ISBN: 978-602-50730-0-7

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

MATARAM - NTB, 14 SEPTEMBER 2017

IMPLEMENTASI NEW URBAN AGENDA MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERBASIS BUDAYA LOKAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS



ISBN: 978-602-50730-0-7

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

MATARAM - NTB, 14 SEPTEMBER 2017

IMPLEMENTASI NEW URBAN AGENDA MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERBASIS BUDAYA LOKAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS



Prosiding Seminar Nasional Planoearth#1 2017
Program Studi Teknik Perencanan Wilayah dan Kota
Universitas Muhammadiyah Mataram-NTB
Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan No 1 Pagesangan – Kota Mataram – 83127
Telp/Fax : (0370) 631904
Online: ***http://planoearth.ummat.ac.id***

Tema: Implementasi New Urban Agenda Melalui Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Budaya Lokal dan Pemberdayaan Komunitas

Isi: 1. Pembicara Utama / *Keynote Speaker*
2. Studi Pariwisata Perkotaan
3. Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Informasi Terhadap Kepariwisataan
4. Pemberdayaan Komunitas Terhadap Kepariwisataan
5. Pengelolaan Lingkungan Terhadap Kepariwisataan

ISBN: 978-602-50730-0-7

Reviewer:
Dr. Eng. Islamy Rusyida.,MT
Dr. Ibrahim Ali

Editor:
Ima Rahmawati, ST.,M.MT
Fariz Primadi Hirsan, ST.,MT
Baiq Harly Widayanti, ST.,MM
Febrita Susanti, ST.,M.Eng
Sri Apriani Puji Lestari, ST.,MT
Yusril Ihza Mahendra, ST.,MT

Desain Sampul:
Ardi Yuniarman ST.,M.Sc
Agus Kurniawan, S.Ip.,M.Eng
Rasyid Ridha ST.,M.Si
Nahrul Hayat Imansyah, ST.,M.Si

Diterbitkan Oleh:

Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

LAPORAN KETUA PANITIA SEMINAR NASIONAL PLANOEARTH#1

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirrabbil al Aamiin

Dengan rahmat Allah SWT pada hari ini Kamis, tanggal 14 September 2017 kita bersama bisa bertemu dan berkumpul pada kegiatan Seminar Nasional Planoearth#1 yang diselenggarakan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Salam dan shalawat juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang berkat perjuangannya bisa membawa kita saat ini ke jalan yang lebih terang.

Pertama-tama kami sampaikan salam hormat dan selamat datang kepada :

1. Menteri PUPR atau yang mewakili
2. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Gubernur NTB atau yang mewakili
4. Ketua ASPI
5. Budayawan NTB
6. Ketua BNSP
7. Ketua IAP NTB
8. Ketua PWM NTB
9. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
10. Ketua BPH
11. Para Dekan
12. Kepala Lembaga dan Unit di Universitas Muhammadiyah Mataram
13. Para stakeholders terkait
14. Para Pemakalah dan
15. Peserta yang kami hormati, dan
16. Mahasiswa/i Program Studi PWK yang kami banggakan

Untuk dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini merupakan kegiatan Seminar Nasional Planoearth#1 pertama kali yang diadakan oleh Program Studi PWK yang nantinya akan menjadi agenda kegiatan Seminar Nasional setiap 2 tahun. Kegiatan Seminar Nasional ini sebagai rangkaian juga dari kegiatan Kongres ASPI IX yang diselenggarakan oleh Program Studi PWK, Fakultas Teknik UMMat sebagai tuan rumah bekerjasama dengan ASPI.

Tujuan dari kegiatan Seminar Nasional ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas dan aktualisasi para pendidik dan Institusi Pendidikan, Instansi dan Stakeholders terkai sesuai tujuan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa perlu upaya

pengembangan kemampuan dan membentuk watak seta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengangkat, mempublikasikan dan mengentaskan pesoalan dan dinamika pembangunan di Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh 57 Program Studi PWK dari seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia yang tergabung sebagai anggota ASPI. Pada hari ini akan dilakukan publikasi atau presentasi dari paper yang telah dikirimkan kepada Panitia sejumlah 144 paper. Paper ini selain dari Program Studi PWK yang tergabung sebagai anggota ASP, baik S1 maupun Pasca Sarjana juga dari program studi atau fakultas yang bukan merupakan anggota ASPI, baik dari Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Kehutanan, Arsitektur dan Instansi Pemerintahan / BAPPEDA yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Diantaranya dari Jember, Malang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Palembang, Manado, Makassar

Tema yang diambil adalah ***Implementasi New Urban Agenda melalui Pengembangan Pariwisata yang berbasis Budaya Lokal dan Pemberdayaan Komunitas*** sebagai upaya mengentaskan persoalan kemisinan dan kesenjangan yang terjadi di wilayah perkotaan, baik dari aspek sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan okal dan partisipasi masyarakat dengan ada 4 topik utama.

Luaran dari kegiatan ini adalah Prosiding ber-ISBN, yang kami harapkan nanti dengan fasilitasi ASPI dapat masuk ke dalam Jurnal Terakreditasi A pada masing-masing PT yang tergabung dalam ASPI serta dapat menjadi rujukan dalam Implementasi New Urban Agenda.

Rangkaian kegiatan hari ini juga akan dilanjutkan dengan kegiatan Penjurian Penghargaan Karya Studio Tata Ruang Terbaik, yan telah diikuti oleh 37 peserta Program Studi PWK dan mendapatkan 6 finalis dalam kategori Pengembangan Wiilayah dan Penataan Kawasan (Urban Design).

Selanjutnya Kongres ASPI IX yang akan diselenggarakan besok, tgl 15 September 2017 di Universitas Muhammadiyah Mataram dan dilanjutkan dengan *Island Trip* Gili Terawangan dan sekitarnya pada tanggal 16 September 2017.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan atensi dan kontribusi moril dan materiil dalam kegiatan ini sehingga bisa terselenggara dengan lancar. Kami sampaikan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Institusi, khususnya Universitas Muhaamadiyah Mataram, ASPI, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kota Mataram, Ikatan Ahli Perencanaan, seluruh pembicara, undangan, pemakalah, peserta , mahasiswa dan Panitia yang telah bekerja keras dan menjaga semangatnya selalu hingga saat ini.

Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak jika selama kegiatan ini berlangsung ada kekurangan dari kami.

Semoga kegiatan positif ini bisa memberikan manfaat dan motivasi positif bagi kami dan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikandan perencanaan di Indonesia dan mengentaskan dinamika persoalan pembangunan di Indonesia.

Wabbilahitaufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum.wr.wb

Mataram, 14 September 2017

Ketua Panitia

Ima Rahmawati Susanti, ST.,M.MT

PIDATO SAMBUTAN REKTOR UMMAT PADA SEMINAR PLANOEARTH 1

AssalamualaikumWarohmatullohiwabarokatuh

Yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat

Yang terhormat Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Mataram

Yang terhormat para pembicara utama Seminar Nasional Planoearth 1:

- **Dr. TGH. M. Zainul Majdi** Gubernur Nusa Tenggara Barat
- **Ir.Agusta Ersada Sinulingga.,MT** (Kementerian PUPR)
- **Ir. WisnubrotoSarosa, CES, M.Dev.Plg** (Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN)
- **Ir.Tubagus Furqon Shofani.,MA,Ph.D** (Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)
- **Lalu Agus Faturrohman** (Budayawan Nusa Tenggara Barat)

Yang Saya banggakan Para Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Mataram. Singkatnya para hadirin tamu undangan dan peserta seminar Nasional Planoearth 1.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subahanahu Wataala, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan kita semua hidayah kesehatan dan kesempatan untuk bias menghadiri kegiatan Seminar Nasional Planoearth 1 hari ini dengan tema ***Implementasi New Urban Agenda Melalui Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Budaya Lokal dan Pemberdayaan Komunitas***,dan insya Allah akan dilanjutkan dengan Kongres ASPI yang ke IX esok hari.

Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam, seorang nabi akhir zaman suri tauladan bagi setiap umat islam yang beriman.

Bapak/ ibu hadirin yang saya hormati.

Ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan kepada hadirin sekalin sekilas mengenai Universitas Muhammadiyah Mataram.

Universitas Muhammadiyah Mataram atau yang disingkat dengan UMMAT berdiri pada tanggal 25 juni tahun 1980 dengan tiga (3) Fakultas, yaitu FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), FISIPOL (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) dan FATEK (Fakultas Teknik). Seiring dengan berjalannya waktu, dan meningkatnya minat masyarakat untuk melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Mataram, kini Universitas Muhammadiyah Mataram berkembang pesat dan telah memiliki tujuh(7)

Fakultas dan dua puluh tiga (23) program studi, baik pada jenjang S1 maupun pada jenjang D3.

Institusi Universitas Muhammadiyah Mataram telah meraih akreditasi B dan dua puluh tiga (23) program studi tersebut hampir seluruhnya telah meraih akreditasi B dari BAN PT. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota sendiri berdiri pada tahun 2007 dan Alhamdulillah telah meraih akreditasi B pada tahun 2015, dan perlu diketahui bahwa Program Studi PWK UMMat adalah satu-satunya Program Studi Perencanaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hadirin yang saya hormati

Berbicara mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak keunikan, baik dari keunikan geografis maupun keunikan budaya. Dari sisi keunikan geografis, provinsi ini memiliki dua (2) pulau besar dan tidak kurang dari 280 pulau-pulau kecil, pemandangan pantai dan pegunungan yang indah, serta 3 gunung api yang pernah menggemparkan dunia yaitu Gunung Api Rinjani, Tambora dan Sangiang.

Selanjutnya, disamping keunikan geografis tadi Provinsi NTB juga memiliki keunikan budaya, dimana Provinsi terbentuk dari persatuan tiga (3) suku masyarakat yaitu Suku Sasak di Pulau Lombok dan Suku Samawa dan Mbojo di pulau Sumbawa. Keberagaman ini merupakan suatu khasanah budaya yang perlu dilestarikan dan merupakan potensi besar dalam upaya pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Bapak/ ibu hadirin yang saya hormati

Sejak terimplementasinya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di tahun 2012, perkembangan industri kepariwisataan di NTB mengalami kemajuan yang sangat pesat. Terbukti bahwa angka kunjungan di tahun 2012 sejumlah 2,25 Juta wisatawan dan di tahun 2016 target kunjungan 3 juta wisatawanpun mampu terpenuhi.. Ditambah lagi dengan keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB khususnya pulau Lombok meraih Penghargaan Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia dan Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia dua kali berturut-turut pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Tentu ini merupakan pencapaian yang luar biasa.

Disisi lain, perkembangan suatu wilayah tentu juga akan memberikan beban baru bagi wilayah tersebut. Tumbuhnya aktifitas-aktifitas baru, yang sudah barang tentu akan dibarengi dengan tumbuhnya kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran aktifitas-aktifitas tersebut. Belum lagi bertambahnya jumlah penduduk baik yang disebaban oleh mortalitas ataupun migrasi sebagai dampak dari terbukanya berbagai macam lapangan pekerjaan yang merupakan output dari *multiplier effect* atau dampak turunan dari sebuah industry kepariwisataan.
Isu-isu semacam ini hanya sebagian kecil dari banyak sekali isu dalam agenda-agenda

baru perkotaan atau yang kita kenal sebagai *New Urban Agenda*. Semoga saja dengan terlaksananya kegiatan seminar nasional Planoearth 1 ini bisa diperoleh berbagai macam ide-ide segar sebagai alternative perencanaan dalam menghadapi isu-isu New Urban Agenda seperti yang diuraikan diatas.

Selamat melaksanakan seminar, semoga Allah Subhanahuwataala Tuhan Yang Maha Memiliki Ilmu meridhoi usaha kita dan memberikan kelancaran sampai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan ini.

Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh…

Mataram, 14 September 2017

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

Drs. H. Mustamin H. Idris,. MS
NIP. 196412102005011003

PIDATO SAMBUTAN GUBERNUR NTB SEKALIGUS PEMBUKAAN SEMINAR PLANOEARTH#1

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat

Yang terhormat Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Muhammadiyah Mataram

Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atau yang mewakili

Yang terhormat para pembicara utama Seminar Nasional Planoearth 1:

1. **Ir.Agusta Ersada Sinulingga.,MT** (Kementerian PUPR)
2. **Ir. WisnubrotoSarosa, CES, M.Dev.Plg** (Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN)
3. **Ir.Tubagus Furqon Shofani.,MA,Ph.D** (Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)
4. **Lalu Agus Faturrohman** (Budayawan Nusa Tenggara Barat)

Singkatnya para hadirin tamu undangan dan peserta Seminar Nasional Planoearth 1 yang berbahagia.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subahanahu Wataala, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan kita semua hidayah kesehatan dan kesempatan untuk bias menghadiri kegiatan Seminar Nasional Planoearth 1 hari ini dengan tema ***Implementasi New Urban Agenda Melalui Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Budaya Lokal dan Pemberdayaan Komunitas***,dan insya Allah akan dilanjutkan dengan Kongres ASPI yang ke IX esok hari.

Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam, seorang nabi akhir zaman suri tauladan bagi setiap umat islam yang beriman.

Bapak/ ibu hadirin yang saya hormati,

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang ikut menopang perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pariwisata turut menyumbang dalam pemasukan devisa, membantu menciptakan lapangan kerja baru hingga ikut berperan pada pemerataan pembangunan. Berbicara mengenai pembangunan, alangkah baiknya apabila kita memahami makna dari pembangunan itu sendiri. Sejak dimulainya penerapan bebas visa pada Juni 2015 lalu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 6.977.209 orang. Jumlah tersebut masih belum mencapai target kunjungan 12 juta wisatawan. Pemerintah juga telah mengeluarkan dana bagi pengembangan infrastruktur dan promosi pariwisata hingga 5,6

triliyun. Promosi di bidang pariwisata tersebut paling gencar dilakukan terhadap negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan negara di Asia Timur.

Infrastruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan pariwisata suatu negara. Kita tentu tidak bisa memungkiri jika ingin menuju destinasi-destinasi wisata membutuhkan akses baik melalui jalan, pelabuhan dan bandara. Akses suatu tempat wisata dalam hal ini perlu didukung infrastruktur yang memadai. Infrastruktur Indonesia di tahun 2012 misalnya, masih berada di posisi ke-90 dari 139 negara. Tentu infrastruktur perlu diperbaiki dan dibangun agar daya saing pariwisata Indonesia pun meningkat.

Seminar Nasional dan Kongres Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) IX ini diharapkan menjadi Forum Nasional penataan ruang yang inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi dan merumuskan strategi yang efektif untuk memastikan penataan ruang yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Dengan Tema besar yang akan diangkat adalah : "***Implementasi New Urban Agenda Melalui Pengembangan Pariwisata Yang Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas***". Tema ini sesuai dengan isu yang sedang terjadi di Provinsi NTB, dimana Provinsi NTB telah mendapat World Best Halal Destination Award 2015 dan World Halal Honeymoon Award 2015. Anugerah ini merupakan tantangan bagi Provinsi NTB untuk tetap menjaga potensi pariwisata yang dimilikinya dalam mewujudkan pariwisata halal, dalam pengembangan pariwisata maka dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor baik dari komunitasnya maupun sarana dan prasarananya.

Berdasarkan data terakhir dari BPS tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mencapai 16,02% pada tahun 2016, dengan kondisi ini menjadi beban bagi stakeholder di Provinsi NTB dalam menurunkan tingkat kemiskinan, dari segi aksesibilitas Provinsi NTB masih terus berbenah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pariwisatanya. Kunjungan pariwisata belum terlalu memberikan kontribusi yang berarti pada pertumbuhan ekonomi NTB, tingkat kunjungan wisatawan secara langsung juga dapat terlihat dari perkembangan sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (PAMM).

Dalam mengembangkan pariwisata baik di Propinsi NTB maupun di Indonesia secara umum tentunya terdapat beberapa permasalahan, oleh sebab itu perlu diadakan diskusi bersama dalam mencari solusi yang efektif yang diharapkan mampu meminimalisir masalah dalam pengembangan kawasan pariwisata di Provinsi NTB khususnya dan indonesia pada umumnya. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram berencana mengadakan forum diskusi yang dikemas dalam bentuk seminar nasional untuk mendiskusikan implementasi dari *new urban agenda* terhadap pengembangan pariwisata di wilayah Propinsi NTB.

Hadirin yang saya hormati

Kami selaku Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut baik kegiatan seminar Nasional Planoearth ini. Semoga dari kegiatan ini kita bisa menemukan solusi inovatif

memajukan NTB dan mempersiapkan NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam menghadapi isu baru perkotaan atau *new urban agenda.* Disamping itu semoga dari kegiatan ini kita dapat memperoleh ide-ide baru yang segar terkait perencanaan inovatif untuk mengembangkan pariwisata di NTB sekaligus menguatkan citra NTB sebagai destinasi wisata halal dunia, menyatukan ide diantara para stakeholder; masyarakat, akademisi dan prakitisi serta profesional dalam menyusun perencanaan pembangunan di NTB di masa yang akan datang.

Bapak/ ibu hadirin yang saya hormati

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim saya nyatakan Seminar Nasional Planoearth#1 dibuka secara resmi.

Selamat melaksanakan seminar, semoga Allah Subhanahuwataala Tuhan Yang Maha Memiliki Ilmu meridhoi usaha kita dan memberikan kelancaran sampai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan ini.

Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas segala kekurangan.

Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Mataram, 14 September 2017

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Dr. H. Zainul Majdi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkembangan umat manusia dari masa ke masa telah memberikan warna baru bagi perubahan global. Pertambahan penduduk, pertumbuhan tingkat kebutuhan akan permukiman serta fasilitas-fasilitas pendukungnya merupakan tantangan yang senantiasa dihadapi oleh para perencana pembangunan khususnya para akademisi, profesional serta para birokrat yang menjadi eksekutor pemenuhan kebutuhan tersebut. Tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga merupakan masalah-masalah yang harus segera ditangani sebagai agenda perkotaan di masa yang akan datang atau yang dikenal dengan istilah "*New Urban Agenda*"

Disamping masalah di atas adapun tantangan yang sedang dihadapi saat ini adalah pengembangan pariwisata di tanah NTB. Sejauh ini NTB telah dua kali berturut-turut memperoleh Penghargaan Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia dan Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia pada tahun 2015 dan 2016. Tantanganya adalah bagaimanakah ide-ide terbarukan sebagai solusi dalam mempertahankan prestasi terebut di masa yang akan datang serta meningkatkan kualitas pariwisata NTB tanpa mereduksi kualitas lingkungan dan budayanya.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diuraikan di atas Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram (PWK UMMat) berinisiatif menyelenggarakan seminar dengan tema **IMPLEMENTASI *NEW URBAN AGENDA* MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA YANG BERBASIS BUDAYA LOKAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS**. Prodi PWK UMMat berharap dari kegiatan ini dapat ditemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang semuanya terangkum dalam "***Prosiding Seminar Nasional Planoearth#1"***

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan arahan dan pandangan terkait dengan pentingnya kegiatan seminar. Penghargaan dan terima kasih juga kepada para pembicara utama/ *keynote speaker*, yaitu:

1. ***Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT*** (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
2. ***Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg*** (Kementerian Agraria dan Penataan Ruang/BPN – Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan)
3. ***H. Lalu. Moh. Faozal., S.Sos., M.Si*** (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB)
4. ***Lalu Agus Faturrahman*** (Budayawan NTB)

Selanjutnya kepada para presenter dan editor Prosiding Seminar Nasional Planoearth#1 ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas sumbangsihnya sehingga prosiding ini dapat disusun dengan baik. Akhir kata, semoga prosiding ini bermanfaat adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 14 September 2017

Ketua Panitia

Ima Rahmawati Susanti, ST.,M.MT

DAFTAR ISI

Laporan Ketua Panitia Seminar Nasional Planoearth 1 i

Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram iv

Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat vii

Kata Pengantar x

Daftar Isi xi

PEMBICARA UTAMA / *KEYNOTE SPEAKER*

Implementasi Agenda Baru Perkotaan Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal & Pemberdayaan Komunitas
(Ir.Agusta Ersada Sinulingga.,MT/ Kementerian PUPR) 1

Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Mendukung Implementasi New Urban Agenda
(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES,M.Dev.Plg/Kementerian ATR/ BPN) *7*

Peluang dan Tantangan Dalam Pengembangan Pariwisata Halal (*Halal Tourism*) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017/ 2018
(H.Lalu Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si) *15*

New Urban Agenda: Peran dan Implikasi pada Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota
(Ir.Tubagus Furqon Shofani.,MA,Ph.D) *17*

Peran Budaya dan Komunitas Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di NTB
(Lalu Agus Faturrahman) *18*

STUDI PARIWISATA PERKOTAAN

Prospek Pembangunan Rusunawa Dalam Mendukung Kota Berkelanjutan Di Indonesia : Studi Persepsi Penghuni (*Adi Nugroho*) 28

Strategi Pengembangan Industri Kerajinan Mutiara Sebagai Daya Tarik Wisata Belanja Di Kota Mataram (*Dita pebrianti dan Luthfi Muta'ali*)..... 37

Pentingnya Proses Formulasi Peraturan Zonasi Dalam Manajemen Perkotaan (*Hettik, R. Widodo D. Pramono dan Widyasari H. N.*) 48

Strategi Permukiman Kembali Warga Di Lokasi Squatter Dalam Rangka Pengembangan Budaya Masyarakat Kampung Pulo
(*Marilyn Larahati, Deva Fosterharoldas Swasto dan Leksono Subanu*) 56

Model Sinergis Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Berkelanjutan Di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara (*Rieneke L.E Sela, Linda Tondobala, Raymond Tarore*) 66

Penataan Prasarana Dan Sarana Kawasan Tradisional Etnis Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Nasional Provinsi Sulawesi Barat (*Mimi Arifin, Jayanti Mandasari, a. Teddy M*) 72

Pengembangan Hunian Pendukung Potensi Wisata Kawasan Pesisir Di Tanjung Bayang Kota Makassar (*Yuniza Pridanti, Shirly Wunas dan Mimi Arifin, Fathien Azmy*) 79

Pariwisata Kawasan Kars Yang Lestari di Pawonsari (*Soedwiwahjono)* 88

Potensi Pariwisata Budaya Berbasis Rumah Tinggal Di Kota Palembang *(Tetty Harahap)*..... *98*

Pertimbangan Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Mandeh Sumatera Barat (*Hamdi Nur dan Ahyuni*)..... 106

Taman Kota Ramah Lansia Untuk Mendukung Daya Tarik Pariwisata Kota Bogor (Studi Kasus : Taman Heulang) (*Indarti Komala Dewi dan Eneng Dayu Saidah*) 113

Alih Fungsi Tata Permukiman Dan Tata Sosial Masyarakat Sekitar Kampus II Universitas Ahmad Dahlan (Studi Kasus Kampung Sidikan, Umbulharjo Kota Yogyakarta) (*Jubbai Marasabessy*) 122

Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Cagar Budaya dan Pariwisata (*Maskur*) 132

Strategi *Retrofitting* Pada Kawasan Pinggir Kota Yogyakarta Berdasarkan Konsep Kota Kompak Studi Kasus Condong Catur, Sleman, Yogyakarta (*Wahyu Ardhiningtika, M. Sani Roychansyah dan Dwita Hadi Rahmi*) 142

Kajian Bangunan Bersejarah Mesjid Al-Mashun Kota Medan Dinilai Dari Historis dan Estetika (*Wahyu Hidayat dan Tunggul H. Ganie*)..... 153

Analisis Komoditas Perikanan Unggulan Sebagai Pendukung Halal Tourism di Kabupaten Lombok Utara (*Yunita Ratih W, dkk*) 162

Penataan Permukiman Suku Bajo Di Pulau Bungin (*Verry Lahamendu*)..... 171

'*Good Food Revolution'* Peningkatan Potensi '*Home Industry'* Sebagai Aset Pengembangan Kawasan Wisata Gastronomi Studi Kasus: Kawasan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Kec Blimbing, Kota Malang (*Syahyudes Rina*) 178

Adat Istiadat Tunggu Tubang Sebagai Strategi dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim *(Andryan Wikrawawrdana*)..... 193

Preferensi Dan Motivasi Perjalanan Wisatawan Mancanegara Di Kota Makassar*(Asni Amaliah Nuchri,Bakti Setiawan, dan Ardhya Nareswari)* 204

Pengembangan Daya Saing Destinasi Wisata Kota Batu Berdasarkan Pendekatan Model *Dwyer* (*Myrna Sukmaratri*)..... 222

Pengembangan Perumahan Masyarakat Pulau Kecil Sebagai Penunjang Wisata Kota (*Shirly Wunas, dkk*)..... 233

Evaluasi Kualitas Visual Koridor Jalur Wisata Kota Batu (*Sitti Wardiningsih,dkk*) 243

Tingkat Kesiapan Kampung Duren Sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Baru Di Kota Malang (*Dian Indah Shofarini*) 254

Potensi Pengelolaan Kawasan Panatapan Danau Toba Oleh Pemerintah Nagori Di Simalungun Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (*M. Ade Kurnia Harahap, dkk*)..... 264

Revitalisasi Permukiman Kumuh Berbasis Wisata Pada Bantaran Sungai Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar (*Mimi Arifin, Shirly Wunas dan Pratiwi Mushar*)..... 275

Pengembangan Potensi Wisata Pendidikan Di Kampung Duren Mandiri Rw 04 Kelurahan Bakalan Krajan Kota Malang (*Septiana Hariyani*) 284

Pengembangan Penataan Ruang Kolaboratif Di Kawasan Wisata Puncak, Bogor (Andrea Emma Pravitasaria,B dkk) 294

Tekanan terhadap ruang peruntukan penunjang pariwisata Pada koridor kota malang-kota batu (*Arief Setijawan dan Surjono*)..... 306

Minapolitan Hallal Tourism Kabupaten Lombok Tengah (*Ike Karwinto P*) 314

Pengembangan Wisata Susur Pantai Berbasis *Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)* (*S. Trisutomo, Mukti Ali, Sri Aliah Ekawati*) 327

Kebutuhan Penanganan Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara (*Veronica A. Kumurur*)..... 335

Analisis Pengaruh Peluang Usaha dan Peningkatan Pendapatan Terhadap Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Simalungun (*DR. Sarintan Efratani Damanik*)..... 345

Pengembangan Wilayah Kabupaten Bantaeng Melalui Sektor Industri Pariwisata (*Ihsan dkk*)..... 350

Model Neighborhood Pada Ruang Publik Perkotaan Ditinjau Dari Perilaku Dan Aktivitas Di Melting Pot Kota Jember (*Dewi Junita Koesoemawati dan Hari Yuswadi*)..... 363

Strategi Prioritas Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Baluran Jawa Timur (*Luh Putu Suciati dan Anggriawan Dwi Cahya Putra)* 370

Keterkaitan Pariwisata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Mataram (*Baiq Siti Noer Azima dan Ima Rahmawati Sushanti*) 380

Strategi Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat (*Umar Mansyur dan Intim Vinda Gesvita*) 387

Ekspektasi Wisatawan Terhadap Produk Wisata Trans Studio Theme Park Makassar (*Amalia Paramitha, T.Yoyok Wahyu Subroto dan Bambang Sunaryo)* 402

Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya Kota Batu Provinsi Jawa Timur (*Hasan*)..... 413

Prioritas Elemen Ruang Publik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Place Making (Studi Kasus: Ruang Publik Kota Makassar) *(Ghaziyah Ghandy Panessai, Ananto Yudono dan Arifuddin Akil)*..... 423

Pengembangan Agrowisata Horti Park di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah *(Gunawan Prayitno, dkk)* 432

Karakteristik Potensi dan Daya Tarik Wisata Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Sengingi (*Mira Hafizhah T , Puji Astuti dan Mardianto Manan*) 438

Studi Obyek Wisata Perkotaan dan Arahan Pengembangan Pariwisata di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Santun R. P. Sitorus dan Rifat Y. Y. Maromon*) 452

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPARIWISATAAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Pemasaran Kawasan Wisata Sanur Bali (*Ni Wayan Rena Mariani*) 459

Transformasi Spasial Kota Lasem : 1925 – 2015
(*Nilta Rahmah, Agam Marsoyo dan Budi Kamulyan*) 470

Pengembangan Transit Oriented Development Berbasis Sistem Transportasi Berkelanjutan Penunjang Pariwisata
(Ananto Yudono, Arifuddin Akil dan Ade Mulawarman) 479

Tingkat Pelayanan Perahu Ketek Sebagai Angkutan Wisata
Di Sungai Musi Kota Palembang
(Anta Sastika, Aleksander Purba dan Citra Persada) 489

Aplikasi Smart Province "Jogja Istimewa" Dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata *(Rini Rachmawati, Elvandio Ramadhan dan Amandita 'Ainur Rohmah)* 400

Analisis Persepsi Dan Preferensi Wisatawan Dalam Upaya Penataan Fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin (*Anak Agung Sagung Alit - Widyastuty dan Samuel Gabrie*) 510

Penentuan Rute Potensial Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Analisis Sistem Informasi Geografis di Kawasan Perkotaan Mamminasata (*Ahmad Aulia Bahrun Amieq, Ananto Yudono, Arifuddin Akil, M. Fathien Azmy*) 519

Identifikasi Pengaruh Infrastruktur Transportasi Terhadap Gejala Peri Urbanisasi Studi Kasus Pulau Jawa *(Hadiyan Wijaya, Delik Hudalah)* 526

Pengembangan Jalur Wisata Kabupaten Bantaeng *(Ihsan, dkk)* 533

Kebutuhan Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Pariwisata Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
(Muhammad Baiquni, dkk) 545

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS TERHADAP KEPARIWISATAAN

Quality of Life (QOL) Masyarakat Lokal pada Destinasi Wisata Desa Gili Indah *(Dian dinanti, Hadi Abdurrahman dan Nindya Sari)* 559

Kewirausahaan Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata (Kasus Studi Kampung Di Kota Semarang)
(Holi Bina Wijaya, Muhammad Indra Hadi Wijaya dan Putri Prasetyan) 572

Faktor Pengaruh Keberlanjutan Pariwisata Budaya Pada Kampung Lawas Maspati, Surabaya
(Ni Ketut Ratih Larasati dan Dian Rahmawati) 583

Ketangguhan Komunitas dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan:
Pelajaran dari Peristiwa Bom Bali
(Wayan Nanda Khrisna Pratama dan Putu Gde Ariastita) 590

Kajian Komponen Konsep Community Based Tourism
(Nindya Sari, Dzacki Rendy S dan Kartika Eka Sari) 598

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Okura,
Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru
(Apriyan Dinat dan Asy-Syaukani) 607

Revitalisasi Desa Tua Sillanan-Tana Toraja Menjadi
Kawasan Wisata Berkelanjutan Berbasis Budaya Lokal
(Arifuddin Akil dan Ananto Yudono) 616

Penyusunan Rencana Penataan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat
di Nglinggo, Kabupaten Kulonprogo
(Dyah Widiyastuti,T. Yoyok Wahyu Subroto, dan Henry Brahmantya) 629

Implementasi Desa Adat dan Peran Komunitas Masyarat
Dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata
di Nusa Penida dan Sekitarnya *(Indrayani)* 634

Pendekatan Kebijakan Fiskal dalam Konteks Pengembangan
Pulau-Pulau Kecil *(Samsul Ma'rif)* 644

Dampak Pariwisata Terhadap Penghidupan Berkelanjutan
Masyarakat Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep
(Heru Purboyo HP. dan Khairatul Ummah) 654

Karakter Tata Kehidupan Masyarakat Desa Ketep
Sebagai Desa Wisata Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang
(Eppy Yuliani, Al Aswad dan Metafia Ardiyani) 667

Peran Program Desa Produktif Nasional Dalam Peningkatan Industri
Rumah Tangga di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
(Ratih Novi Listyawati) 675

Pengembangan Agroekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat
Di Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam
(Harne Julianti Tou , Melinda Noer dan Helmi Sari Lenggogeni) 685

Pengukuran Kampung Seni Nitiprayan Yogyakarta
Sebagai *Art Based Creative District* (*ABCD*)
(Ratri Winahyu, M. Sani Roychansyah dan Dyah Titisari Widyastuti) 692

Pengembangan Desa Wisata Karangtengah Berbasis Kearifan Lokal
(Dwinda Tanaya Cipta, Ratna Eka Suminar) 703

Pemanfaatan Daya Tarik Pusaka Budaya Sebagai Potensi
Pariwisata Pusaka Desa Belandingan
(Ni G.A.Diah Ambarwati Kardinal, I Gusti Putu Anindya Putra,
I Nyoman Harry Juliarthana) 713

"Dieng Culture Festival" Memperkuat *Brand Image* Destinasi
Lewat Ajang Festival,
(Destha Titi Raharjana, dkk) 727

Reformulasi Konsep Ekoturisme Berbasis Partisipasi Masyarakat
(Wara Indira Rukmi)..... 738

Hambatan Struktural Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tenaga Pendidik Smk Pariwisata Di Pulau Lombok
(Janianton Damanik,dkk) 749

Pengembangan Pariwisata Aik Nyet Berbasis Masyarakat Sebagai Model
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buwun Sejati
(*Sri Apriani Puji Lestari dan Agus Kurniawan)*..... 762

Peran Kelompok Masyarakat *Sembalun Community Development Centre*
Dalam Mengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
Gunung Rinjani (*Maria Christina Endarwati dan Royal Sembahulun*,) 770

Kajian Ruang Hidup Berdasarkan Home-Range
Masyarakat Pesisir Desa Medana Kecamatan Tanjung
Kabupaten Lombok Utara (*Fariz Primadi Hirsan dan Gaffar Azwaz)*..... 781

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata,
Desa sukarara, kec. Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,
Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Sri Rahmi Yunianti dan Laylan Jauhari*)..... 797

PENGELOLAAN LINGKUNGAN TERHADAP KEPARIWISATAAN

Konfigurasi Kota Yang Efektif Untuk Memitigasi *Urban Heat Island (UHI)*
Melalui Koridor Ventilasi Di Kota Bandung, Indonesia
(Eliana, dan Teti Armiati Argo) 815

Pengembangan Ekowisata Berbasis Kesesuaian dan Daya Dukung
Kawasan Pantai (Studi Kasus Pulau Marsegu Kabupaten Seram Bagian Barat)
(Henderina Lelloltery, dkk) 826

Evaluasi Jasa Lingkungan Kawasan Wisata Konservasi
Dengan Pendekatan *Travel Cost Method (Kartika Eka Sari dan Nindya Sari)*..... 838

Analisis Daya Dukung Lingkungan Pengembangan Pariwisata Kawasan
Hutan Lindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur *(Lalu Razieb Ariaharf)* 847

Strategi Pengembangan Kawasan Agrowisata Kabupaten Lombok Utara
(M. Rosulinanda,dkk) 856

Pengelolaan Sampah Organik "*Eco Garbage Enzyme*" Sebagai Pestisida
Ramah Lingkungan Pada Tanaman Hidroponik Sayuran Hijau
(Ni Wayan Yuliandewi) 868

Pariwisata dan Perubahan Iklim di Indonesia: Persepsi Wisatawan
di Kawasan Kuta, Bali (*Nurrohman Wijaya, dkk*) 874

Daya Dukung Lingkungan Wisata Subak Jatiluwuh Kabupaten Tabanan
Provinsi Bali *(Rendiana Satya Pangestika dan Nadhia MaharanySiara)* 882

Strategi Pengembangan *Ecotourism* Lereng Merapi Berbasis Konsolidasi
Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta *(Sutaryono dan Aristiono Nugroho)* 894

Identifikasi Bentuk/ Morfologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagai
Fungsi Ekologis Penyerap Air Hujan di Kelurahan Kalirungkut, Surabaya
(Tisa Angelia) 900

Analisis Karakteristik Dinamika Tanah Berdasarkan Data Mikrotremor
di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
(Uzlifatul Azmiyati, Kirbani Sri Brotopuspito dan Suprapto Dibyosaputro) 912

Pengaruh Karakteristik Wisatawan Terhadap Penilaian Kualitas Restoratif
Kawasan Wisata Sanur, Bali *(Wulan Dwi Purnamasari, I Gde Bintang Sena
dan Dian Kusuma Wardhani)* 921

Faktor Pemilihan Lokasi Bermukim Pada Kawasan Rawan Bencana Longsor
Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
(Baiq Harly Widayanti, Ardi Yuniarman dan Febrita Susanti) 930

Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Pesisir Kabupaten Tuban
Dalam Mewujudkan Permukiman Yang Berkelanjutan
(*Dr. Ir. Eko Budi Santoso,dkk*)..... 944

Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Wisata Gunung Salak Endah (GSE)
Kabupaten Bogor *(Janthy Trilusianthy Hidayat dan,Anton Apriansah)* 959

Perencanaan Lanskap Vulkanik yang Berkelanjutan dalam Mendukung
Pariwisata Lokal. Studi Kasus: Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat
(Nur Hepsanti Hasanah) 967

Desa Wisata Tangguh Bencana Studi Kasus : Desa Kebonagung, Bantul,
D.I. Yogyakarta *(Ratna Eka Suminar dan Nadiya Pranindita)* 974

Penentuan Prioritas Pengembangan Pariwisata Berbasis Daya Dukung
di Kawasan Puncak; Studi Kasus Lokasi Pariwisata di Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
(*Setyardi Pratika Mulya, Ernan Rustiadi dan Andrea Emma Pravitasari)*..... 986

Konservasi Lingkungan Hidup dan Ekowisata : Tantangan Status Cagar Alam Dalam Pelaksanaan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang *(Teti A Argo dan Muhajah Babny)*..... 996

Inovasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Berbasis Ekowisata *(Wisnu Sasongko, dkk)* 1005

Pendekatan Kolaboratif Dalam Pengelolaan Kebun Raya Untuk Pembangunan Wilayah Yang Berkelanjutan *(Anita Delina, Bakti Setiawan dan Deva Fosterharoldas Swasto)* 1017

Penentu Tingkat Keberhasilan Implementasi Pembangunan Taman Kota Dalam Upaya Mewujudkan Kota Berkelanjutan *(Meta Andan Sari, Retno Widodo dan Dwi Pramono)* 1025

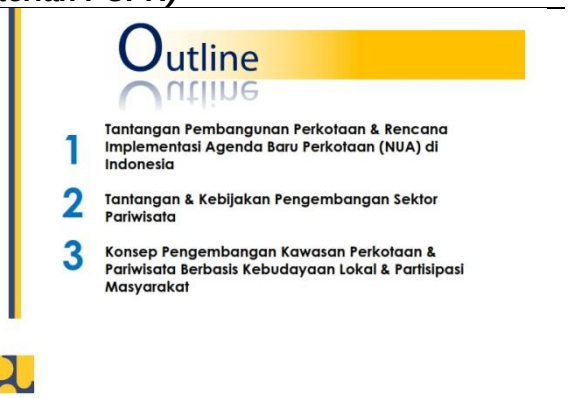
Kinerja Pengembangan Obyek Wisata Desa Budaya Pampang Berdasarkan Persepsi Pengunjung (*Ardiyanto Maksimilianus Gai, Sina Lestari dan Agustina Nurul Hidayati)*..... 1037

KEYNOTE SPEAKER

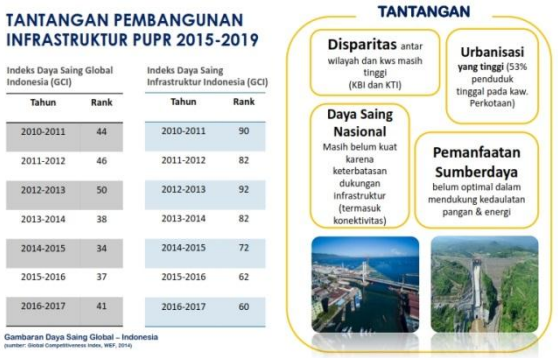
Implementasi New Urban Agenda melalui Pengembangan Pariwisata yang berbasis Budaya Lokal dan Pemberdayaan Komunitas

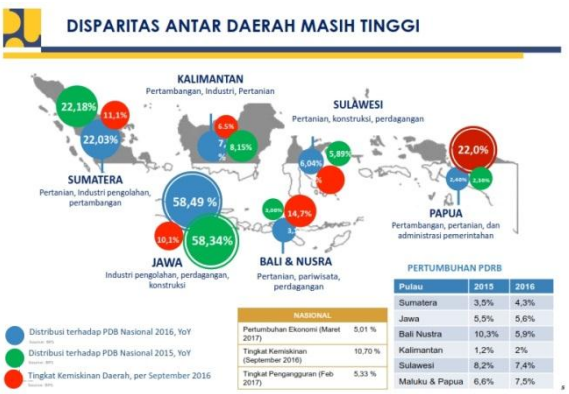
KEYNOTE SPEAKER* 1** : Implementasi Agenda Baru Perkotaan Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal & Pemberdayaan Komunitas ***(Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT/ Kementerian PUPR)

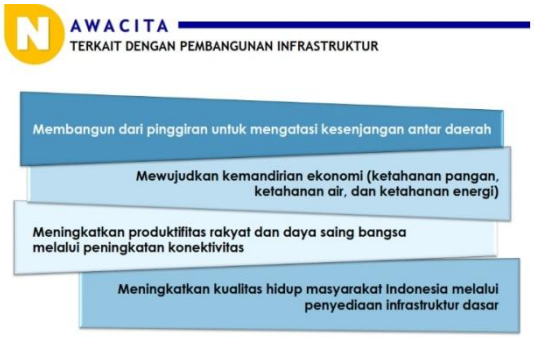


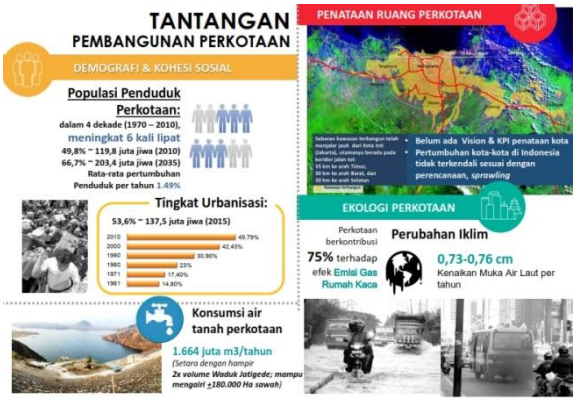






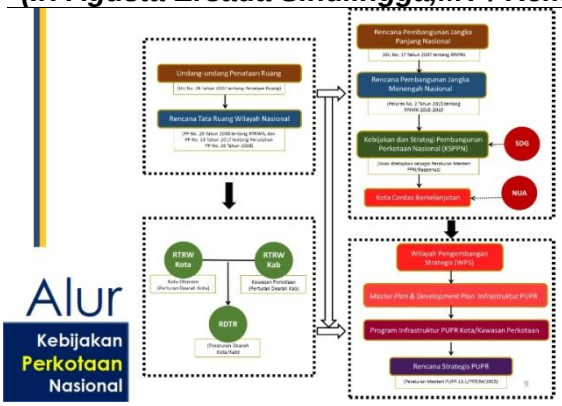








KEYNOTE SPEAKER* 1** : Implementasi Agenda Baru Perkotaan Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal & Pemberdayaan Komunitas ***(Ir. Agusta Ersada Sinulingga,MT / Kementerian PUPR)





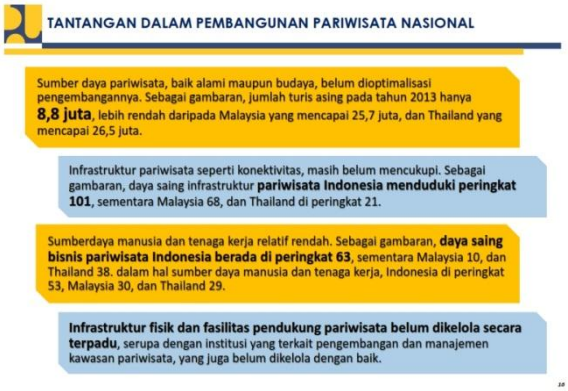










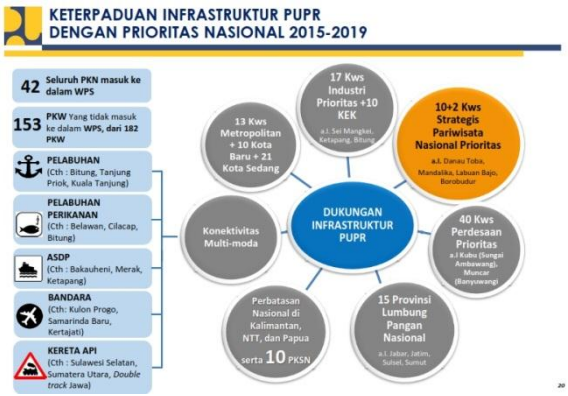


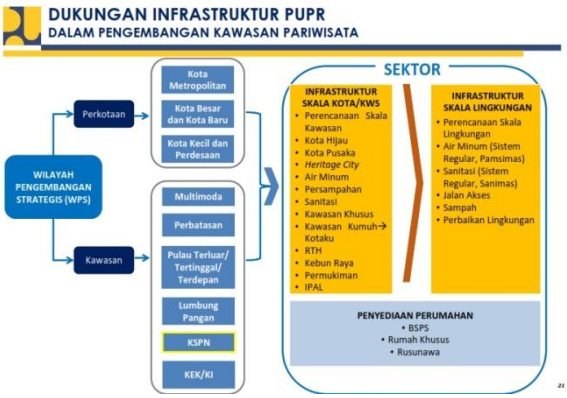
***KEYNOTE SPEAKER* 1** : Implementasi Agenda Baru Perkotaan Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal & Pemberdayaan Komunitas
(Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT / Kementerian PUPR)









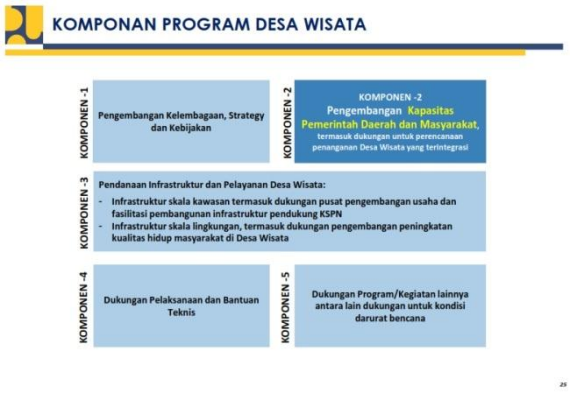








***KEYNOTE SPEAKER* 1** : Implementasi Agenda Baru Perkotaan Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal & Pemberdayaan Komunitas
(Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT / Kementerian PUPR)

















KEYNOTE SPEAKER* 1** : Implementasi Agenda Baru Perkotaan Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal & Pemberdayaan Komunitas ***(Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT / Kementerian PUPR)













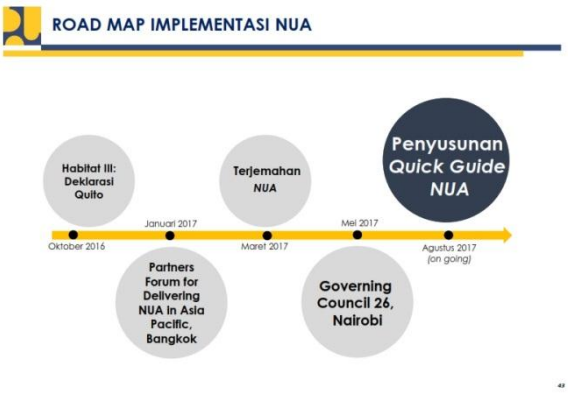


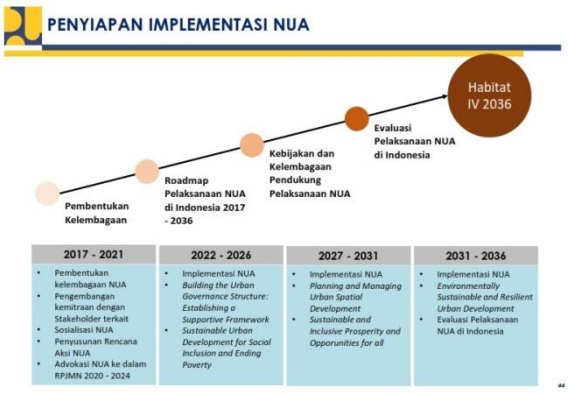


KEYNOTE SPEAKER* 1** : Implementasi Agenda Baru Perkotaan Melalui Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal & Pemberdayaan Komunitas ***(Ir. Agusta Ersada Sinulingga, MT / Kementerian PUPR)













KEYNOTE SPEAKER 2 : Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam mendukung Implementasi New Urban Agenda - Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas***(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg /Kementerian ATR/BPN -Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah)***

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

PERAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI *NEW URBAN AGENDA*

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA LOKAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS



oleh:
Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg
Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Disampaikan pada:
SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES ASPI IX
Mataram, 14-16 September 2017

Outline

- *New Urban Agenda* dan Isu Kawasan Perkotaan
- Aspek Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfatan Ruang
- Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Harmonisasi Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang
- Penutup



Habitat III dan *New Urban Agenda*

Habitat adalah konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa *(United Nations)* yang secara khusus membahas mengenai permukiman dan perkotaan.

Konferensi ini telah **diadakan 20 tahun sekali** yaitu pada tahun 1976 di Vancouver, Kanada, kemudian di Tahun 1996 diadakan di Isntanbul, Turki. Dan untuk yang ketiga atau **Habitat III** diadakan di Quito, Ekuador tahun 2016 yang lalu.

Konferensi Habitat III menghasilkan komitmen bersama mengenai perkotaan untuk 20 tahun mendatang dalam sebuah dokumen bernama ***New Urban Agenda*** yang akan diajdikan acuan bagi negara-negara di dunia dalam pembangunan perkotaan dan permukiman untuk 20 tahun mendatang hingga 2036.

New Urban Agenda secara garis besar merupakan penjabaran detail dari **Tujuan ke 11** dalam *Sustainable Development Goals*, yaitu ***"Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable"***. Butir-butir dalam *New Urban Agenda* merupakan cita-cita pembangunan perkotaan masa depan yang diharapkan sesuai untuk diadopsi oleh semua pihak sesuai kebutuhan masing-masing.

Tujuan SDG dan keterkaitan Tujuan ke-11



Target-target Tujuan ke-11



Make cities and human settlements inclusives, safe, resilient, and sustainable

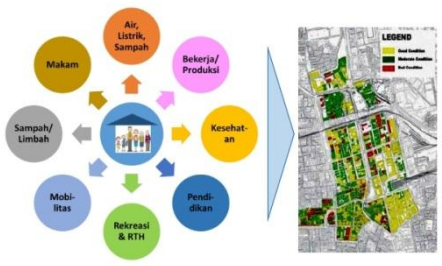
1. Layanan Dasar dan Perumahan yang Memadai, Aman, & Terjangkau
2. Akses kepada Sistem Transportasi yang Berkelanjutan, Aman, Terjangkau, Peningkatan Keselamatan Jalan, Perluasan Transportasi Publik dengan perhatian kepada Wanita, Anak-anak, Disable, Orang Tua
3. Peningkatan Urbanisasi Inkusif & Berkelanjutan dan Kapasitas Pengelolaan dan Perencanaan Permukiman yang Berkelanjutan, Terpadu, & Partisipatif
4. **Peningkatan Upaya Melindungi dan Menjaga Warisan Alam dan Budaya Dunia**
5. Pengurangan Jumlah Kematian dan Orang yang Kehilangan Ekonomi Akibat Bencana, Termasuk Bencana Terkait Air
6. Pengurangan Dampak Lingkungan per Kapita, termasuk Kualitas Udara dan Pengelolaan Sampah
7. Penyediaan RTH yang Aman, Inklusif, dan Aksesibel

Kebijakan *New Urban Agenda*

	6 Areas	22 Issues	10 Policy Units
Kota layak huni: Keadilan dan kohesi sosial		1. Inclusive cities (incl. Pro Poor, Gender, Youth, Ageing) 2. Migration & refugees in urban areas 3. Safer Cities **4. Urban Culture & Heritage**	1. Right to the City & Cities for All 2. Socio-Cultural Urban Framework
Tata kelola perkotaan		5. Urban Rules & Legislation 6. Urban Governance 7. Municipal Finance	3. National Urban Policies 4. Urban Governance, Capacity and Institutional Development 5. Municipal Finance and Local Fiscal System
Penataan ruang perkotaan		8. Urban & Spatial Planning & Design 9. Urban Land 10. Urban-rural linkages 11. Public Space	6. Urban Spatial Strategies: Land Market & Segregation
Ekonomi perkotaan		12. Local Economic Development 13. Jobs and Livelihoods 14. Informal Sector	7. Urban Economic Development Strategies
Ekologi dan lingkungan perkotaan		15. Urban Resilience 16. Urban Ecosystems & Resource Management 17. Cities and Climate Change & Disaster Risk Management	8. Urban Ecology Resilience
Perumahan dan layanan dasar		18. Urban Infrastructure & Basic Services, including energy 19. Transport and Mobility 20. Housing 21. Smart Cities 22. Informal Settlements	9. Urban Services & Technology 10. Housing Policies

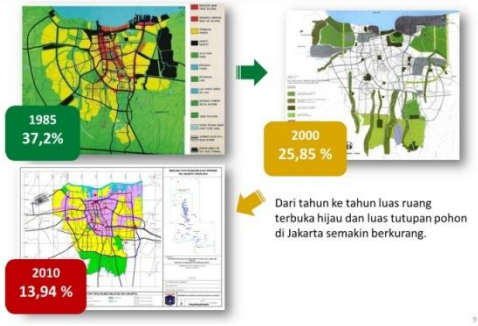
Keseimbangan pengunaan lahan kawasan permukiman

Dalam kawasan perkotaan perlu ada keseimbangan antara berbagai fungsi hunian dan non-hunian, serta kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa

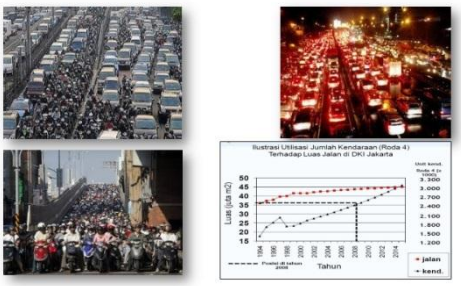


KEYNOTE SPEAKER 2 : Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam mendukung Implementasi New Urban Agenda - Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas***(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg /Kementerian ATR/BPN -Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah)***

Ruang terbuka hijau (RTH) yang menyusut



Kemacetan yang parah

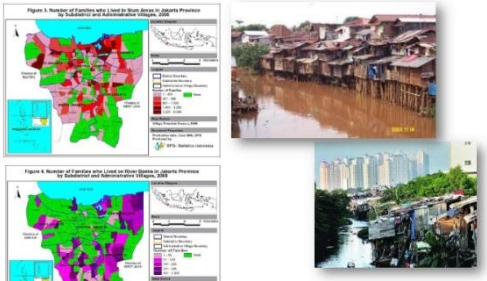


Banjir



Banjir semakin sering terjadi, semakin meluas dan semakin lama menggenang

Lingkungan permukiman yang kumuh



Permasalahan di bantaran sungai



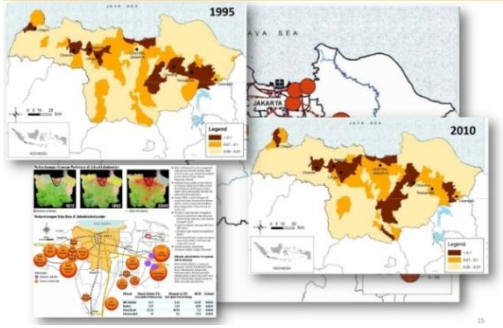
- Permukiman di bantaran sungai pada umumnya berada di lahan *illegal*
- Kondisi permukiman padat dan kumuh
- Degradasi lingkungan akibat pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke badan sungai
- Orientasi *"river back"* (memunggungi sungai)
- Penyempitan badan sungai

Alih fungsi lahan

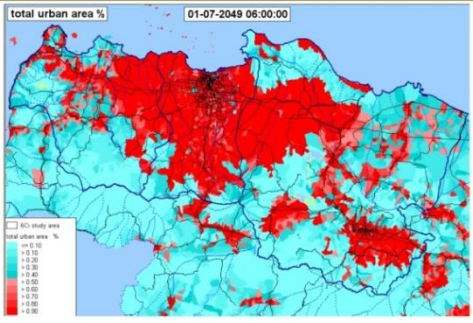
- Alih fungsi lahan **pertanian menjadi non-pertanian** yang berlebihan dan tidak terkendali



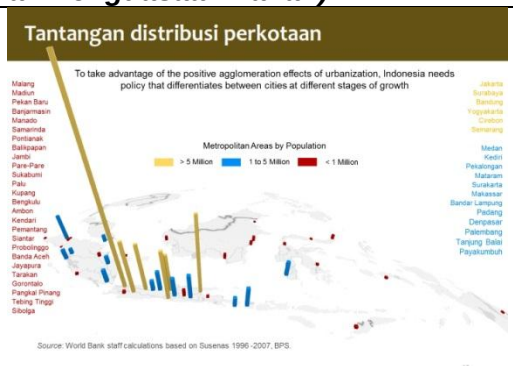
Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak terkendali



Urban sprawl



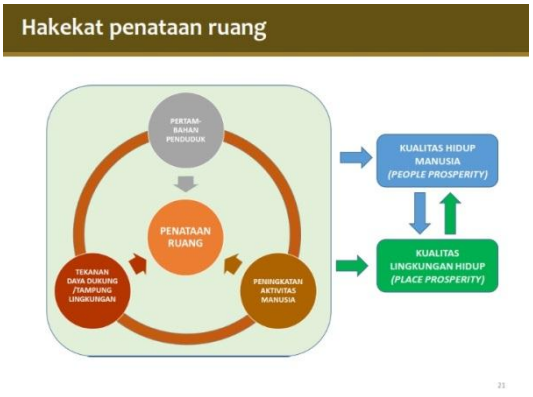
KEYNOTE SPEAKER 2 : Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam mendukung Implementasi New Urban Agenda - Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas***(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg /Kementerian ATR/BPN -Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah)***

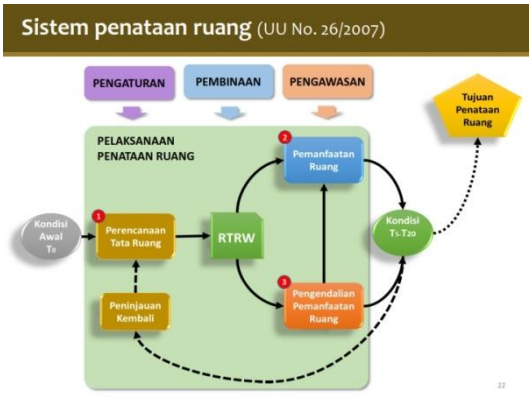


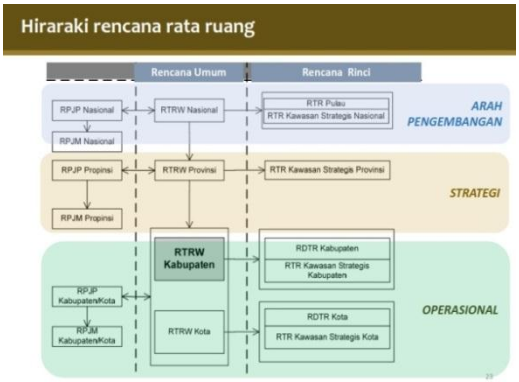


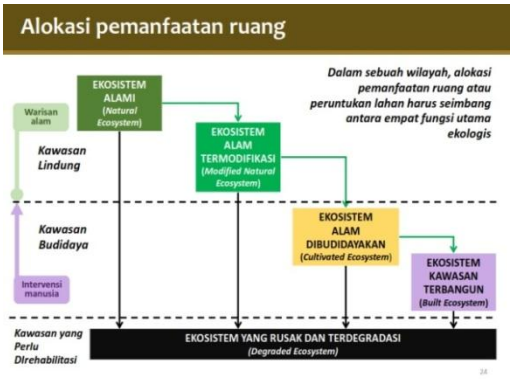




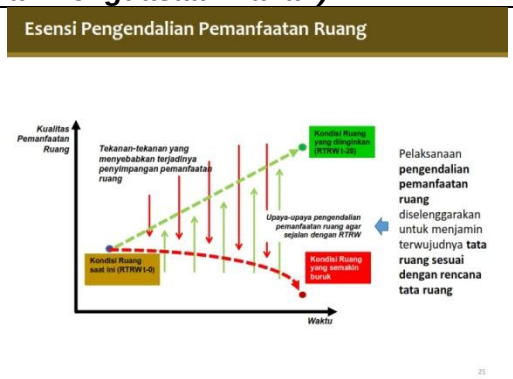








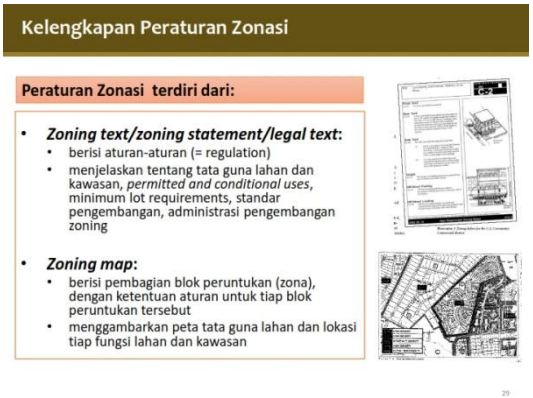
KEYNOTE SPEAKER 2 : Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam mendukung Implementasi New Urban Agenda - Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas***(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg /Kementerian ATR/BPN -Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah)***



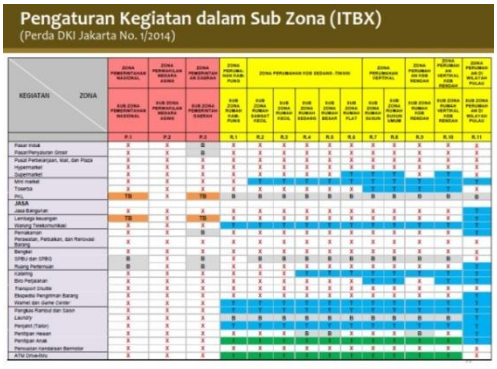














KEYNOTE SPEAKER 2 : Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam mendukung Implementasi New Urban Agenda - Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas***(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg /Kementerian ATR/BPN -Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah)***

Pengaturan Batasan Intensitas (Perda DKI Jakarta No. 1/2014)

- **KDB** — **Koefisien Dasar Bangunan**, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
- **KLB** — **Koefisien Lantai Bangunan**, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
- **KB** — **Ketinggian Bangunan** adalah jumlah keseluruhan lantai bangunan dengan memperhatikan ketentuan tinggi ruang setiap lantai bangunan dan ketinggian peil lantai dasar.
- **KDH** — **Koefisien Dasar Hijau** , adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.
- **KTB** — **Koefisien Tapak Basemen**, adalah persentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan Lahan Perencanaan yang dikuasai sesuai RDTR dan PZ.
- **PSL** — **Pola Sifat Lingkungan** adalah pengelompokan lokasi lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.

Contoh Pengaturan Intensitas Pemanfaatan Ruang (Perda DKI Jakarta No. 1/2014)

LAMPIRAN III-3 TABEL 8B INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KECAMATAN TANAH ABANG

KELURAHAN	BLOK	SUB BLOK	ZONA	SUB ZONA	ID SUBBLOK	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL
BENDUNGAN HILIR	01	001	ZONA JALUR HIJAU	H.6	01.001.H.6.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	002	ZONA JALUR HIJAU	H.4	01.002.H.4.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	003	ZONA JALUR HIJAU	H.6	01.003.H.6.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	004	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.5	01.004.R.5.a.b	60	1,20	2	20	0	K	P
BENDUNGAN HILIR	01	005	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.4	01.005.R.4.a.b	60	1,20	2	20	0	D	P
BENDUNGAN HILIR	01	006	ZONA PERUMAHAN VERTIKAL	R.7	01.006.R.7.a.b	50	3,40	6	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	007	ZONA PEMERINTAHAN DAERAH	P.3	01.007.P.3.a.b	60	2,00	4	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	008	ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA	K.2	01.008.K.2.a.b	50	2,00	4	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	009	ZONA PERUMAHAN VERTIKAL	R.7	01.009.R.7.a.b	40	3,00	16	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	010	ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA	K.2	01.010.K.2.a.b	60	2,40	4	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	011	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.4	01.011.R.4.a.b	60	1,20	2	20	0	D	P
BENDUNGAN HILIR	01	012	ZONA TAMAN KOTA/LINGKUNGAN	H.2	01.012.H.2.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	013	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.6	01.013.R.6.a.b	60	2,40	4	20	0	K	P
BENDUNGAN HILIR	01	014	ZONA TRANSJAKARTA BRT	T.1	01.014.T.1	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	015	ZONA PERUMAHAN VERTIKAL	R.7	01.015.R.7.a.b	55	3,00	6	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	016	ZONA JALUR HIJAU	H.4	01.016.H.4.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	017	ZONA TAMAN KOTA/LINGKUNGAN	H.2	01.017.H.2.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	018	ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA	K.2	01.018.K.2.a.b	50	2,00	4	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	019	ZONA TAMAN KOTA/LINGKUNGAN	H.2	01.019.H.2.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	020	ZONA PERKANTORAN, PERDAGANGAN, DAN JASA	K.2	01.020.K.2.a.b	50	2,50	4	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	021	ZONA PELAYANAN UMUM DAN SOSIAL	S.3	01.021.S.3.a.b	40	1,60	4	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	01	022	ZONA TAMAN KOTA/LINGKUNGAN	H.2	01.022.H.2.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	01	023	ZONA TAMAN KOTA/LINGKUNGAN	H.2	01.023.H.2.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	02	001	ZONA PEMERINTAHAN DAERAH	P.3	02.001.P.3.a.b	55	3,00	6	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	02	002	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.5	02.002.R.5.a.b	60	1,20	2	20	0	K	P
BENDUNGAN HILIR	02	003	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.3	02.003.R.3.a.b	60	1,20	2	20	0	D	P
BENDUNGAN HILIR	02	004	ZONA TAMAN KOTA/LINGKUNGAN	H.2	02.004.H.2.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	02	005	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.5	02.005.R.5.a.b	60	1,20	2	20	0	K	P
BENDUNGAN HILIR	02	006	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.6	02.006.R.6.a.b	60	1,20	2	20	0	K	P
BENDUNGAN HILIR	02	007	ZONA PERUMAHAN KDB SEDANG-TINGGI	R.4	02.007.R.4.a.b	60	1,20	2	20	0	D	P
BENDUNGAN HILIR	02	008	ZONA JALUR HIJAU	H.5	02.008.H.5.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	02	009	ZONA PERUMAHAN VERTIKAL	R.7	02.009.R.7.a.b	45	4,00	24	30	55	T	P
BENDUNGAN HILIR	02	010	ZONA JALUR HIJAU	H.5	02.010.H.5.a.b	0	0	0	0	0	-	P
BENDUNGAN HILIR	02	011	ZONA PEMERINTAHAN DAERAH	P.3	02.011.P.3.a.b	50	2,00	4	30	55	T	P

Jenis-jenis izin terkait pemanfaatan ruang

JENIS IZIN	PENJELASAN	DASAR PEMBERIAN
IZIN PRINSIP IZIN LOKASI	• Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota. • Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan. • Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha untuk non-pertanian dan > 25 Ha untuk pertanian.	RTRW Kab/Kota
IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH	• Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan	
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	• Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. • Diberikan berdasarkan peraturan zonasi. • Sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan.	RDTR Kab/Kota Peraturan Zonasi
IZIN LAIN BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN	• Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/atau instansi yang berwenang.	Peraturan Sektor

Rujukan pemberian izin

NO.	JENIS PERIZINAN	RUJUKAN
1.	**Licensi (Izin usaha dll) termasuk Izin Prinsip.**	Daftar negatif, tidak melanggar peraturan perundangan, pertimbangan ekonomi (terutama). Tidak terkait dengan 'ruang
2.	**Permit**	Terkait dengan ruang.
	Á. Izin Lokasi	• RTRW dan ketentuan Umum Peraturan Zonasi (jika ada rencana yang lebih detail atau PZ lebih baik)
	B. IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Tanah)	• RTRW dan ketentuan Umum PZ. • RDTR. • Peraturan Zonasi.
	C. Izin Site Plan	RDTR, Peraturan Zonasi.
	D. IMB	• RDTR, Peraturan Zonasi • Peraturan Bangunan (*building code*). • Standar-standar terkait bangunan
	E. Penyesuaian IMB (jika terjadi perubahan Pemanfaatan Ruang	
	F. Ijin Pemanfaatan Bangunan	

Ketentuan perizinan dalam UU No. 26 Tahun 2007

1. Izin pemanfaatan ruang yang **tidak sesuai dengan RTRW DIBATALKAN** oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah (ps. 37 ayat 2)
2. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan/diperoleh dengan **tidak melalui prosedur yang benar BATAL DEMI HUKUM** (ps. 37 ayat 3)
3. Izin pemanfaatan ruang yang **tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW DAPAT DIBATALKAN** dengan memberikan ganti kerugian yang layak (ps. 37 ayat 6)
4. Setiap pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang **DILARANG menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTR** (ps. 37 ayat 7)

Ketentuan perizinan (PP No. 15 Tahun 2010)

Pasal 161, PP No. 15/2010:
setiap orang wajib memiliki izin pemanfataan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang

Pasal 161:
(1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
   a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
   b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
   c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.

Pasal 162 ayat 1 dan 2:
Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi, yang merupakan biaya untuk administrasi perizinan.

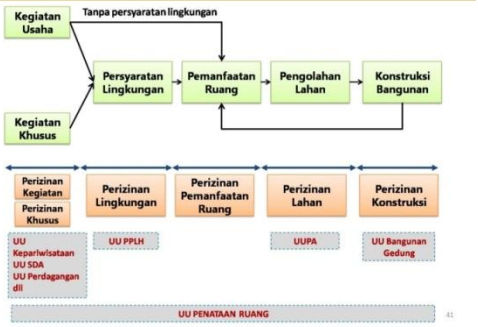
Izin-izin terkait pemanfaatan ruang

1. Izin Lokasi,
2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT),
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
4. Izin Pemancangan Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyebrangan Oramg (JPO), dan sejenisnya,
5. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan,
6. Izin Pembuatan Jalan Masuk di Dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan, dan Sejenisnya,
7. Izin Penutupan/Penggunan Trotoar, Berm, dan Saluran,
8. Izin Pematangan Lahan/Tanah,
9. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah,
10. Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija),
11. Izin Pengambilan Air Permukaan ,
12. Izin Pembuangan Air Buangan Ke Sumber Air,
13. Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi, dan Kemiringan Dasar Saluran/Sungai ,
14. Izin Perubahan Atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan serta Perkuatan Tanggul yang Dibuat Oleh Masyarakat ,
15. Izin Pembangunan Lintasan yang Berada di Bawah/di Atasnya ,
16. Izin Pemanfaatan Bangunan Perairan dan Lahan Pada Daerah Sempadan dan Saluran/Sungai ,
17. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan Lainnya.

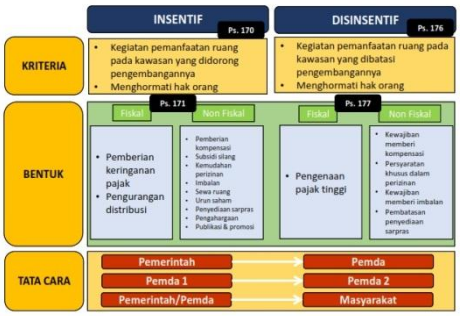
PERIZINAN	NON PERIZINAN / REKOMENDASI
I. PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG ❑ Hak atas tanah (HGB, SHM) ❑ Penetapan Lokasi Pembebasan Lahan ❑ SIPPT / IPPT ❑ SP3L / Pembebasan Sanksi SP3L ❑ Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) ❑ Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Sanksi SP3L ❑ Surat Persetujuan Prinsip Lahan Pengganti ❑ Rencana Tata Letak Bangunan ❑ Ketetapan Rencana Kota (KRK) ❑ Peningkatan Intensitas ❑ Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ❑ Izin Membangun Prasarana (IMP) ❑ Sertifikat Layak Fungsi (SLF) ❑ Penyelenggaraan Reklame **II. PERIZINAN OPERASIONAL** ❑ Izin Undang-Undang Gangguan/Tempat Usaha ❑ Izin terkait Prasarana & Utilitas (SPBU, Pembangkit, Penggunaan Instalasi Bangunan) ❑ Izin terkait Peribadatan (Rumah Ibadah) ❑ Izin terkait Pendidikan (Perdirian Sekolah) ❑ Izin terkait Kesehatan (Rumah Bersalin, Apotek, Toko Obat, dll) ❑ Izin terkait Usaha (Usaha Perpasaran, Usaha Industri, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Perdagangan, Usaha Pariwisata, dll)	**I. REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG** ❑ Amdal / UKL-UPL ❑ Rekomendasi Peil Banjir ❑ Rekomendasi Kajian Manajemen Lalu Lintas **II. REKOMENDASI OPERASIONAL** ❑ Keterangan Kependudukan (Akte kelahiran umum, Perkawinan, Kematian, Perceraian, dll) ❑ Keterangan Pajak Daerah (Pelayanan PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, dll) ❑ Keterangan Usaha (Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Gudang, dll) ❑ Keterangan Pendidikan dan Ketenagakerjaan (Legalisasi Izasah / STTB, Pelayanan Perpindahan Siswa / Mutasi, Pelayanan Kartu Kuning, dll)

KEYNOTE SPEAKER 2 : Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam mendukung Implementasi New Urban Agenda - Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas***(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg /Kementerian ATR/BPN -Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah)***

Mekanisme penerapan perizinan



Pemberian insentif dan disinsentif



Berdasarkan PP 15 Tahun 2010, Pasal 170-177.

Contoh Pemberian Insentif dan Disinsentif

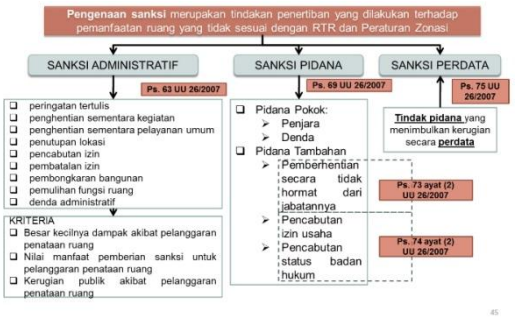
CONTOH SIFAT POLA PENGATURAN

	INSENTIF	DISINSENTIF
Preventif	Pengusaha yang membangun industri di kawasan industri dikenakan keringanan pajak	Dalam mencegah alih fungsi lahan perumahan menjadi lahan komersial, ditetapkan pembatasan daya aliran listrik
Kuratif	Dalam rangka mengurangi permukiman kumuh di bantaran sungai, Pemerintah memberikan subsidi yang terkait kinerja Pemda dalam mengurangi permukiman kumuh.	Dalam rangka mencegah berkembangnya permukiman kumuh di bantaran sungai, Pemda tidak memberikan prasarana dan sarana penunjang di kawasan tersebut.

Alur pengenaan sanksi



Pelanggaran dan pengenaan sanksi



Sanksi Administratif

	BENTUK	TATA CARA	KRITERIA
a	**Peringatan Tertulis**	Penerbitan Surat peringatan tertulis	• Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan • Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan • Kerugian publik yang ditimbulkan
b	**Penghentian Sementara kegiatan**	Penerbitan surat keputusan penghentian kegiatan setelah peringatan tertulis diabaikan	
c	**Penghentian Sementara kegiatan pelayanan umum**	Penerbitan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum kpd pelanggar setelah peringatan tertulis diabaikan	
d	**Penutupan lokasi**	Penerbitan surat keputusan penutupan lokasi, setelah peringatan tertulis diabaikan	
e	**Pencabutan Izin**	Penerbitan surat keputusan pencabutan izin, setelah peringatan tertulis diabaikan	
f	**Pembatalan Izin**	Penerbitan surat keputusan pembatalan izin, setelah peringatan tertulis diabaikan	
g	**Pembongkaran Bangunan**	Penerbitan surat keputusan pembongkaran bangunan, setelah peringatan tertulis diabaikan	
h	**Pemulihan Fungsi Ruang**	Penerbitan surat perintah pemulihan fungsi ruang setelah surat peringatan diabaikan	
i	**Denda Administratif**	Dapat dikenakan bersama dengan sanksi lain atau tersendiri	

Sanksi pidana

UNSUR TINDAK PIDANA	SANKSI PIDANA
1. Tidak mentaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.	• penjara paling lama 3 tahun ; dan • denda paling banyak Rp. 500 juta
2. Tidak mentaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda/rusaknya barang.	• penjara paling lama 8 tahun ; dan • denda paling banyak Rp. 1, 5 miliar
3. Tidak mentaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan mengakibatkan Kematian orang	• penjara paling lama 15 tahun ; dan • denda paling banyak Rp. 5 miliar
4. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.	• Pidana penjara paling lama 3 tahun; dan • denda paling banyak Rp. 500 juta
5. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;	• Pidana penjara paling lama 5 tahun; dan • denda paling banyak Rp. 1 miliar
6. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kerugian thd harta benda/kerusakan barang.	• Pidana penjara paling lama 5 tahun; dan • denda paling banyak Rp. 1,5 miliar
7. Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kematian orang	• Pidana penjara paling lama 15 tahun; dan • denda paling banyak Rp. 5 miliar
8. Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.	• Pidana penjara paling lama 1 tahun; dan • denda paling banyak Rp. 100 juta
9. Tidak memberikan akses terhadap kawasan yg oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum	• Pidana penjara paling lama 1 tahun; dan • denda paling banyak Rp. 100 juta
10. Pejabat pemerintah penerbit izin yang enerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	• Pidana penjara paling lama 5 tahun; dan • denda paling banyak Rp. 500 jt • dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.

Ketentuan penertiban perizinan

	SESUAI RTRW	TIDAK SESUAI RTRW
Telah ada SEBELUM RTRW ditetapkan dengan Perda		
Berizin		• Penerapan *non-conforming use* (dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan) • Pencabutan izin, pembongkaran dan pemberian kompensasi • Pengenaan insentif/disinsentif untuk penyesuaian dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi
Tidak berizin	• Perlengkapan izin • Pengenaan denda	• Pembongkaran dan denda • Pemulihan fungsi
SETELAH RTRW ditetapkan dengan Perda		
Berizin		• Pencabutan izin dan pemberian kompensasi • Penindakan pemberi izin
Tidak berizin	Pencabutan izin dari dan pemberian kompensasi	• Pembongkaran dan denda • Pemulihan fungsi

KEYNOTE SPEAKER* 2** : Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam mendukung Implementasi New Urban Agenda - Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg /Kementerian ATR/BPN -Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah)***



Kearifan Lokal

- **Kekayaan adat istiadat, bahasa, tata nilai, dan budaya**
- **Keanekaragaman budaya daerah sebagai potensi sosial**
- **Keanekaragaman budaya daerah sebagai potensi sosial**
- **Kearifan lokal perlu dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh**
- **Relevansi nilai-nilai dan bentuk kearifan lokal dalam proses atau kaidah perencanaan**
- **Perlu dilakukan *knowledge management* terhadap berbagai jenis kearifan lokal**



50

Jenis Kearifan Lokal

- **TATA KELOLA**
  - Sistem kemasyarakatan yang mengatur tentang struktur sosial dan keterkaitan antara kelompok komunitas
  - Lembaga dan organisasi sosial yang mengelola kehidupan di lingkungan pedesaan
  - Pembagian tugas dan fungsi dalam suatu kelompok masyarakat adat
  - Kewenangan dalam struktur hirarki sosial
- **SISTEM NILAI**
  - Di Bali, terdapat suatu aturan atau ketentuan-ketentuan adat yang harus ditaati



51

Jenis Kearifan Lokal

- **TATA CARA DAN PROSEDUR**
  - Beberapa aturan adat di daerah memiliki ketentuan mengenai waktu yang tepat untuk bercocok tanam serta sistem penanggalan tradisional
  - Aturan mengenai penggunaan ruang adat
  - Tata wilayah (pengaturan pemanfaatan lahan), tata wayah (pengaturan waktu pemanfaatan), dan tata lampah (pengaturan perilaku/perbuatan)
- **KETENTUAN KHUSUS**
  - Pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif


Sistem Subak di Bali


Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat

52

Harmonisasi terhadap pelaksanaan Penataan Ruang


Kawasan Strategis Nasional Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (SARBAGITA)

- Perencanaan tata ruang yang memperhatikan aspek budaya yang ada, seperti adanya kawasan strategis dan kawasan pusaka/budaya;
- Studi mengenai kearifan lokal yang akan menentukan bentuk dari regulasi penataan ruang;
- Rencana pemanfaatan ruang yang lebih menonjolkan pusaka budaya kota;
- Pengaturan fungsi bangunan atau lingkungan yang boleh, tidak boleh, atau dibatasi pengembangannya dalam kawasan sekitar pusaka budaya;
- Melakukan revitalisasi dan/atau konservasi dalam pengembangan dan pelestarian kearifan lokal kota;
- Mempertahankan, melindungi, memelihara, dan mengembalikan fungsi kawasan pusaka budaya
- Pengembangan *public – private partnership* bangunan-bangunan konservasi atau pelestarian yang ada

53

Harmonisasi terhadap pengawasan Penataan Ruang

- Melibatkan tokoh-tokoh adat dalam pengawasan penyelenggaraan penataan ruang;
- Pelarangan perubahan fungsi bangunan di sekitar kawasan pusaka budaya yang dapat mengganggu karakter kawasan pusaka cagar budaya, dan kepada pemilik bangunan diberikan insentif, misalnya dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pembayaran PBB;
- Memperhatikan faktor-faktor yang sudah terkait di dalam bangunan-bangunan bersejarah.


Bangunan di kawasan Jalan Braga, Bandung masih sesuai dengan fungsi bangunan aslinya


Pelibatan tokoh-tokoh adat dalam pengawasan penyelenggaraan penataan ruang

54

Proses Adopsi

- **Mengakomodasi KEARIFAN LOKAL secara utuh/langsung ke dalam regulasi penataan ruang tanpa intervensi**

CONTOH:

1. **Karang Kekeran, Bali – Regulasi peruntukan lahan lokal dalam pengaturan pembangunan fisik**



2. **Penamaan daerah menggunakan penamaan zoning:**
   - **kauman (daerah pesantren)**
   - **kepatihan (daerah tempat para patih)**
   - **jagalan (tempat menyembelih binatang sapi)**



55

Proses Adaptasi

- **Penyesuaian KEARIFAN LOKAL yang meliputi perubahan untuk menyesuaikan dan menghasilkan suatu perencanaan yang baik**

TANAH ULAYAT / HAK ULAYAT

Tanah Ulayat adalah bidang tanah dimana terdapat hal ulayat masyarakat hukum adat tertentu

Hak Ulayat adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam secara turun-menurun dan tidak terputus

Pemerintah menetapkan Desa Kenekes, Banten sebagai hal ulayat masyarakat hukum adat Baduy:

- **Perda Kab. Lebak No. 32/2001 ttg Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy; Perda No. 31/2001 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Lebak; dan**
- **Keputusan Bupati Lebak No. 590/Kep.233/Huk/2002 ttg Penetapan Batas-batas Detail Tanah Ulayat Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes**





56

KEYNOTE SPEAKER 2 : Peran Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam mendukung Implementasi New Urban Agenda - Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal Dan Pemberdayaan Komunitas***(Ir.Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg /Kementerian ATR/BPN -Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah)***

Proses Asimilasi

- Upaya penggabungan kebudayaan sehingga terbentuk budaya atau kearifan yang baru
  - Sifat integratif dan mediatif budaya
  - Sistem ekologi - keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya
  - Dalam menentukan suatu daerah untuk menjadi kawasan *heritage*, melibatkan beberapa aspek: pertimbangan konservasi dan pertimbangan rasional lainnya, seperti kretivitas seni, dan perencanaan pariwisata







Contoh Penerapan di Kota Mataram

Contoh Penerapan Pengembangan Kawasan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Mataram

Pasal 38 ayat (8) Perda Kota Mataram Nomor 12/2011 tentang RTRW Kota Mataram

Rencana pengembangankawasan pariwisata dilakukan melalui:
a. penataan kawasan destinasi pariwisata di Kota;
b. mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah yang ada;
c. mempertahankan dan mengembangkan pariwisata religi yang ada sesuai dengan visi Kota;
d. .....

Lampiran IV.2 Perda Kota Mataram Nomor 12/2011 tentang RTRW Kota Mataram

Kriteria Kawasan Pariwisata yaitu kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata serta tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan dengan manfaat antara lain:
h. melestarikan budaya lokal;
i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

58

Contoh Penerapan di Kota Mataram (2)

Contoh Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

Pasal 49 Perda Kota Mataram Nomor 12/2011 tentang RTRW Kota Mataram

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya terdiri dari:
a. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan;
b. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan;
c. Kawasan Makam van Ham di Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara; dan
d. Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram.

Kriteria Kawasan Strategis Kota dari sudut kepentingan Sosial dan Budaya di Kota Mataram:
a. merupakan **tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya lokal** di Kota;
b. merupakan prioritas peningkatan sosial dan budaya serta **jati diri daerah**;
c. merupakan **aset daerah** yang harus dilindungi dan dilestarikan;
d. merupakan tempat perlindungan **peninggalan budaya daerah**;
e. memberikan perlindungan terhadap **keanekaragaman budaya lokal**;
f. memiliki potensi **kerawanan terhadap konflik sosial skala lokal** (kota).

Penutup

- Pengembangan perkotaan Indonesia semakin dituntut untuk lebih berbasis pendayagunaan asset lokal
- Kearifan lokal adalah kunci penguatan penyelenggaraan penataan ruang
- Pemerintah perlu terus berupaya pada tingkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi turbinlakwas
- Peran Masyarakat harus terlibat dalam proses dari tahap persiapan sampai pada penetapan suatu rencana
- Mengakomodasi kearifan lokal dalam regulasi penataan ruang yaitu melalui proses Adopsi, Adaptasi dan Assimilasi
- Operasionalisasi kebijakan dan strategi pelestarian dan pengembangan kearifan lokal harus menSINERGIkan antara Aspek Budaya dengan aspel strategis lainnya

60



Terima kasih

0812 9979 485
dirppratr@gmail.com

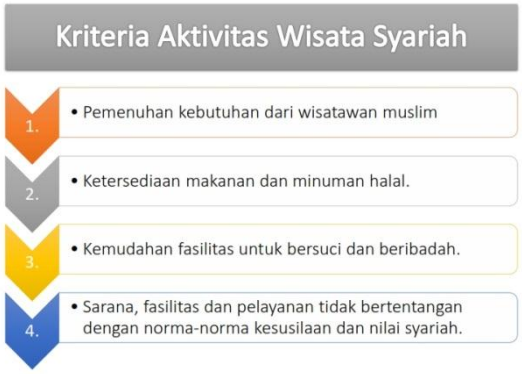
61

KEYNOTE SPEAKER* 3** : Peluang dan Tantangan Dalam Pengembangan Pariwisata Halal - Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017/2018 ***(H. Lalu. Moh. Faozal., S.Sos., M.Si / Dinas Pariwisata Provinsi NTB)

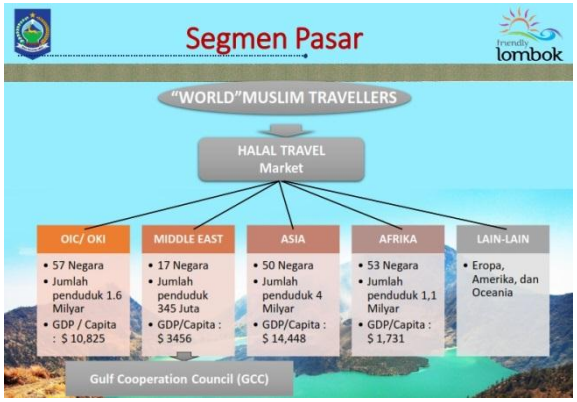


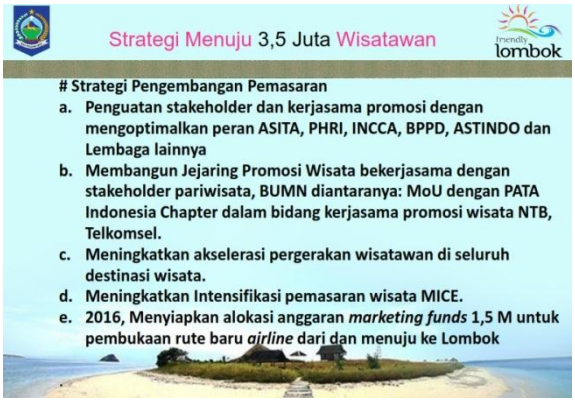








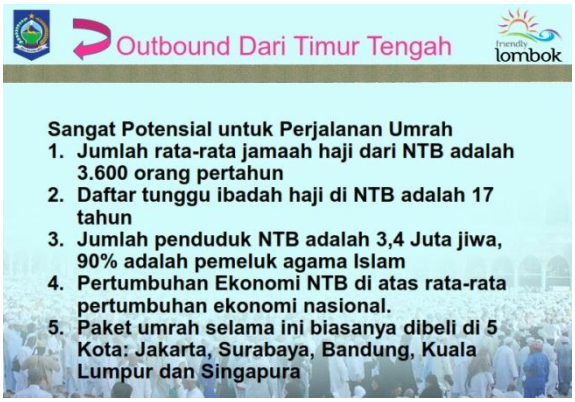






KEYNOTE SPEAKER* 3** : Peluang dan Tantangan Dalam Pengembangan Pariwisata Halal - Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017/2018 ***(H. Lalu. Moh. Faozal., S.Sos., M.Si / Dinas Pariwisata Provinsi NTB)









NO	TAHUN	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	PERKEMBANGAN (%)
1	2012	471.706	691.436	1.162.512	31,15
2	2013	565.944	791.658	1.357.602	16,72
3	2014	752.306	876.816	1.629.122	20,00
4	2015	1.061.292	1.149.235	2.210.527	35,69
5	2016	1.404.328	1.690.109	3.094.437	39,99





KEYNOTE SPEAKER* 4** : New Urban Agenda:Peran dan Implikasi pada Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota(Tubagus Furqon Sofhani / Ketua ASPI 2015 – 2017)***

New Urban Agenda: Peran dan Implikasi pada Pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota

Tubagus Furqon Sofhani
Ketua ASPI 2015 – 2017
Mataram, 14 September 2017

Tema Pokok New Urban Agenda

1. Sustainable Urbanization: Dari Human Settlement isu (adequate shelter for all) kepada social, economic and political inclusion dan environmental sustainability.
2. Merespon secara lebih khusus kebutuhan kelompok marjinal

Sejarah Pendidikan Perencanaan

1. Respon terhadap proses urbanisasi sebagai dampak dari revolusi industri melalui pengorganisasian ruang
2. Respon secara khusus kebutuhan kelompok marjinal: Advocacy dan Equity Planning (Social and economic inclusion)
3. Respon kegagalan pasar politik: Collaborative Planning. Political Inclusion, termasuk kelompok marjinal, dalam proses perencanaan

Peran Pendidikan PWK dalam Implementasi NUA

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi preskriptif terhadap proses urbanisasi melalui rencana pengorganisasian ruang dan kebijakan non-spatial
2. Memproduksi pengetahuan yang dapat menjelaskan sifat dan implikasi urbanisasi terhadap ruang dan kesejahteraan kolektif masyarakat di Indonesia
3. Turut serta bersama komponen bangsa lainnya dalam mengelola proses urbanisasi melalui rumusan kebijakan dan penguatan masyarakat dan pemerintah.

Tantangan pada Pendidikan PWK

1. Kurikulum: Kompetensi (Kemampuan mengintegrasikan isu inklusifitas dalam menghadapi kekuatan pasar yang dominan)
2. Proses Pembelajaran: Menjembatani "gap" antara teori dengan realitas dan implikasi urbanisasi yang jauh lebih komplek
3. Integrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam merespon urbanisasi

Tantangan pada Penelitian

1. Pemahaman sifat dan implikasi urbanisasi di Indonesia: ekonomi masyarakat ganda dan mega village
2. Uncontrolled capitalism: Sebaran Kota-Kota Baru dan Zona Industri
3. Mega Region Pantura Jawa sebagai implikasi perkembangan infrastruktur: konversi lahan, daya dukung lingkungan dan food security.

Tantangan Pada Pengabdian Masyarakat

1. Mengkomunikasikan hasil riset terkait sustainable urbanization pada pengambil keputusan
2. Membangun jejaring yg lebih luas untuk mendorong proses perubahan kebijakan dan penguatan kelompok marjinal

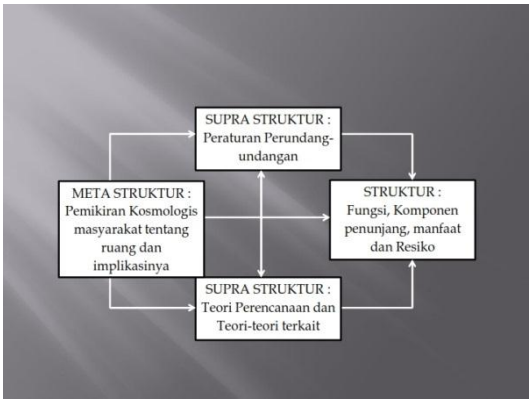
Terima Kasih

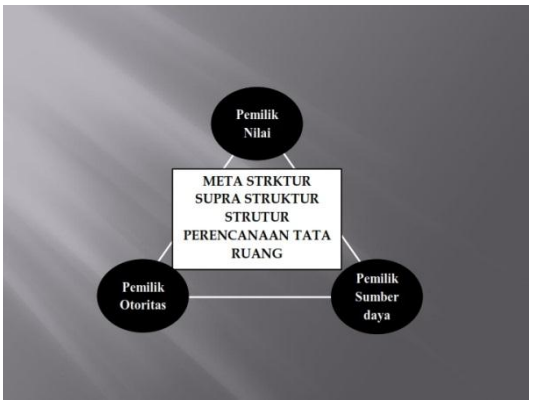
KEYNOTE SPEAKER* 5** : Pemikiran Kosmologis Masyarakat Tradisi Dalam Pengembangan Kawasan - Implemantasinya Dalam Perencanaan Kawasan Pariwisata ***(Lalu Agus Faturrahman/ Budayawan NTB)

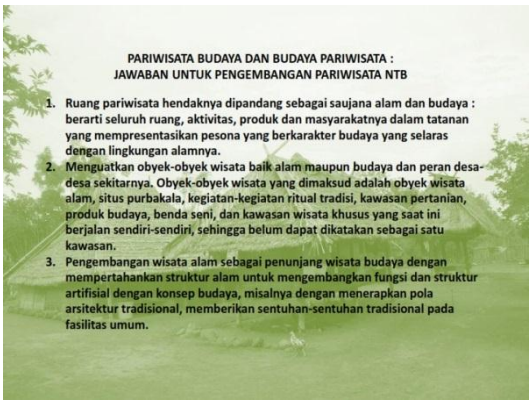


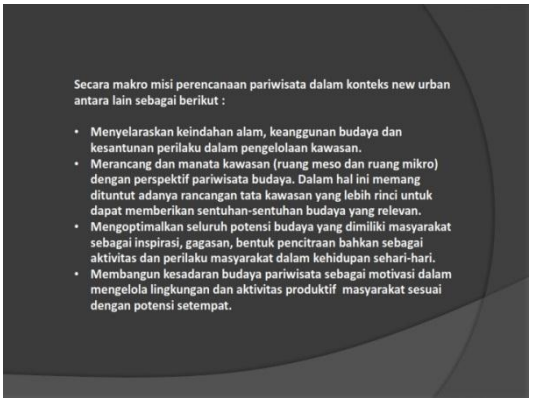


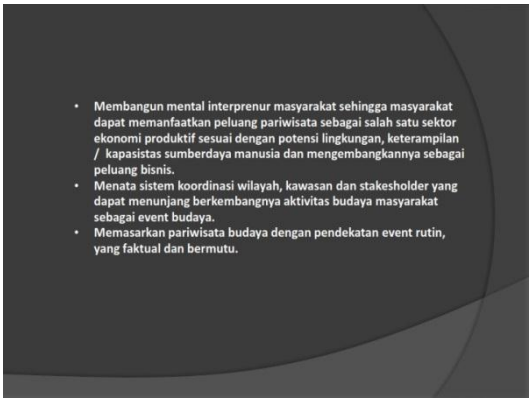








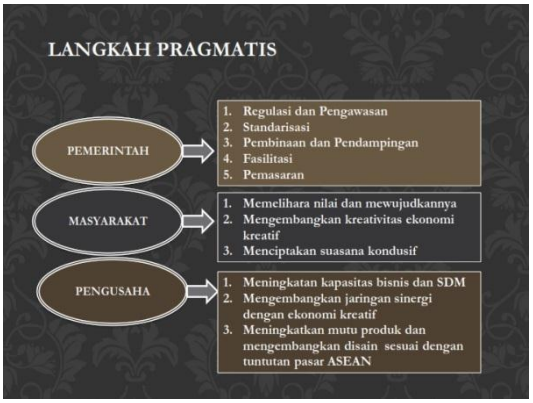




KEYNOTE SPEAKER* 5** : Pemikiran Kosmologis Masyarakat Tradisi Dalam Pengembangan Kawasan - Implemantasinya Dalam Perencanaan Kawasan Pariwisata ***(Lalu Agus Faturrahman/ Budayawan NTB)









PEMIKIRAN KOSMOLOGIS MASYARAKAT TRADISI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN : IMPLEMENTASINYA DALAM PERENCANAAN KAWASAN PARIWISATA

H. L. Agus Fathurrahman[1]
[1]Budayawan NTB

A. Membaca Fenomena Ruang Kita

Ruang-ruang persegi saat ini menjadi habitat kita, bangunan-bangunan persegi menjadi pemandangan nyaris di setiap sudut kota bahkan sampai ke pedesaan. Konsep bangunan minimalis menjadi gaya hidup juga sampai ke sudut-sudut dusun kita. Tembok-tembok membatasi ruang hunian dan justeru merasa nyaman dan aman dengan tembok-tembok pembatas yang kekar. Kita hidup di dalam kotak dan pikiran kita juga seakan membangun konsep kotak-kotak dalam menghadapi persoalan lingkungan kita.Kita lebih percaya pada tembok tinggi yang kekar dari pada orang-orang atau masyarakat sekitar kita. Tembok kekar kemudian menjadi gaya hidup, dibangun dan ditata sedemikian rupa hanya sebagai tempat persembunyian.

Ruang- kemudian - diinterpretasi dengan fungsi yang sangat terbatas, sebagai hunian. Developer memotret setiap sudut ruang dengan pertimbangan strategis dan memberi kemudahan, membangun hunian yang diikuti dengan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, sebagai salah satu identitas kota berkembang. Maka jadilah desa kita semacam desa global dari gaya penataan ruang dan arsitektur. Masyarakat tradisi yang semula merasa gamang dalam rumah dan lingkungannya sendiri, ada yang tersisih, terpaksa menyesuaikan diri dan ada yang merasa terbiasa dan akhirnya menjadi masyarakat anomali. Nilai dan norma modernitas yang dibawa desa global belum bisa diinternalisasi dan tradisionalitasnya telah ditinggalkan banyak orang dalam komunitasnya.

Fungsi dan bentuk ruang yang dihadirkan oleh para perencana dan pengembang saat ini cenderung berdimensi kotak-kotak dengan batas yang tegas. Dari sistem perencanaan itu lahir konsep ruang pariwisata, ruang industri, ruang pemukiman, dan lain-lain yang akhirnya akan mematikan kreativitas kita untuk menjadikan ruang kita ruang yang berdimensi luas, seluas dimensi kehidupan manusia. Keterbatasan konsep dalam perencanaan, telah mengurangi makna ruang secara kosmologis. Ruang yang semula sebagai sarana kehidupan manusia berubah menjadi aset, investasi dan alat produksi, sehingga ia tidak lagi dipandang sebagai subyek yang pandangannya perlu dipertimbangkan dalam perencanaan suatu kawasan. Pada saat yang bersamaan, budaya yang kita agungkan telah kita campakkan. Inilah awal dari ketidak-bermaknaan ruang selain makna-makna secara pragmatis dan ekonomis.

Fenomena semacam ini adalah sesuatu yang niscaya, tak terbendungkan menghadapi aneka persoalan demografis serta turunannya yang menjadi beban. Tetapi bukanlah secara niscaya pula tata nilai budaya harus hilang di atas permukaan bumi ini, untuk mengejar pemenuhan kebutuhan fisik biologis. Tidak semua orang mempercayakan kebahagiaannya pada kecenderungan hedonisme, sehingga semua harus dipandang dengan konsep menyenangkan dan memudahkan. Aspek-aspek psikologis dan spiritual tidak semuanya dapat dirasionalkan dalam kalkulasi logika perencanaan yang hanya mengedepankan pragmatis dan ekonomis.

Diharapkan sebagai mediator antara konsep filosofis dan konsep pragmatis dalam penataan ruang adalah hadirnya sistem perundang-undangan negara yang yang menata Tata Ruang Wilayah secara makro (kosepsi secara nasional) dan meso (konsepsi secara regional) berdasarkan potensi spasial dan aspek-aspek fungsi ruang secara natural dan kultural. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh wilayahnya tidak saja dalam konteks wilayah teritorial secara politik dan militer, tetapi

juga melindungi keseluruhan sistem yang berkaitan dengan wilayah Indonesia secara teritorial, spasial dan kultural.

Bagaimana Undang-undang yang mengelola tata ruang kita ?

Payung agung yang menjadi acuan dalam penataan ruang di bumi nusantara ini bernama Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Undang-undang tersebut didefinisikan, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Selanjutnya penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan : (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan (c) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kata kunci pada pengertian dan tujuan penataan ruang di Indonesia berdasarkan undang-undang tersebut adalah kesatuan ruang yang harmonis, lestari, aman dan nyaman dalam mengembangkan kebudayaan untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kata kunci diatas, jika dielaborasi dengan pendekatan budaya akan mengedepankan konsep ruang sebagai satu kesatuan atau bentang saujana alam dan budaya. Masyarakat memandang ruang dengan landasan nilai, dalam hal ini suatu ruang tidak hanya dipandang sebagai lingkungan pisik semata, tetapi mencakup meta struktur yang melandasi pengetahuan, pemahaman dan sikapnya. Meta struktur ini tentu tidak akan ditemukan dalam Undang-undang tentang Penataan Ruang, tetapi harus menjadi bahan pertimbangan dalam elaborasi pengelolaan tata ruang.

B. Ruang : Bentang Saujana Alam Dan Budaya

Masyarakat tradisi pada umumnya dan khususnya masyarakat Sasak memandang ruang sebagai sebuah entitas meso kosmos dengan segala jenis pengkosmos di dalamnya. Suatu ruang meso terbangun dengan struktur permukaan dan meta struktur yang menetapkan fungsi suatu ruang. Bagi masyarakat tradisional, struktur permukaan memiliki makna dan makna itu diorientasikan ke fungsi dan fungsi itu sebagai awal pemberian tanda. Inilah yang dimaksud dengan bentang saujana alam dan budaya. Struktur ruang yang diinterpretasi untuk fungsi hutan, ladang, kebun, sawah, pemukiman, tanah lapang dan pekuburan, diberikan simbol-simbol yang menjadi pusat ritualnya. Kesatuan ruang-ruang fungsional itulah yang disebut dengan paer dalam budaya Sasak (lebih jauh tentang hal ini, baca : H. L. Agus Fathurrahman, 2017)

Apakah itu sama dengan kawasan atau resort ?

Jawabannya tergantung pada komitmen untuk penataan suatu kawasan atau resort dengan mengadopsi konsep makna ruang secara kosmologis. Secara kosmologis, ruang merupakan suatu spasial dengan satu pusat yang disebut tempat. (Anton Bakker, 1995 : 165). Masyarakat budaya di Nusantara mengekspresikan titik pusat atau tempat tersebut dengan simbol-simbol tertentu. Di Lombok titik-titik pusat tersebut disebut kemaliq, biasanya menggunakan batu menhir atau sumur sebagai penanda. Ttitik ini dijadikan pusat orientasi penataan ruang. Dalam hal ini ada yang menggunakan pola lingkaran dengan orientasi ruang vertikal dan ada yang berpola struktur dengan orientasi ruang horisontal. Pola pengaturan ruang ini termasuk ekspresi budaya dan aktivitas sosial masyarakat penghuninya yang juga merupakan bagian dari kesatuan entitas kosmos dalam suatu ruang. Dengan kata lain, ruang tidak hanya dipahami sebagai ruang pisik, tetapi termasuk ruang sosial, ruang kultural dan ruang spiritualnya. Masing-masing komponen ruang itu senantiasa saling mengisi, sehingga suatu perubahan struktur dan fungsi ruang fisik dalam budaya Sasak

senantiasa mempertimbangkan aspek sosial, kultural dan spiritualnya. Secara kosmologis, penempatan “tempat” atau titik pusat kosmos pada suatu kawasan akan berpengaruh terhadap kekuatan energi yang akan mendukung suatu kawasan atau sebaliknya akan menentang keberadaan suatu kawasan. Pada masyarakat Sasak hal ini diistilahkan dengan subawe.

Komitmen para pengembang dan perencana untuk mengkaji konsep ruang secara tradisional dapat dijadikan inspirasi untuk merencanakan suatu kawasan atau resort dengan konsep meso kosmos. Konsep ini akan menjadikan kawasan yang akan dikembangkan akan menyatu dengan lingkungan alam, lingkungan sosial maupun kultural dan akan menjadi aspek yang akan memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar. Mengapresiasi konsep dan tatanan lingkungan secara kosmologis, juga dapat menciptakan variasi karakter ruang dalam satu kawasan atau karakter satu kawasan dalam satu wilayah. Misalnya dalam mempertimbangkan koneksitas satu kawasan potensial dengan kawasan potensial lain memanfaatkan karakter ruang alami. Jarak antara pusat bisnis atau pusat aktivitas dengan pemukiman walaupun agak jauh tapi lancar, tidak akan terlalu membuat stress jika dibandingkan dengan jaraknya dekat tetapi padat dan macet.

C. Masyarakat, Budaya Dan Ratapan Alamnya

Seperti telah dikemukakan terdahulu, lahan saat ini merupakan aset dan saat ini telah menjadi biang konflik keluarga, konflik horisontal dan konflik vertikal. Masyarakat sebagian besar tidak mampu menahan banjir uang yang melandanya, ketika investor menyebutkan angka yang fantastis untuk satu-satunya lahan yang dimiliki. Secara sistematis masyarakat dikepung oleh investor dan tak berdaya. Tanah dijual, masyarakatnya menyingkir dan uangnya dibelanjakan tanpa perencanaan. Tanahpun menangis melihat “anaknya” harus menjalani hidup tanpa dirinya. Lahan berganti tuan yang lebih memperhatikan dan lebih memakmurkan dengan kehidupan modern, tetapi sejatinya tanah merasa tidak pantas dan lelah karena tak lagi memberikan kasih sayangnya, tetapi mempekerjakan pisiknya dengan dandanan yang norak. Demikianlah permisalan kondisi pengelolaan dan penataan kawasan saat ini.

Masyarakat hidup dalam kondisi gamang, budaya muncul dalam bentuk-bentuknya yang anomali sebagai ekspresi kegamangan masyarakatnya. Pembangunan kawasan menjadi kaku dan congkak. Gedung-gedung yang kokoh menjulang menggambarkan gaya hidup orang-orang yang beraktivitas dan dapat mengaksesnya. Sementara masyarakat yang telah menyingkir “berziarah” ke bekas tanahnya (tapi tetap menjadi tanah tumpah darahnya), dan kita menganggapnya mengganggu dan menyebutnya “kampungan”. Demikian punya budaya hanya menjadi pelengkap kesenangan orang-orang yang menjadi pemilik baru kawasan yang sejatinya adalah ruang budaya. Dalam hal ini, tidak ada yang salah, dan hendaknya jangan saling menyalahkan karena tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Masing-masing hendaknya mulai retrospeksi sebelum terlambat. Masyarakat hendaknya menata diri untuk mengikuti dinamika peradaban, investor juga mulai mengapresiasi dan memberi ruang budaya dalam perencanaan dan pengembangan programnya.

Kegamangan masyarakat perlu disentuh dengan kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan permasalahan lokal, misalnya dengan terapi yang membangkitkan kembali percaya diri melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, dan pemberian akses untuk ikut merasa memiliki. Kebudayaan ditata dengan rancang bangun yang adaptatif dengan perkembangan peradaban dengan strategi yang lebih komprehensif dan holistik serta berorientasi ekonomi kreatif. Alam dikemas dengan dandanan yang berwatak budaya, dijaga kelestarian serta harmoninya dengan lingkungan secara makro (keanekaragaman hayatinya). Implikasi pragmatis dalam perencanaan adalah dengan memberikan

rekomendasi-rekomendasi non teknis yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial budaya, pasat arsitektur, flora lokal, menyediakan instalasi sosial budaya sebagai ruang publik yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dll. Dengan demikian, ratapannya akan lebih reda dan kegelisahannya akan sedikit terobati.

D. MERUSAK TATANAN DAN MENATA KERUSAKAN : GAMBARAN PERENCANAAN KITA

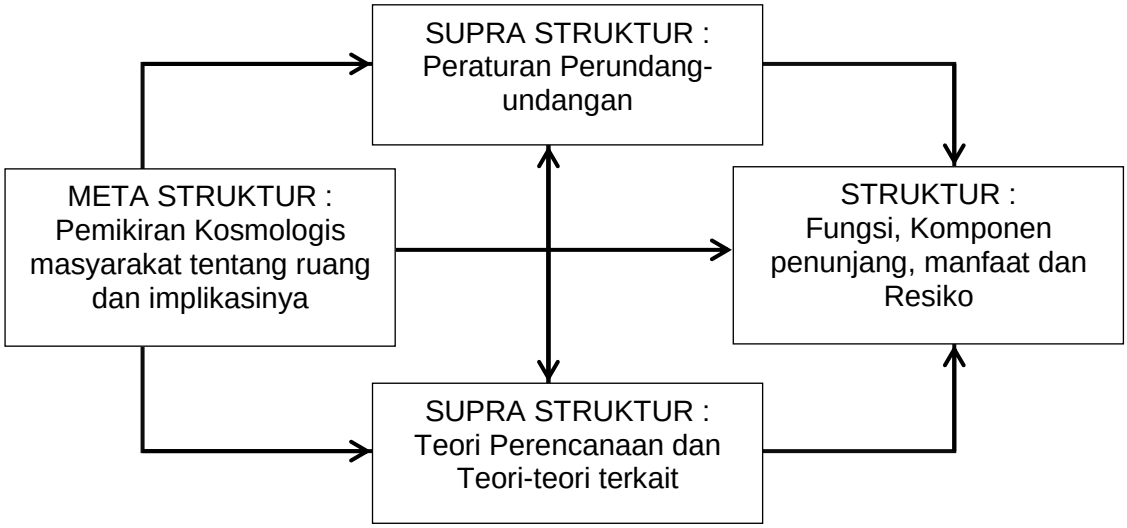
Perencana modern, tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi memiliki tanggungjawab ideologis dan profesional untuk menciptakan konsep perencanaan yang efisien, efektif, futuristik berbasis budaya. Peningkatan jumlah penduduk yang tak terbendung, perkembangan peradaban yang melahirkan globalisasi, menyebabkan dunia ini menjadi satu desa global. Diversifikasi usaha dan kebutuhan lahan, menuntut efisiensi dan efektivitas pengelolaannya. Saat ini kita baru terperangah melihat akibatnya. Dimensi-dimensi tersebut, telah berkolaborasi merusak tatanan manusia, budaya dan alamnya karena dibiarkan berjalan secara alami. Konsep kearifan tradisional yang berkaaitan dengan ruang dan fungsi tidak mendapat perhatian oleh pemerintah maupun oleh pengembang.

Jika boleh kita katakan (walaupunn mungkin sangat sarkas) bahwa alam kita telah sedemikian rusaknya, maka saatnya kita berbenah dan kembali "bertanya kepada alam" tentang apa yang seharusnya dilakukan. Bertanya tentang apa yang salah dalam perencanaan yang selama ini kita lakukan. Bertanya tentang pertimbangan nilai sebagai meta struktur suatu perencanaan, tentang pandangan kosmologis masyarakat Nusantara tentang alam, manusia dan budayanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih dapat dikembangkan sampai menemukan titik temu antara kebutuhan perkembangan peradaban, revitalisasi dan transformasi nilai serta teori dan etika perencanaan. "Bertanya kepada alam" dalam konteks ini bertanya pada diri sendiri tentang apresiasi terhadap masyarakat, budaya dan alamnya.

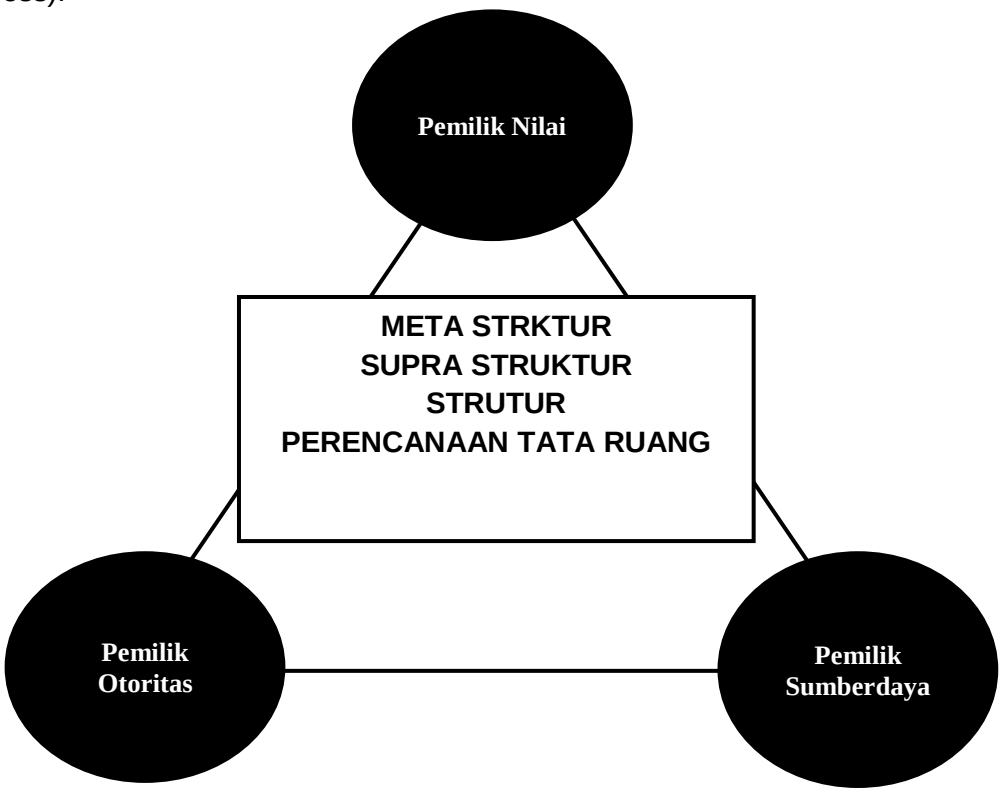
Demikian banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli dunia tentang masa depan bumi yang semuanya merujuk pada konsep pembangunan berkelanjutan dengan bertumpu pada modernisasi ekologis. Anthony Giddens misalnya mencoba mencermati pola hubungan manusia dengan kemajuan ilmiah dan respon terhadap resiko. Pengamatannya membawa kepada pandangan bahwa lingkungan tidak semata bersifat alami, tetapi merupakan produk atau dipengaruhi oleh aktivitas manusia (1999 : 69). Perencanaan pada dasarnya merupakan aktivitas menata kembali suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan dengan mempertimbangkan resikonya terhadap berbagai aspek alam, sosial dan budaya.

Sebuah perencanaan merupakan suatu pilihan terhadap resiko yang sudah diprediksi, berdasarkan beban lingkungan buatan terhadap lingkungan alam. Sebuah pendekatan formalisme, tanpa memperhatikan subyek yang terlibat berinteraksi didalamnya yaitu masyarakat dengan pandangan kosmologis dan budayanya. Jika kondsi perencanaan yang demikian yang dilakukan pada dasarnya merupakan pola yang merusak tatanan, artinya perencana memaksakan alam mengikuti beban yang diberikan oleh lingkungan buatan. Saatnya para perencana beralih pada konsep menata kerusakan, dengan lebih berorientasi pada pertimbangan resiko sosial dan psikologis, seperti yang ditawarkan oleh James Robertson (1990 : 11) dengan konsep masa depan yang Sehat, Humanis dan Ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya transformasi teoritis berdasarkan filosofi masyarakat setempat.

Kerangka dasar yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dengan pendekatan transformasi teoritis berdasarkan filosofi masyarakat setempat dapat digambarkan sebagai berikut :



Perencanaan yang komprehensif akan dapat dilakukan dengan kesadaran untuk melibatkan masyarakat pemilik indigenus knowledge untuk memahami konsep-konsep meta struktur dari proses penentuan kebijakan publik tentang penataan ruang, proses perencanaan makro sampai perencanaan detail. Dalam hal ini diharapkan terjadi dialog tiga komponen dalam perencanaan suatu kawasan yaitu masyarakat pemilik nilai (indigenus people), pemerintah (Otority and Power) dan Pengusaha (Resorcess).



E. PARIWISATA BUDAYA DAN BUDAYA PARIWISATA :

Sektor pariwisata telah menjadi pilihan daerah ini sebagai program prioritas pembangunan sejak dua dekade terakhir. Secara teoritis pilihan ini tepat untuk daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya alam secara kuantitatif karena wilayah yang

sempit. Disamping itu, pariwisata merupakan koridor yang menghubungkan seluruh belahan dunia dengan berbagai urusan. Pariwisata menjadi titian muhibah kemanusiaan dan kebudayaan secara alami, karena dinamika kehidupan dan kecenderungan dasar manusia untuk selalu bergerak. Dinamika pergerakan manusia dengan kemajuan sistem transportasi, komunikasi dan informasi saat ini sangat cepat dan kita akan selalu terlambat mengantisipasinya, jika hanya dijawab secara reaktif. Dalam hal ini, dibutuhkan sistem perencanaan yang holistik dari hulu ke hilir, dengan visi jauh ke depan.

Dalam konteks pariwisata, alam Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok merupakan anugrah Allah SWT dengan karakter alam yang sangat indah, mulai dari pantai, lembah sampai puncak gunung tertingginya. Disamping itu, perjalanan sejarah peradaban yang sangat panjang telah melahirkan keragaman budaya yang kaya dan berkualitas. Kebudayaan yang lahir dari pemikiran kosmologis asli masyarakat maupun hasil akulturasi dalam sejarah peradaban, tertata apik di daerah ini. Kebudayaan yang lahir dari pemikiran kosmik melahirkan ritual-ritual, mitos dan legenda yang dapat dijadikan inspirasi dalam ekspresi budaya dalam berbagai wujud kesenian maupun atraksi budaya lainnya. Sementara kebudayaan yang lahir sebagai buah akulturasi juga berkembang menjadi ekspresi budaya yang memperkaya khazanah kultural. Perpaduan keindahan alam yang bagaikan potongan surga dan keluhuran dan kekayaan budaya merupakan modal yang sangat besar bagi daerah ini dalam memajukan masyarakatnya. Dan tentu saja, ini merupakan anugrah Allah sebagai jalan hidup, kehidupan dan penghidupan hambaNya yang hidup di pulau ini.

Kekayaan modalita tersebut, tidak akan memberikan hasil maksimal jika tidak dikelola dengan sistem perencanaan yang konseptual, strategis dan visioner. Perencanaan yang konsepsional mengacu pada filosofi, nilai dan visi budaya masyarakat sehingga masyarakat menemukan dirinya dalam ikon pariwisata, merasa memiliki, ikut berpartisipasi secara pragmatis dan dapat menikmati manfaatnya untuk peningkatan kesejahteraannya. Perencanaan yang strategis mampu menghimpun seluruh komponen yang berkepentingan dengan berbagai perspektif yang akan memperkuat bangunan pariwisata dan perencanaan yang visioner mampu menyusun strategi dan program yang menghadang peradaban 50 sampai seratus tahun.

Dalam hal ini, kerangka dasar yang dibangun terlebih dahulu adalah konsep pariwisata budaya dan budaya pariwisata. Konsep pariwisata budaya pada dasarnya merujuk pada budaya sumberdaya pariwisata berdasarkan potensi setempat, sedangkan budaya pariwisata adalah membangun mentalitas masyarakat yang secara alami dan motivasi internal ikut dalam upaya pengembangan pariwisata. Perencanaan tata ruang pariwisata secara holistik hendaknya mengacu pada konsep saujana alam dan budaya dan sinergitas dua konsep dasar tersebut. Merencanakan pengembangan substansial dengan konsep pariwisata dengan basis penguatan budaya dan merencanakan pemberdayaan masyarakat dengan visi pariwisata.

Beberapa sumbangan pemikiran dalam merancang tata ruang pariwisata di NTB khususnya dengan perspektif new urban adalah sebagai berikut :

1. Ruang pariwisata hendaknya dipandang sebagai saujana alam dan budaya : berarti seluruh ruang, aktivitas, produk dan masyarakatnya dalam tatanan yang mempresentasikan pesona yang berkarakter budaya yang selaras dengan lingkungan alamnya. Perencanaan diarahkan pada pengukuhan dan penguatan eksisting dan menata koneksitasnya sebagai penunjang produktivitas. Sebagai akibat penguatan eksisting dan koneksitasnya, maka perencanaan juga diorientasikan untuk menampung dinamika dan perubahan yang dihasilkan. Untuk dibutuhkan databased desa, potensi yang dapat dikembangkan atau aspek yang perlu ditata dan aksisibilitasnya dengan kawasan atau daerah tujuan wisata. Sebagai contoh, Sukerare sebagai salah satu eksisting yang sudah sangat dikenal, tetapi memiliki koneksitas yang sulit, sehingga harus dirancang

koneksitasnya dengan obyek wisata yang lain yang tidak memiliki karakter yang sama.

2. Menguatkan obyek-obyek wisata baik alam maupun budaya dan peran desa-desa sekitarnya. Obyek-obyek wisata yang dimaksud adalah obyek wisata alam, situs purbakala, kegiatan-kegiatan ritual tradisi, kawasan pertanian, produk budaya, benda seni, dan kawasan wisata khusus yang saat ini berjalan sendiri-sendiri, sehingga belum dapat dikatakan sebagai satu kawasan. Diharapkan satu desa atau lokasi pariwisata dapat ditata koneksitasnya dengan desa lain dalam pengembangan program. Desa di sekitar obyek wisata harus dikaitkan secara sistematis sebagai penyangga dan diharapkan akan berkembang menjadi obyek baru sesuai dengan potensi desa yang bersangkutan. Dengan pola ini, seluruh desa akan berkembang menjadi obyek pariwisata sehingga terbangun satu kawasan pariwisata secara mandiri.
3. Pengembangan wisata alam sebagai penunjang wisata budaya dengan mempertahankan struktur alam untuk mengembangkan fungsi dan struktur artifisial dengan konsep budaya, misalnya dengan menerapkan pola arsitektur tradisional, memberikan sentuhan-sentuhan tradisional pada fasilitas umum. Demikian pula pada kawasan yang dirancang sebagai sentra wisata belanja dan wisata khusus lainnya.
4. Secara makro misi perencanaan pariwisata dalam konteks new urban antara lain sebagai berikut :
    a. Menyelaraskan keindahan alam, keanggunan budaya dan kesantunan perilaku dalam pengelolaan kawasan.
    b. Merancang dan manata kawasan (ruang meso dan ruang mikro) dengan perspektif pariwisata budaya. Dalam hal ini memang dituntut adanya rancangan tata kawasan yang lebih rinci untuk dapat memberikan sentuhan-sentuhan budaya yang relevan.
    c. Mengoptimalkan seluruh potensi budaya yang dimiliki masyarakat sebagai inspirasi, gagasan, bentuk pencitraan bahkan sebagai aktivitas dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
    d. Membangun kesadaran budaya pariwisata sebagai motivasi dalam mengelola lingkungan dan aktivitas produktif masyarakat sesuai.
    e. Membangun mental interprenur masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan peluang pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi produktif sesuai dengan potensi lingkungan, keterampilan / kapasistas sumberdaya manusia dan mengembangkannya sebagai peluang bisnis.
    f. Menata sistem koordinasi wilayah, kawasan dan stakesholder yang dapat menunjang berkembangnya aktivitas budaya masyarakat sebagai event budaya.
    g. Memasarkan pariwisata budaya dengan pendekatan event rutin, yang faktual dan bermutu.
5. Dalam konteks perencanaan pengembangan kawasan yang diorientasikan untuk memfasilitasi masyarakat memiliki budaya pariwisata, berkaitan dengan aksisibilitas jalan, fasilitas umum seperti pasar tradisional yang memadai, yang tidak mengganggu jalan umum, penerapan sistem pertanian tradisional yang terkontrol, penataan lingkungan yang sehat dan humanis, dll. Untuk itu memang memerlukan pendampingan masyarakat untuk membangun citra desanya sebagai tujuan wisata dan upaya swadaya yang seharusnya dilakukan untuk menerima wisatawan.

F. SIAPA YANG BISA MENGAMBIL PERAN

Pertanyaan retorik ini diharapkan masing-masing kita menjawabnya dengan sikap sebagai seorang birokrat, teknokrat, profesional perencana, profesional

pengembang, cendkiawan, seniman, budayawan bahkan rakyat jelata yang memiliki kebeningan rasa. Apa yang bisa disumbangkan dalam perencanaan parsipatori untuk menyelaraskan manusia,budaya dan alamnya, semacam memberi ruang pembelajaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pembangunan pariwisata. Seandainya tidak sekat antara pemilik otoritas, pemilik modal dan sumberdaya dan pemilik nilai untuk saling mendengar dan mengapresiasi, maka masyarakatpun akan berkontribusi dalam memelihara kesinambungan program.

Atas dasar apresiasi yang tulus dan rasional, masyarakat akan termotivasi dalam menguatkan citra diri sebagai bangsa yang berbudaya dengan ekspresi budaya yang berkualitas. Suatu kawasan pariwisata yang bercitra budaya akan diikuti dengan produk-produk industri kreatif berbasis budaya sebagai penunjang yang sangat penting. Jujur, kondisi pariwisata kita saat ini masih mencari-cari dan bahkan ”membuat-buat” event dan kegiatan berbau budaya tanpa akar dan basis budaya yang jelas, sehingga masyarakat tidak menemukan dirinya dalam kegiatan tersebut. Bukankah masyarakat telah berusaha menunjukkan kiprahnya sesuai dengan kemampuannya tapi sering dianggap mengganggu apalagi akan diapresiasi.

Para perencana-lah yang paling utama harus mengambil bagian, walaupun sering dikesampingkan oleh para penentu kebijakan.

Berjuangkah.

DAFTAR PUSTAKA

Bakker, Anton, *Kosmologi dan Ekologi, Filsafat tentang Kosmos Sebagai Rumah Tangga Manusia, Penerbit Kanisius*, Yogyakarta, 1995

Fathurrahman, Agus Lalu, *Kosmologi Sasak, Risalah Inen Paer*, Penerbit Genius, Mataram, 2017.

Fathurrahman, Agus Lalu, *Membaca Arsitektur Sasak* , Penerbit Genius, Mataram, 2016.

Gidden, Anthony, *Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Robertson, James, *Alternatif Yang Sehat, Pilihan Untuk Masa Depan*, Yayasan Obor, Jakarta, 1990.

Sekretariat Negara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Jakarta, 2007.

Sumarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1988.

Zen, M.T, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, Gramedia Jakarta, 1985.

.

Tema 1

STUDI PARIWISATA PERKOTAAN

Prospek Pembangunan Rusunawa Dalam Mendukung Kota Berkelanjutan Di Indonesia : Studi Persepsi Penghuni

Adi Nugroho[1]
[1]*Mahasiswa Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Fakultas Teknik*
Universitas Gadjah Mada
Email : adi26nugroho@yahoo.com

ABSTRAK

Rusunawa, sebagai salah satu bentuk hunian vertikal kota kompak, diyakini menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat di perkotaan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit untuk mendapatkan akses tempat tinggal di kota. Namun demikian tidaklah mudah untuk mengajak masyarakat yang terbiasa untuk tinggal di hunian horisontal untuk pindah ke rusunawa. Makalah ini bertujuan memberikan contoh kasus pembangunan rusunawa sebagai alternatif pemukiman dalam mendukung perkembangan kota yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian di Batam, prospek pembangunan rusunawa akan meningkat. Hal ini didasarkan pada persepsi penghuni bahwa terjadi peningkatan motivasi kerja setelah tinggal di rusunawa. Melalui survei kuantitatif dan wawancara kualitatif mengungkapkan bagaimana kondisi dan fungsi rusunawa mampu meningkatkan motivasi kerja penghuninya.

Kata kunci : Rusunawa, Kota Berkelanjutan, Motivasi Kerja, Persepsi

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan pemukiman yang layak huni di kota saat ini menjadi agenda global untuk pengembangan kota berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Masalah yang ada diperkotaan terutama ketersediaan lahan untuk pemukiman yang terbatas. Sehingga perlu dilakukan pembangunan hunian yang vertikal untuk menjadi solusi kebutuhan perkotaan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menurut Eko Budihardjo (mengambil pendapat Brundtland:1997) adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun tidaklah mudah untuk mengajak masyarakat beradaptasi untuk tinggal di hunian vertikal, karena masyarakat sudah terbiasa dengan hunian horisontal. Pemerintah harus berperan aktif untuk mensosialisasikan manfaat dan keuntungan tinggal di Rusunawa, sehingga masyarakat akan mengetahui tujuan dan manfaatnya. Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) merupakan hunian vertikal yang berfungsi sebagai alternatif hunian yang dikelola oleh Pemerintah, selain untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau juga untuk mengurangi timbulnya lingkungan kumuh, mengoptimalkan fungsi lahan perkotaan, terpenuhinya ruang terbuka hijau di perkotaan dan bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja penghuninya. Makalah ini memfokuskan mengenai salah satu tujuan dari pembangunan rusunawa, yaitu untuk meningkatkan produktifitas kerja penghuninya. Produktifitas kerja mempunyai pengaruh terhadap peningkatan hasil industri pada khususnya dan daya tarik kota pada umumnya. Menurut Tosics (2004), di tingkat nasional, pembangunan kota berkelanjutan harus menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktifitas kerja adalah motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan suasana batin atau psikologis seorang sebagai individu yang mempunyai pengaruh besar pada pelaksanaan pekerjaannya. Suasana batin itu terlihat dalam semangat atau gairah kerja yang menghasilkan kegiatan kerja sebagai kontribusi bagi pencapaian tujuan hidupnya menjadi lebih baik (Nawawi, 2003). Motivasi kerja seseorang akan muncul apabila telah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya (Maslow

dalam Rekshadiprodjo dan Handoko, 1996). Rusunawa mempunyai peranan dalam mendukung peningkatan motivasi kerja penghuninya untuk menjadi lebih baik kehidupannya sehingga masyarakat yang tinggal di rusunawa menjadi lebih sejahtera. Terkait dengan peningkatan motivasi kerja maka pengelola rusunawa perlu memperhatikan faktor pada kondisi dan fisik rusunawa yang dapat meningkatkan dan mempertahankan motivasi kerja penghuninya. Karena motivasi kerja tidak dapat muncul begitu saja tanpa adanya pengaruh dan perencanaan yang baik dalam kondisi dan fisik rusunawa. Maksud dan tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan kondisi dan fungsi rusunawa dengan motivasi kerja berdasarkan persepsi penghuninya. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi dalam membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan mengenai perencanaan dan pembangunan rumah susun sederhana sewa pekerja dalam mendukung kota berkelanjutan di Indonesia.

II. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif dan wawancara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara yang ditujukan ke penghuni rusunawa untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam hubungan persepsi penghuni terhadap kondisi dan fungsi rusunawa dengan motivasi kerjanya selama tinggal di rumah susun sederhana sewa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah kota Batam, yang merupakan kota industri. Kawasan industri di kota Batam tersebar di berbagai wilayah kota Batam. Lokasi Rumah susun sewa pekerja yang dimiliki Pemerintah berada di dekat kawasan industri Muka Kuning, kawasan industri Batu Ampar, kawasan industri Kabil dan Kawasan industri Sekupang. Lokasi rumah susun sederhana sewa dan kawasan industri dalam rencana penelitian ini adalah di rumah susun sewa Kabil - Badan Pengusahaan Batam dan rumah susun Muka Kuning - Badan Pengusahaan Batam. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah keberadaan rumah susun yang sudah dibangun dari tahun 2003 di Muka Kuning dan rumah susun yang relatif baru di Kabil (mulai tahun 2009 - 2011) dari pemerintah. Rumah Susun Kabil dihuni sekitar 400 pekerja yang bekerja di kawasan industri dan sekitarnya. Sedangkan Rumah Susun Muka Kuning dihuni sekitar 1500 pekerja. Selain itu Kawasan industri di Kabil dan di Muka Kuning merupakan kawasan industri yang cukup besar di kota Batam.

C. Variabel Penelitian dan Hubungan Antar Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi kondisi dan fungsi rusunawa sebagai variabel bebas (Independent Variable) dan motivasi kerja penghuni sebagai variabel tergantung (Dependent Variable). Variabel bebas atau Variabel Independen pada kondisi rusunawa dalam penelitian ini seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Variabel Bebas, Indikator dan Tolok Ukur

Variabel	Indikator	Tolok Ukur
Jarak ke Tempat Kerja	Jarak dari Rusunawa ke Tempat Kerja	1 = Tidak Setuju 2 = Setuju 3 = Sangat Setuju
Penghematan Biaya Pengeluaran	Penghematan pengeluaran biaya setiap bulan	1 = Tidak Setuju 2 = Setuju 3 = Sangat Setuju
Kesehatan Penghuni	Kesehatan penghuni	1 = Tidak Setuju 2 = Setuju 3 = Sangat Setuju

Sumber : Analisa Peneliti, 2017

Variabel Tergantung atau Variabel Dependen dalam penelitan ini adalah seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Variabel Tergantung, Indikator dan Tolok Ukur

Variabel	Indikator	Tolok Ukur
Peningkatan Motivasi Kerja Penghuni	Peningkatan Motivasi Kerja	1 = Tidak Setuju 2 = Setuju 3 = Sangat Setuju

Sumber : Analisa Peneliti, 2017

Dalam penelitian ini, penelitian dibatasi dengan melihat hubungan antar variabel yang telah ditentukkan, hubungan antar variabel tersebut adalah :

1. Hubungan Jarak ke Tempat Kerja dengan Motivasi Kerja
   Hubungan ini memperlihatkan dengan jarak dari tempat tinggal ke tempat kerja yang relatif dekat akan turut meningkatkan motivasi pekerja, karena dengan jarak yang dekat, pekerja tidak merasa malas dan mengurangi resiko yang dapat mengganggu untuk berangkat dan pulang kerja.
2. Hubungan Penghematan Biaya Pengeluaran dengan Motivasi Kerja
3. Hubungan ini memperlihatkan adanya dampak yang ditimbulkan selama tinggal di rusunawa dimana penghuni dapat menghemat pengeluaran tiap bulannya, sehingga penghuni dapat menyimpang penghasilannya lebih besar. Kemampuan penghuni untuk menyimpan penghasilannya dapat memberikan motivasi kerja untuk lebih baik lagi.
4. Hubungan Kesehatan Penghuni dengan Motivasi Kerja
5. Hubungan ini memperlihatkan adanya dampak yang ditimbulkan selama tinggal di rusunawa. kesehatan pekerja dapat terjaga sehingga hal ini mampu untuk meningkatkan motivasi kerjanya.

D. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi responden ditetapkan sebagai jumlah penghuni di rumah susun sederhana sewa Muka Kuning dan Kabil - BP Batam. Sampel diambil dengan metode probality sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (responden). Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah simple random sampling, di manan pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, karena anggota populasi bersifat homogen, yaitu pekerja yang tinggal di rumah susun sederhana sewa.

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebaga berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \,.\, d^2}$$

Keterangan :
n = ukuran sampel
N = Populasi
d = toleransi kesalahan

Populasi di Rusunawa Kabil adalah 438 pekerja dan populasi di Rusunawa Muka Kuning adalah 1589 pekerja. Sehingga sampel yang didapatkan untuk untuk Rusunawa Kabil adalah 81,4 yang dibulatkan menjadi 85 dan sampel di Rusunawa Muka Kuning adalah 94,1 yang dibulatkan menjadi 95 sampel. Jumlah total sampel yang didapatkan adalah 180 sampel.

E. Teknik Pengolahan Analisis Data

Setelah mendapatkan data primer dan data sekunder, maka berikutnya diolah berdasarkan jenis datanya. Setelah itu pengolahan data dilakukan dengan uji Chi-square dan mengkaitkan hubungan antar variabel-variabel di dalam kondisi dan fungsi Rumah Susun Sederhana Sewa (variabel bebas) dengan variabel di dalam motivasi kerja penghuni (variabel tergantung), sehingga dapat memberikan gambaran ada atau tidak adanya hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan pengolahan data dalam penelitian ini ada 2, yaitu untuk pengolahan analisis data kuantitatif dan pengolahan analisis data kualitatif.

Data kuantitatif dalam penelitian ini di olah dengan menggunakan cara dimasukkan data tersebut dalam uji Chi - Square kemudian dilakukan Crosstab atau tabulasi silang untuk menampilkan dua variabel dalam satu tabel yang ada hubungannya. Tabulasi silang akan memproyeksikan kecenderungan suatu hasil hubungan dengan melihat frekuensi terbanyak dimana dalam tabel ini terdapat variabel dependen dan independen. Dalam penelitian ini apakah peningkatan kualitas kondisi dan fungsi rumah susun sederhana sewa cenderung diikuti dengan peningkatan motivasi kerja penghuninya.

Dalam melakukan pengujian Chi Square untuk mengetahui tingkat signifikan hubungan terhadap antara variabel - variabel dalam penelitian ini. Indikasi hubungan menurut statistik apabila signifikannya lebih kecil dari α = 0,10, maka dapat diartikan terjadi kontribusi adanya hubungan yang signifikan antar variabel, begitu sebaliknya apabila nilai signifikannya lebih besar dari α = 0,10 maka dapat diartikan tidak ada kontribusi adanya hubungan yang signifikan di antara variabel tersebut. Kemudian dilakukan Crosstab atau tabulasi silang untuk menampilkan hubungan dua variabel yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan dengan Skala Likert dengan interval 1 - 3 yang menggambarkan penilaian kondisi yang tidak baik sampai dengan sangat baik.. Tabulasi silang akan memproyeksikan kecenderungan suatu hasil hubungan dengan melihat frekuensi terbanyak dimana dalam tabel ini terdapat variabel independen (kondisi dan fungsi rusunawa) dan dependen (motivasi kerja).

Tabel 3. Tabulasi Silang Hubungan Kondisi dan Fungsi Rusunawa dengan Motivasi Kerja.

			Kondisi dan Fungsi Rusunawa (Variabel Independen)			Total
			1	2	3	
Motivasi Kerja (Variabel dependen)	1	Count				
		% of Total				
	2	Count				
		% of Total				
	3	Count				
		% of Total				
Total		Count				
		% of Total				100.0%

Sumber : Analisa Peneliti, 2017

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa data yang dilakukan mengenai hubungan persepsi penghuni rusunawa Kabil dan Muka Kuning - BP Batam terhadap kondisi dan fungsi rusunawa pada motivasi kerja penghuninya.

A. Hubungan Jarak ke Tempat Kerja dengan Motivasi Kerja

Persepsi hubungan jarak ke tempat kerja dengan motivasi kerja menggambarkan adanya hubungan antara jauh atau dekatnya jarak lokasi rusunawa ke tempat kerja penghuni dengan peningkatan motivasi kerja di tempat kerja. Lokasi yang relatif dekat antara rusunawa dengan tempat bekerja akan mempunyai keuntungan seperti datang tepat waktu dan terhidar dari sikap terburu-buru. Hasil uji chi square pada hubungan jarak ke tempat kerja dengan motivasi kerja adalah:

Tabel 4. Hasil Uji Chi Square antara Hubungan Jarak ke Tempat Kerja dengan Motivasi Kerja

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	14.024[a]	4	.007
Likelihood Ratio	13.631	4	.009
Linear-by-Linear Association	2.832	1	.092
N of Valid Cases	180		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.17.

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Dari tabel 4 diketahui bahwa hasil nilai Asymp. Sig (2-sided) yang diperoleh adalah 0.007. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig 0.007 < 0.05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara jarak ke tempat kerja dengan motivasi kerja.

Hasil tabulasi silang antara hubungan jarak ke tempat kerja dengan motivasi kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Hubungan Jarak ke Tempat Kerja dengan Motivasi Kerja

			Jarak ke Tempat Kerja			Total
			1	2	3	
Motivasi Kerja	1	Count	9	10	12	31
		% of Total	5.0%	5.6%	6.7%	17.2%
	2	Count	12	11	70	93
		% of Total	6.7%	6.1%	38.9%	51.7%
	3	Count	9	11	36	56
		% of Total	5.0%	6.1%	20.0%	31.1%
Total		Count	30	32	118	180
		% of Total	16.7%	17.8%	65.6%	100.0%

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Hasil dari tabel 5 di atas terdapat kecenderungan pertama sebesar 70 atau 38.9 % responden yang menilai lokasi rusunawa sangat dekat dengan tempat kerjanya sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja di tempat kerjanya. Kedua sejumlah 36 responden atau 20 % menilai lokasi rusunawa berjarak sangat dekat dengan tempat kerja penghuni sehingga sangat meningkatkan motivasi kerja di tempat kerjanya.

B. Hubungan Penghematan Biaya Pengeluaran dengan Motivasi Kerja

Persepsi hubungan penghematan biaya pengeluaran dengan motivasi kerja menggambarkan adanya hubungan antara kemampuan penghuni dalam menghemat biaya pengeluaran tiap bulannya . Jarak yang dekat antara rusunawa dengan tempat

kerja akan menghemat biaya transportasi dan fasilitas-fasilitas yang ada mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga penghuni tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar untuk mencari kebutuhan pokok di luar rusunwa. Hal ini dapat membantu penghuni untuk menyimpan uang penghasilannya lebih besar, dengan kondisi demikian akan mampu mendorong penghuni untuk meningkatkan motivasi kerja. Hasil uji chi square pada hubungan ini adalah :

Tabel 6. Hasil Uji Chi Square Hubungan Penghematan Biaya Pengeluaran dengan Motivasi Kerja

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	24.263[a]	4	.000
Likelihood Ratio	26.056	4	.000
Linear-by-Linear Association	2.004	1	.157
N of Valid Cases	180		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.20.

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Dari tabel 6 diketahui bahwa hasil nilai Asymp. Sig (2-sided) yang diperoleh adalah 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig 0.000 < 0.05 maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penghematan biaya pengeluaran dengan motivasi kerja.

Hasil tabulasi silang antara hubungan penghematan biaya pengeluaran dengan motivasi kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hubungan Penghematan Biaya Pengeluaran dengan Motivasi Kerja

			Penghematan Biaya Pengeluaran			Total
			1	2	3	
Motivasi Kerja	1	Count	9	16	6	31
		% of Total	5.0%	8.9%	3.3%	17.2%
	2	Count	10	54	29	93
		% of Total	5.6%	30.0%	16.1%	51.7%
	3	Count	17	12	27	56
		% of Total	9.4%	6.7%	15.0%	31.1%
Total		Count	36	82	62	180
		% of Total	20.0%	45.6%	34.4%	100.0%

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Hasil dari tabel 7 di atas yang pertama terdapat kecenderungan sebesar 54 atau 30 % responden yang menilai selama tinggal di rusunawa, penghuni mampu dapat menghemat biaya pengeluaran sehingga dapat meningkatkan motivasi kerjanya. Kedua terdapat sejumlah 29 responden atau 16.1 % menilai selama tinggal di rusunawa dapat sangat menghemat biaya pengeluaran sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja penghuni.

C. Hubungan Kesehatan Penghuni dengan Motivasi Kerja

Persepsi hubungan kesehatan penghuni dengan motivasi kerja menggambarkan adanya hubungan antara kesehatan penghuni selama tinggal di rusunawa dapat terjaga kesehatannya. Lingkungan rusunawa yang mampu memberikan kebutuhan kesehatan seperti kebersihan lingkungan, air bersih, sanitasi yang baik, fasilitas olah raga, fasilitas ibadah serta kedekatan jarak antara tempat kerja dengan rusunawa memberikan keuntungan bagi penghuni untuk terhindar dari tekananan dalam perjalanan dan resiko kecelakaan. Hal ini dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan penghuni sehingga motivasi kerja penghuni akan meningkat. Hasil uji chi square pada hubungan ini adalah :

Tabel 8 Hasil Uji Chi Square Hubungan Kesehatan Penghuni dengan Motivasi Kerja

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	42.578[a]	4	.000
Likelihood Ratio	40.395	4	.000
Linear-by-Linear Association	26.008	1	.000
N of Valid Cases	180		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.86.

Sumber : Hasil Olah Data, 2017

Dari tabel 8 diketahui bahwa hasil nilai Asymp. Sig (2-sided) yang diperoleh adalah 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig 0.000 < 0.05 maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesehatan penghuni dengan motivasi kerja.

Hasil tabulasi silang antara hubungan kesehatan penghuni dengan motivasi kerja adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hubungan Kesehatan Penghuni dengan Motivasi Kerja

			Kesehatan Penghuni			Total
			1	2	3	
Motivasi Kerja	1	Count	16	12	3	31
		% of Total	8.9%	6.7%	1.7%	17.2%
	2	Count	10	48	35	93
		% of Total	5.6%	26.7%	19.4%	51.7%
	3	Count	8	13	35	56
		% of Total	4.4%	7.2%	19.4%	31.1%
Total		Count	34	73	73	180
		% of Total	18.9%	40.6%	40.6%	100.0%

Sumber : Hasli Olah Data, 2017

Hasil dari tabel 9 di atas, pertama menunjukkan terdapat kecenderungan sebesar 48 atau 26.7% responden yang menilai selama tinggal di rusunawa, penghuni dapat terjaga kesehatannya sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja penghuni. Kedua terdapat 2 peniliaian yang sama, yaitu sejumlah 35 responden atau 19.4 % menilai selama tinggal di rusunawa, kesehatannya sangat terjaga sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja penghuni, kemudian sejumlah 35 responden atau 19.4 % menilai selama tinggal di rusunawa, kesehatannya sangat terjaga sehingga sangat meningkatkan motivasi kerja penghuni.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghuni Rumah Susun bahwa tinggal di Rumah Susun pada dasarnya dapat meningkatkan motivasi kerja bagi penghuni. Penghuni menilai dengan keberadaan Rumah Susun dapat memenuhi kebutuhannya. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya Faktor yang penting berdasar persepsi penghuni adalah faktor pengelola rusunawa. Penghuni meminta agar peran dari pengelola dapat lebih aktif lagi. Karena menurut beberapa penghuni, pengelola dapat berperan lebih aktif agar dapat membantu meningkatkan motivasi kerja. Pengelola dapat melakukan pertemuan rutin dengan penghuni, mengadakan pengajian dan berkerja sama dengan lembaga pelatihan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan di lingkungan rusunawa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas, terdapat hubungan antara kondisi dan fungsi Rumah Susun Sederhana Sewa dengan motivasi kerja penghuninya. Hal ini terbukti berdasar hasil penelitian di Rusunawa BP Batam - Muka Kuning dan Rusunawa BP Batam - Kabil. Rusunawa dapat membantu penghuninya untuk meningkatkan motivasi kerjanya, sehingga dengan meningkatnya motivasi kerja maka dapat membantu kinerja dan produktivitas di perusahaan di mana penghuni itu bekerja. Sehingga rusunawa dalam makalah ini menjadi bukti bahwa pembangunan rusunawa menunjukkan suatu konsep pemukiman di kota yang dapat mendukung suatu kota sebagai kota yang berkelanjutan.

Dalam perencanaan dan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pekerja di perkotaan, Rumah Susun tidak hanya sebagai tempat tinggal saja. Namun Rumah Susun juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan penghuninya. Selain itu Rumah Susun beserta lingkungannya harus mampu menjadi sarana tempat tinggal yang layak dan sehat. Terjaganya dan terpeliharanya kualitas dan kuantitas sarana serta fasilitas - fasilitas yang ada di Rumah Susun dapat mendukung kegiatan maupun kebutuhan dari penghuninya dan lingkungan sekitarnya. Pembangunan Rumah Susun adalah untuk membangun pemukiman yang baik sehingga akan berdampak pada meningkatnya motivasi kerja penghuninya.

Untuk meningkatkan motivasi kerja, maka perlu diperhatikan faktor - faktor yang ada pada kondisi dan fungsi Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai tempat tinggal. Kualitas kondisi rusunawa yang baik akan mampu memaksimalkan pengaruh terhadap motivasi kerja penghuni. Faktor-faktor pada konidisi dan fungsi rusunawa yang berhubungan dengan motivasi kerja adalah lokasi rusunawa, penghematan biaya pengeluaran, dan kesehatan penghuni.

Ada satu faktor yang menurut penghuni yang dapat meningkatkan motivasi kerja. Faktor tersebut adalah peran aktif pengelola rusunawa dalam membantu meningkatkan motivasi kerja penghuni. Pengelola tidak hanya memperhatikan kondisi fisik rusunawa juga tapi juga harus dapat memperhatikan kebutuhan lain yang tidak ada di kondisi rusunawa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adisasmita, Rahardjo (2015). Teori Pertumbuhan Kota. Yogyakarta : Graha Ilmu

Aryadi., B. Setiawan (2010). Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku, Pengantar ke Teori, Metodologi dan Aplikasi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Azwar, Saifuddin (2015). Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Bacal, Robert (2001). Performance Management. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Brookfield, Stephen. D.(2006). *The Skillful Teacher* : On Techniques, Trust and Responsiveness in the Classroom, San Francisco : Josse-Bass, A Wiley Imprint.

Budihardho, Eko dan Sujarto, Djoko., (2009), Kota Berkelanjutan, Bandung : Alumni

Iskandar, Zulrizka (2013). Psikologi Lingkungan Metode dan Aplikasi. Bandung: Refika Aditama

Nawawi, Hadari (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Jurnal :

Sofyan, Afriyanto., (2012), Studi Pengembangan Model Perencanaan Rusunawa di Provinsi Jawa Tengah *Vitasphere, ISSN 2085-7683,* Vol. II, Agustus Tahun 2012. 78-86.

Tosics, Ivan (2004) , European Urban Development : Sustainability and The Role of Housing *Springer, Journal of Housing and the Built Enviroment,* Vol. I9, No. 1, Dimensions of housing and urban sustainability (2004), 67-90.

Thamrin, M,. Novita, Desi., Panjaitan, Panjaitan, Faisal Azhari Baldan., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan Permanen. *Agrium, ISSN 0852-1077 (Print) ISSN 2442-7306,* Vol. 19 No. 1 Oktober Tahun 2014. 44-51.

Widodo, Intan Puspita., Yuliastuti, Nany., 2013. Penilaian Keberlanjutan Permukiman di Kelurahan Bugangan Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK ,* Vol. 2 No. 1 Tahun 2013. 191-197.

STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN MUTIARA SEBAGAI DAYA TARIK WISATA BELANJA DI KOTA MATARAM

Dita Pebrianti[1], Luthfi Muta'ali[1]

[1]Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: dita.pebrianti@mail.ugm.ac.id; luthfi.mutaali@gmail.com

ABSTRAK

Kota Mataram memiliki salah satu daerah yakni kelurahan Karang Pule yang penduduknya dikenal bermatapencaharian sebagai pengrajin dan pengusaha industri kerajinan mutiara. Sebagai komoditas unggulan Kota Mataram, industri tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi karakteristik industri kerajinan mutiara, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi daya tarik, dan merumuskan strategi pengembangan industri kerajinan mutiara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jumlah populasi sebanyak 56 unit industri yang diperoleh dengan cara sensus dengan menyebar kuesioner kepada 56 pengusaha industri kerajinan mutiara, dan 30 wisatawan secara aksidental. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik industri kerajinan mutiara merupakan usaha turun temurun, menggunakan bahan baku mutiara air laut, area distribusi pemasaran didominasi di dalam negeri, dan memanfaatkan teknologi internet sebagai usaha pemasaran. Faktor yang memiliki daya tarik tinggi yaitu faktor kualitas produk, sedangkan faktor yang memiliki daya tarik rendah ialah faktor paket wisata pembuatan kerajinan. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas industri kerajinan mutiara yakni strategi turn-around karena menempati kuadran IV pada matriks analisis SWOT. Strategi turn-around ini dilakukan dengan cara upaya manajemen produk dan kegiatan manajerial. Selain strategi turn-around, penelitian ini menghasilkan beberapa strategi lain untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan kategori pengusaha.
Kata kunci: Industri Kerajinan Mutiara, Daya Tarik, Strategi Pengembangan, Kota Mataram

I. PENDAHULUAN

Industri berskala kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia, terutama terkait dengan kontribusinya dalam memajukan perekonomian wilayah. Berdasarkan UU RI No.3 Tahun 2014 tentang perindustrian bahwasanya ketetapan nilai investasi untuk industri kecil yakni sampai dengan Rp 500.000.000 sedangkan nilai investasi industri menengah yakni lebih besar dari Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah sebagai bentuk implementasi dari pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Terutama keberadaan industri kecil di banyak negara berkembang mampu memberikan kontribusi mencapai 30% - 60% dari seluruh penduduk perkotaan (Gunawan & Permadi, 2015). Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sebuah strategi yang dilaksanakan secara simultan.

Menurut Chandler (1962) dalam Rangkuti (1998), strategi ialah suatu alat yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang. Strategi yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri secara berkelanjutan *(sustainable)*. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki berbagai subsektor industri berskala kecil yang membentuk klaster. Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 526/X/2009 tentang Penetapan Klaster Industri Kecil Unggulan Kota Mataram, terdapat 8 (delapan) jenis klaster industri kecil

unggulan. Salah satunya ialah industri kerajinan mutiara, emas, dan perak.

Industri kerajinan mutiara, emas, dan perak termasuk ke dalam industri pengolahan. Kerajinan mutiara menjadi komoditas unggulan Kota Mataram sehingga pemerintah daerah menetapkan industri kerajinan mutiara sebagai produk kompetensi inti daerah. Kerajinan ini terkonsentrasi di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis bidang pariwisata oleh pemerintah. Kini kawasan tersebut dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata belanja kerajinan.

Industri kerajinan mutiara termasuk industri hilir, sehingga dalam perkembangannya akan sangat dipengaruhi oleh pasokan bahan baku yang berasal dari industri pertambangan, baik dari sisi kuantitas maupun harga beli (Albanjari, 2012). Diketahui beberapa pengusaha industri kerajinan mutiara menutup usahanya dikarenakan keterbatasan modal sehingga tidak dapat membeli bahan baku dalam jumlah banyak, meremajakan alat produksi dan menambah stok produk, serta masih kecilnya nilai tambah yang diperoleh para pengrajin dan pengusaha dikarenakan desain yang belum berkembang sesuai permintaan pasar. Adanya mutiara yang dipasok dari Cina juga mempengaruhi produksi dan pemasaran terhadap mutiara hasil budidaya lokal yang dapat menyebabkan kegiatan produksi semakin menurun (Hasil *interview* ketua IKM kerajinan mutiara dan Lurah Karang Pule).

Berbagai masalah dan kendala yang dihadapi industri skala kecil akan berdampak terhadap kinerja yang menjadi kurang berhasil (Tambunan, 2002). Oleh karena itu, perlu dilakukan rumusan strategi pengembangan yang tepat guna meningkatkan aktivitas industri kerajinan mutiara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik industri kerajinan mutiara, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi daya tarik industri kerajinan mutiara, dan merumuskan strategi pengembangan industri kerajinan mutiara sebagai daya tarik wisata belanja di Kota Mataram.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram yang merupakan sentra industri kerajinan mutiara. Jumlah populasi industri kerajinan mutiara yang diperoleh sebanyak 56 unit industri (Ketua Keluarga Besar Persatuan Pedagang dan Pengrajin Mutiara Lombok, serta hasil observasi lapangan).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap persiapan berupa studi pustaka, persiapan alat dan bahan yang akan digunakan dan orientasi lapangan. Tahap berikutnya adalah observasi lapangan, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara sensus dengan menyebar kuesioner kepada 56 pengusaha yang memiliki toko atau *showroom* yang juga sebagai tempat produksi, dan 30 wisatawan yang berkunjung ke sentra industri kerajinan mutiara secara aksidental, serta sedikit dilakukan wawancara sebagai informasi tambahan.

Peneliti melakukan rekapitulasi data kuesioner yang kemudian diolah dengan teknik *scalling* untuk menyamakan satuan dari berbagai indikator yang terdiri dari lama karir usaha, modal usaha perbulan, jumlah tempat produksi, jumlah tenaga kerja, jumlah pengiriman barang, jumlah pelanggan, intensitas pengiriman, dan pendapatan kotor perbulan. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam menjumlahkan nilai skalanya untuk mendapatkan nilai indeks kompositnya (Muta'ali, 2015). Hal tersebut guna memperoleh karakteristik industri kerajinan mutiara yang terdiri dari karakteristik usaha, karakteristik produk, karakteristik pemasaran, dan karakteristik teknologi, serta mengetahui proporsi nilai masing-masing faktor daya tarik sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi daya tarik industri kerajinan mutiara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni dengan analisis deskriptif, dan analisis matriks SWOT dengan melakukan pembobotan terhadap faktor strategi internal dalam IFAS *(Internal Strategy Factor Analysis System)* dan faktor strategi

eksternal dalam EFAS *(External Strategy Factor Analysis System)* sehingga diperoleh posisi industri dan rumusan strategi pengembangan industri kerajinan mutiara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri kerajinan mutiara di Kelurahan Karang Pule dapat diklasifikasikan yakni berdasarkan klasifikasi relatif terhadap kinerja pengusaha sehingga diperoleh kelas kategori pengusaha dengan melihat karakteristik-karakteristik kinerja pengusaha yang ada. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menunjukkan karakteristik kinerja pengusaha, yaitu lama karir usaha, modal usaha perbulan, jumlah tempat produksi, jumlah tenaga kerja, jumlah barang dikirim perbulan, jumlah pelanggan tetap, intensitas pembelian barang, dan pendapatan kotor perbulan.

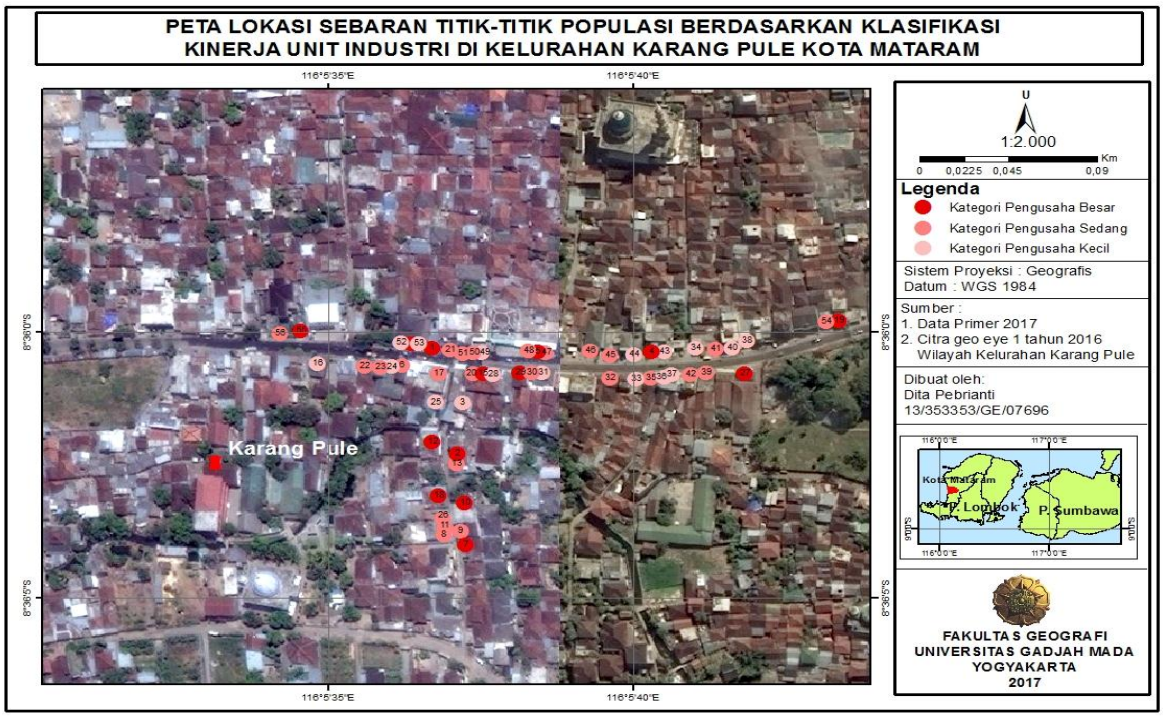
Tabel 1. Rincian Karakteristik Kinerja Pengusaha

No	Karakteristik	Kinerja Pengusaha		
		Kecil	Sedang	Besar
1	Lama karir usaha	1 – 9 tahun	10 – 18 tahun	19 – 28 tahun
	Persentase (%)	30,4	50,0	19,6
2	Modal usaha perbulan	< Rp 7.000.000	Rp 7.000.000 – Rp 14.000.000	>Rp 14.000.000
	Persentase (%)	1,8	50,0	48,2
3	Jumlah tempat produksi	1	2	3
	Persentase (%)	87,5	10,7	1,8
4	Jumlah tenaga kerja	1 – 5 orang	6 – 9 orang	10 – 14 orang
	Persentase (%)	57,1	32,1	10,8
5	Jumlah pengiriman barang	2 – 20 barang	21 – 40 barang	41 – 60 barang
	Persentase (%)	77	14	5
6	Jumlah pelanggan	< 8 orang	8 – 13 orang	>13 orang
	Persentase (%)	58,9	30,4	10,7
7	Intensitas pengiriman	< 4 kali	4 – 7 kali	>7 kali
	Persentase (%)	35,7	55,4	8,9
8	Pendapatan kotor perbulan	Rp 45.000.000 – Rp95.000.000	Rp96.000.000 – Rp147.000.000	Rp148.000.000 – Rp200.000.000

Sumber: Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 1, kinerja pengusaha dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelas kategori pengusaha dengan teknik *scalling*; kategori pengusaha kecil yakni pengusaha dengan nilai total skala < 35,27; kategori pengusaha sedang dengan nilai total skala 35,27 – 56,53; kategori pengusaha besar dengan nilai total skala > 56,53. Diketahui sebanyak 25% pengusaha yang tergolong ke dalam kategori pengusaha besar, 45% tergolong kategori pengusaha sedang, dan 30% tergolong kategori pengusaha kecil.

Adapun peta lokasi sebaran titik-titik populasi berdasarkan klasifikasi kinerja unit industri di kelurahan Karang Pule dapat dilihat pada Gambar 1. Persebaran unit industri kerajinan mutiara ini berada di sepanjang jalan Sultan Kaharudin yang merupakan jalan utama (jalan kolektor) di Kelurahan Karang Pule.



Gambar 1. Peta Lokasi Sebaran Titik-Titik Populasi Berdasarkan Klasifikasi Kinerja Unit Industri di Kelurahan Karang Pule Kota Mataram

Karakteristik usaha industri kerajinan mutiara ini meliputi jenis usaha, modal usaha, lama usaha/karir, aset kepemilikan tempat produksi dan tenaga kerja. Diketahui bahwasanya 75% usaha tergolong ke dalam usaha turun menurun, dan sisanya 25% usaha yang tergolong ke dalam jenis usaha baru. Rata-rata usia usaha/karir industri dari para pengusaha industri kerajinan mutiara ini ialah berusia 10-18 tahun.

Modal usaha tiap bulan yang digunakan oleh para pengusaha ini cukup besar. Secara umum sebesar 50% dari 56 responden membutuhkan modal usaha sebesar antara Rp 7.000.000 hingga 14.000.000 setiap bulannya. Nilai modal usaha ini tergolong ke dalam industri kecil karena mempunyai kekayaan bersih kurang dari Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan (berdasarkan Instruksi Presiden Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah). Namun, untuk industri dengan kategori pengusaha besar menggunakan modal > Rp 14.000.000 setiap bulannya. Hal ini dikarenakan kebutuhan produksi dari industri tersebut lebih banyak.

Jumlah tempat produksi di sentra industri kerajinan mutiara Kelurahan Karang Pule ini beragam, mulai dari yang berjumlah 1 hingga 3 tempat produksi. Diketahui hampir 90% unit industri memiliki jumlah tempat produksi sebanyak 1 tempat produksi yang kepemilikannya secara pribadi. Secara umum industri memiliki tenaga kerja yakni pengrajin sebanyak 1-5 orang dengan rata-rata lama pengalaman kerja 10-18 tahun.

Karakteristik produk industri kerajinan mutiara ini meliputi jenis produk, bahan baku, model, dan harga. Mutiara sebagai bahan baku yang diproses dari industri ini terdiri atas dua jenis, yaitu mutiara air laut dan mutiara air tawar yang dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3. Mutiara air laut yang dikenal dengan *South Sea Pearl* berasal dari Lombok yang dibudidaya sendiri oleh masyarakat lokal di daerah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan mutiara air tawar berasal dari Cina dan merupakan hasil pabrikan.



Gambar 2. Mutiara Air Laut



Gambar 3. Mutiara Air Tawar

Kedua jenis mutiara ini dapat dibedakan dari segi bentuk, warna, dan kualitas. Mutiara air laut memiliki bentuk bulat atau oval dengan permukaan tidak sempurna yang disebut Barok, dan bentuk bulat sempurna yang disebut Super. Ciri warnanya ialah putih dan kuning dengan tampilan lebih berkilau. Sedangkan mutiara air tawar memiliki bentuk pipih dengan ciri warnanya bervariasi. Mutiara air laut memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan mutiara air tawar.

Rata-rata industri kerajinan mutiara lebih menggunakan mutiara air laut sebagai bahan baku utama dalam menghasilkan produk. Para pengusaha melakukan proses produksi berupa bahan mentah dengan bahan baku mutiara yang dikombinasikan dengan bahan-bahan lain yang difungsikan sebagai pengikat mutiara atau *frame*, terdiri dari emas, perak, dan kerang. Adapun jenis model atau motif produk yang dijual oleh masing-masing pengusaha beragama mulai dari perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, liontin, dan anting, bros, tasbih, pelakat, dan hiasan rumah. Berikut adala gambar produk kerajinan mutiara yang ditunjukkan pada Gambar 4, 5, 6, 7, dan 8:



Gambar 4. Perhiasan



Gambar 5. Bros



Gambar 6. Tasbih



Gambar 7. Pelakat



Gambar 8. Hiasan rumah

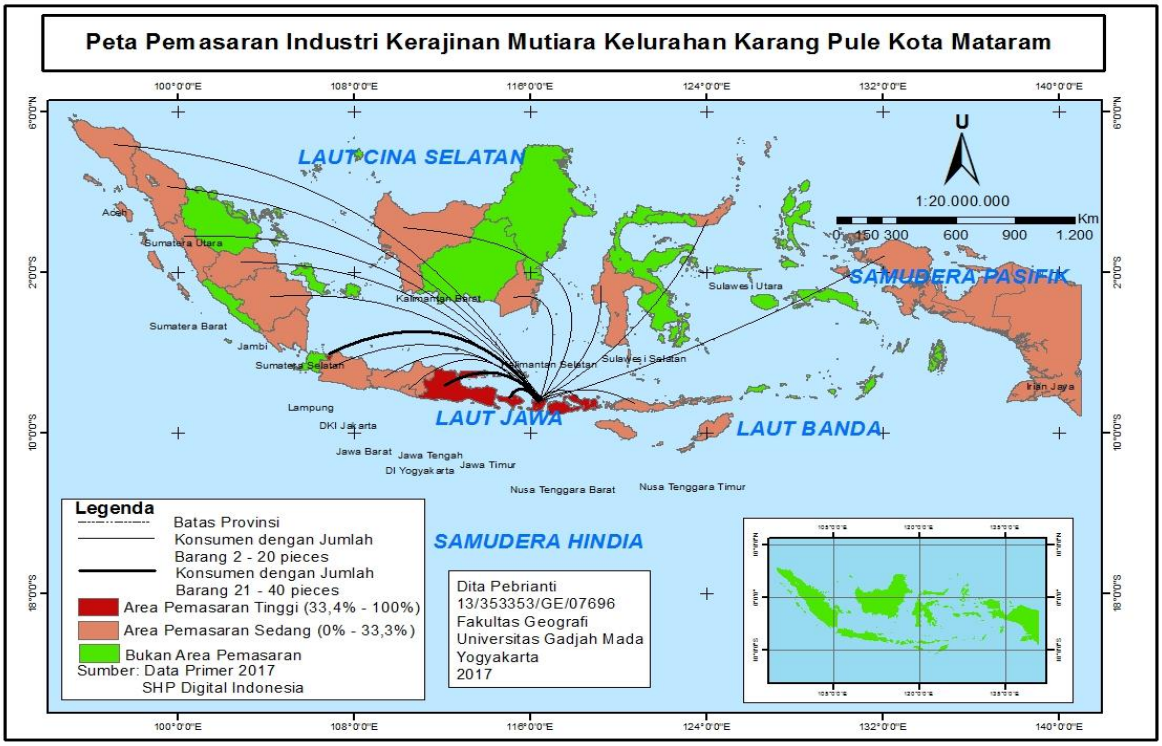
Dominasi produk yang dijual ialah perhiasaan dikarenakan latarbelakang sejarah di mana dahulu kelurahan tersebut sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pande besi dan pande emas yang telah berkembang secara turun temurun. Harga yang dijual untuk masing-masing unit produk beragam tergantung jenis mutiara dan kerang/*frame* yang digunakan. Harga yang ditawarkan baik industri dengan kategori pengusaha kecil, sedang, mapun besar memiliki harga rata-rata produk yang sama yakni < Rp 8.100.000.

Karakteristik pemasaran industri kerajinan mutiara ini meliputi area distribusi pemasaran, usaha pemasaran, jumlah pengiriman barang, jumlah pelanggan, dan intensitas transaksi. Selain melakukan distribusi ke berbagai daerah di dalam negeri,

beberapa diantara pengusaha tersebut diketahui telah melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara, seperti Malaysia, Timor Leste, Australia, dan Hongkong. Kegiatan ekspor ini baru hanya dilakukan oleh 9 dari 56 unit industri kerajinan mutiara yang merupakan industri dengan kategori pengusaha besar. Hal ini dikarenakan masih terkendala pada sistem kegiatan ekspor, seperti biaya ekspedisi yang mahal, ketersediaan garansi, dan waktu pengiriman yang lama, serta masih minimnya informasi yang diperoleh terkait kegiatan ekspor.

Asal daerah pelanggan juga menjadi area pemasaran industri kerajinan mutiara yang tersebar di berbagai kota di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 19 provinsi yang menjadi area pemasaran industri-industri tersebut, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Area pemasaran paling tinggi yakni di kota-kota Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Adapun peta pemasaran industri kerajinan mutiara Kelurahan Karang Pule Kota Mataram ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Peta Area Pemasaran Industri Kerajinan Mutiara Kelurahan Karang Pule Kota Mataram

Usaha dalam memasarkan produk menjadi hal penting dalam bisnis. Berdasarkan Diagram 1 diketahui 80% para pengusaha industri kerajinan mutiara memanfaatkan media sosial sebagai usaha pemasaran produk disamping hanya dengan mengandalkan informasi pelanggan. Hal ini mempengaruhi jumlah pembeli setiap bulannya. Diketahui rata-rata jumlah pembeli berkisar antara 28-55 orang setiap bulannya untuk musim ramai. Musim ramai yang dimaksudkan ialah musim liburan pada saat tahun baru, pra lebaran, dan pasca lebaran. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 pada saat libur tahun baru.

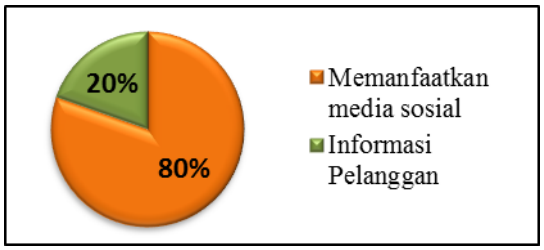


Diagram 1. Jumlah Persentase Usaha Pemasaran

Rata-rata masing-masing industri baik industri dengan kategori pengusaha kecil, sedang, maupun besar mampu melakukan pengiriman barang mencapai 2-20 pieces setiap bulannya. Intensitas pengiriman barang oleh masing-masing industri beragam tergantung pada jumlah pelanggan tetap. Dominan masing-masing industri memiliki jumlah pelanggan tetap < 8 orang dan mampu mengirim barang yakni 4 hingga 7 kali setiap bulannya.

Pendapatan kotor rata-rata industri dengan kategori pengusaha besar mampu mencapai Rp 148.000.000 – Rp 200.000.000 setiap bulannya, sedangkan industri dengan kategori pengusaha sedang dan kecil mampu mencapai Rp 45.000.000 – Rp 95.000.000. Hasil ini diperoleh pada saat penelitian dilakukan pada musim ramai yaitu bulan Januari 2017.

Karakteristik teknologi industri kerajinan mutiara ini meliputi teknologi produksi dan teknologi pemasaran. Dominan pengusaha yang memiliki 1 tempat produksi juga memiliki 1 alat produksi per item, seperti bor mutiara, timbangan, liseng dan penembak, tang dan cepit alit, besi gilik, benang khusus, dan grinder. Rata-rata pengusaha menggunakan *smartphone* sebagai media pemasaran dengan memanfaatkan media *online*.

Kerajinan mutiara sebagai salah satu destinasi wisata belanja kerajinan tentu memiliki daya tarik tersendiri. Menurut Littrell (1994) dalam Moscardo (2004), bahwasanya salah satu kriteria wisatawan melakukan wisata karena tertarik dengan sejarah dan alam, serta mencari cenderamata seni dan kerajinan lokal. Menurut Albayrak, et al (2016) bahwasanya komponen terbesar dari pengeluaran perjalanan wisata oleh wisatawan berasal dari kegiatan belanja baik pada jasa maupun produk yang ditawarkan.

Faktor-faktor yang menjadi daya tarik industri kerajinan mutiara merupakan hal penting untuk dikaji sehingga mengetahui seberapa besar minat pasar dan seberapa besar pengusaha industri ini dalam menarik hati pelanggan. Faktor-faktor daya tarik yang dilihat berdasarkan tanggapan pengusaha terdiri atas 10 faktor, sedangkan berdasarkan tanggapan wisatawan terdiri atas 9 faktor. Adapun faktor-faktor daya tarik tersebut antara lain kualitas produk, keragaman produk, harga produk, kreatifitas produk, pengemasan produk, lokasi yang strategis, peranan teknologi dalam pemasaran, paket wisata, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari tenaga kerja yang terampil, dan tenaga kerja yang sering mengikuti pelatihan.

Nilai skor faktor-faktor daya tarik industri dihasilkan berdasarkan skoring skala likert (skor 1 hingga 5). Berdasarkan faktor-faktor daya tarik tersebut dapat diurutkan faktor-faktor yang memiliki daya tarik tinggi hingga faktor-faktor memiliki daya tarik rendah dilihat dari jumlah skor atau persentase masing-masing faktor baik berdasarkan tanggapan pengusaha maupun wisatawan.

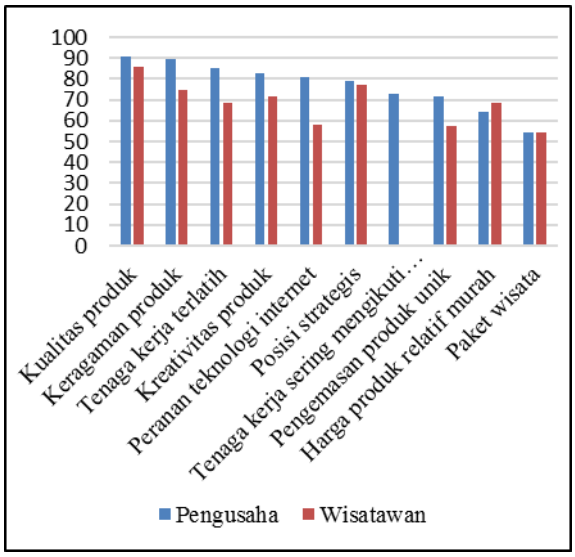


Diagram 2. Tingkatan persentase tanggapan pengusaha dan wisatawan terhadap faktor daya tarik

Berdasarkan Diagram 2 dapat diketahui bahwasanya 86% wisatawan dan 90,7% pengusaha beranggapan bahwa faktor kualitas produk memiliki daya tarik tinggi bagi industri kerajinan mutiara. Hal ini ditunjukkan dengan prilaku beberapa wisatawan yang kembali lagi untuk membeli produk-produk kerajinan mutiara. Sedangkan 54,6% wisatawan dan pengusaha beranggapan bahwa faktor paket wisata berpartisipasi dalam pembuatan kerajinan memiliki daya tarik paling rendah. Karena fasilitas tersebut belum tersedia. Padahal sebagian besar wisatawan sangat ingin jika dapat berpartisipasi baik aktif maupun pasif dalam proses pembuatan kerajinan mutiara dikarenakan keingintahuan wisatawan yang cukup besar dalam proses pembuatan kerajinan terutama wisatawan mancanegara.

Kondisi internal dan kondisi eksternal dari pengusaha industri kerajinan mutiara dapat diketahui melalui hasil wawancara dan kuesioner. Adapun faktor-faktor internal dari kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal dari peluang dan ancaman yang dimiliki para pengusaha industri kerajinan mutiara Karang Pule ialah sebagai berikut:

Faktor Internal Kekuatan *(Strengths)*:
1. Kualitas produk sangat baik.
2. Aksesibilitas sangat baik.
3. Adanya dukungan keterampilan/kearifan lokal yang telah turun temurun.

Faktor Internal Kelemahan *(Weakness)*:
1. Banyak pengusaha yang memiliki modal usaha terbatas.
2. Kualitas pengrajin dalam mendesain produk masih terbatas.
3. Penguasaan dan kemampuan teknologi yang masih relatif lemah.

Faktor Eksternal Peluang *(Opportunities)*:
1. Adanya dukungan dari pemerintah berupa pelatihan kewirausahaan.
2. Minat pasar global terhadap produk kerajinan mutiara cukup tinggi.
3. Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Faktor Eksternal Ancaman *(Threats)*:
1. Ketersediaan bahan baku yang semakin menipis.
2. Banyak pengusaha yang masih menjual mutiara yang berasal dari Cina.
3. Peningkatan persaingan dengan daerah sekitarnya yang juga menghasilkan produk sejenis.

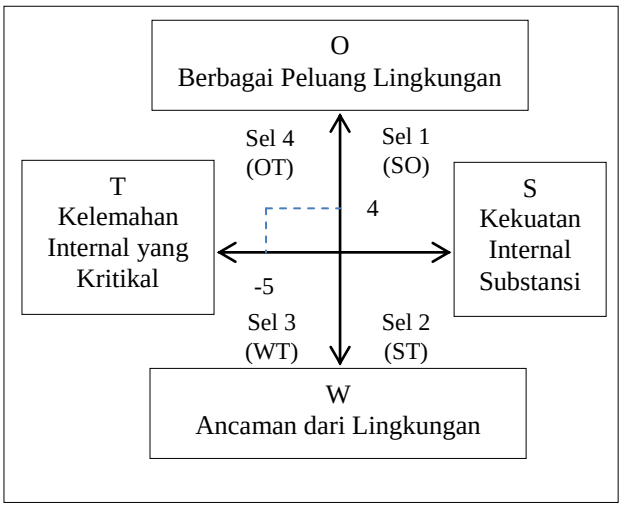
Berdasarkan faktor-faktor di atas, kemudian dilakukan pemberian skor dan bobot pada masing-masing faktor berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan di daerah penelitian. Adanya deskripsi mengenai karakteristik dari

pengusaha memudahkan peneliti dalam memberikan nilai skor dan bobot. Analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Pearce dan Robinson (1998) dalam Arlita (2014). Analisis SWOT dapat digunakan menjadi acuan dalam perumusan strategi (Baiquni, 2004). Pada masing-masing faktor diberi nilai skor yakni dengan rentang nilai 1-10 (Sangat tidak penting – Sangat penting), kemudian diberi nilai bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya berdasarkan faktor lainnya; 1 (sama mendesak), 2 (lebih mendesak), 3 (sangat mendesak).

Faktor yang memiliki nilai skor dan bobot tertinggi dari kekuatan industri kerajinan mutiara Karang Pule ini yaitu faktor kualitas produk yang sangat baik. Untuk kelemahan yaitu industri kerajinan mutiara ini yaitu faktor banyak pengusaha yang memiliki modal usaha terbatas. Faktor peluang yang dianggap lebih penting dan memiliki bobot yang lebih kuat yakni minat pasar global terhadap produk konsumen yang berasal dari luar negeri terhadap produk-produk kerajinan mutiara cukup tinggi. Untuk faktor ancaman yakni ketersediaan bahan baku utama berupa mutiara dan bahan baku lainnya yang merupakan hasil tambang yang berfungsi sebagai *frame*/kerangka dari mutiara yang semakin menipis.

Hasil yang diperoleh dari pemberian nilai skor dan nilai bobot pada masing-masing faktor strategi internal dalam IFAS *(Internal Strategy factor Analysis System)* dan faktor EFAS *(External Strategy factor Analysis System)*, yaitu total skor untuk faktor internal dalam IFAS sama dengan -5 (x), dan total skor untuk faktor eksternal dalam EFAS sama dengan 4 (y). Maka diperoleh posisi relatif industri kerajinan mutiara Karang Pule yakni berada pada nilai sel 4 atau kuadran 4.

Hal ini menandakan bahwa kerajinan mutiara Karang Pule menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, industri ini menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strateginya ialah meniadakan kelemahan internal agar dapat lebih efektif dalam memanfaatkan peluang pasar (Pearche, Robinson, dan Maulana, 1997:232). Artinya, industri ini disarankan untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan cara strategi *turn-around* (berbenah-diri). Adapun upaya yang dilakukan adalah manajemen produk dan kegiatan manajerial seperti memperluas produk pasar, meningkatkan kinerja tenaga kerja, peningkatan akses permodalan, serta mengadakan atraksi wisata dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Berikut adalah gambar posisi relatif industri kerajinan mutiara Karang Pule dalam matriks SWOT yang ditunjukkan pada Gambar 10:



Gambar 10. Posisi Relatif Industri Kerajinan Mutiara Karang Pule

Perumusan strategi untuk masing-masing pengusaha berbeda, sehingga perlu diketahui tipologi masing-masing kategori pengusaha yang disusun berdasarkan ciri

umum dari faktor umum yang mewakili daya tarik seperti jenis dan model produk, dan usaha pemasaran oleh pengusaha sebagai berikut:

a. Kategori pengusaha kecil: Jenis dan model produk yang dijual masih sederhana, dan usaha pemasaran yang dilakukan masih mengandalkan *showroom*.
b. Kategori pengusaha sedang: Jenis dan model produk yang dijual cukup bervariasi dan usaha pemasaran yang dilakukan sudah memanfaatkan media *online*.
c. Kategori pengusaha besar: Jenis dan model produk yang dijual sangat bervariasi dan usaha pemasaran yang dilakukan sering mengikuti pameran.

Berikut rekomendasi strategi untuk masing-masing pengusaha berdadasarkan kategori pengusaha dalam rangka meningkatkan produktivitas industri:

1. Kategori pengusaha kecil:
   Meningkatkan kreatifitas pengrajin, dan mulai memanfaatkan media *online*.
2. Kategori pengusaha sedang:
   Meningkatkan *skill* pengrajin dalam mendesain produk, dan meningkatkan penggunaan teknologi internet dengan membuat *website*.
3. Kategori pengusaha besar:
   Meningkatkan informasi mengenai *trend* pasar terhadap produk, dan lebih sering berpartisipasi dalam pameran.

Peningkatan produktivitas dari masing-masing pengusaha sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi penduduk suatu wilayah tinggi, maka tingkat perkembangan wilayahnya akan semakin maju. Harapannya strategi-strategi tersebut dapat menjadikan kawasan industri kerajinan mutiara Kelurahan Karang Pule memiliki daya tarik wisata belanja bagi wisatawan dan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan mampu meningkatkan perkembangan wilayah Kota Mataram.

IV. KESIMPULAN

1. Karakteristik Industri kerajinan mutiara Kelurahan Karang Pule yaitu industri tersebut merupakan usaha turun temurun, menggunakan bahan baku mutiara air laut, area distribusi pemasaran didominasi di dalam negeri, dan memanfaatkan teknologi internet sebagai usaha pemasaran.
2. Faktor kualitas produk memiliki daya tarik yang tinggi, sedangkan faktor paket wisata berpartisipasi dalam pembuatan kerajinan kurang menjadi daya tarik.
3. Strategi yang secara umum diperlukan yakni strategi *turn-around* (berbenah- diri) karena dalam matriks SWOT menunjukkan posisi industri kerajinan mutiara Karang Pule berada pada kuadran IV atau sel 4. Strategi *turn-around* ini dilakukan dengan manajemen produk dan kegiatan manajerial.

DAFTAR PUSTAKA

Albanjari, H. (2012). *Analisis Rantai Nilai Kerajinan Mutiara, Emas, dan Perak di Kota Mataram, Nusata Tenggara Barat.* Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Albayrak, T., Caber, M., & Comen, N. (2016). Tourist Shopping: The Relationship Among Shopping Attributes, Shopping Value, and Behavioral Intention. *Tourism Management Perspectives*, 98-106.

Arlita, M. N. (2014). *Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Batik Tulis Giriloyo untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Wilayah di Desa Wukirsari, Imogiri Bantul.* Yogyakarta: Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

Baiquni, M. (2004). *Buku Ajar Manajemen Strategis.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Dinas Koperasi dan Perindustrian Kota Mataram. 2017. Keputusan Walikota Mataram Nomor 526/X/2009 tentang Penetapan Klaster Industri Kecil Unggulan Kota Mataram.

Gunawan, Y., & Permadi, A. (2015). Strategi Pengembangan Industri Kecil Carica. *Journal of Economics and Policy*, 45-53.

Instruksi Presiden Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah

Moscardo, G. (2004). Shopping as a Destination Attraction: An Empirical Examination of the Role of Shopping in Tourists Destination Choice and Experience. *Journal of Vacation Marketing*, Vol. 10 No. 4, pp. 294-307.

Muta'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional: Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan.* Yogyakarta: BPFG UGM.

Pemerintah Kelurahan Karang Pule. 2016. Profil Kelurahan Karang Pule 2016. Karang Pule : Kota Mataram.

Porter, E. M., & Maulana, A. (1980). *Strategi Bersaing: Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing (Diterjemahkan oleh Agus Maulana).* Jakarta: Erlangga.

Rangkuti, F. (1998). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Robinson, R., Pearce, J., & Maulana, A. (1997). *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian (Diterjemahkan oleh Agus Maulana).* Jakarta: Binarupa Aksara.

Tambunan, T. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah: Beberapa Isu Penting.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pentingnya Proses Formulasi Peraturan Zonasi Dalam Manajemen Perkotaan

Hettik[1], R. Widodo D. Pramono[1] , Widyasari H. N.[1]
[1]*Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*
Email: hettik21@yahoo.co.id; pramono.wid@ugm.ac.id; widyasari.hn@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan guna lahan yang cepat khususnya di perkotaan, mendesak kebutuhan akan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai instrumen perijinan bagi tujuan ini, Indonesia menuju penggunaan sistem regulatori dengan memperkenalkan peraturan zonasi. Namun pada prakteknya, ditemukan permasalahan dimana peraturan zonasi seringkali masih diperlakukan sebagai discretionary system. Salah satu penyebabbya adalah sulitnya mnyusun materi sebagai peratuaran yang dapat diterima semua pihak dan dapat diperlakuakn seara konsisten. Makalah ini bertujuan untuk menggambarkan proses formulasi peraturan zonasi dan permasalahan yang menghambat penerapan peraturan zonasi sebagai regulatory system dengan pendekatan deskriptif eksploratif melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan zonasi. Hasil makalah menunjukkan bahwa kualitas proses formulasi peraturan zonasi mempengaruhi kualitas penerapan peraturan zonasi dalam management perkotaan. Selama ini belum ada pembahasan penyelesaian regulatory dari sisi proses formulasi peraturan zonasi.

Kata kunci : peraturan zonasi, regulatory system, pengendalian pemanfaatan ruang, manajemen perkotaan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan guna lahan di perkotaan, mendesak kebutuhan akan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Di dunia,dikenal ada dua model sistem penataan ruang yaitu *regulatory system* dan *discretionary system*. Menurut Booth (1996), *regulatory systems* didasarkan pada kebutuhan untuk menetapkan hak dan menciptakan kepastian, sedangkan *discretionary systems* dibentuk oleh keinginan untuk mencapai respon yang fleksibel terhadap pembangunan di masa depan.

Roberts (1998) mengkritisi berbagai permasalahan dalam *regulatory system*, terutama dalam hal interaksi sistem yang seringkali overlap antara rencana pembangunan, kesepakatan perencanaan, pengendalian dan penegakan pembangunan; antara kebijakan perencanaan regional dengan rencana pembangunan, antara peran dan nilai keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, dan antara rencana pembangunan dengan implementasi, sehingga diperlukan review terhadap sistem secara menyeluruh.

Disisi lain, dilema penerapan peraturan zonasi sebagai perencanaan hukum (*planning law*) juga diungkapkan oleh Morgan (2012). Bahwa dalam hukum tidak dikenal kebijaksanaan (*discretion)*, pelaksanaan kekuasaan administratif disamakan dengan kesewenang-wenangan dalam penerapannya, sehingga seringkali mengabaikan beberapa kondisi seperti kepentingan pemilik lahan, hubungan dengan lingkungan budaya, kriteria estetis dan ideologis subyektif.

Sebagai instrumen perijinan, Indonesia menuju penggunaan sistem regulatori dengan memperkenalkan peraturan zonasi sebagai teknik manajemen pertumbuhan. Mengapa Indonesia menggunakan *regulatory system*? Sejak reformasi pada tahun 1997 yang diikuti otonomi daerah pada tahun 1999, ada perubahan pandangan masyarakat akan transparansi pemerintah. Mungkin hal ini juagalah yang mendorong

berubahnya sistem penataan ruang dengan lahirnya UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sebagaimana diungkapkan Prawiranegara (2014), pada *regulatory system*, semua jenis rencana tata ruang ditetapkan atau disahkan menjadi produk hukum. Pemanfaatan ruang sebisa mungkin didasarkan pada kepastian hukum. Meskipun pada rencana wilayah yang luas seperti RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW kabupaten, rencana tata ruang masih dominan sebagai rencana program pembangunan terutama infrastruktur. Pola ruang yang ditetapkan dalam rencana-rencana makro ini masih bersifat makro dan tidaklah bisa menjadi dasar perijinan guna lahan mikro. Baru pada rencana rinci (RDTR), rencana guna lahan yang sudah bersifat mikro dapat menjadi dasar perjinan. Pada skala ini pengendalian pemanfatan ruang di dasarkan pada peraturan zoning yang bersifat *regulatory*.

Regulatory system seharusnya menciptakan kepastian,namun pada praktiknya seringkali ditemukan ketidakpastian. Indikasinya adalah masih seringnya pengambilan keputusan perijinan berlaku seperti discretionary system. Hal ini terjadia pada banyak kasus karena adanya kesalahan atau kekurangan dalam substansi peraturan zonasi itu sendiri. Dalam kasus yang seperti ini pengambilan keputusan yang seharusnya tinggal mencocokkan dengan sustansi peraturan zonasi, terpaksa dilakukan melalui forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) lagi. Kasus-kasus ini menunjukkan masih adanya keraguan penerapan *regulatory system* dalam proses formulasi sampai dengan tahap implementasi.

Tulisan ini untuk menggambarkan permasalahan dalam proses penyusunan substanasi peraturan zonasi. Lingkup wilayah penelitian dalam tulisan ini yaitu Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Wilayah penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan administrasi, lokasi, karakteristik sama, memiliki permasalahan tata ruang yang hampir sama, serta telah memiliki dokumen rencana tata ruang berupa peraturan zonasi yang telah diterapkan dalam perizinan.

Hasil penelitian diharapkan menggambarkan variabel-variabel kontekstual yang dapat menmpengaruhi kualitas dan konsistensi penerapan peraturan zonasi.

II. METODE

A. Pendekatan penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif dengan membandingkan dua kasus pada konteks geografis yang relatif sama namun dengan penyusun yang berbeda konteks sosiologis kepemeirintahannya. Kedua kasus adalah dua kecamatan yang berdampingan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Unit amatan adalah proses formulasi peraturan zonasi yang dilakukan oleh dua kelompok penyusun. Kajian dilakukan dengan menggambarkan atau memaparkan proses yang dilakukan, kondisi yang menjadi pertimbangan, suasana, peristiwa, serta kegiatan selama proses penyusunan. Bersamaan dengan proses deskripsi, secara eksploratif juga dilakukan untuk menggali tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu untuk mengetahui suatu permasalahan.

B. Metode pengumpulan dan analisis data

Data dikumpulkan dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam terhadap delapan orang narasumber dari pemerintah dan konsultan perencana sebagai triangulasi data sekunder. Sumber sekunder diperoleh dari survei instansional ke Bappeda dan DPU kedua kabupaten.

Variabel yang digunakan yaitu kesesuaian tahapan, kesesuaian waktu, kesesuaian kualifikasi penyusun, kepastian kebijakan, persamaan interpretasi penetapan zona/ subzona, persamaan interpretasi nomenklatur kegiatan, dan persamaan interpretasi penetapan derajat ITBX.

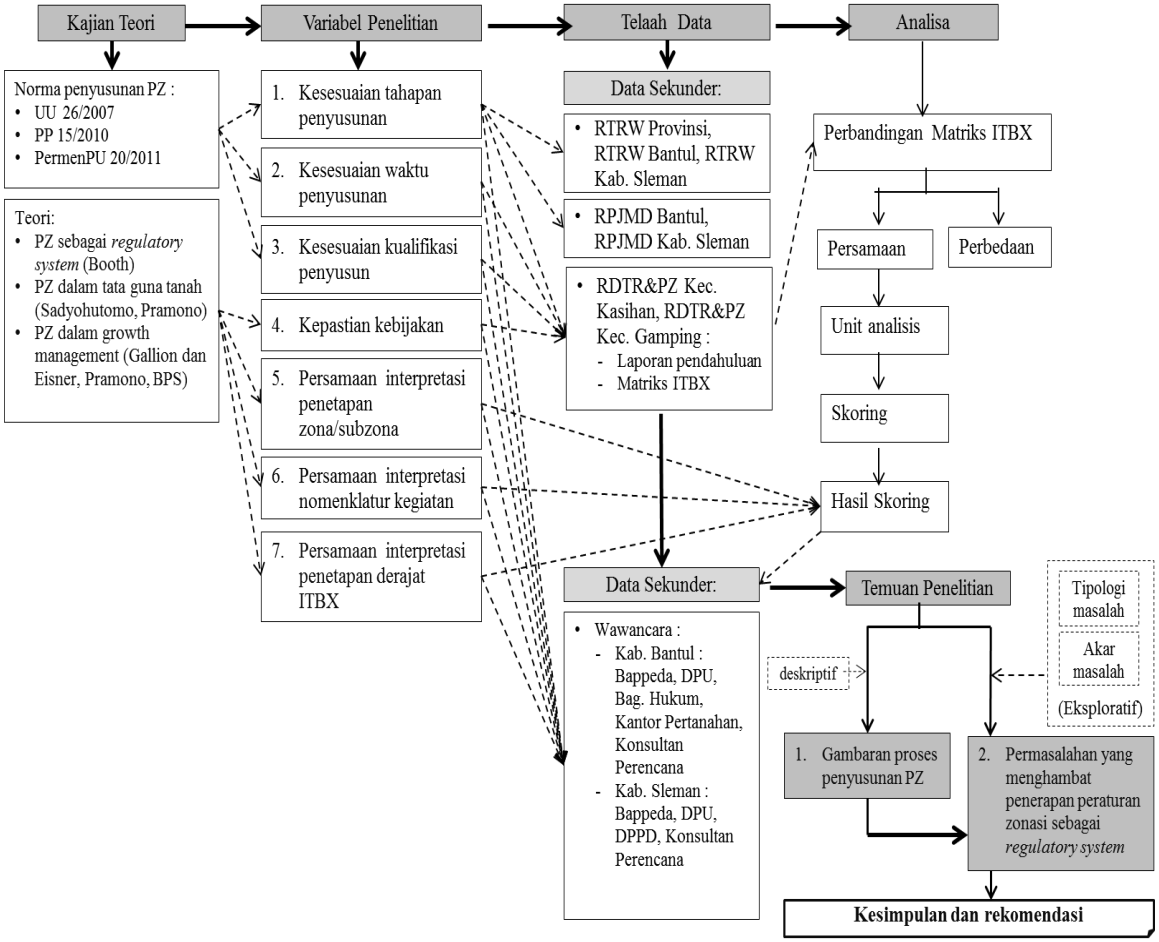
Hasil variabel persamaan persepsi dalam hal penentuan zona, nomenklatur kegiatan, dan ketentuan ITBX diperoleh dari perbandingan rancangan matriks ITBX Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Gamping yang kemudian crosscek ke masing-masing penyusun melalui wawancara. Proses perbandingan dan hasil skoring dijabarkan menggunakan unit analisis persamaan zona, zubzona, dan kegiatan kedua peraturan zonasi.

Tabel 1 Persamaan Klasifikasi Zona, Subzona, dan Jenis Kegiatan sebagai Unit Analisis

	Kec. Kasihan	**Kec. Gamping**	**Persamaan**	**Keterangan**
Klasifikasi Zona	9 zona	9 zona	7 zona	unit analisis zona
Klasifikasi Subzona	34 subzona	11 subzona	7 subzona	unit analisis sub zona
Jenis Kegiatan	150 kegiatan	134 kegiatan	69 kegiatan	unit analisis kegiatan

Sumber : Hasil analisis, 2017

Analisa temuan penelitian dirumuskan melalui tipologi masalah secara eksploratif untuk menemukan hubungan sebab akibat antar temuan penelitian sampai diperoleh akar masalah. Secara lengkap digambarkan melalui gambar tahapan penelitian berikut.



Sumber : Hasil Analisis, 2017

Gambar 1. Tahapan Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Secara umum kedua proses di kedua Kabupaten telah mengikuti pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ). Namun demikian proses penyusunan Peraturan Zonasi (PZ) Kecamatan Kasihan menunjukkan proses yang lebih lengkap dibanding Kecamatan Gamping. Proses penyusunan PZ Kecamatan Kasihan dilanjutkan ke proses penetapan perda meskipun sampai sekarang belum selesai. Proses penetapan membutuhkan waktu lama terutama pada proses persetujuan substansi dan persetujuan peta oleh BIG. Sedangkan PZ Kecamatan Gamping tidak dilanjutkan penetapan perda karena peta yang digunakan belum baku dan ada keraguan proses persetujuan lama di BIG.

Penelitian dapat mengungkap bahwa sebenarnya telah ada komitmen dari kedua kabupaten untuk melegalisasi RDTR dan PZ, ditunjukkan dengan ditetapkannya indikator perda rencana tata ruang dalam RPJMD. Namun jika dibandingkan, ada tingkat keberanian berbeda dari kedua kabupaten. Kabupaten Bantul lebih berani dalam melegalisasi RDTR dan PZ dibanding Kabupaten Sleman. Hal ini ditunjukkan oleh dua hal, (1) ditetapkannya indikator perda rencana tata ruang dalam indikator kinerja untuk Kabupaten Bantul sedangkan Kabupaten Sleman hanya pada indikator program, dan (2) Target indikator Kabupaten bantul lebih besar yaitu 100% pada tahun 2021 dan 70% pada tahun 2016, sedangkan Kabupaten Sleman 2 buah perda pada tahun 2021 dan 0 perda pada tahun 2016.

Meskipun belum dapat dilegalkan sebagai Perda, kedua PZ sama-sama telah digunakan untuk dasar perijinan pemanfaatan ruang. Pengaturan dalam RDTR dan PZ dianggap lebih detil dan jelas dibanding hanya menggunakan acuan perda RTRW yang memiliki skala peta rencana lebih besar.

Kesulitan pengambilan keputusan subtantif dalam penyusunan PZ ditunjukkan dengan sulitnya menjalankan prosedur sesuai waktu yang dipersyaratkan. Waktu yang dialokasikan kedua kabupaten lebih pendek 4-7 bulan dari waktu yang seharusnya dialokasikan dikarenakan ada pembatasan tahun anggaran. Hal ini berakibat waktu yang dialokasikan menjadi belum efektif, selain belum semua substansi terbahas (khususnya matriks ITBX), ada keterbatasan kemampuan penyusun untuk menyelesaikan PZ dalam waktu tersebut.

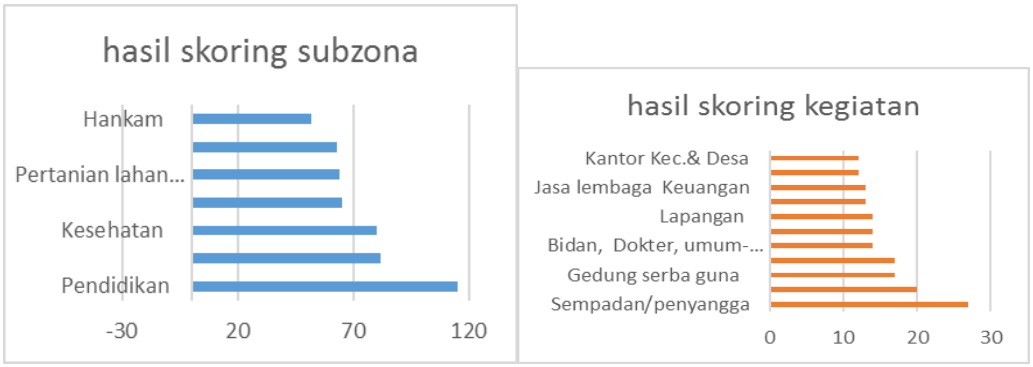
Karena keterbatasan waktu dan terbatasnya kualitas SDM yang terlibat salah satu penyebab belum tuntas terbahasnya PZ. Kedua kecamatan belum dapat menghasilkan kualifikasi penyusun PZ sesuai dengan pedoman, Beberapa kualifikasi subtansi yg belum tercapai adalah ahli kependudukan, ahli ekonomi wilayah, ahli kelembagaan, dan ahli hukum tata ruang. Hal ini disebabkan keterbatasan tenaga ahli yang dapat diakses di daerah dan keterbatasan alokasi anggaran untuk tenaga ahli.

Masih belum sesuainya kualifikasi ini membuat kepastian hukum dalam implementasi substansi pengaturan dalam PZ. Di Kecamatan Kasihan, PZ terus berubah seiring terjadinya raqgam kasus permohonan ijin oleh masyarakat. Sedangkan di Kecamatan Gamping PZ tidak mengalami perubahan, namun bukan karena tidak ada kasus, melainkan kewenangan pada saat itu PZ disusun oleh Bappeda sedangkan mulai tahun 2015 kewenangan penyusun berpindah ke DPU, dan telah direncanakan direvisi pada tahun 2017.

Kurangnya kualitas kualifikasi mendorong adanya multiinterprestasi dari substansi. Dan masalah yang lebih pelik adalah tidak adanya persamaan cara interpretasi dalam penentuan zona, subzona, dan nomenklatur kegiatan oleh kedua penyusun PZ. Hal ini ditemukan dari perbandingan kedua rancangan matriks dan zoning map. Dalam hal penetapan zona dan subzona terdapat perbedaan penetapan

2 zona dan 31 subzona, juga ada perbedaan dalam format peta, baik pewarnaan, maupun penulisan kode subzona. Begitu juga dalam hal penetapan nomenklatur kegiatan, dari 150 jenis kegiatan dalam PZ Kecamatan Kasihan dan 134 jenis kegiatan dalam PZ Kecamatan Gamping, ditemukan hanya 69 jenis kegiatan yang sama.

Meskipun perbedaan penetapan oleh dua administrasi boleh berbeda, namun mempertimbangkan kedua lokasi merupakan kawasan yang saling berbatasan dan memiliki karakteristik wilayah yang hampir sama, maka semestinya perbedaan yang terjadi tidak signifikan. Perbedaan signifikan menunjukkan indikasi perbedaan cara interpretasi.



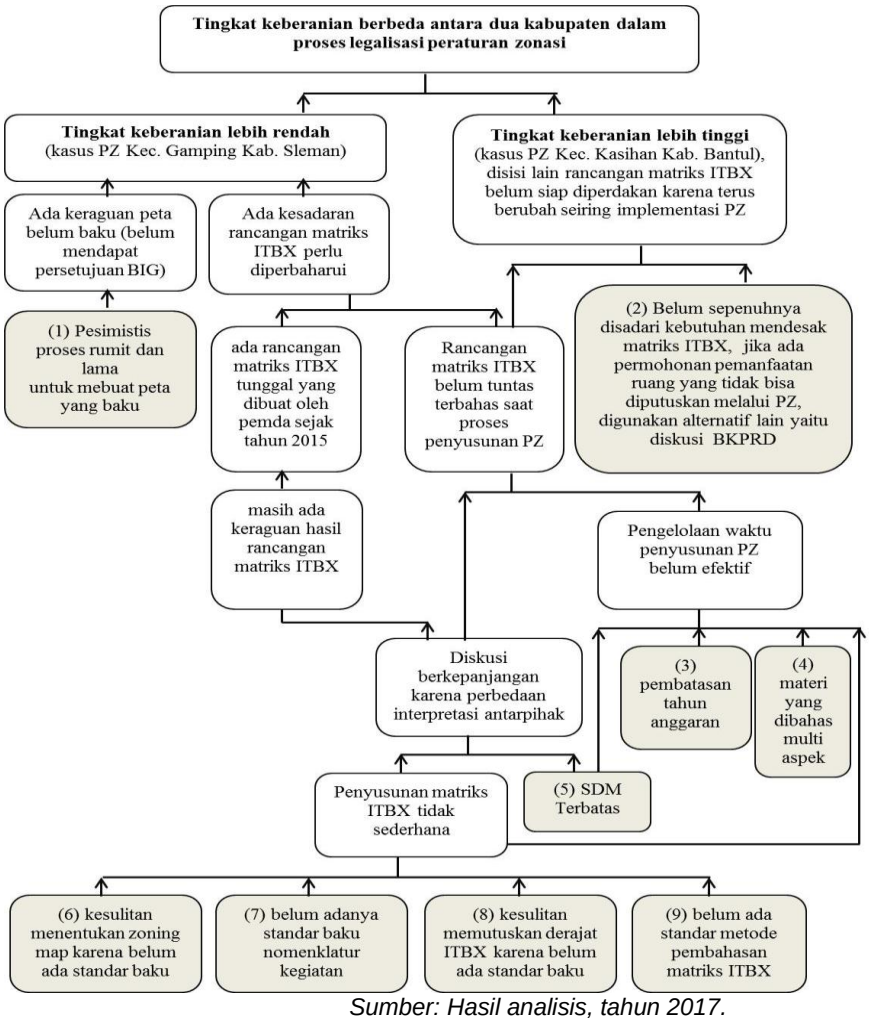
Sumber : Hasil analisis, 2017

Gambar 2. Hasil skoring penetapan ITBX berdasarkan sub unit kegiatan dan suzona

Dalam gambar di atas, terlihat peringkat teratas hasil skoring perbandingan dua rancangan matriks ITBX berdasarkan unit analisis subzona dan kegiatan, semakin besar nilai skoring, maka semakin besar perbedaan. Nilai terbesar yaitu 120 dari nilai normal 0 atau berbeda 120%. Hasil tersebut menunjukkan perbedaaan yang besar, yang artinya terjadi perbedaan interpretasi dalam menetapkan derajat ITBX oleh kedua penyusun PZ.

Dari hasil temuan, diperoleh beragam masalah antara lain tingkat keberanian berbeda dalam proses legalisasi peraturan zonasi, proses rumit dan lama untuk membuat peta yang baku, ada kesadaran rancangan matriks ITBX perlu direvisi, rancangan matriks ITBX terus berubah selama implementasi, rancangan matriks belum tuntas terbahas selama proses penyusunan, belum sepenuhnya disadari kebutuhan mendesak peraturan zonasi, pengelolaan waktu belum efektif, pembatasan tahun anggaran, materi yang dibahas multi adspek sementara kualitas SDM terbatas, kesulitan menentuksn zoning map karena belum ada standar baku, belum adanya standar baku nomenklatur kegiatan, pesimistis proses rumit dan lama untuk membuat peta yang baku, dan kesulitan memutuskan derajat ITBX karena belum ada standar baku.

Dari temuan permasalahan-permasalahan di atas, dilakukan analisis hubungan sebab akibat antar masalah-masalah tersebut yang dapat di gambarkan sebagai berikut.



Sumber: Hasil analisis, tahun 2017.

Gambar 3. Bagan Tipologi Masalah

B. Pembahasan

Ada beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya tingkat keberanian menjadi PZ sebagai produk hukum positif yang secara konsisten dapat diimplementasikan. Permasalahan tersebut antara lain (1) pesimistis proses rumit dan lama untuk mebuat peta yang baku, (2) belum sepenuhnya disadari kebutuhan mendesak matriks ITBX, (3) pembatasan tahun anggaran, (4) materi yang dibahas multi aspek, (5) kualitas SDM Terbatas, (6) kesulitan menentukan zoning map karena belum ada standar baku, (7) belum adanya standar baku nomenklatur kegiatan, dan (8) kesulitan memutuskan derajat ITBX karena belum ada standar baku.

Banyak masalah yang berasal dari faktor eksternal yaitu lamanya konsultasi peta di BIG dan belum adanya standar baku untuk menetapkan zoning map, nomeklatur kegiatan, dan derajat ITBX.

Terkait pemetaan, sebagaimana terlihat pada pohon masalah, permasalahan teknis di mulai dari lama dan rumitnya proses untuk membuat peta yang baku berdasar pada kewajiban konsultasi peta rencana tata ruang ke Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tertuang dalam PP No. 8 tahun 2013 pasal 7. BIG mengkoreksi peta dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk semua rencana tata ruang, termasuk RDTR dan PZ. Di Negara lain, proses konsultasi peta tidak ada dalam tahapan penyusunan tata ruang, seperti pada tahapan dari FAO (1993) dan Hagman (1975). Menurut Akbar (2012), komitmen pemerintah diperlukan melalui

dukungan pendanaan dan penerapan standarisasi data yang dapat saling dipertukarkan sehingga waktu penyusunan PZ lebih efektif.

Secara internal permasalahan terkait dengan SDM. Proses pembahasan substansi multi aspek dalam PZ sangat terkendala pada SDM di pemerintah daerah yang terbatas secara kualitas. Terkait hal ini FAO (1993) menyatakan bahwa dalam tim perencanaan idealnya terdiri dari tim ahli khusus yang beragam. Syarat ini masih agak sulit disediakan di daerah jika tanpa harus bekerja sama dengan misalnya perguruan tinggi. Akbar (2012) juga menyatakan bahwa kemampuan sumberdaya aparatur pengambil keputusan manajemen tata ruang pada institusi yang berwenang di daerah belum mampu menunjukkan standar kompetensi tinggi. Prawiranegara (2014) menyatakan secara spesifik bahwa perencanaan komprehensif memiliki keterbatasan dalam hal data dan kemampuan perencana, dalam hal ini pada kualitas SDM penyusun.

Kombinasi antara absennya standar dengan kualitas SDM membuat diskusi berkepanjangan. Dalam proses diskusi seringkali terjadi perbedaan interpretasi antar pihak penyusun PZ. Pembahasan juga tidak tuntas terbahas hingga waktu penyusunan berakhir sehingga kebijakan terus berubah selama implementasi Hal ini tidak memenuhi prinsip kepastian dalam konsep *regulatory system* menurut Booth (1996), seharusnya sistem ini didasarkan pada kebutuhan untuk menetapkan hak dan menciptakan kepastian.

Hal yang mendasar, adanya perbedaan interpretasi menunjukkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan matriks ITBX , Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman baku dalam menentukan zona dan subzona (zoning map), nomenklatur kegiatan, dan menentukan ITBX. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk keseragaman pengklasifikasian lapangan usaha yang bisa dijadikan standar baku klasifikasi kegiatan. Selama ini, KBLI hanya digunakan dalam perijinan usaha dan belum dimanfaatkan untuk keperluan rencana tata ruang.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam proses penyusunan peraturan zonasi diatas masih terbatas pada permasalahan teknis, belum direview secara komprehensif dengan perencanaan pembangunan lainnya seperti disampaikan oleh Roberts (1998). Tidak mengherankan apabila dikemudian hari nanti dalam penerapan peraturan zonasi ditemukan permasalahan-permasalahan misalnya overlap program/kegiatan ketika dihadapkan dengan perencanan pembangunan lainnya.

Kebijaksanaan (*discretion)* mungkin diperlukan dalam penerapan peraturan zonasi apabila untuk mengakomodasi kondisi atau situasi tertentu yang belum diatur dalam peraturan zonasi sebagai akibat dari proses pembahasan yang belum tuntas. Menguatkan argumen Morgan (2012) bahwa perlu dilakukan suatu perubahan untuk mengubah sistem peraturan yang dibangun setidaknya sebagian dalam situasi dan kriteria tertentu.

IV. KESIMPULAN

Hubungan antara kualitas proses formulasi dengan kualitas hasil (output) merupakan kunci efektifitas implementasi peraturan zonasi. Selama ini belum ada penyelesaian *regulatory* efektif dari sisi proses penyusunan sehingga perlu dukungan peningkatan kualitas proses formulasi peraturan zonasi terutama di perkotaan yang memiliki tingkat perkembangan guna lahan tinggi.

Permasalahan dalam proses formulasi peraturan zonasi (PZ) terutama dalam hal perbedaan interpretasi antar pihak berpengaruh pada kualitas PZ yang dihasilkan. Masalah kualitas SDM mendorong adanya multiinterprestasi dari substansi. Penyebab terpenting yaitu belum adanya standar baku yang dapat diacu oleh pemerintah daerah

untuk formulasi penetapan matrix ITBX (*zoning matrix*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Pusat Statistik. (2015). *Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Booth*, Philip. (1996). Zoning or Discretionary Action: Certainty and Responsiveness in Implementing Planning Policy*. Journal of Planning Education and Research Volume 14 : page 103-112.

Djasriain, A., Eka; Prawiranegara, Mirwansyah. (2014). *Hukum dan Administrasi Perencanaan*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

FAO. (1993). *Guidelines for Land Use Planning 5.* FAO, Rome.

Hagman, Donald G. (1975). *Urban Planning and Land Development Control Law*. West Publishing Co. Minnesota.

Indrati, F., Maria dkk. 2015. *Ilmu Perundang-Undangan*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Kelly, Eric Damian. (1993). *Managing community Growth: Policies, Techniques, and Impacs.* Praeger, Westport, Connecticut.

Sadyohutomo, Mulyono. (2016). *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Pramono, W.D., Retno. (2009). *Naskah Akademis Rancangan Kebijakan Dominasi Fungsi Penatagunaan Tanah Kabupaten Sleman.* Pemerintah Kabupaten Sleman.

Jurnal :

Akbar, Roos. (2012). *Data dan Informasi dalam Proses dan Implementasi Perencanaan Tata Ruang*. Pidato Ilmiah Guru Besar Institut *Teknologi Bandung. Balai Pertemuan Ilmiah ITB.*

Morgan, Ed. (2012). *The Sword in The Zone: Fantasies of Land-Use Planning Law*. The University of Toronto Law Journal, Vol. 62, No. 2 (Spring 2012). University of Toronto Press.

Patta, Johny. (1995). *Manajemen Perkotaan Dalam Pembangunan Perkotaan Di Indonesi.* Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Nomor 18/April 1995. Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Robert, Trevor. (1998). *Viewpoint: The Statutory System of Town Planning in the UK: A Call for Detailed Reform*. The Town Planning Review, Vol. 69, No. 1 (Jan., 1998), pp. iii-vii. Liverpool University Press.

Peraturan perundang-undangan:

Kementerian Pekerjaan Umum. (2011). *Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi*. Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Jakarta.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.* Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta

STRATEGI PERMUKIMAN KEMBALI WARGA DI LOKASI SQUATTER DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BUDAYA MASYARAKAT KAMPUNG PULO

Marilyn Larahati[1], Deva Fosterharoldas Swasto[2], Leksono Subanu[2]
[1]Mahasiswa, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada
[2] Dosen, Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Email : lara.hatie@gmail.com; devafswasto@yahoo.com; lsubanu@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Permukiman Kampung Pulo adalah kawasan yang dikelilingi oleh kawasan perdagangan Jatinegara yang sangat strategis. Dalam perkembangannya, kawasan permukiman yang ada di bantaran Kali CIliwung ini terus mengalami peningkatan kebutuhan permukiman sehingga menyebabkan kepadatan, penurunan kualitas lingkungan permukiman dan berakibat pada menyempitnya lebar sungai sehingga terjadinya banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan kebijakan demi kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, dalam implementasinya menemui kendala. Akhirnya, pada tahun 2015, kebijakan permukiman kembali warga Kampung Pulo ke Rumah Susun Jatinegara Barat berhasil dilakukan. Sampai saat ini (2017) warga yang dipindahkan masih bertahan di lokasi permukiman yang baru. Menjadi pertanyaan penelitian ini, bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 sehinggakebijakan tersebut berhasil diimplementasikan dan faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan tersebut?
Menggunakan metode penelitian deduktif dengan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dapat menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan permukiman kembali di Kampung Pulo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan 3 jenis strategi antara lain strategi kepastian tempat tinggal dalam artian memberikan rumah sebagai tempat berlindung dengan kejelasan status tempat tinggal, strategi pengawasan yang dilakukan dengan memberikan KTP yang beralamatkan rusun sehingga unit tidak dapat dipindahtangankan dan strategi pelayanan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalampeningkatan kesejahteraan dengan kemudahan akses fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, dan fasilitas kesehatan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari sisi internal dan sisi eksternal. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dari sisi internal adalah karakteristik dari pimpinan dalam hal ini adalah pimpinan daerah sedangkan dari sisi eksternal adalah aspek keamanan bermukim.

Kata Kunci : Permukiman Kembali, Implementasi, Kebijakan Publik, Rumah Susun

BAB I. PENDAHULUAN

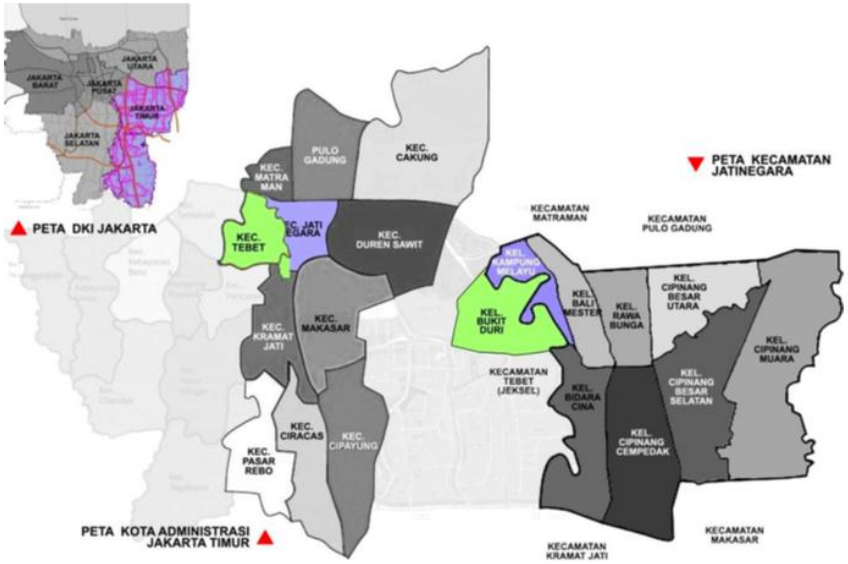
A. Latar Belakang

Permasalahan permukiman di DKI Jakarta bukan sekedar masalah kuantitas, tetapi juga kualitas. Keterbatasan perumahan yang disediakan pemerintah dan tidak terjangkaunya harga perumahan yang disediakan oleh pihak swasta membuat masyarakat yang berpenghasilan rendah akhirnya memilih untuk tinggal di bantaran sungai.Permukiman di bantaran sungai tersebut kemudian menimbulkan masalah-masalah lainnya seperti penyempitan lebar sungai yang berimbas pada banjir, penurunan kualitas lingkungan permukiman yang kemudian berimbas pada masalah kesehatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta melakukan intervensi melalui kebijakan-permukiman kembali. Namun, kebijakan tersebut menemui kendala-kendala pada tahap implementasinya. Pada tahun 2015,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya berhasil melaksanakan kebijakan permukiman kembali bagi warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kampung Pulo merupakan salah satu kawasan permukiman padat penduduk di pinggiran Sungai Ciliwung yang setiap tahun selalu menjadi langganan banjir Kota Jakarta. Sesuai dengan namanya yang terinspirasi dari daratan yang seolah-olah terpisah dari daratan membentuk pulau ketika air di Sungai Ciliwung naik. Penelitian ini menggambarkan, Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam usaha meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi banjir yang berulang setiap tahunnya telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah kebijakan permukiman kembali warga yang ada di pinggiran Sungai Ciliwung.

B. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi pembahasan pada kebijakan yang ada di dokumen perencanaan dan implementasinya pada penduduk Kampung Pulo yang direlokasi ke Rumah Susun Jatinegara Barat yang secara langsung merasakan implementasi kebijakan permukiman kembali. Sedangkan untuk batasan temporalnya adalah implementasi kebijakan permukiman kembali yang dilakukan pada tahun 2015 dengan batasan lokasi penelitian adalah sebagai berikut :



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, 2016.

Gambar 1. Peta Lokasi

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 tersebut dapat secara cepat dan tepat menangani implementasi pelaksanaan kebijakan permukiman kembali**,** strategi apa yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar warga dapat direlokasi dan faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi mengenai pemecahan masalah dalam usaha permukiman kembali warga relokasi kepada Pemerintah Daerah yang menghadapi permasalahan yang sama, memberikan informasi untuk perumusan kebijakan permukiman yang cepat dan tepat bagi terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik di masa yang akan datang

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Strategi

Berdasarkan *Oxford Dictionary* strategi adalah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang atau tujuan secara keseluruhan[1]. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi*/stra·te·gi/* /stratégi (*n)*adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa (-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai[2]. Michele De Certeau dalam bukunya yang berjudul *The Practice of Everyday Life* dalam Indriani (2015)menyimpulkan bahwa strategi adalah hal yang dilakukan oleh si produsen untuk memberlakukan suatu hal. Menurut Peter Ducker dalam Nugroho (2004), Strategi termasuk dalam arti kata manajemen, yaitu aktifitas yang dilakukan, sebuah proses, dan dimensi di mana inovasi dibangun untuk mencapai sebuah prestasi terbaik. Memang bersifat politik karena berhubungan dengan alokasi dan realokasi sumber sumber produktif dari suatu organisasi.

B. Pengertian Permukiman

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna (Kamus Tata Ruang Tahun 1997). Sedangkan permukiman kembali adalah suatu usaha untuk memindahkan penduduk dari suatu lokasi yang tidak layak lagi ke permukiman baru karena alasan tertentu. Pemukiman kembali atau *resettlement* adalah dari kata *settlement* yang berarti menurut *Oxford learner's pocket dictionary* (1995) :

> "*property given to a person, process of settling people in a place, place where they settle (make one's permanent home in a place)*".

Sedangkan menurut Asian Development Bank (1999):

> *"Involuntary resettlement is "Development project results in unavoidable resettlement losses, that people affected have no option but to rebuild their lives, incomes and asset bases elsewhere".*

C. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan bukan sekedar suatu aturan tetapi lebih dari itu kebijakan perlu dipahami secara utuh dan benar sehingga apa yang diharapkan dari akhir suatu kebijakan dapat tercapai. Itulah sebabnya Anderson (1984) berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Dalam implementasi kebijakan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya antara lain : sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, karakteristik implementor, dan standar kebijakan.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif melalui pendekatan gabungan *(mix method)*[3]. Penelitian deduktif adalah penelitian yang menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan instrumen untuk membangun hipotesis

[1] https://en.oxforddictionaries.com/definition/strategy, di akses tanggal 06/04/2017
[2] http://kbbi.web.id/strategi, di akses tanggal 06/04/2017
[3] Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi' (Dalam Indriani, 2015): Penelitian gabungan adalah penelitian yang berorientasi pada tindakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam proses pelaksanaan suatu penelitian yang sama. Penelitian gabungan merupakan suatu prosedur untuk pengumpulan data, analisis data secara sekuensial menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif atau sebaliknya.

serta sebagai dasar dalam menentukan masalah penelitian[4]. Menggunakan pendekatan gabunganyaitu kuantitatifdan kualitatif, artinya penelitian penelitian ini menggunakan data-data berupa angka-angka dan menganalisisnya secara matematis dan statistik[5] sekaligus mengeksplorasi dan memahami makna yang – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan[6].

Penelitian ini menggunakan format deskriptif studi kasus. Format deskriptif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Penelitian ini menggunakan kasus tertentu sebagai objek penelitian, atau sebuah wilayah sebagai objek penelitian sehingga bersifat kasuistik terhadap objek penelitian tersebut[7].

Populasi dari penelitian ini merupakan seluruh penduduk yang ada di Rumah Susun Jatinegara Barat yang berjumlah 481 KK. Dengan jumlah sampel sebanyak 84 orang. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik *accidental sampling* (sampling kebetulan).

B. Variabel Penelitian

Adapun variabel dari penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu variabel permukiman untuk melihat faktor dari sisi penerima manfaat dan variabel kebijakan untuk melihat faktor dari sisi pelaksana kebijakan (pemerintah DKI Jakarta), berikut daftar variabel penelitian:

Tabel 1. Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Parameter	Deskripsi teori
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan permukiman kembali dari sisi masyarakat (faktor eksternal)				
1.	Aspek Fisik (Turner, 1976)	1. Kondisi rumah (Teori Permukiman, Budiharjo, 1998)	Lokasi yang baru tidak banjir, tingkat keamanannya meningkat.	Relokasi diartikan sebagai pemindahan ke tempat yang lebih aman yang telah direncanakan.
		2. Kondisi sistem yang menunjang berfungsinya lingkungan (Teori Permukiman, Doxiadis, 1971)	Fasilitas di lokasi yang baru lebih baik dari sebelumnya	Salah satu unsur permukiman adalah tersedianya sarana-prasarana yang menunjang berfungsinya lingkungan permukiman.
2.	Aspek Keamanan Bermukim (Turner, 1976)	1. Tingkat kebetahan (Teori Relokasi, Budiharjo, 1998)	Jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan sama dengan jumlah penduduk yang bertahan di lokasi yang baru	Prinsip utama relokasi adalah kesukarelaan masyarakat untuk pindah ke lokasi permukiman baru dan meminimalkan kemungkinan untuk meninggalkan tempat yang baru.
		2. Kepastian tidak digusur (Teori permukiman, Santoso, 2002)	Adanya kepastian yang diberikan kepada masyarakat	Hak-hak penguasaan khususnya hak milik atas tanah dan bangunan tidak penting, yang penting adalah tidak digusur
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan permukiman kembali dari sisi pemerintah				

[4]Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua (2011)
[5] Sugiyono (2011)
[6]Creswell (2013)
[7]Bungin (2011)

(faktor internal)				
3.	Sumber Daya (Edward III, 1980)	1. Tersedianya lokasi relokasi, 2. Tersedianya anggaran	Adanya rumah susun dengan fasilitasnya	Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya alat yang digunakan untuk implementasi.
4.	Komunikasi (Edward III, 1980)	1. Adanya sosialisasi 2. Tingkat pemahaman dari target group	Adanya sosialisasi	Implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan sehingga bisa ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), dan mengurangi distorsi implementasi.
5.	Struktur Birokrasi (Edward III, 1980)	1. Pembagian kerja 2. Koordinasi pihak-pihak yang bersangkutan	Struktur organisasi yang jelas tugas dan fungsinya	Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
6.	Karakteristik Implementor (Van Meter dan Van Horn, 1975)	1. Ketegasan pimpinan 2. Pemimpin mempengaruhi kinerja anggota	tingkat ketegasan pimpinan	komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis yang dimiliki oleh implementor dalam merealisasikan tujuan.
7.	Standar Kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975)	Jelas –Tidak	Adanya peraturan yang mengikat dan mengatur	sasaran kebijakan yang jelas dan terukur agar tidak menimbulkan multi-interpretasi dan berakhir dengan kesalahpahaman dan konflik

Sumber : Analisis penulis, 2017

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kebijakan Permukiman Kembali Di Provinsi Dki Jakarta

Perjalanan kebijakan permukiman kembali untuk kawasan Kali Ciliwung dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 2.Riwayat Kebijakan Permukiman Kembali Kawasan Kali CIliwung

No.	Masa	Kebijakan Permukiman	Kekurangan Kebijakan
1.	Tahun 1992 - 1997	Pelebaran Kali Ciliwung menjadi 60 m, berimbas pada pemindahan penduduk sekitar, dilakukan pembangunan rumah susun milik.	Ketidaksiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan permukiman warga korban gusuran, dan terjadinya jual beli rumah susun.

No.	Masa	Kebijakan Permukiman	Kekurangan Kebijakan
2.	Tahun 1997 - 2007	Pembuatan Banjir Kanal, menyebabkan terjadinya banyaknya penggusuran	Mekanisme penggusuran yang salah mengakibatkan penolakan dari warga sehingga permukiman kembali tidak dapat dilakukan
3.	Tahun 2007 - 2012	Rumah Susun	Ketidaksiapan pemerintah dalam sumber daya aparatur, sehingga pengawasannya kurang dan mengakibatkan banyak unit rusun yang berganti kepemilikan
4.	Tahun 2012 – 2014	Pembangunan Kampung Deret	Waktu pelaksanaan yang terlalu pendek dikarenakan Gubernur menjadi Presiden
5.	Tahun 2015	Rumah Susun	Berhasil dilaksanakan

B. Implementasi Permukiman Kembali Kampung Pulo Tahun 2015

1. Tahap Persiapan

Perencanaan Rusunawa Jatinegara Barat dilakukan melalui Sayembara *Proyek Desain Arsitektur : Rusunawa di Jatinegara Barat, Jakarta Timur*, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI c/q Direktorat Jendral Cipta Karya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta. Rusunawa Jatinegara Barat terletak di kawasan strategis di Jakarta Timur, Lokasinya dekat dengan terminal bayangan Kampung Melayu, pasar Jatinegara maupun pusat bisnis Otista. Rusun tersebut cukup elite sekelas apartemen sederhana, memiliki 520 unit yang dibagi menjadi tower A dan tower B.

2. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan melalui beberapa kali pertemuan antara warga dengan aparatur pemerintahan setempat. Awalnya warga telah menyetujui untuk dipindahkan karena adanya penggantian biaya terhadap tanah dan bangunan. Namun, ternyata Peraturan Gubernur Nomor 190 tahun 2014 tersebut bertentangan dengan UU nomor 2 tahun 2012, sehingga penggantian tidak dapat dilakukan.

3. Tahapan Pelaksanaan

Proses penghunian diawali dengan survei dari pihak pertanahan untuk membuat surat keterangan verifikasi atas bangunan yang dimiliki oleh warga, verifikasi ini dilakukan tanpa pemungutan biaya, jadi warga yang mendaftar ke rumah susun adalah warga yang memiliki KTP, KK dan peta bidang dari bangunan asal yang diverifikasi oleh badan pertanahan, setelah proses pemeriksaan administrasi selesai kemudian akan dilakukan pengundian nomor unit rusun yang akan ditempati. Hal ini dilakukan pihak Pemda DKI agar menghindari terjadinya kesalahan pemberian subsidi perumahan. Dikarenakan rumah susun ini adalah rumah susun yang terprogram khusus warga Kampung Pulo maka warga yang akan menghuni Rusun Jatinegara Barat adalah warga yang memiliki KTP di Kampung Pulo, atau jika tidak memiliki KTP, warga harus membuat surat keterangan dari lurah dan didukung oleh surat keterangan RT/RW yang mendukung bahwa seseorang adalah penduduk Kampung Pulo.

C. Strategi Pelaksanaan Kebijakan Permukiman Kembali

Menurut Dye (1992) dalam bukunya Understanding Public Policy mengatakan bahwa kebijakan publik adalah tentang *"whatever governments choose to do or not to*

do" artinya, dalam implementasi kebijakan akan dibutuhkan keputusan-keputusan strategi yang mempengaruhi keberlangsungan implementasi. Pada kebijakan permukiman kembali di Pemda DKI, kebijakan tidak berhenti di penggusuran dan penghunian, terobosan demi terobosan dijalankan pemerintah DKI untuk meningkatkan kesejahteraan warga rumah susun. Inovasi dan kebijakan merupakan dua hal yang saling melengkapi, inovasi hadir sebagai cara baru untuk menggantikan cara yang lama.

Strategi pemerintah DKI dalam mengimplementasikan kebijakan permukiman kembali dapat dibagi menjadi 3 strategi yaitu, strategi kepastian tempat tinggal, strategi pengawasan, dan strategi kerja sama antar instansi. Strategi kepastian tempat tinggal diimplementasikan dalam usaha memenuhi kebutuhan fisik rumah. Strategi pengawasan melalui sistem pembuatan KTP baru dan strategi kerja sama antar instansi diimplementasikan dalam pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Strategi kepastian tempat, yaitu mengartikan rumah sebagai tempat berlindung yang aman dari gangguan manusia (penggusuran), kejelasan status tempat tinggal menjadi penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka memberikan rasa aman untuk beraktifitas dan berkehidupan tanpa adanya kekhawatiran akan digusur di kemudian hari. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah objek yang paling sering terkena dampak kebijakan publik, dan sering menjadi yang dikorbankan, untuk itu psikologi kebertahanan seseorang yang berasal dari kawasan yang dianggap ilegal lebih besar. Jika merujuk pada teori kebutuhan Maslow (1954), kebutuhan ini ada pada tingkatan *basic needs* yaitu pada tingkat *safety needs*. Rasa aman yang dimaksud adalah rasa aman fisik, stabilitas, perlindungan, dan kebebasan dari ancaman termasuk ancaman bencana alam seperti banjir, pengusiran, dan penggusuran.

Selanjutnya strategi dalam hal pengawasan dan kontrol, belajar dari kekurangan mekanisme pengawasan permukiman kembali masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah DKI memberlakukan KTP baru bagi penghuni rumah susun agar mempermudah pengawasan perpindahan kepemilikan unit yang sering terjadi pada implementasi permukiman kembali sebelumnya. Dengan perubahan alamat KTP tersebut, pihak Pemda menjadi lebih mudah melakukan pengecekan kepemilikan unit rumah susun.

Strategi yang terakhir adalah strategi dalam memberikan pelayanan kebutuhan pokok kehidupan warga Kampung Pulo. Turner (1976) menyebutnya sebagai penunjang kesempatan *(opportunity)* keluarga untuk berkembang dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. Fungsi ini diwujudkan dalam lokasi tempat tinggal. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna mendapatkan sumber penghasilan. Dalam rangka membantu warga dalam melangsungkan kehidupan, Pemerintah DKI memberikan insentif berupa fasilitas pendidikan anak, fasilitas transportasi dan fasilitas kesehatan. Akses dalam pemenuhan kebutuhan sosial seperti pendidikan dimudahkan dengan memberikan Kartu Jakarta Pintar dilengkapi dengan bis sekolah yang standby di rumah susun untuk mengantar dan menjemput anak-anak sekolah, akses pada fasilitas kesehatan diakomodasi dalam penyediaan dokter dan klinik kesehatan di dalam lingkungan rumah susun, ditambah lagi dengan akses transportasi dengan pemberian kebijakan gratis menggunakan transportasi umum busway.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Strategi Implementasi Kebijakanpermukiman Kembali Warga Kampung Pulo, Kampung Melayu

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu sisi penerima manfaat yaitu masyarakat dan sisi pelaksana kebijakan yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari sisi penerima manfaat adalah faktor fisik dan faktor keamanan bermukim. Fisik tidak hanya bersifat kualitas bangunan, tetapi lebih kepada fungsi fisik rumah sebagai tempat berlindung, sehingga ketersediaan fisik rumah susun pada saat terjadinya banjir yang menggenang Kampung Pulo, mengakibatkan warga lebih memilih pindah ke lokasi yang tidak banjir. Di samping itu, Pemerintah DKI menyediakan dan mempermudah akses warga pada sarana prasarana pokok seperti pendidikan dan kesehatan meminimalkan keinginan warga untuk meninggalkan tempat yang baru. Selanjutnya, faktor Keamanan Bermukim yang diperoleh dari kepastian tempat tinggal dengan pemberlakuan kebijakan bahwa warga yang terdampak kebijakan permukiman kembali dapat menempati rumah susun seumur hidup, tanpa harus khawatir akan digusur ataupun diusir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, berikut hasil perbandingan permukiman warga Kampung Pulo sebelum dan sesudah pindah ke rusun Jatinegara Barat:

Tabel 3. Kondisi Permukiman Warga

No.	Aspek Amatan	Kampung Pulo	Rusun Jatinegara Barat	Temuan
1.	Kondisi Rumah	Bangunan tidak permanen yang dihuni oleh beberapa KK dalam 1 unit rumah, kondisi terlalu rapat sehingga pencahayaan dan penghawaannya tidak bagus bagi kesehatan.	Bangunan permanen dengan luasan 30 m^2 terdiri dari 2 kamar, kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang tengah.	Kondisi rumah/ kualitas fisik bangunan semakin baik, berimbas pada kesehatan penghuni
2.	Lokasi	Berada di pinggir Kali Ciliwung, tidak dapat diakses oleh kendaraan roda empat.	Di pinggir jalan raya, dekat kawasan perkantoran, perdagangan, dan jasa, dekat dengan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, dekat dengan lokasi permukiman sebelumnya.	Permukiman yang baru memiliki aksesibilitas yang lebih mudah dicapai
3.	Fasilitas	Menggunakan air dari sungai, jet pump, sumur.	Lift, CCTV, Genset, Alat Pemadam Kebakaran, Sprinkle, Listrik menggunakan voucher, PDAM, Cleaning Service, petugas keamanan.	Rusun Jatinegara Barat memiliki fasilitas rumah yang lebih lengkap
4.	Sarana Prasarana	Tidak ada	Area bermain, pendidikan anak usia dini (PAUD), perpustakaan, puskesmas, posyandu, pos jaga, area parkir, area simpan sarana usaha, dan ruang usaha.	Sarana prasarana penunjang permukiman yang dimiliki lokasi yang baru lebih terjangkau secara jarak

Sumber : Observasi dan Wawancara, dirangkum oleh peneliti, 2017

Adapun faktor yang dilihat dari sisi pelaksana kebijakan antara lain : (1) Faktor Sumber Daya, Pemda DKI memiliki sumber daya yang cukup terutama sumber daya materi yang sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan. Pemda DKI telah menyiapkan rumah susun sebagai tempat relokasi yang lengkap dengan sarana-prasarananya, memiliki anggaran untuk memberikan kebijakan tambahan yang meringankan beban warga terdampak penggusuran. Sehingga ketika warga pindah ke rumah susun, terdapat sedikit kelegaan bahwa tempat mereka tinggal selanjutnya lebih baik dibandingkan tempat sebelumnya. (2) Faktor Komunikasi, Komunikasi dilakukan Pemda DKI melalui sosialisasi program jauh sebelum dilaksanakannya penggusuran. Pendekatan yang dilakukan melalui beberapa metode seperti seminar, dialog, temu warga, dan lain-lain. Namun, sepertinya komunikasi bukan hanya dari pelaksana kepada target groups, tetapi juga komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dijalankan dengan baik pada masa pemerintahan Gubernur Joko Widodo. Pada masa Gubernur Ahok terjadi mis-komunikasi dalam kebijakan awal Pemda yang menjanjikan pembayaran ganti rugi. (3) Faktor Struktur Birokrasi, adanya pembagian kerja di tingkat pelaksana kebijakan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan pembangunan fisik dan pembangunan sarana prasarana permukiman, sedangkan untuk pengelolaan diserahkan pada Unit Pengelola Rumah Susun. Hal ini mempermudah pelayanan, pengawasan, dan monitoring terhadap kebutuhan warga rumah susun. (4) Faktor Karakteristik Implementor, Komitmen, Ketegasan, dan Inovasi yang dimiliki oleh Gubernur DKI Jakarta berpengaruh besar pada kinerja pelaksana kebijakan sehingga seluruh kebijakan permukiman kembali dapat dilaksanakan dengan baik. (5) Faktor Standar Kebijakan, Pemda DKI telah memiliki pedoman pelaksanaan kebijakan yang baik, sehingga mempermudah pelaksana kebijakan untuk melaksanakannya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan permukiman kembali terdahulu terkendala beberapa masalah seperti kesalahan mekanisme kepemilikan unit sehingga mengakibatkan adanya pemindahan kepemilikan/ kesalahan *target groups*, kurangnya pengawasan pengelolaan sehingga mengakibatkan maraknya percaloan rumah susun, dan masalah kembalinya warga yang telah direlokasi ke lokasi ilegal lainnya.
2. Strategi implementasi kebijakan permukiman kembali yang dilakukan pada tahun 2015 dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi, yaitu strategi kepastian tempat tinggalmelalui kebijakan (1) Pemberian kemudahan berupa gratis sewa selama 3 bulan pertama dan (2) Pemberian jaminan kepastian tempat tinggal dengan kebijakan berhak menempati rumah susun selamanya.. Strategi pengawasanmelalui (1) Memperketat pengawasan dengan perubahan alamat kartu tanda penduduk dari Kampung Pulo menjadi Rusun Jatinegara Barat dan (2) Mengubah struktur organisasi birokrasi rumah susun dari terpusat di Dinas menjadi tersebar di setiap rumah susun. Strategi kerja sama antar instansi yang tergambar pada kebijakan (1) Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan melalui Fasilitas Kartu Jakarta Pintar dan Penyediaan Bus Sekolah, (2) Pemberian Jaminan Kesehatan, dan (3) Menjalin Kerja Sama dengan Pihak BUMD untuk Pelayanan Transportasi Gratis Menggunakan Busway.
3. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan permukiman kembali warga kampung Pulo dapat diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal (dari sisi penerima kebijakan) dan faktor internal (dari sisi birokrasi kebijakan). Dari sisi masyarakat, faktor yang mempengaruhi adalah faktor fisik dan faktor keamanan bermukim. Sedangkan dari sisi pelaksana kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang tidak sentralisasi. Hal ini tidak terlepas dari ketegasan dan komitmen dari pembuat kebijakan, yaitu Pemda DKI dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.

B. SARAN

1. Kebijakan Permukiman kembali dalam kasus pengadaan tanah kerap direspon secara negatif sebagai salah satu bentuk ‘penggusuran’ atau ‘pengusiran’. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mencoba membuat kebijakan permukiman kembali sebagai bentuk ganti rugi yang disiapkan oleh pemerintah, ketika ganti rugi dalam bentuk uang tidak dapat diberikan, pemerintah harus menggantinya dengan program seperti program kesempatan kerja, program bantuan sosial, program keterampilan.
2. Sosialisasi kebijakan juga harus dipahami oleh birokrasi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Jika membangun rumah di atas tanah negara dilarang, harusnya ketika ada jual beli di atas tanah negara, RT, RW, dan lurah harus melarang. Begitu juga dengan pembangunan tanpa IMB, aparat harus dengan sigap melakukan pencegahan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Budihardjo, Eko. 1998. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group

Creswell. John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kulitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Edisi Ketiga), (Achmad Fawaid, Penerjemah). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood. Cliffs.

Doxiadis, Constantinos A. *Ekistics: an Introduction to the Science of Human Settlements*. London: Hutchinson & Co., 1969.

Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy (Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan).* Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Turner, John FC (1972), Freedom to Build, Dweller Control of The Housing Process, The Macmilan Company, New York

Model Sinergis Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Berkelanjutan di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara

Rieneke L.E Sela[1], Linda Tondobala[1], Raymond Tarore[1]
[1]Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi, Manado
Email: rienekesela@unsrat.ac.id, rine_sela@yahoo.com

ABSTRAK

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan program pemerintah Indonesia yang tertuang dari Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, agropolitan terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang ditunjukkan keterkaitan fungsional dan hirakhi keruangan. Kawasan perdesaan agrowisata sebagai pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat membangun ekonomi berbasis pertanian terpadu dan berkelanjutan melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang dikemas dalam konsep wisata. Lokasi penelitian di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara sebagai kawasan memiliki komoditas unggulan buah-buahan dengan potensi wisata, namun tidak didukung kesinergisan spasial kawasan perdesaan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi karateristik kawasan, menganalisis konsep pengembangan serta menemukan model sinergis pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berkelanjutan. Target luaran berupa pengembangan kawasan perdesaan dengan komoditas unggulan buah pisang dan durian dalam sistem rangkaian entitas pembangunan kawasan yang terstruktur klaster dan antar klaster secara keruangan, saling bekerja sama ruang dan kegiatan dari hulu ke hilir. Metode penelitian adalah pengumpulan data sekunder dan primer berupa aspek fisik dasar lahan, kependudukan dan sosial budaya, ekonomi, sarana prasarana serta pelayanan dan perkembangan desa. Kompilasi data dalam bentuk pengolahan data, pengolahan peta citra, pengolahan analisis kecenderungan perkembangan yaitu menilai kecenderungan sejak masa lalu, masa sekarang dan kemungkinan di masa depan, terutama pengaruh tumbuhnya fungsi baru khususnya pada pelayanan kabupaten dan kota yang mempengaruhi perkembangan di masa depan.

Keywords: Model Sinergis, Perdesaan, Agrowisata, Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

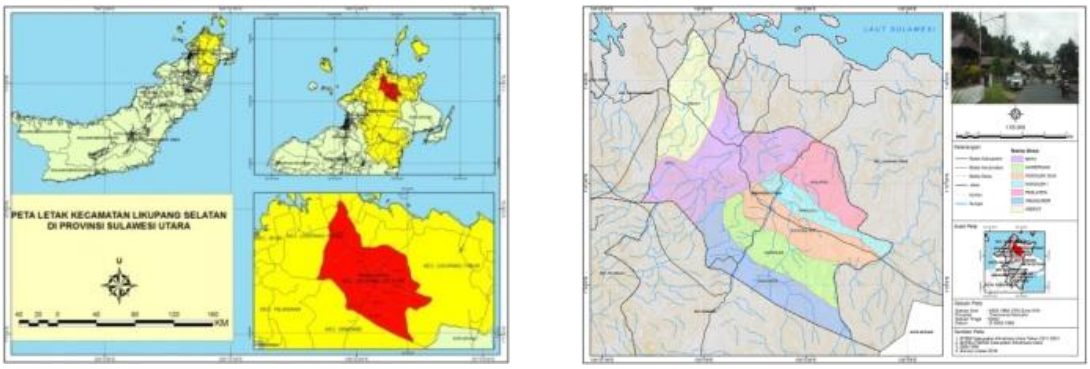
Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah (Adisasmita, 2006). Kemiskinan di wilayah pinggiran atau perdesaan akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan, sehingga kota dan pusat-pusat pertumbuhan menjadi melemah dan inefisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta timbulnya masalah sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin kompleks dan sulit diatasi (Bintarto,1996). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara kota dan desa. Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya regulasi tersebut sebagai mandat untuk

menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengacu pada program pemerintah melalui pengembangan kawasan perdesaan yang berada di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara sebagai kawasan perdesaan memiliki potensi unggulan berupa potensi buah-buahan yang didukung dengan potensi peternakan, perikanan air tawar, budaya dan wisata alam. Isu-isu strategis adalah produksi buah yang tidak terkendali dengan kondisi infrastruktur yang tidak dapat menunjang hasil produksi, sebaran penanaman buah-buahan tidak teratur dalam cluster. Permasalahan yang lain adalah sentra-sentra produksi dan pusat pemasaran distribusi hasil yang belum ada serta potensi wisata alam dan wisata budaya yang belum dioptimalkan sebagai destinasi wisata.

B. Ruang Lingkup

Lingkup penelitian adalah mengetahui karakter kawasan, konsep dari hulu ke hilir serta model sinergis secara spasial pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berkelanjutan. Lingkup wilayah penelitian hasil kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berada di Kecamatan Likupang Selatan yang memiliki 7 (tujuh) desa: Wangurer, Kaweruan, Kokole2, Kokole 1, Paslaten, Batu dan desa Werot.



Gambar 1. Posisi Kawasan Perdesaan di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian model sinergis pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berkelanjutan di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara adalah:

1. Mengidentifikasi karateristik kawasan perdesaan
2. Menganalisis konsep pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berkelanjutan
3. Menemukan model sinergis pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berkelanjutan di Kecamatan Likupang Selatan

II. METODE

A. *Metode Pengumpulan data*

Kegiatan pengumpulan data dilakukan survey sekunder untuk mendapatkan data dan informasi yang telah terdokumentasikan dalam buku, laporan dan statistik yang umumnya terdapat di instansi terkait. Survey primer pengumpulan data di lapangan terdiri dari fisik dasar lahan (luas dan wilayah administrasi, iklim, topografi, jenis tanah, penggunaan lahan, bencana dan status lahan), kependudukan dan sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana pelayanan serta perkembangan desa.

B. *Analisis Data*

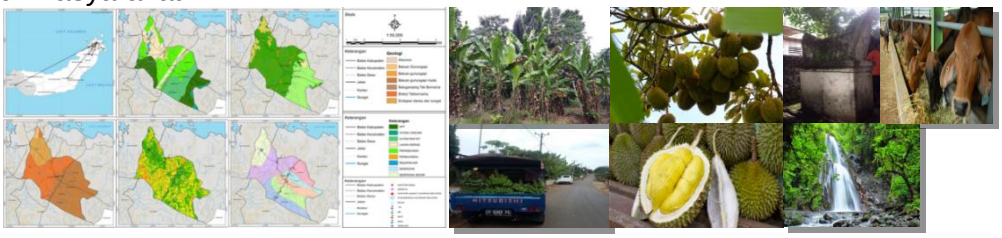
Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif (Creswell, 2008). Data yang dikumpulkan dilakukan kajian dan analisis untuk menyusun konsep dan rencana serta model sinergis. Analisa keadaan dasar yaitu menilai kondisi eksisting, analisa kecenderungan perkembangan kecenderungan sejak masa lalu sampai sekarang dan kemungkinan di masa depan, terutama pengaruh tumbuhnya fungsi baru khususnya pada pelayanan kabupaten dan kota, analisa sistem serta kebutuhan ruang yaitu menilai hubungan ketergantungan antar sub sistem atau antar fungsi serta pengaruhnya apabila sub sistem atau fungsi baru itu berkembang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Kondisi Kawasan Perdesaan

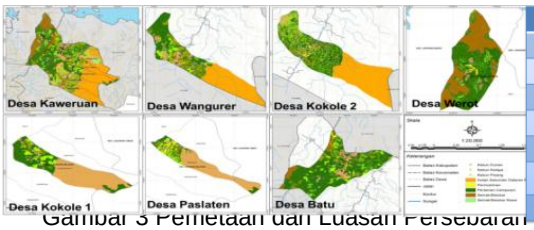
Identifikasi kondisi kawasan perdesaan di Kecamatan Likupang Selatan ditemukan sejumlah potensi dan masalah sebagai berikut:

1. *Aspek Fisik*; dilihat dari potensi menunjukkan jarak dari kota Manado ke Kabupaten Minahasa Utara cukup dekat sebesar 32 Km. Kondisi geografis, topografi, tanah, iklim mikro berpotensi untuk perkembangan 18 jenis buah sedangkan produksi buah durian dan pisang adalah komoditas unggulan. Lahan cukup luas untuk pengembangan buah-buahan berbasis wisata didukung potensi alam sungai, air terjun, peternakan sapi, perikanan air tawar dan waruga sebagai situs. Permasalahan yang ditemui kondisi topografi yang terjal sehingga kesulitan dalam pengangkutan hasil panen buah, akses jalan menuju desa yang sempit serta jembatan dalam kondisi rusak. Kondisi ini menghambat pengangkutan hasil panen dan cenderung cepat membusuk, selain itu waruga sebagai situs sejarah tidak terpelihara dan wisata air terjun belum memiliki akses jalan sehingga tidak banyak diketahui masyarakat.



Gambar 2 Pemetaan Kondisi Fisik Kawasan Perdesaan Kec. Likupang Selatan

2. *Aspek Sosial Budaya*; Potensi pertumbuhan penduduk yang baik terutama untuk usia produktif didukung masyarakat petani, masyarakat sebagian besar sebagai pemilik perkebunan (dilihat pada gambar 3). Kehidupan masyarakat masih terpelihara adat istiadat yang kuat dan memiliki kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kelompok usaha tani. Permasalahan pada masyarakat mayoritas petani tergolong pendidikan tingkat dasar yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pengembangan wisata, penanaman, produksi, pengolahan serta pemasaran, kekurangan penyuluh pertanian serta belum terbentuk sentra-sentra produksi.
3. *Aspek Ekonomi*; Potensi komoditas unggulan pisang dan durian sebagai tanaman endemik memiliki rasa yang enak dan bermanfaat, produksi hasil panen melimpah merupakan sumber perekonomian masyarakat setempat di setiap desa. Permasalahan dimana hasil panen ditangani secara perorangan sebagi pengumpul, hasil panen buah melimpah dan banyak busuk karena masyarakat tidak memiliki keahlian mengolah hasil panen menjadi produk turunan, belum memiliki peralatan produksi, keterbatasan modal usaha, keterbatasan sistem manajerial dan pemasaran produk.



No.	Desa	Pisang (Ha)	Durian (Ha)
1.	Wangurer	35	30
2.	Kaweruan	65	30
3.	Kokoleh Dua	43	12
4.	Kokoleh Satu	32	13
5.	Paslaten	55	30
6.	Batu	75	10
7.	Werot	19	15

Kecamatan	Desa	IPD	IDM	Jumlah Penduduk	Luas Kawasan (Km2)	Potensi	Produk Unggulan
Likupang Selatan	Wangurer	65,57	0,576	807	12,21	Buah-buahan	Pisang
	Kaweruan	57,85	0,591	707	24,00	Buah-buahan	Pisang
	Kokoleh 2	58,32	0,580	513	12,50	Pusat pemerintahan	Pisang
	Kokoleh 1	68,74	0,612	817	12,00	Air terjun, Waruga	Pisang
	Paslaten	62,01	0,581	899	20,00	Air Terjun, Waruga	Durian
	Batu	67,12	0,578	1422	35,00	Air Terjun, Waruga	Durian
	Werot	53,29	0,505	689	15,00	Kopra	Durian

Gambar 3 Pemetaan dan Luasan Persebaran Pisang dan Durian per Desa di Kecamatan Likupang Selatan

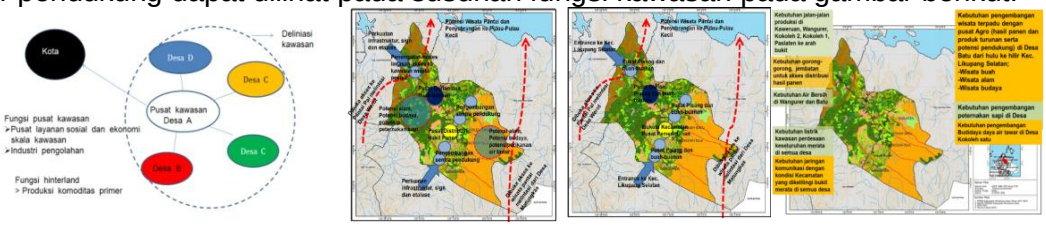
4. *Aspek Prasarana dan Sarana*; Potensi fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pemerintahan dan balai pertemuan, fasilitas peribadatan, ketersediaan akses jalan antar desa, energi serta fasilitas telekomunikasi. Permasalahan tidak memiliki jalan produksi pengangkutan hasil panen buah masih dilakukan secara manual, irigasi untuk pengembangan buah, keterbatasan daya/energi untuk kegiatan produksi produk turunan, keterbatasan fasilitas dan teknologi yang dapat mendukung produksi, belum memadai jaringan IPAL dan sanitasi.

B. Konsep Sinergis Pengembangan Kawasan Perdesaan

Tujuan pembangunan kawasan perdesaan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, yaitu menjadikan Kecamatan Likupang Selatan sebagai kawasan perdesaan agribisnis, industri dan pariwisata secara terpadu serta berkelanjutan di Tahun 2021. Perumusan komoditas unggulan sekaligus merupakan upaya verifikasi komoditas unggulan yang telah ditetapkan pada tahap penetapan kawasan. Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut dan potensi pengembangan kawasan perdesaan menjadi perdesaan berkelanjutan akan dikembangkan sebagai konsep agrowisata berkelanjutan. Menurut Tirtawinata (1996) agrowisata adalah sebuah sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian, dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dalam hal ini adalah petani buah pisang dan durian.

Konsep sinergisme pembangunan kawasan perdesaan dapat terintegrasi dengan potensi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai potensi wisata serta akses pembukaan jalan menuju kearah Pantai Pal di Kecamatan Likupang Timur akan dibuka, dari titik Desa Wusa Kecamatan Mapanget dan dari titik Desa Matungkas. Gambar 4 memperlihatkan sinergisme dari sisi ruang dan pusat-pusat kegiatan, menunjukkan bahwa salah satu jalan dari arah Desa Wusa menuju ke pesisir pantai akan melintasi Desa Werot di Kecamatan Likupang Selatan. Lintas akses ini memberikan potensi di Desa Werot sebagai desa penghasil buah-buahan untuk menjadi pintu masuk kawasan perdesaan agrowisata di Kecamatan Likupang Selatan. Selain itu, dari segi wilayah, memberikan peluang kawasan perdesaan menjadi satu kesatuan wilayah pengembangan dengan kawasan strategis dan kawasan unggulan wisata pesisir dan bahari di Kabupaten Minahasa Utara.

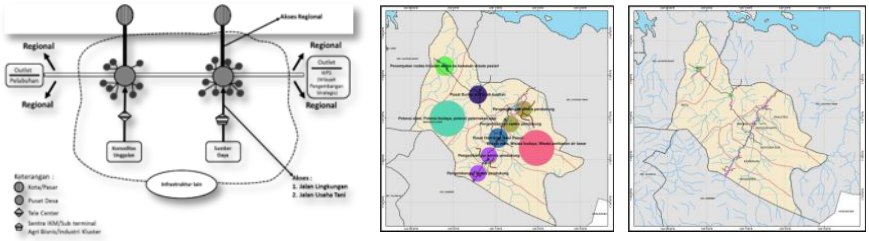
Klaster terdiri atas klaster komoditas yaitu komoditas unggulan yang akan dikembangkan di setiap desa (durian, pisang, buah-buahan lainya, wisata alam air terjun, wisata budaya waruga, wisata peternakan sapi dan perikanan air tawar) dan klaster pendukung dapat dilihat pada susunan fungsi kawasan pada gambar berikut:



Gambar 4 Konsep Klaster dalam Kawasan Perdesaan di Kecamatan Likupang Selatan

C. Model Sinergis Pengembangan Kawasan Perdesaan

Perumusan model sinergis kawasan Perdesaan di Kecamatan Likupang Selatan, melihat bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan prinsip sinergisme antar berbagai komponen. Pengembangan berangkat dari komoditas unggulan dalam hal ini adalah buah pisang dan durian serta sumberdaya lain yang mendukung sistem produksi, peningkatan dukungan infrastruktur sebagai perkuatan aksesibilitas, menetapkan *platform* perencanaan dalam entitas regional, menciptakan *linkage* sistem produksi dan pemasaran dalam bentuk *outlet-outlet* agribisnis yang didukung peran kelembagan (kelompok tani) dan perkuatan infrastruktur (Douglas, 1998). Kajian tersebut di atas dapat di skemakan dalam model sinergisme sebagai berikut:



Gambar 5. Model Sinergis dalam Pengembangan Komoditas Unggulan Kawasan Perdesaan Agrowisata Berkelanjutan di Kecamatan Likupang Selatan

Penerapan sistem keamanan pangan sebagai hilirisasi sistem bisnis O*n Farm, Off Farm* dan *Non Farm*, memperlihatkan ada 5 (lima) tahap produksi menuju hilirisasi pertanian.

1. Kegiatan *On Farm* (Tahapan awal/kegiatan di hulu) : berupa budidaya pertanian (durian, pisang) yang menghasilkan produksi pertanian. Rangkaian kegiatan ini perlu didukung oleh kegiatan dan prasarana dan sarana produksi (jalan produksi, jembatan penghubung, traktor, bibit, pupuk dan sebagainya);
2. Kegiatan *On Farm* (Sub Sektor hulu) : berupa penanganan pasca panen. Proses yang berlangsung pada kegiatan harus ditunjang oleh sejumlah kegiatan dan prasarana dan sarana pendukung (gudang penampungan, tempat pengumpul dan sebagainya);
3. Kegiatan *Off Farm* (kegiatan di hilir) : berupa pengolahan hasil panen. Disini terjadi industrialisasi, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi hasil industri dan produk turunan/derivikasi produk (agroindustri: keripik, manisan buah, selai, aneka minuman buah, macam buah kering dan sebagainya);
4. *Off Farm* (Sub Sektor hilir) : berupa berbagai prasarana dan sarana serta kegiatan yang menunjang hilirisasi produk (sentra agro industri, mesin pengolahan, mesin penyeratan dan sebagainya);
5. Kegiatan *Non Farm* : berupa kegiatan yang tidak langsung terkait dengan ke-empat tahapan kegiatan produksi namun tahap non farm sangat penting bagi keberlanjutan usaha dan keberhasilan usaha/produksi pertanian, seperti: pembangunan galery dan etalase produk, revitalisasi pasar dan pusat informasi agrowisata.

Model sinergis antar klaster kawasan perdesaan agrowisata berkelanjutan di Kecamatan Likupang Selatan, sebagai berikut :

1. Pusat agrowisata di Desa Batu sebagai penghasil durian paling dominan, selain buah pisang sebagai komoditas unggulan. Potensi air terjun Kinaapian dan potensi wisata budaya waruga berada juga di Desa Batu. Dengan demikian, Desa Batu membentuk satu satuan klaster komoditas buah-buahan yang ditunjang oleh potensi sumber daya alam, potensi peternakan sapi, potensi budaya/Waruga. Desa Batu juga berperan sebagai klaster pemasaran produk;

2. Desa Kokoleh Dua sebagai ibukota kecamatan sekaligus pusat pemerintahan sebagai kawasan yang akan dikembangkan sebagai pusat pemasaran hasil panen komoditas unggulan serta produk turunan;
3. Desa Kokoleh Satu, Desa Paslaten sebagai sentra pendukung yang berperan sebagai kegiatan *on farm*, sub sektor hulu dengan fasilitas pendukung pergudangan dan tempat pengumpul;
4. Pengolahan hasil panen (*off farm*) yang menghasilkan produk turunan ditempatkan di Desa Kaweruan. Proses hilirisasi (kegiatan *off farm*) meliputi agroindustri, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi / produk hasil industri;
5. Desa Werot dan Desa Wangurer sebagai pusat pelayanan *non farm* membentuk klaster etalase produk dan galery, jasa dan perdagangan sebagai pusat promosi agrowisata sekaligus berfungsi sebagai pintu gerbang masuk dan keluar kawasan;
6. Klaster komoditas pisang dan durian serta potensi peternakan sapi, perikanan air tawar yang tersebar di masing-masing desa yang kesemuanya ini berpotensi menjadi agrowisata dengan dukungan infrastruktur jalan.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian kawasan perdesaan agrowisata berkelanjutan di Kecamatan Likupang Selatan kabupaten Minahasa Utara, sebagai berikut:

1. Hasil identifikasi menunjukkan kawasan perdesaan di Kecamatan Likupang Selatan dapat ditingkatkan penguatan dari desa tertinggal, berkembang menjadi perdesaan berkelanjutan dengan potensi wisata buah durian dan pisang yang sangat dominan didukung wisata alam air terjun, wisata peternakan dan perikanan air tawar serta wisata situs waruga;
2. Konsep antar klaster kawasan perdesaan sebagai kawasan agrowisata berkelanjutan berupa klaster komoditas unggulan dan klaster komoditas pendukung setiap desa di Kecamatan Likupang Selatan;
3. Model sinergis sebagai hilirisasi dari pusat agrowisata desa, pengolahan produk, pergudangan/ pengumpul, pelayanan hingga pemasaran yang didukung dengan potensi wisata disetiap desa dengan perkuatan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Anonimous. Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anonimous. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor: 14/DPKP/SK/07/2016

Adisasmita, Rahardjo. 2006*. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu

Bintarto. Prof. Drs. R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia

Bintarto, R., dkk. 1996. *Berbagai Aspek Pembangunan Perdesaan*. Media Mandiri, Jogyakarta.

Creswell, J.W. 2008. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.

Douglas, Mike. 1998. *A Regional Network Strategy For Reciprocal Rural – Urban Lingkages*

Sumarwoto, J. 1990. *Pengembangan Agrowisata: Potensi dan Prospek. Seminar Nasional: Pembangunan Pertanian & Pedesaan Sumatera*. Berastagi, 5-8 Maret.

Tirtawinata, M.R. dan L. Fachruddin. 1996. Daya Tarik dan Pengelolaan Agrowisata. Jakarta: Penebar Swadaya.

Penataan Prasarana dan Sarana Kawasan Tradisional Etnis Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Nasional Provinsi Sulawesi Barat

Mimi Arifin[1], Jayanti Mandasari[1], A. Teddy M [2]

[1]Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
[2]Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Satria, Makassar
Email: mimiarifin@yahoo.com, jayanti.mandasariama@gmail.com, mappateddy@yahoo.com

ABSTRAK

Berdasarkan ketetapannya dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa menjadi salah satu kabupaten yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pariwisata berbasis wisata budaya, selain memiliki potensi yang sangat besar, secara geografis, Kabupaten Mamasa berdekatan dengan Kabupaten Toraja yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata nasional. Namun kondisi aksesibilitas yang kurang dan kurangnya penataan kawasan permukiman yang menjadi objek wisata menghambat pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Mamasa. Penelitiaan ini bertujuan untuk menetapkan deliniasi kawasan tradisional etnis Mamasa yang diarahkan pengembangannya sebagai destinasi pariwisata berbasis nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan kebutuhan data diperoleh dengan beberapa proses yaitu melalui observasi, wawancara mencakup didalamnya pembagian kuesioner dan kegiatan diskusi. Analisis dilakukan secara spasial maupun kuatitatif dan kualitatif. Dengan ditetapkannya deliniasi kawasan pariwisata maka diharapkan penelitian ini mampu menjadi acuan untuk pengembangan potensi kawasan pariwisata berbasis budaya di Mamasa dalam rangka meningkatan perekonomian daerah (PAD) maupun ekonomi masyarakat mamasa.

Kata kunci: Penataan Permukiman Tradisional, Etnis Mamasa, Destinasi Pariwisata Nasional, Kabupaten Mamasa

I. PENDAHULUAN

Tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat. Ini membuktikan bahwa sektor pariwisata merupakan industri yang digerakan oleh pasar, sehingga begitu banyak peluang untuk memasarkan produk wisata yang ada di Indonesia. Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional, sebagai tambahan sumber penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor ini telah menjadi tumpuan dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Merujuk pada RIPPDA Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016, Propinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang menempatkan kegiatan pariwisata sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan daerah selain sektor lainnya. Potensi wisata yang tersebar di Provinsi Sulawesi Barat yang beraneka ragam mulai dari wisata alam seperti air terjun dan arung jeram, wisata Sosial budaya seperti tarian tarian unik, tenunan khas dan perayaan perayaan tradisional dan wisata minat khusus memiliki keunikan yang mempunyai daya tarik yang besar. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 15 Tahun 2008 yang menetapkan Kabupaten Mamasa sebagai daerah destinasi pariwisata unggulan. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa asas penetapan destinasi pariwisata unggulan ini ialah pemerataan kesejahteraan rakyat samapai kepelosok desa atas manfaat pariwisata. Namun pengembangan potensi belum dilakukan dengan baik dalam hal ini kurangnya informasi lengkap setiap pariwisata yang ada dan peruntukannya contohnya pembagian zonasi kawasan belum dilakukan padahal hal tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana operasional dan panduan teknis pemanfaatan lahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian dilakukan untuk menyusun penetapan deliniasi kawasan tradisional etnis mamasa yang diarahkan sebagai destinasi pariwisata nasional di Indonesia.

II. METODE

Secara administratif, Provinsi Sulawesi Barat memiliki luas wilayah sebesar 16.937,16 Km2 atau 0,33 persen luas daratan Indonesia, terdiri dari 6 (enam) Kabupaten yaitu: Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013. Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi pariwisata yang besar khususnya di Kabupaten Mamasa. Diketahui Kabupaten Mamasa yang berada pada posisi antara 2°39'216" LS dan 3°19'288" LS dan antara 119°0'216" BT dan 119°51'17"BT dengan luas wilayah sebsar 3.005,88 km^2 dan terbagi dalam 17 Kecamatan menjadi kabupaten dengan potensi wisata terbesar di Provinsi Sulawesi Barat

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan telaah pustaka.

Observasi dilakukan lansung ke area dengan melihat kondisi prasarana dan sarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar kawasan wisata yang harus memenuhi kriteria dasar antara lain: persyaratan pencapaian yang mudah , kenyamanan dan keamanan. Sedang untuk prinsip pengembangan terhadap ; apa yang akan dilakukan, dinikmati (dilihat, dirasakan) dan apa saja yang dapat dibeli. Dalam mengembangkan kegiatan wisata pada kawasan tradisional etnis Mamasa harus memperhatikan terjaganya nilai budaya serta alam sekitar kawasan adat yang harus dilindungi.

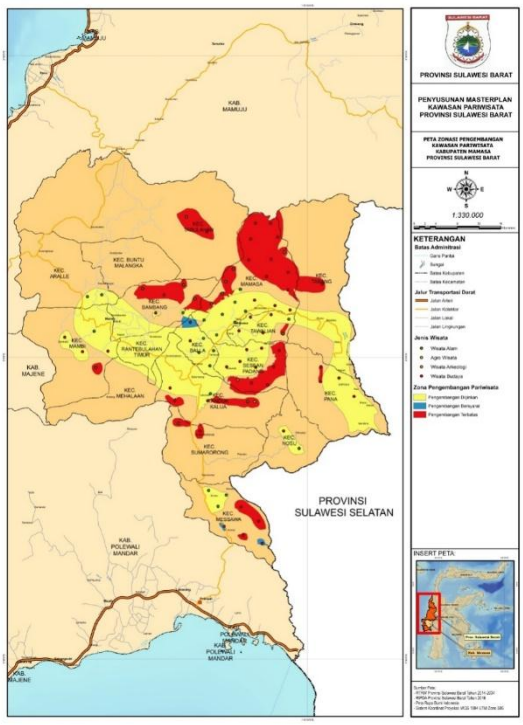
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Potensi Wilayah

Selain memiliki kemajuan pariwisata yang berkembang dengan baik, secara geografis, Kabupaten Mamasa berada dekat dengan Kabupaten Tana Toraja yang rencanakan akan dimasukkan sebagai Kawasan Pariwisata Nasional (KSPN). Hal itu kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No 1 Tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034, dimana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berupa kawasan perkotaan yang dipromosikan dengan skup pelayanan provinsi atau beberapa kabupaten dan atau kota dengan fungsi dan prasarana wilayahnya strategis ditetapkan di Kabupaten Mamasa dalam hal ini sebagai pusat pariwisata budaya dan alam yang dipromosikan menjadi PKWp**.** Diketahui, Kawasan pariwisata di kabupaten Mamasa berjumlah 103 destinasi pariwisata dengan jumlah kawasan pariwisata alam termasuk agrowisata sebanyak 32 destinasi, kawasan wisata flora dan fauna sebanyak 1 destinasi dan kawasan pariwisata budaya sebanyak 70 destinasi. Berdasarkan penetapannya**,** Kabupaten Mamasa direncanakan sebagai kawasan pariwisata primer yang berfungsi sebagai kawasan inti pariwisata provinsi dengan keunggulan pariwisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata yang berada di Tana-Toraja. Berikut beberapa gambaran lokasi pariwisata etnis mamasa:



Gambar 1. Gunung Mambuliling (kiri) dan rumah adat (kanan)



Gambar 2. Peta Zonasi Pengembangan Kawasan Priwisata Kabupaten Mamasa

Berdasarkan kriteria penentuan seperti pola ruang kawasan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat, kerawanan bencana, sumberdaya manusia, dan penetapan kawasan dalam rencana strategis provinsi. Maka dilakukan penentuan zonasi kawasan pariwisata dengan menggunakan teknik *overlay.* Adapun zonasi kawasan pariwisata Kabupaten Mamasa yaitu terdapat 19 kawasan wisata alam pada zona pengembangan diijinkan dan 14 kawasan wisata alam yang berada di zona pengembangan terbatas. Sedangkan 41 kawasan wisata budaya terletak pada zona pengembangan diijinkan, sebanyak 6 kawasan terletak pada zona pengembangan bersyarat, dan sebanyak 23 kawasan terletak pada zona pengembangan terbatas.

B. Aksesibilitas

Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam aksesibilitas adalah transportasi, maksudnya yaitu frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak seolah-olah menjadi dekat. Tingkat kemudahan untuk mengakses kawasan pariwisata akan mempengaruhi perkembangan suatu daerah wisata. Namun terdapat beberapa permasalahan aksesibilitas di Kabupaten Mamasa dimana terdapat beberapa jaringan jalan penghubung kawasan pariwisata dengan

kawasan jalan utama yang memiliki kondisi buruk terutama pada konstruksi dan lebar jalannya seperti yang ada Perkampungan Tradisional Balla Peu' di Kabupaten Mamasa. Selain itu, belum berkembangnya informasi yang disediakan pemerintah setempat sehingga wisatawan tidak mengetahui objek-objek wisata potensial lainnya.



Gambar 3. Sebagian Gambaran Kondisi Jalan di Kabupaten Mamasa

Berdasarkan pertimabangan prinsip dasar pencapaian yang mudah, aman dan nyaman pada suatu kawasan wisata,maka perencanaan jaringan jalan sebagai prasarana pendukung kegiatan pariwisata dilakukan sebagai berikut:

1. Perbaikan seluruh jalan menuju kawasan pariwisata baik konstruksi maupun peningkatan kapasitas jalan sehingga dapat menampung pergerakan kendaraan para wisatawan.
2. Membuat paket perjalanan yang dapat dipilih oleh para wisatawan.
3. Pengadaan *street furniture* di kawasan pariwisata baik papan kawasan pariwisata dan papan penunjuk arah keberadaan kawasan pariwisata
4. Pusat kegiatan dengan aksesibilitas tinggi dilengkapi dengan pelabuhan dan bandara yang dipaduselaraskan dengan rute wisatawan mancanegara dan nasioanl Bandara Tampapadang ke Mamasa dan Tana Toraja atau sebaliknya.

C. Analisis Prasarana Kepariwisataan

1. Sistem Jaringan Listrik

Secara umum, pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Barat telah dilayani oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) namun dari standar pelayanan yang digunakan diketahui bahwa untuk kebutuhan di tahun 2017 dibutuhkan sekitar 503.435.278 watt atau sekitar 503.435,28 kW. Kebutuhan ini belum mengestimasi perkembangan akibat pembangunan kawasan industri Matabe dan estimasi potensi pertambahan kebutuhan yang disebabkan peningkatan jumlah wisatawan. Maka Untuk mengakomodasi kebutuhan sekarang maupun kebutuhan dimasa yang akan dating, dilakukan perencanaan energi listrik di Provinsi Sulawesi Barat dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada seperti sungai-sungai besar, laut dalam, dan perkebunan yang dapat dimanfaatkan untuk sehingga kebutuhan energi listrik untuk Provinsi Sulbar dan provinsi sekitarnya dapat terpenuhi.

2. Sistem Jaringan Telekomunikasi

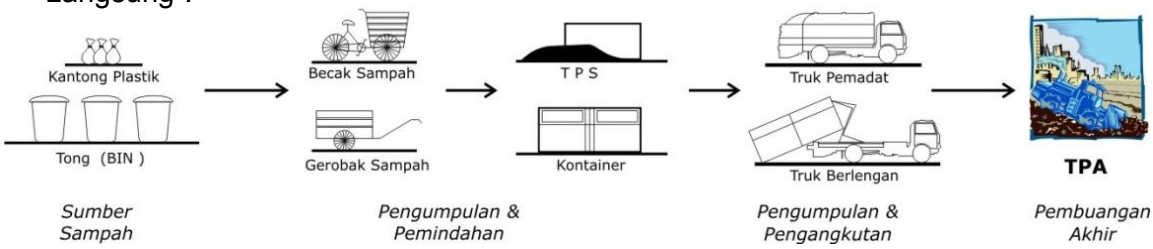
Interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal Provinsi Sulbar maupun dengan wilayah luar sangat memerlukan dukungan sistem komunikasi dan akses informasi baik menggunakan sistem konvensional dengan kabel maupun sistem nirkabel. Mempertimbangakan pada kawasan wisata permukiman Tradisional Etnis Mamasa harus dikembangkan sistim informasi baik pemasaran tentang potensi wisata budaya dan alam serta informasi sebagai pelayanan bagi wisatawan. Untuk mendukung sistem interkoneksi tersebut diarahkan pengembangan jaringan kabel

telepon mengikuti pola jalan, sedangkan sistem telekomunikasi nirkabel yang memanfaatkan sistem satelit dan didukung dengan menara-menara penerima dan pemancar yang dilokasikan pada bukit-bukit di dekat ibukota provinsi dan di dekat ibukota-ibukota kabupaten. Penyediaan jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan perkembangan penduduk dan estimasi wisatawan yang akan melakukan kunjungan.

3. Sistem Jaringan Persampahan

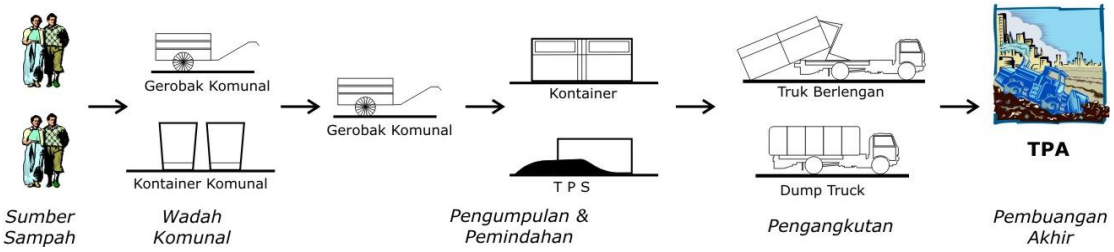
Sistem persampahan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat masih menggunakan metode konvensional yaitu dengan tidak memisahkan antara sampah organik dan an-organik. Besaran timbulan sampah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan sampah terutama aspek teknis operasional. Pada daerah Kawasan Tradisional Etnis Mamasa penganan sampah harus diterapkan dan dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat lokal, dilanjutkan dengan pembangunan sarana fisiknya.Teknis operasional penanganan sampah dilakukan secara terpadu yang digambarkan dalam skema di bawah ini:

a) Teknis operasional dilakukan dengan ”Pola Pengumpulan Individual Tidak Langsung”.



Gambar 4. Skema Penanganan Sampah Pola Individual Tidak Langsung

b) Teknis operasional dilakukan dengan ”Pola Pengumpulan Komunal Tidak Langsung”.



Gambar 5. Skema Penanganan Sampah Pola Pengumpulan Komunal Tidak Langsung

4. Sistem Jaringan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan dan kesehatannya. Keberadaan air bersih di daerah perkotaan menjadi sangat penting mengingat aktifitas kehidupan masyarakat kota yang sangat dinamis. Untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan, pengembangan sistem sumberdaya air melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan air baku dilaksanakan dengan kegiatan :

a. Pembangunan waduk untuk menyediakan air baku serta konservasi sumber air.

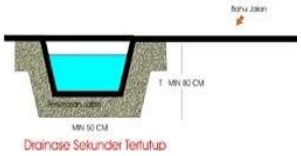
b. Pemanfaatan sumber air baku alternatif yaitu air bawah permukaan.
c. Pembangunan prasarana pengendali banjir.
d. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
e. Pembangunan jaringan air bersih
f. Normalisasi saluran sungai
g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air
h. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

5. Sistem Jaringan Drainase dan Air Limbah

Sistem pembuangan air kotor (*grey water*) kawasan permukiman maupun kawasan pariwiata yag ada di Kabupaten Mamasa saat ini merupakan sistem drainase tercampur dimana penggunaannya untuk pembuangan air limbah rumah tangga dan limpasan air hujan, sehingga kapasitas saluran harus dapat menampung limpasan air hujan dan air buangan rumah tangga. Sistem pengelolaan air limbah yang berada pada kawasan perencanaan saat ini menggunakan sistem sanitasi setempat (on site) dengan pembuatan tangki septik di tiap-tiap rumah. Kelemahan dari kondisi ini adalah sering kali masyarakat tidak mengetahui standar teknis yang telah ditentukan.

Salah satu syarat yang kurang diperhatikan oleh masyarakat saat membangun sumur peresapan dari tangki septik adalah letak dan jarak sumur peresapan dengan sumur gali karena sempitnya persil tanah yang dipunyai, disamping kurangnya pengetahuan posisi sumur peresap tetangga sekitarnya.

Sistem jaringan drainase direncanakan menggunakan sistem saluran terbuka (*riol*) yang belum memisahkan antara limpasan air hujan (*run off)* dan limbah rumah tangga. Khusus pada kawasan Wisata Etnis Mamasa dengan kondisi yang berkontur disaratkan perhatian kontur tanah terhadap perencanaan volume drainase makin rendah volume makin besar . Untuk menahan laju derasnya aliran drainase pada saat curah hujan tinggi harus dikembangkan drainase yang berpori. Dan khusus drainase pada daerah kegiatan aktivitas kuliner dapat direncanakan drainase dengan menggunakan sistem salurah tertuup dengan dilengkapi bak pengontrol (*mainhole*) dan street inlet. Drainase ini mendukung meningkatkan kenyamanan, keamanan dan kebersihan.



Gambar 6. Arahan sistem drainase tertutup untuk kawasan yang mempunyai aktifitas tinggi kegiatan kuliner dan perbelanjaan sovenir

IV. KESIMPULAN

1. Kabupaten Mamasa memiliki potensi pariwisata yang besar ditinjau dari jumlah pariwisata yang ada dan letak geografisnya sehingga dibutuhkan perencanaan pengembangan pariwisata berdasarkan ketetapan zonasi yang telah dilakukan.
2. Arahan pengembangan aksesibilitas dengan melakukan perbaikan jalan, menambahkan *street furniture*, membuat paket wisata serta pengembangan perluasan jaringan aksesibilitas darat, laut dan udara mengingat Kabupaten Mamasa berada pada kawasan strategis dimana lokasinya berdekatan dengan Tana Toraja yang merupakan kawasan pariwisata tingkat nasional
3. Berdasarkan hasil studi, prasarana yang terdapat pada kawasan wisata budaya belum memadai untuk menunjang kegiatan wisata. Untuk itu, diperlukan penataan terhadap sarana dan prasarana yang belum memadai seperti moda transportasi, jalan, parkir dan halte, akomodasi, restoran, toko souvenir, sarana pusat informasi, toilet umum, persampahan, serta jaringan listrik,.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara
Tahun 1990, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427).

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.64/HK.201/MKP/04, tentang Pedoman Pengembangan Pariwisata Daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15Tahun 2008 tentang Penetapan Kabupaten Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034

Wunas, S dkk. (2014). Masterplan pengembangan kawasan wisata Olele dan kawasan wisata Botutonuo, Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo

Kepmen Permukiman dan Prasarana wilayah No. 217/KPTS/M/2002, tentang kebijakan dan strategi nasional perumahan dan permukiman (KSNPP).

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (KM.67/UM.001/MKP/2004, UU RI No.1 tahun 2014) tentang Pedoman umum pengembangan pariwisata di pulau pulau kecil

Pengembangan Hunian Pendukung Potensi Wisata Kawasan Pesisir Di Tanjung Bayang Kota Makassar

Yuniza Pridanti[1], Shirly Wunas[2] dan Mimi Arifin[2], Fathien Azmy[2]

[1]Mahasiswa Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
[2] Dosen Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: ypridanti@gmail.com; shirly_wunas@yahoo.co.id; mimiarifin@yahoo.com; fathienazmy@gmail.com

ABSTRAK

Posisi strategis pantai cenderung diabaikan dengan perkembangan hunian informal di kawasan pesisir Tanjung Bayang yang belum memperhatikan aturan tata bangunan. Pemanfaatan lahan pesisir secara berlebihan dikhawatirkan akan mengakibatkan penurunan kualitas pantai. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi tapak hunian, sarana wisata, aksesibilitas, aspek ekonomi; sosial dan budaya terhadap sistem pengelolaan kawasan, serta menyusun arahan pengembangan hunian pendukung potensi wisata di Tanjung Bayang. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari observasi lapangan dan hasil kuesioner serta wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui instansi terkait. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, komparatif, dan analisis spasial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Tapak hunian mempunyai kepadatan yang relatif rendah dengan jarak antar rumah ≤ 2m. Tapak hunian non panggung terletak di area sempadan pantai, namun aman dari waktu pasang air laut. Tapak sarana penunjang wisata (bale-bale) cenderung padat (5 unit/1 atap) dan bangunan bilas belum melayani seluruh kawasan. Akses menuju kawasan merupakan fungsi jalan lokal yang berada di antara dinding real estate, belum dilengkapi penanda dan jalur pejalan kaki. Belum terdapat TPS ataupun depo pembuangan sampah. Jaringan listrik untuk bangunan sudah memadai, namun belum terdapat lampu penerangan untuk bale-bale dan hunian sewa. Dominan masyarakat bekerja dan memanfaatkan fasilitas penunjang wisata pantai sebagai mata pencaharian utama. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka konsep arahan yang diusulkan berupa pengembangan rumah tinggal menjadi hunian sewa serta pengembangan sarana, prasarana, aksesibilitas, dan sistem pengelolaan kawasan berbasis masyarakat guna meningkatkan ekonomi lokal.
Kata kunci: pengembangan, hunian, wisata, pesisir

I. PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota berciri khas pantai dengan kehidupan pesisir. Pantai Tanjung Bayang adalah salah satu kawasan pesisir yang menjadi potensi wisata. Namun, berbagai masalah terjadi, seperti orientasi hunian dan garis sempadan bangunan yang tidak jelas, jarak antar hunian ≤2m atau kurang dari dua meter, kondisi infrastruktur penunjang seperti listrik, persampahan, dan limbah yang belum memadai. Selain itu, Kondisi gazebo informal yang belum layak huni, saling berdempetan satu sama lain, serta mendorong perilaku asusila membuat Kawasan Pesisir Tanjung Bayang semakin mengalami penurunan kualitas pantai.

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah kondisi tapak hunian dan sarana, prasarana, aksesibilitas, serta kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan hunian masyarakat di Kawasan Tanjung Bayang dengan memaksimalkan potensi wisata yang ada guna meningkatkan ekonomi lokal.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode *purposive sampling* dengan karakteristik hunian sewa dan rumah tinggal yang berbentuk panggung.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data primer berupa karakteristik dan pola hunian, kondisi geografis hunian, kondisi ekonomi; sosial; dan budaya, ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, serta ketersediaan LPM yang diperoleh dengan teknik observasi, dokumnetasi, kuesioner, dan wawancara. Sedangkan data sekunder berupa peta dasar lokasi penelitian, data kondisi kemiringan lereng yang diperoleh melalui studi literatur kebijakan.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis seluruh bagian pada tujuan no 1,2,3 dan 4; analisis deskriptif kuantitatif berupa penyajian data dalam bentuk tabulasi pada data kemiringan lereng, geografis, karakteristik hunian, prasarana penunjang wisata, dan kondisi ekonomi masyarakat; analisis komparatif yang digunakan untuk membandingkan kondisi eksisting dengan NSPM berlaku, serta analisis spasial pada data tapak hunian, sarana dan prasarana, dan aksesibilitas dengan teknik pemetaan menggunakan peta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tapak Hunian

Permukiman lapis pertama mengikuti dan menghadap geografis pantai secara linear. Namun, beberapa hunian sewa potensi *sea view* terhalang oleh keberadaan *bale-bale* yang tertutup dan tidak teratur.

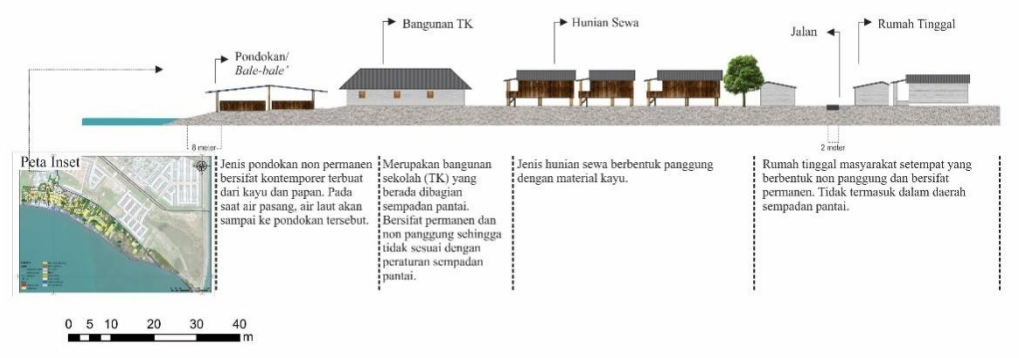


Gambar 1. Potensi *sea view* dari hunian sewa yang dihalangi *bale-bale*.

Titik air pasang tertinggi di kawasan ini adalah 7-10 meter dari bibir pantai dan akan naik ke permukaan hanya sampai ke *bale-bale*. Sehingga, tidak membahayakan keselamatan bangunan dan pengunjung yang sedang berwisata.

Tabel 1. Jarak Hunian Sewa Terhadap Pantai

Jarak (m)	**Jumlah**	
	n	**Persentase(%)**
0-100	46	92
>100	4	8
Total	50	100



Gambar 2. Potongan sempadan Tanjung Bayang

Dominan hunian sewa berbentuk panggung dengan persentase 56 %, sedangkan bentuk hunian sewa non panggung memiliki persentase 44 %. Sedangkan hunian tinggal masyarakat 49% berbentuk panggung. Pemilik hunian dapat memanfaatkan bagian kolong rumah sebagai hunian sewa dan warung campuran.

Terdapat dua kecenderungan pola hunian sewa dengan rumah tinggal pemilik hunian sewa yang berada di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang. Beberapa pemilik cenderung membangun hunian sewa dekat dengan rumah tinggal untuk mempermudah proses pemantauan hunian sewa oleh pemilik nya.



Gambar 3. Hunian sewa yang dibangun dekat dengan rumah tinggal



Gambar 4. Hunian sewa yang dibangun cukup jauh dari rumah tinggal.

Sejak tahun 2001 rumah tinggal masyarakat telah dibangun di kawasan ini dan berkembang ke arah pantai seiring dengan permintaan pengunjung akan hunian sewa semakin meningkat. Hingga pada tahun 2015 puncak pembangunan hunian sewa hampir sangat dekat dengan bibir pantai (15meter dari bibir pantai).

Tabel 2. Bentuk Rumah Sewa Di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang

Bentuk Hunian	***Jumlah***	
	n	*Persentase (%)*
Non Panggung	22	44
Panggunng	28	56
Total	50	100

Rata-rata luas rumah tinggal di kawasan ini adalah 78 m^2. Satu hunian rata-rata dihuni oleh 4-5 jiwa per rumah, maka satu orang mendapatkan 20 m^2-15 m^2. Hal ini berarti kepadatan huni rumah tinggal di kawasan ini tergolong cukup rendah sehingga dapat dimanfaatkan atau dikembangkan menjadi hunian sewa.



Gambar 5. Peta Bentuk Hunian

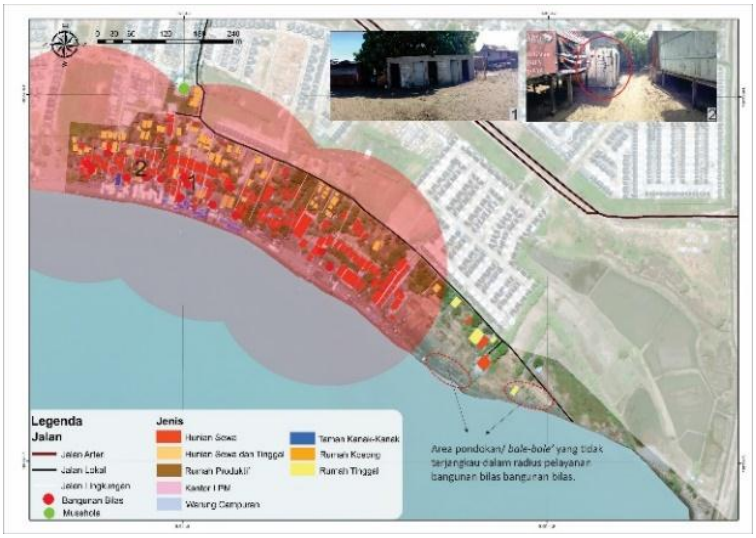
B. Analisis Sarana Penunjang Wisata

Sebagian besar (60%) hunian sewa dimiliki oleh masyarakat lokal (103 unit) dan 40% merupakan investasi dari masyarakat luar. Terdapat 541 unit gazebo di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang dengan kondisi kurang memadai, saling berdempetan satu sama lain (gambar 2). Jumlah gazebo sebanyak 541 unit apabila diasumsikan satu unit dapat dihuni oleh 4 jiwa, maka seluruh pondokan di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang dapat menampung kurang lebih 2.164 jiwa pengunjung. Sedangkan, berdasarkan data jumlah pengunjung pada *pick hour* adalah sebanyak 2.200 jiwa.



Gambar 6. Sarana akomodasi berupa hunian sewa & gazebo/*bale-bale*

Sarana pelayanan yang tersedia di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang adalah bangunan bilas dan masjid. Berdasarkan hasil analisis spasial dengan membuat radius pelayanan sarana pelayanan bangunan bilas (200 m) yang ditempuh dengan berjalan kaki masih terdapat beberapa pondokan/ *bale-bale* yang belum dilayani oleh bangunan bilas.

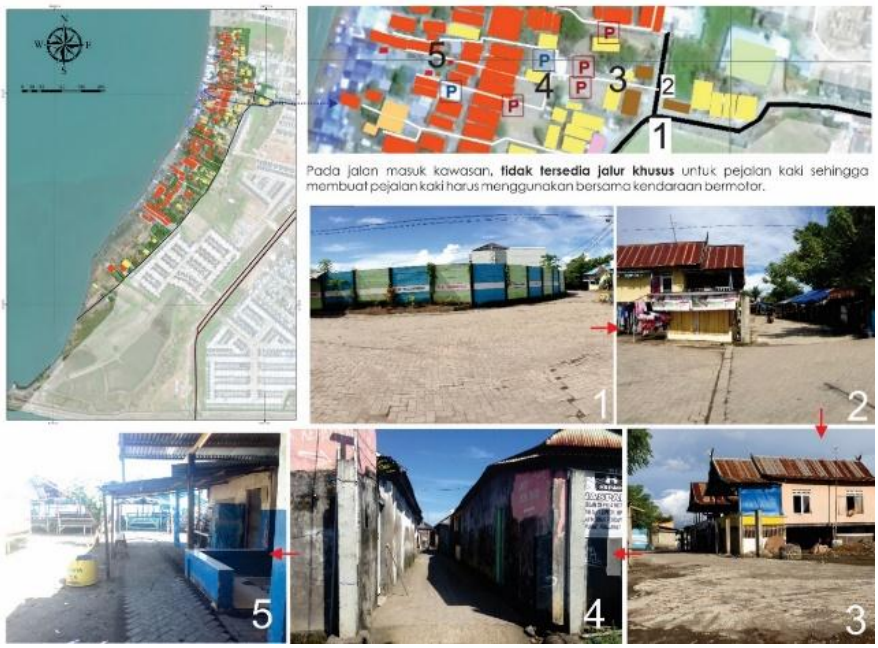


Gambar 7. Peta radius sarana pelayanan bangunan bilas

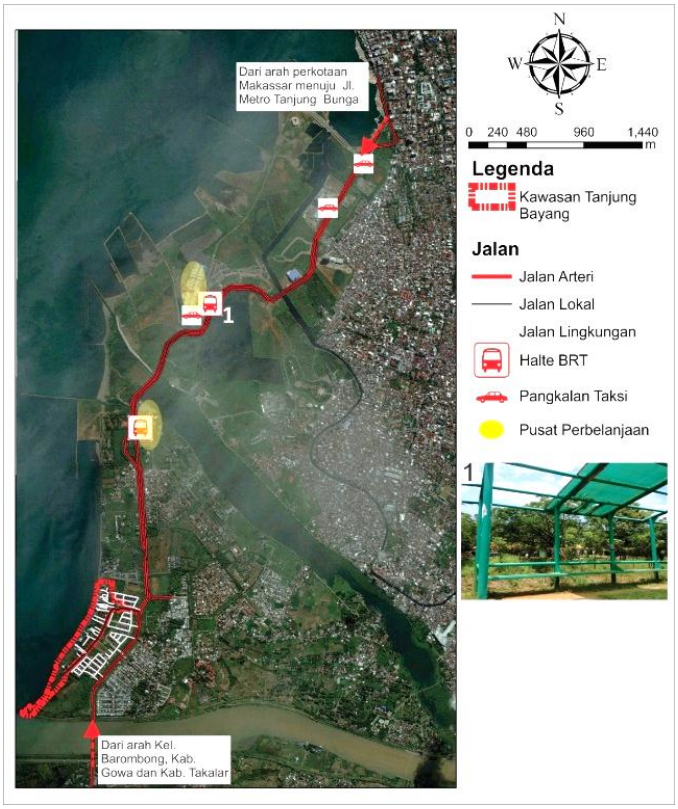
Selain itu, masyarakat memanfaatkan kolong rumah sebagai tempat untuk berjualan sehingga terbentuk hunian usaha. Warung yang tersedia dengan standar radius pelayanan 300 m telah dapat melayani seluruh kawasan. Sarana kesehatan juga dapat diakses dari kawasan ini dengan kendaraan bermotor.

C. Analisis Aksesibilitas

Jalan masuk Kawasan Tanjung Bayang merupakan fungsi jalan lokal, material *paving block*, lebar 5-6 meter. Akses menuju kawasan berada di antara dinding pagar *real estate* yang berkembang cukup kuat sehingga jalan masuk ke kawasan ini tidak begitu jelas. (gambar 3). Setelah melewati jalan lokal, selanjutnya terdapat jalan lingkungan dengan lebar 1,5-3meter yang digunakan oleh pejalan kaki dan kendaraan bermotor untuk mengakses parkir.



Gambar 8. Akses dari parkir menuju pantai



Gambar 9. Peta ketersediaan angkutan umum

D. Analisis Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Terhadap Sistem Pengelolaan

Berdasarkan hasil survei, rata-rata masyarakat lokal mempunyai 2unit hunian sewa dan 4 unit *bale-bale*, dengan rataan pendapatan kurang lebih Rp.4.800.000 per bulannya. Bagi masyarakat yang tidak memiliki hunian sewa, paling tidak, masyarakat memiliki 4-5unit *bale-bale* dan satu bangunan bilas.

Tabel 3. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

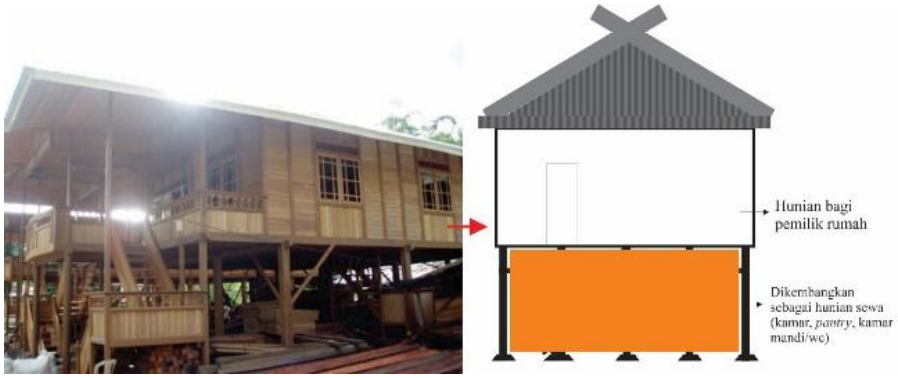
Jenis Mata Pencaharian KK	***Jumlah***	
	r	*Persentase (%)*
Wirausaha	20	95
Nelayan	1	5
Total	21	100

.

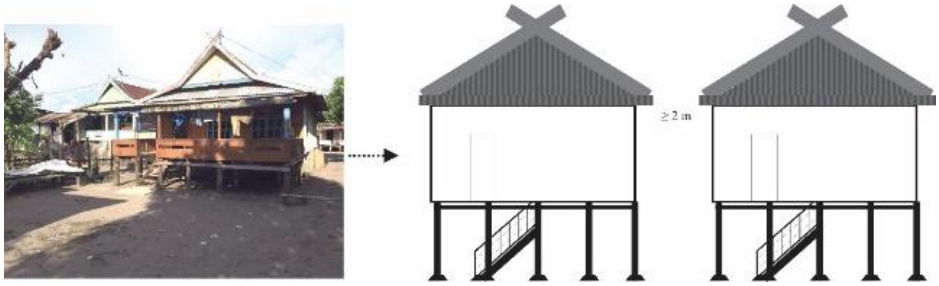
Terdapat lembaga yang mengatur dan mengelola jalannya aktivitas pariwisata di Kawasan Pesisir Tanjung Bayang, yakni LPM Tanjung Merdeka. Masyarakat Kawasan Tanjung Bayang dinilai telah cukup berperan sebagai tuan rumah di kawasan wisata ini. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha fasilitas penunjang wisata yang sebagian besar dimiliki dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat Namun, seluruh masyarakat belum dilibatkan lebih lanjut oleh petinggi-petinggi LPM dalam pengambilan keputusan dikarenakan minimnya sosialisasi atau pertemuan yang dilakukan.

E. Arahan Pengembangan

Pengembangan tapak hunian masyarakat lokal sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Hunian sewa yang tidak memiliki jarak satu sama lain akan dilakukan penataan jarak agar memiliki sirkulasi yang baik.



Gambar 10. Ilustrasi pengembangan rumah tinggal menjadi hunian sewa



Gambar 11. Ilustrasi penataan jarak antar hunian

1. Arahan Pengembangan Sarana

550unit *bale-bale* yang lebih terbuka, berjarak satu dengan lainnya agar lebih mendapatkan sirkulasi udara dan akses yang baik (1 *bale-bale* dihuni oleh 4 pengunjung. Total Pengunjung 2.200 jiwa/4 = 550). Selanjutnya, untuk menghindari pembangunan yang mengarah ke bibir pantai maka diarahkan adanya jalan setapak yang berjarak 3meter dari bibir pantai dengan lebar 2 meter

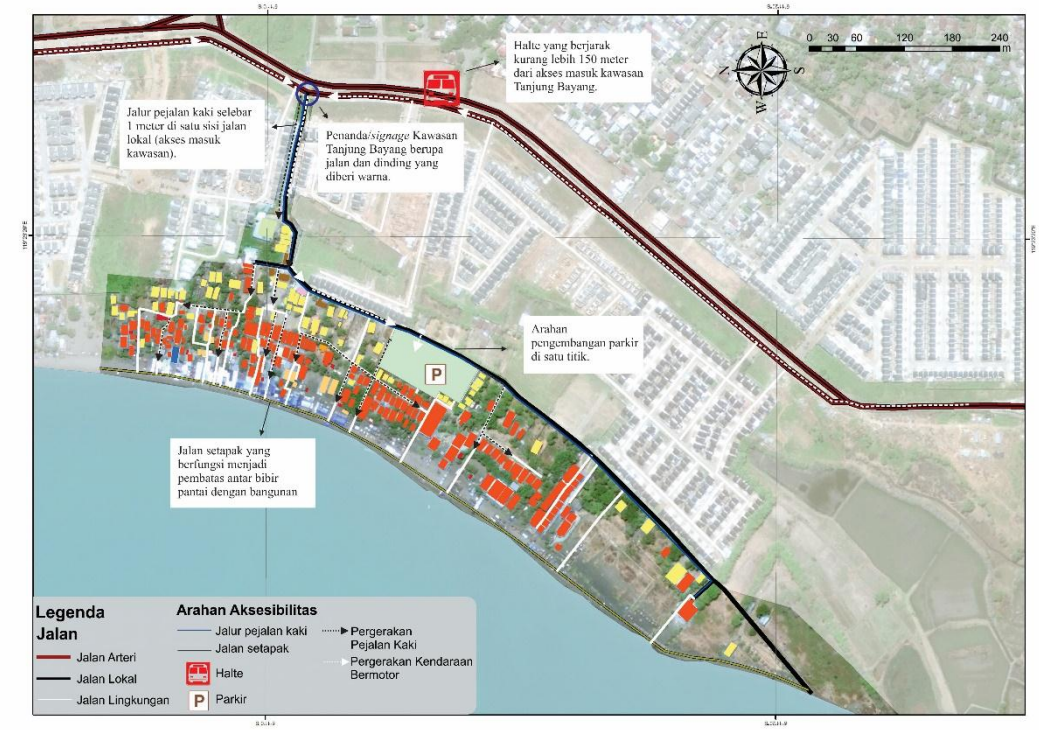


Gambar 12. Peta zonasi dan ilustrasi *bale-bale*

2. Arahan Aksesibilitas

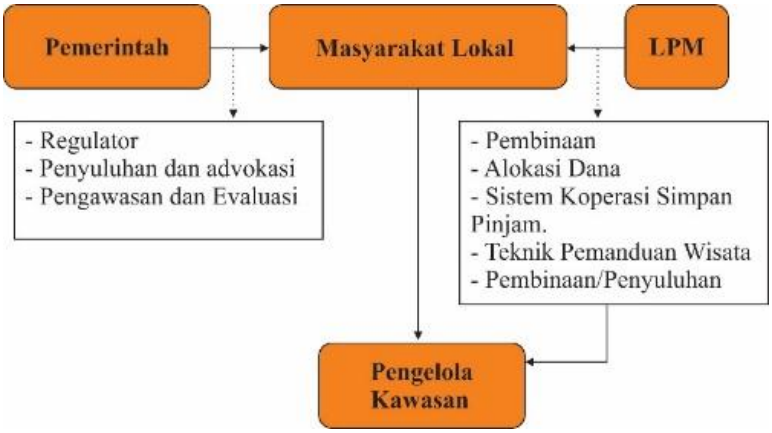
Arahan aksesibilitas meliputi pengadaan halte agar lebih mudah dijangkau oleh pengunjung, pengadaan jalur pejalan kaki yang memisahkan kendaraan bermotor

dengan pejalan kaki, pengadaan parkir terpadu di satu titik, serta pengadaan penanda/*signage* di akses masuk kawasan.



Gambar 13. Peta arahan aksesibilitas

Arahan sistem pengelolaan Kawasan Tanjung Bayang adalah berbasis masyarakat yakni, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam merealisasikan hal tersebut, tentunya masyarakat membutuhkan suatu sistem kelembagaan yang selanjutnya dapat mengatur pengelolaan yang sistematis (gambar 6).



Gambar 14. Tugas dan fungsi lembaga pengelola kawasan

a. Arahan Promosi Kawasan

Sistem promosi Kawasan Tanjung Bayang dapat berupa media elektornik berupa website khusus wisata Pantai Tanjung Bayang yang menggambarkan keindahan wisata pantai itu sendiri, ataupun berupa pamflet, poster, atau selebaran yang berada di titik-titik strategis kawasan wisata, atau bahkan di Bandara Sultan Hasanuddin dan sarana transportasi umum lainnya.

b. Arahan Pemberdayaan SDM

Adanya pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan permukiman dan pantai. Masyarakat juga dapat diberi pemahaman mengenai cara menjaga kelestarian dan keselamatan wilayah pantai dari bencana yang akan terjadi.

IV. KESIMPULAN

Tapak hunian mempunyai kepadatan yang relatif rendah dengan jarak antar rumah ≤ 2m. Tapak hunian non panggung terletak di area sempadan pantai, namun aman dari waktu pasang air laut. Tapak sarana penunjang wisata (*bale-bale*) cenderung padat (5 unit/1 atap) dan bangunan bilas belum melayani seluruh kawasan.

Akses masuk menuju kawasan adalah fungsi jalan lokal yang berada di antara dinding real estate, belum dilengkapi penanda dan jalur pejalan kaki. Material jalan lingkungan adalah *paving block*. Sebagian besar (95%) masyarakat Kawasan Tanjung Bayang memanfaatkan fasilitas wisata sebagai mata pencaharian. Masyarakat dibantu oleh LPM dalam pengelolaan. Hanya saja, masyarakat belum dilibatkan lebih jauh dalam pengambilan keputusan.

Konsep arahan yang diusulkan adalah arhan pengembangan hunian, arahan pengembangan sarana, prasarana, aksesibilitas penunjang wisata, dan arahan sistem pengelolaan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amri, Nurmaida dan Idawarni. 2014. *Laporan Penulisan Buku Ajar Perumahan dan Permukiman Pesisir*. Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin: Makassar.

Jurnal:

Wunas, S. Arifin, M. Natalia, V.V. 2014. Principles of Location Development For Housing and Seaweed Processing Industrial Based on Community Approach (Case Study: Bantaeng Regency Watershed)*. Journal of Human Settlements Vol.7 No.2 September 2015.* Universitas Hasanuddin: Makassar.

Regulasi:

Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2010-2030.

UU RI No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

UU RI No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir.

PARIWISATA KAWASAN KARS YANG LESTARI DI PAWONSARI

Soedwiwahjono
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik
Universitas Negeri Surakarta
email: soedwiw@ft.uns.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari (Pawonsari), yang sebagian alamnya ditandai dengan pegunungan kars, merupakan daerah yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi relatif rendah dan pencapaian pendapatan per kapita masih rendah. Padahal bagian dari Kawasan Gunung Sewu ini sudah termasuk UNESCO - Global Geopark Network*. Oleh sebab itu menjadi permasalahan ketika kawasan kars yang sudah menjadi perhatian dunia, masyarakatnya tidak bisa mendapatkan manfaat dari potensi sumber daya alam di sekitarnya, karena terkendala kerasnya sifat alam dan kewajiban melestarikan kawasan kars. Oleh sebab itu diperlukan tindakan, di antaranya adalah melalui pendekatan penataan ruang yang berbasis perencanaan dan pengembangan sumber daya alam kars sebagai upaya pemanfaatan sumber daya lokal untuk kehidupan dan penghidupan masyarakat.*

Pendekatan penataan ruang dilakukan dengan mengenali karakteristik kawasan kars di Pawonsari, mendapatkan potensi dan permasalahannya secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, sehingga bisa diwujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan kars secara khas melalui penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.

Dari hasil eksplorasi didapatkan konsep penataan ruang kawasan kars Pawonsari berdasarkan klasifikasi kawasan kars. Meskipun terdapat nodal-nodal perkotaan Pacitan, Ponjong, dan Giriwoyo, kawasan berpeluang dikembangkan dengan berbasis potensi sumber daya alam kawasan kars sebagai kawasan pertanian tertentu, kawasan pariwisata terbatas dengan memanfaatkan bentang alam dan bentukan alam, eksplorasi sumber material dan mineral secara berkelanjutan. Namun di sisi lain penataan ruang wajib melindungi keunikan-keunikannya terkait geologi, geomorfologi, palaentologi, hidrologi, serta flora dan fauna dan memanfaatkanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Semua didasari kebijakan peraturan zonasi kawasan kars yang tegas dan peran serta dari masyarakat.

Kata kunci: Pawonsari, kars, geowisata

I. PENDAHULUAN

Pegunungan kars mewarnai alam wilayah Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah, dan Kabupaten Gunung Kidul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul juga disebut sering sebagai Wonosari; seperti salah satu nama kecamatannya. Ketiga wilayah yang saling bersambungan batas wilayahnya ini membentuk kerja sama Wilayah Pawonsari sejak sekitar tahun 1986. Alasannya waktu itu adalah terdapat faktor persamaan sebagai daerah tertinggal di Selatan Pulau Jawa yang tandus, kedekatan kultural serta mempunyai masalah di daerah perbatasan telah membentuk ikatan ketiga daerah itu. Di Wilayah Pawonsari terdapat *Gunung Sewu* atau Pegunungan Seribu sebagai perwujudan dari alam yang secara geologi merupakan bentang alam kars.

Dari berbagai sumber dituliskan bahwa bentang alam kars memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan. Bentang alam kars dalam ekosistem bisa menyimpan dan menyediakan bahan-bahan seperti air bersih, sumber daya material alam, sumber daya hayati, baik di permukaan atau di bawah permukaan serta bisa turut

mengendalikan perubahan iklim lingkungan. Namun demikian, keberadaan kars seringkali juga memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakatnya karena ada masyarakat yang melakukan budidaya dari kars di sekitarnya. Oleh sebab itu kawasan kars memiliki peran secara hidrologis, ekologis, namun juga sosial-ekonomi. Adanya eksploitasi akan menyebabkan kawasan kars akan mudah rusak, bila salah satu unsur penyusun ekosistemnya tercemar atau hilang.

Permasalahan yang terjadi kemudian adalah bagaimana Kawasan Kars Pawonsari harus bisa terjaga kelestariannya karena fungsinya bagi lingkungan, namun di sisi lain sudah banyak penduduk yang bertempat tinggal di tempat tersebut. Sebagai ekosistem, Kawasan Kars Pawonsari dapat dilihat sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat hubungan interaksi dan interdependensi antar lingkungan fisik, non fisik, hayati dan non hayati, serta bio-geokimia baik itu pada *eksokarst*, maupun *endokarst*. Kawasan kars memiliki potensi yang tinggi dan sekaligus kerentanan yang tinggi. Alamnya kaya namun bisa dengan mudah mengalami kerusakan kalau ada gangguan. Kawasan kars Pawonsari dihuni oleh masyarakat dari hasil budi daya lingkungannya dengan kehidupan ekonomi pada umumnya taraf menengah ke bawah; karena sebenarnya pemanfaatan daya dukung lingkungan juga rendah.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan bahwa kondisi dan situasi Kawasan Kars Pawonsari dijelajahi menggunakan pendekatan konsep-konsep kajian yang dimiliki peneliti. Untuk itu tahapan yang dilakukan adalah persiapan baik di lapangan maupun penjelajahan terhadap informasi yang ada secara sekunder.

Di Kawasan Kars Pawonsari, dengan membawa perlengkapan dokumentasi, data-data yang di persiapan sudah diidentifikasi kebutuhannya, dicari dengan cara pengamatan langsung, mencoba merasakan situasinya, serta melakukan wawancara dengan penduduk yang dipilih secara kebetulan ditemui serta aparat setempat. Di sisi lain dilakukan pencarian data dari informasi sekunder serta penelitian dan studi yang pernah dilakukan sebelumnya. Data-data sekunder tentang Kawasan Kars Pawonsari cukup banyak. Semua data dikompilasi menurut kepentingannya, misalnya dikelompokkan berdasarkan klasifikasi jenis kars dan pemanfaatannya, kondisi, upaya pengelolaan, serta gambaran sosial budaya dan ekonomi penduduk.

Analisis dilakukan dengan mengelaborasi data dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Kars Pawonsari. Data-data pemanfaatan dinilai apakah sudah dilakukan dengan benar menurut ukuran teoritis dan praktis. Data-data pengendalian pemanfaatan dinilai apakah sudah cukup tepat untuk mengkonservasi Kawasan Kars Pawonsari. Di dalam analisis ini sekaligus dilakukan pembahasan untuk memberikan makna yang penting dalam rangka pemanfatan dan pengendalian potensi kawasan kars Pawonsari sebagai hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pawonsari

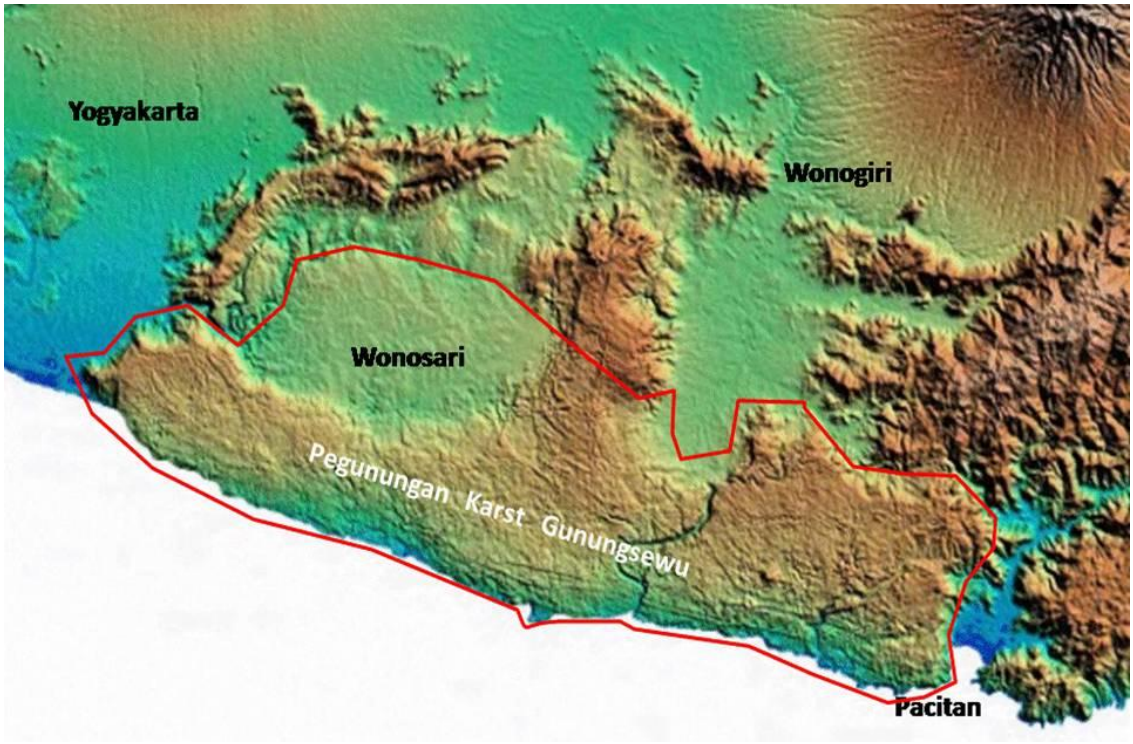
Pawonsari merupakan kawasan yang meliputi daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosari atau Kabupaten Gunung Kidul. Tidak semua wilayah kabupaten-kabupaten tersebut merupakan kawasan kars. Pada umumnya kawasan kars terdapat di sepanjang bagian selatan. Oleh sebab itu wilayah pantai selatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia merupakan pantai kars. Meskipun demikian, sekitar Waduk Gajah Mungkur yang berjarak 30 km dari pantai selatan, alamnya juga di dominasi oleh kars.

Penduduk kawasan Pawonsari umumnya petani yang menggunakan potensi lahan yang ada di dekat tempat tinggalnya. Sebagai kawasan kars, lapisan tanah di kawasan kars Pawonsari umumnya tidak dalam. Sering ditemui tonjolan-tonjolan kars

– terlihat seperti batu kapur atau karang – di sela-sela tanah yang ditanami oleh petani. Penghasilan penduduk dari bertani atau berternak tidak cukup tinggi. Dari bertani dan berternak, penduduk kehidupannya sederhana. Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2016 sebanyak 722.479 jiwa, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebanyak 580.014 jiwa, jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri sebanyak 628.914 jiwa.

Pada kawasan kars, jumlah penduduk sekitar satu juta jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 30 jiwa/hektar. Ada kecamatan dengan kepadatan penduduk sekitar 5 jiwa/hektar, misalnya di Kecamatan Batuwarno Wonogiri namun ada yang kepadatan rata-ratanya sekitar 254 jiwa/hektar, misalnya pada Kecamatan Kebonagung Pacitan.

Kerjasama Antar Daerah (KAD) oleh ketiga kabupaten diresmikan pada tahun 2002 untuk bekerjasama dalam bidang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kawasan Kars Pawonsari terdapat pusat-pusat kegiatan manusia yang membentuk kota-kota sehingga terdapat nodal-nodal perkotaan Pacitan, Ponjong, dan Giriwoyo, kawasan berpeluang dikembangkan dengan berbasis potensi sumber daya alam kawasan kars sebagai kawasan pertanian tertentu, kawasan pariwisata terbatas dengan memanfaatkan bentang alam dan bentukan alam, eksplorasi sumber material dan mineral secara berkelanjutan.



(sumber: http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/09/gunung-sewu-dinobatkan-sebagai-geopark-kelas-dunia)

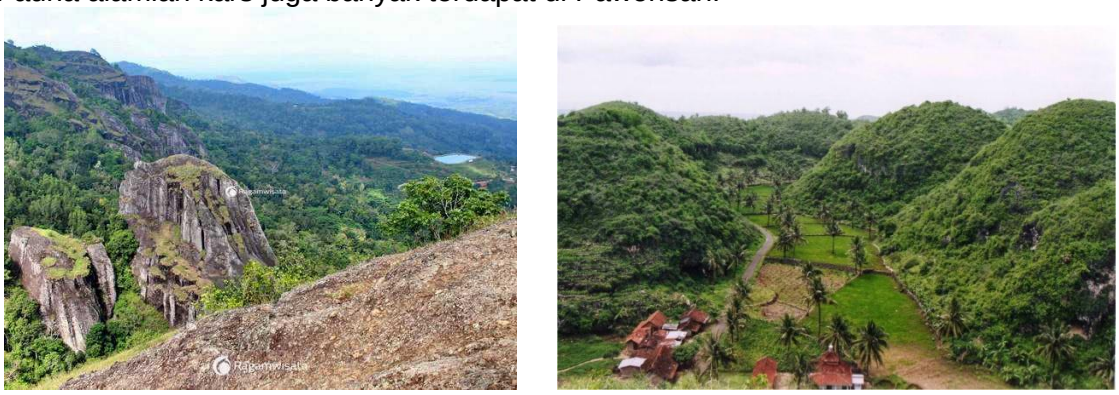
Gambar 1. Kawasan Kars Pawonsari

B. Kawasan Kars Pawonsari

Kawasan kars adalah bentang alam yang terbentuk dari pelarutan batuan terlarut seperti batu gamping, dolomit, dan gipsum. Hal ini ditandai dengan sistem drainase bawah tanah dengan lubang pembuangan dan gua. Sebagai kawasan kars, Pawonsari tutupan lahan didominasi oleh sedimen organik batu gamping terumbu karang, batuan gamping napal, atau batuan gamping dolomit. Batuan ini kalau terpapar sinar matahari dan terkena air hujan mudah lapuk dan larut. Oleh karenanya kawasan ini juga banyak sedimen lepas semacam pasir dari batu gamping atau kalsit atau carbonat. Sebagai bentukan dari masa purba, struktur yang tertinggal adalah bukit-bukit atau tonjolan

kalsit serta lembah berisi dolomit ($CaCO_3$ atau $CaMg(CO_3)_2$). Batuan di dalam tanah yang larut karena aliran bawah tanah menjadikan kawasan ini banyak memiliki gua-gua dan sungai bawah tanah. Selain itu bentukan yang terjadi adalah deretan bukit-bukit kecil (*conical hills*) yang sangat banyak ada di Kawasan Pawonsari yang sering disebut Gunung Sewu atau Gunung Seribu. Juga bisa ditemui lubang-lubang dalam semacam sumur besar dengan diameter dan kedalaman yang bervariasi. Ini akibat dari batuan yang runtuh akibat di bawahnya ada lubang akibat erosi di dalam tanah atau pelarutan batuan gamping secara intensif. Penduduk menyebutnya *luweng*.

Batuan jenis gamping ini tidak subur untuk ditanami. Ditambah dengan curah hujan yang rendah di beberapa lokasi, produktifitas pertanian di Kawasan Kars Pawonsari tidak merata. Air hujan tidak cukup baik disimpan di kawasan kars sehingga pada pemanfaatan lahan untuk pertanian menggantungkan pada adanya hujan. Air hujan yang meresap ke sela-sela retakan kars membentuk aliran sungai bawah tanah yang berpotensi untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu, misalnya dipompa atau dibuat bendungan di dalam tanah. Pertanian yang dilakukan penduduk menggunakan sekitar 25 % untuk tegalan (pertanian lahan kering) serta hanya sekitar 18 % untuk sawah (pertanian lahan basah). Sebagian besar lainnya merupakan lahan terbuka dengan tanaman alamiah dan penghijauan serta nonbudidaya. Lahan terbuka ini sebagian menjadi lahan penggembalaan ternak penduduk berupa kambing dan sapi. Fauna alamiah kars juga banyak terdapat di Pawonsari.



(Sumber:http://ragamwisata.com/wp-content/uploads/2017/03/gunung-api-purba-dan-embung-nglanggeran-1a.jpg
http://klikgeografi.blogspot.co.id/2015/03/bentang-alam-hasil-proses-karstifikasi.html)
Gambar 2. Lansekap Kawasan Kars Pawonsari

Dari klasifikasi yang dilakukan oleh Purnomo dan Sugeng (2005) menggunakan Landsat TM 7 untuk daerah Wonosari terdapat tiga kelas. Ketiganya membedakan bentukan lembah luas, lembah yang tidak lebar dan tidak panjang, serta morfologi perbukitan. Tipenya adalah kegel kars yang juga terbagi menjadi *labyrint cone karst*, *polygonal karst*, *dan residual cone karst*. Bentukan alam di kawasan kars Pawonsari sering menjadi tujuan studi dan kajian penelitian di samping dalam kualitas terbatas menjadi obyek kunjungan wisata sampingan bagi wisatawan yang ke pantai-pantai di selatan. Selain itu kawasan kars di sini juga kadang menjadi obyek para ahli speleologi.

C. Potensi Kawasan Kars dan Pemanfaatan

Kawasan kars Pawonsari memiliki potensi alamiah dan penampakan karakteristik kars yang lengkap. Oleh sebab itu nilai-nilai alamiah yang masih terjaga perlu dikonservasi dengan sebaik-baiknya, apalagi pada tempat-tempat tertentu memiliki keunikan yang jarang ditemui di tempat lain. Selain itu, kerja sama antara daerah Pawonsari untuk meningkatkan promosi dan pengembangan produk wisata,

penyediaan infrastruktur dan transportasi yang layak, serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian juga membangun pemahaman bidang pendidikan dalam rangka pengembangan dan pelestarian Pawonsari khususnya Gunung Sewu sebagai Unesco - Global Geopark Network yang ditetapkan pada 19 September 2015, *menyusul Geopark BATUR di Bali.* Saat ini juga sudah ada Museum Kars di Pracimantoro Wonogiri.



sumber: http://kedaisusu01.blogspot.co.id/2016/09/goa-tanding-pesona-baru-wisata-gunungkidul.html

Gambar 3. Potensi Kars Pawonsari untuk Pariwisata

1. Sumberdaya mineral

Mineral yang berasal dari kawasan kars bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan juga untuk bahan baku industri. Pada saat ini pemanfaatan bahan mineral dari Pawonsari belum dilakukan secara maksimal terutama untuk bahan baku industri. Pemanfaatan mineral yang banyak adalah pengambilan batuan gamping untuk bahan bangunan. Eksploitasi yang masih terbatas menyebabkan alam kars di Pawonsari tidak terdegradasi. Namun penggunaan yang terbatas terutama pada bahan mineral untuk industri yang bernilai tinggi belum bisa menjadikan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Akik dari kawasan Pawonsari juga sudah dikenal luas namun belum cukup bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Pada saat booming beberapa waktu yang lalu yang cukup memberikan peningkatan pendapatan para perajin akik.

2. Sumberdaya lahan

Masyarakat menggunakan tanah yang terbatas di lahan kawasan kars dan beberapa wilayah memiliki tanah yang luas dan subur untuk pertanian. Tanah yang terbatas di sela-sela batuan kars ditanami tanaman semusim seperti padi, jagung, kedelai, singkong, dan semacamnya. Dengan kedalaman yang terbatas, tanah di kawasan kars cenderung sangat kering di musim kemarau. Tanaman yang tumbuh liar sekarang juga banyak terlihat ditanami rumbut gajah dan lamtoro gung untuk makanan ternak. Ternak masyarakat yang meluas masih terbatas pada sapi dan kambing. Ayam, itik, mentok juga ada.

Pemanfaatan lahan belum dilakukan dengan menyadari bahwa di kawasan kars perlu dijaga proses terjadinya imbuhan air ke dalam bumi. Hidrologi bawah tanah akan baik jika proses imbuhan ini berlangsung dengan baik.




Sumber:http://wisatawanalam.blogspot.co.id/2014/07/wisata-alam-gunung-kidul.html?m=1
Gambar 4. **Pemanfaatan Lahan untuk Pertanian**

3. Sumberdaya flora

Tanaman yang tumbuh di kawasan kars dengan pengaruh bentang alam yang unik bisa beragam juga. Tanaman tersebut mulai dari rumput-rumputan, perdu dan semak, serta pohon-pohon yang umurnya tahunan. Tanaman jenis rumput dan perdu biasanya digunakan untuk makanan ternak, dan digunakan untuk tanaman obat oleh penduduk. Penggunaan sebagai bahan baku industri jamu dan kecantikan masih secara terbatas. Tanaman tahunan yang banyak tumbuh di Pawonsari misalnya Jati, Mahoni, Akasia dan Sengon. Potensinya untuk digunakan sebagai bahan bangunan.

4. Sumberdaya fauna

Binatang yang hidup di kawasan Kars Pawonsari bisa meliputi beberapa jenis kera. Selain itu terdapat banyak jenis burung dan kelelawar serta reptilia. Di tempat-tempat yang banyak air akan mudah ditemui ikan, jenis-jenis keong, serta katak dan jenisnya kepiting air tawar. Berbagai jenis serangga mudah ditemui di sini, malah seperti walang sangit dan belalang bisa menjadi makanan yang diperdagangkan. Madu sebagai hasil dari budi daya lebah juga bisa ditemui di beberapa tempat. Keberadaan fauna secara alamiah di kawasan kars keadaannya stabil bertahun-tahun tidak berubah secara signifikan. Pemanfaatannya belum sampai mengganggu ekosistem.

5. Sumberdaya air

Pada umumnya kawasan kars tidak bisa menyimpan air di permukaan tanah. Namun banyaknya telaga menjadi potensi tersendiri di kawasan ini. Beberapa tempat diketahui terdapat sungai bawah tanah. Adanya telaga menjadi habitat tempat kehidupan berbagai flora dan fauna. Banyak terdapat jenis-jenis tanaman yang bisa dinikmati produksinya sepertinya semanggi untuk makanan atau bisa dinikmati keindahannya seperti bunga padmawijaya atau teratai yang hidup di banyak telaga.Di telaga ini juga berbagai burung-burung lokal seperti kuntul sering bisa ditemui. Sungai bawah tanah di tempat masuknya ke dalam tanah atau di tempat keluarnya sungai bawah tanah menjadi daya tarik sendiri untuk didatangi.

6. Sumberdaya lansekap

Lembah, bukit, banyaknya gunung-gunung kecil semacam tonjolan-tonjolan di permukaan tanah, tebing-tebing karang atau pun sumuran-sumuran merupakan pemandangan yang luar biasa untuk dinikmati. Apalagi diselingi oleh adanya atau tiadanya tanaman. Di dalam tanah atau di bawah permukaan tanah terdapat banyak goa, ada yang pendek dan ada panjang, ada yang mudah dijelajahi namun juga ada yang perlu upaya avonturir untuk mencapainya merupakan potensi lansekap di kawasan kars Pawonsari. Goa yang panjang bisa terjadi karena gerusan dalam batuan bawah tanah yang kemudian terbentuk sungai bawah tanah, namun pada akhirnya mengering. Oleh sebab itu dengan penjelasan ilmiah yang sama, potensi kars ini bisa

sangat rawan oleh adanya erosi atau oleh kurangnya curah hujan yang menyebabkan batuan kars mudah larut atau hancur.

Di pantai selatan, banyak pantai yang cukup baik untuk dinikmati karena ombaknya, pasirnya, atau pemandangan lansekap. Di Pawonsari juga terdapat beberapa pelabuhan yang berfungsi untuk kegiatan angkutan barang, penumpang, perikanan, militer, dan sebagainya. Pelabuhan tersebut adalah Tamperan dan Gelon di Pacitan serta Sadeng di Gunung Kidul.



(Sumber:http://images.detik.com/customthumb/2012/06/18/1025/img_20120618153036_4fdee72c8de54.jpg?w=600)

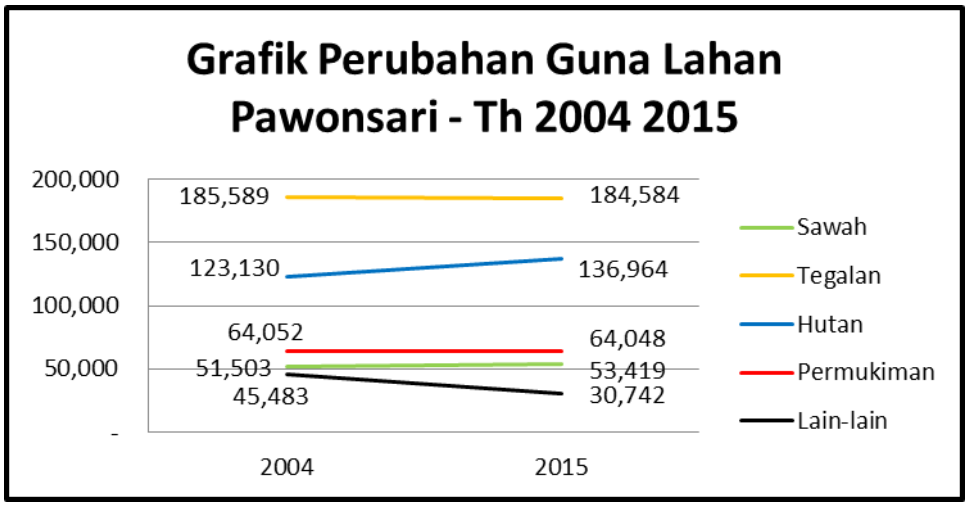
Gambar 5. Pantai Selatan di Kawasan Kars Pawonsari

7. Sumberdaya budaya

Cara hidup masyarakat yang tinggal di daerah kawasan kars bisa memiliki keunikan sesuai dengan alamnya yang relatif tidak mudah ditaklukkan. Namun selain itu juga ada berbagai tradisi budaya yang bisa ditemui kawasan kars Pawonsari, di antaranya adalah upacara melasti di Pantai Gunung Kidul seperti di Pantai Ngobaran. Upacara Rasulan juga di gunung Kidul, Upacara Adat Cing-cing Goling di Karangmojo Gunung Kidul, Pertapaan Kembang Lampir di Kecamatan Panggang Gunung Kidul, Upacara Babad Dalan Sodo di Kecamatan Paliyan di Gunung Kidul, serta Upacara Sedekah laut di di Pantai Kukup Kecamatan Tanjung sari Gunung Kidul.

Di Kabupaten Wonogiri bisa ditemui tradisi budaya misalnya Malem Selikuran, Adat Ruwatan. di Kabupaten Pacitan bisa ditemui Upacara Adat Mantu Kucing, Upacara Adat Ceprotan, di Kecamatan Donorojo. Di Kecamatan Kebonagung ada upacara adat Tataken Gunung Limo dan Upacara Adat Eretan serta Upacara Adat Baritan. Pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan.

Dengan segala sumber daya yang dimiliki, Kawasan Pawonsari berpeluang dikembangkan dengan berbasis potensi sumber daya alam kawasan kars – eksokart dan endokarst – sebagai kawasan pertanian tertentu, kawasan pariwisata terbatas dengan memanfaatkan bentang alam dan bentukan alam, eksplorasi sumber material, mineral dan sumber air bersih secara berkelanjutan. Istilahnya pengembangan kawasan kars dengan konsep *geotourism* atau geowisata. Namun di sisi lain penataan ruang wajib melindungi keunikan-keunikannya terkait geologi, geomorfologi, palaentologi, hidrologi, serta flora dan fauna dan memanfaatkanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu prinsip *integrity of place* dipakai dalam memanfaatkan semua sumber daya; memperkuat karakter kawasan kars, menjaga kearifan lokal, untuk menjadi obyek geowisata.



Sumber: BPS Kab. Pacitan, BPS Kab.Wonogiri, BPS Kab. Gunungkidul – 2004 2015

Gambar 6. Grafik Perubahan Guna Lahan Tahun 2004 2015

D. Pengendalian Pemanfaatan

1. Inventarisasi

Inventarisasi potensi dan permasalahan Kawasan Kars Pawonsari perlu dilakukan yang meliputi keberadaan sumber daya mineral, sumber daya lahan, sumber daya flora, sumber daya fauna, sumber daya air, sumber daya lansekap, dan sumber daya budaya. Di sini terdapat nilai kekhususan sebagai kawasan kars dalam satu sistem lengkap dalam satu situs kawasan. Namun demikian di kawasan ini juga terdapat potensi terdapat konflik antara pelestarian sumber daya alam dan pemanfaatan untuk kesejahteraan, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta jika dijadikan kawasan pariwisata yang tidak terkendali.

Keberagaman atau diversitas potensi di Pawonsari bisa memancing berbagai kegiatan budi daya, misalnya sebagai ruang dalam berkehidupan, sebagai obyek geowisata, sebagai obyek pembelajaran dan kajian ilmu pengetahuan, sebagai obyek yang dilestarikan. Kapasitas masyarakat juga diidentifikasi untuk bisa ikut dilibatkan dalam mengelola kawasan kars.

2. Penataan pemanfaatan ruang

Penataan ruang dalam kerangka pemanfaatan Kawasan Kars Pawonsari harus memperhatikan potensi-potensi yang ada dan mengatur sesuai kemampuan dan permasalahan lahan. Kawasan kars memiliki kompleksitas isi, baik fisik dasar, iklim mikro, sosial ekonomi dan budaya, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Salah satu yang penting diperhatikan adalah pada kawasan kars terdapat nilai kelangkaan yang ditonjolkan terkait geologi, geomorfologi, palaentologi, hidrologi, serta flora dan faunanya yang ada di alam asli. Pariwisata terbatas merupakan cara pemanfaatan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi masyarakat ikut mendapatkan benefit. Namun demikian pembatasan dalam pemanfaatan harus tetap memperhatikan kebutuhan wisatawan atau ahli yang datang ke kawasan Kars Pawonsari. Pariwisata terbatas bisa dilakukan dengan melakukan membatasi jumlah pasar wisata pada obyek-obyek yang relevan saja (*market selectivity*).

3. Rehabilitasi

Kawasan kars yang sudah terlanjur mengalami perusakan karena eksploitasi terutama untuk pengambilan kapur perlu dikembalikan fungsinya sebagai ekosistem yang seimbang. Sebagaimana disampaikan dalam pembahasan, rehabilitasi di Kawasan Kars Pawonsari dilakukan agar proses alami kawasan kars bisa berlangsung

kembali. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bijaksana, berhati-hati dalam mengeksploitasi sumberdaya alam yang langka, menggunakannya sesuai kemampuan alam dengan berkonsep pada keberlanjutan dan mengutamakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Masyarakat dan pengunjung diajak menyadari dan menginterpretasi perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu kontrol dan evaluasi terhadap kondisi dan situasi yang berkembang di Kawasan Kars Pawonsari harus terus menerus dilakukan. Sebagai obyek geowisata harus ada prinsip *protection and enhancement of destination appeal*.

IV. PENUTUP

Pada Kawasan Kars Pawonsari, konservasi dilakukan dengan menjaga keunikan yang ada dengan tetap memanfaatkan potensinya terutama untuk kesejahteraan penduduk setempat yang masih perlu ditingkatkan kesejahteraan ekonominya. Kerusakan dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi perlu direhabilitasi sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjadi. Sebagaimana ketentuan dalam mengelola makna kawasan yang kemudian menjadi kawasan wisata alam (geowisata), maka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan di sini harus memenuhi ketentuan berikut.

Pertama adalah memperhatikan kemampuan sumber daya alam yang terdapat di kawasan kars untuk dieksploitasi. Sumber daya alam tersebut bisa meliputi sumber daya-sumber daya mineral, lahan, flora, fauna, air, lansekap harus ditangani dengan konsep *environmentally responsible*. Kedua adalah keberadaan penduduk dengan aspek-aspek sosial-ekonomi-budayanya di Kawasan Kars Pawonsari dan dengan keunikannya dihargai sebagai potensi lokal. Kearifan-kearifan lokal selayaknya dijunjung sebagai payung dalam mengelola kawasan kars untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Istilahnya lainnya *Culturally responsible*. Ketiga adalah memaksimalkan nilai tambah secara bersama-sama (*synergy*) antara pemanfaatan sumber daya alam kars dengan sumber daya budaya. Dengan sinergi ini diharapkan pariwisata di Kawasan Kars Pawonsari bisa berkembang sehingga bermanfaat secara luas untuk rekreasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, tetap melakukan konservasi untuk menjaga kelestarian kawasan, namun juga meningkatkan harkat martabat penduduk lokal sebagai pihak yang bermukim di Kawasan Kars Pawonsari. Masyarakat di sini ikut menjadi pelaku dalam menjaga dan memanfaatkan Kawasan Kars Pawonsari.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi Purnomo, Sugeng, *Klasifikasi Kawasan Karst Menggunakan Landsat TM 7 Daerah Wonosari, Yogyakarta*, Makalah dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan MAPIN XIV ”Pemanfaatan Efektif Penginderaan Jauh untuk Peningkatan Kesejahteraan Bangsa” Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 14 – 15 September 2005

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456 K/20/MEM/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars

Laporan Tugas Studio Perencanaan Wilayah Prodi PWK FT UNS Tahun 2016

Website:

http://Gunungsewugeopark.Org

http://Images.Detik.Com/Customthumb/2012/06/18/1025/Img_20120618153036_4fdee72c8de54.Jpg?W=600

http://kedaisusu01.blogspot.co.id/2016/09/goa-tanding-pesona-baru-wisata-gunungkidul.html

http://klikgeografi.blogspot.co.id/2015/03/bentang-alam-hasil-proses-karstifikasi.html

http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/09/gunung-sewu-dinobatkan-sebagai-geopark-kelas-dunia
http://ragamwisata.com/wp-content/uploads/2017/03/gunung-api-purba-dan-embung-nglanggeran-1a.jpg
http://wisatawanalam.blogspot.co.id/2014/07/wisata-alam-gunung-kidul.html?m=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekowisata
https://id.wikipedia.org/wiki/Pegunungan_Sewu

Potensi Pariwisata Budaya Berbasis Rumah Tinggal di Kota Palembang

Tetty Harahap
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri, Palembang
Email: tetty.harahap@uigm.ac.id

ABSTRAK

Kota Palembang termasuk ke dalam sepuluh kota besar di Indonesia yang memiliki potensi wisata khas dibanding daerah-daerah lainnya. Dengan latar belakang sejarah budaya yang kuat, Kota Palembang memiliki banyak lokasi wisata budaya yang berbasis ketokohan, produk khas, komunitas/etnis, peninggalan dan funeral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pariwisata di Kota Palembang yang meliputi kondisi eksisting dan potensi pengembangan dari sejumlah 64 tujuan destinasi pariwisata. Sejumlah destinasi ini setelah diterapkan metode deskriptif kualitatif dengan memasukkan parameter ke-khasan khusus maka didapat tujuh destinasi yang berpotensi sebagai destinasi berbasis pemukiman. Guna memperkuat potensi pariwisata yang telah ada, pembenahan semua sektor destinasi telah dilakukan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan event akbar Asian Games 2018, sehingga semakin membuka peluang kunjungan wisata bagi wisatawan yang berada di luar Kota Palembang. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa ada tujuh potensi pariwisata budaya berbasis permukiman diatas memiliki ciri khas dan komoditi masing-masing yang memiliki daya tarik masing-masing.

Kata kunci: pariwisata, permukiman, budaya,

I. PENDAHULUAN

Kota Palembang memiliki latar belakang sejarah yang kuat di Indonesia. Berdirinya Kerajaan Sriwijaya di masa lampau dan sejarah peradaban lain di kota ini membuat potensi-potensi pariwisata budaya menjadi aset wilayah yang harus dikembangkan. Kota Palembang masuk ke dalam sepuluh kota besar di Indonesia. Tahun 2018, Kota Palembang akan menjadi tuan rumah bagi *megaevent* Asian Games 2018. Kondisi ini membuat Kota Palembang berbenah, terutama dari segi infrastruktur.

Kota Palembang pada dasarnya memiliki berbagai potensi wisata, yang melingkupi wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus (Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2017). Pada bagian wisata budaya, potensi wisata yang ada juga terdiri dari wisata bangunan fisik dan wisata budaya non-fisik. Penulis tertarik meneliti tentang potensi wisata budaya berbasis rumah tinggal di Kota Palembang. Hal ini mengingat bahwa budaya adalah hasil dari suatu peradaban. Suatu hal yang menarik apabila potensi wisata lahir dari sebuah satuan rumah tinggal yang memiliki ciri khas tertentu. Potensi wisata inilah yang memiliki peluang untuk dikembangkan dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pariwisata budaya berbasis rumah tinggal di Kota Palembang dan potensi pengembangannya menjadi pariwisata berkelanjutan di Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskripstif adalah penelitian yang menggunakan metode yang melukiskan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut (Nawawi dan Martini (1994) dalam Ufie

(2013)). Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik :

1. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama untuk mendatangi secara langsung sumber data.
2. Mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung kata-kata daripada angka
3. Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak semata-mata kepada hasil
4. Melalui analisis induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi
5. Mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif. (Bogdan dan Biglen (1982) dalam Ufie (2013)).

Peneliti mengumpulkan data primer dengan observasi lapangan dan data sekunder mengenai lokasi-lokasi pariwisata di Kota Palembang yang secara khusus mengelompokkan pariwisata budaya berbasis rumah tinggal dengan empat kriteria, dan menganalisisnya menjadi sebuah rencana pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan di Kota Palembang.

Empat kriteria yang menjadi parameter dalam klasifikasi pariwisata budaya berbasis rumah tinggal di Kota Palembang adalah :

1. *Adanya penduduk yang bermukim*

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermukim adalah bertempat tinggal. Dalam konteks ini, permukiman menjadi tempat tinggal tersebut. Adanya penduduk yang bermukim di lokasi wisata tersebut merupakan salah satu unsur yang membentuk budaya dan kekhasan yang menjadi modal dasar dalam pembentukan pariwisata budaya tersebut.

2. *Terdapat komoditas yang menjadi penarik wisatawan*

   Pariwisata pada prinsipnya adalah kegiatan rekreasi di tempat khusus yang menimbulkan kesan berbeda dari rutinitas. Ada faktor penarik yang membuat wisatawan tertarik untuk datang ke lokasi tersebut. Dengan kata lain, ada barang yang dijual di lokasi tersebut. Komoditas dapat dikatakan sebagai barang dagangan utama. Komoditas ini dapat berupa hasil kerajinan lokal, pemandangan, budaya, suasana, maupun kuliner setempat.

3. *Ada keterlibatan atau partisipasi masyarakat untuk eksitensi pariwisata budaya*

   Peran masyarakat adalah elemen penting dari pengokohan suatu lokasi wisata. Lokasi wisata yang berkembang dengan keterlibatan masyarakat akan memiliki keberlanjutan yang lebih baik. Keberlanjutan akan membuat pariwisata yang ada menjadi kokoh dan berkembang.

4. *Keberadaan lokasi wisata yang lebih dari sepuluh tahun*

Eksistensi adalah suatu bukti autentik bahwa lokasi wisata ini bukan hanya tren sementara. Sepuluh tahun adalah waktu yang cukup lama menunjukkan keberadaan dan perkembangan suatu lokasi wisata. Dengan parameter ini, lokasi wisata yang masuk dalam kategori pariwisata budaya berbasis tempat tinggal adalah lokasi wisata yang telah lama berdiri.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan klasifikasi lokasi wisata yang termasuk ke dalam pariwisata budaya berbasis rumah tinggal. Lokasi wisata yang memenuhi ≥ 75% dari empat parameter di atas, masuk ke dalam kategori tersebut. Analisis dilanjutkan dengan rencana pengembangan lokasi wisata yang masuk ke dalam klasifikasi, maupun yang tidak masuk klasifikasi pariwisata budaya berbasis rumah tinggal.

Persiapan penelitian meliputi persiapan data awal mengenai pariwisata budaya Kota Palembang, studi literatur, dan persiapan survei lapangan. Pelaksanaan Penelitian meiputi survei lapangan dan analisis data. Penelitian diakhiri dengan menghasilkan identifikasi potensi budaya berbasis rumah tinggal di Kota Palembang

dan rencana pengembangannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Palembang memiliki tiga jenis potensi destinasi wisata. Pertama adalah wisata alam di Kota Palembang. Kedua adalah wisata sejarah budaya Kota Palembang. Ketiga adalah Wisata Minat Khusus di Kota Palembang. Potensi wisata yang dibahas dalam tulisan ini adalah wisata sejarah budaya di Kota Palembang. Penulis memberikan batasan selanjutnya dengan menambahkan kategori potensi wisata budaya yang berbasis rumah tinggal.

Tabel 1. Potensi Wisata Budaya Berbasis Rumah Tinggal

No	Destinasi	Parameter Identifikasi Pariwisata Pemukiman			
		Pemukiman	Komoditi khas	Keterlibatan masyarakat	Keberadaan ≥ 10 Tahun
1	Meseum TPKS	-	√	-	√
2	Meseum Dr. A.K. Gani	-	√	-	√
3	Meseum Tekstil	-	√	-	√
4	PT. Pusri	-	√	-	√
5	Balai Pertemuan KBTR	-	√	-	√
6	Pulokerto	-	√	√	-
7	Kampung Firma	√	√	√	√
8	Masjid Ceng Ho	-	√	-	-
9	PT. Pertamina	-	√	-	√
10	Pulau Kemarau	-	√	-	√
11	Sungai Musi	-	√	-	√
12	Kambang Iwak	-	√	-	√
13	Graha Songket	-	√	-	√
14	Hutan Wisata Punti Kayu	-	√	-	√
15	Kantor Ledeng	-	√	-	√
16	Jembatan Ampera	-	√	-	√
17	Benteng Kuto Besak	-	√	-	√
18	Bukit Siguntang	-	√	-	√
19	Meseum Bala Putera Dewa	-	√	-	√
20	Meseum SMB II	-	√	-	√
21	MONPERA	-	√	-	√
22	Masjid Agung	-	√	-	√
23	Masjid Ki Merogan	-	√	-	√
24	Masjid Lawang Kidul	-	√	-	√
25	Masjid Pulau Seribu	-	√	-	√
26	Masjid Al Mahmudiyah Simpang Suro	-	√	-	√
27	Masjid Sultan Agung	-	√	-	√
28	Makam Kambang Koci	-	√	-	√
29	Makam Kawah Tekurep	-	√	-	√
30	Makam Sultan Agung	-	√	-	√
31	Makam Sabokingking	-	√	-	√
32	Makam Bagus Kuning	-	√	-	√
33	Makam Cinde Welang	-	√	-	√
34	Makam Ki Gede Ing Suro	-	√	-	√

No	Destinasi	Parameter Identifikasi Pariwisata Pemukiman			
		Pemukiman	Komoditi khas	Keterlibatan masyarakat	Keberadaan ≥ 10 Tahun
35	Makam Sultan M. Mansyur	-	√	-	√
36	Makan Ariodilla	-	√	-	√
37	Rumah Limas Cek Mas	-	√	-	√
38	Rumah Limas Bayumi Wahab	-	√	-	√
39	Kawasan I Ilir	-	√	-	√
40	Kawasan Pasar 16	-	√	-	√
41	Kawasan Tuan Kentang	√	√	√	√
42	Kawasan sekanak	√	√	√	√
43	Kawasan Pengrajin Songket Tangga Buntung	√	√	√	√
44	Klenteng Dewi Kwan IM	-	√	-	√
45	Kampung Kapitan	√	√	√	√
46	Kampung Arab Al-Munawwar	√	√	√	√
47	Pabrik es assegaf	-	√	-	√
48	Rumah Adat Dekranasda	-	√	-	-
49	Goa Jepang Ario Kemuning	-	√	-	√
50	Goa Jepang Jalan Joko	-	√	-	√
51	Meseum Sriwijaya	-	√	-	√
52	Jakabaring Sport City	-	√	-	-
53	OPI Water Fun	-	√	-	-
54	Fantasy Island	-	√	-	-
55	Amanzi Water Park	-	√	-	-
56	Danau OPI	-	√	-	-
57	Al-Quran Akbar	-	√	-	-
58	Palembang Bird Park	-	√	-	-
59	Kawasan Sungai Lumpur	√	√	√	√
60	Rumah Limas KMS HA. Aziz wahid	-	√	-	-
61	Kawasan Kampung Ukir	-	√	-	√
62	Monumen Silk Air	-	√	-	√
63	Sudirman walk	-	√	-	-
64	Kenten park	-	√	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Palembang, 2017

Berdasarkan empat parameter yang telah dijelaskan di bagian metode, penulis mendapatkan tujuh destinasi pariwisata yang masuk ke dalam kategori pariwisata budaya berbasis rumah tinggal. Tujuh destinasi tersebut telah memenuhi minimal 75% dri parameter yang telah ditentukan. Tujuh destinasi tersebut adalah :

1. Kawasan Pengrajin Songket Tangga Buntung
2. Kampung Arab Al Munawwar
3. Kampung Kapitan
4. *Sekanak Heritage Village*

5. Kawasan Firma
6. Kampung Sungai lumpur
7. Kampung Tuan Kentang

Penjelasan lebih lengkap mengenai destinasi-destinasi pariwisata tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Kawasan Pengrajin Songket Tangga Buntung*

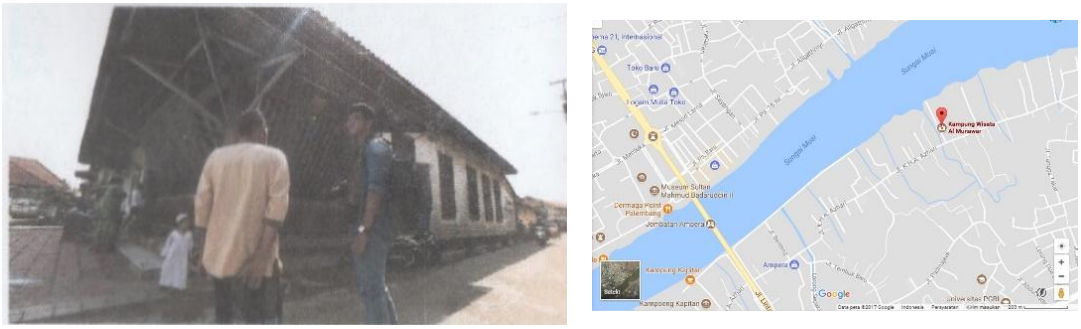
Lokasi wisata yang pertama terdapat di kawasan tangga buntung, kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Komoditas dari kawasan ini adalah kain songket yang dibuat oleh warga yang bertempat tinggal di kawasan tangga buntung ini. Songket adalah hasil kerajinan yang bernilai seni tinggi khas Palembang. Songket-songket yang terkenal antara lain adalah Fikri Collection, Cek Ipah, Cek Ilah, dan Zainal Songket. Sebagai contoh, songket fikri collection telah berdiri sejak tahun 2000. Hal ini telah menunjukkan bahwa kerajinan songket ini telah didirikan sejak 17 tahun yang lalu dan masih lancar hingga saat ini. Komoditas yang diperjualbelikan pun tidak hanya songket, melainkan juga ada batik jenis songket, sarung tajung, jumputan dan souvenir khas Kota Palembang.



Sumber *: Google Maps* dan Dinas Pariwisata Kota Palembang (2017)
Gambar 1. Lokasi dan Gambar Kampung Arab AL Munnawar

2. *Kampung Arab Al-Munawwar*

Kampung Arab Al Munawwar adalah salah satu perkampungan yang ada di tepian Sungai Musi. Sebagai sungai utama yang membelah Kota Palembang menjadi dua, Sungai Musi juga menjadi icon Kota Palembang. Kampung arab adalah kampung yang dominan ditinggali oleh warga berketurunan etnis Arab. Kampung Arab Al Munawwar terletak di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. Kampung Arab sedang gencar dikembangkan lagi menjadi destinasi wisata religi di Kota Palembang oleh Pemerintah Daerah. Kesiapan Kampung Arab untuk menyandang gelar Kampung Religi juga didukung oleh peran masyarakat setempat. Masyarakat Kampung Al Munawwar sangat ramah dan terbuka dengan wisatawan yang datang. Senyum dan izin memotret segala sudut kampung ini menjadi pendukung yang sangat berarti untuk terbukanya kampung ini sebagai destinasi wisata.



Sumber *: Google Maps* dan Dinas Pariwisata Kota Palembang (2017)
Gambar 2. Lokasi dan Gambar Kampung Arab AL Munnawar

3. *Kampung Kapitan*

Kampung Kapitan adalah sebuah perkampungan yang terletak di Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Letaknya bersebelahan dengan Jembatan Ampera. Nama Kampung Kapitan adalah semacam penanda bagi keberadaan komunitas marga Tionghoa yang tinggal di Kampung tersebut. Pembatas Kampung, mulai dari Tepi Sungai Musi di utara hingga ke Tepian Jalan K.H.A. Azhary di bagian selatannya. Bagian barat berbatasan dengan kelenteng yang kini sudah tidak berfungsi lagi dan sebelha timur berbatasan dengan sungai kedemangan. Jalan masuk utama ke kampung ini adalah sebuah jalan kampung sepanjang krang lebih 50 meter. Pada kawasan utama kampung ini, wisatawan akan melewati gerbang utama yang merupakan penghubung antara Rumah Kapitan dan Rumah Abu yang menjadi simbol Kampung Kapitan ini.

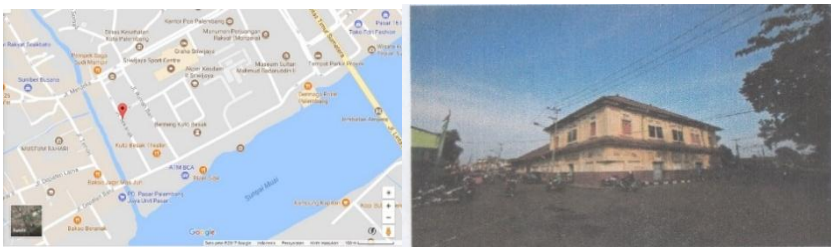


Sumber *: Google Maps* dan Dinas Pariwisata Kota Palembang (2017)

Gambar 3. Lokasi dan Gambar Kampung Kapitan

4. *Kampung Sekanak*

Kampung Sekanak adalah kawasan permukiman tua masyarakat asli Kota Palembang. Lokasinya berada di Keluarahan 7 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Dahulu, kawasan ini adalah tempat tinggal kawasan bangsawan di Kota Palembang.



Sumber *: Google Maps* dan Dinas Pariwisata Kota Palembang (2017)

Gambar 4. Lokasi dan Gambar Kampung Sekanak

5. *Kampung Firma*

Kampung Firma ini terdapat di Kelurahan 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Di Kampung ini banyak terdapat rumah-rumah limas lama. Rumah Limas adalah rumah adat khas Kota Palembang. Rumah yang paling lama adalah yang berusia 250 tahun. Selain itu, tak jauh dari Kampung Firma ini, terdapat rumah persembunyian Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, yaitu Ir. Soekarno, dari kejaran Belanda.

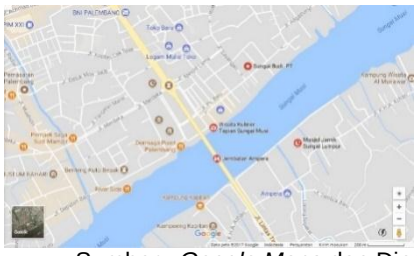


s Pariwisata Kota Palembang (2017)

Gambar 5. Lokasi dan Gambar Kampung Firma

6. *Kampung Sungai Lumpur*

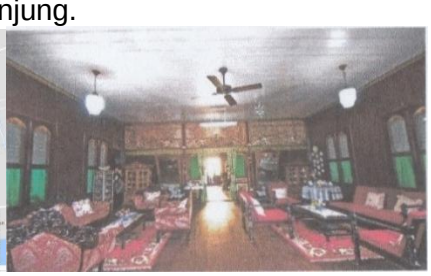
Kampung Sungai Lumpur terdapat di Jalan Abdullah Azhary, Keluarahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang. Di Kampung ini terdapat masjid tua bersejarah yang memeperlihatkan jejak-jejak penyebaran Islam di Kota Palembang.




Sumber *: Google Maps* dan Dinas Pariwisata Kota Palembang (2017)
Gambar 7. Lokasi dan Gambar Kampung Sungai Lumpur

7. *Kampung Tuan Kentang*

Kampung Tuan Kentang terletak di Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Kawasan ini terkenal sebagai kawasan pengrajin kain tenun. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perindustrian, Bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) akan menjadikan Kawasan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, sebagai kampung kain. Adanya Kampung kain ini menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat. Komoditas yang ada di Kampung ini adalah songket khas Palembang, jumputan, blongsong, dan kain tanjung.

Sumber *: Google Maps* dan Dinas Pariwisata Kota Palembang (2017)
Gambar 7. Lokasi dan Gambar Kampung Tuan Kentang

Ketujuh lokasi tersebut mempunyai potensi pengembangan dengan pola perencanaan partisipatif. Kawasan-kawasan tersebut memerlukan partisipasi aktif dari warga dan pemerintah untuk pengembangan potensi masing-masing. Setiap lokasi mempunya komoditi wisata yang berbeda-beda. Hal ini bisa juga menjadi percontohan bagi kawasan lainnya untuk mengembangkan wisata dengan konsep, *one village one tourism.*

Saat ini, Pemeritah Kota Palembang melalui Dinas Pariwisata, telah melakukan program kerjasama dengan biro *tour* dan *travel* lokal untuk menyediakan paket tur di Kota Palembang. Kampung Al Munnawar dan Kampung Kapitan disatukan dalam paket tur tersebut. Hal ini menunjukkan sudah ada usaha dari pemerintah setempat dalam mengembangkan potensi pariwisata budaya berbasis rumah tinggal di kota palembang.

Selain, partisipasi masyarakat dan peran pemerintah kota, ketujuh destinasi wisata tersebut dapat dikembangkan dengan menambah promosi dan diferensiasi komoditas yang dapat membuat wisatawan hanya dapat datang ke destinasi tersebut untuk suatu barag atau suasana yang dicari. Dengan cara ini, setiap destinasi wisata dapat berkembang secara mandiri dan fokus untuk menjadi bagian dari kekayaan destinasi pariwisata Kota Palembang.



Sumber : Analisis, 2017

Gambar 8. Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Budaya Berbasis Rumah Tinggal di Kota Palembang.

IV. KESIMPULAN

Kota Palembang memiliki tujuh potensi wisata budaya berbasis rumah tinggal. Kondisi masing-masing lokasi sudah memiliki daya tarik dan menarik wisatawan dengan pola organik. Ketujuh lokasi tersebut mempunyai potensi pengembangan pariwisata dengan pola partispatif dan dapat menjadi percontohan untuk kawasan permukiman/ kampung lain dengan konsep *one village one tourism.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dinas Pariwisata Kota Palembang. 2017. *Destinasi Wisata Kota Palembang Dan Program Half Day Palembang Tour.* Palembang.

Indriastuti, Kristantina, dkk. (2016). Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan. Palembang : Balai Arkeologi Sumatera Selatan.

Prideaux and Cooper (Penyunting). (2006). River Tourism. UK : CAB Interbational

Suwantoro, Gamal. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta : Penerbit Andi.

Jurnal :

Suherlan, Herlan dan Nurdin Hidayah. *Sikap Wisatawan Nusantara terhadap Produk Wisata Kuliner di Kota Palembang.* *Journal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2015. 1-13.

Tesis :

Ufie, Agustinus. 2013. *Kearifan Lokal (local wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia

Website:

Dinas Pariwisata Kota Palembang (2017). *Destinasi Wisata Kota Palembang* Diakses pada Juni 2017, dari alamat http://palembang-tourism.com

Pertimbangan Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Mandeh Sumatera Barat

Hamdi Nur[1], Ahyuni[2]

[1]*Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta Padang*
[2] *Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi, Universitas Negeri Padang*
Email: hamdinur66@gmail.com*;* ahyuniaziz@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Mandeh adalah kawasan wisata pesisir unggulan Sumatera Barat yang juga direncanakan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata. Ada harapan sangat besar bahwa kawasan wisata Mandeh akan dapat menjadi destinasi wisata yang mampu menjadi pendorong pembangunan ekonomi daerah. Berbagai rencana telah dibuat dan program dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dijalankan. Agar pengembangan kawasan wisata berjalan sesuai dengan harapan maka beberapa pertimbangan dalam aspek fisik, sosial ekonomi dan pengendalian pembangunan perlu dijadikan dasar dalam mengambil keputusan perencanaan. Pertimbangan tersebut merupakan hasil dari beberapa diskusi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan pelaku wisata tentang pengembangan wisata Kawasan Mandeh.

Kata kunci: pertimbangan, pariwisata, pesisir

I. PENDAHULUAN

Kawasan Wisata Mandeh mulai dikembangkan sejak tahun 2000-an. Mulai saat itu jalan sepanjang pesisir Mandeh dibuka dan telah mengubah keterisoliran desa sepanjang pesisir. Kawasan ini masuk sebagai destinasi utama pariwisata kebaharian dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) tahun 2004 bersama Biak dan Bunaken. Akan tetapi pembangunan pariwisata Kawasan Mandeh kemudian boleh dikatakan relatif stagnan sampai kemudian pada tahun 2015 pengembangan Kawasan Mandeh mulai mengemuka lagi dengan digelarnya Mandeh Joy Sailing dan Festival Mandeh sejalan dengan dijadikannya sektor pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi unggulan nasional. Kawasan Mandeh menurut Ketua Pokja Percepatan 10 Bali Baru pada pertengahan Tahun 2017 nanti, ditargetkan area itu menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Pada lahan seluas 400 hektar akan dibangun pusat amenitas, seperti hotel, convention hall, restoran, café dan fasilitas lainnya (sumber:http://www.tribunnews.com/regional/2016/06/10/mandeh-bakal-jadi-kawasan-ekonomi-khusus-pariwisata).

Berbagai program yang berasal dari pendanaan pusat, provinsi dan kabupaten dan juga dari para filantrofis telah dilakukan khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sanitasi permukiman. Penggiat wisata juga telah mulai memberdayakan masyarakat dalam pengembangan usaha wisata dan berbagai bentuk kegiatan untuk mempromosikan Kawasan Mandeh. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengembangkan Kawasan Mandeh perlu untuk merujuk kepada beberapa pertimbangan fisik, ekonomi, sosial dan kelembagaan sesuai dengan karakteristik dan potensi kawasan.

II. METODE

Analisis dan kesimpulan dalam merumuskan pertimbangan ini diperoleh dari hasil *focus group discussion* yang pernah dilakukan di nagari-nagari di Kawasan Mandeh dalam rangka penyusunan rencana pengembangan kawasan berbasis masyarakat.

Beberapa pertemuan yang diadakan oleh pemerintah daerah dan inisiatif pelaku dan penggiat wisata membahas usulan dan saran bagaimana sebaiknya pengembangan Kawasan Wwisata Mandeh dilakukan. Kegiatan ini berlangsung sepanjang tahun 2015-2016 di Kota Painan, Padang, dan Jakarta. Penulis terlibat aktif didalamnya dalam merumuskan, mencatat dan menyimpulkan hasil diskusi. Hasil keterlibatan penulis tersebut kemudian dituangkan sebagai dasar penulisan makalah ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kawasan

Kawasan Mandeh terletak di Bagian Barat Provinsi Sumatera Barat dan menjadi bagian wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan Mandeh dapat dicapai dari Kota Padang melalui jalan darat dengan jarak ± 56 Km. Selain melalui jalan darat, Kawasan Mandeh dapat dicapai melalui transportasi laut dari Kota Padang dengan waktu 1,5 - 2 jam perjalanan.

Kawasan ini meliputi kawasan perairan laut yang tenang di pesisir berteluk dengan pulau-pulau kecil di depannya Di Kawasan Mandeh terdapat dataran yang relatif sempit pada kawasan berbukit. Gugus pulau-pulau kecil di Kawasan Mandeh terdiri atas 11 (sebelas) pulau, yaitu Pulau Nyamuk, Pulau Marak, Pulau Cubadak, Pulau Sironjong Kecil, Pulau Sironjong Gadang, Pulau Setan Kecil, Pulau Setan Gadang, Pulau Taraju, Pulau Pagang, Pulau Ular dan Pulau Nibung. Di antara pulau-pulau tersebut telah dikembangkan sebagai resort area atau dihuni oleh masyarakat setempat. Kawasan Mandeh terdiri dari 5 nagari dengan permukiman tersebar sepanjang pesisir dengan jumlah penduduk hampir mencapai 10.000 jiwa. (data tahun 2015).

Topografi berbukit mendominasi kawasan sekitar 77.4 % dari luas daratan Kawasan Mandeh. Lahan datar hingga landai yang merupakan dataran sempit tersebar di kawasan pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan perbukitan dan laut. Selain lahan datar yang sempit, morfologi pada pulau-pulau tersebut merupakan bukit yang curam. Beberapa pulau sejak garis pantai hingga tengah pulau merupakan bukit yang sangat curam.



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Mandeh.jpg

Gambar 1. Panorama kawasan Mandeh

B. Pertimbangan kemampuan daya dukung kawasan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat ingin merevisi kembali masterplan Kawasan Wisata Mandeh karena belum jelas peruntukan kawasan untuk investasi skala besar seperti untuk resort wisata dan pelayanan wisata. Sering ada pertanyaan tentang dimana lokasi yang cocok untuk *heavy invesment* di kawasan Mandeh yang memerlukan lahan puluhan hektar. Kawasan Bukik Ameh telah

direncanakan sebagai kawasan KEK wisata. Akan tetapi sampai saat ini masih belum jelas alokasi lahan seluas 400 Ha yang akan dijadikan kawasan KEK tersebut.

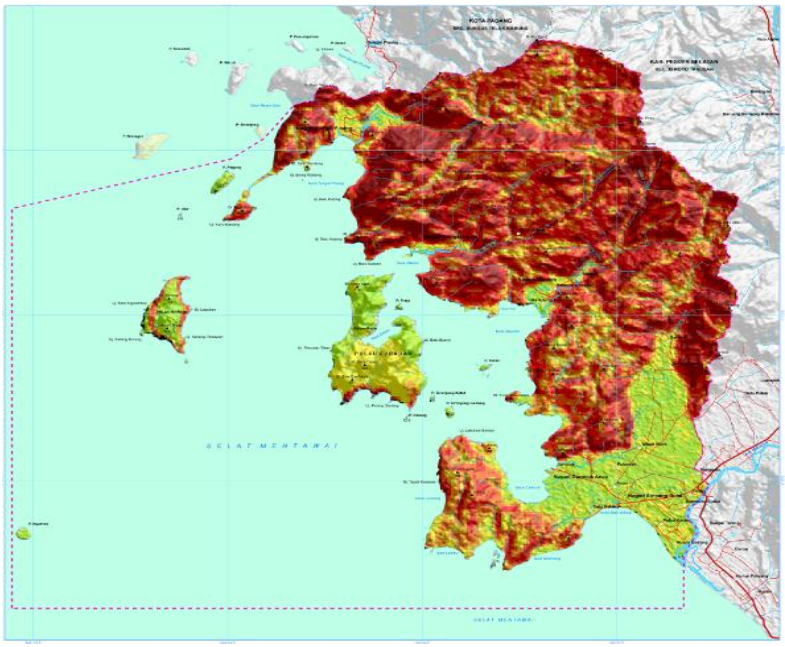
Ide pengembangan Kawasan Mandeh tersebut dikritik karena kurang mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang rendah. Sangat sedikit lahan yang relatif datar dan sebagian besar kondisi lahan yang datar tersebut umumnya adalah kawasan berawa. Hanya dibagian utara terdapat sedikit lahan datar yang tidak berawa. Kawasan relatif datar tersebut umumnya telah menjadi permukiman penduduk. Pembangunan dan membuka akses kawasan besar-besaran dikhawatirkan akan menyebabkan degradasi lingkungan dan akan berdampak negatif bagi kawasan dalam jangka panjang.

Sepanjang Pesisir Kawasan Mandeh telah dibuka jalan sepanjang 43 kilometer menyusuri pesisir pantai dengan lebar enam meter dengan tujuan agar bisa dilewati oleh bus wisata berukuran sedang. Akan tetapi pembangunan jalan yang lebar ini dikritik karena menyebabkan erosi dan sedimentasi pada perairan teluk dan argumentasi lebih mendasar menurunkan kualitas kawasan Mandeh sebagai destinasi wisata unggulan karena akan menjadikan kawasan sebagai tempat wisata masal dengan berbagai dampak negatifnya.

Banyak yang beranggapan dan berharap bahwa Kawasan Mandeh bisa dikembangkan untuk menarik investasi disektor pariwisata dalam skala besar. Keindahan alam yang berkualitas premium perlu diimbangi dengan investasi dalam skala besar. Untuk menarik investasi tersebut dibutuhkan rencana kawasan wisata dengan berbagai zonasi fasilitas wisata. Akan tetapi kalau dipandang dari sisi karakteristik ekologi kawasan, daya dukung dan daya tampung yang rendah menyebabkan pengembangan kawasan perlu lebih mempertimbangkan keterbatasan alam dan agaknya perlu memilih strategi pengembangan kawasan yang lebih eksklusif tidak dibangun berskala besar dengan target pengunjung yang selektif daripada mengembangkan pariwisata yang bersifat masal mendatangkan banyak pengunjung.

Gambar berikut ini memperlihatkan kondisi topografi Kawasan Mandeh. Relief berwarna hijau adalah lahan yang datar sementara lahan kuning dan merah adalah lahan yang curam dan sangat curam. Gambar topografi ini memperlihatkan bahwa kawasan yang bisa dibangun di Kawasan Mandeh sangat sedikit. Dataran dengan lahan berawa rawan terhadap pencemaran kalau dibangun aktifitas dalam skala yang besar diluar daya dukung lingkungan. Demikian juga kawasan perairan seperti teluk sangat sensitif terhadap pencemaran limbah dan sampah.

Kawasan Bukik Ameh yang direncanakan sebagai KEK pariwisata (pada gambar berada pada lahan berbentuk tanjung di bagian selatan) memiliki topografi berbukit yang curam. Pengembangan pada area ini akan membutuhkan biaya pengerjaan lahan dan penyediaan infrastruktur yang mahal. Pengembangan area ini menjadi kawasan resort kelihatannya cukup sulit untuk dibangun dengan tipe bangunan yang besar dan luas. Oleh karena itu pengembangan kawasan yang diusulkan sebagai KEK ini perlu dikaji dengan rinci kemungkinan pengembangannya. Dengan kendala pengembangan lahan yang cukup besar dengan imlikasi biaya maka pengembangan kawasan kelihatannya tidak bisa diserahkan semuanya kepada pihak swasta dan perlu melibatkan pemerintah dalam pendanaannya.



Gambar 2. topografi Kawasan Mandeh

Dalam pengelolaan kawasan wisata pesisir beberapa dampak yang relevan perlu diperhatikan yaitu: (a) kualitas air, (b) polusi, (c) sampah, (d) erosi pantai, dan (e) konflik antar aktifitas (Needham, 2011). Dalam pengembangan Kawasan Mandeh, wujud dampak tersebut seperti:

a) Perkembangan usaha perahu wisata yang mencapai lebih dari seratus perahu wisata bisa berdampak terhadap kualitas air di perairan Mandeh yang seperti teluk. Pencemaran minyak dan buangan sampah akan lama tertahan pada perairan.
b) Polusi visual perlu diantisipasi di Kawasan Mandeh. Lahan sepanjang jalan yang menyusuri pantai sepanjang 43 km khususnya pada sisi jalan menghadap laut rawan dibangun untuk warung dan fasilitas wisata yang akan menghalangi pandangan ke arah laut.
c) Dengan dibukanya akses jalan dari kota Padang akan menarik pengunjung ke Mandeh. Mengingat perilaku pengunjung kawasan wisata yang umumnya tidak memperhatikan kebersihan maka pengelolaan persampahan menjadi penting.
d) Pembukaan jalan telah menyebabkan erosi lahan dan menimbulkan sedimentasi di perairan Mandeh. Hal ini perlu dicegah dengan penghijauan.
e) Akomodasi wisata cottage yang telah berkembang seperti di pulau Cubadak menjadi area wisata yang eksklusif. Nelayan dan perahu wisata dilarang mendekati dan mendarat di pulau tersebut. Kecenderungan pengembangan wisata yang eksklusif di pesisir akan rawan untuk menimbulkan konflik antar pelaku wisata atau antar pelaku wisata dengan masyarakat lokal.

C. Pertimbangan faktor kepemilikan dan harga lahan dalam perencanaan

Selain itu faktor lain yang bisa menghambat pengembangan kawasan yaitu kepemilikan lahan dan harga tanah. Meskipun tidak terdata, banyak tanah di kawasan yang telah berpindah tangan/dijual. Hal ini akan menjadi faktor yang akan menyulitkan dalam menyusun rencana zonasi kawasan sesuai dengan keinginan. Ditambah dengan faktor kepemilikan tanah di Sumatera Barat yang rumit maka penetapan zonasi kawasan diatas kertas menjadi sangat terbatas dan sulit dilakukan.

Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan yaitu ekspektasi harga lahan. Penetapan zona peruntukan lahan akan bisa menyebabkan naiknya harga lahan. Oleh karena itu menyusun rencana kawasan wisata Mandeh dalam bentuk *blue print* rencana justru bisa berakibat implementasi rencana lebih sulit dilakukan. Oleh karena itu alternatif lain adalah mengambangkan peruntukan lahan (*floating zone*).

D. Pertimbangan pilihan target segmen wisatawan

Tipologi wisatawan menurut Cohen (Swarbrooke, 2006) dapat dibagi atas: (a) wisatawan masal terorganisasi (*organized mass-tourism*) yang membeli paket liburan dan biasanya dalam kelompok, (b) wisatawan individual (*individual mass tourism*) yang berwisata dalam jadwal terencana tetapi lebih bebas dan lebih mau mencari pengalaman baru daripada wisatawan terorganisir, (c) penjelajah (explorer) yang mengatur perjalanannya sendiri, mencari sesuatu yang baru tetapi tetap mencari kenyamanan dan cenderung menghindari kontak dengan wisatawan lain, dan terakhir, (d) *drifter* yang tidak memiliki rencana perjalanan terencana, suka mencari sesuatu yang baru meskipun mengorbankan kenyamanan, ingin dekat dengan masyarakat lokal dan tinggal lebih lama. Kategori lain dari Smith membagi wisatawan lebih rinci atas tipe: (a) explorers tourists yang berwisata dalam kelompok kecil dengan semangat menjajaki destinasi baru, (b) elite tourists yang rutin berwisata dan menyukai tur yang mahal, (c) off-beat tourists yang lebih suka menyendiri, (d) unusual tourists yang menyukai pengenalan dengan budaya lokal, (e) incipient mass tourists yang lebih menyukai tempat wisata yang memenuhi standar ameniti dan kenyamanan, (f) mass tourists dengan pendapatan menengah yang lebih suka berlibur dalam kelompok, dan (g) charter tourists yang tidak terlalu tertarik dengan destinasi wisata dan lebih menyukai hiburan dan standar makanan dan akomodasi yang sesuai harapannya.

Dari gambaran tipologi tersebut pengembangan kegiatan pariwisata perlu menjaring sekaligus mengantisipasi perilaku wisatawan yang beragam tersebut. Hal yang penting diperhatikan adalah terdapat tipologi wisatawan yang kurang berkesesuaian. Tipe *explorer/off beat/elite* kurang cocok digabungkan dengan tipe *mass tourists*.

Pada kasus Kawasan Wisata Mandeh, pembangunan jalan yang lebar tersebut akan menyebabkan bentang alam Mandeh menjadi kurang menarik bagi wisatawan yang memilih tempat wisata berkualitas premium dengan alam yang masih asri dan mau membayar mahal. Jalan yang lebar tersebut akan lebih menarik wisatawan masal dengan perilakunya yang beresiko mencemari kawasan. Ungkapan yang mengatakan Kawasan Mandeh dikatakan sebagai Raja Ampatnya Sumatera hanya benar dari kondisi alamnya tetapi berbeda kalau dilihat dari aspek pengembangan pariwisatanya. Kawasan Raja Ampat dikembangkan sebagai kawasan wisata eksklusif dengan mempertahankan keasrian alamnya sementara Kawasan Mandeh dengan pembangunan jalur akses telah menjadikannya lebih sesuai untuk *mass tourists*. Sementara itu masih terdapat beberapa lokasi yang masih cocok untuk *off-beat tourists* di area pesisir daratan Mandeh maupun di pulau.

Di Kawasan Mandeh terdapat potensi berbagai objek wisata alam bersifat petualangan seperti panorama air terjun, pemandian, pemandangan hutan hujan tropis, satwa liar dengan kegiatan wisata *climbing, hiking, tracking, camping*, buru babi, dan kegiatan *out bond* yang cocok untuk wisatawan tipe *explorers tourists, drifter* atau *unusual tourists*.

E. Pertimbangan Sosial Ekonomi

Pengembangan kawasan wisata Mandeh agar dapat berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada investasi swasta tetapi juga perlu mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat. Atas dasar itu maka perlu dilakukan identifikasi berbagai peluang pengembangan wisata desa dengan tema berbeda-beda dan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam usaha wisata.

Berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat, tema wisata desa yang diinginkan untuk dikembangkan di Kawasan Mandeh yaitu:

a) Nagari ekonomi kreatif di Ampang Pulai/Carocok Anau sebagai pusat pengolahan hasil laut dan pusat pasar wisata untuk souvenir dan kuliner,
b) Nagari agrowisata terpadu di Nagari Mandeh

c) Wisata tradisi dan seni budaya di Nagari Sungai Nyalo sebagai lokasi pengembangan pusat wisata tradisi dan seni budaya dengan menyediakan fasilitas rumah adat, medan dan bapaneh, dan menyelenggarakan berbagai festival serta tempat pelatihan/belajar kesenian tradisional.
d) Nagari Sungai Pinang sebagai pusat pendidikan dan pelatihan pariwisata alternatif lokasi pengembangan *center for education and training tourism* dengan program pengembangan kampung Inggris sekolah pariwisata dan pelatihan untuk wisata minat khusus seperti *surfing, diving*, dan *snorkeling.*

Berdasarkan studi dan diskusi dengan masyarakat yang pernah dilakukan, dirasa perlu untuk membangun kelompok usaha dan pendukung pariwisata ditingkat masyarakat. Kelompok yang perlu dibangun dan diberdayakan yaitu seperti: kelompok sadar wisata, kelompok pengelola perahu, kelompok guide tur wisata, kelompok pemuda pengelola diving, kelompok perempuan pengelola kuliner, kelompok kerajinan suvenir, kelompok keterampilan penyablonan, kelompok seni tradisi, kelompok pengelola agrowisata, kelompok diklat homestay Sungai Pinang. Selain itu dirasa perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Nagari yang berupa gabungan koperasi-koperasi: koperasi perjalanan, koperasi kuliner, koperasi perdagangan dan koperasi perikanan.

F. Pertimbangan penguatan hukum

Seperti telah disinggung sebelumnya, pengembangan Kawasan Mandeh memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak negatif dalam aspek tata ruang yaitu pembangunan tanpa perijinan yang jelas akan merusak lingkungan dan visual kawasan (lihat gambar dibawah ini). Oleh karena itu dibutuhkan peraturan pembangunan yang jelas dan efektif implementasinya. Pengawasan ditingkat kabupaten dan kecamatan dirasa kurang efektif tanpa melibatkan pihak nagari. Oleh karena itu peraturan, perijinan dan pengawasan pembangunan perlu ditempatkan pada tingkat nagari dengan membuat Peraturan Nagari (Perna) tentang perijinan bangunan. Peraturan membangun tersebut berkaitan dengan zona yang boleh dibangun, jarak bangunan dari jalan, jarak bangunan dari bibir lereng, aturan tentang pemotongan tanaman dan lainnya.



Gambar 3. Contoh kasus pembangunan dermaga dengan merusak hutan mangrove tanpa ada ijin di Kawasan Mandeh



Gambar 4. Pembangunan dibibir pantai tanpa ijin

Selain itu produk hukum dalam bentuk Peraturan Nagari perlu dibuat untuk mengatur berbagai perilaku dan batasan dalam berwisata, tentang hal kebersihan dan keamanan, pungutan wisata dan pengelolaan kegiatan wisata.

IV. KESIMPULAN

Pengembangan kawasan wisata khususnya pesisir perlu mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan menghindari kemungkinan dampak yang bisa merusak lingkungan. Pada kawasan dengan daya dukung lingkungan rendah, pengembangan wisata perlu menyusun strategi pengembangan agar pengembangan kawasan optimal. Selain itu, agar pengembangan wisata dapat berkelanjutan maka pengembangan kawasan wisata selain berbasis investasi dari luar perlu medorong pengembangan usaha wisata berbasis masyarakat. Perijinan dan pengawasan pembangunan perlu diupayakan untuk berjalan dengan efektif dengan melibatkan masyarakat lokal.

Dalam pengembangan kawasan wisata, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan wisata perlu menyatukan persepsi dan wawasan serta kesadaran tentang potensi dan kendala fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan dari destinasi yang akan direncanakan agar perencanaan bisa berjalan seperti diinginkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA.

_____(2009). *Sustainable Coastal Tourism/An Integrated Planning And Management Approach.* United Nations Environment Programme.

Miller, M. L., Jan Auyong. *Sustainable Coastal Tourism: Challenges For Management, Planning, and Education.* diunduh tanggal 1 September 2017 http://nsgl.gso.uri.edu/washu/washuw99003/1-Introduction_Miller.Pdf

Needham, M.D., Brian W. Szuster. (2011). Situational influences on normative evaluations of coastal tourism and recreation management strategies in Hawai'i. *Tourism Manag*ement Vol. 32 Tahun 2011. 732-740.

Swarbrooke, J., Susan Horner (2007). *Consumer Behaviour In Tourism (Second Edition)* Elsevier Ltd.

Taman Kota Ramah Lansia Untuk Mendukung Daya Tarik Pariwisata Kota Bogor (Kasus Studi : Taman Heulang)

Indarti Komala Dewi[1], dan Eneng Dayu Saidah[1]
[1]Prodi PWK Fakultas Teknik,Universitas Pakuan,Bogor
Email:indarti@unpak.ac.id; enengdayu@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini terjadi kecenderungan global yaitu jumlah penduduk lanjut usia (lansia) semakin meningkat. Salah satu kebutuhan para lansia adalah rekreasi yang aman dan nyaman. Taman kota adalah tempat rekreasi yang dapat meningkatkan kesehatan para lansia, dan mendukung pengembangan pariwisata. Salah satu sasaran pengembangan pariwisata Kota Bogor adalah mewujudkan citra Kota Bogor yang dapat bersaing dengan kota lain dalam hal kepariwisataan. Kota Bogor mempunyai berbagai objek wisata yang berpotensi menarik wisatawan. Taman kota merupakan pendukung objek wisata yang sudah ada tersebut. Kota Bogor mempunyai beberapa taman kota, akan tetapi sampai saat ini taman kota yang ada di kota Bogor belum secara khusus mengadopsi konsep taman kota ramah lansia. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi wisata yang ada di kota Bogor,dan menganalisis kondisi taman Heulang menggunakan kriteria taman ramah lansia. Penelitian menggunakan metoda deskriptif terhadap 5 kriteria taman ramah lansia yaitu lokasi, aksesibilitas, vegetasi, pencahayaan, danfasilitas yang dirinci menjadi 40 indikator. Hasil analisis menunjukkan potensi objek wisata di Kota Bogor sangat beragam jenisnya. Taman Heulang berdasarkan hasil analisis mempunyai kondisi baik (94,16%) sebagai sebuah taman kota ramah lansia sehingga dapat mendukung daya tarik pariwisata Kota Bogor.

Kata kunci: Aktivitaslansia, Citra Kota, Pariwisata, Taman Ramah Lansia

I. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor andalan nasional untuk meningkatkan devisa negara dan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) suatu kota. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sampai tahun 2019 sebesar 20 juta orang, dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 275 juta, serta target Indonesia berada di ranking 30 dunia(Alamsjah,2016). Target kunjungan wisatawan dan ranking Indonesia ini tentunya perlu diimbangi dengan menata destinasi wisata yang sudah ada. Penataan destinasi wisata perlu mempertimbangkan potensi pariwisata.

Portofolio bisnis pariwisata di Indonesia menyebutkan bahwa pariwisata budaya (*culture*)merupakan unggulan karena potensinya hampir 50% (Alamsyah, 2016). Pengembangan pariwisata budaya dalam bentuk produk wisata Kota dan Desa potensinya 35% (Alamsyah, 2016). Hal tersebut tentu menjadi isu menarik dalam pengembangan kota-kota di Indonesia. Dalam hal pengembangan kota, kecenderungan global yang terjadi adalah menjadikan kota sebagai destinasi wisata (Utama, 2013). Pengembangan kota sebagai destinasi wisata bukan hal yang baru, terutama bagi kota yang mempunyai kawasan budaya (*cultural heritage*) dan sejarah (Cianga, 2013). Kebijakan menjadikan kota sebagai destinasi wisata memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kota dan penduduk kota (Cianga, 2013).

Pertumbuhan penduduk usia lanjut (lansia), yaitu penduduk berusia diatas 60 tahun, di seluruh dunia meningkat sangat cepat dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Proporsi penduduk lansia menjadi lebih besar dibandingkan penduduk usia anak dan remaja (Musa, 2016). Meningkatnya populasi lansia, tidak hanya mempengaruhi struktur demografi, tetapi juga mempengaruhi pola perjalanan yang berakibat pada peningkatan jumlah wisatawan lansia (Balderas, dkk, 2017). Beberapa studi tentang wisatawan lansia menunjukan terjadi kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan lansia di berbagai tempat baik di Asia maupun di Eropa (Astiti, 2017; Shalini dan Wee, 2014; Alen, dkk, 2012). Sebagai contoh wisatawan

mancanegara (wisman) lansia yang datang ke Indonesia pada tahun 2005 -2012, yang berumur 55-64 tahun kira-kira 14,06%, dan yang berumur 45- 54 tahun kira-kira 34,10% (Astiti, 2017). Kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan lansia, tidak hanya yang berasal dari mancanegara, tetapi juga yang berasal dari wisatawan nusantara (wisnus). Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2014 menunjukkan wisatawan nusantara (wisnus) lansia (usia> 55 tahun) mengalami peningkatan dari 12,30% tahun 2013 menjadi 13,50 % tahun 2014. Rata-rata lama perjalanan yang dilakukan para lansia adalah 5,07 hari , paling lama dibandingkan wisnus usia lainnya. Kecenderungan meningkatnya wisatawan lansia dan lamanya mereka berkunjung perlu diimbangi dengan pengembangan fasilitas kota yang ramah lansia untuk mendukung daya tarik wisata kota.

Dukungan pemerintah terhadap wisatawan lansia telah diaturdalam Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan Presiden No.69Tahun 2015 tentangFasilitas Bebas Visa KunjunganSingkat (BVKS)memungkinkan wisatawan mancanegara berwisata selama 30 hari. Dukungan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lansia ke berbagai kota di Indonesia.

Pengembangan pariwisata untuk lansia tidak hanya mendatangkan devisa bagi kota yang dituju, tetapi juga membantu stabilitas sosial dan meningkatkan kualitas hidup para lansia (Shalini dan Wee, 2014).Para lansia membutuhkan kegiatan yang dapat meningkatkan, memperbaiki dan menjaga kondisi kesehatan mereka (Kaung, dkk, 2015). Kesehatan yang dimaksud mencakup kesehatan fisik dan mental/psikologis. Oleh karena itu perjalanan wisata yang dilakukan lansia umumnya bermotif untuk meningkatkan kesehatan mereka.

Taman kota adalah salah satu tempat yang dibutuhkan lansia untuk meningkatkan, memperbaiki dan menjaga kesehatan fisik dan psikologis mereka. Dalam taman kota para lansia dapat meningkatkan kesehatan fisik dengan berjalan kaki atau jogging. Kesehatan psikologis para lansia juga dapat meningkat melalui aktivitas sosialisasi dengan pengunjung taman atau bertemu dengan kerabat sambil berekreasi.

Untuk mendukung kebutuhan lansia terhadap taman kota, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah(PP) No 43/2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, mengatur berbagai hal terkait lansia antara lain: kemudahan lansia dalam penggunaan fasilitas umum; pemanfaatan taman-taman untuk olah raga para lansia, dan aksesibilitas para lansia pada pertamanan dan tempat rekreasi.

Selain sebagai objek wisata, taman kota juga merupakan identitas sebuah kota (Utama, 2013).Oleh karena itu peningkatan kualitas taman kota sebagai taman ramah lansia akan memperkuat identitas kota dan meningkatkan citra kota sebagai kota ramah lansia. Kota ramah lansia akan menambah daya tarik kota sebagai destinasi wisata yang dapat bersaing dengan kota lain dalam hal menarik kunjungan wisatawan, termasuk wisatawan lansia.

Kota Bogor adalah salah satu destinasi wisata penting di Provinsi Jawa Barat, yang memiliki berbagai objek daya tarik wisata, dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara (Mulyana, 2012). Pengembangan Kota Bogor sebagai destinasi wisata dimungkinkan karena kota Bogor mempunyai beragam objek daya tarik wisata, baik yang berbentuk wisata alam maupun buatan. Objek wisata yang didukung oleh taman ramah lansia tentu akan diminati oleh wisatawan lansia yang berkunjung ke kota Bogor.

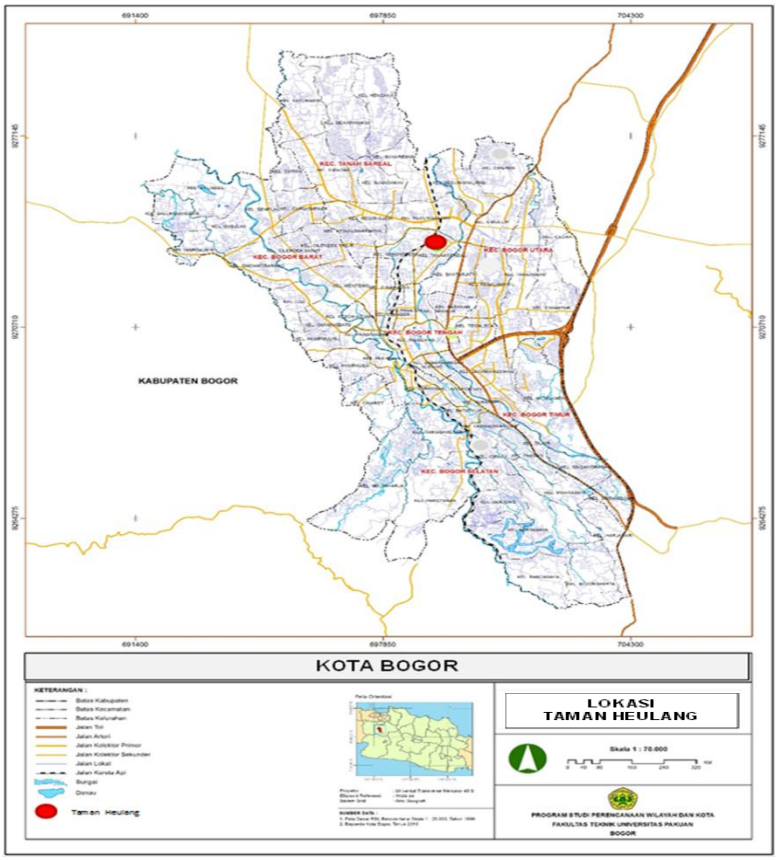
Untuk meningkatkan daya saing kota sebagai destinasi wisata, kota Bogor terus berupaya menambah maupun menata taman-taman kota yang sudah ada. Salah satu taman kota yang paling luas dan berlokasi tidak jauh dari pusat kota Bogor adalah Taman Heulang. Taman Heulang menjadi menarik untuk dikaji karena selain luas, juga merupakan salah satu taman kota yang selalu ramai dikunjungi baik oleh warga kota Bogor maupun oleh wisatawan pada hari libur maupun hari biasa. Pengunjung Taman Heulang beragam mulai dari anak-anak sampai lansia. Walaupun mempunyai banyak taman, tetapi taman-taman di kota Bogor belum secara khusus mengadopsi konsep taman ramah lansia. Berdasarkan hal tersebut maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi objek wisata yang ada di kota Bogor, dan mengidentifikasi kondisi Taman Heulang menggunakan kriteria taman ramah lansia.

II. METODE

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah taman kota yang terluas di Kota Bogor yaitu Taman Heulang. Secara geografis Taman Heulang berlokasi pada 106° 48' 7,514" BT dan 6° 34' 9,786" LS.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, luas Taman Heulang adalah 28.388m^2. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2017. Selanjutnya lokasi Taman Heulang diperlihatkan Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi Taman Heulang

B. Data dan Analisis

Penelitian menggunakan metoda deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi terhadap kondisi taman kota. Untuk menganalisis kondisi taman kota ramah lansia digunakan 5 kriteria taman kota ramah lansia yang dikembangkan berdasarkan: Kelengkapan fasilitas taman kota (Permen PU No 05/PRT/M/2008); kebutuhan taman untuk lansia (UU No 13/1998, PP No 43/2011), Pedoman Perencanaan Ruang terbuka Publik Untuk Lansia (SarkissiandanStenberg,2013), dan Hasil penelitian Survai Meter dan CAS UI tahun 2013 tentang Kota Ramah Lansia. Lima Kriteria tersebut adalah : lokasi, aksesibilitas, fasilitas, pencahayaan, dan vegetasi yang dirinci menjadi 40 indikator. Observasi terhadap kondisi taman menggunakan kriteria dan indikator pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria dan Indikator Taman Kota Ramah Lansia

No	***Kriteria***	***Indikator***
1	Lokasi	Dekat dengan Fasilitas Sosial/ekonomi
		Tenang
		Mudah dijangkau
		Tidak berpolusi
		Aman
2	Aksesibilitas	Pintu masuk dari berbagai sisi
		Pintu masuk mudah diakses
		Jalur Pejalan kaki dalam taman kondisi baik
		Jalur pejalan kaki menghubungkan antar aktivitas dalam taman

No	Kriteria	Indikator
		Jalur pejalan kaki cukup luas untuk kursi roda
		Trotoar menuju taman dikhususkan untuk pejalan kaki
		Trotoar menuju taman cukup luas untuk kursi roda
		Tangga landai dan tidak licin
		Terdapat ramp utk masuk dengan kemiringan yg sesuai bagi lansia
3	Vegetasi	Terdapat pohon peneduh
		Terdapat tanaman pengarah
		Lapangan ditutupi rumput
		Vegetasi tidak menutupi aktivitas dalam taman
		Vegetasi mampu menciptakan iklim mikro yang sejuk dan sehat
		Terdapat variasi bentuk, pola dan warna bunga/tanaman hias
4	Pencahayaan	Pencahayaan cukup (tidak gelap atau terlalu terang)
		Lampu penerangan tersedia diberbagai lokasi
5	Fasilitas	Tempat duduk mudah dicapai
		Tempat duduk terdapat diberbagai tempat kegiatan
		Tempat duduk aman bagi lansia
		Terdapat tempat duduk panjang untuk berkumpul
		Toilet tersedia
		Toilet mudah dicapai
		Lantai toilet tidak licin dan bersih
		Terdapat tempat sampah
		Tempat sampah mudah dijangkau
		. Tempat sampah tersebar diberbagai lokasi kegiatan
		. Terdapat informasi ttg taman
		. Terdapat sarana olah raga (senam , jogging)
		. Terdapat sarana untuk refleksi
		. Sarana olah raga cukup luas
		. Drainase baik
		. Terdapat elemen air
		. Terdapat tempat parkir
		. Tempat parkir terhubung dengan taman

Sumber: modifikasi dari Permen PU No 05/PRT/M/2008; UU no 13/1998, PP no 43/2011;SarkissiandanStenberg,2013; Survai Meterai dan CAS UI, 2013.

Penilaian terhadap masing-masing indikator sebagai berikut: sesuai nilai 3, dan tidak sesuai nilai 0. Selanjutnya nilai masing-masing kriteria(Ki) dihitung berdasarkan nilai perolehan dari indikatornya (KN)) dibagi dengan kondisi ideal masing-masing kriteria berdasarkan indikatornya (Kid), dikalikan dengan 100 atau Ki = (KN/Kid)x 100 . Selanjutnya berdasarkan jumlah indikator dihitung bobot masing-masing kriteria yaitu : Lokasi (14); Aksesibilitas (22), Vegetasi (15), Pencahayaan (6), dan Fasilitas (43). Skor kondisi Taman heulang sebagai taman ramah lansia dalam mendukung daya tarik pariwisata dihitung dengan mengalikan perolehan setiap kriteria pada bobotnya dan dibuat 3 klasifikasi kondisi yaitu : Kurang Baik 0-33, Cukup Baik 34-66, dan Baik 67-100.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Potensi Objek Wisata Di Kota Bogor*

Potensi pariwisata kota Bogor selain meningkatkan pendapatan daerah, juga dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Kota Bogor mempunyai beragam jenis objek wisata yang berlokasi tersebar di seluruh kota. Objek wisata Kota Bogor

dapat diklasifikasikansebagai berikut:Wisata peninggalan sejarah (musium perjuangan, istana, prasasti, makam), Wisata alam (Kebun Raya Bogor, dan Situ Gede), Wisata ilmiah(musium ilmu pengetahuan dan kebun/balai penelitian), Wisata bangunan kuno (gedung dengan arsitektur kolonial yang berusia lebih dari 50 tahun), Wisata kuliner, Wisata belanja, dan Taman-taman kota.

Objek wisata peninggalan sejarah di Kota Bogor terletak di kawasan pusat kota. Objek wisata yang terkenal adalah Istana Bogor. Istana Bogor didirikanatasprakarsaGubernurJenderal GW Baron van Imhoff pada tahun 1745. Objek wisata peninggalan sejarah lainnya adalah musium perjuangan yang diresmikan tahun 1957, dan musium petadi pusat kota Bogor, Prasasti Batu tulis merupakan peninggalan kerajaan Sunda tahun 1455 Saka (1533 Masehi),dan makam pelukis terkenal Raden Salehdi Kecamatan Bogor Selatan.

Objek wisata alam yang yang terkenal di kota Bogor adalah Kebun Raya Bogor (KRB). Kebun Raya Bogor bersatu dengan Istana Bogor. Kebun raya merupakan objek wisata kota Bogor yang banyak dikunjungi wisatawan, karena mempunyai berbagai koleksi tanaman yang berusia ratusan tahun. LuasKRB 87 ha ,memiliki 14.354 jeniskoleksipohondantumbuhan. Kebun Raya Bogor didirikan pada 18 Mei 1817 penggagasnya Reinwardt dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal **G.A.G.P. van der Capellen**. Kebun Raya Bogor merupakan hutan kota. Objek wisata alam lainnya adalah Situ Gede, terletak di Kecamatan Bogor Barat. Luas Situ Gede 6 ha.

Objek wisata ilmiah cukup banyak di kota Bogor terutama yang berkaitan dengan penelitian pertanian, kehewanan, kehutanan, dan tanah. Balai penelitian-balai penelitian tersebut mempunyai bangunan dengan arsitektur bergaya kolonial Belanda yang khas. Selain gedung-gedung dengan arsitektur yang khas, terdapat pula objek wisata ilmiah berupa kebun penelitian dan musium seperti Musium Etnobotani, Musium Zoologie, Musium Tanah.

Objek wisata bangunan kuno dengan gaya arsitektur kolonial dapat dijumpai di kawasan pusat kota Bogor, terutama di sekitar Kebun Raya Bogor. Bangunan kuno tersebut berbentuk kantor (BPN, Kehutanan, Perindustrian, Penelitian Tanah), gereja, pendidikan (IPB), musium (Zoologi, Etnobotani), dan rumah tinggal.

Objek wisata kuliner di Kota Bogor tersebar di setiap kecamatan terdiri dari kuliner tradisional dan modern. Kuliner tradisional terdiri dari berbagai macam makanan dan minuman khas Bogor, seperti Doclang, cungkring, dodongkal/awug, toge goreng, soto kuning, dan laksa. Lokasi kuliner tradisional sebagian besar di pusat kota Bogor. Kawasan yang direncanakan dikembangkan sebagai wisata kuliner adalah di Wilayah Pengembangan (WP) D yaitu Jalan Pajajaran , Pandu Raya dan sekitarnya.

Objek wisata belanja yang khas kota Bogor adalah Tas, kaos, batik dan sepatu. Barang-barang tersebut dibuat oleh para pengrajin yang ada di Bogor. Lokasi belanja Tas yang terkenal adalah di daerah Tajur. Tempat produksi Kaos yang terkenal adalah di daerah Ciremai Ujung, sepatu di produksi di daerah Ciomas, dan Batik dengan motif khas Bogor.

Taman–taman di Kota Bogor, selain dicanangkan untuk memenuhi kegiatan rekreasi dan olah raga warga kota Bogor, juga difungsikan sebagai penunjang objek wisata yang sudah ada. Untuk meningkatkan fungsi taman, maka taman–taman kota direvitalisasi. Taman kota yang direvitalisasi di kota Bogor adalah Taman Heulang, Taman Sempur dan Taman Kencana. Taman Heulang dan Taman Sempur selain tempat rekreasi juga merupakan tempat olah raga. Taman Kencana yang relatif lebih kecil hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi. Taman tidak hanya dapat mendukung objek wisata yang ada, jika dikembangkan sesuai kebutuhan wisatawan, dapat menjadi tujuan wisata. Sebaran Taman Kota di Kota Bogor tahun 2016 yang

mempunyai luas lebih besar dari 1000 m^2diperlihatkan Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran dan Luas Taman Kota di Kota Bogor

No	*Taman Kota*	*Kelurahan*	*Kecamatan*	*Luas (m^2)*
1	Taman Sempur*[1]	Sempur	Bogor Tengah	3.712
2	Taman Kencana	Babakan	Bogor Tengah	4.796
3	Taman Paranginan	Sempur	Bogor Tengah	1.699
4	Taman Malabar	Babakan	Bogor Tengah	5.518
5	Taman Heulang	Tanah Sareal	Tanah Sareal	28.388
6	Taman Situ anggalena	Kedunghalang	Bogor Utara	5.600
7	Taman SudutPangrango	Babakan	Bogor Tengah	1.820
8	Taman Matematika	TegalGundil	Bogor Utara	1.068
		Jumlah		52.602

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor 2016.
Keterangan : *[1] merupakan kawasan yang terdiri dari 3 taman (Taman Sempur, Taman Kaulinan, dan Taman ekspresi)

Objek wisata yang beragam di kota Bogor ini menarik banyak wisatawan ke kota Bogor. Data wisatawan mancanegara maupun domestik yang mengunjungi objek-objek wisata di Kota Bogor terus meningkat. Kunjungan wisatawan ke Kota Bogor ditunjukan Tabel 3

Tabel 3. Kunjungan Wisatawan Ke Kota Bogor Tahun 2010-2016

Tahun	*Domestik*		*Mancanegara*		*jumlah*
2010	1.524.044	28,96	42.812	0,81	1.566.856
2011	1.630.687	30,99	43.837	0,83	1.674.524
2012	1.775.580	33,74	110.975	2,11	1.886.555
2013	3.277.442	62,28	104.780	1,99	3.382.222
2014	4.146.766	78,80	202.187	3,84	4.348.953
2015	4.561.433	86,68	222.406	4,23	4.783.839
2016	5.017.578	95,35	244.646	4,65	5.262.224

Sumber:BPS Kota Bogor 2017

Posisi geografis kota Bogor yang berdekatan dengan Jakarta sebagai destinasi wisata internasional, dan ditunjang prasarana dan sarana transportasi yang baik, maka wisatawan mancanegara berpotensi datang ke kota Bogor. Oleh karena itu Kota Bogor perlu mengembangkan objek wisata dan pendukung objek wisata berupa taman-taman kota yang ramah lansia.

B. Kondisi Taman Heulang Sebagai Taman Ramah Lansia

Taman Heulang adalah taman kota yang terluas di Kota Bogor.Taman Heulangmerupakantaman yang direvitalisasi dengan bantuan KementerianPekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH).Taman Heulangdilengkapi prasarana olah raga, sarana rekreasi, dan sarana penunjang . Prasarana olah raga yaitu : jalur sepeda, dan jalan jalur jogging. Sarana rekreasi yaitu jaringan *WI–FI*, jalan setapak, air mancur, bangku taman, Gazebo, shelter, dan ruang serbaguna yang dapat dipakai berdiskusi. Sarana penunjang yaitu kamerapengintai *CCTV*untukmemantauaktivitas yang ada di dalam area taman , rumah jaga , lampu taman, mushola, kamar mandi dan WC.

Penilaian kondisi Taman Heulang menggunakan 5 kriteria taman kota ramah lansia, yaitu lokasi, aksesibilitas, vegetasi, pencahayaan dan fasilitas. Masing-masing kriteria dijabarkan menjadi beberapa indikator.

Penilaian kondisi taman Heulang berdasarkan kriteria lokasi menggunakan 5 indikator menunjukan bahwa kondisi taman Heulang telah memenuhi kriteria lokasi. Taman Heulang terletak di kawasan perumahan, sehingga tercipta suasana yang tenang, tidak bising, jauh dari polusi kendaran dan aman. Taman ini Heulang dilengkapi fasilitas CCTV sehingga semua aktivitas terpantau. Terdapat beberapa fasilitas umum yang dibutuhkan lansia antara lain, Rumah Sakit, tempat belanja dan kuliner. Lokasi taman harus mudah dijangkau menggunakan berbagai moda angkutan baik umum maupun pribadi, atau dengan berjalan kaki. Umumnya para lansia menyukai taman kota yang lokasinya mudah dikunjungi baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraandan jauh dari polusi dan kebisingan. Hal ini terkait dengan mobilitas fisik yang yang berpotensi menurun (Sarkissian dan Stenberg, 2013; Ramadhani, dkk,2015). Dengan demikian wisatawan lansia mudah berkunjung ke Taman Heulang untuk menikmati suasana taman. Lokasi yang mudah dijangkau, tenang, tidak polusi dan dekat dengan fasilitas umum yang diperlukan lansia, membuat nyaman lansia yang berkunjung ke Taman Heulang.

Penilaian kondisi taman Heulang berdasarkan kriteria aksesibilitas menggunakan 9 indikator menunjukkan bahwa kondisi Taman Heulang belum sepenuhnya memenuhi kriteria aksesibilitas. Taman harus dapat di akses oleh semua orang (Sarkissian, dan Stenberg, 2013). Keterbatasan fisik lansia harus menjadi pertimbangan dalam mendisain taman ramah lansia . Sebagian besar indikator aksesibitas sudah terpenuhi, hanya saja tangga yang merupakan akses masuk walaupun landai dan tidak licin, tetapi tidak dilengkapi dengan ramp. Hal ini berpotensi menyulitkan bagi lansia yang menggunakan kursi roda atau memakai tongkat dalam mengakses Taman Heulang.

Dari segi kriteria vegetasi, penilaian terhadap 6 indikator menunjukkan Taman Heulang mempunyai vegetasi yang baik karena menunjang kebutuhan lansia dari segi kenyamanan.Taman bagi lansia adalah tempat untuk menghabiskan waktu luang sambil berinteraksi dengan pengunjung dan menikmati suasana alam yang membuat perasaan mereka menjadi bahagia. Tajuk tanaman yang rimbun, menurunkan iklim mikro sekitar taman, sehingga lansia merasa nyaman.Lansia biasanya mengalami penurunan orientasi ruang (Hermawati, 2015.) dengan demikian tanaman pengarah menolong lansia agar supaya tidak kehilangan orientasi. Warna, bentuk dan pola pengaturan tanaman secara psikologis membuat taman menjadi lebih menarik dan menyenangkan.

Kriteria pencahayaan menggunakan 2 indikator yaitu kualitas dan penempatannya, menunjukkan Taman Heulang mempunyai pencahayaan yang baik. Lansia mengalami penurunan penglihatan (Hermawati,2015; Survai Meter dan CAS UI, 2013). Oleh karena itu para lansia memerlukan pencahayaan yang baik untuk menyeimbangkan penglihatan yang mulai memburuk. Lansia menginginkan taman yang terang tetapi tidak membuat silau. Di Taman Heulang cahaya matahari terutama siang hari terhalang oleh kerindangan tajuk pohon. Lampu taman yang dibutuhkan pada sore dan malam hari terpasang secara tersebar, sehingga pada sore hari para lansia akan tetap merasa nyaman.

Kriteria fasilitas menggunakan 18 indikator menunjukkan secara umum fasilitas taman yang ramah lansia terpenuhi tetapi belum lengkap. Fasilitas yang sudah ada di Taman Heulang adalah tempat duduk, yang aman dan mudah dijangkau oleh lansia, tempat duduk memungkinkan Lansia untuk berinteraksi dengan pengunjung lain maupun bercengkerama dengan keluarga atau teman. Lansia biasanya mengalami penurunan sistem perkemihan (Survai Meter dan CAS UI, 2013). Oleh karena itu Taman ramah lansia harus dilengkapi dengan toilet yang bersih, lantainya tidak licin dan mudah dijangkau oleh lansia. Fasilitas toilet dengan indikator tersebut sudah

tersedia di Taman Heulang. Kebersihan taman cukup baik karena terdapat tempat sampah yang tersebar di beberapa lokasi kegiatan dan mudah dijangkau. Fasilitas untuk olah raga ringan membantu kebugaran lansia, karena salah satu tujuan kunjungan lansia ke taman kota adalah untuk olah raga ringan seperti berjalan diatas batu-kerikil (batu refleksi), senam dan jogging.Fasilitas yang belum lengkap adalah yang terkait dengan kesehatan bagi lansia.Di Taman Heulang sudah tersedia tempat khusus untuk jogging dan senam, tetapi tidak tersedia tempat untuk refleksi .

Dari 5 kriteria yang digunakan untuk menilai kondisi taman Heulang saat ini, 3 kriteria menunjukkan kondisi baik, yaitu lokasi, vegetasi, dan pencahayaan. Sedangkan kriteria aksesibilitas dan fasilitas menunjukkan kondisi belum lengkap. Hasil penilaian terhadap 5 kriteria taman ramah lansia menunjukkan nilai rata-rata kondisi Taman Heulang adalah 95,16 %. Artinya kondisi Taman Heulang sebagai taman ramah lansia termasuk klasifikasi baik, walaupun masih ada kriteria yang belum lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka Taman Heulang dapat digolongkan sebagai taman ramah lansia. Selanjutnya kondisi Taman Heulang berdasarkan 5 kriteria taman kota ramah lansia diperlihatkan tabel 4.

Tabel 4 Kondisi Taman Heulang Berdasarkan Kriteria Taman Ramah Lansia

No	***Kriteria Taman Ramah Lansia***	***Pencapaian***	***Bobot***	***Kondisi***
1	Lokasi	100	14	14,00
2	Aksesibilitas	88,88	22	19,55
3	Vegetasi	100	15	15,00
4	Pencahayaan	100	6	6,00
5	Fasilitas	94,44	43	40,61
	Rata-rata			95,16
	Klasifikasi			Baik

Sumber : Hasil analisis

IV. KESIMPULAN

Kota Bogor merupakan kota yang mempunyai beragam objek daya tarik wisata yang banyak menarik wisatawan untuk berkunjung. Sebagian besar objek wisata berada di kawasan pusat kota. Taman Heulang sebagai salah satu taman kota yang terluas di kota Bogor kondisinya sudah sesuai dengan kriteria taman kota ramah lansia. Pengembangan taman kota ramah lansia merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

Alén-Elisa , TrinidadDomínguez dan NievesLosada (2012). New Opportunities for the Tourism Market: Senior Tourism and Accessible Tourism, Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies, Dr. Murat Kasimoglu (Ed.), *InTech*, DOI: 10.5772/38092.

Alamsjah, M.Iqbal.(2016). DayaSaingPariwisata Indonesia KiniBerada di Rangking 50 Dunia.*Warta Beacukai*Vol 48, No 6 Tahun 2016 .17-21.

Anonim , 2014. *Statistik Profil Wisatawan Nusantara Tahun 2014*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata.

Astiti, NiKomangAyu. (2017).Situs-SitusArkeologiSebagaiMotivasiPenarik (Pull Factors) WisatawanLanjutUsia (Silver Tourism) BerkunjungKeProvinsi Bali.*Jurnal Forum Arkeologi*Volume 30, Nomor 1, April 2017. 41-54

Balderas-Cejudo M A ,GW Leeson and E Urdaneta.(2017). Senior Tourism: Towards and Active and HealthyAgeing.*OAJ Gerontol& Geriatric Med,* Vol.1 No. 3 Tahun 2017. 1-3.

Cianga-Nicolae dan Popescu C.Antoaneta*.(*2013).*G*reen Spaces And Urban Tourism Developmentin CraiovaMunicipality In Romania. *European Journal Of Geography* Vol. 4 No. 2 Tahun 2013. 34-45 .

Hermawati, Istiana. (2015).Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia*.Seminar dan Lokakarya Tentang Kota Ramah Lansia*, April 2015. Yogyakarta: Univertitas Negri Yogyakarta

Kaung Hwa Chen , Hsiang Chang Feng and Yu Liu Fang. (2015). Wellness Tourism among Seniors in Taiwan:Previous Experience, Service Encounter Expectations, Organizational Characteristics, Employee Characteristics, and Customer Satisfaction. J. *Sustainability*, Vol. *7*. tahun 2015. 10576-10601

Mulyana, Bedi. (2012). Pengembangan Kota Bogor SebagaiDestinasiPariwisataInternasional.*JurnalIlmiahPariwisata* Vol. 2 No.1 Tahun 2012. 109-222

Musa, Safuri. (2016). Kajian Kota Ramah Lansia Di Kota Bekasi.*JurnalPendidikan*Vol. 7 No. 1, April 2016. 61-70.

Utama, I Gusti Bagus Rai. (2013)**.** Pengembangan Wisata Kota Sebagai Pariwisata Masa Depan Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Space* # I - Agustus 2013 . Denpasar: Universitas Hindu Indonesia (UNHI).

Ramadhani-Anindita, Darjosanjoto-EndangTitiSunarti, dan Rachmawati-Murni.(2015). Evaluation of The Suitability of Urban Parks Based on The Characteristic of The Elderly's Needs in Surabaya.T*he 1st International Seminar on Science and Technology* B201-47 August 5th 2015, Postgraduate Program InstitutTeknologiSepuluhNopember, Surabaya, Indonesia.

Sanmargaraja- Shalini dan Seow Ta- Wee. (2014). Grey Tourism in Malaysian Parks A case study in Johor State. *International Journal of Conceptions on Management and Social Sciences Vol. 2, No 3, September 2014.1-5.*

Sarkissian-Wendy and Stenberg-Beauford. (2013).*Guidelines for Planning for Older People in Public Open Space*.

Survai Meter dan CAS UI (2013). *Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah Lanjut Usia 2030.* Yogyakarta: Survai Meter.

Alih Fungsi Tata Permukiman Dan Tata Sosial Masyarakat Sekitar Kampus II Universitas Ahmad Dahlan Studi Kasus Kampung Sidikan, Umbulharjo Kota yogyakarta

Jubbai Marasabessy

Teknik arsitektur dan perencanaan,Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta
*Email:*jubbai_m@yahoo.co.id

ABSTRAK

Keberadaan kampus merupakan salah satu instrumen pemicu perkembangan sebuah wilayah. Perkembangan ini tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan ruang dari kalangan masyarakat setempat. Perkembangan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas ruang tetapi kuatitas ruang tersebut yang kemudian mendorong terjadinya peningkatan pemanfaatan ruang dan perubahan fungsi ruang. Sejak tahun 1980an, kampung Sidikan mengalami alih fungsi fisik dan non fisik wilayah yang signifikan disebabkan oleh pembangunan kampus II Ahmad Dahlan. Hal ini ditandai dengan beralihnya fungsi pola pengunaan lahan, aktifitas sosial kemasyarakatan hingga mata pencaharian masyarakat. Dengan demikian, Makalah ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa alih fungsi tata permukiman dan tata sosial masyarakat di sekitar kampus. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi-intepretatif. Analisa data akan dilakukan atas temuan-temuan dan unit-unit informasi yang ada dilapangan kemudian dikelompokkan dalam tema-tema dan selanjutnya di induksi ke dalam rumusan konsep dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi ini terjadi karena peluang pendapatan ekonomi dari aktifitas turunan kampus yang lebih tinggi hingga mencapai 50 persen, dan alih status kampus dari IKIP muhammadiyah menjadi Universitas Ahmad Dahlan.

Kata kunci: tata permukiman, tata sosial, alih fungsi

I. PENDAHULUAN

Keberadaan perguruan tinggi di suatu wilayah selalu mempengaruhi perkembangan wilayah baik fisik dan non fisiknya. Dampak perkembangan wilayah secara fisik dapat di lihat dari perubahan fungsi bangunan dan lahan kawasan, sedangkan non fisik adalah peningkatan aktifitas perekonomi wilayah seperti perkembangan lapangan pekerjaan dan harga tanah. Perguruan tinggi selalu memberi pengaruh pada kawasan sekitarnya (Allison, 2006). Pengaruh ini tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan ruang khususnya dari kalangan mahasiswa seperti tempat tinggal dan tempat kebutuhan sehari-hari. Disamping itu, masyarakat juga memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi sebagai salah satu sumber pendapatan utamanya. Akibatnya terjadi pemanfatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat dan terjadi pembangunan berbagai macam bangunan dengan fungsi pelayanan dan jasa. Kegiatan yang membangkitkan terbentuknya permukiman menurut Chapin dan Kaiser (1979) adalah penggunaan lahan yang berorientasi pada timbulnya peluang kerja.Dengan kata lain, Semakin tinggi *demand* kebutuhanruang dari mahasiswa maka semakin tinggi pula *supply* kebutuhan ruang dari masyarakat setempat. Hubungan *Supply* dan *deman*d ini umumnya menjadi faktor utama dalam perubahan fisik dan non fisik wilayah.

Kehadiran perguruan tinggi memiliki daya tarik untuk mendatangkan mahasiswa bukan hanya dari wilayah sekitar tetapi juga dari luar wilayah. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah bangunan dan perubahan fungsi bangunan khususnya di wilayah yang berbatasan langsung. Hal ini disebabkan karena mahasiswa cenderung memilih tempat tinggal yang tidak jauh dari perguruan tinggi. Pengaruh ini akan menyebabkan alih fungsi bangunan dari waktu ke waktu apabila pertumbuhan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi semakin meningkat. Antara lain terjadi alih fungsi rumah tinggal menjadi rumah dengan kegiatan ekonomi (sewa/kontrak kamar) serta perubahan/penambahan ruang dan bangunan guna menambah kapasitas (Riyanto, 2002). Disamping itu, berbagai aktifitas dan kebutuhan ruang dari kalangan

mahasiswa seperti tempat tinggal, tempat foto copy, tempat makan dan minum, serta kebutuhan sehari-hari juga menpengaruhi alih fungsi ini. Koesariani (2002) menyatakan bahwa perubahan tersebut dapat berlangsung secara terus menerus secara keseluruhan maupun sebagian dalam merespon suatu keadaan.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota pendidikan di Indonesia dimana pengaruh sektor pendidikan sangat tinggi terhadap perkembangan wilayahnya. Kebutuhan sarana prasarana wilayah yang lengkap penting untuk menunjang berbagai aktifitas di wilayah. Pengaruh ini tidak terlepas dari berbagai aktifitas kampus yang mendatangkan daya tarik bagi masyarakat. Hal ini akan selalu dibarengi oleh arus migrasi yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan saling menguntungkan bagi wilayah sekitar. Daya tarik ini akan membuat arus migrasi yang tinggi dan berdampak pada pertumbuhan penduduk yang cepat pula serta akan berdampak luas (*multliplayer effect*) pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Ada *multiplier effect* dari perguruan tinggi terhadap kawasan sekitar, disamping peluang bisnis yang menguntungkan juga prestise yang didapatkan jika memiliki pendidikan tinggi yang berkualitas (prestise) (Bromley, 2006).

Dengan perubahan lingkungan wilayah ini, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap keadaan sosial kemasyarakatan setempat. Lingkungan memiliki peran dalam mempengaruhi perilaku manusia. Hal ini juga tampak di wilayah penelitian disekitar kampus II Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Umbulharjo Kota Yogyakarta. Aktifitas sosialpun juga berubah dari waktu ke waktu seiring dengan peningkatan jumlah masyarakat dan jenis aktifitas didalamnya yang semakin kompleks. Salah satu perubahan aktifitas yakni aktifitas bertani beralih ke aktifitas jasa dan pelayanan. Peralihan ini diakibatkan karena peluang ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan aktifitas bertani sebelumnya.

Kampus II UAD merupakan kampus Ahmad Dahlan kedua dari lima kampus yang dimiliki dan tersebar di kota Yogyakarta. Kampus II memiliki potensi kajian yang lebih mendalam dalam perspektif kajian fenomena permukiman jika dibandingkan dengan kampus UAD lainnya. Banyak kampus memilih daerah-daerah strategis dalam penentuan lokasi dan umummya berada di tengah kota, dekat akses jalan, serta sarana dan prasarana lengkap. Tetapi bagaimana jika keberadaan kampus berada di tengah kampung, yang secara tidak langsung, akan berpengaruh signifikan pada tata permukiman dan tata sosial yang masih kental dengan budaya “tradisional”nya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh warga sekitar bahwa semenjak keberadaan kampus II UAD ini ada, warga mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini.

II. METODE

Analisa data akan dilakukan atas temuan-temuan dan unit-unit informasi yang ada pada tiap kasus (sampel) dilapangan kemudian dikelompokkan dalam tema-tema dan selanjutnya di induksi ke dalam rumusan konsep-konsep dan (Sudaryono, 2015). Analisa ini kemudian akan di intepretasikan berdasarkan informasi yang didapat. Jumlah sampel yang diwawancarai adalah 14 koresponden yang terdiri dari warga lokal, pendatang, mahasiswa dan pedagang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

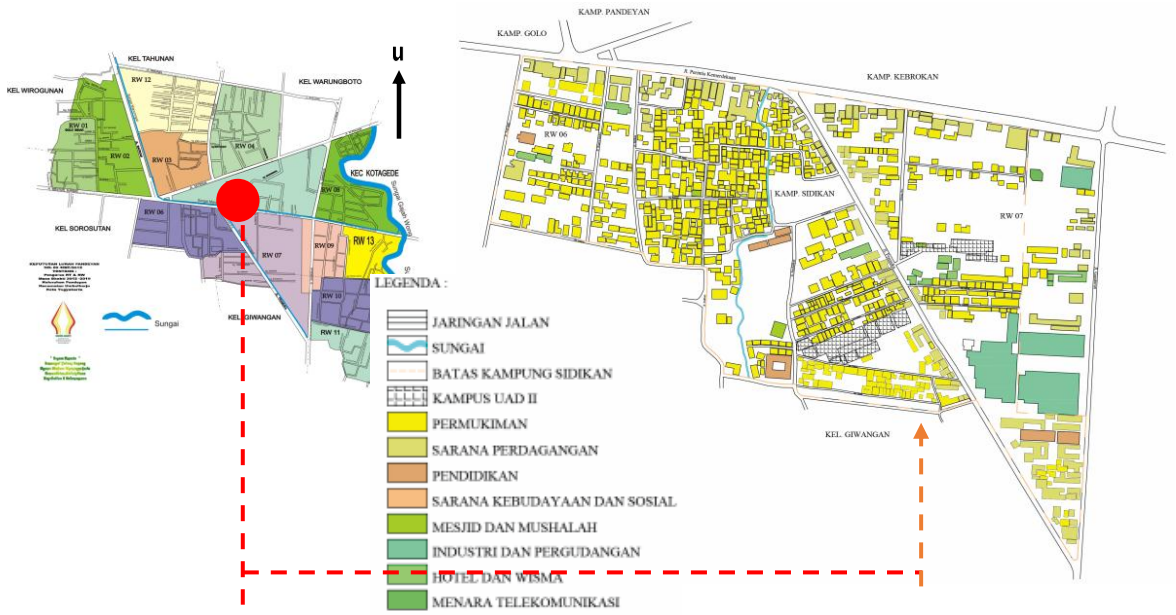
A. Gambaran Wilayah

Kondisi eksisting yang ada di kampung Sidikan termasuk ke dalam kategori permukiman dengan kepadatan yang cukup tinggi. Kepadatan permukiman ini tidak terlepas dari perkembangan mahasiswa kampus 2 UAD yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan menuntut tersediaanya fasilitas hunian sementara (kost). Dalam pembagian struktur wilayah kota Yogyakarta yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah kota Yogyakarta tahun 2010-2029, disebutkan bahwa kampung Sidikan

terletak di Kelurahan Pandeyan.Menurut dokumen kelurahan Pandeyan, Kelurahan ini berjarak 0,5 km dari Kecamatan Umbulharjo dan 2 km dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kampung Sidikan merupakan salah satu kampung di kelurahan Pandeyan sedangkan secara administrasi kampung Sidikan di batasi oleh:

- Sebelah Utara : Kampung Kebrokan dan Kampung Pandeyan
- Sebelah Selatan : Kel Giwangan & Sorosutan
- Sebelah Barat : Kel. Wirogunan
- Sebelah Timur : Kampung Gambiran

Cakupan wilayah penelitian adalah sebagian wilayah kelurahan Pandeyan, dengan detail wilayah penelitian terutama di lingkungan kampung Sidikan, meliputi RW 06 dan RW 07 dan terdiri dari 8 RT. Kampung Sidikan merupakan 1 dari 8 kampung yang terdapat di kelurahan Pandeyan dan terletak bersebelahan dengan kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hal ini membuat sebagian besar penduduk memanfaatkannya sebagai salah satu sumber pemasukan tambahan. Beberapa rumah tinggal bukan hanya di jadikan hunian pribadi tetapi juga dijadikan tempat usaha (laundry/warung/tempat kost). Perumahan dilokasi penelitian didominasi oleh rumah permanen dibandingkan non permanen. Keberadaan rumah non permanen ini biasanya dijadikan sebagai warung makanan/kios kecil sedangkan untuk perumahan permanen dijadikan sebagai tempat tinggal.



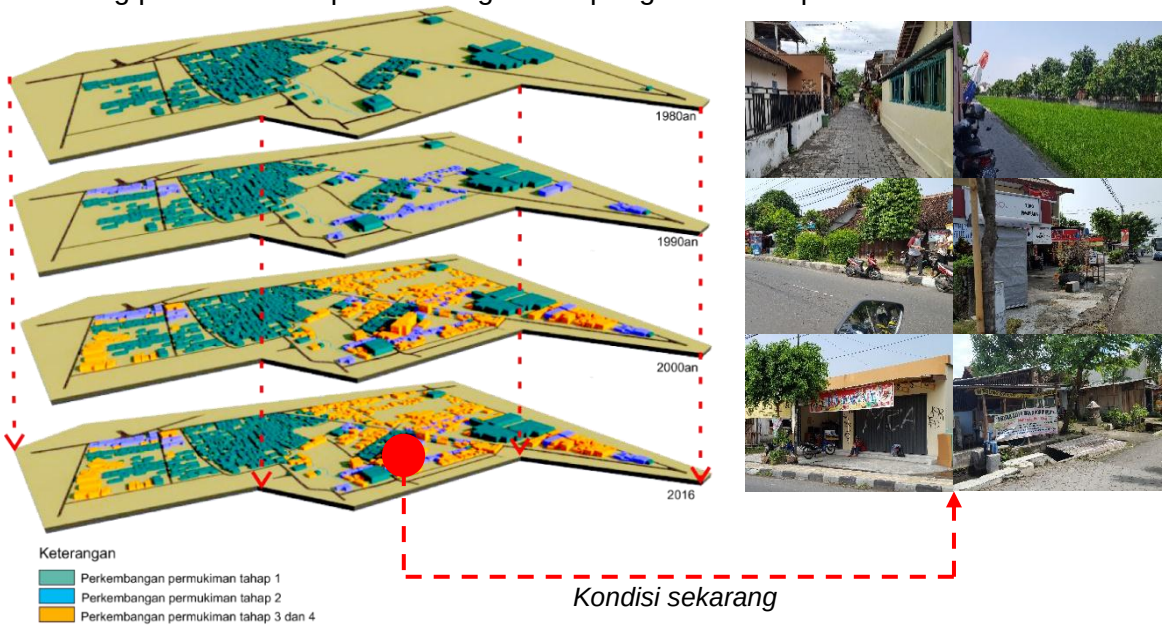
Gambar 1. Peta Orientasi Kampung Sidikan Terhadap Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta

B. Kajian Alih Fungsi Tata Permukiman Dan Tata Sosial

Tata permukiman dan tata sosial di wilayah penelitian memiliki hubungan yang erat. Dengan kata lain, kedua hal ini saling memberikan pengaruh masing-masing terhadap kawasan. Sehingga perubahan yang terjadi pada tata permukiman juga akan mempengaruhi tata sosial.Masyarakat di kampung Sidikan telah menjadikan keberadaan kampus 2 universitas Ahmad dahlan sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tidak hanya berfungsi sebagai sebuah sarana pendidikan saja tetapi juga telah menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi warga dari berbagai aktifitas turunan kampus (pelayanan dan jasa). Aktifitas ini akan semakin berkembang dan berpengaruh besar terhadap perkembangan wilayah seiring dengan semakin besar perkembangan jumlah mahasiswanya. Hal ini akan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. W. Paul Farmwer dan Julie A.Gibb, dalam Catanese (1986), mengatakan bahwa elemen penentu penggunaan lahan adalah interaksi antar manusia, aktivitas dan lokasi. Dengan kata lain, semakin tinggi interaksi dan aktifitas manusia di suatu wilayah maka semakin tinggi pula

perubahan lahan akan terjadi. Indikasi ini perlu menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah setempat karena dapat menimbulkan permasalahan kawasan di kemudian hari.

Di tahun 1980-an, kehadiran kampus UAD belum memberikan pengaruh yang signifikan pada kawasan sekitar dan aktifitas perekonomian juga belum berkembang pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih minimnya jumlah permukiman dan sarana perdagangan. Warga sekitar masih memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan bertani, berkebun maupun beternak. Kegiatan ini menjadi salah satu sumber pendapatan warga disamping pekerjaan lain seperti pegawai negeri dan wiraswasta. Akan tetapi, sejak perubahan status kampus maka perkembangan kawasan menjadi berkembang pesat. Analisa perkembangan kampung Sidikan dapat di lihat dibawah ini:



Gambar 2. Perkembangan Permukiman di kampung Sidikan 1980-2016

Perkembangan permukiman di tahap 1 ini masih di dominasi oleh permukiman warga yang berkembangan di sebelah barat kampung Sidikan dan beberapa pabrik di sebelah timur. Di tahap 2, permukiman mulai berkembang pesat. Hal ini terjadi karena peralihan status IKIP Muhammadiyah menjadi kampus UAD. Dengan adanya peralihan status ini maka terjadi pembangunan infrastruktur kampus yang berdampak pula pada bertambahnya mahasiswa. Dengan bertambahnya mahasiswa maka kebutuhan terhadap tempat tinggal (kost) ataupun tempat makan (warung) juga bertambah. Pada tahap 3 dan 4, permukiman telah tumbuh pesat seiring dengan berkembanganya mahasiswa kampus 2 UAD. Dominasi rumah kost ataupun jasa perdagangan lainnya tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan rumah pribadi. Dalam wawancara dengan beberapa warga, mereka justru lebih memilih mengalihkan fungsi rumah pribadi mereka dengan rumah kost/warung/tempat foto copy sebagian atau sepenuhnya. Mereka menggangap bahwa fungsi rumah ini lebih baik dan dapat menambah sumber pendapatan mereka jika dibandingkan dengan rumah pribadi. Setelah melakukan wawancara dengan koresponden, peneliti mengelompokkan beberapa tema yang menjadi faktor penyebab alih fungsi tata permukiman dan tata sosial yakni tema **kondisi ekonomi, alasan tinggal, aksesibilitas dan perubahan fungsi ruang**.

1. Kondisi Ekonomi

Tidak dapat di pungkiri bahwa keberadaan kampus 2 universitas Ahmad Dahlan telah memberikan dampak signifikan terhadap permukiman sekitar. Lahan-lahan kosong di awal tahun 1980-1990 an berubah menjadi lahan bermukim yang

difungsikan sebagai tempat tinggal maupun sarana komersil seperti warung makan, ruko, dan tempat foto copy. Perubahan ini terjadi karena adanya daya tarik dari keberadaan kampus yang dapat menambah pendapatan warga sekitar yang cukup tinggi. Daya tarik ini tidak hanya dirasakan oleh warga sekitar tetapi juga oleh warga dari luar. Dari hasil wawancara, mayoritas koresponden menyatakan bahwa keradaan kampus telah memberikan banyak pengaruh ekonomi warga Salah satu koresponden yakni Nanda menyatakan bahwa semenjak keberadaan kampus ini yang beralih dari IKIP Muhammadiyah ke Universitas Ahmad Dahlan maka mayoritas masyarakat berlomba membuat jenis usaha tertentu (warung makan, laundry dan foto copy) di sekitar kampus 2 UAD dengan tujuan untuk menambah penghasilan

Salah satu koresponden ,N.1, menyatakan bahwa semenjak keberadaan kampus ini yang beralih dari IKIP Muhammadiyah ke Universitas Ahmad Dahlan maka hampir semua masyarakat yang membuat jenis usaha tertentu (warung makan, laundry dan foto copy) di sekitar kampus 2 UAD ini meningkat. N.1 yang merupakan pengusaha laudry menjelaskan bahwa kenaikan yang dialami dalam usahanya sebesar30-40 %

"*Pemasukan jelas naik dari adanya kampus ini, kenaikan pendapatan sekitar 30-40 persen*"

Pengaruh pendapatan dari kampus juga dialami oleh E.1. Korenponden E.1, seorang karyawan foto copy, menyatakan bahwa kampus 2 UAD ini telah memberikan pengaruh terhadap pendapatan usahanya dimana pendapatannya sekitar 300-400 ribu/hari seperti berikut:

"*Pengaruh kampus besar sekali, yaa kalau dia lagi masuk penjualannya lumayan, pendapatannya ga pernah di hitung tapi biasanya per hari itu 300-400 ribu*"

Dalam wawancara yang dilakukan dengan koresponden lain, S.1, mengatakan bahwa pendapatan masyarakat di sekitar kampus bisa mencapai 50 persen dan pendapatan itu berasal dari mahasiswa. Hal ini menjadikan pengaruh kampus II UADD terhadap warga sekitar cukup tinggi. Seperi dalam wawancara berikut :

"*Kalau disini mah rata-rata pemasukannya 50 persen dari UAD... biasanya sekitar 50 ribu per hari, pengeluarannya ga mesti, tapi untuk usaha ini (warung) 1 minggu sekitar 500-an kalau kampusnya ramai. Rata-rata yang beli mahasiswa*"

Dari wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran kampus II UAD memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup warga kampung Sidikan. HaI ini disebabkan oleh tingginya persentase pendapatan dari aktifitas turunan kampus seperti yang di jelaskan sebelumnya. Dengan adanya peluang ekonomi ini, maka warga akan memanfaatkan kondisi ini dengan memanfaatkan lahan kosong atau sebagian rumah tinggal untuk kegiatan ekonomi. Pemanfaatan ini akan berdampak pada perubahan alih fungsi tata permukiman.

2. Alasan Tinggal

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa alasan tinggal penduduk kampung Sidikan sangat beragam khususnya yang berasal dari luar kampung. Keberagaman ini menjadikan keberadaan kampus 2 UAD bukan satu-satunya alasan penduduk untuk memutuskan berada di kampung Sidikan dan memilih untuk tinggal. Jika melihat dari beberapa hasil wawancara dengan koresponden maka salah satu alasan kenapa penduduk memilih untuk tinggal di sini yakni persoalan ekonomi. Ekonomi menjadi alasan dominan bukan hanya dekat dengan pusat kota Yogyakarta dan ketersediaaan akses jalan tetapi juga harga tanah dan mencari penghasilan lebih baik yang menjadi pertimbangan penduduk memilih tinggal di sini.Pernyataan ini seperti disampaikan oleh K.2 sebagai berikut:

"*saya kan gak punya apa-apa di sana (kampung halaman). Jadi kan saya merantau, merantau cari rezeki. Awalnya kan saya sopir travel selama 10 tahun. Lalu di sini ada tanah kosong banyak dan murah sekitar 50 ribu/tahun tapi 35 tahun yang lalu. Jadi saya kontrak tanah sampai sekarang*".

Hal serupa juga disampaikan oleh S.2 bahwa alasan pindah ke kampung Sidikan ini karena tingkat permintaan pekerjaan di kampung halaman sangat kurang sehingga mencari pekerjaan ke luar. Dia menganggap bahwa keluar kampung merupakan jalan untuk dapat memperbaiki kondisi ekonominya karena peluang mendapatkan pekerjaan masih tinggi. Sebagaimana dituturkan berikut:

"*pindah ke sini karena dikampung masih desa dan belum banyak lapangan pekerjaan. Jadi banyak yang keluar kampung dan ikut temen cari kerja diluar.... Rata-rata pekerja disini berasal dari wonosari. Dulunya rumah ini adalah pribadi tapi mulai diubah jadi tempat foto copy dan ruangnya diperbesar*".

Pernyataan diatas juga didukung oleh N.2 yang juga menyatakan bahwa alasan tinggal di wilayah ini karena persoalan ekonomi khususnya berkaitan dengan harga tanah. Dimana harga tanah di pinggir kota masih relatif lebih murah dibandingkan dengan pusat kota seperti berikut:

"*saya pindah ke sini karena dulunya kontrak disana (kampung). Lalu datang kesini ngikut temen dan liat kalau tanah disini itu murah... Karena waktu itu punya duit yaa... langsung aja di beli*".

Alasan pindah ke kampung Sidikan karena ekonomi telah menjadikan alasan beberapa warga untuk tinggal disini. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di kampung masing-masing membuat mereka tidak punya pilihan lagi selain keluar kampungnya untuk merubah keadaan ekonomi. Mereka menganggap bahwa merantau merupakan salah satu jalan merubah nasib lebih baik lagi dan kampung Sidikan dipilih bukan hanya harga tanah yang masih murah tetapi juga akses kepusat kota yang mudah. Hal ini juga dinyatakan oleh S.3 :

"*Alasanya merantau yaa cari pekerjaan. Dikampung itu apa yaa, Cuma ada pekerjaan buruh tani saja jadi istilahnya itu untuk angkat nasib lah, kan dekat kota jadi peluangnya besar*".

Dari hasil wawancanra diatas dan observasi lapangan, dapat diuraikan bahwa salah satu alasan beberapa penduduk di kampung Sidikan memilih untuk tinggal karena alasan persoalan ekonomi, harga tanah dan lokasi yang berdekatan dengan kampus maupun akses ke pusat kota yang dekat. Dari beberapa alasan tinggal ini maka alasan tinggal warga kampung Sidikan beraneka ragam dan bukan hanya keberadaan kampus menjadi satu-satunya alasan tinggal.

3. Aksesibilitas

Kemudahan aksesibilitas merupakan salah satu instrumen penting dalam memilih lokasi/tempat tinggal di sebuah wilayah karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Pernyataan ini pula yang menjadikan alasan sebagian penduduk kampung Sidikan memilih untuk tinggal di wilayah ini khususnya mahasiswa. Pertumbuhan bangunan permukiman khusunya bangunan sewa atau jasa lainnya menjadi lebih cepat sejak kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan (UAD) berubah status dari IKIP muhammadiyah pada tahun 90-an. Rata-rata mahasiswa disini memilih tempat tinggal yang dekat dengan kampus UAD dengan pertimbangan dapat mengjangkau tempat-tempat tertentu dengan mudah. Jangkauan yang mudah ini juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh K.1:

"*saya tinggal di sini sudah 3 tahun lalu. Uda ngerasa enak di sini. Alasanya saya memilih kost disini ya karena dekat dengan kampus. Jadi saya kalau ke kampus jalan kaki saja. Dan kalau beli kebutuhan makan di warung terdekat atau supermarke*t".

Aksesibilitas juga menjadi pertimbangan koresponden N.3 memilih lokasi kampung Sidikan sebagai tempat tinggal. Ketersediaan tempat kost yang banyak disekitar kampus menjadi pertimbangan utamanya. Selain karena N.3 merupakan mahasiswa kampus 2 UAD, informsi yang diberikan oleh senior disamping kampus juga menjadi pertimbangannya. Pernyataan ini juga disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

"*Saya memilih kost ini karena diberitahuan kk senior kalau ada kost yang dekat dengan kampus dan juga mau menem ani temen SMK yang takut sendiri. Karena merasa dekat maka saya memilihnya. Jadi kalau pergi ke kampus saya naik sepeda*".

Persebaran tempat kost yang banyak dan didukung oleh kemudahan akses masuk dan keluar kampung Sidikan telah membuat minat banyak mahasiswa untuk menempatinya khususnya yang berstatus mahasiswa UAD. Kemudahan akses ini juga membuat temen-temen sesama kampus atau antar kampus dapat kumpul (nongkrong) dengan mudah. Hal ini juga yang membuat B.1 memilih tinggal seperti dalam wawancara berikut :

"*Alasan kenapa saya memilih kost di sini karena letaknya yang strategis dengan kost temen-temen. Jadi bisa nongkrong/kumpul bareng*".

Kemudahan akses ke lokasi-lokasi tertentu seperti warung, toko, pusat kota maupun kampus telah menjadi alasan beberapa warga dari beberapa daerah di luar kampung Sidikan termasuk mahasiswa untuk memilih tinggal di kampung Sidikan.

4. Perubahan fungsi ruang

Kampus 2 Ahmad Dahlan ini telah memberikan berbagai dampak dalam kehidupan warga Sidikan baik kehidupan sosial maupun ekonomi. Perubahan ini tentunya juga telah berdampak pada fisik maupun fungsi bangunan sekitar kampus sebagai bentuk respon terhadap keberadaan kampus ini. Banyak warga di Kampung Sidikan telah merubah fisik atau fungsi bangunannya agar dapat mewadahi dampak dari kampus 2 UAD ini. Perubahan inilah yang membuat fisik atau fungsi bangunan mayoritas warga Sidikan dilakukan, sebagai upaya mewadahi bertambahnya jumlah mahasiswa seperti sekarang ini.

Salah satu koresponden N.4 menyatakan bahwa semenjak terjadinya perubahan status kampus 2 universitas ahmad dahlan dari IKIP Muhammadiyah menyebabkan banyaknya perubahan fungsi bangunan pribadi menjadi bangunan komersil atau tempat kost. Dimana warganya merubah bangunan sebagian ruang atau seluruhnya menjadi tempat kost. Warga sidikan percaya bahwa perubahan status ini akan memberikan peningkatan pendapatan mereka (bertambahnya jumlah mahasiswa sama dengan bertambahnya jumlah pendapatan). Koresponden N.4 manyatakannya dalam wawancara berikut:

" *Bangunan disini awalnya untuk pribadi tapi kemudian berubah menjadi kost-kostan ketika kampus IKIP berubah menjadi UAD. Jadi karena warga melihat potensi kost maka banyak yang mengalihkan rumahnya menjadi kost. Mayoritas warga mengalihkan sebagian rumahnya untuk kostan dan secukupnya untuk pribadi*."

Perubahan fungsi atau fisik bangunan juga dialamu oleh koresponden A.1. pekarangan rumah yang awalnya tidak difungsikan hanya lahan kosong saja berubah menjadi warung makan. Perubahan ini tentunya menambah pendapatan A.1 jika dibandingkan sebelumnya. Pesatnya pertumbuhan mahasiswa dari tahun ke tahun juga membuat lahan disamping rumahnya juga dirubah menjadi warung makan. Secara umum, cara perubahan lahan ini juga dipakai oleh warga-warga lainnya di kampung Sidikan. Di kutip dalam waancara berikut:

" *Sejak awal dirumah ini hanya ada bangunan utama saja. Tapi semenjak ada banyak mahasiswa maka bagian halaman di buat warung kelontong sejak 4 tahun lalu. Lalu karena melihat semakin banyak banyak mahasiswa maka dibuat 1 warung lagi sejak 1,5 setahun lalu*."

Dalam wawancana dengan koresponden S.4 mengatakan bahwa tempat foto copy ini awalnya adalah rumah pribadi dan dirubah menjadi tempat foto copy karena lebih menguntungkan. Dia juga mengatakan bahwa pemiliknya "rela" pindah dari tempat ini

ke dalam kampung Sidikan. Dia memperkiraan bahwa pemiliknya pindah karena tempat ini memiliki keunggulan jika dijadikan tempat foto copy seperti dalam wawancara berikut:

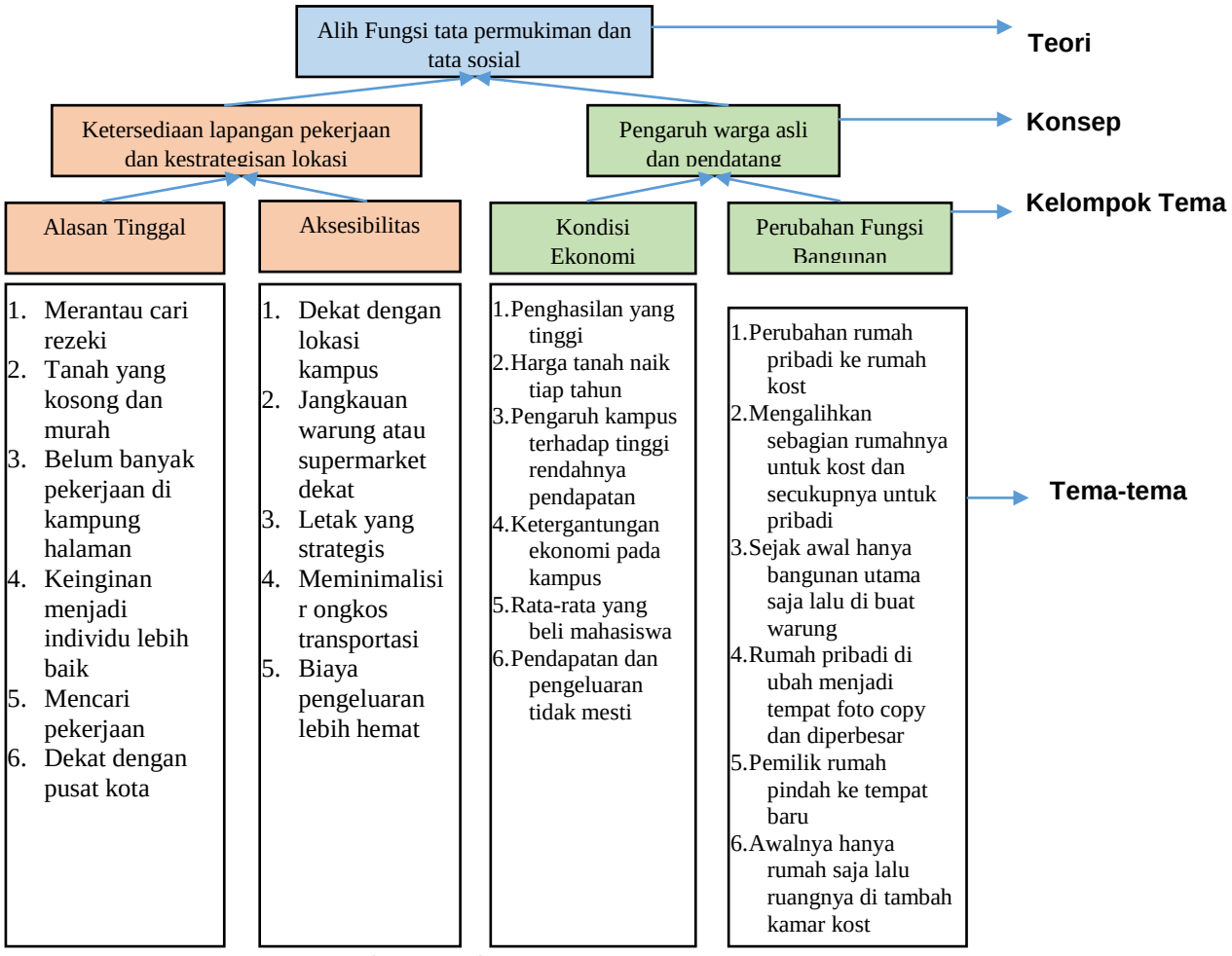
"*Dulunya rumah ini adalah pribadi tapi mulai diubah jadi tempat foto copy dan ruangnya diperbesar kerena lebih untung. Pemilik tempat ini pindah ke belakang kampung dan membeli tanah sekaligus bangun rumah baru*."

Peralihan rumah pribadi juga dialami oleh R.1, dia menyatakan bahwa awalnya tempat kostnya bergabung dengan rumah pribadinya tetapi karena keadaan ini menggangu kenyamanan akhirnya dia membangun tempat kost baru disamping rumahnya yang lahanya masih kosong.

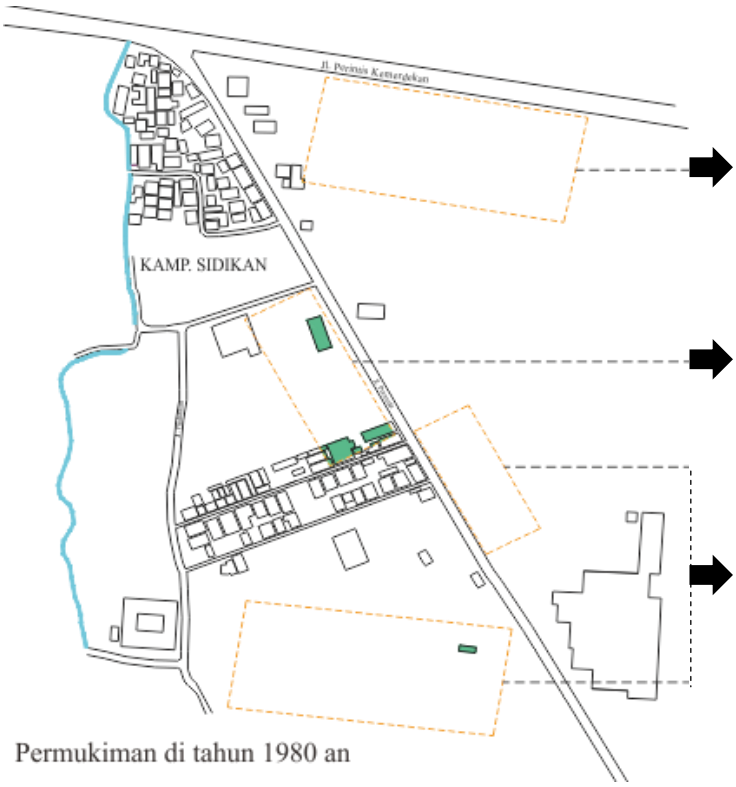
"*Kalau dulu, kamar kost masih di dalam rumah dengan kami. Tapi karena merasa kurang nyaman jadi lahan kosong di sebelah rumah dibangun kost. Bahkan ketika ada orang yang lewat di depan rumah saya disebelah itu (lahan kosong)pasti selalu dibilang "kalau punya saya pasti saya ba ngun buat tempat kost*."

Dari beberapa wawancara diatas. Dapat disimpulkan bahwa keradaan kampus dan perubahan status kampus UAD dari IKIP Muhammadiyah telah membuat perubahan besar terhadap fisik dan fungsi bangunan warga kampung Sidikan. Dan perubahan ini merupakan inisiatif dari warga yang menganggap bahwa keberadaan kampus ini dapat memberikan nilai tambah.

Hubungan diantara ke empat tema dapat di lihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 3. Hubungan Tema Dan Konsep



Permukiman di tahun 1980 an

Lahan kosong di tahun 1980 an ini belum dimanfaatkan untuk kegiatan komersil atau kegiatan lainnya akan tetapi hanya lahan hijau. Di jalan perintis kemerdekaan, tata permukiman belum ada sehingga nilai konsep belum ada.

Bangunan yang terletak di jalan Pramuka masih fungsikan sebagai bangunan pribadi sedangkan bangunan komersil masih belum tampak akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit jumlahnya.

Di area ini, masih terdapat lahan kosong dan belum dimanfaatkan. lahan masih hijau dimana difungsikan sebagai lahan bertani. interaksi sosial pun masih rendah.



Permukiman di tahun 2016

Di jl. Perintis Kemerdekaan ini, terdapat tata permukiman bangunan komersil muncul di sepanjang jalan. Hal ini berkaitan dengan kestategisan lokasi. Bangunan ini muncul karena lokasi yang strategis dimana dekat dengan jalan utama.

Di Jl. Pramuka. Jenis bangunan komersil seperti warung makan, tempat foto copy, tempat pulsa dan bengkel di dirikan. Bangunan ini ditempatkan dekat dengan jalan dan dekat kampus agar dapat memudahkan jangkauan oleh mahasiswa (konsep ketersediaan lapangan pekerjaan dan kestrategisan lokasi).

Banyak terjadi perubahan fungsi bangunan bukan hanya dari warga lokal tetapi warga pendatang (konsep pengaruh warga asli dan pendatang)

Gambar 4. Kondisi tata permukiman dan tata sosial di kampung Sidikan tahun 1980 dan 2016

Dari bagan ini, maka dapat di simpulkan bahwa alih fungsi tata permukiman dan tata sosial di kampung Sidikan disebabkan dua konsep yakni konsep ketersediaan lapangan pekerjaan dan kestrategisan lokasi, dan konsep pengaruh warga asli dan pendatang. Konsep pertama muncul karena lokasi penelitian yang dekat dengan pusat

kota sehingga dianggap memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pusat kota di anggap sebagai wilayah yang dapat menawarkan berbagai macam pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Kondisi lahan yang masih kosong di tahun 1980 an dan migrasi warga pendatang, telah merubah tata permukiman dan tata sosial di kampung Sidikan.

Lahan-lahan kosong di awal tahun 1980-1990 an berubah menjadi lahan bermukim yang difungsikan sebagai tempat tinggal maupun lahan komersil seperti warung, ruko, laudry dan tempat foto copy. Perubahan lahan ini dapat dilihat pada perubahan pola permukiman di jalan Pramuka dan jalan Perintis Kemerdekaan di tahun 1980 hingga 2016 dimana lahan-lahan kosong kemudian berubah menjadi lahan bermukim dan usaha. Aktifitas yang awalnya tidak ada dilahan kosong berubah menjadi aktifitas baru. Aktifitas baru ini akan memunculkan aktivitas baru. Aktifitas ini memuncul tata sosial baru seperi pada Gambar 4.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

a. Keberadaan kampus 2 universitas Ahmad Dahlan telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi warga sekitar hingga 50 persen. Tingginya pengaruh kampus ini membuat sebagian warga mengantungan sebagian besar pendapatan mereka dari kampus.
b. Alih status kampus institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah menjadi Universitas Ahmad Dahlan di tahun 1994 menjadi faktor utama terhadap pesatnya perkembangan permukiman dan daya tarik sektor ekonomi bagi warga pendatang maupun warga lokal.
c. Tata sosial kemasyarakatan di kampung Sidikan telah berubah semenjak kampus 2 UAD berdiri dari kegiatan bertani dan beternak menjadi kegiatan pelayanan dan jasa. Alih fungsi kegiatan ini terjadi karena adanya peluang ekonomi yang lebih tinggi dari aktifitas turunan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016.

Monografi Kelurahan Pandeyan 2015.

Chapin, F.Suart. Jr, and Kaiser, Edward J, 1979. *Urban Land Use Planning.3rd*, Urbana, University Of Illois Press.

Koesariani (2002) dalam http://digilib.itb.ac.id diakses 12 Juli 2017

Sudaryono, 2015. 'Metodologi Penelitian', Bahan kuliah tidak diterbitkan, Magister Perencanaan Kota Dan Daerah, Universitas Gadjah Mada

Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Cagar Budaya dan Pariwisata

Maskur
Mahasiswa S2, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Tumbuhnya ekonomi informal berupa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering menjadi pertentangan pada kawasan yang mempunyai fungsi cagar budaya sekaligus pariwisata. Penataan lokasi PKL yang tidak pas akan memberikan dampak buruk, tidak hanya pada pengembangan ekonomi kawasan, juga pada sisi pelestarian cagar budaya kawasan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dan menjadi aktivitas pendukung kegiatan perdagangan formal, sehingga diperlukan adanya penataan lokasi PKL. Makalah ini berusaha menjelaskan kriteria penentu dalam pemilihan lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata, dalam hal ini mengambil studi kasus di Kawasan Candi Borobudur. Metode pendekatan dalam makalah ini adalah induktif kualitatif, menggunakan metode primer berupa observasi dan wawancara mendalam kepada perwakilan pedagang dan tokoh yang terkait dengan PKL sebagai key informan. Hasil dari makalah ini menghasilkan 7 (tujuh) kriteria dalam penentu lokasi PKL. Makalah ini juga menghasilkan temuan bahwa terjadi benturan lokasi PKL yang diinginkan dengan lokasi PKL yang didasarkan pada peraturan yang ada.

Kata kunci: pedagang kaki lima, lokasi, kawasan cagar budaya dan pariwisata

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan wilayah, pengelolaan kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata sering kali dihadapkan dengan kepentingan ekonomi yang berkembang dan mulai menggeser sisi pelestarian cagar budaya tersebut. Sektor pariwisata merupakan sektor yang bisa memberikan dampak ikutan terhadap kegiatan non pariwisata. Hampton (2005) menyatakan bahwa selain memberikan kontribusi dalam penciptaan kesejahteraan, investasi dan lapangan kerja, sektor pariwisata internasional, juga memainkan peranan dalam pembangunan identitas di banyak negara, contohnya adalah keberadaan kawasan cagar budaya dan pariwisata dalam hal ini mengambil studi kasus di kawasan Candi Borobudur yang ada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.

Salah satu bentuk permasalahan yang ada di kawasan Candi Borobudur adalah tumbuhnya kegiatan ekonomi informal yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di zona 2 Candi Borobudur. Padahal dari sisi aturan dijelaskan bahwa fungsi zona 2 Candi Borobudur adalah zona penyangga.

Pedagang Kaki Lima dalam peraturan perundangan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut, PKL didefinisikan sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Belum adanya rumusan yang jelas terkait penempatan lokasi bagi PKL di zona 2 Candi Borobudur menyebabkan sampai saat ini keberadaan PKL tersebut masih ada dan terdapat kecenderungan pertambahan jumlah PKL. Di sisi lain dalam Peraturan

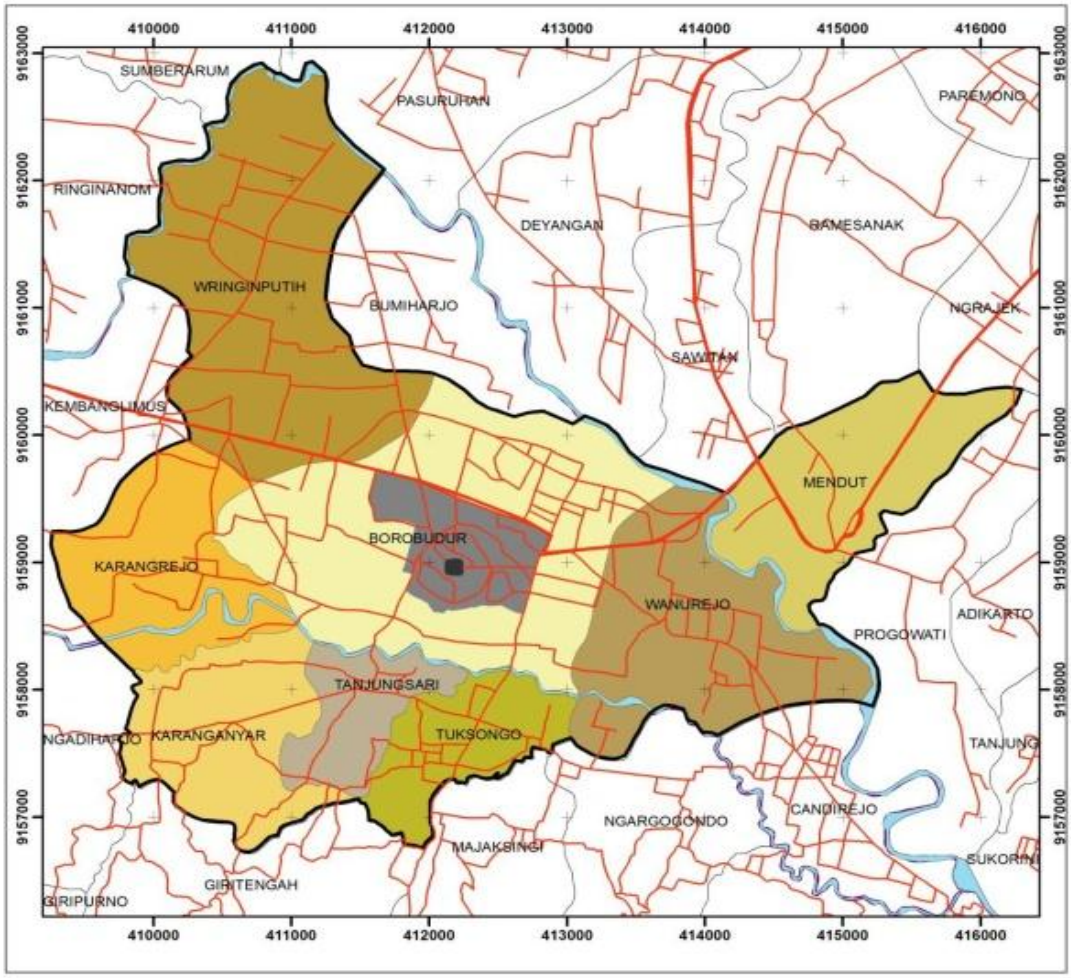
Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya, dalam indikasi program dinyatakan bahwa relokasi kios souvenir harus selesai maksimal Tahun 2019. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pemilihan lokasi bagi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata.

Penelitian ini didasari permasalahan adanya pemanfaatan zona 2 kawasan cagar budaya dan pariwisata Candi Borobudur sebagai lokasi aktivitas ekonomi para PKL, sehingga diperlukan pemecahan masalah berupa bagaimana pemilihan lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata.

II. RUANG LINGKUP

A. Lingkup Wilayah

Ruang lingkup penelitian ini adalah kawasan cagar budaya dan pariwisata Candi Borobudur yang meliputi 7 (tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan, yaitu Desa Tuksongo, Desa Wanurejo, Desa Borobudur, Desa Tanjungsari, Desa Karanganyar, Desa Karangrejo, Desa Wringinputih di Kecamatan Borobudur dan Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

B. Lingkup Substansi

Penelitian ini diarahkan pada bagaimana memilih lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata dengan melihat kedalaman materi berdasarkan dari sisi stakeholder yang terlibat langsung dengan penelitian ini. Stakeholder yang digunakan sebagai informan dalam penelitian ini adalah perwakilan dari Pedagang Kaki Lima

(PKL) dan para tokoh yang memahami betul permasalahan PKL di Kawasan Candi Borobudur.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) merumuskan kriteria dalam pemilihan lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata, dan (2) menentukan alternatif lokasi bagi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata berdasarkan kriteria penentu lokasi. Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang perencanaan kota, khususnya terkait penataan PKL. Sumbangan teoritik tentang perumusan prioritas kriteria pemilihan lokasi dan alternatif lokasi PKL sehingga mampu memberikan gambaran bagaimana menentukan lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan kawasan pariwisata. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan masukan kepada pemerintah selaku pengambil keputusan. Manfaat selanjutnya bisa menjadi masukan agar pemerintah mampu membuat regulasi dalam pemilihan alternatif lokasi bagi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata, secara lebih khusus di kawasan Candi Borobudur.

IV. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif kualitatif. Penelitian induktif kualitatif ini dimulai dari lapangan yaitu fakta empiris dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi dan selanjutnya membuat kesimpulan berdasarkan hasil/temuan yang ada di lapangan, baik melalui wawancara dan observasi.

Dalam penelitian induktif kualitatif ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber sebagai informan yang dipilih secara purposive sampling. Fokus kegiatan ini adalah untuk menghasilkan informasi tentang prioritas kriteria penentu lokasi PKL dan alternatif lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata.

Metode pengumpulan data dikelompokkan kedalam dua kategori utama, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer yang dibutuhkan berupa data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian yang didapatkan melalui observasi dan wawancara. Sedangkang pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengumpulan data-data di instansi-instansi terkait maupun melalui peraturan atau standar yang terkait dengan topik penelitian. Data-data yang didapat dari instansi-instansi biasanya berupa laporan yang bersifat publikasi.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini memberikan gambaran terhadap suatu peristiwa yang dikaitkan dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Terdapat dua analisis yang dilakukan yaitu rumusan prioritas kriteria penentu lokasi PKL dan penentuan alternatif lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata.




Gambar 2. Proses Pengumpulan Data Penelitian

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Pemilihan Lokasi Pkl Di Kawasan Cagar Budaya Dan Pariwisata

Berdasarkan pengumpulan data baik primer dan sekunder, selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data yang didapat, maka dihasilkan 7 (tujuh) kriteria dalam pemilihan lokasi PKL. Ketujuh kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dekat dengan objek wisata, penelitian ini mencatat bahwa dalam pemilihan lokasi PKL secara fisik lokasinya tidak terlalu jauh dengan objek wisata, dalam hal ini objek wisata yang dimaksud adalah zona 2 Candi Borobudur. Pertimbangan jarak lokasi PKL dengan objek wisata ini adalah pertimbangan kenyamanan pengunjung dimana jika lokasi PKL terlalu jauh dengan Candi Borobudur, maka keinginan pengunjung untuk mendatangi lokasi PKL akan semakin kecil.
2. Dekat dengan parkir pengunjung, keberadaan lokasi PKL di Kawasan Candi Borobudur saat ini tidak terlepas dari keberadaan parkir pengunjung Candi Borobudur. Terdapat kegiatan transaksi jual beli antara pedagang dengan pengunjung yang dilaksanakan di lokasi parkir pengunjung. Fenomena masuknya pedagang ke dalam lokasi parkir pengunjung ini memperlihatkan bahwa para pedagang berlomba-lomba mendapatkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Para pedagang merasa khawatir jika para pengunjung tidak akan masuk ke dalam lokasi pedagang yang sudah disediakan (kios).
3. Dilalui oleh pengunjung, jumlah pengunjung Candi Borobudur yang besar menjadi ketergantungan bagi para PKL yang ada di Kawasan Candi Borobudur. Hal ini bisa dimaklumi karena pengunjung Candilah yang merupakan pembeli utama barang dagangan para pedagang, sedangkan masyarakat umum yang sengaja datang ke Candi Borobudur untuk sekedar membeli suvenir atau barang dagangan sangatlah kecil. Tidak heran jika dalam penelitian ini, kriteria lokasi PKL harus dilalui oleh pengunjung menjadi kriteria yang penting.
4. Ketersediaan lahan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pemindahan pedagang yang ada di zona 2 Candi Borobudur, semua pedagang harus keluar dari zona 2 Candi Borobudur, dan lokasi baru nantinya harus bisa menampung semua pedagang tersebut. Hal ini berarti bahwa lokasi PKL nantinya harus mempunyai ketersediaan lahan yang mampu menampung semua pedagang yang ada saat ini.
5. Aksesibilitas, aksesibilitas berupa kondisi jalan dan ketersediaan angkutan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi PKL di Kawasan Candi Borobudur. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa lokasi PKL harus terjangkau angkutan dengan kondisi jalan yang baik.
6. Dapat meningkatkan pendapatan pedagang, dengan adanya rencana perpindahan lokasi berdagang dari lokasi lama ke lokasi yang baru, para pedagang selalu menginginkan penghasilannya lebih banyak bila dibandingkan dengan penghasilannya di lokasi yang lama. Kadang pedagang tidak mau berfikir mau

ditempatkan dimana lokasi dagangnya, mereka hanya berharap nantinya akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

7. Dapat menimbulkan rasa nyaman dalam berdagang, kriteria rasa nyaman dalam berdagang ini lebih terkait dengan perasaan para pedagang dalam melakukan aktivitas dagang mereka. Para pedagang akan memilih lokasi dagangan mereka jika lokasi tersebut jauh benar-benar sudah diakui oleh pemerintah sebagai lokasi resmi PKL.

Jika dilihat dari sisi kepentingan, maka ketujuh kriteria penentu pemilihan lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata bisa dikelompokkan menjadi tiga kepentingan. Ketiga kepentingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan pengunjung

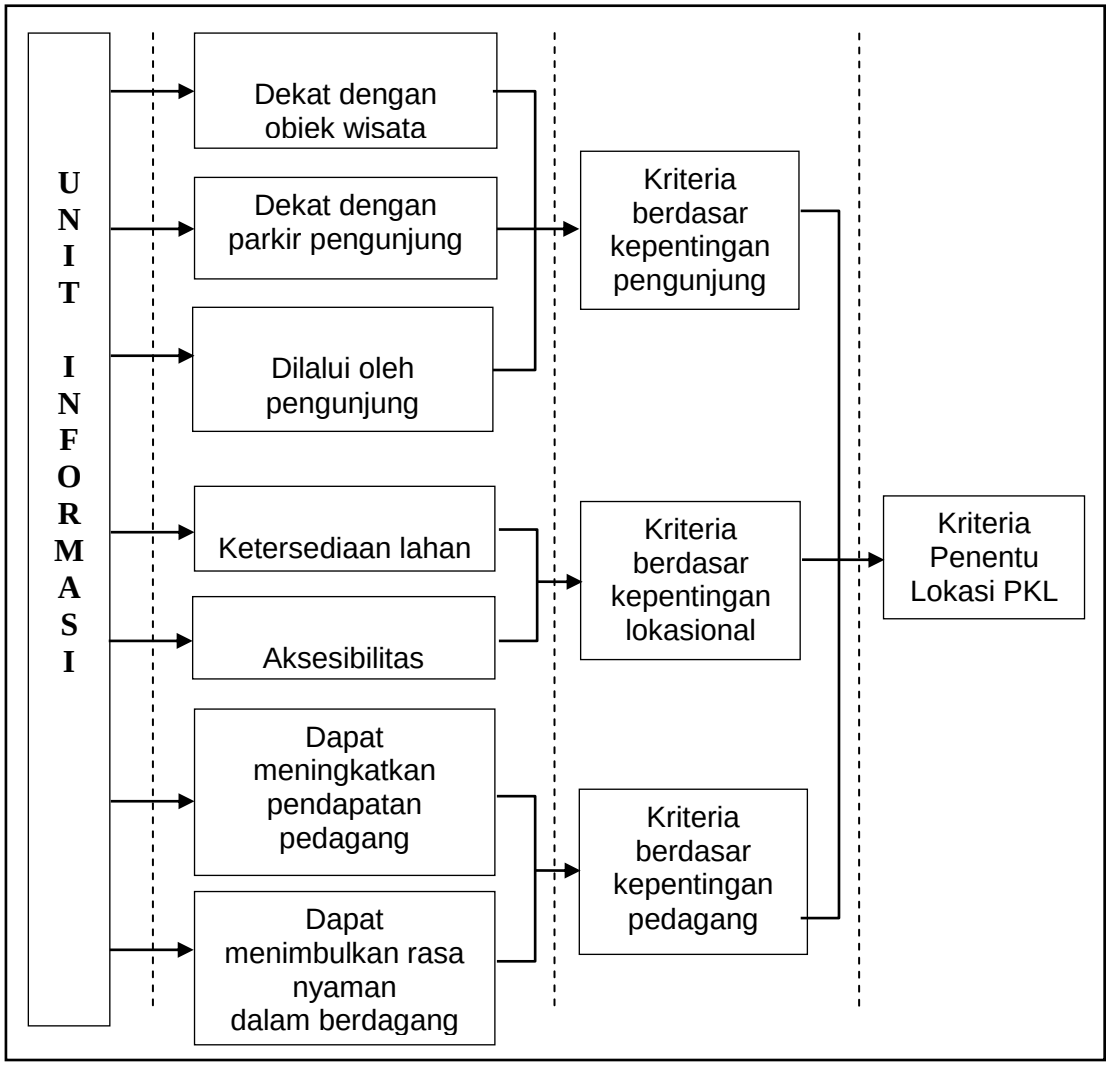
Kriteria penentu lokasi PKL berdasarkan kepentingan pengunjung ini didefinisikan sebagai kriteria penentu lokasi PKL yang lebih memperhatikan kepentingan pengunjung, dimana kebutuhan pengunjung lebih menjadi prioritas. Kriteria-kriteria yang masuk dalam kepentingan pengunjung adalah (1) kriteria dekat dengan objek wisata, (2) kriteria dekat dengan parkir pengunjung, dan (3) kriteria dilalui oleh pengunjung.

2. Kepentingan pedagang

Kriteria penentu lokasi PKL berdasarkan kepentingan pedagang ini didefinisikan sebagai kriteria penentu lokasi PKL yang lebih memperhatikan kepentingan pedagang, dimana kebutuhan pedagang lebih menjadi prioritas. Kriteria-kriteria yang masuk dalam kepentingan pedagang ini adalah (1) kriteria dapat meningkatkan pendapatan pedagang, dan (2) kriteria dapat menimbulkan rasa nyaman dalam berdagang.

3. Kepentingan lokasional

Kriteria ini lebih memperhatikan aspek lokasi, dimana penentuan lokasi PKL tersebut dilihat dari aspek lokasi. Kriteria-kriteria yang masuk dalam kepentingan lokasional ini adalah (1) kriteria ketersediaan lahan, dan (2) kriteria aksesibilitas.

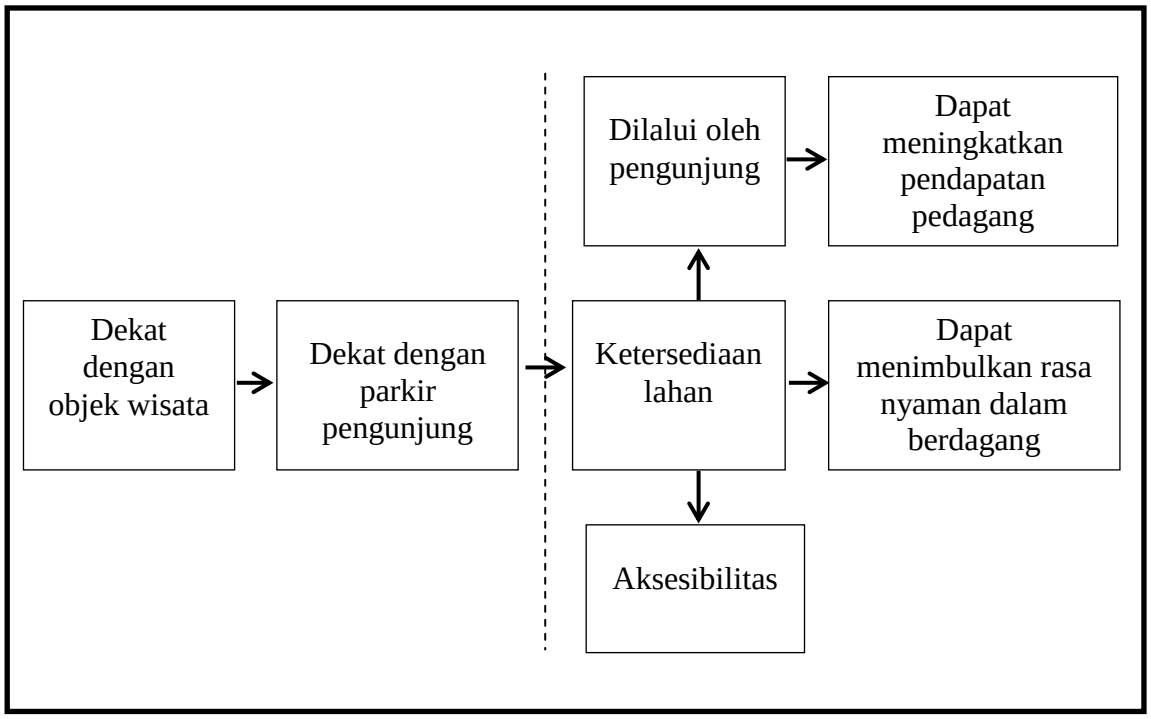


Gambar 3. Rumusan Kriteria Penentu Lokasi PKL

B. Pemilihan Prioritas Kriteria Penentu Pemilihan Lokasi PKL

Dengan melihat kondisi eksisting lokasi PKL yang ada sekarang dan membandingkan kriteria penentu lokasi PKL yang telah dirumuskan, maka disusunlah urutan prioritas kriteria penentu lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata. Berdasarkan sisi kepentingan, prioritas kriteria penentu lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Prioritas I (kriteria sangat penting), didefinisikan sebagai kriteria yang menjadi prioritas utama dalam menentukan sebuah lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata. Kriteria- kriteria tersebut adalah (1) dekat dengan objek wisata, dan (2) dekat dengan parkir pengunjung
2. Prioritas II (Kriteria penting), didefinisikan sebagai kriteria yang dipertimbangkan dalam menentukan sebuah lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata. Kriteria-kriteria tersebut adalah (1) aksesibilitas, (2) ketersediaan lahan, (3) dilalui oleh pengunjung., (4) dapat meningkatkan pendapatan pedagang, dan (5) dapat menimbulkan rasa nyaman dalam berdagang.



Gambar 4. Penentuan Prioritas Kriteria Penentu Lokasi PKL

Apabila pengelompokkan kriteria digabungkan berdasarkan sisi kepentingan dan sisi kemendesakan, maka akan terbentuk tiga kategori kriteria. Ketiga kategori tersebut adalah kategori kriteria sangat penting dan mendesak, kategori kriteria penting dan mendesak, dan kategori kriteria penting tetapi tidak mendesak. Pembagian kategori tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kategori Skala Prioritas Kriteria Penentu Lokasi PKL

Kemendesakan / Kepentingan	**Mendesak**	**Tidak Mendesak**
Sangat Penting	1. dekat dengan objek wisata 2. dekat dengan parkir pengunjung	-
Penting	1. dilalui oleh pengunjung 2. ketersediaan lahan 3. aksesibilitas	1. dapat meningkatkan pendapatan pedagang 2. dapat menimbulkan rasa nyaman dalam berdagang

C. Pemilihan Lokasi PKL Di Kawasan Candi Borobudur (Studi Kasus)

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, didapatkan 4 (empat) lokasi yang dijadikan sebagai alternatif lokasi bagi Pedagang Kaki Lima di kawasan cagar budaya dan pariwisata Candi Borobudur. Keempat lokasi tersebut adalah (1) lokasi Kaliabon, (2) lokasi Segitiga Kujon, (3) lokasi Pondok Tingal, dan (4) lokasi Mendut.



Gambar 5. Orientasi Alternatif Lokasi PKL di Kawasan Candi Borobudur

Untuk merumuskan alternatif lokasi PKL tersebut dilakukan dengan cara menyandingkan antara hasil identifikasi 4 (empat) lokasi PKL dengan kriteria faktor penentu lokasi PKL. Berdasarkan hasil persandingan tersebut, akan direkomendasikan alternatif lokasi PKL terpilih sebagai lokasi PKL di Kawasan Candi Borobudur.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa lokasi Segitiga Kujon mempunyai jarak yang paling dekat dengan objek wisata yaitu berjarak kurang lebih 100 meter, disusul dengan lokasi Pondok Tingal (dengan jarak kurang lebih 510 meter) dan lokasi Kaliabon (dengan jarak kurang lebih 620 meter), sedangkan lokasi Mendut merupakan lokasi yang paling jauh dari objek wisata yaitu kurang lebih 3.274 meter. Dengan demikian Lokasi Segitiga Kujon dan Lokasi Pondok Tingal yang direkomendasikan sebagai alternatif lokasi PKL terpilih.

Berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pembinaan dan penataan PKL dan perencanaan tata ruang di Kawasan Borobudur, dapat disimpulkan bahwa penetapan lokasi PKL harus disesuaikan dengan **rencana tata ruang wilayah** yang berlaku. Berdasarkan pola ruang yang ada di Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014, lokasi yang lebih memungkinkan untuk dijadikan sebagai lokasi PKL di Kawasan Candi Borobudur adalah lokasi Kaliabon karena pola ruang **Lokasi Kaliabon adalah permukiman**, sedangkan pola ruang untuk ketiga lokasi yang lain adalah pertanian.

Tabel 2. Urutan Prioritas Lokasi PKL di Kawasan Candi Borobudur

No	Kriteria	Prioritas Alternatif Lokasi PKL			
		Lokasi Kaliabon	Lokasi Segitiga Kujon	Lokasi Pondok Tingal	Lokasi Mendut
1	Kriteria berdasar penentu lokasi PKL	**III**	**I**	**II**	**IV**
2	Kriteria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014	**I**	**-**	**-**	**-**

VI. KESIMPULAN

Penelitian tentang penentuan alternatif lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata ini telah menyimpulkan bahwa kriteria penentu lokasi bagi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata lebih berpihak pada kepentingan pengunjung. Hal ini bisa dilihat dari kriteria-kriteria penentu lokasi PKL yang paling prioritas lebih cenderung mementingkan kepentingan pengunjung, seperti kriteria dekat dengan objek wisata dan kriteria dekat dengan parkir pengunjung. Sedangkan kriteria yang berpihak pada pedagang merupakan kriteria ikutan dari kriteria-kriteria sebelumnya, misalnya kriteria dapat meningkatkan pendapatan pedagang dan kriteria dapat menimbulkan rasa nyaman dalam berdagang.

Selanjutnya, terkait dengan penentuan alternatif lokasi bagi PKL di Kawasan Cagar Budaya dan Pariwisata (Studi Kasus Candi Borobudur) dihasilkan lokasi Segitiga Kujon dan lokasi Pondok Tingal menjadi alternatif prioritas, disusul dengan Lokasi Kaliabon dan Lokasi Mendut. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan lokasi PKL di kawasan cagar budaya dan pariwisata lebih mementingkan kriteria kedekatan jarak lokasi PKL dengan objek wisata Candi Borobudur.

Pemilihan PKL di Kawasan Candi Borobudur seyogyanya dilakukan secara komprehensif, baik PKL yang ada di zona 2 maupun yang ada di zona 3 Candi Borobudur, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penataan PKL sebagai upaya pemecahan persoalan PKL yang ada di Kawasan Candi Borobudur.

Beberapa kebijakan yang perlu diperlukan pemerintah dalam rangka penetapan lokasi PKL di Kawasan Candi Borobudur adalah penyesuaian dengan rencana tata ruang, penataan kawasan, penambahan moda angkutan dan perbaikan sistem transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

Hampton, Mark P. 2005. *Heritage, Local Communities And Economic Development.* University of Kent, UK.

Republik Indonesia, 2012. *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291.* Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur Dan Sekitarnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137.* Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia, 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607. Jakarta.

STRATEGI *RETROFITTING* PADA KAWASAN PINGGIR KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN KONSEP KOTA KOMPAK

(Studi Kasus Condong Catur, Sleman, Yogyakarta)

Wahyu Ardhiningtika[1],M. Sani Roychansyah[1] dan Dwita Hadi Rahmi[1]

[1]Magister Desain Kawasan Binaan, Fakultas Teknik Arsitektur,Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta
Email:Utuy.ardhi@gmail.com,Saniroy@gmail.com, Dwita_hr@yahoo.com

ABSTRAK

Fenomena urbanisasi yang terjadi pada kota - kota besar di indonesia khususnya pada kota Yogyakarta menyebabkan laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang cukup pesat, dimana fenomena ini menyebabkan peluberan pembangunan pada kawasan pinggiran kota Yogyakarta atau disebut juga dengan urban sprawl. Khususnya pada kawasan Condong Catur dampak yang terjadi yang disebabkan oleh urban sprawl yaitu tidak teratur dan kurang efisiennya dalam penggunaan lahan.Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengupayakan kawasan Condong Catur menjadi kawasan suburban yang lebih tertata dan berkelanjutan. Urban retrofiting dengan implementasi kota kompak (compact city) adalah sebuah konsep bagaimana meregenerasi suatu kawasan dengan mengupayakan pemanfaatan lahan, bangunan, jasa dan penyediaan infrastruktur yang dioptimalkan untuk menciptakan pemukiman perkotaan yang padat yang mendorong penurunan permintaan dan lebih efisien. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yang bersifat design based research (riset berbasis desain) dimana metode ini didasarkan pada konteks dunia nyata di mana peneliti berinteraksi dengan objek studi danakan mengaplikasikan antara teori-teori terkait yang mengarah ke desain.Hasil penelitian menunjukan bagaimana konsep retrofitting dengan strategi re-inhibitation, re-development, dan re-greening bisa mengarahkan perubahan kawasan yang lebih kompak dari sisi densitas, aktivitas, skala, transportasi, dan kesejahteraan sosial. Konsep retrofitting dengan implementasi kota kompak menunjukan perubahan kawasan studi yang awalnya tidak terkendali (acak) menjadi lebih berkelanjutan dan efisien dalam pemanfaatan lahan, bangunan, jasa, dan infrastruktur.

Kata kunci; retrofitting, kota kompak, re-inhibitation, re-development, re-greening

I. PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pertahun untuk periode 1993-1997 mencapai 8,10% dan periode 1998-2000 sebesar 6,44% telah memicu perkembangan Kota Yogyakarta dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh wilayah. Kondisi ini telah menarik banyak pendatang baik dari wilayah-wilayah sekitar maupun dari luar Provinsi DIY untuk mencari pekerjaan dan bertempat tinggal.Peningkatan jumlah pendatang ke Kota Yogyakarta menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan fasilitas permukiman, sedangkan lahan untuk permukiman di Kota Yogyakarta terbatas dengan harga yang semakin mahal.Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk memilih tempat permukiman di luar Kota Yogyakarta dimana harga

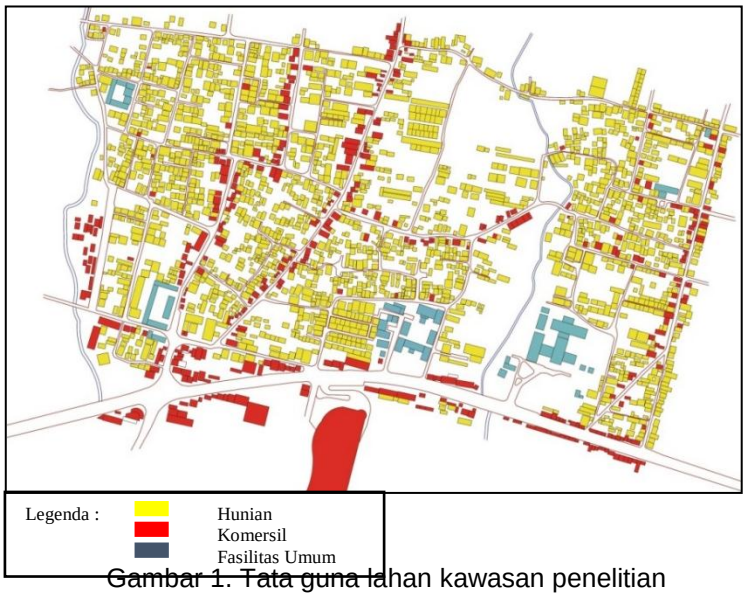
tanah masih lebih terjangkau yaitu di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman adalah daerah yang perkembangannya termasuk sangat pesat.Pertumbuhan perdagangan dan pelayanan publik pada kawasan ini dalam 5 tahun terakhir merupakan bukti kalau kabupaten sleman berkembang dengan dinamis. Salah satunya adalah Desa Condong Catur yang menjadi kawasan padat karena kawasan Condong Catur ini langsung berbatasan dengan kota Yogyakarta dan merupakan wilayah aglomerasi perkotaan kota Yogyakarta. Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang pesat ini menyebabkan kebutuhan hunian sebagai tempat tinggal meningkat dengan pesat yang mengakibatkan perkembangan kawasan Condong Catur menjadi kurang teratur (*sprawl*) dan berdampak kurang berkelanjutan.

Salah satu pemecahan masalah untuk mengatasi terjadinya *sprawl* pada kawasan *suburban* (pinggiran kota) dinegara-negara besar yaitusalah satunya dengan menggunakan strategi*retrofitting* dengan implementasi konsep *compact city*(kota kompak) dimana konsep ini termasuk salah satu kunci untuk menjawab masalah perkembangan pembangunan yang terjadi dan memberikan masa depan kawasan pinggiran kota pada kota-kota besar. Dimana menurut jabreen (2006), *compact city* (kota kompak) adalah konsep yang dianggap paling sesuai untuk pembangunan berkelanjutan, dan *Retrofitting* menurut Malcolm Eames(2014), dalam publikasinya menjelaskan retrofitting adalah lingkungan kota yang dibangun untuk menggambarkan perubahan fisik yang cukup besar di tingkat bangunan dan telah sering digunakan bergantian dengan istilah-istilah seperti 'perbaikan', 'perubahan' atau 'mereparasi'. Pada publikasinya juga disebutkan tentang *retrofitting* dengan implementasi *compact city* (kota kompak) yaitu Perkotaan dengan pemanfaatan lahan, bangunan, jasa dan penyediaan infrastruktur yang dioptimalkan untuk menciptakan bentuk-bentuk pemukiman perkotaan yang padat yang mendorong penurunan permintaan dan lebih efisien penggunaan energi dan sumber daya. Konsentrasi di pusat-pusat perkotaan mengurangi tekanan di pinggiran.Efisiensi yang signifikan diperoleh melalui sistem integrasi dan mendesain ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana keadaan kawasan penelitian dan strategi retrofitting seperti apa yang dapat mengarahkan kawasan menjadi lebih teratur dan berkelanjutan.

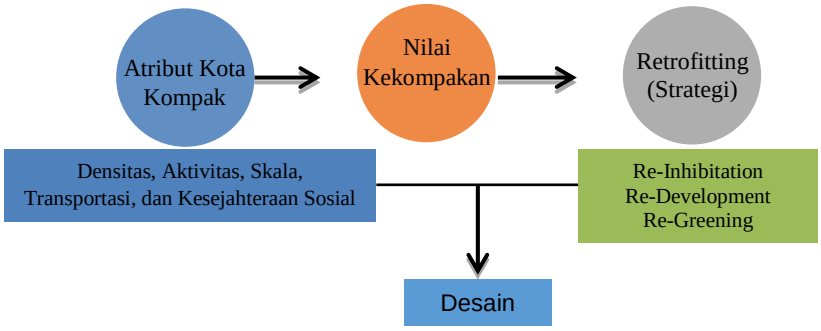
II. METODE

Penilitian ini menggunaan metode kualitatif yang bersifat *design based research* (riset berbasis desain), dimanametode ini untuk mencari makna dibalik frekuensi dan variansi dalam konteks dunia nyata di mana peneliti berinteraksi sosial langsungdengan yang lainnya di kawasan penelitian, yaitu pada wilayah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta yang hasilnyamengarah ke desain.Wilayah penelitian memiliki luas 95,42 Ha dengan kepadatan 72,95/km². Tata guna lahan pada kawasan penelitian di dominasi oleh permukiman hunian dengan persentase 70% Hunian, 20% Komersil, dan 10% fasilitas umum.Fasilitas umum yang tersedia pada kawasan penelitian adalah sekolah SD dan SMP, rumah sakit, dan terminal bus seperti pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Tata guna lahan kawasan penelitian

Data yang diambil pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diambil dengan observasi langsung pada kawasan penelitian dan data-data yang didapat dari kawasan studi, data sekunder didapatkan dari data instansi, teori-teori,penelitian, jurnal terkait, dan penggambaran ulang kawasan. Pada tahap pertama akan dilakukan penilaian kekompakan pada kawasan penelitian dengan 5 atribut kota kompak yaitu densitas, aktivitas, skala, transportasi, dan kesejahteraan sosial (Roychansyah, 2006) untuk mengetahui bagaimana nilai kekompakan yang terjadi pada kawasan penelitian yang kemudian akan diketahui bagaimana strategi retrofitting yang tepat dan ideal untuk kawasan studi dengan nilai kekompakan tersebut.



Gambar 2. Alur Pemikiran

III. HASILDAN PEMBAHASAN

A. Nilai Kekompakan

Menghitung seberapa kompak suatu kawasan (*compactness*) adalah suatu metode untuk melihat perkembangan yang terjadi pada suatu kawasan dimana apakah kawasan tersebut mengarah ke pembangunan yang terkendali atau ke pembangunan yang acak (*sprawl*).Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, secara umum atribut kota kompak (*urban compactness*) yaitu terdiri dari densifikasi penduduk, konsentrasi aktivitas, ukuran ideal kota, intensifikasi transportasi umum, dan kesejahteraan sosial penduduk, Roychansyah (2006).Maka pada kawasan penelitian akan dilakukan penilaian kekompakan kawasan

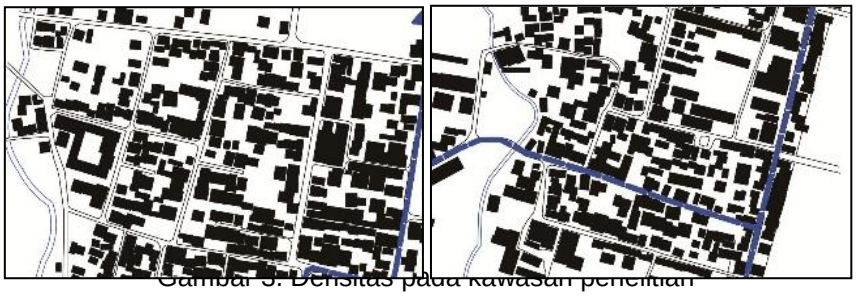
menggunakan atribut kota kompak untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan yang terjadi.

Tabel 1. Nilai Kekompakan Kawasan Penelitian dengan Atribut Kota Kompak

Kluster	Densitas	Aktivitas	Skala	Transportasi	Kesejahteraan Sosial
1	64,76	30,36	100	0	40,33
2	83,44	12,48	100	0	38,08
3	57,02	14,87	86,16	0	29,31
4	59,28	15,54	96,51	0	24,58
Total	66,13	18,3	95,67	0	33,1

Dari nilai kekompakan perkluster kawasan penelitian diatas rata-rata nilai kekompakannya adalah 42,64 (buruk). Nilai buruk yang terjadi pada kawasan menunjukan perkembangan atau pembangunan kawasan penelitian kurang terkendali dan berdampak menjadi kawasan yang *sprawl* (acak). Masalah yang menyebabkan kawasan penelitianmemiliki nilai buruk yang telah diidentifikasi sesuai dengan atribut kota kompak secara garis besar, yaitu:

a. Densitas
   Masih terdapat banyak lahan sisa atau kosong yang relatif sempit dan tidak dapat digunakan yang mengakibatkan densitas penduduk tidak maksimal



Gambar 3. Densitas pada kawasan penelitian

b. Aktivitas
   Kurang terpenuhinya fasilitas pemenuh kebutuhan dan sosial,sehingga penduduk keluar dari kawasan untuk memenuhi kebutuhannya dan kurang terikatnya hubungan sosial antar penduduk



Gambar 4. Aktivitas penduduk pada kawasan penelitian

c. Skala
   Jarak sudah baik tetapi jalan belum mengakomodasi kegiatan pejalan kaki sehingga penduduk memilih menggunakan kendaraan bermotor untuk mencapai kekebutuhannya dengan jarak yang relatif dekat



Gambar 5. Ruang jalan yang hanya mengakomodasi kendaraan pada kawasan penelitian

d. Transportasi
Tidak terdapatnya fasilitas transportasi umum pada kawasan menyebabkan penumpukan kendaraan



Gambar 6. Penumpukan kendaraan pada kawasan penelitian

e. Kesejahteraan sosial
Masih terdapat kesenjangan sosial dengan pengelompokan hunian-hunian mewah dengan hunian yang sederhana



Gambar 7. Pengelompokan hunian pada kawasan penelitian

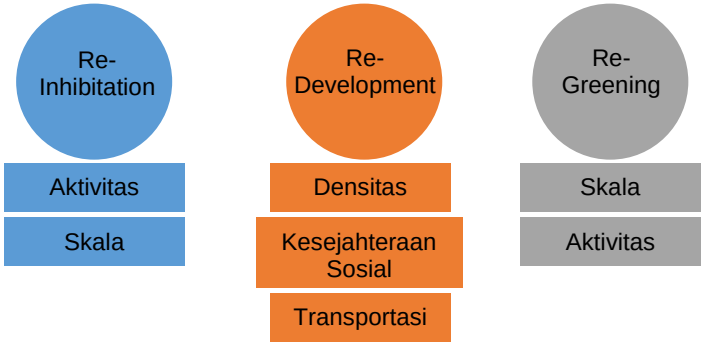
B. Strategi Retrofitting dengan Konsep Kota Kompak

Retrofitting dengan implementasi *compact city* (kota kompak) yaitu konsep perubahan dengan pemanfaatan lahan, bangunan, jasa dan penyediaan infrastruktur yang dioptimalkan untuk menciptakan bentuk-bentuk pemukiman yang padat, mendorong penurunan permintaan, dan lebih efisien penggunaan energi dan sumber daya. Strategi retrofittingsendiri menurut Jones (2009) memiliki 3 konsep yaitu :

1. *Re - inhibitation*
   Konsep atau upaya penggunaan kembali struktur secara adaptif untuk memberikan berbagai macam jenis pelayanan kepada masyarakat maupun juga untuk komunitas agar saling berinteraksi secara sosial.

2. *Re - development*
   Konsep yang dilakukan dengan cara mengganti struktur maupun banggunan pada area parkir dengan ruang publik yang bersifat lebih kompak, lebih walkable dan juga lebih terintegrasi dengan bebagai macam fungsi kegiatan untuk mendukung autodependensi dan merasa lebih terikat secara sosial.
3. *Re - greening*
   Konsep ini dilakukan dengan merubah struktur eksisting dan merevitalisasi lahan yang akan dijadikan taman untuk komunitas, taman bermain dan terkadang re-greening ini juga merupakan bagian konsep dalam tahap redevelopment.

Strategi retrofitting berdasarkan konsep kota kompak ini akan menggunakan strategi re-inhibitation, re-development, dan re-greening seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan dikaitkan dengan indikator atribut kota kompak seperti pada gambar 8berikut untuk memperbaiki nilai-nilai kekompakan yang terjadi pada kawasan penelitian.



Gambar 8. Strategi Retrofitting dengan Konsep Kota Kompak

Kemudian akan dilihat juga bagaimana potensi dan peraturan terdapat pada kawasan penelitian, dimana potensi yang terdapat pada kawasan penelitian adalah terdapatnya terminal tipe B dan cukup banyak komersil, dan peraturan yang diarahkan pada kawasan penelitian yaitu dalam pasal 40 dan 44 Rencana Tata Ruang dan Wilayah tahun 2011-2031 bahwa kawasan Depok termasuk Condong Catur adalah kawasan wisata perkotaan dan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.Dilihat dari nilai kekompakan yang terjadi dan potensi yang terdapat pada kawasan penelitianseperti fasilitas-fasilitas dan peraturan pemerintah yang mendukung kawasan penelitian maka upaya strategi *retrofitting*dengan konsep kota kompak yang akan dilakukan pada kawasan penelitian yaitu :

Tabel 2. Strategi Retrofitting Berdasarkan Konsep Kota Kompak Pada Kawasan Penelitian

Aspek Retrofitting	Indikator Kota Kompak	Retrofitting	Implementasi
Re - Inhibitation	Aktivitas	Menambahkan ruang-ruang aktivitas sosial	Memanfaatkan lahan-lahan kosong /sisa yang masih belum dipergunakan menjadi ruang terbuka publik dan Memanfaatkan bantaran sungai menjadi lahan terbuka publik

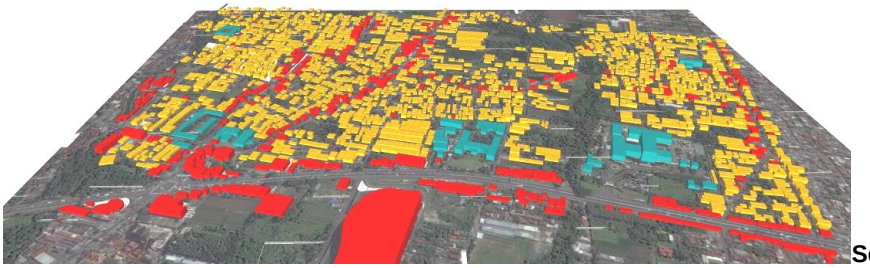
		Menambahkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi penghuni kawasan seperti lahan kerja dan perbelanjaan	Bangunan komersil dan hunian tunggal menjadi campuran pada jalan-jalan primer kawasan dan Membuat kawasan pusat perbelanjaan yang dapat menjadi lahan kerja dan pemenuh kebutuhan penghuni
	Skala	Menambahkan jalan-jalan alternative untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda	Memanfaatkan dan menambahkan jalan-jalan kecil untuk pejalan kaki dan sepeda yang mengerah ke fasilitas-fasilitas, untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
		Menambahkan kebutuhan yang mengakomodasi berbagai kegiatan	Membuat parkir dan jalur pedestrian didepan bangunan komersil yang berada di jalan-jalan primer agar terbentuk *traffic calming*
Re - Development	Densitas	Memaksimalkan kepadatan penduduk	Kawasan dengan fungsi hunian yang bukan termasuk perumahan diarahkan menjadi hunian vertikal untuk menambahkan daya tampung penduduk dan Memaksimalkan lahan yang kosong pada kawasan perumahan
	Kesejahteraan sosial	Menambahkan bangunan vertikal	Membuat hunian vertikal dengan tipe yang lebih beragam dalam satu kawasan
	Transportasi	Menambahkan	Membuat transportasi umum yang

		transportasi umum	mengelilingi kawasan dan di integerasikan dengan terminal condong catur yang mengarah keluar kawasan
		Menambahkan jalur-jalur pejalan kaki	Membuat jalur-jalur pejalan kaki dari kawasan hunian menuju fasilitas transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
Re - Greening	Skala	Menambahkan penghijauan pada jalur-jalur pedestrian	Membuat peneduh alami pada jalur-jalur pedestrian seperti pohon dan pergola dengan tanaman merambat
	Aktivitas	Menambahkan ruang terbuka hijau pada ruang terbuka publik	Menyatukan ruang terbuka publik dengan ruang terbuka hijau

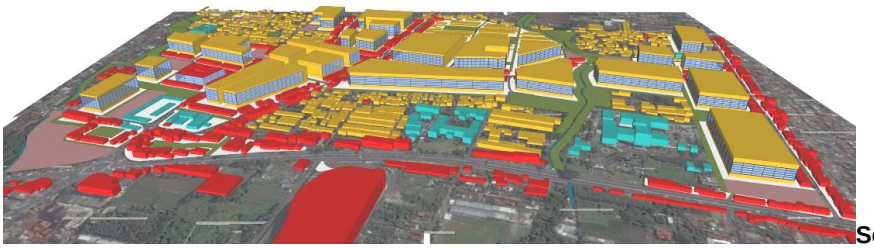
C. Penerapan Strategi Retrofitting Berdasarkan Konsep Kota Kompak Pada Kawasan Penelitian

Dari strategi yang diarahkan pada kawasan penelitian yang terdapat pada tabel 2 maka akan dilihat bagaimana perubahan-perubahan pada kawasan penelitian. Pembangunan yang terjadi pada kawasan penelitian adalah hunian tunggal dengan kepadatan rendah dan menyisakan banyak lahan kosong dan sempit, dengan penerapan strategi retrofitting dengan konsep kota kompak akan diarahkan ke pembangunan vertikal pada kawasan yang perkembangannya tidak efisien dengan daya tampung penduduk lebih tinggi dan fasilitas yang lengkap seperti pada gambar 9 berikut

.



Sebelum



Sesudah

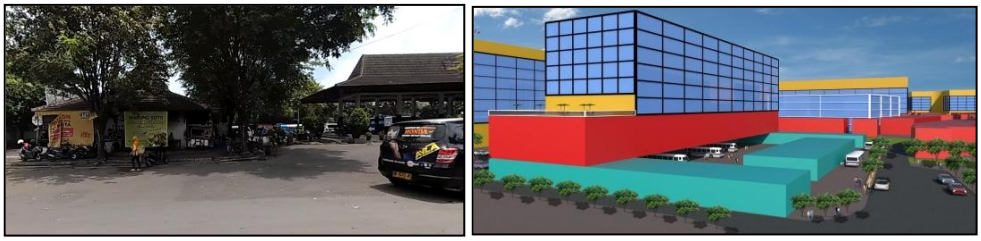
Gambar 9. Perubahan tata guna lahan

Pada koridor jalan primer dan sekunder akan mengakomodasi segala bentuk aktivitas seperti pejalan kaki, sepeda, kendaraan bermotor, dan parkir. Beberapa jalan-jalan sekunder baru dan yang ada pada kawasan hunian akan diarahkan pada jalur khusus nonmotorik dengan konektivitas yang tinggi. Terminal bus akan diarahkan menjadi bangunan yang lebih kompleks dengan penambahan ruang terbuka publik, parkir, retail komersil dan hunian vertikal. Pada bantaran sungai dan lahan-lahan kosong yang cukup lebar akan dijadikan kawasan ruang terbuka hijau dan publik.



Sebelum **Sesudah**

Gambar 10. Perubahan pada koridor primer dan sekunder



Sebelum **Sesudah**

Gambar 11. Perubahan pada terminal



Sebelum **Sesudah**

Gambar 12. Perubahan pada kawasan bantaran sungai dan lahan yang tidak dipergunakan

Dilihat dari gambar penerapan strategi retrofitting 9, 10, 11, dan 12 diatas perubahan yang ideal pada kawasan penelitian dengan strategi retrofitting berdasarkan konsep kota kompak yang pada awalnya memiliki nilai yang cukup buruk dapat di maksimalkan nilai kekompakannya sesuai dengan potensi dan peraturan yang terkait pada kawasan penelitian.

IV. KESIMPULAN

Kekompakan yang terjadi pada suatu kawasan menggambarkan apakah pembangunan kawasan tersebut terkendali (kompak) atau tidak terkendali (acak). Pembangunan suatu kawasan yang telah terjadi itu mengarah terkendali (kompak) atau tidak terkendali (acak) dapat dilihat dari bagaimana nilai-nilai kepadatan pembangunan dan penduduk, pola aktivitas, skala, transportasi, dan kesejahteraan sosial yang terjadi pada kawasan tersebut.Dengan penilaian kekompakan kawasan (urban compactness) pada kawasan pinggiran kota Yogyakarta khususnya pada kawasan penelitian yaitu Condong Catur memiliki hasil yang buruk, dan akan berdampak lebih buruk untuk masa depan kawasan jika tidak di perbaiki atau dirubah ke arah pembangunan yang lebih baik.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk merubah kawasan yang tidak terkendali (acak) menjadi terkendali dapat dengan cara meretrofit kawasan yang tidak terkendali tersebut, dimana strategi ini telah dilakukan di beberapa negara-negara besar yang memiliki permasalahan perkembangan atau pembangunan kawasannya. *Retrofitting* adalah suatu konsep untuk merubah fisik kawasan dalam tingkat bangunan dan lingkungan yang sering juga disebut merubah, menambah, atau memperbaiki. Sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan bahwa

kawasan penelitian akan dikembangkan dengan strategi*retrofitting* dengan konsep kota kompak (*compact city*), dimana konsep ini mengarahkan pada pemenfaatan lahan dan bangunan, pemenuhan kebutuhan, dan penyediaan infrastruktur yang optimal sehingga dapat menjadi kawasan dengan permukiman yang padat, mengurangi permintaan, dan lebih efisien penggunaan energi. Strategi *retrofitting* ini juga mengarahkan perubahan atau penambahan yang mendukung potensi yang terdapat pada kawasan penelitian seperti adanya fasilitas-fasilitas yang telah tersedia dan peraturan pemerintah. Dengan Strategi *retrofitting*yang digunakan pada kawasan penelitian yaitu *re-inhibitation, re-development*, dan *re-greening,* juga melihat bagaimana nilai kekompakannya kemudian akan diketahui bagaimana konsep dari apa yang dibutuhkan kawasan untuk mengarahkan atau menjadikan kawasan menjadi lebih terkendali (kompak) dan juga keberlanjutan masa depan kawasan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Roychansyah, Muhammad Sani. Juni 2006 “Paradigma Kota Kompak”. Jakarta. Majalah Inovasi.

Jones, Ellie Dunham..2009. *Retrofitting Suburbia: Urban Design Solutions for Redesigning Suburbs*, John Wiley & Sons Inc.

Jurnal :

Eames, Malcolm. 2011. *Developing Urban Retrofit Scenarios: An Outline Framework for Scenario Foresight and Appraisal.* Welsh School of Architecture:Cardiff University**.**

Jabareen, Y.R. 2006.*Sustainable urban form.Their typologies, models, and concepts*.Journal of planning education and research.

Kajian Bangunan Bersejarah Mesjid Al-Mashun Kota Medan di Nilai Dari Historis dan Estetika

Wahyu Hidayat [1], Tunggul H. Ganie [1]
[1]TeknikSipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Medan
Email :Wahyuhidayat.plano@gmail.com, tunggul_ganie@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Perlindungan bangunan bersejarah tidak lagi merupakan aktivitas sampingan, tetapi bersifat satu kesatuan dengan perencanaan perkotaan.Bangunan bersejarah atau bangunan kuno merupakan benda cagar budaya yang tidak bergerak. Kategori bangunan bersejarah adalah bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun atau memiliki masa bangunan sedikitnya berumur 50 tahun dan dikategorikan mempunyai nilai penting bagi prasejarah, sejarah, ilmu pengetahuan atau kesenian. Benda alam maupun benda buatan manusia dapat berupa karya rumah tinggal, bangunan komersial, benda budaya dan keagamaan, bangunan industri atau bangunan pemerintah, taman, jembatan dan sebagainya, kota lama, kawasan bersejarah maupun kelompok hunian tradisional.Tujuan kajian ini adalah melakukan identifikasi bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medandengan menyusun senerai yang meliputi : nama bangunan, lokasi, pemilik, tanggal pembangunan, penggunaan semula, penggunaan sekarang, kategori, keadaan bangunan, diskripsi, sejarah, arti penting, foto, sumber, penyusun, rekomendasi upaya rehabilitasi/ revitalisasi/ konservasi/preservasi bagi yang kondisi bangunannya memprihatinkan dan hal lain yang dianggap penting.Kajian ini diharapkan dapat membantu usaha untuk melestarikan bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun Kota Medan dengan mengoptimalkan potensinya baik dengan cara konservasi, preservasi, revitalisasi atau adaptasi, rehabilitasi atau restorasi dan rekonstruksi, sehingga Kota Medan memiliki jati diri, karakteristik yang mampu menciptakan keindahan kota, mengembangkan wisata budaya, dengan tetap melibatkan pihak swasta dan peranserta masyarakat.

Kata kunci: Bangunan, Bersejarah, Mesjid Al-Mashun, Medan

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jatidiri bangsa. Perlindungan bangunan bersejarah tidak lagi merupakan aktivitas sampingan, tetapi bersifat satu kesatuan dengan perencanaan perkotaan. Saat ini perlindungan benda dan terutama bangunan bersejarah merupakan bagian utama dari perencanaan perkotaan. Namun, terdapat banyak contoh di Indonesia bahwa hanya bangunan yang dianggap penting saja yang mampu bertahan dalam bentuk yang lama dan sebagian besar lainnya dirubah, dibangun dengan arsitektur dan gaya lebih baru.

Di berbagai tempat yang memiliki kandungan sejarah sejak lama selalu diliputi kecemasan akan terusik, terusak bahkan punahnya bukti-bukti, gambaran dan kekayaan sejarah diterjang modernisasi yang tumbuh dengan cepat. Bangunan bersejarah selalu berbenturan dengan dinamika perkembangan dengan jumlah

penduduk yang semakin tumbuh dan membutuhkan fasilitas-fasilitas baru sesuai dengan jamannya. Persoalannya adalah bagaimana peninggalan yang bernilai tidak tergerus dinamika kehidupan sementara masyarakat tidak terbelenggu pula oleh upaya pelestarian yang sering diartikan hanya berorientasi kepada keabadian benda yang dilestarikan tanpa pandang bulu keberadaan masyarakat yang lekat dengannya.

Intinya, bagaimana yang lama dan dinamika baru bisa bersanding secara baik tanpa saling menghancurkan. Berbagai upaya pelestarian dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematik agar jejak-jejak masa lalu tetap abadi dan mampu bersanding dengan berbagai ekspresi baru pemenuh kebutuhan jaman yang memang selalu berkembang. Jejak masa lalu bukan sekedar jejak kerinduan semata. Rentang panjang kehidupan diyakini memiliki kekuatan-kekuatan yang mampu menjadi inspirasi dan titik tolak kehidupan selanjutnya. Kekuatan tercermin dalam keanekaan bentukan alam dan pencapaian budaya manusia, termasuk dalam mengelola alamnya dan juga dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa, pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai sejarah secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati.

Perlindungan benda bersejarah ini meliputi penggunaan kembali yang bersifat adaptif, rehabilitasi, dan pembangunan kembali daerah-daerah yang kuno, dan biasanya terletak pada pusat daerah perkotaan. Umumnya usaha indentifikasi dan usaha perlindungan benda cagar budaya ini dilakukan dengan asumsi bahwa nilai kontinyuitas kebudayaan merupakan hal yang penting dan menjadi obyek dari masa lalu, yang bila disimpan sebagaimana wujudnya akan memberikan pernyataan kontinyuitas.

Bangunan bersejarah / bangunan kuno merupakan salah satu benda cagar budaya. Benda cagar budaya dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

1. Benda cagar budaya bergerak adalah Benda cagar budaya yang sifatnya dapat dipindah atau tidak berada pada satu tempat permanen.
2. Benda cagar budaya tidak bergerak adalah Benda cagar budaya yang sifatnya tidak dapat dipindah karena terikat dengan matriksnya.

Namun demikian penanganan pelestarian pada kenyataan di lapangan merupakan suatu penanganan yang sangat kompleks. Masih banyak hambatan - hambatan serta masalah - masalah yang ditemui di lapangan, baik akibat ketidak tahuan maupun akibat adanya konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan baru di satu sisi dengan aktivitas pelestarian di sisi lain, yang seharusnya kedua hal ini perlu disikapi secara arif. Di sisi lain masih banyak ditemui adanya upaya pelestarian yang secara tidak disadari justru telah merusak situs benda cagar budaya itu sendiri.

Kajian ini diharapkan dapat membantu usaha untuk melestarikan bangunan bersejarah Kota Medan dengan mengoptimalkan potensinya baik dengan cara konservasi, preservasi, revitalisasi atau adaptasi, rehabilitasi atau restorasi dan rekonstruksi, sehingga Kota Medan memiliki jati diri, karakteristik yang mampu menciptakan keindahan kota, mengembangkan wisata budaya, dengan tetap melibatkan pihak swasta dan peranserta masyarakat. Dalam pengembangannya harus memperhitungkan nilai sejarah, kelestarian lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu, juga digunakan sebagai alat / instrumen dalam pengendalian dan pelestariannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas permasalahan bangunan bersejarah dapat dioptimalkan di masa kini dengan cara konservasi, preservasi, revitalisasi atau adaptasi, rehabilitasi atau restorasi dan rekonstruksi. Agar kegiatan-kegiatan dalam kaitannya dengan bangunan bersejarah tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan sebuah Peraturan Daerah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah melakukan identifikasi bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medandengan menyusun senerai yang meliputi : nama bangunanan lokasi, pemilik, tanggal pembangunan, penggunaan semula, penggunaan sekarang, kategori, keadaan bangunan, diskripsi, sejarah, arti penting, foto, sumber, penyusun, rekomendasi upaya rehabilitasi/revitalisasi/konservasi/preservasi bagi yang kondisi bangunannya memprihatinkan dan hal lain yang dianggap penting.

D. Manfaat Penelitian

Luaran utama dari penelitian ini adalah :

1. Beberapa Kriteria Bangunan dan Kawasan BersejarahMesjid Al-Mashun
2. Senerai Bangunan Bersejarah Mesjid Al-Mashun
3. Klasifikasi Bangunan Bersejarah Mesjid Al-Mashun di KotaMedan : Hasil Scoring
4. Rekomendasi: Strategi Pembangunan

II. METODE

A. Landasan Teori dan Dasar Hukum

1. Defenisi Umum Tentang Cagar Budaya

Bangsa Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai latar sejarah yang sangat panjang, dimulai dari masa Prasejarah sampai dengan masa kolonial. Menghasilkan peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam-macam sebutan, antara lain benda kuno, benda antik, benda purbakala, monumen, peninggalan arkeologi (archaeological remains), atau peninggalan sejarah (historical remains).

Istilah Benda Cagar Budaya (BCB) mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud Benda Cagar Budaya adalah :

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Pada sisi lain, pengertian Cagar Budaya menurut Situs Warisan Dunia UNESCO (*UNESCO's World Heritage Sites)* mengatakan bahwa, cagar budaya benda dan tak benda adalah sumber ikatan sosial, keragaman, dan penggerak kreativitas, inovasi dan regenerasi perkotaan, kita harus berbuat lebih untuk manfaatkan kelebihan tersebut (*Group of separate or connected buildings, which because of their architecture, their homogeneity ar their place in landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science*).

Cagar budaya perkotaan merupakan sumber daya kunci dalam meningkatkan kelayakan huni daerah perkotaan, secara otomatis mendorong pembangunan ekonomi dan kepaduan sosial dalam dunia yang terus berubah. Pada prinsipnya pelestarian cagar budaya harus melibatkan banyak orang sebagai upaya dalam pelesatarian, meningkatkan kepedulian dan mencari skema inovatif. Dengan aktif melibatkan sector public, swasta dan masyarakat kota, bersejaran dan kontemporer, niscaya terlesarikan dan terapresiasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dikenal dengan istilah cagar budaya,

benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya.

2. Klasifikasi Cagar Budaya

Klasifikasi tentang cagar budayaMesjid Al-Mashun, secara teoris belum ada, akan tetap kelasifikasi cagar budaya serta pengertian tentang kelasifikasi cagar budaya telah di paparkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 pasal 1 tentang Cagar budaya .

1) **Cagar Budaya** adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2) **Benda Cagar Budaya** adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3) **Struktur Cagar Budaya** adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
4) **Kawasan Cagar Budaya** adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

3. Teori Tentang Kriteria atau Tolak Ukur Bangunan Bersejarah

Berdasarkan buku terjemahan Susongko (1986, p. 416-420), suatu bangunan layak untuk dipertahankan dan dijadikan bangunan cagar budaya apabila bangunan tersebut memiliki kriteria sebagai berikut:

1) Estetika, yaitu dianggap mewakili gaya arsitektur tertentu;
2) Kejamakan, yaitu bangunan yang tidak memiliki keistimewaan dalam gaya arsitektur tertentu namun dilestarikan sebagai wakil dari satu jenis bangunan;
3) Kelangkaan, yaitu hanya ada satu dari bangunan sejenisnya atau merupakan contoh terakhir yang masih ada dari suatu jenis bangunan;
4) Kesejarahan, yaitu memiliki nilai sejarah bangunan atau menjadi lokasi terjadinya suatu peristiwa bersejarah;
5) Keistimewaan, yaitu memiliki kelebihan atau keunikan pada masa didirikannya, misalnya bngunan terbesar, tertinggi, ataupun terpanjang;
6) Memperkuat kawasan di sekitarnya, lokasinya yang strategis sehingga investasi pada kelompok bangunan atau bangunan akan dapat meningkatkan nilai kawasan yang ada di sekitarnya.

4. Literatur tentang Kriteria atau Tolak Ukur Bangunan Bersejarah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya diresmikan sejak Oktober 2010 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dengan adanya penggantian ini, terdapat pula beberapan perubahan mengenai pengertian Cagar Budaya, pembagian kategori, proses penetapan, dan pemeringkatan. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Republik Indonesia, benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria-kriteria bangunan cagar budaya ditinjau dari:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

5. Pelestarian Cagar Budaya

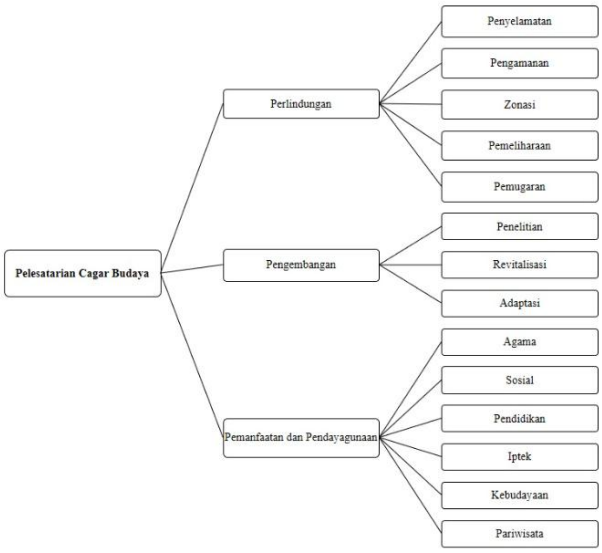
Upaya dalam pelestarian yang telah dilakukan dahulu dan sekarang pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu pelestarian demi kepentingan penggalian nilai-

nilai budaya dan proses-proses yang pernah terjadi pada masa lalu dan perkembangannya hingga kini serta pelestarian benda cagar budaya karena nilainya terhadap suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu. Namun seiring dengan usaha pembangunan yang terus berlangsung di negara kita, maka memberi tantangan tersendiri terhadap upaya pelestarian. Pembangunan sering kali berdampak negatif terhadap kelestarian benda cagar budaya. Problem semacam ini muncul dimana-mana terutama di daerah perkotaan. Kegiatan pembangunan tanpa menghiraukan keberadaan benda cagar budaya hingga saat ini masih terus berlangsung. Hal ini tampak dari semakin menurunnya kualitas dan kuantitas benda cagar budaya.

Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat, terutama pada benda cagar budaya yang masih dipakai (living monument). Pelestarian living monument terkadang lebih sulit, dikarenakan kurangnya pemahaman sang pemilik tentang pentingnya pelestarian benda cagar budaya miliknya. Upaya pelestarian benda cagar budaya secara garis besar sebagai berikut:

Dalam mewujudkan sebuah bangunan bersejarah atau kawasan bersejarah perlu ada upaya pelestarian, pelesatrian Cagar Budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaaan cagar budaya dan nilainya dengan caramelindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Menurut Martukusomo (2005), ada beberapa bentuk kegiatan untuk pelesatarian cagar budaya yakni sebagai berikut :

a. **Konservasi**, merupakan kegiatan dalam wujud pemugaran sebuah bangunan atau kawasan bersejarah
b. **Preservasi**, kegiatan pelestarian yang bersifat statis dan pasif
c. **Rekonstruksi**, merupakan upaya untuk mengembalikan keadaaan sebuah obyek bangunan, *fabric*, kawasan, yang telah hilang atau hancur kepada kondisi awal
d. **Restorasi**, adalah upaya mengembalikan sebuah bangunan atau kawasan kepada kondisi asli, sejauh yang diketahui dengan menghilangkan penambahan baruj atau membuat elemen eksisting tanpa adanya penggunaan bahan baru
e. **Renovasi**, sebagai upaya mengubah sebagian atau beberapa bagian bangunan tua terutama bagian interior, agar bangunan tersebut dapat diadaptasikan untuk mengakomodasi fungsi atau kegiatan baru, tanpa menimbulkan perubahan yangb berarti bagi keutuhan struktur maupun fasade bangunan tersebut
f. **Rehabilitasi**, upaya mengembalikan kondisi obyek, bangunan atau kawasan hingga dapat berfungsi kembali dengan baik.
g. **Gentrifikasi**, merupakan proses perubahan struktur komunitas urban yang dapat berarti relokasi penduduk sebagai dampak dari kegiatan peningkatan kualitas lingkungan, fisik, sosial dan ekonomi
h. **Revitalisasi**, upaya menghidupkan kembali sebuah distrik suatau kawasan kota yang telah mengalami degrade, melalui intervensi ekonomi, sosial dan fisik



Gambar 1. Diagram Pendekatan Kegiatan dalam Pelestarian Cagar Budaya

B. Metode Analisis Data

1. Kriteria dan Tolak Ukur

Ada beberapa kriteria dalam menilai sebuah bangunan cagar budaya dan atau lingkungan cagar budaya. Di beberapa negara menerapkan kriteria yang berbeda, demkian juga dengan kota-kota yang ada di Indonesia juga menetapkan kriteria-kriteria yang tidak sama. Mengacu pada kriteria-kriteria tersebut dapat dirumuskan untuk ditetapkan di Kota Medan. Masing-masing pilihan memiliki konsekuensi yang berbeda. Terdapat 2 bidang dalam penilaian mengenai bangunan bersejarah. Yang pertama meliputi bangunan cagar budaya dan kedua mengenai lingkungan cagar budaya.

2. Metode Skoring Kajian Bangunan Cagar Budaya Kota Medan

Dalam usaha penyusunan Kajian Bangunan Bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan dibutuhkan perangkat skoring atau penilaian terhadap kriteria yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang akan digunakan adalah :

1) Umur
2) Estetika
3) Kejamakan
4) Kelangkaan
5) Nilai Sejarah
6) Memperkuat kawasan
7) Keaslian
8) Keistimewaan
9) Tengeran
10) Kondisi Bangunan

III. KAJIAN BANGUNAN BERSEJARAH MESJID AL-MASHUNDI KOTA MEDAN

A. Analisa Indentifikasi Kondisi Cagar BudayaMesjid Al-Mashun

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, mendefenisikan bahwa bangunan Cagar Budaya adalah bangunan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berndinding, dan beratap. Penjelasan tersebut dapat dikatakan nomotetik, karena menjelaskan secara keseluruhan. Bangunan Cagar Budaya secara umum memiliki fungsi sebagai fungsi sosial dan budaya yaitu tempat

melakukan kegiatan sosial dan budaya gedung pelayanan pendidikan, sosial, dan budaya.

Ada beberapa fungsi dan manfaat dari bangunan bersejarah, diantaranya :

a. Sebagai objek wisata
b. Sebagai objek penelitian dari berbagai disiplin ilmu
c. Sumber Devisa yang dapat menmbah pendapatan daerah
d. Pengayoman budaya daerah setempat

Di Kota Medan sendiri, memimiliki beragam Bangunan Cagar Budaya yang dapat kembangkan dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Bangunan Cagar Budaya tersebut ada yang berumur sampai 100 tahun yang sebagiannya merupakan peninggalan pada zaman kolonial Belanda dan masa kerajaan pemerintahaan Kesultanan Deli.

B. Analisa Bangunan Cagar Budaya

Pada tahapan analisa ini, akan dipaparkan secara komprehensif mengenai bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada prinsipnya, tahapan ini merupakan analisa dengan metode deskriptif mengenai bangunan-bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan

C. Analisa Lingkungan Cagar Budaya

Tahapan analisa berikut menjelaskan tentang umur bangunan bersejarahMesjid Al-Mashun, keaslian bangunan, nilai sejarah bangunan dan kelangkaan bangunan serta ilmu pengetahuan. Itu semua merupakan indikator dalam analisa lingkungan cagar budaya dengan tujuan, agar penilaian sebuah bangunan bersejarah dapat lebih optimal dan tidak terkesan asal-asalan serta telah mengadopsi kriteria dari beberapa kota di Indonesia. Adapun pembagian indikator tentang lingkungan cagar budaya yaitu sebagai berikut :

- **Umur**, berkenaan dengan usia lingkungan terbangun, paling sedikit seusia bangunan yang telah ditetapkan atau diduga sebagai bangunan cagar budaya;
- **Keaslian**, merupakan keberadaan lingkungan cagar budaya yang masih asli, baik lengkap maupun tidak lengkap;
- **Nilai Sejarah**, berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan Kota Medan, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan bangsa Indonesia, ketokohan, politik, sosial, budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional dan/atau daerah untuk memperkuat jati diri bangsa;
- **Kelangkaan**, berkenaan dengan tatanan tapak atau tatanan lingkungan yang jarang ditemukan ;
- **Ilmu Pengetahuan**, berkenaan dengan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan cagar budaya.



Gambar 2. Mesjid Al-Mashun di Kota Medan

D. Analisa Bangunan Bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan

Analisis berikut merupakan tahapan lanjutan setelah analisa kriteria bangunan bersejarah dan lingkungan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan. Pada prinsipnya, analisa bangunan bersejarah berikut akan mengakaji tentang bangunan bersejarah yang ada sesuai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan, kriteria yang digunakan merupakan dasar dalam penilaian setiap bangunan bersejarah, sehingga dapat menghasilkan kajian yang bagus dan optimal serta sesuai dengan hakikat-hakikat yang ada. Adapun kriteria tersebut, yakni :

a. Umur
b. Estetika
c. Kejamakan
d. Kelangkaan
e. Nilai Sejarah
f. Memperkuat Kawasan
g. Keaslian
h. Keistimewaaan
i. Tengeran
j. Kondisi Bangunan

E. Klasifikasi Bangunan Bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan

Dari analisis skoring yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi dasar pada penentuan dan penjumlahan nilai hasil skoring total serta kelasifikasi bangunan cagar budaya bersejarah. Namun, sebelum masuk ketahap penentuan batas interval atau pembagian kelas setiap bangunan bersejarah akan dipaparkan hasil skoring total pada setiap kriteria-kriteria yang telah ditetapakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabeldi lampiran.

Bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan dengan jumlah skor 126. Dalam penentuan skor dan harkat pada setiap indikator mengacu pada asumsi yang sudah ditetapkan sebelumnya, jadi hasil skor total tersebut merupakan satu bagian dari sebuah sistem untuk menghasilkan klasifikasi bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun Kota Medan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil skoring serta klasifikasi bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan yang telah dilaksanakan, tergolong pada klasifikasi I (Satu) yang artinya bangunan-bangunan tersebut Umur ≥ 150 tahun; estetika bangunan kuno; kejamakan banyak jenis; sangat langka; bernilai sejarah nasional; memperkuat kawasan; keaslian masih sangat asli; sangat istimewa; sebagai tengeran dan kondisi bangunan baik terawat.

B. Rekomendasi

Dari penelitian ini, ada beberapa rekomendasi tentang strategi pembangunan untuk Pemerintah Kota dalam melakukan konservasi bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan tersebut. Beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan, perlu tindakan konservasi atas bangunan-bangunan bersejarah tersebut agar tidak tereduksi fungsi dan manfaatnya serta nilai historis yang terdapat pada bangunan bersejarah itu sendiri;
b) Bangunan bersejarah Mesjid Al-Mashun di Kota Medan adalah bangunan yang memiliki karakter tersendiri dan juga memberikan dampak terhadap penguatan indentitas pada sekitar kawasan secara khusus dan secara umum pada Kota Medan.
c) Saat ini Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang tentang Pelestarian Bangunan dan atau Lingkungan Cagar Budaya. Namun, dalam Peraturan tersebut tidak dimuatkan bangunan atau cagar budaya mana saja yang masuk dan dikonservasi. Jadi, perlu ada tindakan revisi terhadap peraturan daerah tersebut dengan tujuan lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

Burger DH, Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I, Penerbit Jambatan 1962.

Carey, Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kitab Kedung Kebo, Penerbit Pustaka Azet, 1986.

Dennys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid III, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1996

Peter Carey, Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kitab Kedung Kebo, Penerbit Pustaka Azet, 1986

ANALISIS KOMODITAS PERIKANAN UNGGULAN SEBAGAI PENDUKUNG HALAL *TOURISM* DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Yunita Ratih W[1], Aris Subagiyo[1],Desi Tri Susanti[1], Fatimah Zahro[1], Agung Satria[1], Novresheila Estu Y[1], Narulita Putri H[1],RM Adi Listiyo NBK[1]

[1]Perencanaan Wilayah & Kota Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Malang

email: yunitaratih61@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi dibidang perikanan yakni seluruh kecamatannya dilewati oleh garis pantai serta terdapat Gili Matra yang selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Potensi yang besar tersebut tentunya mampu untuk mendukung halal tourism. Adapun terdapat 5 langkah strategis dalam mendukung halal tourism salah satunya ialah ketersediaan, yang mana berkaitan erat dengan jumlah komoditas. Oleh karena itu diperlukan dilakukan analisa untuk mengetahui komoditas perikanan unggulan. Agar dapat mengidentifikasi komoditas unggulan tersebut dilakukan analisa berupa analisa potensi masalah, supply chain, keterkaitan antara sektor pariwisata dan perikanan, LQ dan DLQ. Analisa potensi maalah digunakan untuk mengetahui potensi dan masalah utama sektor perikanan, sedangkan keterkaitan antar sektor digunakan untuk mengetahui hubungan sektor perikanan dengan sektor pariwisata. Analisa LQ dan DLQ berfungsi untuk mengetahui fokus sasaran potensi komoditas unggulan untuk dikembangkan. Adapun data yang digunakan dalam proses analisa tersebut ialah nilai produksi dari masing-masing komoditas. Potensi komoditas unggulan dipilih berdasarkan hasil perhitungan LQ dan DLQ dengan nilai > 1. Berdasarkan hasil analisa penelitian, didapatkan hasil bahwa komoditas unggulan Kabupaten Lombok Utara antara lain, baby tuna, cakalang, tongkol, tenggiri/makarel, dan ikan beronang. Adapun komoditas unggulan perikanan budidaya yakni nila dan lele.

Kata kunci : *komoditas unggulan, LQ, DLQ, keterkaitan antar sektor, supply chain*

I. PENDAHULUAN

Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) dikenal dengan predikat lumbung pangan nasional karena produksi padinya terus meningkat, juga layak dikembangan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Potensi produksi penangkapan mencapai 185.528,5 ton, dengan potensi lestari 129.863 ton, meliputi perairan pantai 67.907 ton dan perairan lepas pantai 61.957 ton. Tetapi dari keseluruhan potensi tersebut yang dimanfaatkan sekitar 73,26% (95.148 ton) (Syahdan, 2016).

Berdasarkan putusan ajang *The World Halal Travel Summit and Exhibition* 2015, di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Pulau Lombok NTB dinobatkan menjadi "destinasi halal terbaik di dunia" sekaligus "destinasi halal untuk berbulan madu terbaik di dunia". *Halal tourism* tidak hanya memperhatikan destinasi yang akan dikunjungi wisatawan, tetapi perilaku wisatawan yang salah satunya ialah mengonsumsi makanan. Ada banyak jenis makanan salah satunya ikan. Ikan merupakan produk halal karena selain daging ikan, bangkainya juga dapat dimakan. Selain itu ikan mengandung 18% protein yang terdiri dari asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakan. Hal ini sangat baik bagi pertumbuhan tubuh (pertanian.magelangkota.go.id) Adapun 5 langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendukung *halal tourism* ialah : regulasi, ketersediaan, keterjangkauan, sertifikasi halal dan kemitraan (Munir, 2016). Pada

penelitian ini hanya akan berfokus pada aspek ketersediaan, yang mana erat kaitannya dengan *supply* dan *demand*.

Kabupaten Lombok Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat sejak tahun 2008. Seluruh wilayah Lombok Utara dilewati oleh garis pantai sepanjang 829,50 km^2. Hal ini tentunya berdampak pada komoditas terbesar yang dihasilkan yakni ikan, yang diketahui produksinya mencapai 70571,1 ton (tangkap) tahun 2013. Padahal potensi yang dimiliki sebesar 142.187,4 ton, sehingga dapat diketahui bahwa pemanfataan potensi di Kabupaten Lombok Utara masih belum optimal sekitar 49,63%. Data PDRB Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015, menunjukkan penurunan pada tahun 2011 persentase kontribusi mencapai angka 9,32% sedangkan pada tahun 2013 persentase kontribusi menjadi 8,92 %.

Dalam rangka sebagai pendukung *halal tourism*, maka perlu diketahui hubungan sektor perikanan dan pariwisata, letak kluster pengolahan perikanan dan pengembangan pariwisata dalam hal pemasaran. Sehingga nantinya komoditas unggulan dapat meningkatkan kontribusi tersebut. Komoditas dikatakan unggulan apabila memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah (Rachman, 2003; Iyan, 2014). Penetapan komoditas unggulan diharapkan menjadi bagian dari langkah strategis yang dapat mendukung *halal tourism*.

II. METODE

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif-kuantitatif. Penelitian kualitatif menggunakan analisis potensi masalah, *supply chain* dan keterkaitan antara perikanan dan pariwisata. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai potensi perikanan daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan survei primer dan survei sekunder. Data sekunder yang diambil yakni data produksi perikanan selama 5 tahun. Adapun data primer didapatkan dengan cara wawancara. Narasumber dalam wawancara ialah Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan (Dishublutkan) dan nelayan-nelayan yang tersebar setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis :

A. Analisis location quotient (LQ) dan dynamic location quotient (DLQ)

Metode LQ digunakan untuk mengetahui sektor basis atau sektor potensial suatu daerah atau wilayah tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relatif-antara emampuan sektor di daerah dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas (Tarigan, 2005: Iyan 2014). Selanjutnya (Daryanto 2010:Ahdan et all, 2015) dalam penelitiannya menggunakan rumus (LQ) dengan formulasi sebagai berikut :

(1)

Keterangan
Si = jumlah produksi pada sektor i di Kabupaten Lombok Utara
S = jumlah total produksi di Kabupaten Lombok Utara
Ni = jumlah produksi pada sektor i di Provinsi Nusa Tenggara Barat
N = jumlah total produksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Analisis DLQ digunakan untuk menentukan reposisi sektor dan sub sektor ke depan di daerah tertentu. Analisis ini penting digunakan untuk mengetahui apakah di masa yang akan datang sektor dan sub sektor tertentu dapat bertahan sebagai sektor dan sub sektor basis atau tidak dan sebaliknya apakah sektor dan sub sektor yang sebelumnya bukan basis dapat mengalami reposisi/berpotensi menjadi sektor dan sub sektor basis di masa yang akan datang (Hajeri et all,2015).Menurut (Suyatno,2000: Hajeri et all,2015) rumus dari *DLQ* sebagai berikut:

(2)

Kriteria keputusan nilai DLQ

1. Nilai DLQ > 1 berarti suatu sektor masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang
2. Nilai DLQ < 1 berarti sektor tersebut tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi masalah

Potensi dan permasalahan sektor perikanan wilayah KLU diperoleh dari hasil peninjauan kebijakan pemerintah, keterkaitan yang berada dalam sistem perikanan (pola penyerapan tenaga kerja, pola aliran bahan baku, pola aliran pemasaran produk), wawancara nelayan dan pembudidaya, tren produktivitas perikanan tiap tahunnya, serta peran kelembagaan milik pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dengan sektor perikanan (BAPEDA, Dinas PU, Dinas Perhubungan dan Kelautan, Disperindakop, Dispar, Kelompok pembudidaya dan penangkapan ikan, Kelompok pengepul, Kelompok pengolahan dan pemasaran, Kelompok pengawas). Berikut potensi dan permasalahan sektor perikanan di wilayah KLU:

Tabel 1 Potensi Masalah

Aspek	Potensi	Masalah
Produksi	Adanya komoditas perikanan budidaya seperti kerapu, mutiara dan udang vaname yang sudah dipasarkan ke luar Lombok Utara bahkan Luar Negeri	Jumlah produksi perikanan tangkap ataupun budidaya, belum dapat memenuhi permintaan pasar
Pengolahan	Nelayan maupun pembudidaya ikan telah menerima penyuluhan dan pelatihan untuk pengolahan ikan	Nilai tambah komoditas masih rendah karena pada umumnya diekspor dalam bentuk segar (produk primer)
	Terdapat pengolahan hasil perikanan walaupun masih berupa perikanan tangkap	-
Pemasaran	-	Belum ada koordinasi antar pengepul, sehingga hasil produksi ikan di Lombok Utara kembali lagi dengan harga yang mahal

B. LQ dan DLQ

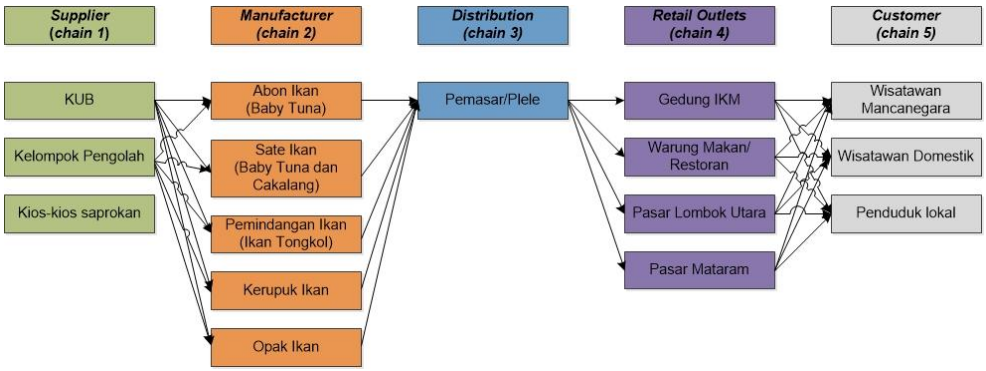
Komoditas perikanan tangkap KLU meliputi ikan beloso, kerapu, kurisi, layang, selar, kuwe, julung-julung, teri, tembang, lumuru, kembung, tengiri, layur, tongkol, udang barong, cumi cumi, gurita, ikan beronang, dan udang kerosok. Berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ hasil komoditas perikanan tangkap dikelompokan dalam 3 tingkatan yaitu unggulan, andalan dan tertinggal. Unggulan jika hasil LQ >1 dan DLQ >1, Andalan jika hasil LQ <1 dan DLQ >1, Tertinggal jika hasil LQ <1 dan DLQ <1. Komoditas yang tergolong dalam tingkat uggulan yaitu beloso, kurisi, layang, selar, julung-julung, layur, tongkol, udang barong, ikan beronang. Komoditas yang tergolong

andalan yaitu kerapu, kuwe, tembang, teri, lemuru, kembung, tengiri,cumi-cumi, gurita.Komoditas yang tergolong tertinggal yaitu udang krosok.

Adapun untuk komoditas perikanan budidaya pada wilayah KLU yaitu Nila Lele, dan Udang Vaname. Berdasarkan analisis LQ komoditas perikanan budidaya digolongkan menjadi basis dan non basis. Basis apabila memiliki LQ >1 dan Non basis bila <1. Komoditas basis pada perikanan budidaya ialah nila dan lele sedangkan udang vanamei tergolong komoditas non basis.

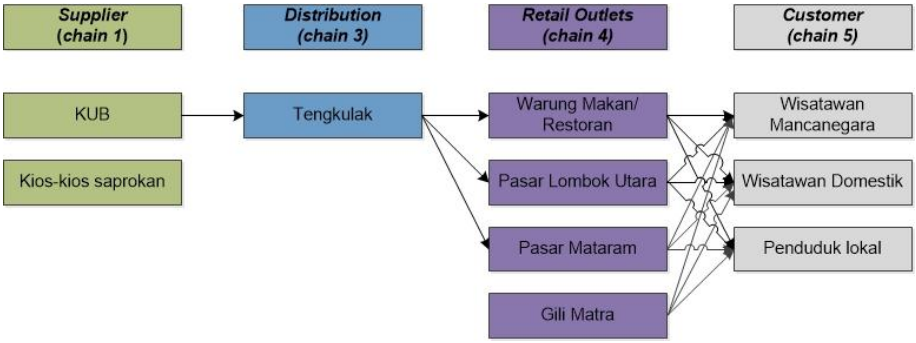
B. Supply Chain

Supply Chain merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistim distribusi (Hayati, 2014). Berdasarkan hasil analisa potensi dan masalah pada aspek pengolahan, tahapan *supply chain* dibagi menjadi dua yakni hasil perikanan yang diolah dan tidak diolah. **Gambar 1** ialah hasil yang diolah, sedangkan **gambar 2** dan **gambar 3** merupakan hasil yang tidak diolah.



Gambar 1. *Supply Chain Stages* Perikanan Tangkap yang diolah

Pada **gambar 1**, diketahui bahwa tahapan *supply chain* terbagi menjadi 5. *Supplier* dalam kasus ini ada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yakni kelompok-kelompok nelayan, dimana terdapat 83 kelompok yang tersebar di 5 kecamatan. Kemudian ada kelompok pengolah yang biasanya merupakan kumpulan istri nelayan. Jumlah dari kelompok pengolah ini ada 35 kelompok. Hasil olahan yang sampai sekarang berjalan dengan baik yakni sate ikan dan abon ikan. Keduanya olahan tersebut masing-masing menggunakan jenis ikan baby tuna (tuna sirip kuning) dan ikan cakalang. Kemampuan para pengolah terbatas hanya sebanyak 200 kg/kelompok. Selanjutnya ada pemasar atau biasa disebut plele, kelompok pemasar ini merupakan satu kesatuan dengan kelompok pengolah. Pemasaran untuk sate ikan dilakukan di warung makan/restoran, sedangkan untuk abon ikan dipasarkan di gedung IKM dan pasar. Konsumen atau penikmat hasil olahan ini mulai dar penduduk lokal, wisatawan domestik dan mancanegara.



Gambar 2. *Supply Chain Stages* Perikanan Tangkap yang tidak diolah

Perbedaan **gambar 1 dan 2** terletak di *chain* 2 dan *chain* 4, dimana pada **gambar 2** karena kemampuan para pengolah terbatas maka ikan-ikan segar ini langsung didistribusikan oleh tengkulak. Ada dua jenis tengkulak, yakni yang bermain di pasar besar akan mendistribusikan ke Mataram, sedangkan tengkulak yang bermain di pasar kecil mendistribusikan di warung makan/restoran dan pasar lokal. Harga hasil tangkapan tentunya ditetapkan oleh tengkulak, biasanya perbedaan harganya 1000 rupiah lebih mahal daripada harga ikan segar. Pada *chain* 4, pemasaran juga dilakukan di Gili Matra (Gili Trawangan, Air, dan Meno).

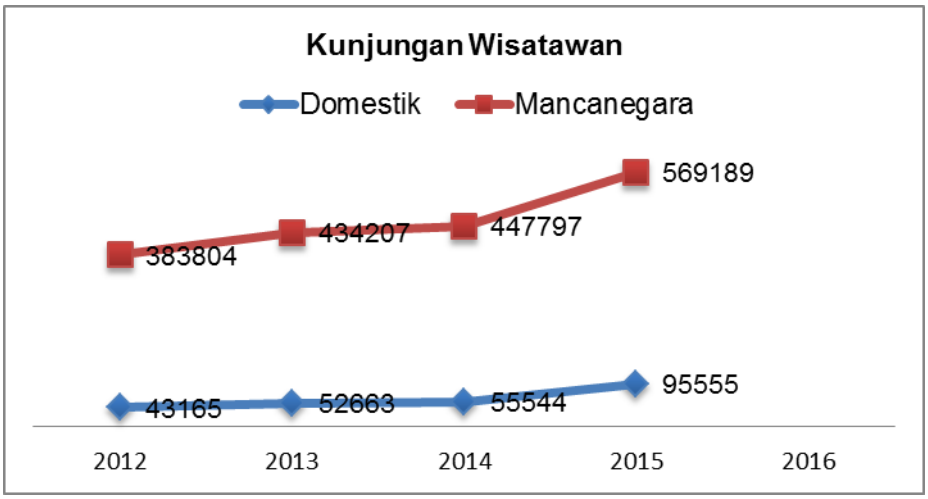


Gambar 3. *Supply Chain Stages* Perikanan Budidaya

Gambar 3 hampir sama dengan gambar 2, bedanya ialah pada *supplier* diperlukan benih, pakan dan obat-obatan dari Balai Benih Ikan di Lingsar, Lombok Barat. Hal ini karena di Lombok Utara masih belum terdapat BBI.

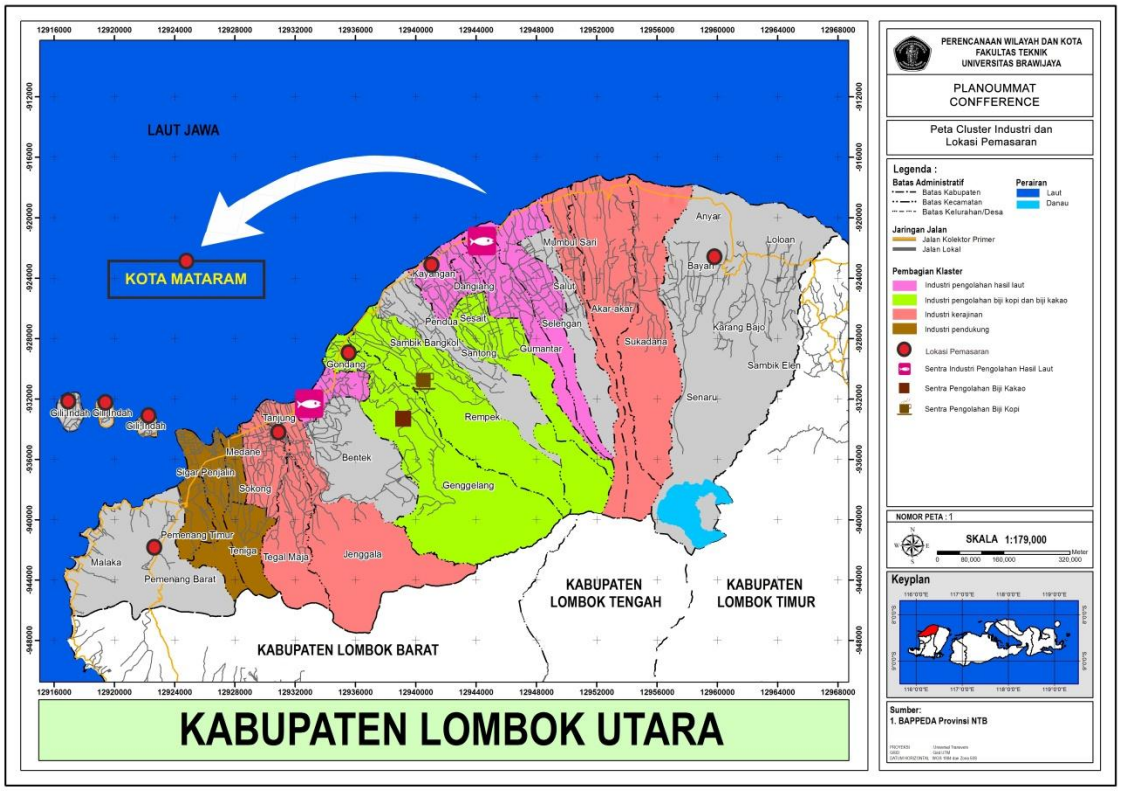
C. Keterkaitan antara Komoditas Perikanan dan Halal Tourism

Konsep halal tourism dapat diaplikasikan secara luas, termasuk dalam hal pangan. Ketersediaan pangan terutama hasil perikanan yang melimpah di Kabupaten Lombok Utara termasuk suatu potensi, ditambah dengan pesona Gili Matra yang mampu menarik wisatawan berkunjung. Diketahui bahwa trend wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Kunjungan wisatawan

Trend kunjungan wisatawan diprediksikan setiap tahunnya akan bertambah. Tentunya setiap wisatawan tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga makan. Berdasarkan *supply chain*, hubungan antara komoditas perikanan dan pariwisata ialah pada proses *retail outlets* yakni pada tempat-tempat pemasaran, seperti ditunjukkan pada **gambar 4**. Keberadaan warung makan/restoran dan hotel atau tempat tinggal sementara yang terdapat di daerah wisata membutuhkan *supply* ikan.



Gambar 4. Peta Cluster Industri dan Lokasi Pemasaran

Penentuan cluster industri pada **gambar 4,** berdasarkan 3 dimensi sisi luar (*competitiveness, economic specialization, spatial Identity)* dan 4 elemen sisi dalam (*interconnected/linked,* kombinasi sumberdaya dan kompetensi, konsentrasi spasial) tersebut, industri-industri yang ada di Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi menjadi 3 cluster seperti ditunjukkan pada **tabel 2.**

Tabel 2 *Cluster* Industri

***Cluster* Industri**	**Kecamatan**	**Desa**	**Jumlah Industri**
Industri makanan dan pengolahan hasil laut	Gangga	Gondang	13
Industri pengolahan biji kopi	Gangga	Genggelang	2
		Rempek	1
	Kayangan	Sesait	1
Industri tenun dan kerajinan dari kayu, batok kelapa, bambu	Tanjung	Tegal Maja	2
		Sokong	3
		Jenggala	4
	Bayan	Akar-Akar	6
		Mumbul Sari	2
		Sukadana	1
		Bayan	12

D. Komoditas Unggulan

Penentuan komoditas unggulan tidak hanya dilihat dari nilai LQ dan DLQ, tetapi juga *supply chain* dan tentunya hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan seperti yang ditunjukkan pada **tabel 3**.

Tabel 3 Penentuan Komoditas Unggulan

Jenis Perikanan	**Hasil Analisis LQ dan DLQ**	**Wawancara Dishublutkan**	**Komoditas Unggulan**
Tangkap	Beloso	Terbang	Baby Tuna sirip kuning
	Kurisi	Tenggiri/makarel	Cakalang
	Layang	Tuna sirip kuning	Beronang
	Selar	Cakalang	Tongkol
	Julung-julung	Kerapu	Tenggiri/makarel
	Layur	Kakap	
	Tongkol	Beronang	
	Udang Barong		
	Beronang		
Budidaya	Nila	Nila	Nila
	Lele	Lele	Lele

Tabel 3, menunjukkan hasil komoditas unggulan perikanan Kabupaten Lombok Utara. Ada perbedaan yang cukup signifikan antara hasil LQ dan DLQ dengan wawancara yang dilakukan Dishublutkan. Alasan memasukkan baby tuna sebagai komoditas unggulan ialah karena baby tuna merupakan bahan dasar untuk dijadikan sate ikan dan abon ikan, dimana abon ikan ini sangat didukung oleh pemerintah dalam pengembangannya. Kemudian cakalang merupakan bahan dasar untuk sate ikan. Ikan tongkol dan tenggiri/makarel sesuai pada *supply chain* merupakan bahan yang digunakan untuk pemindangan (ikan tongkol) dan krupuk ikan (ikan tenggiri) serta bakso ikan (ikan tenggiri). Adapun dalam perikanan budidaya yang merupakan komoditas unggulan ialah nila dan lele. Tetapi perlu diketahui bahwa perikanan budidaya di Kabupaten Lombok Utara pengembangannya masih sangat kurang, karena masih dalam tahap awal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Hasil analisis potensi masalah menunjukkan bahwa masalah utama yang menghambat peningkatan komoditas unggulan ialah pada produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Hubungan antara komoditas perikanan dan pariwisata ialah pada proses *retail outlets* yakni pada tempat-tempat pemasaran, seperti hotel dan warung makan/restoran
3. Komoditas unggulan perikanan tangkap berjumlah 5 yakni baby tuna, cakalang, tongkol, tenggiri/makarel, dan ikan beronang. Adapun komoditas unggulan perikanan budidaya yakni nila dan lele.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdan, Mappatoba, M., & Suparman. (2015). Analisis Penentuan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di Kabupaten Tolitoli. *Katalogis*, 155-166.

Badan Pusat Statistik. (2017). *Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2017.* Lombok Utara: BPS Kabupaten Lombok Utara.

Badan Pusat Statistik . (2012). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2012.* Mataram: BPS NTB.

Badan Pusat Statistik . (2013). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2013.* Mataram: BPS NTB.

Badan Pusat Statistik. (2014). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2014.* Mataram: BPS NTB.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2015.* Mataram: BPS NTB.

Badan Pusat Statistik. (2016). *Nusa Tenggara Barat dalam Angka Tahun 2016.* Mataram: BPS NTB.

Dinas Pertanian. (2017, september 3). *Mengenal Nilai Gizi Ikan*. Retrieved from Pemerintah Kota Magelang Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan: pertanian.magelangkota.go.id

Hajeri, Yurisinthae, E., & Dolorosa, E. (2015). Analisis Penentukan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 253-269.

Harrick, J. (2017, Juli 10). *Cara Menghitung Rasio Pertumbuhan*. Retrieved from Wikihow: id.wikihow.com/Menghitung-Rasio-Pertumbuhan

Hayati, E. N. (2014). Supply Chain Management (SCM) dan Logistic Management. *Dinamika Teknik*, 25-34.

Iyan, R. (2014). Analisis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian di Wilayah Sumatera. *Sosial Ekonomi Pembangunan*, 215-235.

Munir, B. (2016). *NTB Pusat Pangan Halal Dunia.* Mataram: Regional Institute 104.
Regional Institute 104. (2016). *Revolusi Pangan.* Yogyakarta: CV Polydoor.

Penataan Permukiman Suku Bajo Di Pulau Bungin

Verry Lahamendu

Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Email: verry_lahamendu@yahoo.com

ABSTRAK

Suku Bajo dalam membangun rumah dan bermukim di pulau Bungin selalu menyesuaikan dengan adat-istiadat yang berlaku. Setiap pemuda yang hendak menikah diharuskan mengumpulkan karang mati yang diambil dari laut sebagai tempat mendirikan bangunan rumah. Proses pengambilan batu karang ini telah berlangsung sejak lama dan turun temurun, menyebabkan luas Pulau Bungin selalu bertambah dan penduduknya semakin padat dari tahun ke tahun. Hal inilah yang menyebabkan pola permukiman Suku Bajo di pulau Bungin menjadi tidak beraturan. Jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya saling berdekatan dan semakin mengalami penurunan kualitas lingkungan, baik lingkungan permukiman berupa masalah kekumuhan maupun lingkungan perairan berupa masalah karang laut yang digunakan oleh warga Bungin untuk mendirikan rumah tinggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola bermukim suku Bajo di Pulau Bungin menggunakan metode purposive sampling dengan menetapkan kriteria khusus agar sampel yang diperoleh sesuai tujuan penelitian. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuisioner yang dibagikan secara acak. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya serta adat-istiadat berperan besar dalam membentuk pola permukiman Suku Bajo di pulau Bungin.

Kata kunci: Penataan, Permukiman, Suku Bajo, Pulau Bungin

I. PENDAHULUAN

Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Bungin terkenal sebagai pulau yang terpadat di dunia. Pulau ini memiliki keunikan tersendiri, keunikan tersebut adalah suatu tradisi yang mengharuskan pemuda yang akan menikah harus mengumpulkan karang mati yang diambil dari dasar laut sebagai tempat untuk mendirikan bangunan rumah. Tradisi ini sudah berlangsung lama dan berlaku turun-temurun bagi masyarakat yang tinggal di pulau ini.

Luas pulau Bungin awalnya hanya 3 hektar namun di tahun 2014 telah bertambah menjadi 8 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 3.184 Jiwa atau 939 kepala keluarga. Daratan pulau Bungin selalu bertambah sekitar 30-60 are setiap tahunnya (RPJMDes, 2015-2019). Permukiman di bagian tengah pulau sangat padat sehingga bagi warga yang akan menimbun karang harus dilakukan di bagian terluar pulau dengan ukuran 6m x 12 m atau lebih tergantung dari kemampuan warga.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses membangun rumah dan pola permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin. Penataan permukiman difokuskan di Pulau Bungin karena dinilai memiliki kondisi permukiman yang beresiko terhadap penurunan kualitas lingkungan. Hasil dari kajian ini berupa penataan kembali permukiman Suku Bajo di pulau Bungin melalui konsep bermukim yang sehat, bersih, ramah terhadap lingkungan dan berkelanjutan serta dapat mengantisipasi terhadap perubahan iklim yang sedang berlangsung saat ini.

II. KAJIAN LITERATUR

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian

yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Di kawasan pesisir, perumahan umumnya bersifat sporadic, dibentuk oleh masyarakat (housing by people) dan sifatnya freedom to build. Bentuk rumah yang ada bervariasi.Yang berada di area sekitar pantai (dalam kawasan sempadan pantai) adalah berbentuk panggung dengan material dari kayu dan bamboo. (Amri, 2014).

Menurut Hervianto (2013), cepatnya laju urbanisasi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang, prasarana dan sarana serta utilitas yang cukup menyebabkan suatu kawasan permukiman *over capacity* dan menjadi kumuh. Pada umumnya kondisi permukiman kumuh menghadapi permasalahan antara lain:

(1) Luas bangunan yang sangat sempit dengan kondisi yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kehidupan sosial.
(2) Kondisi bangunan rumah yang saling berhimpitan sehingga rentan terhadap bahaya kebakaran.
(3) Kurangnya air bersih.
(4) Jaringan listrik yang ruwet dan tidak mencukupi.
(5) Drainase yang sangat buruk.
(6) Jalan lingkungan yang buruk.
(7) Ketersediaan sarana MCK yang sangat terbatas [5]

Penataan perumahan dan permukiman menurut Undang-Undang RI No. 4 tahun 1992 bertujuan untuk :

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
b. Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.
d. Menunjang perubahan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan bidang lain.

III. METODE PENELITIAN

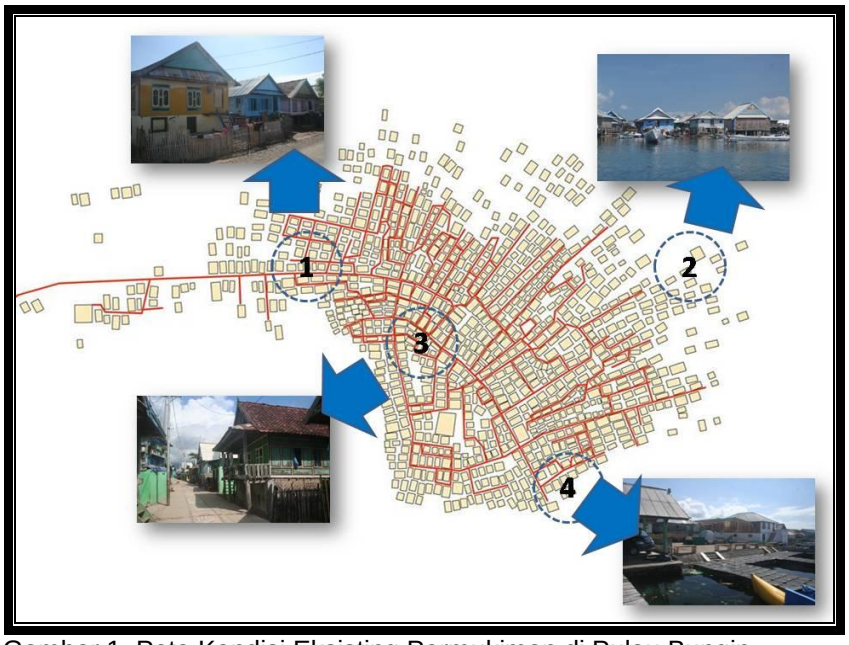
Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih representatif. Data yang representatif mengenai permukiman suku Bajo di pulau Bungin dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dan kuisioner. Pengambilan data lapangan dibagi menjadi empat bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu data kawasan atau lingkungan, data bangunan, sifat khusus yang merupakan gabungan informasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dan data responden (Darjosanjoto,2006). Responden dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan yaitu: 1). Status rumah milik pribadi ; 2). Berasal dari Suku Bajo; 3). Sudah menikah (berkeluarga); 4). Mempunyai pekerjaan. Responden dipilih secara acak berdasarkan letak atau kedudukan rumah, yaitu di tengah pulau, di bagian terluar pulau dan transisi (berada diantara keduanya).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kawasan Permukiman Pulau Bungin.

Berdasarkan hasil observasi, pola perletakkan massa bangunan tidak beraturan. Bangunan rumah tinggal yang ada di pulau Bungin awalnya berorientasi ke arah jalan utama atau bagian tengah pulau. Bangunan baru yang akan dibangun selalu berjejer dibelakangnya. Pola ini terbentuk akibat tradisi yang terus dipelihara oleh generasi muda untuk mengumpulkan karang mati sebagai modal dalam menikah. Tidak ada konsep penataan pola permukiman sehingga masyarakat yang menimbun karang bisa memilih tempat di bagian terluar pulau yang masih kosong. Jarak antara rumah yang satu dengan rumah lainnya hanya 1,5 meter dan tidak

mempunyai pembatas yang jelas sehingga dimanfaat oleh penduduk sebagai jalan setapak. Dari jalan utama menuju ke dalam permukiman ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan beroda empat. Sehingga bila ada penduduk yang akan berpergian harus berjalan kaki dan begitu pula sebaliknya. Infrastruktur jalan yang ada di pulau ini masih sangat minim begitu juga dengan fasilitas umum.

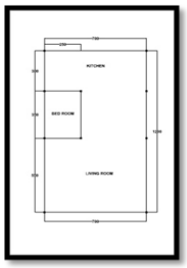
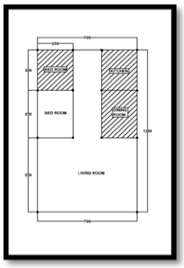


Gambar 1. Peta Kondisi Eksisting Permukiman di Pulau Bungin

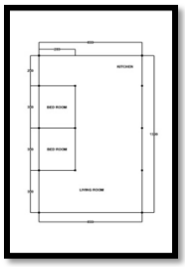
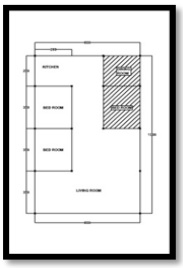
B. *Bangunan Rumah Tinggal.*

Data akurat tentang rumah tinggal diperoleh melalui dua tahapan. Pertama, melakukan obeservasi langsung untuk melihat tampilan fisik dan proses membangun rumah tinggal, kemudian membuat visualisasi yang merupakan garis besar atau intisari wujud rumah tinggal. Sumber informasi diperoleh langsung dari pemilik rumah dengan melakukan wawancara. Kedua menggali informasi dari responden mengenai fungsi rumah tinggal, khususnya menyangkut aspek-aspek sosial dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam rumah secara menyeluruh. Beberapa rumah yang dijadikan sampel penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

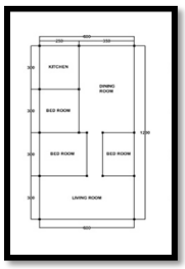
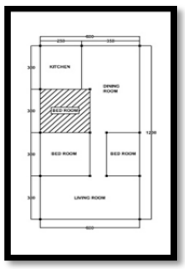
Tabel 1. Data Bangunan Di Bagian Terluar Pulau

Letak rumah (Bagian Terluar Pulau)	Denah awal	Rencana Pengembangan	Keterangan
			**Bentuk Fisik Rumah :** - Luas 7 m x 12 m; - Material Lantai : Kayu; Dinding : Kayu/Tripleks; Atap : Seng - Jumlah Penghuni = 4 orang - Lama tinggal = 6 tahun - Akses menuju rumah menggunakan titian yang terbuat dari kayu/bambu. - Air bersih diambil dengan menggunakan perahu. **Ruang yang ada** : - Ruang Tamu - Kamar Tidur - Dapur dan Ruang makan satu. **Rencana Pengembangan**. - Ruang Dapur dan Ruang makan terpisah. - Menambah ruang Tidur

Tabel 2. Data Bangunan Di Wilayah Transisi

Letak rumah (Daerah Transisi)	Denah awal	Rencana Pengembangan	Keterangan
			**Bentuk Fisik Rumah:** - Luas 8 m x 13 m; - Lantai : Kayu; Dinding : kayu/bambu, - Atap : Seng - Jumlah Penghuni = 5 orang - Lama tinggal 20 tahun - Akses menuju rumah jalan paving stone - Air bersih PDAM, Listrik PLN **Ruang yang ada** : - Ruang Tidur - Kamar Tidur - Dapur dan Ruang Makan satu **Rencana Pengembangan** - Dapur dan Ruang Makan Terpisah

Tabel 3. Data Bangunan Di Tengah Pulau

Letak rumah (Tengah Pulau)	Denah awal	Rencana Pengembangan	Keterangan
			**Bentuk Fisik Rumah :** - luas 6 m x 12 m; - Lantai : Kayu; dinding : Kayu/Bambu; - Atap Seng; - Listris PLN, Air : PDAM - Jumlah Penghuni = 6 orang - Occupied Lama Tinggal 40 tahun - Akses kerumah jalan paving stone **Ruang yang ada** : - Ruang Tamu - Kamar Tidur **Development Plan**. - Ruang Makan

Berdasarkan hasil penelitian bangunan rumah tinggal, yaitu :

- Umumnya ukuran luas bangunan rumah tinggal disesuaikan dengan ukuran timbunan batu karangh. Rumah tidak mengalami pertambahan luas tetapi hanya penambahan ruang dengan cara menyekat ruangan menggunakan bahan yang terbuat dari kayu atau bambu. Jarak rumah yang berdekatan mengandung filosofi bahwa mereka memiliki perasaan bersatu dan ingin selalu ramai. Semangat gotong royong begitu tinggi, dengan sistem keluarga besar (big family) dan extended family menjadi ciri khas dari suku Bajo di Pulau Bungin, akibatnya dalam satu rumah bisa terdiri dari 3-5 anggota keluarga yang berjejal-jejal di dalam satu rumah serta ikatan kekeluargaan yang sangat erat membentuk pola tersendiri dalam cara bermukim .
- Fungsi rumah bagi suku Bajo yaitu sebagai tempat tinggal dan melakukan berbagai aktifitas. Bagian bawah rumah panggung (kolong) dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan perahu, memelihara ternak kambing, tempat bekerja ataupun sebagai warung. Ruang depan difungsikan sebagai tempat berkumpul seluruh anggota keluarga, menerima tamu, serta untuk kegiatan-kegiatan ritual keagamaan seperti sunatan dan pinangan. Beberapa pemilik rumah berencana menambah ruang dengan cara menyekat ruangan menggunakan papan atau tripleks.
- Rumah yang berada di bagian terluar pulau mengambil air bersih diluar pulau dengan menggunakan perahu motor. Tetapi untuk rumah yang berada di tengah-tengah pulau dan sebagian yang berada di daerah transisi menggunakan air dari PDAM. Rata-rata rumah yang berada di pinggiran pulau tidak mempunyai KM/WC, sedangkan yang berada di tengah pulau menggunakan sarana yang diberikan oleh pemerintah yaitu MCK umum. Jarak yang cukup jauh dari pinggiran

pulau menuju ke tempat MCK yang berada di tengah-tengah pulau menyebabkan masyarakat suku Bajo lebih suka membuang langsung ke laut.

- Rumah-rumah tidak mempunyai tempat pembuangan sampah. Sampah cair dan padat dari rumah-rumah penduduk langsung dibuang ke tanah. Pada saat air pasang, sampah-sampah plastik dari laut sering terbawa air dan masuk ke tengah-tengah permukiman warga sehingga pada saat air surut terlihat sampah berserakan dimana-mana. Bagian kolong rumah panggung sering digunakan sebagai tempat untuk memelihara hewan kambing, disamping menjadi kotor juga menimbulkan bau yang tidak sedap.

C. Pengamatan sifat khusus

1. Aksesibilitas

Pencapaian menuju pulau Bungin melalui darat hanya melalui satu pintu masuk utama dan keluar melalui pintu yang sama. Baik pejalan kaki maupun kendaraan beroda dua dan beroda empat melalui jalan yang sama dengan pola sirkulasi radial memutar pulau Bungin. Jalur jalan antara pejalan kaki dan kendaraan tidak dipisahkan sehingga sering menimbulkan kemacetan bila terjadi arus kendaraan yang masuk ataupun keluar, berpapasan dengan warga yang sedang melakukan kegiatan ritual adat seperti Sunatan atau prosesi lamaran pernikahan.

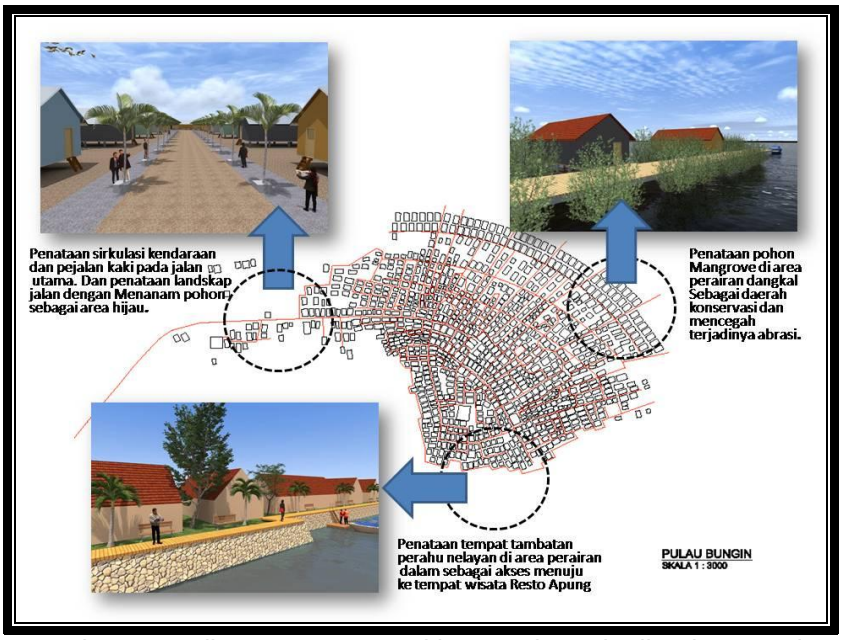
Salah satu tempat yang menarik para wisatawan untuk datang berkunjung ke pulau ini yaitu Resto Apung yang terletak di tengah laut di Selatan pulau. Resto apung ini merupakan tempat pemeliharaan ikan di dalam karamba sekaligus di atas karamba dibangun restoran yang khusus menghidangkan menu ikan. Arus wisatawan yang datang ke Resto Apung ataupun yang kembali dari Resto Apung selalui melewati jalan yang sama sehingga menimbulkan kemacetan kendaraan maupun para pejalan kaki.

2. Massa Bangunan

Pola perletakan massa antar bangunan tidak memperhatikan ruang luar yang terbentuk. Pada rumah-rumah yang berada di tengah pulau orientasi masa bangunan menghadap ke jalan utama sedangkan yang berada di bagian terluar atau pinggiran tidak jelas alur orientasinya. Pola perletakan masa bangunan yang tidak jelas alur orientasinya menyulitkan warga penghuni pulau Bungin dalam bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam mencapai atau memasuki tempat yang dituju, dan adanya kemungkinan mengalami kebingungan dalam mengarahkan geraknya. Lynch(dalam Darjosanjoto, 2006). Pengunjung yang datang ke pulau Bungin juga akan kebingungan untuk mencari jalan keluar. Elemen-elemen ruang luar sebagai penanda yang memudahkan orang-orang yang masuk atau keluar dari kawasan pulau ini belum ada.

3. Ruang Terbuka.

Padatnya permukiman di pulau Bungin menyebabkan lahan yang disediakan sebagai ruang publik tidak tersedia. Padahal ruang publik berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya. Masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik sebagai tempat untuk bersantai, berolahraga, berdiskusi dan lain sebagainya



Gambar 2. Hasil Penataan Permukiman Suku Bajo di Pulau Bungin

IV. KESIMPULAN

Permukiman suku Bajo di pulau Bungin tergolong sebagai permukiman nelayan yang belum tertata dan kumuh. Permukiman di bagian terluar pulau umumnya bersifat sporadik, dimana permukiman tersebut dibentuk oleh masyarakat (housing by people) dan sifatnya bebas membangun (freedom to built). Hal ini di perkuat oleh tradisi yang sudah belaku turun temurun, dimana bagi pemuda yang hendak menikah harus mengumpulkan karang sebagai tempat mendirikan bangunan rumah.

Dalam menghadapi perubahan yang luar biasa akibat perubahan iklim, maka solusi baru perlu dikembangkan dalam mengatasi dampak lingkungan. Perbaikan landscape pantai atau area coastal merupakan hal yang sangat penting. Ini dilakukan dengan menamam mangrove di sepanjang jalan masuk menuju ke pulau Bungin dan di area perairan dangkal. Sebab secara ekologis mangrove berfungsi sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan atau berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut. Disamping itu, fungsi secara ekonomis hutan mangrove adalah penduduk bisa memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar dan bahan pembuat arang serta sebagai bahan untuk membuat tiang-tiang bangunan rumah panggung yang bisa bertahan hingga ratusan tahun.

Penataan permukiman masyarakat suku Bajo di Pulau Bungin yang berkepadatan tinggi tidak dapat dilakukan secara spatial namun secara holistik, meliputi semua komponen yang ada dipermukiman mulai dari penataan massa bangunan, ruang terbuka hijau, fasilitas komunal, hingga revitalisasi terumbu karang mati dan mengalami pemutihan akibat penambangan lokal yang dijadikan dasar mendirikan bangunan.Hal ini dilakukan tanpa meninggalkan ciri khas suku Bajo dalam membentuk pola bermukim dengan arsitektur vernakularnya tanpa merusak lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Darjosanjoto, Endang. T. Sunarti (2006), Penelitian Arsitektur Di Bidang Perumahan Dan Permukiman, ITS Press,39-48.

Amri, Nurmaida (2014), Perumahan Pesisir, Laporan Penulisan Buku Ajar, Universitas Hasanudin.

Peraturan:

[1] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2015-2019.

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman.

Website:

Hervianto, Iyan, dkk**,** (2013)Permukiman Pesisir Dengan Pendekatan Ekologi Berkelanjutan Di Tanjung Pasir. Diakses pada 4 Agustus 2017 dari alamat http://thesis.binus.ac.id/doc/Lain-lain/2013-1-00099-AR%20WorkingPaper001.pdf.

'GOOD FOOD REVOLUTION'
PENINGKATAN POTENSI 'HOME INDUSTRY' SEBAGAI ASET PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA GASTRONOMI

Studi Kasus: Kawasan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Kec Blimbing, Kota Malang

Syahyudes Rina[1]

[1]*Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Desain, Institut Teknologi dan Sains Bandung, Kabupaten Bekasi*
Email: syahyu_30@yahoo.com

ABSTRAK

Kawasan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan *berada di* ***Kecamatan Blimbing Kota Malang*** *diarahkan sebagai* ***Kawasan Strategis Ekonomi*** *yang pada dasarnya merupakan kawasan yang perlu didorong pertumbuhannya untuk mampu mengeksplorasi potensi serta meningkatkan ketertinggalannya. Salah satu citra* ***Kawasan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan*** *telah terbentuk sebagai kawasan industri dan perdagangan berbahan gastronomi/ kedelai berbentuk Keripik tempe.. Hal ini jika dikembangkan akan memberikan dampak signifikan pada perkembangan* ***Kota Kecamatan Blimbing*** *khususnya****, Kota Malang*** *umumnya.*

Pengembangan ***Kawasan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan*** *diharapkan menjadi salah satu pendorong pembangunan karena memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Keberadaan sentra industri ini dapat menjadi salah satu penarik untuk berkunjung ke* ***Kota Malang*** *dan akan meningkatkan pendapatan daerah* ***Kota Malang****.*

Keberadaan kawasan strategis ekonomi ini telah didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang memadai serta jaringan utilitas yang mendukung kegiatan di kawasan tersebut, sehingga perkembangan yang sangat cepat tidak akan terelakan. Dimana saat ini fungsi utama kawasan adalah 'home industry' dan berpotensi dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata gastronomi. Untuk itu diperlukan panduan penataan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bangunan dan lingkungan terkait pengembangan kawasan yang lebih berdaya guna.

Metode pada tahap persiapan meliputi desk study, book review, dan visualisasi lapangan studi kasus yaitu di ***Kawasan Sentra Industri Sanan.*** *Kemudian pada tahap analisis kawasan dilakukan dengan survey sekunder (instansional), survey primer (observasi lapangan), tabulasi dan kompilasi data, poling (wawancara semi terstruktur) dan survey kampung sendiri (SKS). Pada tahap perumusan dan pengembangan rancangan menggunakan metode proyeksi, modelling, dan urban design analysis.*

Kesimpulan dan rekomendasi terkait perumusan dan pengembangan kawasan wisata berbasis gastronomi ***Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan*** *yang diharapkan adalah 1) konsep perancangan; 2) Konsep Tata Kualitas Lingkungan; 3) Konsep Ruang Terbuka dan Tata Hijau; 4) Konsep Sirkulasi dan Jalur Penghubung, dan 5) Konsep Prasarana dan Utilitas Lingkungan.*

Kata kunci: *'good food revolution', gastronomi, 'home industry' tempe, dan pengembangan kawasan wisata*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

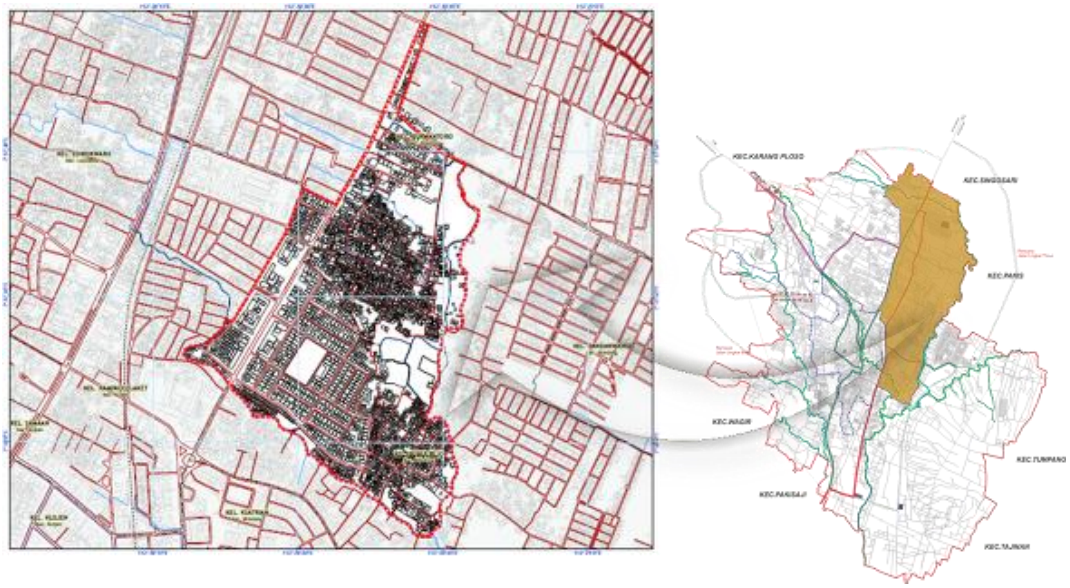
Keberadaan **Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Blimbing Malang** dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak cepat terkait dengan fakta potensi, peluang dan kesempatan **Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Blimbing Malang**, meliputi:

1) Potensi: (a) Fungsi perdagangan/ jasa skala regional; (b) Fungsi permukiman dengan intensitas sedang-tinggi; (c) Fungsi hunian 'home industry' yang telah berkembang; (d) Adanya titik-titik ruang terbuka di kawasan perumahan yang berpotensi menjadi fungsi Ruang Wisata sekaligus fungsi RTH (Ruang Terbuka Hijau); (e) Arahan untuk pengembangan kawasan wisata; (f) Peruntukan sarana prasarana umum pendidikan; (g) Secara umum, tingkat alih fungsi bangunan di kawasan relatif rendah; dan (h) Batas fungsi dalam kawasan jelas dan terbaca sehingga memudahkan perencanaan.
2) Permasalahan: (a) Tata guna lahan eksisting tidak sesuai dengan arahan tata ruang; (b) Adanya ruang ketiga yang dimanfaatkan oleh PKL dan kegiatan temporer (bengkel, dll); dan (c) Ruang luar yang mati atau belum termanfaatkan secara maksimal sebagai 'linkage' maupun ruang terbuka di permukiman.
3) Peluang: (a) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari **Kota Malang** dan sekitarnya dapat memperluas peruntukan lahan perdagangan dan jasa; (b) Mengembangkan kawasan dengan menata peruntukan fungsi lahan guna menunjang kegiatan wisata dan perekonomian; (c) Penataan lingkungan permukiman; dan (d) Penataan ruang koridor luar dan dalam pertokoan serta area perdagangan & jasa lainnya di dalam kawasan.
4) Kesempatan: (a) Pengembangan kawasan dengan daya tarik ekonomi dan wisata dikhawatirkan mengubah tata guna lahan di kawasan; (b) Mengembangkan peruntukan kawasan untuk permukiman yang nyaman; (c) Mengembangkan peruntukan kawasan untuk dapat meningkatkan peluang usaha masyarakat; dan (d) Menyesuaikan tata guna lahan dan fungsi peruntukan dalam memaksimalkan kegiatan perekonomian dan pariwisata.

Dimana saat ini fungsi utama kawasan adalah 'home industry' dan dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata gastronomi berdasarkan potensi, permasalahan, peluang dan kesempatan di kawasan ini. Untuk itu diperlukan panduan penataan, pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta bangunan dan lingkungan terkait pengembangan kawasan yang lebih berdaya guna.

B. Ruang Lingkup Kawasan Perencanaan

Kawasan perencanaan adalah kawasan '*home industry*' di Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, dengan luas deliniasi kawasan perencanaan adalah ± 66,946 ha. Batas lokasi sebelah Barat: Jl. Sulfat; Selatan: RW 9,10, 11 dan 12 Kel. Bunulrejo; Barat: Jl. Tumenggung Suryo dan Timue: RW 8 Kel. Bunulrejo dan Kel. Pandanwangi, seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Deliniasi Kawasan Perencanaan, Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan

Lokasi berada di 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Purwantoro dan Kelurahan Bunulrejo, meliputi 3 (tiga) kawasan 'home industry' yaitu kawasan permukiman Cibuni, Kawasan Permukiman Sanan dan Kawasan Permukiman Sanansari.

C. Maksud dan Tujuan

Menyediakan pedoman penataan pada Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Kec. Blimbing, Kota Malang sehingga memenuhi kriteria perencanaan yang berkelanjutan untuk peningkatan kawasan wisata berbasis gastronomi.

II. METODE

Metode pada tahap persiapan meliputi desk study, book review, dan visualisasi lapangan studi kasus yaitu di Kawasan Sentra Industri Sanan, Blimbing Malang. Pada tahap analisis kawasan dilakukan dengan survey sekunder (instansional), survey primer (observasi lapangan), tabulasi dan kompilasi data, poling (wawancara semi terstruktur) dan survey kampung sendiri (SKS). Pada tahap perumusan dan pengembangan rancangan menggunakan metode proyeksi, modelling, dan urban design analysis.

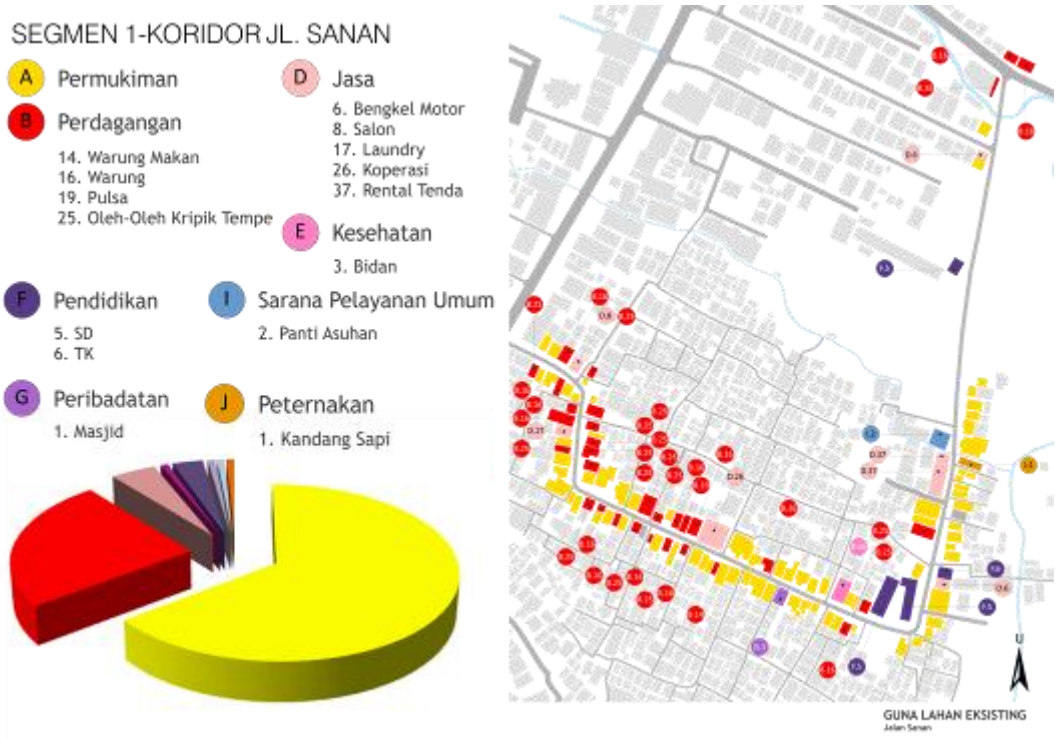
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan **Kondisi Eksisting** Guna Lahan

Guna lahan di Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan dalam rencana pola ruang RTRW Kota Malang 2010-20130 adalah peruntukan **Permukiman, Terminal, Perdagangan, Pemerintahan dan Pendidikan**. Pemetaan kondisi eksisting guna lahan di Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan berdasarkan pemenggalan segmen koridor jalan utama yang melayani kawasan peruntukannya, dalam hal ini meliputi: 1) Jalan Lokal Sekunder-Jalan Sanan, dan 2) Jalan Arteri Sekunder-Jalan Letjen Sunadar Priyo SUdarmo-Jalan Tumenggung Suryo.

Guna lahan di **Koridor Jl. Sanan** meliputi: permukiman, perdagangan, Jasa, Kesehatan, Pendidikan, Peribadatan, Sarana Pelayanan Umum dan Peternakan, seperti terlihat pada gambar berikut.



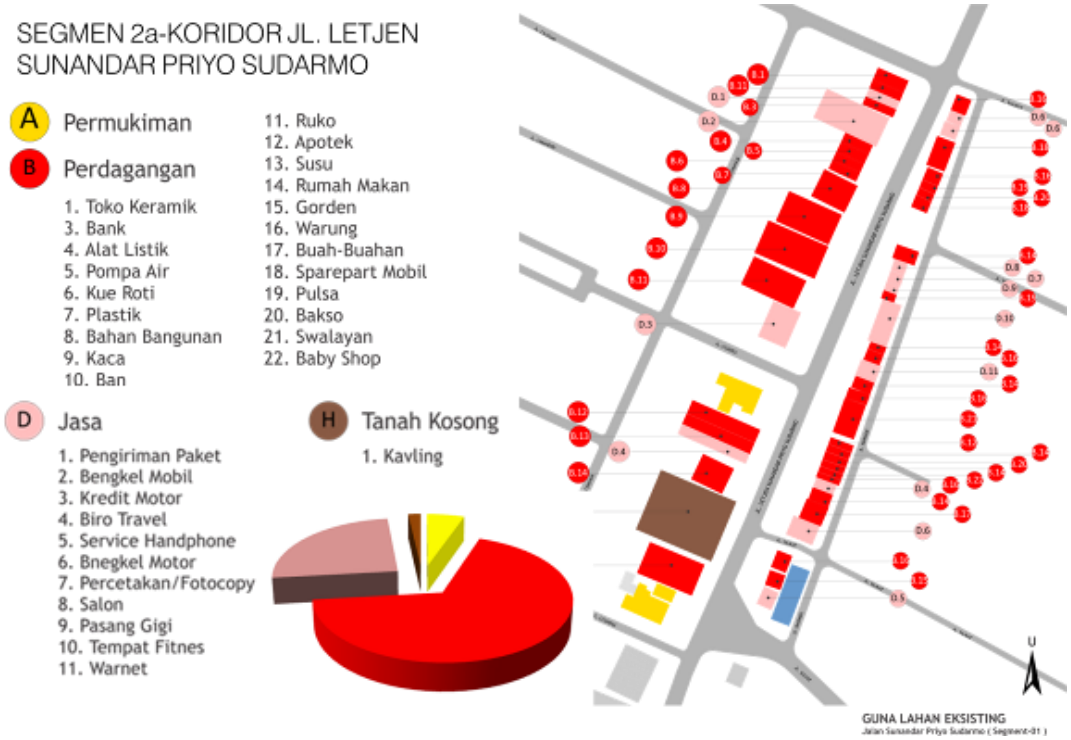


Gambar 2. Kondisi Eksisting Guna Lahan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan

Segmen 2 terdiri dari 4 (empat) bagian, sebagai berikut.

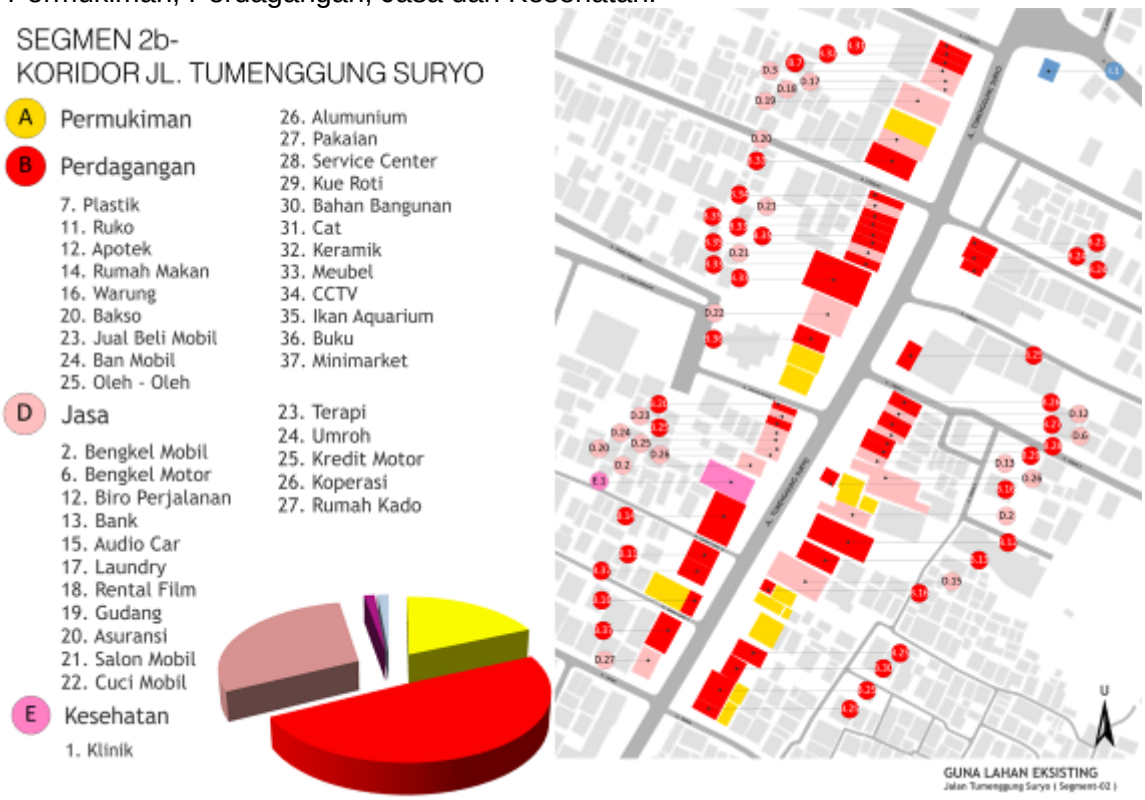
Guna lahan di **Segmen 2a Koridor Jl. Letjen Sunandar Priyo Sudarmo** meliputi: Permukiman, Perdagangan, Jasa dan Tanah Kosong.





Gambar 3. Kondisi Eksisting Guna Lahan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Segmen 1

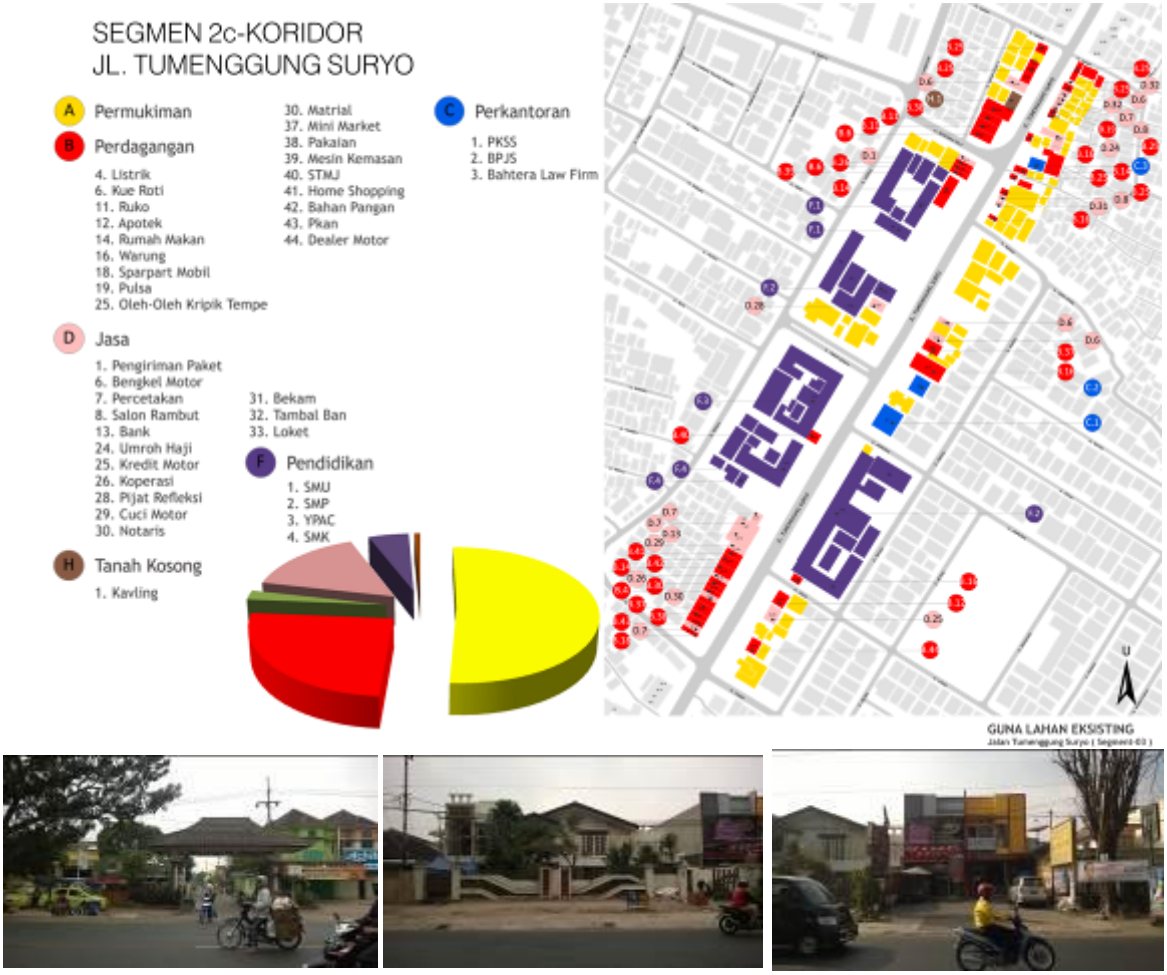
Guna lahan di **Segmen 2b Koridor Jl. Tumenggung Suryo** meliputi: Permukiman, Perdagangan, Jasa dan Kesehatan.



Gambar 4. Kondisi Eksisting Guna Lahan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Segmen 2



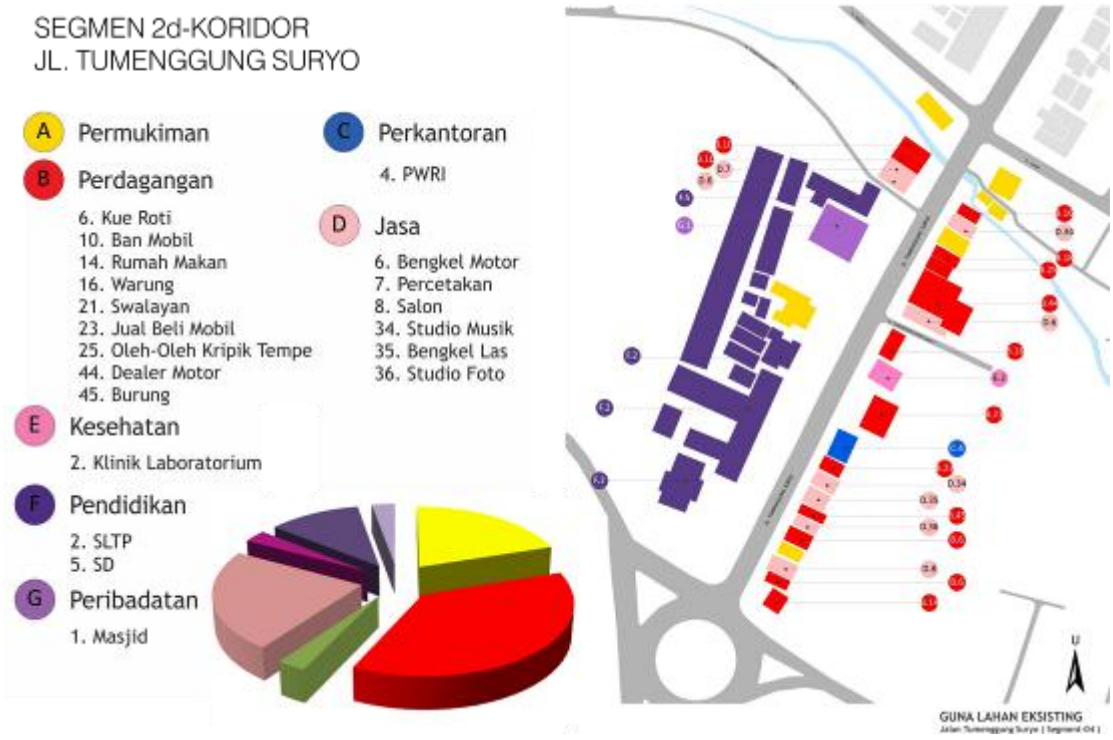
Guna lahan di **Segmen 2c Koridor Jl. Tumenggung Suryo** meliputi: Permukiman, Perdagangan, Perkantoran, Jasa dan Tanah Kosong.



Gambar 5. Kondisi Eksisting Guna Lahan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Segmen 3

Guna lahan di **Segman 2d Jl. Tumenggug Suryo** meliputi: Permukiman, Perdagangan, Perkantoran, Jasa, Kesehatan, Pendidikan dan Peribadatan.





Gambar 6. Kondisi Eksisting Guna Lahan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Segmen 4

B. Gambaran **Kondisi Eksisting** Kegiatan Produksi Tempe di Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan



Produksi = 1 ton/ hari (setara dengan 10.000 bungkus/ hari)
Harga per bungkus grosir = 1.200/plastik
Total Pemasukan Kotor = Rp. 12.000.000,-/ hari



Pengeluaran Bahan perhari meliputi:
- Kedelai 1 ton = Rp. 8.000.000,-
- Gas elpiji 3 kg @ Rp. 12.000/ tabung = 16 tabung x Rp.12.000,- = Rp. 192.000,-
- Plastik pembungkus @ Rp. 50,-/ lbr = 10.000 lbr x Rp. 50,- = Rp. 500.000,-



Pengeluaran Upah tukang (15 orang) meliputi:
-Tukang kemas 11 orang @ Rp. 50.000,-/ hari = Rp. 550.000,-
- Tenaga produksi 4 orang @ Rp. 50.000,-/ hari = Rp. 200.000,-
- Tukang Pembersihan kulit 1 orang @ Rp. 50.00/ hari = Rp. 75.000,-



Pengeluaran Biaya Angkutan per hari Surabaya & Sidoarjo meliputi:
-Kendaraan Mitsubishi L.300 (1 bh) bensin per hari = Rp. 150.000,-
-Upah sopir & kenek plus makan per hari = Rp. 350.000,-

TOTAL PENGELUARAN HARIAN = Rp. 10.017.000,-

TOTAL PENDAPATAN BERSIH SEHARI = ± Rp. 2.000.000,-

Perputaran Uang di Permukiman, Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan: Terdapat 100 KK dengan persentase 40% KK dengan pendapatan Rp. 300.000/ KK, 50% KK dengan pendapatan Rp. 200.000/ KK dan sisa 10% nya tidak menentu

PERPUTARAN PER HARI

400 kk x Rp. 300.000,-	= Rp. 120.000.000,-
500 kk x Rp. 200.000,-	= Rp. 100.000.000,-
TOTAL PERPUTARAN PER HARI	**= Rp. 220.000.000,-**
TOTAL PERPUTARAN PER BULAN	**= Rp. 6.600.000.000,-**

C. **Misi dan Strategi Pengembangan** Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan

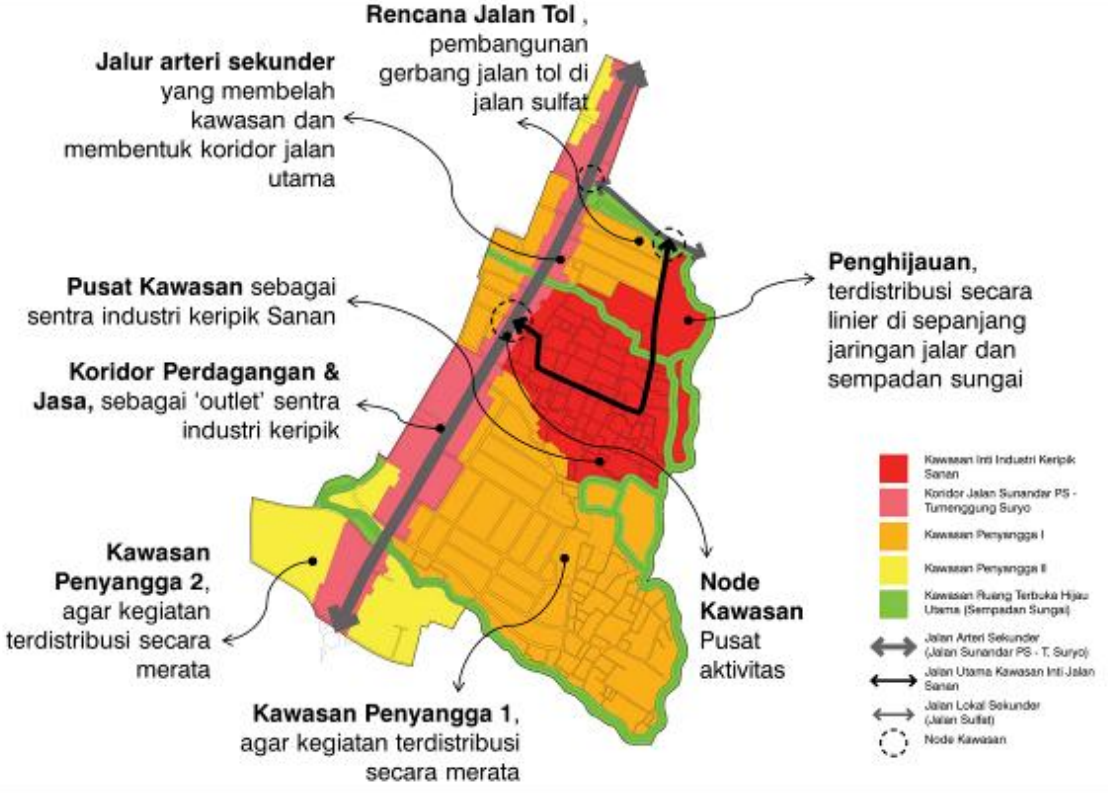




Gambar 7. Misi Pengembangan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan

D. **Analisis dan Konsep** Pengembangan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan

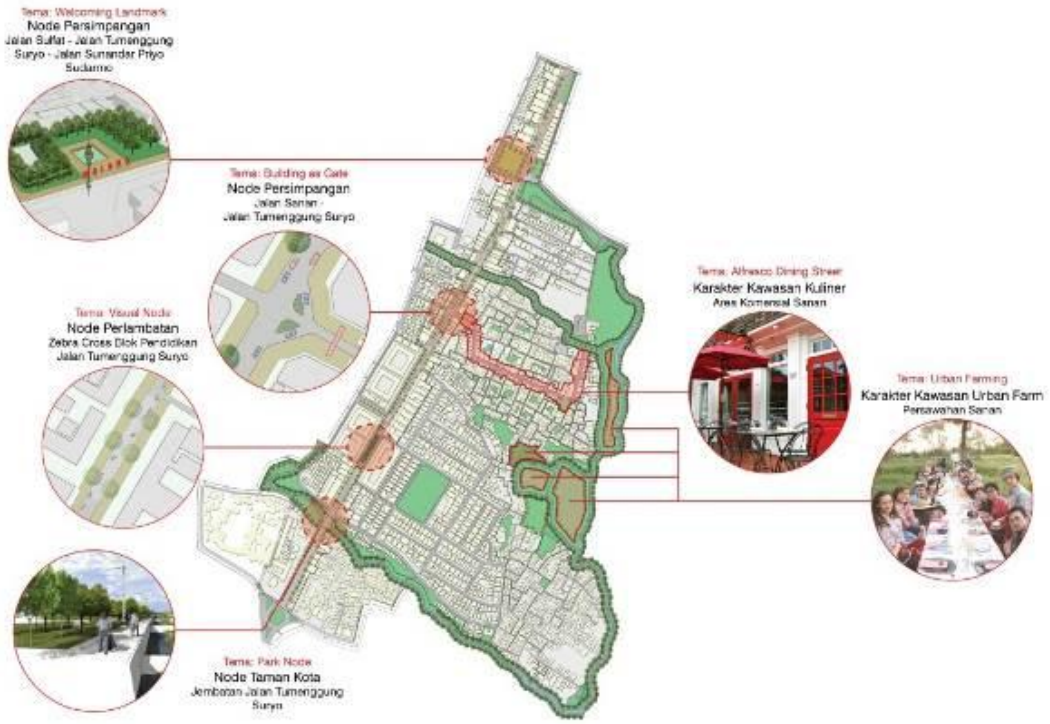
Konsep pengembangan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan merupakan implementasi konsep struktur dan pola ruang untuk pengembangan kawasan wisata berbasis gastronomi, sebagai berikut.



Gambar 8. Konsep Perancangan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan

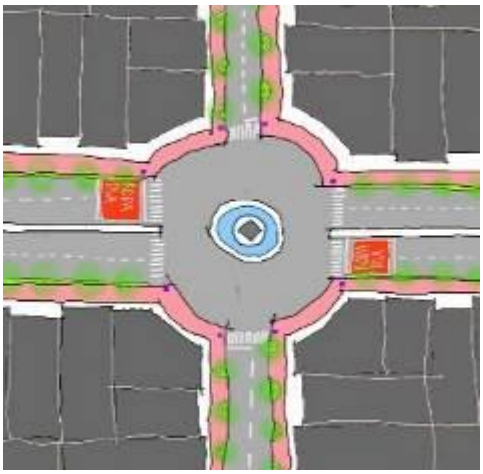
E. Analisis dan Konsep Tata Kualitas Lingkungan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan

Konsep pengembangan Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan sebagai aset pengembangan kawasan wisata gastronomi Meiputi: 1) Konsep Identitas Lingkungan; 2) Konsep Orientasi Lingkungan; dan 3) Wajah Jalan sebagai berikut.



F. Konsep Tata Bangunan (Jalan Sanan)

1. Menata bangunan untuk menciptakan node-node baru sebagai simpul pergerakan agar meningkatkan daya tarik kawasan wisata kuliner di Jalan Sanan



2. Menata bangunan untuk mempertahankan skala manusia dalam kawasan



3. Menata bangunan agar memiliki irama dan penekanan yang mendefinisikan blok koridor Sanan



G. **Konsep** Tata Bangunan (Permukiman 'Home Industry' Sanan)

1. Menata GSB, KDB, Ketinggian dan Garis Muka bangunan di Koridor Jalan Sanan





2. Menata bangunan untuk menciptakan ruang-ruang luar baru yang bisa berfungsi untuk ruang ekologis, ruang sosial, dan ruang berkumpul







3. Menata ulang blok dan kavling permukiman untuk menghilangkan kesan kumuh

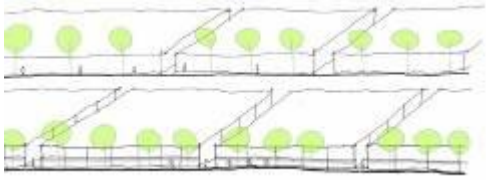


H. **Konsep** Tata Bangunan Jalan Tumenggung Suryo

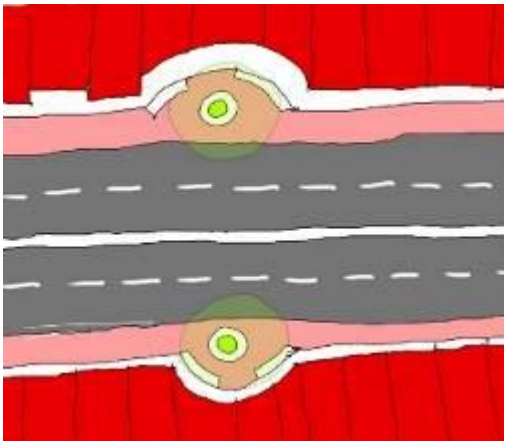
1. Memberi ciri khas tersendiri di sepanjang koridor Tumenggung Suryo, terutama di sekitar node-node baru



2. Menata bangunan sebagai pembatas untuk membuat jeda tiap interval blok untuk menciptakan ruang sirkulasi dan servis



3. Menata bangunan untuk menciptakan simpul pergerakan pada node-node baru untuk meningkatkan daya tarik kawasan wisata kuliner di Jalan Tumenggung Suryo
4. Menata GSB, KDB, Ketinggian dan Garis Muka Bangunan di Koridor Jalan Tumenggung Suryo



5. Mengatur jarak tiap interval bangunan untuk menciptakan ruang sirkulasi dan servis

I. **Konsep** Aksesibilitas dan Jalur Penghubung (Konsep '*Loop Trafic System*')
   1. Satu unit *loop systems* adalah satu blok kawasan dengan luasan tertentu (minimum 2 Ha) akan dikelilingi oleh jalur-jalur pergerakan kendaraan umum dan pribadi
   2. Pangaturan akses ke/ dari dalam kavling dapat terdistribusi dan tidak terkonsentrasi dari arah jalan utama
   3. Akses ke dalam kavling dari arah jalan utama dibatasi hanya untuk kegiatan *drop-off* saja

J. **Konsep** Parkir
   1. Parkir kendaraan pribadi tersebar di beberapa titik dan dibuat sebagai ruang terbuka hijau dan bisa dipakai untuk kegiatan lain yang bersifat temporer (parkir *off street* komersil)
   2. Penyediaan parkir pada daerah *drop-off* dibatasi maksimum 4 kendaraan
   3. Parkir dengan jangka waktu lama disediakan di pelataran belakang atau daerah dalam bangunan yang diakses melalui jalan lingkungan









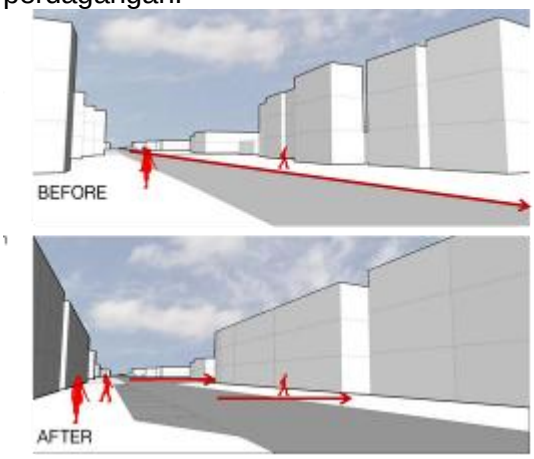
K. Konsep Pengembangan Potensi Wisata

Konsep sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari:
1) Konsep sistem sirkulasi kendaraan umum,
2) Konsep sistem sirkulasi kendaraan pribadi,
3) Konsep sistem pergerakan transit,
4) Konsep sistem pergerakan jalur servis/pelayanan,
5) Konsep sistem sirkulasi pejalan kaki, dan
6) Konsep sistem sirkulasi jalur sepeda serta jalur inspeksi.

Tujuan dari penataan sistem sirkulasi dan jalur penghubung Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan Kota Malang ini adalah tercapainya aksesibilitas yang memadai dari dan ke kawasan perencanaan yang menjadi bagian penting dari kawasan,

meliputi:

1) Konsep sirkulasi kendaraan yang baru dilengkapi dengan drop zona dan area parkir yang terintegrasi, dan
2) Pengembangan konsep pedestrian *ways* perlu direncanakan dengan tujuan agar setiap bangunan dari kawasan akan bisa dicapai dengan mudah dan perkembangan kawasan selanjutnya akan terkendali serta memberikan nilai tambah pada kawasan sebagai jalur wisata pejalan kaki di sekitar kawasan perdagangan.



KESIMPULAN

Kawasan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang apabila di tata dan ditunjang dengan kualitas lingkungan yang baik dapat sebagai aset pengembangan kawsan wisata gastronomi, yaitu kawasan dengan potensi makanan berbahan kedelai sebagai komodoti utama penarik pengunjung.

Oleh karena itu sebagai kawasan wisata beberapa hal perlu ditata ulang dengan konsep yang selaras dan sesuai misi dan strategi pengembangan kawasan sentra industri keripik sanan, meliputi: konsep tata bangunan, konsep aksesibilitas da jalur penghubung, konsep parkir, serta konsep pengembangan potensi wisata (titik-titik pendukung wisata gastronomi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Laporan Akhir Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal CIpta Karya Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Strategis Provinsi Jawa Timur.

Laporan Akhir Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Sentra Industri Keripik Sanan, Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur, PT. Studio Cilaki Empat Lima.

Website:

Dusun Sanan.
Diakses pada 2014, dari alamat http://desangasem.wordpress.com/dusun-sanan/

Geliat Kampung Penghasil Keripik Tempe di Malang.
Diakses pada 2014, dari alamat http://tempesanan.blogspot.com/2014/04/geliat-kampung-penghasil-kripik-tempe.htm

Keripik Tempe Khas Malang yang Terbaik tetap dari Sanan.
Diakses pada 2014, dari alamat http://tempesanan.blogspot.com/2014/03/keripik-tempe-khas-malang-yang-terbaik.html
Ketahanan Usaha Keripik Tempe Sanan Kota Malang dalam Menghadapi Melemahnya Kurs Rupiah.
Diakses pada 2014, dari alamat http://tempesanan.blogspot.com/2014/04/ketahanan-usaha-keripik-tempesanan.html
Manfaat Limbah Tempe.
Diakses pada 2014, dari alamat http://tempesanan.blogspot.com/2009/11/kandang-sapi.html
USDA Specialty Crop Block Grant Program State of Michigan Award to Michigan Grape and Wine Industry Council. Michigan Culinary Torism Alliance: Developing Michigan's Wine and Food Experiences as Contributors to Agriculture and Tourism Economies. This Article was download by: Washington State University Libraries on 27 November 2013 at 12:45. Publisher Routledge. Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954.
Ontario's Four-Year Culinary Torism Strategy and Action Plan 2011-2015. This Article was download by: Washington State University Libraries on 27 November 2013 at 12:45. Publisher Routledge. Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954.
Culinary (OR Gastronomic) Torism.
Best Management Practices in Culinary Torism. This Article was download by: Washington State University Libraries on 27 November 2013 at 12:45. Publisher Routledge. Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954.
Ontario Culinary Torism Alliance. This Article was download by: Washington State University Libraries on 27 November 2013 at 12:45. Publisher Routledge. Informa Ltd Registered in England and Wales Registered Number: 1072954.

Adat Istiadat Tunggu Tubang Sebagai Strategi dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Andryan Wikrawardana[1]

[1]*Staf Bappeda Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*
Email: andryan.wikra@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim merupakan wilayah di Kabupaten Muara Enim yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata berbasis pariwisata alam dan budaya. Akan tetapi hingga saat ini potensi pariwisata budaya dan alam tersebut belum dikembangkan secara optimal. Berbagai permasalahan klasik seperti aksesibilitas, minimnya infrastruktur, kurangnya partisipasi masyarakat hingga masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada menjadi kendala dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dan budaya di kawasan tersebut. Selain bentang alam yang indah, masyarakat Semende dalam kehidupan berkeluarga juga menerapkan sistem kekerabatan yang dikenal bernama "Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai" atau lebih dikenal dengan adat istiadat Tunggu Tubang. Penerapan adat istiadat Tunggu Tubang ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Penerapan adat istiadat Tunggu Tubang ini dapat dimanfaatkan sebagai strategi dalam mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata khususnya dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat, pelestarian budaya dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada.

Kata kunci: Pengembangan Pariwisata, Adat Istiadat Tunggu Tubang, Kabupaten Muara Enim

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dahulunya, masyarakat Semende di Kabupaten Muara Enim secara administratif berada dalam satu kecamatan, yaitu kecamatan Semendo yang terdiri dari Marga Semende Darat Laut, Marga Semende Darat Tengah dan Marga Semende Darat Ulu. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa setiap marga tersebut dipimpin oleh "Pesirah" yang dipilih secara langsung (Pajeri, 2012 : 99-100). Akan tetapi setelah dihapuskannya sistem pemerintahan marga maka eks pemerintahan marga-marga tersebut diintegrasikan dalam satu kecamatan induk dan dua kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Semendo, Kecamatan Pembantu Tanjung Raya dan Kecamatan Pembantu Aremantai. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2001, status kecamatan perwakilan tersebut berubah menjadi kecamatan (Kecamatan Semendo, Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Aremantai). Kemudian pada tahun 2002, nama kecamatan tersebut diubah kembali dan disesuaikan dengan marga yang ada di wilayah Semende Kabupaten Muara Enim yaitu Kecamatan Semendo menjadi Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Raya menjadi Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Aremantai menjadi Kecamatan Semende Darat Ulu.

Seperti halnya masyarakat daerah lainnya di Indonesia, masyakarat Semende yang berada di Kabupaten Muara Enim memiliki keragaman budaya yang khas seperti bahasa, kesenian, upacara perkawinan dsb. Masyarakat Semende dalam kehidupan berkeluarga juga menerapkan sistem kekerabatan yang dikenal bernama "Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai" atau lebih dikenal dengan adat istiadat Tunggu Tubang. Penerapan adat istiadat Tunggu Tubang ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya.

Selain memiliki kekhasan sosial budaya, secara geografis wilayah yang didiami oleh masyarakat Semende ini juga merupakan wilayah di Kabupaten Muara Enim yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata berbasis pariwisata alam. Akan tetapi kondisi pariwisata tersebut hingga saat ini belum dikembangkan secara optimal. Berbagai permasalahan klasik seperti aksesibilitas, minimnya infrastruktur, kurangnya partisipasi masyarakat hingga masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada menjadi kendala dalam upaya pengembangan sektor pariwisata dan budaya di kawasan tersebut.

B. Ruang Lingkup

Tulisan ini akan mengkaji mengenai apa yang dimaksud dengan Adat Istiadat Tunggu Tubang dalam Masyarakat Semende dan bagaimana penerapan adat istiadat Tunggu Tubang tersebut mampu menjadi strategi dalam mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata khususnya dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat, pelestarian budaya dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui strategi seperti apa yang dapat dirumuskan dalam mengoptimalkan pengembangan potensi pariwisata khususnya dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat, pelestarian budaya dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada. Dengan harapan, melalui strategi tersebut, potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu dapat tidak hanya memberikan dampak yang positif bagi dunia pariwisata Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia. Namun dapat menjadi faktor pendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat lokal yang memberikan nilai tambah ekonomi guna mensejahterakan masyarakat di kawasan Semende.

II. METODE

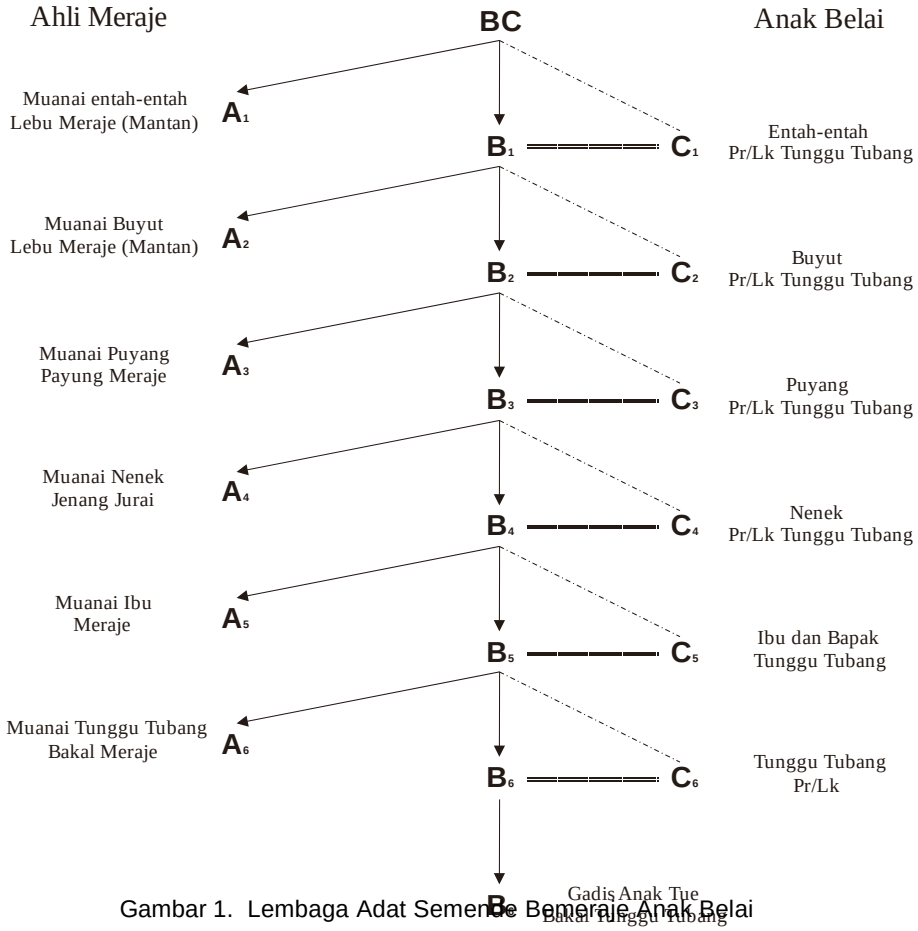
Pada dasarnya penulisan ini lebih bersifat deskriptif yang dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai fakta-fakta terkait. Berbagai temuan tersebut tidak hanya dideskripsikan, namun juga dianalisis serta diuraikan lebih lanjut sehingga dapat lebih mudah dipahami. Dalam proses penyusunan, penulis melakukan kajian pustaka terutama terhadap literatur-literatur terkait dengan objek penelitian. Untuk memperkuat hasil temuan, penulis juga melakukan observasi lapangan serta wawancara dengan berbagai narasumber.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tunggu Tubang dalam Sistem Kekerabatan Adat Semende

Dalam adat Semende terdapat sistem kekerabatan tersendiri. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam uraian mengenai adat semende yang disusun oleh Syekh Nurqadim Al-Baharudin bersama para sahabatnya (Abdur Ra'uf, 1989 : 28-30). Dalam ketetapan tersebut disepakati bahwa dalam kehidupan

berkeluarga ada sistem kekerabatan yang harus diterapkan. Sistem kekerabatan tersebut bernama "Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai". Sistem kekerabatan ini memiliki struktur tersendiri yang didalamnya juga terdapat jabatan khusus dengan peran beserta fungsinya masing-masing. Penerapan dari sistem kekerabatan ini juga dikenal sebagai adat *Bemeraje Anak Belai* dimana terdapat dua unsur yang sangat berkaitan erat, yaitu unsur *Tunggu Tubang* dan *Anak Belai* sebagai pihak yang dibimbing dan diawasi serta unsur *Meraje* yang bertugas menjadi pembimbing, pengasuh dan pengawas (Dzulfikriddin, 2001 : 4-5).



Gambar 1. Lembaga Adat Semende Bemeraje Anak Belai

Keterangan :

A_1-A_6	= Tingkat Kepemimpinan meraje	→	= Anak
B_1-B_7	= Tingkatan Tunggu Tubang	- - - - -	= Suami Istri
BC	= Suami Istri Tunggu Tubang	-·-·-·	= Menantu

Sumber : Abdur Ra'uf (1989 :30)

Adapun jabatan khusus yang memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam menjalankan sistem kekerabatan ini antara lain sebagai berikut :

1. Lebu Meraje, merupakan kakak atau adik laki-laki dari buyut Tunggu Tubang. Lebu Meraje memiliki kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi dalam segala hal, namun dalam penerapannya sangat jarang ditemui karena kebanyakan ketika baru sampai pada tingkatan Jenang Jurai mereka sudah meninggal dunia.

2. Payung Meraje atau Payung Jurai, adalah kakak atau adik dari puyang Tunggu Tubang. Payung Meraje memiliki tugas melindungi, mengasuh dan mengatur Jurai sesuai dengan ajaran agama dan adat.
3. Jenang Meraje atau Jenang Jurai, adalah kakak atau adik laki-laki dari nenek Tunggu Tubang. Tugas dari Jenang Meraje adalah memberi petunjuk yang telah digariskan oleh Payung Jurai kepada keluarga serta mengawasi keadaan Jurai sebagai bahan laporan kepada Payung Jurai.
4. Meraje, adalah kakak atau adik laki-laki dari ibu. Meraje memiliki tugas untuk terjun secara langsung dalam membimbing dan mengasuh seluruh anak belai beserta Tunggu Tubang agar selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan adat.
5. Tunggu Tubang, merupakan suatu jabatan bagi anak perempuan tertua dalam keluarga yang mempunyai tugas menjaga dan mengurus harta pusaka keluarga.

B. Tunggu Tubang, Sejarah dan Pengertiannya

Syamsul Hak dalam (Dzulfikriddin, 2001 : 36-37) mengemukakan bahwa Tunggu Tubang merupakan suatu jabatan di dalam struktur adat Semende. Biasanya jabatan tersebut ditugaskan kepada anak perempuan yang tertua. Adapun tugasnya adalah menjaga harta pusaka jurai (keluarga). Jika ditinjau berdasarkan arti kata, Tunggu Tubang terdiri dari dua kata yaitu Tunggu yang berarti menunggu/mendiami dan Tubang yang bermakna sebagai tempat atau wadah penyimpanan. "Tubang" dalam masyarakat Semende merupakan sebutan untuk bambu berbentuk tabung yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai macam bumbu dapur (terasi, asam jawa, dsb). Fungsi dari tubang sebagai wadah penyimpanan ini diadopsi menjadi semacam kiasan yang diartikan sebagai tempat atau wadah yang berfungsi untuk menghimpun keluarga besar (apit jurai). Istilah Tunggu Tubang digunakan untuk menyebut seseorang yang bertugas menunggu tempat dimana para keluarga besar (apit jurai) berkumpul. Berdasarkan kesepakatan adat, tugas ini diberikan kepada anak perempuan yang tertua.

Pada umumnya masyarakat Semende mempercayai bahwa Tunggu Tubang sudah ada sejak era awal berdirinya Semende. Secara historis, Tunggu Tubang sangat berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Semende. Hingga saat ini tidak diketahui secara pasti kapan istilah Tunggu Tubang mulai muncul dan diterapkan dalam masyarakat Semende. Sama halnya dengan sejarah Semende dan para pendirinya, minimnya catatan atau bukti sejarah pada masa tersebut membuat informasi yang didapatkan mengenai sejarah maupun definisi seseungguhnya dari Tunggu Tubang adalah informasi-informasi lisan yang berkembang masyarakat Semende yang diceritakan secara turun temurun.

Pajeri (2012, : 114-115) mengemukakan bahwa munculnya istilah Tunggu Tubang terjadi pada awal pendirian Semende. Ketika Puyang Awak (pendiri Semende) pertama kali mendiami daerah Semende ada empat orang pendatang yang menyusul beliau. Keempat orang ini juga memiliki keinginan untuk menetap di daerah tersebut. Adapun empat orang ini adalah Puyang Redia Sakti, Puyang Raja Ngekap, Puyang Nakanadin. Puyang Nuh Macan. Keempat puyang ini kemudian diangkat anak oleh Puyang Awak dan diberi gelar Awak Perhuli Empat. Diantara keempat orang puyang tersebut, Puyang Redia Sakti yang berasal dari Besemah merupakan seorang perempuan. Kemudian diceritakan bahwa empat orang ini mengadakan musyawarah untuk memberi nama wilayah yang akan mereka jadikan tempat untuk menetap. Dari hasil musyawarah tersebut, Puyang Redia Sakti mengusulkan tempat tersebut diberi nama "Same Endenye" yang berarti milik bersama dimana tanggung jawab, pengurusan dan pemeliharaannya secara bersama. Puyang Redia Sakti berkeinginan dengan nama "Same Ndenye" (milik bersama) , wilayah tempat mereka akan tinggal ini nantinya dapat diberikan kepada keturunan yang tetap, tidak boleh dijual atau dihabiskan. Dibalik usulan nama yang

akhirnya disepakati tersebut, Puyang Redia Sakti memiliki alasan yang kuat berdasarkan pengalaman beliau di daerah Besemah (tempat Puyang Redia Sakti berasal). Di daerah Puyang Redia Sakti berasal, daerah tempat mereka tinggal dikuasai oleh anak laki-laki dan boleh dijual ataupun dihabiskan.

Dari istilah "Same Ndenye" inilah kemudian empat puyang tersebut juga memusyawarahkan aturan serta tatanan kehidupan yang akan digunakan dalam kehidupan mereka di wilayah tersebut. Salah satu dari aturan tersebut ialah menetapkan anak perempuan tertua untuk mengurusi harta yang diawasi oleh saudara laki-laki yang kemudian disebut Tunggu Tubang. Harta yang dimaksud dalam ketetapan adalah sawah dan rumah. Dimulai dari era inilah aturan Tunggu Tubang ini diterapkan secara turun temurun hingga saat ini.

Dalam cerita lainnya mengenai sejarah Semende, istilah Tunggu Tubang terdapat dalam sistem kekerabatan adat Semende yang dinamakan "Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai". Sistem kekerabatan tersebut merupakan ketetapan hasil musyawarah Puyang Awak bersama sahabatnya yang pada saat itu membahas mengenai ajaran adat Semende. Dalam Abdur Ra'uf (1989 : 26-40) diceritakan bahwa dalam suatu kesempatan Syekh Nurqadim Al-Baharudin (Puyang Awak) bersama para sahabatnya melakukan sebuah musyawarah. Sebelum musyawarah dilaksanakan terlebih dahulu telah dilakukan penugasan kepada beberapa sahabat dari Puyang Awak untuk menuangkan pemikirannya dalam bidang-bidang tertentu. Hasil dari pemikiran-pemikiran tersebut menjadi bahan pembahasan dalam musyawarah yang pada saat itu dipimpin oleh Syekh Nurqadim Al-Baharudin (Puyang Awak). Hasil musyawarah disepakati ada lima hal yang dijadikan sebagai rukun semende yaitu "Tauhid Semende", "Adat Semende", "Adab Semende", "Tungguan Semende" dan "Bahasa-Tulisan Semende". Salah satu ketetapan musyawarah tersebut adalah mengenai "Adat Semende". Dalam ketetapan tersebut (bahwa kehidupan berkeluarga dalam adat semende terdapat sistem kekerabatan yang harus diterapkan. Sistem kekerabatan ini merupakan penyempurnaan dari Lembaga Adat Keluarge Jagat Besemah Lebar dan Lembaga Adat Minang Kabau. Sistem kekerabatan yang diterapkan tersebut bernama "Lembaga Adat Semende Meraje Anak Belai dimana terdapat dua unsur yang sangat berkaitan erat, yaitu Tunggu Tubang dan Anak Belai sebagai pihak yang dibimbing dan diawasi serta unsur Meraje yang bertugas menjadi pembimbing, pengasuh dan pengawas. Karena telah ditetapkan sebagai salah satu dari ajaran adat Semende maka seiring dengan berjalannya waktu sistem kekerabatan tersebut berjalan secara turun temurun hingga saat ini.

Didalam perkembangannya hingga saat ini, sangat sulit untuk mengetahui apa pengertian sesungguhnya dari Tunggu Tubang. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara di lapangan, penulis menemukan banyak pengertian serta pemahaman mengenai Tunggu Tubang. Secara garis besar penulis menggaris bawahi bahwa ada dua klasifikasi pemahaman dan pengertian mengenai Tunggu Tubang. Pertama, ada pendapat yang memaknai pengertian Tunggu Tubang sebagai orang (manusianya). Maksudnya, Tunggu Tubang dipahami sebagai orang (dalam hal ini adalah anak perempuan tertua) yang diberikan tanggung jawab dalam keluarga untuk menjaga serta mengurus harta peninggalan keluarga. Kedua, adalah pendapat yang memaknai pengertian Tunggu Tubang sebagai suatu sistem. Maksudnya, Tunggu Tubang adalah sistem kekerabatan adat Semende itu sendiri dimana terdapat jabatan-jabatan tertentu (seperti Payung Meraje, Jenang Meraje, Meraje, Tunggu Tubang) yang memiliki fungsi maupun tugas masing-masing.

Perbedaan pendapat dan pemahaman tersebut setidaknya telah dijembatani oleh pendapat Salmudin Pajeri (2011 : 64-65) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Waris Adat Tunggu Tubang". Dalam buku tersebut mengemukakan empat hal mengenai apa yang dimaksud dengan Tunggu Tubang. Pertama, Tunggu

Tubang merupakan salah satu fungsi kekeluargaan dalam adat Semende. Kedua, Tunggu Tubang adalah jabatan atau gelar yang diberikan kepada anak perempuan tertua yang berhak mewarisi harta peninggalan keluarga (sawah dan rumah) dan dalam menjalankannya terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan. Ketiga, Tunggu Tubang adalah tempat untuk menghimpun atau mengumpulkan keluarga besar. Keempat, Tunggu Tubang adalah jika dalam suatu keluarga terdapat dua hal, yaitu perangkat seperti payung jurai, jenang jurai, meraje, ahli atau lautan dan anak perempuan yang tertua selaku pemegang tunggu tubang) dan peraturan (kujur, kapak, jala, guci dan pauk).

C. Kewajiban, Hak dan Sifat Tunggu Tubang

Dalam penerapannya, Tunggu Tubang memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Pertama adalah Menjaga dan mengurus harta pusaka. Adapun harta pusaka yang dimaksud ialah rumah dan sawah. Menjaga serta mengurus rumah beserta sawah peninggalan keluarga ini menjadi tugas pokok Tunggu Tubang. Harta ini tidak boleh berkurang ataupun dirusak apalagi sampai digadaikan dan dijual. Adapun sawah Tunggu Tubang harus diusahakan dengan sebaik-baiknya untuk mencukupi kehidupan Tunggu Tubang dan keluarganya. Selain itu, dikarenakan Tunggu Tubang juga berfungsi sebagai tempat menghimpun keluarga besar, maka di tempat Tunggu Tubanglah apit jurai (keluarga besar) akan berkumpul. Kedua adalah Menjaga dan mengurusi orang tua beserta keluarga lainnya. Ketiga, menghormati Meraje selaku pihak mendidik serta mengasuh Tunggu Tubang, dan keempat adalah mentaati dan melaksanakan aturan adat. Selain diberi amanah untuk menjaga dan mengurus harta pusaka (rumah dan sawah), Tunggu Tubang diberikan hak untuk menguasai, memakai, menempati dan menikmati hasil dari harta peninggalan tersebut. Seperti halnya rumah, Tunggu Tubang diberikan hak untuk menempati rumah tersebut sebagai tempat tinggal keluarganya. Begitu pula dengan sawah dimana hasil dari pengolahan sawah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Tunggu Tubang.Hak untuk menguasai ini konteksnya adalah mengelola dan bukan hak untuk memperjualbelikan.

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Tunggu Tubang tentunya merupakan perwujudan dari adat Semende itu sendiri sehingga harus benar-benar menjiwai dan memahami aturan adat. Dalam adat Semende seorang Tunggu Tubang harus memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimaksud dalam Lambang Adat Semende. Adapun sifat-sifat tersebut dilambangkan melalui lima benda yang identik dengan kehidupan sosial masyarakat mende yaitu sebagai sebagai berikut ; a). Jale atau jala merupakan alat untuk menangkap ikan. Dalam adat Semende, filosofis jale ini merupakan lambang persatuan dan kesatuan masyarakat Semende. Karena pada hakikatnya Tunggu Tubang merupakan pusat utama tempat kembali dan berkumpulnya para apit jurai (keluarga besar), maka sudah sepatutnya seorang Tunggu Tubang memiliki sifat seperti pusat jale tersebut. b). Kujur merupakan sebuah tombak kecil. Dalam adat Semende, kujur merupakan lambang kewibawaan, kesetiaan, kejujuran juga keikhlasan. Tunggu Tubang harus bersifat seperti yang dilambangkan oleh kujur dalam adat Semende. Tunggu Tubang harus memiliki kesetiaan dan kepatuhan terhadap orang tua dan para ahli meraje. c). Kapak/Kampak merupakan alat untuk memotong kayu yang memiliki dua sisi yang sama tajam. Dalam adat Semende, Tunggu Tubang harus memiliki sifat seperti filosofi kapak. Fungsinya sebagai alat untuk bekerja dimaknai dengan sifat Tunggu Tubang yang harus mampu bekerja keras untuk memberi kemanfaatan bagi apit jurai (keluarga besar). d). Guci merupakan tempat penyimpanan yang dalam adat Semende melambangkan keanggunan, kesabaran dan kerahasiaan. Pada prinsipnya, apapun yang berada dalam guci apakah itu makanan, sesuatu yang manis, pahit, asin bahkan busuk sekalipun, orang lain tidak akan pernah tahu.

Seorang Tunggu Tubang harus memiliki sifat seperti dilambangkan oleh guci. Terkadang dalam kehidupan keluarga besar terdapat beragam permasalahan, perselisihan, keburukan atau rahasia tertentu. Sebagai seseorang yang diberikan amanah menjadi Tunggu Tubang maka harus mampu menyimpan rapat-rapat semua hal tersebut agar tidak diketahui oleh orang luar sehingga tidak menjadi bahan pergunjingan orang. e). Pauk (Kolam) yang penuh airnya. Pauk yang penuh airnya melambangkan keindahan dan ketenangan. Tunggu Tubang harus memiliki pribadi seperti yang lambangkan oleh pauk tersebut, yakni dalam menghadapi segala permasalahan, harus tetap tenang, sabar dan tidak mudah mengeluh seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

D. Manfaat Penerapan Adat Tunggu Tubang Dalam Pengembangan Pariwisata dan Tantangannya dalam Era Kekinian

Pada dasarnya, kawasan Semende cukup potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata berbasis pariwisata alam. Akan tetapi kondisi pariwisata tersebut hingga saat ini belum dikembangkan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan sinergi berbagai pihak. Pemerintah Daerah melalui dinas teknis terkait bertanggung jawab untuk menyelesakan permasalahan seperti aksesibilitas dan minimnya infrastruktur yang ada. Sedangkan untuk meningkatkan nilai jual kawasan maka diperlukan peran serta masyarakat terutama untuk pelestarian budaya dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada.

Penerapan adat Tunggu Tubang dalam masyarakat Semende akan memiliki dampak yang cukup positif dalam mengoptimalkan pengembangan pariwsata di kawasan tersebut. **Pertama, Adat Tunggu Tubang mengandung nilai-nilai luhur serta budi pekerti yang sangat tinggi.** Dalam penerapannya, sikap saling menghargai, menghormati, tolong menolong, gotong royong, mengayomi, menyayangi, kesopanan dan kesantunan dalam etika kehidupan sangat dijunjung tinggi. Apabila adat Tunggu Tubang benar-benar diterapkan dan dijiwai sepenuh hati oleh masyarakat Semende tentu akan melahirkan tatanan kehidupan sosial individu, keluarga serta masyarakat yang positif. Tatanan sosial masyarakat yang kondusif tentunya akan memudahkan implementasi program pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata yang ada. Selain itu, keramahan masyarakat lokal akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat luar berwisata di kawasan Semende ini.

Kedua, dalam penerapan "Tunggu Tubang" bahwa harta Tunggu Tubang (sawah dan rumah) tidak boleh untuk dijual. Prinsip seperti dijalankan dengan penuh keteguhan di masyarakat Semende. Penerapan "Tunggu Tubang" terutama kaitannya dengan larangan untuk menjual sawah dan rumah "Tunggu Tubang" menjadi salah satu faktor utama kawasan pertanian di Semende tetap berkelanjutan. Begitu juga dengan kawasan pemukiman yang hingga saat ini mayoritas masih dihuni oleh penduduk lokal. Kebanyakan areal persawahan di Semende merupakan harta Tunggu Tubang yang telah diwariskan turun temurun dalam keluarga. Selain memang secara adat ada larangan untuk menjual harta Tunggu Tubang, sawah-sawah tersebut memang masih digunakan sebagai mata pencaharian utama di Semende. Kondisi ini akan menjadi instrumen yang membantu menjaga kelestarian alam yang menjadi nilai jual pariwisata alam di kawasan Semende.

Ketiga, ada banyak hal dalam adat Semende yang khas, unik dan menarik seperti adat Pernikahan Tunggu Tubang, tari-tarian maupun kesenian tradisional lainnya. Kekhasan dan keunikan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi orang luar Semende untuk dapat menyaksikannya secara langsung. Kondisi seperti ini

tentunya akan menciptakan peluang untuk menjadikan acara-acara adat tersebut sebagai objek wisata budaya wisatawan lokal maupun mancanegara.

Meskipun banyak sisi positif dalam penerapannya, Adat Tungggu Tubang dewasa ini di masyarakat Semende menghadapi tantangan yang cukup berat. Apabila tantangan tersebut tidak dikelola dengan bijaksana maka dapat mengancam eksistensi serta keberlanjutan Adat Tunggu Tubang di masa depan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Adat Tunggu Tubang mengandung nilai-nilai luhur serta budi pekerti yang sangat tinggi. Namun demikian, kondisi sosial masyarakat saat ini memiliki pengaruh terhadap munculnya dinamika dalam penerapan Tunggu Tubang. Perkembangan zaman membuat masyarakat cenderung tidak lagi memahami adat Semende secara komprehensif. Dahulunya, pemahaman masyarakat yang tinggi terhadap adat melahirkan mekanisme kontrol sosial. Kesadaran terhadap hakikat ajaran agama dan adat membuat mekanisme seperti ini berjalan dengan sendirinya. Akan tetapi, perkembangan zaman membuat masyarakat saat ini menjadi cenderung individualis dan acuh tak acuh. Berkembangnya sifat masyarakat seperti ini membuat masyarakat menjadi permisif terhadap hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai luhur adat Semende.

Saat ini penerapannya di masyarakat mulai memudar. Begitu pula dengan pemahaman mengenai kedudukan Tunggu Tubang dalam kehidupan keluarga dimana saat ini banyak generasi muda hanya mengetahui Tunggu Tubang sebatas istilah semata namun makna filosofis dan hakikat dari Tunggu Tubang tersebut tidak dipahami. Dikhawatirkan, kondisi masyarakat yang permisif kedepannya akan membuat situasi dimana seorang Tunggu Tubang yang tidak menjalankan kewajibannya menjadi hal yang biasa saja terutama dikaitkan dengan konteks perkembangan zaman. Kondisi ini tentunya akan mengancam tatanan sosial masyarakat Semende yang selama ini dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan budi pekerti berdasarkan Adat Semende yang telah diwariskan secara turun temurun.

Selain tantangan dinamika kehidupan sosial masyarakat yang terancam perubahan zaman, Hasanah (2008) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa saat ini terjadi perubahan makna dan nilai dalam adat Tunggu Tubang. Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan peran serta fungsi Tunggu Tubang dalam kekerabatan adat Semende. Seperti yang telah diketahui bahwa Tunggu Tubang memiliki peranan sebagai pengemban amanah keluarga besar untuk mengurus harta warisan keluarga serta tempat berkumpulnya keluarga besar. Akan tetapi saat ini banyak Tunggu Tubang yang tidak lagi menjalankan peranan tersebut. Banyak diantara Tunggu Tubang dalam keluarga pergi merantau untuk menuntut ilmu atau bekerja di luar daerah. Seringkali dalam perantauan mereka mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik sehingga tidak lagi menetap di Semende untuk mengurus harta Tunggu Tubang. Kerap terjadi situasi dimana tidak ada sama sekali keluarga yang mengurusnya sehingga harta Tunggu Tubang menjadi terbengkalai.

E. Adat Tunggu Tubang Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata

Dinamika yang terjadi di era kekinian terkait dengan penerapan Adat Istiadat Tunggu Tubang perlu upaya preventif serta langkah-langkah strategis sehingga eksistensinya dapat berkelanjutan guna menunjang pengembangan sektor pariwisata di kawasan Semende. Terkait dengan penerapan Adat Tunggu Tubang sebagai strategi dalam pengembangan sektor pariwisata di wilayah Semende (Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Tengah dan Kecamatan Semende Darat Ulu), penulis mengklasifikasikan upaya tersebut menjadi dua hal yaitu upaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta

upaya yang menjadi tanggung jawab masyarakat.

Terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk menjaga eksistensi penerapan Adat Tunggu Tubang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai suatu strategi mengembangkan sektor pariwisata yang ada di wilayah tersebut. Adapun kebijakan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Menetapkan Adat Tunggu Tubang sebagai salah satu kearifan lokal Kabupaten Muara Enim yang harus dilestarikan melalui peraturan daerah. Dengan ditetapkan melalui peraturan daerah akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim untuk melakukan upaya pelestarian dalam menjaga keberlanjutan penerapan Adat Istiadat Tunggu Tubang. Selama ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Marga. Namun Perda tersebut hanya mengatur mengenai Lembaga Adat beserta Pemangku Adat masing-masing marga di Kabupaten Muara Enim yang saat ini berjumlah 25 Lembaga Adat Marga (termasuk didalamnya Lembaga Adat Marga Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu). Meskipun demikian, dengan adanya peraturan daerah khusus mengenai Adat Istiadat Tunggu Tubang beserta produk budaya turunannya seperti rumah adat, tarian, tradisi pernikahan, dsb tentunya akan lebih mengoptimalkan upaya pelestarian kedepannya.
b. Menerapkan mekanisme Insentif dan Disinsentif. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam Adat Tunggu Tubang yang diterapkan masyarakat Semende terdapat harta pusaka keluarga yang diwariskan secara turun temurun yaitu rumah dan sawah. Rumah Tunggu Tubang tersebut memiliki arsitektural yang khas yang memiliki nilai jual sebagai objek pariwisata yang perlu dilestarikan. Akan tetapi, dampak modernisasi hingga banyaknya Tunggu Tubang yang tidak mengurus rumah peninggalan tersebut membuat eksistensi Rumah Tunggu Tubang tersebut terancam. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dapat menanggulangi permasalahan ini dengan menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif. Insentif berupa keringanan pajak, bantuan dana perawatan dan perbaikan dapat diberikan kepada Tunggu Tubang untuk menjaga agar rumah pusaka warisan keluarga tersebut tetap memiliki kekhasan arsitekturalnya. Hal tersebut juga dapat dilakukan terhadap sawah Tunggu Tubang. Selain menjadi sumber pendapatan keluarga Tunggu Tubang, keberadaan sawah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu objek wisata berbasis pertanian. Namun keterbatasan modal seringkali membuat banyak sawah Tunggu Tubang di wilayah Semende tidak produktif ataupun memiliki hasil pertanian seadanya. Terhadap keluarga Tunggu Tubang yang tetap menjaga sawah Tunggu Tubang tersebut dapat pula diberikan insentif berupa bantuan pupuk, bibit hingga pendampingan pasca panen. Sedangkan mekanisme disinsentif dapat diberikan untuk kegiatan konversi lahan pertanian yang berstatus sawah Tunggu Tubang. Tidak hanya terbatas pada rumah dan sawah Tunggu Tubang, pemberian insentif juga dapat diberikan kepada keluarga Tunggu Tubang yang tetap menerapkan adat perkawinan Tunggu Tubang dalam pesta pernikahannya.
c. Memfasilitasi promosi Adat Tunggu Tubang maupun pemasaran produk-produk hasil kreasi masyarakat Semende melalui even-even Nasional dan Internasional.

Tentunya upaya Pemerintah Daerah seperti yang telah dijelaskan di atas tidak dapat berjalan secara optimal tanpa peran serta masyarakat dalam pelaksanannya. Untuk mengembangkan sektor pariwisata di wilayah Semende beberapa upaya

yang harus dilakukan oleh masyarakat antara lain sebagai berikut :

a. Optimalisasi peran Lembaga Adat Marga. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Marga dan Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 49/KPTS/BPMPD/2016 telah ditetapkan Pengurus Lembaga Pemangku Adat Marga dalam Kabupaten Muara Enim Periode Tahun 2016-2012. Untuk wilayah Semende terdapat tiga Lembaga Pemangku Adat Marga yaitu, Lembaga Pemangku Adat Marga Semende Darat Laut, Lembaga Adat Marga Semende Darat Tengah dan Lembaga Pemangku Adat Marga Semende Darat Ulu. Adapun tugas dari lembaga pemangku adat marga ini adalah untuk melakukaan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat serta pemberdayaan masyarakat hukum adat. Lembaga Pemangku Adat Marga ini juga diberikan honorarium melalui APBD Kabupaten Muara Enim. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan kondisi di lapangan, peran lembaga pemangku adat marga ini belum begitu terlihat dan dimanfaatkan dengan baik terutama dalam pengembangan potensi sektor pariwisata di wilayah Semende. Tentunya peran dari lembaga pemangku adat marga khususnya di wilayah Semende ini harus lebih dioptimalkan terutama dalam melakukan pendidikan terkait adat istiadat Tunggu Tubang bagi generasi muda, promosi Adat Istiadat untuk eksternal Kabupaten Muara Enim serta melakukan fungsi kontrol sosial terhadap penerapan adat istiadat di wilayah Semende.
b. Konsistensi dan Komitmen dalam menerapkan Adat Istiadat Tunggu Tubang. Penerapan Adat Tunggu Tubang hanya akan menjadi retorika jika hanya dilaksanakan ditataran elit Pemerintah Daerah beserta Lembaga Pemangku Adat Marga. Konsistensi dan komitmen dari masyarakat Semende adalah kunci utama dalam menerapkan dan melestarikan Adat Istiadat Tunggu Tubang.
c. Berpikir visioner, kreatif dan inovatif. Meskipun dituntut untuk menjaga tradisi dan adat istiadat tidak menghalangi masyarakat Semende untuk berpikir maju. Sektor pariwisata yang akan dikembangkan potensinya merupakan sektor industri kreatif yang akan berhasil jika ditopang masyarakatnya yang visioner dan inovatif. Selain tradisi beserta adat istiadat yang dilestarikan, untuk menambah nilai jual pariwisata yang ada maka masyarakat Semende harus mampu berpikir kreatif untuk menghasilkan produk wisata yang menarik minat wisatawan untuk datang ke Semende secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berbagai manfaat dari penerapan Adat Tunggu Tubang dalam upaya mengoptimalkan pengembangan pariwisata di kawasan Semende tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim beserta semua stakeholder terkait. Berbagai kebijakan Pemerintah Daerah dapat diselaraskan dengan keberadaan adat Tunggu Tubang dalam masyarakat Semende Kabupaten Muara Enim. Upaya menjaga kelestarian adat Semende seperti Tunggu Tubang, adat perkawinan Tunggu Tubang serta kesenian tradisional khas Semende lainnya apabila dikolaborasikan pengembangannya dengan pembangunan infrastrukur pariwisata yang memadai, dapat menjadikan Semende sebagai salah satu daerah tujuan wisata budaya di Sumatera Selatan. Hanya saja penerapan saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Apabila tantangan tersebut tidak dikelola dengan bijaksana maka dapat mengancam eksistensi serta keberlanjutan adat Tunggu Tubang di masa depan. Maka dari itu, berbagai pihak terkait seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, para tokoh Lembaga Adat Semende dan masyarakat Semende perlu merumuskan

langkah-langkah strategis untuk melestarikan adat Semende. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka seiring berjalan waktu, berbagai macam adat maupun kearifan lokal yang ada akan hilang dan hanya menjadi catatan sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ra'uf, T. (1989). *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang Jilid 1 & 2*, Pustaka Dzu-Mirrah Yayasan Nurqadim, Palembang.

Djasurah & Halim, A. (2010). *Adat Perkawinan "Tunggu Tubang" Suku Bangsa Semende di Sumatera Selatan*, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.

Dzulfikriddin. (2001). *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, Pustaka Auliya, Palembang.

Hasanah, S.M. (2008). Sejarah Perubahan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan dan Makna Pendidikannya, *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

Pajeri, Salmudin (2011). *Hukum Waris Adat Tunggu Tubang,* Idea Press, Yogyakarta.

Pajeri, Salmudin, (2012). *Hukum Waris Adat "Pengurusan Sawah Tunggu Tubang dalam Dinamika Pranata danKelembagaan Hukum Waris Adat Daerah Semende Kabupaten Muara Enim",* Idea Press, Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim, (2002). *Laporan Penelitian Adat Istiadat Masyarakat Semende di Kabupaten Muara Enim*.

Preferensi Dan Motivasi Perjalanan Wisatawan Mancanegara Di Kota Makassar

Asni Amaliah Nuchri,Bakti Setiawan, dan Ardhya Nareswari
Konsentrasi Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata, Program Studi Teknik Arsitektur,
Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta
E-mail: amaliahnuchri@gmail.com, asni.amaliah.n@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi dan motivasi wisatawan mancanegara dalam berkunjung ke Kota Makassar serta untuk mengetahui hubungan antara preferensi dan motivasinya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar, mengacu kepada preferensi dan motivasi wisatawan mancanegara yang telah mengunjungi dan menggunakan komponen–komponen wisata di kota ini.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Motivasi perjalanan wisatawan mancanegara memiliki hubungan yang signifikan dengan preferensi wisatawan terhadap pilihan moda transportasi, jenis akomodasi, jenis makanan, dan kegiatan bersantai atau berwisatanya, (2) Motivasi yang paling mempengaruhi wisatawan mancanegara dalam berkunjung ke Kota Makassar adalah motivasi untuk melihat pemandangan terkenal yang mengindikasikan bahwa Kota Makassar sudah memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, (3) Karakteristik wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Makassar berdasarkan negara asal diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu Pasar Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Terdapat beragam negara asal yang terjaring sebagai responden dalam penelitian ini yaitu Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, Filipina, Inggris, Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, finlandia, Turki, Afrika Selatan, Libia, dan Amerika Serikat. Beragamnya negara asal wisatawan mancanegara ini menjadi fenomena positif dalam upaya menargetkan calon wisatawan baru maupun kunjungan ulang dan mendukung Visi Kota Makassar menuju Kota Dunia 2022.

Kata kunci: preferensi wisatawan, motivasi perjalanan, komponen pariwisata, wisatawan mancanegara.

I. PENDAHULUAN

Kota Makassar dan sekitarnya merupakan salah satu dari 222 penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang dilampirkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011. Sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata yang menjadi *centre point*wilayah barat dan timur Indonesia, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan ini diharapkan mampu menjadi daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata yang merupakan sebuah kawasan geografis yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas (fasilitas umum dan fasilitas pariwisata), dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan).

Penetapan Kota Makassar sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional di Indonesia menunjukkan bahwa kota ini mulai diperhitungkan keberadaannya dalam hal penyelenggaraan kegiatan pariwisata untuk menerima kunjungan dari beragam jenis wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Hal ini mulai terlihat pada tahun 2010, dimana Kota Makassar terpilih sebagai kota terbaik dalam layanan wisata dan tujuan wisata favorit dalam ajang Indonesia Tourism Award (ITA) 2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bersama Majalah SWA.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Makassar cenderung meningkat setiap tahunnya sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar yaitu "Makassar Menuju Kota Dunia 2022", sehingga dari sisi kepariwisataan, ketersediaan dan kelengkapan komponen – komponen pembentuk destinasi pariwisata di dalam kota ini (seperti daya tarik wisata/ atraksi, aksesibilitas, amenitas/ fasilitas penunjang wisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan) diharapkan mampu menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik dari masing – masing komponen pembentuk destinasi pariwisata tersebut agar dapat memperkuat posisi destinasi yang juga dikenal dengan sebutan "Kota Daeng" ini di dalam kepariwisataan nasional.

Penelitian yang dilakukan dengan mengambil responden wisatawan mancanegara diharapkan mampu memperjelas posisi Kota Makassar sebagai tren tujuan wisata seiring dengan daya saing kota – kota maupun tujuan wisata sekitar yang lebih tinggi dalam lingkup internasional, terlepas dari upaya untuk tetap mempertahankan kestabilan jumlah kunjungan wisatawan nusantara juga. Selain untuk memperoleh informasi umum mengenai preferensi dan motivasi perjalanan wisatawan mancanegara, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara preferensi dan motivasi perjalanan wisatawanmancanegara dalam memilih Kota Makassar sebagai pilihan tujuan wisata mereka yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk dan pemasaran, dimana pendekatan pemasaran pariwisata modern yang berpegang pada pemahaman terhadap keinginan sebenarnya dari wisatawan, berdasarkan maksud perjalanan wisatanya sehingga nantinya diharapkan akan mendapatkan rekomendasi berupa program pengembangan produk wisata yang efisien dan tepat guna karena disesuaikan pada selera pasar wisatawan mancanegara.

II. METODE

A. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma rasionalistik..

B. Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang diperlukan adalah data mengenai profil dan karakteristik sosio-demografis wisatawan mancanegara serta preferensi berwisata wisatawan yang terdiri dari pengenalan terhadap obyek yang ada serta faktor yang memotivasi kunjungannya ke Kota Makassar. Sedangkan data sekunder yang diperlukan terkait jumlah kunjungan wisatawan serta data mengenai kondisi umum lokasi penelitian.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wisatawan mancanegara, baik wisatawan aktual yang sedang berada di lokasi maupun wisatawan potensial yang pernah dan berpotensi melakukan kunjungan kembali ke Kota Makassar.Kriteria responden minimal berusia 18 tahun, didasarkan atas asumsi bahwa responden sudah mandiri dalam memberikan jawaban karena dianggap dewasa dan telah memahami dalam menentukan perjalanan wisatanya.Langkah pengambilan sampel dilakukan dengan pembagian kuesioner secara langsung dan penggunaan metode *Web-based questionnaire*.

D. Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan jumlah sampel untuk responden pengunjung dilakukan sesuai dengan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Slovin (1990) dalam Kusmayadi (2000 : 74) dengan *margin error* yang diperkenankan berkisar antara 5 – 10% dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \qquad n= 109/1+109(10\%)^2 = 52.27 = 52$$

Keterangan :n = ukuran sampel yang dibutuhkan
N = populasi
e = margin error yang diperkenankan (5 – 10%)

Adapun jumlah populasi yang digunakan adalah populasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2014, yaitu sebanyaksebanyak 109, dengan tingkat kesalahan hingga 10% diketahui jumlah sampel yang mewakili adalah 52 responden (pembulatan).Metode pengambilan sampel untuk responden (wisman) adalah secara acak (random) dengan alasan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel.

E. Variabel Penelitian

Tabel 1. Bagian I: Profil Umum Wisatawan Mancanegara

Parameter	Variabel	Indikator	Jumlah Item	Sumber
Segmentasi Wisatawan Mancanegara	Negara Asal	Negara tempat tinggal responden (wisman)		Kotler & Armstrong (2004),
	Jenis Kelamin	Pria atau wanita		Variabel segmentasi demografis, psikografis, sosial-ekonomi
	Usia	18 tahun ke atas		
	Pendidikan	Senior High School Diploma Bachelor Master Doctor	6	Smith (1989) dalam Walyono (2006)
	Pekerjaan	Student Private employee Civil Servant Other.....		

Tabel 2. Bagian II: Karakteristik Perjalanan Wisatawan Mancanegara

Variabel	Indikator	Sumber
Travel Expenditure **(Pengeluaran Perjalanan)**	Less than 100 $, 100-300 $, 301-500 $, 501-1000 $, more than 1000 $	Davidson et al (2010)
Information Search **(Pencarian Informasi)**	Internet, guide books, advice from family, Tour operator, Travel brochures, newspaper/magazines, Other	
Planning in advance **(Lama perencanaan perjalanan)**	Within one week 2-4 weeks 1-3 months 3-6 months More than 6 months	
Trip duration **(Lama perjalanan)**	Day visit (less than 24 hours) 1-3 nights 4-6 nights 1-2 weeks More than 2 weeks	Adaptasi dari Smith, 1989 dalam Sunaryo, 2013:12
Typical trip companion **(teman perjalanan)**	Yourself Friends/ Relatives Family Other	Adaptasi dari Smith, 1989 dalam Sunaryo, 2013:12

Tabel 3.Bagian III & IV: Preferensi dan Motivasi Perjalanan

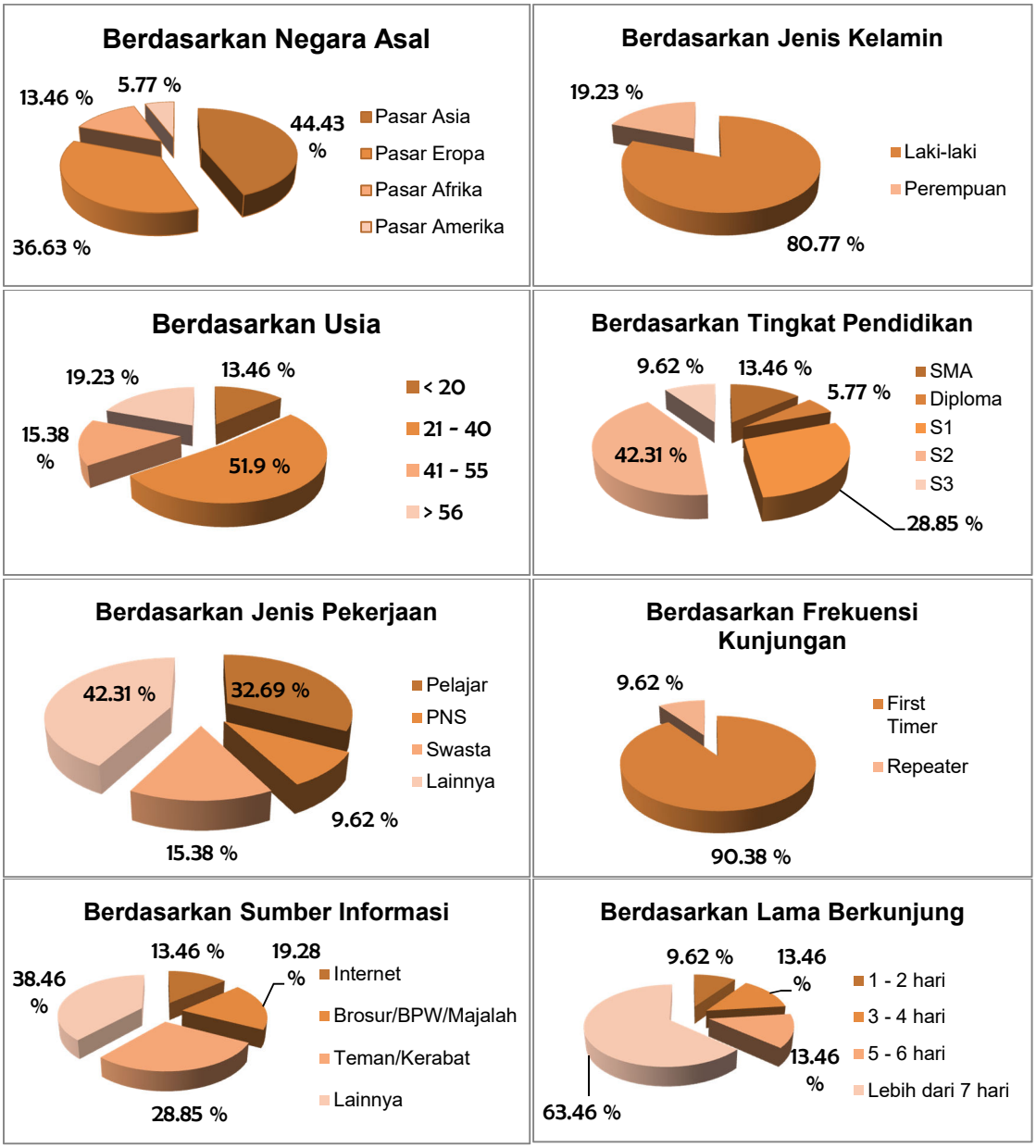
Variabel	Item Pertanyaan	Jumlah item	Sumber
Preferensi perjalanan (akomodasi, moda transportasi, jenis makanan, and leisure activities **Likert scale from never (1) to almost always (5)**	**Accomodation** Hotel/motel, Home of friends/relatives, Hostel/dorm, Campground, Homestay/guesthouse, Self-catering accomodation (apartment, cottage)	6	Field (1999), Shoham et al (2004)
	Mode of Transport Motorcycle, Car (rented and private), Bus, Van, Train, Airplane, Boat/ship	7	Field (1999), Shoham et al (2004) Adaptasi dari Smith, 1989 dalam Sunaryo, 2013:12
	Food Preferences Formal restaurants, International fastfood (e.g McD, KFC), Local style, Self prepared (cooking), Convenience stores (7-eleven, Alfamart, Indomaret), Supermarket (e.g carrefour, hero)	6	Field (1999), Shoham et al (2004)
	Leisure activity Visiting historical monuments and cultural sites; Taking pctures/photos; City sightseeing; Hanging out on the beach (e.g sunbathing); Shopping for pleasure, buy arts/crafts/souvenirs /gifts; Nightlife and entertainment (e.g clubs, bar, dancing); Visiting place with beautiful scenery and landscapes; Trekking, hiking, climbing; Visiting museums and theatres; Attending festivals and events (e.g music, arts, film); Trying local foods and drinks; Doing sports/physical activities (e.g surfing, diving, snorkeling, skiing)	12	
Travel motivation **Likert scale, from not important at all (1) to highly important (5)**	To discover new things/places To see famous sights To experience new culture and history To learn new things/increase knowledge To relax after my studies To have fun and be entertained To escape from everyday routine To do things with my friends, relatives, and family To visit my friends, relatives, or family To visit a place recomended by	14	Pitana (2005), Faktor Pendorong dan Penarik perjalanan wisata McIntosh (1977), Pengelompokan motivasi Perjalanan wisata

friends
To do things the locals do
To interact with local residents
To do outdoor/sports activity
To meet new people and the locals

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Identifikasi Karakteristik Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar*

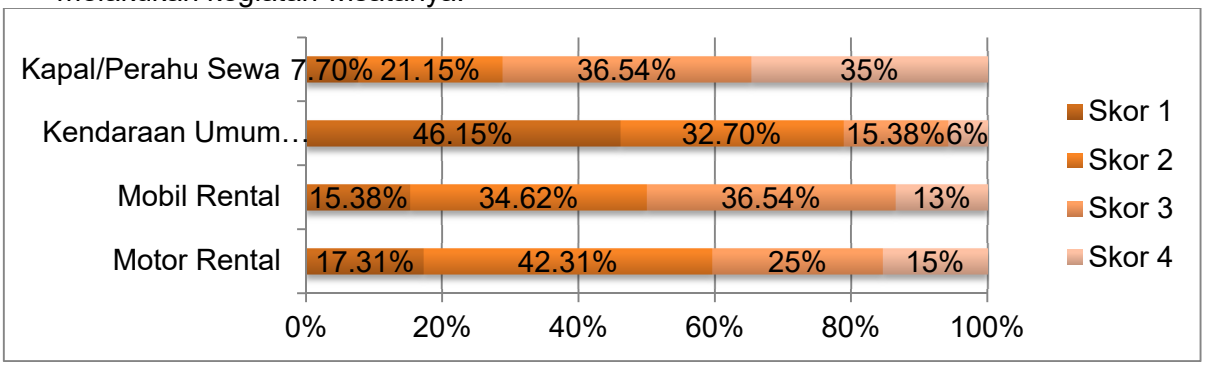
Hasil identifikasi karakteristik wisatawan mancanegara diperoleh dari data primer yang dihimpun dari pembagian kuesioner penelitian, dimana indikatornya diturunkan berdasarkan variabel penelitian yang dirumuskan dari teori-teori terkait. Berikut adalah diagram *pie chart*hasil kuesioner peneliti (2017):



B. *Analisis Preferensi Perjalanan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar*

1. Preferensi Perjalanan Wisatawan Mancanegara terhadap Moda Transportasi

Berdasarkan diagram batang (*bar chart*) yang digambarkan di bawah, maka dapat diketahui beberapa hal terkait keragaman moda transportasi yang dapat menjadi pilihan wisatawan mancanegara selama melakukan kegiatan wisata di Kota Makassar, yaitu sebagai berikut. Dari keragaman pilihan moda transportasi pendukung kegiatan kunjungan wisatanya secara keseluruhan memperlihatkan adanya perbedaan yang tidak terlalu jauh antara pemberian skor positif dan skor negatif oleh wisatawan mancanegara yang menjadi responden dalam penelitian ini. Penggunaan motor dan mobil rental sebagai sarana transportasi yang sering digunakan oleh wisatawan mancanegara berada di rentang skor yang cukup baik, menunjukkan bahwa mobil dan motor sewaan masih menjadi sarana transportasi pilihan utama yang paling sering digunakan oleh wisatawan mancanegara dalam melakukan kegiatan wisatanya.



Sumber: Hasil Data Kuesioner, 2017

Tabel 4. Wisatawan Mancanegara Analisis Penggunaan Moda Transportasi sebagai Penunjang Kegiatan Wisata oleh

Moda Transportasi	Hasil data Kuesioner				Total Skor	Keterangan
	Always (4)	Often (3)	Rarely (2)	Never (1)		
Motor (sewa)	15,38 % = 8 Skor: 8x4 = 32	25% = 13 Skor: 13x3 = 39	42,31 % = 22 Skor: 22x2 = 44	17,31 % = 9 Skor: 9x1 = 9	32+39 +44+9 = 124	Pilihan terhadap motor (sewa) sebagai moda transportasi pilihan wisatawan mancanegara menunjukkan total skor positif sebesar 40,38%, lebih rendah dari jumlah skor positif yang diberikan yaitu sebesar 59,62%
Mobil (sewa)	13,46 % = 7 Skor: 7x4 = 28	36,54 % = 19 Skor: 19x3 = 57	34,62 % = 18 Skor: 18x2 = 36	15,38 % = 8 Skor: 8x1 = 8	28+57 +36+8 = 129	Skor positif yang diberikan terhadap penggunaan mobil (Sewa) oleh responden wisatawan manacanegara adalah sebesar 40%, juga lebih rendah dari skor negatifnya yaitu sebesar
Kendaraan Umum (Angkot ,Buswa	5,77% = 3 Skor: 3x4 =	15,38 % = 8 Skor: 8x3 =	32,7% = 17 Skor: 17x2 =	46,15 % = 24 Skor: 24x1 =	12+24 +34+2 4 = 94	Preferensi terhadap moda transportasi angkutan umum masih didominasi oleh skor negatif yaitu sebesar 78,85%, sedangkan untuk skor positifnya

y) Kapal/Perahu Sewa	12 34,61 % = 18 Skor: 18x4 = 72	24 36,54 % = 19 Skor: 19x3 = 57	34 21,15 % = 11 Skor: 11x2 = 22	24 7,7% = 4 Skor: 4x1 = 4	**72+57 +22+4 = 155**	berada pada angka 21,15% Penggunaan kapal/perahu sewa sebagai moda transportasi wisata di Kota Makassar oleh wisman adalah sebesar 71,15% skor positif

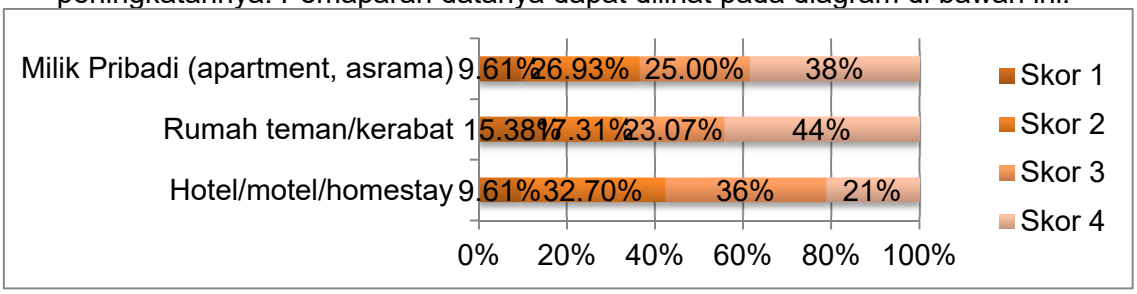
Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2017

Analisis:

Berdasarkan tabel hasil perhitungan skoring di atas, skor tertinggi berada pada poin ke 4 yaitu penggunaan kapal/perahu sewa sebagai moda transportasi yang sering menjadi pilihan wisatawan mancanegara dalam melakukan kunjungan wisatanya di Kota Makassar yaitu sebesar 155. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan yang cukup besar terhadap potensi daya tarik wisata alam/kepulauan seperti yang dijabarkan dalam Profil kepariwisataan yang tersedia di Kota Makassar dalam Tabel Obyek Wisata Alam/Kepulauan yang ada. Sedangkan, untuk skor terendah berdasarkan hasil perhitungan skoring di atas berada pada penggunaan Kendaraan Umum (Angkot,Busway) sebagai pilihan moda transportasi wisatawan mancanegara tersebut yaitu hanya sebesar 94 poin. Berdasarkan penjabaran ini maka hal ini dianggap penting untuk menjadi perhatian tersendiri bagi pihak pemerintah setempat khususnya bagi pihak penyelenggara kegiatan aksesibilitas di Kota Makassar.

2. Preferensi Perjalanan Wisatawan Mancanegara terhadap Jenis Akomodasi

Hasil penilaian terhadap preferensi jenis akomodasi secara umum di Kota Makassar memperlihatkan bahwa mayoritas wisatawan mancanegara memberikan skor positif terhadap pilihan jenis akomodasi yang disediakan. Namun tingkat skor positif yang paling tinggi masih didominasi pada pilihan akomodasi rumah kerabat/teman. Hal ini memberikan makna bahwa bagi sebagian besar jumlah wisatawan mancanegara yang menjadi responden dalam penelitian sebagian besar masih memberikan dampak yang sedikit terhadap bisnis perhotelan/usaha jasa akomodasi di kota Makassar, sehingga menarik untuk dijadikan bahan perhatian bagi pemerintah kota agar dapat diupayakan peningkatannya. Pemaparan datanya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Sumber: Hasil Data Kuesioner, 2017

Tabel 5. Analisis Preferensi terhadap Jenis Akonodasi sebagai Penunjang Kegiatan Wisata oleh Wisatawan Mancanegara

Jenis Akomodasi	**Hasil data Kuesioner**				**Total Skor**	**Keterangan**
	Always (4)	Often (3)	Rarely (2)	Never (1)		
Hotel/mot	21,1	36,3	32,7	9,61	44+57+3	Penggunaan

el/homestay	5% = 11 Skor :11x 4 = 44	4%= 19 Skor : 19x3 = 57	% = 17 Skor : 17x2 = 34	% = 5 Skor : 5x1= 5	4+5 = 140	hotel/motel/homestay sudah cukup sering dipilih oleh responden dilihat dari jumlah skor positif yang diperoleh yaitu sebesar 57,49%, sedangkan untuk pilihan skor negatif masih berada di angka yang cukup dekat yaitu sebesar 42,31%
Rumah teman/kerabat	44,23%= 23 Skor : 23x4 = 92	23,07%= 12 Skor : 12x3 = 36	17,31%= 9 Skor : 9x2 = 18	15,38% = 8 Skor : 8x1 = 8	**292+36+18+8 = 154**	Pilihan skor positif terhadap penggunaan rumah teman/kerabat sebagai tempat akomodasi selama berwisata berada pada rentang skor positif yang baik yaitu sebesar 67,30% jauh lebih besar dibandingkan skor negatifnya.
Milik Pribadi (apartment, asrama)	38,46% = 20 Skor : 20x4 = 80	25% = 13 Skor : 13x3 = 39	26,93%= 14 Skor : 14x2 = 28	9,61 % = 5 Skor : 5x1 = 5	80+39+28+5 = 152	Skor positif untuk pilihan responden terhadap akomodasi berupa milik pribadi adalah sebesar 63,46%, jauh lebih besar dibandingkan dengan skor negatif terhadap penggunaan jenis akomodasi ini

Sumber ; Hasil Olah Data Kuesioner, 2017

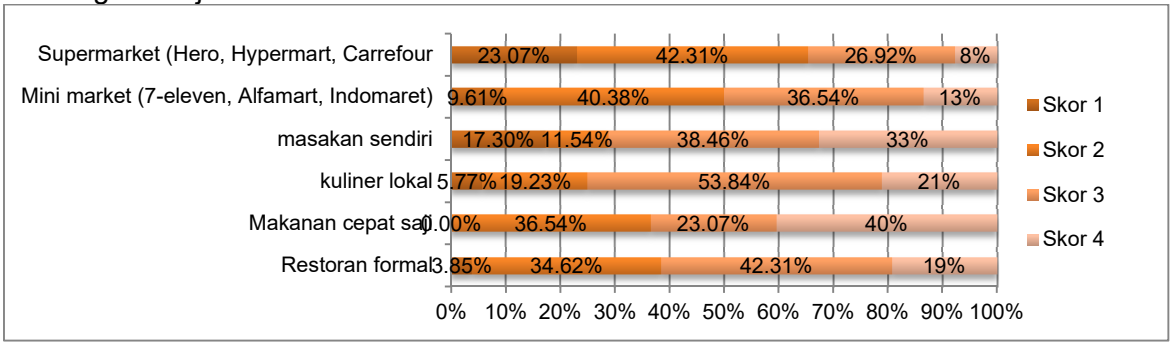
Analisis:

Berdasarkan tabel hasil perhitungan skoring di atas, poin tertinggi berdasarkan pilihan responden adalah pada penggunaan rumah teman/kerabat sebagai sarana akomodasi selama berwisata di Kota Makassar yaitu dengan nilai sebesar 154 poin. Tingginya nilai pada pilihan ini menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota ini masih memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan penduduk atau orang yang menetap di destinasi ini.Sedangkan nilai terendah untuk pilihan akomodasi wisatawan mancanegara yaitu sebesar 140 poin yang merupakan sarana akomodasi berupa hotel/motel. Rendahnya pilihan terhadap jenis akomodasi hotel/motel dibandingkan rumah teman/kerabat dapat mengindikasikan dua hal, yang pertama adalah adanya motivasi lain dalam perjalanan wisatawan mancanegara itu sendiri (selain motivasi berwisata saja) dan kedua adalah indikasi diperlukannya upaya peningkatan baik dari segi promosi maupun kualitas dari penyedia jasa akomodasi seperti hotel, motel, dan lainnya sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara untuk memilih atau menggunakan sarana akomodasi tersebut dalam perjalanan wisatanya.

3. Preferensi Perjalanan Wisatawan Mancanegaraterhadap Jenis Makanan

Untuk pilihan ragam makanan yang ada, skor positif dominan ada pada pilihan kuliner lokal, makanan sendiri, dan juga restoran formal. Hal ini menunjukkan adanya keinginan bagi wisatawan mancanegara untuk mencoba

kuliner lokal yang ada di daerah yang dikunjunginya, sehingga menjadi hal positif bagi kemajuan usaha kuliner lokal kota Makassar.



Sumber: Hasil Data Kuesioner, 2017

Tabel 6. Analisis Preferensi terhadap Jenis Makanan sebagai Penunjang Kegiatan Wisata oleh Wisatawan Mancanegara

Jenis Makanan	Hasil data Kuesioner				Total Skor	Keterangan
	Always (4)	Often (3)	Rarely (2)	Never (1)		
Restoran formal	19,23 %= 10 Skor: 10x4 = 40	42,31 % = 22 22x3 = 66	34,62 % = 18 Skor: 18x2 = 36	3,85% = 2 Skor: 2x1 = 2	40+ 66+ 36+ 2 = 144	Skor positif terhadap pemilihan restoran formal sebagai pilihan bagi wisman adalah sebesar 61,54% dan skor negatif sebesar 38,47%
Makanan cepat saji	40,38 %= 21 Skor: 21x4 = 84	23,07 % = 12 Skor: 12x3 = 36	36,54 % = 19 Skor: 19x2 = 38	-	**84+ 36+ 38 = 158**	Skor positif mendominasi pilihan jenis makanan cepat saji yaitu sebesar 73,45%, dan sisanya yaitu sebanyak 36,54% responden yang memberi skor negatif terhadap keseringan pilihan terhadap jenis makanan cepat saji ini.
kuliner lokal	21,15 % = 11 Skor: 11x4 = 44	53,84 %= 28 Skor: 28x3 = 84	19,23 % = 10 Skor: 10x2 = 20	5,77% = 3 Skor: 3x1 = 3	44+ 84+ 20+ 3 = 151	Skor positif = 74,99% Skor negatif = 25%
masakan sendiri	32,7% = 17 17x4 = 68	38,46 % = 20 20x3 = 60	11,54 % = 6 6x2 = 12	17,3% = 9 Skor: 9x1 = 9	68+ 60+ 12+ 9 = 149	Skor positif = 71,16% Skor negatif = 28,84%
Mini market (7-eleven, Alfamart, Indomaret	13,46 % = 7 Skor: 7x4 =	36,54 % = 19 Skor:	40,38 % = 21 Skor:	9,61% = 5 Skor:	28+ 57+ 42+ 5 = 132	Skor positif = 50% Skor negatif = 50%

)	28	19x3 = 57	21x2 = 42	5x1 = 5		
Supermarket (Hero, Hypermart, Carrefour	7,7%= 4 Skor: 4x4 = 16	26,92 % = 14 Skor: 14x3 = 42	42,31 % = 22 Skor: 22x2 = 44	23,07 % = 12 Skor: 12x1 = 12	16+ 42+ 44+ 12 = 114	Skor positif = 34,62% Skor negatif = 65,38%

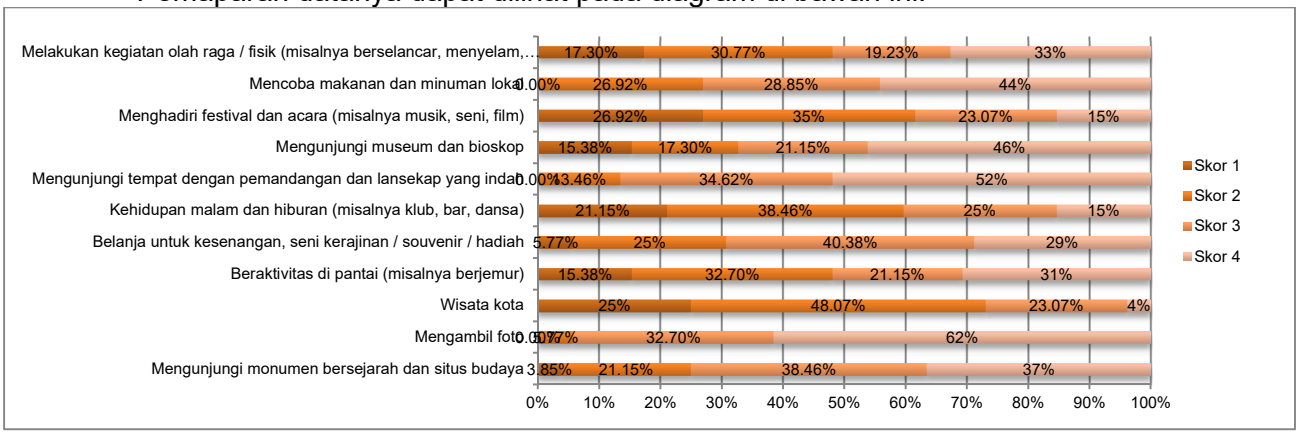
Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2017

Analisis:

Hasil pengolahan data kuesioner untuk preferensi terhadap jenis makanan yang tersedia menunjukkan poin tertinggi berada pada pilihan makanan cepat saji yaitu sebesar 158 poin. Restoran makanan cepat saji yang terbilang sudah cukup banyak di Kota Makassar menjadi pilihan utama ketika wisatawan mancanegara berkunjung ke kota ini. Tersedianya restoran makanan cepat saji di Kota Makassar diharapkan mampu menunjang keinginan wisatawan mancanegara yang mayoritas memiliki selera yang berbeda dengan penduduk lokal, sehingga adanya restoran jenis ini menjadi pilihan tak tergantikan kemanapun tujuan wisatanya. Hal yang cukup menarik perhatian adalah skor tertinggi kedua terhadap preferensi jenis makanan ini yaitu pada jenis kuliner lokal dengan nilai sebesar 151. Hal ini mengindikasikan cukup tingginya minat ataupun ketertarikan wisatawan mancanegara untuk mencoba hal baru seperti makanan maupun minuman lokal yang bisa menjadi peluang bagi perkembangan usaha kuliner di kota ini.

4. Preferensi Perjalanan Wisatawan Mancanegara terhadap Kegiatan bersantai atau berwisata

Untuk preferensi terhadap jenis kegiatan bersantai yang bisa dilakukan di kota Makassar, pilihan kegiatan mengambil foto/berfoto menjadi pilihan yang paling banyak didominasi dengan skor positif yaitu sebesar 92,70% dengan asumsi bahwa adanya keunikan yang dimiliki suatu tempat yang tidak dapat dilihat oleh pengunjung di tempat/lokasi asalnya. Sedangkan secara keseluruhan, skor positif terendah terlihat pada kegiatan wisata kota dengan nilai sebesar 26,92%. Pemaparan datanya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Sumber: Hasil Data Kuesioner, 2017

Tabel 7. Analisis Preferensi terhadap Kegiatan Bersantai atau Berwisata oleh Wisatawan Mancanegara

No	Kegiatan	Hasil data Kuesioner				Total Skor	Keterangan
		Always (4)	Often (3)	Rarely (2)	Never (1)		
1.	Mengunjungi monumen bersejarah dan situs budaya	36,54% = 19 19x4 = 76	38,46% = 20 20x3 = 60	21,15% = 11 11x2 = 22	3,85% = 2 2x1 = 2	76+60+22+2 = 160	Skor positif = 75% Skor negatif = 25%
2.	Mengambil foto	61,54% = 32 32x4 = 128	32,7% = 17 17x3 = 51	5,77% = 3 3x2 = 6	-	**128+51+6 = 185**	Skor positif = 94.24% Skor negatif = 5,77%
3.	Wisata kota	3,85% = 2 2x4 = 8	23,07% = 12 12x3 = 36	48,07% = 25 25x2 = 50	25% = 13 13x1 = 13	8+36+50+13 = 107	Skor positif = 26,92% Skor negatif = 73,07%
4.	Beraktivitas di pantai (misalnya berjemur)	30,77% = 16 16x4 = 64	21,15% = 11 11x3 = 33	32,7% = 17 17x2 = 34	15,38% = 8 8x1 = 8	64+33+34+8 = 139	Skor positif = 51,92 % Skor negatif = 48,08%
5.	Belanja untuk kesenangan, seni kerajinan / souvenir / hadiah	28,85% = 15 15x4 = 60	40,38% = 21 21x3 = 63	25% = 13 13x2 = 26	5,77% = 3 3x1 = 3	60+63+26+3 = 152	Skor positif = 69,23% Skor negatif = 30,77%
6.	Kehidupan malam dan hiburan (misalnya klub, bar, dansa)	15,38% = 8 8x4 = 32	25% = 13 13x3 = 39	38,46% = 20 20x2 = 40	21,15% = 11 11x1 = 11	32+39+40+11 = 122	Skor positif = 40,38% Skor negatif = 59,61%
7.	Mengunjungi tempat dengan pemandangan dan lansekap yang indah	51,92% = 27 27x4 = 108	34,62% = 18 18x3 = 54	13,46% = 7 7x2 = 14	-	108+54+14 = 176	Skor positif = 86,54% Skor negatif = 13,46%
8.	Mengunjungi museum dan bioskop	46,15% = 24 24x4 = 96	21,15% = 11 11x3 = 33	17,3% = 9 9x2 = 18	15,38% = 8 8x1 = 8	96+33+18+8 = 155	Skor positif = 67,3% Skor negatif = 32,68%
9.	Menghadiri festival dan acara (misalnya musik, seni, film)	15,38% = 8 8x4 = 32	23,07% = 12 12x3 = 36	34,62% = 18 18x2 = 36	26,92% = 14 14x1 = 14	32+36+36+14 = 118	Skor positif = 38,45% Skor negatif = 61,54%
10.	Mencoba makanan dan minuman lokal	44,23% = 23 23x4 = 92	28,85% = 15 15x3 = 45	26,92% = 14 14x2 = 28	-	92+45+28 = 165	Skor positif = 73,08% Skor negatif = 26,92%
11.	Melakukan kegiatan olah raga / fisik (misalnya berselancar,	32,7% = 17 17x4 = 68	19,23% = 10 10x3 = 30	19,23% = 16 16x2 = 32	17,3% = 9 9x1 = 9	68+30+32+9 = 139	Skor positif = 51,93% Skor negatif = 36,53%

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2017

Analisis :

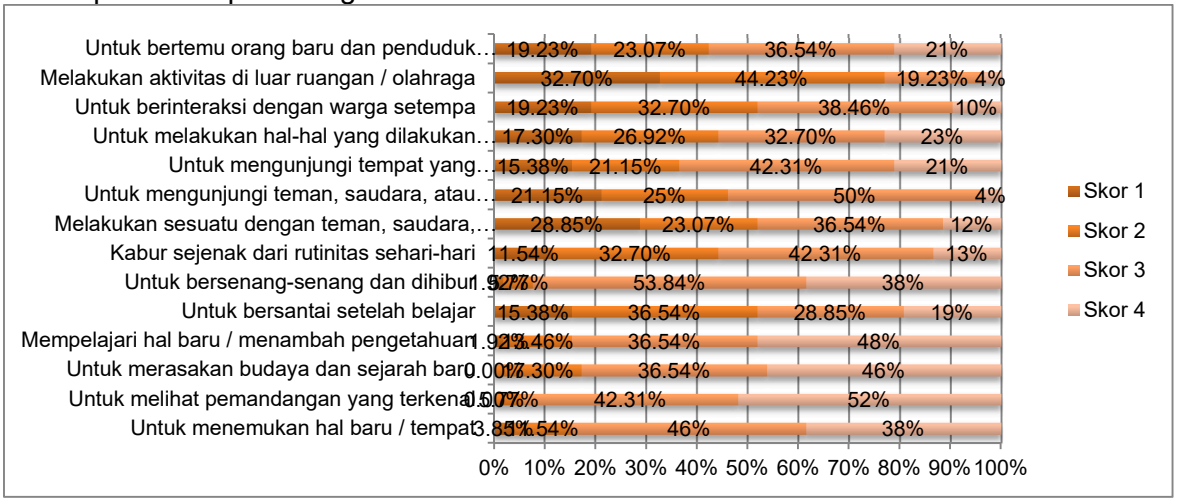
Berdasarkan tabel preferensi terhadap kegiatan bersantai atau berwisata di Kota Makassar di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan **mengambil foto** adalah pilihan kegiatan yang mendapat nilai paling banyak yaitu sebesar 185 poin. Hal ini menandakan kegiatan ini merupakan prioritas utama wisatawan mancanegara dalam berwisata di Kota Makassar.

Kegiatan bewisata yang memiliki nilai terbesar keduadengan nilai sebsar 176 poin adalah kegiatan **mengunjungi tempat dengan pemandangan dan lansekap yang indah**. Adanya minat yang cukup tinggi dari wisatawan mancanegara dalam mengeksplorasi pemandangan dan lansekap yang indah di Kota Makassar merupakan peluang yang baik dalam pengembangan potensi yang dimiliki kota ini baik itu berupa wisata alam/kepulauan maupun pada pengelolaan terhadap landmark dan ruang publik yang dimiliki saat ini.

Skor terendah dalam penilaian terhadap komponen kegiatan bersantai/berwisata ini adalah pada kegiatan **Wisata Kota** dengan nilai sebesar 107 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia masih belum merupakan destinasi wisata kota bagi wisatawan mancanegara yang merupakan responden dalam penelitian ini.

C. *Analisis Motivasi Perjalanan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar*

Skor positif terbesar berada pada poin kedua dalam kuesioner yaitu keinginan untuk melihat pemandangan yang terkenal di Kota Makassar yakni sebesar 97,31%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar telah memiliki namanya tersendiri untuk wisatawan mancanegara dan landmark kotanya telah menjadi pembicaraan yang cukup untuk memotivasi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kota Makassar. Poin kedua terbesar adalah keinginan untuk menemukan hal dan tempat baru yaitu sebesar 84%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berkunjung wisatawannya adalah untuk pertama kalinya datang ke Kota Makssar dan ingin menemukan hal-hal baru yang belum pernah dialaminya baik di negara asal maupun daerah lain yang pernah dikunjunginya.Pemaparan datanya dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Sumber: Hasil Data Kuesioner, 2017

Tabel 8. Analisis Motivasi Perjalanan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar

No.	Kegiatan	Hasil data Kuesioner				Total Skor	Keterangan
		Sangat Penting (4)	Penting (3)	Cukup Penting (2)	Tidak Penting (1)		
1.	Untuk menemukan hal baru / tempat	38,46 % = 20 20x4 = 80	46,15 % = 24 24x3 = 72	11,54 % = 6 6x2 = 12	3,85% = 2 2x1 = 2	80+72+12+2 = 166	Nilai kepentingan yang diberikan untuk motivasi ini yaitu sebesar 84,61% responden memberikan skor positif
2.	Untuk melihat pemandangan yang terkenal	51,92 % = 27 27x4 = 108	42,31 %= 22 22x3 = 66	5,77% = 3 3x2 = 6	-	**108+66+6 = 180**	Motivasi untuk melihat pemandangan terkenal secara keseluruhan mendapat skor positif yang besar dari responden yaitu sebesar 94,23%
3.	Untuk merasakan budaya dan sejarah baru	46,15 % = 24 24x4	36,54 % = 19 19x3 =	17,3% = 9 9x2 = 18	-	96+57+18 = 171	Skor positif = 82,69% Skor negatif = 17,3%

		= 96	57				
4.	Mempelajari hal baru / menambah pengetahuan	48,07 % = 25 25x4 = 100	36,54 % = 19 19x3 = 57	13,46 % = 7 7x2 = 14	1,92% = 1 1x1 = 1	100+57+14+1 = 172	Skor positif = 84,61% Skor negatif = 15,38%
5.	Untuk bersantai setelah belajar	19,23 % = 10 10x4 = 40	28,85 % = 15 15x3 = 45	36,54 % = 19 19x2 = 38	15,38 % = 8 8x1 = 8	40+45+38+8 = 131	Skor positif = 48,08% Skor negatif = 51,92%
6.	Untuk bersenang-senang dan dihibur	38,46 % = 20 20x4 = 80	53,84 % = 28 28x3 = 84	5,77% = 3 3x3 = 9	1,92% = 1 1x1 = 1	80+84+9+1 = 174	Skor positif = 92,3% Skor negatif = 7,69%
7.	Kabur sejenak dari rutinitas sehari-hari	13,46 % = 7 7x4 = 28	42,31 % = 22 22x3 = 66	32,7% = 17 17x2 = 34	11,54 % = 6 6x1 = 6	28+66+34+6 = 134	Skor positif = 55,77% Skor negatif = 44,24%
8.	Melakukan sesuatu dengan teman, saudara, dan keluarga	11,54 % = 6 6x4 = 24	36,54 % = 19 19x3 = 57	23,07 % = 12 12x2 = 24	28,85 % = 15 15x1 = 15	24+57+24+15 = 120	Skor positif = 48,08% Skor negatif = 51,92%
9.	Untuk mengunjungi teman, saudara, atau keluarga saya	3,85% = 2 2x4 = 8	50% = 26 26x3 = 78	25% = 13 13x2 = 26	21,15 % = 11 11x1 = 11	8+78+26+11 = 123	Skor positif = 53,85% Skor negatif = 46,15%
10.	Untuk mengunjungi tempat yang direkomendasikan oleh teman-teman	21,15 % = 11 11x4 = 44	42,31 %= 22 22x3 = 66	21,15 % = 11 11x2 = 22	15,38 % = 8 8x1 = 8	44+66+22+8 = 140	Skor positif = 63,46% Skor negatif = 36,53%
11.	Untuk melakukan hal-hal yang dilakukan penduduk	23,07 % = 12 12x4 = 48	32,7% = 17 17x3 = 51	26,92 % = 14 14x2 = 28	17,3% = 9 9x1 = 9	48+51+28+9 = 136	Skor positif = 55,77% Skor negatif = 44,22%

12.	Untuk berinteraksi dengan warga setempat	9,61% = 5 5x4 = 20	38,46 % = 20 20x3 = 60	32,7% = 17 17x2 = 34	19,23 % = 10 10x1 = 10	20+60+34+10 = 124	Skor positif = 48,07% Skor negatif = 51,93%
13.	Melakukan aktivitas di luar ruangan / olahraga	3,85% = 2 2x4 = 8	19,23 % = 10 10x3 = 30	44,23 % = 23 23x2 = 46	32,7% = 17 17x1 = 17	8+30+46+17 = 101	Skor positif = 23,08% Skor negatif = 76,93%
14.	Untuk bertemu orang baru dan penduduk setempat	21,15 % = 11 11x4 = 44	36,54 % = 19 19x3 = 57	23,07 % = 12 12x2 = 24	19,23 % = 10 10x1 = 10	44+57+24+10 = 135	Skor positif = 57,69% Skor negatif = 42,3%

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner, 2017

Analisis:

Poin tertinggi untuk motivasi adalah motivasi untuk melihat pemandangan terkenal yaitu dengan poin 180. Berdasarkan teori pembagian jenis motivasi oelh Oka A.Yoeti, maka motivasi ingin melihat pemandangan terkenal dikategorikan ke dalam kelompok Alasan pendidikan dan kebudayaan, dimana sebelum melakukan perjalanan wisatawan dianggap telah mempelajari mengenai destinasi wisatawa tersebut sebelumnya. Poin terendah yaitu motivasi untuk melakukan aktivitas di luar ruanga/olahraga yaitu sebesar 101 poin. Jarak yang cukup jauh untuk ditempuh wisatawan mancanegara adalah salah satu faktor kurangnya alasan kesehatan, olahraga, dan rekreasi ini untuk menjadi alasan kunjungannya.

D. Pembahasan

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya. Pembahasan mengenai hasil penelitian ini akan dibahas secara terpisah agar lebih memudahkan dalam penyusunannya, dan di akhir penulisan akan dbahas secara menyeluruh sehingga memunculkan keterkaitan analisis yang satu dengan lainnya. Komponen yang akan dibahas dalam sub bab ini yaitu karakteristik perjalanan wisatawan mancanegara, preferensi wisatawan mancanegara terhadap komponen kepariwisataan, motivasi kunjungan wisatawan mancanegara, dan hubungan antara motivasi dan preferensi perjalanannya.

1. Karakteristik Perjalanan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar

   Kota Makassar merupakan sebuah kota berkembang yang di dalamnya terdapat beragam potensi wisata yang cukup untuk menjadi faktor penarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Potensi-potensi tersebut dikelompokkan menjadi potensi wisata alam/kepulauan, wisata sejarah, wisata pesisir, wisata belanja, wisata sejarah, wisata hiburan/buatan, wisata kuliner lokal, wisata lainnya. Wisatawan mancanegara yang berkunjung juga memiliki keragaman baik itu berdasarkan asal negara, kelompok usia, jenis kelamin tingkat pendidikan maupun pekerjaannya.

2. Preferensi Wisatawan Mancanegara terhadap Komponen Kepariwisataan di Kota Makassar

Preferensi wisatawan mancanegara diukur bedasarkan tingkat keseringan penggunaan komponen kepariwisataan atau sarana pendunkung kepariwisataan yang tersedia di Kota Makassar yaitu moda transportasi, jenis akomodasi, jenis makanan, dan kegiatan berwisatanya. Berdasarkan preferensi terhadap moda transportasi diketahui bahwa jenis angkutan yaitu kapal/perahu sewa merupakan pilihan yang paling sering digunakan oleh wisatwan mancanegara dalam melakukan kunjungan wisatanya di kota ini. Penggunaan kapal/perahu sewa yang berada di dermaga Kayu Bangkoang maupun dermaga POPSA adalah kaitan dengan kunjungan ke beberapa obyek wisata kepulauan (Spermode) yang berada di sepanjang pesisir barat Kota Makassar. Hal ini juga erat kaitannya dengan motivasi wisatawan mancanegara yang mengunjungi kota ini dengan tujuan untuk melihat pemandangan atau lansekap yang indah, dimana daya tarik utama kepulauan Spermonde adalah pemandangan pasir putih maupun pemandangan bawah laut yang cukup asri dengan lokasi yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Makassar. Preferensi wisatawan mancanegara terhadap pilihan jenis akomodasi berdasarkan tingkat keseringan penggunaan yaitu pada rumah teman/kerabat, dimana hal ini menjadi salah satu dampak negatif terhadap penyedia jasa akomodasi seperti hotel, motel dan sejenisnya. Untuk preferensi terhadap pilihan jenis makanan adalah pada pilihan makanan cepat saji. Restoran makanan cepat saji yang terbilang sudah cukup banyak di Kota Makassar menjadi pilihan utama ketika wisatawan mancanegara berkunjung ke kota ini. Tersedianya restoran makanan cepat saji di Kota Makassar diharapkan mampu menunjang keinginan wisatawan mancanegara yang mayoritas memiliki selera yang berbeda dengan penduduk lokal, sehingga adanya restoran jenis ini menjadi pilihan tak tergantikan kemanapun tujuan wisatanya. Preferensi terhadap pilihan aktivitas bersantai/berwisata wisatwan mancanegara yaitu pada pilihan aktivitas mengambil foto/berfoto. Kegiatan ini adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh pelancong, terutama dalam kunjungannya ke negara lain, baik itu kunjungan pertama maupun kunjungan ulang.

3. Motivasi Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar

Motivasi untuk melihat pemandangan terkenal dipilih oleh wisatawan mancanegara (responden) sebagai motivasi yang paling penting dalam mengambil keputusan berwisatanya di Kota Makassar. Dimana berdasarkan teori pembagian jenis motivasi oelh Oka A.Yoeti, maka motivasi ingin melihat pemandangan terkenal dikategorikan ke dalam kelompok Alasan pendidikan dan kebudayaan, dimana sebelum melakukan perjalanan wisatawan dianggap telah mempelajari mengenai destinasi wisatawa tersebut sebelumnya. Ketersediaan informasi yang mudah diperoleh di era digital saat ini menjadi salah satu faktor dalam mengenal daerah tujuan wisata bagi responden. Namun, dalam karakteristik berdasarkan sumber informasi pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa sumber informasi yang paling banyak dipilih reponden sebagai alasan mengenal kota ini adalah berasal dari teman/kerabat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya motivasi lain yang mendorong wisatawan mancanegara tersebut dalam berkunjung. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan ketersediaan sarana pendidikan bertaraf internasional di kota ini, sehingga selain untuk berwisata, responden juga memiliki motivasi khusu yang ada kaitannya dengan alasan pendidikan baik itu untuk melanjutkan pendidikan maupun mengunjungan kerabat yang sedang bersekolah di kota ini.

4. Keterkaitan antara Motivasi dan Preferensi Perjalanan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa preferensi wisatawan mancanegara terhadap komponen kepariwisataan sangat dipengaruhi oleh motivasi yang melatarbelakangi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Makassar itu sendiri. Motivasi yang paling berpengaruh terhadap preferensi penggunaan kapal atau perahu sewa paling dipengaruhi oleh motivasi poin terakhir yaitu untuk bertemu dengan orang-orang baru dan penduduk lokal. Hal ini sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, dimana dermaga kapal/perahu kayu yang tersedia masih dikelola oleh masyarakat setempat, begitu pula dengan pulau-pulau yang menjadi obyek wisata tujuan wisatawan mancanegara tersebut. Penduduk asli yang bermukim di pulau-pulau yang ada di sepanjang pesisir pantai kota Makassar melihat adanya potensi kepariwisataan yang ada, sehingga memanfaatkan rumah mereka sebagai sarana akomodasi dan penyediaan jasa tempat makan seadanya, dikarenakan beberapa pulau tersebut masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Sedangkan untuk preferensi terhadap pilihan rumah teman/kerabat paling besar dipengaruhi oleh motivasi poin untuk mempelajari hal baru/menambah pengetahuan dan bersenang-senang dan dihibur. Hal ini erat kaitannya dengan motivasi sosial. Sedangkan untuk preferensi terhadap pilihan makanan cepat saji paling besar dipengaruhi oleh motivasi poin kedua yaitu untuk melihat pemandangan terkenal. Pemilhan terhadap makanan cepat saji biasanya dikarenakan wisatawan mancanegara yang memilih poin ini lebih fokus pada motivasinya berkunjung yaitu untuk melihat pemndangan terkenal. Pelancong jenin ini tidak terlalu memperhatikan jenis makanan apa yang harus mereka makan selama motivasinya terpenuhi. Kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia memang telah ditunjang oleh beragam restoran makanan cepat saji yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan mancanegara yang berkunjung. Sedangkan untuk preferensi terhadap kegiatan mengambil foto/berfoto paling besar dipengaruhi oleh motivasi poin kedua yaitu untuk melihat pemandangan terkenal, dimana wisatawan telah merencanakan perjalanannya dan mempelajari mengenai daerah tujuan wisatanya.

IV. KESIMPULAN

Dari temuan dan analisis yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang preferensi perjalanan dan motivasi berkunjung wisatawan mancanegara di Kota Makassar, serta ada tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut dalam perjalanan wisatawan mancanegara ke Kota Makassar.Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

Motivasi Perjalanan

1. Faktor yang paling mempengaruhi wisatawan mancanegara dalam melakukan perjalanan wisata di Kota Makassar berdasarkan hasil olah data yang diperoleh menggunakan tabel analisis skoring dari skala likert adalah motivasi **untuk melihat pemandangan terkenal** yaitu sebanyak 180 poin. Skor tertinggi kedua yaitu motivasi **untuk bersenang-senang dan dihibur** dengan poin sebanyak 174. Kemudian skor tertinggi berikutnya adalah motivasi **untuk mempelajari hal baru/menambah pengetahuan** yaitu sebesar 172 poin. Ketiga hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok besar faktor motivasi menurut McIntosh (1977) sebagai *Physiological Motivation* (motivasi yang bersifat fisik) dan *Cultural Motivation* (motivasi budaya).

Preferensi terhadap Komponen Wisata

2. Untuk penggunaan **moda transportasi**, skor tertinggi yang ditunjukkan dalam tabel analisis skoring dari skala likert terhadap preferensi wisatawan mancanegara adalah senilai 155 poin, yaitu penggunaan **kapal/perahu sewa**.
3. Pada pemilihan jenis akomodasi, skor tertinggi preferensi wisatawan mancanegara adalah rumah teman/kerabat dengan nilai sebesar 154 poin.
4. Hasil pengolahan data kuesioner untuk preferensi terhadap jenis makanan yang tersedia menunjukkan poin tertinggi berada pada pilihan makanan cepat saji yaitu sebesar 158 poin.
5. Berdasarkan tabel analisis skoring preferensi terhadap kegiatan bersantai atau berwisata di Kota Makassar, dapat dilihat bahwa kegiatan mengambil foto adalah pilihan kegiatan yang mendapat nilai paling banyak yaitu sebesar 185 poin.

   Preferensi dan motivasi kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar
6. Terdapat hubungan yang signifikan antara keempat komponen preferensi yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu moda transportasi, jenis akomodasi, pilihan makanan, dan kegiatan bersantainya. Hal ini memberikan makna bahwa preferensi wisatawan mancanegara terhadap obyek dan komponen kepariwisataan sangat dipengaruhi oleh motivasi yang melatarbelakangi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Makassar itu sendiri. Hubungan yang terjadi antara antara preferensi perjalanan wisata dan motivasi kunjungan wisatawan mancanegara yang terjadi di Kota Makassar adalah hubungan positif berbanding lurus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gunn, Clare A. 1994. *Tourism Planning: Basic, Concepts, Cases (Third Edition).* USA: Taylor & Francis.

Hadinoto, Kusudianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta: UI-Press.

Hall, C. Michael and Stephen J. Page. 2006. *The Geography of Tourism & Recreation: Environment, Place, and Space (Third Edition).* New York: Routledge.

Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning*. New York: Van Nostrand Reinhold.

Ismayanti, 2010. Pengantar Pariwisata. Jakarta: Grasindo.

Kusmayadi dan Indar Sugiarto.2000. Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan. Jakara: Gramedia Pustaka Utama.

Marpaung, Happy. 2002. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung: Alphabeta.

Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Pitana, I Gede. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi.

Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta.2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta: Andi.

Schiffman, Leon, G.,Leslie Lazar Kanuk. 2000. *Consumer Behavior* {Edisi Tujuh). New Jersey: Prentice-Hall.

Setiadi, Nugroho J. 2003. (Edisi Revisi) Perilaku Konsumen. Jakarta; Kencana.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata. Yogyakarta: Gava Media.

World Tourism Organization. 2004. *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destination: A Guidebook*. Madrid: *World Tourism Organization.*

Yoeti. Oka A. 1991. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung: Penerbit Angkasa.

Yoeti. Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Jurnal dan Artikel:

Asni Amaliah Nuchri, 2017. **Preferensi dan Motivasi Perjalanan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar**. Tesis.

C. Van Vuuren and Elmarie Slabbert. 2011. ***Travel Motivations and Behaviour of Tourists to A South African Resort.***

Dinas Pariwisata Kota Makassar. Buku Petunjuk Pariwisata *(Makassar Tourism Guidebook).* 2015

Fara Kurnia Iranda. 2011. **Pengaruh Sebaran Produk Wisata terhadap Pola Perjalanan Wisatawan Mancanegara di Kota Batam**. Tesis.

Jian Li, Fen Luo, Hui-mei Liu, Jian-feng Kong. 2012. ***A Study on Recreational Travel Preference of Foreign Residents in China:****Case of Unit Nation Community in Yiwu City.*

Pratiwi Indah Cahyani, 2013, **Hubungan antara Kualitas Destinasi Pariwisata Makassar dengan Tingkat Pengalaman Berwisata dan Keputusan Lama Tinggal Wisatawan.** Tesis.

Pratiwi Juniar Achmad Gani. 2012. **Pengaruh Kualitas Produk Wisata terhadap Kepuasan dan Motivasi Kunjungan Kembali Wisatawan Mancanegara di Pantai Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba.** Tesis.

Syakir Amir, Mariana Mohamed Osman, Syahriah Bachok and Mansor Ibrahim. 2014. ***Understanding Tourists' Profile and Preference of Tourists' Destination Choice:****A case Study in Melaka World Heritage City.*

Website:

http://mmriset.blogspot.com/2012/01/teori-perilaku-wisatawan.html diakses tanggal 4 April 2015

http://resthoe.blogspot.com/2013/02/destinasi-wisata-daerah-tujuan-wisata.html diakses tanggal 4 April 2015

http://www.tourism-makassar.com/ diakses tanggal 25 April 2015

http://swa.co.id/business-strategy/sejuta-pesona-kota-makassar diakses tanggal 30 April 2015

http://tempatwisatadimakassar.blogspot.com/ diakses tanggal 20 Juni 2015

(http://rocmksr.blogspot.com/2015/02/sejarah-singkat-kota-makassar.html), diakses tanggal 21 Februari 2017

Pengembangan Daya Saing Destinasi Wisata Kota Batu Berdasarkan Pendekatan Model Dwyer

Myrna Sukmaratri

Fakultas Teknik Universitas Indo Global Mandiri, Palembang
Email: myrnasukma@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan daya saing wisata diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, memberikan pendapatan bagi pemerintah dan mendorong investasi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi Kota Batu dapat dikatakan bergantung pada sektor pariwisata. Seiring bertambahnya objek wisata, Kota Batu semakin dikenal sebagai Kota Wisata. Namun, terdapat indikasi kejenuhan wisatawan akan wisata di Kota Batu. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah wisatawan di sejumlah wisata buatan pada tahun 2013-2015. Oleh karena itu, dalam pengembangan wisata Kota Batu ke depannya perlu adanya strategi untuk meningkatkan daya saing yang berfokus pada faktor/variabel penentu yang paling berpengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun arahan pengembangan destinasi wisata Kota Batu berdasarkan penentu daya saing destinasi wisata dengan pendekatan model Dwyer. Faktor penentu dihasilkan berdasarkan penilaian dari para ahli (expert judgement) dengan menggunakan metode analisis Analitical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan empat arahan pengembangan daya saing destinasi wisata Kota Batu, yaitu (1) Diversifikasi produk wisata. Pada objek wisata alam diarahkan menjadi alternative tourism, untuk wisata buatan diarahkan adanya inovasi wisata dengan menggabungkan budaya Indonesia pada atraksi wisatanya, serta pembangunan pasar wisata di Alun-alun Kota Batu sebagai bentuk diverisfikasi destinasi Kota Batu; (2) Peningkatan kualitas SDM, baik dari pemerintah, industri wisata, dan masyarakat; (3) Arahan pengelolaan lingkungan perlu dilakukan sebagai upaya menanggulangi dampak negatif dari pembangunan wisata, serta; (4) Peningkatan kerjasama bidang pariwisata dalam lingkup Malang Raya dengan mengakomodasi proses kerja sama pengembangan kawasan pariwisata antar daerah dengan membangun forum jaringan komunikasi antar daerah Malang Raya.

Katakunci:daya saing, destinasi wisata, AHP, Kota Batu

I. PENDAHULUAN

Daya saing pariwisata memiliki peranan yang sangat penting terhadap kunjungan wisatawan karena manfaat ekonomisnya.Sektor pariwisata Kota Batu memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sumber utama pendapatan daerah. Pemandangan yang indah serta iklim yang kondusif memberikan keuntungan bagi Kota Batu dalam sektor pariwisata. Selain memiliki potensi wisata alam, berbagai wisata buatan *theme park* seperti Jawa Timur Park I & II, Museum Angkut, dan *Batu Night Spectaculer* menjadi wisata andalan Kota Batu.

Objek-objek wisata buatan yang ada di Kota Batu saat ini menjadi primadona dan merupakan wisata unggulan bahkan bisa dikatakan bahwa wisata buatan di Kota Batu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sektor kepariwisataan di Malang Raya. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat penurunan jumlah wisatawan pada sejumlah objek wisata buatan (BPS, 2016). Hal ini mengindikasikan adanya kejenuhan berwisata di Kota Batu. Terdapat kecenderungan wisatawan yang sudah pernah mengunjungi wisata buatan di Kota Batu kecil kemungkinannya untuk berkunjung lagi sampai batas waktu tertentu. Fenomena ini bisa berdampak pada penurunan jumlah wisatawan di Kota Batu secara keseluruhan. Selainitu, terdapat beberapa permasalahan lain terkait sektor pariwisata di Kota seperti pembangunan

wisata buatan yang berlebihan dikhawatirkan dapat menenggelamkan eksistensi wisata alam yang selama ini menjadi *branding* Kota Batu, adanya dampak negative lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan wisata, serta aksesibilitas objek wisata yang tidak semua terjangkau oleh angkutan umum menyebabkan para wisatawan lebih memilih untuk menggunakan moda transportasi pribadi sehingga muncul permasalahan kemacetan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, Kota Batu harus memiliki strategi guna meningkatkan daya saing wisatanya. Strategi pengembangan tersebut harus tepat sasaran dan terfokus pada faktor penentu yang paling berpengaruh pada peningkatan daya saing destinasi wisata Kota Batu. Dalam penelitian ini, faktor daya saing dilihat berdasarkan model daya saing yang dikemukakan oleh Dwyer (2003). Model daya saing Dwyer dianggap lebih komprehensif dan aplikatif terkait penelitian ini. Model ini merupakan pengembangan dari model-model mengenai daya saing terdahulu seperti *Porter's Diamond* dan model daya saing destinasi wisata Crouch dan Ritchie.

Dengan berfokus pada faktor penentu daya saing destinasi Kota Batu, diharapkan sektor pariwisata memiliki daya saing yang lebih baik karena strategi untuk meningkatkan daya saing destinasi harus dapat memuat keputusan tentang di mana dan bagaimana sumber daya yang terbatas harus diarahkan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan pada sektor pariwisata Kota Batu dalam memanfaatkan potensi yang ada dan menetapkan strategi kebijakan yang efektif dan efisien agar pariwisata Kota Batu dapat terus meningkat dan mampu berdaya saing.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP). AHPtelah diterima sebagai model pengambilan keputusan yang bersifat multikriteria oleh orang-orang akademik maupun praktisi (Mauro, 2001). Beberapa peneliti telah mengembangkan teknik-teknik pengambilan keputusan dengan multi atribut. Namun, Moutinho dkk. (1996) dalam Crouch (2007) meneliti bahwa penerapan metode AHP dalam konteks pariwisata memiliki banyak kelebihan. Moutinho dkk. mencatat bahwa pengambilan keputusan manajerial dalam pariwisata yang dihadapi oleh perencana atau *stakeholder* pariwisata biasanya melibatkan variabel yang sulit diukur secara langsung. Bahkan apabila semua variabel dapat diukur secara akurat, terdapat kesulitan dalam memperoleh data numerik dari kepentingan tiap-tiap variabel. AHP dirancang sebagai metode serbaguna untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Dengan menggunakan metode AHP, para ahli yang berpartisipasi dalam penelitian ini melakukan dua tahap penilaian mengenai faktor penentu daya saing wisata. Penilaian pertama adalah untuk membandingkan sub variabel dalam setiap lima variabel utama daya saing (sumber daya inti, sumber daya pendukung, manajemen destinasi, kondisi situasional, dan kondisi permintaan). Hasil penilaian tersebut adalah faktor penting daya saing destinasi wisata Kota Batu yang selanjutnya menjadi dasar pengambilan data penilaian AHP Tahap II. Pada penilaian kedua ini, para ahli diminta untuk menilai kinerja relatif dari tiga destinasi (Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang) sehubungan dengan faktor penting yang telah terpilih. Hasil penilaian AHP tahap II ini adalah faktor penentu daya saing destinasi wisata Kota Batu.

Arahan pengembangan daya saing destinasi Kota Batu disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor penentu daya saing yang telah dilakukan. Dalam penyusunan arahan pengembangan ini akan ditunjang dengan hasil wawancara peneliti dengan para ahli (*expert*) serta data sekunder mengenai pariwisata Kota Batu. Wawancara dimaksudkan untuk menemukan isu-isu strategis dari sudut pandang, pengalaman

persepsi, pengetahuan, dan sikap pakar dan *stakeholders* tentang faktor penentu daya saing Kota Batu.

B. Responden Penelitian

Kuesioner diberikan kepada sepuluh para ahli dalam memberikan masukan kedalam penelitian ini, baik instansi maupun akademisi yang dianggap berkompeten menyangkut bidang pariwisata. Ahli yang dipilih sebagai responden mewakili ahli planologi, ahli pariwisata, birokrat, serta pengelola objek wisata yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata.

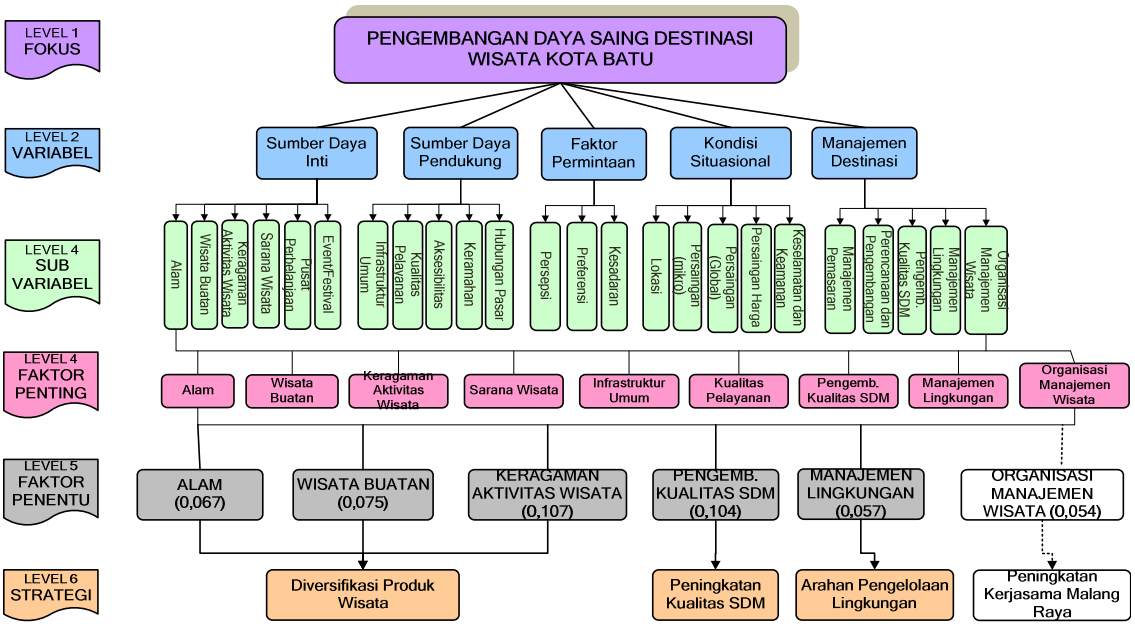
C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian didapatkan dari hasil modifikasi model daya saing Dwyer (2003). Modifikasi model didasarkan dari hasil *pilot test*. *Pilot test* bertujuan untuk menguji kesesuaian variabel-variabel model daya saing destinasi wisata Dwyer terhadap kondisi rill di Kota Batu. Hasil dari *pilot test* tersebut selanjutnya digunakan sebagai data kuesioner dalam penelitian ini. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian:

a. Sumber Daya Inti (*Core Resources*)*,* yang terdiri dari alam, budaya, sarana wisata, keragaman aktivitas wisata, pusat perbelanjaan, *event*, dan wisata buatan.
b. Sumber Daya Pendukung (*Suppporting Factor, & Resources*),yakniinfrastruktur umum, kualitas layanan, aksesibilitas, keramahan, dan hubungan pasar.
c. Manajemen Destinasi (*Destination Management*)*,* meliputi organisasi manajemen destinasi, manajemen pemasaran destinasi, kebijakan perencanaan dan pengembangan destinasi, pengembangan kualitas SDM dan manajemen lingkungan.
d. Faktor Permintaan (*Demand Factors*)*,* kategori ini terdiri dari tiga unsur utama permintaan pariwisata, yaitu kesadaran, persepsi dan preferensi.
e. Kondisi Situasional (*Situational Conditions*)*,* Kategori ini meliputi lokasi destinasi wisata, persaingan (mikro), persaingan global, persaingan harga, serta keselamatan dan keamanan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi alam Kota Batu membawa sektorpariwisata berkembang dengan pesat dan memiliki daya saing yang cukup diperhitungkan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Karena keindahan alamnya maka Kota Batu pada jaman kolonial Belanda mendapat julukan "*De Klein Switzerland*" atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Pada saat ini daya tarik wisata di Kota Batu tidak hanya berbasis pada alam tetapi juga buatan dan budaya. Beberapa wisata alam maupun wisata buatan menjadi wisata unggulan di Kota Batu seperti Cangar, Agrokusuma, Jatim Park I dan II, BNS, serta Museum Angkut. Berdasarkan hasil analisis AHP, diperoleh lima factor penentu dalam peningkatan daya saing destinasi wisata Kota Batu, yaitu (1) Faktor Alam, (2) Wisata Buatan, (3) Keragaman Aktivitas Wisata, (4) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan (5) Manajemen Lingkungan. Kelima factor penentu daya saing destinasi wisata ini nantinya akan menjadi dasar pengambilan arahan pengembangan dalam upaya peningkatan daya saing destinasi wisata Kota Batu. Arahan pengembangan ini didukung hasil wawancara oleh para pakar dan pihak instansi terkait bidang pariwisata serta data-data sekunder yang peneliti temukan selama proses penelitian. Responden yang diwawancara adalah dari birokrat yang diwakiliki Bappeda Kota Batu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, ahli pariwisata, ahli planologi, serta ahli lingkungan. Berikut adalah arahan pengembangan daya saing wisata Kota Batu berdasarkan prioritas. Prioritas ini didasarkan dari rumusan permasalahan yang ada di lapangan.



Gambar 1. Skema Arahan Pengembangan Daya Saing Destinasi Wisata Kota Batu

A. *Diversifikasi Produk Wisata*

Pengembangan kawasan wisata selalu bersifat dinamis, yaitu senantiasa sesuai dengan perkembangan teknologi, tren pasar, keunikan produk dan kebutuhan masyarakat yang merupakan wujud dari strategi pengembangan suatu kawasan wisata (Bappeda Kota Batu, 2013). Kota Batu merespon permintaan pasar dengan rencana pembangunan objek wisata buatan baru. Pembangunan objek wisata Kota Batu terpaku pada solusi pembuatan wisata buatan karena memang hal tersebut dirasa penyelesaian paling mudah untuk menjawab tantangan pasar. Pemerintah Kota Batu pun memberi layanan maksimal pada investor dengan memberikan kemudahan perizinan investasi. Namun, pada dasarnya atraksi wisata baru tidak harus dengan membangun objek wisata yang baru karena sebaiknya mengoptimalkan objek wisata yang sudah ada yakni dengan cara melengkapi fasilitas wisata, menambah wahana atau atraksi wisata. Dalam pembangunan objek wisata baru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selain dampak ekonomi seperti dampak lingkungan seperti daya dukung dan daya tampung lahan.

Selain itu, dengan visi pariwisata Kota Batu yaitu "Terwujudnya Pariwisata Kota Batu Bertaraf Internasional yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat", Pemerintah Kota Batu harus mulai melihat pangsa pasar wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara akan lebih tertarik pada sesuatu hal yang tidak mereka temui di negara asalnya. Oleh karena itu, pembangunan *alternative tourism* dapat menjadi salah satu bentuk inovasi wisata Kota Batu. *Alternative tourism* di Kota Batu dapat dengan mengoptimalkan objek-objek wisata alam serta desa ekowisata yang telah ada. Oleh karena itu, arahan pengembangan destinasi wisata Kota Batu adalah pembatasan pembangunan wisata buatan dan pengoptimalan wisata dengan diversifikasi produk wisata.

Pada arahan diversifikasi produk wisata dibedakan menjadi diversifikasi pada destinasi Kota Batu dan juga pada objek wisata. Diversifikasi destinasi Kota Batu bertujuan untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan sehingga wisatawan tidak hanya berwisata di objek-objek wisata yang ada melainkan juga dapat menikmati suasana Kota Batu. Selain itu, diversifikasi destinasi Kota Batu juga diharapkan dapat meningkatkan *multiplier effect* dari sektor pariwisata, sehingga

dampak positif dari wisata tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak swasta yang memiliki objek wisata, tetapi masyarakat lokal Kota Batu juga ikut merasakan.

Diversifikasi destinasi Kota Batu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan koridor Jalan Diponegoro dan Jalan Gajahmada Alun-Alun Kota Batu untuk membangun wisata belanja dan wisata kuliner. Koridor ini dapat dikembangkan menjadi wisata belanja seperti oleh-oleh khas Kota Batu, pakaian khas Kota Batu, aksesoris, maupun barang lainnya serta ditambah dengan wisata kuliner.Alun-alun Kota Batu sebagai ruang publik dan juga salah satu objek wisata menarik tanpa biaya tiket masuk menjadi magnet bagi para wisatawan. Dengan hadirnya pasar wisata diharapkan mampu menjadi sentra wisata belanja dan wisata kuliner bagi wisatawan. Pedagang yang berjualan pun diprioritaskan bagi masyarakat lokal Kota Batu. Pengembangan PKL pada prinsipnya selama tidak menganggu sirkulasi lalu lintas, pejalan kaki dan tidak berada di RTH masih diperbolehkan, sehingga strategi dari penataan PKL di Kota Batu adalah PKL dengan sistem bongkar pasang (tenda *knock down).*

Pada kondisi eksisting, di koridor Jalan Diponegoro, Jalan Gajahmada, dan sekitar Alun-alun Kota Batu telah ada kegiatan perdagangan dan jasa baik pertokoan maupun PKL, namun masih belum tertata dengan baik. Para PKL ini membuka barang dagangan mereka di trotoar sekeliling Alun-alun Kota Batu sehingga dapat mengganggu pejalan kaki yang hendak mengitari alun-alun melalui trotoar, penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag) Kota Batu telah menata dan merelokasi PKL di Alun-Alun Kota Batu. Hal ini dilakukan untuk menegakkan Peraturan Walikota Batu nomor 18 tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas PKL salah satunya kawasan Alun-Alun Kota Batu.

Sarana wisata pun menjadi salah satu pertimbangan wisatawan dalam mengunjungi suatu objek wisata. Kuantitas dan kualitas sarana wisata yang memadai di destinasi wisata dapat meningkatkan kepuasan wisatawan. Objek-objek wisata yang masih minim sarana wisata akan menyebabkan ketidaknyamanan wisatawan. Hal ini mayoritas terdapat pada wisata alam dimana pengelolaannya masih di bawah pengawasan Perhutani atau masyarakat lokal seperti Cangar, Coban Talun, dan Paralayang. Perbaikan dan penambahan sarana wisata perlu dilakukan di beberapa titik-titik objek wisata.

Untuk peningkatan akesibilitas, selain yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pembangunan sentral parkir serta angkutan wisata, Kota Batu dapat melakukan koordinasi dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang terkait pembangunan akses baru berupa jalan kereta api. Hal ini dikarenakan, kedua wilayah ini memiliki simpul transportasi berupa stasiun dan bandara yang tidak dimiliki oleh Kota Batu. jalan kereta api dapat dibangun dari Bandara Abdurahman Saleh (Kabupaten Malang) ke Kota Batu dengan melewati Kota Malang. Dengan demikian, wisatawan dimudahkan perjalanan wisatanya dengan adanya akses baru, selain itu juga dapat memajukan ketiga sektor pariwisata di Malang Raya.

B. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Suksesnya pariwisata suatu daerah tidak hanya bergantung kepada keberagaman objek-objek wisatanya saja, tetapi juga bergantung dari manajemen pengelolaannya, dimana peran serta masyarakat, industri wisata, dan pemerintah dalam membangun dan mempertahankan Kota Batu sebagai kota wisata diperlukan. Kegiatan pengembangan SDM pariwisata Kota Batu diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas SDM agar menjadi terampil dan ahli mulai dari aspek pelayanan (informasi dan pramuwisata), sampai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan pariwisata. Peningkatan kualitas

sumber daya manusia (SDM) pariwisata di Kota Batu dibagi menjadi tiga, yakni SDM aparatur, SDM usaha pariwisata, dan SDM masyarakat lokal.

Aparatur pemerintahan dituntut untuk selain menguasai substansi mengenai kepariwisataan, juga mampu mengakomodasi kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai dinas yang secara langsung menangani sektor pariwisata bertanggung jawab untuk membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan serta menjaga dan mempertahankan branding wisata Kota Batu dengan merancang dan melaksanakan berbagai program-program untuk menunjang keberadaan Kota Batu sebagai kota wisata. Namun, dalam praktiknya terlihat banyak di antara aparatur birokrasi pariwisata Kota Batu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang pariwisata. Oleh karena itu, program peningkatan kualitas SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah di Kota Batu, seperti adanya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan SDM perencana pariwisata dengan materi yang relevan perlu diselenggarakan.

Selain itu, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) juga perlu segera direalisasikan. Pembentukan lembaga yang mempunyai tugas utama mempromosikan wisata daerah tersebut sudah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata dan dipertegas oleh Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan perkembangan wisata di Kota Batu. Sekarang ini perkembangan wisata dinilai minim campur tangan Pemerintah Daerah. Ini dikarenakan para pelaku usaha wisata bergerak sendiri mempromosikan objek wisata yang ditawarkan. Hal itu berakibat pengenalan objek wisata tidak merata menyentuh semuanya. Oleh karena itu, dengan adanya Badan Promosi Pariwisata Daerah diharapkan dapat mempromosikan semua objek wisata yang ada di Kota Batu

Pariwisata Kota Batu yang kini mengalami perkembangan signifikan disebabkan oleh dorongan masyarakat dan peran para pengusaha wisata. Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, pelaku industri pariwisata harus melakukan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Sertifikasi kompetensi ini bertujuan untuk memberi pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dan meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja. Sedangkan sertifikasi usaha di bidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan meningkatkan produktivitas usaha pariwisata. Upaya sertifikasi kompetensi adalah dengan diselenggarakan pelatihan lisensi pemandu muda pada tahun 2015. Selain itu, sejumlah pelaku usaha wisata di Kota Batu mengikuti pelatihan pembinaan dan pengembangan paket wisata yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Peserta yang terdiri dari para pelaku usaha pariwisata biro dan agen perjalanan serta penggiat desa di Kota Batu mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan paket wisata di Malang Raya

Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata perlu diarahkan melalui program pemberdayaan di bidang pariwisata untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi, sehingga dampak adanya potensi pariwisata di Kota Batu dapat dirasakan oleh masyarakat lokal. Menurut RIPPDA Kota Batu, kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata perlu memperhatikan tiga aspek, yaitu:

a. Penguatan kapasitas dan peran masyarakat

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, di samping berorientasi pada penguatan usaha ekonomi masyarakat, juga harus berorientasi pada penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses

pengembangan, baik proses perencanaan maupun implementasi/pembangunan. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat di bidang pariwisara sangat diperlukan untuk memperluas *multiplier effect* kegiatan pariwisata itu sendiri.

Masyarakat lokal tidak hanya dijadikan sebagai objek tetapi juga dijadikan sebagai pelaku pariwisata. Untuk itu, diperlukan partisipasi dan penguatan lembaga masyarakat di tingkat lokal, seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok pengelola desa wisata, dan kelompok-kelompok usaha pariwisata lainnya untuk dapat memiliki peran aktif dalam proses pembangunan.

b. Penguatan akses dan kesempatan berusaha masyarakat

Penguatan usaha ekonomi masyarakat sebagai salah satu hal penting dalam pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan dengan optimalisasi nilai manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata bagi masyarakat Kota Batu. Sebagaimana menjadi salah satu prinsip dalam konsep pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat (community based tourism), bahwa pengembangan pariwisata harus memberikan nilai manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, peluang, kesempatan serta akses masyarakat terhadap nilai manfaat ekonomi pariwisata harus dioptimalkan.

Dengan adanya strategi pembangunan pasar wisata di Alun-alun Kota Batu adalah sebagai salah satu upaya untuk memberikan akses bagi masyarakat Kota Batu untuk ikut dalam kegiatan wisata. Hadirnya pasar wisata dapat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan UKM yang ada di Kota Batu. Selain itu, banyaknya masyarakat yang dilibatkan dapat mensukseskan program pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Kota Batu.

c. Pengembangan masyarakat sadar wisata

Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan peran dan keterlibatan semua pihak baik unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Masing-masing pihak memiliki fungsi dan peran sesuai kapasitasnya. Masyarakat sebagai salah satu stakeholder pariwisata memiliki peran strategis tidak saja sebagai penerima manfaat pengembangan pariwisata, tetapi juga sebagai pelaku yang mendorong keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayah masing-masing. Dukungan dan partisipasi masyarakat tersebut sangat dibutuhkan dalam menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat Kota Batu memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberadaan, perkembangan dan pertumbuhan wisata Kota Batu. Masyarakat yang memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh, serta memiliki *sense of belonging* terhadap Kota Batu, akan menjadikan Kota Batu akan semakin dikenal, tidak hanya dikenal karena pesona wisatanya saja, tetapi juga masyarakat yang ramah dapat membuat pengunjung betah.

Pemerintah Kota Batu telah merencanakan pengembangan desa wisata Kota Batu dimana peran masyarakat sadar wisata sangatlah penting. Terdapat kelembagaan pengelolaan desa wisata yang sebaiknya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat yang ditunjuk sebagai pengelola desa wisata. Untuk menunjang kemajuan desa wisata, dapat dilakukan kegiatan pelatihan atau *workshop* bagi masyarakat agar semakin paham mengenai potensi wisata alam yang ada di desa mereka.

Selain pengetahuan mengenai potensi wisata di daerah/lingkungan mereka, masyarakat juga diberikan pelatihan mengenai melayani wisatawan dengan baik. Tidak hanya ramah, tetapi masyarakat juga harus dapat menjaga persepsi positif dari wisatawan yang datang. Pelatihan-pelatihan mengenai keterampilan tingkah laku (*attitude*) dari Pemerintah Kota Batu yang bersifat formal dan infomal dapat dilakukan.

Pengembangan masyarakat sadar wisata juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pelayanan jasa pariwisata. Dengan adanya pendidikan yang baik di bidang pariwisata maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan pun akan meningkat, misalnya terkait dengan kemampuan berbahasa asing. Dengan peningkatan kualitas pelayanan sudah tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Dalam SDM aparatur perlu diadakan bimbingan dan pelatihan-pelatihan terkait sektor pariwisata serta pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagai lembaga yang mempunyai tugas utama mempromosikan wisata Kota Batu. Bagi pelaku industri pariwisata harus melakukan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Sertifikasi kompetensi ini bertujuan untuk memberi pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dan meningkatkan kualitas serta daya saing tenaga kerja sedangkan sertifikasi usaha di bidang pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan meningkatkan produktivitas usaha pariwisata. Selanjutnya, sebagai upaya peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata perlu diarahkan melalui program pemberdayaan di bidang pariwisata untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi, sehingga dampak adanya potensi pariwisata di Kota Batu dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.

C. Arahan Pengelolaan Lingkungan

Pembangunan dengan segala aktivitasnya akan mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Penting tidaknya pengaruh atau dampak tersebut dapat diukur dari jumlah manusia yang terkena dampak, berbalik atau tidaknya dampak, lama dampak berlangsung, luas persebaran dampaknya, intensitas dampak dan langsung atau tidak langsungnya pengaruh tersebut. Dampak kegiatan rekreasi pada area kehutanan (kelompok vegetasi dan fauna) dapat berupa penurunan dari potensi dan prosentasi tutupan hutan yang diakibatkan oleh penebangan pohon secara tidak terencana untuk lahan kawasan rekreasi dan wisata (Wall & Wright dalam Haryadi, 1997).

Selain itu pembukaan hutan (konversi hutan) untuk keperluan lahan kawasan rekreasi dan wisata dapat berpengaruh terhadap kondisi tanah yang telah dibuka tadi. Pada lereng-lereng punggung gunung, hal tersebut dapat mengakibatkan longsor dan banjir bandang karena terkupasnya permukaannya. Jika kelongsoran tersebut mencapai sungai, maka proses pendangkalan tidak bisa dielakkan. Dampak ikutannya adalah timbulnya banjir, berkurangnya populasi ikan dan berkurangnya sumber air tawar (air bersih dan air minum yang langsung layak pakai).

Pada pembahasan di atas diperlihatkan bahwa kerusakan atau penciutan areal hutan (dalam hal ini yang dipergunakan sebagai pengembangan kawasan rekreasi dan wisata) merupakan salah satu dampak negatif penting dari kegiatan di bidang kepariwisataan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2010-2030, disebutkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Batu merupakan wilayah pegunungan dengan didukung adanya potensi sumber daya alam yang masih cukup baik (ruang, air, vegetasi dan tanah). Kota Batu merupakan kota dengan luas wilayah administratif yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah kota lainnya. Peran dan fungsi yang diemban kota Batu sebagai daerah yang memiliki kawasan lindung dan konservasi membawa konsekuensi perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Namun pada kenyataan yang terjadi sebaliknya, kegiatan budidaya terutama sektor pariwisata di Kota Batu cenderung

terus tumbuh dan berkembang secara dinamis sehingga konversi hutan menjadi kawasan budidaya pun tidak dapat terelakkan.

Meskipun pembangunan kawasan rekreasi dan wisata Kota Batu memiliki banyak dampak positifnya seperti tersedianya lapangan kerja, naiknya pendapatan daerah, terbangunnya infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, namun berbagai dampak negatif juga timbul akibat kegiatan pengembangan kawasan rekreasi dan wisata tersebut. Beberapa diantaranya adalah hal-hal yang berpengaruh dan bersifat fisik seperti kemacetan, pengurasan sumber daya alam khususnya air, pencemaran dan peningkatan kepadatan bangunan yang cenderung menuju keadaan yang melampaui daya dukung lingkungannya. Beberapa dampak lingkungan akibat wisata di Kota Batu adalah kemacetan, alih fungsi lahan, banjir, serta kenaikan suhu udara. Selain itu, dampak negatif lainnya yang harus diwaspadai adalah berkurangnya sumber mata air dan longsor akibat alih fungsi lahan pada daerah konservasi.

Semua kegiatan pariwisata yang ada di Kota Batu harus dikontrol dengan sistem manajemen lingkungan agar dampaknya bisa dikelola. Hal ini sangat penting karena wilayah Kota Batu relatif rentan atau rawan terhadap bencana (daerahnya bergelombang dan sebagian merupakan kawasan konservasi). Oleh karenannya Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Kepariwisataan merupakan suatu sistem yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Batu untuk mengelola dampak lingkungan akibat kegiatan pariwisata sehingga dampak positifnya dapat dikembangkan secara maksimal dan dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Keberhasilan Kota Batu yang kini sebagai Kota Wisata rupanya menjadi pertimbangan utama dari para investor untuk menanamkan investasinya. Banyaknya investor pariwisata yang berminat berinvestasi di Kota Batu pun disambut baik oleh pemerintah Kota Batu dengan mempermudah akses perijinan investasi. Hal ini dapat berdampak positif maupun negatif bagi perkembangan Kota Batu. Di satu sisi, Kota Batu diuntungkan dengan masuknya investor sehingga mendapat keuntungan untuk pendapat daerah Kota Batu. Namun, di sisi lain, Kota Batu harus tetap waspada akan dampak lingkungan akibat pesatnya pembangunan di Kota Batu dalam sektor pariwisata. Meskipun, Kota Batu memberikan kemudahan dalam perizinan investor tetapi Pemerintah harus tetap memperhatikan aturan-aturan, salah satunya adalah kajian AMDAL, UKL, dan UPL sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah pun harus tetap melakukan evaluasi dan monitoring pada objek-objek wisata dalam pengelolaan lingkungan yang telah tertuang pada kajian AMDAL.

Dengan banyaknya implikasi terhadap lingkungan seperti diuraikan di atas maka Kota Batu perlu adanya menerapkan arahan pengelolaan lingkungan sebagai upaya penanggulangan dampak negatif lingkungan seperti (1) Penerbitan regulasi yang mendorong terjadinya perilaku bersih, efisien, dan aman di dalam manajemen wisata, dan juga mendorong peningkatan kesadaran lingkungan melalui program pelatihan dan pendampingan masyarakat, (2) Melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bagi objek, destinasi, atau kawasan pariwisata, (3) Merencanakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman vegetasi di koridor jalan guna mereduksi cemaran udara dan peredam kebisingan, serta (4) Penelaahan lebih lanjut tentang penanggulangan atau pencegahan dampak negatif dan peningkatan dampak positif melalui riset atau penelitian.

D. Peningkatan Kerjasama Bidang Pariwisata dalam Lingkup Malang Raya

Pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batasan administratif wilayah atau batasan akses atau pilihan terhadap produk pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Kota Batu perlu mempertimbangkan konteks regional dengan melakukan kerja sama secara sinergis dengan kabupaten/kota lain khusunya Kabupaten Malang dan Kota Malang yang termasuk dalam satu kawasan pengembangan pariwisata baik dalam skala regional Jawa Timur maupun nasional.

Kerja sama terpadu diperlukan untuk membangun daya tarik kolektif yang kuat sebagai suatu kesatuan destinasi dalam skala regional, nasional, dan internasional. Namun, pada kenyataannya, kerja sama terkait sektor pariwisata di Kota Batu masih kurang. Sulitnya perkembangan pariwisata di Malang Raya disebabkan oleh Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah masih enggan untuk menjalin kerja sama di bidang pariwisata. Besarnya egosentral pimpinan daerah di Malang Raya membuat pariwisata sulit berkembang. Potensi wisata di tiga daerah ini memiliki tipe yang berbeda hingga akan menguntungkan apabila disatukan. Kota Malang memiliki potensi wisata perkotaan seperti wisata kuliner dan belanja. Kabupaten Malang memiliki wisata seribu pantai, serta Kota Batu punya potensi wisata alam pegunungan dan wisata buatan.

Pembangunan pariwisata secara parsial direncanakan tidak hanya memiliki keterkaitan ke dalam (*backward linkages*), tetapi juga memiliki keterkaitan keluar (*forward linkages*), yaitu mengembangkan jaringan keterpaduan antar wilayah dan antar provinsi. Konsep ini menjadi dasar dalam pembangunan perwilayahan kepariwisataan, mengingat distribusi kunjungan wisatawan tidak hanya dari satu titik saja, tetapi juga tersebar di wilayah provinsi, sehingga pengembangan pariwisata Kota Batu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu destinasi wisata, tetapi juga perlu mengembangkan keterkaitan produk atau pemasaran yang terintegrasi dengan wilayah lain. Untuk itu, perlu adanya keterpaduan kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, serta Pemerintah Kota Malang sehingga tercipta koordinasi dan sinkronisasi yang dapat mendasari pelaksanaan kegiatan pariwisata.

Kesepakatan mengenai kerja sama dan koordinasi ketiga daerah ini haruslah tertuang dengan jelas pada kebijakan kepariwisataan (RIPPDA) masing-masing daerah serta tindakan konkret untuk mengimplementasikan kerja sama tersebut. Untuk saat ini, kesepakatan baik kerja sama maupun koordinasi antar wilayah belumlah tercantum pada RIPPDA Kota Batu. Kerja sama dan koordinasi yang baik akan terwujud jika ditunjang dengan adanya usaha efektif untuk mengubah paradigma semangat ego-sektoral dan ego-kedaerahan menjadi paradigma kebersamaan. Untuk mengakomodasi proses kerja sama pengembangan kawasan pariwisata antar daerah, perlu dibangun forum jaringan komunikasi daerah dan antar daerah hingga tingkat desa yang melibatkan masyarakat, LSM, pejabat pemerintah, dan anggota DPRD dalam rangka membangun kesepahaman terhadap urgensitas pengembangan kawasan pariwisata melalui kerja sama antar daerah.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan pariwisata di seluruh dunia mengalami perkembangan yang pesat tak terkecuali Indonesia. Seluruh destinasi wisata pun berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pariwisatanya agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal ini menyebabkan persaingan pariwisata menjadi semakin kompetitif. Dalam pasar

yang semakin kompetitif, pemahaman tentang meningkatkan dan mempertahankan daya saing adalah masalah mendasar dalam perencanaan dan manajemen wisata.

Penelitian ini mencoba merumuskan arahan pengembangan daya saing destinasi Kota Batu berdasarkan faktor penentu daya saing destinasi dengan pendekatan model destinasi daya saing Dwyer. Hal ini dikarenakan mengingat bahwa beberapa faktor daya saing destinasi wisata akan jauh lebih penting daripada yang lain sehingga apabila Kota Batu ingin meningkatkan kinerja kompetitifnya, harus lebih memfokuskan perhatian dan sumber daya pada faktor penentu yang memiliki pengaruh terbesar. Dari hasil penelitian, terdapat empat arahan pengembangan daya saing destinasi wisata Kota Batu, yaitu (1) Diversifikasi Produk Wisata; (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, baik dari pemerintah, industri wisata, dan juga masyarakat lokal; (3) Arahan Pengelolaan Lingkungan; serta (4) Peningkatan Kerjasama Bidang Pariwisata dalam Lingkup Malang Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2016). *Statistik Daerah Kota Batu Tahun 2016*

Bappeda Kota Batu. (2009). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030.*

Bappeda Kota Batu. (2013). *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Batu Tahun 2014-2029.*

Crouch, Geoffrey L. 2007. *Modelling Destination Competitiveness: A Survey and Analysis of The Impact of Competitiveness Attributes*. Australia: Sustainable Tourism CRC.

Dwyer, Larry and Kim, Chlwon. 2003. Destination Competitiveness: Determinants and Indicators*. Current Issues in Tourism Journal. Londo*n. England: Routledge, Vol 6 No 5, pp 369-414.

Haryadi. 1997. *Pengembangan Kawasan Wisata dan Rekreasi*. Yogyakarta: PPLH UGM

Mauro, J.P. and Nordvik, A.C. 2001. *Multi-Criteria Decision Support System and Data Warehouse for Designing and Monitoring Sustainable Industrial Strategies*, Italia

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Pengembangan Perumahan Masyarakat Pulau Kecil Sebagai Penunjang Wisata Kota

Shirly Wunas1, Mimi Arifin[1], Venny Veronica Natalia[1], Pratiwi Mushar2

[1]Departemen Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
[2]Departemen Arsitektur,Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: shirly_wunas@yahoo.co.id, mimiarifin@yahoo.com, veronica_natalia@ymail.com, tiwiarch19@gmail.com

ABSTRAK

Paper ini membahas konsep pengembangan perumahan pada pulau kecil berbasis wisata. Analisis diawali dengan membahas karakteristik site yang terkait dengan pola tapak perumahan masyarakat lokal dan fasilitasnya sebagai sarana penunjang wisata pulau kecil, kemudian selanjutnya menganalisis perilaku dan aktifitas masyarakat lokal yang terkait dengan upaya pengembangan perumahannya sebagai penunjang wisata. Lokasi penelitian di Pulau Samalona, data berasal dari pengamatan langsung, mempergunakan alat bantu GPS (tracking), serta data wawancara langsung dengan 15 Kepala Keluarga. Analisis spatial secara PPA (point pattern analysis), dan analisis deskriptif komparatif berdasarkan kebijakan dan standard perencanaan perumahan sehat, layak huni. Hasil penelitian: 1) terdapat 52,0% rumah sewa yang terletak pada site yang rentan terhadap keselamatan bangunan, perumahan berkembang tidak teratur pada lingkar luar/ wilayah tepi. Keterkaitan antar bangunan (rumah dan bale bale) dengan objek wisata (daya Tarik alam) umumnya mempunyai akses dan jarak capai yang sama, sehingga kesempatan sama untuk nilai jual terhadap hal yang dapat dilakukan, hal yang dapat dilihat, serta hal yang dapat dibeli, 2) seluruh pemilik bangunan mempunyai ikatan keluarga serta beraktivitas sebagai penyedia rumah sewa dan bale bale. Tapak rumah terbentuk berdasarkan penguasaan lahan kepemilikan penduduk lokal, ikatan keluarga yang dekat dan keberadaan pohon dan 3) pengembangan dan penataan bangunan menggunakan konsep pengendalian, khususnya pada lahan rawan bencana, dan perumahan dilengkapi dengan sumur resapan. konsep revitalisasi berbasis masyarakat dengan mengangkat dan menata rumah panggung sesuai fungsi bangunan (pribadi dan sewa) yang mengikuti struktur jaringan jalan setapak dan garis tanggul yang ada, serta peningkatan pengadaan vegetasi tanaman lokal (kalumpang, kelapa, tanaman produktif).

Kata kunci: perumahan, pulau kecil, wisata, rumah sewa

I. PENDAHULUAN

Pulau-pulau kecil Indonesia umumnya memiliki pemandangan laut/ alam yang luas terbuka, bentangan pasir putih halus, riak-riak air yang berpotensi untuk wisata aktif ataupun pasif bagi penduduk perkotaan. Sebagian besar dari pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir Indonesia yang sangat potensi untuk kegiatan wisata telah dihuni ataupun dikuasai lahannya oleh penduduk lokal secara turun temurun. Penduduk tersebut mempunyai ikatan keluarga yang sangat kuat (contoh dari penduduk wilayah pesisir Botutonuo di Gorontalo, hunian pertama dibangun sebelum 1945, diikuti oleh hunian dari saudara dan anak-anaknya secara turun temurun (wunas,2014), demikian juga hunian yang terdapat di pantai Nirwana Kota BauBau yang dikuasai oleh 3 kepala keluarga induk, Pulau Samalona yang dikuasai oleh 7 nama pemilik (momotrip journal,2017). Permasalahan timbul terkait dengan jumlah wisatawan yang meningkat (3,5%/tahun) ke pulau Samalona, dan terkait dengan

pembangunan villa (swasta, penduduk eksternal) dan rumah sewa/ rumah produktif (penduduk lokal) sesuai hak dan izin atas penguasaan pemilikan tanah.

Walaupun demikian, pembangunan tersebut menunjukkan penduduk lokal telah mampu secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan huniannya, dan membangun usaha ekonomi dengan hunian sewa, walaupun belum memenuhi norma standard perencanaan perumahan (Permen Perumahan Rakyat RI.No.13 tahun 2011), belum memenuhi standard kelayakan kunjungan, dan kelayakan investasi.



Sumber:(http://journal.momotrip.co.id, akses Juli 2017)

Gambar 1. Indikasi 7 nama yang menyatakan sebagai pemilik pulau, tercantum pada papan yang terletak di dermaga Pulau Samalona. Saat ini sesuai hasil wawancara dengan cucu dari dari salah satu pemilik (Minggu Dg Tika) papan nama tersebut telah lapuk, dan terbawa angin (Juli 2017).

Permasalahan pembangunan tersebut didukung dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana wilayah No. 217/KPTS/M/2002, karena perumahan wilayah pesisir dan pulau juga merupakan wilayah prioritas dalam strategi peningkatan kualitas lingkungan permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan mendorong pengembangan rumah sewa di wilayah pesisir dan pulau.

Selain itu permasalahan penduduk pulau kecil tersebut juga didukung dengan Permen Kebudayaan dan Pariwisata (KM.67/UM.001/MKP/2004, UU RI No.1 tahun 2014) yang mengarahkan tentang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata di pulau-pulau kecil, dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

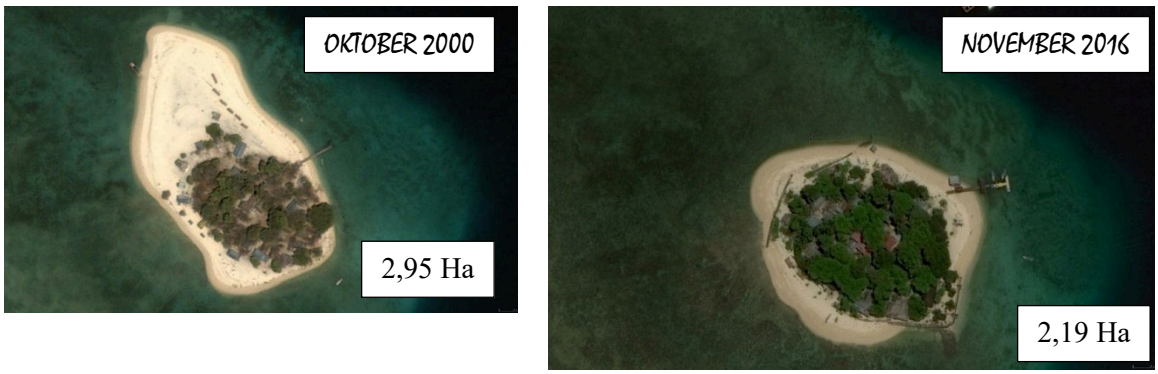
Meskipun demikian, aspek kelayakan huni, keselamatan bangunan merupakan aspek utama dalam pengembangan fungsi wisata untuk pulau-pulau kecil/ wilayah pesisir, agar dapat menjadi kawasan/ pulau kecil yang layak kunjungan, dan layak investasi, serta sekaligus dapat layak untuk peningkatan ekonomi masyarakat lokal (wunas, dkk, 2014).

Penggunaan wilayah pesisir dan pulau secara berlebihan dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan, dan berdasarkan UU nomor 27 tahun 2007, pengelolaan wilayah pesisir tersebut seharusnya didukung dengan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Saat ini pulau kecil yang sangat berpotensi untuk kegiatan wisata di Kota Makassar, salah satunya adalah Pulau Samalona, yang merupakan bagian dari gugus pulau di Selat Makassar, yang disebut sebagai kepulauan spermonde. Pulau Samalona dipengaruhi angin dari Timur laut dan Barat Laut, bentuk pulau berubah sesuai arah angin dan dimensi pulau berkurang (gambar 2). Penduduk lokal

membangun perumahan dan *bale-bale* (gazebo) pada ruang tepi pantai, dan perluasan bangunan rumah dilakukan sesuai kebutuhan wisatawan, tanpa mempertimbangkan keselamatan bangunan dan penghuni yang sekaligus dapat terkait dengan penghasilannya. Wilayah pesisir seharusnya mempunyai citra kawasan yang berkarakter ***liveability, investability*** **dan** ***visitability,*** sebagai wisata kota. (Tenri, Maruddani, 2009). Kegiatan wisata sangat memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal di sekitar tempat wisata. Masyarakat secara langsung menjaga kualitas kawasan wisata sehingga kelestarian lingkungan dapat tetap terjaga dan aktivitas wisata dapat terus berlangsung dan membawa manfaat ekonomi bagi penduduk setempat (Adrianto, 2004). Sesuai Dahuri (2004), terdapat 13 prinsip dasar pengelolaan wilayah pesisir, antara lain adalah tata ruang daratan dan perairan harus dikelola secara terpadu, serta pengeloaannya disesuaikan dengan sifat dan dinamika alam yaitu tepat dalam pembangunan wilayah pesisir,

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut di atas, tujuan dari materi pembahasan ini adalah menjelaskan tentang konsep pengembangan perumahan pada pulau kecil berbasis wisata. Analisis diawali dengan membahas karakteristik site yang terkait dengan pola tapak perumahan masyarakat lokal dan fasilitasnya sebagai sarana penunjang wisata pulau kecil, kemudian selanjutnya menganalisis perilaku dan aktifitas masyarakat lokal yang terkait dengan upaya pengembangan perumahannya sebagai penunjang wisata dan ekonomi.



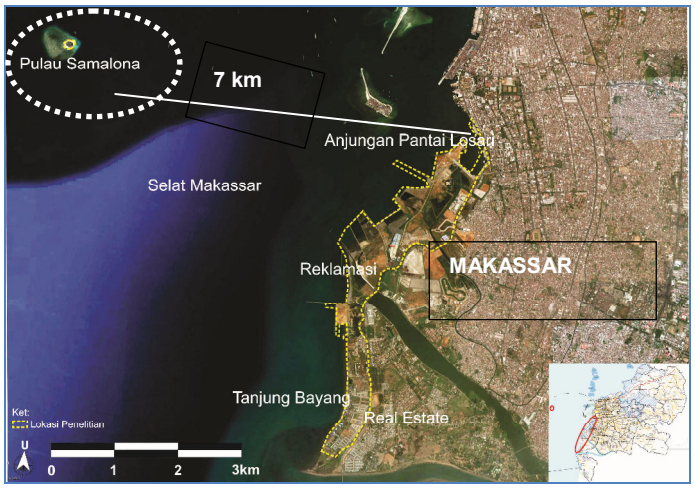
Sumber: Dikembangkan dari peta Citra Google Earth, Akses: Juni, 2017
Gambar 2. Ilustrasi peta citra tentang perubahan bentuk dan dimensi pulau Samalona

Maksud dari tujuan pembahasan ini adalah mengungkapkan kelayakan hunian dan prasarananya terkait dengan site dan fungsi antar ruang yang dapat menunjang kegiatan wisata pulau/ pesisir dan mengungkapkan perilaku penduduk dan kearifan lokalnya dalam pengembangan perumahannya.

Ruang lingkup pembahasan ini terfokus pada penataan perumahan berbasis wisata perkotaan di pulau kecil Samalona.

II. METODE

Lokasi dari materi pembahasan ini adalah Pulau Samalona, Kota Makassar (gambar 3). Secara geografis terletak pada $119^0$20’33,3”-$119^0$20’38,3”BT dan $05^0$07’26,9”-$05^0$07’32,2” LS. Luas wilayah Pulau Samalona ± 2,34 Ha (Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2006).



Sumber: dikembangkan dari peta Citra Google Earth, akses Juni, 2017

Gambar 3. Illustrasi peta lokasi penelitian.

Pulau Samalona adalah salah satu dari 12 pulau yang terletak dalam Wilayah kepulauan Spermonde, termasuk dalam wilayah Pengembangan V (WP) Kota Makassar, yang diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui kegiatan pariwisata (RTRW Kota Makassar 2015-2034). Saat ini pembangunan perumahan dengan fungsi sewa berkembang 24% dalam 6 tahun terakhir (2011-2016). Tapak rumah dan *bale bale*/ gazebo dibangun sesuai penguasaan lahan, mengabaikan standard perumahan layak huni dan layak kunjungan.

Data diperoleh dari wawancara langsung dengan seluruh Kepala Keluarga (15 responden) yang mempunyai rumah dan *bale bale/* gazebo, serta PKL di Pulau Samalona. Selain itu data diperoleh dari pengamatan dan sketsa, mempergunakan alat bantu GPS *(tracking)*. Data diolah dengan mempergunakan program spss, dan analisis kearifan lokal secara deskriptif komparatif berdasarkan kebijakan dan standard perencanaan perumahan layak huni, serta analisis tapak bangunan secara spatial (*PPA/ point pattern analysis)* dan konsep penataan perumahan berbasis wisata dan ramah lingkungan (terlampir kerangka konsep pembahasan).



Gambar 4. Kerangka Konsep Penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Samalona memiliki jumlah penduduk 82 jiwa dengan 15 kepala keluarga/ KK (profil pulau kecil Kota Makassar, 2014). Etnis penduduk dominan adalah suku Makassar, berasal dari Galesong Takalar (wawancara Mei 2017).

Tabel 1. angka pertumbuhan pembangunan perumahan (wawancara Mei 2017)

Tahun pembangunan	N	%
< 1990	9	36
1991-2000	3	12
2001-2010	7	28
2011-2016	6	24
Jumlah	25	100

Rata-rata 5-6 jiwa per KK. Perumahan dengan fungsi hunian sewa berkembang dalam 16 tahun terakhir (52%, tabel 1), seiring dengan perkembangan kunjungan wisatawan ke Pulau Samalona (39.600 wisatawan/ tahun, (berdasarkan dari rata-rata jumlah angkutan perahu per tahun).

A. Analisis karakteristik site terkait dengan pola tapak perumahan dan sarana penunjang wisata

Tapak bangunan perumahan dan *bale bale*/ gazebo berkembang tidak teratur dalam ruang lingkar luar dari zona tengah, terdapat 52,0% rumah sewa yang terletak pada site yang rentan terhadap keselamatan bangunan, yaitu terancam dari angin Barat Laut dan Timur Laut. Perumahan terbangun dalam bentuk kelompok, tidak nampak struktur ruang yang tegas (gambar 5).



Sumber: Dikembangkan dari peta Citra Google Earth, Akses: Juni, 2017

Gambar 5. Ilustrasi kondisi pertumbuhan tapak perumahan Pulau Samalona

Berdasarkan studi mitigasi untuk pulau samalona (Wikantari, 2015), ruang wilayah yang mendapat pengaruh angin dari Barat Laut dan Timur Laut diarahkan bangunan 1 lantai. Saat ini terdapat 24% rumah 2 lantai (bentuk rumah panggung) yang terletak dalam ruang yang rawan, dan sebagian dari bentuk rumah panggung sudah terbangun kolong rumahnya. Bentuk rumah landed (52%) dan rumah 2 lantai (15%) juga dapat mengurangi daerah resapan air untuk dimensi pulau kecil. Sesuai Witoelar (2009), setiap luas tutupan bangunan yang <50m^2 membutuhkan satu kolam penampung air dengan dimensi 1,5m^3. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perumahan kehilangan air resapan sebanyak 25,5m^3.

Tabel 2. Bentuk konstruksi bangunan perumahan di Pulau Samalona (hasil pengamatan lansung, Mei 2017)

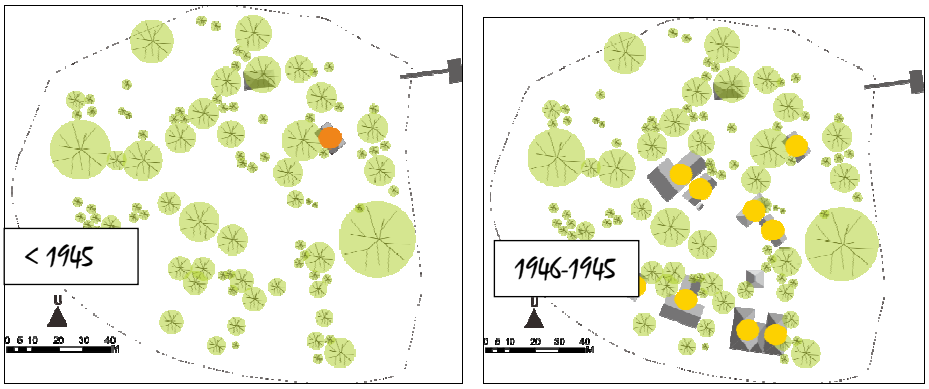
Bentuk konstruksi bangunan	N	%
Rumah panggung	8	32
Rumah 2 lantai (kolong rumah terbangun	4	16
Rumah *landed*/ rumah biasa	13	52
Jumlah	25	100

Selain itu terdapat 14 kamar bilas yang keseluruhannya mempergunakan air tanah, oleh sebab itu dikhawatirkan pemanfaatan air tanah yang berlebihan, dan daerah resapan air berkurang dapat menimbulkan dampak terhadap intrusi air laut, penurunan muka air tanah, amblesan tanah yang dapat menimbulkan genangan di musim penghujan.

Bangunan bilas dan warung serta PKL terletak menyebar merata pada seluruh ruang pulau, sehingga memudahkan akses dari bangunan rumah dan *bale-bale* dengan sarana pelayanannya. Demikian juga dengan objek wisata (daya Tarik alam) umumnya mempunyai akses dan jarak capai yang sama, sehingga seluruh wisatawan mempunyai kesempatan sama untuk menikmati nilai wisata terhadap hal yang dapat dilakukan, hal yang dapat dilihat, serta hal yang dapat dibeli.

B. Analisis perilaku dan aktifitas masyarakat lokal terkait upaya pengembangan perumahan

Seluruh pemilik bangunan (< tahun 2010) mempunyai ikatan keluarga serta beraktivitas sebagai penyedia rumah sewa dan *bale bale* (100%). Sebagian penduduk lainnya sebagai penyedia alat olah raga air dan sebagian kecil sebagai nelayan.



Sumber: hasil wawancara dengan cucu dari salah satu keluarga dari 7 pemilik pulau Samalona

Gambar 6. Illustrasi lokasi tapak awal perumahan di Pulau Samalona, sebelum 1945, yaitu pasanggrahan yang dibangun oleh Belanda, dengan penjaga rumah bernama Hamja Dg Rurung, dan berkembang menjadi 9 rumah sebelum 1990 (

Secara spatial, pola tapak bangunan terbentuk secara kelompok sesuai dengan penguasaan pemilikan lahan, dan ikatan kekerabatan keluarga, serta sesuai dengan keberadaan pohon (penduduk tidak diizinkan menebang pohon untuk pembangunan rumah). Tapak bangunan perumahan dan *bale bale* terbangun tidak teratur, salah satu penyebabnya adalah keberadaan vegetasi. Terdapat 44% rumah dengan mono fungsi sewa, dan 20% diantara pemilik rumah tersebut telah memisahkan rumah dengan fungsi tempat tinggalnya. Adapun bentuk bangunan dengan fungsi ganda adalah rumah panggung, berkarakter bugis Makassar (tabel 3). Penduduk lokal

telah dapat bertindak secara cerdas dengan memisahkan hunian pribadi dan hunian sewa. Jika rumah disewakan, maka pemilik rumah akan numpang tinggal sementara di rumah tetangga ataupun memisahkan diri dengan tinggal di kolong rumah panggungnya.

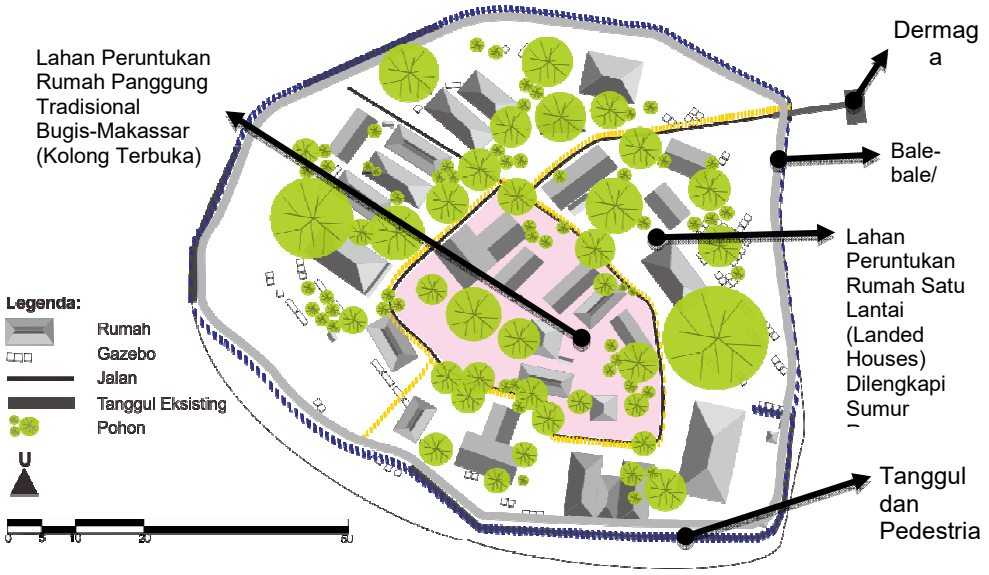
Tabel 3. Karakteristik fungsi perumahan penduduk Pulau Samalona

Fungsi rumah penduduk	N	%
Rumah, mono fungsi hunian	5	20
Rumah, mono fungsi sewa	11	44
Rumah fungsi sewa dan hunian	7	28
Rumah, fungsi usaha warung	2	8
Jumlah	25	100

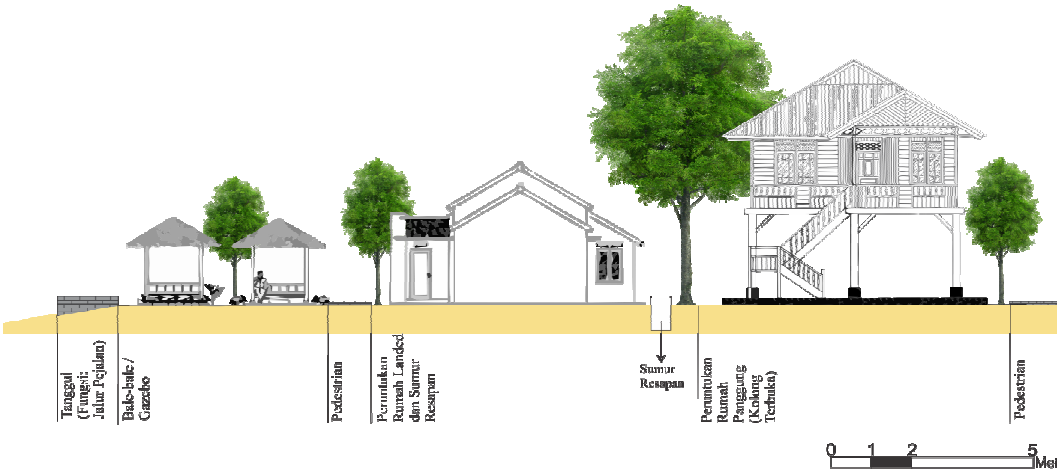
Bale bale dibangun di sekitar pemilik rumah, dan lokasi strategis yaitu pada bagian tepi pantai ataupun pada ruang yang terdapat pohon peneduh. Jumlah bale bale yang dibangun adalah sesuai ruang yang dikuasai oleh pemilik, dan sesuai dengan ketersediaan ruang strategis (tersebut di atas). Terdapat satu KK yang memiliki >40 *bale bale,* karena memiliki ruang strategis yang luas, tetapi pada musim angin Timur Laut, bentuk pulau berubah dan ketersediaan ruang juga berkurang.

C. Konsep pengembangan perumahan pada pulau kecil, berbasis wisata

Rumah fungsi sewa dapat dipertahankan. Pengembangan dan penataannya menggunakan konsep pengendalian pembangunan pada lahan rawan bencana, dan perumahan dilengkapi dengan sumur resapan (air hujan dan air bilas), konsep revitalisasi berbasis masyarakat dengan mengangkat dan menata rumah panggung ciri Bugis Makassar, sesuai fungsi bangunan yang mengikuti struktur jaringan jalan setapak dan garis tanggul yang ada (gambar 7 dan 8). Tanggul penahan ombak dikembangkan pada sekeliling pantai sesuai elevasi tanah, dan Bale bale ditata mengikuti garis pantai/ tanggul, Pohon pohon sebagai pengarah angin ditingkatkan pada bagian tepi pulau, serta peningkatan pengadaan vegetasi tanaman lokal (kalumpang, kelapa, tanaman produktif sebagai penahan angin.



Gambar 7. Peta indikasi konsep pengembangan perumahan dalam pulau kecil berbasis wisata



Gambar 8. Illustrasi transek untuk konsep pengembangan perumahan dan *bale bale* dalam pulau kecil berbasis wisata

IV. KESIMPULAN

1)Tapak bangunan perumahan sewa berkembang kuat pada wilayah rawan bencana, dan perkembangan perumahan mengabaikan resapan air. Posisi tapak perumahan, *bale bale* mempunyai akses yang mudah untuk mencapai objek wisata, dan sarana pelayanan wisata, sehingga semua wisatawan mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati objek wisata yang dapat dilakukan (to do), dilihat (to see) dan dibeli (to buy). 2) Seluruh pemilik bangunan di Pulau Samalona mempunyai ikatan keluarga yang sangat kuat, beraktifitas sebagai penyedia rumah sewa, *bale bale*, penyedia peralatan olah raga air dan sebagian kecil sebagai nelayan. Pembangunan perumahan dan *bale bale* berdasarkan kearifan lokal, yaitu dibangun pada lahan yang dikuasai keluarga, tanpa menebang pohon yang ada, 3) Konsep pengembangan perumahan pada wilayah rawan diarahkan menggunakan konsep pengendalian pembangunan berbasis ramah lingkungan, yaitu memaksimalkan air masuk kembali ke dalam tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dahuri Rokhmin, dan Ginting Sapta Putra. (2013). Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Balai Pustaka, Indonesia

Rachmat Witoelar. (2009). Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 12 tahun 2009. Tentang Pemanfaatan air hujan

Wikantari, R dkk. (2015). *Mitigasi bencana di Pulau Kecil:* Model tata ruang dan bangunan tanggap bencana di Pulau Samalona. Makassar. Laporan penelitian unggulan Universitas Hasanuddin

Wunas, S dkk. (2014). Masterplan pengembangan kawasan wisata Olele dan kawasan wisata Botutonuo, Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo

Kepmen Permukiman dan Prasarana wilayah No. 217/KPTS/M/2002, tentang kebijakan dan strategi nasional perumahan dan permukiman (KSNPP)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup. No.12 tahun 2009. Tentang pemanfaatan air hujan.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (KM.67/UM.001/MKP/2004, UU RI No.1 tahun 2014) tentang Pedoman umum pengembangan pariwisata di pulau pulau kecil

Tenri D, Maruddani W. 2009. Economic Community Activity In Self-Help Elevated Traditional Housing On Coastal Area At South And Southeast Sulawesi. , Proceedings Senvar X & Conveesh I

Jurnal:

L. Adrianto and Y Matsuda. Environment, Development and Sustainability. 2004. https://link.springer.com/article/10.1023/B:ENVI.0000029902.39214.d0 akses Juli 2017

Evaluasi Kualitas Visual Koridor Jalur Wisata Kota Batu

Sitti Wardiningsih[1], Asep Syafruddin[1], Ray March Syahadat[1], dan Priambudi Trie Putra[1]

[1]*Program Studi Arsitektur Lanskap, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jakarta*
Email: wardiningsih.sitti@gmail.com; safrudinasee@gmail.com; ray.arl@istn.ac.id; pram.arl@istn.ac.id

ABSTRAK

Kondisi sebuah kawasan wisata tidak terlepas dari aksesbilitas atau pencapaian kawasan tersebut. Adapun Kota Batu memiliki beberapa wisata unggulan yang menjadi ikon Kota Batu, Banyak objek wisata unggulan tersebar di sepanjang koridor jalan mulai dari Jalan Oro-oro Ombo hingga Jalan Abdul Gani. Hal ini menjadikan koridor tersebut menjadi satu kesatuan kawasan wisata sebagai jalur wisata. Kenyataanya meski merupakan satu kesatuan, keadilan estetika belum terpenuhi pada seluruh ruas jalan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas koridor jalur wisata Kota Batu dengan menggunakan pendekatan sceenic beauty estimation (SBE). Hasil yang diperoleh, terdapat 12 titik lanskap jalan yang memiliki nilai SBE < -20 yang memiliki arti kualitas visual yang buruk. Secara umum lanskap jalan dengan kualitas yang buruk dikarenakan oleh minim dan hambarnya elemen penyusun lanskap jalan itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas visual lanskap yang buruk, maka perlu dilakukan perancangan elemen lanskap jalan atau street furniture yang dikhususkan pada titik lanskap dengan nilai SBE yang rendah baik berupa hardscape maupun softscape.

Kata kunci: keadilan estetika, lanskap, SBE, sceenic beauty estimation, street furniture.

I. PENDAHULUAN

Kota Batu memiliki wisata unggulan yang menjadi ikon Kota Batu dan destinasi favorit wisatawan, yaitu Batu Night Spectacular, Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Museum Angkut. Semua objek wisata terbentang dari Jalan Oro-oro Ombo hingga jalan Abdul Gani sepanjang 4,8 km. Dengan banyaknya atraksi wisata di sepanjang jalur ini, kawasan ini menjadi sebuah kesatuan kawasan wisata yang utuh.

Semuanya atraksi wisata sepanjang koridor jalur wisata Kota Batu memiliki keunggulan masing-masing. Akan tetapi meski sudah berada pada satu kawasan wisata, sepanjang jalur kawasan wisata ini belum mencirikan karakter atau identitas kawasan tersebut. Selain itu pada sepanjang jalan kawasan wisata ini banyak jalan yang belum dilengkapi sarana dan prasarana yang baik untuk mobilitas pengunjung. Dengan demikian lanskap jalan atau *streetscape* merupakan hal yang vital untuk diperhatikan.

Lanskap jalan adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan. Bentuknya bukan hanya dari elemen lanskap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, tetapi juga terbentuk dari elemen lanskap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. Lanskap jalan ini mempunyai ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama. Kenyamanan pemakai jalan diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, nyaman, memenuhi fungsi keamanan, dan mengeliminasi pengaruh negatif (Direktorat Bina Marga, 1996; Nurisjah dan Adriani, 2015). Selain itu jalan juga harus memenuhi fungsi utamanya untuk memberi akses bagi pengguna, penghubung antar wilayah, dan menciptakan sarana pergerakan

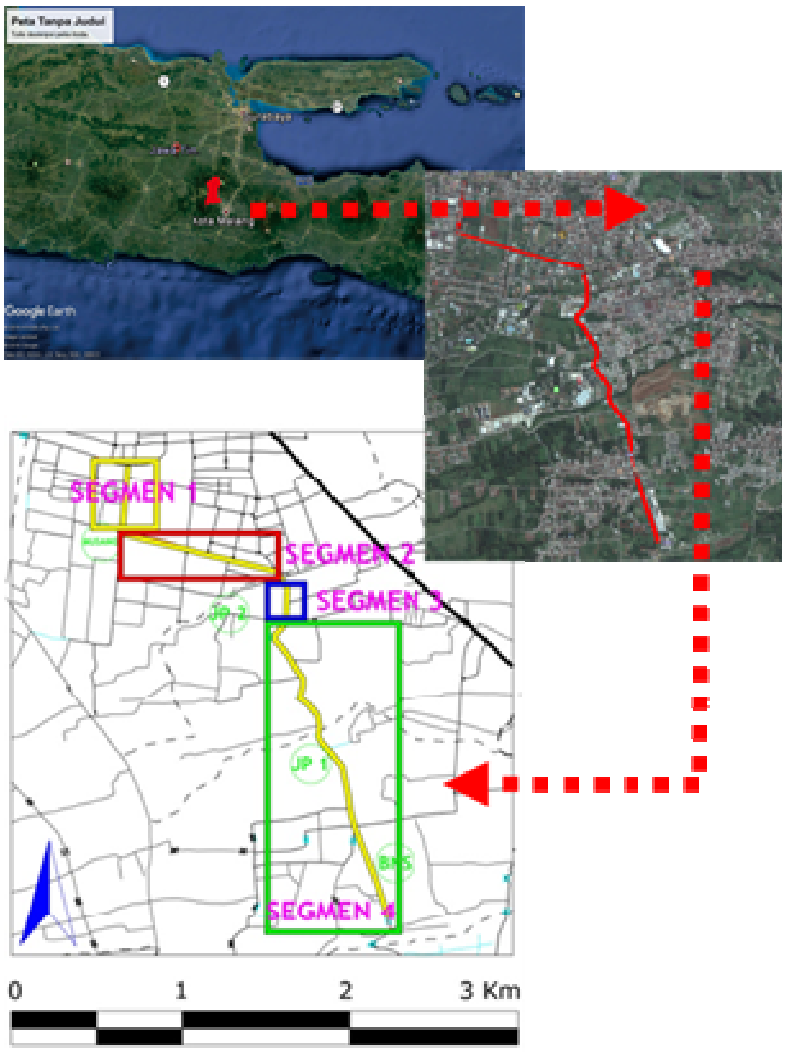
pengguna (Harris dan Dines, 1988).

Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan sebuah studi untuk menentukan perencanaan dan perancangan elemen lanskap koridor jalan Kota Batu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ciri karakter Kota Batu sebagai Kota wisata. Manfaat yang akan diberikan apabila menciptakan karakter dan identitas pada koridor ini, secara tidak langsung akan meningkatkan pariwisata setempat. Ruang lingkup artikel ini dibatasi pada jalur jalan yang menghubungkan antar objek wisata dari arah pintu masuk yang sering digunakan oleh wisatawan yaitu arah utara dan selatan.

II. METODE

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis terletak di koordinat antara 7°52' Lintang Utara 112°31' Bujur Timur / 7,867° Lintang Selatan 112,51° Bujur Timur. Koridor jalan yang menjadi lokasi penelitian dibagi menjadi empat segmen yaitu Jl. Oro-oro Ombo, Jl. Agus Salim, Jl. Sultan Agung, dan Jl. Abdul gani. Yang memiliki total panjang ± 3,8 km (Gambar 1).



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

B. Analisis

Metode analisis yang digunakan yaitu *sceenic beauty estimation* (SBE) yang diperkenalkan oleh Daniel dan Boster (1976). Metode ini digunakan untuk mengetahui nilai estetik atau keindahan suatu lanskap. Titik lanskap jalan diwakili 30 sampel gambar yang mewakili keadaan sepanjang koridor jalur wisata. Kualitas lanskap dinilai oleh Penelitian menggunakan sampel 60 orang yang terdiri atas 30 warga Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) dan 30 warga Jakarta. Responden warga Jakarta dipilih untuk diasumsikan sebagai responden calon pengunjung atau wisatawan (*demand* dalam *tourism system*). Penilaian lanskap dinilai secara kuantitatif dengan skala nilai 1 hingga 10 dengan alat bantu kuesioner. Nilai yang tinggi menunjukkan nilai dengan kualitas visual yang tinggi sedangkan nilai yang rendah merupakan nilai dengan kualitas visual yang buruk. Setiap lanskap yang dinilai ditampilkan melalui *slide* dengan durasi masing-masing satu menit. Selanjutnya, hasil penilaian responden kemudian di olah menggunakan software pengolah angka Microsoft Excell 2013 dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$SBE_X = (Z_{yx} - Z_{yo}) \times 100 \quad (1)$$

Keterangan:
SBE_x = Nilai pendugaan keindahan pemandangan suatu lanskap ke-x
Z_{yx} = Nilai rata-rata nilai z lanskap ke-x
Z_{yo} = Nilai rata-rata nilai z suatu lanskap tertentu sebagai standar

Nilai SBE >20 menunjukkan kualitas visual yang sangat baik. Nilai SBE sebesar -20 hingga 20 menunjukkan kualitas visual yang baik/sedang. Selanjutnya nilai SBE <-20 menunjukkan kualitas visual yang sangat buruk. Selain itu, untuk mendukung hasil penelitian juga dilakukan analisis aksesbilitas, klimatologi, kondisi sosial sekiat lokasi penelitian, dan tata guna lahan. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data klimatologi diperoleh dari BPS Kota Batu (2016). Selanjutnya data aksebilitas dan tata guna lahan diperoleh dari observasi lapangan yang kemudian diolah ke dalam *software* pengolah gambar AutoCAD 2007 dan Adobe Photoshop CS3 yang kemudian di analisis secara deskriptif. Data sosial diperoleh dari observasi yang juga diolah secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aksesibilitas

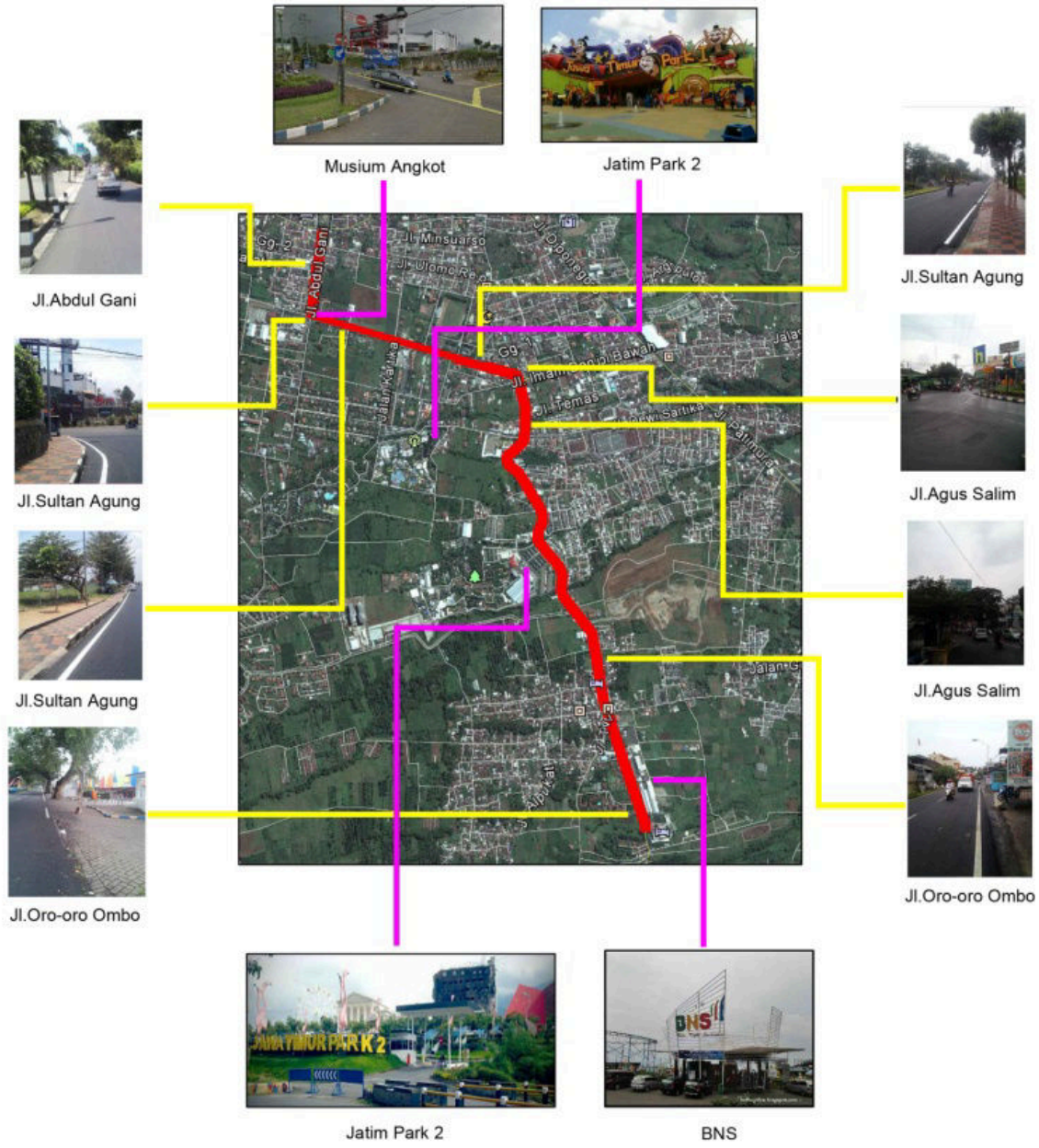
Aksesbilitas wisata satu ke wisata yang lain berada dalam satu jalur sangat memudahkan pengunjung mengunjungi semua wisata yang ada pada koridor jalan ini. Terlebih lagi koridor jalan ini merupakan jalur dua arah. Bila ditempuh dari pusat Kota Malang cukup menggunakan angkutan menuju Terminal Landungsari dan berganti angkot yang bisa langsung menuju ke tapak (Gambar 2).

B. Klimatologi

Lokasi Kota Batu yang diapit oleh beberapa gunung membuat suhu udara menjadi dingin dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Sedangkan kondisi temperatur di Kecamatan Batu tergolong sejuk yaitu 18,9 °C dan curah hujan rata-rata 298 mm. Curah hujan yang cukup tinggi ini perlu dipertimbangkan dalam hal penggunaan material sempadan maupun median jalan yang awet bila terkena air. Selanjutnya pemilihan vegetasi juga harus mempertimbangkan agroklimatologinya.

C. *Tata Guna Lahan*

Pemanfaatan lahan pada koridor jalan ini didominasi oleh kawasan wisata berupa objek wisata dan jasa lainnya seperti penginapan dan restoran, yang merupakan destinasi utama pengunjung di Kota Batu ini, selain kawasan wisata, tata guna lahan sepanjang koridor jalan ini juga terdapat pemukiman warga, kios/outlet, kantor dinas, dan ruang terbuka hijau (Gambar 3). Melihat dari tata guna lahan ini, seharusnya koridor jalan ini harus menunjukkan karakter yang sama sebagai jalur wisata karena adanya sistem wisata yang berkesinambungan.



Gambar 2. Aksesibilitas

D. *Kondisi Sosial*

Koridor jalan yang terletak di kawasan wisata serta tata guna lahan yang beragam mengakibatkan terdapat berbagai pengguna mulai dari anak-anak, remaja,

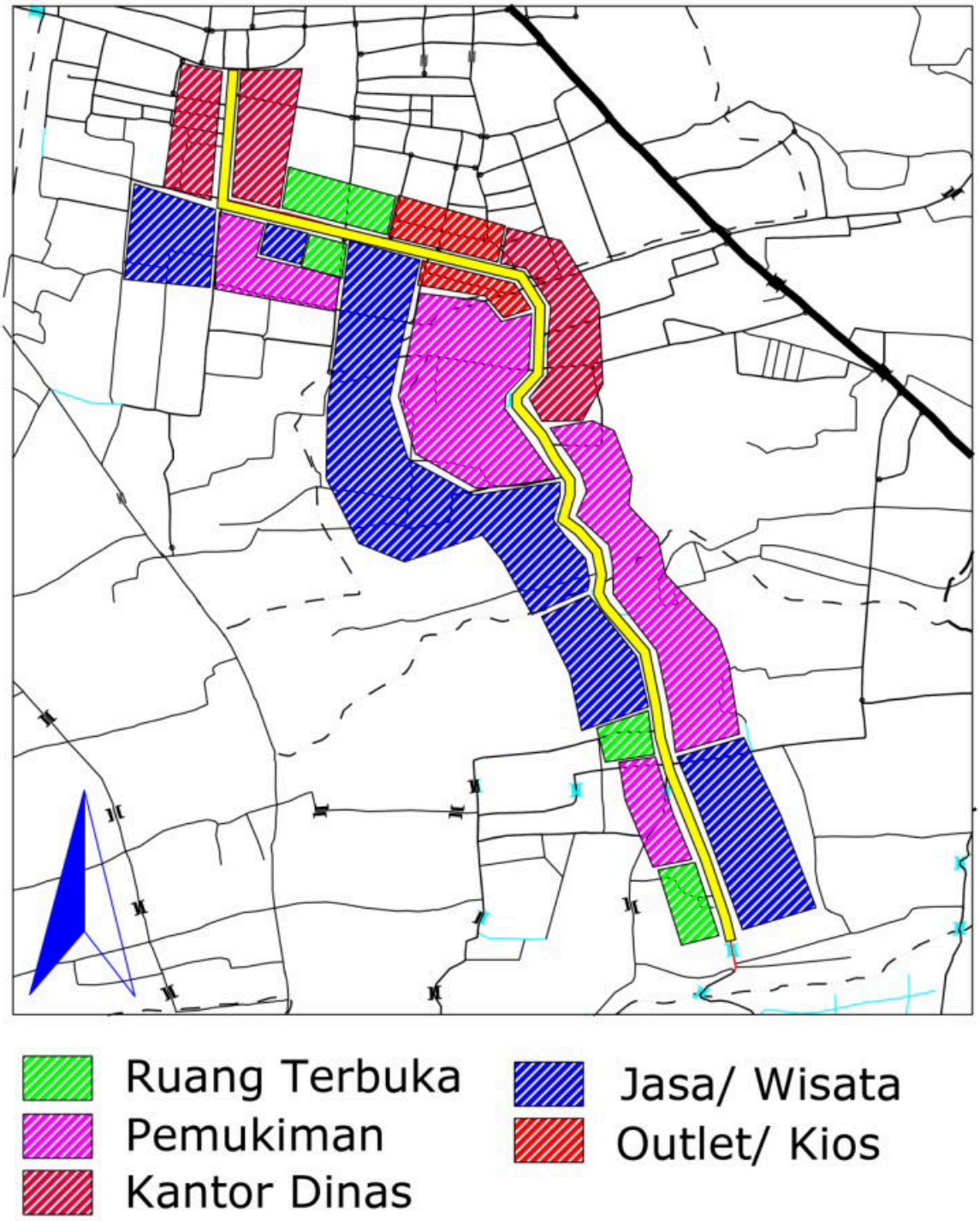
dewasa, hingga lansia. Beberapa instansi pemerintah maupun pendidikan berupa kantor dinas dan sekolah menjadikan koridor jalan ini ramai oleh berbagai kalangan. Selain itu dapat juga ditemui wisatawan baik lokal maupun asing. Koridor jalan ini juga dikunjungi oleh wisatawan yang sedang lewat dan ingin membeli cinderamata yang terdapat disepanjang jalan Agus Salim.

E. Kondisi Eksisting

Berdasarkan pengamatan langsung, fasilitas baik *hardscape* maupun *softscape* pada koridor jalan belum dapat dikatakan baik karena tidak konsisten. Hanya Jl. Sultan Agung saja yang memiliki beragam *street furniture,* vegetasi yang beragam*,* tertata, dan estetik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan estetika tidak tercapai pada koridor jalur wisata Kota Batu. Adapun fasilitas pada koridor jalur wisata Kota Batu dapat dilihat pada Tabel 1.

F. Kualitas Visual

Rentan nilai kualitas visual terbagi atas tiga selang yaitu baik, sedang, dan buruk. Nilai SBE sebesar >20 merupakan lanskap dengan kualitas visual yang baik. Nilai SBE yang berada pada rentan 20 hingga -20 merupakan nilai kualitas visual yang sedang. Kemudian nilai SBE sebesar >-20 merupakan nilai dengan kualitas visual yang buruk (Daniel dan Boster, 1976). Hasil perhitungan SBE menunjukkan bahwa nilai kualitas visual koridor Wisata Kota Batu menunjukkan umumnya berada dari pada kondisi visual yang sedang dan rendah. Sebesar 46,6% lanskap merupakan lanskap yang buruk menurut responden (Gambar 4).



Gambar 3. Tata guna lahan

Terdapat 12 titik lanskap jalan yang memiliki nilai SBE < -20 sehingga ke-12 titik lanskap ini merupakan area prioritas untuk ditata agar lebih baik. Lanskap dengan kualitas visual yang buruk terlihat memiliki kondisi yang serupa. Ciri-cirinya antara lain merupakan jalan kolektor, tidak memiliki batas sempadan yang jelas, tidak adanya *street furniture,* tidak meratanya tata hijau, dan juga bertebarannya sampah (Gambar 5).

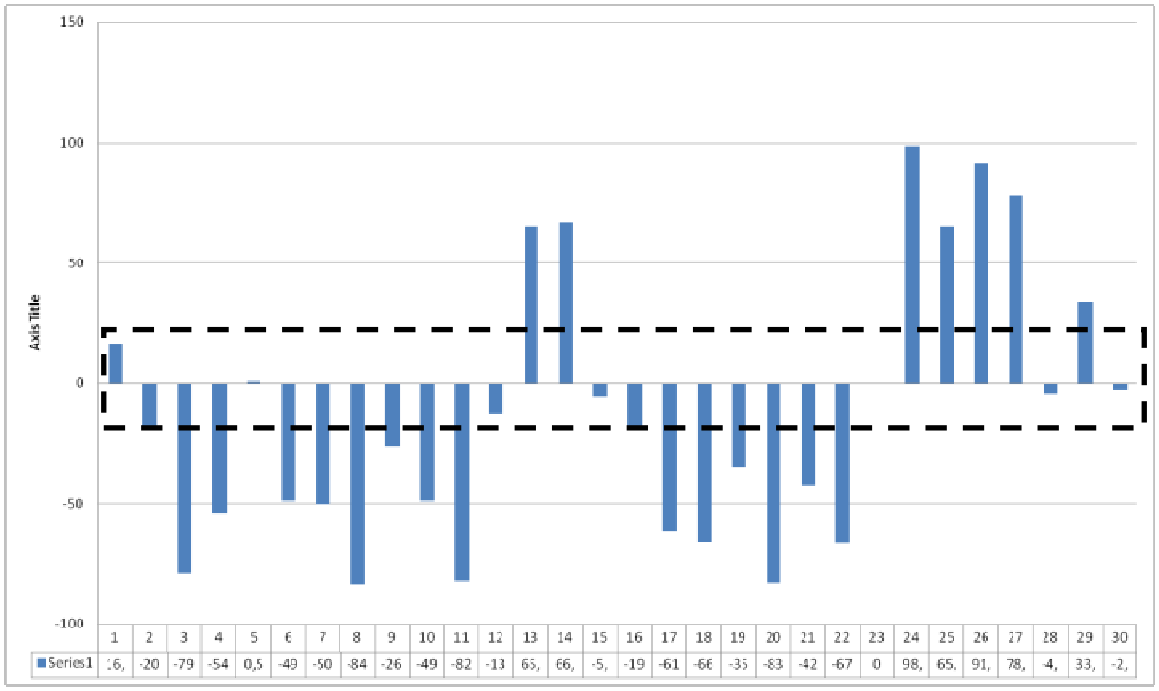
Tabel 1. Fasilitas pada koridor jalur wisata Kota Batu

No	Nama Jalan	Hardscape	Keterangan
1	Abdul Gani	Aspal	Termasuk jalan arteri sekunder, memiliki lebar jalan 7 m dan panjang 450 m
		Lampu Jalan	Jenis tiang galvanis, lampu 250 w, jumlah 9 buah
		Pedestrian	Menggunakan Paving dengan lebar 1 m
		Drainase tertutup	Dengan lebar 1 m, bahan adukan semen dan batu bata
2	Sultan Agung	Aspal	Merupakan jalan arteri dan memliliki 2 lajur jalan, total lebar keseluruhan 16 m dengan panjang 1 km
		Lampu Jalan	Jenis tiang galvanis, lampu 250 w, jumlah 39 buah
		Pedestrian	Menggunakan tegel coating, lebar 2,5 m
		Bangku	Menggunakan material besi dan kayu dengan lebar 0,5 m panjang 1,5 m, jumlah 20 buah
		Tong Sampah	Bahan dari plastik, bentuk menyerupai kayu. Lebar 60 cm dan tinggi 1 m, jumlah 20 buah
		Median jalan	Memiliki lebar 3 m.
		Shelter	Memiliki panjang 3 m, lebar 1,5 m dan tinggi 2,5 m, jumlah 2 buah
		Drainase tertutup	Dengan lebar 1 m, bahan adukan semen dan batu bata
3	Agus Salim	Aspal	Termasuk jalan arteri sekunder, memiliki lebar jalan 8 m dan panjang 500 m
		Lampu jalan	Jenis tiang galvanis, lampu 250 w, jumlah 19 buah
		Lampu merah	Tinggi 3 m, jumlah 1 buah
		Drainase terbuka	Dengan lebar 0,5 m, bahan adukan semen dan batu bata
4	Oro-oro Ombo	Aspal	Termasuk jalan arteri sekunder, memiliki lebar jalan 8 m dan panjang 2,5 km
		Lampu Jalan	Jenis tiang galvanis, lampu 250 w, jumlah 18 buah
		Pedestrian	Menggunakan paving, dengan lebar 1 m
		Lampu merah	Tinggi 3 m
		Drainase terbuka	Dengan lebar 0,5 m, bahan adukan semen dan batu bata

G. Rekomendasi

Pada koridor jalur wisata ini, lanskap jalan yang memiliki kualitas visual buruk merupakan lanskap dengan jalan terbatas. Terlihat dengan tidak adanya jalur pedestrian di sempadan jalan. Untuk itu pada konsep ini, penggunaan *street furniture* berupa *hardscape* sangat dianjurkan dengan konsep yang minimalis dan berkesan. *Street furniture* yang disarankan antara lain *signage*, lampu, bolard, tempat sampah. Desain yang dibuat harus memiliki kesatuan tema. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa *usser* dalam hal ini wisatawan dapat merasakan *sense* telah berada di koridor wisata. Peran penataan lanskap di sini merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Penataan lanskap yang ingin diciptakan merupakan pesan nonverbal yang terjadi di belahan otak bagian kanan dalam memproses informasi (Purnaningsih, 2010).

Peletakan yang disarankan menyesuaikan prinsip jarak pandang horizontal dan vertikal harus cukup 10 detik pada jalan yang diinginkan (Simonds, 1994).



Gambar 4. Grafik nilai SBE

Seleksi vegetasi untuk koridor jalur wisata Kota Batu direkomendasikan menggunakan tanaman pohon kecil (berstrata rendah). Hal ini didasari oleh lahan yang sempit, tidak boleh dipaksakan dengan penanaman tanaman besar meskipun dirasa muat. Tanaman sebagai makhluk hidup memerlukan ruang untuk tumbuh. Ukuran lubang tanam umumnya dua sampai tiga kali bola akar. Selanjutnya perkerasan tidak boleh mencekik batang pohon. Idealnya tanah terbuka harus tersedia sebesar 1/3 luas tajuk per pohon. Apabila hal ini tidak terpenuhi akar pohon akan terus tumbuh ke bawah dan tidak menyebar ke samping, sehingga terjadi ketidak seimbangan pertumbuhan yang dapat mengakibatkan pohon mudah tumbang (Nurisjah dan Adriani, 2015).

Vegetasi sempadan jalan bukan hanya memiliki fungsi estetis tetapi juga memiliki fungsi ekologis. Untuk itu dalam seleksi vegetasi, diupayakan untuk dipilih tanaman-tanaman yang efektif menyerap, menjerap, maupun mendeposisi polutan. Baik polutan gas maupun padatan. Polutan yang umumnya ada di perkotaan antara lain COx, NOx, SOx, dan Pb. Polutan COx efektif diserap oleh tanaman berdaun lebar. Polutan NOx dan SOx efektif diserap oleh tanaman dengan ciri morfologi daun kecil, berwarna merah atau keunguan, dan diameter batang yang besar. Selanjutnya polutan Pb dapat dijerap dan dideposisi dengan tanaman dengan ciri daun tebal, memiliki trikomata (rambut daun), atau dengan tanaman yang memiliki daun dengan lapisan lilin. Dengan demikian, tanaman yang digunakan sangat disarankan menggunakan tanaman yang beragam (Nurhasanah *et al.,* 2017; Nurisjah dan Nailufar, 2015; Nasrullah *et al.,* 2000).

Hal yang dapat menjadi kualitas estetika pada pohon antara lain tekstur, warna, bentuk tajuk, dan fitur. Fitur dapat berupa daun, batang, percabangan, bunga, buah, biji, atau perakaran (Sirivejdarak, 2007). Pemilihan pohon harus mempertimbangkan ketinggian tidak menganggu sarana dan prasarana di sekitar jalan, bentuk rapi dan tidak menakutkan, tidak mudah tumbang, dan tajuk tidak terlalu rimbun atau lebar. Selanjutnya daun cukup rindang, berasal dari perkembangbiakan generatif, tidak

menghasilkan buah yang besar, serta pemeliharaan mudah (Nurisjah dan Adriani, 2015). Ping dan Lynn (2001), merekomendasikan 13 spesies jenis pohon berukuran rendah untuk tanaman tepi jalan dan ruang terbuka yang dapat dilihat pada Tabel 2.



Gambar 5. Lanskap jalan dengan kualitas visual yang buruk berdasarkan hasil penilaian SBE

Nilai penting suatu tanaman akan meningkat apabila dapat menghadirkan satwa khususnya burung. Satwa burung diperkotaan dapat dijadikan indikator kualitas lingkungan yang baik. Hal ini disebabkan oleh burung merupakan satwa yang sangat sensitif terhadap udara kotor dan bising (Nurisjah dan Mardiastuti, 2015). Tanaman juga memiliki peran untuk menciptakan memperbaiki iklim mikro bagi lingkungan sekitar (Nurisjah dan Nailufar, 2015; Mariski *et al*., 2017). Untuk menciptakan kenyaman termal, pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu dominansi vegetasi yang digunakan karena berdasarkan penelitian, dominansi vegetasi berpengaruh signifikan terhadap penurunan suhu pada suatu tempat (Alfian *et al.,* 2016).

Tabel 2. Rekomendasi jenis pohon berukuran rendah

Nama tanaman	Tinggi pohon dewasa (m)	Jarak tanam tepi jalan (m)
Brassia actinophylla	8-10	6
Carallia brachiata	5-8	6
Cordia subcordata	10-12	6
Cratoxylum formosum	10-15	6
Cratoxylum cochinchinense	10-12	6
Erythrina glauca	5-8	6
Gustavia superba	5-6	4
Kopsia flavida	8-12	6
Kopsia singapurensis	5-8	6
Melaleuca citrina	5-6	6
Malaleuca genistifolia	5-6	6
Malaleuca viminalis	5-8	6
Tripatelum cymosum	8-10	6

IV. KESIMPULAN

Secara umum lanskap jalan dengan kualitas yang buruk dikarenakan oleh minim dan hambarnya elemen penyusun lanskap jalan itu sendiri. Lanskap dengan nilai SBE rendah merupakan lanskap jalan merupakan jalan kolektor, tidak memiliki batas sempadan yang jelas, tidak adanya *street furniture,* tidak meratanya tata hijau, dan juga bertebarannya sampah. Untuk meningkatkan kualitas visual lanskap yang buruk, maka perlu dilakukan perancangan elemen lanskap jalan atau street furniture yang dikhususkan pada titik lanskap dengan nilai SBE yang rendah. Selain itu pemilihan vegetasi direkomendasikan merupakan pohon strata rendah karena lahan dengan kualitas visual lahannya tidak terlalu besar. Desain yang dibuat harus memiliki kesatuan tema yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa *usser* dalam hal ini wisatawan dapat merasakan *sense* telah berada di koridor wisata Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, R., Budiarti, T., Nasrullah, N., 2016. Pengaruh Bentuk Hutan Kota terhadap Kenyamanan Termal di Sekitar Hutan Kota. *Buana Sains*. Vol. 6 No. 2. 101-110.

BPS Kota Batu. (2016). *Kota Batu dalam Angka 2016.* Batu: BPS Kota Batu.

Daniel, C., Boster, R.S. (1976). *Measuring Landscape Aesthetic: The Scenic Beauty Estimation Method*. New Jersey : USDA.

Direktorat Jendral Bina Marga. (1996). *Tata Cara Perencanaan Teknik Lanskap Jalan*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga-Departemen Pekerjaan Umum.

Harris, C.W. dan Dines, N.T. (1988) *Time Saver Standars for Landscape Architecture.* New York: McGraw Hill.

Mariski, Nasrullah, N., Gunawan, A. 2017. Persepsi dan Preferensi Pengunjung Terhadap Kenyamanan Klimatologis di Taman Menteng dan Taman Honda Tebet. *Jurnal Lanskap Indonesia.* Vol. 9 No. 1. 24-35

Nasrullah, N., Gandanegara, S, Suharsono, H, Wungkar, dan M, Gunawan, A. (2000). Pengukuran Serapan Polutan gas NO2 pada tanaman tipe pohon, semak, dan penutup tanah dengan menggunakan gas NO2 bertanda 15N. Badan Tenaga Nuklir Nasional Puslitbang Teknologi Isotop dan Radiasi (Ed) (2000). *Risalah Pertemuan Ilmiah Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi*. Jakarta: P3TIR-BATAN.

Nurhasanah, F, Utami, I.U., dan Syahadat, R.M. 2017. Vertical Greenery pada Sarana dan Prasarana Transportasi Publik untuk Mendukung Kota Hijau. *Vitruvian Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan.* Vol. 6 No. 3 Tahun 2017. 101-108.

Nurisjah, S. dan Adriani, H. (2015). Pohon Tepi Jalan Kriteria dan Penanaman. Jakarta Selatan: IALI.

Nurisjah, S. dan Mardiastuti, A. (2015). Tata Hijau Penari Satwa Burung. Jakarta Selatan: IALI.

Nurisjah, S. dan Nailufar, B. (2015). Mengenal Tanaman Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota. Jakarta Selatan: IALI.

Purnaningsih, N. (2010). Simbol non-verbal. Hubeis, A.V.S. (Ed) (2010). *Dasar-dasar Komunikasi.* Bogor: Sains KPM IPB Press.

Simonds, J.O. (1994). Garden Cities 21: Creating A Livable Urban Environment. New York: McGraw Hill.

Sirivejdarak, T. (2007). Menata Taman. Bangkok: PT Gaya Favorit Press.

Tingkat Kesiapan Kampung Duren Sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Baru di Kota Malang

Dian Indah Shofarini[1]

[1]*Jurusan PWK Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang*
Email: shofarini@ub.ac.id

ABSTRAK

Sebuah destinasi wisata memiliki beberapa komponen penting dalam penyelenggaraan pariwisata agar dapat berjalan dengan baik. Perancangan Kota yang Komponen yang harus dipenuhi terdiri dari daya tarik, sarana prasarana wisata, kelembagaan, wisatawan serta masyarakat. Diperlukan tangan tangan kreatif untuk mewujudkan perancangan kota yang mampu mengakomodir berbagai elemen kampung kota termasuk partisipasi masyarakat di dalamnya. Upaya kreatif yang dilakukan oleh Bappeda Kota Malang adalah dengan mengadakan lomba kampung tematik dalam Festival Rancang Malang yang diharapkan dapat melahirkan kampung tematik khas Kota Malang dengan mengkolaborasikan antara masyarakat dengan akademisi atau ikatan ahli professional. Kampung Duren RW 4 Kelurahan Bakalan Krajan berpartisipasi sebagai salah satu peserta dengan mengusung tema pengembangan energi terbarukan. Hasil proposal pengembangan Kampung Duren menjadi salah satu dari 10 kampung terbaik dan akan diimplementasikan menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan komponen wisata Kampung Duren berdasarkan daya tarik wisata, sarana prasarana wisata, kelembagaan, wisatawan serta masyarakat. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah deduktif kuantitatif dengan menjadikan teori yang dikaitkan dengan unsur tujuan, subjek dan sumber data secara jelas dan rinci. Metode analisis yang digunakan adalah metode skoring untuk menentukan kriteria kesiapan destinasi wisata kampung tematik berdasarkan masing-masing variabel. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Duren agak siap menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Malang dengan mengusung tema kampung wisata edukasi berbasis energi terbarukan karena masih memiliki kekurangan dari beberapa variabel yang dikaji.

Kata kunci: kampung-tematik, tingkat-kesiapan-wisata, Kota-Malang, Kampung-Duren

I. PENDAHULUAN

Menurut Ismayanti (2010) pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Dengan kata lain, pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat komplimentaris artinya didalam kegiatan pariwisata terdapat berbagai steakholder yang bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan kegiatan pariwisata. Pariwisata adalah gejala yang ditimbukan dari perjalanan orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, yang tidak ada hubungannya dengan pencarian nafkah (Yoeti dalam Arjana, 2015). Sebuah destinasi wisata hendaknya memenuhi beberapa komponen yang terdiri dari daya tarik, sarana prasarana wisata, kelembagaan, wisatawan serta masyarakat. Dalam penyelenggaran pariwisata perlu melibatkan stakeholder agar kegiatan kepariwisataan dapat berlangsung dengan baik. Stakeholder merupakan individu-individu atau kelompok-kelompok yang ahli dalam bidangnya dan mempunyai peran didalam suatu kebijakan yang menaungi bidangnya tersebut. Stakeholder pariwisata tidak hanya berperan dalam mengambil

keputusan bersama untuk kebijakan pengembangan pariwisata, namun juga berperan dalam mengelola wisata.

Penghuni kota merupakan nyawa kota, oleh karena itu penghuni kota juga perlu mendapat peran untuk mendiskusikan dan merancang ruang hidupnya. Dalam hal perancangan kota, terminologi penghuni bukan hanya manusianya, melainkan termasuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan serta lingkungannya sebagai penyeimbang alam. Diperlukan tangan tangan kreatif untuk mewujudkan perancangan kota yang mampu mengakomodir berbagai elemen kampung kota termasuk partisipasi masyarakat di dalamnya. Hal ini penting untuk menjembatani sisi harapan dan sisi kemampuan, serta membangun kerjasama antara capaian yang berorienasi hasil dan penghargaan terhadap proses. Beruntungnya, Kota Malang memiliki segudang aset dan potensi untuk bisa mewujudkan perancangan kota secara ideal, memberi nilai tambah fisik dan nonfisik bagi mereka yang terlibat di dalamnya, serta memiliki efek langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai upaya kreatif mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam perancangan kota, maka pada tahun 2016 ini pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Lomba Kampung Tematik dalam event Festival Rancang Malang. Festival Rancang Malang adalah sebuah kegiatan kompetisi perancangan kawasan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat, dibantu tim pendamping (dapat diusulkan mandiri oleh masyarakat dan atau dibantu pengabdian masyarakat perguruan tinggi) untuk mendorong lahirnya kampung tematik khas Kota Malang (Bappeda Kota Malang, 2016).

Ide awal program Lomba Kampung Tematik adalah menginginkan Kota Malang sebagai Kota Pariwisata dengan mencoba menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan melibatkan perguruan tinggi (Anton, 2016). pelibatan perguruan tinggi diharapkan dapat menstimulus masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam perencanaan. Harapannya melalui program inovatif ini akan kami kenalkan Kota Malang tidak hanya secara nasional, tapi juga secara internasional.

Dalam Festival Rancang Malang, Kampung Duren RW 4 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang juga akan turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Selain sebagai sebuah ajang pencapaian masyarakat, Festival Rancang Malang juga dapat membantu menjadikan Kampung Duren menjadi lebih baik serta memiliki identitas. Harapannya dari keikutsertaan Kampung Duren dalam Festival Rancang Malang, masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya partisipasi dan pentingnya pengelolaan kampung secara terencana sehingga dapat menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat.

Ruang lingkup penelitian terdiri atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah yang dikaji adalah Kampung Duren RW 4 Kelurahan Bakalan Krajan Kota Malang. Sedangkan ruang lingkup materi yang dikaji adalah terkait dengan tingkat kesiapan Kampung Duren sebagai salah satu destinasi wisata baru di Kota Malang. Menurut Pitana dan Diarta (2009) destinasi merupakan tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan misalnya daerah transit. Sedangkan menurut Sugiama (2013) Destinasi Wisata (DW) adalah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang merupakan campuran dari beberapa komponen kepariwisataan yang dikunjungi wisatawan dengan waktu kunjungan minimal 24 jam. Maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesiapan Kampung Duren yang merupakan salah satu dari 10 besar pemenang lomba kampung tematik Kota Malang berdasarkan daya tarik wisata, sarana prasarana wisata, kelembagaan, wisatawan serta masyarakat.

II. METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam kegiatan penelitian yang bersifat swakelola ini adalah melalui pendekatan penelitian/studi eksplorasi (*exploration study*). Studi yang bersifat penjajakan ini dilakukan dengan harapan dapat menggali informasi yang diperlukan untuk memahami karakteristik. fenomena atau masalah potensi sumberdaya dan pemanfaatannya di wilayah Kampung Duren RW 4 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah deduktif kuantitatif dengan menjadikan teori yang dikaitkan dengan unsur tujuan, subjek dan sumber data secara jelas dan rinci.

Variabel yang dinilai berdasarkan sudut pandang pemasaran (Middleton dalam Ernawati, 2010) yang membagi pelayanan kepariwisataan ke dalam 5 komponen yaitu Atraksi wisata, akomodasi, transportasi, travel organiser dan organisasi kepariwisataan. Materi yang akan dikaji dalam penelitian ini akan dijadikan parameter tingkat kesiapan dengan mempertimbangkan pihak kampung menerima keuntungan yang maksimal dan meminimalkan dampak negatif. Indikator kesiapan yang akan dinilai adalah pemahaman masyarakat terhadap hakekat kepariwisataan, dampak pariwisata, wisatawan, tersedianya infra dan supra struktur, jasa kepariwisataan, atraksi wisata, travel organizer, dan dukungan pemerintah desa.

Data yang digunakan berasal dari hasil kuesioner yang dikumpulkan langsung di Kampung Duren dengan responden sejumlah orang 87 orang yang mayoritasnya berpendidikan minimal lulusan SMA dan juga sebagian perguruan tinggi. Kuesioner yang berisikan 26 pertanyaan dengan opsi jawaban dalam kode angka yang meliputi : amat sangat setuju (5), sangat setuju (4), setuju (3), kurang setuju (2), dan tidak setuju (1). Data tersebut kemudian ditabulasi dan kemudian dilakukan Analisa frekuensi, setelahnya dilakukan klasifikasikan dalam 5 kelas interval.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

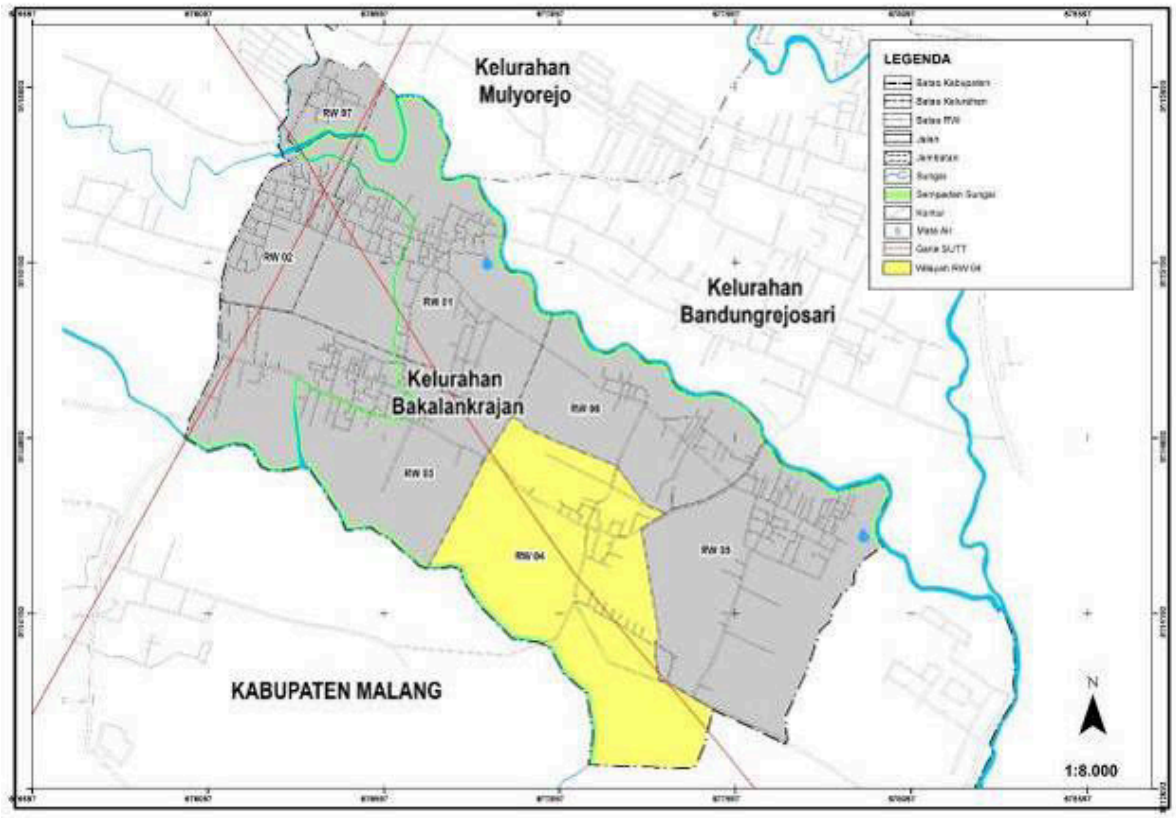
A. Gambaran Umum Kampung Duren

Kampung Duren berada pada RW 4 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang (Gambar 1). Kampung ini memiliki luas yang terdiri dari 5,9 ha area terbangun dan 33,2 ha area tidak terbangun. Kampung dengan populasi 699 penduduk memiliki berbagai macam potensi yang bisa dikembangkan.

Lingkungan RW 04 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang memiliki luas wilayah 39,09 Ha. Rentang ketinggian rata-rata di Kelurahan Bakalankrajan adalah 426 – 455 meter di atas permukaan laut. Keadaan bentang alam kontur topografi adalah berombak serta merupakan kawasan berlereng dengan kemiringan 2-15%. Kondisi fisik binaan di RW4 Kelurahan Bakalankrajan dibagi menjadi lahan terbangun, lahan tidak terbangun dan jalan (Tabel 1).

Tabel 1 Luas Lahan Terbangun dan Lahan Tidak Terbangun RW 4 Kelurahan Bakalankrajan

RW	Luas (Ha)	Luas Lahan	
		Tidak Terbangun (Ha)	Terbangun (Ha)
4	39,1	33,2	5,9



Gambar 1. Wilayah Administrasi RW 4 Kampung Duren

Dalam partisipasinya di Lomba Kampung Tematik Kota Malang, Kampung Duren memanfaatkan potensi yang ada pada kampung tersebut. Selain pemandangan alam yang masih asri, Kampung Duren memiliki beberapa potensi desa yang layak untuk dikembangkan secara lebih optimal:

- *Home industry* tempe yang dimiliki oleh keluarga Bapak Suwono. Usaha tempe ini dalam sehari mampu memproduksi tempe dan produk olahannya sebanyak 2 kuintal yang dipasarkan di pabrik-pabrik yang ada di sekitar Kelurahan Bakalan Krajan. Kegiatan industri ini juga telah mengaplikasikan konsep zero waste dalam operasionalnya.
- Potensi Biogas yang dimiliki oleh keluarga Bapak Suwono. Potensi ini dikembangkan di rumahnya karena beliau memiliki lahan dan juga sapi yang bisa digunakan untuk kegiatan Biogas. Limbah dari pengolahan tempe digunakan sebagai pakan ternak, dan limbah ternaknya digunakan sebagai input biogas.
- *Home industry* jamu. Usaha jamu yang dimiliki oleh Bapak Purwanto ini pernah mengalami masa puncak usaha beberapa tahun lalu. Kendala tenaga kerja pemasaran menjadi masalah yang menyebabkan terbatasnya produksi per hari saat ini. Saat ini, meskipun sudah memiliki pasar tetap, produksi jamu hanya mencapai 30 liter per hari.
- Kerajinan kayu. Usaha Bapak Novianto ini saat ini sedang mengalami perkembangan usaha seiring dengan lingkup pemasaran yang semakin luas di Jawa Timur. Banyak produk dari *home industry* ini yang sudah dibeli oleh tempat-tempat wisata di Kota Wisata Batu. Kerajinan berupa miniature dan maket merupakan produk yang paling diminati saat ini.
- Kesenian jaranan. Sanggar kesenian jaranan milik Bapak Sutrisno Hadi

ini merupakan binaan salah satu dosen perguruan tinggi di Kota Malang. Sanggar kesenian ini menjadi salah satu kesenian warga yang sering ditampilkan pada acara-acara di Kampung Duren. Selain warga lokal, sanggar kesenian jaranan ini juga memiliki anggota dari luar kampung.



Gambar 2. Potensi Kripik Tempe dan Biogas di Kampung Duren



Gambar 3. Konsep Perencanaan dan Tim Pendamping beserta masyarakat RW 4 Kampung Duren

Dalam proposal perencanaan di Kampung Nduren RW 4 ini bisa mengakomodir dan membuat masyarakat harus singgah dan beristirahat di Kampung Nduren ini. Gambaran ide/rancangan Kampung Nduren mengusung tema pengembangan

Kampung Wisata Nduren Mandiri Berbasis Energi Terbaharukan. Konsep pengembangan ini disesuaikan dengan potensi Kampung Nduren yang memiliki lahan untuk pengembangan biogas eksisting, ketersediaan ruang terbuka hijau yang cukup banyak dan potensi hasil industri rumah tangga potensial seperti tempe, jamu dan kerajinan kayu. Proposal perencanaan untuk Kampung Duren ini adalah hasil kolaborasi antara warga RW 4 Kampung Duren dan Tim Pendamping dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Masyarakat dan tim pendamping turut serta selama proses identifikasi permasalahan dan potensi kampung, menganalisa dan menyusun konsep rencana.

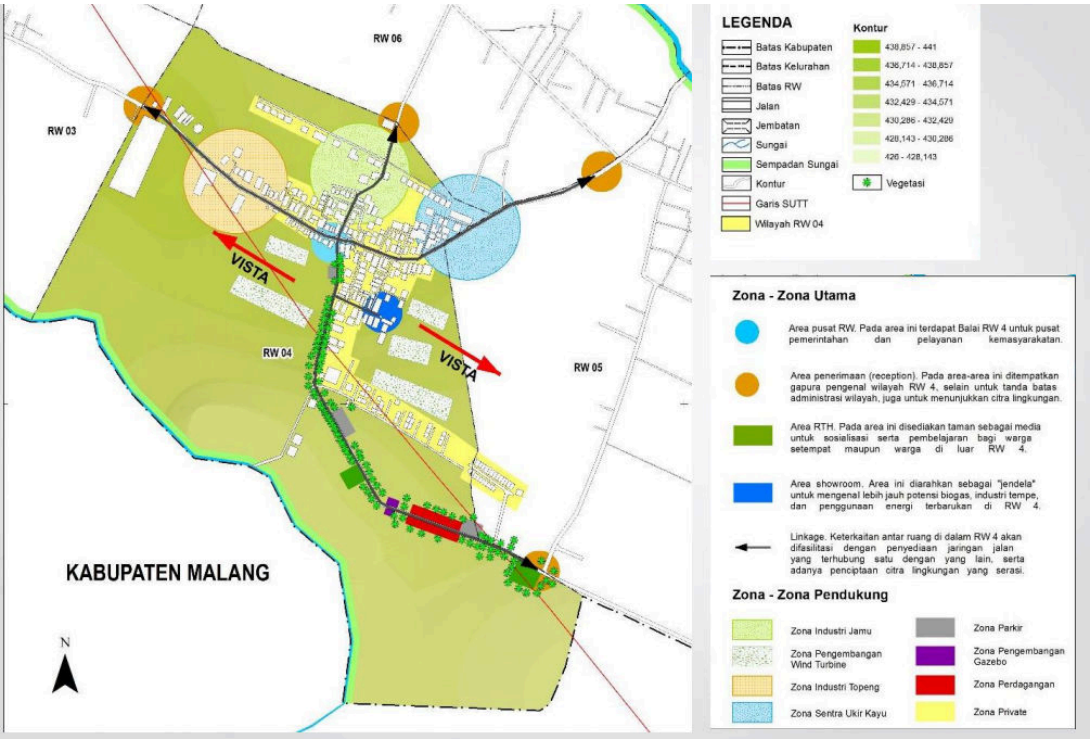
Lomba kampung tematik ini diikuti oleh 71 kampung dari 57 kelurahan yang ada di Kota Malang. Dari 71 kampung tesebut terpilih 10 besar kampung tematik yang lolos seleksi. Kampung tematik yang lolos 10 besar yaitu Kampung Pelangi (Merjosari), Kampung Gerabah (Penanggungan), Kampung Kuliner Heritage (Klojen), Kampung Bambu Mewek Park (Tunjungsekar), Kampung Petik Organik (Purwodadi), Kampung Durian (Bakalan Krajan), Kampung Keramat (Kasin), Kampung Bibit (Lowokwaru), Kampung Organik Bela Negara (Lesanpuro), Kampung Edukasi dan Budaya (Buring) (mutermalang.com).



Gambar 4. Presentasi Final 10 Besar Kampung Tematik (kiri) dan Pak Imam sebagai salah satu perwakilan dari Kampung Duren untuk memperoleh sertifikat dari Wali Kota Malang (kanan)

B. Konsep pengembangan Kampung Duren

Dengan memperhatikan asal muasal kata Kudu Leren, maka perencanaan di Kampung Duren RW 4 ini bisa mengakomodir dan membuat masyarakat harus singgah dan beristirahat di Kampung Duren ini melalui pengembangan feature atau landmark yang sangat khas Kampung Duren serta kegiatan yang dapat diikuti/dilakukan oleh para tamu. Gambaran ide/rancangan kampung Duren mengusung tema pengembangan Kampung Wisata Edukasi Duren Mandiri Berbasis Energi Terbarukan.



Gambar 3. Konsep Pengembangan Wisata RW 4 Kampung Duren

Konsep pengembangan ini disesuaikan dengan potensi Kampung Duren yakni embrio energi terbarukan biogas dari hasil peternakan yang dimiliki oleh salah satu warganya untuk menopang usaha industry tempe, kerajinan kayu, serta produksi jamu. Selain itu, lahan tidak terbangun yang mendominasi wilayahnya memiliki potensi sebagai daerah tangkapan angin dan sinar matahari yang dapat dikembangkan sebagai pusat pembelajaran energi terbarukan.

B. Tingkat Kesiapan Kampung Duren Sebagai Destinasi Wisata

Selama 2 bulan persiapan penyusunan proposal, masyarakat Kampung Duren diberikan pendampingan terkait dengan pengembangan potensi desa dan konsep desa wisata. Faktor yang memperkuat potensi Kampung Duren sebagai salah satu destinasi wisata adalah potensi biogas dan juga potensi pemandangan alam Kampung Duren yang masih asri dan memiliki view gunung. Luasnya lahan tidak terbangun yang ada menjadikan konsep pengembangan di Kampung Duren menjadi kawasan wisata edukatif yang terkait dengan energi terbarukan untuk menciptakan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Menurut Gateaways (dalam Ernawati, 2010), istilah *sustainable tourism* yang digunakan adalah industri yang mengupayakan untuk meminimalisir dampak terhadap lingkungan dan budaya lokal, sementara membantu mendatangkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan dan konservasi terhadap ekosistem. sustainable tourism didefinisikan sebagai sebuah proses yang memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut dan masyarakat tuan rumah sekaligus melindungi dan memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang. Definisi ini menekankan pada pemenuhan terhadap kebutuhan konsumen yang merupakan orientasi dasar dari praktek bisnis yang sehat disamping orientasi terhadap konservasi.

Pengembangan Kampung Duren yang komprehensif dilakukan untuk menghasilkan hasil positif yang ingin dicapai dan dapat meminimalkandampak negative yang ada. Pengembangan desa wisata untuk Kampung Duren dapat

dilakukan karena memiliki beberapa persyaratan yang sesuai dengan standar yaitu:

1. Aksesbilitas baik. Kondisi aksebilitas yang ada di Kampung Duren tergolong cukup baik karena jalan yang menghubungkan dari dan menuju Kampung Duren sudah menggunakan perkerasan aspal. Jalan lingkungan di dalam Kampung Duren pun memiliki kondisi yang baik sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk beraktivitas ataupun melakukan pergerakan.
2. Memiliki objek yang menarik. Objek yang ada pada Kampung Duren selain berupa potensi berupa biogas, home industry, dan juga kerajinan, Kampung Duren juga memiliki pemandangan alam yang Indah dengan background gunung yang berada di sisi utara Kampung Duren.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa. Masyarakat RW 4 Kampung Duren ikut pro aktif selama proses penyusunan proposal pengembangan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Duren memberikan dukungan yang cukup tinggi untuk kegiatan yang terkait pengembangan wilayahnya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin. Berdasarkan hasil survei, kondisi di Kampung Duren cukup aman yang dapat diidentifikasi dari minimnya tindakan kriminal yang ada di Kampung Duren tersebut.
5. Beriklim sejuk dan dingin. Letak Kampung Duren yang cukup jauh dari pusat Kota Malang dan berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang menjadikan kawasan ini masih memiliki iklim yang sejuk dan tidak memiliki polusi yang cukup banyak jika dibandingkan di kawasan perkotaan karena jika dilihat berdasarkan karakteristiknya, Kampung Duren masih tergolong kawasan pedesaan.
6. Berhubungan dengan objek wisata lain yang dikenal masyarakat. Potensi yang ada di Kampung Duren dan kawasan sekitarnya tergolong skala kecil atau lokal sehingga belum ada pengembangan yang berarti dari pihak pemerintah. Hal itu menyebabkan masyarakat belum mengenal objek wisata lain di sekitar Kampung Duren. Namun karena letak Kampung Duren berada di pintu masuk Kota Malang dari arah Kabupaten Malang, maka letak Kampung Malang cukup strategis untuk diingat dan dikenal oleh masyarakat.

Setelah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 besar pemenang lomba kampung tematik, masyarakat diberikan kuesioner terkait kesiapan mereka dalam rencana implementasi Konsep pengembangan wisata. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan dari sudut pandang pemasaran yang memperhatikan 5 komponen dalam pelayanan pariwisata yaitu atraksi wisata, akomodasi, transportasi, travel organizer, dan organisasi kepariwisataan. Dari hasil penelitian, pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat selanjutnya diklasifikasikan menjadi 8 kategori, hasil analisa yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Indikator Tingkat Kesiapan Kampung Duren Sebagai Destinasi Wisata Baru

Deskripsi	Tidak siap	Agak Siap	Siap	Sangat siap	Amat sangat siap
Pemahaman tentang kepariwisataan			3.0		
Pemahaman tentang dampak pariwisata		3.3			

Pemahaman tentang wisatawan			3.0	
Kesiapan infrastruktur			2.5	
Kesiapan suprastruktur	3.0			
Ketersediaan atraksi wisata		3.3		
Kemampuan pengelola		2.5		
Dukungan pimpinan desa				4.0

Dari hasil tabel 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesiapan Kampung Duren sebagai salah satu destinasi baru di Kota Malang dinilai tergolong agak siap dengan pemahaman kesiapan variabel pemahaman tentang dampak pariwisata, ketersediaan atraksi wisata dan kemampuan pengelola. Masyarakat masih belum mengetahui terkait dengan dampak secara menyeluruh baik dampak positif maupun dampak negatif, ketersediaan atraksi wisata yang cukup menunjang potensi pengembangan dan rencana realisasi dari konsep yang tertuang dalam proposal perencanaan serta kemampuan pengelola yang masih minim.

Responden menyebutkan bahwa tingkat pemahaman terkait pariwisata tergolong siap dengan sudah mengetahui tujuan dari wisatawan melaksanakan perjalanan dan keterbukaan terhadap pengunjung yang akan datang serta mereka melaksanakan kegiatan secara alami sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan sehari-hari. Pengelolaan pariwisata juga didukung oleh tingkat pendidikan masyarakat dimana mayoritas penduduk Kampung Duren merupakan lulusan mayoritas SMA sehingga masih membutuhkan beberapa pengalaman maupun workshop terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membantu masyarakat desa membentuk jaringan kerja dalam industri pariwisata. Dukungan yang kuat dari pengurus desa merupakan kekuatan yang sudah dimiliki oleh Kampung Duren menuju desa wisata dengan pengembangan berbasis masyarakat. Dalam pengembangannya nanti, masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait dengan kepariwisataan baik dalam hal sosialisasi penguatan sumber daya manusia serta terkait pengelolaan dan pelaksanaan terkait kegiatan pariwisata.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Duren agak siap menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kota Malang dengan mengusung tema kampung wisata edukasi berbasis energi terbarukan dengan memperhatikan potensi yang ada di Kampung Duren baik berupa potensi fisik dan non fisik. Masyarakat sudah cukup mengetahui dan paham terkait dengan kepariwisataan namun masih belum paham mengenai dampak yang dihasilkan dari kegiatan kepariwisataan baik dampak positif maupun negatif. Meski masih memiliki kekurangan dalam hal kesiapan suprastruktur, pengembangan Desa Wisata di Kampung Duren dapat berjalan dengan baik. Harapannya dengan perencanaan ini selain meningkatkan perekonomian masyarakat, Kampung Duren akan lebih dikenal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anton, Muhammad. 2016. Tunjungsekar Juarai Lomba Kampung Tematik-Festival Rancang Malang 2016. Diakses pada 13 Juli 2017, Dari alamat http://mutermalang.com/tunjungsekar-juarai-lomba-kampung-tematik-festival-rancang-malang-2016/

Arjana, I Gusti. 2015. Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Depok: Rajawali Press.

Ernawati, 2010. Jurnal analisis Pariwisata Vol 10 No 1 Tahun 2010. Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.

Ismayanti (2010). Pengantar pariwisata.Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Muter Malang (2016). Tunjungsekar Juarai Lomba Kampung Tematik-Festival Rancang Malang 2016. Diakses pada 13 Juli 2017, Dari alamat http://mutermalang.com/tunjungsekar-juarai-lomba-kampung-tematik-festival-rancang-malang-2016/

Pemerintah Kota Malang (2016). *Lomba Kampung Tematik Fesrival Rancang Malang.* Diakses pada 13 Juli 2017, dari alamat http://malangkota.go.id/2016/08/11/lomba-kampung-tematik-festival-rancang-malang/

Pitana, I Gde. dan Surya Diarta, I Ketut. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Sugiama, Gima. (2013). Manajemen Aset Pariwisata. Bandung : Guardaya. Intimarta

Potensi Pengelolaan Kawasan *Panatapan* Danau Toba Oleh Pemerintah *Nagori* Di Simalungun Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon

M. Ade Kurnia Harahap[1]
Sirojuzilam[2]
R.Hamdani Harahap[2]
Beni O.Y Marpaung [2]
[1] Pengajar Pada Fakultas Teknik Universitas Simalungun dan Mahasiswa Program Doktor Pengembangan Wilayah USU
[2] Pengajar Pada Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Keberadaan Panatapan yang ada saat ini di Kabupaten Simalungun terutama di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon tidak dikelola dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelenjutan. Indikator hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan di Panatapan yang tidak didukung oleh uji keamanan bangunan secara keteknikan, polemik status lahan yang merupakan lahan miring konservasi yang juga merupakan sempadan jalan serta sistem pengelolaan sampah yang tidak terpola. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirasa perlu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana potensi keberadaan pemerintahan Nagori sebagai sistem pemerintahan tradisional di Simalungun untuk bisa dilibatkan dalam pengelolaan kawasan Panatapan dalam mendukung pembangunan kawasan Danau Toba yang berkelanjutan.

Metode penelitian yang mendasari tulisan ini adalah studi kasusProses pengumpulan data penelitian ini mengandalkan observasi dan wawancara mendalam dengan didukung studi literatur untuk melihat regulasi kewenangan Nagori. Teknik analisas data dilakukan secara kualitatif dengan mengadopsi teknik etnografi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa selama ini, pemerintahan Nagori tidak telah terlibat dalam perkembangan kawasan Panatapan namun oknum Pangulu dan atau aparaturnya secara beribadi ikut mendorong munculya aktivitas okupasi lahan di kawasan Panatapan. Potensi penggusuran usaha masyarakat di kawasan Panatapan sangat terbuka lebar karena status lahan yang diokupasi adalah lahan miring yang secara regulasi tidak boleh dikelola ditambah lagi lahan tersebut adalah bagian dari sepandan jalan. Pola bangunan di kawasan Panatapan yang saat ini terjadi secara artistik juga telah membatasi wisatawan untuk menikmati panorama pemandangan dengan lebih leluasa. Secara umum penelitian ini juga melihat bahwa peluang pemerintahan Nagori untuk terlibat dalam mengelola kawasan Panatapan secara lestari amat sangat besar namun dukungan regulasi untuk itu menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Danau Toba, *Panatapan*, Pengelolaan Kawasan, Nagori

A. Pendahuluan

Sampai saat ini, keberadaan Danau Toba masih menjadi salah satu objek wisata unggulan di Sumatera Utara. Namun demikian, tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun manca negara dari waktu ke waktu relatif menurun. Banyak sudah upaya dilakukan oleh semua pihak untuk mengembalikan pamor Danau Toba. Upaya mutakhir adalah dengan menetapkan kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategi nasional. Namun demikian, bagian terberat dalam upaya pengembangan kawasan ini adalah mesinergikan setiap upaya dengan peningkatan kesejateraan penduduk di sekitarnya.

Salah satu bagian dari kawasan Danau Toba yang secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan penduduk adalah kawasan "*Panatapan*"[1].

Secara geografi, beberapa nagori[2] yang masuk dalam beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun memiliki hubungan langsung dengan kawasan Danau Toba. Pada masing-masing nagori yang tinggal masyarakat yang memiliki karakter yang beragam. Untuk bisa mengembangkan kawasan tersebut sebagai kawasan wisata terutama terkait dengan pengeloalan ruang terbuka publik, dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Pariwisata Berbasis Komunitas (PBK) yang diajukan oleh Damanik (2013). Pengelolaan pariwisata model ini tentunya tetap harus memperhatikan kondisi sumberdaya alam, lingkungan dan manusia yang ada di dalamnya. Mengingat pengelolaan kawasan Danau Toba di Kabupaten Simalungun akan bersentuhan dengan kelompok masyarakat yang memiliki karakter yang beragam, maka diperlukan sebuah model pengembangan kawasan pariwisata yang memang harus bersifat lokalistik namun harus sesuai dengan prinsip pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan pemerintah.

Semangat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan ruang terbuka publik dalam mendorong tumbuhnya daya saing pariwisata tentu sebuah hal yang baik. Kondisi ini semakin terlihat penting saat otonomi daerah di tingkat desa telah lahir melalui pengundangan Undang-undang Nomor 6 tentang Desa pada tahun 2014. Kehadiran undang-undang ini secara langsung jelas memberikan ruang yang lebih luas bagi desa sebagai basis daerah otonom. Untuk kasus di Simalungun, salah satu tema manarik terutama di Nagori yang terletak di peninggiran Danau Toba adalah menyangkut keterlibatan pemerintah Nagori dalam kewenangan pengaturan ruang terbuka publik yang bila dispesifikkan merujuk pada kawasan "*Panatapan*". Kahadiran kawasan ini jelas memiliki dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi pemanfaatan kawasan penatapan oleh masyarakat sebagai lokasi berdagang adalah baik, namun pola pengusahaannya yang membatasi akses pengunjung dalam hal ini wisatawan untuk menikmati ruang publik ikut menurunkan kualitas estetika dan kepuasan pengunjung. Berdasarakan kondisi demikian, maka diperlukan sebuah penelitian yang lebih khusus untuk membahas tentang bagaimana posisi pemerintahan nagori dalam pengelolaan kawasan ruang terbuka publik dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Urgensi pengadopsian prinsip pembangunan berkelanjutan adalah untuk menjamin bahwa pola pengelolaan kawasan *Panatapan* tersebut harusnya mampu mempertahakan daya dukung lingkungan atas kehidupan manusia tidak hanya saat ini namun juga di masa yang akan datang.

Sesuai dengan gambaran fenomena yang disampaikan sebelumnya, maka lingkup masalah ini tentu dibasatai oleh satuan wilayah yang menjadi perhatian yaitu kawasan Danau Toba yang masuk dalam wilayah Kabupaten Simalungun. Sementara itu, berkesesuaian dengan gambaran latar belakang yang telah disampaikan, maka masalah penelitian yang potensial untuk dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana pola penataan dan pengelolaan ruang terbuka publik berupa kawasan *Panatapan* di sekitar Danau Toba yang selama ini berlangsung di Kabupaten Simalungun serta bagaimana keterlibatan pemirintahan Nagori guna mendorong

[1] Panatapan adalah konsep lokal yang secara umum digunakan untuk menyebut spot pemandangan atau lokasi yang digunakan sebagai tempat untuk menimati pemandangan suatu kawasan wisata dengan sudut padang yang relatie luas dan biasanya berada di ketinggian dan kawasaan terebut juga dapat dikategorikan sebagai ruang terbuka umum/ ruang publik

[2] Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 TAHUN 2006 disebutkan bahwa Nagori adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

peningkatan daya saing pariwisata guna menjamin kesejahteraan penduduk dengan mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan?

B. Tujuan dan Mafaat Penelitian

Merujuk pada rumusan yang hendak dibahas melalui penelitian ini, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pengelolaan kawasan ruang terbuka publik di sekitar Danau Toba serta bagaimana posisi pemerintah Nagori dalam pengelolaannya guna mendorong peningkatan daya saing pariwisata guna menjamin kesejahteraan penduduk dengan mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah akan ditemukannya sebuah pola pengelolaan atas ruang publik di sekitar kawasan Danau Toba yang berlangsung selama in dna strategi pelibatan pemerintahan Nofor dala i. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini kemudian dengan bantuan pemikiran teoritis dapat dipergunakan sebagai pisau analisis untuk melahirkan sebuah model pengembangan kawasan wisata yang berdaya saing dan bersinergi dengan peningkatan kesejahteraan penduduk melalui pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.

C. Kerangka Pikir

Secara garis besar ada banyak penelitian tentang pengelolaan ruang publik yang secara langsung terkiat dengan aspek ekonomi penduuduk. Namun demikian, penelusuran publikasi ilmiah tentang pengelolaan kawasan *Panatapan* dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing pariwisata serta kesejahteraan penduduk masih sangat terbatas terutama kajian yang menggunakan perspektif pembangunan berkelanjutan. Sekalipun demikian, dalam rangka mendukung studi ini, terdapat beberapa penelitian tentang tema terkait yang layak dirujuk dalam membantu pembentukan kerangka pikir dalam penelitian ini. Beberapa diantaranya adalah tulisan Aristian (2011) yang membahas tentang permasalah pengelolaan ruang terbuka publik yang lebih difokuskn pada pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan. Beberapa tulisan lainnya yang membahas tentang pengelolaan ruang terbuka publik adalah Zuhaidha, dkk (2011) yang membahas tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang dikaitkan dengan pengembangan kawasan wisata.

Menyimak bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan adalah kacamata yang digunakan dalam membahas pengembangan pengelolaan kawasan panatap sekaitar Danau Toba di Simalungun, maka memahami prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi penting. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang.

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlajutan (sustainability) sendiri baru muncul beberapa decade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersedian lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul The Limit to Growth (Meadowet at al.,1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis).

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlajutan pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, (dalam Fauzi, 2004), konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi; (1) dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, (2) dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan.

Pezzey (1992) melihat aspek keberlajutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa "Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, Hall (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlajutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar;

(1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang.
(2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic wellbeing.
(3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala.

Dalam tulisannya lain, Perman et al., (1999) mencoba mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan 5 lima alternatif pengertian.

(1) Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption),
(2) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang,
(3) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (nondeclining),
(4) Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi.

Sedangkan pandangan Haris (dalam Fauzi, 2004) melihat bahwa konsep keberlajutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu;

- Keberlajutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlajutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
- Keberlajutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.

- Keberlajutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Merujuk pada penjelasan tentang konsep pembangunan berkelanjutan berikut ciri-cirinya diatas, maka dapatlah dipahami bahwa upaya mengembangkan kawasan *Panatapan* yang bersiergis dengan peningkatan kesejhateraan juga harus mengitrodusir nilai keberlangsungannya di masa yang akan datang. Untuk itu, pelibatan masyarakat lokal dalam perancangan pembangunan yang berkelanjutan menjadi penting. Pada kasus *Panatapan* di kawasan Simalungun, arti penting pelibatan masyarakat dalam rencana pengembangan kawasan Danau Toba juga harus memperhatikan keberadaan pranata sosial yang sudah ada.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Simalungun lebih tepatnya lagi di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. Lokasi ini dipilih karena kawasan *Panatapan* di kecamatan ini telah lama diokupasi masyarakat sebgai tempat berusaha. Tidak hanya itu, kawasan panatan di kecamatan ini telah berkembang baik secara kualitas bangunan tempat usaha maupun jumlah pengunjungnya.

Merujuk pada masalah serta disiplin ilmu yang mendasarinya, maka penelitian menggunakan metode atau pendekatan yang dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya dinamakan studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan yang berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) sesuatu objek. Atas dasar itu, maka data yang diperlukan akan digali dari seluruh aspek yang berkaitan dengan objek yang dikaji yang kemudian akan diupayakan untuk bisa menggambarkan objek secara luas dan mendetail melalui berbagai sumber data yang relevan. Dilihat dari sifat penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama yang dicari dalam penelitian model deskriptif kualitatif ini adalah informasi tentang kata-kata dan tindakan (Moloeng, 1991) dari pihak-pihak yang terlibat baik masayarakat dan perencana pembangunan dalam kaitannya dengan upaya menarasikan pola pengelolaan kawasan wisata yang berlangsung saat ini dan pengembangannya ke depan.

Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Observasi dilakukan di lokasi dengan mengamati seluruh kondisi, kegiatan, aktivitas dan hal-hal faktual yang ditemukan pada objek studi yaitu kawasan panatan. Teknik ini menggunakan alat bantu berupa kamera saku. Sedangkan wawancara dilakukan kepada para pelaku usaha atau mereka yang melakukan okupasi lahan di kawasan *Panatapan*. Tidak hanya itu, wawancara juga dilakukan kepada para aparatur pemerintahan nagori. Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui studi dokumen utamanya terkait dengan regulasi kewenangan pemerntahan Nogari dalam mengelola aset.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data dianalisis secara deskritif kualitatif dengan mempertimbangkan sumber dan temanya. Secara garis besar, proses analisis data berjalan sebari proses pengumpulan dilakuka. Teknik ini lebih dikenal dengan teknik on going analysis.

E. Hasil dan Pembahasan

e.1. Kondisi Umum dan Pola Pengelolaan Panatapan di Girsang Sipangan Bolon

Perlu dipahami bahwa kawasan ruang terbuka publik berupa area *panatapan* yang ada di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon mayoritas berada dalam wilayah Nagori Sibanganding. Kondisi umum kawasan ini hanya berupa jejalan kedai yang memanjang mengikuti ruas jalan utama Pematang Sinatar- Parapat. Dari hasil wawancra diketahui bahwalokasi *Panatapan* ini mulai diokupasi oleh penduduka sekitar 25 tahun yang lalu. Pada awalnya lahan di pantapan ini hanya dijadikan sebgai tempat usaha tempel ban

dan kedai kopi/ rumah makan, itupun jumlahnya tidak lebih dari 4 unit. Seiring dengan perkembangan, maka lambat laun okupasi lahan miring yang juga berstatus ruang terbuka pulik ini mulai bertambah. Pada awalnya mereka yang mengokupasi lahan di *Panatapan* ini hanyala penduduk sekitar Nagori Sibaganding semata, namun belakangn penduduk luar juga sudah mulai ikut mengusahainya dengan status sewa pada mereka yang membuka lahan.

Jika kita menuju Kota Parapat dari arah Kota Pematang Siantar, maka sejak sekitar 6 km sebelum memasuki Parapat dahulunya kita akan disuguhi pemandangan yang dengan bebas bisa kita lihat. Di sebelah kanan kita kan disuguhi Panorama Danau Toba dengan perpaduan warna hijau dan biru dengan jurang terjal tepat disisi kanan jalan. Sementara itu, di sebelah kiri kita akan disuguhui penampakan punggung gunung atau bukit dengan dominasi warna hijau pohon dan ilalang pada beberapa bagian dan warna hitam bebatuan pada bagian kecil lainnya.

Semenjak kawasan lahan miring di Nagori Sibanganding mulai ramai diokupasi sejak 25 tahun lalu, maka suasana itu tidak lagi dengan mudah kita nikmati. Bangunan kedai yang berjajar seakan menjadi pembatas bagi siapapun untuk menikmati panorama keindahan Danau Toba dengan bebas. Pemandangan indah Danau Toba tetap dengan bisa diakses namun kita harus singgah pada bangunan kedai-kedai yang ada tersebut. Pad ahari-hari biasa, tidak banyak aktifitas yang bisa kita lihat saat pertama kita memasuki daerah *Panatapan* di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon ini. Hal yang paling umum terkihat hanyalan kendaraan yang lalu lalang dengan volume yang tidak begitu besar dihari biasa di menjelang akhir minggu jumlahnya akan bertambah. Kalau pagi hari menyusurii kawasan ini, kita biasanya hanya melihat beberapa warga yang membersihkan pekarangan kedai mereka dan bebukitan di seberang jalan. Belkangan ini kita juga akan melihat aktifitas masyarakat yang sedang melakukan proses pembangunan kedai di sekitar *Panatapan*. Pada beberapa kedai lainnya kita akan menjumpai aktifitas pedagang yang melayani para pengunjung yang datang.

Jika liiburan menjelang, kondisi sedikit berubah. Di musim liburan daerah *Panatapan* ini akan sangat ramai di singgahi oleh para pengunjung. Semua kedai relatif akan buka dan kita kan melihat jajaran mobil dan atau kendaraan yang di Parkir pada halaman kedai yang di sebagian lokasi kondisi hampir tidak berjarak dengan badan jalan. Penelusuran pada aparatur pemerintahan Nagori Sibaganding tidak diperoleh jumlah pasti berapa jumlah pasti bangunan kedai atau tempat usaha di kawasan *Panatapan* yang ada di wilayah mereka. Pengamatan sambil lalu memperkirakan jumlah bangunan kedai mencapai puluhan mendekatu ratusan. Kondisi bangunan kedai di kawasan ini juga beragam namun didominasi oleh bangunan semi permanen dan permanen. Saat ini, di beberapa kedai pengelola telah membangun tajuk atau tera di bagian yang menghadan danau toba dengan struktur beton sehingga proses menikmati pemandangan bisa dengan leluasa tapi tetap harus masuk terlbih dahulu ke kedai mereka.

Hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa jam operasional setiap usaha adalah tergantung pemilik kedai. Beberapa pemilik kedai yang buka hanya saat musim liburan saja jadi kalau tidak musim liburan kedai mereka akan dibiarkan begitu saja. Untuk sebagian lagi ada juga yang buka jika ada anggota keluarga mereka yang sempat dan mau menjaga kedai. Namun demikian dapat dipastikan jika rata-ratai pemilik kedai di kawasan *Panatapan* ini membuka kedai mereka selama 24 jam.

Mengenai pengelolahan sampah, masyarakat sekitar *Panatapan* lebih memilih untuk turun langsung membersihkan sampah-sampah di pekarangan mereka. Aktifitas membersihkan sampah biasanya dilakukan di pagi dan sore hari dengan cara membakar sampah-sampah pada tempat tertentu atau tanah yang digali. Pemerintah kabupaten sendiri tetap menyediakan truk pengangkat sampah untuk mengangkut sampah-sampah yang tertumpuk di sekitaran pemilik kedai. Namun demikian, pada

halaman kedai yang tidak berpenghuni akan didapati sampah-sampah yang dibiarkan berserakan.

Fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut adalah seperti kamar mandi umum, dan ruang sholat untuk yang sebagian kondisinya masih terjaga. Selian fasilitas itu, di beberapa kedai telah tersedia fasilitas khusus untuk *spot* foto. Air bersih di kawasan ini didapat langsung dari sumber mata air pegunungan yang di tampung di dalam tank besar. Karenanya untuk pengadaan air bersih, sejauh ini para pengelola usaha di panatan tidka merasa kesulitan.

Penelusuran atas proses memulia usaha di kawasan ini memperlihatkan kenyataan bahwa pembangunan bangunan kedai di kawasan ini sebagian tidak berlangsung secara bertahap, bahkan ada yang memiliki waktu sela pembangunan mencapai 5 tahun. Hal ini seprti disampaikan oleh salah satu informan, Opung Kesdam Boru Sinaga yang berusia 65 tahun. Dalam peneuturannya ia menceritakan bahwa ia melanjutkan kembali pembangunan kedai milik orang tuanya yang setelah 5 tahun terhenti. Data yang diperoleh dilapangan juga memperlihatkan bahwa kebanyakan masyarakat sekitar penatapan merupakan penduduk asli yang bersuku Batak Toba dan sebagian kecial berasala dri suku Simalung. Sejauh ini tidak ada strategi khusus yang mereka lakukan dalam upaya membangun kedai mereka bahkan untuk mempertahankan kedai mereka. Hal ini dikarenakan status lahan yang dimiliki adalah milik pribadi dan merupakan kepunyaan masyarakat sekitar. Dengan demikian masyarakat masih bisa membangun kedai mereka sendiri tentunya dengan modal sendiri. Walaupun demikian, pemeirntah melalui pihak kecamatan juga sudah menggagasbeberapa ketentuan dalam mebangun bangunan di kawasan *Panatapan* diantaranya adalah himbauan kepada masyarakat agar tidak membangun kedai karena ini daerah larang kelola yang mana kemiringan tanahnya lebih dari 60^0 dan hal ini dapat membahayakan mereka. Hal unik lainnya adalah walaupuan lahan dikawasna ini milih diyakini milik leluahur, namun ijin kepemilikan tidak bisa dikeluarkan karena statusnya yang memang merupakan lakan konservasi serta ruang tebruka publik berupa sempadna jalan. Sekalipun demikian hal unik yang ditemukan di lapangan adalah adanya beberapa kedai yang mempunyai izin dari kecamatan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sekalipuan demikian, pada beberapa kasus terungkap bahwa bagi para calon pemilik usaha yang ingin mendirikan bangunan ini, biasanya akan di seleksi lokasinya oleh pihak Kecamatan.

Sejuah ini data yang diperoleh memperlihatkan bahwa tidak ada tarif khusus yang harus di bayarkan oleh pengelola kedai kepada pemerintah daerah baik pihak kecamatan atau aparatur nagori kecuali retribusi parkir yang dibayarkan kepada Dinas Perhubungan dan tarif tersebut adalah sebesar Rp. 15.000 / hari. Selian itu para pengelola juga dikenati retribusi sampah yang mana petugasnya dari pihak kecamatan sendiri dengan tarif yang dikenakan Rp. 5.000 / minggu. Selai itu masyarakat pemilik usaha hanya perlu membayar pajak wajib yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada negara setiap tahunnya. Untuk hal ini ada sedikit yang unik sebab dari beberap informan yang diwawnacarai tidak satupun yang memiliki sertifikat hak milik namun sebagian mengaku memang mambayar pajak bumi dan bangunan. Pendalaman akan hal ini dirasa perlu namun pada studi ini belum berhasil diperoleh.

e.2. Peran Eksisting Aparatur Nagori Sibaganding dalam Pengelolaan Panatapan

Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya bahwa statuas kepemilikan tanah di *Panatapan* tersebut merupakan kepemilikan leluhur. Dalam proses okupasi lahan terebut, urusan izin membangun usaha tidaklah dipersulit oleh pihak aparatur kecamatan maupun nagorinya. Hanya saja yang menjadi penghambat saat ini adalah pengesahan kepemilikan tanah yang belum di beri sertifikat kepemilikan. Sejauh ini peranan aparatur nagori disini hanya mengawasi dan mengontrol serta mempermudah segala akses masyarakat ke kecamatan. Selian itu, aparatur nagori juga kerap

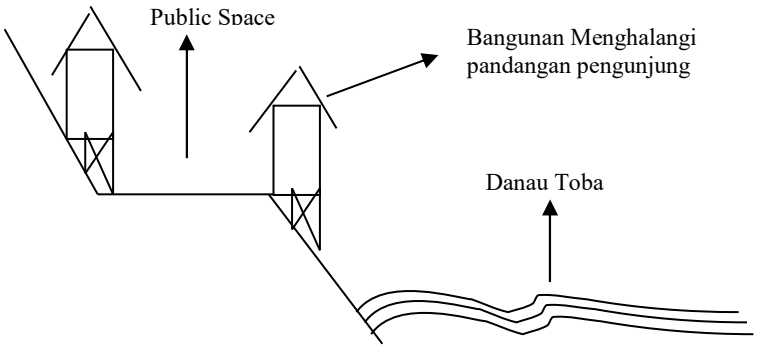
menghimbau warga agar tetap menjalakan usaha dengan sambil menjaga ekosistem yang ada demi keselamatan bersama.

Secara regulasi, lahan di kawasan *Panatapan* merupakan lahan yang dilarang untuk dikelola hanya karena struktur dari kemiringan tanahnya yang lebih dari $60^{0.}$ Kemiringan seperti itu akan sangat berisiko jika dikelola. Resiko terbesar adalah bencana seperti longsor dan lainnya yang dapat membahayakan warga sekitar. Pihak nagori sendiri sudah sering mensosialisasikan masalah ini, namun karena alasan masyarakat yang mengggantungkan kehidupan pada usaha mereka, maka pihak aparatur nagori tidak bisa berbuat apa. Karena seluruh kawasan di parapat ini merupakan ekowisata yang tetap harus dijaga kelestariannya sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk saling menjaga kelestarian alam, oleh karenanya pemerintah setempat tetap memberikan izin usaha kepada masyarakat dengan syarat tetap menjaga ekosistem yang ada. Selama menjalankan usaha di *Panatapan* ini para pelaku usaha mempunyai hubungan yang penting dengan aparatur nagori karena dari sini para aparatur saling bekerja sama dengan masyarakat dalam urusan menyampaikan keluhan dan perizinan mereka kepada kecamatan, selain itu adanya gotong royong yang terus menerus mereka lakukan di sekitaran *Panatapan*.

e.3. Analisis Potensi Nagori dalam Penataan Ruang Publik di Kawasan Danau Toba: Kasus Pengembangan Panatapan di Nagori Sibaganding

Secara eksplisit kewenangan nagori dalam penataan kawasan nagori tertuang pada pasal 150 Peraturan Daerah Simalungun No. 13 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori. Pada pasal 150 Bab VIII, Penataan Kawasan Nagori dijelaskan bahwa Penetapan kawasan Nagori bertujuan untuk menata ruang suatu Nagori guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan atara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman,pelayanan jasa public dan social,serta fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pasar. Dengan aturan ini maka secara jelas keberadaan beberapa ruang publik menajdi kewenangan nagori untuk mengatur pengelolaannya termasukla areal "*Panatapan*". Sejalan dengan itu, salah satu kewenangan nagori yang semakin menguat seiring dengan diundangkannya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah menyangkut kewenangan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Salah satu bagian dari komponen sumberdaya alam dan lingkungan adalah *Panatapan* sebagai ruang publik. Pada konteks di beberapa nagori yang terletak di sepanjang pesisir Danau Toba, keberadaan *Panatapan* ini memiliki arti penting baik secara ekologis dan ekonomis. Atas dasar kondisi tersebut, maka penataan tata kelola *Panatapan* memiliki urgensi tersendiri bago nagori-nagori tersebut dalam rangka pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Nilai ekologis *Panatapan* dapat dilihat dari fakta bahwa mayoritas *Panatapan* berada di tepi jalan dengan kondisi lahan yang cukup terjal dan kemiringan lahannya di atas 45%. Dengan tingkat kemiringan lebih dari 45 % maka dapat dipastikan bahwa kawasan tersebut adalah lahan konservasi yang tidak boleh dikelola. Sementara itu dari sudut ekonomis, kehadiran *Panatapan* tersebut merupakan sarana pendukung wisata yang sayangnya dalam kajian estetika lingkungan wisata malah mengancam perkembangan pariwisata. Pola penataan kawasan *Panatapan* sebagai ruang publik telah dikavling menjadi kawasan privat oleh pengelola kedai sehingga upaya menikmati pemandangan dan panaroma kawasan Danau Toba oleh pengunjung menjadi terganggu. Secara umum pola penataan kawasan *Panatapan* yang kerap dijumpai di sepanjang Nagori Sibaganding yang berada di pinggiran Danau Toba dapat dilihat pada model berikut ini:



Gambar 1. Sket Pengelolaan umum Kawasan *Panatapan* Saat ini

Memperhatikan aspek ekologis dan ekonomi kawasan *Panatapan* tersebut, maka menjadi relevan memperbincangkan potensi keterlibatan pemerintahan nagori dalam mengelolanya sebagai sumber pendapatan nagori. Hal ini paling tidak tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 16 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Nagori di Kabupaten Simalungun. Pada pasal 2 poin 1 peraturan daerah terbeut disebutkan bahwa sumber pendapatan nagori terdiri atas: (a) pendapatan asli nagori yang meliputi; (1) hasil usaha nagori, (2) Hasil Kekayaan Nagori, (3) Hasil Swadaya dan Partisipasi, (4) Hasil Gotong Royong dan (5) lain-lain pendapatan asli Nagori yang sah. Sedangkan pada pasal 3 disebutkan bahwa kekayaan Nagori terdiri atas:

a. Tanah Kas Nagori
b. Pasar Nagori
c. Bangunan Nagori
d. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagori
e. Pemandian umum yang diurus oleh Nagori
f. Hutan Nagori
g. Perairan/ pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagori
h. Tempat-tempat pemandian sungai
i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh nagori
j. Jalan nagori; dan
k. Lain-lain kekayaan milik nagori

Merujuk pada isi peraturan daerah terebut, maka keberadaan *Panatapan* pada beberapa Nagori di sepanjang garis pantai Danau Toba adalah potensial dikembangkan menjadi sumber pendapatan nagori. Peluang itu menjai semakin etrbuta seiring dengan diundangkannya undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa.

Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa pola pengelolaan kawasan *Panatapan* yang berlaku saat ini memiliki banyak keterbatasan untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan. Pola bangunan yang didirikan oleh masyarakat di kawasan *Panatapan* jelas memberikan keterbatasan bagi pengunjung di Danau Toba. Tidak hanya itu, estetika bangunan secara arsitektur juga jelas mengurangi dimensi keindahan kawasan di ruang publik. Akiibatnya orang menjadi sangat tidak terdorong untuk menikmati keindahan kawasan Danau Toba dalam waktu yang lama. Keasrian kawasan yang tidak terjaga juga dipastikan akan bisa mempengaruhi kepuasan pengunjung. Dalam upaya mengatasi keterbatasan itu, melalui undang-undnag desa yang baru, epmerintahan Nagori semakin diberi ruang untuk terlibat. Pelibatan itu tentunya memiliki dimensi tujuan yang beragam. Namun demikian, usaha panjang untuk memaksimalkan peran pemerintahan nagori pada penataan ruang bulik semisal

Panatapan juga masih memiliki keterbatasn terutama pada kesiapan apatarur pemerintahan nagori untuk melahirkan regulasi pengelolaan kawasan *Panatapan*. Beberapa keterbatasan lainnya, adalah sejauh ini identifikasi atas spot atau lokasi potensial sebagai kawasan belum terlaksana dengan baik di masing-masing nagori. Tidak hanya itu sinergitas pengelolaan kawasan *Panatapan* ini dengan aturan pengeloalan kawasn kopnservasi juga menjadi hal yang ahrus dilakukan. Semua itu akhirnya berpulang pada kesiapan aparatur pemerintahan nagori termasuk, Pangulu, Tungkat Nagori, Maujana dan lainnya untuk memanfaatkan peluang keweangan yang diamanatkan oleh Undang-undang no. 6 tahun 2004 tentang desa. Bila hal ini bisa didorong, maka upaya peningkatakan kesejahteraan masyarakat melalaui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Nagori akan bisa terwujud.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diajukan dalam kaitannya untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Beberapa kseimpulan itu diantaranya adaah:

1. Polemik pengelolaan kawasan *Panatapan* di Nagori Sibaganding sejuah ini memang masih belum menjadi persoalan sekalipun secara formal ada banyak aturan dan atau regulasi yang dilanggar. Pengelolaan *Panatapan* selama ini secara faktual memberi akses terbatas pada pengunjung Danau Toba untuk menikmati dan hal ini berpotensi untuk menurunkan minat kunjungan orang. Di satu sisi pengeloaan selama ini secara ekonomi memang ikut meningkatkan pendapatan penduduk, secara sosial belum memunculkan konflik, namun secara ekologis masih perlu penyesuaian terutama berhubungan dengan aspek kelestaraian dan keamananan bangunan dari susaut keteknikan.
2. Peran aparatur nagori sejauh ini hanya sebatas perpanjangan tangan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten tanpa dibarengi dengan kewenangan untuk menerima manfaat secara ekonomi pada pendapatan asli nagori. Sementara itu secara hukum, pelibatan pemerintahan Nagori pada pengelolaan kawasan ruang terbuka publik berupa *Panatapan* di nagori Sibaganding sangat terbuka lebar untuk mendorong peningkatan pendapatan nagori yang pada gilirannya akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekalipun demikian, kemampuan aparatur pemerintahan nagori secara operasional dalam mengelola kekayaan nagori sebagai sumber pendapatan masih sangat diperlukan. Proses peningkatakan kemampuan itu sendiri harus dilihat dalam kerangka persiapan implementasi undang-undang no. 6 tahun 2004 tentang desa

Sementara itu, hal umum yang bisa disarankan dari studi ini adalah perlunya dilakukan segera sebuah upaya pengkajian yang lebih mendalam tentang penyesuaian substansi isi Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 13 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori dengan kandungan yang ada pada undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang desa. Penyesuaian ini menjadi penting sebab beberapa aturan operasional tentang otonomi daerah terutama di kawasan Simalungun ini lebih dahulu ditetapkan dari pada pengundangan Undang-undang desa. Sebut saja, peraturan tentang sumber pendapatan Nagori sudah ditetapkan melalui peraturan daerah No. 16 tahun 2000. adapun aturan tentang pemerintahan nagori baru ditetapan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah No. 13 tahun 2006. Sedangkan payung hukum tentang otonomi desa baru diundangkan melalui undang-undang No. 6 tahun 2014. Ini artinya ada aturan yang lebih opersioanl lebih dahulu keluar dibandingkan dengan payung hukum induknya.

Daftar Pustaka

Aristian, Febry. (2011) Ruang Terbuka Hijau Dalam Perencanaan Kota, makalah dimuat pada http://febryaristian.blogspot.co.id

Fauzi, A. 2004. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hall, G. (1998) Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability.Columbia University Press. New York

Damanik, Janianton. 2013. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan. Yogyakarta*: Pustaka Pelajar

Meadowet et.al.(1972) *The Limits to Growth*. Universe Books. New York

Moleong, Lexy J. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya

Pezzey, John. (1992)"Sustainabilty: An Interdisciplinary Guide." Environmental Values 1, no. 4 . Page 321-362 juga dimuat pada http://www.environmentandsociety.org/node/5473

Perman, at. al. (1999)natural Resoaurce and Environmental Economics. 2nd Edition. Longman; London

Zuhaidha, Sylvia Ayu., dkk (2011) Perencanaan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang (Studi Kasus : Hutan Wisata Tinjomoyo). Makalah dimuat pada http:// portalgaruda.org

Revitalisasi Permukiman Kumuh Berbasis Wisata Pada Bantaran Sungai Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar

Mimi Arifin[1],Shirly Wunas[1],Pratiwi Mushar[2]

[1]Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
[2]Departemen Arsitektur,Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
Email:, mimiarifin@yahoo.com, shirly_wunas@yahoo.co.id tiwiarch19@gmail.com

ABSTRAK

Penghuni permukiman kumuh sekitar sungai Tallo umumnya kaum migran. Pertambahan areal permukiman tiap tahun mengindikasikan perlunya arahan penanganan. Menumbuhkan karakter tertentu pada setiap permukiman, membutuhkan konsep revitalisasi yang tepat agar pembangunan bisa dinikmati dan dimiliki oleh penghuninya, masyarakat umum dan pemerintah Kota. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik fisik dan non-fisik permukiman sekitar sungai Tallo guna mendapatkan konsep penanganan dan penataan sesuai standar, keinginan penghuni serta program pemerintah kota Jenis penelitian adalah deskriptif. Metode analisis yang digunakan analisis spasial, kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kondisi fisik permukiman tidak memadai termasuk struktur bangunan, infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi. Beberapa rumah menempati areal aliran sungai yang merupakan kawasan publik dan rawan bencana, sehingga harus di relokasi.. Konsep penataan mengaitkan dengan potensi lokasi wisata sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya lingkungan perumahan yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta kota bebas kumuh.

Kata kunci: Revitalisasi, Permukiman Kumuh, Berbasis Wisata, Bantaran Sungai Tallo,

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Badan Pusat statistik tahun 2016 pertambahan penduduk kota Makassar masih tergolong tinggi 1,39 % . Pertumbuhan tersebut tidak hanya secara alami , namun juga oleh arus urbanisasi. Pertambahan migran yang masuk ke kota Makassar disebabkan kebutuhan mendapatkan pekerjaaan serta daya tarik kota. Pertambahan penduduk menyebabkan makin meningkatnya kebutuhan akan perumahan. Penyediaan lahan perumahan oleh pemerintah bagi kaum migran yang bekerja di sektor informal belum terpenuhi. Kaum migran umumnya membangun hunian di tempat seadanya dengan kondisi fisik bangunan yang tidak ideal. Kondisi fisik bangunan diperburuk dengan keadaan sarana prasarana yang minim dan tidak mendukung aktifitas para pemukim yang ada di suatu kawasan. Hal inilah menyebabkan terbentuknya kekumuhan, salah satunya di kawasan permukiman sekitar bantaran sungai Tallo.

Upaya pemerintah pusat dalam mengurangi permukiman kumuh perkotaan seperti gerakan pembangunan sejuta rumah serta Upaya pemerintah kota untuk menjadikan kota Makassar Zero slum di tahun 2020 , maka upaya untuk meneliti konsep revitalisasi permukiman kumuh sekitar bantaran sungai Tallo merupakan suatu yang penting agar permukiman kumuh tidak semakin berkembang.

Sejalan dengan RTRW penanganan permukiman kumuh di sekitar sungai Tallo dalam RTRW kota Makassar menetapkan bahwa misi Kawasan Khusus berupa Pengembangan Koridor Sungai Tallo adalah mengendalikan kawasan

Sungai Tallo dari, banjir dan pencemaran, memanfaatkan secara maksimal fungsi Sungai Tallo sebagai sarana transportasi air, pariwisata, dan budidaya perikanan.

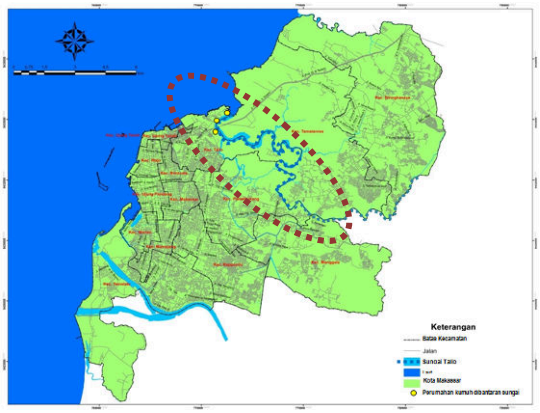
II. METODE

A. Lokasi penelitian

Sungai Tallo merupakan salah satu dari dua sungai yang berada di Kota Makassar. Dapat dilihat pada peta kota makassar (gambar 2.1) sungai Tallo membelah dua kota makassar. Berdasarkan posisi tersebut tergambarkan potensi sungai Tallo terhadap perkembangan Kota Makassar.

Secara geografis Sungai Tallo terletak diantara 119^0 23' dan 119^0 47 Bujur Timur serta 5^0 5' dan 5^0 17' Lintang Selatan Batas wilayah sungai Tallo adalah :

Berdasarkan administrasi pemerintahan Sungai Tallo terletak pada dua Kabupaten yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa dan satu kota yaitu Kota Makassar. Bagian dari Sungai Tallo yang terletak di Kabupaten Gowa meliputi 17.057 Ha atau 41,85 % dari total luas Sungai Tallo. Bagian dari Sungai Tallo yang terletak di Kabupaten Maros meliputi 12.281 Ha atau 30,13 % dari total luas Sungai. Untuk Kota Makassar, sebagian besar wilayahnya masuk dalam Sungai Tallo dan merupakan muara dari Sungai ini yang menerima pengaruh dari berbagai kegiatan di wilayah hulu yang terletak di Kabupaten Maros dan Gowa.



Gambar 1. Lokasi Penelitian Sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo

Kecamatan yang dilalui oleh Sungai Tallo terdiri atas 4 kecamatan yaitu Kec. Tallo, Ujung Tanah, Tamalanrea dan Manggala. Walaupun Kecamatan Tallo terkecil, perbatasannya dengan sungai tallo, namun permukiman kumuh dibantaran sungai hanya berada pada Kecamatan Tallo terutama sekitar muara. Pesatnya pertumbuhan perumahan kumuh ini tentu disebabkan potensi wilayah sekitar muara sungai tallo yang tumbuh pesat oleh industri, pergudangan, dan perikanan. Untuk itu berkaitan dengan tujuan revitalisasi permukiman kumuh di bantaran sungai tallo, maka lokasi difokuskan pada kecamatan tallo serta sekitar Daerah Aliran sungai Tallo terkait pengembangan transportasi air keterpaduannya dengan simpul-simpul potensi wisata sekitar.

Data diperoleh dari wawancara langsung dengan salah satu pasangan (suami/isteri) di seluruh rumah yang berada di bantaran sungai Tallo. Selain itu data kondisi rumah dan lingkungan diperoleh dari pengamatan dan sketsa, mempergunakan alat bantu GPS. Metode yang digunakan adalah pendekatan *beneficiary assessment* atau *client satisfaction.* Untuk mengetahui lebih mendalam kebutuhan dan keinginan mereka. Berdasarkan hasil wawancara konsep awal revitalisasi disusun yang selanjutnya dilakukan FGD ke masyarakat

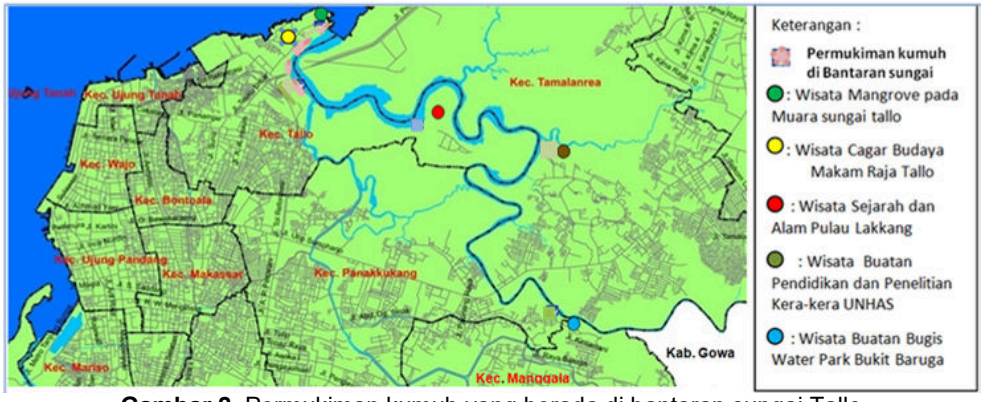
dan pemerintah untuk mendapat masukan lebih lanjut. Sedang data untuk menyusun arahan potensi wisata dan pengembangan sistim transportasi air ditanyakan langsung ke responden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN:

Analisis Ruang Perumahan Informal Terhadap Keselamatan Bangunan Dan Guna Lahan Fungsi Wisata

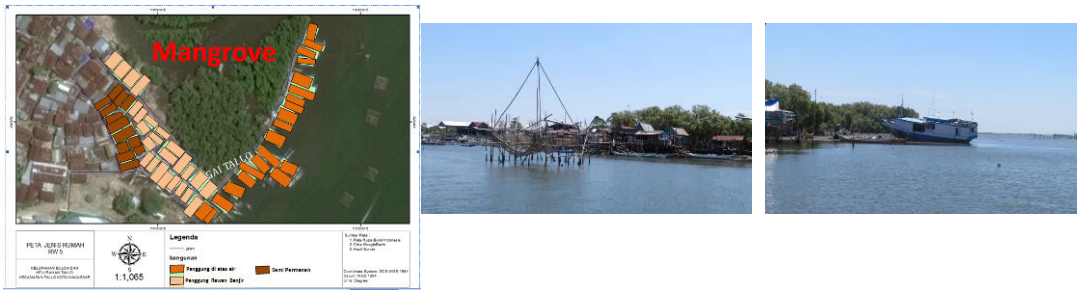
A. *Berdasarkan keselamatan bangunan ditinjau dari posisi perumahan yang berada di bantaran sungai dan rawan banjir*

Berdasarkan Analisis spasial dan observasi lapangan di tetapkan lokasi yang akan dijadikan pengamatan serta sumber informasi(data) .



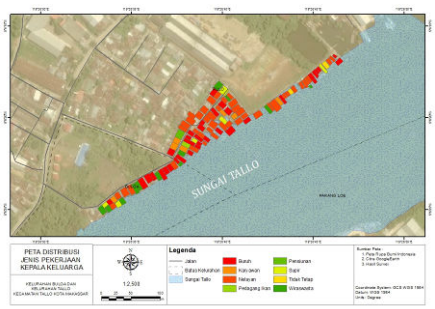
Gambar 2. Permukiman kumuh yang berada di bantaran sungai Tallo

Pada segmen 1 yaitu RW 5 kelurahan Tallo kecamatan Tallo tepatnya pada muara sungai Tallo terdapat 46 rumah yang ilegal dengan 21 yang berada pada bantaran sungai sedang 25 yang masih rawan banjir.



Gambar 3. Perumahan kumuh di RW 05 Kelurahan Tallo muara sungai Tallo

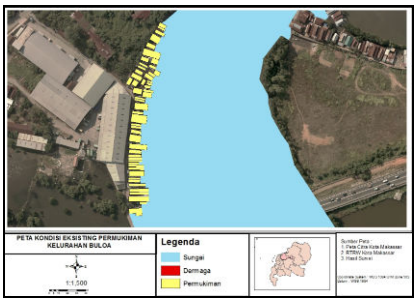
Untuk itu rumah yang harus direlokasi sebanyak 21 unit karena rawan dari sisi keselamatan bangunan serta area tersebut akan dikembangkan sebagai wisata mangrove. Keselamatan bangunan ditinjau dari posisi yang masih terkena dampak arus laut serta tingginya kecepatan angin terutama saat musim barat (hujan). Selama ini walaupun mereka sering merasa khawatir terutama saat musim hujan dan angin mereka harus terima keadaan tersebut karena tidak memiliki tanah untuk membangun rumah serta yang bermata pencaharian sebagai nelayan merasa lebih nyaman karena dekat dengan tempat kerja (laut). Lokasi ke dua pada RW 03 kelurahan Tallo Kecamatan Tallo dengan 108 rumah





Gambar 4. Perumahan kumuh yang berada di RW 03 Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo

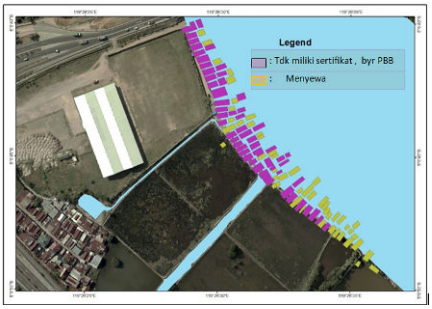
Lokasi ketiga yaitu kelurahan Buloa Kecamatan Tallo setelah jembatan Tol menuju ke arah muara sungai Tallo. Perumahan ini berada berkembang pesat dibelakang Bangunan pabrik dan pergudangan. Jumlah rumah yang berada di bantaran sungai 50 unit bangunan. Dengan pekerjaan penghuni rata-rata sebagai pekerja buruh industri, tukang,buruh bangunan serta nelayan.





Gambar 5. Lokasi dan eksisting permukiman kumuh dibantaran sungai Tallo kelurahan Buloa Kecamatan Tallo.

Lokasi ke Empat yaitu pada Kelurahan Buloa Sengkabatu Kecamatan Tallo sekitar bantaran sungai Tallo sebelum Jembatan Tol ke arah Muara





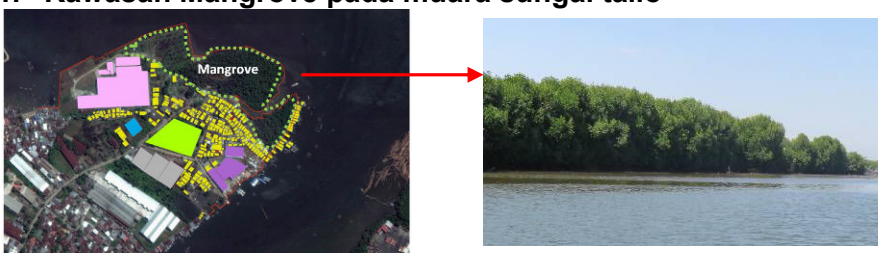
Gambar 6. Perumahan kumuh yang berada di RW 05 Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo

Berdasarkan survey, tercatat ada sekitar 107 rumah yang telah terdaftar di kampung Sengkabatu, namun belum ada yang memiliki sertifikat tanah. Permukiman Nelayan Sengka Batu terletak di Jln. Teuku Umar 15, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo Kota Makassar. Posisi perumahan berada di bantaran Sungai Tallo dekat dengan Jln. Tol Insinyur Soetami, tepatnya di belakang pergudangan Bosowa Sport Center.

B. Kawasan Peruntukan dan Potensi Wisata Sekitar Daerah Aliran Sungai Tallo

Kawasan Pariwisata yang dapat dikembangkan sejalan dengan pengembangan transportasi air sepanjang sungai Tallo antara lain :

1. Kawasan Mangrove pada muara sungai tallo



Gambar 7.Potensi Kawasan Mangrove Yang Berada Pada Muara Sungai Tallo

Tanaman mangrove di Muara sungai makin berkurang, baik akibat berubah menjadi perumahan maupun dimanfaatkan batangnya sebagai kayu bakar (arang). Arang mangrove memiliki kualitas yang baik setelah arang kayu oak dari Jepang dan arang onsshu dari Cina. Untuk itu arahan pengembangan kawasan mangrove sebagai kawasan wisata alam dan pendidikan harus ditegaskan agar ekosistim mangrove yang telah mengalami kerusakan/penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya, dapat diperbaiki dan terjaga. Kegiatan wisata ini juga dapat menyerap tenaga kerja lokal.

2. Cagar Budaya Makam Raja-raja Tallo

Keberadaan makam raja-raja tallo mengingatkan keberadaan kerajaan Tallo yang dahulu sangat terkenal berhubungan erat dengan kerajaan Gowa yang secara bersama-sama membuat kerajaan yang bernama GowaTallo Kerajaan Tallo berawal dari wafatnya Raja Gowa yang ke-6 bernama Tonatang Kalopi. Penerusnya sebagai raja Gowa ke ke-7 adalah anak tertuanya Batara Gowa Tuminangari Paralakkenna, dan adiknya yang bernama Karaeng Loerisero memerintah sebagian wilayah yang disebut Tallo.

Cagar Budaya adalah kegiatan menjaga atau melakukan konservasi terhadap benda-benda alam atau buatan manusia yang dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di Indonesia, benda cagar budaya harus berumur sekurang-kurangnya 50 tahun (UU No.5 tahun 1992).

3. Wisata Alam dan Sejarah dan Pendidikan di Pulau Lakkang

Pulau Lakkang merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Tallo. Pulau ini merupakan salah satu daerah wisata sejarah yang ada di kota Makassar yang telah diresmikan tahun 2011 . Daerah ini juga merupakan salah satu pusat penelitian lingkungan hutan *mangroove* yang ada di Makassar. Konsep ini telah direncanakan oleh pemerintah Kota Makassar melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dan telah direspon oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.



Gambar 8. Potensi wisata alam dan sejarah berupa dermaga, Situs Bunker Jepang

Di Pulau lakkang terdapat lokasi penelitian Mangrove yang dikelola oleh Politani Universitas Hasanuddin. Lokasi ini berpotensi dijadikan wisata pendidikan dan

dipadukan dengan wisata atractive mangrove yang berada di muara sungai tallo. Untuk mencapai lokasi ini terdapat dermaga khusus dapat dilihat pada gambar 9.




Gambar 9. Dermaga sebagai potensi wisata alam dan Pendidikan Lakkang

4. Wisata Alam ,Pendidikan dan Penelitian Kera-Kera

Daerah ini berbatasan dengan Universitas Hasanuddin (Unhas). Desa kera-kera yang berpotensi dikembangkan sebagai wisata pendidikan dan penelitian. Potensi lain selain dekat dengan Universitas Hasanuddin juga sudah terdapat dermaga yang selama ini melayani masyarakat lokal dalam aktivitas sehari-hari serta menuju ke pulau lakkang tempat lainnya




Gambar 10. Dermaga Kera-kera sebagai dermaga utama yang menghubungkan dengan pulau lakkkang dan sekitarnya

5. Wisata Buatan Bugis Waterpark Adventure (BWA)

Lokasi ini dibangun sejak tahun 2012 yang dapat dicapai melalui sungai Tallo. Konsep wisata bahari modern yang dikemas merupakan bentuk pelestarian terhadap sejarah kemaritiman Bugis-Makassar. Penerapan ini juga menjadi edukasi alternatif kepada masyarakat dalam dan luar Sulsel (wisatawan lokal) terhadap sejarah Bugis-Makassar. Potensi wisata pada BWA terlihat dari pengunjung pada hari libur terutama hari minggu mencapai lebih dari seribu orang(2017).




Gambar 11. Wisata Bugis Waterpark Adventure

Sekitar 400 meter dari lokasi WBA terdapat dermaga Bukit Baruga.Dermaga yang telah dibangun dengan fungsi awal untuk memenuhi kebutuhan penghuni

perumahan Bukit Baruga yang ingin menikmati keindahan sungai tallo atau yang ingin berwisata ke pulau-pulau wisata lainnya seperti Samalona, Lae-lae, Barang Caddi, Kodingareng dan pulau lainnya. Perahu milik masyarakat ini dapat disewa. Kondisi Dermaga masih perlu ditingkatkan karena sudah terjadi pendangkalan dan kurang terpelihara. Dapat dilihat pada gambar 12.



Gambar 12. Dermaga Bukit Baruga yang mengalami pendangkalan dan kurang terpelihara.

Dengan konsep keterpaduan dengan wisata air serta pengembangan transportasi sungaii menuju muara hingga laut merupakan suatu yang akan saling menunjang aktivitas wisata dan tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

6. Wisata Lainnya Terkait Potensi Alam Dan Budaya

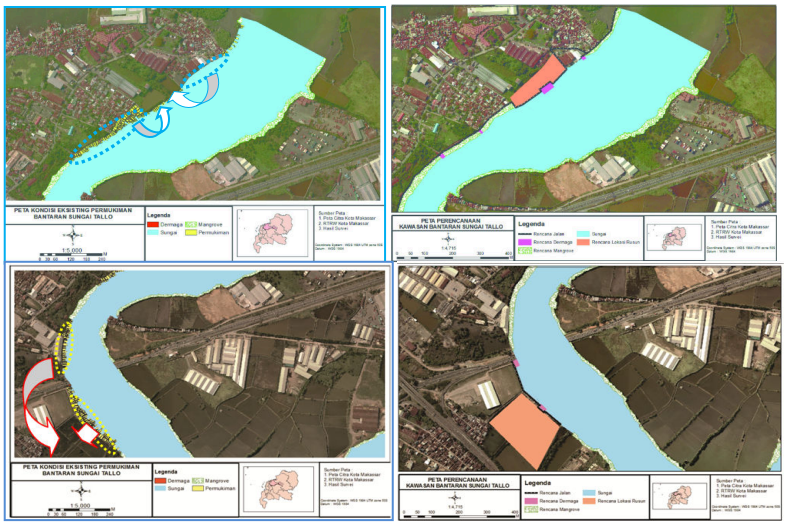
Lokasi sekitar sungai Tallo yang dapat dikembangkan sebagai wisata seperti lomba dayung, kegiatan mancing , budi daya perikanan (pertambakan). Potensi Hutan mangrove terdapat sekitar muara sungai meliputi kecamatan Tallo sampai perbatasannya dengan Panakukang. Hutan Mangrove sangat berpotensi sebagai lahan berkembang biaknya ikan, udang serta mencegah erosi. Hutan mangrove dapat dikembangkan sebagai wisata alam dan edukasi. Mulai Kecamatan Panakukang sampai kecamatan Tamalanrea dan Manggala sepanjang bantaran sungai terdapat hutan nipah (Nypa fruticans Wurmb). Selama ini warga lokal memanfaatkan daunnya sebagai atap dan tandan bunga nipah untuk menyadap nira serta tempat bernaung saat memancing. Buahnya bisa dikonsumsi langsung atau dibuat kue tradisional. Dapat dilihat pada gambar 3.12



Gambar 13. Hutan nipah yang difungsikan secara sederhana oleh masyarakat lokal dan umum.

Keberadaan pohon nipah belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, Dalam Chairul dan Yenti (2013), pohon Nipah berpotensi sebagai bahan pembuat etanol yang telah diteliti hasilnya lebih efektif dari kelapa sawit . Selain itu sebagai bahan dasar pembuatan palm sugar. Potensi sungai tallo menurut penduduk sekitar sangat potensil dengan udang putih, sedang udang yang dieksport (hasil budidaya) banyak dikembangkan pada tambak disepanjang bantaran sungai Tallo.

Arahan revitalisasi permukiman kumuh , dengan merelokasi mereka ke rumah susun yang tidak jauh dari lokasi awal rumah mereka. Pembangunan rumah susun harus lengkap dengan fasilitasnya agar masyarakat tidak lagi kekurangan sarana sosial, ekonomi dan kebudayaan. Seperti Lokasi tambatan perahu tidak jauh dari rumah mereka,serta tersedianya tempat pengolahan hasil laut dan sungai. Tempat pelatihan ketrampilan bagi ibu-ibu serta sarana kesehatan dan posyandu untuk kesejahteraan ibu dan anak.



Gambar 14. Eksisting permukiman kumuh di bantaran sungai tallo dan arahan relokasi

IV. KESIMPULAN

Revitalisasi perumahan sekitar bantaran sungai Tallo dengan melakukan penggeseran lokasi perumahan maksimal 800 meter dari lokasi awal (sekitar bantaran sungai) agar penghuni tidak kehilangan pekerjaan serta dapat menikmati dampak dari rencana pengembangan kawasan sepanjang DAS. Diharapkan semua bentuk pengembangan wisata dan simpulnya dapat terpadu dengan peningkatan pendapatan masyarakat lokal serta perluasan partisipasi masyarakat, seperti pengembangan budidaya perikanan dipadu dengan pengembangan kreativitas wanita lokal sehingga menambah pendapatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Silas, Johan (2000). *Rumah Produktif Dalam Dimensi Tradisional Dan Pemberdayaan***.** Lab. perumahan dan pemukiman jurusan arsitektur FISP-ITS.

Wunas, dkk. 2014. *Prinsip-prinsip pengembangan lokasi perumahan produktif dan industry pengolahan rumput laut berbasis komunitas (kasus DAS Kabupaten Bantaeng)*. Unhas, penelitian hibah kompetensi.

Wunas, S. 2013. *Model perluasan bangunan swadaya sebagai pendukung fungsi hunian dan usaha berbasis ramah lingkungan*,seminar Nasional ilmiah IPLBI.

Peraturan/ UU/Kebijakan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Chairul, Selvia Reni Yanti. 2013. Pembuatan Bioetanol dari Nira Nipah Menggunakan *Sacharomyces Ceriviceae*. Jurnal Teknobiologi, IV(2):105-108 ISSN : 2087-5428. Riau

Pengembangan Potensi Wisata Pendidikan di Kampung Duren Mandiri RW 04 Kelurahan Bakalan Krajan Kota Malang

Septiana Hariyani[1]

[1]*Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik,Universitas Brawijaya,Malang*

*Email:septianahariyani@ub.ac.id*atau
septianahariyanipwk@yahoo.co.id

ABSTRAK

*Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Pesatnya perkembangan dan pembangunan Kota Malang mulai mengancam keberadaan kampung-kampung kota. Semakin tahun semakin banyak pembangunan perumahan dan gedung gedung tinggi yang mulai menggeser adat budaya lokal kampung kota. Permukiman Kampung Kota sudah mulai muncul sejak pemerintahan Hindia Belanda, seperti halnya Kampung Duren yang sudah ada sejak jaman Belanda. Menurut warga, sejarah Kampung Duren berasal dari kata "kudu leren" atau dengan kata lain adalah harus istirahat, merupakan tempat pelaku perjalanan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat Kota Malang. Penelitian ini mengkaji potensi-potensi yang dimiliki Kampung Duren Mandiri, serta strategi pengembangan untuk menjadikannya wisata edukasi.Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan metode analisis menggunakan Participatory Urban Appraisal (PUA)*yang *dilakukan dengan cara focus discussion grup (FGD) untuk mengetahui potensi dan masalah yang berkaitan dengan wisata edukasi. Sementara untuk analisis pengembangan menggunakan metode SWOTberserta IFAS dan EFAS untuk merancang strategi pengembangan wisata edukasi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di wilayah studi. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan sebagai wisata edukasi yaitu adanya industri tempe, jamu tradisional, kerajinan kayu, kesenian jaranan dan peternakan berupa penggemukan sapi yang dapat dikembangkan sebagai wisata edukasi energi terbarukan. Kelemahan wilayah studi belum memiliki petunjuk arah yang jelas sebagai tempat wisata edukasi, selain itu juga belum memiliki tempat untuk menyelenggarakan pertunjukkan. Peluang yang dapat diambil oleh kampung ini adalah terletak dekat dengan Kota Batu yang juga telah mengembangkan wisata edukasi. Ancaman berupa wisata edukasi sejenis yang ada di Malang Raya.Strategi-strategi yang perlu dikembangkan adalah peningkatan identitas Kampung Duren, pengembangan rumah showroom energi terbarukan, ruang public untuk pementasan kesenian, dan pembuatan sarana promosi, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan biro perjalanan wisata.*

Katakunci :wisata-edukasi, Participatory Urban-Appraisal (PUA), Focus-Discussion-Grup (FGD)

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang, Ruang Lingkup, MaksuddanTujuan.

Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dalam tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini menjadi ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. SDGs 2030 Tujuan ke-8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) termasuk untuk merancang dan menerapkan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Selaras dengan SDGs, RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 bagian yang pertama adalah Menciptakan masyarakat yang makmur, salah satunya adalah Pengentasan kemiskinan, serta bagian ke-6 adalah Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya. Selain itu sejak tahun 1962 Kota Malang juga memiliki Tri Bina Cita yaitu sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata dan Industri Kecil.

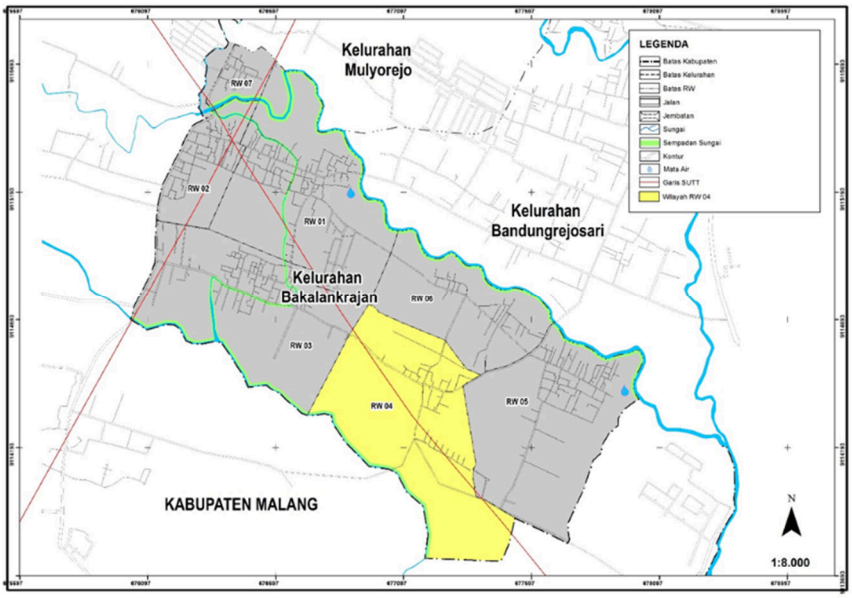
Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sektor pariwisata sebagai menunjang perekonomian Kota Malang hal ini tidak terlepas dari potensi alam yang dimiliki, yaitu pemandangan alam yang elok, udara yang sejuk, serta bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda. Konsep pariwisata yang dapat dikembangkan menurut Holloway (1986) dapat berdasarkan atas tujuan berwisata yaitu *holliday, bussiness, heath, study, meeting/congres, family visiting, relligion, sports* dan *others*. Konsep wisata edukasi merupakan trend yang akhir-akhir ini cukup diminati oleh masyarakat luas. Pengembangan obyek-obyek wisata di Kota Wisata Batu, misalnya, banyak mengadopsi konsep wisata edukasi dan menarik jumlah wisatawan yang banyak, sebut saja Eco Green Park dan Predator Fun Park.

Trend wisata edukasi merupakan peluang yang dapat dikembangkan di Kota Malang terutama di Kampung Duren, mengingat lokasi kampung yang cukup dekat dengan fasilitas-fasilitas pendidikan dasar dan menengah serta memiliki potensi embrio energi terbarukan.

II. METODE

Berdasarkan tujuan penelitian, yaitu mengembangkan potensi wisata edukasi di Kampung Nduren Mandiri, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki denganmenggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atausebagaimana adanya (Nawawi, 2001:63).

Lokasi penelitian berada dalam wilayah administratif Kota Malang yaitu di Kampung Duren MandiriRW 04 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun, lebih jelas dapat dilihat dalam Gambar 1 Peta Orientasi Kampung Duren Mandiri.



Gambar 1 Peta Kampung Nduren Mandiri

A. Metode Pengumpulan Data

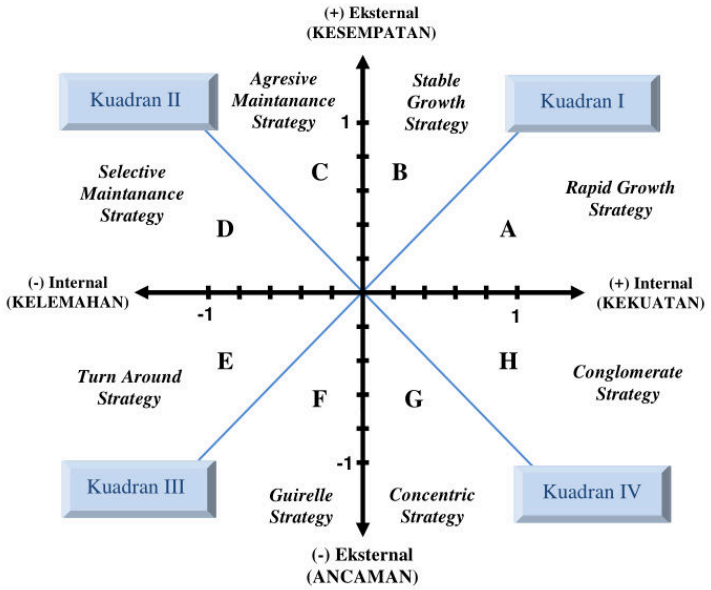
Metode pengumpulan data menggunakan 1) observasi adalah cara mengumpulkan data berdasarkan pada pengamatan langsung terhadap gejala fisik obyek penelitian (Wardiyanta, 2006:32). Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati karakteristik obyek atau potensi yang dimiliki oleh Kampung Nduren Mandiri yang dapat dikembangkan sebagai wisata edukasi. 2) Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsungditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen (Hasan, 2002:87).Dokumentasi wilayah studi pada penelitian ini ditampilkan dalam bentuk foto mapping yang dapat memberikan gambaran mengenai obyek studi yang diteliti. 3) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dimana jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam (Hasan, 2002:85). Wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pihak Dinas Pariwisata Kota Malang, Kelurahan, RW, RT, dan masyarakat Kampung Nduren Mandiri. dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi pariwisata yang dapat dikembangkan.

B. Metode Analisis

1. Metode analisis yang dipergunakan adalah *Participatory Urban Appraisal*(PUA) menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat lokal untuk membuat analisis mereka sendiri tentang masalah yang mereka hadapi dan untuk mengidentifikasi solusinya (Peerapun, 2012),(Moser, McIlwaine, 2001), dan (Caroline Moser dan Cathy McIlwaine, 1999). Analisis PUA dilakukan dengan cara *focus discussion grup (FGD)* untuk mengetahui potensi dan masalah yang berkaitan dengan wisata edukasi.
2. Metode analisisSWOT untuk mengetahui faktor-faktor yangmempengaruhi kondisipotensi pariwisata, yaitu untuk melihat Strength (kekuatan), Weakness(kelemahan), Opportunity (kesempatan) dan Threat (ancaman), dan menginventarisasifaktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan pariwisata kawasan perencanaan yangdipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-

langkah perbaikan yang diperlukandalam pengembangan selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangantersebut adalah sebagai berikut: 1) Potensi (*Strength*): kekuatan apa yang dapat dikembangkan agar lebih tangguh,sehingga dapat bertahan di pasaran, yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri; 2) Masalah (*Weakness*): segala faktor yang merupakan masalah atau kendala yangdatang dari dalam wilayah studi; 3) Peluang (*Opportunities*): Kesempatan yang berasal dari luar wilayah studi.Kesempatan tersebut diberikan sebagai akibat dari pemerintah, peraturan ataukondisi ekonomi secara globa; dan 4). Ancaman (*Threat*): merupakan hal yang dapat mendatangkan kerugian yangberasal dari luar wilayah studi (Arthur A. Thomson, JR. dan A.J. Strickland 1993)

3. Metode Analisis IFAS dan EFAS adalah analisis yang digunakan untuk memberikanpenilaian dan pembobotan terhadap kekuatan dan kelemahan potensi pariwisata yang dimiliki oleh wilayah studi Sedangkan metode analisis EFAS adalah analisis yang digunakan untukmemberikan penilaian dan pembobotan terhadap peluang dan ancaman bagi pengembangan potensi pariwisata di wilayah studi.Keempat faktor dalam analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, danThreat*) masing-masing dianalisis yang ditinjau dari beberapa variabel yaitu darisumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial dan budaya masyarakat serta faktor lainyang akan mempengaruhi pengembangan. Kemudian dilakukan penilaian untukmengetahui posisi obyek pada kuadran IFAS-EFAS. Dari penilaian tersebut diketahuikoordinat pada sumbu X dan sumbu Y (Hitt, Michael A, et al. 2001), sehingga diketahui posisinya, seperti didalam Gambar 2.



Gambar 2 Kuadran Strategi IFAS dan EFAS
Sumber: Charles W. L. Hill dan Gareth R. Jones (2012)

Kuadran I (*Growth*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran initerdiri dari dua ruang yaitu:

- Ruang A dengan *Rapid Growth Strategy* yaitu strategi pertumbuhan aliran cepat

untuk diperlihatkan pengembangan secara maksimal untuk target tertentu dan dalam waktu singkat

- Ruang B dengan *Stable Growth Strategy* yaitu strategi pertumbuhan stabil dimana pengembangan dilakukan secara bertahap dan target disesuaikan dengan kondisi.

Kuadran II (*Stability*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu:

- Ruang C dengan *Agresif Maintenance Strategy* dimana pengelola obyekmelaksanakan pengembangan secara aktif dan agresif
- Ruang D dengan *Selective Maintenance Strategy* dimana pengelolaan obyek adalahdengan pemilihan hal-hal yang dianggap penting

Kuadran III (*Survival*), adalah kuadran pertumbuhan dimana pada kuadran initerdiri dari dua ruang yaitu:

- Ruang E dengan *Turn Around Strategy* yaitu strategi bertahan dengan cara tambalsulam untuk operasional obyek.
- Ruang F dengan *Guirelle Strategy* yaitu strategi gerilya, sambil operasionaldilakukan, diadakan pembangunan atau usaha pemecahan masalah dan ancaman.

Kuadran IV (*Diversification*), adalah kuadran pertumbuhan dimana padakuadran ini terdiri dari dua ruang yaitu:

- Ruang G dengan *Concentric Strategy* yaitu strategi pengembangan obyekdilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak.
- Ruang H dengan *Conglomerate Strategy* yaitu strategi pengembangan masing-masing kelompok dengan cara koordinasi tiap sektor itu sendiri.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi yang dimiliki adalah: Lingkungan RW 04 Kelurahan Bakalankrajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang memiliki luas wilayah 39,09 Ha. Rentang ketinggian rata-rata di Kelurahan Bakalankrajan adalah 426–455 meter di atas permukaan laut. Keadaan bentang alam kontur topografi adalah berombak serta merupakan kawasan berlereng dengan kemiringan 2-15%. Kondisi fisik binaan di RW4 Kelurahan Bakalankrajan dibagi menjadi lahan terbangun, lahan tidak terbangun, dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Luas Lahan Terbangun dan Lahan Tidak Terbangun

RW	Luas (Ha)	Luas Lahan	
		Tidak Terbangun (Ha)	Terbangun (Ha)
4	**39,1**	**33,2**	**5,9**

Sumber: Laporan Studi Permukiman Perkotaan, PWK UB (2016)

Lahan terbangun didominasi oleh guna lahan perumahan dan lahan tidak terbangun pada kondisi eksisting merupakan area persawahan dimana foto-foto lokasi studi dapat dilihat dalam Gambar 3.Sarana dan Prasarana Kampung yang terdapat di kampung Duren RW 04 Kelurahan Bakalankrajan sudah cukup menunjang kegiatan warga. Jenis sarana yang dapat sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa, serta sarana keamanan. Gambaran sarana dan prasarana wilayah studi dapat dilihat dalam Gambar 4.



Gambar 1 Kondisi Guna Lahan di RW 4



Gambar 4 Kondisi Sarana dan Prasarana di RW 4

Selain guna lahan yang tidak terbangun masih luas, wilayah studi juga memiliki potensi yaitu:

A. Hasil analisis *Participatory Urban Appraisal* (PUA) dengan mempergunakan FGD didapatkan potensi dan wilayah dari Kampung Nduren Mandiri. Selain pemandangan alam yang masih asri, Kampung Duren memiliki beberapa potensi desa yang layak untuk dikembangkan secara lebih optimal yaitu 1) Home industry tempe yang dimiliki oleh keluarga Bapak Suwono. Usaha tempe ini dalam sehari mampu memproduksi tempe dan produk olahannya sebanyak dua (2) kwintal yang dipasarkan di pabrik-pabrik yang ada di sekitar Kelurahan Bakalan Krajan. Kegiatan industri ini juga telah mengaplikasikan konsep *zero waste* dalam operasionalnya. Limbah dari pengolahan tempe digunakan sebagai pakan ternak, dan limbah ternaknya digunakan sebagai input biogas.

2) Home industri jamu. Usaha jamu yang dimiliki oleh Bapak Purwanto ini pernah mengalami masa puncak usaha beberapa tahun lalu. Kendala tenaga kerja pemasaran menjadi masalah yang menyebabkan terbatasnya produksi per hari saat ini. Saat ini, meskipun sudah memiliki pasar tetap, produksi jamu hanya mencapai 30 liter per hari.

3) Kerajinan kayu. Usaha Bapak Novianto ini saat ini sedang mengalami perkembangan usaha seiring dengan lingkup pemasaran yang semakin luas di Jawa Timur. Banyak produk dari home industry ini yang sudah dibeli oleh tempat-tempat wisata di Kota Wisata Batu. Kerajinan berupa miniature dan maket merupakan produk yang paling diminati saat ini.

4) Kesenian jaranan. Sanggar kesenian jaranan milik Bapak Sutrisno Hadi ini merupakan binaan salah satu dosen perguruan tinggi di Kota Malang. Sanggar kesenian ini menjadi salah satu kesenian warga yang sering ditampilkan pada acara-acara di Kampung Duren. Selain warga lokal, sanggar kesenian jaranan ini juga memiliki anggota dari luar kampung.

5) Pak Suwono, pemilik usaha penggemukan sapi yang menggunakan limbah ternaknya sebagai sumber energi untuk mendukung industri tempe yang dimilikinya. Melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2014, produksi gas methane telah dilakukan menggunakan sebuah bio-digester. Bio-digester adalah wadah kedap udara dimana limbah atau kotoran difermentasi dalam kondisi tanpa oksigen (pencernaan *anaerob*) sehingga menghasilkan gas methane. Biogas merupakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan, dapat dibakar seperti gas elpiji (LPG) dan dapat digunakan sebagai sumber energi.



Gambar 5Suasana FGD di RW 4
(Sumber: Hariyani, et.al 2016)

Kelemahan yang dimiliki wilayah studi belum memiliki petunjuk arah yang jelas sebagai tempat wisata edukasi, selain itu juga belum memiliki tempat untuk menyelenggarakan pertunjukkan. Peluang yang dapat diambil oleh kampung ini adalah terletak dekat dengan Kota Batu yang juga telah mengembangkan wisata edukasi. Ancaman berupa wisata edukasi sejenis yang ada di Malang Raya.

Hasil analisis SWOT dan analisis IFAS-EFAS, ditabelkan dalam Tabel 2. Hasil perhitungan IFAS-EFAS menunjukkan Pengembangan Potensi Wisata Pendidikan di Kampung Duren Mandiri RW 04 Kelurahan Bakalan Krajan Kota Malang termasuk kedalam kuadaran IV ruang G (*Concentric Strategy*) yaitu strategi pengembangan obyek dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak.

Tabel 2. Tabel Perhitungan Analisis SWOT (Penilaian Kriteria IFAS-EFAS)

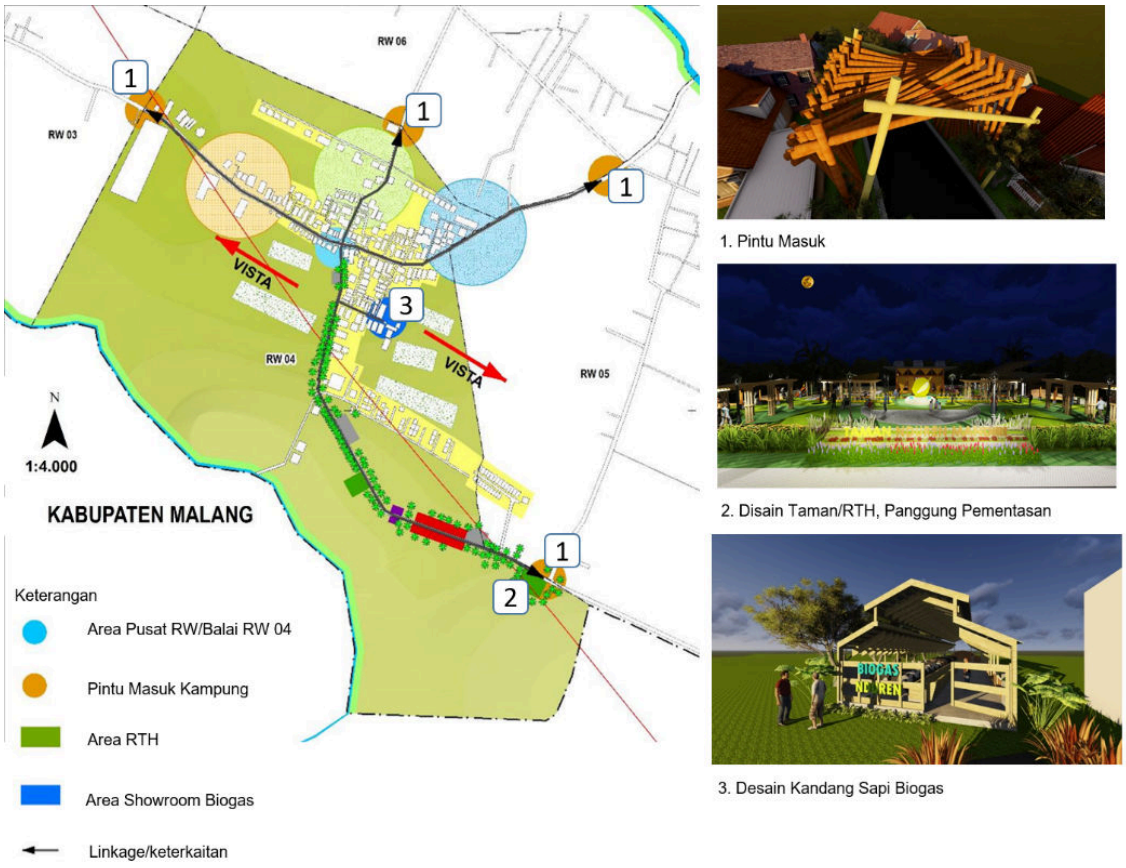
Faktor Internal			
	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Strength			
1. Kampung Duren Mandiri RW 04 Kelurahan Bakalan Krajan Kota Malang	0,143	5	0,715
2. Memiliki something to see pemandangan yang indah, dan kesenian jaranan yang berpotensi untuk menjadi atraksi di kawasan wisata edukasi	0,143	3	0,429
1. Memiliki *something to do* berupa aset embrio energi terbarukan dari limbah ternak yang berpotensi untuk menjadi wisata edukasi	0,143	5	0,715

4. Memiliki something to buy berupa oleh-oleh keripik tempe, jamu tradisional, dan kerajinan kayu	0,143	3	0,429
Total*Strength*	0,572		2,288
Weakness			
1. Kurangnya fasilitas penunjang penanda masuk kedalam kawasan wisata edukasi, tempat parkir, trotoar, dan informasi	0,143	5	0,715
2. Kurangnya publikasi, promosi mengenai wisata edukasi	0,143	5	0,715
3. Kurangnya kerjasama dengan biro perjalanan, dan sekolah-sekolah sebagai tujuan wisata edukasi	0,143	5	0,715
Total*Weakness*	0,429		2,145
Faktor Eksternal			
Opportunities			
1. Adanya jalur transportasi umum yang dapat mempermudah masyarakat untuk datang ke Kawasan wisata edukasi	0,25	3	0,75
2. Pemenang 10 besar lomba Kampung tematik di Kota Malang tahun 2016	0,25	3	0,75
Total*Opportunities*	0,5		1,5
Threat			
1. Adanya wisata edukasi sejenis di Malang Raya	0,25	5	1,25
2. Something to buy berupa oleh-oleh keripik tempe, jamu tradisional, dan kerajinan kayu yang sama dengan wilayah lain di Malang Raya	0,25	3	0,75
Total*Threa*t	0,5		2

X= *Strenght – Weakness*
= 2,288– 2,145
= 0,143

Y = *Opportunity – Threats*
= 1,5 – 2,0
= − 0,5

Strategi-strategi yang perlu dikembangkan untuk menjadikan wilayah studi sebagai wisata edukasi adalah peningkatan identitas Kampung Duren Mandiri, pengembangan rumah *showroom* energi terbarukan, ruang *public* untuk pementasan kesenian. Perlu adanya pembuatan sarana promosi, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, sekolah-sekolah, dan biro perjalanan wisata untuk lebih mengembangkan Kampung Duren Mandiri sebagai wisata edukasi. Secara lebih jelas strategi-strategi yang dapat dikembangkan di Kampung Duren Mandiri dapat dilihat dalam Gambar 6.



(Sumber: Hariyani, et.al 2016)

Gambar 6 Kondisi Sarana dan Prasarana di RW 4

IV. KESIMPULAN

Pengembangan kampung wisata edukasi Duren Mandiri berbasis energi terbarukan akan berjalan dengan beberapa pengembangan berupa:

- Ruang publik, tempat pementasan kesenian, Pintu masuk ke RW 4, rumah percontohan untuk energi terbarukan
- Wisata edukasi, diarahkan untuk memberikan pelayanan bagi sekolah-sekolah yang telah mentradisikan study tour sebagai bagian dari proses pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Nawawi, Hadari. 2001. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Wardiyanta. 2006. Metode Penelitian Pariwisata. Yogyakarta, Andi.

Hasan, Iqbal. 2002. Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Arthur A. Thomson, JR. and A.J. Strickland III.1993. *Strategic Management: Concept and Cases*. 7th ed. New York, Richard d. Irwin, inc.

Hitt, Michael A, et al. 2001.Strategic Management-Competitiveness and Globalization. 4th ed., United States of America, Thomson Learning.

Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones. 2012.*Strategic Management: An Integrated*

Approach, 10th ed. South Western, Cengange Learning, USA
Holland, J. u. J. Blackburn.1998. *Whose voice? Participatory research and policy change*. England. Practical Action.
Holloway, J. Christopher. 1986.*The Business of Tourism, 2nd ed*., Pitman
Hariyani. Septiana, Utomo. Dadang Meru, Waloejo. Budi Sugiarto, Wicaksono. Agus Dwi, Agustin. Imma Wijayanti, Giriwati. Novi.S.S, Hidayat. MN, Shofarini. Dian Indah. 2016. *Pendampingan Lomba Kampung Tematik Kampung Duren Mandiri RW 4 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun Kota Malang*. Pengabdian Masyarakat Terpadu Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
Nizam U. Ahmed, Mohammed M. Alam. Reaching the Unreachable: Barriers of the Poorest to Accessing NGO Healthcare Services in Bangladesh. *Journal of Health, Population and Nutrition*, Vol. 24, No. 4, Dec, 2006, pp. 456 – 466
Caroline Moser and Cathy McIlwaine. Participatory urban appraisal and its application for research on violence. *Journal Environment & Urbanization*, Vol 11 No 2 October 1999, pp.203-226.
C McIlwaine, CON Moser. 2001. Violence and social capital in urban poor communities: perspectives from Colombia and Guatemala. *Journal of International Development* 13 (7), pp.965-984
Peerapun,Wannasilpa, Participatory Planning in Urban Conservation and Regeneration: A Case Study of Amphawa Community*. Procedia-Social and Behavioral Sciences.*Volume 36, 2012, Pages 243-252
Carlisle,Sheena, Johansen, Aleksander and Kunc, Martin.Strategic foresight for (coastal) urban tourism market complexity: Thecase of Bournemouth.*Journal Tourism Management*, Volume 54, June 2016, Pages 81-95
Sustainable Development Growth (SDGs). Diakses 12 Januari 2017, dari alamat*https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals*
Draft Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Versi 10 Januari 2017*,* Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.Diakses 12 Januari 2017
RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018. Diakses 12 Januari 2017, dari alamat http://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/

Pengembangan Penataan Ruang Kolaboratif Di Kawasan Wisata Puncak, Bogor

Andrea Emma Pravitasari[1,2], Ernan Rustiadi[1,2], Setyardi Pratika Mulya[2], La Ode Syamsul Iman [1], Lutfia Nursetya Fuadina[2]

[1] Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W/CRESTPENT), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Institut Pertanian Bogor (IPB),
Jl. Raya Pajajaran, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, Indonesia, 16144
[2] Divisi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan,
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB),
Jl. Meranti, Kampus IPB Darmaga, Bogor, Indonesia, 16680

ABSTRAK

Kawasan Puncak adalah bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur yang memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Letak geografisnya yang signifikan, membuat kawasan ini menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional. Namun, perkembangan yang pesat di Kawasan Puncak telah mengurangi area konservasi dan meningkatkan zona bangunan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini kemudian mengancam keseimbangan fungsi ekologis kawasan ini sebagai daerah tangkapan air dan pengendali banjir. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan sistem perencanaan tata ruang lokal yang terkait dengan kawasan Puncak, (2) menganalisis inkonsistensi perencanaan spasial, (3) mendeskripsikan praktek pengendalian penggunaan lahan di wilayah Puncak, dan (4) Membangun solusi komprehensif terkait dengan partisipasi masyarakat lokal untuk pengembangan pariwisata di Kawasan Puncak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena penataan ruang di Kawasan Puncak tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan konsep integratif dan holistik dari semua otoritas pemerintah (dari hulu hingga hilir) dan seluruh pemangku kepentingan. Ketidakkonsistenan tata ruang di Kawasan wisata Puncak dalam bentuk kegiatan budidaya dan di kawasan lindung adalah seluas 2136,530 ha, tersebar di Kabupaten Megamendung, Cisarua dan Ciawi. Bentuk pengendalian penggunaan lahan di Kawasan Puncak adalah pembuatan peraturan dan penegakan hukum secara ketat, termasuk bekerja sama dengan masyarakat yang terkait dengan Ciliwung, insentif dan disinsentif. Pemberdayaan komunitas dan peran serta masyarakat lokal sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Puncak untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah namun juga tetap memperhatikan pelestarian nilai dan budaya lokal, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Kata kunci: inkonsistensi pola ruang, Kawasan Puncak, pariwisata, penataan ruang kolaboratif

I. PENDAHULUAN

Puncak adalah bagian dari wilayah Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawasan Puncak merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur). Kawasan ini juga memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Bogor pada periode 2005-2025, kawasan Puncak diarahkan untuk menjaga

keseimbangan ekologis sebagai daerah tangkapan air dan pengendalian banjir. Kawasan Puncak memiliki berbagai fungsi strategis, seperti kawasan lindung dan pengelolaan air, sumber daya plasma nutfah, zona penyangga dan kawasan budidaya serta kawasan wisata. Karena letak geografisnya yang signifikan, dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, kawasan ini menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Selain itu kawasan ini memiliki keindahan alam dan udara sejuk karena didominasi oleh hamparan pegunungan perkebunan teh yang berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut sehingga menjadi andalan Jawa Barat dan Indonesia dalam forum pariwisata internasional. Banyak orang menggunakan kawasan ini sebagai tempat alternatif untuk menikmati keindahan wisata alam pada akhir pekan, dan beberapa di antaranya membeli tanah untuk investasi kemudian membangun restoran, villa dan resor wisata lainnya, mulai dari skala kecil sampai skala besar. Meningkatnya jumlah villa dan resor wisata di daerah Puncak memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi lokal namun membuat jumlah penduduk dan area built-up meningkat dengan cepat. Menurut Alihar (2002), jumlah penduduk di daerah Puncak meningkat dari 5,7 juta pada tahun 1980 menjadi 11,7 juta orang pada tahun 2000.

Apalagi pembukaan jalur padat Puncak-Bandung sejak 1960 membuat kemajuan pembangunan daerah ini sulit dikendalikan. Kondisi ini menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsi yang dimaksud. Misalnya, hutan, daerah pertanian dan daerah tangkapan air telah berubah menjadi kawasan perumahan atau industri. Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur sebenarnya telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, karena fungsinya sebagai zona penyimpanan air tanah, sehingga konversi lahan di daerah tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi lingkungan negatif yang serius di daerah hilir, yaitu Jakarta dan sekitarnya (Firman, 2009). Akibatnya, ada beberapa masalah lingkungan yang memiliki dampak ekologis seperti banjir, erosi, tanah longsor, dll, yang tidak hanya terjadi di Puncak tapi juga di daerah sekitarnya. Dalam konteks pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di daerah, pengembangan sektor pariwisata memiliki pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu sektor pariwisata dapat membantu pelestarian nilai dan budaya lokal, serta berpotensi menjembatani perbedaan sosial budaya dan kesenjangan ekonomi sehingga diperlukan kontribusi dari masyarakat lokal untuk ikut serta dalam pengelolaan pariwisata di Kawasan Puncak.

Adanya keputusan Presiden pada penataan ruang tahun 1999 menetapkan bahwa daerah-daerah tertentu di Puncak harus bebas dari bangunan, sementara daerah lainnya dapat memiliki bangunan hingga 10 persen dari permukaan tanah. Namun, banyak pemilik properti telah melanggar keputusan tersebut dengan membangun vila dan rumah di zona bebas bangunan. Perkembangan pesat di Puncak telah sangat mengurangi area konservasi dan meningkatkan zona bangunan selama beberapa tahun terakhir. Akibat dari kecenderungan itu umumnya daerah telah membuat rencana tata ruang kawasan budidaya (misalnya untuk kawasan wisata, kawasan industri, dll), sedangkan rencana tata ruang kawasan lindung (contoh: kawasan resapan air) seringkali terlupakan (Wibowo, 2006). Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan pariwisata di Kawasan Puncak harus difokuskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat dengan dukungan fasilitas maupun aksesibilitas namun tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu upaya pemerintah adalah memperketat peraturan (hukum) di wilayah Puncak. Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) dikeluarkan untuk menjaga pemanfaatan ruang di daerah ini. Sebelumnya, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13/1963, Keppres Nomor 48/1983, Keppres Nomor 79/1985, PP Nomor 47/1997 dan Keppres Nomor 114/1999 yang digunakan.

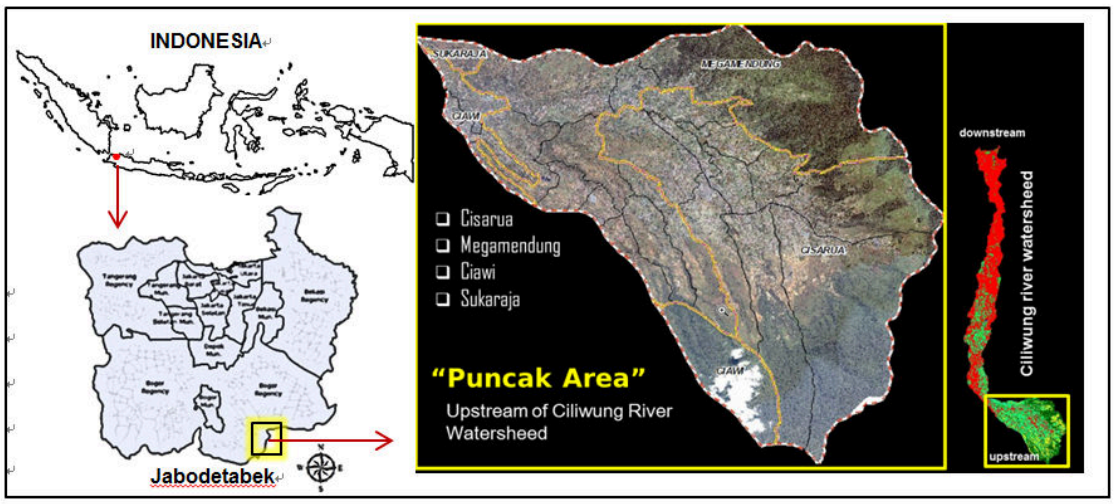
Sebagai dasar aturan operasi di wilayah Puncak, namun sayangnya, semuanya dianggap tidak relevan dengan dinamika perkembangan di lapangan, karena tidak ada peraturan yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan sistem perencanaan tata ruang lokal yang terkait dengan kawasan Puncak, (2) menganalisis inkonsistensi perencanaan spasial, (3) mendeskripsikan praktek pengendalian penggunaan lahan di wilayah Puncak, dan (4) Membangun solusi komprehensif terkait dengan partisipasi masyarakat lokal untuk pengembangan pariwisata di Kawasan Puncak.

II. METODOLOGI

A. LOKASI PENELITIAN

Kawasan Puncak merupakan hulu dari Sungai Ciliwung. Kawasan ini merupakan daerah dataran tinggi karena berada pada daerah pegunungan. Secara astronomis daerah ini terletak pada posisi 6° 37' 48" - 6° 46' 12" Lintang Selatan (LS) dan 106° 49' 48" - 107° 00' 00" Bujur Timur (BT). Sub DAS Ciliwung Hulu di Kabupaten Bogor mencakup 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi. Kawasan ini memiliki luas 14.587,06 Ha yang meliputi 27 desa untuk 4 kecamatan. Daerah tangkapan sungai Ciliwung memiliki luas 352 km^2 yang terbagi dalam 9 sub-basin (Sun *et al*. 2014).



Gambar 1. Lokasi Penelitian

B. BAHAN DAN METODE

Penelitian ini, menggunakan data dan informasi dari sumber data penginderaan jauh melalui citra satelit Ikonos, resolusi spasial 1 meter, perekaman tahun 2012 sebagai detail informasi penggunaan lahan, dan citra satelit Landsat, resolusi spasial 30 meter, secara berurutan pada tahun 1995, 2000, 2005, 2010 dan 2012, untuk informasi pemantauan dan analisis perubahan penggunaan lahan secara global. Peta sistem lahan jawa dari sumber informasi RePPProT (*Regional Physical Planning Programme for Transmigration*) tahun 1998. Peta Rencana Pola Ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Skala 1 : 50.000, Peta perencanaan kawasan hutan skala 1 : 100.000 dari sumber Direktorat jenderal Badan Planologi Kementerian Kehutanan R.I. Data sebelum analisis diolah melalui pendekatan literatur, pengumpulan informasi lapangan aktual, diskusi dengan para pihak dan pemangku kepentingan (Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Bappeda dan komunitas peduli ciliwung sebagai pelaku lapangan aksi peduli sungai di wilayah hulu DAS Ciliwung). Informasi iklim diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Nasional Indonesia. Data curah hujan bulanan dan tahunan rata-rata di

stasiun pemantauan Cisarua digunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kemampuan lahan untuk menilai daya dukung lingkungan, terutama berdasarkan faktor berbasis lahan seperti kemiringan (L), kedalaman solum (k), tekstur (t), drainase (d), batuan terbuka (b) dan tingkat erosi (E).

C. DESKRIPSI PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan dan perubahannya diperoleh hasil analisis dan pengolahan dan analisis dari data citra satelit penginderaan jauh dengan data secara seri waktu secara berurutan pada tahun 1995, 2000, 2005, 2010, dan 2012, dengan menggunakan alat analisis secara geoinformasi. Pengecekan lapangan dilakukan pada tahun 2012 dan bulan januari 2014 untuk mengetahui kondisi terkini wilayah puncak sebagai hulu das ciliwung dan saat analisis dan interpretasi citra satelit.

D. ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

Perubahan penggunaan lahan dianalisis dengan mendeteksi tingkat perubahan dari waktu ke waktu pada aktivitas penggunaan lahan melalui hasi analisis dan interpretasi citra satelit. Citra satelit penginderaan jauh menggunakan sensor Landsat selanjutnya diolah pada citra multisensor pada dua titik tahun *i* dan *j*, sebagai variabel untuk mendeteksi perubahan penggunaan lahan, dengan mengacu pada persamaan vektor antar dua piksel dengan persamaan (Deng, J. S. Et al., 2009);

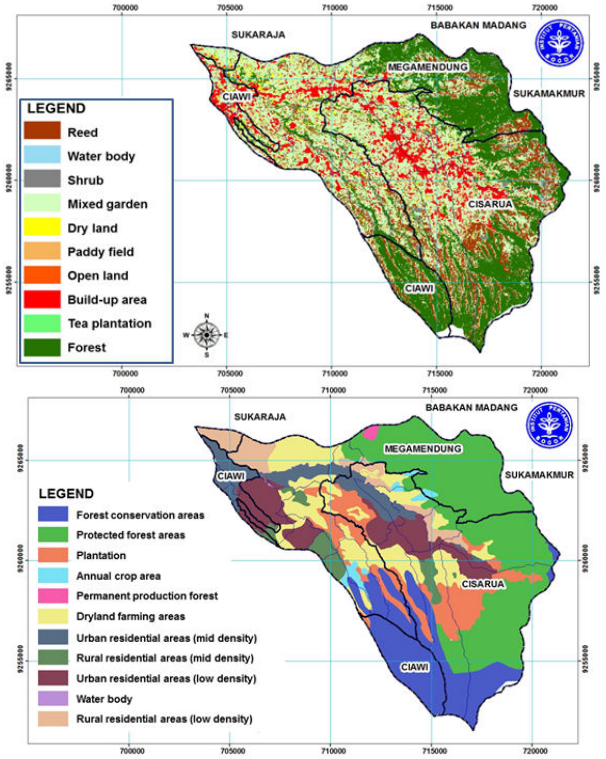
$$X_i = [X_{i1}, X_{i2}, \ldots \ldots X_{in}] \quad \ldots\ldots\ldots\

pola ruang yang mengikutinya tetapi aktual penggunaan lahan cenderung bersimpangan dengan pemanfaatannya. Pola demikian mengindikasikan terjadinya inkonsistensi penggunaan lahan terhadap variabel penentu dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING DAN POLA RUANG KAWASAN PUNCAK

Penggunaan lahan Kawasan Puncak Sub Das Ciliwung diantaranya terdiri dari alang-alang, badan air, belukar, hutan, kebun campuran, lahan kering, sawah, lahan terbuka, pemukiman, dan perkebunan. Cakupan yang paling luas adalah kebun campuran, yaitu seluas kurang lebih 5.000 hektar atau sekitar 39 % dari luas Sub Das. Distribusi spasial berikut rincian luasan masing-masing landuse disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 2.



(a). (b).

Gambar 2. (a). Penggunaan lahan eksisting 2012; (b). Pola Ruang Kawasan Puncak 2005-2025

Tabel 1. Penggunaan Lahan Kawasan Puncak 2012

No	Penggunaan Lahan	Total luas	
		Hektar	Presentase
1	Alang-alang	1.578,71	10,91
2	Badan air	42,76	0,30
3	Semak belukar	232,22	1,60
4	Hutan	4.592,58	31,74
5	Kebun campuran	5.693,50	39,35
6	Lahan kering	510,88	3,53
7	Lahan sawah	186,40	1,29
8	Lahan terbuka	61,44	0,42

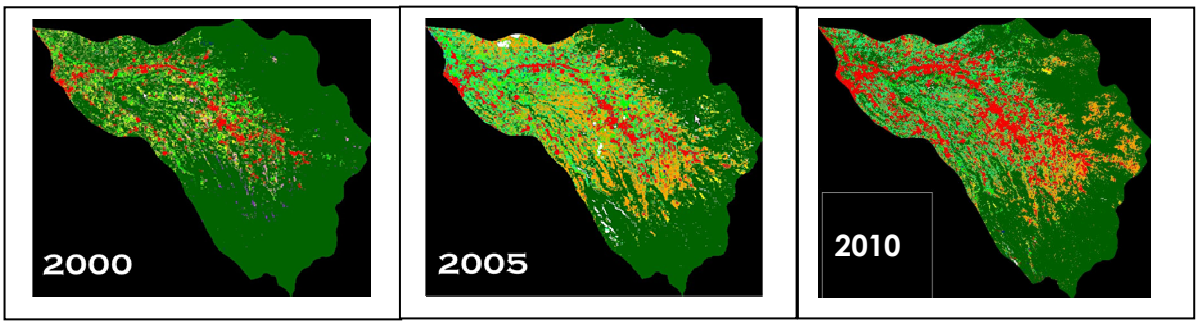
9	Pemukiman	1.545,81	10,68
10	Kebun campuran	25,78	0,18
	Total	14.470,07	100,00

B. PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

Kawasan pariwisata Puncak yang memiliki luas 18.352,89 Ha, yang semula peruntukannya adalah sebagai kawasan non budidaya, diperuntukkan bagi pengaturan air, pencegahan erosi dan banjir, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah. Akan tetapi, pada saat ini cenderung menjadi kawasan dengan fungsi pengembangan perkotaan, dengan meningkatnya berbagai macam pembangunan. Pesatnya pembangunan di kawasan ini menyebabkan berkurangnya kawasan hutan lindung dan meningkatnya luas kawasan lahan kritis.

Berdasarkan data KLH (2009), terjadi perubahan fungsi lahan di kawasan lindung. Kecamatan Cisarua, misalnya, secara signifikan mengalami penurunan luas hutan dari tahun 2000 hingga 2008 sebesar 74 persen (4.918 ha menjadi 1.265 ha), sedangkan tanah terbuka hampir tidak dijumpai (4.550 ha menjadi 14 ha), sementara pemukiman bertambah sangat signifikan yaitu sebesar 44 persen (24.833 ha menjadi 35.750 ha. Berdasarkan Rudel *et al*. (2005), transisi hutan dimulai pada awal periode deforestasi. Deforestasi terjadi dengan dilakukannya penebangan pohon dan tidak ada bentuk penanaman kembali. Transisi hutan menyangkut perubahan jangka panjang. Awalnya, hutan menurun luasnya bersamaan dengan meningkatnya jumlah petani. Para petani menebang hutan dan mengubahnya menjadi ladang untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Salah satu bentuk pemukiman yang berkembang pesat adalah hotel maupun villa. Munculnya villa dan bangunan lain dikarenakan area Puncak dianggap sebagai lokasi investasi yang menguntungkan di area Jabodetabek (Firman dan Dharmapatni 1994). Perubahan alih fungsi lahan di daerah puncak setiap tahun sangat tinggi, hasil penelitian yang dilakukan oleh P4W menyebutkan bahwa sekitar 39 persen pemukiman yang berada di kawasan puncak tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan daya dukung wilayah. Selain itu, perubahan penggunaan lahan akan mengakibatkan perubahan terhadap kapasitas infiltrasi dan tampungan permukaan atau gabungan keduanya, dan efek selanjutnya adalah mempengaruhi aliran permukaan (Lisnawati dan Wibowo, 2010). Gambaran tingkat perubahan perubahan penggunaan lahan di kawasan puncak pada tiga titik tahun (2000, 2005, dan 2010) dapat disajikan pada Gambar 3.

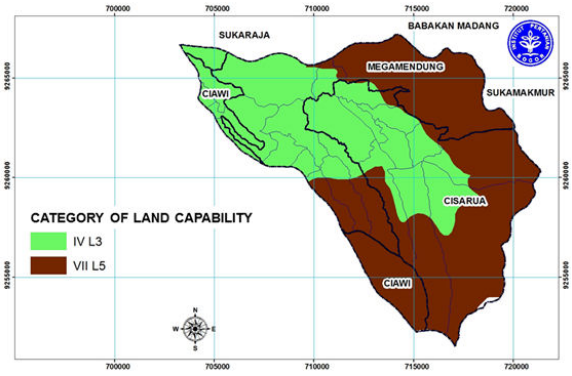


Gambar 3. Perubahan Penggunaan Lahan

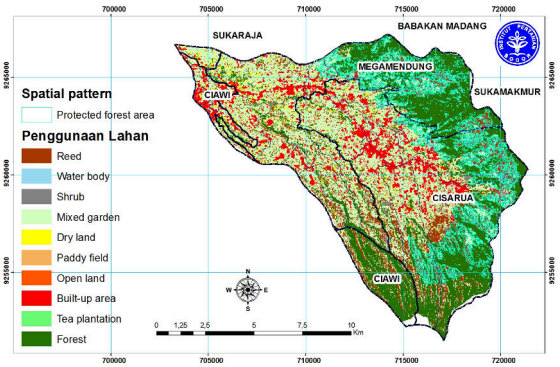
C. *PERBANDINGAN RENCANA POLA RUANG DAN KEMAMPUAN LAHAN*

Dinamika pengaturan penggunaan lahan di kawasan puncak dapat dilihat dari perbandingan rencana pola ruang dan kemampuan lahannya. Hasil analisis menunjukkan kemampuan lahan di kawasan puncak terdiri dari dua kelas, yaitu kelas IV dan kelas VII (Gambar 4 dan Gambar 5). Kelas kemampuan lahan di kawasan puncak, wilayah Cisarua dan Ciawi bagian utara diklasifikasikan pada kelas IV artinya ialah wilayah ini merupakan lahan dengan ciri tanah terletak pada wilayah yang miring sekitar 12–30 persen, dengan sistem pengairan yang buruk. Hambatan dan ancaman kerusakan pada tanah-tanah di dalam lahan kelas IV lebih besar dari pada tanah-tanah di dalam kelas III, dan pilihan tanaman juga lebih terbatas. Tanah di dalam kelas IV dapat digunakan untuk tanaman semusim dan tanaman pertanian dan pada umumnya, tanaman rumput, hutan produksi, padang penggembalaan, hutan lindung dan cagar alam. Sementara itu, untuk wilayah sebagian Megamendung, Cisarua dan wilayah Ciawi bagian selatan diklasifikasikan pada kelas VII artinya ialah lahan pada klasifikasi ini tidak sesuai untuk budidaya pertanian.

Secara umum wilayah yang memiliki kelas kemampuan VII dalam rencana pola ruang termasuk kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi. Namun demikian, berdasarkan tumpang tindih peta kemampuan lahan, land use 2012 dan pola ruang RTRW 2005-2025 maka terdapat beberapa wilayah yang terjadi inkonsistensi karena di kawasan hutan lindung terdapat beberapa penggunaan lahan yang berupa aktifitas budidaya, diantaranya berupa kebun campuran, lahan kering, sawah, dan pemukiman. Inkonsistensi penggunaan lahan pada kawasan lindung ini secara keseluruhan seluas kurang lebih 2.100 hektar. Inkonsistensi tata ruang di kawasan tersebut bukan akibat kemiskinan warga setempat sehingga lapar akan lahan, melainkan akibat keserakahan kelompok masyarakat elite dan konflik tata kelola kelembagaan. Konflik tata kelola, yang berarti ada pada pemerintah, terutama terjadi pada kawasan yang dikelola dan kewenangan utamanya ada pada pemerintah pusat, yakni pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan teh.



Gambar 4. Kelas Kemampuan Lahan Kawasan Puncak



Gambar 5. Hasil Tumpang Tindih Kelas Kemampuan Lahan dan RTRW

D. *PERSOALAN HUBUNGAN ANTAR WILAYAH TERKAIT PENATAAN RUANG*

Perencanaan Kawasan Puncak tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus saling terkait, hal tersebut yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur. Perubahan fungsi ruang kawasan Puncak menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan sebagainya.

Persoalan utama dalam pelaksanaan RTRW di Kabupaten Bogor adalah kurangnya pemahaman dan kurangnya kesepakatan seluruh pelaku pembangunan atas subtansi rencana tata ruang tersebut.

Berbagai persoalan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penataan ruang Kawasan Puncak merupakan permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh komponen masyarakat lokal. Kebutuhan akan penataan Kawasan Puncak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin bersarnya dampak yang ditimbulkan bahkan melintasi batas-batas wilayah. Oleh karenanya, masalah lingkungan hidup tersebut mau tidak mau juga harus didudukan sebagai masalah sosial. Dalam konteks demikian, mau tidak mau, maka gerakan lingkungan harus mentransformasikan dirinya menjadi sebuah gerakan sosial. Artinya seluruh komponen masyarakat seperti buruh, petani, guru, kaum profesional, pemuda, remaja, mahasiswa, Kelompok Pecinta Alam, Komunitas, anak-anak dan kaum perempuan harus bersatu berjuang menghadapi.

E. PARA PIHAK YANG TERKAIT DAN PERMASALAHANNYA

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2008 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dimana Kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang **secara terpadu** sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan **lintas wilayah dan lintas sektor** pada kawasan tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Kawasan Jabodetabekpunjur diharapkan dapat terwujud keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antar daerah/antar wilayah serta berkembangnya perekonomian wilayah yang produktif, efektif dan efisien. Kebijakan penataan ruang kawasan tersebut diarahkan pada keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang kawasan dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup, melalui strategi penataan ruang kawasan untuk mendorong terselenggaranya (a) pengembangan kawasan yang berdasar atas keterpaduan antar daerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan, (b) pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi air tanah dan air permukaan serta menanggulangi banjir, (c) pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah.

Pengertian secara terpadu yang dimulai dari proses penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, sampai pengendalian pemanfaatan ruang, mengandung makna adanya pihak pihak atau '*stakeholders*' (pemangku kepentingan) yang terkait di dalamnya yang mempunyai tanggungjawab terhadap aspek ekonomi-politik-sosial-budaya dan lingkungan terhadap Kawasan Strategis Nasional tersebut. Secara umum '*stakeholders*' (pemangku kepentingan) yang terkait di Kawasan Puncak adalah: **Pihak Eksekutif** (Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten Bogor, Lembaga *ad hoc/*BKPRD), **Pihak Legislatif** (DPRD), **Masyarakat** (Lokal, Luar, Pendatang), **Asosiasi Profesi & Bisnis** (PHRI, Bisnis bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan), dan **Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Komunitas** (Formal, Non Formal).

F. BENTUK-BENTUK SOSIAL KAPITAL YANG EKSIS DAN DAPAT DIKEMBANGKAN

Bentuk modal sosial pada kegiatan-kegiatan organisasi lokal yang ditemukan di lapangan, antara lain:

a. **Kegiatan Penyelamatan Sungai Ciliwung Seperti yang Diinisiasi oleh Komunitas Peduli Ciliwung Bogor (KPC).** Komunitas ini ingin meningkatkan rasa kepedulian terhadap keberlangsungan sungai Ciliwung di Kota Bogor. Kesepakatan dalam menyelamatkan sungai Ciliwung, tidak dibuat dengan aturan formal, tetapi cukup melalui pembicaraan-pembicaraan informal. Kesepakatan bisa dibuat oleh orang per orang di dalam komunitas. Pembuatannya hanya didasarkan atas sifat saling kepercayaan. Oleh karena itu, isi kesepakatan tidak diatur secara detil dan tidak mengikat formal. Tidak ada biaya yang harus dibayar oleh seluruh anggota komunitas.
b. **Bina Sarana Bakti.** BSB (Bina Sarana Bakti) merupakan suatu lembaga pusat pengembangan organis. BSB lebih mengutamakan pembentukkan karakter organis agar hidup selaras dengan alam, kehendak Tuhan, dan sesama. Pertanian organis merupakan sarana untuk berbakti mencapai keharmonisan hidup. BSB terletak wilayah Desa Tugu Selatan, Kampung Sampay. Kebun produksi/praktik pertanian organis BSB terletak sekitar 400 meter dari Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor. Lokasi BSB berada di Kawasan puncak lereng Gunung Pangrango dengan kemiringan 3 – 5 persen.
c. **Sekolah Konservasi Alam (Basir Baesuni).** Sekolah yang biasa kita temui adalah tempat menimba ilmu dari jenjang sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Namun, berbeda dengan Sekolah setingkat SMP yaitu SMP Terbuka Amerta. Di sekolah ini para murid belajar mengenai konservasi alam. Itulah sekolah yang didirikan oleh Basir Baesuni yang terletak di Kawasan Megamendung. Meski profesi sebenarnya sebagai tukang kebun, di sekolah ini Basir menjadi seorang guru bagi anak-anak didiknya. Sekolah ini didirikan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di kawasan puncak. Bersama dengan murid-muridnya Basir berhasil menanam ribuan pohon di sepanjang jalur Puncak yang dilakukan tahun 2006.
d. **Kelompok Tani Megamendung.** Diawali dari keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan dan bertambah luasnya lahan kritis dilingkungan tempat tinggal di Bopunjur dan tempat lain di Indonesia. Bambang Istiawan, Rosita, Untung Rihadi, Ade Zaenal Muttaqin, pada Agustus 2001 mencetuskan keinginan berpartisipasi secara mandiri untuk membuat percontohan "rehabilitasi ekosistem dan lahan kritis" yang menyeluruh, sambil mencari metode yang tepat untuk menjadikan pekerjaan rehabilitasi lahan kritis, walaupun tidak ada diantara mereka yang memiliki latar belakang pendidikan ataupun pengalaman di bidang pertanian dan kehutanan. Modal dasar yang dimiliki hanya Komitmen, Semangat, Kesungguhan, Keterbukaan dan Bekerja Nyata untuk mencapai impian. Kelompok kerja tersebut diberi nama Kelompok Tani Megamendung (KTM). Dalam melakukan program tersebut dilakukan secara swadaya. Hingga tahun 2006 luas lahan yang telah dikelola adalah 12 hektar (luas pada tahun : 2001 : 2 ha, 2002 : 4 ha , 2003 : 7 ha, 2005 : 9 ha, 2006 : 12 ha).
e. **Karang Taruna.** Karang Taruna adalah organisasi sosial atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk masyarakat terutama generasi muda yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
f. **Konsorsium Penyelamatan Puncak.** Konsorsium Penyelamatan Puncak (save puncak) sebagai bagian dari gerakan penyelamatan Daerah Aliran Ciliwung merupakan konsorsium terbuka yang mengajak insitusi pemerintah, masyarakat, komunitas, badan usaha, akademisi, media, dan para pihak

lainnya untuk bersama-sama mendorong usaha penyelamatan Kawasan Puncak sebagai daerah tangkapan air. Berangkat dari keprihatinan mengenai kondisi kawasan puncak, Konsorsium bersama-sama dengan masyarakat Tugu Utara dan Tugu Selatan, menggulirkan aksi bersama sejak tahun 2014.

G. *PEMBERDAYAAN KOMUNITAS TERHADAP SEKTOR PARIWISATA DI KAWASAN* PUNCAK

Tumbuhnya kesadaran masyarakat lokal akan kelestarian lingkungan mulai muncul sejak akhir tahun 2014 ditandai dengan kemauan masyarakat untuk turut serta berembug mendiskusikan masa depan kawasan Puncak. Aksi masyarakat beberapa kampung di kawasan ini yang tergerak secara rutin memulung sampah sampah domestik, wisatawan, hotel-restoran di hulu-hulu sungai Ciliwung membutuhkan dukungan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Pemerintah Daerah, pengelola kawasan perkebunan serta pengusaha pengusaha perhotelan dan restoran di kawasan ini dapat mendukung terbangunnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi pada skala wilayah. Budayawan dan pemuka agama dapat membantu menumbuhkan kesadaran warga dan umat beragama mewujudkan Sungai Ciliwung bersih. Aksi di hulu yang tidak kalah penting adalah kontribusi akademisi dan peneliti. Mereka bukan saja pencetus paradigma paradigma untuk menjawab tantangan baru namun juga berkontribusi menjelaskan dan menjernihkan persoalan kelabu menjadi terang benderang ke khalayak, bukan sebaliknya.

Di sektor pariwisata, masyarakat lokal yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan Cibulao (KTH) Bike Park yang berlokasi di Kampung Cibulao, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Kawasan Puncak Bogor berinisiasi untuk membuka pariwisata dengan konsep jalur sepeda. Jalur sepeda ini dikelola oleh kelompak tani hutan yang juga mengelola wisata hutan di kawasan Puncak. Jalur KTH yang berjarak kurang lebih 4-5 km ini berada di kawasan hutan konservasi/cagar alam bagi perlindungan hewan liar seperti burung, maka tidak heran akan terdengar suara burung ketika pesepeda melintasinya. KTH memiliki 3 Rute, yaitu KTH OG, KTH Kondang, dan KTH AT. Ketiga rute tersebut dimulai dari pintu Gunung Mas sampai dengan kawasan perkemahan Citamiang. Jalur KTH ini sangat menantang bagi para pesepeda karena tidak hanya melewati pepohonan pinus, lereng gunung atau bukit yang miring, tapi juga melintasi sungai, melewati jalan turunan dan tanjakan. Jalurnya hanya dapat dilintasi oleh satu pesepeda (*single track*).



(Sumber : http://nardexmtb.blogspot.co.id)
Gambar 6. Jalur Sepeda di KTH Bike Park

Selain pengembangan jalur sepeda, KTH Cibulao bekerja sama dengan Konsorsium Penyelamatan Puncak, dan P4W LPPM IPB mengembangkan pariwisata berbasis edukasi tanaman kopi robusta Cibulao. Kegiatan bertemakan Sekolah Kebun ini telah dilaksanakan dalam 3 tahap dengan pemberian materi oleh pakar di bidang tanaman kopi yaitu Dr. Ir. SUpijatno, MSi yang merupakan dosen IPB. Materi Sekolah Kebun pada Tahap 1 adalah Konservasi Tanah dan Air, tahap 2 mengenai pengelolaan cabang pohon, sedangkan tahap 3 mengenai teknik okulasi dan pemangkasan kopi.



(Sumber : dokumentasi pribadi)
Gambar 7. Kegiatan dalam Sekolah Kebun

IV. KESIMPULAN

1. Fenomena penataan ruang di Kawasan Puncak tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan konsep integratif dan holistik dari semua otoritas pemerintah mulai dari hulu hingga hilir, yang terdiri dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya yang tinggal di daerah ini.

2. Ketidakkonsistenan di wilayah Puncak dalam bentuk kegiatan budidaya dan di kawasan lindung telah mencakup sekitar 2136,530 ha, tersebar di Kabupaten Megamendung, Cisarua dan Ciawi.

3. Suatu bentuk pengendalian penggunaan lahan di wilayah Puncak, termasuk pembuatan peraturan dan penegakan hukum secara ketat untuk ketidakpatuhan, bekerja sama dengan masyarakat yang terkait dengan Ciliwung, insentif dan disinsentif.

4. Pemberdayaan komunitas dan peran serta masyarakat lokal sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Puncak untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah namun juga tetap memperhatikan pelestarian nilai dan budaya lokal, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Alihar, F. (2002). Bopuncur Area Plan: A Review of Demographic Aspects. Papers In Concept Development Workshop Bioregional Basis Sustainable Area Management. Caringin Bogor.

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.J., Li, K., Fei-Fei, L. (2009). Imagenet: A large-scale hierarchical image database. In: CVPR.

Firman T and Dharmapatni AI. 1994. The Challenges to Sustainable in Jakarta Metropolitan Region. *Habitat Intl*. 18(3): 79-94.

Firman T. 2009. The Continuity And Change In Mega-Urbanization In Indonesia: A Survey Of Jakarta–Bandung Region (JBR) Development. *Habitat International*. 33: 327-339.

Lisnawati Y dan Wibowo A. 2010. Analisis Fluktuasi Debit Air Akibat Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 7(4): 2210226.

Rudel TK, Coomes O, Moran E, Achard F. 2005. Forest Transition: Towards a Global Understanding of Land Use Change. *Journal of Global Environmental Change*. 15: 23-31.

Sun Y, Doan CD, Dao AT, and Liu J. 2014. Improving Numerical Forecast with Ensemble Kalman Filter and Chaos Theory: Case Study on Ciliwung River Model. *Journal of Hidrology*. 512(2014): 540-548.

Wibowo M. 2006. Model Penentuan Kawasan Resapan Air Untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Hidrosfer*. 1(1): 1-7.

[FAO]. Food and Agriculture Organization. (1976). A Framework for land evaluation. Rome, Italy. ISBN: 92-5-100111-1.

http://nardexmtb.blogspot.co.id/2015/05/enduro-race-kth-bikepark.html

Tekanan Terhadap Ruang Peruntukan Penunjang Pariwisata Pada Koridor Kota Malang-Kota Batu

Arief Setijawan[1],Surjono [2]

[1]PWK, FTSP,ITN,Malang
[2]PWK Fakultas Teknik,UB,Malang
Email:arf_setiyawan@yahoo.com; surjono@ub.ac.id

ABSTRAK

Ruang koridor memiliki potensi tinggi untuk mengalami perubahan ketika berada diantara dua kota dengan intensitas kegiatan yang tinggi. Demikian halnya dengan koridor Malang – Batu. Pembangunan dan perubahan yang terjadi mengakibatkan tekanan terhadap ruang koridor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif menggunakan metode kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Responden adalah pemilik dan orang yang mengetahui seluk beluk lahan yang telah mengalami perubahan di koridor Kota Malang – Kota Batu. Analisis secara induktif untuk memahami fenomena yang terjadi dengan menghasilkan konsep. Pemanfaatan lahan pada lokasi penelitian ditentukan oleh faktor arah pergi dan pulang ke objek wisata, batasan fisik kawasan, dan durasi atau intensitas kunjungan terhadap pemanfaatan ruang. Ambang batas lahan dapat ditentukan dari daya tampung ruang itu sendiri, lahan parkir, kondisi kemiringan lereng lahan dan jaringan jalan serta ambang batas pandangan yang menarik dari satu lokasi

Katakunci:Ruang, Pariwisata, Tekanan, ambang batas

I. PENDAHULUAN

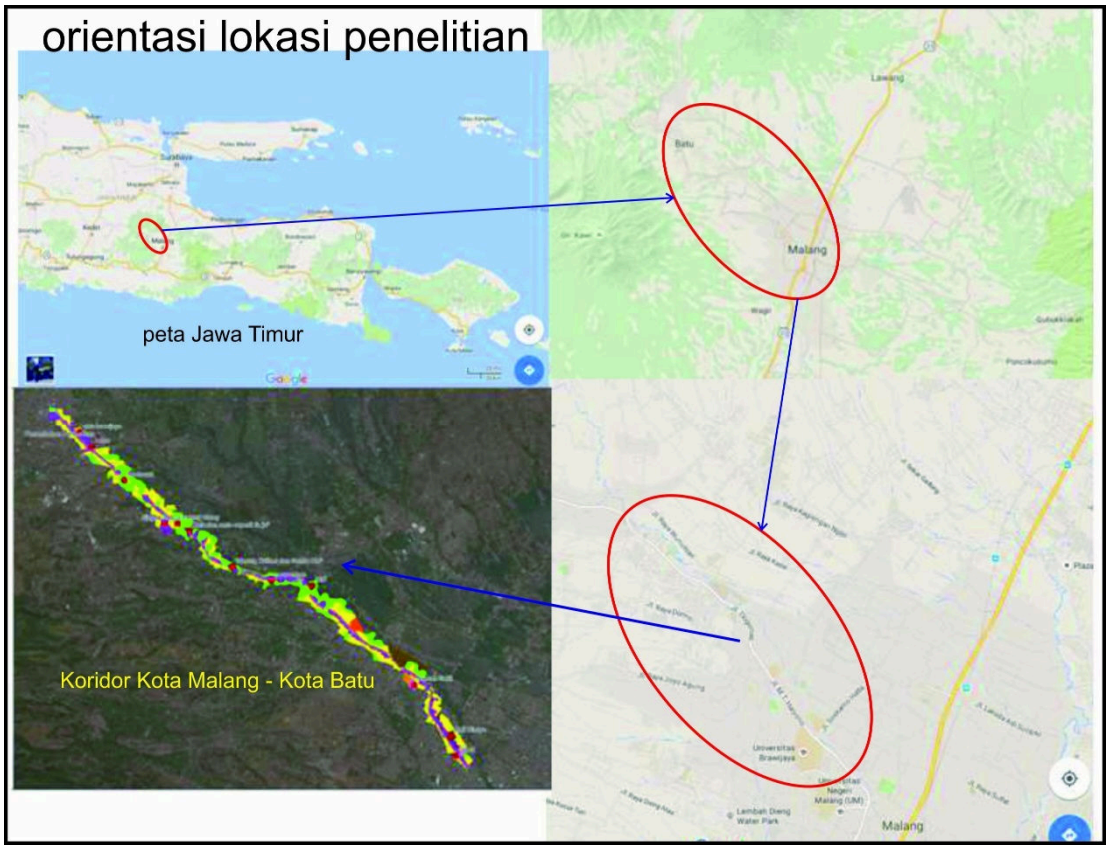
Kota yang berkembang secara terus menerus akan mengalami pergeseran fungsi kekotaan ke pinggiran kota tanpa memperhatikan batasan adaministratif. Kawasan pinggiran yang akan mengalami perubahan tinggi adalah wilayah yang berada diantara dua kota yang secara administratif relatif berdekatan.Ruang sebagai wadah dari aktivitas pariwisata, dalam penataannya harus memperhatikan berbagai aspek terkait, yakni aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga aspek visual. Pengembangan pariwisata juga harus memperhatikan aspek ambang batas ruang, mengingat jika melebihi ambang batas sisi kemenarikan dan kenyamanan berwisata akan menjadi permasalahan tersendiri. Permasalahan ambang batas muncul karena suatu tempat dibangun lebih intensif karena daya tarik tempat tersebut. Tempat yang paling menarik tentunya yang berada dibagian inti atau pusat aktivitas, kemudian merembet pada ruang diantara dua ruang utama yang disebut dengan ruang koridor.Demikian halnya yang terjadi pada ruang koridor Kota Malang dengan Kota Batu yang telah menjadi kawasan yang memiliki potensi tinggi terhadap perubahan ruang. Difusi yang terjadi pada koridor ini adalah difusi ekspansi yaitu suatu proses dimana material atau informasi menajalar melalui suatu populasi ke populasi lain dan dari suatu daerah ke daerah yang lain (Bintarto, 1987). Kasus di lokasi penelitian dapat dipahami bahwa ruang yang memiliki intensitas tinggi adalah Kota Malang yang kemudian bergerak keintensitas yang lebih rendah di Kota Batu yang saat itu masih berbentuk kota kecamatan, perkembangan berikutnya setelah terbentuk Kota Batu maka pergerakan menuju ke koridor diantara Kota Malang dan Kota Batu. Koridor ini memiliki panjang kurang lebih 11 km.

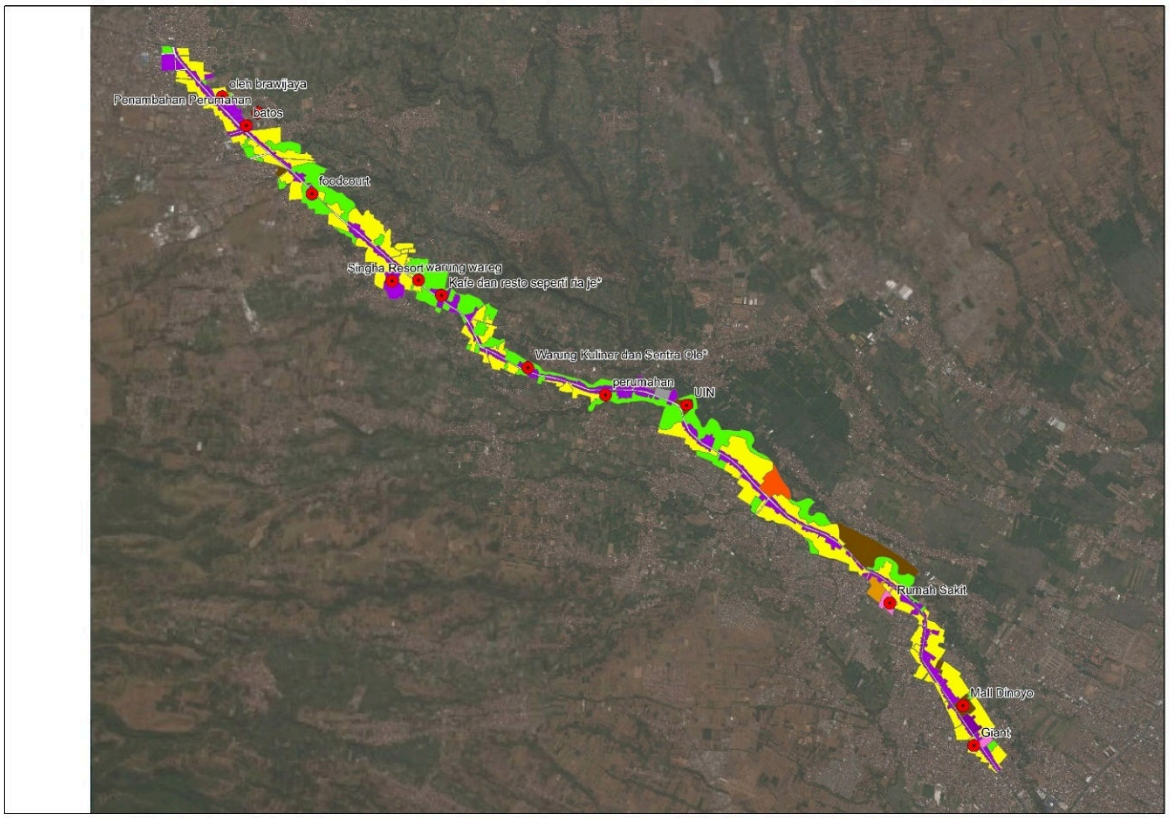
Kota Malang tumbuh dan berkembang menjadi kota perdagangan, jasa dan pendidikan sedangkan Kota Batu menjadi kota pariwisata. Kota Malang memiliki luas 252,1 km^2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 873.716 jiwa, sedangkan Kota Batu memiliki luas 202,30 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2015sebesar 189.281 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan Kota Batu, 2015). Dapat dilihat pada gambar orientasi lokasi penelitian dan peta hasil survey.

Fungsi kawasan untuk koridor Malang-Batu adalah kawasan penyangga bagi kedua kota, karenanya pemanfaatan didominasi kawasan untuk pertanian, sedangkan kapling lahan pada lapispertama kiri kanan jalan dimanfaatkan untuk kawasan terbangun. Ruang koridor terbagi menjadi tiga kepentingan pelayanan yaitu :

1. Pariwisata atau penunjang pariwisata
2. Kebutuhan sehari-hari atau pelayanan masyarakat sekitar (kampong)
3. Multiplayer kegiatan intensif (mall, perguruan tinggi, terminal, hotel)

Gambar 1. Orientasi Lokasi Penelitian





Sumber: hasil survey
Gambar 2. Tutupan Lahan

Keterangan:

- Perumahan
- RTH
- Perkantoran
- Perdagangan dan jasa
- Pendidikan
- Peribadatan

Terkait kepentingan pemanfaatan lahan pada koridor Kota Malang– Kota Batu dapat dibagi menjadi tiga segmen, yaitu:

1. Segmen dari mall Dinoyo sampai pertigaan Pendem,
2. Segmen dari pertigaan Pendem sampai pertigaan pasar Batu, dan
3. Segmen dari pertigaan pasar Batu sampai mall Batu.

Segmen satu didominasi penggunaan perdagangan dan jasa untuk pelayanan masyarakat dan pelayanan kegiatan pendidikan tinggi, terminal dan rumah sakit, untuk segmen dua didominasi kegiatan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pariwisata, sedangkan segmen tiga didominasi perdagangan dan jasa untuk

pelayanan bagi masyarakat sekitar dan juga pelayanan pendukung pariwisata. Segmen yang terkait dengan kawasan pendukung pariwisata adalah segmen dua dan tiga. Fisik kawasan yang dimiliki oleh segmen dua dan tiga cukup spesifik dengan keberadaan drainase alami disisi selatan jalan dan kondisi jalan yang cukup menanjak.

Penggunaan lahan pada sisi utara lebih didominasi penggunaan untuk pendukung kegiatan pariwisata, berupa pedagang souvenir, buah, tanaman hias, makanan ringan, jasa atau panti pijat, rumah makan atau retoran dan masjid. Sisi selatan didominasi penggunaan untuk pendukung pariwisata dan pendukung aktivitas lokal berupa hotel, restoran, pedagang tanaman hias, vihara, stasiun pengisian bahan bakar minyak, perumahan, dan toko. Seluruh penggunaan lahan pada kawasan koridor merupakan perubahan pemanfaatan lahan yang pada awalnya berupa lahan pertanian dan rumah-rumah penduduk.

Tiap ruang memiliki ambang batas, jika melebihi pasti berdampak pada kualitas ruang tersebut. Ambang batas didasari pada fakta bahwa pembangunan kota atau kawasan pada umumnya menghadapi keterbatasan fisik disebabkan oleh kondisi lingkungan alam dan buatan. Kozlowski, 1995, mengatakan bahwa kota atau kawasan itu seperti makhluk hidup yang berkembang, saat terjadi komplikasi atau sakit berarti tubuh sudah tidak bisa memenuhi kebutuhannnya.

II. METODE

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan dilapangan atau data-data yang ditemukan. Sehingga penelitian kualitatif bericirikan informasi yang berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena social (Creswell, 1994: 4-7). Keterlibatan dan interaksi peneliti kualitatif dengan realitas yang diamatinya merupakan salah satu ciri mendasar dari metode penelitian ini. Jary and Jary mendefinisikan istilah *qualitative research techniques* sebagai setiap penelitian dimana ilmuwan sosial mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat empatis dalam rangka mengumpulkan data yang unik mengenai permasalahan yang ia investigasi, lihat David Jary and Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, (Glasgow: HarperCollins Publishers, 1991), hlm.513.

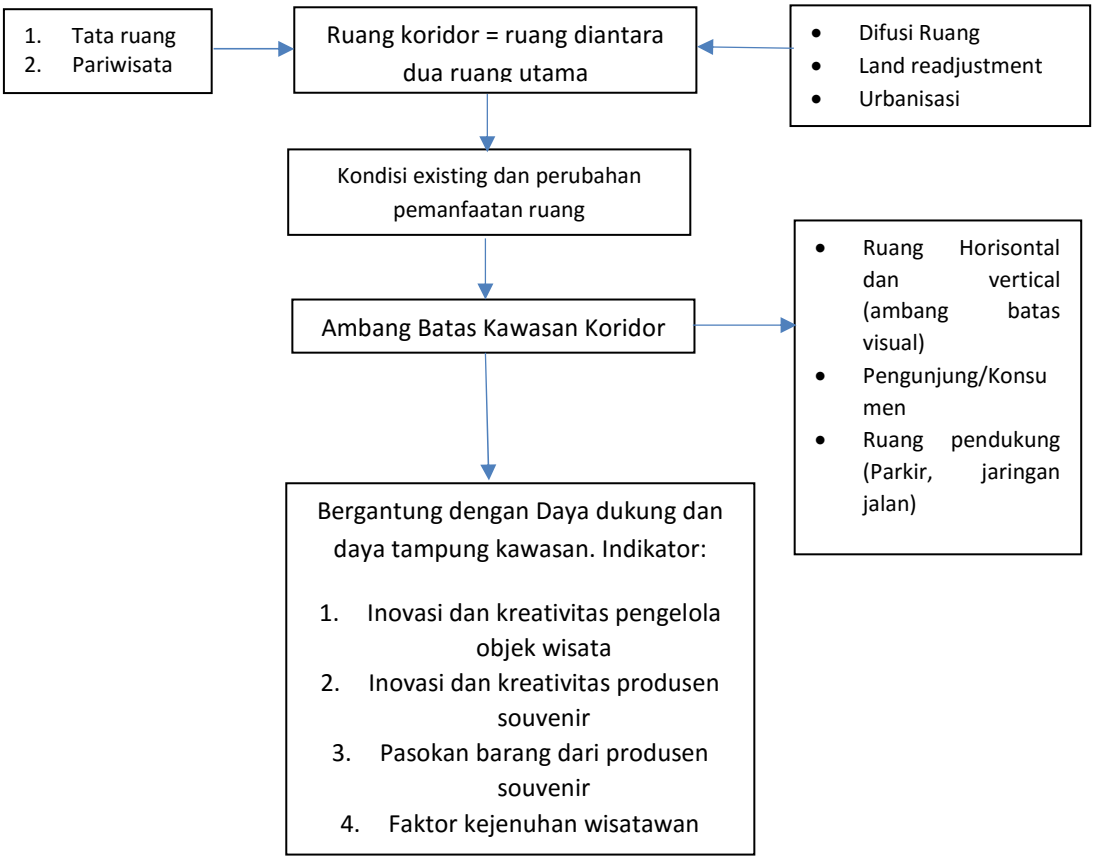
Sementara itu, Lincoln dan Guba mengajukan empat hal penting yang merefleksikan paradigma kualitatif ketika seorang peneliti hendak mengajukan proposal penelitian kualitatifnya. Pertama, kredibilitas yang bertujuan untuk mendemonstrasikan bahwa penyelidikan yang dilakukan telah selaras dengan kaidah-kaidah ilmiah. Hal ini untuk memastikan identifikasi dan deskripsi masalahpenelitian secara akurat. Penyelidikan dan penelitian harus mengikuti aturan main "*credible to theconstructors and the original multiple realities*" (Marshall *et.al.*, 1989: 144-147)Kedua, *transferability* yang menyangkut kemampuan untuk demostrasi aplikasi temuan penelitian dalam konteks yang berbeda. Triangulasi dapat dijadikan rujukan untuk dapat mencapai transferability dari suatu penelitian kualitatif. Ketiga, *dependability* dimana peneliti berusaha untuk mencermati perubahan kondisi pada fenomena sosial yang dikajinya sebagaimana ia menyesuaikan desai studi untuk menyaring pemahaman pada *setting* sosial. Yang terakhir adalah *confirmability*, yang bisa disepadankan dengan objektivitas. Dalam hal ini, peneliti kualitatif dituntut untuk menghasilkan temuan yang dapat dikonfirmasikan oleh pihak lain (Marshall *et.al.*, 1989: 144-147).

Herbert Blumer (dalam Somantri, Gumilar Rusliwa) membangun suatu landasan teoritis yang pada dasarnya "mensituasikan" makna dalam interaksi sosial. Ia berangkat dari tiga premis pokok:

1. aktor bertindak dalam ruang dan makna yang diberikan objek serta peristiwa;
2. makna biasanya muncul di luar interaksi sosial, dan aktor mengkonstruksi makna secara masing-masing;
3. makna dirubah dalam proses interaksi.

Landasan teoritik Blumer implisit memperlihatkan, bahwa interaksionisme simbolik tertarik mengkaji makna historis dan organisasi social dari makna yang bersifat "jadi", berserakan, dan menjadi pembentuk utama realitas sosial. Secara metode pengumpulandata, tradisi ini banyak melakukan proses ethnografis termasuk mengembangkan "*life-history*",pengamatan terlibat, bahkan analisa dokumen.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif menggunakan metode kualitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Responden adalah pemilik dan orang yang mengetahui seluk beluk lahan yang telah mengalami perubahan di koridor Kota Malang – Kota Batu. Analisis secara induktif untuk memahami fenomena yang terjadi dengan menghasilkan konsep.



Gambar 3. Diagram alir Konsep Penelitian

Konsep disarikan dari tema-tema dan unit-unit informasi yang didasarkan pada hasil wawancara. Dimulai dengan pengumpulan data, observasi terhadap penelitian yang berubah fungsi, tahapan analisa serta pengelompokan data dari sub tema-sub tema yang sama menjadi satu tema, kemudian tema-tema tersebut dibahas untuk mencari makna yang terkandung di dalamnya dan selanjutnya dapat ditarik suatu konsep hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat perubahan pemanfaatan lahan dalam skala kecil dan besar. Selain perubahan dari pertanian menjadi ruko (rumah toko), perubahan rumah menjadi toko atau warung merupakan perubahan paling banyak terdapat pada kawasan penelitian. Terdapat juga perubahan jenis usaha saja, misalkan dari toko pracangan menjadi toko baju, atau dari kios menjadi warung. Dapat diidentifikasi alasan perubahan pemanfaatan lahan pada lokasi penelitian yakni:

1. Alih profesi, awalnya pekerja pabrik beralih menjadi pedagang
2. Faktor ikut-ikutan karena melihat lingkungan sekitar yang berubah dan terlihat sukses
3. Pindah domisili dari luar Malang
4. Membuka cabang
5. Mengembangkan hobi dibidang kesenian

Perubahan pemanfaatan lahan pada kawasan studi yang dikarenakan alasan alih profesi dari pekerja pabrik menjadi pedagang dapat diintepretasikan bahwa telah ada kesadaran terhadap peruntukan pemanfaatan lahan yang disesuaikan dengan fungsi kawasan sebagai pendukung kegiatan pariwisata yang berada di Kota Malang dan Kota Batu. Kesadaran yang sama terjadi untuk perubahan karena pindah domisili, membuka cabang dan mengembangkan hobi di bidang kesenian. Pada kesadaran ini dimungkinkan karena penguasaan ketrampilan dibidang produksi barang penunjang pariwisata seperti pembuatan patung, tempat sampah bertema, lampion, keterampilan pengembang-biakkan tanaman hias. Tingkat kesadaran yang lebih rendah terjadi pada alasan perubahan karena faktor ikut-ikutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak atau kurang dimilikinya pengetahuan tentang fungsi kawasan. Niatan awal pembangunan juga mejadi faktor penentu dimana pemilik lahan memang tahu peruntukan tata ruang kawasan koridor terkait pemanfaatan lahan dan berniat atau memilikikesadaran untuk menyesuaikannya

Lokasi objek wisata sebagai tujuan utama membedakan arah pergi dan pulang. Arah dari Kota Malang atau luar kota sebelah utara Kota Malang ke Kota Batu disebut sebagai arah pergi dan arah dari Kota Batu ke Kota Malang disebut arah pulang. Selain arah pergi dan pulang juga terdapat batasan akibat faktor fisik kawasan yang menjadikan pertimbangan pemanfaatan ruang. Kondisi kelerengan jalan yang menanjak pada posisi pergi manjadikan koridor ini dilalui kendaraan dengan kecepatan rendah hingga sedang. Kecepatan kendaraan tersebut memungkinkan para wisatawan untuk memperhatikan kiri kanan jalan dengan baik. Terkait dengan hal ini posisi kanan jalan saat pergi memiliki potensi besar untuk dikunjungi saat pulang nantiya. Kondisi tersebut digeneralisir untuk memanfaatkan lahan sisi utara untuk kepentingan penunjang pariwisata berupa penjualan souvenir dan rumah makan. Tidak diadapat informasi pasti terkait hal ini namun dari pelaku atau pemilik lahan mengatakan bahwa wisatawan tidak memiliki keinginan untuk membeli souvenir atau makan ketika mereka belum sampai ke tujuan utama.

Posisi selatan yang memiliki keterbatasan karena drainase alam memerlukan perlakuan tersendiri saat akan dikembangkan, mengingat juga karena arah pergi ke tujuan utama tempat wisata di Kota Batu. Posisi selatan yang dapat dikatakan bertahan dan cenderung berkembang adalah peruntukan untuk stasiun pengisian bahan bakar, hotel, pembuat patung dan panti pijat. Pemanfaatan lain yang tetap bertahan adalah pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat lokal. Cukup menarik keberadaan rumah makan yang bertema kafe, tempat nongkrong anak-anak muda, karena konsep dan desain yang unik berbeda dengan pemanfaatan lahan lain disisi selatan maka rumah makan yang beroperasi pada tahun 2014 tersebut terlihat selalu ramai dikunjungi.

Durasi waktu kunjungan bertautan erat dengan kapasitas tempat partkir, hal ini karena pada lokasi pemanfaatan lahan untuk penunjang pariwisata tempat parkir menjadi suatu keharusan. Pengunjung yang memang merupakan wisatawan tentunya datang dengan menggunakan kendaraan bermotor. Ambang batas terkait dengan tempat parkir ini menjadi faktor penentu awal keberadaan dan daya tahan untuk mempertahankan pemanfaatan lahan pada koridor Kota Malang – Kota Batu. Faktor penentu berikutnya adalah kualitas barang yang dijual, pelayanan yang diberikan, dan harga barang. Kondisi kewajiban menyediakan parkir berdampak positif pada pemanfaatan lahan di lokasi penelitian. Dampak yang paling jelas adalah pemanfaatan lahan dengan sempadan bangunan yang cukup tinggi. Jadi kondisi positif ini terjadi lebih dikarenakan faktor pasar bukan karena produk perencanaan tata ruang kawasan. Kedepan sebaiknya dikuatkan dengan tata aturan bangunan dan gedung pada koridor ini oleh pemerintah daerah terkait.

Kondisi sempadan bangunan yang semakin tinggi akan berdampak pada ambang batas pandangan bagi pengguna jalan terhadap pemandangan alam di sisi utara dan selatan koridor, tentunya dalam jangka panjang akan mempengaruhi keberanjutan keberadaan kawasan pariwisata secara umum. Ambang batas pandangan juga sangat bergantung dengan pemanfaatan lahan pada sisi luar atau lapis kedua dan seterusnya dari koridor kawasan penelitian. Pemanfaatan yang dimaksud adalah mempertahankan pemanfaatan lahan untuk pertanian artinya harus diminimalisir atau bahkan ditiadakan gedung yang di bangun pada lapis kedua, ketiga dan seterusnya dari koridor tersebut. Keberadaan bangunan, yang memiliki ketinggian bangunan yang lebih tinggi dari lapis pertama koridor tentunya akan menjadi pembatas pandangan.

IV. KESIMPULAN

Ruang koridor Kota Malang dengan Kota Batu dapat dibagi menjadi tiga kepentingan pelayanan, yaitu:

1. Pariwisata atau penunjang pariwisata
2. Kebutuhan sehari-hari atau pelayanan masyarakat sekitar (kampong)
3. Multiplayer kegiatan intensif (mall, perguruan tinggi, terminal, hotel)

Terkait kepentingan pemanfaatan lahan pada koridor ini dapat dikategorisasikan menjadi tiga segmen, yaitu:

1. segmen 1 (satu) dari mall Dinoyo sampai pertigaan Pendem,
2. segmen 2 (dua) pertigaan Pendem sampai pertigaan pasar Batu, dan
3. segmen 3 (tiga) pertigaan pasar Batu sampai mall Batu.

Dari ketiga segmen ini yang terkait dengan keberadaan pariwisata adalah segmen dua dan tiga. Tekanan terhadap ruang koridor dapat didekati dari dua sisi

yaitu perubahan pemanfaatan ruang dan ambang batas ruang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan atau perubahan pemanfaatan lahan pada koridor ini adalah batasan fisik lahan berupa kelerengan lahan dan keberadaan drainase alam, faktor arah pergi dan pulang. Arah pergi adalah arah dari Kota Malang atau luar kota sebelah utara Kota Malang menuju Kota Batu, dan arah pulang adalah arah sebaliknya, dari Kota Batu kearah Kota Malang. Faktor tersebut menjadikan alasan perubahan pemanfaatan lahan pada lokasi penelitian yakni:

1. Alih profesi, awalnya pekerja pabrik beralih menjadi pedagang
2. Faktor ikut-ikutan karena melihat lingkungan sekitar yang berubah dan terlihat sukses
3. Pindah domisili dari luar Malang
4. Membuka cabang
5. Mengembangkan hobi dibidang kesenian
6. Ambang batas pemanfaatan lahan pada koridor Kota Malang – Kota Batu dipengaruhi oleh faktor keunikan desain, durasi waktu kunjungan, keberadaan atau kapasitas tempat parkir.

Ambang batas ini pada akhirnya mempengaruhi ambang batas pandangan dari koridor kearah kiri dan kanan. Keberadaan ambang batas pandangan akan sangat berpengaruh pada tingkat kejenuhan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu atau Kota Malang.

Salah satu hal yang positif pada lokasi penelitian adalah kesadaran atau lebih tepatnya kewajiban untuk memenuhi ruang parkir sehingga menjadikan seluruh bangunan memiliki sempadan bangunan yang tinggi. Semakin tinggi sempadan bangunan akan memberikan hal positif terhadap keberadaan koridor dalam menunjang pariwisata secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bintarto, R dan Hadisumarno, S. 1987. Metode Analisa Geografi, LP3ES, Jakarta

Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications, Inc.

Jary, David and Julia Jary. 1991. *Dictionary of Sociology*. Glasgow: HarperCollins Publishers.

Kolozlowski, Jerzy. 1995, Pendekatan Ambang Batas dalam Perencanaan Kota, Wilayah dan Lingkungan (teori dan praktek), UI Press, Jakarta

Marshall, Catherine and Gretchen B. Rossman. 1989. *Designing Qualitative Research*. Newbury Park, California: Sage

Jurnal :

Gumilar Rusliwa Somantri, Memahami Metode Kualitatif**,** *Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 57-65*

Dong, Rencai; Yu, Lijun; Liu, Guohua, *Impact of tourism development on land-cover change in a matriarchal community in the Lugu Lake area*, International Journal of Sustainable Development and World Ecology 15.1 (Feb 2008)

Minapolitan Hallal Tourism Kabupaten Lombok Tengah

Ike Karwinto P[1], Debora E[1],Sarah S[1], Sarah Q[1], Elsa A W[1], R Abhi K W[1], Reza E H[1], Firdausi N[1]

[1] *Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Fakultas Teknik,Universitas Brawijaya, Malang*
Email:ikarwinto@student.ub.ac.id; deboraelisabet96@gmail.com; minapolitanlomteng2017@gmail.com

ABSTRAK

Minapolitan hallal tourism adalah konsep pengembangan pariwisata hallal pada sektor perikanan. Pariwisata hallal atau bisa disebut wisata syariah memiliki definisi lebih luas dari wisata religi seperti haji, umroh, atau ziarah di tempat-tempat bersejarah islam, wisata hallal yaitu wisata yang dilaksanakan berdasarkan pada nilai-nilai syariah yang melayani liburan dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim. Sesuai yang diungkapkan oleh World Tourism Organization bahwa wisata hallal bukan merupakan pariwisata yang khusus untuk umat Muslim namun juga non Muslim, dimana wisata hallal ini berorientasi pada pelayanan yang nyaman, mencegah tindakan negatif, menjaga ketenangan, keamanan, dan kelestarian lingkungan, serta menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Sektor minapolitan merupakan salah satu sektor pengerak perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Potensi sektor minapolitan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan degan stimulus konsep pengembangan pariwisata hallal. Minapolitan hallal tourism bukan hanya dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah, namun juga mampu menjadi ciri khas, dan juga menjaga nilai-nilai sosial serta kearifan budaya di Kabupaten Lombok Tengah.

Kata kunci: Minapolitan Hallal Tourism, Minapolitan Kabupaten Lombok Tengah, SDA, SDM, Pengembangan Pariwisata.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari pulau Lombok dan Pulau Sembawa disertai 278 pulau kecil. Luas perairan pesisir mencapai 29.159 km^2 dengan garis pantai sepanjang 2.332,80 km^2. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) NTB memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) yang sangat besar. Sudah sewjarnya Provinsi NTB menjadi obyek yang sangat potensial untuk menembangkan multi sektor diantaranya kegiatan perikanan, pariwisata, konservasi, transportasi laut, industri maritim, pertambangan, pendidikan, riset, energi, adat dan budaya masyarakat.

Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan sebagai penggerak sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas untuk meningkatkan daya saing, serta meningkatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi regional dan nasional. Konsep pembangunan minapolitan dilakukan berdasarkan asas demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil, serta penguatan peran ekonomi daerah (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republi Indonesia No. 18 Tahun 2012)

Untuk mengembangkan kegiatan pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsep minapolitan, kawasan minapolitan dipilih secara terkoordinasi antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2013,

salah satu kabupaten yang temasuk sebagai kawasan minapolitan adalah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari Kecamatan Pujut, Praya Bara, Praya Timur, Kecamatan Praya, Kecamatan Praya tengah, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Batukliang, Kecamatan Batukliang Utara, dan Kecamatan Praya Barat Daya.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya yang besar yaitu sebesar 15.679 Ha yang terdiri dari budidaya air laut, budidaya air payau, dan budidaya air tawar. Berdasarkan data Sektor Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007, total luas potensi budidaya laut di Kabupaten Lombok Tengah adalah 2.255 Ha namun baru dimanfaatkan dengan dominasi budidaya rumput laut sebesar 1,6%, total luas potensi budidaya air payau adalah 450 Ha namun baru dimanfaatkan sebesar 3,2%, sedangkan total luas potensi budidaya air tawar adalah 15.292 Ha.Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031, salah satu program utama perwujudan pengembangan kawasan strategis dengan pengelolaan kawasan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan kualitas kawasan minapolitan di Kawasan Gerupuk dan Awang, Kecamatan Pujut dan Praya Timur. Untuk mencapai program utama tersebut sekaligus memenuhi syarat dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2011 sebagai salah satu kabupaten yang telah ditetapkan menjadi kawasan minapolitan, maka Kabupaten Lombok Tengah perlu memiliki rencana pengembangan kawasan minapolitan.

Pada tahun 2016, Nusa Tenggara Barat kembali meraih penghargaan di ajang *World Hallal Tourism Awards* (WHTA). Desa Sembalun kembali terpilih sebagai destinasi bulan madu hallal terbaik (*World's Best Hallal Honeymoon Destination*) 2016, Novotel Lombok Resort & Villas sebagai resor hallal tepi pantai terbaik (*World's Best Hallal Beach Resort)*dan situs www.wonderfullomboksumbawa.com sebagai situs pariwisata hallal terbaik dunia *(World's Best Hallal Travel Website*). Wisata Hallal kini telah direncanakan untuk dikembangkan dalam beberapa tempat di Nusa Tenggara Barat.Salah satu yang berpotensi dikembangkan menjadi wisata hallal adalah Kabupaten Lombok Tengah.Lombok Tengah terkenal dengan budaya dan potensi alamnya.Potensi yang dapat digunakan untuk mendukung terlaksananya wisata hallal adalah sektor minapolitan atau dapat disebut sebagai *Minapolitan Hallal Tourism*.Untuk dapat merencanakan pengembangan wilayah dari sektor minapolitan dan pariwisata maka perlu dilakukan pengkajian potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

II. METODE

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan survei primer dan survei sekunder. Analisis dilakukan pada dua pokok pembahasan yang ada yaitu dari sektor minapolitan dan sektor pariwisata yang bertujuan untuk mengetahui potensi dan masalah terkait pengembangan *minapolitan hallal tourism* di Kabupaten Lombok Tengah.

A. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) merupakan suatu analisis untuk menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah terutama dari kriteria kontribusi (Basuki, 2009).Analisis LQ juga dipakai untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan dalam suatu daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau internasional.Rumus menghitung LQ adalah sebagai berikut.

$$LQ_i = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

Keterangan :

Eij = Variabel regional di sector i di wilayah j

Ej = Variabel regional di wilayah j
Ein = Variabel regional di sektor i di wilayah n
En = Variabel regional perekonomian kabupaten/propinsi

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut :

1. Nilai LQ di sektor i sama dengan 1 (LQ = 1), berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi j adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi n
2. Nilai LQ di sektor i lebih besar dari 1 (LQ > 1), berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi j adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi n. Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi j sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi j.
3. Nilai LQ di sektor i lebih kecil dari 1 (LQ < 1), berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dan kurang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerakan perekonomian daerah.

B. Analisis Growth Share

Analisis *Growth Share* dilakukan dengan perhitungan *growth* yang bertujuan untuk mengetahui produktivitas atau pertumbuhan suatu komoditas di suatu kawasan terhadap besar komoditas di seluruh bagian wilayah perencanaan. Selanjutnya dilakukan perhitungan *share* jika hasil perhitungan nilai 2 dan negative maka kontribusi komoditas tersebut kecil, sementara nilai 2 dan 3 yang memiliki simbol positif menunjukan kontribusi komoditas tersebut besar.

C. Analisis Subsistem Minapolitan

Analisis subsistem minapolitan merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis setiap kegiatan minapolitan mulai dari minainput, minaproses, dan minaoutput.Analisis ini dapat digunakan untuk melihat potensi dan masalah yang ada di sektor minapolitan Kabupaten Lombok Tengah.

D. Analisis Karakteristik Wisatawan

Analisis karakteristik wisatawan digunakan untuk mengetahui motivasi berkunjung, lama berkunjung, dan asal wisatawan.Analisis ini dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan ODTW dan pemenuhan kebutuhan wisatawan.

E. Analisis Daya Tarik Wisata

Analisis daya tarik wisata digunakan untuk mengetahui karakteristik suatuobjek wisata dengan melakukan identifikasi objek wisata yang sesuai dengan kriteria yangtelah ditetapkan.Analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui objek wisata unggulan dan potensi serta permasalahan baik fisik maupun non fisik di objek wisata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Potensi Minapolitan Kabupaten Lombok Tengah

Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi sektor minapolitan adalah Analisis LQ dan Analisis *Growth Share.*Berikut hasil analisis LQ dan *Growth Share* sektor minapolitan Kabupaten Lombok Tengah.

1. Analisis LQ

   Berdasarkan hasil perikanan budidaya Kabupaten Lombok Tengah, hasil dari analisi LQ dilihat dari komoditas ikan yang unggulan di Kabupaten Lombok Tengah. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan hasil perikanan budidaya Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil perikanan budidaya Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016. Hasil perhitungan

analisis LQ perikanan budidaya Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada**Tabel 3.**

Tabel 1.Hasil Perhitungan LQ Komoditas Perikanan Budidaya Kabupaten Lombok Tengah

No.	Hasil Perikanan	Jumlah Produksi (Ton)		$\frac{si}{s}$	$\frac{ni}{n}$	LQ
		Kabupaten	Provinsi			
1	Ikan Mas/Karper	1.615	3.444	0,052601	0,023015	2,285489
2	Nila	27.890	53.148	0,90838	0,35517	2,557593
3	Patin	0	705	0	0,004711	0
4	Lele	358	3.400	0,01166	0,022721	0,513185
5	Bawal	59	660	0,001922	0,004411	0,43569
6	Bandeng	80	10.053	0,002606	0,067181	0,038785
9	Udang Vaname	701	78.936	0,022832	0,527502	0,043283
	Jumlah	**30.703**	**149.641**			

Sumber: Hasil Analisa, 2017

Tabel 2. Hasil Perhitungan LQ Komoditas Perikanan Tangkap Kabupaten Lombok Tengah

No.	Hasil Perikanan	Produksi		$\frac{si}{s}$	$\frac{ni}{n}$	LQ
		Kabupaten	Provinsi			
1	Banyar	3,70	740,00	0,002629	0,007131637	0,368607
2	Bawal	3,90	55,00	0,002771	0,000530054	5,227524
3	Cakalang	260,30	6240,00	0,184938	0,060137043	3,075273
4	Cumi-Cumi	28,80	3280,00	0,020462	0,031610497	0,647311
5	Kembung	39,00	8555,00	0,027709	0,082447501	0,336077
6	Kenyar	0,70	205,00	0,000497	0,001975656	0,251732
7	Kepiting	4,80	493,00	0,00341	0,004751212	0,717775
8	Kerong-Kerong	23,60	177,00	0,016767	0,00170581	9,829532
9	Kurisi	3,80	1820,00	0,0027	0,017539971	0,153924
10	Rajungan	25,70	4738,00	0,018259	0,045661748	0,399882
11	Selar	28,50	5846,00	0,020249	0,056339928	0,359402
12	Siro	13,00	3023,00	0,009236	0,029133699	0,317029
13	Sotong	2,00	458,00	0,001421	0,004413905	0,321928
14	Sunglir	2,90	586,00	0,00206	0,005647485	0,364833
15	Tembang	23,80	6567,00	0,016909	0,063288455	0,26718
16	Tenggiri	13,00	2826,00	0,009236	0,027235142	0,339129
17	Teri	56,20	6812,00	0,039929	0,065649605	0,608213
18	Tetengek	1,70	128,00	0,001208	0,00123358	0,979114
19	Tongkol	184,80	10748,00	0,131297	0,103582202	1,26756
20	Udang Putih	15,30	4171,00	0,01087	0,040197373	0,270424
	Jumlah	**735,5**	**67468**			

Sumber: Hasil Analisa, 2017

Berdasarkan Tabel 1dan Tabel 2**.** komoditas perikanan budidaya yang dipilih sebagai komoditas unggulan untuk budidaya laut adalah Rumput Laut, budidaya air tawar adalah Ikan Nila dan Ikan Karper, sedangkan untuk budidaya air payau adalah Udang Vaname. Sedangkan untuk perikanan tangkap adalah Ikan Bawal, Cakalang, dan Tongkol.

2. Analisis *Growth Share*

Berdasarkan perhitungan *growth*, 80% jumlah produksi perikanan didominasi budidaya memiliki hasil dengan tanda positif, yang berarti bahwa hasil perikanan tersebut produktif. Ikan-ikan tersebut adalah ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan lele, ikan bawal, ikan bandeng, dan udang vaname. Hasil perikanan yang memiliki hasil negatif adalah ikan patin, hal tersebut

karena perikanan budidaya Kabupaten Lombok Tengah memang tidak memproduksi ikan patin. Berikut adalah hasil perhitungan *growth*

Tabel 3 Hasil Perhitungan Growth Perikanan Budidaya

No.	Hasil Perikanan	Jumlah Produksi (Ton)		Growth	Tanda	Makna
		2015	2016			
1	Ikan Mas/Karper	302,51	1.615	4,3	+	Produktif
2	Nila	4.048,86	27.890	5,9	+	Produktif
3	Patin	0	0	0,0	-	Tidak Produktif
4	Lele	75,13	358	3,8	+	Produktif
5	Bawal	4,34	59	12,6	+	Produktif
6	Bandeng	8,5	80	8,4	+	Produktif
7	Udang Vaname	118,09	701	4,9	+	Produktif

Sumber: Hasil Analisa, 2017

Tabel 4 Hasil Perhitungan Share Perikanan Budidaya

No.	Hasil Perikanan	Jumlah Produksi (Ton)		Share	Nilai	Tanda	Kontribusi
		Kabupaten	Provinsi				
1	Ikan Mas/Karper	1.615	3.444	0,469	1	-	Kecil
2	Nila	27.890	53.148	0,525	1	-	Kecil
3	Patin	0	705	0,000	1	-	Kecil
4	Lele	358	3.400	0,105	1	-	Kecil
5	Bawal	59	660	0,089	1	-	Kecil
6	Bandeng	80	10.053	0,008	1	-	Kecil
7	Udang Vaname	701	78.936	0,009	1	-	Kecil

Sumber: Hasil Analisa, 2017

Tabel 5 Hasil Analisis Growth Share Perikanan Budidaya

No.	Hasil Perikanan	Growth	Share	Growth-Share
1	Ikan Mas/Karper	+	-	Dominan
2	Nila	+	-	Dominan
3	Patin	-	-	Statis
4	Lele	+	-	Dominan
5	Bawal	+	-	Dominan
6	Bandeng	+	-	Dominan
7	Udang Vaname	+	-	Dominan

Sumber: Hasil Analisa, 2017

Berdasarkan analisis *growth share*, hampir seluruh hasil perikanan budidaya di Kabupaten Lombok Tengah memiliki hasil *growth* positif dan *share* negatif. *Growth* positif berarti bahwa hasil perikanan tersebut produktif, sementara *share* negatif berarti bahwa hasil perikanan tersebut kurang berkontribusi pada jumlah hasil perikanan provinsi. Gabungan dari *growth* positif dan *share* negatif merupakan komoditas dominan, yaitu berarti bahwa komoditas tersebut mendominasi di Kabupaten Lombok Tengah, namun memiliki persentase yang rendah di tingkat provinsi, dan berpotensi untuk menjadi komoditas basis. Satu hasil perikanan yang memiliki hasil *growth* negatif dan *share* negatif adalah ikan patin, yaitu disebabkan karena Kabupaten Lombok Tengah memang tidak memproduksi ikan tersebut.

Berikut adalah hasil perhitungan *growth*dan *share* perikanan tangkap di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 6 Hasil Perhitungan Growth Perikanan Tangkap0

No.	Hasil Perikanan	Produksi (Ton)		Nilai	Tanda	Makna
		2015	2016			
1	Banyar	8,2	3,7	-0,5	-	Tidak Produktif
2	Bawal	1,1	3,9	2,5	+	Produktif
3	Cakalang	104,4	260,3	1,5	+	Produktif
4	Cumi-Cumi	10,9	28,8	1,6	+	Produktif
5	Kembung	32,6	39	0,2	+	Produktif
6	Kenyar	1,5	0,7	-0,5	-	Tidak Produktif
7	Kepiting	1,2	4,8	3,0	+	Produktif
8	Kerong-Kerong	3,9	23,6	5,1	+	Produktif
9	Kurisi	0,5	3,8	6,6	+	Produktif
10	Rajungan	10,4	25,7	1,5	+	Produktif
11	Selar	3,6	28,5	6,9	+	Produktif
12	Siro	1	13	12,0	+	Produktif
13	Sotong	0,4	2	4,0	+	Produktif
14	Sunglir	0,1	2,9	28,0	+	Produktif
15	Tembang	27,5	23,8	-0,1	-	Tidak Produktif
16	Tenggiri	16,7	13	-0,2	-	Tidak Produktif
17	Teri	39,8	56,2	0,4	+	Produktif
18	Tetengek	0,9	1,7	0,9	+	Produktif
19	Tongkol	171,8	184,8	0,1	+	Produktif
20	Udang Putih	0,4	15,3	37,3	+	Produktif

Sumber: Hasil Analisa, 2017

Tabel 7Hasil Perhitungan Share Perikanan Tangkap

No.	Hasil Perikanan	Produksi (Ton)		Share	Nilai	Tanda	Kontribusi
		Kabupaten	Provinsi				
1	Banyar	3,7	740	0,005	1	-	Kecil
2	Bawal	3,9	55	0,071	1	-	Kecil
3	Cakalang	260,3	6240	0,042	1	-	Kecil
4	Cumi-Cumi	28,8	3280	0,009	1	-	Kecil
5	Kembung	39	8555	0,005	1	-	Kecil
6	Kenyar	0,7	205	0,003	1	-	Kecil
7	Kepiting	4,8	493	0,010	1	-	Kecil
8	Kerong-Kerong	23,6	177	0,133	1	-	Kecil
9	Kurisi	3,8	1820	0,002	1	-	Kecil
10	Rajungan	25,7	4738	0,005	1	-	Kecil
11	Selar	28,5	5846	0,005	1	-	Kecil
12	Siro	13	3023	0,004	1	-	Kecil
13	Sotong	2	458	0,004	1	-	Kecil
14	Sunglir	2,9	586	0,005	1	-	Kecil
15	Tembang	23,8	6567	0,004	1	-	Kecil
16	Tenggiri	13	2826	0,005	1	-	Kecil
17	Teri	56,2	6812	0,008	1	-	Kecil
18	Tetengek	1,7	128	0,013	1	-	Kecil
19	Tongkol	184,8	10748	0,017	1	-	Kecil
20	Udang Putih	15,3	4171	0,004	1	-	Kecil

Sumber: Hasil Analisa, 2017

Berdasarkan hasil analisis *growth share*, 99,91% hasil perikanan memiliki *growth* positif dan *share* negatif. *Growth* positif berarti bahwa hasil perikanan tersebut produktif, sementara *share* negatif berarti bahwa jumlah produksi hasil perikanan tersebut memberikan kontribusi yang kecil terhadap jumlah produksi hasil perikanan provinsi. Gabungan *growth* positif dan *share* negatif berarti bahwa hasil perikanan tersebut memiliki sifat dominan, yaitu berarti bahwa komoditas tersebut mendominasi di Kabupaten Lombok Tengah, namun memiliki persentase yang rendah di tingkat provinsi, dan berpotensi untuk menjadi komoditas basis. Sebesar 0,09% hasil perikanan memiliki *growth* dan *share* negatif, yaitu ikan Banyar, ikan Kenyar, ikan Tembang, dan ikan Tenggiri. *Growth* negatif berarti bahwa hasil perikanan tersebut kurang produkti, sementara *share* negatif berarti bahwa hasil perikanan tersebut kurang memberikan kontribusi terhadap hasil perikanan produksi di tingkat produksi. Gabungan dari *growth* negatif dan *share* negatif tersebut berarti bahwa hasil perikanan tersebut statis, yaitu komoditas yang memerlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan produktivitas.

Berdasarkan hasil analisis LQ dan *Growth Share* komoditas unggulan perikanan di Lombok Tengah adalah Rumput Laut, Udang Vaname, Ikan Nila dan Karper, serta Ikan Tongkol. Berikut analisis sub sitem untuk masing-masing komoditas unggulan

3. Analisis Sub Sistem Minapolitan

   Berdasarkanhasil analisis sub sistem perikanan budidaya laut untuk komoditas rumput laut, maka hasilnya sebagai berikut.

   a) Pemanfaatan lahan budidaya rumput laut belum maksimal, dari 1,200 Ha lahan potensial yang digunakan untuk budidaya rumput laut hanya 594,7 Ha. (Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tenagh, 2017)
   b) Bibit rumput laut yang dihasilkan oleh UPR dan Seaweed Center Kabupaten Lombok Tengah sudah mampu melampaui kebutuhan bibit rumput laut di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga bibit rumput laut tersebut dapat diekspor ke luar wilayah Kabupaten Lombok Tengah. (Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2011-2016, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah)
   c) Lahan budidaya Rumput Laut yang berkurang akibat perubahan fungsi kegiatan. Pantai Kute, Kecamatan Pujut awalnya merupakan sentra utama kegiatan budidaya Rumput Laut, namun pada tahun 2015 terjadi perubahan peruntukan kegiatan pada kawasan tersebut yaitu menjadi sentra pariwisata. Kegiatan budidaya Rumput Laut yang ada di Pantai Kute berkurang 75% dari sebelumnya. Selain masalah tersebut, di kecamatan lainnya terjadi pengurangan jumlah pembudidaya Rumput Laut. Berkurangnya jumlah pembudidaya Rumput Laut karena masyarakat lebih memilih untuk menangkap baby lobster. Sehingga tali dan lahan yang digunakan untuk budidaya Rumput Laut berubah menjadi alat penangkap baby lobster. Kegiatan ilegal dan dilarang tersebut memberikan keuntungan besar dari segi ekonomi kepada masyarakat yang lebih besar daripada budidaya Rumput Laut.
   d) Hasil dari budidaya Rumput Laut tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, hal tersebut dikarenakan rendahnya nilai jual dan sulitnya pemasaran hasil produksi. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat lebih memilih untuk menangkap benih Lobster daripada

membudidayakan Rumput Laut. Penangkapan Lobster biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, dan sudah ada pengepul yang membeli Lobster dengan harga yang tinggi. Rumput Laut dijual tanpa adanya pengolahan dengan harga Rp.7.000,- sampai dengan Rp.9.000,- per Kg. Sedangkan benih Lobster dijual dengan harga Rp.60.000,- per ekor. Perbedaan harga jual yang jauh tersebut membuat masyarakat lebih memilih menangkap benih Lobster daripada budidaya Rumput Laut. Namun, tindakan illegal tersebut telah ditindaklanjutin oleh pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikana. Usaha yang sedang dilakukan adalah memberikan sanksi tegas terhadap penangkap benih Lobster illegal, selain itu memberikan modal usaha budidaya Rumput Laut, dan memberikan pelatihan tambahan terkait proses budidaya dan pengolahan Rumput Laut.

e) Kebutuhan air bersih yang cukup sulit didapatkan. Pada wilayah zona I dikhususkan untuk kegiatan budidaya laut yang terdiri dari 4 kecamatan hanya memiliki 2 unit fasilitas pembangunan sarana air bersih dengan sistem destilasi air laut, yaitu di Gerupuk dan di Kuta, yang berada di Kecamatan Pujut. Selain itu, pada tahun 2015 pipa air baru dibangun pada Desa Prabu. Begitu juga dengan pembuatan sumur bor air bersih yang ada di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat pada tahun 2016. Sarana pemenuhan kebutuhan air masih dirasa kurang oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kaitannya dengan budidaya Rumput Laut.
f) Kurangnya SDM pengolahan hasil budidaya rumput laut.

Analisis sub sistem budidaya air tawar Ikan Nila dan Karper.

a) Kualitas benih di BBI Lombok Tengah masih kalah dengan benih dari tempat lain, sehingga banyak pembudidaya yang membeli benih di luar Kabupaten Lombok Tengah.
b) Produksi benih di BBI serta UPR di Kabupaten Lombok belum mampu memenuhi kebutuhan benih pembudidaya.
c) Harga pakan yang masih belum terjangkau oleh sebagian besar pembudidaya.
d) Belum terdapat pengolahan pasca panen dari hasil produksi budidaya Ikan Nila dan Karper di Kabupaten Lombok Tengah.

Hasil analisissub sistem budidaya Udang Vaname.

a) Pemenuhan benih untuk budidaya Udang Vaname dilakukan dengan membeli benih di BPBAP Situbondo, CP.Prima Kabupaten Sumbawa, dan JAPVA. Hal tersebut yang masih dirasa masalah oleh pembudidaya Udang Vaname di Kabupaten Lombok Tengah.
b) Pemanfaatan lahan potensial budidaya Udang Vaname yaitu sebesar 550 Ha baru dimanfaatkan sebesar 285 Ha.
c) Belum ada pengolahan pasca panen yang dapat menambah nilai ekonomi dari budidaya Udang Vaname.

Hasil analisis sub sistem perikanan tangkap.

Tabel 8.Potensi dan Masalah Subsistem Perikanan Tangkap

Variabel	Sub Variabel	Potensi	Masalah
Subsistem Hulu Perikanan Tangkap	BBM (solar)	Adanya tempat Pengisian bahan bakar pada pelanuhan teluk awang yang bisa membantu para	Harga bahan bakar yang tidak stabil bedampak terhadap penjualan hasil ikan.
	Perahu	Perahu yang dimiliki para nelayan di Kabupaten Lombok Tengah yang memliki apasitas mesin yang berkisar antara 5 – 30 GT yang bisa melaut hingga lebih dari 12 mil	Armada nelayan yang di pakai pada saat ini memeliki kekurangan dalam hal teknis sehingga membuat para nelayan kesulitan untuk mencari hasil tangkapan ikan
Subsistem Proses Perikanan Tangkap	Penangkapan Ikan	-	Hasil wawancara pada nelayan permasalahan yang dihadapi pada saat melaut yaitu kondisi cuaca, pasang surut, musim jenis ikan, dan gelombang, sehingga apabila pada saat kondisi cuaca buruk, para nelayan memilih untuk tidak pergi melaut karena membahayakan diri mereka dan merusakperahu.
Subsistem Hilir Perikanan Tangkap	Produk Hasil Olahan		- Produk pengolahan ikan belummaksimal. - Minimnya adanya bantuan alat untuk pengolahan ikandari pemerintah - Belum rutinnya pelatihan/penyuluhan pengolahan ikan dan pengemasanikan.
	Lokasi Hasil Olahan		Hanya dijual di toko, pasar lokal dan tengkulak yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, namun belum ada produk yang dijual sampai Kabupaten.
	Kondisi jaringan jalan untuk pemasaran (aksesibilitas)		Kondisi jaringan jalan untuk proses pengangkutan dan pemasaran hasil produksi perikanan buruk

Sumber: Hasil Analisa, 2017

B. Analisis Potensi Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah

1. Analisis Karakteristik Wisatawan

   Jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2015 adalah 100,728 orang.(Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 64 A Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah)

   a) Hasil analisis motivasi berkunjung daya tarik wisata di Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 3 yaitu motivasi rekreasi, motivasi studi, dan motivasi sosial. Berdasarkan hasil survei primer 94% wisatawan berkunjung karena untuk rekreasi , 2% untuk studi, 4% untuk sosial. Untuk motivasi studi dan sosial daya tarik wisata yang dikunjungi adalah wisata tenun tradisional Desa Sade, sedangkan 94% wisatawan berkunjung di wisata alam, dengan prosentase terbesar berkunjung ke Pantai Kuta dan Pantai Selong Belanak.
   b) Hasil analisis lama berkunjung menunjukan bahwa lama kunjungan untuk wisata alam adalah 2-5 jam dengan kegiatan yang dilakukan adalah berenang, *surfing,* mengabadikan foto, dan berbelanja oleh-oleh. Sedangkan untuk wisata budaya adalah 5 jam dengan kegiatan belanja kain songket dan oleh-oleh lainnya, serta mengabadikan foto.
   c) Hasil analisis asal wisatawan menunjukan bahwa 90% adalah wisatawan domestic, 10% wisatawan mancanegara.

2. Analisis Daya Tarik Wisata

   Berdasarkan hasil analisis daya tarik wisata, tingkat daya tarik wisata yang mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan dari skoring dengan beberapa kriteria adalah Pantai Kuta, Desa Sade, Pantai Selong Belanak, dan Pantai Mawun.Daya tarik wisata tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk dijadikan sebagai wisata unggulan dan dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata utama di Kabupaten Lombok Tengah.

C. Minapolitan Hallal Tourism Kabupaten Lombok Tengah

Minapolitan Hallal Tourism atau pariwisata syariah menurut Kementrian Pariwisata dalam Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah oleh Bidang Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan, Kementrian Pariwisata adalah kegiatan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah yang sesuai dengan ketentuan syariah. Jika disesuaikan dengan pengertian tersebut maka produk, jasa, dan objek wisata dari wisata syariah sama dengan wisata pada umumnya. Konsep wisata syariah atau wisata hallal ini tidak terlepas dari hukum hallal dan haram di dalam Islam. Hallah yang diartikan benar, dan haram yang artinya dilarang. Konsep hallal dapat diartikan dari segi konsumen sebagai perlindungan konsumen yaitu menyediakan yang dapat dikonsumsi oleh konsumen sesuai dengan keyakinannya atau jaminan bahwa konsumen mendapatkan sesuai dengan yang seharusnya sesuai dengan keyakinannya. Dari segi produsen dapat diartikan sebagai peluang bisnis, sasaran konsumen dan kriteria yang disesuaikan dengan keyakinananya telah jelas dan terukur, maka akan mudah untuk meningkatkan nilai dari produk yang dilihat dari intangible value (Hamzan dan Yudiana, 2015 dalam Lapoan Akhir Kajian Pengembangan Pariwisata, Bidang Pengembangan Kebijakan Pariwisata),

Terdapat perbedaan antara wisata konvensional, religi, dan wisata syariah atau hallal sebagai berikut (Ngatawi Al Zztrow dalam Laporan Ahir Kajian Pengembangan Pariwisata, Bidang Pengembangan Kebijakan Pariwisata).

1. Wisata konvensional memiliki objek wisata yaitu alam, budaya, heritage, dan kuliner. Tujuan wisata konvensional adalah menghibur. Target dari wisata konvensional adalah menyentuh kepuasan dan kesenangan yang

berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan. Pada wisata konvensional guide diharuskan mampu memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap objek wisata. Fasilitas pelengkap hanya sekedar pelengkap. Wisata konvensional menyediakan kuliner yang bersifat umum. Relasi dengan masyarakat dilingkungan objek wisata adalah komplementer dan hanya untuk keuntungan materi. Wisata konvensional dapat dilakukan atau didapatkan setiap waktu.

2. Wisata religi memiliki objek wisata yaitu tempat ibadah dan peninggalan sejarah lainnya. Tujuan wisata religi adalah untuk meningkatan spiritual dengan target yaitu aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa atau untuk mendapatkan ketenangan batin. Wisata religi mewajibkan guide untuk menguasai sejarah tokoh, lokasi, atau benda yang menjadi objek wisata. Fasilitas ibadah pada wisata religi hanya pelengkap. Kuliner yang disediakan bersifat umum. Relasi dengan masyarakat bersifat komplementer dan hanya untuk keuntungan materi. Pada wisata religi hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu.
3. Wisata Hallal atau syariah memiliki objek wisata yang luas baik alam, budaya, kuliner, tempat ibadah, dan objek wisata lainnya (tidak ada batasan tertentu). Tujuan dari wisata hallal adalah meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur dengan target untuk memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama. Guide pada wisata hallal harus membuat turis tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Fasilitas ibadah menjadi salah satu unsur utama yang menjadi satu dalam objek pariwisata, selain itu ritual ibadah yang ada menjadi salah satu daya tarik dalam paket wisata. Agenda perjalanan dalam wisata hallal adalah meperhatikan waktu.

Berdasarkan hasil analisis potensi pariwisata, ODTW unggulan yang dapat dikembangkan berada di kawasan minapolitan yaitu Pantai Kuta, Pantai Selong Belanak, dan Pantai Mawun. Potensi tersebut dapat dikembangkan selaras dengan pengembangan potensi komoditas unggulan minapolitan Kabupaten Lombok Tengah yang dapat menunjang wisata hallal Kabupaten Lombok Tenagh yaitu Rumput Laut, Udang Vaname, Ikan Nila, dan Ikan Karper. Perikanan merupakan salah satu sektor yang mudah dikembangkan menjadi wisata hallal,karena pada dasarnya komoditas dari hasil perikanan termasuk hallal, hanya pada proses pengolahan dan pemasaran yang perlu dilakukan monitoring agar tetap hallal.

Berikut merupakan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan pariwisata hallal dari sektor minapolitan Kabupaten Lombok Tengah.

1. Kelembagaan
   a. Mengoptimalkan komunitas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah seperti POKDAKAN,Komunitas Wanita Nelayan, dan lembaga lainnya untuk turut melakukan kegiatan dengan ketentuan wisata hallal.
   b. Memasukan muatan wisata syariah dalam PERDA yang terkait dengan kepariwisataan.
   c. Membentuk lembaga sertifikasi hallal dan pengawas yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan MUI Kabupaten Lombok Tengah.
   d. Menyusun pedoman penyelenggaraan usaha pariwisata yang hallal.
2. Aksesibilitas dan informasi
   a. Melakukan sosialisasi pada masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah terkait wisata hallal di Kabupaten Lombok Tengah

b. Memberikan informasi yang bukan hanya secara langsung melalui sosialisasi namun masyarakat juga dapat mengakses informasi dari website ataupun sumber informasi lainnya yang mempermudah masyarakat.
c. Mempromosikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai destinasi minapolitan hallal tourism pada pasar dan menentukan branding yang tepat.

3. Daya tarik wisata
   a. Menyediakan sarana ibadah dan sarana bersuci yang layak pada setiap objek wisata
4. Akomodasi (hotel)
   a. Menyediakan sarana ibadah yang layak.
   b. Menyediakan sarana bersuci, alat sholat, dan penunjuk arah kiblat pada setiap kamar.
   c. Menyediakan restoran bersetifikat hallal..
5. Restoran dan rumah makan
   a. Menghimbau pengelola restoran dan rumah makan untuk mengikuti sertifikasi hallal MUI.
   b. Memfasilitasi restoran dan rumah makan untuk melakukan sertifikasi MUI.
   c. Menggunakan bahan mentah untuk makanan dari dalam Kabupaten Lombok Tengah khususnya dari hasil laut dan perikanannya.
6. Biro Perjalanan Wisata
   a. Meyediakan paket wisata hallal.
   b. Membuat daftar akomodasi dan restoran hallal.
   c. Ikut mempromosikan wisata hallal kususnya pada sektor minapolitan di Kabupaten Lombok Tengah
7. Pramuwisata
   a. Terdapat pelatihan dan sosialisasi terkait minapolitan hallal tourism.
   b. Menyusun standar kompetensi pramuwisata untuk memfasilitasi wisatawan Muslin.

IV. KESIMPULAN

Potensi sektor perikanan Kabupaten Lombok Tengah baik dari segi SDM baik individu maupun kelompok seperti POKDAKAN, UPR, Wanita Nelayan, segi komoditas unggulan yaitu Rumput Laut, Udang Vaname, Ikan Nila, Ikan Karper, dan Ikan Tongkol dapat digunakan untuk mengembangkan sektor minapolitan juga mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata. Komoditas dan SDM dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan menjadi pengolahan hasil produksi yang dapat menjadi ciri khas Kabupaten Lombok Tengah dengan memperhatikan kehallalan pada setiap proses pengolahan dan pemasaran maka hal tersebut juga dapat mendukung adanya rencana pengembangan wisata Hallal di Kabupaten Lombok Tengah. Pengolahan komoditas unggulan minapolitan dapat dijadikan sebagai sentra pengolahan yang mampu dikembangkan menjadi wisata kuliner.Selain itu, pengembangan *minapolitan hallal tourism* juga didukung oleh potensi pariwisata alam yang dominannya adalah pantai yang berada di kawasan minapolitan.*Minapolitan Hallal Tourism* dapat terlaksana apabila terdapat kerjasama yang baik dari berbagai pihak baik dalam proses pelaksanaan ataupun monitoring dari berbagai aspek.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh (2016). *Sekilas Tentang Wisata Halal.* Diakses pada 6 September 2016, dari alamat http://disbudpar.acehprov.go.id/sekilas-tentang-wisata-halal/

Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka Tahun 2017.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 35 Tahun 2013

Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah, Bidang Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan, November 2015.

Laporan Sektor Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007.

Laporan Studio Perencanaan Wilayah Sektor Minapolitan dan Sektor Pariwisata, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Unversitas Brawijaya, Tahun 2017.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 64 A Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republi Indonesia No. 18 Tahun 2012.

Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tenagh, 2017.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031.

Statistik Perikanan Budidaya Tahun 2011-2016, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah.

SuaraNTB.com (2016). *Lombok Kembali Raih Tiga Juara dalam Ajang "World Halal Tourism Awards" 2016.* Diakses pada 8 Desember 2016, dari alamat www.suarantb.com

Pengembangan Wisata Susur Pantai Berbasis *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA)

S. Trisutomo[1], Mukti Ali[1], Sri Aliah Ekawati[1]
[1]*Prodi PWK Fak. Teknik Universitas. Hasanuddin*

Email: trisutomo@gmail.com

ABSTRAK

Makassar adalah metropolitan, memiliki pantai dan gugusan pulau Spermonde yang potensial sebagai obyek wisata susur pantai. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangkan wisata susur pantai. Mertode analisis pengembangan dilakukan dengan model Multi-Criteria Decision Analyses (MCDA) yaitu integrasi antara analisis SWOT, Analysis Hierarchy Process (AHP), dan analisis kuantitatif. Data primer diperoleh dari pemangku kepentingan yang dipilih secara purposive. Identifikasi unsur internal factor analysis strategic (IFAS) dan external factor analysis strategic (EFAS) dilakukan oleh pemangku kepentingan dan dilanjutkan dengan AHP sehingga diperoleh peringkat dalam IFAS dan EFAS. Pemberian skor berskala Likert 1 sampai 5 masing-masing unsure tersebut menghasilkan rerata, yang kemudian digandakan dengan peringkatnya menghasilkan nilai gabungan kelompok IFAS dan EFAS. Nilai tersebut menghasilkan strategi di Kuadran I yaitu pengembangan ofensif.

Kata kunci: wisata susur pantai, wisata pantai, MCDA, AHP, SWOT

I. PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi salah satu industri penting dengan skala global serta diharapkan tumbuh dua kali lipat dalam dasa warsa terakhir. Dan pantai telah memberikan keunikan fitur sehingga menjadikan tempat yang atraktif untuk dikunjungi (Ghosh, 2011; Kim dan Kim, 1996; Moscardo, 1998). Ditegaskan bahwa *sun, sea, sand* dengan keindahan alam pantainya telah memberikan peluang pertumbuhan ekonomi khusunya penyerapan tenaga kerja sebesar 8.7% (Ghosh: 2011). Atas dasar inilah pengembangan wisata maritim menjadi peluang sangat strategis bagi pembangunan wilayah (Modscardo, 1996; Kim and Kim, 1996; Oktadiyani, dkk, 2015)

Makassar dikenal sebagai kota pantai yang berperan sebagai pusat pertumbuhan untuk kawasan Indonesia timur. Dengan penduduk sekitar 1.769.920 jiwa, kota in berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menurut UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan juga sebagai pusat pertumbuhan untuk metropolitan Maminasata menurut PP 55/2012 tentang Mamminasata. Dengan luas 177,55 km2 berada di Selat Makassar, kota ini memiliki pantai sepanjang 31 km, dilengkapi oleh gugusan pulau-pulau Spermonde yang tersebar sebanyak 13 pulau. Kondisi demikian memperkuat fakta bahwa Makassar adalah kota pantai yang potensial

Trisutomo (2012) telah melakukan penelitian dengan judul Asesmen Visual Wisata Susur Pantai Makassar Menuju Zonasi Wisata Bahari. Penelitian tersebut bertujuan melakukan asesmen terhadap kualitas visual 10 obyek di sepanjang pantai Makassar, yaitu kawasan estuaria di Jembatan Barombong, Pantai Tanjung Bayang, Pantai Akarena, Trans Studio, Masjid Terapung, Anjungan Losari, Hotel Pantai Gapura, Pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar, Depo Pertamina, dan Pelabuhan Tradisional Paotere. Simpulan penelitian menyatakan bahwa kesepuluh obyek tersebut adalah spot Akarena, Anjungan Losari, dan Pelabuhan Tradisional Paotere memperoleh memiliki daya tarik visual dan tiga diantaranya memperoleh peringkat sangat tinggl. Disarankan

untuk dikembangkan sebagai wisata susur pantai (*coastal cruise tourism*). Artikel ini membahas lebih jauh bagaimana dengan 10 spot tersebut dapat dikembangkan menjadi wisata susur pantai.

Wisata susur pantai adalah jenis wisata yang dilakukan dengan cara menikmati keindahan pesisir dari sisi laut dengan cara berlayar serta menyusuri pantai. Berbeda dengan wisata pantai yang selama ini dikenal, yaitu wisata yang menikmati pantai dari sisi darat memandang ke laut. Wisata susur pantai juga bebeda pula dengan *cruise tourism*, yang berlayar antar benua dan samudra dengan *cruise ship* selama beberapa hari bahkan minggu. Wisata susur pantai sebaliknya menikmati keindahan pantai dari sisi laut, memandang ke darat dalam waktu yang relatif pendek. Untuk dapat menikmati keindahan pantai diperlukan alat transportasi, perahu atau kapal.

Wisata susur pantai sudah banyak dilakukan di negara maju, namun di Indonesia belum banyak dikenal. Dengan mempertimbangkan potensi pantai dan gugusan kepulauan Spermonde di Makassar yang eksotik, sebagai pengembangan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep pengembangan strategis wisata susur pantai di Makassar sebagai suatu kegiatan wisata baru.

II. METODE

A. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah kawasan pantai kota Makassar, yang mencakup 10 spot visual di sepanjang pantai Makassar serta perairannya (Gambar 1). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kota Tepian Air (LaKoTA = *Waterfront Planning and Development*, Departmen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.



Gambar 1. Pantai Makassar sebagai Obyek penelitian
Sumber: Trisutomo (2012)

B. Sumber Data

Narasumber sebagai sumber data dipilih dengan maksud tertentu (*purposive sampling*), yaitu memilih dengan pertimbangan keterkaitan dengan pariwisata pantai. Diperoleh 7 narasumber yang mencerminkan pemangku kepentingan pariwisata, yaitu Staf Dinas Pariwisata Kota Makassar, akademisi terkait bidang ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, akademisi terkait Ilmu Pariwisata, LSM pemerhati pesisir, operator perjalanan wisata, tokoh masyarakat pemerhati lingkungan dan nelayan. Secara terpisah mereka diminta mengidentifikasi unsur-unsur kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Kekuatan dan kelemahan

adalah internal factors analisis strategic (IFAS) dan peluang serta ancaman adalah external factors analysis strategic (EFAS) dalam metode SWOT. Dengan tidak mempertemukan mereka dalam satu forum agar lebih obyektif, mereka diminta memberikan penilaian terhadap unsur IFAS dan EFAS tersebut dengan skala Likert skor 1 (sangat buruk) sampai 5 (sangat baik).

C. Metode Analisis

Penelitian ini berbasis pada metode *multi criteria decision analysis* (MCDA) yaitu kombinasi antara SWOT, AHP, dan kuantifikasi penilaian oleh narasumber pemangku kepentingan. Pendekatan dengan SWOT telah banyak digunakan untuk menyusun berbagai strategi pengembangan, misalnya manajemen sampah (Rahmaddin, dkk, 2015), pengembangan kawasan industry (Santosa, dkk, 1998), pengembangan pariwisata (Ayuningtyas dan Djoefran, 2002), dan tourisme (Davis, dkk, 2009), perencanaan pariwisata regional (Davina dan Klodiana, 2014). AHP yang dikenalkan oleh Saaty (2008) diaplikasikan untuk mengukur peringkat atau bobot. Sementara pendekatan dengan MCDA juga telah banyak diaplikasikan untuk pengambilan keputusan, misalnya untuk pemilihan lokasi industry (Ohri, dkk, 2010), penilaian kerentanan pantai (Kasim dan Siregar, 2012), pemeringkatan zona industri (Taibi dan Atmani, 2017), konservasi landuse (Phua dan Minowa, 2005)

D. Tahapan Penelitian

Prosedur dan tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai berikut:

(1) Identifikasi unsur IFAS dan EFAS. Kepada mereka diminta mengidentifikasi unsure IFAS yang mencakup kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), serta faktor analisis eksternal (EFAS) yang mencakup peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*). Untuk menghindari tumpang tindih dan pengulangan, hasil identifikasi IFAS dan EFAS tersebut disederhanakan menjadi 5 faktor dalam masing-masing kelompok.
(2) *Analysis Hierarchy Process* (AHP). Untuk menghitung bobot perbandingan antar unsure dalam IFAS dan EFAS, narasumber diminta untuk membandingkan pasangan antar komponen (*comparative pair wise*) dengan memberikan skor 1, 3, 5, 7, dan 9 sesuai metode AHP menurut (Saaty, 2008). AHP menghasilkan angka peringkat dalam unsur dalam IFAS dan EFAS. Jumlah skor peringkat IFAS maupun EFAS = 1
(3) Meminta para narasumber untuk memberikan skor skala Likert mulai 1 (buruk sekali), 2 (buruk), 3 (sedang)), 4 (baik) sampai 5 (sangat baik) pada unsur IFAS dan EFAS. Hasil penilaian ini kemudian dihitung reratanya
(4) Menghitung nilai total sebagai hasil bobot dikalikan nilai sehingga dioeroleh nilai total IFAS dan EFAS
(5) Nilai total IFAS dan EFAS diaplikasikan untuk memperoleh bagan Kartesian yang menunjukkan strategi pengembangan terpilih

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Faktor IFAS dan EFAS

Tujuh orang narasumber masing-masing mampu mengidentifikasi faktor-faktor IFAS serta EFAS. Dengan penggabungan unsure yang mirim atau berimpitan serta penyederhanaan, dihasilkan 5 unsur di setiap S-W-O-T.

Faktor Kekuatan (S)

(1) Potensi 10 spot sebagai obyek visual
(2) Kenyamanan suasana pantai

(3) Panorama sunset yang menarik
(4) Ombak dan arus yang tenang
(5) Pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) sebagai ikon pantai

Komponen Kelemahan (W)

(6) Belum tersedianya perahu atau kapal untuk susur pantai
(7) Adanya reklamasi yag tak terkendali
(8) Masih terlihat sampah di beberapa spot
(9) Pasangan batu untuk reklamasi ilegal
(10) Kurangnya sabuk hijau mangrove

Komponen Peluang (O)

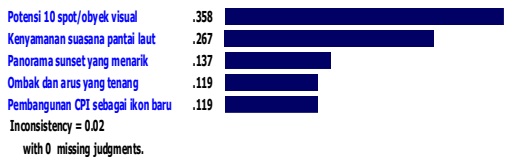
(1) Menginisiasi wisata susur pantai
(2) Promosi wisata susur pantai
(3) Kerjasama dengan kuliner terapung
(4) Atraksi lain sebagai pelengkap
(5) Aksesibel dari jalan menuju pantai

Komponen Ancaman (T)

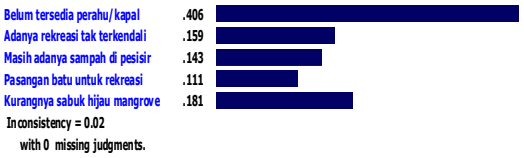
(6) Adanya reklamasi baru
(7) Peningkatan turbiditas perairan
(8) Gangguan maneuver dan alur kapal laut
(9) Bencana akibat perubahan iklim
(10) Pembuangan limbah domestik

B. Penentuan Bobot

AHP menghasilkan bobot peringkat seperti terlihat di Gambar 2AB dan 3AB. Nilai *inconsistency* terbukti sangat kecil (< 0.1) yang berarti penilaian ranking AHP memenuhi syarat.

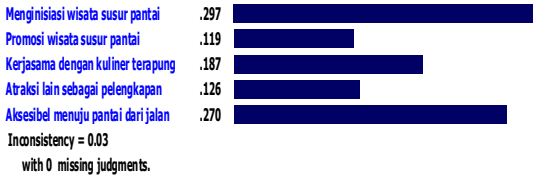


(A)

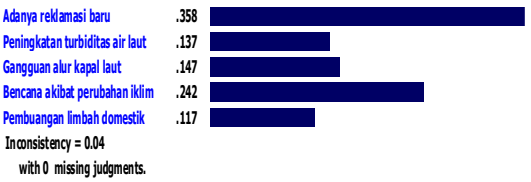


(B)

Gambar 2. Hasil pembobotan unsur IFAS: (A) Kekuatan, dan (B) Kelemahan



(C)



(D)

Gambar 3. Hasil pembobotan unsure EFAS: (A) Peluang, dan (B) Tantangan

Hasil bobot faktor kekuatan dan kelemahan tersebut masih harus disatukan dalam IFAS sehingga bobot = 1; demikian juga pada faktor EFAS seperti tertera Tabel 1.

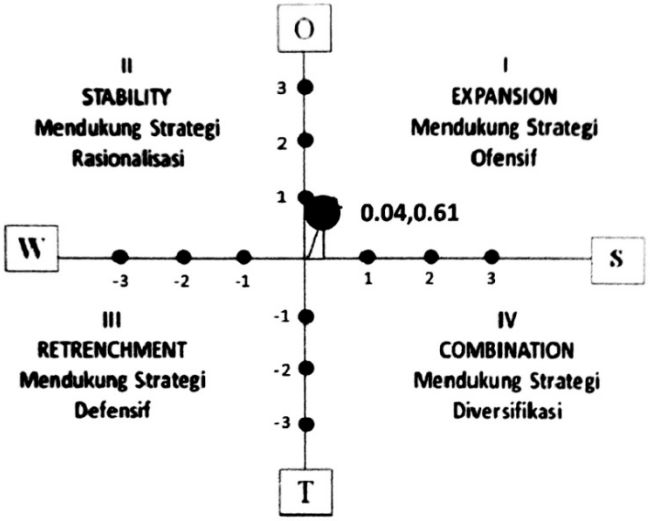
C. Analisis IFAS dan EFAS

Rerata dari *rating* hasil penilaian narasumber untuk masing-masing faktor dalam S-W-O-T dikalikan dengan bobot menghasilkan skor seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Bobot, Rating, dan Skor tiap faktor

	Kekuatan (+)	Bobot	Rating	Total
1	Potensi 10 spot/ obyek visual di sepanjang pantai	0.179	3.71	0.66
2	Kenyamanan suasana dan udara laut	0,134	3.43	0.46
3	Panorama sunset yang menarik	0,068	3.29	0.22
4	Ombak dan arus yang relatif tenang	0.059	3.86	0.23
5	Pembangunan CPI sbg ikon baru	0.060	3.71	0.22
			Jumlah	(+)1.80
	Kelemahan (-)			
1	Belum tersedia perahu/ kapal untuk susur pantai	0.203	3.57	0.72
2	Berlangsungnya reklamasi yang tak terkendali	0.079	3.57	0.28
3	Pesisir masih kotor, outlet kanal dan sampah	0.071	3.29	0.23
4	Kehadiran pasangan batu untuk reklamasi	0.056	3.43	0.19
5	Kurangnya sabuk hijau sepanjang pantai	0.091	3.57	0.32
	Jumlah	1.000		(-)1.76
	Jumlah IFAS (kekuatan – kelemahan)			+0.04

No	**Peluang (+)**			
1	Belum ada wisata susur pantai lain di Makassar	0.149	4.29	0.64
2	Melakukan promosi wisata susur pantai	0.059	4.43	0.26
3	Bekerjasama dengan restoran terapung	0.094	4.29	0.40
4	Atraksi lain di perairan sebagai pelengkap	0.063	4.00	0.25
5	Jaringan jalan yang aksesibel menuju pantai	0.135	4.86	0.66
			Jumlah	(+)2.21
	Ancaman (-)			
1	Kemungkinan adanya reklamasi baru	0.179	3.29	0.59
2	Peningkatan turbiditas air akibat proyek reklamasi	0.069	3.00	0.21
3	Gangguan alur kapal pelabuhan Sukarno-Hatta	0.073	3.29	0.24
4	Ancaman bencana alam akibat perubahan iklim	0.141	2.86	0.40
5	Pembuangan limbah domestik	0.048	3.43	0.16
	Jumlah	1,00		(-)1.60
	Jumlah EFAS (Peluang – Ancaman)			+ 0.61



Gambar 4. Hasil Analisis SWOT

Model strategi pengembangan menurut Ayuningtyas dan Djoefran (2002) serta Goranczewski dan Puciato (2010), dalam analisis SWOT dengan kombinasi SO-WO-ST-WT menghasilkan 4 kuadran. Kuadran I (S+O+), Kuadran II (W-O+), Kuadran III (W-T-), dan Kuadran IV (S+T-). Strategi pengembangan di Kuadran I berarti memilih strategi mendorong pertumbuhan, mencakup pertumbuhan yang (*stable growth strategy*) sampai dengan mendukung strategi ofensif. Kuadran II berarti strategi stabilitas, mendukung rasionalisasi, Kuadran III berarti strategi bertahan (*survival*), dan Kuadran IV berarti srategi penganekaragaman (*diversification*).

Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS di Tabel 1, nilai IFAS total nilai = 0.04 (positif) dan IFAS total nilai 0.61 (positif). Ini berarti bahwa strategi IFAS maupun EFAS berada di Kuadran I seperti di Gambar 4 yang berarti strategi mendorong pertumbuhan ofensif sampai dengan pertumbuhan cepat (*rapid growth strategy*)

D. Diskusi Strategi Pengembangan

Berdasarkan analisis MCDA - kombinasi antara SWOT, AHP, dan asesmen oleh pemangku kepentingan, menghasilkan strategi pengembangan di Kuadran I untuk wisata susur pantai, yaitu strategi pertumbuhan karena memiliki kekuatan dan peluang. Berdasarkan kekuatan dan peluang tersebut, rincian strategi adalah kombinasi antara kekuatan dan peluang, dirumuskan sebagai berikut:

(1) Mengembangkan potensi 10 spot di pesisir. Trisutomo (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan adanya 10 spot obyek wisata di sepanjang pantai Makassar yaitu kawasan Estuaria di Jembatan Barombong, Pantai Tanjung Bayang, Pantai Akarena, Trans Studio, Masjid Terapung, Anjungan Losari, Hotel Pantai Gapura, Pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar, Depo Pertamina, dan Pelabuhan Tradisional Paotere. Peluang bagi kesepuluh spot tersebut untuk dapat dikembangkan menjadi *visual points of interest* bagi wisatawan melalui susur pantai. Ketika melakukan wisata susur pantai, kapal atau perahu dapat berhenti beberapa saat untuk menikmati keindahan visual, bahkan untuk 3 spot utama - Estuaria Barombong, Anjungan Losari, Pelabuhan Tradisional Paoatere - kapal pesiar atau perahu wisata susur pantai dapat menurunkan atau menaikkan wisatawan ((Davina dan Klodiana, 2014)

(2) Mempertahankan kenyamanan suasana dan atmosfir laut. Gosh (2011) menyatakan bahwa pantai memberikan fitur yang unik dan menjadikan tempat yang atraktif bagi pariwisata (Guteres, 2014).

(3) Memanfaatkan panorama *sunset*. Posisi geografis kota Makassar yang menghadap kearah barat memberikan anugrah yaitu matahari terbenam. Ini adalah keadaan yang potensial menjadi keunggulan wisata untuk sore dan malam hari. Restoran di pantai atau yang terapung, permainan lighting atau lampion, ruang publik, adalah beberapa contoh memanfaatkan potensi *sunset*.

(4) Ombak yang relatif tenang. Keberadaan ombak dan pesisir yang tenang akan mendukung dan member kesempatan untuk kegiatan susur pantai. Ketenangan ombak sebagai kekuatan ini dapat dilengkapi dengan atraksi lain misalnya *boating, flying fox, banana boat, parasailing*, yang akan menjadi obyek visual bagi wisatawan susur pantai.

(5) Pembangunan kawasan Center Point of Indonesia (CPI) di depan Anjungan Losari. Di kawasan ini akan dibangun Wisma Negara, Masjid 100 Kubah, ruang public, pasir putih, dan permukiman. Ini adalah kekuatan yang dapat menjadi tambahan obyek visual yang dapat dinikmati oleh wisata susur pantai. Meski demikian, pembangunan haruslah tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekologi pantai yang sangat sensitif terhadap perubahan (Davis, 1998; Ghosh, 2011; Vitkiene, 2012)

IV. KESIMPULAN

(1) Penelitian dengan berbasis MCDA ini menyimpulkan strategi pengembangan wisata susur pantai Makassar dengan cara mendorong strategi pertumbuhan ofensif melalui penggabungan kekuatan dan peluang

(2) Strategi tersebut melengkapi dan memperkuat potensi 10 spot obyek di pantai Makassar sebagai obyek visual yaitu Estuaria di Jembatan Barombong, Pantai Tanjung Bayang, Pantai Akarena, Trans Studio, Masjid Terapung, Anjungan Losari, Hotel Pantai Gapura, Pelabuhan Sukarno-Hatta Makassar, Depo Pertamina, dan Pelabuhan Tradisional Paotere. Tiap spot masih harus dikaji perencanaannya lebih mendalam

(3) Wisata susur pantai dapat menjadi model wisata baru yang belum banyak dilakukan, dengan melengkapi infrastruktur terkait

(4) Penelitian ini masih terbatas untuk pengembangan strategik yang konseptual. Masih harus dilanjutkan dengan penelitian lain dengan mempertimbangkan variabel lingkungan, ekonomi, social, serta perencanaan infrastruktur dan rute wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, R. A., dan Djoefran, S. H. 2010. Strategi Pegembangan Pariwisata di Sepanjang Sungai Kapus Kota Pontianak. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 10 No 1 Tahun 2002. 1-13

Davis, D. 1998. Coastal tourism development: guiding principles for sustainable development. *Journal of Coastal Development.* 1(3).

Davina, N., Klodiana, G. 2014. Use of SWOT Nalysis as a Planning Tool in Regional Tourism Planning in Vlora Region Albania. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 2(14), 1-9

Ghosh, T. 2011. Coastal tourism: opportunity and sustainability. *Journal of Sustainable Development.* 4(6), 67-71

Goranczewski, B., Puciato, D. 2010. SWOT Analysis in the Formulation of Tourism Development Srategies for Destinations. *Tourism* 20(2), 45-53

Guterres, C., D., S. 2014. Pengembangan daya tarik wisata berbasis masyarakat di Pantai Vatuvou, Distrik Liquisa, Timor Leste. *Jurnal Master Pariwisata*. 1(1).

Kasim, F., Siregar, V., P. 2012. Penilaian kerentanan pantai menggunakan metode integrasi CVI-MCA studi kasus pantai indramayu. *Forum Geografi*. 26(1).

Kim, S.G. and Kim, Y.J.E. 1996. Overview of Coastal and Marine Tourism in Korea. *in the Journal of Tourism Studies, pp. 46-53, Vol. 7, No. 2.*

Moscardo, G. 1998. Interpretation and Sustainable Tourism: Fuctions, Examples and Principles. *The Journal of Tourism Studies, pp. 2-13, Vol. 9, No. 1.*

Oktadiyani, P., Iwanuddin, Helwinsyah. 2015. Strategi pengembangan pariwisata alam Taman wisata alam wera. *Jurnal WASIAN*. 2(1).

Ohri, A., Singh, P., K., Singh, P., K. 2010. Spatial multi criteria analysis for sitting Industries. *International Journal of Industrial Engineering Research and Development*. 1(1).

Phua, M., Minowa, M. 2005. A GIS-based Multi-Criteria Decision Making Approach to forest conservation planning at a landscape scale: a case study in the Kinabalu Area, Sabah, Malaysia. *Landscape And Urban Planning.* 71: 207-222.

Putong, I. 2003. Teknik Pemanafaatan Analisis SWOT Tanpa Skala Industri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* No. 2 Jilid 8, 2003, hal. 65-71

Rahmaddin, MY1., Hidayat, T., Yanuwiadi, B., Suyadi. 2015. Social Engineering Strategy of Waste Management in River Banks of Martapura. *Resources and Environment* 2015, 5(3): 97-105

Santosa, B., Suryoni., Rachmansyah, A., Soemarno. 2014. Strategy Development of Western East Java Industrial Area. *American Journal of Sociology Research* 2014, 4(2):42-52

Saaty, T. L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Sevices Sciences, Vol. 1, No. 1, 2008, 83-98*

Santoso, B., et al. 2014. Strategy development of western east java industrial area. *American Journal of Sociological Reseach.* 4(2).

Taibi, A., Atmani, B. 2017. Multi-criteria Analysis Coupled with GIS and IF... THEN... Rules for Rangking Industrial Zones. *International Journal of Applied Engineering Research*. 12(1).

Trisutomo, S. 2012. Asesmen Visual Wisata Susur Pantai Makassar. URI: http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/6420

Vitkiene, E. 2012. Long-term Principle Concept for Sustainable Development of Coastal Zone Management. *Regional Formation and Development Studies. 8*(3).

KEBUTUHAN PENANGANANPENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI UTARA

Veronica A. Kumurur
Prodi Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado
Email:vkumurur@gmail.com

ABSTRAK

Kecamatan Kotamobagu Barat adalah wilayah yang memiliki wilayah kawasan kumuh dengan luas 198,98 ha atau 70,48% dari luas seluruh wilayah kawasan kumuh Kota Kotamobagu. Berbagai permasalahan permukiman, seperti: kepadatan bangunan yang tinggi, ketidakteraturan bangunan, ketidaksesuaian dengan peruntukkan lahan di bantaran sungai, status lahan illegal di bantaran sungai, dan masih banyak bangunan tidak memiliki sertifikat ada di kawasan ini. Jumlah penduduk 8510 Jiwa, kepadatan penduduk 82 jiwa/Ha dengan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang, dengan tingkat ketidakteraturan bangunan sekitar 78%, tidak memiliki sistem pengamanan bahaya kebakaran, sistem drainase, pelayanan air minum, pengolahan limbah, aksesibilitas lingkungan, serta pengelolaan persampahan yang belum memenuhi persyaratan teknis. Data primer diperoleh dengan cara melakukan survei lapangan dengan cara "by name by address", sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu serta data-data dari kecamatan Kotamobagu Barat dan kelurahan Gogagoman serta dari Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Metode analisis menggunakan analisis deskriptif, dengan metode pembobotan yangberdasarkan kondisi faktual dan isu strategis kota/perkotaan dan kebijakan penanganan permukiman kumuh perkotaan Kota Kotamobagu. Kesimpulan bahwa kondisi kekumuhan Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Molinow dan Kelurahan Mogolaing berada pada tingkat kumuh ringan. Sedangkan kebutuhan penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di wilayah kecamatan Kotamobagu Barat, adalah: i) Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan Permukiman; ii) Pengaturan dan pemanfataan lahan; iii) Pengaturan dan pemanfataan lahan pada kawasan permukiman; dan iv) Pembinaan masyarakat terkait rumah layak huni.

Katakunci: Permukiman, kumuh, perkotaan, Kotamobagu, Sulawesi Utara

I. PENDAHULUAN

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No 1/2011). Permukiman kumuh adalah permukiman spontan, sama seperti lingkungan manusia, tidak terjadi begitu saja; mereka dirancang dalam arti bahwa perubahan yang terarah dilakukan terhadap lingkungan fisik melalui serangkaian pilihan di antara alternatif yang ada (Rapoport, 1988, Fernandez, 2012).Urbanisasi yang cepat, salah satu perubahan sosio-ekonomi terbesar selama lima dekade terakhir ini, telah menyebabkan berkembangnya jenis permukiman kumuh baru, pertumbuhan perumahan liar dan informal berkembang pesat di sekitar kota di negara berkembang *(United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)* (2003)).

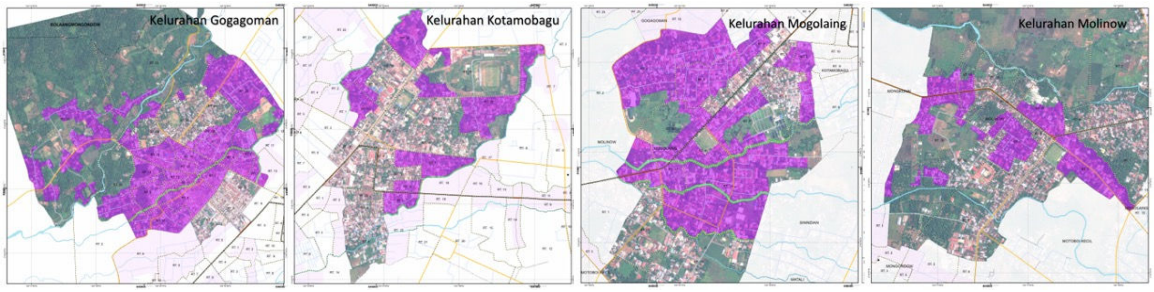
Kota Kotamobagu, salah satu dari empat kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Wilayah Kota Kotamobagu terdiri atas 4 kecamatan, yaitu: kecamatan Kotamobagu Timur, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kecamatan Kotamobagu Utara dan Kecamatan Kotamobagu Selatan. Berdasarkan SK Walikota Kotamobagu Nomor 93 tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Kotamobagu, telah ditetapkan 7 lokasi yang berada pada 7 kelurahan yang tersebar pada dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Kotamobagu Timur dan Kotamobagu Barat. Hasil verifikasi luas kawasan permukiman kumuh di Kota Kotamobagu telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kotamobagu bersama tim

penyusun RP2KPKP pada tahun 2016, dan diperoleh luas total wilayah kawasan permukiman kumuh adalah 282,315 ha. Wilayah kecamatan Kotamobagu barat memiliki kawasan permukiman kumuh terluas, yaitu: 198,98 ha atau 70,48% dari luas seluruh wilayah kawasan kumuh Kota Kotamobagu (Dokumen RP2KPKP Kota Kotamobagu 2016).Kawasan permukiman kumuh ini berada pada Kecamatan Kotamobagu Barat, di mana Wilayah kecamatan Kotamobagu Barat adalah pusat kegiatan perkotaan. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan kondisi kekumuhan Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Molinou dan Kelurahan Mogolaing dan menentukan kebutuhan penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di wilayah kecamatan Kotamobagu Barat .

II. METODE

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada kawasan permukiman di Kelurahan Gogagoman (86,5 ha), Kelurahan Molinow (20,54 ha), dan Kelurahan Mogolaing (61,29 ha) berada pada Kecamatan Kotamobagu Barat (Gambar 1).



Gambar 1. Kawasan Permukiman di Wilayah Kecaatan Kotamobagu Barat

B. Pengumpulan Data

Menyiapkan peta dasar dengan kedalaman informasi skala 1 : 5.000 yang akan digunakan sebagai peta dasar untuk menentukan lokasi survei di kawasan permukiman kumuh kecamatan Kotamobagu Barat (Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Molinou dan Kelurahan Mogolaing). Data primer yang diambil adalah tujuh 7 kriteria penentuan perumahan kumuh perkotaan Kota Kotamobagu menurut PerMen PU No.02/PRT/2016, yaitu: 1) bangunan gedung; 2) jalan lingkungan; 3) penyediaan air minum; 4) drainase lingkungan; 5) pengelolaan air limbah; 6) pengelolaan persampahan; dan 7) proteksi kebakaran.Data primer diambil mengukur dan memotret baik secara horisontal maupun dari udara. Dalam menentukan strategi pencegahan permukiman kumuh, maka dilakukan dengan cara melakukan *Focus Group Discussion (FGD*). Data-data sekunder yang diperoleh dari pemerintah setempat (BAPPEDA Kota Kotamobagu, BPS Kota Kotamobagu), serta data dari masyarakat dan lembaga Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Kotamobagu.

C. Analisis

Untuk menentukan kondisi kekumuhan pada 4 lokasi kawasan permukiman menggunakan 7 kriteria/indikator dan aspek pertimbangan lain serta legalitas lahan (Tabel 1). Kemudian melakukan pembobotan *(scoring)* pada masing-masing kawasan kumuh di kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing dan kelurahan Molinow. Strategi pencegahan ditentukan berdasarkan kondisi eksisting yang ada serta kajian kebijakan yang akan dilaksanakan pada lokasi kawasan kumuh tersebut.

Tabel 1. Aspek/Kriteria dan Indikator penentuan Kekumuhan suatu kawasan permukiman

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR
A	**FISIK**		
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL meliputi pengaturan blok bangunan, ketinggian, dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
		Tingkat Kepadatan Bangunan	• KDB melebihi ketentuan RDTR dan/atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu : - Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥250 unit/Ha - Untuk kota sedang dan kota kecil ≥200 unit/Ha
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • Keselamatan bangunan gedung (BG) • Kenyamanan BG • Kemudahan BG
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2x setahun
		Ketidaktersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan permukiman, yaitu saluran tersie dan/atau saluran lokal
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Terknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/deomestik, komunal maupun terpusat
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana • Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik • Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu • Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga • Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R (*Reduce, Recycle, and Reuse*) pada skala lingkungan • Gerobak sampak dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan • Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut • Perwadahan dan pemilahan domestik • Pengumpulan lingkungan • Pengangkutan lingkungan • Pengolahan lingkungan
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan berkala
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi yaitu • Pasokan air • Jalan lingkungan • Sarana komunikasi • Data sistem proteksi kebakaran lingkungan, dan • Bangunan pos kebakaran
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi yaitu • Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • Mobil pompa • Mobil tangga sesuai kebutuhan, dan • Peralatan pendukung lainnya
B	**IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN**		
8	Pertimbangan Lain	Nilai strategis lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada • Fungsi strategis kabupaten/kota, atau • Bukan fungsi strategis kabupaten/kota
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi • Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150jiwa/ha • Sedang yaitu kepadatan penduduk di bawah 151-200jiwa/ha • Tinggi yaitu kepadatan penduduk di bawah 201-400jiwa/ha • Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di bawah di atas 400jiwa/ha
		Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa • Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat
C	**LEGALITAS LAHAN**		
9	Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan lahan	• Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa • Kepemilikan sendiri dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah, atau

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR
A	**FISIK**		
			• Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemiliki tanah dengan pihak lain
		Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK)

Sumber: Diadopsi dari Buku Panduan Pelaksanaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukian Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) (2016)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

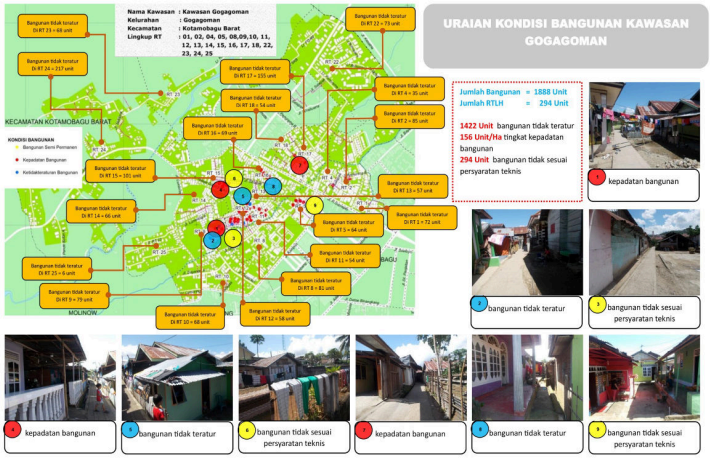
A. Kondisi Fisik

Kondisi Bangunan Gedung

Kondisi bangunan dilihat dari ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bagunan dan ketidaksesuaian persyarakat teknis, diperoleh bahwa kawasan permukiman di Kelurahan Gogagoman dan kelurahan Molinow memiliki 76%-100% bangunan yang tidak memiliki keteraturan atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona. Sedangkan kawasan permukiman kumuh kelurahan Kotamobagu dan Kelurahan Mogolaing memiliki 51%-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. Kawasan permukimankumuh di kelurahan Gogagoman memiliki 51%-75% bangunan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Kondisi Jalan Lingkungan

Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Gogagoman, Keluraha Kotamobagu, Kelurahan Mogolaing dan Kelurahan Molinow memiliki 25%-50% area yang belum terlayani jaringan jalan lingkungan. 25%-50% area permukiman kumuh di kelurahan Gogaagoman memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk.



Gambar 2. Kondisi Bangunan di Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Gogagoman

Kondisi Penyediaan Air Minum

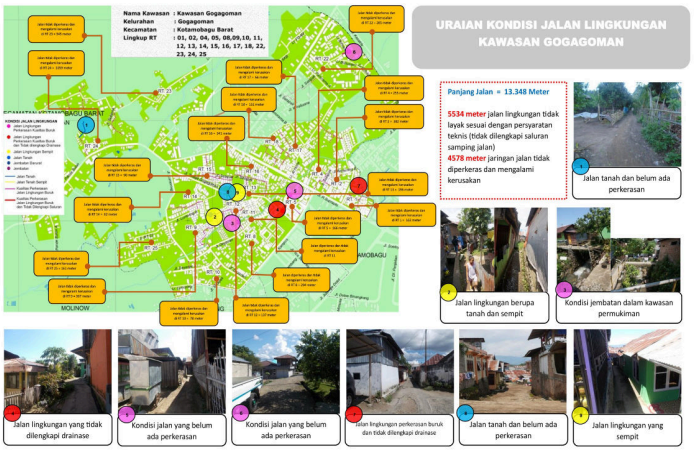
Seluruh wilayah kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing dan kelurahan Molinow tersedia akses air minum yang aman. Namun 51% - 75% populasi masyarakat pada kawasan permukiman di wilayah kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing dan kelurahan Molinow tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya atau kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Kondisi Drainase Lingkungan

Kawasan permukiman di kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing dan kelurahan Molinow51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan atau tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal. Namun, hanya kawasan permukiman kelurahan Mogolaing yang memiliki 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun pusat atau 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis.



Gambar 2. Kondisi Jalan Lingkungan di Kawasan Kelurahan Gogagoman

Kondisi Pengelolaan Sampah

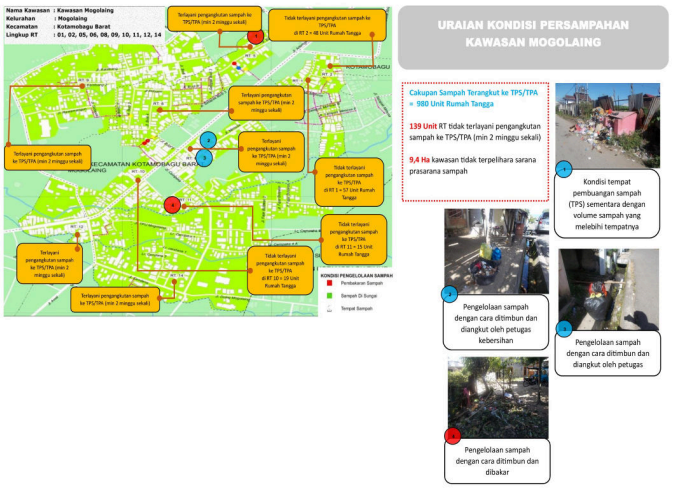
Sampah/limbah dihasilkan baik oleh manusia, hewan, atau tumbuhan, atau dari proses alami atau buatan apapun. Limbah membutuhkan banyak bentuk, seperti limbah padat perkotaan, limbah biodegradable, limbah nonbiodegradable, limbah kimia, limbah hasil pembongkaran bangunan, limbah elektronik, limbah biomedis, air limbah, lumpur, limbah beracun, limbah industri, limbah makanan, dan seterusnya (Kumar, 2016). Terdapat 51%-75% area kawasan permukiman di Kelurahan Kotamobagu dan Kelurahan Molinow memiliki sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sedangkan 25% - 50% area permukiman di Kelurahan Gogagoman dan Kelurahan Mogolaing memiliki sarana dan prasarana(sarpras) pengelolaan persampahan yang belum memenuhi persyaratan teknis. Permukiman di kelurahan Kotamobagu dan kelurahan Molinow memiliki 51% - 75% area sistem persampahan tidak sesuai standar, sedangkan 25% - 50% area permukiman di Kelurahan Gogagoman dan Kelurahan Mogolaing memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar.Keempat area permukiman kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing dan kelurahan Molinow tidak merawat sarana dan prasarana pengelolaan persampahan atau 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara.



Gambar 3. Kondisi Pengolahan air limbah di Kawasan Mogolaing

Kondisi Proteksi Kebakaran

Kawasan permukiman di kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing, dan kelurahan Molinow sama sekali tidak tersedia prasarana dan prasarana proteksi kebakaran atau 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran.



Gambar 4. Kondisi Persampahan di Kawasan Permukiman Mogolaing

B. Legalitas Lahan

Legalitas yang dimaksud disini adalah kejelasan status dan penguasaan lahan dan yang dimaksud dengan kejelasan terhadap status atau keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain. Sedangkan penguasaan lahan berupa keterangan status tanah lainnya yang sah; atau kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah. Lahan permukiman di kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing dan kelurahan Molinow sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain dan sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah/Rencana Detail Tata Ruang.

C. Nilai Strategis Lokasi, Kependudukan dan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya (Pertimbangan Lain)

Permukiman kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing berada pada lokasi yang memiliki nilai strategis karena lokasinya berada pada fungsi strategis kota Kotamobagu. Hanya lokasi permukiman di kelurahan Molinow berada pada lokasi yang memiliki fungsi strategis kota Kotamobagu. Pertimbangan lain lagi adalah kepadatan penduduk ≥400 jiwa/ha berada pada kawasan permukiman kelurahan Gogagoman. Sedangkan kepadatan penduduk di kelurahan Kotamobagu, kelurahan Mogolaing dan kelurahan Molinow memiliki ≤ 150 jiwa/ha. Sedangkan lokasi wilayah kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu, dan kelurahan Mogolaing memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara dan hanya wilayah kelurahan Molinow tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara.

D. Hasil penilaian Tingkat Kekumuhan

Dari hasil penilaian kekumuhan kawasan permukiman, diperoleh keempat wilayah permukiman memiliki tingkat kekumuhan ringan. Hal ini disebabkan posisi tiga wilayah (kelurahan Gogagoman, kelurahan Kotamobagu dan Kelurahan Mogolaing) berada pada lokasi tanah legal *(slum)* dan sesuai peruntukkan. Terdapat 2 lingkungan pada kelurahan Gogagoman berada di wilayah sempadan sungai, yang secara fungsi, kawasan ini berfungsi sebagai kawasan lindung, namun belum ada penetapan kawasan lindung pada wilayah.

Tabel 2. Hasil Penilaian Kekumuhan Kawasan Permukiman Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Mogolaing, dan Kelurahan Molinow

No	Penilaian Kekumuhan	Kawasan Permukiman			
		Gogagoman	Kotamobagu	Mogolaing	Molinow
1	Tingkat Kekumuhan				
	Kumuh Berat (71-95)				
	Kumuh Sedang (45-70)				
	Kumuh Ringan (19-44)	X	X	X	X
2	Jumlah Nilai Aspek Pertimbangan Lain	15	11	11	3
3	Pertimbangan Lain				
	Tinggi (11-15)	X	X	X	
	Sedang (6-10)				
	Rendah (1-5)				X
4	Legalitas Lahan				
	Legal (Nilai +)	X	X	X	X
	Tidak Legal (-)	X	X	X	X

E. Kebutuhan Pola Penanganan/Pencegahan

Pola Penanganan Permukiman Kumuh menurut (Anonim 2015), dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:1) Pencegahan dan 2) Peningkatan Kualitas.

Pola penanganan pencegahan terdiri atas: 1)Pengawasandan Pengendalian: Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2)Pemberdayaan Masyarakat: Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pola penanganan peningkatan kualitas terdiri atas: 1)Pemugaran: Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni; 2)Peremajaan: Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat; 3)Pemukiman kembali: Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan Rusunawa)

Tabel 3. Kebutuhan Penanganan/Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh pada wilayah Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Mogolaing, dan Kelurahan Molinow

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA/PERKOTAAN	LOKASI	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN/PENCEGAHAN
1	Munculnya kantong-kantong kumuh Akibat perkembangan yangtidak terkendali di kawasan pusat kota dan sekitarnya	Kawasan Permukiman Gogagoman, Kotamobagu, Mogolaing	Penataan kawasan permukiman perkotaan	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan Permukiman
2	Alih fungsi lahan(konversi) menjadi fungsi permukiman akibat demand yang cukup tinggi cenderung berkembang pada wilayah limitasi	Seluruh Kawasan kumuh	Membatasi perkembangan permukiman di wilayah Limitasi	Pengaturan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian Ruang diKawasan Lindung
3	Berkembangnya permukiman di lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya untuk di daerah bantaran sungai	Kawasan Permukiman di bantaran Sungai (kawasan Gogagoman, Kotamobagu, dan Mogolaing)	Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya	Penegakan aturan Perijinan
4	Pembangunan permukiman yang Sprawl, perumahan swadaya (dibangun olah masyarakat yang sifatnya mengisi lahan kosong cenderung tumbuh secara	Kawasan Gogoman, Kawasan Mogolaing	Penataan dan pengendalian permukiman	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) Rumah Sederhana Sehat

NO.	KONDISI FAKTUAL DAN ISU STRATEGIS KOTA/PERKOTAAN	LOKASI	KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH HASIL OVERVIEW	KEBUTUHAN PENANGANAN/PENCEGAHAN
	parsial, tidak teratur, tidak hirarkis			
5	Daerah rawan banjir ,	Kawasan Gogagoman	Penataan kawasan permukiman yang terkena banjir/limpasan air hujan	Pengaturan dan pemanfataan lahan di kawasan banjir
6	Tidak adanya land banking oleh Pemerintah Kota	Kawasan Gogoman, Kawasan Mogolaing	Penataan dan pengendalian permukiman	Pengaturan dan pemanfataan lahan
7	Kondisi fisik tanah yang berada di daerah rawan gerakan tanah		Penataan dan pengendalian permukiman	Pembinaan masyarakat dalam untuk membangun permukiman yang memperhatikan kondisi daerah rawan bencana
8	Garis sempadan bangunan	Semua kawasan kumuh	Penataan dan pengendalian permukiman	Pengaturan dan pemanfataan lahan pada kawasan permukiman
9	Kondisi rumah tidak layak huni	Semua kawasan kumuh	Penataan dan pengendalian permukiman	Pembinaan masyarakat terkait rumah layak huni

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, diperolah kesimpulan, sebagai berikut:

a. Kondisi kekumuhan Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Molinow dan Kelurahan Mogolaing berada pada tingkat kumuh ringan.
b. Sedangkan kebutuhan penanganan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di wilayah kecamatan Kotamobagu Barat, adalah: i) Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan Permukiman; ii) Pengaturan dan pemanfataan lahan; iii) Pengaturan dan pemanfataan lahan pada kawasan permukiman; dan iv) Pembinaan masyarakat terkait rumah layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anonim (2016). Panduan Pelaksanaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukian Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Cipta Karya. Jakarta

Anonim (2015). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh–Panduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Cipta Karya. Jakarta

Kunar, S. (2016). *Municipal Solid Waste Management in Developing Countries.* CRC Press Taylor & Francis Group. Parkway NS

United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (2003) The *Challenge Of Slums - Global Report On Human Settlements 2003*.Earthscan Publications Ltd London and Sterling, VA 2003

Asana Cita Yasa. 2016. Dokumen RP2KPKP Kota Kotamobagu. Pemerintah Kota Kotamobagu (tidak dipublikasikan).

Jurnal :

Fernandez Rosa F. 2012. *Physical and Spatial Characteristics of Slum Territories Vulnerable to Natural Disasters.* Les Cahiers de l'Afrique de l'Est, 2011, 44, p.5-p.22. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00751670 (diakses 12 Agustus 2017)

Analisis Pengaruh Peluang Usaha Dan Peningkatan Pendapatan Terhadap Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Simalungun

Dr. Sarintan Efratani Damanik, M.Si
Universitas Simalungun
E-mail: pwkusi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peluang usaha, pengaruh pendapatan terhadap pengembangan tujuan wisata di Kabupaten Simalungun. Jenis Penelitian adalah penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah 464 orang pedagang di kawasan pariwisata di Kabupaten Simalungun pengambilan sampel dilakukan secara unsur sengaja (purposive sampling) yang diambil masing-masing 35 pedagang setiap wilayah pariwista. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang usaha berpengaruh terhadap pengembangan tujuan wisata sebesar 68%. Peningkatan pendapatan terhadap pengembangan tujuan wisata berpengaruh sebesar 88,3%. Peluang usaha dan pendapatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengembangan daerah tujuan wisata sebesar 86,5%. Kesimpulan penelitian peluang usaha untuk menunjang pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan, kekayaan alam dan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki daerah serta dikelola oleh masing-masing daerah sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wisata.

Kata Kunci : Peluang Usaha, Pendapatan, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

I. PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan terpilihnya kebudayaan, kepribadian nasional dan kelestarian lingkungan hidup. Sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sector pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik.

Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanjaannya, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan *(Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *Final Demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk berproduksi memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain.

Sumatera Utara mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar bagaikan harta terpendam yang belum tengah dikembangi, terlebih-lebih lokasi dan berbagai jenis pariwisata di Kabupaten Simalungun. Dari berbagai informasi yang diperoleh bahwa Kabupaten Simalungun memiliki keindahan panorama alam, kekayaan fauna dan flora yang mampu mempesona wisatawan, namun belum dieksploitasi dengan sentuhan kaidah wisata sehingga belum banyak mendapat kunjungan wisatawan

Kabupaten Simalungun memiliki banyak lokasi pariwisata, baik yang telah dikenal oleh masyarakat maupun yang belum dikenal dan masih bersifat potensial serta belum tersentuh pembangunan sebagaimana layaknya suatu lokasi pariwisata. Sumber Daya Alam kepariwisataan yang dimiliki sangat beragam meliputi budaya, keindahan alam sehingga diyakini berpotensi mendukung peningkatan kemakmuran masyarakat Simalungun. Kategori jenis wisata yang paling banyak adalah wisata bahari Danau Toba. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis Pengaruh Peluang Usaha dan Peningkatan Pendapatan Terhadap Pengembangan Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Simalungun

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variabel-variabel pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi-variasi pada suatu atau faktor lain. Untuk memperoleh informasi dari responden, pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peluang Usaha

Peluang usaha masyarakat untuk mengembangkan usahanya sangat setuju sebanyak 108 sebesar 23,28%, setuju 144 sebesar 31,03%, kurang setuju 160 sebesar 34,48%, tidak setuju 47 sebesar 10,13% dan masyarakat sangat tidak setuju sebanyak 5 atau sebesar 1,08%.

Pengaruh peluang usaha terhadap pengembangan tujuan wisata, dalam hal ini R yang menunjukkan korelasi .824[a] . *R Square* (R^2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi, besar R^2 sebesar .680 artinya bahwa peluang usaha berpengaruh sebesar 68,0% terhadap pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Simalungun.

Penelusuran peluang usaha perpedoman kepada kebijakan pembangunan daerah setempat yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Peluang usaha yang dapat dilakukan dan dikembangkan bepedoman pada potensi wilayah tujuan wisata

B. Pendapatan Masyarakat Pedagang

Analisis peningkatan pendapatan masyarakat sangat setuju sebanyak 101 sebesar 43,53% diikuti setuju 122 sebesar 52,59%, kurang setuju 9 sebesar 3,88%, tidak setuju dan sangat tidak setuju 0 %.

Peningkatan pendapatan terhadap pengembangan tujuan wisata, dalam hal ini R yang menunjukkan korelasi .939[a] . *R Square* (R^2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi, besar R^2 sebesar .883 artinya bahwa peluang usaha berpengaruh sebesar 88,3% terhadap pengembangan daerah tujuan wisata di Kabupaten Simalungun.

Pendapatan dari usaha hasil kerja di usaha pariwisata merupakan dampak sekunder, sedangkan dampak primrnya berupa pendapatan bisnis organisasi atau perusahaan serta pendapatan devsa Negara. Bagi perusahaan, pendapatan primer inilah dipakai untuk membiayai dan uah pekerjanya serta berupa deviden bagi pemilik usaha.

C. *Peluang Usaha dan Pendapatan Masyarakat Pedagang terhadap Pengembangan* Kawasan Tujuan Obyek Wisata di Kabupaten Simalungun

Pengembangan kawasan tujuan wisata masyarakat sangat setuju sebanyak 73 sebesar 31,47 % diikuti setuju 81 sebesar 34,91%, kurang setuju 50 sebesar 21,55%, tidak setuju 28 sebesar 12,07 % dan sangat tidak setuju 0 %.

Pengaruh peluang usaha dan pendapatan secara bersama-sama terhadap pengembangan daerah tujuan wisata persamaan regresi yang didapat dalam peneitian ini adalah sebagai berikut :

$Y = 25.835 + 0{,}115X_1 + 0.536X_2$

Pengembangan daerah wisata akan menjadi prospek yang menjanjikan dimasa yang akan datang dan menjadi pusat perhatian pembangunan terutama sektor pariwisata. Sementara dilihat dari trend pertumbuhan wilayah ada kecenderungan jumlah kota semakin meningkat dari masa ke masa karena adanya arus modernisasi.

IV. PENGEMBANGAN WILAYAH DAERAH WISATA

Pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan secara nasional, regional atau propinsi dan kawasan ataupun obyek. Perencanaan secara nasional disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berbagai issues dan fenomena yang berkembang. Sementara itu pengembangan pariwisata regional atau lokal didasarkan pada regulasi di daerah serta persepsi dan preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru yang memberdayakan masyarakat. Proses perencanaan pengembangan pariwisata yang mengkoordinasikan pemikiran nasional dan pemikiran masyarakat akan menghasilkan perencanaan terpadu. Secara langsung perencanaan ini akan menjadi *participation planning*.

Perencanaan Nasional Pengembangan Pariwisata menghasilkan strukturisasi pengembangan kawasan konservasi. Perubahan yang mendasar adalah konsep kawasan sebagai fungsi utama pelestarian. Sementara pemanfaatan hanya dilakukan terhadap aspek jasa estetika, pengetahuan (pendidikan dan penelitian) terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati filosofi, pemanfaatan jalur untuk *tracking* dan *adventuring*

V. PEMBAHASAN

Potensi yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata berbeda-beda, tergantung pada pengelolaan dan daya dukung baik sarana dan prasarana, sosial ekonomi beserta masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Untuk itu penting penilaian potensi objek tujuan wisata segera dilakukan agar arah pengembangannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pengembangan yang tidak memperhatikan potensi yang ada akan memberikan dampak negatif, misalnya berkurangnya kunjungan wisatawan sebagai akibat turunnyadaya tarik objek wisata sehingga mempengaruhi omzet penjualan bagi masyarakat pedagang atau peluang usaha sangat rendah. Oleh karena itu perlu perhatian dari pemerintah sangat berpengaruh terhadap berkembang tidaknya suatu objek wisata sehingga peluang usaha bagi masyarakat semakin tinggi. Peluang usaha yang dapat dilakukan di daerah tujuan wisata Kabpaten Simalungun adalah sebuah kesempatan untuk mengembangkan usaha dengan melihat hal-hal positif yang ada untuk dimanfaatkan dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Dengan adanya peluang berarti adanya hal-hal positif yang mengarah pada kemajuan atau perkembangan suatu usaha yang sedang dibangun atau yang baru dimulai dibangun dengan melihat prosfek kedepan usaha nantinya akan menjadi lebih baik dan meningkatnya pendapatan usaha tersebut. Ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu

harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan dan kebutuhan pasar sehingga usaha tersebut dapat bertahan lama.

Dampak positif pariwisata yaitu peningkatan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, kepemilikan harta benda meningkat, dan dampak negatif adalah kepemilikan usaha dan konrol dari pihak luar, dan harga-harga meningkat. Perlu diperatikan oleh para pedagang agar memiliki sikap terbuka untuk menerima perbedaan. Bagi pihak pengelola agar lebih aktif memberikan penyuluhan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan secara nasional, regional atau propinsi dan kawasan ataupun obyek. Perencanaan secara nasional disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berbagai issues dan fenomena yang berkembang. Sementara itu pengembangan pariwisata regional atau lokal didasarkan pada regulasi di daerah serta persepsi dan preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru yang memberdayakan masyarakat. Agar daerah tujuan wisata dapat berkembang dan kepariwisataan berkembang maju dalam perencanaan pengembangan dan monitoring dapat menjalin hubungan kemitraan dengan masyarakat dan lembaga pendidikan atau para pemerhati.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) peluang usaha untuk menunjang pengembangan kepariwisataan berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya, dengan memanfaatkan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam, (2) meningkatnya pendapatan masyarakat secara otomatis meningkatkan pembangunan dan pengembangan suatu daerah (3) Pengembangan daerah tujuan wisata dipergunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi suatu objek wisata dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar objek dan daya tarik wiata maupun bagi pemerintah. Saran (1) pemerintah Kabupaten Simalungun, sebaiknya memperbaiki kondisi jalan yang menjadi akses utama bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata, mengadakan variasi yang telah menjadi daya tarik wisatawan sehingga pengunjung memiliki keinginan untuk kembali lagi (2) masyarakat sekitar, menyambut pengunjung dengan baik, menyediakan keperluan yang sekiranya diperlukan wisatawan dan kebersihan lingkungan aerah wisata.

DAFTAR PUSTAKA

A.Yoeti, Oka. 2005. *Perencanaan Strategi Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Gafur, Juliafitri Dj. 2008. “Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung (*tesis*)”. Medan : Universitas Sumatera Utara

Hikmat, Harry 1995. “ Paradigma Pembangunan dan Implikasi dalam perencanaan Sosial” Jakarta: Universitas Indonesia.

——————,1996. “ Pembangunan Sosial yang Berpusat pada Rakyat: Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis.”Makalah, Bandung: UNPAD

H.K. Nurdin, (ed), *Perubahan Nilai-nilai di Indonesia,* Alumni, Bandung, 1983

Inskeep, Edward, 1991, *Taourism Palinning : Integrated and Sustainable development Approach,* Van Nostrand Reinhold, New York

Mappi, Andi. S. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta : Balai Pustaka

Paramitasari, Isna D. 2010. *Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal Dikawasan Dieng Kabupaten Wonosobo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Pitana, I Gede & Putu G, Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

Spillane, J James. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Kanisius. Yogyakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 tentang Kepariwisataan

MODEL NEIGHBORHOOD PADA RUANG PUBLIK PERKOTAAN DITINJAU DARI PERILAKU DAN AKTIVITAS DI MELTING POT KOTA JEMBER

Dewi Junita Koesoemawati[1], Hari Yuswadi[2]
[1]Fakultas Teknik Universitas Jember
[2]FISIP Universitas Jember
Email: dewi.teknik@unej.ac.id

Model neighborhood space menjadi fenomena yang menarik dan amat penting untuk diteliti karena neighborhood space khususnya pada ruang publik perkotaan sebagai wadah masyarakat perkotaan dalam melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial didukung adanya potensi kohesi sosial sebagai modal perilaku dan aktivitas masyarakat di melting pot kota Jember. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara synchronic reading. Teknik survei menggunakan static snapshots sebagai salah satu teknik survei yang digunakan untuk mencatat aktivitas pergerakan orang dan aktivitas statis orang terkait dengan penggunaan ruang. Hasil penelitian berupa model neighborhood berbasis perilaku dan aktivitas pada ruang pubik perkotaan di melting pot kota Jember. Peranan ibu rumah tangga dan anak-anak mempengaruhi intensitas interaksi sosial pada ruang publik dikarenakan faktor ekonomi dan keterbatasan lahan.

Kata Kunci: neighborhood, ruang publik, perilaku dan aktivitas

I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teori *neighborhood unit* muncul pertama kalinya pada tahun 1929 dari pemikiran Clarence Arthur Perry. *Neighborhood unit* adalah ruang kota bersuasana "kampung halaman" yang dibuat untuk mengembalikan social community yang sehat dalam kehidupan urban (Prabowo, 2010).

Untuk mendukung terbentuknya *neighborhood* perlu tersedianya sarana dan prasarana yang mewadahi berlangsungnya aktivitas interaksi sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Interaksi sosial memiliki aturan dan aturan itu dapat dilihat melalui dimensi ruang dan dimensi waktu. Dimensi ruang dijelaskan Edward Twitchell Hall (1966) tentang jarak dan ruang serta dimensi waktu.

Ruang publik mempunyai peran penting dalam mewadahi berlangsungnya interaksi sosial. Jalan, taman bermain dan plaza adalah tempat yang mempunyai intensitas tinggi dalam melakukan aktivitas interaksi sosial (Hartati, 2012). Carr dkk (1992) membagi tipologi ruang publik menjadi 11 tipe, yaitu: taman publik, square dan Plaza, memorial, pasar, jalan, taman bermain, ruang terbuka komunitas, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruang spontan dalam lingkungan hunian dan tepi air. Jan Gehl (2004), mengatakan bahwa ruang publik memiliki tiga fungsi: sebagai tempat bertemu, tempat berdagang, dan tempat lalu lintas. Ruang publik dipengaruhi oleh tiga unsur selain unsur fisiknya yaitu manusia sebagai pelaku, kegiatan dan pikiran manusia (Purwanto, 2007). Faktor lain yang mempengaruhi terbentuknya *neighborhood* pada ruang publik adalah fasilitas yang ada sebagai salah satu aspek fisik. Aspek non fisik adalah masyarakat yang beraktivitas melakukan interaksi sosial

tersebut. Pemanfaatan ruang publik tidak terlepas dari aktivitas masyarakatnya. Masyarakat yang melakukan interaksi sosial dalam ruang publik mempengaruhi terbentuknya model *neighborhood*.

Kota Jember meliputi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sumbersari, Kaliwates dan Patrang, sebagai *melting pot* Kabupaten Jember. *Melting pot* kota Jember merupakan tempat bertemunya etnis Madura dan etnis Jawa, yang dalam kurun waktu lama melakukan asimilasi melalui ikatan pernikahan. Proses asimilasi tersebut membentuk *hybrid* pendalungan (Hari Yuswadi, 2001; Ayu Sutarto, 2006). Masyarakat pendalungan menempati *melting pot* kampung kota. Titik-titik pertemuan akibat dari aktivitas bersama banyak dijumpai di kota Jember, salah satunya adalah alun-alun, sebagai ruang untuk melakukan komukasi langsung dengan kerabat/teman.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini adalah:

1. Aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan ruang publik
2. Pola interaksi sosial dalam ruang publik
3. Model neighborhood pada ruang publik

1.3. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pihak perencana dan penentu kebijakan tentang pola *neighborhood space* pada ruang publik kota Jember, sebagai gambaran dalam memberikan fasilitas pada ruang public.

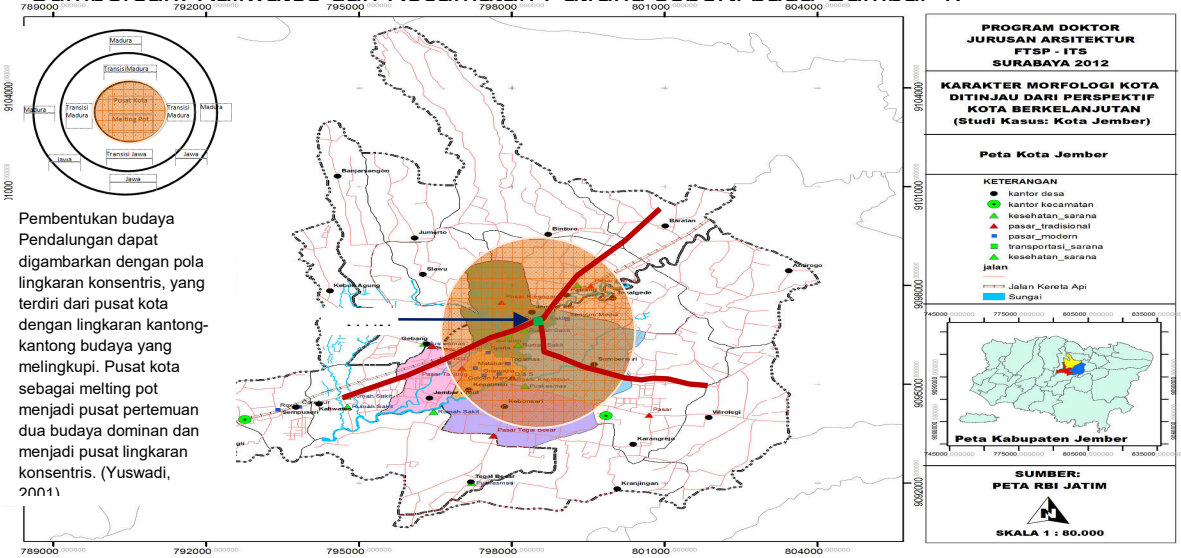
1.4. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui model *neighborhood* berbasis perilaku dan aktivitas pada ruang pubik perkotaan di melting pot kota Jember.

II.METODE

Lokasi penelitian berada di melting pot kota Jember yang terdiri dari Kecamatan Sumbersari, Kaliwates dan Kecamatan Patrang seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kota Jember (Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari)

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunaakan deskriptif kualitatif dengan cara *synchronic reading*. Teknik survey menggunakan static snapshots untuk mencatat aktivitas pergerakan orang dan aktivitas statis orang terkait dengan penggunaan ruang.

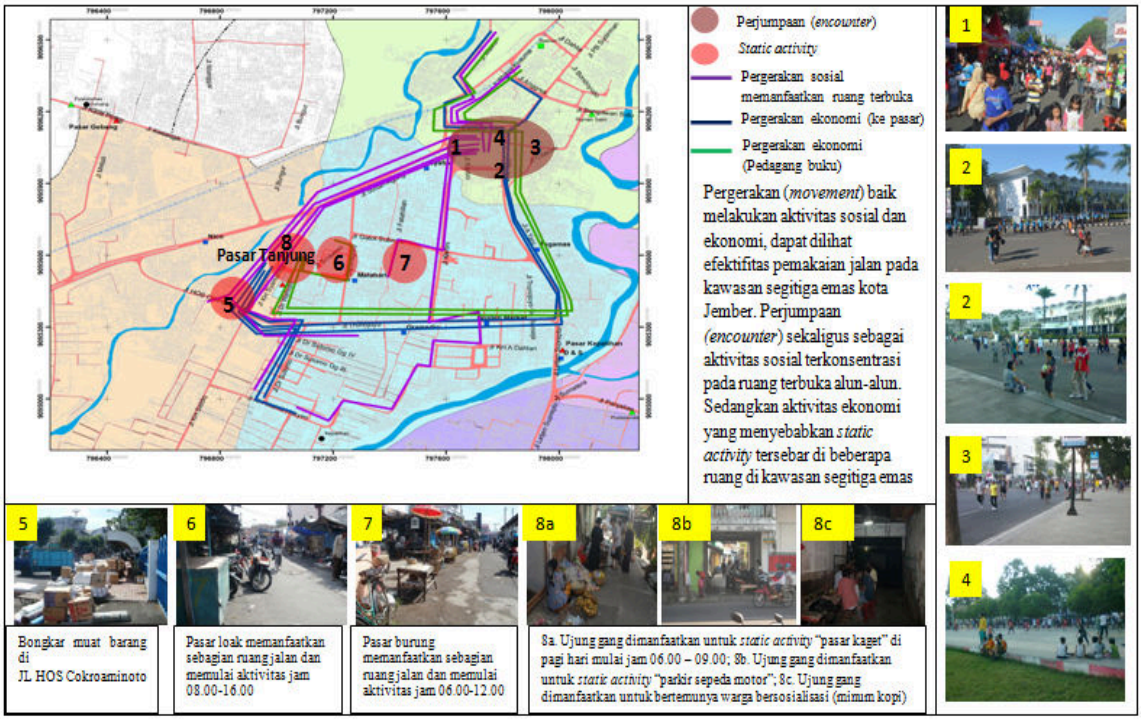
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survey, ada beberapa ruang publik yang disebabkan oleh aktivitas dan pergerakan masyarakat pendalungan di *melting pot* kota Jember dapat dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Fungsi Ruang Publik

No	Ruang Komunal	Fungsi Tempat Bertemu	Fungsi Berdagang (Ekonomi)	Fungsi Lalu Lintas	Fungsi Estetika	Fungsi Sosial
1	Alun-alun	v	v		v	v
2	Pasar Loak	v	v	v		
3	Pasar Burung	v	v	v		
4	Pasar Kaget	v	v	v		
5	Pasar Krempyeng	v	v	v		
6	Jual Makanan Minuman di ujung gang	v	v	v		

Ruang publik berbasis kohesi sosial banyak dijumpai di kota Jember, sebagai ruang untuk melakukan komunikasi langsung dengan kerabat/teman. Ruang publik ini terbentuk adanya aktivitas bertemunya beberapa orang yang dilakukan secara terus menerus. Aktivitas yang dilakukan bisa bersifat ekonomi dan sosial baik bersifat *static activity* maupun dimanis activity, seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Titik-titik Aktivitas Berbasis Kohesi Sosial Membentuk Ruang Publik

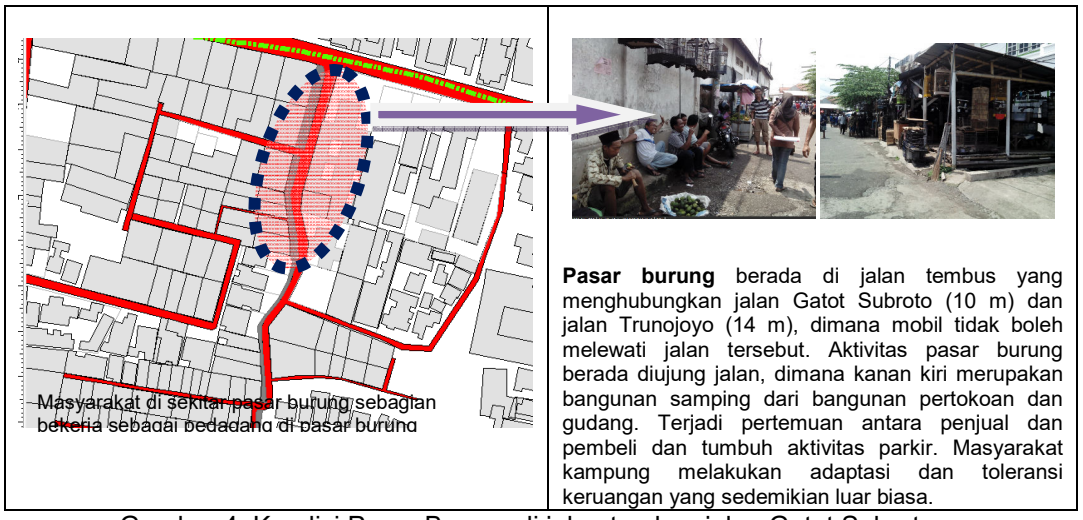
Pada gambar 2 no 1,2,3,4 menunjukkan fungsi ruang publik alun-alun untuk aktivitas rekreasi pada *car free day* dan aktivitas olahraga, khususnya pada pagi hari atau pada hari-hari tertentu, sehingga bersifat *dynamic activity*. Pasar loak pada Gambar 2 di no 6 menempati lokasi di jalan Sulawesi. Jalan Sulawei merupakan jalan tembus, tetapi mobil tidak boleh melalui jalan tersebut. Jalan Sulawesi berada di belakang mall matahari. Terdapat aktivitas yang berlangsung menetap, sehingga bersifat *static activity*.



Gambar 3. Kondisi Pasar Loak di jalan Sulawesi

Pasar burung menempati lokasi di jalan tembus dari jalan Gatot Subroto ke jalan Trunojoyo (pertokoan). dimana mobil tidak boleh melalui jalan tersebut, dapat dilihat

pada gambar 4.3. Kegiatan yang terjadi adalah tempat orang melakukan transaksi jual beli burung, atau hanya tempat orang ngobrol dengan temannya yang jual burung di tempat tersebut juga adanya aktivitas parkir. Solidaritas transpasial terjadi pada ruas tersebut.



Gambar 4. Kondisi Pasar Burung di jalan tembus jalan Gatot Subroto

Kegiatan tersebut di atas dibangkitkan karena adanya pergerakan akibat adanya perbedaan guna lahan yaitu dari guna lahan permukiman ke tempat kerja/tempat rekreasi kota. Pergerakan yang terjadi akan menimbulkan *Encounter* (perjumpaan) pada ruang-ruang yang nyaman untuk dilakukan pertemuan. *Encounter* merupakan wujud dari interaksi sosial, memandu orang yang berjalan di sekitar untuk ikut terlibat aktivitas di tempat itu. Pada masyarakat pendalungan, tidak hanya memanfaatkan ruang hanya untuk interaksi sosial, berjumpa dengan tetangga atau saudara tetapi membangkitkan untuk melakukan *statis activity*.

Encounter pada masyarakat pendalungan dibedakan:

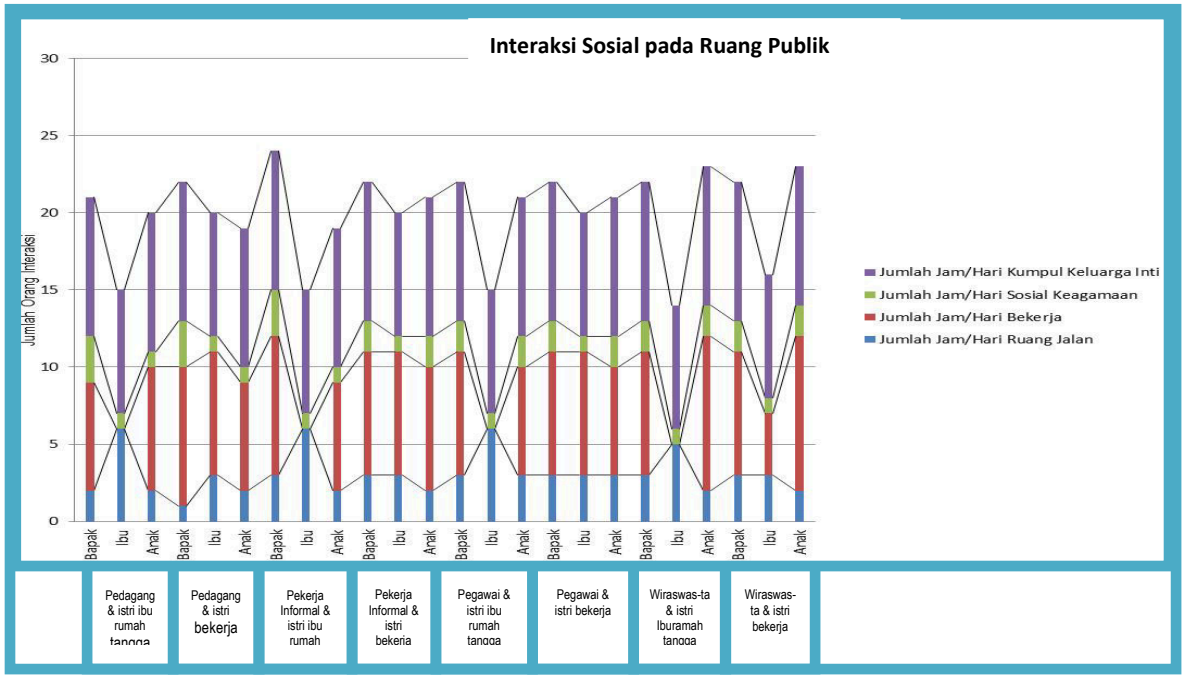
1. *Encounter* yang memanfaatkan ruang terbuka alun-alun sebagai pusat tempat aktivitas olahraga, rekreasi, ngobrol dengan teman atau saudara pada hari-hari tertentu seperti *car free day*, sehingga membangkitkan adanya *static activity.*
2. *Encounter* yang memanfaatkan ruang jalan, seperti ujung-ujung gang atau ujung jalan yang awalnya hanya sebagai tempat nyaman untuk ngobrol akhirnya dimanfaatkan sebagai *static activity*. Sebagai contoh pasar loak, pasar burung yang berada di ujung jalan, sedangkan pertemuan orang di gang-gang membangkitkan *static activity* untuk jualan makanan dan minuman di ujung gang. Kondisi ruang jalan atau ruang gang yang dipakai untuk melakukan pertemuan adalah ruang yang tidak boleh dilewati oleh mobil dan hanya bisa dilewati sepeda motor atau pejalan kaki.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ruang publik sebagai salah satu wujud fisik kohesi sosial dapat dijelaskan sebagai berikut.

***Pertama*,** ruang publik adalah ruang yang terbentuk secara spontan oleh masyarakat karena adanya aktivitas interaksi untuk merepresentasikan karakter budaya masyarakatnya dan secara fungsional bisa berfungsi ekonomi, sosial, rekreasi dan fungsi lingkungan sebagai akibat dari kondisi kepadatan hunian yang tinggi dan keterbatasan ruang yang dimilikinya.

Kedua, kondisi keterbatasan lahan pada permukiman kampung-kota, telah mendorong masyarakat untuk menyiasati pola-pola penggunaan ruang/lahan untuk kegiatan kemasyarakatan mereka. Karakteristik penggunaan ruang publik secara fisik sangat dipengaruhi oleh keterbatasan ruang, tingkat kepadatan penghuni, lingkungan yang tumbuh yang umumnya "*unplanned*", sosial ekonomi masyarakat, dan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan.

Pemanfaatan ruang publik tersebut tidak terlepas dari aktivitas masyarakatnya. Identifikasi aktivitas dilakukan untuk mengetahui pola aktivitas dan pergerakan yang dilakukan masyarakat pendhalungan, sehingga dapat diketahui waktu kebersamaannya dan sekaligus diketahui pergerakannya. Pola aktivitas berdasarkan waktu dan tempat disamping untuk mengetahui waktu kebersamaan masyarakat juga untuk menggambarkan karakter memanfaatkan ruang publik. Interaksi sosial tidak hanya dipengaruhi oleh ruang dan waktu saja, tetapi dipengaruhi juga oleh mobilitas sosial. Pada kasus di *meltong pot* kota Jember ibu rumah tangga mempunyai pengaruh yang kuat dalam tingginya interaksi sosial. Proses adaptasi interaksi sosial dari kedekatan interaksi antar kerabat/teman dikarenakan faktor ekonomi dan keterbatasan lahan. Interaksi yang dikaitkan dengan ruang dan waktu menunjukkan bahwa interaksi sosial pada masyarakat pendalungan banyak dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak seperti ditunjukkan pada Gambar 5. Ruang jalan yang membentuk ruang publik tidak hanya sebagai jalur sirkulasi saja, tetapi juga difungsikan secara aspek sosial dan aspek ekonomi.



Gambar 5 Interaksi Sosial pada Ruang Publik (Sumber: Survei Kuisioner, 2017)

IV.KESIMPULAN

Terbentuknya ruang publik karena adanya aktivitas bertemunya beberapa orang yang dilakukan secara terus menerus. Aktivitas yang dilakukan bisa bersifat ekonomi dan sosial. Proses adaptasi interaksi sosial dari kedekatan interaksi antar kerabat/teman dikarenakan faktor ekonomi dan keterbatasan lahan. interaksi sosial pada masyarakat pendalungan banyak dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Carr, S., Francis, Mark., Rivlin, Leanne G. & Stone, Andrew M. (1992). *Public Space*, Cambridge University Press. Cambridge.

Gehl, Jan (2004), Lively Attractive and Safe Cities-bur how?, New Urbanism and Beyond, Stockholm.

Hartati, Lisa (2012). Tata Ruang Publik Kota Wisata Cibubur sebagai Sebuah Neighborhood. Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur. FTUI. Jakarta

Hall, Edward Twitchell (1966), *Theory of Proxemics,* NY. Doubleday & company, Inc.

Hall, Edward Twitchell (1966), *The Hidden Dimention*, NY. Doubleday & company, Inc. 1966:110-120)

Prabowo, Agus (2010). Neighborhood Unit. http://membacaruang.com/neighborhood-unit/2011. diakses tanggal 4 September 2017

Sutarto, A. (2006), "Overview of the Community Pendalungan", *Papers Browse supplying cultures*, History of the Center for Research and Traditional Values. Yogyakarta.

Yuswadi, H. (2001), "Community Pendalungan Jember - Inter-Ethnic Cultural Hybridization Pattern", *Journal of Social and Political Culture (JSBP) – Vol I, No. 1, (Nopember 2001), LKPK dan LKPM* – FISIP Universitas Jember.

Strategi Prioritas Pengembangan Ekowisata Taman Nasional Baluran Jawa Timur

Luh Putu Suciati[1] dan Anggriawan Dwi Cahya Putra[1]
[1]Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jember, Jember Jawa Timur
e-mail : suciati.faperta@unej.ac.id

ABSTRAK

Taman Nasional Baluran memiliki beberapa obyek dan daya tarik wisata alam yang cukup beragam, terdiri dari kombinasi berbagai bentang alam mulai dari ekosistem laut hingga pegunungan, savana, dan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan. Pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan membutuhkan langkah-langkah penting untuk mencegah atau mengurangi terjadinya dampak negatif melalui perumusan strategi pengelolaan yang bersinergi dengan masyarakat daerah penyangga. Berdasarkan peran penting Taman Nasional Baluran dari sisi sosial, ekonomi dan tata lingkungan, maka penelitian ini diarahkan untuk melakukan karakteristik ekowisata di Taman Nasional Baluran dan prioritas strategi pengelolaan ekowisata di kawasan Taman Nasional Baluran. Metode penelitian menggunakan analisis skoring dan AHP (analytical Hierarki process). Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ekowisata di Taman Nasional Baluran sebagai wisata alam memiliki keunikan dan kekhasan yang berpotensi besar sebagai destinasi wisata di Jawa Timur. Hal tersebut didukung oleh ekosistem, infrastruktur dan aspek sosial budaya dikategorikan baik, sedangkan aspek kelembagaan dikategorikan kurang baik. Pengelolaan potensi ekowisata di Taman Nasional Baluran perlu memberi prioritas pada aspek sosial. Kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan melibatkan kelompok masyarakatat dalam pengelolaannya ekowisata. Stakeholder yang berperan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan ekowisata berkelanjutan yang pertama adalah pihak Taman Nasiona Baluran itu sendiri, kelompok masyarakat desa penyangga dan juga Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo. Ketiga stakeholder ini merupakan stakeholder yang perlu untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan ekowisata di kawasan Taman Nasional Baluran.

Kata kunci: Taman Nasional Baluran, Ekowisata, Strategi Prioritas

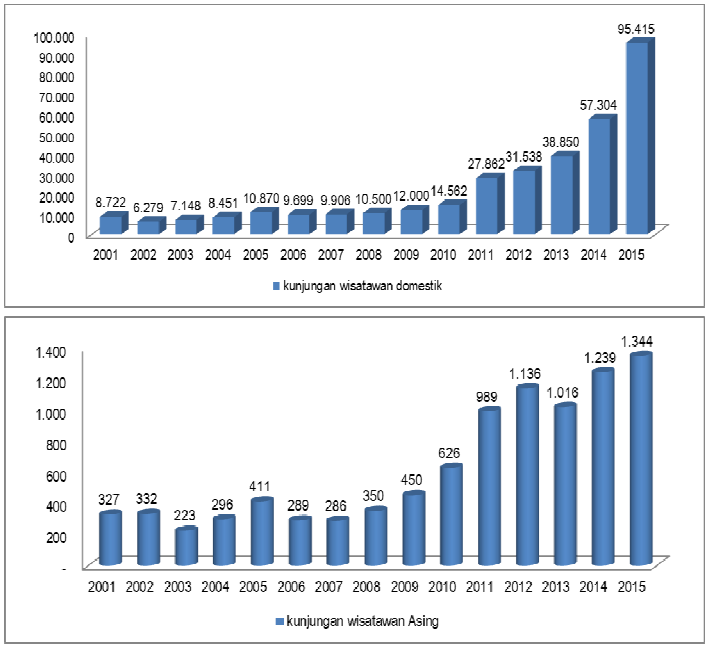
I. PENDAHULUAN

Taman Nasional Baluran merupakan salah satu kawasan konservasi di Kabupaten Situbondo yang berada pada ujung timur Provinnsi Jawa Timur. Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna dan terkenal dengan sebutan secuil Afrika di Jawa. Ekosistem di TN Baluran memiliki beragam manfaat baik manfaat bersifat *tangible* (dalam pemanfaatan skala terbatas) maupun manfaat yang bersifat *intangible*, berupa produk jasa lingkungan, seperti udara bersih dan pemandangan alam. Kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang dan waktu yang sama, sehingga diperlukan suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur pengalokasian sumberdaya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Taman Nasional Baluran memiliki beberapa obyek dan daya tarik wisata alam yang cukup beragam, terdiri dari kombinasi berbagai bentang alam mulai dari ekosistem laut hingga pegunungan, savana, dan keanekaragaman jenis satwa dan tumbuhan. Beberapa lokasi di Taman Nasional Baluran juga sering dikunjungi wisatawan dan masyarakat untuk berbagai keperluan terutama yang dimanfaatkan sebagai daerah tujuan wisata.

Secara umum tujuan pengembangan taman nasional diutamakan untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. Fakta dilapangan menunjukkan adanya kebutuhan untuk pemanfaatan sumberdaya taman nasional agar lebihberdaya guna bagi masyarakat sekitar agar dapat mengurangi potensi kerusakan lingkungan. Kegiatan pemanfaatan tersebut jika tanpa pengelolaan yang bijaksana dapat menjadi tekanan terhadap keberadaan taman nasional yang dikhawatirkan dapat mengancam kelestarian dan keberlanjutan.

Keberadaan Taman Nasional (TN) sebagai kawasan konservasi dianggap sebagai kawasan yang kurang produktif secara ekonomi karena keterbatasan informasi nilai potensi ekonomi sumberdaya dalam kawasan TN selain hasil kayu, non kayu dan beberapa kegiatan wisata alam yang hanya diminati oleh kalangan masyarakat tertentu. Kegiatan konservasi kawasan TN seringkali dianggap sebagai kegiatan yang menghabiskan biaya tanpa hasil keuntungan ekonomi yang diperoleh secara nyata. Oleh karena itu diperlukan dirumuskan strategi pengelolaan potensi Taman Nasional melalui optimalisasi ekowisata yang mensinergikan peran pemerintah khususnya Balai Taman Nasional, pemerintah daerah dan masyarakat penyangga di sekitarnya.

Beberapa destinasi ekowisata di Taman Nasional Baluran sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu tujuan wisata alam di ujung timur Jawa Timur yang khas. Keragaman tipe vegetasi savana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan minat khusus sumberdaya alam. Namun demikian, untuk mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati untuk kegiatan ekowisata memerlukan pengelolaan yang tepat agar fungsi konservasi (ekologi), fungsi ekonomi dan fungis sosial (pendayagunaan masyarakat penyangga) dapat berjalan selaras. Berikut perkembangan jumlah kunjungan wisata domestic dan asing di Taman Nasional Baluran.



Gambar 1. Jumlah kunjungan Wisatawan Domestik dan Asing ke Taman Nasional Baluran

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mengindikasikan bahwa aspek ekowisata sangat penting untuk dikelola dengan baik. Saat ini, Kecenderungan perkembangan dunia pariwisata mulai mengalami pergeseran ke pariwisata lingkungan *(ecotourism),* dimana keaslian potensi kekayaan alam dan peran serta masyarakat setempat dibutuhkan. Pergeseran paradigm dari pariwisata lama (*mass tourism)* ke pariwisata baru (*Alternative Tourism)* telah mendorong pelaku pariwisata semakin menyadari eksistensi ekosistem sebagai bagian dari kegiatan wisatanya. Mereka menyadari betapa pentingnya keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam bagi kehidupan generasi mendatang. Perkembangan pariwisata dengan konsep *back to nature* menyebabkan adanya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kegiatan wisata. Namun, pengembangan pariwisata ini harus diupayakan tetap pada koridor pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya alam dan lingkungan tetap tersedia bagi generasi yang akan datang (Setiawan, E. 2013).

Gejala peningkatan kunjungan wisatawan terebrut juga merupakan indikasi bawa ekowisata di Indonesia telah dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Peran sebagai motor penggerak ekonomi menjadi alasan utama selain merupakan kegiatan untuk mengurangi angka pengangguran. Kegiatan ekowisata mempunyai trickle-down effect ke sektor lain seperti industri kerajinan, makanan, perhotelan, biro wisata sehingga secara diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Demikian halnya *dengan k*eberadaaan TN Baluran yang juga menjadi tumpuan penghidupan masyarakat desa penyangga Taman Nasional dan sekitarnya. Berdasarkan peran penting Taman Nasional Baluran dari sisi sosial, ekonomi dan tata lingkungan, maka perlu dirumuskan strategi agar arah pengembangan taman nasional dapat berkelanjutan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

II. METODE

A. Metode Pengumpulan data dan Sampling

Pengambilan sampel untuk melihat karakteristik ekowisata menggunakan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi berdasarkan informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan (Martadiredja dan Sarwono, 2008). Pengumpulan data primer dilakukan berdasarkan wawancara menggunakan kuisioner, observasi dan foto hasil pengamatan (dokumenter). Wawancara dan observasi ditujukan untuk mengetahui karakteristik ekowisata di Taman Nasional Baluran dan persepsi *Stakeholder* tentang strategi tata kelola ekowisata di Taman Nasional Baluran.

Pengumpulan data skunder dilakukan melalui penelusuran arsip Taman Nasional Baluran, Profil Desa Wonorejo, Sumberwaru, dan Sumberanyar. Data sekunder digunakan untuk diskripsi umum Taman Nasional Baluran, sumberdaya alam, flora, fauna, sejarah, kebudayaan masyarakat setempat, adat istiadat serta jumlah dan karakteristik pengunjung.

B. Metode Analisis Data

B.1. Analisis Skoring Karakteristik Ekowisata di Taman Nasional Baluran

Karakteristik ekowisata di Taman Nasional Baluran dilakukan melalui studi pustaka, hasil observasi lapang dan wawancara menggunakan kuisioner. Metode pengumpulan data melalui observasi untuk menghasilkan diskripsi dari interaksi antar stakeholder.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan skoring untuk mengukur karakteristik ekowisata. Berikut indikator kriteria karakteristik ekowisata sesuai kriteria pengembangan ekowisata dari Direktorat Produk Pariwisata, Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia.

Tabel. 1. Aspek dan Kriteria Ekowisata

No	Aspek	Kriteria
1.	Ekosistem (lingkungan)	Menggunakan teknologi ramah lingkungan (listrik tenaga surya, mikrohidro, biogas, dll.). (1-4)
		Ekowisata mendorong masyarakat mendukung dan mengembangkan upaya konservasi. (1-4)
2.	Infrastruktur	Fasilitas pendukung tidak merusak ekosistem yang unik dan rentan. (1-4)
		Rancangan fasilitas umum sesuai tradisi lokal dan masyarakat lokal terlibat proses perencanaan dan pembangunan (1-4)
3.	Kelembagaan	kemitraan antara masyarakat dengan *Tour Operator* untuk memasarkan dan mempromosikan produk ekowisata (1-4)
		Mendorong"*ecotourism conservancies*" atau kawasan ekowisata sebagai kawasan peruntukan khusus yang pengelolaannya diberikan kepada organisasi masyarakat yang berkompeten. (1-4)
		Ekowisata mendorong ketersediaan *homestay* dan regulasi yang mengatur standar kelayakan *homestay*. (1-4)
		Ekowisata mendorong prosedur sertifikasi pemandu sesuai kondisi lokasi wisata. (1-4)
4.	Sosial budaya pendukung atraksi	Edukasi tentang budaya setempat dan konservasi untuk para turis/tamu menjadi bagian dari paket ekowisata. (1-4)
		Kegiatan ekowisata beriringan dengan aktivitas meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat tentang upaya konservasi (1-4)
		Mengembangkan skema keterlibatan dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan kawasan ekowisata (1-4)
		Memperjuangkan prinsip melindungi pengetahuan serta hak atas karya intelektual masyarakat lokal (foto, kesenian, pengetahuan tradisional, musik, dan lain lain. (1-4)

Penilaian indikator dinyatakan dalam skor dengan rentang skor 1-4, dengan kategori skor 1 menunjukan tingkat yang tidak baik, skor 2 menunjukan tingkat yang kurang baik, untuk skor 3 menunjukan tingkat yang baik, dan untuk skor 4 menunjukan tingkat yang sangat baik. Data yang diperoleh menggunakan Skala Likert. Penentuan rentang skala menggunakan rumusan :

$$RS = \frac{m-n}{b}$$

Keterangan =

RS : Rentang Skala
m : Angka tertinggi dalam pengukuran
n : Angka terendah dalam pengukuran
b : Banyaknya kelas yang dibentuk

Dari rumusan tersebut dapat diperoleh :

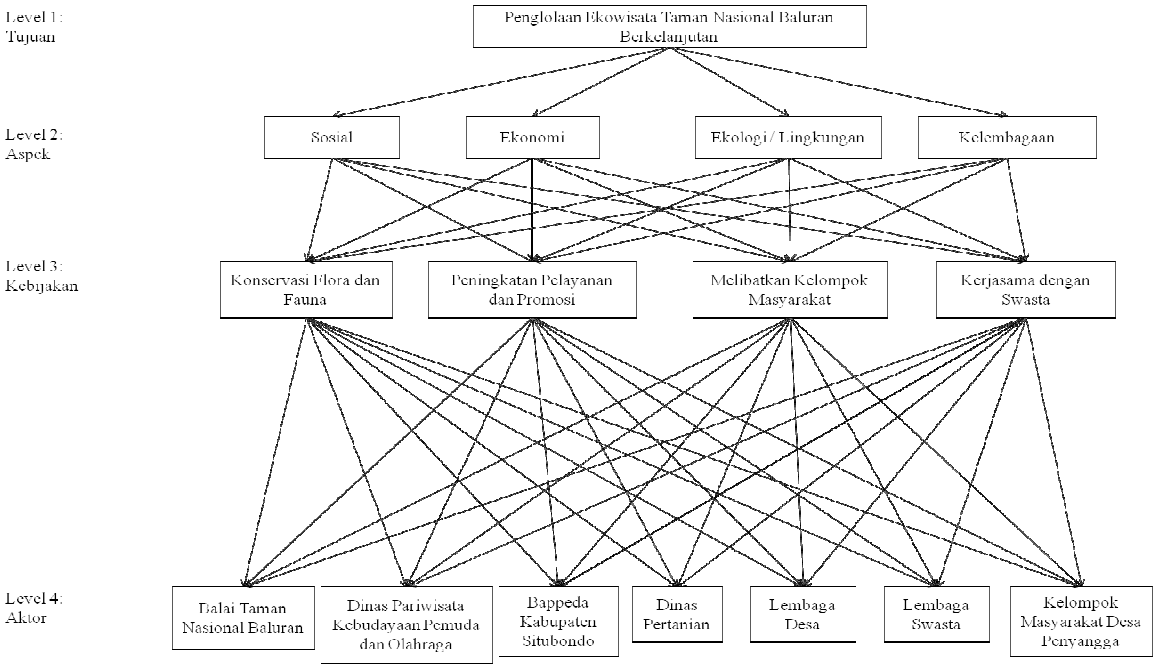
$$RS = \frac{(12\times4)-(12\times1)}{4} = 9$$

Kriteria pengambilan keputusan penilaian karakteristik ekowisata :

1. Karakteristik ekowisata Taman Nasional Baluran tidak baik (skor 12-20)
2. Karakteristik ekowisata Taman Nasional Baluran kurang baik (skor 21-29)
3. Karakteristik ekowisata Taman Nasional Baluran baik (skor 30-38)
4. Karakteristik ekowisata Taman Nasional Baluran sangat baik (skor 39-48)

B.2. Analytic Hierarchy Process (AHP) Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Baluran

AHP membantu mengidentifikasi dan menetapkan prioritas berdasar sasaran dan pengetahuan serta pengalaman terhadap permasalahan. Selanjutnya dari permasalahan akan muncul beberapa kriteria yang memungkinkan menjadi pilihan utama (prioritas) pengambilan keputusan. Kriteria tersebut kemudian diperbandingkan antar kriteria dari setiap indikator, menggunakan angka (skoring). Derajat kepentingan antar kriteria dilakukan dengan pendekatan perbandingan berpasangan untuk menentukan kepentingan relatif dari elemen-elemen dan kriteria-kriteria. Perbandingan berpasangan tersebut diulang untuk semua elemen dalam tiap tingkat. Elemen dengan bobot paling tinggi adalah pilihan keputusan yang layak dipertimbangkan. Untuk setiap kriteria dan alternatif, harus dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) yaitu membandingkan setiap elemen dengan elemen yang lainnya pada setiap tingkat hirarki secara berpasangan sehingga didapat nilai tingkat kepentingan elemen dalam bentuk pendapat kualitatif. Berikut struktur hirarki prioritas pengelolaan ekowisata Taman Nasional Baluran



Gambar 2. Konstruksi Struktur Hirarki Prioritas Pengelolaan Ekowisata TN Baluran

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Ekowisata Taman Nasional Baluran

Karakterisitik penilaian ekowisata dilakukan berdasarkan empat aspek yaitu Ekosistem (lingkungan), infrastruktur, kelembagaan, sosial budaya pendukung atraksi. Setiap aspek memiliki beberapa kriteria sebagai indikator dan dianalisis berdasarkan bobot penilaian perhitungan skor karakteristik pada ekowisata di Taman Nasional Baluran. Penilaian dinyatakan dalam skor dengan rentang skor 1-4, dengan kategori skor 1 menunjukan tingkat yang tidak baik, skor 2 menunjukan tingkat yang kurang baik, untuk skor 3 menunjukan tingkat yang baik, dan untuk skor 4 menunjukan tingkat yang sangat baik. Tabel 2 berikut menjelaskan skoring penilaian masing-masing komponen.

Tabel 2. Karakteristik Ekowisata Taman Nasional Baluran

Kriteria	Nilai				skor
	1	2	3	4	
1. Ekosistem					**6**
Teknologi ramah lingkungan			100%		
Mendorong upaya konservasi			100%		
Fasilitas pendukung tidak merusak ekosistem			100%		
2. Infrastruktur					**6**
Sesuai tradisi lokal, dan melibatkan masyarakat d			100%		
Kemitraan para pihak terkait	100%				
3. Kelembagaan					**8**
Kemitraan masyarakat dengan pihak terkait	100%				100 %
”*ecotourism conservancies*”	29%	71%			29%
homestay dan regulasinya		8%	50%	42%	
Sertifikasi pemandu		58%	42%		
4. Sosial Budaya					**10**
Edukasi budaya dan konservasi		33%	54%	12%	
kesadaran upaya konservasi SDA hayati dan ekosistemnya		67%	33%		
Mengembangkan (*stay & volunteer)*		54%	46%		
Melindungi pengetahuan serta hak atas karya intelektual		42%	46%	12%	
J U M L A H					**30**

Keterangan : 1 (tidak baik), 2 (kurang baik), 3 (baik) dan 4 (sangat baik)

Persepsi stakeholder terkait karakteristik ekowisata Taman Nasional Baluran pada kriteria ekosistem dan infrastruktur pada tabel 2 memberikan informasi pada kategori baik dengan skoring 6. Walaupun kemitraan para pihak dianggap kurang baik. Sedangkan persepsi stakeholder terkait aspek kelembagaan sangat beragam. Nilai skoring aspek kelembgaan dengan nilai 8 dikategorikan pada tingkat tingkat kurang baik. Secara umum penyebab kurang baiknya aspek kelembagaan pengelolaan ekowisata Taman Nasional Baluran disebabkan lemahnya koordinasi antar stakeholder. Penguatan dan pembentukan kelembagaan multistakeholder perlu dilakukan sehingga peluang keterlibatan masyarakat lebih besar pada kegiatan ekowisata. Salah satu model pengelolaan ekowisata yang melibatkan semua *stakeholder* adalah *Rinjani Trek Management Board* (RTMB) di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Nusa

Tenggara Barat (NTB). Aktivitas KOMPAKH (Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu) yang didirikan oleh Organisasi putra-putri asli Kapuas Hulu merupakan contoh pemberdayaan masyarakat mengacu pada prinsip ramah lingkungan, bertanggung jawab, dan berbasis masyarakat (Maring H.R. dan Eghenter C., 2012).

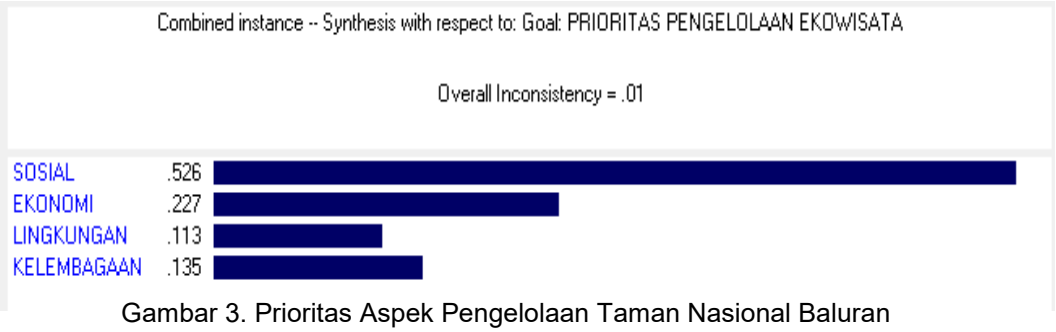
Kelembagaan atau organisasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait. Taman Nasional Baluran sebagi pihak yang bertanggung jawab terhadap kawasan diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat. Kelembagaan yang muncul dari wujud kepedulian masyarakat terhadap kawasan akan lebih bekelannjutan dan konsisten. Pelatihan – pelatihan dan penyuluhan sangat perlu dilakukan untuk membekali masyarakat agara mampu mengelola ekowisata sekaligus mengamankan kawasan dari berbagai macam gangguan dan ancaman

B. Prioritas Pengelolaan Ekowisata di Taman Nasional Baluran

Penentuan proritas pengelolaan ekowisata di kawasan Taman Nasional Baluran dianalisis menggunaan *Analytic Hierarchy Prosess* (AHP) dengan *software expert choice 11.* Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber ahli yaitu :

a. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah (SPTNW) Karangtekok, Taman Nasional Baluran.
b. *Stakeholder* bidang pariwisata diwakili Kepala Bagian Pariwisata Budaya Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Situbondo.
c. *Stakeholder* bidang perencanaan di wakili oleh Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Situbondo.

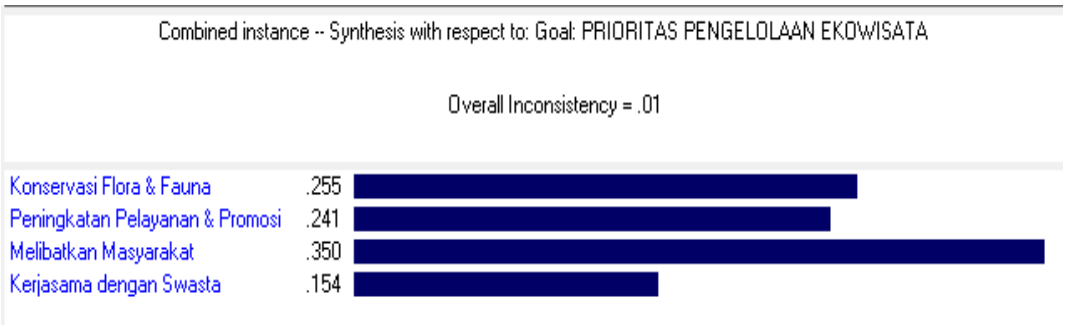
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa aspek sosial merupakan aspek yang di prioritaskan dan harus diperhatian untuk mendukung pengelolaan ekowisata (sebesar 52%.) Aspek sosial perlu di utamakan karena ekowisata terkait kebutuhan skunder masyarakat, bersinggungan dengan aspek seni dan selera. Selain itu kegiatan ekowisata membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat daerah penyangga sehingga unsur *benefit* bagi masyarakat menjadi hal yang penting. Aspek sosial menekankan pada keterlibatan masyarakat desa Penyangga dan pemenuhan kebutuhan sosial stakeholder utama terkait ekowisata agar mereka mendukung kegiatan ekowisata secara kontinu dan berkelanjutan.



Gambar 3. Prioritas Aspek Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Hasil analisis pada gambar 4 diketahui Kebijakan prioritas utama yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata, dengan nilai sebesar 35 %. Kebijakan ini menjadi penting karena kawasan Taman Nasional Baluran berbatasan langsung dengan pemukiman masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan sehingga rasa memiliki tanggung jawab pengelolaan kawasan. Keberhasilan pengelolaan Taman nasional sangat bergantung pada dukungan dan penghargaan masyarakat sekitar kepada kawasan. Seperti pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat oleh warga Desa Sumbersari Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, yang menjadi percontohan

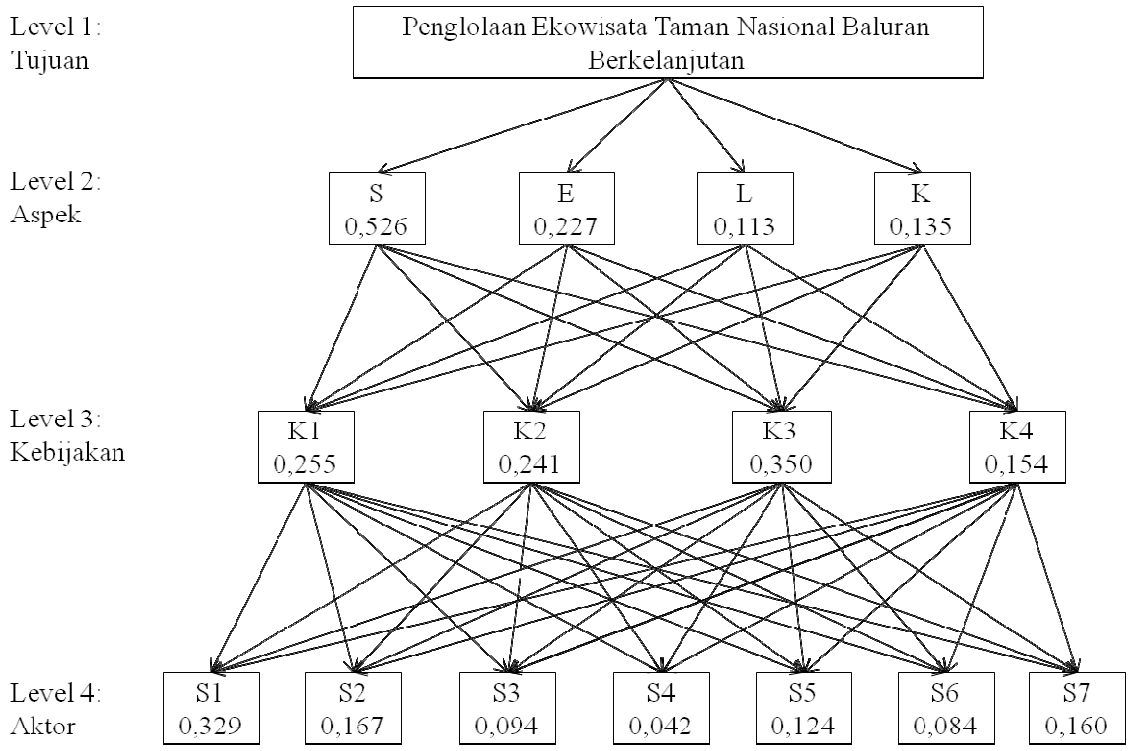
tingkat nasional. Pada ekowisata mangrove tersebut, masyarakat dilibatkan mulai proses perencanaan hingga pelaksanaan. Kabupaten Banyuwangi dijadikan percontohan karena mampu mengelola ekowisata yang melibatkan *stakeholder* mulai Pemerintah Daerah, Taman Nasional Alas Purwo, Perhutani dan masyarakat pinggir hutan.



Gambar 4 Prioritas Kebijakan untuk Pengelolaan Taman Nasional Baluran

Stakeholder yang menjadi prioritas pertama untuk mengelola taman nasional termasuk kegiatan ekowisata adalah Balai Taman Nasional Baluran dengan prosentase 32%. Saat ini stakeholder yang terkait langsung dengan pengelolaan dan kebijakan taman nasional adalah Kementrian Kehutanan dan Lingkungan HIdup melalui Balai Taman Nasional Baluran. *Stakeholder* kedua yang menjadi prioritas untuk mengelola ekowisata adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo, dengan nilai 16,7 %. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga (DISPARBUDPORA) Kabupaten Situbondo bagian Pariwisata dan Kebudayaan merupakan bagian yang menangani langsung masalah ekowisata yang ada di Taman Nasional Baluran. DISPARBUDPORA memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan yang sesuai dalam pengelolaan ekowisata Taman Nasional Baluran Kabupaten Situbondo. *Stakeholder* yang menempati urutan ketiga untuk mengelola ekowisata adalah kelompok masyarakat Desa Penyangga, dengan nilai sebesar 16 %.

Secara keseluruhan hirarki hasil penilaian penentuan prioritas pengelolaan ekowisata di kawasan Taman Nasional Baluran dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Hiraki Prioritas Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Baluran

Keterangan :

S = Sosial
E = Ekonomi
L = Lingkungan
K = Kelembagaan
K1= Konservasi Flora dan Fauna
K2= Peningkatan Pelayanan dan Promosi
K3= Melibatkan Kelompok Masyarakat
K4= Kerjasama dengan Swasta
S1= Balai Taman Nasional Baluran
S2= Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo
S3= Bappeda Kabupaten Situbondo
S4= Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo
S5= Lembaga Desa
S6= Lembaga Swasta
S7= Kelompok Masyarakat Desa Penyangga

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Aspek ekosistem, infrastruktur dan aspek sosial budaya pendukung atraksi dikategorikan baik, sedangkan aspek kelembagaan termasuk kategori kurang baik.
2. Pengelolaan ekowisata Taman Nasional Baluran adalah perlu memberi prioritas pada aspek sosial dengan melibatkan kelompok masyarakatat dalam pengelolaannya ekowisata. *Stakeholder* yang berperan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan ekowisata berkelanjutan yang pertama adalah pihak Taman Nasiona Baluran, kelompok masyarakat desa penyangga dan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Situbondo. Ketiga *stakeholder* ini merupakan *stakeholder* yang perlu untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan ekowisata di kawasan Taman Nasional Baluran.

Rekomendasi studi adalah pembentukan konsorsium atau forum kelembagaan yang khusus menangani ekowisata, terdiri dari multi stakeholder sehingga mendukung peran

Taman Nasional dalam memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati tanpa meninggalkan aspek konservasi

DAFTAR PUSTAKA

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2004. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Jakarta : Departemen Kehutanan.

[Dephut] Departemen Kehutanan. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Jakarta : Departemen Kehutanan.

[Dephut] Departemen Kehutanan.2012 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P. 01/IV-Set/2012. Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun Dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam. Jakarta : Departemen Kehutanan.

Balai Taman Nasional Baluran 2009. *Sekilas Ekowista Berbasis Masyarakat di Heart of Borneo.* Direktorat Produk Wisata. Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia.

Balai Taman Nasional Baluran. 2007. *Secuil Afrika di Jawa, Sekilas Potensi Wisata Taman Nasional Baluran.* Balai Taman Nasional Baluran.

Damanik, Jonianton dan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata : Dari Teori ke Aplikasi*. Jogjakarta : Pusat Studi Pariwisata UGM dan Penerbit Andi Jogjakarta.

Direktorat Produk Pariwisata, Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia. (2009) Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat.

Hidayat H, Haba J. Siburian R. 2011. *Politik Ekologi Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Juwariah, Siti. 2011. *Pengembangan Pariwisata Alam di TN Baluran dan Peran Serta Masyarakat Sekitar Kawasan*. Savana Baluran Edisi Mei 2011. www.Balurannationalpark.web.id.

Pamungkas, Gilang. 2010. Ekowisata Belum Milik Bersama: Kapasitas Jejaring Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata (Studi Kasus: Taman Nasional Gunung Gede Pangrangno). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 21 (1) : 49 - 64.

Setiawan B dan Rahmi DH. 2000. *Resource and Environmental Managemen*t. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada Univ Pr.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009. Tentang Kepariwisataan.

Keterkaitan Pariwisata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Mataram

Baiq Siti Noer Azima[1] dan Ima Rahmawati Sushanti[2]

[1]Mahasiswa Program Stdi Perencanaan Wiilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram
[2]Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram
azima.noer@gmail.com ; imarahmawarti77@gmail.com

ABSTRAK

Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan pariwisata terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Mataram. Pariwisata yang dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan karena dampaknya yang diberikan terhadap kehidupan perekonomian di tempat yang dikunjungi wisatawan sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta pembangunan manusia bagi penduduk setempat dimana pariwisata itu dikembangkan (Yoeti, 2008). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Persentase peran pariwisata terhadap PDRB Kota Mataram masih belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan, walaupun perkembangan peran sektor pariwisata Kota Mataram terjadi peningkatan dari tahun 2011-2016. Hal ini disebabkan peningkatan dari sektor-sektor yang lain dan peran sektor-sektor lain yang lebih besar terhadap PDRB. Terdapat keterkaitan pariwisata Kota Mataram dengan pembangunan manusia, khususnya dalam kontribusi lapangan usaha, tetapi belum tentu dengan meningkatnya kegiatan pariwisata dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Kata kunci : pariwisata, pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, PDRB.

I. PENDAHULUAN

Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik (Spillane, 1994). Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan berbelanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tersirat pada Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan sehingga masyarakat dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Selain itu, pariwisata yang dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan arena dampaknya yang diberikan terhadap kehidupan perekonomian di tempat yang dikunjungi wisatawan sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta pembangunan manusia bagi penduduk setempat dimana pariwisata itu dikembangkan (Yoeti, 2008).

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik, sesuai dengan yang dikatakan Mubyarto (2004). Menurut

Todaro (2000), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disetai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat , perlu mengetahui statistic Pendapatan Nasional/Regional secara berkala.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik supakah factor atu Negara yang timbul akibat berbagaiaktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan factor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Penyusunan PDRB dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu : 1) pendekatan produksi, 2} pengeluaran, dan 3) pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota Mataram sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah kota.

Pentingnya pariwisata sebagai suatu industri perlu dikembangkan pada suatu Negara. Menurut Wahab, S (1996), pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional. Dampak penggandaan yang ditimbulkan pengeluaran wisatawan sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan suatu daerah tujuan wisata. Hal ini menjadi penting dalam menggambarkan dampak dari perkembangan pariwisata kedalam pembangunan manusia, pada hal yang sama dalam respon pertumbuhan ekonomi pembangunan manusia telah menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Hubungan antara pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dilakukan pembuktian bukan hanya secara teoritis, tetapi juga empiris, dalam rangka mengukur kontribusi pendapatan secara nyata suatu daerah. (Anand, S dan A. Sen, 2000).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan pariwisata dengan pembangunan manusia di kota Mataram. Hal tersebut dilakukan dengan mengetahui potensi pariwisata berdasarkan kunjungan wisatawan, pendapatan pariwisata, dan jumlah obyek daya tarik wisata, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan struktur ekonomi berdasarkan PDRB.

II. METODE

Metode kuantitatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi lain dalam bentuk publikasi, seperti laporan tahunan, profil perusahaan dan seterusnya (Kusmayadi & Sugiarto, 2000). Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder laporan tahunan Kota Mataram yaitu Statistik pariwisata Kota Mataram 2011- 2016 yang didapat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram, data Indeks Pembangunan Manusia 2011-2016 dan data tingkat PDRB didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram.

Teknik pengumpulan data metode kualitatif yaitu dengan pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh langsung dilapangan, untuk memperoleh data dan juga informasi. Pengumpulan data ini menggunakan wawancara mendalam atau Indept Interview dan dokumentasi (Sugiyono, 2010).

Pengolahan data dilakukan dengan membuat Tabel, grafik dan diagram yang menunjukkan dinamika potensi pariwisata dan dinamika Tingkat Pembangunan manusia dari rentang tahun 2011-2016 kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Untuk menyederhanakan dan mempermudah analisis secara deskriptif dan spasial maka dalam penelitian ini disederhanakan dan generalisasikan kedalam kawasan pengembangan pariwisata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Pariwisata

Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan Kota Mataram dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam RTRW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Kota Mataram sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah kota.

Kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok merupakan sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok. Kota Mataram saat ini dikembangkan menjadi salah satu kota pariwisata. Kawasan Pariwisata yang telah ditentukan sesuai RTRW Kota Mataram untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan pariwisata, baik Nasional, Regional dan Lokal terdiri dari peruntukan pariwisata pantai, pariwisata belanja, pariwisata budaya, pariwisata religi, pariwisata buatan dan pariwisata kuliner.

Di Kota Mataram terdapat beberapa destinasi wisata, mulai dari pariwisata pantai yakni pantai loang baloq, pantai gading, pantai ampenan dan lainnya. pariwisata budaya, perpaduan antara budaya Lombok dan Bali dan sentuhan dari etnis lainnya, melahirkan suatu kolaborasi budaya yang sangat menarik. Dan ada beberapa tempat menarik yang layak untuk dikunjungi terkait dengan hal tersebut antara lain : Taman Mayura, Pura Meru, Pura Segara, Museum Nusa Tenggara Barat, Loang Baloq, dan Kota Tua Ampenan. Selain itu juga keberadaan pariwisata belanja, yaitu Pusat Kerajinan Mutiara Emas Perak, Kecamatan Sekarbela, dan peruntukan pariwisata lainnya.

Hal ini juga terlihat pada akhir tahun 2016, kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara meningkat tajam yaitu 83.025 orang untuk wisatawan lokal, dan 1.571 untuk wisatawan mancanegara yang pada tahun 2015 sebesar 41199 untuk wisatawan lokal dan 1.573 untuk wisatawan mancanegara.

Rata-rata kunjungan wisatawan di Kota Mataram selama tahun 2011-2016 mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi selama tahun 2012-2013. Pada tahun 2012 jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 29469 yang terdiri dari 28524 wisatawan lokal dan 9444 wisatawan mancanegara. Pada tahun 2013 jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 39227 wisatawan lokal dan 8765 wisatawan mancanegara.

B. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM disusun berdasakan tiga indikator yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan. Kaitannya dengan pembangunan ekonomi adalah pertama semakin besar ekonomi suatu daerah maka pembangunan suatu wilayah akan semakin tinggi. Begitu juga dengan tingkat pendidikan, ketika tingkat pendidikan disuatu daerah semakin baik dilihat dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah meningkat, maka pembangunan ekonomi suatu daerah akan meningkat pula. Indikator kesehatan dilihat dari angka harapan hidup, ketika angka harapan hidup suatu daerah meningkat, maka tingkat kesehatan suatu daerah akan meningkat, hal ini dapat meningkatkan pembangunan manusia di Kota Mataram. Adapun Indeks Pembangunan Manusia di Kota Mataram sebagai berikut :

Tabel 1 Komponen Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Mataram

Komponen IPM	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	69,73	70,03	70,18	70,43	70,70
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,72	15,02	15,27	15,28	15,50
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	08,15	08,45	09,04	09,05	09,25
Pengeluaran Per Kapita	12.380	12.748	13.021	13.399	13.576

Sumber : BPS Kota Mataram

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Adapun perhitungan indeks pembangunan manusia Kota Mataram ialah :

IPM = $\sqrt[3]{Ikesehatan\ X\ Ipendidikan\ X\ Ipengeluaran}$ X 100

IPM = $\sqrt[3]{70{,}70\ X\ 20{,}125\ X\ 13576}\ X\ 100$

IPM = 77,20

Keterangan :

IPM < 60 : IPM Rendah
IPM ≤ IPM < 70 : IPM Sedang
IPM ≤ IPM < 80 : IPM Tinggi
IPM ≥ 80 : IPM Sangat Tinggi

Dari hasil perhitungan diatas, nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram sebesar 77,20 yang berarti Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram berada dalam kategori tinggi.

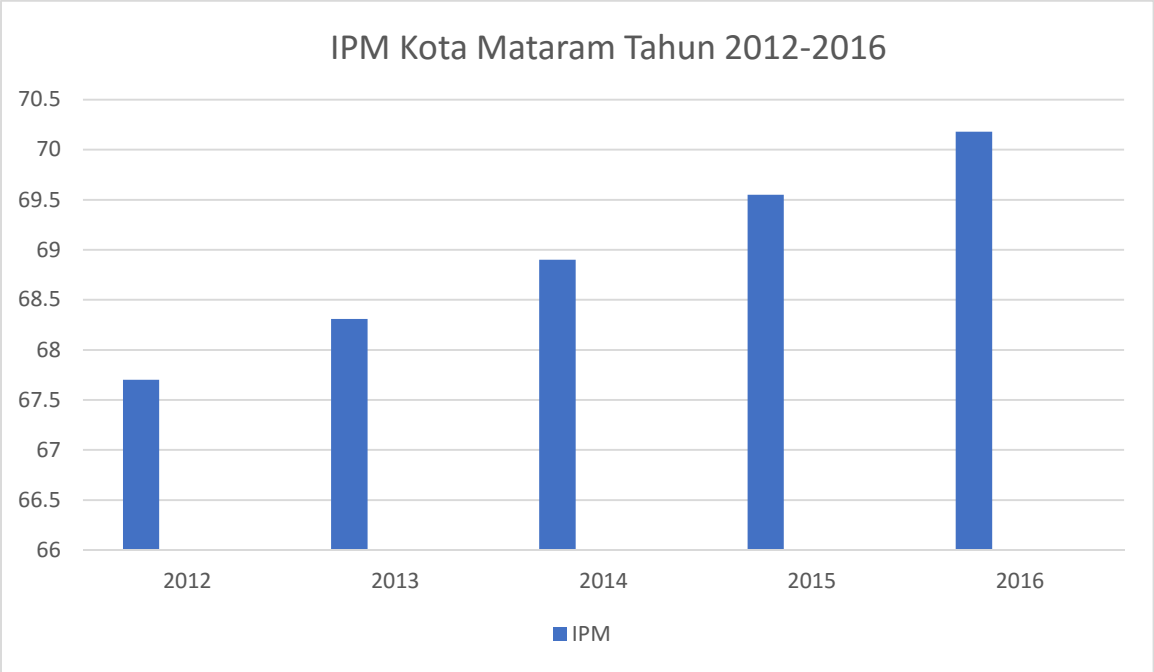
Tabel 2 Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2012-2015 dengan metode perhitungan baru

Komponen IPM	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	69,73	70,03	70,18	70,43	70,70
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,72	15,02	15,27	15,28	15,50
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	08,15	08,45	09,04	09,05	09,25
Pengeluaran Per	12.380	12.748	13.021	13.399	13.576

Komponen IPM	2012	2013	2014	2015	2016
Kapita					
IPM	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18
5. IPM	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18

Sumber : Hasil Perhitungan Menggunakan Metode Baru

Selama periode 2012-2016, IPM Kota Mataram selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan manusia di Kota Mataram selalu mengalami kemajuan. IPM Kota Mataram meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian Mataram dan meningkatnya kinerja pemerintah.



Gambar 1. Grafik IPM Kota Mataram Tahun 2012 - 2016

Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya. Capaian angka IPM akan menentukan urutan (*ranking*) antar daerah. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi (*ranking*). Peningkatan yang terjadi tidak terlepas dari pondasi pembangunan yang telah diletakkan sebelumnya serta sifatnya relatif lebih stabil dan mudah mengalami kejenuhan apabila telah mencapai derajat tertentu. Misalkan, daerah perkotaan yang telah mencapai angka melek huruf cukup tinggi pasti akan mengalami 'stagnasi' peningkatan capaian indikator, demikian pula dengan rata-rata lama sekolah serta angka harapan hidup.

C. *Struktur Ekonomi*

Berbagai aktivitas ekonomi di Provinsi NTB telah berperan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB. Kondisi geografis dan alam Provinsi NTB menjadikan aktivitas di bidang pertanian, pertambangan dan penggalian menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi di anatara bidang-bidang yang lainnya. Sehingga dalam struktur ekonomi Provinsi NTB menurut lapangan usaha, bidang-bidang tersebut merupakan dominator pembentuk PDRB. Pada tahun 2015, peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan

dan perikanan mencapai 20,95%, pertambangan dan penggalian sebesar 20,58% dan perdagangan besar dan eceran sebesar 12,44%.

Sebagai daerah tujuan wisata Nasional, peranan kepariwisataan di Provinsi NTB dalam pembentukan PDRB diperkirakan tidak lebih dari 7%. Hal ini secara tidak langsung dapat dilihat dari peranan lapangan usaha penyedaan akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 2,14%. Lapangan usaha tersebut merupakan indik ator dominan dalam aktivitas kepariwisataan. Nilai tambah yang diciptakan oleh aktivitas kepariwisataan juga merupakan bagian dari nilai tambah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi.

PDRB Kota Mataram setiap tahun mengalami perkembangan, baik dinilai atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 mencapai 13,24 triliun rupiah , mengalami peningkatan sebesar 13,75% dibandingkan tahun 2014 sebesar 11,64 triliun rupiah. Sementara itu, nilai PDRB Kota Mataram atas dasar harga konstan pada tahun 2015 mencapai 10,68 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 7,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 9,89% pada tahun 2014.

Sumbangan terbesar PDRB Kota Mataram tahun 2015, adaah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 19,97%. Selanjutnya Konstruksi sebesar 10,25%. Kemudian kategori Jasa Keuangan adan Asuransi dengan peranan sebesar 9,86%. Kategori Pertambangan dan Penggalian memberikan kontribusi terkecil sebesar 0,01. Sub sektor industry tekstil dan pakaian jadi menyumbang peranan sebesar 7,69% pada tahun 2015. Industri tekstil dan pakaian jadi semakin berkembang di Kota Mataram seiring dengan semakin terbentuknya potensi wisata di pulau Lombok khususnya dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat umumnya. Produk tekstil dan pakaian jadi bukan terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok sandang masyarakat, namun turut didorong oleh permintaan souvenir terkait pariwisata, seperti produk kaos, tenun dan produk tekstil lainnya.

D. Hubungan Pariwisata Terhadap Pembangunan Manusia

Persentase peran pariwisata terhadap PDRB Kota Mataram masih belum mampu memberikan kontribusinya secara signifikan, walaupun perkembangan peran sektor pariwisata Kota Mataram terjadi peningkatan dari tahun 2011 - 2016. Hal ini disebabkan peningkatan dari sektor-sektor yang lain dan peran sektor-sektor lain yang lebih besar terhadap PDRB. Peningkatan PDRB akan meningkatkan pemasukan terhadap APBD, yang mana dari APBD tersebut akan digunakan untuk alokasi biaya pembangunan dibidang ekonomi, sosial (kesehatan, pendidikan, kesejahteraan), pada setiap sektor (pariwisata dan non pariwisata) yang secara bersama-sama dapat meningkatkan pembangunan manusia.

Keterkaitan antara pariwisata dengan pembangunan manusia tidak secara langsung, akan tetapi melalui variabel antara yaitu PDRB. Pariwisata adalah salah satu sub sektor bagian yang terdapat didalamnya. PDRB adalah salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu wilayah. Kenaikan PDRB tersebut merupakan investasi dalam meningkatkan pembangunan manusia disuatu wilayah. Tentunya dalam meningkatkan pembangunan manusia masih ada indikator yang lain. PDRB dan sumber-sumber lain ikut berperan dalam kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang mana dari sumber pendapatan Negara tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan manusia yaitu untuk meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Keterkaitan antara kegiatan pariwisata dengan pembangunan manusia pada tingkat regional ternyata sulit untuk menyatakan terdapat hubungan yang kuat sebab

pembangunan manusia adalah indikator makro sehingga tidak secara langsung dapat terkait, tetapi harus melalui variabel antara. Secara nyata pada level regional Kota Mataram memang kegiatan pariwisata mampu memberikan dampak yang berarti terhadap pembangunan manusia, akan tetapi dampak tersebut sangat kecil dan belum tentu dengan meningkatnya kegiatan pariwisata dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut. Berbeda apabila pariwisata dilihat pada level makro atau secara nasional maupun global yang bisa memberikan pengaruh signifikan.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat diambl kesimpulan bahwa :

1. Kota Mataram yang terletak di Pulau Lombok merupakan sentra dari perjalanan wisata di Pulau Lombok. Kota Mataram saat ini dikembangkan menjadi salah satu Kota Pariwisata.
2. Dari hasil perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran, nilai IPM Kota Mataram sebesar 77,20 yang berarti berada dalam kategori tinggi.
3. Berdasarkan perhitungan IPM dengan metode terbaru, selama periode 2012 - 2016, IPM Kota Mataram selalu meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan manusia di Kota Mataram selalu mengalami kemajuan. IPM Kota Mataram meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian Mataram dan meningkatnya kinerja pemerintah.
4. Persentase peran pariwisata terhadap PDRB Kota Mataram adalah sebesar 7% dan masih belum mampu memberikan kontribusinya secara signifikan, walaupun perkembangan peran sektor pariwisata Kota Mataram terjadi peningkatan dari tahun 2011-2016.
5. Terdapat keterkaitan pariwisata Kota Mataram dengan pembangunan manusia, khususnya dalam kontribusi lapangan usaha tetapi belum tentu dengan meningkatnya kegiatan pariwisata dapat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anand dan Sen, 2000. The Income Component of The Human Development Index. Journal of Human Development. 1 (1) : 83 – 105.

Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Anonim, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009 - 2029

Anonim, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Mataram Tahun 2011 - 2031.

Anonim, Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Kusmayadi, Endar Sugiarto, 2000. Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Mubyarto, 2004. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta : BPFE

Spillane, James. 1994. Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan. Kanisius. Yogyakarta

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND. Bandung : Alfabeta

Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga : Jakarta.

Wahab, Salah. 1996. Manajemen Kepaiwisataan. PT. Pradnya Paramita : Jakarta.

Yoeti, Oka. A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Cetakan Kedua. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.

Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat

Umar Mansyur[1] , Intim Vinda Gesvita[2]

[1]Universitas Pakuan, Bogor
[2]Mahasiswi S2 Prodi Ilmu Perenc.Wilayah IPB, Bogor
Email: umarmansyur@unpak.ac.id dan vinda.gesvita@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki banyak obyek wisata alam, budaya dan tantangan/ minat seperti ekowisata, baik yang telah berkembang maupun yang berpotensi untuk dikembangkan serta yang tidak berkembang. Potensi tersebut berupa pulau-pulau kecil dan pantai yang indah serta masih sangat alami yang menjadi pemicu banyaknya tawaran investasi menarik dengan beberapa obyek wisata yang telah dikelola dengan baik oleh pemda dan juga masih banyak obyek wisata yang tidak terpelihara serta belum tersedia fasilitas pendukung dan sangat mempengaruhi minat wisatawan yang berkunjung. Tujuan penelitian untuk menganalisis seluruh obyek wisata dan pengelompokannya(sudah berkembang dan belum berkembang); mengidentifikasi dan menganalisis obyek wisata yang berpotensi dikembangkan dengan pilihan wisatawan; mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik kunjungan wisatawan; menyusun arahan rencana pengembangan ekowisata; dan menyusun arahan strategi pengembangan ekowisata. Metodologi analisis yang digunakan adalah: AHP(Analytical Hierarchy Process), penilaian parameter, skoring, SKW (Satuan Kawasan Wisata), dan A'WOT (AHP dan SWOT). Hasil menunjukkan bahwa terdapat 51 obyek wisata (8 telah berkembang dan 43 belum berkembang) dari 43 obyek tersebut (26 berpotensi dikembangkan dan 17 kurang berpotensi); daya tarik kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh jenis obyek (ekowisata/laut) dan tingkat pelayanan(keamanan keramahtamahan); arahan rencana pengembangan ekowisata dikelompokkan menjadi 4 SKW yaitu: SKW I (12 di Koto XI Tarusan), SKW II (12 di Bayang dan IV Jurai), SKW III (5 obyek di Bayang Utara) dan SKW IV (2 di Sutera); dan arahan strategi pembangunan ekowisata yaitu: meningkatkan potensi daya tarik ekowisata, membangun infrastruktur dan akomodasi penunjang wisata, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata;dan meningkatkan manajemen mitigasi bencana.

Kata kunci: ekowisata, SKW, strategi, pengembangan

I. PENDAHULUAN

Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal (TIES,1991 dalam Nugroho,2011) dan merupakan bagian dari *sustainable tourism*. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai obyek ekowisata yang telah berkembang maupun yang berpotensi untuk dikembangkan atau tidak kedua-duanya. Potensi tersebut berupa pulau-pulau kecil dan pantai yang indah serta masih sangat alami yang menjadi pemicu banyaknya tawaran investasi menarik dengan beberapa obyek wisata yang telah dikelola dengan baik. Sleain itu, masih terdapat banyak obyek wisata yang tidak terpelihara dan belum tersedianya fasilitas pendukung yang sangat mempengaruhi minat wisatawan yang berkunjung.

Ekowisata dalam mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal dan akan mendukung sektor-sektor wisata secara umum seperti: wisata bahari, wisata perdesaan, wisata alam, wisata budaya, dan perjalanan bisnis. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki berbagai obyek wisata, baik yang telah berkembang sebagai destinasi wisata maupun yang berpotensi untuk dikembangkan

serta yang tidak berkembang.

Perkembangan kunjungan wisatawan dalam kurung waktu 2011-2015 sebanyak 4.559.173 wisatawan dengan rincian 4.636 asing dan 4.554.537 domestik. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) selain fungsinya sebagai Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK), sehingga diharapkan mempunyai strategi pengembangan pariwisata terutama obyek wisata ekowisata karena belum teridentifikasi dan terdeskripsikan obyek wisata tersebut dengan baik.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat dengan luas wilayah 5.749,89 km^2 terletak di bagian selatan dan memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai 218 Km dan memiliki 47 pulau kecil yang menyebar di sisi pantainya. Posisi geografis dan administratif tersebut menjadikan Kab.Pesisir Selatan sebagai gerbang masuk wilayah selatan Sumatera Barat dengan dukungan prasarana, baik transportasi darat dan laut yang memadai, seperti jalan nasional Padang-Bengkulu dan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan.

Sektor pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi primadona dalam empat tahun terakhir ini. Potensi alam menjadikan pariwisata saat ini adalah sektor yang sedang dikembangkan dan diharap dapat menjadi sektor utama dalam peningkatan PDRB. Berkembangnya pariwisata disuatu daerah dapat dilihat dari banyaknya usaha-usaha dalam industri pariwisata, peningkatan jumlah wisatawan dan banyaknya obyek wisata. Jenis usaha dibidang industri pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi 6 jenis yaitu hotel, penginapan, biro perjalanan, agen perjalan, toko souvenir dan rumah makan.



Gambar 1. Kabupaten Pesisir Selatan

Oleh karena itu, maka penelitian ini dirancang dengan tujuan: menganalisis seluruh obyek wisata dan pengelompokannya yang telah berkembang dan belum berkembang; mengidentifikasi dan menganalisis obyek wisata yang berpotensi dikembangkan dengan pilihan wisatawan; mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik kunjungan wisatawan;menyusun arahan rencana pengembangan ekowisata; dan menyusun arahan strategi pengembangan ekowisata.

II. METODE

A. Pembobotan AHP

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah kerangka yang memungkinkan untuk mengambil keputusan yang efektif atas persoalan kompleks dengan cara menyederhanakan permasalahan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dan keempat faktor analisa, lalu mencari bobot setiap faktor tersebut dalam menentukan suatu obyek wisata yang berkembang yaitu: 1) jumlah wisatawan, 2) akomodasi penunjang wisata atau sarana prasarana, 3) adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat dikunjungi, dan 4) adanya partisipasi masyarakat setempat. Obyek wisata dengan penilaian parameter kuat hingga sangat kuat (4-5) adalah obyek wisata yang sudah berkembang sedangkan sisanya sangat lemah hingga sedang (1-3) adalah

obyek wisata yang belum berkembang (Sofyar F. 2007).

B. Penilaian Parameter

Analisis obyek wisata yang berpotensi dikembangkan berdasarkan pada hasil penilaian parameter obyek wisata berkembang, dimana obyek wisata yang belum berkembang dengan rentang penilaian lemah hingga sedang (2,1-3) dinyatakan sebagai obyek wisata yang berpotensi dikembangkan, sedangkan obyek wisata dengan rentang penilaian parameter sangat lemah (1-2) dinyatakan sebagai obyek wisata yang kurang berpotensi berkembang.

C. Skoring

Analisis skoring dilakukan dengan penyebaran koesioner kepada wisatawan dan masyarakat, dimana besarnya skor masing-masing obyek wisata akan ditentukan dari kebalikan jumlah obyek wisata yang ditentukan. Hasil skoring akan menunjukan peringkat dari masing-masing obyek wisata sehingga dapat diketahui seberapa besar minat wisatawan terhadap obyek wisata tersebut.

D. SKW (Satuan Kawasan Wisata)

Arahan rencana pengembangan pariwisata akan disusun dengan penggabungan obyek wisata yang sudah berkembang dan obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan karena keterkaitan koridor atau jalur wisata yang lebih jelas dan terarah dalam sistem Satuan Kawasan Wisata (SKW) dimana disusun berdasarkan beberapa pertimbangan: 1) keterkaitan obyek wisata dalam satu akses atau satu jalur wisata, 2) adanya kedekatan obyek wisata secara spasial, 3) adanya kemiripan daya tarik obyek, 4) kedekatan sarana pendukung dan saling melengkapi, dan 5) memperhatikan kebijakan pemerintah.

E. A'WOT (AHP dan SWOT)

Analisis menggunakan analisis gabungan AHP (*analytical hierarchy process*) dan analisis SWOT (*Strenght, Weaknesses, Oppurtunities* dan *Threats*) yang biasa disebut A'WOT, yaitu menganalisis komponen SWOT dengan AHP untuk mengetahui bobot dari tiap komponen SWOT, sehingga dapat diketahui bahwa komponen SWOT dengan bobot tertinggi adalah komponen utama atau yang paling berpengaruh, selanjutnya diperoleh faktor prioritas dan masing-masing bobot SWOT dikalikan dengan bobot faktor internal dan eksternalnya. Selian itu, dilakukan analisis faktor strategi internal (IFAS) dan analisis faktor strategi eksternal (EFAS) yang dirating untuk memperoleh skor yang dilengkapi dengan analisis matriks *space* yang diperoleh dari selisih antara IFAS dan EFAS yang menghasilkan koordinat (*x,y*) yang menunjukkan posisi pengembangan dalam kuadran matriks *space*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. menganalisis seluruh obyek wisata dan pengelompokan obyek wisata yang telah berkembang dan belum berkembang

Berdasarkan data sekunder dari instansi Dinas Budaya dan Pariwisata dan Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan serta wawancara responden tingkat kecamatan pada saat observasi langsung ke obyek wisata, maka teridentifikasi sebanyak 51 obyek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan (lihat Tabel 1).

Berdasarkan hasil penilaian bobot setiap indikator pada setiap obyek wisata tersebut diperoleh 8 obyek wisata dengan nilai tertinggi (4.01-5) sebagai obyek wisata yang sudah berkembang (Tabel 2), sedangkan obyek wisata diberi nilai <4 adalah obyek wisata yang belum berkembang sebanyak 43 obyek (Tabel 3).

Obyek wisata yang sudah berkembang berdasarkan peta tematik penyebarannya (Gambar 2) juga dapat kita ketahui bahwa obyek wisata yang sudah berkembang sebagian besar adalah obyek wisata bahari berupa pulau-pulau kecil yang terletak

berbatasan langsung dengan Kota Padang ibukota Provinsi Sumatera Barat dan obyek wisata yang terletak dekat pusat pemerintahan di Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan seperti Pantai Carocok Painan, selain itu obyek wisata Pulau Cubadak yang merupakan obyek wisata yang dana pengembangannya berasal dari investor Itali.

Tabel 1. Obyek Wisata di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan
1	Pulau Pagang	Koto XI Tarusan	27	Pemandian Batu Biduak	IV Jurai
2	Penangkaran Hewan Primate*)	Koto XI Tarusan	28	Air Terjun Bayang Sani	Bayang
3	Pulau Pamutusan	Koto XI Tarusan	29	Makam H. Ilyas Yakub*)	Bayang
4	Pulau Setan	Koto XI Tarusan	30	Makam Syeh Jamil*)	Bayang
5	Puncak Mandeh	Koto XI Tarusan	31	Situs Kursi Rajo	Bayang
6	Pulau Cubadak	Koto XI Tarusan	32	Pulau Nibung	Bayang
7	Puncak Langkisau	Koto XI Tarusan	33	Jembatan Akar	Bayang Utara
8	Pulau Bintagor	Koto XI Tarusan	34	Pulau Tempurung	Batang Kapas
9	Hutan Mangrove	Koto XI Tarusan	35	Pulau Batu Nago	Batang Kapas
10	Sungai Nyalo	Koto XI Tarusan	36	Konservasi Penyu	Sutera
11	Pulau Kapo-Kapo	Koto XI Tarusan	37	Pulau Karsik	Sutera
12	Pulau Sironjong	Koto XI Tarusan	38	Pulau Karamba Kaciak	Sutera
13	Pulau Babi	Koto XI Tarusan	39	Pulau Karamba Gadang	Sutera
14	Pulau Kumbang	Koto XI Tarusan	40	Bukit Taratak	Sutera
15	Pulau Nyamuk	Koto XI Tarusan	41	Pulau Gosong	Lengayang
16	Pantai Carocok Painan	IV Jurai	42	Pulau Ampiang Parak	Lengayang
17	Pulau Aur Ketek	IV Jurai	43	Masjid Al-Iman*)	Lengayang
18	Pulau Cingkuak	IV Jurai	44	Rumah Percetakan Uang*)	Lengayang
19	Pulau Penyu	IV Jurai	45	Pantai Sumedang	Ranah Pesisir
20	Air Terjun Timbulun	IV Jurai	46	Air Terjun Palangai Gadang	Ranah Pesisir
21	Pulau Kereta	IV Jurai	47	Pulau Beringin	Linggosari Baganti
22	Pulau Semangki Gadang	IV Jurai	48	Pulau Katangkatang	Linggosari Baganti
23	Pulau Semangki Ketek	IV Jurai	49	Situs Kerajaan Indrapura	Pancung Soal
24	Pulau Batu Dandang	IV Jurai	50	Makam Tuan Berdarah Putih*)	Pancung Soal
25	Pulau Aur Gadang	IV Jurai	51	Rumah Gadang Mande Rubiah*)	Lunang Silaut
26	Puncak Langkisau	IV Jurai			

Sumber: Disbudpar dan Bappeda serta analisis, 2016

*) obyek wisata alam dan budaya (alam dan buatan)

Tabel 2. Obyek Wisata yang Sudah Berkembang

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Nilai
1	Pantai Carocok Painan	IV Jurai	5.00
2	Pulau Pagang	Koto XI Tarusan	4.70
3	Pulau Cingkuak	IV Jurai	4.70
4	Pulau Pamutusan	Koto XI Tarusan	4.60
5	Pulau Setan	Koto XI Tarusan	4.47
6	Puncak Mandeh	Koto XI Tarusan	4.47
7	Pulau Cubadak	Koto XI Tarusan	4.40
8	Puncak Langkisau	Koto XI Tarusan	4.40

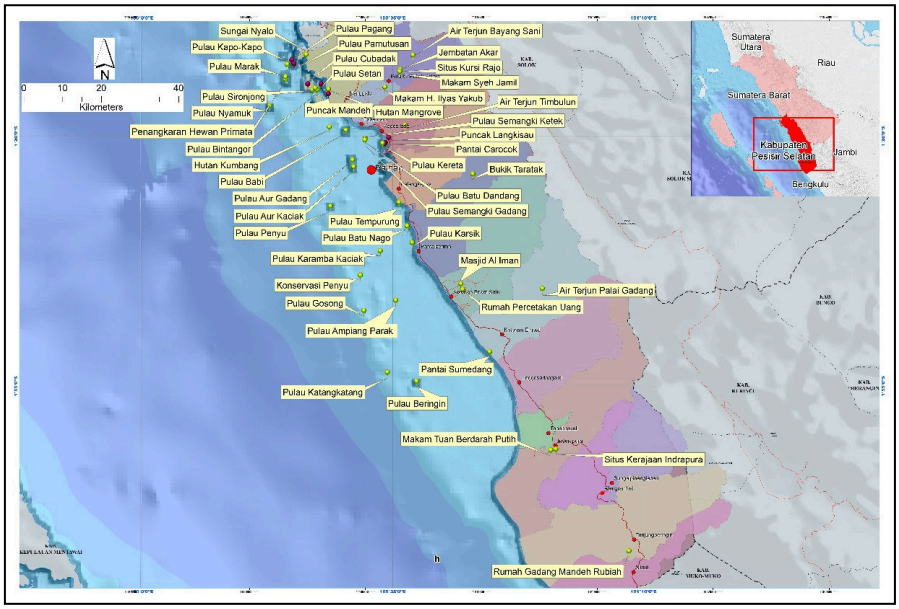
Sumber: Analisis, 2016

Tabel 3. Obyek Wisata yang Belum Berkembang

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Nilai
1	Jembatan Akar	Bayang Utara	3.37
2	Air Terjun Timbulun	IV Jurai	3.37
3	Puncak Langkisau	IV Jurai	3.37
4	Pulau Marak	Koto XI Tarusan	3.37
5	Air Terjun Bayang Sani	Bayang	3.17
6	Pulau Kapo-Kapo	Koto XI Tarusan	2.83
7	Pulau Sironjong	Koto XI Tarusan	2.70
8	Pulau Bintagor	Koto XI Tarusan	2.43
9	Hutan Mangrove	Koto XI Tarusan	2.37
10	Sungai Nyalo	Koto XI Tarusan	2.34
11	Pulau Babi	Koto XI Tarusan	2.34
12	Pulau Kumbang	Koto XI Tarusan	2.30
13	Pulau Kereta	IV Jurai	2.30
14	Pulau Semangki Gadang	IV Jurai	2.30
15	Pulau Semangki Ketek	IV Jurai	2.30
16	Rumah Gadang Mandeh Rubiah*)	Lunang Silau	2.18
17	Penangkaran Hewan Primata*)	Koto XI Tarusan	2.17
18	Pulau Batu Dandang	IV Jurai	2.17
19	Pulau Aur Gadang	IV Jurai	2.17
20	Pulau Aur Ketek	IV Jurai	2.17
21	Pantai Sumedang	Ranah Pesisir	2.00
22	Konservasi Penyu	Sutera	2.00
23	Pulau Karsik	Sutera	2.00
24	Pulau Batu Nago	Batang Kapas	2.00
25	Makam H. Ilyas Yakub*)	Bayang	2.00
26	Makam Syeh Jamil*)	Bayang	2.00
27	Situs Kursi Rajo	Bayang	2.00
28	Pulau Nyamuk	Koto XI Tarusan	1.83
29	Pulau Penyu	IV Jurai	1.70
30	Pulau Beringin	Linggosari Baganti	1.70
31	Pulau Katangkatang	Linggosari Baganti	1.70
32	Pulau Karamba Kaciak	Sutera	1.70
33	Pulau Gosong	Lengayang	1.60
34	Pulau Ampiang Parak	Lengayang	1.60
35	Pulautempurung	Batang Kapas	1.60
36	Bukit Taratak	Sutera	1.57
37	Pulau Nibung	Bayang	1.57
38	Pemandian Batu Biduak	IV Jurai	1.40
39	Air Terjun Palangai Gadang	Ranah Pesisir	1.27
40	Masjid Al-Iman*)	Lengayang	1.10
41	Rumah Percetakan Uang*)	Lengayang	1.10
42	Situs Kerajaan Indrapura	Pancung Soal	1.10
43	Makam Tuan Berdarah Putih	Pancung Soal	1.10

Sumber: Analisis, 2016

Obyek Wisata yang belum berkembang sebagian besar adalah obyek wisata yang ditemukan dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir dimana sebagian pengembangannya masih terhambat karena keterbatasan anggaran. Beberapa pihak asing berminat untuk berinvestasi dalam pengembangan obyek wisata tersebut, namun karena benturan adat istiadat dan kebudayaan, sosial dan politik sehingga belum terlaksana atau terhambat.



Gambar 2. Sebaran Obyek Wisata di Kabupaten Pesisir Selatan

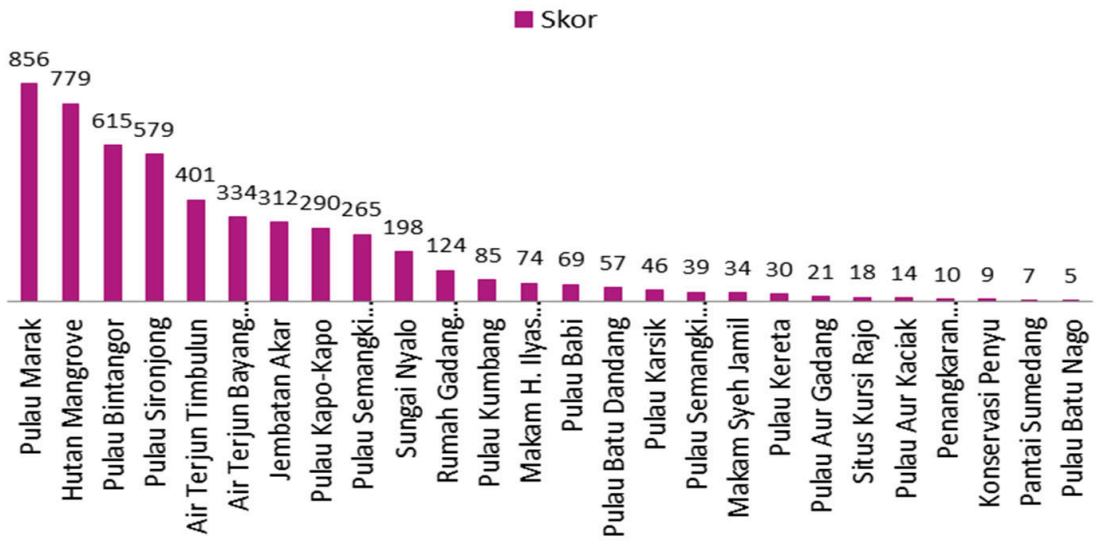
B. mengidentifikasi dan menganalisis obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan preferensi atau pilihan wisatawan

Pendit (1994) mengemukakan bahwa yang dimaksud potensi obyek wisata adalah segala macam bentuk sumber daya yang terdapat di suatu daerah tertentu yang bisa diramu dan dikembangkan menajadi suatu aneka atraksi wisata, maka berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dimana teridentifikasi 43 obyek wisata yang belum berkembang maka dianalisis untuk mengetahui obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan berdasarkan preferensi atau pilihan wisatawan. Hasil pembobotan obyek wisata berdasarkan indikator obyek wisata berkembang diketahui bahwa obyek wisata yang berpotensi dikembangkan dari obyek wisata yang belum berkembang yaitu dengan nilai 2-4 dan obyek wisata yang kurang berpotensi dikembangkan dengan nilai <2, maka teridentifikasi sebanyak 26 obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan atau berpotensi berkembang dan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Obyek Wisata yang Potensi Berkembang

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Nilai
1	Jembatan Akar	Bayang Utara	3.37
2	Air Terjun Timbulun	IV Jurai	3.37
3	Pulau Marak	Koto XI Tarusan	3.37
4	Air Terjun Bayang Sani	Bayang	3.17
5	Pulau Kapo-Kapo	Koto XI Tarusan	2.83
6	Pulau Sironjong	Koto XI Tarusan	2.70
7	Pulau Bintagor	Koto XI Tarusan	2.43
8	Hutan Mangrove	Koto XI Tarusan	2.37
9	Sungai Nyalo	Koto XI Tarusan	2.34
10	Pulau Babi	Koto XI Tarusan	2.34
11	Pulau Kumbang	Koto XI Tarusan	2.30
12	Pulau Kereta	IV Jurai	2.30
13	Pulau Semangki Gadang	IV Jurai	2.30
14	Pulau Semangki Ketek	IV Jurai	2.30
15	RG Mandeh Rubiah	Lunang	2.18
16	Penangkaran Hewan	Koto XI Tarusan	2.17
17	Pulau Batu Dandang	IV Jurai	2.17
18	Pulau Aur Gadang	IV Jurai	2.17
19	Pulau Aur Ketek	IV Jurai	2.17
20	Pantai Sumedang	Ranah Pesisir	2.00
21	Konservasi Penyu	Sutera	2.00
22	Pulau Karsik	Sutera	2.00
23	Pulau Batu Nago	Batang Kapas	2.00
24	Makam H. I Yakub	Bayang	2.00
25	Makam Syeh Jamil	Bayang	2.00
26	Situs Kursi Rajo	Bayang	2.00

Sumber: Analisis, 2016



Gambar 3 Hasil Analisis Skoring Obyek Wisata yang Berpotensi Dikembangkan

Untuk mengetahui obyek wisata yang berpotensi dikembangkan berdasarkan preferensi atau minat wisatawan untuk dikunjungi, maka dilakukan analisis skoring terhadap 26 obyek wisata tersebut dan hasilnya diidentifikasi bahwa terdapat 4 obyek wisata berupa obyek wisata ekowisata dengan hasil skor tertinggi, yaitu Pulau Marak, Hutan Mangrove, Pulau Bintangor dan Pulau Sironjong (Gambar 3).

Obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan tersebut sebagian besar adalah obyek wisata yang berada tidak jauh dari jalan utama provinsi dan ibukota kabupaten serta memiliki potensi daya tarik dan keunikan alam yang sangat indah sekalipun sebagian besar dari obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan tersebut sangat terbatas dalam hal penyediaan sarana prasarana dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangannya. Sedangkan selebihnya 17 obyek wisata yang kurang berpotensi berkembang (Tabel 5) disebabkan karena kurangnya daya tarik, tidak adanya sarana prasarana wisata serta belum banyak diketahui masyarakat umum maupun wisatawan.

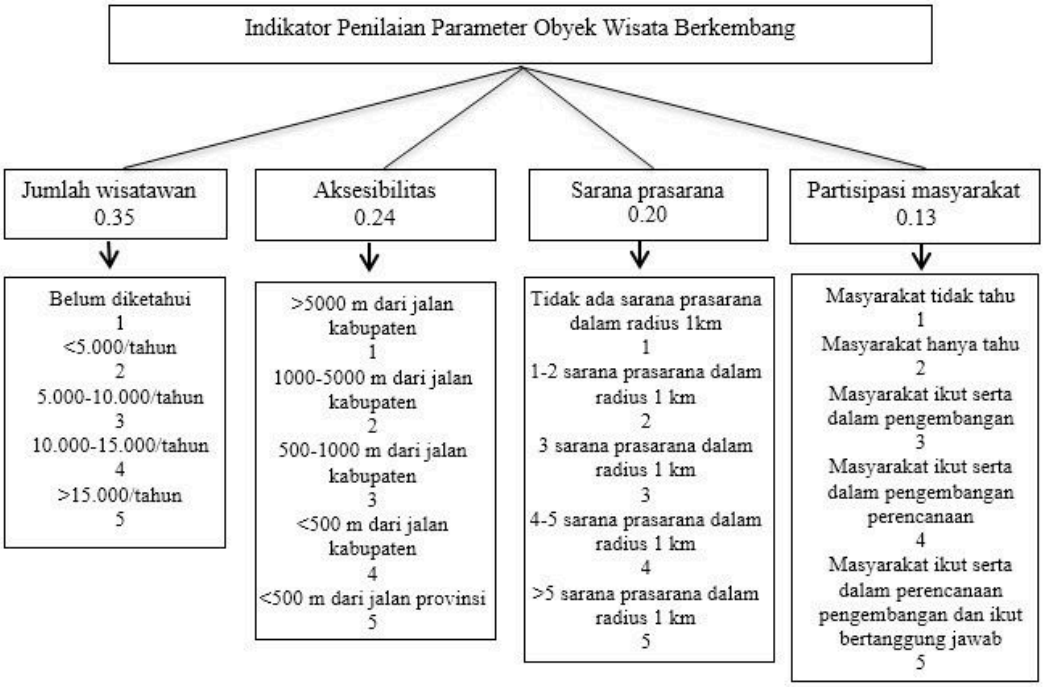
Tabel 5 Obyek Wisata yang Kurang Berpotensi

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Nilai	Keterangan
1	Pulau Nyamuk	Koto XI Tarusan	1.83	Pulau tidak berpenghuni tidak ada akomodasi
2	Pulau Penyu	IV Jurai	1.70	Pengelolaan terhenti
3	Pulau Beringin	Linggosari Baganti	1.70	Akses yang sulit dan tidak ada sarana prasarana wisata
4	Pulau Katangkatang	Linggosari Baganti	1.70	Akses yang sulit dan tidak ada sarana prasarana wisata
5	Pulau Karamba Kaciak	Sutera	1.70	Akses yang sulit dan tidak ada sarana prasarana wisata
6	Pulau Karamba Gadang	Sutera	1.70	Kurang daya tarik
7	Pulau Gosong	Lengayang	1.60	Pulau tidak berpenghuni tidak ada akomodasi
8	Pulau Ampiang Parak	Lengayang	1.60	Pulau tidak berpenghuni tidak ada akomodasi
9	PulauTempurung	Batang Kapas	1.60	Pulau tidak berpenghuni tidak ada akomodasi
10	Bukit Taratak	Sutera	1.57	Akses yang sulit
11	Pulau Nibung	Bayang	1.57	Penuh dengan semak belukar
12	Pemandian Batu Biduak	IV Jurai	1.40	Kurang daya tarik dan akses yang suli dijangkau
13	Air Terjun Palangai Gadang	Ranah Pesisir	1.27	Akses yang sulit dijangkau
14	Masjid Al-Iman	Lengayang	1.10	Kurang daya tarik
15	Rumah Percetakan Uang	Lengayang	1.10	Kurang daya tarik
16	Situs Kerajaan Indrapura	Pancung Soal	1.10	Kurang daya tarik
17	Makam Tuan Berdarah Putih	Pancung Soal	1.10	Kurang daya tarik

Sumber: analisis, 2016

Berdasarkan jumlah obyek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 51 obyek, dilakukan pembobotan dan penilaian berdasarkan indikator obyek wisata berkembang dari hasil observasi di lapangan, maka diidentifikasi 4 indikator penilaian obyek wisata berkembang dan dianalisis dengan metode AHP dimana penilaian kriteria berdasarkan hasil wawancara dengan *expert* atau *keyperson* (Kepala BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan) dan hasil analisis AHP untuk indikator obyek wisata yang sudah berkembang dapat dilihat pada Gambar 4.

Berdasarkan hasil di atas, maka dilakukan analisis perkalian bobot indikator



Sumber : Modifikasi Model Gunn 1979 dan Coppock 1971 dalam Pramudya (2008).

Gambar 4 Hasil Analisis Skoring Obyek Wisata yang Berpotensi Dikembangkan

dengan masing-masing nilai indikator yang sesuai dengan obyek wisata dan hasilnya tersebut diperoleh 8 obyek wisata dengan nilai tertinggi (4.01–5) atau dengan kategori sebagai obyek wisata yang sudah berkembang (Tabel 6) dan obyek wisata yang memperoleh nilai <4 adalah obyek wisata yang belum berkembang.

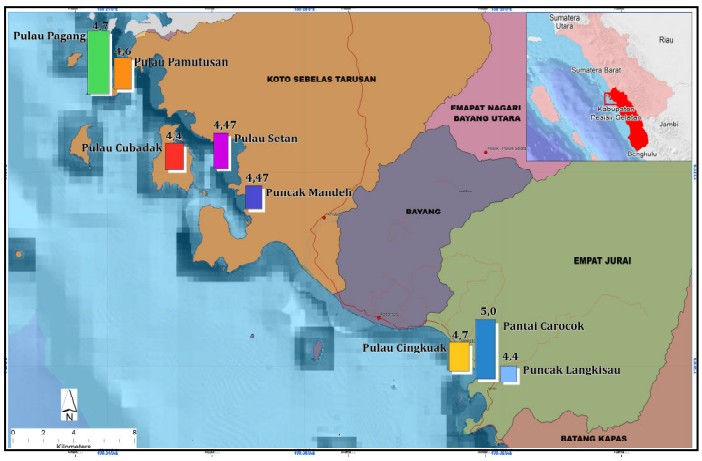
Tabel 6 Obyek Wisata yang Sudah Berkembang

No	Nama Obyek Wisata	Kecamatan	Nilai
1	Pantai Carocok Painan	IV Jurai	5.00
2	Pulau Pagang	Koto XI Tarusan	4.70
3	Pulau Cingkuak	IV Jurai	4.70
4	Pulau Pamutusan	Koto XI Tarusan	4.60
5	Pulau Setan	Koto XI Tarusan	4.47
6	Puncak Mandeh	Koto XI Tarusan	4.47
7	Pulau Cubadak	Koto XI Tarusan	4.40
8	Puncak Langkisau	Koto XI Tarusan	4.40

Sumber: analisis, 2016

Hasil skor obyek wisata yang sudah berkembang jika dilihat berdasarkan peta tematik penyebarannya (Gambar 5) sebagian besar adalah obyek wisata bahari berupa pulau-pulau kecil yang terletak berbatasan langsung dengan Kota Padang ibukota

Provinsi Sumatera Barat dan obyek wisata yang berada di dekat pusat pemerintahan di ibukota Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Pantai Carocok Painan.



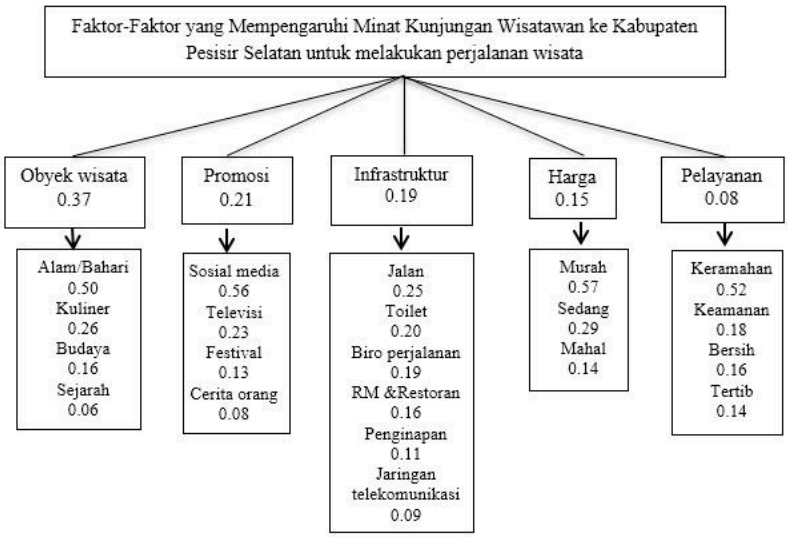
Gambar 5 Peta Obyek Wisata Berkembang

C. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik kunjungan wisatawan

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan sebagian besar adalah wisatawan domestik dan lokal serta sebagian lainnya wisatawan mancanegara dan dalam 3 tahun terakhir termasuk dalam 3 besar jumlah kunjungan wisatawan terbanyak selain Kota Padang dan Kota Bukittinggi (Disbudpar,2016).

Untuk wisatawan mancanegara sebagian besar mengunjungi obyek wisata pulau-pulau kecil yang terletak di Kecamatan Koto XI, Tarusan dan Kecamatan IV Jurai, karena terkenal dengan potensi wisata baharinya dan dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sumatera.

Minat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor berdasarkan hasil wawancara berdasarkan kuesioner dan wawancara dengan Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan dan beberapa wisatawan yaitu: obyek wisata, promosi wisata, infrastruktur, pelayanan, dan harga. Berdasarkan 5 faktor tersebut terdapat faktor yang paling berpengaruh dan dianalisis dengan metode AHP ditemukan beberapa pendapat berdasarkan penilaian 2 kelompok wisatawan yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik (lokal) dan akan ditemukan pendapat gabungan tentang faktor yang paling dominan terhadap minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: obyek wisata (alam atau bahari), wisata kuliner, promosi dan infrastruktur (lihat Gambar 6).



Gambar 6 Struktur Hirarki Faktor dan Sub Faktor Kombinasi terhadap Minat Berkunjung Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Lokal)

D. menyusun arahan rencana pengembangan ekowisata

Sebagian besar obyek wisata yang sudah berkembang terletak di dua kecamatan dengan berjarak terdekat dengan Kota Padang,sedangkan obyek wisata yang berpotensi berkembang sebagian besar terletak dekat obyek wisata yang sudah berkembang dan banyaknya obyek wisata yang ada tentu memerlukan banyak fasilitas dan akomodasi serta terbatasnya dalam pengembangan obyek.

Berdasarkan lamanya waktu kunjungan wisatawan menginap adalah 2-3 hari dan wisatawan yang tidak menginap rata-rata mengahabiskan waktu 6-12 jam berada di obyek wisata. Oleh karena itu, diharapkan dalam perencanaan pengembangan obyek wisata memperhatikan kualitas kunjungan dari setiap wisatawan, yaitu dalam satu kali perjalanan wisatawan tidak hanya mengunjungi satu obyek wisata saja tetapi dapat mengunjungi beberapa obyek wisata yang berdekatan.

Urutan dalam prioritas pengembangan satuan kawasan wisata perlu diperhatikan karena akan berdampak pada obyek dan daya tarik. Pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan rata-rata skor potensi obyek wisata dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat kunjungan wisatawan berupa jenis obyek wisata dan fasilitas wisata. Oleh karena itu, kemiripan obyek dan berada pada satu jalur wisata dalam pengembangan wisata dapat dikelompokkan menjadi 4 SKW sebagai berikut:

1. Satuan Kawasan Wisata (SKW) I

SKW I terdiri dari 12 obyek wisata bahari yang meliputi 5 obyek wisata yang sudah berkembang dan 7 obyek wisata yang berpotensi dikembangkan. Pengembangan pada SKW I ini berdasarkan dari letak obyek yang berada dalam satu jalur dan dalam satu kawasan bahari serta berada dalam satu region kecamatan yang dapat dijadikan sebagai *waterfront city* Kabupaten Pesisir Selatan karena berada di pintu masuk Kabupaten Pesisir Selatan. Sumatra Barat.

2. Satuan Kawasan Wisata (SKW) II

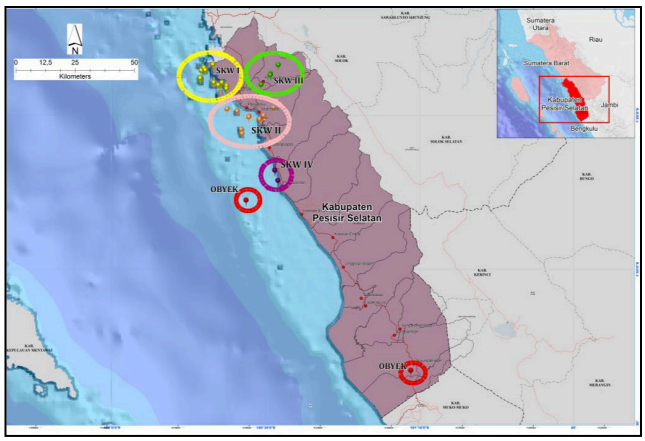
SKW II terdiri dari 12 obyek wisata, meliputi obyek wisata yang berada di dekat pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan 3 obyek wisata berkembang dan 9 obyek wisata berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini juga dikarenakan adanya kedekatan sarana pendukung seperti beberapa obyek yang berada pada satu pintu masuk utama.

3. Satuan Kawasan Wisata (SKW) III

SKW III terdiri dari 5 obyek wisata yang berpotensi dikembangkan yang berada dalam satu Kecamatan Bayang Utara berupa wisata alam, berada berdekatan dengan wisata sejarah dikarenakan adanya kedekatan jarak dan sarana pendukung.

4. Satuan Kawasan Wisata (SKW) IV

SKW IV terdiri dari 2 obyek wisata berpotensi untuk dikembangkan berupa pulau-pulau kecil yang berada di dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sutera yang berjarak ± 2,5 dari ibukota Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Painan.



Gambar 7. Peta Satuan Kawasan Wisata (SKW)

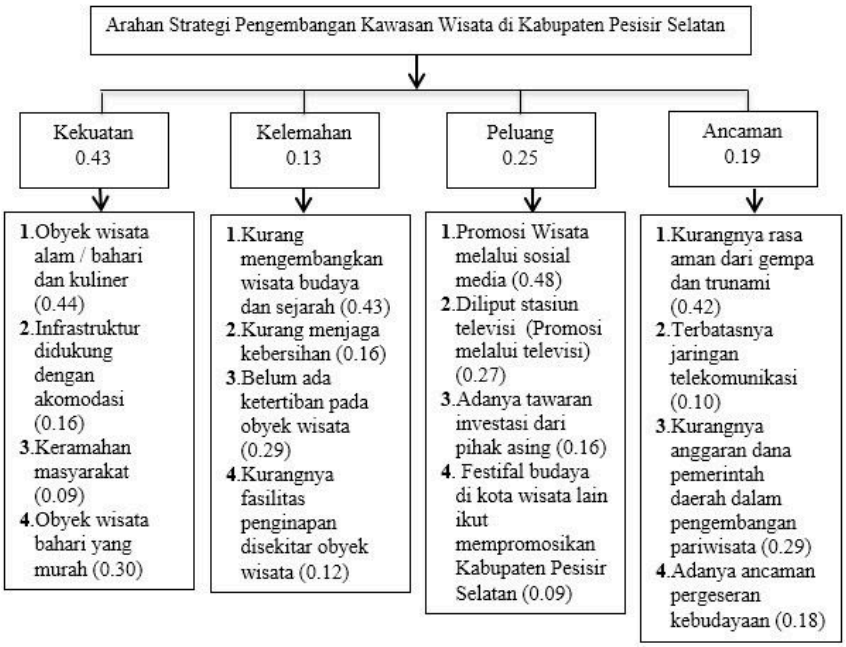
E. menyusun arahan strategi pengembangan ekowisata.

Penyusunan arahan kebijakan pengembangan ekowisata di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil dari obyek wisata yang sudah berkembang, obyek wisata yang berpotensi berkembang dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berkunjung wisatawan ke Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil tersebut ditentukan komponen dari faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang disajikan pada Tabel 7 dan AHP pada Gambar 8.

Tabel 7 Faktor Internal dan Eksternal Analisis SWOT

Faktor Internal	
Kekuatan	**Kelemahan**
1. Obyek wisata alam / bahari dan kuliner 2. Infrastruktur didukung dengan akomodasi 3. Keramahan masyarakat 4. Obyek wisata bahari yang murah	1. Kurang mengembangkan obyek wisata budaya dan sejarah 2. Kurang menjaga kebersihan obyek wisata 3. Belum ada ketertiban pada obyek wisata 4. Kurangnya fasilitas penginapan sekitar obyek wisata
SKW Prioritas	**Faktor Eksternal**
Peluang **Konservasi Penyu**	**Ancaman**
1 Promosi wisata melalui sosial media 2. Diliput stasiun televisisebagai raja ampat Sumatra (Promosi melalui televisi) 3. Adanya tawaran investasi dari pihak asing 4. Festifal budaya ikut mempromosikan	1. Bencana alam gempa bumi dan tsunami 2. Keterbatasan jaringan telekomunikasi 3. Keterbasan anggaran 4. Pergeseran kebudayaan

Sumber: analisis, 2016



Gambar 8 Struktur Hierarki Arahan Strategi Pengembangan SKW

Berdasarkan analisis A'WOT diperoleh bobot yang paling tinggi adalah kekuatan 0.37 dengan subfaktor tertinggi adalah obyek wisata alam/bahari dan kuliner, sedangkan bobot terendah adalah kelemahan 0.13 dengan subfaktor tertinggi adalah kurang mengembangkan obyek wisata budaya dan sejarah. Matriks IFAS menganalisis terhadap faktor strategi internal menyangkut kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan satuan kawasan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan dan hasil analisis *matrix space* bahwa arahan pengembangan pariwisata berada pada kuadran I yang berarti pengembangan yang agresif termasuk dalam bentuk satuan kawasan wisata.

Penyusunan strategi pengembangan wisata di Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada hasil dari matriks *space* yaitu posisi pengembangan pariwisata berada pada kuadran I yang menunjukan adanya kekuatan internal dan peluang eksternal dalam melakukan rencana pengembangan pariwisata,sehingga pemilihan strategi dalam matriks SWOT yaitu strategi SO *(Strengths-Opportunities).* Langkah selanjutnya melakukan interaksi kombinasi strategi dengan menggabungkan faktor-faktor penggunaan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi ancaman (ST), pengurangan kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang (WO) dan pengurangan kelemahan untuk menghadapi ancaman yang akan datang (WT). Hasil penggabungan analisis SWOT tersebut akan diurutkan berdasarkan ranking hasil jumlah bobot untuk mendapatkan prioritas dan arahan strategi utama dalam pengembangan parwisata di Kabupaten Pesisir Selatan (Tabel 8 dan Tabel 9).

Tabel 8 Faktor internal dan eksternal analisis SWOT

Internal / **Eksternal**	**Peluang(*Opportunity*)** 1. Promosi wisata melalui sosial media 2. Diliput stasiun televisi sebagai raja ampat Sumatra (Promosi melalui televisi) 3. Adanya tawaran investasi dari pihak asing	**Ancaman *(Threats)*** 1. Kurangnya rasa aman dari resiko bencana gempa dan tsunami 2. Adanya ancaman benturan kebudayaan 3. Kurangnya anggaran dana pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata
Kekuatan (Strengths) 1. Obyek wisata alam / bahari dan kuliner	**SO** **S1, O1, O2, O3,** Meningkatkan potensi daya tarik dengan promosi wisata, ikut serta dalam kegiatan festival wisata atau mengadakan festival wisata dan menjadikannya layak untuk wisata kelas international serta melakukan	**ST** **S1, T1, T2, T3** Meningkatkan manajemen mitigasi bencana serta jalur evakuasi yang jelas dan harus adanya kebijakan dari pemerintah serta musyawarah dan kesepakatan untuk pemanfaatan obyek berpotensi yang lebih baik

2. Infrastruktur didukung dengan akomodasi 3. Keramahan masyarakat	pertimbangan dalam bentuk investasi yang ditawarkan **S2, O1, O2, O3** Membangun infrastruktur dan akomodasi penunjang wisata dan mempromosikannya **S3, O1, O2, O3** Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata dan membekali masyarakat dengan pelatihan paket wisata	**S2, T1, T2, T3** Menyempurnakan pembangunan infrastruktur dan dengan bekerjasama dengan pihak investor atau pengembang wisata **S3, T1, T2, T3** Mempertahankan keramahan masyarakat dengan membekalinya pelatihan dan rasa sadar budaya minang yang juga bisa menjadi daya tarik bagi sebagian wisatawan
Kelemahan *(Weaknesses)* 1. Kurang mengembangkan obyek wisata budaya dan sejarah 2. Kurang menjaga kebersihan obyek wisata 3. Belum ada ketertiban pada obyek wisata	**WO** **W1, O1, O2, O3** Menjaga wisata peninggalan sejarah dengan menyediakan fasilitas penunjang wisata di sekitar lokasi obyek wisata sejarah dan menanamkan pentingnya nilai-nilai budaya pada masyarakat serta mempromosikannya melalui sosial media dan televisi. **W2, O1, O2, O3** Kurangnya aspek kebersihan pada obyek wisata dikarenakan kurangnya manajemen wisata dan terbatasnya anggaran dana pemerintah daerah hal ini sehingga dapat dipertimbangkan tawaran investasi dari pihak asing. **W3, O1, O2, O3** Belum adanya ketertiban pada sebagian besar obyek wisata dapat dilakukan dengan membekali masyarakat dengan pelatihan paket wisata sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mempromosikan obyek wisata	**WT** **W1, T1, T2, T3** Melakukan pembangunan fasilitas penunjang wisata dan memadukannya dengan pengenalan budaya dan penanaman nilai-nilai kebudayaan pada masyarakat **W2, T1, T2, T3** Memperkuat sistem manajemen pariwisata baik dalam pemerintahan, lingkungan dan kebudayaan untuk bersiap-siap pada resiko bencana alam dan mencegah terjadi pergeseran budaya **W3, T1, T2, T3** Mengoptimalkan pembangunan secara terarah berdasarkan Satuan Kawasan Wisata (SKW) dan kebudayaan untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan

Sumber: analisis, 2016

Tabel 9 Ranking Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan

Unsur SWOT	Keterkaitan	Jumlah bobot	Ranking
Strategi SO			
S1O	S1, O1, O2, O3	1,229	1
S2O	S2, O1, O2, O3	0,661	2
S3O	S3, O1, O2, O3	0,572	4
Strategi ST			
S1T	S1, T1, T2, T4	0,986	3
S2T	S2, T1, T2, T4	0,533	8
S3T	S3, T1, T2, T4	0,329	9
Strategi WO			
W1O	W1, O1, O2, O3	0,567	5
W2O	W2, O1, O2, O3	0,497	6
W3O	W3, O1, O2, O3	0,493	7
Strategi WT			
W1T	W1, T1, T2, T3	0,325	10
W2T	W2, T1, T2, T3	0,255	11
W3T	W3, T1, T2, T3	0,251	12

Posisi arahan strategi pengembangan pariwisata berdasarkan analisis *Matrix Space* adalah strategi SO adalah bahwa pembangunan harus dilakukan karena adanya kekuatan dalam pengembangan pariwisata, sejalan dengan urutan ranking arahan strategi pengembangan berdasarkani urutan bobot yang diperoleh terdapat 4 rencana strategis yaitu SO meliputi : 1) meningkatkan potensi daya tarik dengan promosi wisata, ikut serta dalam kegiatan festival wisata atau mengadakan festival wisata dan menjadikannya layak untuk wisata kelas international serta melakukan pertimbangan dalam bentuk investasi yang ditawarkan; 2) membangun infrastruktur dan akomodasi penunjang wisata dan mempromosikannya; 3) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata dan membekali masyarakat dengan pelatihan paket wisata; dan 4) meningkatkan manajemen mitigasi bencana serta jalur

evakuasi yang jelas dan harus adanya kebijakan dari pemerintah serta musyawarah dan kesepakatan untuk pemanfaatan obyek berpotensi yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

1. Obyek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan teridentifikasi sebanyak 51 obyek yang terdiri atas 8 obyek wisata yang sudah berkembang dan 43 obyek wisata yang belum berkembang;
2. Berdasarkan obyek wisata yang belum berkembang sejumlah 43 obyek, diperoleh 26 obyek wisata berpotensi untuk dikembangkan dan 17 obyek wisata yang kurang berpotensi untuk dikembangkan;
3. Faktor utama yang mempengaruhi minat berkunjung wisatawan adalah obyek wisata terutama wisata bahari atau alam dan pelayanan terutama faktor keamanan dan keramahan;
4. Arahan rencana pengembangan ekowisata berdasarkan Satuan Kawasan Wisata (SKW) terdiri dari 4 yaitu: SKW I terletak pada Kecamatan Koto XI Tarusan dengan 12 obyek, SKW II gabungan dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bayang dan Kecamatan IV Jurai yang berada dekat dengan pusat pemerintahan dengan 12 obyek, SKW III berada pada Kecamatan Bayang Utara dengan 5 obyek dan SKW IV terletak di Kecamatan Sutera dengan 2 obyek dan terdapat pengembangan obyek wisata konservasi penyu dan obyek wisata budaya rumah gadang Mandeh Rubiah berdasarkan keunikan obyek; dan
5. Arahan strategi pengembangan ekowisata di Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 4 rencana strategis yang meliputi: 1) meningkatkan potensi daya tarik dengan promosi wisata dengan keikutsertaan dalam kegiatan festival wisata atau mengadakan festival wisata dan menjadikannya layak untuk wisata kelas international serta melakukan pertimbangan dalam bentuk investasi yang ditawarkan; 2) membangun infrastruktur dan akomodasi penunjang wisata dan mempromosikannya; 3) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekowisata dan membekali masyarakat dengan pelatihan paket wisata; dan 4) meningkatkan manajemen mitigasi bencana serta jalur evakuasi yang jelas dan harus adanya kebijakan dari pemerintah serta musyawarah dan kesepakatan untuk pemanfaatan obyek berpotensi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto. (2005). *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta (ID): Rineka Cipta.

[BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 2016. *Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan*. Painan (ID).

Eriyatno, Sofyar F. 2007. *Riset Kebijakan: Metode Penelitian untuk Pascasarjana*. Bogor: IPB Press.

Gesvita I. 2014. *Karakteristik Wilayah Sawahlunto Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Provinsi Sumatra Bara*t. Bandung (ID): Departemen Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia

Nugroho, I. 2011. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 2015. *Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 Sumatra Barat*. Painan. (ID): Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

EKSPEKTASI WISATAWAN TERHADAP PRODUK WISATA TRANS STUDIO *THEME PARK* MAKASSAR

Amalia Paramitha[1], T.Yoyok Wahyu Subroto[2] dan Bambang Sunaryo[3]

[1]Teknik Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[2] Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[3]Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: amaliaparamitha2016@gmail.com

ABSTRAK

Kesuksesan dan popularitas Trans Studio mampu meningkatkan citra Sulawesi Selatan sebagai Theme Park Indoor yang terbesar di dunia yang merupakan salah satu destinasi utama di Kota Makassar. Terjadinya kesenjangan antara ekspektasi wisatawan terhadap kualitas produk wisata Trans Studio Theme Park Makassar memberikan dampak yang besar pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan dengan mengetahui ekspektasi wisatawan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi wisatawan terhadap kualitas produk wisata Trans Studio Theme Park Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian berada di wilayah Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan. Teknik sampling menggunakan proportionate stratified random sampling dengan memperhatikan sampel proporsional berdasarkan asal dan umur wisatawan. Pembahasan analisis berisi bahasan mengenai temuan segmentasi wisatawan Trans Studio Theme Park Makassar, tingkat ekspektasi wisatawan berdasarkan beberapa indikator kualitas produk, gap yang terjadi antara ekspektasi wisatawan dan kualitas produk wisata Trans Studio Theme Park Makassar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ekspektasi wisatawan.

Kata kunci: Wisatawan, Ekspektasi, Kualitas Produk, dan Kesenjangan

I. PENDAHULUAN

Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam sektor ekonomi dari pendapatan asli daerah. Sektor pariwisata juga berdampak positif pada industri pariwisata Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan yang berada pada posisi strategis sebagai *centre point of Indonesia* menjadikan *hub-interkoneksi* wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu, kesuksesan dan popularitas Trans Studio mampu meningkatkan citra Sulawesi Selatan sebagai *Theme Park Indoor* yang terbesar di dunia yang menjadi salah satu tujuan destinasi utama di Makassar.

Suatu perusahaan mengalami siklus hidup produk dan pasti akan mengalami penurunan. Terjadinya kesenjangan antara ekspektasi wisatawan terhadap kualitas produk wisata Trans Studio *Theme Park* Makassar memberikan dampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Untuk meningkatkan kembali angka kunjungan dan citra destinasi perlu diketahui ekspektasi wisatawan terhadap kualitas produk wisata dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga ditemukan langkah-langkah yang dapat menjadi dasar dalam perbaikan kualitas produk wisata di Trans Studio *Theme Park* Makassar.

Kajian teori yang digunakan adalah teori siklus hidup produk wisata (destinasi), produk wisata *(tourism product)* dan ekspektasi wisatawan. Berikut penjabaran singkat teori tersebut:

a. Teori siklus hidup produk wisata (destinasi)

Siklus hidup suatu produk wisata menyatakan bahwa suatu destinasi setelah mengalami stagnasi akan mengalami fase kemunduran. Hal inilah yang menandakan bahwa destinasi tersebut hidup. Siklus hidup dikemukakan oleh Butler (1980) yang dikenal dengan *destination area lifecycle.* Menurut Pitana (2005:103) siklus hidup area wisata terbagi dalam tujuh fase yaitu: *exploration, involvement, development, consolidation, stagnation,decline dan rejuvenation.*

Untuk memperbaiki keadaan destinasi yang sedang mengalami penurunan *(decline),* maka perlu dievaluasi dari sisi permintaan dan sisi penawaran berdasarkan teori Gun (1994) dalam Syahrul (2010:27) memberikan landasan perencanaan pariwisata yakni sisi penawaran *(supply)* yaitu produk wisata dan sisi permintaan *(demand)* yaitu ekspektasi wisatawan.

b. Produk Wisata *(Tourism Product)*

Produk adalah setiap apa saja yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan (Sumarni dan Soeprihanto, 2010:281). Produk tidak hanya selalu berupa barang tetapi bisa juga berupa jasa ataupun gabungan dari keduanya (barang dan jasa).

Menurut Gilbert (2005:644) produk terdiri atas 4 (empat) tingkatan yaitu *core product* (produk inti), *facilitating product* (pelayanan atau barang), *supporting product* (produk ekstra), dan *augmented product* (akses, atmosfer, interaksi dan partisipasi pelanggan). Produk wisata terdiri atas 4A yaitu atraksi, amenitas, aksesibilitas dan kelembagaan.

Setiap produk memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari wisatawan. Kemampuan tersebut berbeda-beda berdasarkan dimensi kualitasnya. Menurut Wijayanti (2014:174) terdapat 7 (tujuh) dimensi kualitas produk yang terdiri atas fungsi produk, fitur produk, keandalan produk, usia produk, pelayanan produk, estetika produk, dan persepsi kualitas produk.

c. Ekspektasi Wisatawan

Kepuasan ataupun ketidakpuasan wisatawan akan mempengaruhi perilaku wisatawan selanjutnya. Terciptanya kepuasan wisatawan adalah dampak dari terwujudnya harapan-harapan wisatawan terhadap kualitas produk wisata. Apabila wisatawan merasa puas, maka akan menunjukkan kemungkinan berkunjung kembali dan memberikan referensi yang baik kepada orang lain.

Faktor-faktor pembentuk ekspektasi wisatawan faktor internal (segmentasi wisatawan: asal, umur, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, moda transportasi dan teman perjalanan) dan faktor eksternal (*communication by the service provider, price paid, similar experience, and past experience).*

II. METODE

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode penelitian kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan untuk mengetahui karakteristik segmentasi wisatawan yang berkunjung ke Trans Studio *Theme Park* Makassar. Kemudian menganalisis performa produk wisata sehingga dapat mengetahui tingkat ekspektasi wisatawan terhadap produk wisata Trans Studio *Theme Park* Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi wisatawan terhadap produk wisata tersebut. Metode kualitatif dilakukan untuk melakukan verifikasi kepada wisatawan

terhadap temuan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif sebelumnya.

B. Objek dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian berada di Trans Studio *Theme Park* Makassar yang berlokasi di wilayah Tanjung Bunga Makassar. Kawasan yang merupakan kawasan wisata terpadu yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga No. 28, Maccini Sombala, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah objek yang merupakan sumber informasi/data dalam suatu penelitian. Tiro (2004) membedakan dua macam populasi, yaitu: populasi sampel dan populasi target. Populasi target dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berada di wilayah Indonesia bagian timur baik itu wisatawan aktual maupun potensial. Populasi sampel adalah wisatawan aktual yang sedang dan pernah berkunjung ke Trans Studio *Theme Park* Makassar yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur.

Penelitian ini menggunakan Teknik sampling *Proportionate stratified random sampling,* pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan memperhatikan strata (kelompok) secara proporsional berdasarkan asal dan umur wisatawan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel yang terdiri atas 28 sampel wisatawan yang pertama kali berkunjung dan 72 sampel wisatawan yang berulang kali berkunjung.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

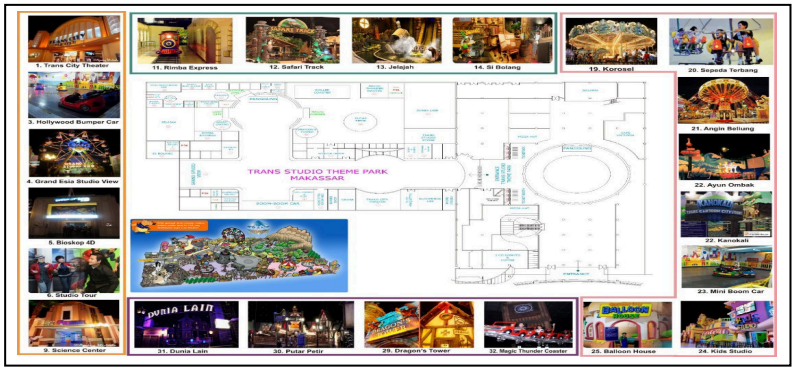
Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi lapangan, menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner sebagai instrumen penelitian, metode wawancara dan studi literatur.

Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis multivariat untuk merumuskan segmentasi dan ekspektasi wisatawan dari produk wisata Trans Studio *Theme Park* Makassar, analisis *cross tabulasi* Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi wisatawan terhadap kualitas produk wisata Trans Studio *Theme Park* Makassar*,* analisis Wilcoxon *Signage-Rank Test* untuk mengetahui kesenjangan *(gap)* antara ekspektasi wisatawan terhadap kualitas produk wisata*,* dan analisis IPA *(Importance Performance Analysis)* untuk mengetahui skala prioritas pada indikator-indikator kualitas produk.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Trans Studio merupakan taman hiburan *indoor* terbesar di Indonesia bahkan di dunia dengan luas 2,7 hektar. Trans Studio *Theme Park* Makassar dengan menyajikan 21 wahana permainan dengan bermacam bentuk hiburan. Berikut kondisi *eksisting* di Trans Studio *Theme Park*:



(Sumber: Survei, 2016)

Gambar 1. Kondisi Eksisting Trans Studio Theme Park Makassar

B. Profil Responden (Segmentasi Wisatawan)

Berikut gambaran profil responden berdasarkan hasil survei sehingga dapat diketahui karakteristik segmentasi wisatawan Trans Studio *Theme Park* Makassar secara umum:

Tabel 1. Profil Wisatawan

No.	Segmentasi	Profil wisatawan
1.	Segmentasi wisatawan berdasarkan geografis (asal wisatawan)	Wisatawan dominan yang berkunjung berasal dari Kota Makassar (wisatawan *origin*) dengan persentase sebanyak 77%.
2.	Segmentasi wisatawan berdasarkan sosial-demografi (usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis pekerjaan, dan pendapatan)	1) Usia, didominasi wisatawan yang berusia antara 24-50 tahun dengan persentase sebanyak 83%.
		2) Jenis kelamin, didominasi wisatawan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 53%
		3) Tingkat pendidikan, didominasi oleh wisatawan lulusan S1 sebanyak 80%.
		4) Jenis Pekerjaan, didominasi oleh pegawai pemerintah (PNS/ TNI/ POLRI/ Dokter, dll) dengan persentase sebanyak 34%.
		5) Jumlah pendapatan, didominasi oleh wisatawan yang memiliki tingkat pendapatan di atas UMR (Upah Minimum Regional) dengan persentase sebanyak 70%.
3.	Segmentasi wisatawan berdasarkan karakteristik perjalanan wisata	1) Jenis transportasi wisatawan, didominasi wisatawan menggunakan kendaraan pribadi (Mobil atau Motor) dengan persentase sebanyak 93%
		2) Teman perjalanan wisatawan, didominasi sebagian besar bersama keluarga dengan persentase sebanyak 63%.
4.	Motivasi wisatawan berkunjung ke Trans Studio *Theme Park* Makassar	Motivasi wisatawan berkunjung adalah karena ingin melepaskan diri dari kejenuhan, penyegaran dan bergembira bermain dengan persentase sebanyak 69%. Wisatawan termotivasi karena informasi yang bersumber dari teman dan keluarga.
5.	Faktor-faktor yang memotivasi wisatawan berkunjung ke Trans Studio *Theme Park* Makassar	1) Faktor pendorong *(push factor),* berdasarkan hasil analisis **tidak ditemukan faktor pendorong** dari dalam diri wisatawan yang memotivasi untuk memilih Trans Studio Theme Park Makassar sebagai destinasi yang akan dikunjungi.
		2) Faktor penarik *(pull factor),* berdasarkan hasil analisis di atas ditemukan hubungan yang signifikan pada kategori **teman perjalanan** yang menjadi faktor penarik wisatawan berkunjung ke Trans Studio *Theme Park* Makassar.

No.	Segmentasi	Profil wisatawan
6.	Frekuensi berkunjung wisatawan ke Trans Stufio *Theme Park*	Didominasi oleh wisatawan yang telah berulang kali (≥ 2 kali) berkunjung dengan tujuan untuk melepas kejenuhan, penyegaran, dan bergembira dengan bermain yang dilakukan bersama keluarga dan kebanyakan yang berkunjung wisatawan yang berdomisili di Makassar.

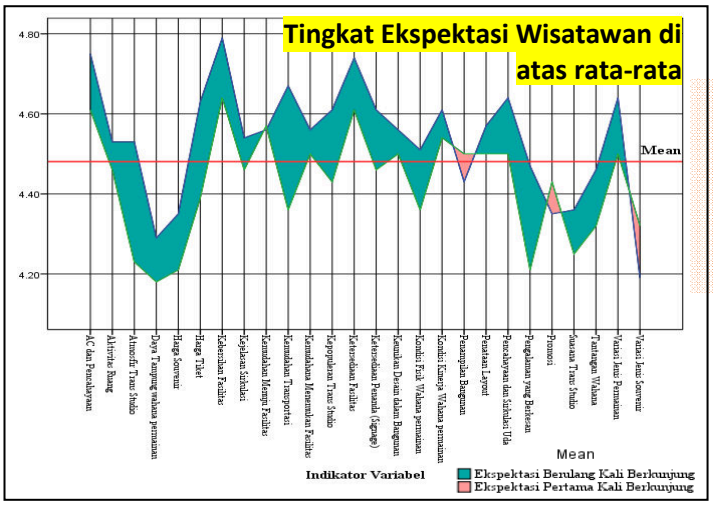
(Hasil Survei, 2016)

C. *Analisis Ekspektasi Wisatawan*

1. Analisis Ekspektasi wisatawan

Berikut gambar tingkat ekspektasi wisatawan rata-rata terhadap indikator variabel yang telah ditentukan:

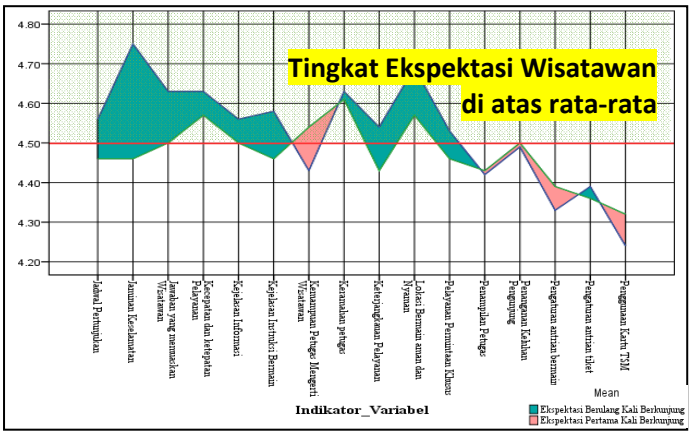
a. Tingkat Ekspektasi Wisatawan Terhadap Kualitas Produk Wisata



(Sumber: Analisis, 2016)

Gambar 2. Interval Tingkat ekspektasi Wisatawan terhadap kualitas produk wisata Trans Studio Theme Park Makassar

b. Tingkat Ekspektasi Wisatawan Terhadap Kualitas Pelayanan Wisata



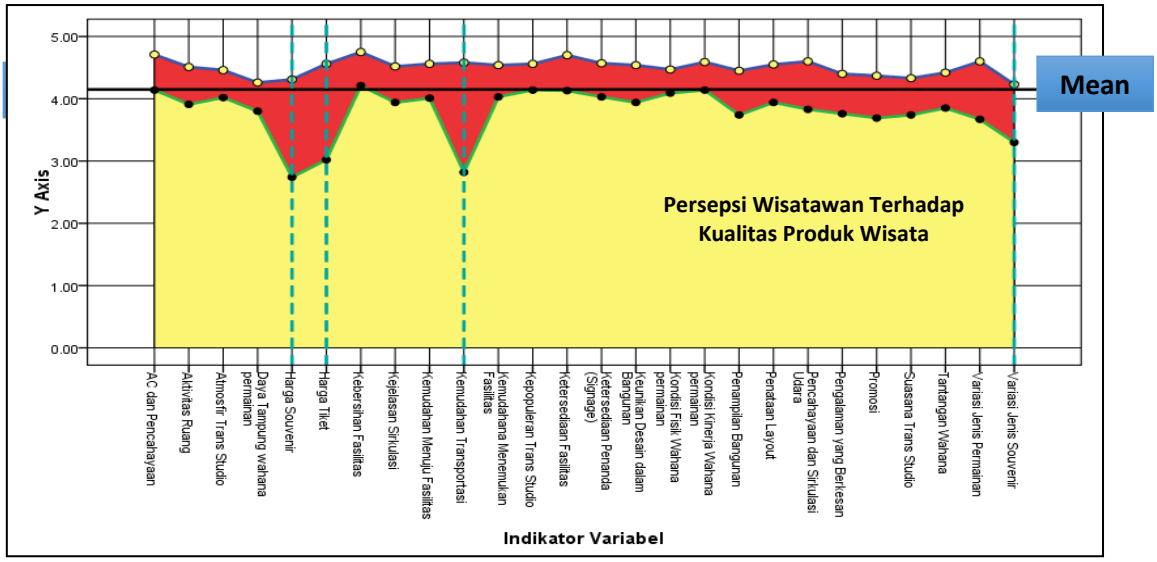
(Sumber: Analisis, 2016)

Gambar 3. Interval Tingkat ekspektasi Wisatawan terhadap kualitas pelayanan wisata Trans Studio Theme Park Makassar

2. Analisis Gap (Kesenjangan)

Berikut gambar grafik gap antara ekspektasi wisatawan terhadap indikator variabel yang telah ditentukan:

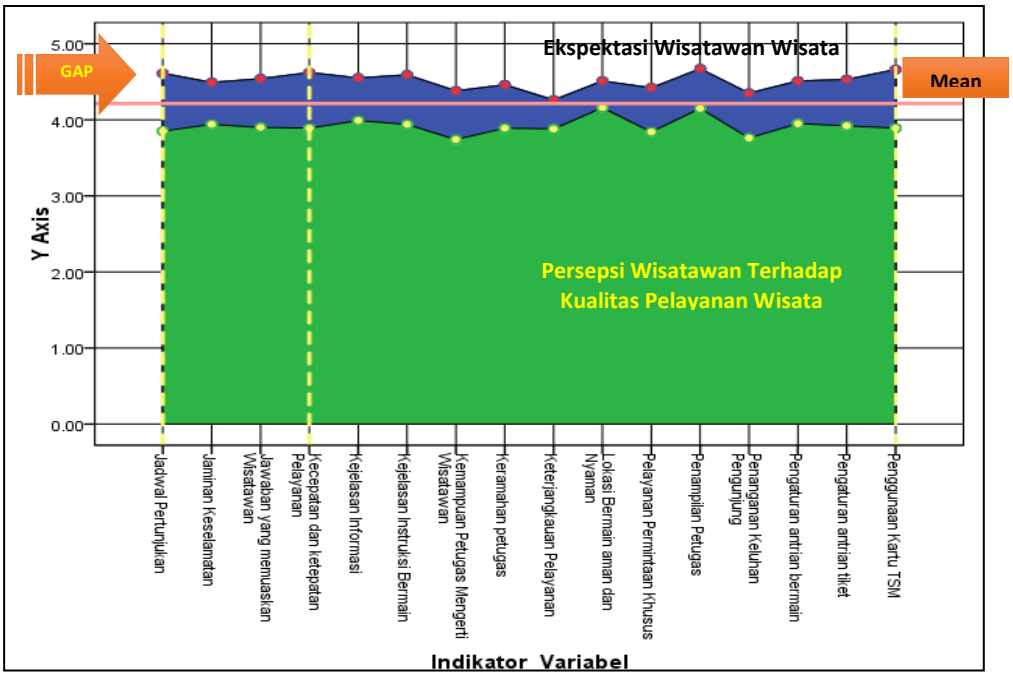
a. Gap Ekspektasi Wisatawan Terhadap Kualitas Produk Wisata



(Sumber: Analisis, 2017)

Gambar 4. Grafik Gap Ekspektasi wisatawan terhadap Kualitas Produk Wisata Trans Studio Theme Park Makassar

b. Gap Ekspektasi Wisatawan Terhadap Kualitas Pelayanan Wisata



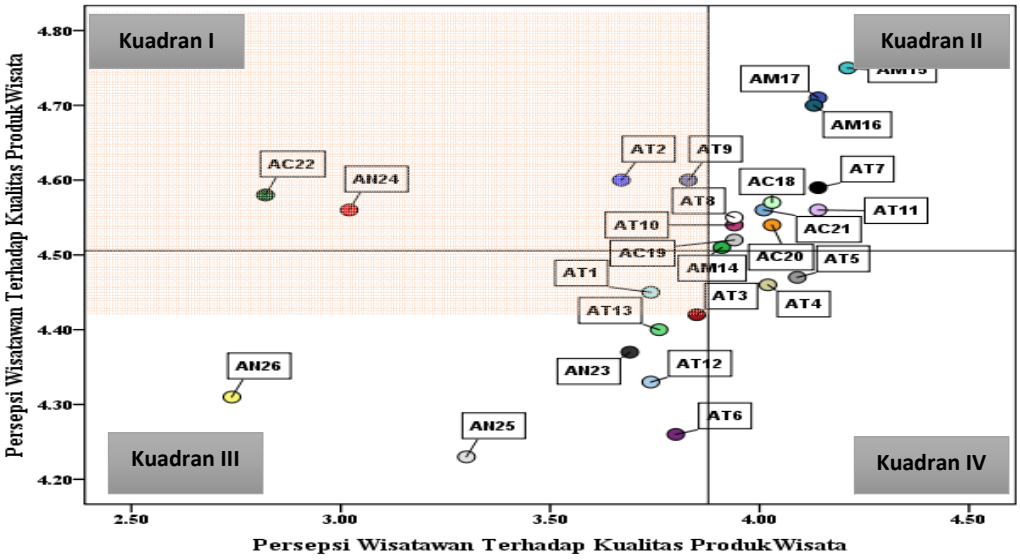
(Sumber: Analisis, 2017)

Gambar 5. Grafik Gap Ekspektasi wisatawan terhadap Kualitas Pelayanan Wisata Trans Studio Theme Park Makassar

3. Analisis IPA *(importance Performance Analisis)*

Berikut analisis IPA terkait mengidentifikasi indikator-indikator dalam menangani masalah peningkatan produk wisata berdasarkan skala prioritas:

a. Matrix IPA terkait Indikator Kualitas Produk Wisata

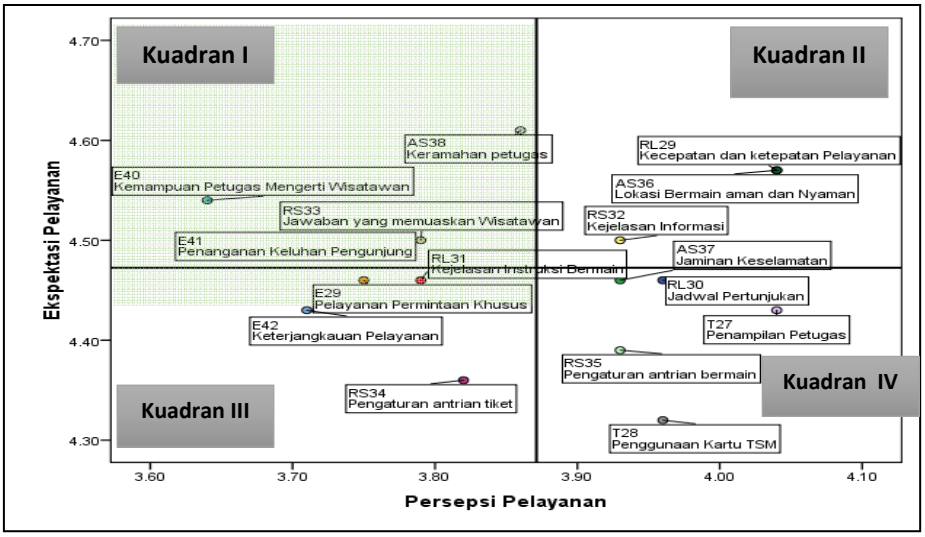


(Sumber: Analisis, 2017)

Gambar 6. Matrix IPA terkait Indikator Kualitas Produk Wisata Trans Studio Theme Park Makassar

Berdasarkan hasil analisis di atas, indikator yang dianggap penting dan diharapkan wisatawan namun kondisi kualitasnya dirasa belum memuaskan sehingga perlu diprioritaskan untuk lebih ditingkatkan terdapat pada kuadran I dengan indikator: variasi jenis permainan (AT2), Pencahayaan dan Sirkulasi Udara (AT9). kemudahan transportasi (AC22) dan harga tiket (AN24).

b. Matrix IPA terkait Indikator Kualitas Pelayanan Wisata



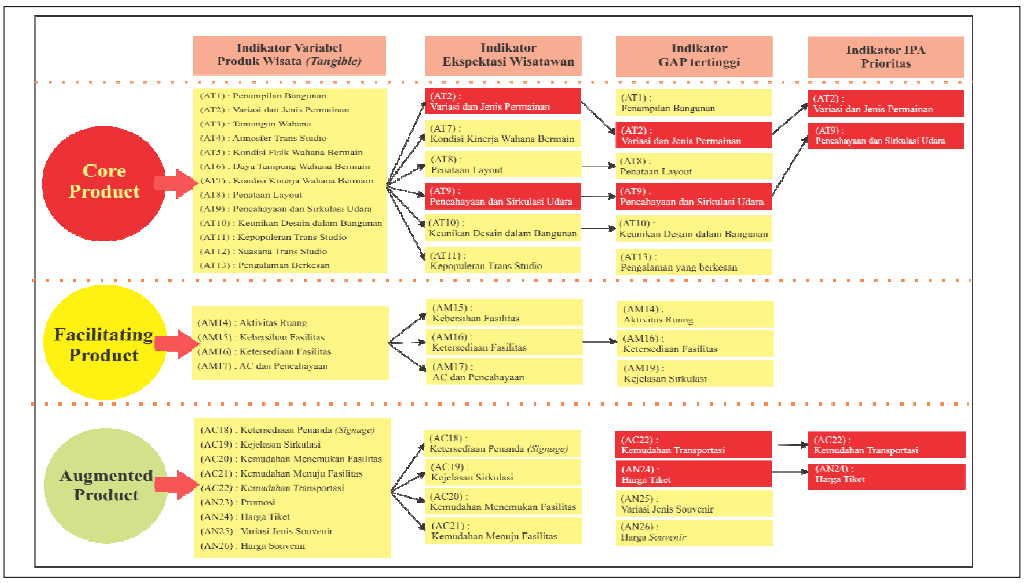
(Sumber: Analisis, 2017)

Gambar 7. Matrix IPA terkait Indikator Kualitas Pelayanan Wisata Trans Studio Theme Park Makassar

Berdasarkan hasil analisis di atas, indikator yang dianggap penting dan diharapkan wisatawan namun kondisi kualitasnya dirasa belum memuaskan sehingga perlu diprioritaskan untuk lebih ditingkatkan terdapat pada indikator: jawaban yang memuaskan wisatawan (AS33), keramahan petugas (AS38), kemampuan petugas mengerti wisatawan (E40), dan penanganan keluhan pengunjung (E41).

D. Pembahasan Hasil Analisis

Berikut pembahasan hasil analisis tingkat ekspektasi wisatawan terhadap produk wisata Trans Studio *Theme Park* Makassar:



Gambar 8. Hasil analisis Ekspektasi Wisatawan, Gap dan IPA
Tangible Product Tourism
(Sumber: Analisis, 2017)

Tabel di atas menunjukkan tingkat ekspektasi wisatawan, Gap (kesenjangan) dan indikator prioritas variabel. Berdasarkan tabel tersebut tingkat dari beberapa variabel berbeda-beda sesuai faktor yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa variabel yang memiliki tingkat ekspektasi yang tinggi, memiliki tingkat kesenjangan cukup tinggi dan memiliki nilai prioritas yang sangat perlu diperhatikan oleh perusahan untuk meningkatkan nilai jual produknya.

Berikut beberapa indikator variabel yang sangat perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kualitas produk wisata Trans Studio Theme Park Makassar:

1. ***Core product :*** variasi dan jenis permainan

   Terjadinya ketidaksesuaian harapan terhadap kualitas variasi jenis permainan. Kebanyakan dari wisatawan merasa bahwa variasi jenis permainan kurang variatif, tidak adanya wahana *(entertainment)* yang baru, kurang menantang, kurang memacu adrenalin, dan wisatawan merasa bahwa kebanyakan permainan disuguhkan untuk anak-anak.

2. ***Core Product :*** Pencahayaan dan Sirkulasi Udara

   Wisatawan merasakan ketidaknyamanan terhadap pencahayaan yang terlalu gelap dan sirkulasi udara yang sangat panas. Managemen Trans Studio *Theme Park* Makassar butuh mengadakan perbaikan dan peningkatan kualitas untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap kenyamanan selana berada di lokasi bermain.

3. ***Augmented Product*** **:** Kemudahan Transportasi

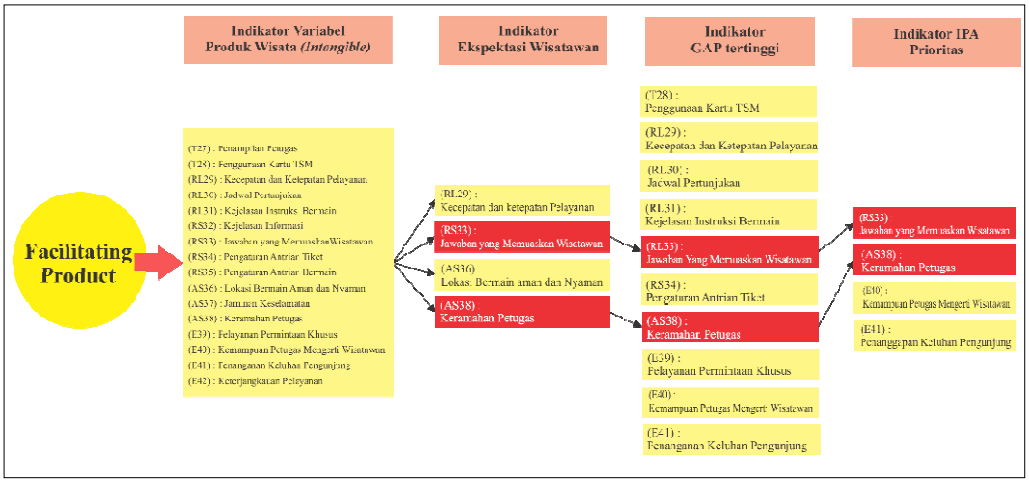
   Wisatawan merasa bahwa lokasi Trans Studio *Theme Park* Makassar dirasa sangat jauh dari pusat kota dan akses menuju lokasi sangat susah, belum ada jalur transportasi angkutan umum pete-pete yang menuju ke lokasi Trans Studio *Theme Park* Makassar

   Selain itu, belum adanya akses khusus yang menghubungkan antara kota-kota yang menjadi target pasar Trans Studio *Theme Park* Makassar sehingga menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi calon wisatawan untuk berkunjung ke Trans Studio *Theme Park* Makassar.

4. ***Augmented Product*** **:** Harga Tiket

   Wisatawan merasa keberatan terhadap harga yang ditawarkan oleh Trans Studio *Theme Park* Makassar dengan tidak adanya perbedaan harga antara anak-anak dan orang dewasa. Harga tiket juga dirasa relatif mahal dari jumlah variasi jenis permainan yang ditawarkan.

Berikut pembahasan terkait tingkat ekspektasi wisatawan terhadap indikator-indikator variabel produk wisata (*intangible)* Trans Studio *Theme Park* Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya:



Gambar 9. Hasil analisis Ekspektasi Wisatawan, Gap dan IPA terhadap *intangible product tourism*
(Sumber: Analisis, 2017)

Wisatawan yang merasakan ketidaksesuaian dengan harapan terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan sebagian besar menyatakan bahwa pelayan di Trans Studio *Theme Park* Makassar tidak melayani dengan ramah baik dalam memberikan ucapan selamat datang, memberikan senyuman dan memasang wajah ramah. Hal ini menunjukkan bahwa kurang profesionalnya dalam memberikan layanan kepada para wisatawan yang sedang berkunjung.

Terjadinya GAP tersebut di atas menimbulkan kekecewaan kepada wisatawan sehingga wisatawan memberikan pernyataan negatif sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kualitas produk dan layanan yang dirasakan. Hal ini menyebabkan wisatawan merasa bahwa Trans Studio *Theme Park* Makassar sudah tidak menarik lagi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wisatawan memiliki tingkat ekspektasi berbeda-beda terhadap indikator produk dan pelayanan.
   a. Tingkat ekspektasi wisatawan yang tertinggi pada kategori *core product,* wisatawan sangat menaruh harapan pada indikator variasi jenis permainan, pencahayaan dan sirkulasi udara.

   Wisatawan menaruh harapan pada peningkatkan mutu kualitas permainan dengan variasi jenis permainan yang lebih ekstrim dan permainan yang bersifat edukatif. Untuk pencahayaan dan sirkulasi udara, wisatawan menaruh harapan untuk perlu diadakannya evaluasi dan perbaikan pencahayaan dan sirkulasi udara di titik-titik lokasi bermain seperti di *Grand Esia Studio View, safari track dan si bolang* baik itu dari sisi perletakan cahaya ataupun mengubah tata *layout* ruang.

   b. Untuk kategori *augmented product* terdapat pada kemudahan transportasi dan harga tiket. Wisatawan yang berasal dari Kota Makassar maupun dari kota-kota yang berada di sekitarnya, menaruh harapan besar pada kemudahan akses menuju lokasi bermain. Lokasi yang jauh dan akses yang sulit menuju ke lokasi membuat wisatawan berfikir dua kali untuk datang berkunjung.

   Untuk indikator harga, diharapkan adanya perbaikan penentuan harga tiket masuk dan jadwal pertunjukan yang jelas. Berdasarkan wawancara mendalam saat melakukan verifikasi hasil penelitian, penetapan harga tiket berdasarkan persepsi wisatawan yang berkunjung yaitu: tiket untuk anak usia 5-9 tahun ditentukan dengan harga 50% dari harga tiket dewasa, tiket untuk usia remaja 10-15 tahun ditentukan dengan harga 75% dari harga tiket dewasa, dan tiket untuk dewasa 16 tahun ke atas dikenakan biaya *full.*

   c. Untuk kategori *facilitating product (serviceability)* terdapat pada indikator jawaban yang memuaskan dan keramahan petugas.

   Wisatawan yang berkunjung merasa bahwa para pelayan di Trans Studio *Theme Park* Makassar sangat tidak ramah dan tidak memberikan *feedback* yang baik atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan wisatawan. Sehingga sistem manajemen pelayanan dari pihak Trans Studio *Theme Park* Makassar dirasa kurang maksimal dalam melayani wisatawan.

2. Secara general ekspektasi wisatawan terhadap kualitas produk wisata di Trans Studio *Theme Park* Makassar dipengaruhi oleh faktor internal (asal, usia, jenis kelamin, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan dan tujuan berekreasi wisatawan), sedangkan faktor eksternal (kesan dari teman/keluarga, harga, pengalaman sebelumnya, iklan-iklan dari perusahaan Trans Studio *Theme Park* Makasar).

Selain ditemukannya faktor internal dan eksternal, juga diketahui bahwa frekuensi kunjungan mempengaruhi tingkat ekspektasi wisatawan terhadap kualitas produk wisata yang dirasakan wisatawan.

Berikut rekomendasi yang diusulkan berdasarkan beberapa aspek yang ditemukan pada hasil penelitian. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas produk Trans Studio Theme Park Makassar:

1. Perlu diadakan diversifikasi produk terutama variasi jenis permainan yang lebih memacu adrenalin wisatawan dan jenis permainan yang bersifat edukatif.

2. Perlu diadakan evaluasi terkait sistem pencahayaan dan sirkulasi udara di beberapa titik lokasi bermain seperti: *Grand Esia Studio View, safari track dan si bolang.*
3. Perlu diadakan evaluasi terkait kemudahaan transportasi bagi target pasar baru yang berada di luar Kota Makassar. Salah satunya dengan perencanaan bus antar dan jemput pada waktu liburan, dan bekerjasama dengan pihak dinas perhubungan dalam rangka penambahan trayek angkutan umum menuju ke lokasi Trans Studio Theme Park Makassar.
4. Perlu diadakannya evaluasi terhadap harga tiket di Trans Studio Theme Park Makassar dengan membedakan harga tiket anak-anak, remaja dan orang dewasa, dengan spesifikasi harga tiket untuk anak dengan usia 5-9 tahun 50% dari harga tiket dewasa, untuk usia remaja 10- 15 tahun 75% dari harga tiket dewasa dan untuk usia dewasa 16 tahun ke atas dikenakan biaya full. Selain itu perlu diadakannya pembuatan kalender pertunjukan sehingga harga tiket dapat disesuaikan dan tidak sewaktu-waktu langsung naik.
5. Pengadaan pelatihan dan peningkatan *skill* dalam rangka meningkatkan kemampuan kualitas pelayanan dalam memahami keinginan wisatawan dan sikap ramah kepada wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Gilbert, David. et.al. 2005. Third Edition. ***Tourism Principles and Practice***. Prentice Hall. England.

Pitana, I. G dan Gayatri, P.G. 2005. **Sosiologi Pariwisata**. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Syahrul. 2010. **Pengaruh Faktor Psikografi Kunjungan Pasar Wisman Terhadap Pengembagan Produk Wisata di Sulawesi Selatan.** MPAR. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. 2010. **Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan).** Edisi ke 5. Yogyakarta: Liberty Yogyakrta

Wijayanti, Titik. Ir., FI., MM. 2014. Second Edition. ***Marketing Plan!*** **Dalam Bisnis**. PT Elex Media Komputindo. Jakarta

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BUDAYA KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR

Hasan
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang, Malang
Email:hasandoctor88@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata adalah kegiatan seseorang dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan perbedaan waktu kunjungan dan motivasi kunjungan. Menurut Pandit (l990), pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktifitas lainnya. Kota Batu yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki konsep sebagai kota pariwisata sudah memiliki berbagai macam obyek wisata alam, wisata buatan, dan juga wisata budaya. Hal ini sejalan dengan visi serta misi penataan ruang Kota Batu yakni menjadikan Kota Batu sebagai kota wisata dan Agropolitan di Jawa Timur, dengan salah satu misinya yaitu meningkatkan posisi dan peran Kota Batu dari kota wisata menjadi sentra wisata yang diperhitungkan di tingkat regional atau bahkan nasional, dengan melakukan penambahan ragam obyek dan atraksi wisata yang didukung oleh sarana dan prasarana serta unsur penunjang wisata yang memadai dengan sebaran yang relatif merata di penjuru wilayah Kota Batu guna memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi pengangguran dan meningkatakan pendapatan warga maupun PAD Kota Batu yang berbasis Pariwisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun strategi pengembangan pariwisata budaya di Kota Batu Provinsi Jawa Timur. Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi jenis-jenis wisata budaya di Kota Batu (2) menganalisa potensi dan permasalahan wisata budaya di Kota Batu (3) merumuskan strategi pengembangan pariwisata budaya di Kota Batu. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisa kelayakan lahan, analisa kependudukan, analisa IFAS-EFAS, dan analisa SWOT

Kata kunci : pariwisata, objek wisata, wisata budaya, strategi pengembangan

I. PENDAHULUAN

Pariwisata adalah kegiatan seseorang dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan perbedaan waktu kunjungan dan motivasi kunjungan. Menurut Pandit (l990), pari-wisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktifitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang komplek juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan dan cinderamata, penginapan dan transportasi, secara ekonomis juga dipandang sebagai industri.

Kota Batu memiliki konsep sebagai Kota Pariwisata, saat ini Kota Batu sudah memiliki berbagai macam obyek wisata alam, wisata buatan, dan juga wisata budaya. Hal ini sejalan dengan visi serta misi penataan ruang Kota Batu. Visi pentaan ruang Kota Batu yakni menjadikan Kota Batu sebagai Kota Wisata dan Agropolitan di Jawa Timur, dengan salah satu misinya yaitu meningkatakan posisi dan peran Kota Batu dari kota wisata menjadi sentra wisata yang diperhitungkan di tingkat regional atau

bahkan nasional, dengan melakukan penambahan ragam obyek dan atraksi wisata, yang di dukung oleh sarana dan prasarana serta unsur penunjang wisata yang memadai dengan sebaran yang relatif merata di penjuru wilayah Kota Batu guna memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi pengangguran dan meningkatakan pendapatan warga maupun PAD Kota Batu yang berbasis Pariwisata. Sebagai Kota yang memiliki tujuan dan opsi wisata terlengkap di Jawa Timur, Kota Batu bahkan dicanangkan menjadi sentral wisata Jawa Timur. Untuk mendukung Kota Batu sebagai Kota Wisata bertaraf nasional bahkan internasional, Dinas Pariwisata dn Kebudayaan Kota Batu memiliki program yaitu pusat informasi pariwisata untuk nantinya dapat memberikan pelayan kepariwisataan terhadap wisatawan melalui komunikasi langsung, media online, dan media cetak bahkan juga memberikan pelayan berupa pemandu wisata (*guide*).

II. METODE

Metode adalah langkah - langkah yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Pada metodologi penelitian ini akan diuraikan segala hal yang berkenaan dengan cara dan metode yang digunakan pada penyusunan laporan penelitian, diantaranya metode pengumpulan data dan metode analisa.

a. Metode Pengumpulan Data

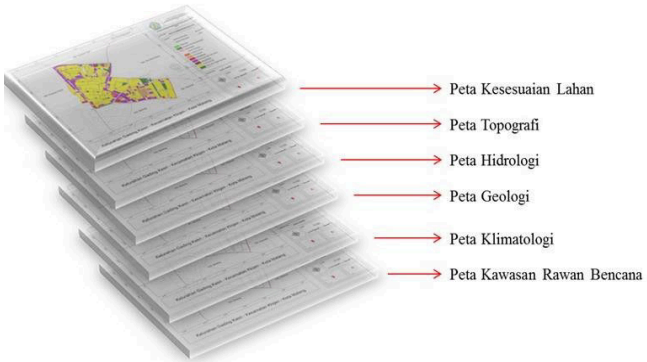
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei primer dan survei sekunder. Kegiatan survei primer dilakukan dengan cara menggali informasi tentang pariwisata dengan mengadakan wawancara kepada masyarakat, melihat lansung lokasi pariwisata, dan melakukan dokumentasi.sedangkan untuk survei sekunder dilakukan dengan cara mencari data-data di instansi, dalam hal ini instansi yang dituju adalah Dinas Pariwisata Kota Batu.

b. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kelayakan lahan, analisa kependudukan, analisa EFAS-IFAS, dan analisa SWOT

1) Analisa Kelayakan Lahan

Analisa fisik dasar ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kesesuaian lahan untuk suatu kegiatan, adapun metode yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian lahan adalah metode super impose/ overlay peta fisik dasar, yang biasanya terdiri dari beberapa variabel berikut, yakni Topografi, Hidrologi, Geologi, Klimatologi dan Daerah rawan bencana.



Gambar 1. Ilustrasi Metode Super Impose

2) Analisa IFAS-EFAS

IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*) adalah pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor srtategis. Faktor strategis adalah faktor dominan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang memberikan pengaruh terhadap kondisi dan situasi yang ada dan memberikan keuntungan bila dilakukan tindakan posistif. (Robert G. Dyson, 1990: 8-12). Menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan. Masalah strategis yang akan dimonitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhi pariwisata dimasa yang akan datang. Menganalisis lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman. Masalah strategis yang akan dimonitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhi pariwisata dimasa yang akan datang.

3) Analisa SWOT

Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. Menurut Drs. Robert Simbolon, MPA (1999), analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki dan dihadapi, yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan-kelemahan (weaknesses), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (oppotunities) dan ancaman-ancaman (threats).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Potensi Wisata Budaya Kota Batu

Sejak abad ke-10 SM, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok , seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sindok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti. Wisata Budaya tersebar merata di seluruh Kota Batu, hal ini dikarenakan masyarakatnya yang masih teguh memegang kepercayaan akan kearifan lokal. Hal ini yang mendukung pelestarian budaya di Kota Batu, terutama hal yang bersifat sakral dan mistis, semisal punden. Wisata budaya dalam pembahasan ini dikelompokan menjadi dua kelompok, yakni Antraksi Kebudayaan dan Cagar Budaya.

1) Atraksi Budaya

Antraksi kebudayaan berorientasi pada seni pertunjukan. Kesenian yang menarik di Kota Batu pada umumnya berupa tarian – tarian serta pementasan wayang.

Tabel.1 Persebaran Atraksi Kebudayaan di Kota Batu Tahun 2016

No.	Nama Desa / Kelurahan	Antraksi Kebudayaan		Jumlah
1.	Junrejo	- Terbang Jidor - Campursari - Tari Kendang - Pencak Silat - Ludruk		5
2.	Beji	- Terbang Jidor - Pencak Silat - Tari Naga (leang-leong) - Kuda Lumping - Selamatan Desa	Tari Naga	5
3.	Dadaprejo	- Jaran Kepang - Bantengan - Terbang Jidor - Selamatan Desa - Serabian - Barikan (tutup tandur)	Jaran Kepang	6
4.	Pendem	- Pencak Silat - Terbang Jidor - Bantengan - Orkes Melayu - Kuda Lumping - Javen - Panen Rojo - Selamatan Desa - Serabian - Suroan	Pencak Silat	7
5.	Mojorejo	- Terbang Jidor - Kuda Lumping - Karawitan - Wayang Orang - Bantengan - Campur Sari	Wayang Orang	6

2) Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan warisan dan kekayaan dunia. Cagar budaya memiliki nilai budaya, sejarah dan juga estetika di dalamnya. Cagar budaya di Kota Batu pada umumnya berupa punden, arca dan peninggalan zaman Kerajaan Singosari, Belanda dan juga Jepang.

Tabel.2 Persebaran Cagar Budaya di Kota Batu Tahun 2016

No.	Nama Desa / Kelurahan	Antraksi Kebudayaan		Jumlah
1.	Junrejo	- Punden Telogorejo - Makam Mbah Wiwit	 	2
2.	Beji	- Punden Beji - Punden Ngemplak - Lumpang Kentheng	Lumpang Kentheng	3
3.	Pendem	- Makam Mbah Marwan - Makam K. H. Silaiman Toyib - Punden Pendem	Punden Pendem (Arca)	3
4.	Mojorejo	- Punden Mojorejo - Vihara Dhamma Dipa Arama		4

b. Hasil Analisa

1) Analisa Kelayakan Lahan

Hasil analisa kelayakan lahan Kota Batu di tunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel.3 Analisa Kriteria Kelayakan Lahan Kota Batu

No.	Kelerengan	Nilai	Jenis Tanah	Nilai	Curah Hujan	Nilai	Total Nilai	Kelayakan Lahan
1	25 - 40%	12	Alluvial	3	14,08 mm/hari	2	17	Lahan Layak Bangun Bersyarat
2	26 - 40%	12	Latosol	6	14,08 mm/hari	2	20	Lahan Layak Bangun Bersyarat
3	27 - 40%	12	Kambisol	7	14,08 mm/hari	2	21	Lahan Layak Bangun Bersyarat
4	28 - 40%	12	Andosol	9	14,08 mm/hari	2	23	Lahan Tidak Layak Bangun
5	> 40%	16	Alluvial	3	14,08 mm/hari	2	21	Lahan Layak Bangun Bersyarat
6	> 40%	16	Latosol	6	14,08 mm/hari	2	24	Lahan Tidak Layak Bangun
7	> 40%	16	Kambisol	7	14,08 mm/hari	2	25	Lahan Tidak Layak Bangun
8	> 40%	16	Andosol	9	14,08 mm/hari	2	27	Lahan Tidak Layak Bangun

Kelayakan lahan yang ada di Kota Batu hanya ada 2 yaitu lahan layak bangun bersyarat dan lahan tidak layak bangun. Kriteria kelayakan lahan yang dipakai adalah sebagai berikut :

a. Lahan Layak Bangun : Yang termasuk ke dalam kawasan ini adalah kawasan dengan total skor 9 – 15
b. Lahan layak bangun bersyarat : Yang termasuk ke dalam kawasan ini adalah kawasan dengan total skor 16 – 22
c. Lahan Tidak Layak Bangun : Yang termasuk ke dalam kawasan ini adalah kawasan dengan total skor 22 -31

2) Analisa IFAS-EFAS

Hasil analisa IFAS-EFAS pariwisata budaya Kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel.4 Analisa IFAS

Faktor-Faktor Strategis	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
Kekuatan			
1. Adanya peran masyarakat	0,15	3	0,45
2. Memiliki nilai sejarah	0,15	4	0,6

Faktor-Faktor Strategis	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
3. Masih terawat/belum terjamah/ masih alami	0,14	3	0,42
4. Memiliki nilai estetika	0,14	2	0,28
5. Tersebar merata di semua desa wisata/ non wisata	0,13	2	0,26
6. Lebih tinggi dalam hal jumlah (kuantitas) dibanding jenis wisata lainnya.	0,14	3	0,42
7. Ada regulasi/ peraturan pemerintah yang melindungi dan mengelola	0,15	4	0,6
Jumlah	1,00		3,03
Kelemahan			
1. Aksesbilitas kurang	0,19	- 2	- 0,38
2. Masih banyak potensi pariwisata yang belum dikembangkan.	0,20	- 2	- 0,4
3. Biro wisata atau paket wisata belum memadai.	0,19	- 2	- 0,38
4. Kurangnya koordinasi antar sektor terkait.	0,21	- 1	- 0,21
5. Animisme masyarakat yang masih kuat.	0,21	- 2	- 0,42
Jumlah	1,00		- 1,79

Tabel.5 Analisa EFAS

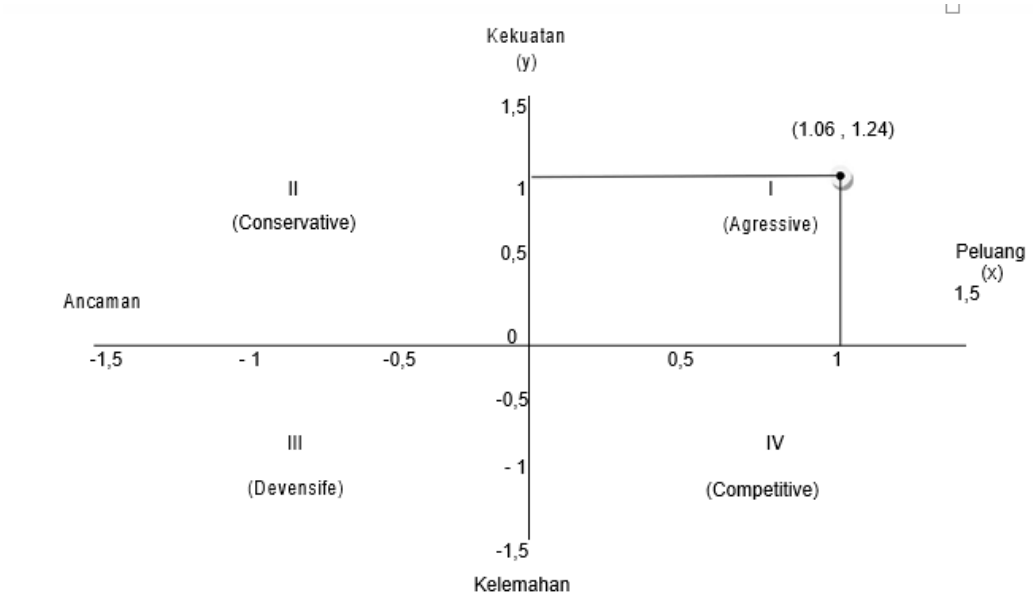
Faktor-Faktor Strategis	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
Peluang			
1. Adanya komitmen dari pemerintah dan kebijakan.	0,21	4	0,84
2. Adanya komitmen dari masyarakat.	0,20	3	0,60
3. Peluang investasi.	0,19	2	0,38
4. Tingginya minat wisatawan asing terhadap kebudayaan Indonesia	0,21	4	0,84
5. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.	0,19	2	0,38
Jumlah	1,00		3,04
Ancaman			
1. Masih rentan terhadap perilaku kriminal dan vandalisme.	0,20	- 2	- 0,40

Faktor-Faktor Strategis	Bobot	Nilai	Bobot x Nilai
2. Persaingan antar objek wisata.	0,19	- 3	- 0,57
3. Citra pariwisata sebagai pendorong praktek prostitusi dan seks bebas	0,21	- 1	- 0,21
4. Perilaku negatif wisatawan yang kurang menghargai norma setempat	0,20	-2	- 0,40
5. Kecenderungan pengalihan fungsi lahan pada lokasi situs cagar budaya.	0,20	-2	- 0,40
Jumlah	1,00		- 1,98

Sumber: Analisis

Jumlah Total IFAS (sumbu y) = Total Bobot Kekuatan + Total Bobot Kelemahan
= 3,03 + (- 1,79)
= 1,24

Jumlah Total EFAS (sumbu x) = Total Peluang + Total Bobot Ancaman
= 3,04 + (-1,98)
= 1,06



Berdasarkan hasil analisa IFAS-EFAS di atas, didapatkan kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata budaya di Kota Batu berada pada kuadran I (agresif) yang artinya sangat berpotensi dan menjanjikan jika dikembangkan.

3) Analisa SWOT

Hasil analisa SWOT pengembangan pariwisata budaya Kota Batu ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel.5 Analisa SWOT

IFAS EFAS	Strenght : 1. Adanya peran masyarakat 2. Memiliki nilai sejarah 3. Masih terawat 4. Memiliki nilai estetika 5. Tersebar merata di semua desa	Weakness : 1. Aksesbilitas kurang 2. Masih banyak potensi wisata yang belum dikembangkan 3. Kurangnya koordinasi antar sektor terkait 4. Biro wisata belum memadai 5. Animisme masyarakat masih kuat
Opportunity : 1. Adanya komitmen dan kebijakan dari pemerintah 2. Adanya komitmen dari masyarakat 3. Peluang investasi	Strenght – Opportunity : 1. Pengembangan paket-paket wisata yang ada dengan menyisipkan objek wisata budaya di dalamnya 2. Pengembangan objek pariwisata budaya dengan *brand image* yang spektakuler	Weakness – Opportunity : 1. Peningkatan aksesbilitas menuju tempat wisata 2. Peningkatan keterampilan dan daya inovasi pengembang usaha wisata budaya 3. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pembinaan yang berkesinambungan
Threat : 1. Masih rentan terhadap perilaku kriminal dan vandalisme 2. Persaingan antar objek wisata 3. Citra pariwisata sebagai pendorong praktek prostitusi dan seks bebas	Strenght – Threat : 1. Pengembangan kesadaran masyarakat tentang wisata budaya 2. Penentuan target promosi serta target pemasaran yang tepat	Weakness – Threat : 1. Pengembangan pariwisata budaya sebagai salah satu daya tarik wisata 2. Pengembangan kewirausahaan di bidang pariwisata bagi masyarakat lokal 3. Peningkatan peran PEMDA dan instansi terkait untuk mendukung usaha pariwisata di daerah untuk menjaring wisatawan

IV. KESIMPULAN

Secara umum berdasarkan kondisi eksisting dan hasil analisa, sektor wisata budaya di Kota Batu, masih belum cukup berkembang dibandingkan dengan jenis wisata lainnya. Selain akses yang kurang bagus, paket wisata yang kurang menarik turut mempengaruhi angka kunjungan wisata budaya setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 10 Tentang Kepariwisataan

Anonim. 2016. Potensi Wisata Kota Batu. Batu : Dinas Pariwisata Kota Batu

S.Pendit, Nyoman. 1990. Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta : Angkasa

Noor. 2010. Analisis SWOT IFAS EFAS. Diakses pada tanggal 1 September 2017, dari alamat https://www.scribd.com/doc/36920346/Analisis-Swot-Ifas-Efas

PRIORITAS ELEMEN RUANG PUBLIK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP *PLACE MAKING* (STUDI KASUS: RUANG PUBLIK KOTA MAKASSAR)

Ghaziyah Ghandy Panessai[1], Ananto Yudono[2], Arifuddin Akil[3]
Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar

[1]Mahasiswa Program Studi Teknik Pengembangan Wilayah & Kota, Universitas Hasanuddin,
[2]Dosen Program Studi Teknik Pengembangan Wilayah & Kota, Universitas Hasanuddin,
[3]Dosen Program Studi Teknik Pengembangan Wilayah & Kota, Universitas Hasanuddin
Email: ghaziyahg@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas ruang publik Kota Makassar berdasarkan persentase kinerja menurut persepsi pengunjung masih dibawah 100% (Darwis, 2015) mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas. Salah satu upaya peningkatan kualitas ruang publik yang telah populer pada negara-negara berkembang hingga negara maju yaitu mengacu pada prinsip-prinsip Place Making (dipopulerkan oleh Community of project for public space), terdiri dari empat komponen utama yaitu aktivitas, aksesibilitas, kenyamanan, dan sosiabilitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas ruang publik dan mengetahui prioritas elemen-elemen ruang publik Kota Makassar berdasarkan prinsip-prinsip Place Making. Penelitian dilakukan pada tiga tipologi ruang publik di Kota Makassar, yaitu Anjungan Pantai Losari, Fort Rotterdam, dan Lapangan Karebosi. Dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis untuk mengukur kualitas diperoleh hasil kualitas ruang publik cukup baik dengan indeks rata-rata pada interval 40%-80%. Selanjutnya, menggunakan metode Analytical Hirarchy Process untuk mengetahui prioritas elemen ruang publik, diperoleh hasil prioritas tinggi elemen ruang publik secara keseluruhan pada lokasi studi yaitu pada elemen aktivitas terdiri dari jenis kegiatan bermain, elemen aksesibilitas teridiri dari jalur disabilitas dan jalur penyeberangan, elemen kenyamanan teridiri dari penerangan dan kebersihan, serta elemen sosiabilitas teridiri dari kebutuhan fasilitas olahraga dan kuliner.

Kata Kunci: Ruang Publik, Place Making, Aktivitas, Aksesibilitas, Kenyamanan, Sosiabilitas

I. PENDAHULUAN

Kualitas ruang publik Kota Makassar dilihat dari tingkat kinerja secara keseluruhan memiliki persentase kurang dari 100% (Darwis, 2015). Masyarakat menilai fasilitas yang terdapat pada ruang publik masih jauh dari harapan pengunjung. Anjungan Pantai Losari, Benteng Fort Rotterdam, dan Lapangan Karebosi merupakan tiga dari berbagai jenis ruang publik yang ada di Kota Makassar. Tiga ruang publik ini menjadi ruang publik yang paling banyak diminati masyarakat lokasi serta wisatawan. Melihat masih rendahnya kualitas ruang publik di Kota Makassar berdasarkan persepsi pengunjung, maka diperlukan upaya yang dapat meningkatkan kualitas ruangnya sehingga dapat menjadi sebuah *place* yang berkualitas.

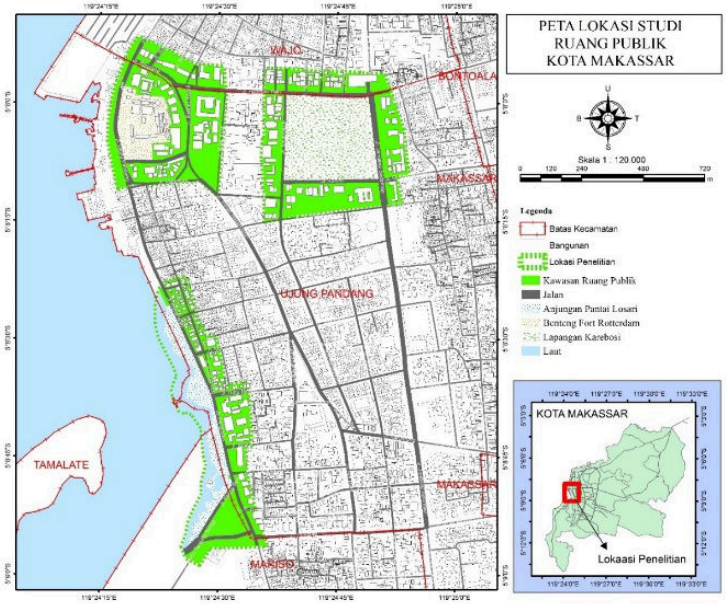
Inovasi penataan sebuah *place* yang telah berkembang sejak tahun 1960-an merumuskan sebuah ide *Project for Public Space* dalam konsep *Place Making* telah menciptakan kawasan-kawasan yang menarik untuk menghasilkan sebuah ruang publik yang sukses. Empat pilar utama dalam konsep ini yaitu sosiabilitas, aktivitas, akses, dan *image* menjadi sebuah dasar ukuran penilaian untuk menciptakan kawasan yang menarik. Sehingga diharapkan prinsip ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan sebuah ruang publik kota berkualitas dalam hal memiliki *sense*

sehingga meningkatkan daya tarik dan menjadi sebuah kawasan dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang mendukung prinsip layak huni dan berkelanjutan. Untuk mencapai peningkatan kualitas, penelitian ini diselesaikan dengan membahas prioritas dari masing-masing elemen ruang publik dengan melihat indeks kualitasnya.

II. METODE

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada ruang publik Anjungan Pantai Losari, Benteng Fort Rotterdam, dan Lapangan Karebosi yang secara administrasi terletak pada Kecamatan Ujung Pandang. Ruang publik yang dipilih merupakan ruang publik dengan kuantitas pengunjung terbesar.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

B. Teknik Analisis

1. Importance Performance Analysis

Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui peforma kualitas ruang publik yaitu dengan cara menghitung tingkat kesesuaiannya yang diperoleh dengan melihat kesenjangan antara skor tingkat kepentingan atribut dan kepuasan pengunjungAdapun penggunaan metode ini yaitu mengukur tingkat kesesuaian untuk melihat kualitasnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan bobot dari masing-masing atribut yang akan dinilai
2) Memberi nilai dari masing-masing atribut ruang publik berdasarkan kondisi yang ada.
3) Menemukan tingat kesesuaian dengan rumus :

$$TK_i = \frac{X_i}{Y_i} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan :
TK = Tingkat kesesuaian
X = Skor penilaian kinerja (*Performance*)
Y = Bobot dari masing-masing atribut (*Importance*)

Dengan menggunakan skala didapatkan indeks dengan skala 0 – 100%. Masing-masing variabel memiliki interpretasi yang sama dimana nilai mendekati 100% bersifat positif, dengan demikian nilai minimun adalah ‘0’ dan nilai maksimum adalah ‘100%’.

2. Analytical Hirarchy Process

Empat komponen dari prinsip-prinsip *Place Making* yang masing-masing komponen terdiri dari elemen-elemen yang menjadi alternatif pilihan prioritas untuk meningkatkan kualitas ruang publik. Adapun tahap yang dilakukan dengan menggunakan metode AHP adalah sebagai berikut:

1) Menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif.
2) Menyusun kriteria-kriteria ke dalam bentuk matriks berpasangan.
3) Menghitung nilai elemen kolom kriteria dengan rumus masing-masing elemen kolom dibagi dengan jumlah matriks kolom.
4) Menghitung nilai prioritas kriteria dengan rumus menjumlah matriks baris hasil langkah ke-4 dan hasilnya dibagi dengan jumlah kriteria.
5) Menguji konsistensi setiap matriks berpasangan dengan langkah sebagai berikut:
   Menghitung indeks konsistensi (CI) dengan rumus:

$$CI = \frac{\lambda\ maksimum - n}{n-1} \quad (2)$$

CI = indeks konsistensi
$\lambda\ maksimum$ = nilai eiger terbesar dari matriks ordo n
n = Jumlah kriteria

Menghitung Rasio Konsistensi (CR) dengan rumus:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (3)$$

6) Hasil akhirnya berupa prioritas sebagai nilai yang digunakan oleh pengambil keputusan berdasarkan skor yang tertinggi. Jika hasil perhitungan rasio konsistensi kurang dari 0,1 maka penilaian dianggap konsisten dan dapat diterima.

3. Rasionalistik Kualitatif

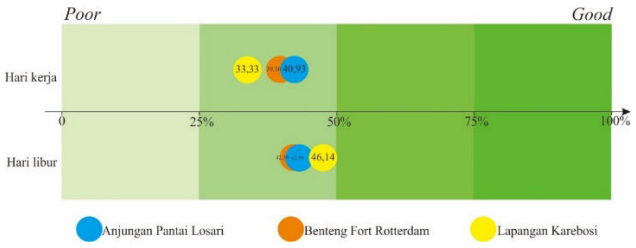
Digunakan pendekatan rasionalistik kualitatif untuk merumuskan ide penataan yang sesuai pada ruang publik. Ide yang dipaparkan secara rasionalistik berdasarkan prioritas kebutuhan serta kesesuaian penerapannya. Adapun konsep *Place Making* menjadi acuan dalam menyusun ide penataan lokasi studi.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh mengacu pada tujuan penelitian, terdiri dari indeks kualitas ruang publik dan prioritas elemen ruang publik yang mengacu pada prinsip-prinsip *Place Making* yang terdiri dari aspek aktivitas, aksesibilitas, kenyamanan, dan sosiabilitas.

A. Aktivitas

1. Intensitas penggunaan ruang

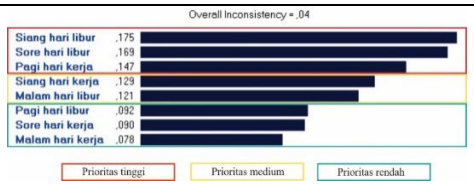
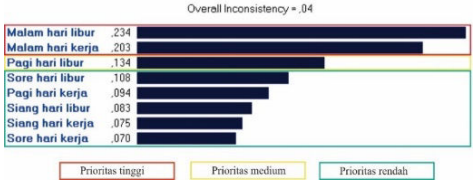
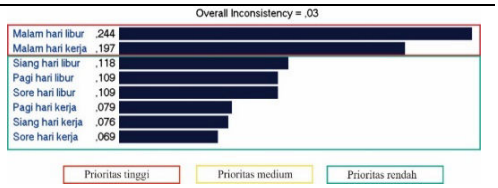


Gambar 2. Grafik Indeks *Intensity of Use* ruang publik Kota Makassar

Indeks kualitas ruang publik Kota Makassar pada indikator intensitas penggunaan ruang yaitu Anjungan Pantai Losari berkualitas cukup baik untuk penggunaan pada hari kerja maupun hari libur. Rendahnya kualitas penggunaan ruangnya dipengaruhi oleh jumlah pengunjung yang memiliki kesenjangan cukup jauh antara malam hari dengan siang hari. Sama halnya dengan Fort Rotterdam dan Lapangan Karebosi yang memiliki kualitas cukup baik yang dipengaruhi oleh jumlah pengunjungnya yang sangat rendah pada waktu malam hari terpaut sangat jauh dengan jumlah pengunjung tertinggi pada waktu sore hari baik pada hari libur maupun hari kerja.

Selanjutnya yaitu menemukan prioritas elemen ruang publik dengan melakukan kombinasi prioritas elemen menurut pengunjung, menurut para ahli, serta berdasarkan kesenjangan dari perolehan skor kualitas. Setelah mendapatkan hasil kombinasi, tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu menemukan prioritas elemen intensitas penggunaan ruang pada ruang publik Kota Makassar.

Tabel 1. Prioritas intensitas penggunaan ruang publik Kota Makassar

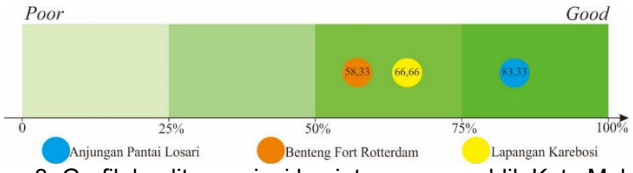
Ruang Publik	Grafik Prioritas Intensitas Penggunaan Ruang
Anjungan Pantai Losari	
Benteng Fort Rotterdam	
Lapangan Karebosi	

Ruang publik di Kota Makassar memiliki prioritas yang berbeda berdasarkan periode intensitas penggunaan ruangnya. Hasil yang diperoleh dipengaruhi oleh prioritas periode penggunaan ruang publik menurut pihak-pihak ahli serta menurut keinginan pengunjung.

Hasil yang diperoleh juga dipengaruhi oleh kesenjangan jumlah pengunjung setiap periode di masing-masing ruang publik. Sehingga dapat dilihat Benteng Fort Rotterdam dan Lapangan Karebosi memiliki prioritas yang tinggi untuk aktivitas pada malam hari karena sedikitnya pengunjung di ruang publik ini pada malam hari.

2. Jenis Kegiatan

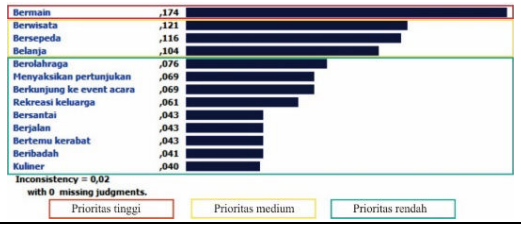
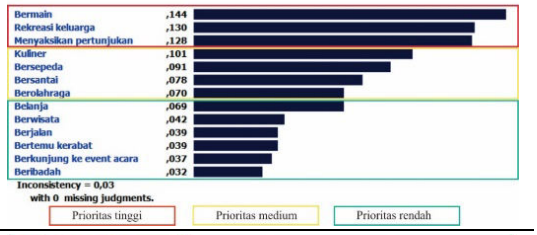
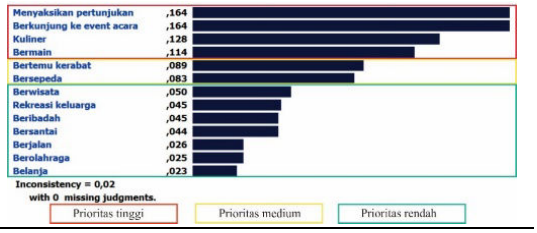
Jenis aktivitas di ruang publik Kota Makassar dikatagorikan berdasarkan klasifikasi jenis aktivitas oleh Gehl (1987). Adapun untuk jenis aktivitas yang memiliki aktivitas pilihan paling banyak yaitu di Anjungan Pantai Losari. Pada ruang publik Lapangan Karebosi jenis aktivitasnya memiliki jumlah yang sama.



Gambar 3. Grafik kualitas variasi kegiatan ruang publik Kota Makassar

Ruang publik berdasarkan variasi kegiatan yaitu Anjungan Pantai Losari telah berkualitas sangat baik dipengaruhi oleh tingginya persntase aktivitas pilihan yang dapat dilakukan di ruang publik ini. Ruang publik Benteng Fort Rotterdam dan Lapangan Karebosi berkualitas baik dipengaruhi oleh persentase aktivitas sosial di ruang publik ini bernilai kecil sehingga mempengaruhi skor kualitas yang diperoleh.

Tabel 2. Grafik prioritas jenis kegiatan yang diinginkan pengunjung di ruang publik Kota Makassar

Ruang Publik	Grafik Prioritas Jenis Kegiatan
Anjungan Pantai Losari	
Benteng Fort Rotterdam	
Lapangan Karebosi	

Prioritas jenis kegiatan yang diperoleh dari hasil analisis AHP berdasarkan kesenjangan kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung dengan kegiatan yang dilakukan pengunjung di masing-masing ruang publik. Anjungan Pantai Losari hanya memiliki satu jenis kegiatan prioritas dipengaruhi oleh sebagian besar kegiatan yang diinginkan pengunjung sudah dapat dilakukan di ruang publik. Sedangkan beragamnya prioritas jenis kegiatan di Benteng Fort Rotterdam dan Lapangan Karebosi dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang dinginkan pengunjung belum tersedia sehingga perlu dilakukan peningkatan jenis kegiatan.

B.Aksesibilitas

Aksesibilitas dari ruang publik dijelaskan berdasarkan kemudahan akses untuk menuju ruang publik tersebut. berdasarkan pergerakan kendaraan atau arus atau sirkulasi kendaraan bermotor pada korodur utama, akses jalan berupa *street scape* pada koridor utama, transportasi publik yaitu konektivitas dengan pusat kegiatan,

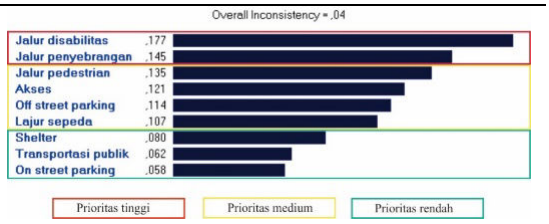
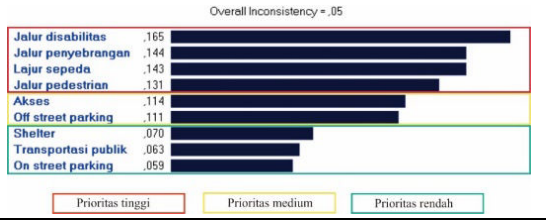
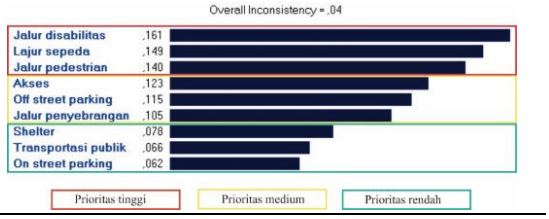
sistem parkir untuk melihat pola pergerakan pengunjung, *side walk* sebagai jalur pedestrian, jalur penyeberangan pada koridor utama dan halte.



Gambar 4. Grafik kualitas aksesibilitas ruang publik Kota Makassar

Hasil yang diperoleh melihat kualitas ruang publik berdasarkan elemen aksesibilitas, Anjungan Pantai Losari memiliki kuaitas yang mendekati sangat baik. Tingginya kualitas aksesibilitas Anjungan Pantai Losari dipengaruhi dengan tingginya skor jalur pedestrian dengan melihat kondisi jalur pedestrian di Anjungan Pantai Losari telah hampir memenuhi bobot ideal. Sedangkan rendahnya skor aksesibilitas Lapangan Karebosi dipengaruhi oleh tidak tersedianya fasilitas halte atau shelter bus di lokasi ini.

Tabel 3. Grafik prioritas elemen aksesibilitas ruang publik Kota Makassar

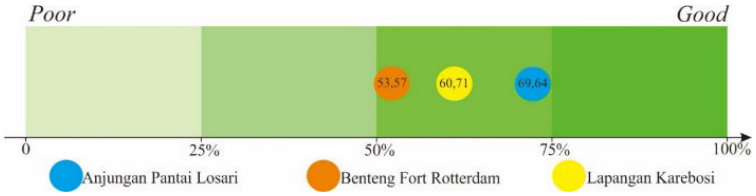
Ruang Publik	Grafik Prioritas Elemen Aksesibilitas
Anjungan Pantai Losari	
Benteng Fort Rotterdam	
Lapangan Karebosi	

Jalur disabilitas memiliki prioritas tinggi dari elemen aksesibilitas pada masing-masing ruang publik di Kota Makassar. Hasil tersebut dipengaruhi oleh kesenjangan dari ketersediaan jalur disabilitas pada ruang publik Kota Makassar yang masing belum memenuhi *bobot importance* atau kondisi ideal dari elemen jalur disabilitas. Sedangkan elemen *on street parking* memiliki prioritas rendah karena dipengaruhi oleh random index yang diperoleh berdasarkan persepsi pihak-pihak ahli memiliki nilai yang rendah. Namun untuk elemen *on street parking* perlu diperhatikan kondisinya berdasarkan kondisi ideal.

C. Kenyamanan

Kelengkapan elemen kenyamanan di ruang publik didukung oleh elemen yang dirangkum menurut Carmona, et al. (2008). Adapun kelengkapan elemen kenyamanan di Kota Makassar sudah cukup lengkap. Namun beberapa elemen masih belum

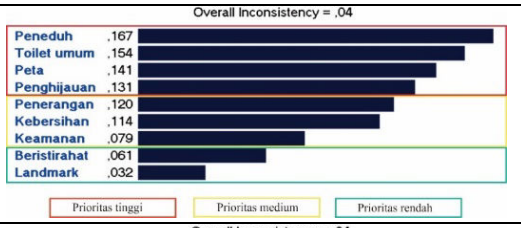
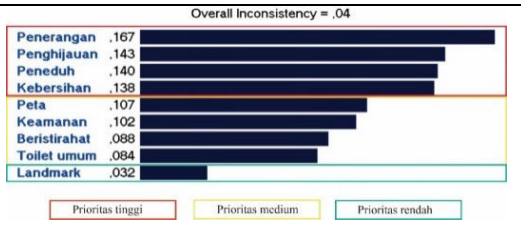
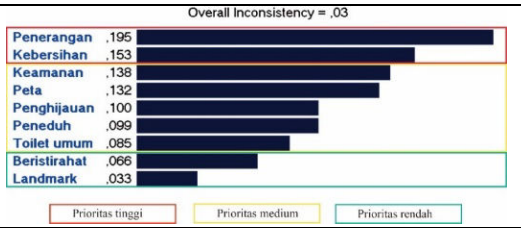
berkualitas baik dan perlu dilakukan peningkatan. Ada pula elemen yang tidak terdapat di ruang publik yaitu peta atau penunjuk lokasi.



Gambar 5. Grafik kualitas kenyamanan ruang publik Kota Makassar

Kualitas ruang publik Kota Makassar dilihat berdasarkan aspek kenyamanan yaitu Anjungan Pantai Losari berkualitas baik. Faktor yang mempengaruhi tingginya skor kualitas kenyamanan Anjungan Pantai Losari yaitu dapat dilihat pada elemen kebersihan memiiki nilai tinggi. Rendahnya kualitas kenyamanan di Benteng Fort Rotterdam dan Lapangan Karebosi salah satunya yaitu dipengaruhi oleh tidak tersedianya penerangan untuk malam hari.

Tabel 4. Grafik prioritas elemen kenyamanan ruang publik Kota Makassar

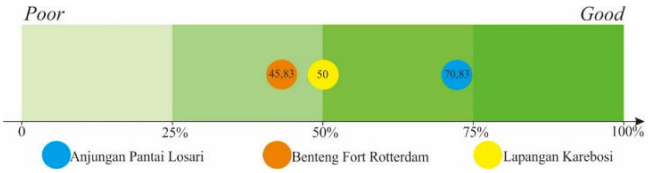
Ruang Publik	Grafik Prioritas Elemen Kenyamanan
Anjungan Pantai Losari	
Benteng Fort Rotterdam	
Lapangan Karebosi	

Hasil yang diperoleh untuk prioritas elemen kenyamanan berbeda pada masing-masing ruang publik di Kota Makassar. Benteng Fort Rotterdam dan Lapangan Karebosi memiliki elemen penerangan sebagai prioritas yang tinggi karena tingginya persentase kesenjangan ketersediaan penerangan di lokasi ini sehingga kurangnya kegiatan pada periode malam hari. Sedangkan untuk elemen peta atau penunjuk lokasi tidak terlalu memiliki prioritas tinggi disebabkan oleh tingkat prioritasnya yang rendah menurut pengunjung dan menurut ahli walapun tingkat kesenjangannya tinggi.

D. Sosiabilitas

Sebuah ruang publik merupakan tempat yang menjadi wadah berlangsungnya interaksi sosial antar sesama manusia (Carr, 1992). Adapun beberapa kegiatan sosial

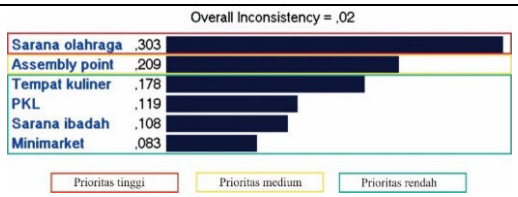
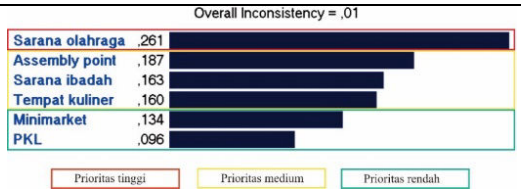
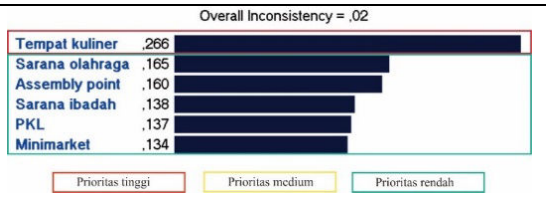
yang dapat menunjang sebuah *place* yaitu terdapat tempat beribadah, tempat untuk berkuliner, serta terdapat titik untuk berkumpul.



Gambar 6. Grafik kualitas sosiabilitas ruang publik Kota Makassar

Grafik di atas menunjukkan kualitas sosiabilitas ruang publik Kota Makassar dimana anjungan pantai losari memiliki kualitas yang hampir berkualitas sangat baik. Hal tersebut didukung dengan nilai elemen kuliner dan PKL yang tinggi. Adapun pada ruang publik Benteng Fort Rotterdam memiliki nilai yang masih cukup baik dipengaruhi oelh tidak tersedia sarana untuk berolahraga.

Tabel 5. Grafik prioritas elemen sosiabilitas ruang publik Kota Makassar

Ruang Publik	Grafik Prioritas Elemen Sosiabilitas
Anjungan Pantai Losari	
Benteng Fort Rotterdam	
Lapangan Karebosi	

Tingkat prioritas elemen sosiabilitas pada sarana olahraga memiliki prioritas yang tinggi. Lapangan karebosi tidak memiliki prioritas medium karena tidak tersedianya tempat kuliner sehingga kesenjangan terpaut cukup jauh dengan elemen lainnya.

IV. Kesimpulan

Kualitas ruang publik Kota Makassar ditinjau dari empat aspek ruang publik yaitu aktivitas, aksesibilitas, kenyamanan, dan sosiabilitas, maka didapatkan hasil ruang publik Kota Makassar berkualitas cukup baik. Masing-masing kualitas ruang publik pada lokasi penelitian yaitu :

a) Anjungan Pantai Losari berkualitas cukup baik pada aspek aktivitas dipengaruhi oleh intensitas penggunaan ruang yaitu kesenjangan jumlah pengunjung pada periode waktu siang hari dan malam hari. Pada aspek aksesibilitas berkualitas sangat baik, serta berkualitas baik dari aspek kenyamanan serta pada aspek sosiabilitas.

b) Benteng Fort Rotterdam berkualitas cukup baik dari aspek aktivitas dipengaruhi oleh intensitas penggunaan ruang yaitu kesenjangan jumlah pengunjung pada periode waktu siang hari dan malam hari. berkualitas baik pada aspek aksesibilitas dan aspek kenyamanan. Serta pada aspek sosiabilitas berkualitas cukup baik yang dipengaruhi oleh tidak tersedianya sarana ibadah dan kuliner.
c) Lapangan Karebosi berkualitas cukup baik pada aspek aktivitas dipengaruhi oleh intensitas penggunaan ruang yaitu kesenjangan jumlah pengunjung pada periode waktu sore hari dan malam hari. Pada aspek aksesibilitas dan kenyamanan berkualitas baik. Serta pada aspek sosiabilitas berkualitas cukup baik dipengaruhi oleh tidak tersedianya pedagang kaki lima, kuliner, dan sarana ibadah.

Hasil yang diperoleh secara keseluruhan pada masing-masing ruang publik memiliki prioritas yang berbeda setiap elemennya. Adapun yang memiliki prioritas tinggi mengindikasikan bahwa perlunya adanya peningkatan kualitas. Dengan melihat secara keseluruhan pada tiga jenis ruang publik di Kota Makassar, jenis kegiatan bermain memiliki prioritas tinggi. Sedangkan elemen prioritas tinggi untuk elemen aksesibilitas yaitu jalur disabilitas, elemen kenyamanan yaitu penerangan dan kebersihan, serta elemen sosiabilitas yaitu kebutuhan fasilitas olahraga.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitama, M.S. 2013. Faktor Penentu Setting Fisik Dalam Beraktifitas Di Ruang Terbuka Publik "Studi Kasus Alun – Alun Merdeka Kota Malang". Jurnal RUAS, Volume 11 N0 2, Desember 2013, ISSN 1693-3702

Carmona M., Heath T. Oc T., Tiesdell ST. 2003. *Public places, urban spaces: The dimensions of urban design*. Architectural press. London.

Carmona, et al. 2008. *Public space: the management dimension*. Routledge, Taylor&Francis group. New York, USA.

Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G. and Stone, A. M. 1992. Public Space. New York: Cambridge University Press.

Community of Project for Public Space. 2010. *Place Making : what if we built our cities around place ?*. diakses pada www.pps.org

Darwis, W. D. 2015. Evaluasi Kualitas Ruang Terbuka Publik Kota Makassar Berbasis Persepsi Masyarakat. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar

Gehl J. 1987. Life between buildings. Van Nostrand Reinhold Company, New York

Nazir. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Graha Indonesia

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Cetakan Ke-20. Penerbit Alfabeta. Bandung

Whyte, W. H. 1979. *The Social Life of Small Urban Spaces*. The Conservation Foundation. Washington, DC

Zhang dan Lawson. 2009. *Meeting and greeting: activities in public outdoor spaces outside highdensity urban residential communities.* Urban design international (2009), volume 14, 4, 207-214

Pengembangan Agrowisata Horti Park di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah

Gunawan Prayitno, Nurulfalah Pakaya, Vicky Astri Larini, Kiara Putri Linggarjati
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang,
Email: gunawan_p@ub.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan kawasan agropolitan didasarkan pada potensi alam Kabupaten Lombok Tengah yang sangat mendukung. Potensi daerah yaitu dengan penggunaan lahan 79% pada sektor pertanian, yaitu berupa sawah, tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/empang, hutan, dan perkebunan (KDA, 2015). Wilayah Lombok Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagi sentra produksi hortikultura dan destinasi wisata baru di Nusa Tenggara Barat (sasambonews,2014). Terdapat program pemerintah "Visit Lombok and Sumbawa" sehingga pengembangan agropolitan dapat menjadi penunjang untuk mendukung pengembangan Agrowisata Hortipark di Lombok Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui potensi dan masalah dalam pengembangan Kawasan Agrowisata Hortipark di Desa Karangsidemen, Lombok Tengah. Hingga saat ini pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Namun, trend dalam 5 tahun kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan (KDA, 2015). Berdasarkan hasil analisis komoditas unggulan yaitu tanaman pangan, hortikultura dan kopi merupakan komoditas unggulan Kabupaten Lombok Tengah. Terdapat beberapa program untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Agrowisata Hortipark di Desa Karangsidemen, Lombok Tengah yaitu mengoptimalkan infrastruktur penunjang seperti jaringan jalan, serta pengelolaan sumberdaya air untuk fungsi irigasi, pengembangan industri kecil, serta kesiapan dan kemampuan sumberdaya manusia. Program ini diharapkan dapat memicu perkembangan agrowisata setiap tahunnya.

Kata Kunci: Pengembangan, Agrowisata, Pertanian, Agropolitan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Lombok Tengah dikenal sebagai daerah agraris, hal ini tercermin dari penggunaan lahan yang dominan digunakan untuk kegiatan di sektor pertanian yaitu 79% dari total luas wilayah 120.839 Hadigunakan untuk usaha pertanian. Berdasarkan trend, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Permasalahan sektor pertanian lain yaitu alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian karena perkembangan pembangunan terutama permukiman. Berdasarkan data RTRW Kabupaten kota alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian telah mencapai 1,4 – 1,5% atau 3,09 juta hektar dari 7,8 juta hektar (BPS, 2014).

Dalam Kebijakan RTRW Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011 yang berisi bahwa Kabupaten Lombok Tengah akan dikembangkan sesuai potensinya yang dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan minapolitan. Lokasi agribisnis unggulan di kabupaten lombok tengah diantaranya di Kecamatan Batukliang Utara sebagai kawasan agropolitan atau agribisnis hortikultura, di Kecamatan Pringgarata ternak sapi. Juga, pengembangan agribisnis di kawasan lahan kering di Kecamatan Praya Timur seperti melon, dan di kawasan Mareje Bonga di manfaatkan untuk ternak kambing (suarakomunitas.net, 2014).

Agrowisata adalah suatu jenis pariwisata yang khusus menjadikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya tarik bagi wisatawan (Yoeti, 2000). Agrowisata adalah wisata pertanian dengan objek kunjungan daerah

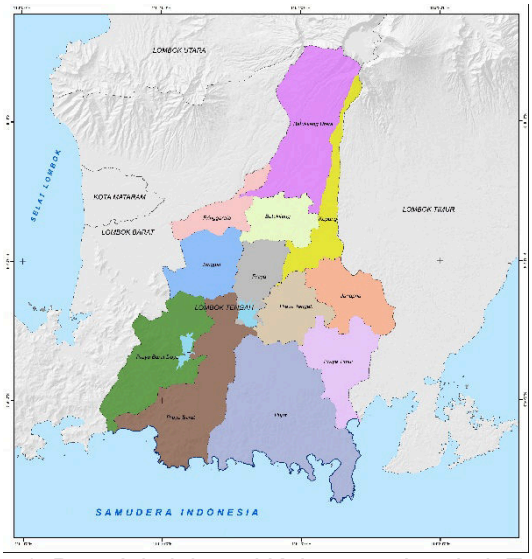
pertanian atau perkebunan yang sifatnya khas, yang telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga berbagai aspek yang terkait dengan jenis tumbuhan yang dibudidayakan itu telah menimbulkan motivasi dan daya tarik bagi wisatawan yang mengunjunginya (R.S. Damardjati, 1995).

Lahan yang digunakan sebagai Agrowisata Hortipark terletak di Desa Karangsidemen tepatnya di kecamatan Batukliang utara, dimana sesuai dengan syarat serta iklim yang ada di wilayah tersebut sangat mendukung untuk pembangunan sarana tersebut, baik dari cuaca serta ketersediaan pakan semua tersedia di wilayah Batukliang Utara. Untuk pembangunan Agrowisata Hortipark ini pemerintah menyediakan lahan 175 Hektar. sumber pendanaan pembangunan hortipark ini yaitu dari Kementrian Pertanian pada Dirjen Hortikultura, sementara untuk pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (NTBKita.com).

Kawasan Hortipark Desa Karangsidemen ini dapat menjadi kawasan yang multifungsi, diantaranya menjadi lokasi percontohan penerapan Good Agricultura Practives, pusat penangkaran benih, edukasi, pusat wisata dan pusat produksi aneka jenis komoditi Hortikultura (sasambonenews.com). Beraneka tanaman diantaranya: Manggis, Durian, Rambutan, Nangka, Jambu, Belimbing, Kelengkeng, Srikaya, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Keberadaan hortipark ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan..

B. Ruang Lingkup

Agrowisata Horti Park terletak di Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara. Kecamatan Batukliang Utara sendiri berbatasan dengan sebelah utara Kabupaten Lombok Utara; sebelah timur dengan Kabupaten Lombok Timur; sebelah barat dengan Kabupaten Lombok Utara dan sebelah Selatan dengan Kecamatan Batukliang, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Lombok Tengah

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan studi ini antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi dan masalah pengembangan Kawasan Agrowisata Hortipark di Desa Karangsideman, Kabupaten Lombok Tengah:
2. Merumuskan rencana pengembangan Kawasan Agrowisata Hortipark di Desa Karangsideman, Kabupaten Lombok Tengah

II. METODE PENELITIAN

A. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data

Survey primer yang dilakukan adalah dengan cara turun langsung pada lokasi studi yang bertujuan untuk memperoleh data primer. Dara primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Teknik yang digunakan dalam survey primer meliputi teknik observasi lapangan dan wawancara. Teknik wawancara yaitu usaha dalam mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden di lokasi studi. Penentuan responden adalah dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Responden yang dipilih seperti pegawai UPT, kelompok tani, penyuluh pertanian dan beberapa petani.

B. Tahap Analisis dan Interpretasi Data

Terdapat beberapa metode analisis data yang digunakan strategi Pengembangan Agrowisata Horti Park di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, diantaranya:

1. Analisis *Linkage System*
   Analisis linkage system merupakan analisis yang bertujuan untuk melihat hubungan dari berbagai kegiatan dalam perekonomian daerah yang luas dengan mempelajari adanya hubungan atau keterkaitan antar sektor dan hubungan dengan komoditas lain,
2. *Value Proportion Analysis*
   Value Proportion Analysis yaitu analisis dengan pemilihan nilai yang didasarkan pada faktor yang ada dalam produk serta konsumen dari produk itu sendiri.
3. *Force Field Analysis (FFA)*
   Force Field Analysis (FFA) merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis faktor yang ditemukan dalam permasalahan yang kompleks. Dalam analisis ini dibagi menjadi dua faktor yang dapat mempengaruhi yaitu masalah dalam hal faktor atau tekanan yang mendukung status quo (kekuatan menahan) dan tekanan- tekanan yang mendukung perubahan ke arah yang diinginkan (penggerak). (Lewin K, 1951)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun 2014, Pemkab Lombok Tengah meresmikan kawasan Horti Park Tastura seluas 175 hektar. Berlokasi di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara, horti park ini memiliki potensi besar sebagai sentra produksi hortikultura dan destinasi wisata alam di NTB yang merupakan horti park terluas yang ada di Indonesia. Selain itu, harapan dari pemerintah sendiri dengan adanya horti park ini adalah sebagai wahana edukasi masyarakat, penggerak dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.

Sebagai lahan horti park berasal dari eks kebun kopi milik PT. Tresno Kenangan. Karena ketika itu masih dalam proses hukum, banyaknya proposal dari investor berminat yang tidak dapat diproses, sehingga pemanfaatan potensinya dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah untuk dikembangkan sebagai horti park. Atas persetujuan Kementrian Pertanian RI, revitalisasi kawasan kebun kopi dilakukan untuk dijadikan kawasan agrowisata dengan landscape yang tertata.

Horti park juga memiliki masalah dalam status lahan yang belum jelas. Karena status yang belum jelas, Pemprov NTB belum bisa menganggarkan dana APBD yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan pariwisata dalam

mendukung kawasan tersebut sebagai kawasan agro eduwisata. Dengan tidak didukungnya pendanaan, berdampak pada pembangunan sarana prasarana yang kurang, perawatan yang tidak optimal serta pengelolaanya yang lemah. Selain itu, aksesibilitas tergolong sulit karena kondisi jalan menuju horti park yang buruk





dengan perkerasan makadam. Saat ini, kondisi horti park di Lombok Tengah sudah terbengkalai dengan masih belum selesainya permasalahan kepemilikan lahan.

Gambar 2. Agrowisata Horti Park Gambar 3. Agrowisata Horti Park

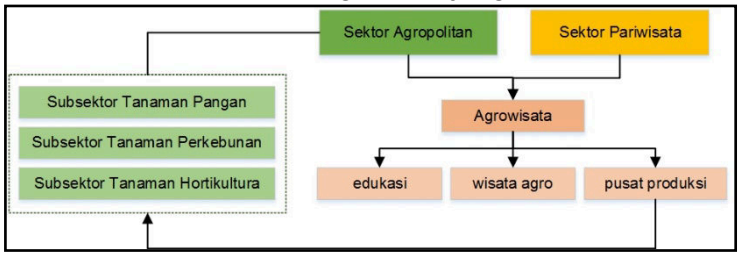
Terdapat beberapa permasalahan pada sektor pertanian di Kabupaten Lombok Tengah secara umum yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Permasalahan Sektor Pertanian

Agrobisnis Hulu	Subsistem Usaha Tani	Subsistem Hilir	Sarana Penunjang
▪ Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal	▪ Pengairan terbatas saat musim kemarau ▪ Tidak ada kebijakan harga pemerintah ▪ SDM kurang terampil dalam proses budidaya	▪ Belum ada pengolahan produk, beberapa yang ada belum berkembang ▪ SDM kurang terampil ▪ Infrastruktur perlu perbaikan dan penambahan	▪ Belum ada penyuluhan rutin khusus KWT ▪ Fungsi KUD belum optimal sebagai sarana permodalan dan pemasaran produk

1. *Linkage System*

Agropolitan Lombok Tengah saling terkait antar komoditasnya dari hulu hingga hilir. Seperti pada pemanfaatan limbah pertanian untuk peternakan maupun sebaliknya dimana kedua subsektor saling menunjang.

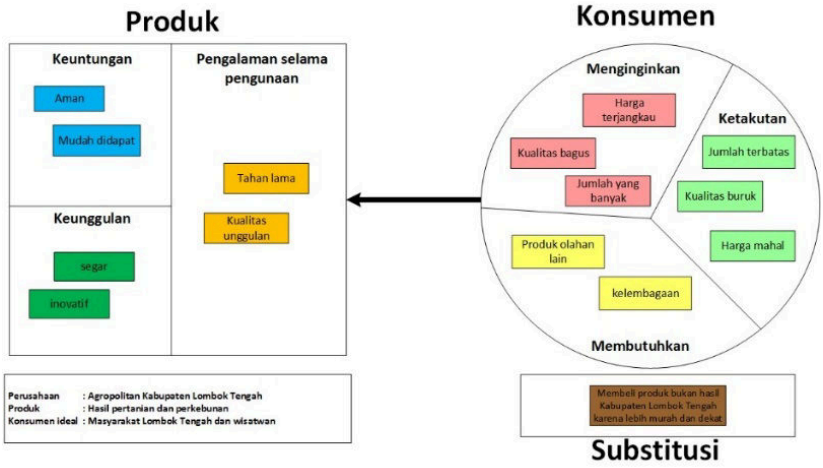


Gambar 4. Linkage System Antar Sektor

Selain sistem keterkaitan antar sub sektor itu sendiri, sektor agropolitan juga memiliki hubungan dengan sektor lainnya, salah satunya sektor pariwisata. Lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura berpotensi untuk dijadikan lokasi wisata yang ditujang dengan sarana prasarana. Contohnya seperti taman horti (hort park) yang memiliki berbagai jenis tanaman yang tidak hanya horti (sayur dan buah) saja namun juga tanaman perkebunan dengan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan pengunjung di dalamnya.

2. *Value Proportion Analysis*

Pemilihan nilai dalam value proporsition didasarkan pada faktor yang ada dalam produk serta konsumen dari produk itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi suatu produk adalah keuntungan dari produk, keunggulan dari produk, serta pengalaman yang berbeda selama menggunakan produk tersebut. Faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan produk yaitu keinginan, kebutuhan, serta ketakutan dalam pemilihan suatu produk.



Gambar 5. *Value Proportion Analysis*

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa keinginan konsumen untuk produk yaitu harga terjangkau, kualitas bagus dan jumlah yang banyak, ketakutan konsumen akan produk adalah jumlah terbatas, kualitas buruk dan harga mahal, dan yang dibutuhkan konsumen adalah produk olahan lain dan kelembagaan. Sedangkan keuntungan produk yaitu aman dan mudah didapat, keunggulannya yaitu segar dan inovatif dan pengalaman selama menggunakan adalah tahan lama dan kualitasnya yang unggulan. Sehingga, nilai yang dapat diterapkan untuk sektor Agropolitan Kabupaten Lombok Tengah adalah operational excellence yaitu produk dan pelayanan berdasar harga yang kompetetif, minimalisasi harga melalui tolak ukur efisiensi, organisasi dan industri yang multifungsi, kemajuan industri dan organisasi melalui harga mudah serta proses yang efisien dan mudah.

3. *Force Field Analysis (FFA)*

Analisis medan kekuatan (FFA) merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam merencanakan perubahan. Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang didapatkan dari beberapa analisis sebelumnya yang kemudian faktor-faktor tersebut dicari nilai urgensi faktor (NU) dan bobot faktor dengan menggunakan teknik komparasi, kemudian dilakukan evaluasi faktor pendorong dan penghambat dan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel Skoring Komparasi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

No	Faktor Pendorong	BF %	ND	NBD	Nilai Keterkaitan (NK)								TRK	NRK	NBK	TNB	FKK
					D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	H4					
D1	Terdapat banyak jenis tanaman hortikultura dan perkebunan	33.3	4	1.332	0	5	4	3	1	1	3	4	21	2.1	0.699	0.633	2
D2	Luas Horti Park seluas 175 Ha dan terluas di Indonesia (www.sasambonews.com)	33.3	4	1.332	5	0	5	3	4	1	3	3	24	2.4	0.799	0.533	3
D3	Potensi sebagai sentra hortikultura dan destinasi wisata alam	0	5	0	4	5	0	4	5	5	4	4	31	3.1	0	0	4
D4	Sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar	33.4	5	1.67	3	3	4	0	3	4	2	3	22	2.2	0.735	0.935	1
Jumlah																2.101	

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel Skoring Komparasi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

No	Faktor Pendorong	BF %	ND	NBD	Nilai Keterkaitan (NK)								TRK	NRK	NBK	TNB	FKK
					D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	H4					
D1	Status kepemilikan lahan yang belum jelas	60	4	3	1	4	5	3	0	2	3	3	21	2.1	1.26	1.74	1
D2	Akses menuju horti park yang buruk	0	4	0	1	1	5	4	2	0	3	3	19	1.9	0	0	3
D3	Prasarana penunjang wisata seperti tempat istirahat atau kamar kecil kurang	40	3	2	3	3	4	2	3	3	0	4	22	2.2	0.88	0.32	2
D4	Perawatan agrowisata yang masih kurang	0	4	0	4	3	4	3	3	3	4	0	24	2.4	0	0	4
Jumlah																2.06	

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar 6 Tabel Evaluasi Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Setelah melakukan pengelompokan faktor kunci keberhasilan dan menggambarkannya dalam diagram medan kekuatan, dimana berdasarkana hasil penilaian dan diagram medan kekuatan menunjukkan bahwa nilai TNB (Total Nilai Bobot) pendorong lebih besar dibandingan dengan nilai TNB penghambat sehingga potensi keberhasilan semakin tinggi.

Kemudian dilakukan penyusunan strategi yang diarahkan untuk mengoptimalkan faktor pendorong dan memperbaiki faktor penghambat. Strategi yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

a. Penentuan status kepemilikan lahan melalui diskusi oleh Dinas Pertanian, PT Tresno Kenangan, BPN, Pemprov dan tokoh masyarakat.
b. Perbaikan jalan menuju ke Horti Park di Desa Karang Sidemen.
c. Penambahan tempat duduk, toilet umum dan pusat informasi.
d. Peningkatan perawatan horti park baik perawatan tanaman maupun sarana dan prasarana.

IV. KESIMPULAN

Agrowisata Hortipark terletak di Desa Karangsidemen, Kecamatan Batukliang Utara dapat menjadi kawasan yang multifungsi, diantaranya menjadi pusat penangkaran benih, edukasi, pusat wisata dan pusat produksi aneka jenis komoditi Hortikultura. Namun, terdapat beberapa permasalahan yaitu status kepemilikan lahan yang tidak jelas dan mengakibatkan tidak adanya pendanaan yang berdampak pada pembangunan sarana prasarana yang kurang, perawatan yang tidak optimal serta pengelolaanya yang lemah dan juga aksesibilitas tergolong sulit. Sehingga didapatkan beberapa strategi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diantaranya:

a. Penentuan status kepemilikan lahan melalui diskusi oleh Dinas Pertanian, PT Tresno Kenangan, BPN, Pemprov dan tokoh masyarakat.
b. Perbaikan jalan menuju ke Horti Park di Desa Karang Sidemen.
c. Penambahan tempat duduk, toilet umum dan pusat informasi.
d. Peningkatan perawatan horti park baik perawatan tanaman maupun sarana dan prasarana.

Daftar Pustaka

Anonim, 2014. Hari ini, Horti Park Tastura Loteng di Launching. Diakses pada 10 Juli 2017 dari alamat http://www.sasambonews.com/2014/12/hari-ini-horti-park-tastura-loteng-di_13.html

Anonim, 2014. Pemda Lombok Tengah, Sampaikan Jawaban Atas Padangan Umum Fraksi Terhadap Nota keuangan Dan Ranperdan APBD 2015. Diakses pada 10 Juli 2017 pada alamat http://www.suarakomunitas.net/baca/81284/pemda-lombok-tengah--sampaikan-jawaban-atas-padangan-umum-fraksi-terhadap-nota-keuangan-dan-ranperdan-apbd-2015/

Lewin, K. 1951. *Field Theory in Social Science*. Harper and Row, New York.

Pino, 2014. Bupati Loteng : Horti Park Tastura Terluas di Indonesia. Diakses pada 10 Juli 2017 dari alamat https://mataramnews.co.id/tani/item/4321-bupati-loteng-horti-park-tastura-terluas-di-indonesia

Karakteristik Potensi dan Daya Tarik Wisata Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Sengingi

Mira Hafizhah T [1], Puji Astuti[1] Mardianto Manan[1]
Fakultas Teknik,Universitas Islam Riau. Kota Pekanbaru
Email: mirahafizhah@eng.uir.ac.id;

ABSTRAK

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau. Kecamatan Kuantan Mudik memiliki tempat-tempat wisata yang dapat dikembangkan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat dengan kedatangan wisatawan untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun wisata-wisata tersebut adalah Air Terjun Guruh Gemurai, Air Terjun Pati Soni, Air Terjun Rawang Nyipai, Air Terjun Dangku, Danau Kobun Nopi, Perahu Baganduang dan kuliner Lomang Batang

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif deskriptif berfungsi untuk menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran detail tentang obyek yang diteliti.

Potensi wisata yang terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik belum dioptimalkan dengan baikbaik dari segi pengelolaan maupun pengembangan.hal ini ditunjukkan dari beberapa potensi wisata yang ada hanya Air Terjun Guruh Gemurai yang sudah dikembangkan dan dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan sudah terdatanya jumlah wisatawan yang dating ke Air Terjun Guruh Gemurai. Sedangkan untuk potensi wisata Air Terjun Rawang Ngipai, Air Terjun Poti Soni dan Air Terjun Dangku belum di kembangkan dengan baik. Untuk potensi Danau Kebun Kopi sudah dikembangkan akan tetapi belum dikembangkan dengan baik. Potensi wisata budaya perahu baganduang merupakan event tahunan yang hanya dilakukan setahun sekali dimana promosi untuk event ini masih dalam skala Kabupaten Kuantan Sengigi.

Kata kunci: kuantan mudik,potensi,wisata, wisata alam

I. PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan wilayah di masing-masing daerah membuat daerah tersebut berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Salah satunya yaitu pengembangan kawasan pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu potensi daerah yang paling cepat berkembang karena pariwisata mempunyai daya tarik tersendiri yang dapat menarik para wisatawan sehingga dapat memberikan banyak pemasukan bagi daerah tersebut. Begitu pula dengan Kecamatan Kuantan Mudik. Untuk mengembangkan wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya melalui pengembangan potensi pariwisata.

Kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi Provinsi Riau. Kecamatan Kuantan Mudik memiliki tempat-tempat wisata yang dapat dikembangkan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus berdampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat dengan kedatangan wisatawan untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun wisata-wisata tersebut adalah Air Terjun Guruh Gemurai, Air Terjun Pati Soni, Air Terjun Rawang Nyipai, Air Terjun Dangku, Danau

Kobun Nopi, Perahu Baganduang dan kuliner Lomang Batang. Saat ini kecamatan kuantan mudik menjadi tujuan wisata. Namun potensi tersebut masih kurang didukung oleh kemudahan akses untuk mencapai lokasi wisata air terjun poti soni dan air terjun rawang nyipai kemudian pengelolaan kawasan yang masih perlu ditingkatkan serta perawatan dan pendukung tempat wisata masih menjadi Pekerjaan Rumah yang harus di benahi oleh dinas pariwisata. Oleh karena itu perlu mengetahui bagaimana *karakteristik potensi dan daya tarik wisata di Kecamatan Kuantan Mudik*. Sehingga dapat mengoptimalkan pengembangan wilayah lewat potensi wisata untuk terciptanya pemerataan ekonomi serta menimbulkan gerakan sadar wisata bagi masyarakat agar mampu melihat segala jenis peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menarik wisatawan menjadikan Kecamatan Kuantan Mudik sebagai tujuan wisata.

II. METODE

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif deskriptif berfungsi untuk menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran detail tentang obyek yang diteliti (moleong 1994).

Analisis karakter tempat wisata ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik obyek wisata yang dilihat dari kondisi fisik, alam, dan lingkungannya. Selain itu juga dilakukan analsisi terhadap kondisi dan kelengkapan fasilitas penunjang dan prasarana lain yang wajib ada dalam suatu wisata serta analisis transportasi, akomodasi, dan atraksi wisata. Dari analisis ini akan didapatkan poin-poin yang merupakan potensi yang dimiliki dan merupakan daya tarik wisata yang akan membuat pengunjung nyaman dalam berwisata di Kecamatan Kuantan Mudik ini dan akan mengundang lebih banyak lagi pengunjung untuk datang.

Selain menggunakan anlisis diatas juga menggunakan analisis prioritas yang digunakan untuk menetukan langkah-langkah yang akan diambil, seperti melakukan prioritas terhadab objek wisata mana yang lebih utama untuk dikembangkan dan kelola. Analisis Prioritas di lakukan dengan memberi score pada tiap indikator yang ada guna memperoleh lokasi wisata yang menjadi prioritas.

. Untuk lebih lanjut langkah-langkah penghitungan yang dilakukan pada analisis prioritas lokasi pembangunan Kawasan Wisata adalaah sebagai berikut:

1. Menentukan orde prioritas (n)

Untuk menentukan orde prioritas dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{Xmax} - \text{Xmin}}{\text{n}}$$

Ket: I : Panjang Interval
Xmax : Nilai Tertinggi
Xmin : Nilai Terendah
n : Jumlah Interval

$$n = 1 + 3.3 \log N$$

Keterangan: N : jumlah daerah amatan

Dan dari hasil perhitungan didapatkan hasil dari jumlah intervalnya adalah 7.

2. Menentukan Nilai Tertinggi (Xmax)

Dari table diatas diperoleh nilai tertinggi adalah 36

3. Menentukan Nilai Terendah (Xmin)

Dari table diatas diperoleh nilai terendan adalah 20

4. Mencari Interval Prioritas

5. Dengan menggunakan rumus pada pola satu maka hasil analisis prioritas dapat dihitung sebagai berikut :

$$I = \frac{Xmax - Xmin}{7}$$

$$I = \frac{36 - 20}{7}$$

$$I = 2{,}28$$

$$I = 2$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi yang berkelanjutan berbasis alam dan budaya yang beragam dan potensial dikembangkan sebagai ikon daerah, adapun pot Data Potensi Pariwisata di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi

	Nama Objek	Potensi yang Dikembangkan	Lokasi	Peluang Investasi
	Air Terjun Guruh Gemurai	a. Objek wisata Air Terjun Guruh Gemurai berjarak 23 KM dari pusat Kota Teluk Kuantan. b. Indahnya air terjun ini memeberikan kenyamanan dan ketenangan tersendiri bagi pengunjung	Kecamatan Kuantan Mudik	SDA
	Air Terjun Rawang Ngipai	a. Air terjun yang khas, karena air terjunnya pendek-pendek namun banyak tingkatnya b. Lingkungan alam yang begitu indah	Lubuk Jambu Kecamatan Kuantan Mudik	SDA
	Air Terjun Poti Soni	a. Air terjun dengan ketinggian kurang lebih 15 meter b. Kolam yang luas dengan air yang jernih c. Pepohonan yang rindang	Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik	SDA
	Air Terjun Dangku	a. Air Terjun dengan ketinggian 7 meter dan terdapat batang kayu yang bersandar persis disebelah aliran air terjun memberi kesan alami. b. Kolam yang cukup luas dengan air yang jernih lagi dangkal memberi kemudahan bagi pengunjung mendekati air terjun. c. Tebing yang berbentuk staltit menambah keindahan.	Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik	SDA

	Nama Objek	Potensi yang Dikembangkan	Lokasi	Peluang Investasi
	Danau Kobun Nopi	a. Kawasan danau buatan yang mempunyai tingkat natural dan perspektif alam yang sangat tinggi. b. Tempat Penyelenggaraan Pacu Jalur PON RIAU 2011.	Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik	SDA
	Perahu Beganduang	a. Merupakan obyek wisata budaya yang terletak di Kecamatan Kuantan Mudik. b. Objek wisata ini sangat dekat dengan ibukota kabupaten dan berada di sungai Kuantan	Kecamatan Kuantan Mudik	SDA
	Wisata Kuliner Lomang Batang	a. Kuliner Khas Lubuk Jambi yang dimasak dengan bambu yang dibakar. b. Lomang batang terdapat dua rasa yaitu bahan ketan dan ubi. c. Disantap dengan menggunakan tapai ketan hitam. d. Banyak di jual di pasar minggu lubuk jambi.	Kelurahan Lubuk Jambi Pasar Minggu Kecamatan Kuantan Mudik	Kuliner Khas Kecamatan Kuantan Mudik

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

A. Air Terjun Guruh Gemurai

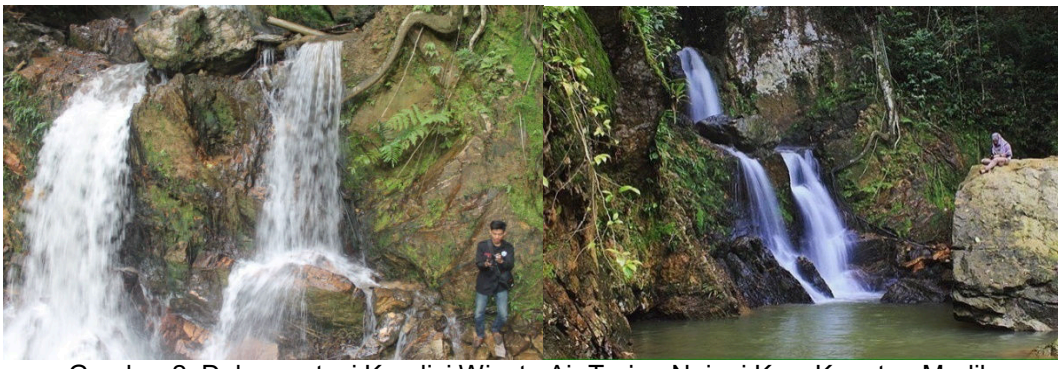
Objek wisata unggulan Guruh Gemurai Sebagai destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi terus berbenah di mulai pada tahun 2013 dengan pembangunan berbagai fasilitas seperti pintu gerbang, pentas terbuka, kolam pemandian, gazebo, kios dan infrastruktur jalan yang sudah di aspal dan sampai saatnya sudah banyak dikunjungi masyarakat terutama pada saat hari libur. Jumah pengunjung air terjun Guruh Gemurai pada tahun 2015 berjumlah 15.000 orang dan apabila diproyeksikan pada tahun 2024 akan berjumlah 594.659 orang.



Gambar 1. Dokumentasi Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kec. Kuantan Mudik

B. Air Terjun Rawang Ngipai

Air Terjun Rawang Ngipai memiliki keindahan namun campur tangan pemerintah belum terlihat hanya saja pembangunan jalan yang masih 30% dan 70% masih jalan tanah. Sehingga pengunjung yang datang ke objek wisata ini belum dapat didata. Dan juga belum terdapat tangga batu yang memudahkan pengunjung untuk melihat Air Terjun, Gazebo, Toilet, kios, Mushala dan tempat Parkir belum tersedia di Air Terjun Rawang Ngipai.



Gambar 2. Dokumentasi Kondisi Wisata Air Terjun Ngipai Kec. Kuantan Mudik

C. Air Terjun Poti Soni

Air terjun pati soni masih alami dan belum mendapat campur tangan dari pihak swasta ataupun pemerintah, hal ini di kuatkan dengan survei yang kami lakukan bahwasannya air terjun pati soni belum memiliki sarana, prasarana serta utilitas yang dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung.



Gambar 3.Dokumentasi Kondisi Wisata Air Terjun Poti Soni Kec. Kuantan Mudik

D. Air Terjun Dangku

Merupakan kondisi di sekitaran air terjun dangku yang masih alami dan belum disentuh dan di kembangkan oleh pemerintah setempat. Air terjun dangku yang masih alami ini memiliki beberapa permasalahan terkait untuk kemudahan akses pencapaian ke lokasi untuk lebih jelasnya



Gambar 4. Dokumentasi Kondisi Wisata Air Terjun Dangku Kec. Kuantan Mudik.

E. Danau Kebun Nopi

Danau Kebun Nopi adalah salah satu venues Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Riau yaitu cabang olahraga dayung. Pengembangan Kawasan Kebun Nopi menggunakan konsep yang dikembangkan berdasarkan perencanaan yang matang, secara garis besar yang meliputi deferensiasi (unik, berbeda, komperatif dan koperatif), akses untuk semua, berwawasan lingkungan yang keterpaduan manajemen. Danau Kebun Nopi akan menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 5. Dokumentasi Kondisi Wisata Danau Kebun Nopi Kec. Kuantan Mudik

F. Perahu Baganduang

Perahu Baganduang merupakan sebuah atraksi budaya khas masyarakat Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan Mudik, berupa parade sampan tradisional yang dihiasi berbagai ornamen dan warna-warni. Akan tetapi atraksi budaya ini merupakan even tahunan yag hanya diadakan setahun sekali. Dimana promosi untuk event ini masih kurang baru bersifat lokal kabupaten Kuantan Sengingi



Gambar 6. Dokumentasi Kondisi Wisata Perahu Baganduang Kec.Kuantan Mudik

G. Wisata Kuliner Lomang Batang

Selain dikenal dengan banyak obyek wisata di Kecamatan Kuantan Mudik, kuantan mudik juga terkenal dengan wisata kulinernya. Kuantan mudik khususnya lubuk jambi terkenal dengan Lomang dan kue wajik yang menjadi makanan khas Kecamtan Kuantan Mudik. .Kekurangan dari Wisata Kuliner Lomang Batang ini hanya di dapat pada hari minggu di pasar-pasar tradisional.

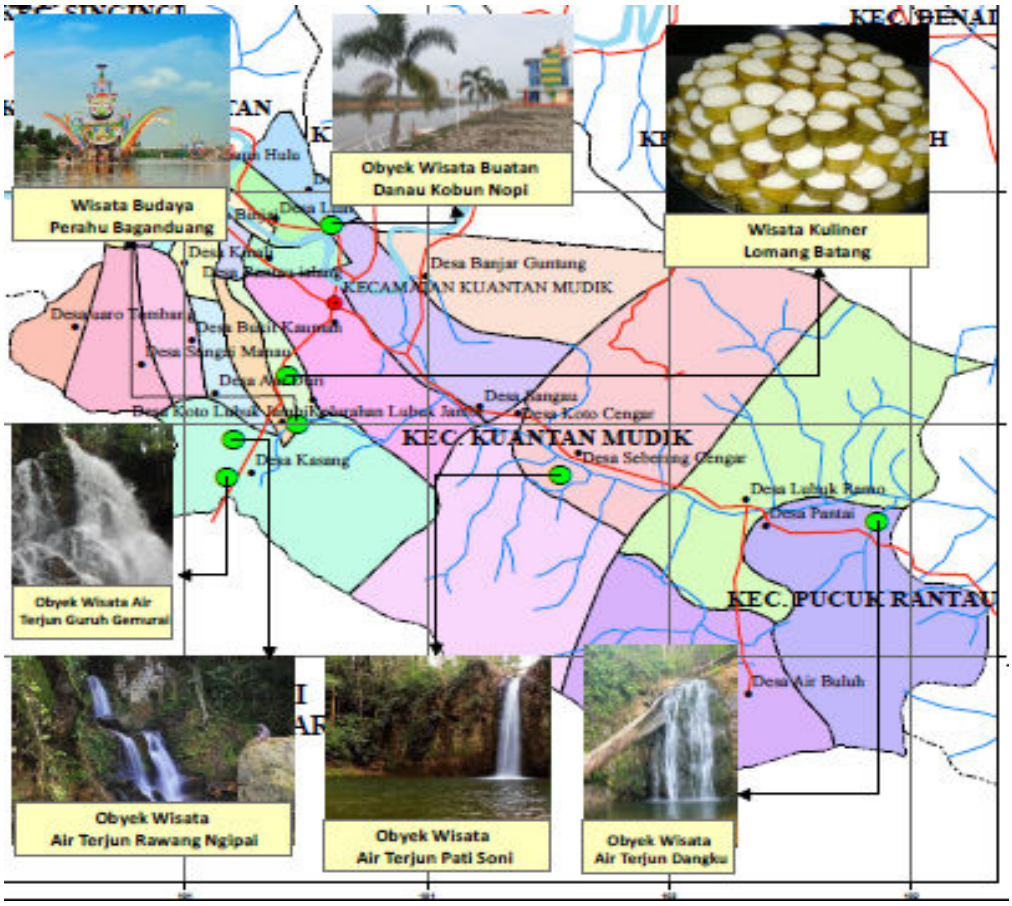


Gambar 7. Dokumentasi Lomang Batang Kec.Kuantan Mudik

Dari penjelasan diatas dapat dilihat beberapa daya tarik wisata yang terdapat di kecamatan kuantan mudik yang memungkinkan untuk di kembangkan untuk menjadi daya tarik wisata di kuantan mudik.dengan melihat karakteristk masing masing daya tarik wisata sehingga mudah untuk mengembangkannya. pemerintah telah merencanakan pengembangan kawasan wisata yang telah diidentifikasi, namun pengembangan pariwisata hanya untuk beberapa kawasan wisata yang menjadi prioritas seperti Air Terjun Guruh Gemurai, Perahu Baganduang dan Danau Kobun Nopi. Ketiga kawasan wisata tersebut telah mendapat perhatian berupa dana untuk pengembangan kawasan. Air tejun guruh gemurai mendapat anggaran dana dari pemerintah daerah kabupaten untuk perawatan dan pengembangan fasilitas pendukung, danau kobun nopi mendapat anggaran dana dari pemerintah provinsi untuk keamanan, kebersihan dan perenovasiang fasilitas pendukung wisata dan terakhir untuk even budaya perahu baganduang telah masuk ke kalender wisata tahunan menjadi even yang diadakan pada hari lebaran idul fitri. Namun untukobjek wisata lainnya masih belum direncanakan untuk pengembangnnya masyarakat bersama karang taruna melakukan pengembangan seadanya dengan menggunakan dana yang minim, masyarakat bersama kepala desa dan karang taruna membuka jalur menuju objek

wisata dengan mendapat izin dari dinas kehutanan mengingat lokasi objek wisata berada di kawasan hutan lindung. Kepala desa bersama karang taruna telah memiliki rencana untuk pengembangan kawasan membuka jalan dengan menggunakan alat berat agar lokasi mudah di capai dengan menggunakan kendara namun masih terkendala oleh dana.

Oleh karena itu berdasarkan dari observasi yang dilakukan di lapangan hendaknya dilakukan rencana pengembangan pariwisata yang terintegrasi bagi seluruh objek wisata yang ada dikecamatan kuantan mudik hal ini bertujuan agar seluruh obyek wiata yang terdapat di kecamatan kuantan mudik terhubung dan wisatawan dapat berkunjung ke obyek-obyek wisata lainnya tanpa membedakan obyek wisata berdasarkan prioritas yang dibuat oleh pemerintah dan juga diharapkan pemerintah menganggarkan dana untuk masing-masing obyek wisata yang dapat dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat lokal agar tercipta kesejahteraan ekonomi lewat pengembangan objek wiata yang dimiliki.



Gambar 8. Peta sebaran Potensi wisata di Kecamatan Kuantan Mudik

Dari peta persebaran potensi wisata bahwa dapat dilihat objek wisata di Kecamatan Mudik cukup banyak dan dapat di kembangkan dengan baik. Untuk mengembangkan objek wisata yang terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik perlu dilakukan suatu analisis yang dapat menetukan langkah-langkah yang akan diambil, seperti melakukan prioritas terhadab objek wisata mana yang lebih utama untuk

dikembangkan dan Kelola. Analisis Prioritas di lakukan dengan memberi score pada tiap indicator yang ada guna memperoleh lokasi wisata yang menjadi prioritas

Indikator Skoring Pengembangan Objek Wisata di Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2019 s/d 2034

No	Indikator	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skcore	Obyek Wisata	skore
1	**Jarak Tempuh (10)**	Air Terjun Guruh Gemurai (Desa Kasang)	4	Air Terjun Rawang Ngipai (Desa Kasang)	4	Air Terjun Poti Soni (Desa Sebrang Cengar)	4	Danau Kobun Nopi (Bukit Pedusunan)	4	Perahu Beganduang (Kelurahan Lubuk Jambi)	4	Air Terjun Dangku (Desa Pantai)	3
	a. 0 km – 25 km (4)												
	b. 26 km-50 km (3)												
	c. 51 km -75 km (2)												
	d. >75 km (2)												
2	**Waktu Tempuh (10)**		4		4		4		4		4		3
	a. kurang dari ½ jam (4)												
	b. ½ sampai 1 jam (3)												
	c. 1 sampai 2 jam (2)												
	d. lebih dari 2 jam (1)												
3	**Kondisi jalan (20)**		4		1		1		3		4		1
	a. Jalan Aspal kondisi sangat baik (4)												
	b. jalan aspal kondisi baik (3)												
	c. jalan aspal kondisi berlubang (2)												
	d. jalan tanah (1)												
	a. datar (4)		4		2		1		4		4		3
	b. bergelombang (3)												
	c. terjal (2)												
	d. sangat terjal (1)												

No	Indikator	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skcore	Obyek Wisata	skore
4	**Jaringan transportasi (20)**												
	a. mudah (4)												
	b. Cukup (3)		4		1		1		4		4		1
	c. sedamg (2)												
	d. sukar (1)												
	a. angkutan umum (4)												
	b. bis/travel (3)		1		1		1		1		1		1
	c. taxi (2)												
	d. angkutan pribadi (1)												
5	**Frekuensi kendaraan (10)**												
	a. sangat banyak (4)												
	b. banyak (3)		3		1		1		3		3		1
	c. cukup banyak (2)												
	d. sedikit (1)												
6	**Lokasi obyek wisata (20)**												
	a. lokasi di tepi jalan raya (4)												
	b. lokasi di tepi jalan kecil (3)		2		3		2		4		4		1
	c. lokasi di tepi jalan lokal (2)												
	d. lokasi di jalan terpencil (1)												
	a. sangat strategis (4)												
	b. strategis (3)		3		3		1		4		4		2

No	Indikator	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skore	Objek Wisata	Skcore	Obyek Wisata	skore
	c. cukup strategis (2)												
	d. tidak strategis (1)												
7	**Biaya yang dikeluarkan (10)**												
	a. Sedang atau kurang dari Rp 25.000 (4)		4		4		4		4		4		4
	b. Cukup banyak Rp 25.000 - Rp 50.000 (3)												
	c. banyak Rp 50.000- Rp 100.000 (2)												
	d. lebih dari Rp 100.000 (1)												
Total			**33**		**24**		**20**		**35**		**36**		**20**

Sehingga dari hasil analisis diatas dapat diperoleh tingkatan prioritas lokasi kawasan wisata di Kecamatan Kuantan Mudik sebagai berikut :

ORDE 1	36 – 34	Perahu Beganduang (Kelurahan Lubuk Jambi) dan Danau Kobun Nopi (Bukit Pedusunan)
ORDE 2	34 – 32	Air Terjun Guruh Gemurai (Desa Kasang)
ORDE 3	32 - 30	

IV. KESIMPULAN

Potensi wisata yang terdapat di Kecamatan Kuantan Mudik beum dioptimalkan dengan baikbaik dari segi pengelolaan maupun pengembangan.hal ini ditunjukkan dari beberapa potensi wisata yang ada hanya Air Terjun Guruh Gemurai yang sudah dikembangkan dan dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan sudah terdatanya jumlah wisatawan yang dating ke Air Terjun Guruh Gemurai. Sedangkan untuk potensi wisata Air Terjun Rawang Ngipai, Air Terjun Poti Soni dan Air Terjun Dangku belum di kembangkan dengan baik. Untuk potensi Danau Kebun Kopi sudah dikembangkan akan tetapi belum dikembangkan dengan baik. Potensi wisata budaya perahu baganduang merupakan event tahunan yang hanya dilakukan setahun sekali dimana promosi untuk event ini masih dalam skala Kabupaten Kuantan Sengigi.

Berdasarkan table analisis prioritas di atas, maka dapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prioritas pertama

Dari data hasil analisis prioritas di atas dapat ditentukan bahwa yang menduduki prioritas pertama adalah Perahu Beganduang (Kelurahan Lubuk Jambi) dan Danau Kobun Nopi (Bukit Pedusunan). Dua kawasan obyek wisata akan di prioritaskan mendapat perhatian untuk tumbuh dan berkembangnya kawasan wisata menjadi tempat tujuan berwisata dan mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Oleh sebab itu perlu dilakukan perencanaan mulai dari pengelolaan, pembenahan, perawatan dan berinovasi untuk bisa menarik pengunjung. Pengelolaan dapat memberdayakan masyarakat lokal untuk dapat berperan aktif dalam mengurusi keperluan dan kelengkapan kawasan wisata hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat tumbuh dan memperoleh penghasilan dari keberadaan tempat wisata.

2. Prioritas kedua

Air Terjun Guruh Gemurai (Desa Kasang)Berdasarkan hasil analisis lokasi kawasan kedua tidak terlalu diprioritaskan karena memilik nilai lebih rendah dibandingkan kawasan wisata lainnya. Keberadaan airi terjun guruh gemurai menjadi kebanggaan masyarakatkuantan mudik terbukti air terjun guruh gemurai telah mendapat perhatian pemerintah berupa ketersediaan sarana pendukung. Walaupun begitu berdasarkan hasil skoring air terjun guruh gemurai merupakan prioritas kedua penting untuk mengevaluasi kawasan wisata dan membenahi apa-apa yang dirasa kurang dan tindakan yang mampu meningkatkan pengunjung untuk berkunjung ke air terjun guruh gemurai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :
Fandeli, Chafid, 1995, Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam, Liberty, Yogyakarta.
Haryono, Wing, 1978, Pariwisata, Rekreasi Dan Entertaiment, Ilmu Publisher, Bandung.
Soekadijo, R.G, 1996, Anatomi Pariwisata, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Moleong,lexy j.1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung.Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
Kusmayadi dan Sugiarto,E., 2000, *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Website:
www. Riaumagz.com/2017
www.goriau.com/2016

Studi Obyek Wisata Perkotaan dan Arahan Pengembangan Pariwisata di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Santun R. P. Sitorus[1] dan Rifat Y. Y. Maromon[2]
[1]Divisi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor
[2]Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Nusa Cendana Kupang
Email:santun_rps@yahoo.com; rifatmaromon@gmail.com

ABSTRAK

Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi alam, budaya dan sejarah yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Berbagai obyek wisata tersebut ada yang sudah berkembang dan ada yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga perlu ada upaya untuk mengembangkannya. Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengidentifikasi dan menganalisis obyek wisata yang sudah berkembang dan Obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan (2) menyusun arahan rencana pengembangan kawasan wisata dan (3) menyusun arahan strategi pengembangan pariwisata. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis skoring, bertujuan mengetahui obyek wisata yang sudah berkembang dan yang berpotensi untuk dikembangkan, metode Satuan Kawasan Wisata (SKW) untuk menyusun arahan rencana pengembangan pariwisata dan analisis A'WOT yaitu gabungan analisis AHP dan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats) bertujuan untuk menyusun arahan strategi pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kota Kupang memiliki 55 obyek wisata terdiri atas 18 obyek wisata yang sudah berkembang, 26 obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan dan 11 obyek wisata yang kurang berpotensi untuk dikembangkan. Arahan pengembangan pariwisata dengan mengintegrasikan obyek wisata yang sudah berkembang dan yang berpotensi untuk dikembangkan menghasilkan 5 Satuan Kawasan Wisata. Strategi pengembangan wisata di Kota Kupang terdiri dari lima strategi yaitu: (1) Mengintegrasikan wisata budaya, sejarah dan religi kota kedalam setiap satuan kawasan wisata dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pada setiap usaha pariwisata; (2) Meningkatkan potensi obyek wisata menjadi satuan kawasan wisata yang berpedoman pada pelestarian lingkungan dan unsur budaya untuk usaha pariwisata ; (3) meningkatkan prasarana jalan dan menyediakan moda transportasi (angkutan darat dan laut) dengan merencanakan jalur, waktu dan jadwal tempuh untuk mendukung pola perjalanan wisatawan ke obyek wisata dan antar kawasan wisata menjadi kesatuan paket wisata. (4) meningkatkan fungsi prasarana jalan untuk mendukung wisata Kota Kupang yang berpedoman pada pelestarian sumberdaya alam dan unsur budaya untuk usaha pariwisata dan (5) mengembangkan jejaring manajemen pariwisata berbasis satuan kawasan wisata dan sekitarnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kata kunci : Obyek wisata, pengembangan pariwisata, satuan kawasan wisata, waterfront city

I. PENDAHULUAN

Menurut RTRW Kota Kupang 2011- 2031 Kota Kupang berfungsi dan berperan sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berbasis kota tepi pantai atau Waterfront City yang berkelanjutan (Bappeda Kota Kupang, 2012). Rutinitas pekerjaan masyarakat yang tinggi membutuhkan rekreasi untuk penyegaran jasmani dan rohaninya

Kota Kupang berbasis waterfront city menunjukan bahwa kota ini memiliki obyek wisata pantai. Selain wisata pantai, Kota Kupang juga memiliki obyek wisata alam lainnya, wisata kuliner, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata buatan. Obyek wisata yang dimiliki ada yang sudah berkembang dan ada yang belum berkembang. Namun demikian, belum ada Rencana dan Strategi pengembangan obyek wisata dan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi dan menganalisis obyek wisata yang sudah berkembang dan yang berpotensi untuk dikembangkan, (2) menyusun arahan rencana pengembangan kawasan wisata dan (3) menyusun arahan strategi pengembangan pariwisata Kota Kupang.

II. METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota Kupang terdiri atas enam kecamatan dan lima puluh satu kelurahan. Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Maret 2016.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan pengecekan lapangan terhadap seluruh obyek wisata Kota Kupang. Selain itu dilakukan, pengisian kuesioner oleh 110 responden secara sengaja (*purposive sampling*) dan wawancara dengan 6 orang expert yaitu 3 orang dari pemerintahan mewakili Dinas Pariwisata, Dinas Permukiman dan Tata Kota dan Bapeda Kota Kupang, 1 orang akademisi, 1 orang praktisi dan 1 orang pengusaha. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi di Kota Kupang dan di Provinsi NTT.

Analisis Data

Obyek Wisata yang sudah Berkembang dan yang Berpotesi untuk Dikembangkan Analisis obyek wisata dilakukan 2 tahap. Pertama untuk mengetahui obyek wisata yang sudah berkembang dan yang belum berkembang. Selanjutnya, obyek wisata yang belum berkembang di analisis untuk mengetahui obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan menggunakan analisis pembobotan *(scoring)* yaitu hasil penilaian yang diperoleh dari pejumlahan skor setiap obyek wisata berdasarkan pendapat responden (Rudita *et al.* 2012). Besarnya skor masing-masing obyek wisata ditentukan dari kebalikan dari jumlah obyek wisata yang ditentukan. Misalnya sejumlah n obyek yang telah ditentukan , maka nilai skor teringgi suatu obyek wisata adalah n dan skor terendah adalah 1(Sitorus *et al*., 2014).Hasil skoring menunjukan peringkat dari masing-masing obyek wisata.

Arahan Rencana Pengembangan Pariwisata

Arahan rencana pengembangan pariwisata disusun melalui penggabungan obyek wisata yang sudah berkembang dan yang berpotensi untuk dikembangkan dalam bentuk Satuan Kawasan Wisata (SKW) dengan mempertimbangkan keterkaitan sirkuit atau jalur wisata (Marcovilier dan Prey,2005).Selain itu, penggabungan tersebut juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah, kemiripan daya tarik dan kedekatan obyek wisata secara spasial (Pramudia,2008). Satuan Kawasan Wisata yang diperoleh menjadi arahan pengembangan kawasan wisata dengan aneka ragam daya tarik obyek wisata.

Arahan Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Kupang

Arahan strategi pengembangan pariwisata disusun berdasarkan hasil Analisis A'WOT yaitu kombinasi AHP dan SWOT. Analisis A'WOT diawali dengan pengumpulan data melalui wawancara. Data SWOT dan faktor internal dan eksternal

dinilai oleh ekspert untuk mendapatkan bobot dari AHP. Selanjutnya untuk memperoleh faktor prioritas maka masing-masing bobot SWOT dikalikan dengan bobot faktor internal dan eksternalnya.Selanjutnya dilakukan analisis faktor strategi internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) yang di *rating* untuk memperoleh skor. Analisis matriks *space* di peroleh dari selisih antara IFAS dan selisih antara EFAS menghasilkan koordinat (x,y) yang menunjukan posisi pengembangan dalam kuadran matriks *space*. Strategi pengembangan yang dihasilkan kemudian *dirangking* berdasarkan penggabungan skor faktor prioritas dari faktor internal dan eksternal. Selanjutnya ditetapkan skala prioritas arahan strategi pengembangan pariwisata Kota Kupang (Kahraman *et al*., 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data Obyek Wisata yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Kupang dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, wawancara di tingkat kecamatan dan observasi berbagai obyek wisata dilapangan, diperoleh jumlah Obyek wisata di Kota Kupang sebanyak 55 obyek wisata. Obyek wisata tersebut di kelompokkan berdasarkan tingkat keramaian pengunjung dan penilaian potensi wisata yaitu daya tarik, jarak, kemudahan akses, ketersediaan sarana dan prasarana wisata, ada tidaknya pengelola, adanya atraksi budaya, keamanan dan kuliner serta kios cendramata (Pramudia,2008). Hasil pengelompokan 55 objek wisata tersebut diperoleh 18 obyek wisata yang sudah berkembang dan 37 obyek wisata yang belum berkembang.

Obyek Wisata yang sudah Berkembang

Hasil Analisis skoring dari wawancara dengan 110 responden/wisatawan terhadap 18 Obyek wisata yang sudah berkembang menunjukan obyek wisata yang paling diminati adalah Pantai Lasiana dengan skor tertinggi sebesar 1.576. Selengkapnya untuk hasil skoring obyek wisata yang sudah berkembang disajikan pada Tabel 1. Hasil observasi terhadap 18 obyek wisata yang sudah berkembang menunjukan semua obyek wisata memiliki daya tarik khas, akses baik, sarana prasarana wisata telah tersedia, ada pengelolanya, sebagian memiliki atraksi, keamanan baik, menyediakan wisata kuliner, namun masih kurang dalam ketersediaan atau kios cendramata.

Tabel 1 Hasil Skoring Obyek Wisata yang sudah Berkembang

No.	Obyek Wisata	Skor	Daya Tarik	Jarak(km)	Akses	Sarpras	Pengelola	Atraksi	Keamanan	Kuliner	Cendra mata
1	Pantai Lasiana	1576	Pasir, Pepohonan,Sunset	12	SB	SB	Pem.Prov	Gula Lempeng	B	SB	C
2	Pantai Nunsui	1256	Pasir, Pepohonan,Sunset	11	B	SB	Swasta	Banana Beach	B	SB	C
3	Taman Nostalgia	1026	Arena olah raga/bermain	5	SB	SB	Pemkot	Panggung Terbuka	SB	SB	C
4	Pawai Paskah	989	Kisah Tokoh di Alkitab	0	SB	SB	GMIT*	Teatrikal/Budaya	SB	B	C
5	Pantai Ketapang Satu	943	Pasir, Karang,Sunset	1	SB	SB	LPM*	Panggung Terbuka	B	B	C
6	Kuliner Pasar Malam	860	Sea Food / Ikan Bakar	0.8	SB	SB	LPM*	-	SB	SB	C
7	Gua Monyet Alak	743	Habitat Monyet	7	SB	B	Pemkot*	-	B	B	C
8	Kuliner jalan El Tari	689	Jagung Bakar dll	4	SB	B	Pemprov	*Car Free Day*	SB	SB	C
9	Museum Prov. NTT	592	Benda bersejarah	5	SB	SB	Pemprov	Budaya	SB	B	C
10	Kuliner Taman Nostalgia	587	Jajanan Murah	5	SB	B	Pemkot	Panggung Terbuka	SB	B	C
11	Pantai Paradiso	536	Pasir, Pepohonan,Sunset	8	B	B	Pemkot	-	B	-	C
12	Kuliner Pantai Lasiana	517	Pisang penyet	12	SB	SB	Pemprov	Gula Lempeng	B	SB	C
13	Kupang *Waterpark*	404	Arena permainan Air	4	SB	SB	Swasta	Panggung Terbuka	SB	SB	B
14	Mangrove Oesapa Barat	389	Habitat *Mangrove*,Sunset	8	B	B	LPM	-	SB	SB	C
15	Gereja Kota Kupang	387	Cagar Budaya Nasional	0.1	SB	SB	Pusat	Rohani	SB	B	C
16	Kuliner LLBK	376	Aneka Jajanan khas	0.3	SB	B	Pemprov	Panggung Terbuka	SB	SB	B
17	Pantai Subasuka	337	Taman, Pasir, Sunset	4	SB	SB	Swasta*	Pesta Taman	SB	SB	B
18	Pantai Koepan	334	Pasir, Sunset, Plasa	0.3	SB	B	Swasta*	Panggung Terbuka	SB	SB	B

Keterangan : *. Ada Kerjasama S : Sangat Baik (Sangat Tinggi) B : Baik (Sedang) C : Cukup (Rendah)

Obyek Wisata yang Berpotensi untuk Dikembangkan

Hasil Analisis skoring dari wawancara dengan 110 responden/wisatawan terhadap 37 Obyek wisata yang belum berkembang menunjukkan 26 obyek wisata berpotensi untuk dikembangkan dan 11 obyek wisata kurang berpotensi untuk dikembangkan. Obyek wisata yang paling diminati adalah wisata Pantai Batu Kepala diikuti berturut turut tujuh obyek wisata lainnya yaitu Pantai Pasir Panjang, Kolam Airnona, Pantai Kelapa Satu, Makam Raja Taibenu Manutapen, Kolam Wirasakti, Jalan Baru Manutapen dan Pantai Namosain dengan skor berturut-turut 908, 902, 806,800,793,771 dan 719. Hasil observasi terhadap 37 obyek wisata yang belum berkembang menunjukan bahwa semua obyek wisata memiliki daya tarik namun masih kurang dalam penyediaan sarana prasarana wisata. Hasil skoring selengkapnya obyek wisata yang belum berkembang disajikan pada Tabel 2.

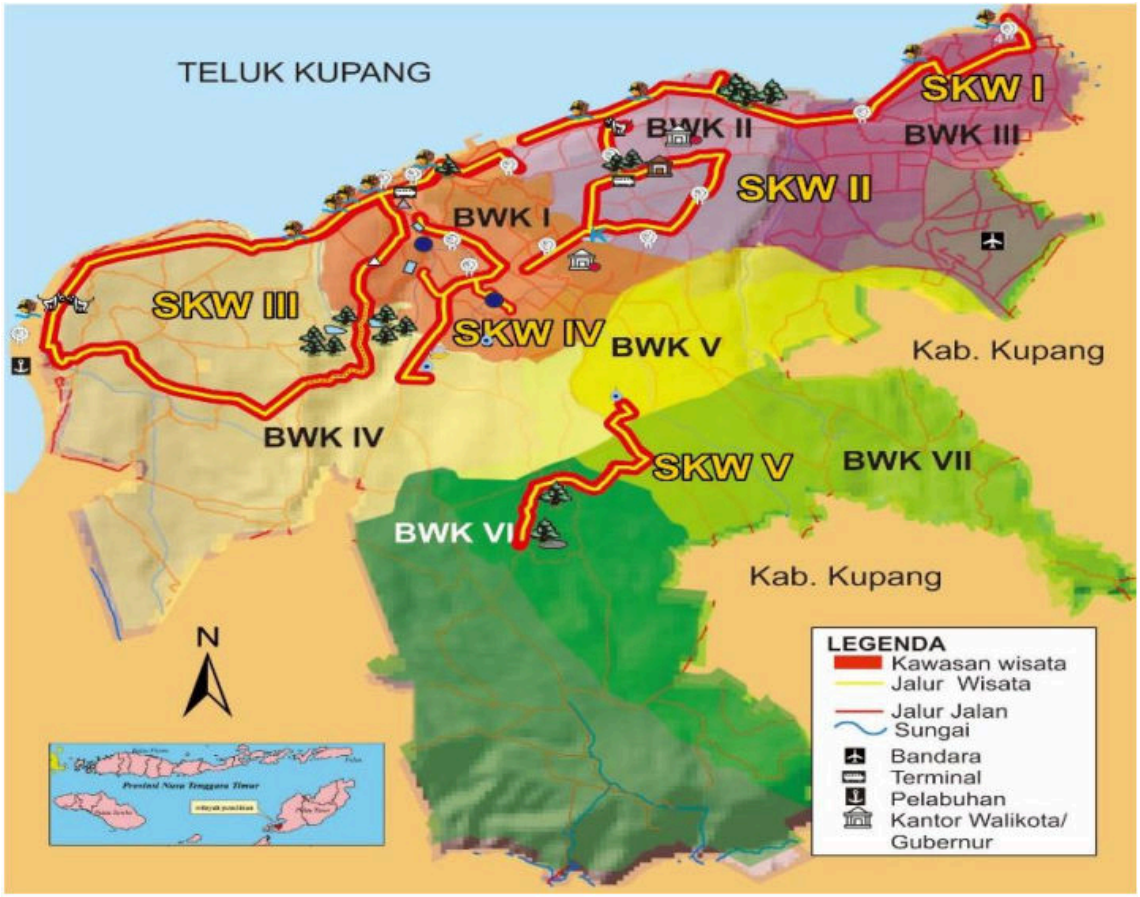
Arahan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata

Arahan rencana pengembangan kawasan wisata di Kota Kupang disusun berdasarkan penggabungan dari 18 obyek wisata yang sudah berkembang dan 26 obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan dalam Satuan Kawasan Wisata (SKW). Hasil penggabungan ini dilakukan berdasarkan : (1) adanya keterkaitan obyek wisata dalam satu sirkuit atau satu jalur wisata, (2) adanya kedekatan obyek wisata secara spasial, (3) Obyek wisata yang di gabungkan memiliki kemiripan daya tarik dan saling melengkapi. Penentuan SKW memperhatikan kebijakan pemerintah dalam pengembangan Kota Kupang menyangkut pemanfaatan ruang yang serasi dilandaskan pada sub pusat pelayanan kota yang terdiri dari 7 Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Kupang. Hasil penggabungan dari 18 obyek wisata yang sudah berkembang dan 26 obyek wisata yang berpotensi dikembangkan direncanakan dalam 5 Satuan Kawasan Wisata (SKW) seperti disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 3.

Tabel 2 Hasil Skoring Obyek Wisata yang belum berkembang

No.	Obyek Wisata	Skor	Daya Tarik	Jarak(km)	Akses	Sarpras	Pengelola	Atraksi	Keamanan	Kuliner	Cendra mata
1	Pantai Batu Kepala	630	Tanah Lot Kupang	0.6	SB	SB	LPM	-	B	-	C
2	Pantai Pasir Panjang	627	Pasir putih,labuhan perahu	3	SB	B	-	-	B	B	C
3	Kolam Airnona	607	Mata air alam, pemandian	4	SB	SB	LPM	-	B	-	C
4	Pantai Kelapa Satu	588	berkarang, pepohonan	7	C	C	-	-	C	-	C
5	Kolam Wirasakti	577	Kolam Renang	0.5	SB	B	TNI	-	SB	B	C
6	Makam Raja Taibenu	544	Sejarah/Pemandangan Bukit	1	B	B	Pemprov.	-	B	-	C
7	Jalan Baru Manutapen	542	Pemandangan,Hutan Pramuka	2	SB	B	Kehutanan	camping	C	-	C
8	Kuliner Oipoi	484	Jajanan malam	4	SB	B	Pemprov.	Panggung/Sail	SB	SB	C
9	Pantai Namosain	483	Pelra,Sunset	1.2	SB	B	LPM	-	B	C	C
10	Gua Monyet Kelapa Lima	478	Satwa Monyet, Pepohonan	5	SB	B	Pemkot.	-	B	-	C
11	Kuliner Kuanino	471	Jajanan Malam khas Kupang	2	SB	C	-	-	SB	SB	C
12	Pemancingan Air Sagu	433	Pancingan Air Tawar	5	B	B	Swasta	-	SB	B	C
13	Pantai Kelapa Lima	417	Berkarang, labuhan perahu	4	SB	C	-	-	SB	SB	C
14	Kuliner Fontein	415	Jajanan malam khas Kupang	1.3	SB	C	-	-	SB	-	C
15	Pantai Nunhila	398	Pantai dan Gua alam	0.5	SB	C	-	Sail	B	-	C
16	Bendungan Dendeng	383	Pemandian/Jembatan	1	SB	B	Pemkot	-	B	-	C
17	Mata Air Oelon	376	Mata air beringin	8	C	C	-	-	C	-	C
18	Mata Air Bakunase	361	Pemandian	5	SB	B	LPM	-	B	-	C
19	Kuliner TDM	351	Jajanan Khas Kupang	5	SB	C	-	-	B	SB	C
20	Gua Alam Fatukoa	300	Stalaktit,stalakmit,cendana	14	C	C	-	-	C	-	C
21	Kuliner Oesapa	294	Pisang gepeng/jagung bakar	10	SB	B	Pemkot	-	C	-	C
23	Bendungan Bik'noi	281	Penampungan air	4	C	B	Pemkot	-	B	SB	C
24	Mata air Sagu	262	Mata Air Alam	5	C	C	-	-	B	-	C
26	Kuah Asam Tenau	218	Kuliner Ikan	7	SB	B	Swasta	-	B	-	C
35	Cekdam Manutapen	161	Tampungan Air Hujan	2	SB	B	Kehutanan	-	C	-	C
36	Hutan Lindung Fatukoa	150	Pepohonan Cendana/Jati	17	C	C	Kehutanan	-	B	-	C

Keterangan : *. Ada Kerjasama S : Sangat Baik (Sangat Tinggi) B : Baik (Sedang) C : Cukup (Rendah)



Gambar 1. Peta Satuan Kawasan Wisata

Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Kupang.

Arahan strategi pengembangan pariwisata Kota Kupang di lakukan dengan pembobotan SWOT dengan menggunakan teknik analisis AHP (Saaty,1993). Komponen SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dibandingkan setiap faktor dan tiap komponen yang dilakukan oleh 6 orang ekspert. Hasil keenam orang expert digabungkan menghasilkan pembobotan. Analisis Matriks Space menunjukan posisi pengembangan Kawasan Wisata di Kota Kupang pada kuadran dalam matriks space. Hasil analisis matriks space pengembangan kawasan wisata Kota Kupang berada pada koordinat (1,105 ; 0,440) atau kuadran I yang menunjukan bahwa strategi yang dipilih dalam matriks SWOT yaitu strategi SO (kekuatan dan peluang) yaitu menggunakan kekuatan internal yang dimiliki kawasan wisata Kota Kupang untuk memanfaatkan peluang eksternal yang ada. Penyusunan arahan strategi pengembangan Kawasan Wisata di Kota Kupang berdasarkan strategi SO dan skor yang dimiliki untuk urutan arahan strategi dengan kombinasi S1,O1,O2,O3 (1,462), S2,O1,O2,O3 (1,073) dan S4O1,O2,O3 dengan bobot (0,990).

Tabel 5. Satuan Kawasan Wisata dan Obyek Wisatanya

No	Kawasan Wisata 1		Kawasan Wisata 2		Kawasan Wisata 3		Kawasan Wisata 4		Kawasan Wisata 5
1	Pantai Lasiana*	1	Taman Nostalgia*	1	Ketapang Satu	1	Kolam Wirasakti	1	Hutan Fatukoa*
2	Pantai Nunsui	2	Kuliner Eltari	2	Pasar Malam	2	Bend. Dendeng*	2	Gua Fatukoa
3	Pantai Paradiso	3	Museum NTT	3	Gereja Kota Kupang	3	Kuliner Fontein	3	Mata Air Oelon
4	Kuliner Lasiana	4	Kuliner Tamnos	4	Pantai Koepan*	4	Kuliner Kuanino		
5	Hutan *Mangrove*	5	*Waterpark*	5	Kuliner LLBK	5	Kolam Airnona		
6	Pantai Subasuka	6	Kuliner Oipoi	6	P.Batu Kepala	6	Bendungan Biknoi		
7	P. Pasir Panjang	7	Gua Monyet	7	P.Nunhila	7	Mata Air Bakunase		
8	P. Kelapa Lima	8	Kuliner TDM	8	P.Namosain	8	Pemancingan		
9	Kuliner Oesapa			9	Gua Monyet	9	Mata Air Sagu		
				10	P.Kelapa Satu				
				11	Kuliner Tenau				
				12	Jalan Baru				
				13	Cek Dam				
				14	Makam Taibenu				

Hasil arahan sesuai ranking diperoleh 5 strategi pengembangan wisata Kota Kupang yaitu (1) Mengintegrasikan wisata budaya, sejarah dan religi kota ke dalam setiap satuan kawasan wisata dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pada setiap usaha wisata; (2) meningkatkan potensi obyek wisata menjadi satuan kawasan wisata yang berpedoman pada pelestarian lingkungan dan unsur budaya untuk usahausaha pariwisata; (3) Meningkatkan prasarana jalan dan menyediakan moda transportasi (angkutan darat dan laut) dengan merencanakan jalur, waktu dan jadwal tempuh untuk mendukung pola perjalanan wisatawan ke obyek wisata dan antar kawasan wisata menjadi kesatuan paket wisata; (4) Meningkatkan fungsi prasarana jalan untuk mendukung wisata Kota Kupang berpedoman pada pelestarian sumberdaya alam dan unsur budaya untuk usaha-usaha pariwisata dan (5) Mengembangkan jejaring manajemen pariwisata berbasis satuan kawasan dan sekitarnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan Hasil penelitian ini berikut:

1. Identifikasi obyek wisata diperoleh 55 obyek wisata di Kota Kupang terdiri atas 18 obyek wisata yang sudah berkembang, 26 obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan dan 11 obyek wisata yang kurang berpotensi untuk dikembangkan.
2. Rencana pengembangan kawasan wisata Kota Kupang dilakukan berdasarkan 5 Satuan Kawasan Wisata (SKW) yaitu : SKW I, SKW Pantai Lasiana dan sekitarnya memiliki 9 obyek wisata dengan arahan rencana pengembangan memanfaatkan keragaman obyek wisata pantai untuk mendukung obyek wisata Lasiana sebagai destinasi provinsi; SKW II, SKW Taman Nostalgia dan sekitarnya memiliki 9 obyek wisata dengan arahan pengembangan memanfaatkan kunjungan singkat tamu pemerintah atau swasta ke taman Nostalgia, Museum NTT dan wisata kuliner; SKW III, SKW Pantai Koepan dan sekitarnya memiliki 14 obyek wisata dengan arahan rencana pengembangan wisata minapolitan melalui reklamasi pantai, wisata kuliner, wisata alam, wisata suaka monyet dan wisata budaya atau sejarah Kota Kupang; SKW IV, SKW Bendungan Dendeng dan sekitarnya, memiliki 8 obyek wisata. dengan arahan rencana pengembangan wisata buatan (bendungan, kolam, pemancingan, pertanian) dan wisata penelitian untuk meningkatkan

konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS); SKW V, Hutan Fatukoa dan sekitarnya, memiliki 3 obyek wisata dengan arahan rencana pengembangan wisata penelitian untuk konservasi, bentangan alam, resapan air, suaka rusa *Timorensis* dan wisata Agro.

3. Terdapat 5 strategi pengembangan pariwisata Kota Kupang yaitu (1) Mengintegrasikan wisata budaya, sejarah dan religi kota ke dalam setiap satuan kawasan wisata dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pada setiap usaha wisata; (2) meningkatkan potensi obyek wisata menjadi satuan kawasan wisata yang berpedoman pada pelestarian lingkungan dan unsur budaya untuk usahausaha pariwisata; (3) Meningkatkan prasarana jalan dan menyediakan moda transportasi (angkutan darat dan laut) dengan merencanakan jalur, waktu dan jadwal tempuh untuk mendukung pola perjalanan wisatawan ke obyek wisata dan antar kawasan wisata menjadi kesatuan paket wisata. (4) Meningkatkan fungsi prasarana jalan untuk mendukung wisata Kota Kupang berpedoman pada pelestarian sumberdaya alam dan unsur budaya untuk usaha-usaha pariwisata dan (5) Mengembangkan jejaring manajemen pariwisata berbasis satuan kawasan dan sekitarnya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

[BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang. (2012). *Peraturan Daerah Kota Kupang No. 11 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Kupang Tahun2011 – 2031*. Kota Kupang: BAPEDA Kota Kupang.

Kahraman C, Demirel NC and Demirel T.(2007). Priorization of e-Government Strategies using a SWOT-AHP Analysis : The Case of Turkey*. Europen Journal of Information Systems.* Vol. 16 Tahun 2007, 284 – 298

Marcouiller DW and Prey J. (2005). The Tourism Supply Lingkage*. Journal of Region Analysis and Policy.* Vol. 35 No.1 Tahun 2005. 23 – 32

Pemerintah Provinsi NTT. (2015). *Peraturan Daerah Provinsi NTT No. 5 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi NTT Tahun 2015-2025.*Kota Kupang Pemprov. NTT.

Pramudia E. (2008). *Evaluasi Potensi Obyek Wisata Aktual di Kabupaten AgamSumatera Barat untuk Perencanaan ProgramPengembangan*. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Rudita IKP, Sitorus SRP, dan Hadi S. (2012). Potensi Obyek Wisata dan Keterpaduannya dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Gianyar Bali. *Jurnal Landskap Indonesia*. Vol.4 No.1 Tahun 2012. 37-42

Saaty TL. (1993). *Pengambilan Keputusan Bagi Pemimpin*. ; Jakarta [ID] : PT Gramedia.

Sitorus SRP, Rianto T dan Panuju DR. (2014). Analisis Obyek Wisata dan arahan Pengembangan Kawasan Wisata Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia* di Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Pekanbaru Tanggal 17-18 Oktober 2014. Hal. 376-395

Tema 2

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPARIWISATAAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Pemasaran Kawasan Wisata Sanur Bali

Ni Wayan Rena Mariani [1]
[1]Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional, Denpasar
Email: wynrena@gmail.com, wynrena@stpbi.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Teknologi informasi juga membawa dampak terhadap sistem Pengelolaan kawasan wisata. Sistem informasi mampu mengolah data dan mendistribusikan informasi dengan cakupan yang luas dalam waktu yang cepat. Beberapa kawasan wisata telah memanfaatkan Sistem informasi dalam pengelolaan pemasaran untuk meningkatkan daya saing kawasan wisata

Sanur merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat terkenal di Indonesia maupun di dunia. Kawasan wisata Sanur, Bali ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk pembangunan Pariwisata Nasional tahun 2010-2015. Penetapan ini memacu pengelola dan masyarakat di kawasan wisata sanur, dalam mengembangkan infrastruktur serta sistem pengelolaan kawasan wisata tersebut

Penelitian berjudul Pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan pemasaran kawasan wisata sanur bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai pemanfaatan Sistem informasi dalam proses pengelolaan pemasaran kawasan wisata disanur sehingga dapat diketahui peran Sistem informasi dalam membantu pengelolaan pemasaran kawasan wisata sanur

Penelitian ini merupakan penelitian exploratif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancar, observasi dan teknik pengambilan basis data. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan linier dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas

Hasil yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah gambaran proses pengelolaan pemasaran serta kebutuhan dan pemanfaatan Sistem informasi dalam upaya memasarkan kawasan wisata sanur.

Kata kunci : Sistem Informasi, Pemasaran, Pengelolaan Kawasan Wisata, Kawasan Wisata Sanur Bali

I. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem informasi mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan Sistem Informasi juga mempengaruhi bidang pariwisata. Terbukti dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam industry pariwisata. Pada tahun 1960-an Industry Penerbangan (*Airlines)* memperkenal *Central Reservation system . Central reservation system* ini digunakan untuk mengolah dan menyimpan data dari transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembelian tiket penerbangan (Wikipedia, 2010). Pertengahan tahun 1990-an sistem informasi bidang pariwisata berkembang menjadi *destination management system (DMS)*. Sistem ini *dikembangkan* untuk memberikan informasi produk kepada turis dan digunakan untuk memetakan jumlah turis yang berkunjung. Dengan pemetaan ini, organisasi pengelola destinasi dapat melakukan upaya-upaya untuk menambah kunjungan pada saat jumlah kunjungan menurun

DMS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang mengelola data dan informasi mengenai kawasan wisata. *DMS* dapat membantu *destination management operation (DMO)* dalam mengelola kawasan wisata. *DMS* dapat menyediakan web content management, dan database (Buhalis, 2013). DMS memungkinkan

pengembangan kawasan wisata menjadi terstruktur, sehingga kawasan wisata memiliki daya saing (Buhalis, 2013). Beberapa kawasan wisata yang telah berhasil dalam pemanfaatan *DMS* adalah Holland, Tiscover-Austria, Singapore.

Mengacu pada pengelolaan destinasi yang terkoordinasi melalui suatu bentuk organisasi yaitu DMO, pengelolaan suatu kawasan wisata difokuskan pada elemen-elemen yang membentuk kawasan wisata itu sendiri.(Sunaryo, 2013). Elemen yang membentuk kawasan wisata antara lain pengembangan produk, pengembangan pemasaran, pengembangan lingkungan

Sanur merupakan sebuah kelurahan yang terdiri dari 2 Desa dan 1 kelurahan yaitu desa sanur kaja, desa sanur kauh, dan kelurahan sanur. Sanur berlokasi di bagian tenggara pulau bali. Daya tarik sanur yang banyak mengundang wisatawan untuk datang adalah pantai yang indah. Beberapa pantai disanur yang menjadi daya tarik wisatawan adalah Pantai Matahari Terbit dan Pantai sanur, pantai sindu, semawang dan pantai mertasari.

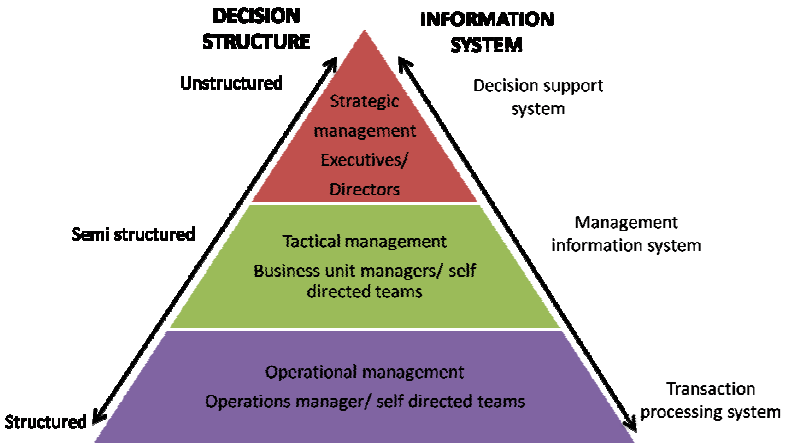
Yayasan pembangunan sanur bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan sanur. Untuk pengelolaan kawasan wisata sanur, Yayasan pembangunan sanur memutuskan untuk membentuk DMO yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pariwista di sanur. Salah satu tugas DMO sanur adalah mengelola pemasaran kawasan wisata sanur.

Berdasarkan hasil pencarian di google menggunakan kata kunci “wisata sanur bali” ditemukan 523.000 halaman website yang memuat kata “wisata sanur bali”. 50 (lima puluh) daftar halaman website pertama merupakan website dari pelaku bisnis pariwisata atau tulisan dalam blog bukan dari situs resmi pengelola kawasan wisata sanur ataupun dari situs resmi dinas pariwisata daerah kota denpasar.website resmi dari DMO Sanur tidak terindeks pada halaman pertama di mesin pencari google. Bagaimana DMO sanur mengelola pemasaran kawasan wisata sanur? Apakah DMO sanur memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pemasarannya?

Berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2009, Wisata adalah kegiatan perjalan mengunjungi suatu tempat yang dilakukan oleh perorangan atau berkelompok untuk tujuan berekreasi ataupun mempelajari keunikan suatu daerah tertentu. Destinasi wisata adalah sebuah kawasan geografis yang beada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang memiliki daya tarik, fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait untuk terwujudnya pariwisata. Sedangkan Kawasan Strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan

Menurut Charles R Goeldner, 2009 dalam bukunya yang berjudul *Tourism, Principles, Practices, Philosopies,* ada 2 parameter yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola kawasan wisata yaitu *competitiveness* dan *sustainability. Competitiveness* merujuk pada kemampuan bersaing sedangkan sustainability merujuk pada keberlanjutan. Dalam elemen *competitiveness* disebutkan marketing menjadi salah satu *management Skill* yang diperlukan dalam mengelola kawasan wisata.

Sistem informasi merupakan sekumpulan komponen yang terdiri dari software (Perangkat lunak), hardware (Perangkat keras), *telecomunication network* (Jaringan telekomunikasi), Database, *Pepople* (manusia), dan *Policy and procedure* (Kebijakan dan procedure) yang saling bekerjasama untuk mengolah data menjadi informasi. O’brien menggolongkan system informasi menjadi menjadi 2 bagian yaitu system informasi yang mendukung operational (*Operational Support*) dan system informasi yang mendukung manajemen (*Management Support*).



Gambar 1. Sistem Informasi pada level Organisasi

Gambar 1 menunjukkan bahwa *operation support system* digunakan oleh manajemen terbawah yaitu *operational management*. Dua diantara beberapa jenis sistem informasi yang mendukung operasional manajemen adalah *Transaction Processing system* dan *Enterprise collaboration system.* Untuk mendukung manajemen, ada 3 jenis sistem informasi yaitu *management information system, decision support system,* dan *Executive information system.* Tetapi perkembangan sistem informasi saat ini adalah menggabungkan seluruh fungsi sistem informasi untuk masing-masing level manajemen. Setiap level dapat menggunakan sistem informasi sesuai dengan level pengguna dalam sistem informasi terkait. Sistem seperti ini biasanya disebut *e-bussiness* ataupun *enterprise resources planning(ERP).*

Sitem informasi membantu organisasi pengelola dalam mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menyebarluaskan data serta informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pengembangan kawasan wisata. Menurut buhalis, 2003 dalam bukunya yang berjudul *e-tourism : information technology for strategic tourism management* menggagas sebuah system informasi kepariwisataan yang diberi nama e-Tourism. Sistem informasi ini diambil dari concept e-commerce dan e-bussiness yang telah menjadi tren dalam system informasi sejak tahun 2000 (O'brien, 2011). E-tourism adalah sebuah konsep sistem informasi pariwisata yang mencakup seluruh fungsi bisnis antara lain e-commerce, e-marketing, e-finance, eHRM, e-procurement, eR&D, eProduction, e-strategy, e-planning and e-management untuk seluruh industry pariwisata mulai dari travel, transport, hospitality, dan organisasi sektor public.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian *explorative* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperlukan adalah fakta-fakta yang terkait dengan pengelolaan pemasaran kawasan wisata sanur. Data sekunder yang diperlukan adalah bagaimana penggunaan sistem informasi tersebut.

Sumber data penelitian ini adalah organisasi, orang atau kelompok masyarakat yang aktif terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata sanur. Sumber data lain dapat berupa literature, ataupun dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan kawasan wisata Sanur.

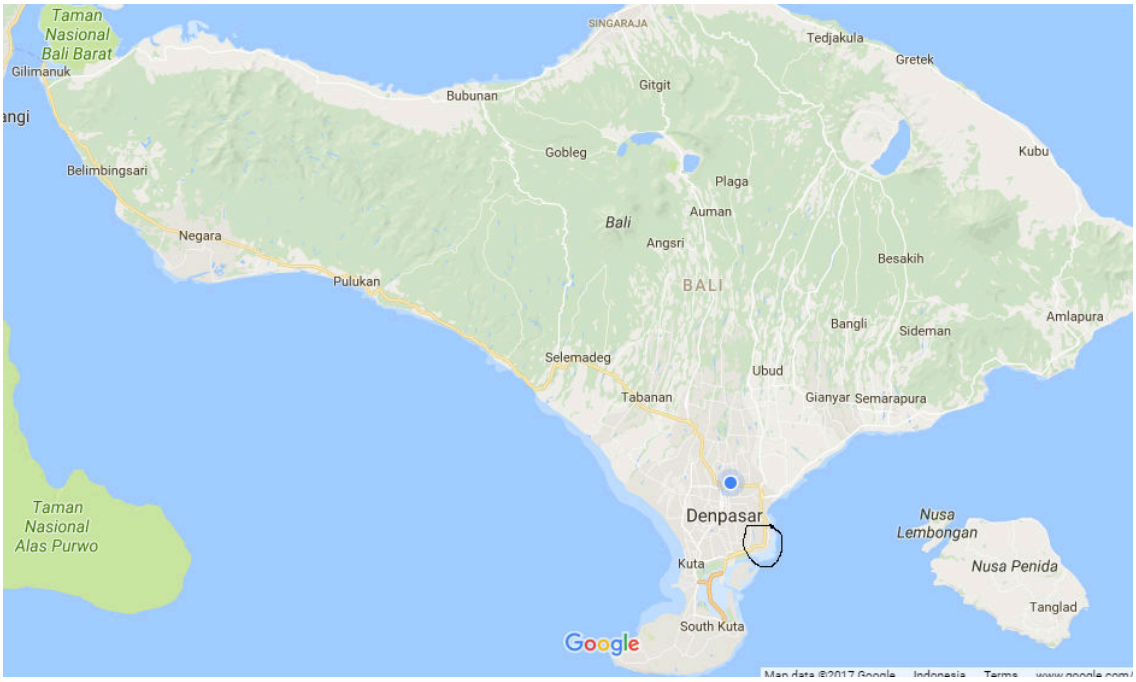
Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan teknik pengambilan basis data (Jogiyanto, 2008). Menurut Jogiyanto dalam bukunya tentang metodologi penelitian Sistem informasi, teknik pengambilan basis data merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. Teknik wawancara

diharapkan dapat memperoleh data strategi-strategi yang digunakan dalam mengelola pemasaran kawasan wisata sanur.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan linier dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas. (Creswell 2010). Pendekatan ini lebih interaktif dengan beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunannya. Pendekatan ini terdiri dari 6 langkah, yaitu : a) Mengolah dan mempersiapkan data, b) Membaca Keseluruhan data, c) Menganalisis lebih detail dengan mengcoding data, d) Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori dan tema yang akan dianalisis, e) Deskripsi dan tema-tema ini disajikan kembali dalam narasi, dan f) Interpretasi atau memaknai Data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Geografis kawasan wisata sanur terletak di bagian tenggara pulau Bali. Secara administratif kawasan wisata sanur merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Denpasar selata, wilayah kotamadya Denpasar. Kelurahan sanur dipimpin oleh seorang Lurah yang membawahi 3 bagian. 2 desa yaitu desa sanur kauh, desa sanur kaja dan kelurahan sanur itu sendiri. 2 desa dipimpin oleh kepala desa sedangkan kelurahan sanur dipimpin oleh seorang lurah. Luas wilayah Kawasan sanur adalah 1.057 hektar. Gambar 2 menunjukkan gambar pulai bali. Kawasan Sanur dilingkari dengan lingkaran hitam Kawasan sanur terletak 11 km sebelah timur kota denpasar.



Gambar 2. Lokasi Kawasan Sanur pada Peta Bali

Sanur memang memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik unggulan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat beberapa potensi yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang mengunjungi sanur. Beberapa daya tarik wisata yang dimiliki adalah Wisata alam, Wisata Budaya, Wisata Kuliner.

DMO KSPN Sanur memiliki tugas dalam pengelolaan pemasaran Kawasan Wisata Sanur. Tugas ini bukanlah suatu tugas yang berat, tetapi tidak bisa dikatakan ringan. Karena sanur bukan kawasan baru yang dikembangkan. Sebelum sanur menjadi seperti saat ini, Sanur telah lebih dulu dikenal oleh wisatawan dari Eropa, Amerika dan Australia.

Menurut sebuah tulisan dalam buku *The Rough guide to Bali & Lombok* yang

ditulis oleh Lesley Reader, sejarah Pariwisata sanur dimulai pada tahun 1920-an. Beberapa seniman dari eropa, amerika, dan australia datang dan menetap di Bali. Seniman tersebut antara lain Adrien-Jean Le Mayuer de Marphes seorang seniman dari Belgia. Ia adalah seorang seniman lukis. Seniman ini akhirnya jatuh cinta pada salah satu wanita bali yang bernama Ni Polok. Mereka menikah dibali. Le Mayuer memutuskan untuk menetap dibali. Sepasang seniman dari amerika yaitu Katharane Mershon dan suaminya, Jack Mershon, terpesona dengan keindahan pantai sanur. Mereka memustuskan menetap dan memiliki rumah dibali. Begitu juga dengan beberapa seniman lain dari jerman yaitu Hans dan Rolf Neuhaus. Mereka semua sangat menyukai keindahan pulau bali sehingga memutuskan untuk menetap dibali. Setelah perang dunia kedua seorang seniman australia Donald Friend juga memutuskan untuk membeli rumah di sanur dan mentap. Tetapi sampai saat ini, bukti bahwa seniman tersebut hidup disanur, hanya dapat dilihat pada museum Le Mayeur. Museum ini merupakan galeri lukisan dan beberapa benda-benda pribadi milik Le mayeur dan istri yang diletakkan dalam sebuah ruangan yang dilindungi dengan kaca. Melalui seniman-seniman inilah keindahan pulau bali dan pantai sanur menjadi terkenal di beberapa negara di eropa maupun di amerika.

Tetapi saat itu, fasilitas yang tersedia seperti hotel, tempat belanja, dan restoran serta atraksi wisata belum dikembangkan seperti hari ini. Budaya masyarakat yang merupakan salah satu daya tarik, juga mengalami perubahan. Inilah yang menjadi tugas DMO sanur. Memberikan informasi kepada seluruh penduduk dunia tentang pengembangan kawasan wisata sanur. Pengembangan dari segi fasilitas, atraksi serta budaya masyarakat disanur.

Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan perkembangan kawasan wisata sanur. Dalam pengelolaan pemasaran, Branding dilakukan melalui event tahunan yaitu Sanur Village Festival. Event ini diadakan setiap bulan agustus atau bulan september setiap tahunnya. Bulan Agustus atau september dipilih karena, secara umum tingkat hunian dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali, khususnya ke sanur menurun. Tingkat hunian hotel di sanur menjadi rendah. Pada umumnya tingkat hunian hotel disanur menjadi tinggi pada bulan desember-Januari.

Event sanur village festival sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Dalam event tersebut masyarakat sanur bekerjasama dengan pengusaha pariwisata untuk memperkenalkan sanur sebagai kawasan wisata yang menawarkan pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh wisatawan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus DMO Sanur Bidang lingkungan, Drs. I Wayan Parka, Sumber pendanaan Event Sanur village festival adalah dari dana swadaya masyarakat sanur. Berbeda dengan Nusa dua Festival, yang dananya bersumber dari Anggaran pemerintah. Pengusaha pariwisata disanur mendukung acara ini dengan cara menyumbang sejumlah dana, menyediakan tempat untuk beberapa acara tanpa dikenakan biaya. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha pariwisata apabila ikut berpartisipasi adalah kesempatan *branding* bagi usahanya.

Berbagai acara menjadi agenda pada Sanur Village Festival. Kompetisi olahraga menjadi salah satu agenda. Kompetisi olahraga yang diadakan adalah kompetesi dalam bidang futsal, golf, tenis, selancar air dan lomba kano. Selain lomba dalam bisang olahraga, lomba dalam bidang seni juga menjadi agenda dalam Sanur Village Festival. Lomba layang-layang, *Fotography Contest,* dan lomba jukung (Perahu Tradisional Bali) Adalah Agenda dalam bidang seni. Agenda lain yaitu pertunjukan musik, tari, photography fashian show khusus untuk endek dan kebaya. Pertunjukan musik melibatkan musisi terkenal di indonesia dengan jenis musik pop, jazz, *regae* dan musisi lokal bali dengan alat musik tradisional bali. Sanur village festival melibatkan wisatawan dalam beberapa agendanya yaitu yoga, sepeda santai mengelilingi kawasan wisata sanur, dan parade budaya. Wisatawan juga dilibatkan dalam aktivitas pelestarian lingkungan seperti membersihkan pantai, penanaman

terumbu karang, dan pelepasan penyu dipinggir pantai. Selain agenda diatas Wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal juga dapat menikmati acara Bazar. Ada bazar makanan tradisional bali dan internasional, bazar produk kerajinan tangan, dan bazar tanaman langka. Acara bazar ini menjadi tempat buat pengusaha bertemu dengan customer. Pengusaha dapat mempromosikan produknya pada bazar ini.

Sanur Village Festival memiliki konsep memperkenalkan semua daya tarik wisata disanur. Dari mulai Wisata kuliner hingga wisata budaya. Event ini menggabungkan budaya tradisional bali dengan budaya Indonesia. Melibatkan wisatawan dalam setiap agenda adalah strategi untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sanur. Event ini berhasil menarik minat wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik untuk datang kebali. Sanur Village Festival mampu meningkatkan tingkat hunian seluruh hotel berbintang, hotel melati dan rumah penginapan. Kunjungan wisatawan meningkat pada saat event ini dilaksanakan. Wisatawan datang dari eropa, amerika, australia, dan timur tengah. Hotel atau penginapan dipenuhi juga wisatawan domestik dari sumatera, jawa, dan lombok. Tahun ini event sanur Village festival diadakan pada tanggal 9 sampai 13 agustus 2017.

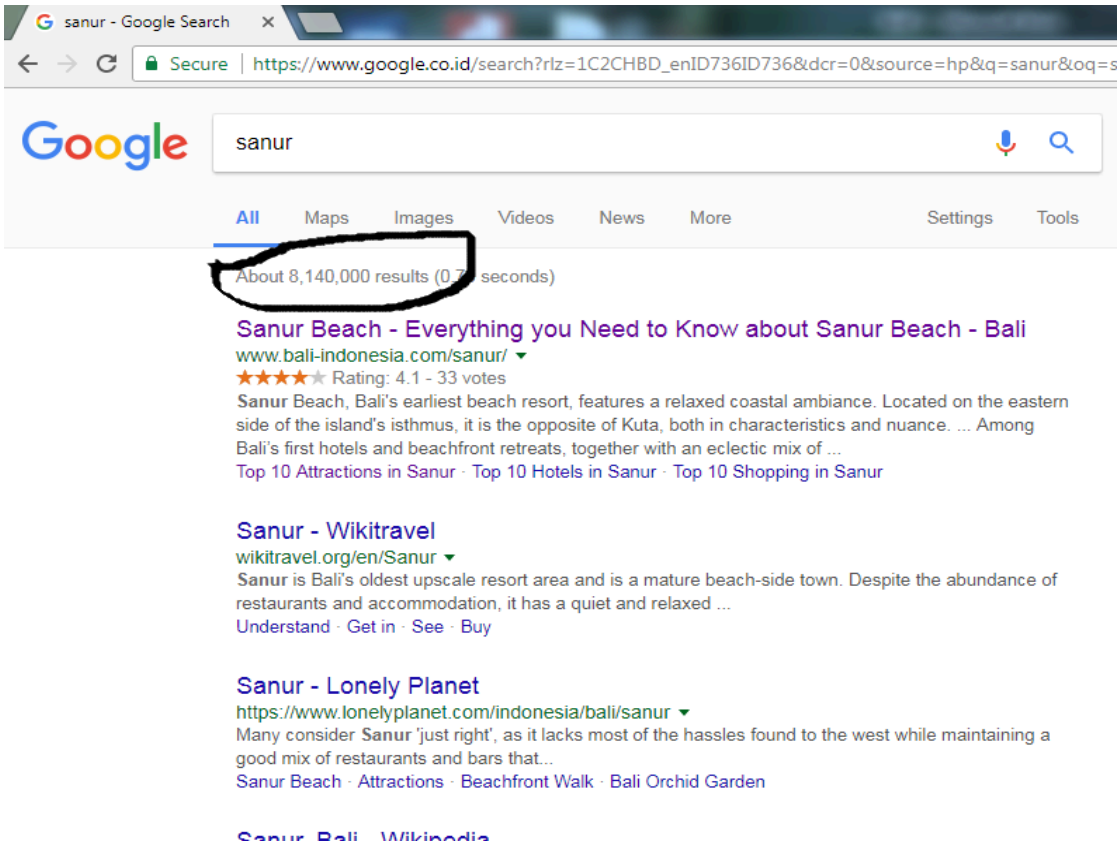
Branding melalui event ini dinilai sangat berhasil oleh ketua Panitia Sanur Village Festival yaitu Bp. Ida Bagus Gde Shidarta Putra yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pembangunan sanur. Oleh karena itu, beliau dan tim panitia sanur village festival berusaha keras untuk memperkenalkan event ini kepada seluruh masyarakat Indonesia dan Internasional. Untuk memperkenalkan event ini, tim panitia menggunakan kekuatan digital marketing. Tim panitia membuat sebuah website yang merupakan sumber informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui Sanur Village Festival. Melalui website inilah promosi Kawasan Wisata Sanur dilakukan.

DMO Kawasan Wisata Sanur tidak memiliki website khusus yang bertujuan memperkenalkan kawasan tersebut kepada wisatawan. Website yang dimiliki adalah website dari pemerintah kotamadya denpasar. Content website tersebut hanya memuat informasi yang terkait dengan kawasan sanur sebagi sebuah desa atau sebagai sebuah Kelurahan.

Meskipun tidak memiliki *official website*, Kawasan wisata sanur telah dikenal oleh wisatawan di dunia. Kawasan wisata sanur dikenal melalui website penyedia jasa perjalanan, penyedia jasa perjalanan wisata, ataupun penyedia jasa atraksi wisata. Website ini memberikan informasi detail tentang kawasan wisata sanur. Konten website menceritakan tentang keindahan pantai sanur disertai dengan foto yang menggambarkan keindahan kawasan pantai sanur. Konten website ini juga menceritakan tentang aktivitas yang dapat dilakukan selama berwisata di kawasan sanur. Secara umum, konten website menceritakan tentang ketersediaan fasilitas dan pemandangan yang dapat dinikmati di kawasan sanur.

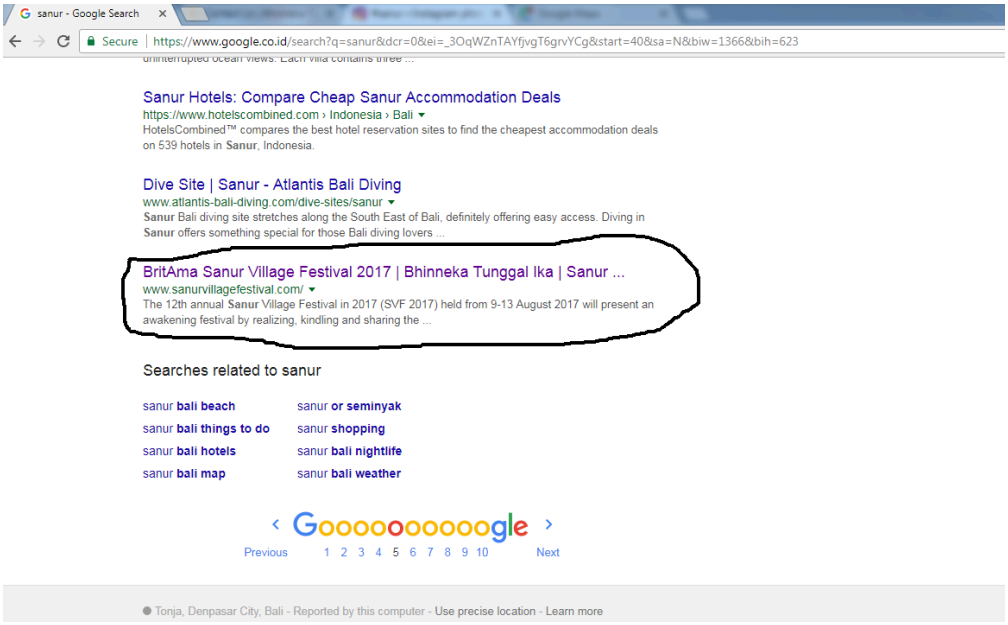
Jumlah halaman website yang memiliki konten tentang sanur sebanyak delapan juta seratus empat puluh ribu (diakses pada 25 Agustus 2017). Hal ini dapat dilihat dari hasil mesin pencari google. Kata kunci yang digunakan adalah “sanur”. Gambar 3 menunjukkan tautan halaman web teratas yang memiliki kata kunci sanur. Tautan ini adalah halaman web dengan domain www.bali-indonesia.com/sanur/ . Website ini milik sebuah online travel agent. Website ini memuat beberapa foto yang menunjukkan keindahan sanur. Melalui website ini wisatawan di seluruh dunia dapat mengenal kawasan wisata. Website ini dilengkapi dengan map yang menunjukkan lokasi setiap fasilitas. Website juga memberikan informasi mengenai fasilitas dan aktivitas yang dapat dinikmati di kawasan wisata sanur. Ini merupakan strategi pengusaha travel tersebut untuk menarik minat pengunjung web agar berkunjung ke kawasan Sanur dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh travelnya. Strategi ini adalah salah satu trik SEO (*Search Engine Optimization*) yaitu salah satu strategi dalam e-marketing, lebih khusus digital marketing. Strategi ini berfungsi untuk mengoptimalisasi halaman web sehingga cepat ter-indeks pada mesin pencari.

Strategi ini menguntungkan bagi DMO sanur. Kawasan Sanur dapat dikenal melalui website ini.



Gambar 3. Hasil Pencarian Mesin Pencari Google dengan kata kunci ‘sanur’

Gambar 4 menunjukkan website Sanur Village Festival ter-indeks pada mesin pencari google. Website ini muncul pada List ke 50. List terakhir pada halaman ke-lima. Banyak faktor yang menyebabkan website ini tidak dapat terindeks dengan posisi lebih diatas. Salah satu diantaranya karena website ini baru berumur 12 Tahun, sesuai dengan tahun mulainya Event sanur village festival. Alasan lain, dikarenakan website ini menjadi website yang pasif dan tidak diupdate setelah event tersebut berakhir yaitu pada bulan september setiap tahunnya. Bp. I Wayan Parka menyebutkan bahwa website ini akan diupdate kembali, ketika panitia Sanur Village Festival kembali aktif bekerja untuk mempersiapkan event pada tahun berikutnya. Panitia bekerja mulai bulan Maret maka website akan mulai diupdate pada bulan april untuk keperluan mengumpulkan sponsor. Selama bulan september hingga April tahun berikutnya, website ini sama sekali tidak diupdate. Ini bertentangan dengan Trik SEO. Seharusnya sebuah website diupdate secara berkelanjutan dalam periode yang tidak terlalu lama, sehingga banyak informasi baru yang mungkin dibutuhkan oleh pengunjung web. Tetapi informasi pada website tersebut tidak berubah. Website ini dapat dikategorikan website statis. Saat ini pola website statis sudah ditinggalkan oleh para pelaku pemasaran karena tidak dapat mendatangkan *traffic* ke halaman web.

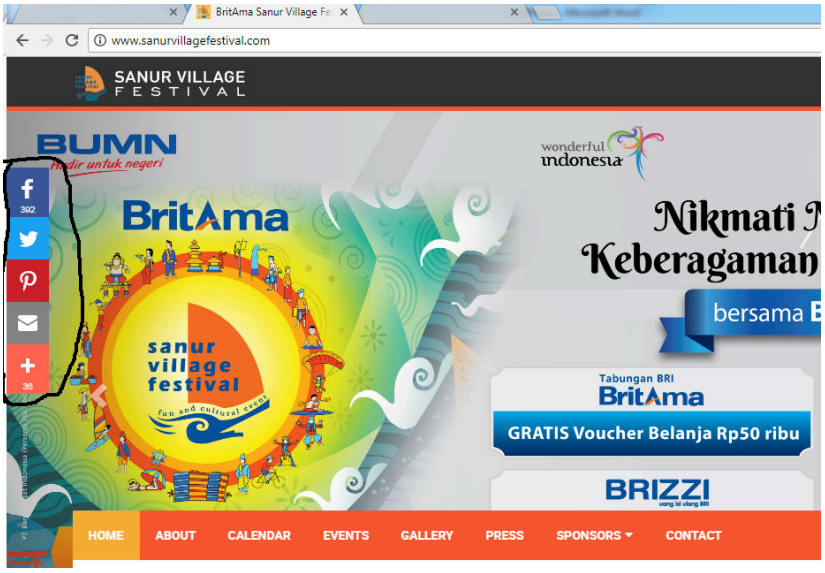


Gambar 4. Website Sanur Village Festival

Meskipun website ini tidak aktif dalam jangka waktu yang lama, tetapi panitia Sanur Village Festival, sudah memikirkan untuk menggunakan kekuatan sosial media dalam mendistribusikan informasi tentang sanur Village Festival. Pada website tersebut disediakan fitur untuk membuat berita yang dapat di posting pada sosial media. Gambar 5 menunjukkan fitur yang dapat digunakan untuk membuat berita yang dapat diposting sebelum atau selama event Sanur village Festival berlangsung. Panitia mengharapkan, dengan disediakannya fitur ini, banyak masyarakat yang dapat mendistribusikan informasi terkait pelaksanaan Sanur Village Festival tersebut.

Sanur Village Festival tidak memiliki akun sosial media. Akun media sosial yang biasanya digunakan untuk mempromosikan acara ini adalah akun pribadi milik panitia atau akun media sosial milik hotel, restoran, atau masyarakat sanur yang turut berpartisipasi dalam acara sanur villageFestival. Tetapi sanur village festival memiliki Halaman pada Facebook dimana pengguna akun media sosial ini bisa memberikan review pada event tersebut. Hal ini menguntungkan bagi DMO sanur. Dengan bantuan pengunjung Sanur Village Festival yang membuat review, akun media sosial facebook yang berteman dengan akun yang bersangkutan akan mengetahui tentang sanur Village Festival.

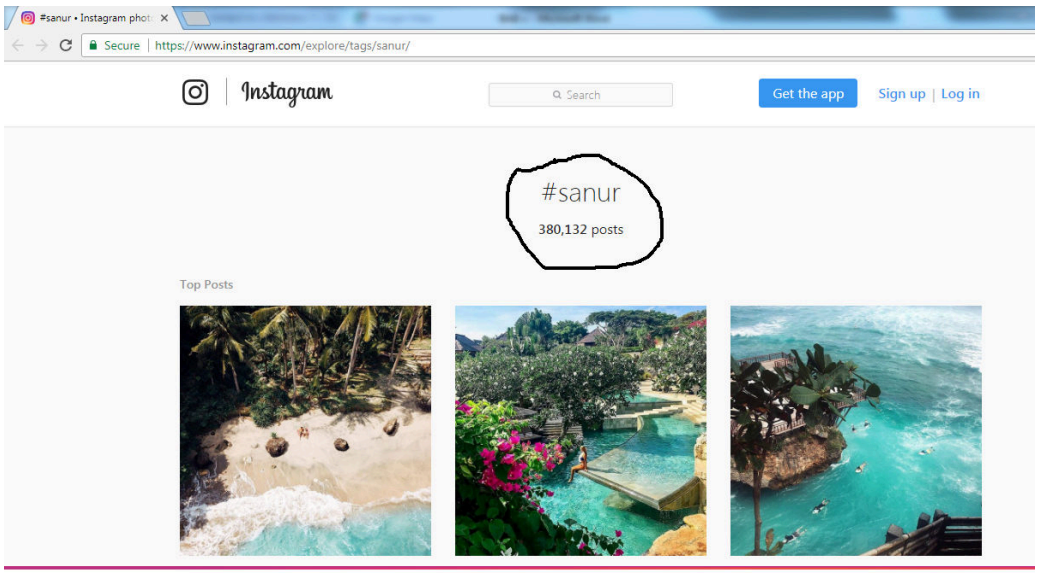
DMO Sanur juga tidak memiliki akun media sosial. DMO sanur memanfaatkan upaya promosi yang dilakukan oleh pengusaha hotel, restoran, atraksi wisata serta agen perjalanan untuk mempromosikan sanur. Secara tidak langsung DMO sanur melibatkan masyarakat dan pengusasa pariwisata disanur untuk mempromosikan sanur. Hal ini dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dengan membuat akun sendiri, mengelolanya termasuk membuat pertemanan dengan akun facebook lainnya. DMO sanur memanfaatkan pertemanan pada akun facebook milik pengusaha, masyarakat, bahkan wisatawan yang pernah ke sanur dan tinggal disanur untuk mempromosikan Kawasan wisata sanur.



Gambar 5. Fitur yang disediakan untuk membuat Berita pada sosial Media

Cara yang sama digunakan pada media sosial lainnya. Cara ini mampu membuat kawasan wisata sanur dikenal oleh banyak pengguna akun media sosial. Pada akun media sosial instagram, postingan yang menggunakan hashtag sanur (#sanur) berjumlah 380.132 buah. Gambar 6 menunjukkan hal tersebut. Hal ini menunjukkan banyak pengguna akun instagram sudah mengenal kawasan sanur. 1 Satu buah postingan dari pengguna akun, akan dapat dilihat oleh akun lainnya yang menjadi *follower* pada akun tersebut.

DMO sanur telah memanfaatkan kekuatan sosial media dalam mempromosikan Kawasan wisata sanur dan Acara tahunan mereka. DMO sanur menggunakan kekuatan pengguna akun media sosial masyarakat, pengusaha, dan wisatawan. Oleh karena itu, kawasan sanur dan Sanur Village Festival dapat dikenal secara luas karena menggunakan banyak akun media sosial yang masing-masing memiliki banyak pertemanan.



Gambar 6. Posting pada instagram dengan #sanur

Promosi dan *Branding* kawasan wisata sanur telah memanfaatkan teknologi informasi. Kegiatan pemasaran lainnya yaitu riset pasar, *Positioning*, dan evalusi program marketing masih menggunakan teknologi informasi dan software yang umum digunakan seperti pengolah kata, spreadsheet dan lain-lain. DMO sanur belum memiliki sistem informasi khusus untuk riset pasar dan evaluasi program marketing. Jumlah pengunjung kawasan wisata sanur belum dihitung secara pasti. Pengunjung hanya dhitung dari jumlah tamu yang menginap disetiap hotel berbintang disanur. Pengunjung sanur village Festival juga tidak dihitung secara pasti karena tidak ada tiket masuk. Tetapi jumlah pengunjung diambil dari jumlah tiket parkir yang terjual. Faktanya tidak semua kendaraan pengunjung mampu ditampung ditempat parkir yang sudah disediakan.Sistem parkir tidak menggunakan sistem informasi. Sistem parkir hanya memberikan tiket secara manual kepada pengunjung di pintu masuk.

IV. KESIMPULAN

Pengelolaan pemasaran kawasan wisata sanur dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pengusaha dan wisatawan yang pernah berkunjung ke sanur. Event sanur Village Festival yang diadakan setiap tahun merupakan upaya DMO sanur dalam memperkenalkan Hotel, restoran, pusat perbelanjaan dan budaya bali kepada seluruh pengunjung. Event ini mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung kebali. Ini dibuktikan dengan tingkat hunian hotel yang dapat mencapai 90% pada hari-hari dimana event tersebut berlangsung.

Branding dan promosi dilakukan melalui sistem informasi berbasis internet. DMO sanur memanfaatkan website sanur village festival, website hotel, travel dan restoran untuk mempromosi kan kawasan wisata sanur. Selain website, DMO sanur juga memanfaatkan sosial media dari seluruh elemen masyarakat, pengusaha dan wisatawan pengguna akun media sosial dalam mempromosikan sanur.

Pengelolaan pemasaran berupa perencanaan pemasaran dan evaluasi, sudah meggunakan teknologi informasi. Tetapi bedanya adalah teknologi informasi yang digunakan bukan berupa sebuah sistem yang terintegrasi dengan sistem promosi dan branding. Teknologi informasi yang dipakai hanya menggunakan spreadsheet dan pengolah kata. Spreadsheet digunakan dalam pengelolaan data, sedangkan pengolah kata digunakan untuk membuat laporan evaluasi pemasaran.

Jenis sistem informasi yang selalu digunakan adalah *enterprise collaboration system*. Sistem ini berfungsi untuk mengkoordinasikan tugas-tugas dengan memanfaatkan email, video conference, online messanger, dan media sosial. Setiap personil yang terlibat dalam pengelolaan pemasaran Kawasan sanur adalah pengguna aktif semua jenis *enterprise collaboration system*. Pengelolaan pemasaran juga sudah memanfaatkan sebagian dari fitur digital marketing.

Secara umum, sebagaian fungsi DMS telah dilaksanakan yaitu *Web Content Management*. Pemetaan fasilitas dan atraksi wisata telah dilakukan secara mandiri oleh pengusaha travel. Bagi pengusaha travel, pemetaan fasilitas dan atraksi adalah peluang bisnis mereka. Tetapi pemetaan ini belum terintegrasi dengan sistem informasi lainnya seperti pemetaan jumlah pengunjung. Pemetaan fasilitas dan atraksi belum menggunakan DMS. Fungsi DMS yang kedua tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan pemasaran. Oleh karena itu, fungsi DMS yang kedua harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pemasaran bagi DMO sanur. Sebuah sistem yang dapat memetakan pengunjung sangat dibutuhkan oleh DMO dalam pengelolaan pemasaran.Kebutuhan akan informasi sangat penting dalam proses perencanaan pemasaran. Pemetaan jumlah pengunjung dan keluhan pengunjung harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan produk berikutnya. Ini juga akan mempengaruhi perencanaan pemasaran. Dengan data yang valid, DMO sanur dapat merencanakan produk dan pemasaran dengan tepat, sehingga pengembangan kawasan wisata sanur dapat dilakukan secara terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Buhalis, D. (2013). E-destinations : Global Best Practice in Tourism Technologies and Applications. *Information and Communication Technologies in Tourism 2013 : Proceedig of International Conference in Innsbruck, Austria January 22-25, 2013* , 119-130.

Buhalis, D. (2003). *eTourism: Information Technology for strategis tourism management.* London: Prentice Hall.

Chaffey, D. (2009). *E-Bussiness and E-Commerce Management, Strategy Implementation and Practice.* Edinburgh Gate England: Prentice Hall.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design.* California: Sage publications.

Evans, D., & Mckee, J. (2010). *Social Media Marketing.* Indianapolis: Wiley Publishing Inc.

Goeldner, C. R. (2009). *Tourism Principles, Practices.* Canada: John Wiley & Son Inc.

J.Miguens, R. C. (2008). Social media and Tourism Destinations : Trip advisor case study. *Advance in Tourism Research 2008* (hal. 26). Aveiro Portugal: IASK ATR2008.

J.Page, S., & Joanne, C. (2014). *Tourism a Modern Synthesis.* Hampshire: Cengage Learning EMEA.

Jogiyanto. (2008). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi.* Jogyakarta: Andi offset.

Lesley Pender, R. S. (2005). *The Management of tourism.* London: Sage Publication Ltd.

Mariani, N. W. (2016). Role of social mediain the promotion "Hidden Canyon" Tourism Object. *International Conference on Tourism, Gastronomy,and Tourist Destination* (hal. 78). Jakarta: Atlantis Press.

O' Brien, M. (2011). *Management Information Systems.* NewYork: McGraw-Hill.

Soltankhah, S. (2013). Managenement information system necessity in today's world. *Advances in Environmental biology* , 2459.

Transformasi Spasial Kota Lasem : 1925 – 2015

Nilta Rahmah[1], Agam Marsoyo[2], Budi Kamulyan[2]
[1]Mahasiswa S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[2]Staf Pengajar Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email : niltarahmah@gmail.com; agam@ugm.ac.id; budi.kamulyan@ugm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi transformasi Kota Lasem sekaligus menemukan transformasi pola spasialnya untuk mewujudkan cita-cita Lasem sebagai kota pelestarian dan pengembangan cagar budaya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mendalam, penelitian ini menggunakan metode campuran. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam serta data sekunder. Penelitian ini berhasil menemukan pola transformasi Kota Lasem pada awalnya membentuk lingkaran konsentris pada masa Majapahit mulai bergeser menjadi kota dengan susunan mirip dengan kota inti berganda sejak masa kolonial. Pola tersebut tidak mengalami perubahan pada kurun waktu penelitian namun susunan kotanya mengalami transformasi beberapa kali. Sejalan dengan susunan kotanya yang mengalami perubahan, faktor yang mempengaruhi transformasi kota Lasem juga mengalami pergeseran dari faktor politik pada masa kolonial menjadi faktor ekonomi pada masa reformasi.

Kata kunci : Transfomasi kota; Kota tua; Kota Majapahit; Metode campuran; Semiotik.

I. PENDAHULUAN

Kota mempunyai struktur yang berbeda-beda dipengaruhi oleh budaya dan kehidupan masyarakat pada awal terbentuknya. Kota yang berdiri pada masa berbeda akan mempunyai struktur kota yang berbeda pula. Perubahan budaya dan kehidupan sosial masyarakat tersebut membentuk pola kenampakan kota saat ini. Kota-kota tersebut mengalami transformasi menyesuaikan dengan budaya dan kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana kota-kota prakolonial di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan baik Hindu maupun Islam. Sedangkan kota kolonial cenderung mempunyai pola spasial yang lebih kaku akibat pengaruh struktur modern negara barat. Perpaduan pola spasial tersebut menyatu pada kota-kota tua sehingga membentuk pola spasial yang unik dan berbeda-beda pada setiap kota.

Lasem belum diketahui secara pasti awal terbentuknya, namun telah dikenal sejak Raja Hayam Wuruk berkuasa di Kerajaan Majapahit. Lasem pada saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit yang disebutkan pada Nagarakrtagama (Unjiya, 2014). Namun dilihat dari temuan arkeologisnya, Lasem sudah berkembang jauh sebelum adanya Kerajaan Majapahit. Pada masa itu Lasem telah menjadi kota perdagangan dengan pusat kegiatan perdagangan di sekitar Pelabuhan Kaeringan.

Rentang sejarah Lasem yang panjang dengan potensi budayanya tersebut dituangkan menjadi tujuan penataan ruang Lasem. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang PKLp Lasem menetapkan tujuannya sebagai “pusat penataan dan pelestarian cagar budaya dalam rangka pengembangan pariwisata yang didukung pengembangan perdagangan dan jasa, penyediaan prasarana sarana pelayanan yang memadai yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.

Berbagai fakta dan gambaran perkembangan Kota Lasem tersebut sangat menarik untuk dicermati guna menjadi dasar untuk mewujudkan tujuan penataan ruang

Kota Lasem. Penelitian ini dibatasi hanya pada pusat Kota Lasem sejak masa berdiri dan pusat Kota Lasem sekarang yang bertujuan untuk mengidentifikasi transformasi spasial Kota Lasem sekaligus faktor yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui transformasi tersebut dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi serta dapat dijadikan pembelajaran untuk mencegah permasalahan mendatang. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang diangkat penulis adalah: bagaimana transformasi spasial yang terjadi pada kota peninggalan Majapahit sejak masa kolonial hingga sekarang?

II. METODE

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memverifikasi sekaligus mengembangkan teori mengenai transformasi spasial kota sehingga metode campuran (*mixed method*) dianggap paling sesuai digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuannya. Alasan lain yang mendasari pemilihan pendekatan campuran berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah berupa perkembangan Kota Lasem sejak masa kolonial hingga sekarang. Objek penelitian ini menyangkut peristiwa di masa lalu sehingga peneliti tidak bisa menyatu dengan objek tersebut. Namun peneliti harus tetap melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap perkembangan transformasi kota pada setiap periode yang didasarkan pada data masa lalu serta wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Metode yang digunakan adalah*embedded konkuren* dimana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan dalam satu tahapan. Dalam *embedded method* salah satu metode dapat menjadi alat dominan dan metode lainnya menjadi pendukung (Creswell, 2009). Pendekatan kualitatif diperlukan untuk menginterpretasi data dan peta sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan terhadap peta rekonstruksi penggunaan lahan pada setiap periode untuk mengetahui besaran transformasi spasial yang terjadi dan laju perubahannya pada setiap periode. Penggabungan dua model pendekatan tersebut akan menutupi kelemahan masing-masing metode sehingga hasil penelitian lebih terpercaya.

B. Metode pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi diperlukan untuk mengkonfirmasi hasil rekonstruksi peta dengan kondisi di lapangan. Sementara itu wawancara diperlukan untuk menggali kondisi Lasem dari masa ke masa sekaligus menggali faktor-faktor yang memepengaruhi transformasi Kota Lasem.

Data sekunder merupakan sumber informasi lain yang penting dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder tersebut berasal dari instansi-instansi terkait baik berupa dokumen, buku maupun hasil penelitian. Data-data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Peta Lasem dan foto udara, keduanya diperlukan untuk melakukan interpretasi perubahan dan perkembangan lahan kota selama kurun waktu penelitian.
2. Data-data statistik, data ini diperlukan untuk mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dari masa ke masa sehingga didapatkan gambaran utuh mengenai kondisi masyarakat pada tiap periode.
3. Dokumen sejarah tentang Lasem, berupa buku-buku sejarah Lasem baik yang diterbitkan pada skala nasional maupun cerita lokal, hasil penelitian arkeologis mengenai Lasem.
4. Dokumen tata ruang, berupa peraturan maupun kebijakan lokal yang dituangkan secara tertulis untuk mengatur penggunaan lahan di Kota Lasem.

C. Metode analisis data

Analisis penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu analisis transformasi spasial dan analisis faktor pengaruh utama. Analisis transformasi spasial diperlukan untuk menemukan pola transformasi yang terjadi selama kurun waktu penelitian. Analisis ini diawali dengan rekonstruksi peta sesuai dengan pembagian periode penelitian. Hasil rekonstruksi peta tersebut kemudian diinterpretasikan dan digabungkan dengan data sekunder. Data sekunder tersebut berupa buku dan dokumen tentang Lasem yang diinterpretasikan dengan analisis isi (*content analysis*).

Analisis faktor penentu utama diperlukan untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi transformasi spasial Kota Lasem. Analisis faktor penentu utama diawali dengan identifikasi faktor yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan penelaahan data sekunder. Faktor-faktor yang telah diidentifikasi tersebut selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan variabel penelitian pada masing-masing periode penelitian. Untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi transformasi kota Lasem dilakukan dengan menyusun unit-unit informasi hasil identifikasi faktor.

III. HASIL PEMBAHASAN

A. Transformasi pola spasial Kota Lasem

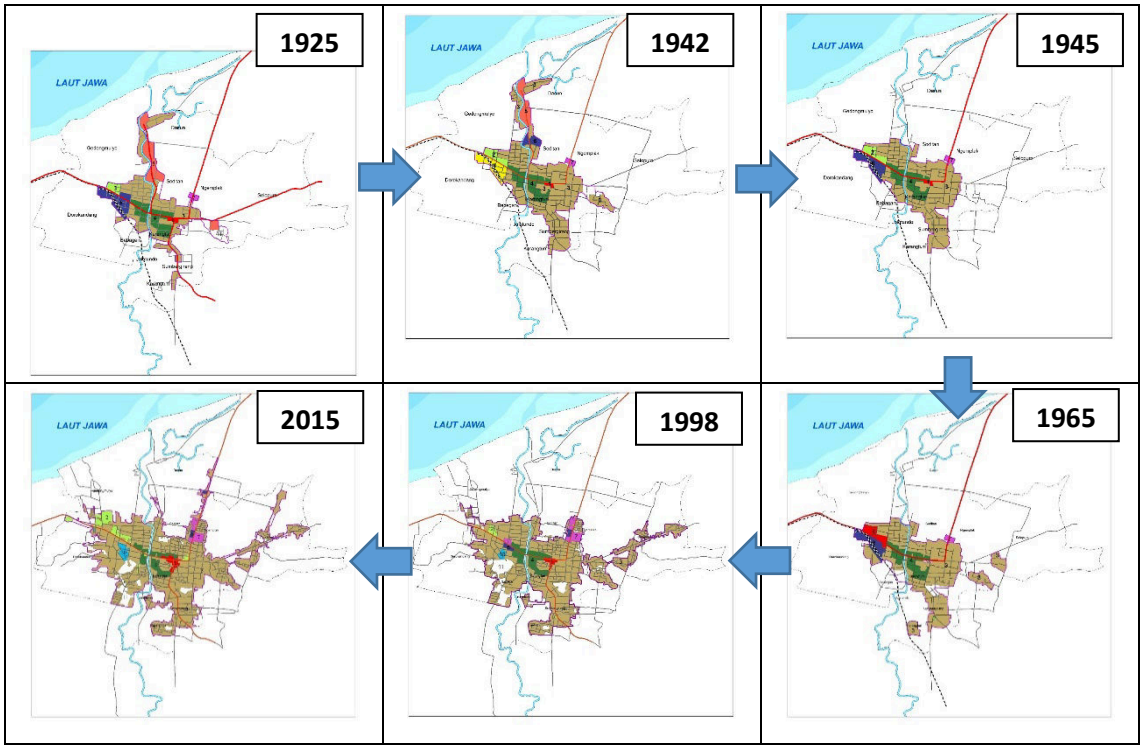
Lasem mengalami dinamika dalam perkembangannya seiring dengan perannaya bagi kawasan di sekitarnya. Pada awal terbentuknya Lasem merupakan negara bawahan kerajaan Majapahit (Karsono, 2016). Perkembangan dan peranannya semakin meningkat hingga masa kolonial. Pada masa kolonial Lasem menjadi saksi bersatunya warga Cina dan pribumi dalam melawan VOC. Hal tersebut yang menyebabkan statusnya mulai diturunkan menjadi kawedanan (*district*) pada masa itu. Meskipun diturunkan, Lasem masih memegang peranan yang penting bagi kawasan di sekitarnya sebagai pusat perdagangan dan industri. Handinoto (2015) bahkan menyebutnya sebagai kota modern pada masa itu. Masa Jepang dan kemerdekaan menjadi titik balik bagi Kota Lasem. Kehancuran Kota Lasem dimulai sejak kedatangan Jepang dan diperparah pada Masa Orde Lama.

Transformasi Kota Lasem dapat dilihat dari perkembangan elemen pembentuk kotanya. Sarana dan prasarana kota merupakan elemen yang paling mudah dikenali dalam melihat transformasi kota. Pada kota kecil sarana dan prasarana tersebut menjadi pusat kegiatan masyarakat yang menyusun pola ruang kota. Pergeseran sarana dan prasarana tersebut menyebabkan bergesernya pusat kegiatan masyarakat sehingga terjadinya transformasi pola ruang kota.

Susunan pola ruang Kota Lasem secara keseluruhan terbagi atas sepuluh zona. Zona tersebut tersusun dari beberapa sarana dan prasarana yang membentuk pusat kegiatan masyarakat. Zona pusat kota (central business district) ditandai dengan adanya masjid, pasar dan lapangan terbuka (alun-alun). Zona perdagangan dan industri ringan ditandai dengan adanya pasar, pertokoan, pegadaian, kantor pos dan industri kecil. Zona permukiman kelas rendah sampai menengah ditandai dengan rumah dengan tapak kecil dan tidak berpagar atau berpagar rendah. Zona permukiman kelas tinggi ditandai dengan rumah dengan tapak besar dan berpagar tinggi. Semiotika kawasan permukiman tersebut didasarkan pada Pratiwo (2010) mengenai kondisi permukiman pengusaha Cina Lasem yang membangun rumahnya dengan pagar tinggi yang disebut sebagai rumah benteng. Rumah benteng tersebut dibangun demi keamanan penghuninya (hasil wawancara dengan Sigit Witjaksono, warga Cina Lasem, 2016). Zona industri ditandai dengan adanya industri besar berupa industri galangan kapal dan industri gula. Zona pemerintahan ditandai dengan adanya kantor-kantor pemerintahan. Zona pendidikan ditandai dengan adanya bangunan-bangunan sekolah. Zona kesehatan ditandai dengan adanya sarana kesehatan berupa puskesmas beserta rumah dinas dokter. Zona transportasi ditandai dengan adanya stasiun kereta api dan terminal.

Zona-zona penyusun pola ruang tersebut tidak muncul secara bersamaan. Beberapa zona muncul akibat bergeser atau hilangnya salah satu zona. Seperti zona kesehatan dan zona transportasi yang muncul akibat adanya pergeseran zona pemerintahan. Sebelumnya zona pemerintahan mencakup beberapa sarana dan prasarana kota termasuk sarana kesehatan dan transportasi namun kegiatan masyarakat yang menonjol adalah kegiatan pemerintahan. Zona peribadatan juga muncul tersendiri pada masa Orde Lama akibat pergeseran pusat Kota Lasem.

Transformasi spasial yang terjadi di Kota Lasem selama kurun waktu penelitian menunjukkan bahwa pusat kegiatan masyarakat mengelompok pada beberapa bagian Kota Lasem. Perubahan elemen fisik tersebut menyebabkan terjadinya transformasi struktur ruang pada kurun waktu penelitian. Pola ruang Kota Lasem membentuk banyak pusat menyerupai teori inti berganda yang dikemukakan oleh C.D Harris dan Ullman (Yunus, 2000). Berbeda dengan teori tersebut, inti berganda terbentuk karena inti pertama tidak mampu menampung kegiatan sehingga membentuk inti baru sedangkan di Kota Lasem inti baru tersebut dibentuk karena kebijakan pemerintah. Misalnya kawasan Dorokandang dengan dibangunnya sarana pemerintahan, kesehatan, ekonomi dan transportasi oleh Pemerintah Belanda membentuknya menjadi inti baru. Hal tersebut juga terjadi di Desa Soditan dimana kebijakan pemerintah membangun perkantoran di kawasan tersebut membentuknya menjadi inti baru. Transformasi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut.



Gambar 1. Transformasi Pola Ruang Kota Lasem
Sumber : penulis, 2017

Tabel 1. Transformasi Pola Ruang Kota Lasem

No	Pola Ruang Kota	Lokasi					
		Tahun 1925	Tahun 1942	Tahun 1945	Tahun 1965	Tahun 1998	Tahun 2015
1	Pusat kota / CBD	Perempatan Sumbergirang	Perempatan Sumbergirang	Perempatan Sumbergirang	Gedongmulyo	Perempatan Sumbergirang	Perempatan Sumbergirang

No	Pola Ruang Kota	Lokasi					
		Tahun 1925	Tahun 1942	Tahun 1945	Tahun 1965	Tahun 1998	Tahun 2015
2	Zona perdagangan / industri ringan	Gedongmulyo dan Babagan	Gedongmulyo dan Babagan	Gedongmulyo dan Babagan	Jolotundo	Gedongmulyo dan Jolotundo	Gedongmulyo, Babagan dan Jolotundo
3	Zona permukiman kelas rendah – menengah	Seluruh Desa di Kota Lasem	Seluruh Desa di Kota Lasem	Seluruh Desa di Kota Lasem	Seluruh Desa di Kota Lasem	Seluruh Desa di Kota Lasem	Seluruh Desa di Kota Lasem
4	Zona permukiman kelas tinggi	Karangturi, Babagan, Soditan, Gedongmulyo dan Sumbergirang	Karangturi, Babagan, Soditan, Gedongmulyo dan Sumbergirang	Karangturi, Babagan, Soditan, Gedongmulyo dan Sumbergirang	Karangturi, Babagan, Soditan, Gedongmulyo dan Sumbergirang	Karangturi, Babagan, Soditan, Gedongmulyo dan Sumbergirang	Karangturi, Babagan, Soditan, Gedongmulyo dan Sumbergirang
5	Zona industri	Soditan, Dasun dan Selopuro	Soditan dan Dasun	-	-	-	-
6	Zona pemerintahan	Dorokandang	Soditan	Dorokandang	Dorokandang	Soditan	Soditan
7	Zona pendidikan	Soditan dan Ngemplak	Soditan dan Ngemplak	Soditan dan Ngemplak	Soditan dan Ngemplak	Soditan dan Ngemplak	Soditan dan Ngemplak
8	Zona Transportasi	-	Dorokandang	-	-	-	-
9	Zona Peribadatan	-	-	-	Perempatan Sumbergirang	-	-
10	Zona Kesehatan	-	-	-	-	Dorokandang	Dorokandang

Sumber : Penulis, 2017

Di lihat dari luasannya, Kota Lasem mengalami perkembangan yang cukup besar pada kurun waktu penelitian yaitu mencapai 114 %. Penambahan luasan terbesar terjadi pada zona permukiman rendah sampai menengah serta zona perdagangan dan industri. Zona yang hilang pada kurun waktu penelitian adalah zona industri dan zona transportasi. Zona transportasi yang hilang adalah stasiun kereta api yang tidak berfungsi sejak masa Orde Baru. Sementara zona peribadatan dan zona kesehatan terbentuk akibat pergeseran pusat kota dan zona pemerintahan.

Pola perluasan lahan terbangun di Kota Lasem merupakan kombinasi dari pola konsentris, liner dan melompat. Di Kota Lasem perluasan tipe konsentris terjadi pada tiap masa di kawasan permukiman kelas rendah sampai menengah. Pola transformasi liner dan melompat banyak terjadi setelah adanya peningkatan jaringan jalan pada masa Orde Baru. Kedua pola tersebut bergabung pada pengembangan sarana perkotaan termasuk fungsi komersial di Kota Lasem. Gabungan antara transformasi struktur ruang, pola ruang dan pola perluasan lahan terbangun tersebut membentuk morfologi Kota Lasem menjari membentuk pola gurita dipicu oleh jaringan transportasi.

Tabel 2. Laju Transformasi Spasial Kota Lasem

No	Pola Ruang	Luas (Ha)					
		1925	1942	1945	1965	1998	2015
1.	Pusat Kota	2.61	1.53	1.59	9.92	3.41	6.44
2.	Zona Perdagangan / Industri Ringan	6.42	9.09	9.10	0.59	3.27	20.03
3.	Permukiman Kelas Menengah - Rendah	126.25	214.42	183.46	213.13	360.66	418.70

No	Pola Ruang	Luas (Ha)					
		1925	1942	1945	1965	1998	2015
4.	Permukiman Kelas Tinggi	31.79	28.63	28.63	26.94	23.69	18.46
5.	Zona Industri	32.48	17.61	-	-	-	-
6.	Zona Pemerintahan	23.16	7.66	18.27	17.70	3.92	2.20
7.	Zona Pendidikan	3.09	2.58	2.58	2.59	10.37	8.48
8.	Zona Transportasi	-	18.27	-	-	-	-
9.	Zona Peribadatan	-	-	-	1.16	-	-
10.	Zona Kesehatan					2.67	5.96
11.	Lainnya	16.88	-	-	-	47.27	40.73
	Jumlah	242.68	299.79	243.63	272.02	455.26	521.00

Sumber: penulis, 2017

Hasil identifikasi Zahnd (2008) pada kota pesisir di Jawa melahirkan beberapa tahapan morfologi yang diawali dengan pos perdagangan hingga kota pramodern. Pada tahap awal Belanda mendirikan pos perdagangan di sekitar kawasan pelabuhan. Tahapan selanjutnya pos perdagangan dikembangkan menjadi benteng pertahanan dilengkapi dengan gudang dan hunian. Selanjutnya morfologi kota pesisir menjadi kota benteng dengan pemindahan pusat kota dan sarana lainnya yang semuanya dihuni oleh warga Belanda. Pada tahap keempat kota benteng berkembang menjadi kota kaum etnis terpisah dengan adanya pengelompokan tempat tinggal. Kota pesisir selanjutnya berkembang menjadi kota pramodern dengan pusat kota yang berpindah di luar benteng kota lama.Setelah masa penjajahan Zahnd (2008) menyebut kota-kota di Jawa sampai pada tahapan modernisasi.

Morfologi Kota Lasem sedikit berbeda dari morfologi yang telah disampaikan oleh Zahnd (2008) di atas. Warga Belanda tidak mendirikan permukimannya di Lasem sehingga Lasem tidak mengalami tahapan kota benteng. Sebelumnya Lasem telah mengalami tahapan sebagai pos perdagangan yang kemudian berakhir dengan perlawanan warga Lasem terhadap Belanda. Pada kurun waktu penelitian ini, Lasem bergeser dari kota kaum etnis terpisah pada masa kolonial hingga kota modern. Kota kaum etnis terpisah terjadi hingga masa kolonial Jepang dimana permukiman dikelompokkan berdasarkan etnis. Tahap pramodern terjadi pada masa Orde Lama dimana pusat kegiatan berpindah karena kebijakan pemerintah. Mulai akhir masa Orde Baru sejak adanya pelebaran jalan Lasem mulai memasuki tahapan kota modern yang berkiblat pada kota-kota besar. Alun-alun sebagai pusat kota sekaligus identitas Kota Lasem mulai tersamarkan oleh kawasan komersial disekitarnya. Kehadiran kawasan komersial tersebut meningkatkan destruktivitas bangunan cagar budaya di Kota Lasem.

B. Faktor pengaruh transformasi spasial Kota Lasem

Kecepatan transformasi kota berbeda-beda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Yunus (2005) membagi faktor tersebut menjadi faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik meliputi topografi, struktur geologi, geomorfologi, perairan dan tanah sedangkan faktor non fisik berupa politik, sosial, budaya, teknologi, peraturan. Branch (1995) dan Bentley (1999) menambahkan faktor agama dan kepercayaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kota terutama di kota-kota tua. Penelitian yang dilakukan di India dan China menemukan bahwa faktor sosial, ekonomi dan fisik merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perkembangan kota (Sinha dalam Giyarsih, 2010). Sejalan dengan pendapat tersebut, Sujarto (2004) mengemukakan bahwa perkembangan fisik suatu lingkungan hidup disebabkan oleh

faktor sosial yaitu manusia dan kelompoknya.Faktor-faktor tersebut tidak secara mutlak mempengaruhi perkembangan kota sejak awal terbentuknya namun mengalami pergeseran dari masa ke masa.

Pada masa kolonial, faktor pengaruh utama perkembangan Kota Lasem adalah faktor politik. Faktor politik mengatur segala sendi kehidupan termasuk ekonomi, sosial hingga pemanfaatan lahan Kota Lasem. Penduduk Lasem pada masa kolonial Belanda didominasi oleh warga Cina (hasil wawancara dengan Sigit Witjaksono, warga Cina Lasem, 2016). Pada masa kolonial Jepang, penduduk Cina mulai berkurang akibat penjarahan dan rasa takut terhadap Jepang. Kedua rezim kolonial membagi strata sosial Kota Lasem berdasarkan etnis. Walaupun memiliki kebijakan yang sama namun pembagian kelas kedua rezim tersebut berbeda. Warga Cina pada masa kolonial Belanda berada pada kelas kedua di atas strata pribumi sedangkan pada masa Jepang posisi warga Cina berada pada kelas terendah yang berada di bawah pribumi. Strata sosial tersebut mempengaruhi pengaturan ekonomi masyarakat dimana warga Cina menjadi kepanjangan tangan Belanda untuk menagih pajak sehingga memiliki kehidupan yang lebih baik daripada warga pribumi (hasil wawancara dengan Sigit Witjaksono, warga Cina Lasem, 2016). Pemanfaatan lahan juga dikelompokkan menurut strata tersebut dengan adanya sistem permukiman (*wijkenstelsel*) dan sistem pas jalan (*passenstelsel*) untuk warga Cina. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah bersatunya warga Cina dan warga pribumi untuk melawan Belanda sebagaimana yang dahulu pernah terjadi di Lasem.

Faktor pengaruh utama transformasi Kota Lasem bergeser menjadi faktor sosial pada masa Orde Lama. Kondisi pemerintahan yang belum stabil dengan warisan hutang dan gangguan politik menyebabkan pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya peningkatan ekonomi masyarakat terutama pribumi justru memobilisasi masyarakat secara besar-besaran. Rezim Orde Lama mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1959 yang melarang warga Cina untuk melakukan kegiatan perdagangan di kota kecamatan dan pedalaman yang memicu berpindahnya warga Cina Lasem menuju ke kota-kota besar sehingga semakin memperparah kehidupan ekonomi Lasem (Pratiwo, 2010 dan Handinoto, 2015).Indikasi terjadinya penurunan jumlah penduduk di Lasem dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk Cina pada tahun 1930 yang mencapai 31.866 jiwa dan tahun 1983sebanyak 24.065 jiwa (Handinoto, 2015).Warga Cina pada masa ini diberikan pilihan untuk tetap tinggal di kota kecamatan namun harus beralih pekerjaan. Sebagian warga Cina Lasem tetap bertahan dengan mendirikan industri-industri tahu, kecap, kerupuk dan batik namun sebagian besar memilih untuk pindah dan meninggalkan rumahnya.

Faktor pengaruh utama transformasi Kota Lasem yang terjadi pada rezim Orde Baru adalah faktor fisik. Jika dilihat dari penambahan area terbangun, transformasi spasial Kota Lasem pada rezim Orde Baru merupakan yang terbesar. Hal tersebut dipengaruhi faktor fisik yaitu adanya pelebaran Jalan Raya Pos yang terjadi dua kali pada masa ini (Pratiwo, 2010) serta penambahan sarana dan prasarana kota. Pemerintah pada rezim ini mulai memperhatikan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Distribusi barang dan jasa sangat diperhatikan untuk meningkatkan investasi swasta yang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian lebih cepat. Pelebaran tersebut menyebabkan beralihfungsinya lahan di sekitar Jalan Raya Pos yang awalnya merupakan permukiman Cina. Pelebaran jalan itu menyebabkan munculnya toko-toko serta merubah arsitektur bangunan di sekitarnya (hasil wawancara dengan Ernantoro, ketua Forum Komunikasi Masyarakat / Fokmas dan Edi Winarno, ketua Masyarakat Sejarahwan Indonesia / MSI, 2016). Penambahan sarana kota berupa fasilitas pendidikan yang ada di Desa Ngemplak dan Desa Soditan memicu terjadinya transformasi spasial dengan munculnya permukiman di sekitar sarana tersebut. Peraturan yang mendiskriminasi warga Cina turut

mempengaruhi perkembangan Kota Lasem. Tujuan awal ditetapkannya aturan tersebut sebenarnya adalah mempercepat proses pembauran antara warga Cina dan pribumi namun kenyataannya justru membuat warga Cina menjadi tertutup dan khawatir.

Pada masa reformasi, pemerintah daerah dapat menentukan arah dan sasaran pembangunan sesuai dengan potensi lokal dan sumberdaya masing-masing daerah. Pembangunan dapat diprioritaskan sesuai dengan kemampuan keuangan dan sumberdaya yang dimiliki. Masing-masing daerah meningkatkan daya saingnya untuk memperoleh investasi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sasaran utama pembangunannya adalah peningkatan ekonomi termasuk di Lasem. Prakarsa masyarakat dan swasta menjadi hal yang utama pada era ini dimana masyarakat berusahamenangkap peluang yang ada untuk merubah lahannya menjadi area komersial. Hal tersebut didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan potensi lokal Lasem yaitu batik. Perekonomian dan sektor pariwisata Lasem menjadi lebih bergairah apalagi dibarengi dengan kebebasan warga Cina untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun di sisi lain komersialisasi tersebut sedikit banyak turut andil dalam menghilangkan jejak perjalanan panjang Kota Lasem dengan rusak dan beralihfungsinya bangunan-bangunan kuno. Transformasi secara horisonatal pada era ini terjadi secara lambat namun alih fungsi bangunan terjadi secara cepat. Sebagian besar alih fungsi tersebut digunakan untuk kegiatan komersial. Transformasi Kota Lasem pada masa ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dengan masyarakat dan swasta sebagai agen perubahannya.



Gambar 2. Transformasi Faktor Utama di Kota Lasem
Sumber : penulis, 2017

IV. KESIMPULAN

Kota peninggalan Majapahit walaupun diturunkan statusnya tetap mengalami transformasi sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Pergeseran faktor utama mempengaruhi kecepatan dan arah transformasi kota. Walaupun terjadi pergeseran faktor yang mempengaruhi, pusat kotanya masih mengacu pada kota lama di Jawa yaitu di sekitar kawasan alun-alun. Jika dilihat dari fungsinya, alun-alun telah bertransformasi dari pusat segala kegiatan pada masa kerajaan menjadi pusat bisnis dan perdagangan pada masa sekarang.. Segregasi fungsi alun-alun tersebut justru membentuk inti kota baru berupa pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan pendidikan, pusat kegiatan kesehatan dan lainnya. Hal tersebut menyebabkan pola kota yang awalnya mengikuti pola konsentris berubah menjadi kota dengan banyak inti.

Faktor utama yang mempengaruhi transformasi spasial kota mengalami pergeseran dari faktor politik yang sangat bergantung pada pemerintah menjadi faktor ekonomi dengan pelaku utama swasta dan masyarakat. Pada masa kolonial pemerintah memegang peranan utama dalam merubah kota karena masyarakat tidak diberikan pilihan. Setelah masa penjajahan, faktor sosial lebih dominan memicu transformasi kota dengan pilihan-pilihan yang diberikan rezim pemerintahan Orde Lama. Pada masa reformasi seiring dengan kebebasan membangun dan berpartisipasi yang diterima masyarakat, transformasi kota menuju ke arah komersial dengan motif ekonomi semakin terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

Bentley, Iant. (1999). Urban Transformations : Power, People and Urban Design. London : Rotledge.

Branch, Melville C. (1995). Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.Creswell, John W. 2009. *Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. London : Sage Publication.

Giyarsih. (2010). Pola Spasial Transformasi Wilayah Di Koridor Yogyakarta-Surakarta : Spatial Pattern Of Regional Transformationin Yogyakarta-Surakarta Corridor. Forum Geografi, Vol. 24, No. 1, Juli 2010. 28 – 38.

Handinoto. (2015). Lasem : Kota Tua Bernuansa Cina di Jawa Tengah. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Karsono, R Panji. (2016). Carita Sejarah Lasem (Terjemahan Bahasa Indonesia). Rembang : Kantor Perpustakaan dan Arsip.

Pemerintah Kabupaten Rembang. (2011). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031.

Pratiwo. (2010). Arsitektur Tionghoa dan Perkembangan Kota. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Romanos, Michael C. (2000). Spatial Transformations : Turning Points in the Evolution of Cities. University of Cincinnati, School of Planning. United States of America.

Sujarto, Djoko. (2004). Bunga Rampai Penataan Ruang Dan Pengembangan Kota Baru Di Indonesia. Bandung : Departemen Teknik Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung.

Unjiya, M. Akrom. (2014). Lasem Negeri Dampoawang. Yogyakarta :Salma Idea.

Yunus, Hadi Sabari. (2000). Struktur Tata Ruang Kota. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yunus, Hadi Sabari. (2005). Manajemen Kota : Perspektif Spasial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Zahnd, Markus. (2008). Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Pengembangan Transit Oriented Development berbasis Sistem Transportasi Berkelanjutan Penunjang Pariwisata

Ananto Yudono[1], Arifuddin Akil[1], dan Ade Mulawarman[1]
[1] Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: yudono@unhas.ac.id; arifuddinak@yahoo.co.id;
ademulawarman@hotmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi, serta jumlah, jenis dan intensitas kegiatan perkotaan, yang kalau penataan ruang wilayahnya tidak direncanakan secara tepat, biasanya berimplikasi pada perkembangan urban builtup area (UBuA) secara menyebar atau biasa disebut urban sprawl. Selain dari pada itu, urban sprawl yang juga menyebabkan lokasi-lokasi transit generators-nya tersebar mengakibatkan perjalanan warga kota sehari-hari tidak efisien dalam jarak, waktu, energi, dan biaya perjalanannya. Saat ini daya tarik moda kendaraan bermotor pribadi yang jauh lebih besar dibanding dengan daya tarik penggunaan sarana angkutan umum masal (SAUM) menyebabkan volume kendaraan bermotor pribadi baik sepeda motor maupun mobil tumbuh berkembang pesat, jauh melebihi pertambahan kapasitas jalannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem Transit Oriented Development (TOD) sebagai dasar agenda baru penataan ruang wilayah metropolitan Mamminasata agar lebih efisien, aman, sehat, manusiawi dan ekologis. Penggunaan program sistem pakar berbasis Geographic Information System (GIS) peta grid telah efektif menentukan lokasi-lokasi potensil yang tepat dikembangkan menjadi sistem TOD metropolitan. Kawasan TOD yang secara tematis menumbuh-kembangkan keunikan-keunikan masing-masing kawasan permukiman TOD baru, seperti tatanan lansekap dan arsitekturnya, jenis kuliner rumah makan atau cafenya, dalam walkable zone yang manusiawi dan ekologis, serta aksesibilitasnya yang tinggi juga potensil tumbuh berkembang menjadi obyek-obyek wisata yang menarik.

Kata kunci: TOD, pariwisata perkotaan, expert system, GIS, Mamminasata

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambahan jumlah penduduk dan perekonomian kota menjadi pemicu utama bertambahnya kebutuhan ruang, yang berimplikasi pada perkembangan UBuA, dan juga meningkatkan intensitas perjalanan warga kota dalam kawasan perkotaannya. Selain itu jarak perjalanan juga semakin jauh, karena terjadi kecenderungan perkembangan UBuA yang bersifat menyebar secara horizontal, atau disebut *urban sprawl*. Rata-rata jarak perjalanan para komuter bertambah terus seperti terjadi di Jabodetabek dari 22 km selama satu dekade tahun 2000-2010 telah bertambah 2-3 km (Hasibuan, Soemardi, Koestoer, & Moersidik, 2014). Fenomena ini mudah terlihat dan terasakan terutama pada kota-kota metropolitan, yang apabila tidak ditanggulangi secara tepat dan cepat maka kota-kota metropolitan akan berkembang menjadi megapolitan yang lalu-lintasnya sangat tidak efisien, tidak manusiawi dan tidak ekologis. Masalah ini semakin besar akibat tumbuh menyebarnya *traffic* seperti perkantoran, *shopping mall*, kampus perguruan tinggi, gedung pertemuan, terminal, pelabuhan, dan bandar udara lokasinya tersebar.

Peningkatan daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi dan rendahnya daya tarik pelayanan kendaraan umum menyebabkan volume kendaraan bermotor pribadi, baik mobil maupun sepeda motor meningkat pesat, yang tidak diimbangi oleh pertambahan kapasitas jalan. Tabel 1 dapat menggambarkan pesatnya

pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan di Makassar, sebagai kota inti metropolitan Mamminasata. Semakin besarnya kesenjangan antara pertambahan kendaraan bermotor dibanding penyediaan SAUM berupa kereta api (KA) komuter dan bis kota serta pertambahan panjang jalannya menyebabkan kondisi kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalulintas semakin memburuk.

Tabel 1. Pertambahan Jumlah Kedaraan Bermotor dan Panjang Jalan di Makassar Tahun 2011-2015

Tahun	Mobil	Angkot (mini bus)	Truk	Spd motor	Panjang jalan	Jalan Toll
2011	119,101	1,692	48,785	791,198	1,578.33	15.13
2012	134,537	16,916	53,400	462,498	1,609.19	17.00
2013	151,328	16,981	57,601	926.097	1,609.19	17.00
2014	172,803	17,080	62,445	1,000,050	1,630.01	17.00
2015	190,428	17,206	67,161	1,062,943	t.a.d	t.a.d

Catatan: t.a.d = tidak ada data

Sumber: Biro Pusat Statistik Kota Makassar

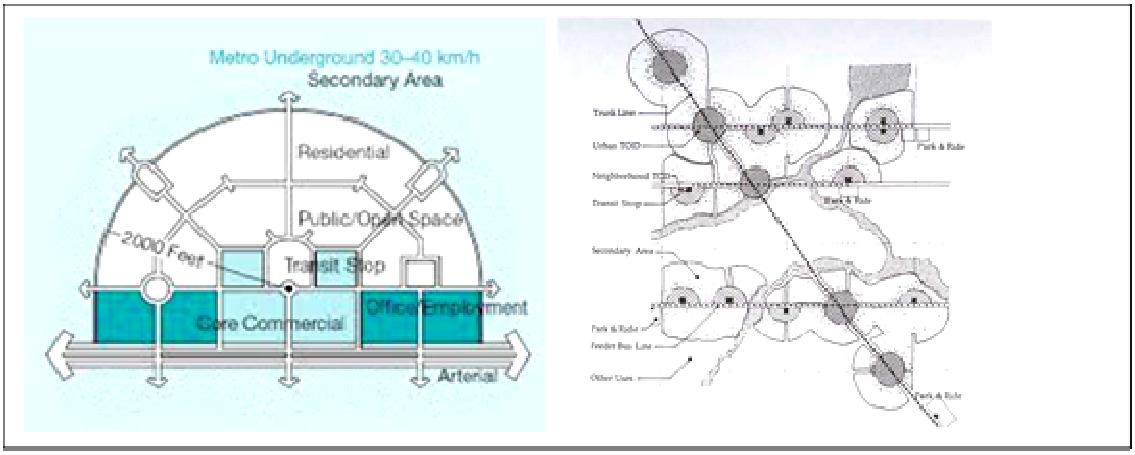
Masalah klasik pesatnya pertambahan kendaraan bermotor, kemacetan lalulintas, dan tidak efisiennya perjalanan warga kota selalu terjadi apabila pembangunan prasarana transportasi lebih mengutamakan kendaraan bermotor pribadi. Perlu dipahami bahwa “most of what destroys quality of life in modern cities results from trying to make more room for cars, and an advanced city is not one where even the poor use cars, but rather one where even the rich use public transport” (Penalosa, 2010).

Kondisi angkutan umum yang kurang layak dalam jangkauan pelayanan, jadwal perjalanan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan, menjadi faktor pendorong pilihan penggunaan mobil pribadi karena lebih bebas dan dapat menjangkau seluruh origin dan destination (Cervero & Kockelman, 1997), (Cervero, 2007), (Shirshir Mathur & Ferrell., 2012), and (Cervero, 2013).

Kesadaran pentingnya keterpaduan tata kota dengan sistem SAUM telah menghasilkan ide brilian berupa TOD (Bruce, 2012). Secara umum prinsip pengembangan TOD (Arief, Ramli, Akil, & Yudono, 2016) adalah:

a. Lingkungan permukiman yang mengutamakan pejalan kaki dan pengendara sepeda untuk pemenuhan kebutuhan harian, serta penggunaan SAUM untuk mencapai traffic generators yang jauh dari permukiman;
b. Fungsi kawasan TOD dirancang secara mixed-use.
c. Stasiun KA komuter dan halte2 bis kota memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan sebagai prasarana transit penggunaan multi-moda transportasi;
d. Urban TOD dilayani langsung oleh SAUM kapasitas besar (KA komuter, MRT), sedangkan neighborhood TOD oleh bis kota trans metropolitan.
e. TOD tidak tepat berlokasi di kawasan-kawasan Central Business District, stasiun KA antarkota, terminal bis, pelabuhan kapal besar, maupun kawasan bandar udara. (Arief et al., 2016)

Tata ruang kawasan TOD disusun secara kompak dan terpadu dengan perumahan, taman, plaza publik, dan layanan publik yang terletak di pusat kegiatan sistem transit SAUM komuter. TOD meningkatkan kualitas udara, dan menciptakan zona yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Ukuran dan konfigurasi wilayah permukiman berbasis TOD berdasarkan pada jarak nyaman pejalan kaki dan jarak nyaman bersepeda, yang mendukung kondisi *walkable zone*. Pusat kawasan TOD ditata sekaligus tempat transit SAUM dan aglomerasi fasilitas sosial permukiman. Gambar 1 berikut menjelaskan model umum tata ruang kawasan TOD.



Gambar 1. Model umum tata ruang kawasan TOD
Sumber: diunduh 11 Oktober 2015

Pemilihan lokasi potensil untuk pengembangan TOD dilalukan dengan program *Expert system* yang telah efektif menentukan pilihan-pilihan alternatif di berbagai bidang seperti ilmu kedokteran dalam mendiaknosis penyakit, ilmu pertanian dalam penentuan komoditi unggulan suatu hamparan, dan ilmu perencanaan kota. Sejak tahun 1998 Asian Urban Research Group telah mengaplikasikan *expert system* dalam penelitian-penelitiannya (Hagishima, 1998) dan (Yudono, Ikaruga, Lee, Zho, & Satani, 1998). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan masalah penelitian ini yaitu tumbuh berkembangnya *urban sprawl* di wilayah metropolitan Mamminasata yang kurang mempertimbangkan keterpaduan sistem transportasi dan sistem tata guna ruang perkotaannya mengakibatkan perjalanan warga kota sehari-hari, termasuk para komuter dan wisatawan menjadi tidak efisien dalam jarak, waktu, energi, dan biaya perjalanan. Selain dari pada itu rendahnya daya tarik penggunaan SAUM menyebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor sangat pesat, yang tidak juga tidak diimbangi oleh pertambahan panjang jalan kota. Disadari urgensi penataan metropolitan yang berbasis TOD, tetapi bagaimana penentuan lokasi yang tepat untuk pengembangan TOD.

TOD sebagai pusat-pusat kegiatan permukiman dengan pelayanan public di pusat kawasannya merupakan kawasan yang potensil dikembangkan juga menjadi obyek wisata perkotaan. Mulai beberapa dekade telah disadari pentingnya pariwisata perkotaan sebagai salah satu fungsi kota yang berdampak ganda. Secara positif sector pariwisata menghasilkan lapangan kerja, menambah penghasilan, dan tumbuh kembangnya kesadaran para pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya tarik lingkungannya baik arsitektur bangunan, lansekap serta pola pikir dan perilaku masyarakatnya menjadi lebih ramah, toleran dan bersahabat. Walaupun demikian perlu diantisipasi untuk mengeliminasi dampak negatifnya, misalnya pengaruh buruk perilaku para wisatawan yang tidak cocok dengan budaya nilai-nilai sosial budaya setempat, serta jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas tampung pusat TOD kan dapat mengganggu privasi para penghuni (Lapko, 2014).

B. Ruang Lingkup

Lingkup tulisan ini adalah pengembangan sistem TOD metropolitan yang diharapkan sebagai salah satu *entry point of new urban agenda* untuk mengubah arah perkembangan *urban* sprawl dan pesatnya perkembangan kendaraan bermotor pribadi menuju terwujudnya *humane-eco-compact city*, dan tumbuh berkembangnya penggunaan moda SAUM, jalan kaki dan bersepeda.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud tulisan ini adalah mengetengahkan dayaubah sistem TOD dalam pengarahkan pengembangan metropolitian agar masyarakat tingggal di permukiman yang pemenuhan kebutuhan hariannya tersedia di lingkungan tempat tinggalnya dan yang terjangkau dengan berjalan kaki dan/atau bersepeda, serta untuk menuju traffic generators yang jauh terlayani oleh SAUM yang tarifnya terjangkau.

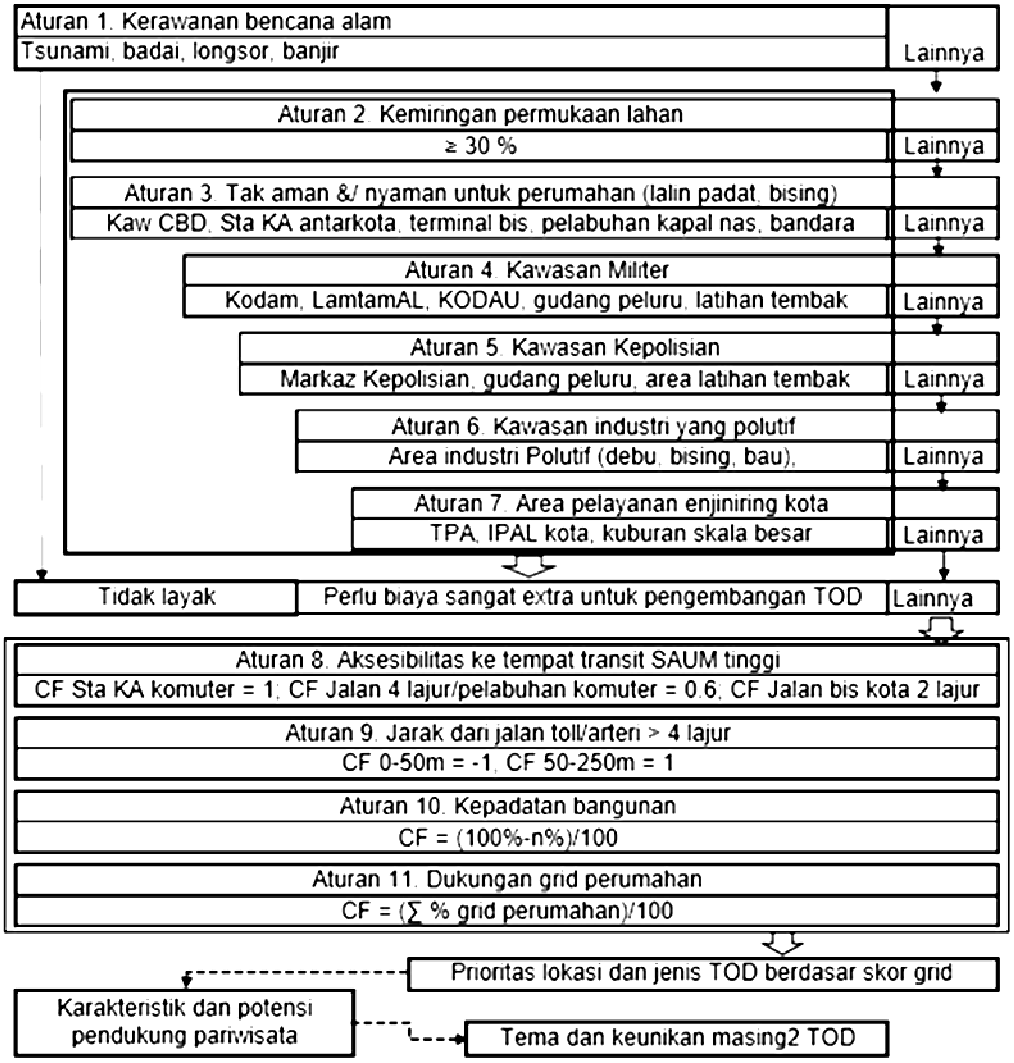
Tujuan tulisan ini adalah untuk: (1) membangun program penentuan lokasi-lokasi potensil yang tepat untuk pengembangan TOD metropolitan Mamminasata menggunakan expert system berbasis GIS peta grid; (2) mengembangkan sistem TOD metropolitan Mamminasata yang diharapkan menjadi agenda baru penataan kota yang mendukung efisiensi perjalanan warganya, pengurangan jarak perjalanan yang berdampak pada eliminasi biaya, energi dan waktu perjalanan, serta peningkatan daya tarik SAUM dan berkurangnya penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

II. METODE

Berdasarkan pertimbangan bahwa penduduk dalam memenuhi kebutuhan non layanan administratif akan mendatangi fasilitas penyedia tanpa terpengaruh tidak batas administrasi, serta jarak nyaman pejalan kaki (±500m) dan pengendara sepeda (±2500m), maka unit analisis adalah grid peta ukuran 250mx250m. Dalam penentuan tingkat kelayakan grid untuk pengembangan TOD, dibangun program *expert system* dengan menyusun aturan-aturan berdasarkan teori dan logika perhitungan skor masing-masing grid peta kawasan perkotaan metropolitan Mamminasata. Skor masing-masing grid ditentukan oleh tingkat daya dukung potensi dan dan daya hambat kendala yang merupakan parameter-parameter tertentu sebagai atribut masing-masing grid. Parameter-parameter penentu kelayakan lokasi TOD sbb: (1) Karakteristik alam dengan kondisi kerawanan terhadap bencana alam, kemiringan permukaan lahan; (2) Fungsi kawasan dengan kondisi keamanan dan kenyamanan kegiatan perumahan, kawasan militer, kawasan kepolisian, kawasan industry polutif, dan area pelayanan enjiniring kota; (3) Aksesibilitas ke tempat transit SAUM dengan variable prasarana transportasi serta jarak dari jalan toll dan arteri; serta (4) Kondisi bangunan dengan variable-variabel kepadatan bangunan dan dukungan fungsi perumahan grid tetangga.

Program ini didasarkan pada peta grid ukuran 250x250m berdasarkan pertimbangkan jarak kenyamanan berjalan kaki yaitu sekitar 500m, dalam *walkable zone*. Skor perhitungan masing-masing grid, menggunakan Bahasa pemrograman Fortran 90, menjadi dasar pemilihan prioritas lokasi pengembangan TOD. Pilihan grid sebesar 0.5% dari nilai skor tertinggi diplotkan dalam peta grid menggunakan *software* quantum GIS. Selanjutnya dikembalikan ke peta raster digambarkan titik-titik TOD dan radius lingkaran 500m yang nyaman bagi pejalan kaki, dan radius 2.500 m yang nyaman bagi pengendara sepeda.

Disusun tiga kategori parameter yaitu: (1) parameter kerawanan bencana alam, yang menentukan grid tidak layak dikembangkan menjadi TOD; (2) parameter penghambat pengembangan TOD, yang memerlukan rekayasa teknik ekstra, biaya ekstra untuk memindahkan fasilitas yang telah ada atau untuk pematangan lahannya. Parameter penghambat ini adalah: (a) kemiringan permukaan lahan; (b) fungsi kawasan yang padat lalu-lintas dan bising; (c) kawasan pusat kegiatan militer; (d) kawasan kegiatan kepolisian; (e) kawasan industri yang polutif; dan (f) area pelayanan enjiniring atau fasilitas sosial skala kota yang tidak sesuai dengan tuntutan suasana TOD; (3) parameter pendukung pengembangan TOD berupa: (a) aksesibilitas tinggi untuk pelayanan SAUM yang menghubungkan *traffic generators* besar kota; (b) jarak dari jalan jalan rute SAUM kapasitas besar (KA komuter MRT); (c) kepadatan bangunan; dan (d) dukungan fungsi permukiman dan perumahan grid tetangga. Gambar 2 berikut menjelaskan aturan-aturan dan tahapan penentuan grid potensil untuk pengembangan TOD.



Gambar 2 Diagram penenentuan skor kelayakan grid sebagai TOD

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Korelasi Kebutuhan Dasar Manusia dengan Prinsip TOD

Penataan ruang kawasan TOD harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh warga penghuni permukiman TOD maupun para pengunjung ke pusat pelayanan TOD. Kebutuhan bagi penghuni yang tidak mampu melakukan perjalan jauh sendiri, seperti anak-anak, ibu rumah tangga dan para penghuni lanjut usia harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya seperti Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, tempat belanja kebutuhan sehari-hari, fasilitas olah raga ringan, tempat rekreasi sederhana, tempat pertemuan, tempat ibadah, taman dsb. Selain dari pada itu juga harus dipenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat non fisik (Maslow, 2011). Tabel 2 menjelaskan matriks korelasi antara jenis-jenis kebutuhan dasar manusia dengan prinsip-prinsip TOD.

Tabel 2. Korelasi Kebutuhan Dasar Manusia dengan Prinsip-prinsip TOD

		Pelayanan alam, gedung dan infrastruktur	Walkable zone	Tenang & sejuk	Mixed use	SAUM	Fasosek	Compact city	Tematik	Jumlah
1	Biologis dan fisiologis	Udara, air, rumah, T4 belanja, T4 kerja		1	1	1	1			4
2	Keamanan	Pos keamanan, T4 evakuasi, Sta Damkar	1					1		2
3	Hubungan sosial	Ruang publik, gedung serba guna, play ground	1		1	1		1		4
4	Harga diri	Rumah, halaman	1	1	1	1		1	1	6
5	Kognitif	STK, gedung sekolah	1		1	1	1			4
6	Estetika	Icon, tata bangunan dan lansekap	1					1	1	3
7	Aktualisasi diri	Rumah, GOR, Gedung kesenian					1			1
8	Religius	Gedung dan T4 ibadah	1		1		1		1	4
	Jumlah		6	2	5	4	4	4	3	

Sumber: dikembangkan dari Maslow A. (www.businessballs.com.maslow.htm, 111018)

Berdasarkan matriks korelasi kebutuhan dasar manusia dengan prinsip-prinsip TOD pada Table 2, dapat diurutkan prioritas prinsip-prinsip TOD yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu: *walkable zone, mixed use*, Fasosek, compact city, tematik, serta ketenangan dan kesejukan. Walaupun analisis korelasi ini masih bersifat subyektif peneliti berdasarkan logika dan pengalaman kegiatan desain kawasan perkotaan, diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan tata bangunan dan lingkungan TOD.

B. *Korelasi Prinsip-prinsip Pariwisata dengan TOD*

Potensi TOD untuk dijadikan obyek wisata perkotaan perlu didukung oleh penerapan prinsip-prinsip pariwisata dalam penataan TOD, khususnya pusat kawasan TOD nya. Kementerian Kebudayaan dan Priwisata telah menentukan aspek-aspek sapta pesona yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan pariwisata, melalui Permen PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata. Tabel 3 berikut menjelaskan nilai korelasi prinsip-prinsip pariwisata dengan TOD.

Tabel 3..Matrik korelasi Prinsip-prinsip TOD dengan Prinsip-prinsip Pariwisata

	Sapta Pesona Wisata							Apa yg dilihat	Apa yang dilakukan	Apa yang dibeli	Jumlah
	Aman	Tertib	Bersih	Sejuk	Indah	Ramah	Kenangan				
Walkable zone	1	1				1	1	1	1		6
Suasana sejuk dan tenang		1	1	1	1	1		1	1		7
Mixed use	1						1	1	1		4
Pelayanan SAUM komuter	1	1	1	1		1	1	1	1	1	9
Ketersediaan fasosek di Pusat TOD						1	1	1	1	1	5
Compact urban space		1		1	1		1	1			5
Tematik TOD	1	1	1		1	1	1	1	1	1	9
Jumlah	4	5	3	3	3	5	6	7	6	3	

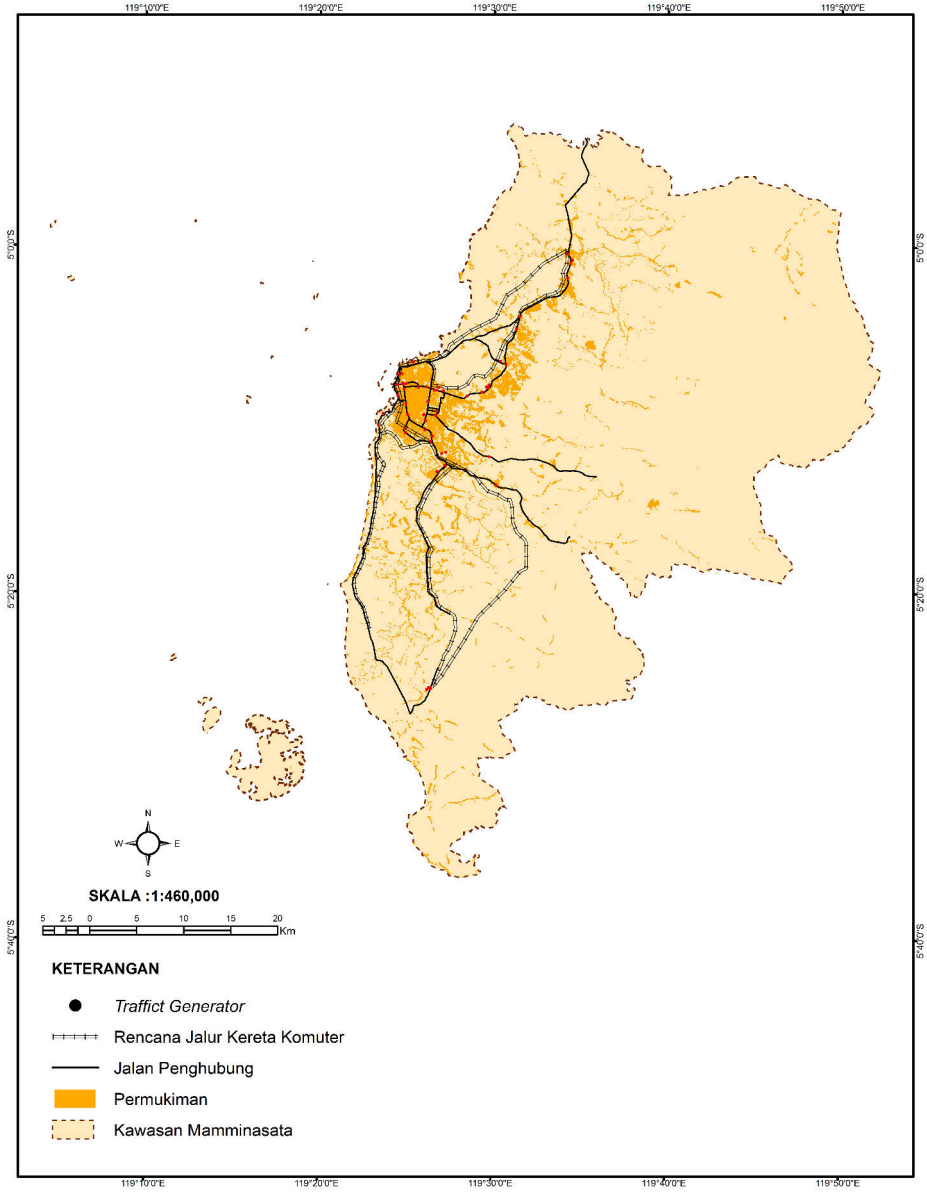
Sumber:
Sapta Wisata dari Permen Kebudayan dan Pariwisata (2008)

Berdasarkan matriks korelasi prinsip-prinsip pariwisata dengan TOD pada Tabel 3, dapat diurutkan prioritas prinsip-prinsip TOD yang mendukung pariwisata perkotaan yaitu: pelayanan SAUM komuter, tematik TOD, suasana sejuk dan tenang, *walkable zone,* fasosek di pusat TOD*, compact city,* dan *mixed use*. Hasil ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penataan TOD yang mendukung pariwisata perkotaan. Tema unik masing-masing TOD menjadi dasar penataan arsitektur bangunan dan lansekap ruang terbuka hijau maupun non hijau, yang potensil dijasikan *icon* masing-masing TOD.

C. *Penentuan Lokasi Potensil TOD*

Metropolitan Mamminasata terdiri dari kota Makassar, dan kawasan-kawasan

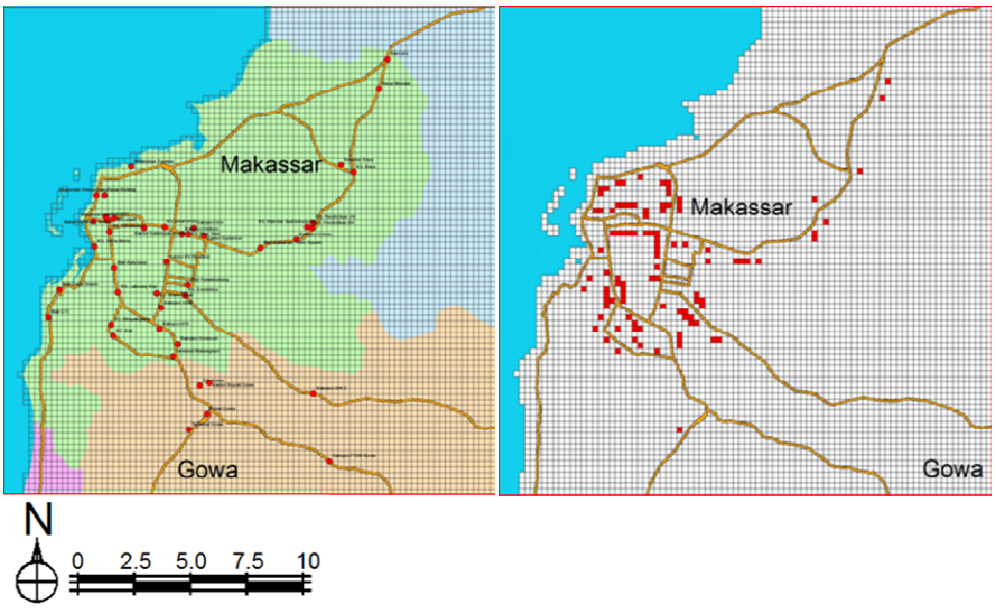
perkotaan kabupaten tetangganya, yang juga merupakan ibukota kabupaten-kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar. Peta posisi *traffic generators* dan jalan potensil untuk rute SAUM penghubungnya menjadi peta dasar analisis. Gambar 3 memperlihatkan *urban built up area* (UBuA) yang teraglomerasi di wilayah kota Makassar dan sekitar pinggirannya, lokasi *traffic generators* yang berdaya tarik lalu-lintas yang besar, seperti shopping mall, kawasan perbelanjaan karebosi dan pasar sentral, kampus, perkantoran, bandar udara Sultan Hasanuddin, pelabuhan Soekarno-Hatta, anjungan pantai Losari, pusat wisata dan belanja Sombaopu, gedung pertemuan dan hotel besar, dan kawasan religius poros masjid al Markaz al Islami – masjid Raya – lapangan Karebosi saat hari raya Islam.



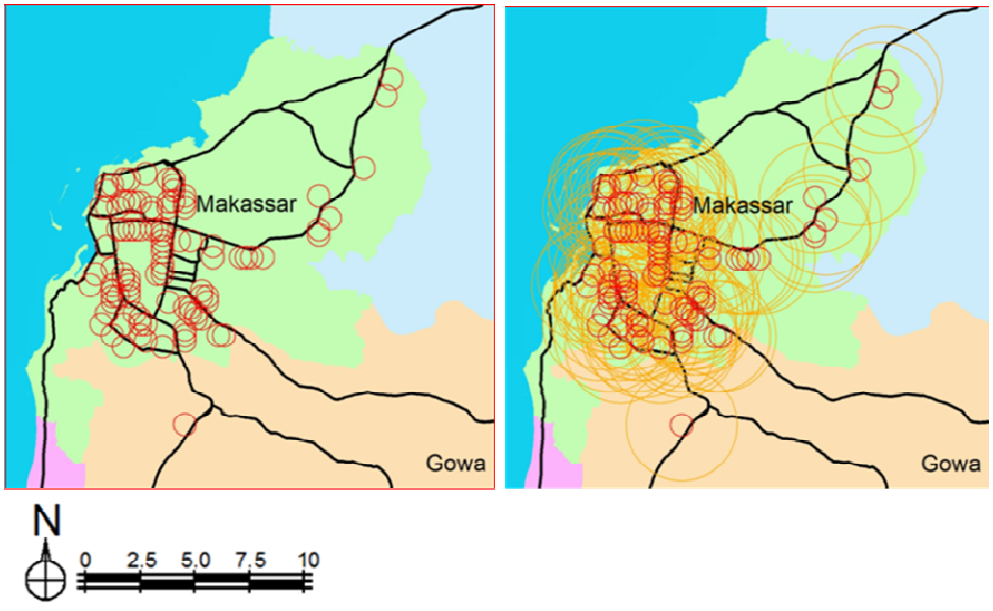
Gambar 3. Peta wilayah Metropolitan Mamminasata.

Program *expert system* penentuan lokasi potensil TOD diterapkan di wilayah metropolitan Mamminasata. Hasil pemetaan grid potensil berdasarkan 0.5% jumlah grid dari skor tertinggi terlihat masih teraglomerasi di wilayah kota Makassar, lihat Gambar 4. Berdasarkan parameter-parameter karakteristik alam, fungsi kawasan, aksesibilitas ke pelayanan SAUM, dan kondisi bangunan di kawasan perkotaan

metropolitan Mamminasata Agustus Tahun 2017, wilayah pelayanan seluruh sistem TOD metropolitan belum merata sampai ke suburban. Secara linier pelayanan TOD merambat ke arah timur laut menelusuri jalan trans Sulawesi yang mulai tumbuh berkembang perumahan-perumahan baru dan fasilitas perbelanjaan serta perhotelan, lihat Gambar 4 dan 5.



Gambar 4. Peta persebaran traffic generators dan grid potensil pengembangan TOD



Gambar 5. Peta lokasi potensil pengembangan TOD dengan radius pelayanan 500 m dan 2500 m

Salah satu faktor penentu adalah belum tersedianya SAUM berupa KA komuter metropolitan seperti yang direncanakan pada rencana tata ruang metropolitan Mamminasata. Stasiun KA komuter di suburban metropolitan merupakan lokasi yang sangat potensil untuk dikembangkan menjadi TOD. Skor nilai kelayakan grid yang berlokasi di stasiun-stasiun KA komuter di suburban metropolitan akan secara drastis naik, sehingga proritas pengembangan TOD akan lebih menyebar ke kota-kota satelit

di kabupaten-kabupaten tetangga kota inti metropolitan Makassar.

Selanjutnya dengan pengendalian pembangunan yang seimbang antara UBuA dengan ruang terbuka hijau (RTH), maka metropolitan Mamminasata akan tumbuh berkembang menjadi kota yang efisien dalam perjalanan warga kotanya, manusiawi, ekologis dan juga berpotensi berkembang menjadi kota wisata dengan keunikan yang didasari beragam tema TOD-TOD-nya. Keberhasilan pengembangan sistem TOD ini memerlukan dukungan seperti: (a) tersedianya sistem SAUM penghubung traffic generators dengan kawasan-kawasan permukiman TOD; (b) kawasan-kawasan traffic generator yang pro pejalan kaki dan kaum difable; (c) tumbuh berkembangnya bisnis terpadu transportasi, property, kantor sewa, shopping mall, pengembang permukiman TOD, dsb; (d) insentif dari pemerintah dalam pengembangan SAUM.

Berdasarkan fungsi kawasan pada lokasi-lokasi terpilih yang potensil dikembangkan menjadi TOD metropolitan, maka beberapa tema yang layak dijadikan dasar pertimbangan penataan arsitektur bangunan, lansekap, terutama di pusat TOD dan sekitarnya antara lain adalah sbb:

1. “Wisata pantai dan perbelanjaan Losari-Fort Rotterdam”, pada TOD pantai koridor Anjungan Losari – pelabuhan rakyat Kayu Bangkoa – Fort Rotterdam, yang penghuninya merupakan para komuter yang tinggal di pulau-pulau kecil Makassar, penghuni ruko dan perumahan di kawasan perbelanjaan Sombaopu, serta para wisatawan yang menginap di hotel-hotel wilayah pantai Losari.
2. “Wisata religius koridor masjid al Markaz al Islami – masjid Raya – laoangan Karebosi”, TOD koridor Jl. Bulusaraung – Jl Mesjid Raya.
3. “Wisata akademik”, pada TOD permukiman sekitar kampus-kampus perguruan tinggi seperti Unibos, UMI, Unhas, UNM.

IV. KESIMPULAN

1. Prinsip-prinsip TOD yang dikembangkan dari teori-teori dan pandangan-pandangan dalam berbagai domain ilmu-ilmu seperti PWK, transportasi, arsitektur, lansekap, dan lingkungan patut dijadikan dasar penentuan parameter dan variable-variabel yang diperlukan dalam pendekatan expert system untuk penentuan lokasi potensil pengembangan TOD. Instrumen quantum GIS dengan akurat dan cepat mampu menstranfer informasi peta-peta tematik menjadi variable-variabel dan parameter sebagai atribut masing-masing grid.
2. Keberhasilan pengembangan sistem TOD yang potensil mendukung tumbuh berkembangnya *humane-eco-compact city*, perlu didukung sinergitas rencana, program dan kegiatan sektoral maupun kewilayahan antara pemerintah, swasta, masyarakat, professional, dan akademisi.
3. Keterpaduan pengembangan TOD dengan pariwisata perkotaan potensil meningkatkan kesadaran warga kota terhadap sapta pesona, penataan ruang wilayah kota, yang berdampak pada pertambahan lapangan kerja, pendapatan masyarakat pelaku kegiatan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, A. B., Ramli, M. I., Akil, A., & Yudono, A. (2016). Prinsip-prinsip Transit Oriented Development (TOD) Pantai, berbasis Potensi Pelabuhan Rakyat Kayu Bangkoa, Makassar. *IPLBI*.

Bruce, C. (2012). Transit-Oriented Development in China: Designing a new transit-oriented neighbourhood in Herxi New Town, Nanjing, Based on Hongkong Case Studies. *-, Bleking Institute of Technology & Nanjing Forestry University*(Urban Design), 1-58.

Cervero, R. (2007). The Transit Metropolis: A Global Inquiry 4 th Edition. *Environment and Planning A 2007, 39*(Transit Oriented Development, and Public Polices), 2068-2085. doi: 10.1068/a38377

Cervero, R. (2013). Transit-Oriented Development and Land Use. *Encyclopedia of Sustainability Science and Technology 2012*.

Cervero, R., & Kockelman, K. (1997). Travel demand and the 3Ds: Density, diversity, and design. *Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2*(3), 199-219. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S1361-9209(97)00009-6

Hagishima, S. (1998). Environmental Planning Expert System by Japanese and Korean Expereiences, and an Application to Ujung Pandang in Indonesia. *The First International Symposium on City Planning and Environmental Management in Asian Countries*, 1-34.

Hasibuan, H. S., Soemardi, T. P., Koestoer, R., & Moersidik, S. (2014). The Role of Transit Oriented Development in Constructing Urban Environment Sustainability, The Case of Jabodetabek, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences 20 (2014) 622, -*(TOD), 620-631.

Lapko, A. (2014). Urban tourism in Szczecin and its impact on the functioning of the urban transport system. *The 1st International Conference Green Cities 2014-Green Logistics for Greener Cities*(ScienceDirect, Procedia-Social and Behavioral Sciences).

Maslow, A. (2011). Maslow's Hierarchy of Needs. from www.businessballs.com/maslow.htm

Penalosa, E. (2010). Happy Cities for the Global South: Interview with Enrique Penalosa. *Jay Waljasper, -*(Alternative ways to measure success in Third World cities and finding his answer inthe public sphere.), 1-9.

Shirshir Mathur, & Ferrell., C. (2012). Measuring the impact of sub-urban transit-oriented developments on single-family home value. *Transportation Research, -*(TOD, Hedonic Reggression, home values), 42-55.

Yudono, A., Ikaruga, S., Lee, D.-B., Zho, S.-C., & Satani, N. (1998). Expert System Supporting Land Use Planning in Ujungpandang City. *AURG Proceeding The First International Symposiumon City Planning and Environmental Management in Asian Countries*, 51-67.

Tingkat Pelayanan Perahu Ketek Sebagai Angkutan Wisata Di Sungai Musi Kota Palembang

Anta Sastika[1], Aleksander Purba[1], Citra Persada[1]
[1]Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Bandar Lampung
Email: antartika_arc@yahoo.com), aleksander.purba@eng.unila.ac.id), citrapersada@yahoo.com)*

ABSTRAK

Sungai Musi merupakan destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Palembang dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dimana terdapat 33 obyek wisata di tepian Sungai Musi yang dapat diakses melalui sungai dengan menggunakan perahu ketek. Perahu ketek adalah salah satu moda transportasi tradisional yang digunakan di Sungai Musi khususnya di Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan salah satu fungsinya adalah sebagai angkutan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan perahu ketek sebagai angkutan wisata di Sungai Musi Kota Palembang dari sisi pengguna (demand) dan dari sisi teknis (supply) sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan pelayanannya agar keberadaan perahu ketek ini nantinya tetap merupakan bagian dari sistem transportasi yang ada di Kota Palembang khususnya angkutan pariwisata. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptip dengan menggunakan pendekatan metode service quality (servqual) untuk analisis dari sisi pengguna/wisatawan (demand) dan menggunakan metode in-dept interview dari sisi teknis (supply). Penelitian ini merupakan kajian terhadap tingkat pelayanan perahu ketek sebagai angkutan wisata yang dilihat dari sisi bukti fisik, kehandalan, jaminan, empati dan daya tanggap. Penelitian ini melibatkan responden yang pernah menggunakan jasa perahu ketek di Sungai Musi Kota Palembang dalam rangka melakukan kegiatan wisata baik wisatawan asing maupun wisatawan nusantara. Sedangkan untuk mengevaluasi perahu ketek dari sisi teknis dengan cara melakukan in-depth interview ke beberapa stakeholder yang berkompeten dibidang transportasi air, bidang pariwisata maupun akademisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan perahu ketek sebagai angkutan wisata di Sungai Musi Kota Palembang dikategorikan buruk dari sisi pelayanan dan juga belum layak dari sisi teknis.

Kata kunci: Pelayanan, Perahu Ketek, Sungai Musi, Wisata, Servqual, In-depth Interview

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang dialiri oleh banyak sungai sehingga disebut sebagai *Venesia from east* (Irwanto: 2010). Sungai Musi yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Salah satu fungsi sungai Musi adalah sebagai jalur transportasi air dan salah satu moda transportasi yang biasa digunakan adalah perahu ketek. Perahu ketek adalah jenis perahu yang menggunakan mesin dalam operasionalnya dengan fungsi sebagai sarana transportasi lokal.

Transportasi merupakan sektor kegiatan yang sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan setiap orang untuk melakukan pergerakan. Kebutuhan ini misalnya untuk mencapai lokasi kerja, lokasi sekolah, mengunjungi tempat hiburan atau pelayanan, dan bahkan untuk bepergian ke luar kota. Transportasi tidak hanya mengangkut orang, tetapi juga untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangan jenis transportasi memungkinkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti akan terjadinya perubahan terhadap fungsi maupun perubahan

terhadap tingkat minat penggunaan moda transportasi tertentu.

Transportasi dikatakan baik, apabila memenuhi aspek berikut, pertama waktu perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan. Kedua, frekuensi pelayanan cukup. Ketiga, aman dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi yang ideal tersebut sangatlah ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana serta sistem jaringannya, kondisi sarana, serta yang tidak kalah penting adalah sikap mental pemakai fasilitas transportasi itu sendiri (Sinulingga, 2005).

Selain sebagai moda transportasi umum, perahu ketek juga berfungsi sebagai angkutan pariwisata dimana faktor transportasi merupakan unsur penting dalam pariwisata (Midleton: 2009). Sungai Musi merupakan salah satu andalan kota Palembang di sektor pariwisata dimana, terdapat 33 titik wisata yang terdapat di tepian sungai Musi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kota Palembang tahun 2014. Selain potensi wisata tersebut, data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Palembang menunjukkan angka kunjungan wisatawan ke kota Palembang sepanjang tahun 2016 sebesar 1.906.793 wisatawan. Untuk menjaga agar iklim pariwisata di Sungai Musi dan eksistensi perahu ketek maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sektor pariwisata dan evaluasi terhadap sarana prasarana perahu ketek yang ada saat ini.

Tingginya potensi pariwisata di Sungai Musi harus diimbangi dengan pelayanan sarana prasarana maupun infrastruktur yang baik dimana, transportasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam sektor pariwisata. Transportasi pariwisata memiliki karakteristik khusus seperti membutuhkan kenyamanan, keamanan dan keandalan moda. Malmmadov (2012) mengatakan bahwa "*Each transportation type has indispensable role in tourism development*". Setiap jenis transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Sebagai angkutan pariwisata, maka perahu ketek dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan, baik dari sisi pelayanan (*demand*) maupun dari sisi teknis (*supply*). Hal ini diperlukan untuk menjaga eksistensi perahu ketek agar dapat menjadi moda favorit para wisatawan. Keberadaan perahu ketek sebagai angkutan pariwasata sangat sejalan dengan visi misi pemerintah kota Palembang yaitu "Destinasi Sungai Berbasis Budaya dalam Menunjang Palembang Emas 2018. Perahu ketek merupakan warisan budaya bagi masyarakat kota Palembang yang saat ini sebagian berfungsi sebagai angkutan pariwisata.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui kualitas tingkat pelayanan melalui kepuasan para wisatawan dan juga penilaian para pakar melalui *in-depth interview* terhadap aspek teknis perahu ketek sebagai transportasi angkutan wisata di Sungai Musi Kota Palembang sehingga dapat menghasilkan sebuah rekomendasi perbaikan pelayanan dan perbaikan kualitas fisik perahu ketek.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Sungai Musi Palembang antara Pulo Kerto dan Pulau Kemaro terutama pada jalur pariwisata yang ada di Sungai Musi. Penelitian dilakukan terhadap sisi *demand* khususnya masyarakat yang pernah menggunakan moda transportasi perahu ketek dalam kegiatan pariwisata dan dari sisi *supply* perahu ketek melalui pakar (*in-depth interview*).

II. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mengelompokkan karakteristik individu (Syamsudin dan Damiyanti: 2011). Langkah awal dalam

penelitian ini dimulai dari menyebarkan kuisioner kepada wisatawan yang pernah atau sedang menggunakan perahu ketek dalam rangka kegiatan wisata di Sungai Musi Kota Palembang (*purposive sampling*) dimana sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto: 2006). Penyeberan kuisioner dipusatkan di Plaza Benteng Kuto Besak sebagai titik awal keberangkatan dan Pulau Kemaro sebagai destinasi utama yang menggunakan perahu ketek. Disamping kedua lokasi tersebut penyebaran kuisioner juga dilakukan di titik-titik destinasi lainnya sebagai antisipasi apabila di lokasi utama jumlah responden kurang. Sedangkan untuk wisatawan asing dilakukan melalui kuisioner online. Penyebaran kuisioner dilakukan pada waktu yang berbeda-beda yaitu pada saat *weekday*, *weekend* dan libur panjang. Kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelayanan yang diberikan oleh perahu ketek kepada wisatawan dengan menggunakan 5 dimensi pengukuran dimensi yang sangat berpengaruh terhadap kualitas tingkat pelayanan (Zeihaml et al: 1990). Adapun jumlah kuisioner yang disebar adalah sebanyak 130 buah. Hasil dari kuisioner ini akan dianalisis dengan alat analisis statistik yang selanjutnya dideskriptifkan (kuantitatif deskriptif). Adapun tahapan analisisnya adalah uji validitas, uji reabilitas, analisis *service quality*, analisis *index performance analisys* dan selanjutnya dideskriptipkan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada para pakar yang berhubungan dengan transportasi air, pariwisata, akademisi dan profesional. Data dari pakar digunakan untuk mengetahui dan menganalisis aspek teknis perahu ketek berikut dengan sarana pendukungnya. Kedua tahapan analisis tersebut menghasilkan luaran berupa rekomendasi untuk melakukan perbaikan terhadap tingkat pelayanan perahu ketek sebagai angkutan wisata baik dari sisi pengguna (*demand*) maupun dari sisi teknis (*supply*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden terdiri dari: jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, jumlah kegiatan berwisata dalam 1 (satu) tahun dan tempat tinggal. Kuisioner yang disebar adalah sebanyak 130 buah akan tetapi yang bisa diolah sebanyak 122 kuisioner sedangkan 8 kuisioner tidak dapat diolah dikarenakan ada beberapa atribut yang tidak diisi oleh responden. Jumlah responden ditentukan berdasarkan jumlah populasi wisatawan yang berkunjung ke Palembang sepanjang tahun 2016.

Berdasarkan data yang terkumpul maka, komposisi responden didominasi oleh perempuan yaitu 52% responden perempuan dan 48% reponden laki-laki. Sedangkan dilihat dari segi usia, responden dapat dibagi menjadi 5 (lima) kelompok usia antara 20 sampai usia 60 tahun. Dari data tersebut, usia responden yang paling dominan adalah 20-30 tahun sebesar 42%. Hal tersebut menunjukkan bahwa usia 20-30 adalah usia produktif dan memiliki minat yang kuat terhadap kegiatan pariwisata. Karakteristik responden menurut tingkat pendidikan didominasi oleh responden dengan tingkat pendidikan strata I (sarjana) yaitu 55% sedangkan urutan kedua adalah responden dengan tingkat pendidikan strata 2 sebesar 22%. Sisanya adalah strata 3, diploma dan SMU. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan didominasi oleh responden yang bergerak dibidang swasta yaitu sebesar 37%. Hal ini dapat diartikan bahwa responden yang bekerja disektor swasta akan lebih mudah untuk melakukan kegiatan wisata dibandingkan dengan responden yang bekerja secara formal. Selanjutnya adalah responden yang berkerja di bidang pemerintahan/BUMN/TNI/Polri sebesar 25% sedang sisanya adalah wiraswasta, professional dan mahasiswa/pelajar.Selanjutnya adalah seberapa sering responden melakukan kegiatan perjalanan wisata dalam satu tahun, maka diperoleh data terbesar adalah 2 (dua) kali dalam setahun yaitu sebesar 30%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah rata-rata responden dalam melakukan kegiatan wisata dalam setahun adalah dua kali perjalanan. Karakteristik responden yang terakhir adalah domisili responden, dari hasil analisis yang ada wisatawan yang

berasal dari daerah Sumatera Selatan masih mendominasi dalam responden ini yaitu sebesar 83% sedangkan wisatawan dari luar Sumatera Selatan relatif masih sedikit yaitu yang berasal dari Sumatera diluar Sumatera Selatan adalah 1%, asal Jawa sebesar 5% dan wisatawan asing dari berbagai negara sebanyak 11%, hal ini dikarenakan Palembang belum menjadi daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia.

B. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Dalam analisis uji validitas ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid. Dimana nilai kritis (r) Product Moment dengan derajat kebebasan sebesar 120 dan taraf signifikansi sebesar 0,01 adalah 0,232. Nilai koefisien korelasi dari seluruh pertanyaan lebih besar nilai kritisnya, yang berarti item-item pertanyaan dalam kuesioner telah memenuhi syarat validitas.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Uji Validitas

		HARAPAN	PERSEPSI	TOTAL_HP	R-table N=122 df=120 sig=0.01	Validitas
HARAPAN	Pearson Correlation	1	,063	.587**	0,232	**VALID**
	Sig. (2-tailed)		,490	,000		
	N	122	122	122		
PERSEPSI	Pearson Correlation	,063	1	.845**	0,232	**VALID**
	Sig. (2-tailed)	,490		,000		
	N	122	122	122		
TOTAL_HP	Pearson Correlation	.587**	.845**	1		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000			
	N	122	122	122		

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji reliabilitas didasarkan pada nilai *Alpha Cronbach* (α), jika nilai *Alpha Cronbach* (α) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap cukup baik dan reliable untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,771	,749	3

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai *Alpha Cronbach* (α) lebih besar dari 0,6 yaitu 0,771 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diandalkan (*reliabel*) untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

C. Pengukuran Skor Servqual

Sebelum dilakukan pengukuran nilai *servqual* untuk masing-masing atribut terlebih dahulu menetukan nilai rata-rata dari seluruh atribut yang digunakan dalam penelitian ini. Fungsi dari nilai rata-rata tersebut adalah untuk mengelompokkan masing-masing

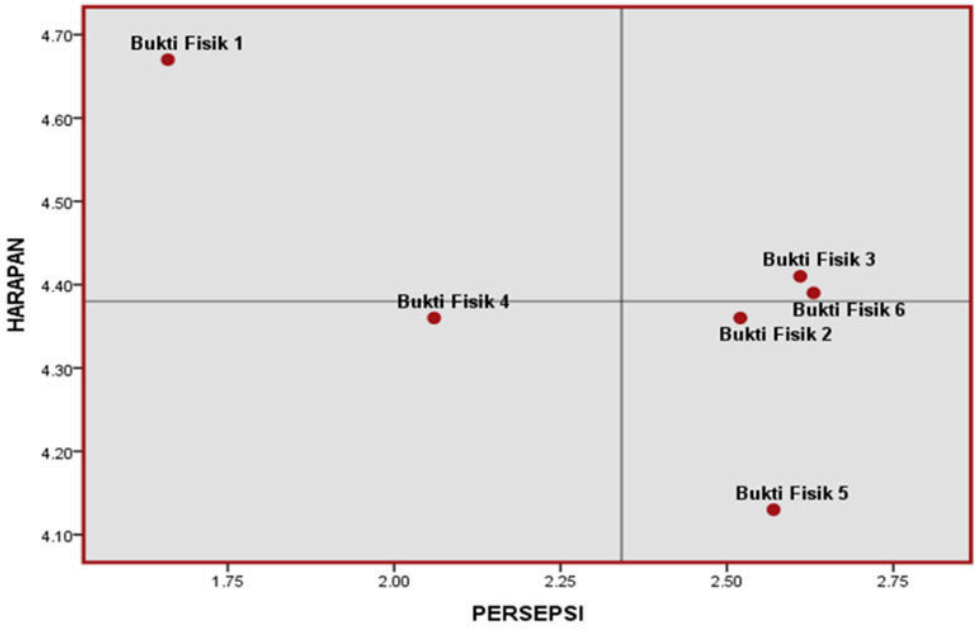
nilai hasil pengukuran servqual yaitu diatas atau dibawah nilai rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran keseluruhan atribut diperoleh nilai rata-ratanya adalah -1,81.

1. Analisis *Service Quality* Dimensi Bukti Fisik

Tabel 3. Analisis Bukti Fisik

NO	ATRIBUT	RATA-RATA		PERSEPSI - HARAPAN
		PERSEPSI	HARAPAN	
BF.1	Ketersediaan Alat Pelampung	1,66	4,67	-3,02
BF.2	Kebersihan Dalam Moda	2,52	4,36	-1,84
BF.3	Kenyamanan Tempat Duduk	2,61	4,41	-1,80
BF.4	Ketersedian Informasi Rute Perjalanan Di Dermaga	2,06	4,36	-2,30
BF.5	Tampilan Visual Moda	2,57	4,13	-1,56
BF.6	Kemudahan Naik Turun Moda	2,63	4,39	-1,76

Hasil analisis *servqual* terhadap atribut bukti fisik diperoleh 3 atribut yang memiliki nilai *servqual*-nya dibawah nilai rata-rata -1,81 (kategori buruk). Ketiga atribut tersebut adalah ketersediaan alat pelampung, ketersediaan informasi rute perjalanan di dermaga dan kebersihan di dalam moda. Sedangkan 3 atribut lainnya nilai serqualnya diatas nilai rata-rata dan dapat dikategorikan aman.



Gambar 1. Bukti Fisik

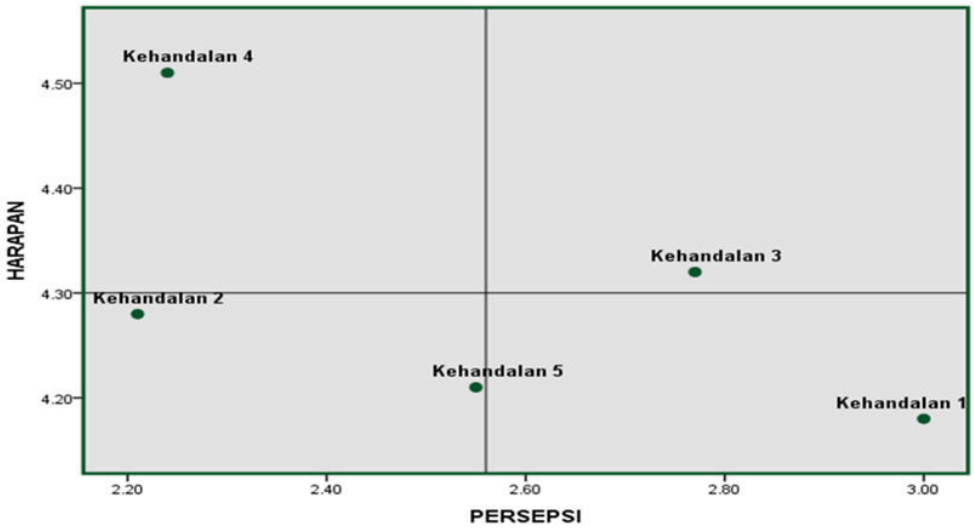
2. Analisis *Service Quality* Dimensi Kehandalan

Analisis terhadap dimensi kehandalan menunjukkan bahwa atribut kejelasan tarif yang ditawarkan, dan ketersediaan informasi tentang destinasi merupakan atribut yang memiliki nilai dibawah rata-rata. Kedua atribut tersebut memiliki kesenjangan yang tinggi antara nilai harapan dan nilai persepsi sehingga, kedua atribut tersebut perlu mendapat prioritas dalam perbaikan kualitas pelayanan. Berikut adalah tabel skor atribut dimensi kehandalan.

Tabel 4. Analisis Kehandalan

NO	ATRIBUT	RATA-RATA		PERSEPSI - HARAPAN
		PERSEPSI	HARAPAN	
K.1	Waktu Menunggu Moda	3,00	4,18	-1,18
K.2	Ketersediaan Informasi Tentang Destinasi	2,21	4,28	-2,07
K.3	Kenyamanan Sepanjang Perjalanan Menuju Destinasi (Obyek Lain Yang Dapat Dinikmati)	2,77	4,32	-1,55
K.4	Kejelasan Tarif Yang Ditawarkan	2,24	4,51	-2,27
K.5	Ketersediaan Layanan Komunikasi Kepada Pelanggan	2,55	4,21	-1,66

Berikut ini adalah pola persebaran setiap atribut dimensi kehandalan dalam diagram kartesius yang menunjukkan masing-masing atribut dalam hubungannya antara harapan wisatawan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemilik perahu Ketek. Setiap atribut tersebar dalam keempat kuadran yang ada.



Gambar 2. Kehandalan

3. Analisis Service Quality Dimensi Daya Tanggap

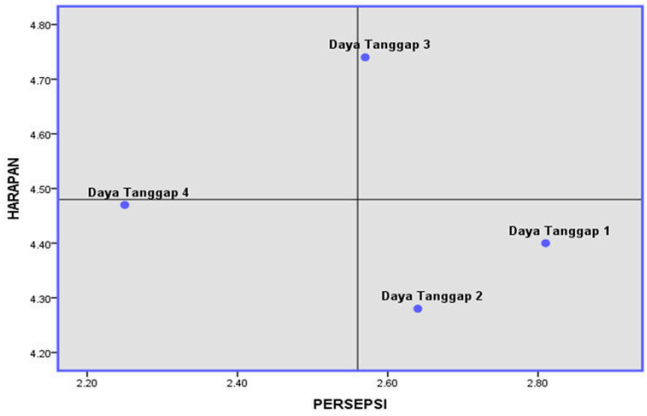
Hasil analisis terhadap atribut daya tanggap dalam dimensi ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 5. Analisis Daya Tanggap

NO	ATRIBUT	RATA-RATA		PERSEPSI - HARAPAN
		PERSEPSI	HARAPAN	
DT.1	Kecepatan Dan Kesiapan Petugas Dalam Menyediakan Pelayanan Bagi Pelanggan	2,81	4,40	-1,59
DT.2	Kecepatan Dan Ketepatan Dalam Memberikan Informasi Kepada Pelanggan	2,64	4,28	-1,64
DT.3	Kecepatan Dalam Menangani Kondisi Darurat Selama Diatas Moda	2,57	4,74	-2,17
DT.4	Kecepatan Dalam Merespon Keluhan Dan PermasalahanPelanggan	2,25	4,47	-2,21

Berdasarkan tabel di atas maka, skor *Servqual* yang memiliki nilai rendah adalah atribut kecepatan dalam merespon keluhan dan permasalahan pelanggan dan atribut kecepatan dalam menangani kondisi darurat selama diatas perahu ketek. Kedua atribut tersebut merupakan atribut yang perlu diprioritaskan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Apabila dimasukkan kedalam diagram kartesius maka

tidak ada atribut yang masuk kedalam kuadran I akan tetapi tersebar dalam kuadran II, III dan kuadran IV.



Gambar 3. Daya Tanggap

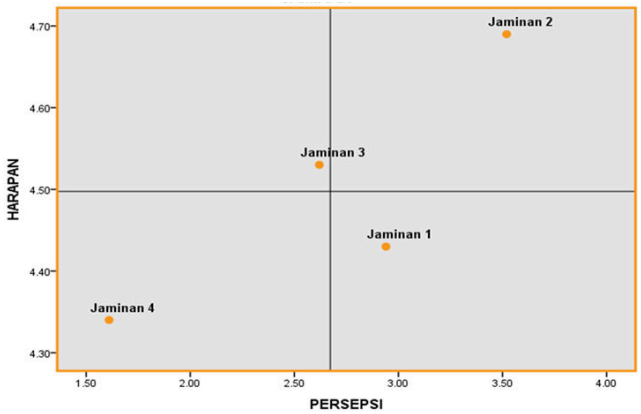
4. Analisis Service Quality Dimensi Jaminan

Hasil analisis terhadap atribut jaminan dalam dimensi ini tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Analisis Atribut Jaminan

NO	ATRIBUT	RATA-RATA		PERSEPSI - HARAPAN
		PERSEPSI	HARAPAN	
J.1	Keramahan Dan Kesopanan Petugas Dalam Melayani Wisatawan	2,94	4,43	-1,48
J.2	Kemampuan Petugas Dalam Menjalankan Moda Perahu Ketek	3,52	4,69	-1,16
J.3	Keamanan Dan Kenyamanan Saat Berada Di Dermaga (Tempat Duduk, Tempat Berteduh)	2,62	4,53	-1,91
J.4	Ketersediaan Asuransi Dan Atau Jaminan Keselamatan	1,61	4,34	-2,74

Atribut ketersediaan asuransi dan atau jaminan keselamatan dan atribut keamanan dan kenyamanan saat berada di dermaga (tempat duduk, tempat berteduh) merupakan atribut yang memiliki kesenjangan paling tinggi antara persepsi dan harapan. Wisatawan sangat mengharapkan adanya jaminan keselamatan selama berada diatas perahu ketek akan tetapi pihak pengelola tidak menyediakan atribut ini. Analisis *index performance analisys* menunjukkan bahwa atribut keamanan dan kenyamanan saat berada di dermaga termasuk atribut yang prioritas untuk dilakukan perbaikan.



Gambar 4. Jaminan

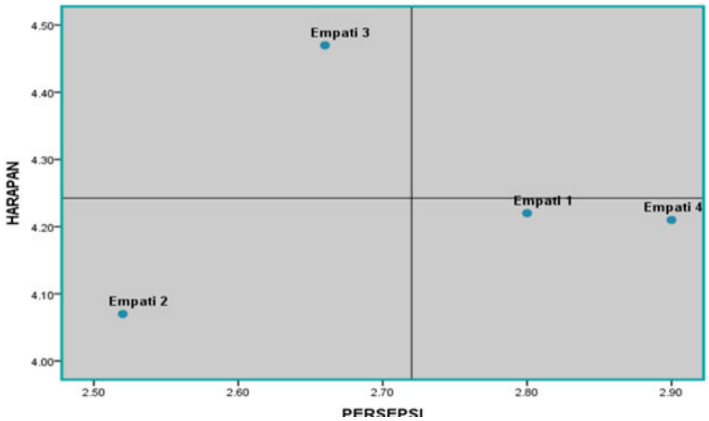
5. Analisis *Service Quality* Dimensi Empati

Hasil analisis terhadap atribut jaminan dalam dimensi ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 7. Analisis Atribut Empati

NO	ATRIBUT	RATA-RATA		PERSEPSI - HARAPAN
		PERSEPSI	HARAPAN	
E.1	Kemampuan Petugas Memberikan Informasi Dengan Bahasa Yang Mudah Dimengerti	2,80	4,22	-1,43
E.2	Kesediaan Karyawan Untuk Menghargai Dan Melayani Serta Mengutamakan Kebutuhan Wisatawan	2,52	4,07	-1,55
E.3	Kejujuran Dan Kesabaran Karyawan/Petugas Dalam Memberikan Pelayanan	2,66	4,47	-1,81
E.4	Kemampuan meberikan Pelayanan Kepada Wisatawan (Membantu Naik dan Turun)	2,90	4,21	-1,31

Berdasarkan tabel di atas, skor *servqua*l untuk atribut kejujuran dan kesabaran karyawan/petugas dalam memberikan pelayanan adalah atribut yang memiliki skor terendah dari keseluruhan atribut-atribut dalam dimensi empati yaitu sebesar -1,81. Atribut ini juga merupakan atribut yang masuk dalam kuadran I yang merupakan kuadran prioritas perbaikan.



Gambar 5. Empati

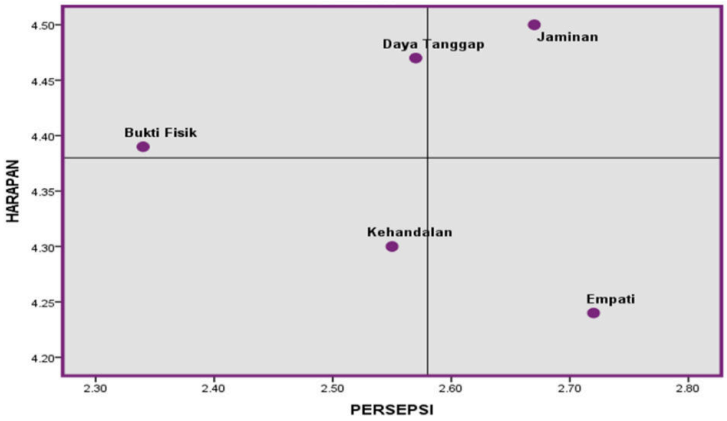
6. *Analisis Service Quality Berdasarkan Dimensi*

Berdasarkan hasil perhitungan nilai terhadap kelima dimensi dengan model *Servqual* yang terdapat pada tabel skor *Servqual* dibawah ini, diketahui bahwa skor keseluruhannya adalah -1,81. Skor -1,81 berarti bahwa tingkat kepuasan wisatawan secara keseluruhan buruk. Dengan demikian, hasil tersebut apabila dikaitkan dengan hipotesis penelitian ini adalah H - P > 0 maka H > P; wisatawan kurang puas atas pelayanan yang diterima.

Tabel 8. Pengukuran Skor Dimensi

No	**Dimensi**	**Rata-Rata**		**Skor SQ**
		Persepsi	Harapan	
1	Bukti Fisik	2,34	4,39	-2,05
2	Kehandalan	2,55	4,30	-1,75
3	Daya Tanggap	2,57	4,47	-1,90
4	Jaminan	2,67	4,50	-182
5	Empati	2,7	4,24	-1,52
Rata-Rata Skor *Servqual*		**2,57**	**4,38**	**-1,81**

Berdasarkan analisis dengan menggunakan diagram kartesius masing-masing dimensi tersebar kedalam semua kuadran akan tetapi, terdapat dua dimensi yang masuk kedalam kuadran I yaitu dimensi bukti fisik dan dimensi daya tanggap.



Gambar 7. Diagram Kualitas Pelayanan

Dimensi yang masuk kedalam kuadran I menunjukkan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa perahu Ketek lebih rendah dari harapan wisatawan. Apabila kepuasan pelanggan diprioritaskan, maka pihak penyedia jasa perahu Ketek perlu dan harus meningkatkan kinerja dimensi ini agar lebih optimal lagi. Dimensi Jaminan berada dalam kuadran II dimana penangananya perlu dipertahankan oleh penyedia jasa perahu Ketek, karena pada umumnya tingkat kinerja telah sesuai dengan harapan/kepentingan wisatawan akan tetapi, atribut jaminan keselamatan dan atau asuransi masih perlu menjadi perhatian bagi penyedia jasa perahu Ketek. Dimensi Keandalan berada dalam Kuadran III, pelayanan dalam dimensi ini dianggap kurang penting bagi wisatawan, sedangkan kualitas pelaksanaannya biasa atau cukup saja. Dimensi Empati berada dalam Kuadran IV hal ini menggambarkan bahwa dimensi ini sebenarnya tidak terlalu penting bagi wisatawan untuk disediakan, akan tetapi pelaksanaannya diberikan secara berlebihan oleh penyedia jasa perahu Ketek.

Masing-masing atribut yang terkadung di dalam setiap dimensi memiliki nilai perbandingan antara persepsi dan harapan yang berbeda-beda sehingga perlu disusun skala prioritas perbaikan kualitas pelayananannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada masing-masing dimensi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan maka, harus melibatkan beberapa instansi terkait di lingkungan pemerintah kota Palembang dan pihak-pihak yang bergerak di industri pariwisata seperti, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas Kebudayaan, Satpolairut, Biro perjalanan dan pengelola perahu ketek.

D. Analisis Hasil In-depth Interview

Penelitian ini melibatkan 5 (lima) pakar yang berasal dari Dinas Pariwisata Kota Palembang, Dinas Perhubungan Kota Palembang, Bappeda Kota Palembang, Universitas Sriwijaya dan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (profesional). Wawancara mendalam ini (*in-dept interview*) menggunakan 20 (dua puluh) atribut yang bersifat teknis yang menjadi dasar dalam melakukan wawancara mendalam dengan pakar terhadap perahu ketek berikut sarana prasarana pendukungnya. Hasil penilaian para pakar dapat dilihat pada Tabel 9:

Tabel 9. Skor *In-depth Interview*

Data Teknis	Informan					Nilai
	I	II	III	IV	V	
Ukuran Perahu	3	4	3	3	3	3,20
Kapasitas Penumpang	3	3	3	4	3	3,20
Pelampung	2	1	1	1	1	1,20
Fungsi Perahu	3	1	5	3	2	2,80
Tampilan Perahu	3	4	4	5	3	3,80
Lebar Perahu	3	4	3	3	3	3,20
Tinggi Perahu	2	1	4	4	3	2,80
Tonase Perahu	3	4	4	5	4	4,00
Material	3	3	3	3	4	2,80
Asuransi	3	1	1	3	1	1,80
Ukuran Dermaga	3	4	5	2	1	3,00
Desain Dermaga	3	1	4	2	1	2,20
Kelengkapan Dermaga	3	1	3	2	1	2,00
Tambatan Dermaga	3	4	4	2	1	2,40
Keamanan Alur Pelayaran	3	4	5	4	3	3,40
Pos Keamanan	2	1	1	1	2	1,40
Rambu Pelayaran	2	1	1	1	2	1,40
Sistem Navigasi	2	1	1	1	1	1,20
Papan Informasi Di Dermaga	2	1	1	2	1	1,40
Hotline Darurat	2	1	1	1	2	1,25
Jumlah Rata-Rata						**2,42**
Satisfaction Index						**0,48**

Sumber: Hasil Analisis

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata yang diberikan oleh kelima pakar adalah 2,42 sehingga nilai *satisfaction index*-nya adalah 0,48 nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori buruk atau belum layak secara teknis. Adapun atribut yang memiliki nilai dibawah nilai rata-rata adalah alat pelampung, asuransi, desain dermaga, kelengkapan dermaga, tambatan perahu, pos keamanan, rambu pelayaran, system navigasi, papan informasi di dermaga dan *hotline* darurat. Kedelapan atribut tersebut merupakan prioritas utama yang dijadikan atribut perbaikan kualitas pelayanan dari sisi *supply* perahu ketek.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai Tingkat Pelayanan Perahu Ketek Sebagai Angkutan Wisata Di Sungai Musi Kota Palembang dari sisi pengguna (*demand*) dan dari sisi teknis (*supply*), maka didapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi, yaitu:

1. Dari sisi pengguna (*demand*), secara keseluruhan pelayanan perahu ketek sebagai angkutan wisata di Sungai Musi Kota Palembang adalah buruk dimana, nilai rata-rata pengukuran dengan metode *service quality* sebesar -1,81 (buruk). Berdasarkan analisis *servqual* maka, ada 10 (sepuluh) atribut yang memiliki nilai gap yang tinggi antara harapan dan persepsi yaitu: ketersediaan alat pelampung, ketersediaan asuransi dan atau jaminan keselamatan, ketersediaan informasi rute perjalanan di dermaga, kejelasan tarif yang ditawarkan, kecepatan dalam merespon keluhan dan permasalahan pelanggan, kecepatan dalam menangani kondisi darurat selama diatas moda, ketersediaan informasi tentang destinasi, keamanan dan kenyamanan saat berada di dermaga, kebersihan moda dan kejujuran dan kesabaran karyawan dalam memberikan pelayanan.
2. Hasil *in-dept interview* menunjukkan bahwa secara teknis perahu ketek berikut infrastruktur lainnya adalah belum layak, hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang

hanya 2,42 dan *satisfaction index* sebesar 0,48. Adapun atribut yang memiliki nilai dibawah rata-rata *in-depth interview* adalah: pelampung, asuransi, desain dermaga, kelengkapan dermaga, tambatan dermaga, pos keamanan, rambu pelayaran, sistem navigasi, papan informasi di dermaga dan *hotline* darurat.

3. Untuk mendukung program pemerintah Kota Palembang dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentang program pembangunan pariwisata berbasis air di Kota Palembang maka, diperlukan kerjasama antar instansi atau dengan pelaku industri pariwisata dalam pembagian tugas untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan perahu ketek. Adapun yang perlu terlibat dalam kerjasama perbaikan adalah Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Raharja dan pelaku industri pariwisata.
4. Belum adanya standart teknis perahu ketek sehingga diperlukan usulan standart teknis perahu ketek sebagai pedoman desain awal perbaikan kualitas perahu ketek dan infrastruktur pendukungnya. Adapun usulan standart yang diperlukan adalah, ukuran perahu, kapasitas perahu, pelampung, tampilan perahu, desain dermaga, asuransi dan papan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.

Dedi, I.,M.,S, 2010, Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial, Yogyakarta: Ombak.

Middleton V., Fyall A., Morgan M. 2009, Marketing in Travel and Tourism, Fourth Edition, Butterworth Heinemann, USA.

Parasuraman, A. Valerie A. Z and Berry L.L. 1985. "A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research". Dalam Journal of Marketing. Vol 49 (Fall 1985), 41-50

Malmmadov, R, 2012. The importance Of Transportation In Tourism Sector, Azerbaijan: Qafqas University.

Singarimbun, M dan Sofian, E. 1999, Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.

Sinulingga, B.,D. 2005. Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Syamsuddin dan Damayanti. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zeithaml, A., V., Parasuraman, A., and Berry, L., L., 1990, Delivering Quality, "Service Balancing Customer Perception and Expectation", The Press New York.

Aplikasi *Smart Province* "Jogja Istimewa" Dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata

Rini Rachmawati[1], Elvandio Ramadhan[1], Amandita 'Ainur Rohmah[1]
[1] Prodi Pembangunan Wilayah, Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: rinirachma@ugm.ac.id ; elvandioram@gmail.com ;amanditarohmah123@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sangat membantu dalam mewujudkan implementasi Smart Province, salah satunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Aplikasi "Jogja Istimewa". Aplikasi ini merupakan program pemerintah, khususnya dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Salah satu informasi yang disediakan dan dapat diakses oleh pengguna aplikasi ini adalah terkait dengan informasi kepariwisataan. DIY sebagai salah satu destinasi wisata mengalami peningkatan kunjungan setiap tahunnya. Aplikasi Jogja Istimewa diharapkan dapat menjadi salah satu media yang dapat diakses wisatawan untuk mengetahui informasi pariwisata di DIY. Penelitian ini merupakan bagian dari riset yang berjudul Aplikasi Smart Province "Jogja Istimewa": Penyediaan Informasi Terintegrasi dan Pemanfaatannya. Dalam paper ini akan difokuskan pada informasi terkait dengan kepariwisataan pada aplikasi tersebut, pemanfaatannya dan sejauh mana aplikasi Jogja Istimewa dalam mendukung kegiatan pariwisata di DIY. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data primer didapatkan dari kegiatan survei melalui wawancara terstruktur, focus group discussion, dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran aplikasi. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi Jogja Istimewa memiliki fitur dan informasi yang memberikan informasi wisata DIY. Fitur-fitur pada aplikasi mempermudah masyarakat dan wisatawan dalam mendapatkan informasi wisata, lokasi, dan akses. Keberadaan fitur augmented reality dan peta yang menunjukkan lokasi sebenarnya dan peta rute lokasi mempermudah wisatawan dalam pemilihan akses dan moda transportasi. Aplikasi Jogja Istimewa merupakan pendukung kegiatan pariwisata DIY yang potensial, tetapi belum banyak dimanfaatkan dan diketahui karena cara sosialisasi yang belum maksimal. Strategi sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi Jogja Istimewa oleh masyarakat dan wisatawan.

Kata kunci: Smart Province, aplikasi Jogja Istimewa, kegiatan pariwisata

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara penyajian informasi. Perkembangan tersebut juga mempermudah cara mengakses informasi. Layanan publik berbasis teknologi merupakan salah satu implementasi konsep smart city yang merupakan konsep pengelolaan kota dengan menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta telah meluncurkan aplikasi Jogja Istimewa. Aplikasi ini berisi berbagai informasi yang ada di Yogyakarta. Informasi ini ditujukan kepada masyarakat di Yogyakarta di samping juga untuk mendukung kegiatan wisata.

Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan wisata yang sangat populer. Perkembangan wisatawan di D.I. Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 130,36% di bulan Juli 2016 dibandingkan Juli 2015 (Lestari, 2016). Perkembangan wisatawan ini menunjukkan adanya potensi kebutuhan informasi publik tentang D.I.Yogyakarta, khususnya informasi pariwisata. Perkembangan teknologi mempermudah masyarakat dan wisatawan mendapatkan informasi, terutama informasi

yang terintegrasi untuk mempermudah dalam penyampaian informasi.Tujuan dari aplikasi Jogja Istimewa adalah untuk mempermudah masyarakat dan wisatawan dalam memperoleh informasi D.I.Yogyakarta secara tepat, cepat, dan aktual. Paper ini merupakan bagian dari riset Aplikasi *Smart Province* "Jogja Istimewa": Penyediaan Informasi Terintegrasi dan Pemanfaatannya. Paper ini memfokuskan pada sejauh mana informasi pada aplikasi Jogja Istimewa dalam mendukung kegiatan pariwisata di D.I. Yogyakarta.

Konsep pengelolaan kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia maupun di dunia saat ini diarahkan pada konsep smart seperti *smart city, smart regency/ smart region*, dan *smart province*, serta *smart village*. *Smart City* merupakan pendekatan pengembangan perkotaan terkait dengan layanan perkotaan yang didasari oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) ((Nallary et al., 2012; Albino dkk, 2015; Rachmawati, 2014). Menurut Bakici, et.al (2012), *smart city* sebagai kota dengan intensifitas atas teknologi yang menghubungkan masyarakat, informasi, dan elemen kota menggunakan teknologi terbarukan untuk menciptakan kota yang berkelanjutan, kota hijau, ekonomi yang kompetitif dan inovatif, dan untuk peningkatan kualitas hidup. Perkembangan teknologi menjadi faktor penting dalam pengembangan daerah pada konsep *smart city*. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan pengelolaan daerah secara efektif dan efisien. Menurut Lee et.al (2014), tujuan dari konsep *smart city* yakni penyelesaian berbagai masalah perkotaan melalui pemanfaatan TIK yang terhubung dengan infrastruktur perkotaan.

Pada dasarnya *smart province* merupakan salah satu pengembangan konsep *smart city*, yang berbeda hanya pada lingkup pengelolaan. Pada *smart province*, lingkup pengelolaan merupakan lingkup yang lebih luas daripada kota yaitu propinsi. Propinsi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dibandingkan kota karena meliputi beberapa daerah kabupaten dan kota. Pengelolaan propinsi dituntut harus sinergis dengan kebutuhan kabupaten dan kota sehingga konsep *smart province* perlu adanya kesesuaian dengan kabupaten dan kota supaya pengelolaannya efektif dan efisien.

Menurut Talvitie (dalam Rachmawati, 2014), teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai penggerak utama dalam pembangunan informasi, pengetahuan, dan masyarakat dalam perencanaan kota. Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi merubah pandangan atas jarak dan waktu. Perubahan pandangan ini menunjukkan adanya pengaruh antara TIK dengan keberlanjutan atau kehidupan masyarakat. Dalam pelayanan publik, setiap daerah harus memenuhi standar pelayanan publik untuk menjamin kepastian dan kenyamanan pengguna. Terdapat prinsip dan standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik diantaranya, yaitu: 1) kesederhanaan, 2) kejelasan, 3) kepastian waktu, 4) akurasi, 5) keamanan, 6) tanggung jawab, 7) kelengkapan sarana dan prasarana, 8) kemudahan akses, 9) kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta 10) kenyamanan.

Pariwisata adalah gabungan kegiatan, pelayanan, dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan, seperti transportasi, akomodasi, makanan, minuman, dan pertokoan (Amakoro, 2015). Menurut WTO (1999, dalam Arjana, 2016), kegiatan pariwisata adalah kegiatan orang-orang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu tempat di luar lingkungan biasanya untuk jangka waktu kurang dari satu tahun secara berturut-turut untuk memanfaatkan waktu senggang, urusan bisnis dan tujuan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar untuk suatu wilayah. Lokasi objek pariwisata mampu meningkatkan jumlah pengunjung sehingga mampu menjadi sumber pendapatan di daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 14, usaha pariwisata meliputi: 1) Daya tarik wisata, 2) Kawasan pariwisata, 3) Jasa transportasi pariwisata, 4) Jasa perjalanan wisata, 5) Jasa makanan dan minuman, 6) Penyediaan akomodasi, 7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, 9) Jasa informasi pariwisata, 11) Jasa pramuwisata, 12) Wisata tirta, dan 13) Spa. Jasa informasi pariwisata menjadi salah satu usaha yang wajib tersedia pada setiap pariwisata daerah. Menurut Arjana (2016), penggunaan TIK dalam dunia pariwisata sangat bermanfaat dalam pengembangan bisnis wisata karena mampu melakukan efisiensi waktu dan biaya. Menurut Pramadya (2011), pemanfaatan teknologi untuk menunjang sektor pariwisata sangat dibutuhkan agar para wisatawan mudah untuk mengakses informasi tempat wisata.

Aplikasi Jogja Istimewa merupakan salah satu informasi pelayanan yang dapat digunakan sebagai sistem informasi pelayanan pariwisata di DIY. Aplikasi Jogja Istimewa menggunakan sistem layanan berbasis lokasi atau lebih dikenal dengan *Location-Based Services* (LBS). Sistem pelayanan LBS menggabungkan antara proses dari layanan *mobile* dengan posisi geografis dari penggunanya. Tipe layanan ini dilakukan dengan menaggunakan posisi pada GPS. Selain itu, tipe ini merupakan tipe layanan yang akan selalu memberikan informasi kepada pengguna walaupun pengguna tidak melakukan permintaan terhadap layanan (Kusumawardani, 2013).

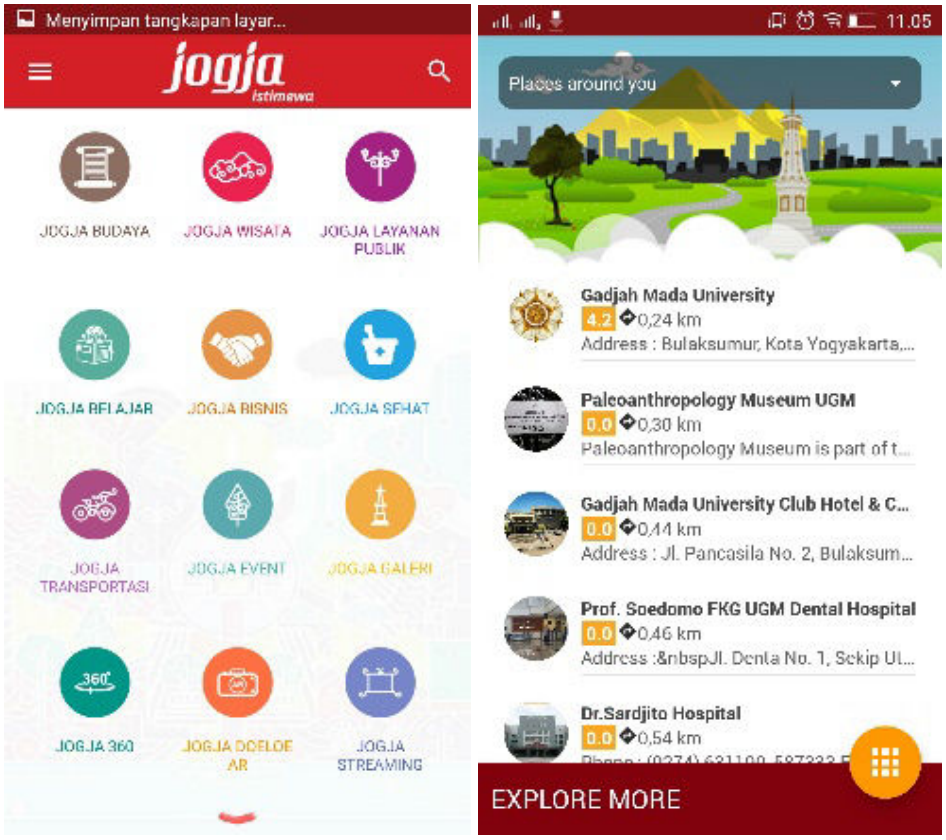
II.METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantatif. Pengambilan data melalui data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui penjelajahan terhadap aplikasi melalui *smart phone*. Data primer diperoleh dengan jalan *indepth interview* dan *focus group discussion*, disamping itu juga melalui wawancara terstruktur. *Indepth interview* dilakukan terhadap informan dari instansi terkait dengan penyediaan aplikasi informasi terintegrasi Jogja Istimewa. *Focus group discussion* dilaksanakan dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah, swasta, akademisi maupun perwakilan masyarakat. Wawancara terstruktur dilaksanakan terhadap sampel dengan jumlah 60 responden. Lokasi pengambilan data primer dengan wawancara terstruktur berada di Jalan Malioboro yang merupakan pusat kota sekaligus pusat pariwisata D.I. Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik pengambilan aksidental. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Jogja Istimewa merupakan sebuah media informasi D.I. Yogyakarta digital berbasis *mobile application* sebagai pemandu masyarakat dan wisatawan yang secara resmi berasal dari pemerintah daerah D.I. Yogyakarta sejak 21 September 2015. Aplikasi Jogja Istimewa ini menjadi media interaktif dan mandiri sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, tren, dan kebiasaan masyarakat dalam penggunaan *smartphone*. Aplikasi Jogja Istimewa memiliki desain yang menarik, ringkas, dan mudah digunakan. Aplikasi ini dapat digunakan pada smartphone dengan platform android dan windows, serta iOS yang sedang dalam tahap pengembangan.

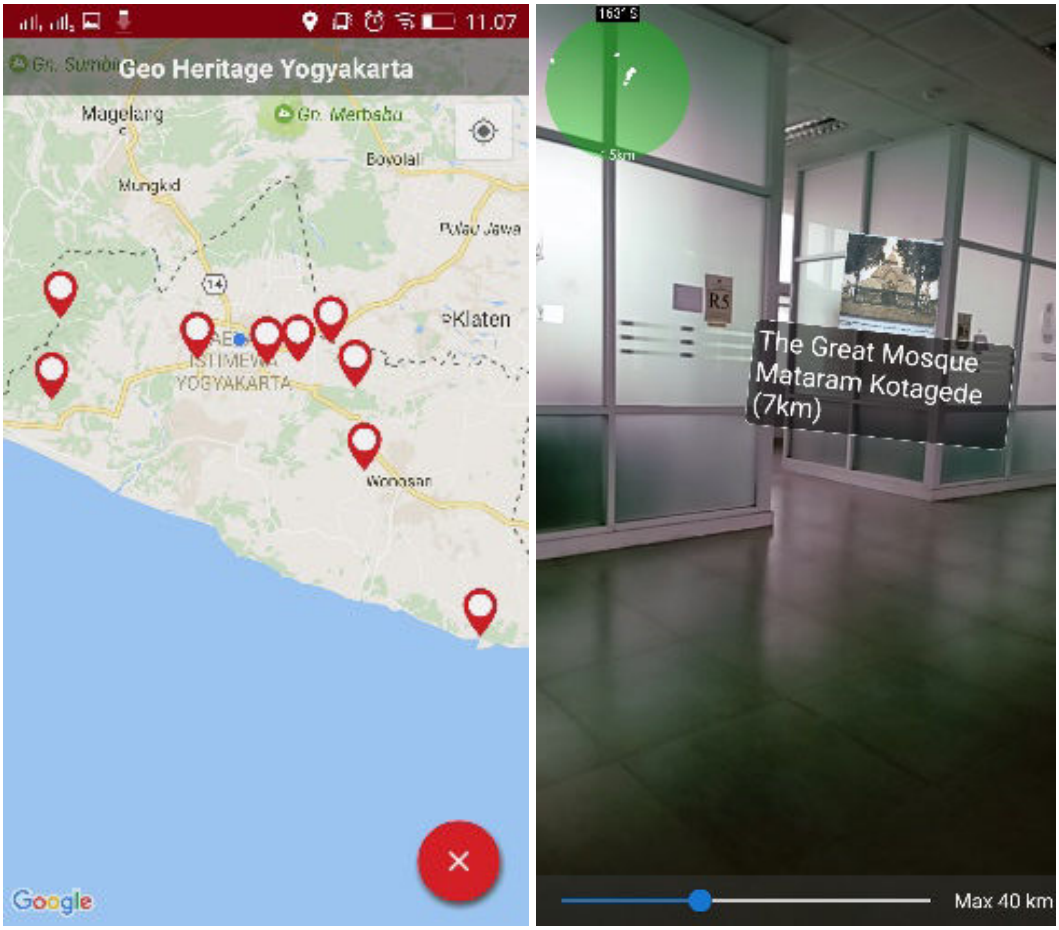
Aplikasi Jogja Istimewa memberikan kemudahan dengan menampilkan berbagai lokasi terdekat dari pengguna dengan memanfaatkan GPS pada perangkat smartphone pengguna. Fitur pencarian lokasi terdekat merupakan tampilan pertama atas aplikasi ini. Informasi lokasi terdekat hanya muncul pada saat pengguna mengakses di D.I. Yogyakarta saja karena memiliki batasan cakupan. Dari fitur ini, pengguna dapat mengetahui informasi umum, lokasi, jarak, cara dan waktu tempuh lokasi tersebut. Hal tersebut mempermudah masyarakat dan wisatawan untuk mengakses lokasi wisata untuk efisiensi waktu, jarak, dan biaya.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Jogja Istimewa

Aplikasi Jogja Istimewa sebagai aplikasi penyedia informasi D.I.Yogyakarta memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan pertama, penyampaian informasi pariwisata dan budaya dapat dilakukan lebih mudah, akurat, dan terarsip dengan baik. Keunggulan kedua, Aplikasi Jogja Istimewa sebagai media promosi daerah untuk meningkatkan kunjungan wisata daerah. Keunggulan ketiga, aplikasi ini dapat mengurangi penggunaan kertas dalam mempromosikan tempat tujuan wisata dan budaya daerah. Keunggulan keempat, aplikasi dapat menjangkau wisatawan di seluruh nusantara dan dunia karena dapat digunakan dimanapun kecuali fitur pencarian lokasi terdekat. Keunggulan kelima, aplikasi mampu mengikuti perkembangan perilaku dan kebiasaan pengguna seiring dengan perkembangan tren teknologi. Keunggulan keenam, tersedianya gratis upgrade sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru. Kekurangan pada aplikasi ini, fitur pencarian lokasi terdekat tidak akan muncul ketika pengguna berada jauh dari Yogyakarta, tetapi fitur lainnya masih berfungsi.

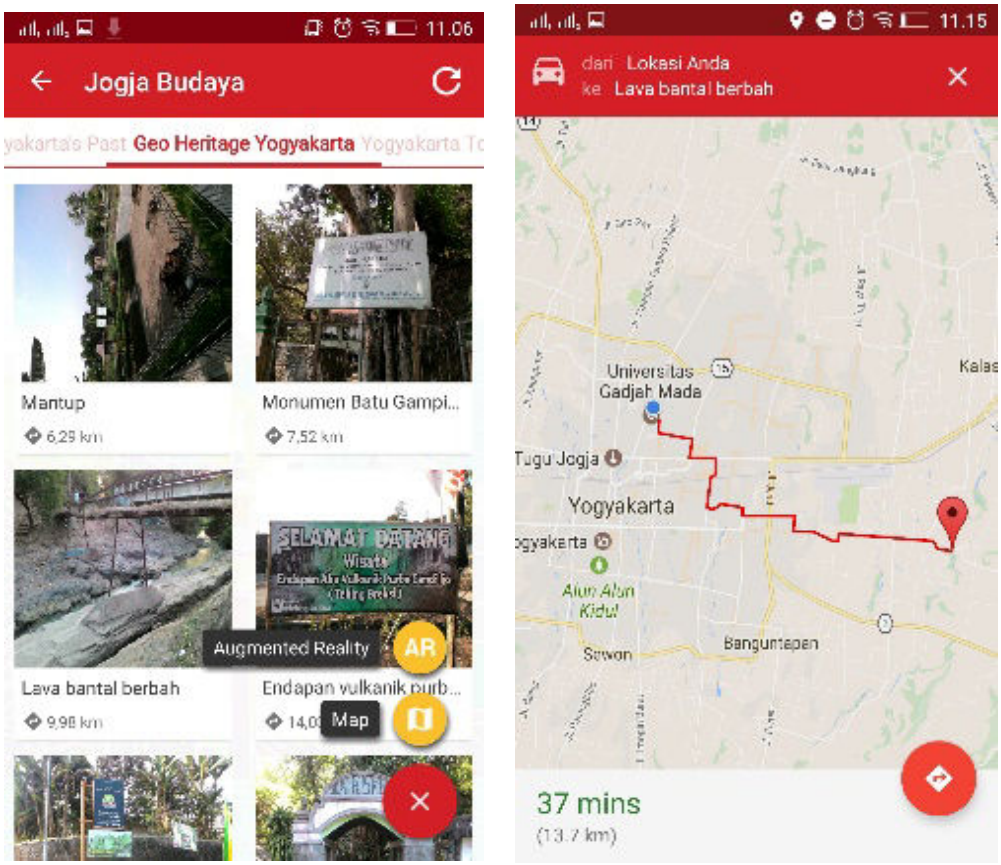
Setiap informasi pada fitur yang ada di aplikasi Jogja Istimewa dilengkapi dengan *Augmented Reality* (AR) dan peta. *Augmented Reality* mampu menunjukkan persebaran lokasi dalam radius jangkauan maksimal 40 km. Fitur *Augmented Reality* (AR) tersebut memberikan pengguna untuk melihat foto masa lalu yang ada di D.I. Yogyakarta berdasarkan arah *smartphone* melalui aktifasi kamera dan GPS smartphone. Peta berfungsi sebagai panduan untuk menuju lokasi yang memberikan kisaran jarak dan waktu tempuh. Kedua alat ini dapat dimanfaatkan apabila pengguna mengaktifkan GPS dan berada pada radius 40 km dari pusat D.I. Yogyakarta. Kedua alat ini bertujuan untuk mempermudah pengguna untuk menentukan keberadaan dan cara menuju lokasi tujuan.



Gambar 2. Tampilan Pemanfaatan Peta dan *Augmented Reality*

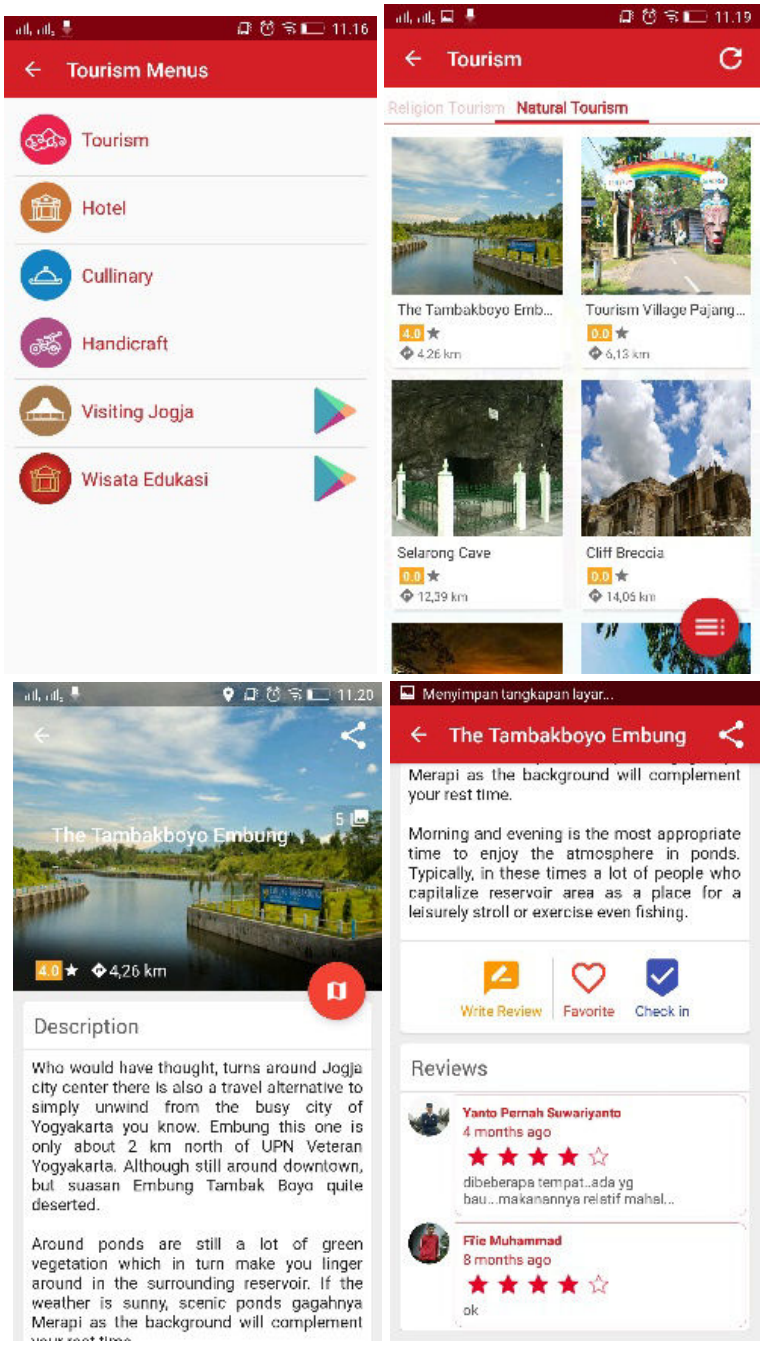
Terdapat beberapa fitur pada aplikasi Jogja Istimewa sesuai fungsi dan kegunaannya untuk mendukung kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan pariwisata. Beberapa fitur aplikasi Jogja Istimewa, yaitu; jogja budaya, jogja wisata, jogja layanan publik, jogja belajar, jogja bisnis, jogja sehat, jogja transportasi, jogja event, jogja galeri, jogja 360, jogja doeloe AR, dan jogja streaming. Setiap fitur memiliki fungsi yang berbeda. Hampir semua fitur mendukung kegiatan pariwisata di D.I. Yogyakarta, terutama fitur jogja budaya, jogja wisata, jogja transportasi, jogja event, jogja galeri, dan jogja streaming.

Fitur Jogja Budaya terdiri atas tiga kelompok informasi, yaitu Yogyakarta Masa Lampau, Geo Heritage Yogyakarta, dan Yogyakarta Masa Kini. Kelompok informasi Yogyakarta Masa Lampau dan Yogyakarta Masa Kini memiliki kelompok informasi didalamnya. Yogyakarta Masa Lampau terdiri dari kelompok informasi Ngayogyokarto Hidiningrat, Jejak Revolusi Perjuangan, Jejak Akulturasi Budaya, Mataram Islam, Mataram Kuno, dan Kolonialisme. Yogyakarta Masa Kini memiliki kelompok informasi Kesenian, Heritage, Sosial Budaya, dan Puro Pakualaman. Beberapa kelompok-kelompok informasi tersebut terbagi atas kelompok informasi lainnya sesuai jenis kebudayaannya. Setiap deskripsi memiliki informasi lokasi dan foto. Informasi lokasi terkoneksi dengan *google map* sehingga dapat menunjukkan jalur tempuh dari lokasi pengguna.



Gambar 3. Tampilan Fitur Jogja Budaya dan Contoh Peta Rute

Fitur Jogja Wisata terdiri dari beberapa kelompok informasi yaitu, wisata, hotel, kuliner, kerajinan, visiting jogja, dan wisata edukasi. Kelompok wisata terdiri dari wisata dan hiburan umum, candi, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religius, dan wisata alam. Kelompok hotel merupakan informasi hotel-hotel di D.I.Yogyakarta yang diklasifikasikan pada hotel bintang 5, hotel bintang 4, hotel bintang 3, dan *guest house*. Kelompok informasi kuliner terdiri dari kelompok kuliner santap siang, legendaris, kuliner malam, sarapan, dan jajanan. Kelompok informasi kerajinan terdiri dari kerajinan kain dan kerajinan tangan. Setiap deskripsi memiliki informasi lokasi, ulasan pengguna dan foto. Deskripsi pada setiap informasi wisata merupakan informasi berkaitan dengan informasi umum, kontak, alamat, serta jam dan biaya kunjungan.



Gambar 4. Tampilan Fitur Jogja Wisata dan Contoh Informasi

Fitur Jogja Streaming merupakan fitur yang paling banyak digunakan oleh pengguna aplikasi Jogja Istimewa. Fitur ini memberikan pengguna untuk mengakses Jogja TV dan Jogja CCTV secara *online* dan *real time*. Informasi secara real time ini yang menjadi alasan banyak pengguna yang mengakses fitur ini. Jogja TV merupakan link yang terhubung dengan server Jogja Istimewa TV. Jogja Istimewa TV merupakan siaran yang diliput dan dipublikasikan oleh pemerintah D.I. Yogyakarta, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika D.I. Yogyakarta. Jogja CCTV merupakan fitur yang memberikan tampilan CCTV D.I. Yogyakarta kepada pengguna. CCTV yang tersebar di D.I. Yogyakarta dapat diakses oleh pengguna untuk mendapatkan gambaran *real time* atas lokasi tersebut.

Aplikasi Jogja Istimewa merupakan pendukung kegiatan pariwisata DIY yang

potensial, tetapi pemanfaatan aplikasi ini masih rendah. Hasil survei **(Gambar. 5)** menunjukkan bahwa 92% responden tidak mengetahui adanya Aplikasi Jogja Istimewa. Responden yang mengetahui adanya Aplikasi Jogja Istimewa sebesar 8%. Informasi yang diperoleh responden tentang Aplikasi Jogja Istimewa berasal dari teman/ relasi, media cetak seperti Radar Jogja dan Tempo, serta berasal dari media sosial berupa *facebook*. Responden yang tidak mengetahui adanya Aplikasi Jogja Istimewa menyebutkan bahwa alasan tidak mengetahui karena belum menerimanya sosialisasi dan informasi tentang Aplikasi Jogja Istimewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dalam mendapatkan informasi tentang D.I. Yogyakarta berasal dari teman/ relasi, media sosial berupa *facebook* dan *instagram*, serta televisi.



Gambar 5. Diagram Pengetahuan Responden Terhadap Aplikasi Jogja Istimewa

Hasil (**Gambar 6**) menunjukkan bahwa dari 8% responden yang mengetahui, 100% tidak memanfaatkan Aplikasi Jogja Istimewa. Belum dimanfaatkannya Aplikasi Jogja Istimewa karena responden merasa belum membutuhkan dan sudah mengetahui informasi D.I. Yogyakarta secara individu ataupun berasal dari teman/ relasi. Informasi melalui sosial media, televisi, dan kerabat masih menjadi media informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan wisatawan. Rendahnya pemanfaatan aplikasi dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi terkait dengan aplikasi ke masyarakat ataupun wisatawan.



Gambar 6. Diagram Pemanfaatan Responden Terhadap Aplikasi Jogja Istimewa

Masyarakat dan wisatawan dalam penelitian ini memberikan usulan bentuk sosialisasi seperti apa yang mereka inginkan. Hasil menunjukkan bahwa 100% menyebutkan perlu adanya sosialisasi melalui sosial media secara gencar. Sosialisasi bentuk lainnya yang disarankan melalui videotron, iklan di televisi, media cetak, pengenalan secara langsung ke masyarakat pada tempat-tempat penting (tempat wisata, bandara, ataupun stasiun).

Responden 7 menyebutkan, "Sosialisasi yang lebih sering di DIY sendiri maupun luar DIY dengan cara menggunakan media sosial ataupun berita *online* untuk sosialisasi luar DIY". Responden 27 menyebutkan, "Di setiap objek wisata, hotel, akomodasi, kantor pemerintahan ada banner-nya. Di setiap acara juga ada banner Aplikasi Jogja Istimewa". Responden 32 menyebutkaan, "Pengenalan aplikasi di fasilitas seperti bandara, terminal, stasiun, dan fasilitas lainnya".

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan aplikasi Jogja Istimewa menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan sosialisasi untuk mengenalkan aplikasi. Pengenalan aplikasi tidak hanya dilakukan dengan sasaran masyarakat saja. Pemerintah secara keseluruhan perlu juga mengenal aplikasi ini supaya pemanfaatan dan pengembangannya optimal. Pengenalan aplikasi dapat dilakukan dengan berbagai strategi, melalui media sosial, media cetak, ataupun televisi. Perencanaan untuk sosialisasi perlu dilakukan untuk menentukan sasaran dan strategi sosialisasi. Setiap sasaran memiliki perbedaan strategi atau pendekatan yang berbeda pula. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Pertama, melakukan sosialisasi ke dinas dan kedua sosialisasi ke masyarakat. Meskipun sosialisasi ke masyarakat punya cara yang berbeda-beda. Mungkin lewat TV atau lewat media koran, atau lainnya untuk menunjukkan keberadaan dari aplikasi ini serta informasi yang ada di dalamnya. Untuk ke dinas-dinas bisa melalui forum pertemuan." (Informan 6: Dinas Koperasi dan UMKM)

"Jogja Istimewa ini menurut saya masih terkesan esklusif belum sampai di surat kabar, atau di media-media baliho, sehingga masih dipandang kurang. Padahal seharusnya seperti di bandara pada saat kedatangan sudah harus ada penjelasan tentang Jogja Istimewa, sehingga orang menjadi tahu. Informasi baru terdapat di beberapa tempat saja dan masih sangat minim, sehingga perlu diperluas di tempat-tempat wisata, bisa melalui *x-banner* dan *updating newsletter*...." (Informan 8: Relawan TIK).

IV. KESIMPULAN

Aplikasi Jogja Istimewa merupakan media informasi di D.I. Yogyakarta berbasis digital berupa *mobile application* sebagai pemandu wisatawan. Aplikasi Jogja Istimewa menjadi salah satu aplikasi yang bermanfaat dalam memberikan informasi kepariwisataan DIY. Terdapat banyak fitur dan informasi yang memudah kegiatan pariwisata. Hampir semua fitur mendukung kegiatan pariwisata di D.I. Yogyakarta, terutama fitur jogja budaya, jogja wisata, jogja transportasi, jogja event, jogja galeri, dan jogja streaming. Adanya fitur *augmented reality* dan peta memberikan kemudahan masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi wisata dan aksesnya. Pemanfaatan aplikasi ini belum maksimal dan masih memerlukan sosialisasi agar lebih banyak diketahui oleh masyarakat pelaku wisata dengan cara penentuan sasaran dan strategi yaitu dilakukan dengan pemasangan banner pada objek wisata, hotel, stasiun, bandara, dan tempat-tempat lainnya yang menjadi pusat keramaian di D.I. Yogyakarta supaya pengetahuan dan pemanfaatan aplikasi Jogja Istimewa meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Albino, Vito, Umberto Berardi, dan Rosa M. Dangelico. (2015). Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, anda Initiatives. *Journal of Urban Technology*, Vol. 22:1. 3-21.

Amakoro, J. (2015). Perancangan Aplikasi Sistem Navigasi Objek Wisata berbasis Android pada Dinas Pariwisata Kota Makassar. *Konferensi Nasional Sistem & Informatika 2015 STMIK STIKOM*.

Arjana, I Gusti Bagus. (2016). *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Bakici, T., Almirall, E., Wareham, J. (2012lestari). A Smart City Initiative: The Case of Barcelona. *Journal of the Knowledge Economy,* Vol. 4 Tahun 2013. 135-148.

Kusumawardani, Dwi. 2013. *Sistem Informasi Pariwisata Pada Kabupaten Malang Berbasis Android*. Yogyakarta: AMIKOM.

Lee, J.H., Hancock, M.G., dan Hu, Mei-Chih. (2014). Towards an Effective Framework for Building Smart Cities: Lessons form Seoul an San Fransisco. *Technological Forecasting and Social Change*,Vol.89. 80-99.

Lestari. (2016). *Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke DIY Tertinggi Se-Indonesia, Tribun Jogja*. Diakses pada 30 Maret 2017, dari alamat http://jogja.tribunnews.com/2016/09/10/perkembangan-jumlah-wisatawanmancanegara-ke-diy-tertinggi-se-indonesia

Nallary, Raj, Griffith, Breda dan Yusuf, Shahid. (2012). *Geography Of Growth Spatial Economy and Competitiveness*. Washington: Bank Dunia

Pramadya, Joni. (2011). *Pembuatan Aplikasi Mobile Berbasis Android OS untuk Mengetahui Lokasi Tempat Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: AMIKOM

Rachmawati, Rini. (2014). *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Analisis Persepsi Dan Preferensi Wisatawan Dalam Upaya Penataan Fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin

Anak Agung Sagung Alit Widyastuty[1] dan Samuel Gabriel[1]
[1]Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: sagungalit@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Objek Wisata Air Panas Wai Platin yang terletak di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur ini menjadi salah satu objek wisata yang menjadi unggulan di kabupaten Flores. Namun saat ini kawasan wisata Air Panas Wai Patin mengalami penurunan pengunjung wisata. Hal ini bisa dilihat dari data BPS kabupaten Flores dari tahun 2008 – 2013 terjadi penurunan rata – rata tiap tahun 34%. Tujuan dari Kajian ini adalah mengidentifikasi karakteristik penataan fasilitas wisata, mengidentifikasi persepsi dan perferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas wisata dan, dan merumuskan arahan penataan fasilitas Air Panas Wai Platin berdasarkan persepsi dan perferensi wisatawan. Metode Analisis yang digunakan untuk mendukung kajian ini analisis deskriptif kuantitatif. Teknik penelitian yang di lakukan adalah pengamatan secara langsung di lapangan dan melakukan penyebaran kuisioner untuk mengetahui tingkat persepsi dan preferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin. Hasil Kajian ini menunjukan bahwa karakteristik penataan fasilitas wisata di Objek Wisata Air Panas ini masih belum memadai. Berdasarkan hasil analisis persepsi dan preferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas dari aspek keamanan menyatakan 12% aman, 51% kurang aman dan 28% tidak aman. Aspek keutuhan fasilitasnya maupun konsep penataan sarana prasarananya menyatakan 8% baik, 69% kurang baik dan 21% menyatakan tidak baik.

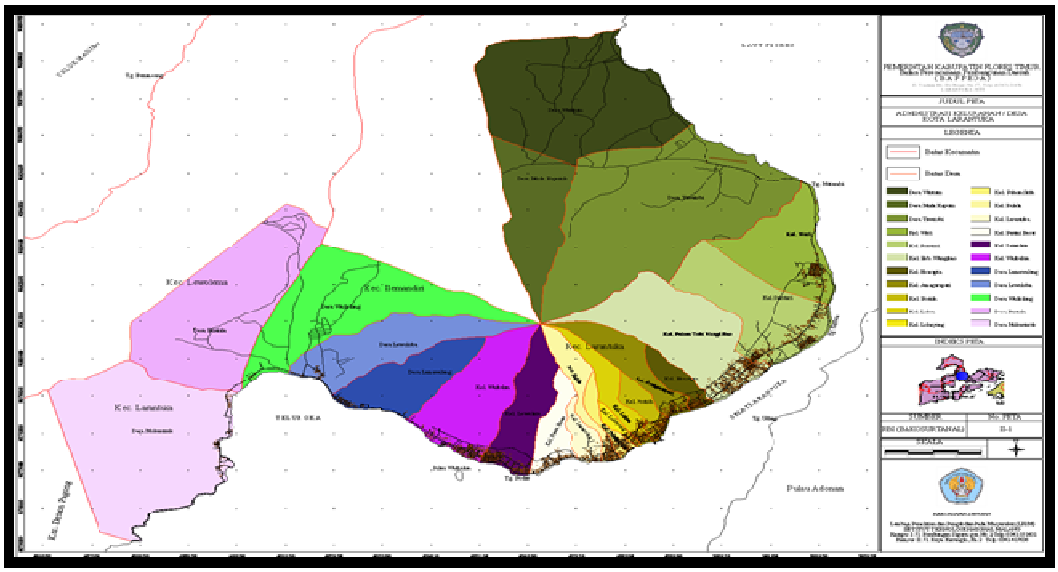
Kata Kunci: Penataan fasilitas wisata, persepsi, dan preferensi

I. PENDAHULUAN

Kecamatan Larantuka merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT) yang memiliki potensi pariwisata yang sangat bagus untuk di gali dan dikembangkan sebagai salah satu pariwisata yang bisa berdaya saing dengan wisata-wisata lain yang ada di Kabupaten Flores Timur bahkan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan RTRK yang di tetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, pendekatan pengembangan tata ruang kepariwisataan yang ada Kabupaten Flores Timur tidak lagi mengacu pada batas administrasi wilayah kecamatan tetapi dikembangkan di tingkat kabupaten.

Batas wilayah Kecamatan Larantuka sebelah utara kecamatan Ile Mandiri, Sebelah Timur Kecamatan Ile Mandiri, Sebelah Selatan Selat Flores dan sebelah Barat Kecamatan Lewolema. Kecamatan Larantuka mempunyai luas wilayah ± 99,82 km2 dan terletak diantara koordinat 8°14'33.19"- 8°22'02.43"

Berdasarkan RTRW Tahun 2011 Kabupaten Flores Timur pariwisata air panas dimasukkan kategori Wilayah Pariwisata Potensial (WPP) belum masuk dalam kategori Wilayah Pariwisata Unggulan (WPU). Wilayah Pariwisata Unggulan mempunyai tingkat potensi tinggi dan sudah teruji oleh pasar dan mampu memberikan dampak pembangunan secara cepat dan menyeluruh, sedangkan Wilayah Pariwisata Potensial (WPP) mempunyai tingkat potensi pengembangan tinggi, belum teruji pasar secara positif, dan dampak pembangunannya akan dirasakan dalam waktu yang lebih lama.



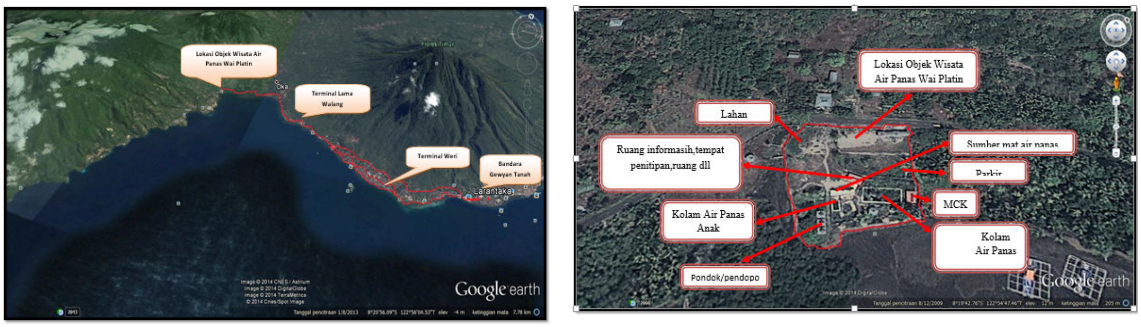
Gambar 1. Batas Administrasi Kecamatan Larantuka

Pembagian tersebut didasarkan pada tingkat dan daya tarik, kedekatan tema dan kedekatan geografis. pengembangan kepariwisataan Kabupaten Flores Timur diarahkan pada tersedianya obyek wisata yang memadai yang didukung oleh pelaku pariwisata yang handal serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung. Selain itu juga di lihat dari segi fisik, sosial dan budaya di sekitar wilayah studi, juga bisa mempengaruhi daya tarik bagi wisatawan. Melalui pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan.

Demikian pula halnya dengan Objek Wisata Air Panas yang terletak di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, perkembangannya akan dipengaruhi oleh perkembangan penduduk di sekitarnya dan pelaku pariwisata, serta tingkat intensitas kegiatannya, yaitu kegiatan kepariwisataan, baik kegiatan yang di lakukan pemerintah maupun penduduk atau masyarakat sekitar untuk mendukung,menjaga dan melestarikan agar Objek Wisata Air Panas Wai Platin ini menjadi salah satu objek wisata yang bisa menarik untuk di kunjungi oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun manca negara. Jumlah wisatawan yang di datakan oleh BPS Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kecamatan Larantuka pada Tahun 2012 adalah sejumlah 2809 sedangkan di tahun 211 berjumlah 1511 dan di tahun 2010 berjumlah 1206 dan di tahun 2009 berjumlah 906 dan di tahun 2008 jumlahnya 447 wisatawan.

Obyek wisata air panas dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2003 menjadi tempat rekreasi umum yang menarik dan dilengkapi dengan toilet, area parkir, kolam renang, area keluarga, tempat bermain anak-anak dan lain sebagainya, namun akibat kepentingan politik dan kurangnya perawatan dari pemerintah maka wisatawan atau pengguna lain tidak nyaman untuk menikmati fasilitas yang sudah ada. Bahkan sekarang semua fasilitas-fasilitas yang ada yang tidak dapat di fungsikan lagi. Padahal aset wisata alam, air panas ini jika di kembangkan menjadi tempat pemandian air panas, akan berdampak positip untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Flores Timur, selain memiliki sumber mata air panas yang cukup memadai, di lokasi air panas yang berdekatan dengan pantai ini menyajikan pemandangan tepi laut yang begitu memposona. Dengan kondisi seperti ini objek wisata Air Panas yang dulunya menjadi pilihan kunjungan paling akhir bagi para maniak wisata alam sebelum kembali ke Kota Larantuka untuk mengakhiri

perjalanan wisata mereka kini hanyalah sebuah bangunan tua yang usang dan di huni ratusan lebah.



A B

Gambar 2 (A) Jalan ke Lokasi Wisata Air Panas Wai Platin, (B) Lokasi Wisata Air Panas Wai Platin

Berdasarkan fakta dan permasalahan di atas,jika masalah ini tidak di teliti maka wisata air panas yang merupakan objek wisata alam yang diunggulkan akan hilang dengan sendirinya di mata masyarakat dan ini akan mengkibatkan jumlah tingkat pengunjung di Kecamatan Larantuka akan menurun atau berkurang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian dengan judul "Penataan Kawasan Objek Wisata Air Panas Wai Platin Berdasarkan Persepsi Dan Perferensi Wisatawan Di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur" penting dilakukan guna menata kawasan Objek Wisata Air Panas ini guna memberi kenyamanan wisatawan yang datang berwisata di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan (UU No. 9 Tahun 1990). Tata kelola pariwisata merupakan bagian dari (*governance)* di sektor pariwisata untuk tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Definisi tata kelola pariwisata ialah mekanisme pengelolaan kolaboratif pariwisata yang melibatkan sektor pemerintah dan non pemerintah dalam suatu usaha kolektif (Muntasib 2009). Elemen Perancangan Kota Dalam desain perkotaan terdapat elemen-elemen fisik Urban Design yang bersifat ekspresif dan suportif yang mendukung terbentuknya struktur visual kota serta terciptanya citra lingkungan yang dapat pula ditemukan pada lingkungan di lokasi penelitian.(Shirvani, 1985). Persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain (Poerwanto, 2004). Dari hasil mempelajari informasi tersebut maka terbentuklah persepsi dari daerah wisata atau obyek wisata tersebut, yang oleh Kotler dikatakan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam memilih, mengorganisasikan dan menginterprestasikan informasi untuk membuat gambaran yang memiliki makna, dengan kata lain dapat dikatakan persepsi membantu individu dalam menyeleksi, serta menginterprestasikan informasi menjadi suatu yang berarti (Poerwanto,2004).

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Teknik penelitian yang di lakukan adalah pengamatan secara langsung di lapangan dan melakukan penyebaran kuisioner kepada 63 wisatawan yang berkunjung di kawasan wisata untuk mengetahui tingkat persepsi dan preferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin.Secara detail

proses penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Sasaran	Variabel	Metode Analisis	Out put
Mengetahui karakteristik penataan fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin	Kondisi Sarana Prasarana	Analisis deskriptif Kuantitatif	Karakteristik penataan fasilitas air panas berdasarkan persepsi dan perferensi wisatawan
	Wisatawan		
	Daya tarik alam		
Mengidentifikasi persepsi dan perferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas wisata air panas Wai Platin	Persepsi wisatawan		persepsi dan perferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas wisata air panas
	Preferensi wisatawan		
Merumuskan konsep penataan fasilitas Wisata Air Panas Waiplatin berdasarkan Persepsi dan Perferensi Wisatawan	Konsep Penataan fasilitas	Analisis Kualitatif berdasarkan elemen Penataan Shirvani	Konsep penataan fasilitas wisata air panas

Sumber: Hasil kajian

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menggunakan beberapa veriabel yang sudah di tentukan pada ruang lingkup materi sehingga menghasilkan beberapa ulasan sebagai berikut:

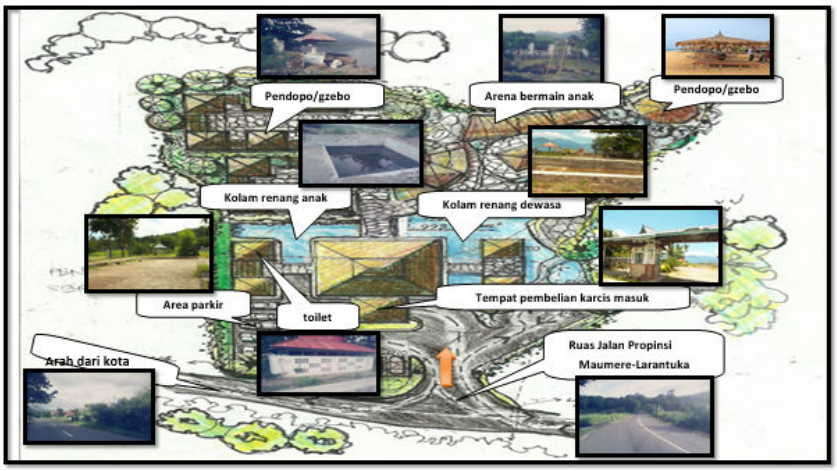
A. Hasil Penelitian Tentang Karakteristik Wisatawan

1. Kondisi sarana prasarana

Untuk sarana dan prasarana yang ada di lokasi objek wisata air panas Wai platin ini banyak sekali fasilitas baik fasilitas sarana dan prasarana utama maupun penunjang perlu di benahi seperti kolam renang baik kolam renang untuk anak-anak mupun untuk dewasa, saat ini wisatawan masih menggunakan kolam renang lama karena kolam renang baru masih sementra dalam proses pembuatan. Untuk tempat ganti peralatan dan pakaian di Wisata Air Panas ini belum ada, para wisatawan masih menggunakan MCK sebagai tempat ganti sementara.

Selain kolam renang fasilitas yang perlu di benahi lagi adalah tempat parkir, MCK, pendopo atau gasebo, tempat karcis masuk dan area bermain anak, sedangkan untuk rumah makan masih belum ada juga, kebanyakan wisatawan yang datang di wisata ini membawa bekalnya masing-masing dan ada beberapa wisatawan membelinya di tempat warung makan terdekat seperti di warung makan Terminal Lama Walang.

Untuk toko oleh-oleh atau toko suvioner di lokasi Wisata Air Panas Wai Platin ini belum ada, para wisatawan yang ingin membeli oleh-oleh buat kenenangan sehabis rekreasi di tempat ini kebanyakan wisatawan masih membelinya di pusat kota Larantuka yaitu berjarak sekitar 8 km dari lokasi Objek Wisata Air Panas Wai Platin ini, dan rata-rata yang di beli oleh wisatawan khususnya wisatawan luar daerah Kabupaten Flores Timur adalah kain tenun yang merupakan kain adat khas masyarakat Lamaholot atau masyarakat Kabupaten Flores Timur pada umumnya.



Gambar 3. Lokasi fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin

2. Kondisi Wisatawan

Dari data dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Flores Timur jumlah pengunjung yang di datakan dari tahun 2010 sampai 2013 adalah, pada tahun 2010 jumlah pengunjung yang datang di lokasi wisata air panas wai platin adalah 215 wisatawan tergolong wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik, di tahun 2011 jumlah wisatawan sudah berkurang dari 215 wisatawan menjadi 144 wisatawan minus 71, sedangkan di tahun 2012 jumlah wisatan berkurang lagi menjadi 94 wisatwan saja. Dari data tersebut jika dihitung dari tahun 2010-2012 jumlah berkurang hingga 121 wisatawan, hal ini menjadi dampak tersendiri terhadap Wisata Air Panas Wai Platin baik dari penghasilannya maupun tingkat daya tarik dan daya saingnya pun menurun drastis.

Kategori umur yang di gunakan peneliti dalam memeberikan kusioner kepada responden bermacam mulai dari umur 15-24 tahun ada 31 responden,sedangkan dari umue 25-34 tahun berjumlah 27 responden dan yang berumur 35-44 tahun hanya berjumlah 5 responden saja.

Motivasi wisatawan adalah salah satu hal yang terpenting untuk di datakan peneliti karena dengan data ini kita bisa mengetahui tujuan wisatawan yang datang apakah rekreasi,berpacaran ataupun kepentingn untuk pendidikan,dari hasil kuisioner yang di berikan kepada 63 responden ada 44 responden yang tujuan datang hanya rekreasi, dan 17 wisatawan datang dengan tujuan berpacaran dan 2 lainnya datang dengan tujuan pendidikan.

3. Daya tarik

Objek Wisata Air Panas Wai Platin yang berlokasi di Desa Mokantarak, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ini di minati banyak pengunjung salah satuhnya adalah karena daya tarik alamnya. Terkait daya tarik alamnya ini Wisata Air Panas Wai Platin ini mempunyai objek alam yang sangat di gemari oleh pengunjung atau wisatawan yaitu salah satunya adalah view atau pemandangan tepi pantai Wisata Air Panas Wai Platin yang sangat indah karena berada tepat di tengah-tengah teluk Oka, di tambah lagi dengan rasa kesejukan udara tepi pantai yang membuat para wisatawan atau pengunjung bisa melepas leleahnya sehabis menikmati kegiatan di Wisata Air Panas Wai Platin seperti setelah mandi atau kegiatan lainnya dengan duduk santai di beberapa pendopo/gazebo alang-alang yang terletak di tepi pantai.

Selain view atau pemandangannya nan indah di tepi panatai, lokasi tepi pantai Objek Wisata Air Panas Wai Platin ini juga di hiasi berbgai tumbuhan alam yang membuat para pengunjung atau wisatawan merasa nyaman berjalan-jalan di pinggiran pantai wisata yang teduh dan dingin ini, di tambah lagi dengan permukaaan pesisir tepi

pantai wisata air panas wai platin yang bertaburan butir-butir pasir halus sehingga para pengunjung atau wisatawan bisa bersenang-senang di pinggir panatai seperti bermain bola dan volly pantai. Tetapi kekurangan dari hal ini adalah kurangnya ketersediaan fasilitas air seprti live jack/motor laut dan berbagai alat berenang air lainnya sehingga para wiatawan hanya masih bisa mengfungsikan permukaan pinggir pantai yang bertabur pasir ini untuk bermain-main saja.

B. Hasil Penelitian Tentang Persepsi Dan Preferensi Wisatawan

1. Persepsi wisatawan

Terbagi menjadi 3 aspek yaitu aspek kenyamanan, aspek keamanan dan aspek keindahan. Setiap aspek penilaian yang digunakan secara kualitatif berdasarkan persepsi wisatawan yaitu aspek kenyamanan (Sangat nyaman, Nyaman, Kurang Nyaman, tidak Nyaman dan sangat tidak nyaman), aspek keamanan (sangat aman, aman, kurang aman, tidak aman, sangat tidak aman) sedangkan untuk aspek keindahan (sangat Baik, Baik, kurang baik, tidak baikm sangat tidak baik) yang kesemunya dijabarkan pada tabel 2.

Tabel 2. Persepsi Wisatawan Terhadap Penataan Fasilitas

No	Indikator Penilaian	Persepsi					jumlah
	Aspek kenyamanan	**SN**	**N**	**KN**	**TN**	**STN**	
1	Ketersediaan fasilitas	0	3	23	25	12	**63**
2	Kebersihan fasilitas	0	0	37	19	7	**63**
3	Kapasitas/ukuran kapasitas	9	32	21	1	0	**63**
	Aspek keamanan	**SA**	**A**	**KA**	**TA**	**STA**	
4	Bentuk/struktur fasilitas	0	13	34	14	2	**63**
5	Keutuhan fasilitas	0	8	34	12	9	**63**
6	Material yang di gunakan	0	3	31	22	7	**63**
	Aspek keindahan	**SI**	**I**	**KI**	**TI**	**STI**	
7	Penataan fasilitas	0	3	29	26	5	**63**
8	Bentuk fisual fasilitas	0	4	51	8	0	**63**
9	Keterpeliharaan fasilitas	0	0	30	26	7	**63**

Sumber : Hasil Analisis

2. Preferensi wisatawan

Seperti hal nya dengan persepsi, aspek yang dijadikan sebagai penilaian preferensi wisatawan adalah fasilitas yang perlu diperbaiki dan juga fasilitas kawasan yang perlu ditambahkan. Penilaian – penilaian itu untuk fasilitas kawasan yang perlu diperbaiki (sangat penting diperbaiki, diperbaiki, tidak penting diperbaiki, dan sangat tidak penting di perbaiki) sedangkan untuk aspek yang ditambahkan (sangat penting di tambahkan, ditambahkan, tidak penting ditambahkan, sangat tidak penting ditambahkan) yang kesemuanya dijabarkan pada tabel 3.

Tabel 3. Preferensi Wisatawan Terhadap Penataan Fasilitas

No	Indikator Penilaian	Preferensi				Jumlah
	Di Perbaiki	**SPDP**	**DP**	**TPDP**	**STPDP**	
1.	Penataan fasilitas	27	36	0	0	63
2.	Bentuk/struktur fasilitas	41	18	2	2	63
3	Material yang di gunakan	35	24	3	1	63
4	Ketersediaan fasilitas pendukung	24	33	6	0	63
	Di Tambah	**SPDT**	**DT**	**TPDT**	**STPDT**	
5	Jumlah pekereja atau	21	28	9	5	63

	karyawan					
6	Jumlah fasilitas	43	18	2	0	63
7	Kapasitas atau ukuran fasilitas	22	23	11	7	63

Sumber : Hasil Analisis

C. Pembahasan

Hasil persepsi dan preferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas dari aspek keamanan menyatakan 12,04% aman, 51,03% kurang aman dan 28,35% tidak aman. dari aspek keutuhan fasilitasnya maupun konsep penataan sarana prasarananya menyatakan 8,02% Baik , 69,3% kurang Baik dan 20,8% menyatakan tidak Baik.

Hasil persepsi dan preferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas dari aspek perbaikan menyatakan 12,04% tidak penting di perbaiki, 51,03% penting di perbaiki dan 28,35% sangat penting di perbaiki. dari aspek perbaikan fasilitasnya maupun konsep penataa sarana prasarananya menyatakan 8,02% tidak penting di perbaiki, 69,3% penting di perbaiki dan 20,8% sangat penting di perbaiki.

Konsep penataaan fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin sebaiknya ada penambahan jenis sarana yaitu toko oleh-oleh, warung makan dan penginapan, selain itu di perlukan perbaikan jenis sarana seperti kolam renang dewasa dan anak, MCK, tempat loket karcis, arena permainan anak, dan pendopo/gazebo dan di tampilkan melalui desain gambar 3 dimensi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hasil Analisis Karakteristik Penataan Fasilitas Wisata

✓ Karakteristik penataan Fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin

Karakteristik penataan fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin di lihat dari dua macam karakter untuk menentukan sebuah konsep penataan fasilitas yaitu karakteristik tentang kondisi sarana prasarana wisata air panas dan karakteristik tentang wisatawan itu sendiri.

✓ *Kondisi sarana prasarana*

berdasarakan hasil analisis karakeristik penataan fasilitas wisata di objek wisata ai panas ini masih belum sempurna serta ketersediaan sarana prasarananya juga masih sangat terbatas. Jumlah sarana prasarana yang ada di Wisata Air Panas Wai Platin sekarang ini adalah untuk kolam renang ada 2 unit dengan kondisi kurang baik, gazebo/pendopo ada 8 unit dengan kondis kurang baik, untuk arena permainan anak 1 unit dengan kondisi kurang baik, dan toilet ada 2 unit dengan kondisi kurang bagus juga, lahan parkir untuk kendaraan pun kondisinya kurang bagus, di tambah lagi dengan loket pembelian karcis yang atapnya ada yang sudah lubang-lubang.

✓ *Kondisi wisatawan*

Kondisi kunjungan wisatawan ke Wisata Air Panas Wai Platin akhir-akhir tahun ini sangat menurun signifikan tercatat di tahun 2010-2012 penurunanya bisa mencapai 75 sampai 100 wisatawan setiap tahunnya termasuk wisatawan mancanegara atau wisatawan luar negeri. wisatawan yang berkunjung di Objek Wisata Air Panas Wai Platin ini bermacam-macam karakternya, jika di lihat dari faktor umur yang lebih dominan berkunjung di Wisata Air Panas Wai Platin ini adalah rata-rata yang berumur remaja dan para pemuda-pemudi.

Motifasi kunjungan untuk setiap kunjungan wisatawan yang datang di wisata air panas ini berbeda-beda, berdasarkan hasil surveyyang telah di lakukan dan hasil data kuisioner yang lebih banyak datang di Wisata Air Panas Wai Platin ini adalah dengan tujuan rekreasi saja. Dari hasil ini maka peneliti tahu arah dan tujuan untuk membuat

sebuah konsep penataan fasilitas dengan melihat motifasi kunjungan wisatawan yang sebenarnya.

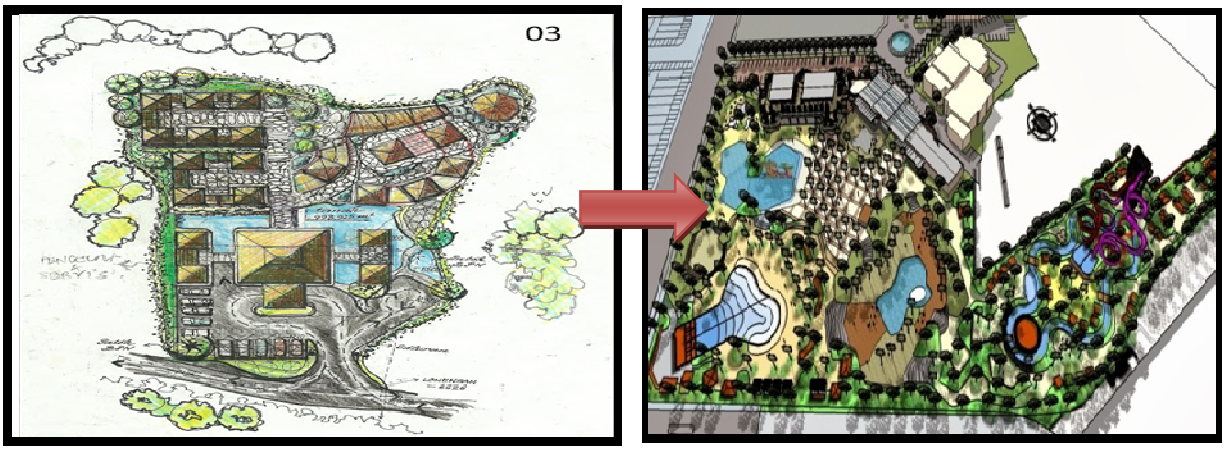
✓ *Persepsi dan preferensi wisatawan*

Persepsi wisatawan terhadap penataan fasilitas wisata adalah salah satu indicator yang sangat penting dalam membuat sebuah konsep penataan. Dari hasil analisis yang telah di buat berdasarkan persepsi dari wisatawan ini banyak wisatawan masih merasa belum puas dengan keadaan fasilitas yang ada di Wisata Pemandian Air Panas Wai Platin baik dari aspek kenyamanan seperti ketersediaan fasilitas, kebersihan fasilitas dan kapasitas/ukuran fasilitas.dari aspek keamanan seperti bentuk/struktur fasilitas, keutuhan fasilitas, dan material yang di gunakan. Sedangkan dasi aspek keindahan juga sama wisatawan masih merasa belum puas dengan keindahan fasilitas yang ada sekarang seperti penataan fasilitas, bentuk visual fasilitas dan keterpeliharaan fasilitas.

Preferensi wisatawan terhadap penataan fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin adalah bagaiman tingkat kepentingan wisatawan dalam memberikan pendapat mereka terhadap penataan fasilitas. Pendapat ini kemudian di cantumkan ke dalam sebuah pertanyaan kuisioner dengan 2 aspek yaitu aspek yaitu aspek perbaikan dengan criteria penilaiannya adalah Penataan fasilitas, Bentuk/struktur fasilitas, Material yang di gunakan, dan Ketersediaan fasilitas pendukung, untuk aspek ke dua adalah aspek penambahan dengan criteria penilaian seperti Jumlah tenaga kerja/karywan, Jumlah fasilitas, dan Kapasitas/ukuran fasilitas. dari hasil analisis preferensi wisatawan terhadap konsep penataan fasilitas wisata ini dengan melihat kedua aspek di atas masih banyak wisatawan memilih di tambah dan di perbaiki lagi untuk semua indicator yang tercantum.

2. *Konsep Penataan Fasilitas Wisata Air Panas Berdasarkan Persepsi Dan Preferensi Wisatawan*

Dari semua hasil analisis yang di buat berdasarkan persepsi dan preferensi wisatawan maka konsep penataan fasilitas Wisata Pemandian Air Panas Wai Platin adalah dapat di lihat pada layout berikut ini:



(A) (B)

Gambar 4. (A) Layout Eksisting, (B) Layout Hasil Konsep Penataan Lokasi fasilitas Wisata Air Panas Wai Platin

Dari hasil layout di atas terlihat cukup jelas perbandingan antara gambar layout eksisting (gambar 4 (A)) dan gambar layout konsep penataan (gambar 4 (B)). Gambar layout eksisiting sebelah kiri terlihat masih cukup sederhana persediaan fasilitasnya pun masih kurang sedangkan gambar sebelah kanan konsep penataannya sudah sangat bagus sekali fasilitasnya pun sudah tertatah dengan rapi mulai dari kolam

renangnnya,dan arena permainan anak, bahakan ada penambhan play groundnya.kolam renang anak juga di lengkapi dengan perosotan air.

B. Saran

1. Di harapkan agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam membangun kembali Wisata Air Panas Wai Platin ini agar bisa mempunyai nilai persaingan dengan wisata lain di Kabupaten Flores Timur dan di mata dunia.
2. Bagi masyarakat yang mempunyai modal atau pengusaha yang mempunyai modal di harapkan agar bisa mmengambil bagian atau pengalihan hak kuasa kepada swasta agar bisa mengelolah kembali Wisata Air Panas Wai Platin Ini.
3. Di harapkan agar masyarakat bisa antusias membantu mempromosikan wisata air panas ini baik melalui majalah, media maupun internet.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Informasi dan Komunikasi. 2012. *Profil Kabupaten Flores Timur 2012*. Larantuka. Dinas Informasi dan Komunikasi

Garbiel Amin Silalahi, BA., MBA., MDS. 2003. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus.* Jakarta. Citra Media

Hadinoto, K. 1996. *Peerncanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata.* Jakarta. Universitas Indonesia.

http://spiritentet.blogspot.com

Kodhyat H, 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta.Grasindo.

Marpaung, H. 2002. *Pengetahuan Kepariwisataan.* Bandung. Alfabeta.

Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta.. UI Press.

Moleong, Lexy J, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Spillance,J.1987. *Pariwisata Indonesia.* Yogyakarta.Kanisius.

Suwantoro, G. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata.* Yogyakarta. Andi

Suwantoro, Gamal, 1997. *Dasar-dasar Pariwisata.* Yogyakarta. ANDY.

Wardiyanto dan Baiquni, M. 2011. *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata.* Bandung. Lubuk Agung.

Yoeti, H. Oka A. 1996. *Pengantar Pariwisata.* Bandung. Angkasa.

Rustam, 2012. *Kriteria Penilaian Persepsi Dan Preferensi.* Jakarta.

Penentuan Rute Potensial Sarana Angkutan Umum Massal Berbasis Analisis Sistem Informasi Geografis di Kawasan Perkotaan Mamminasata

Ahmad Aulia Bahrun Amieq[1], Ananto Yudono[1], Arifuddin Akil[1], M. Fathien Azmy[1]

[1]Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar
Email: amieq.azmy@gmail.com ; yudono69@gmail.com ; arifuddinak@yahoo.co.id ; fathienazmy@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan Mamminasata sebagai Kota Metropolitan meningkatkan kebutuhan perjalanan. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai, mengakibatkan kemacetan yang tidak terkendali. Mamminasata telah dilayani oleh SAUM Bus Rapid Transit (BRT), namun pengembangan rute belum mewakili permintaan masyarakat, sebab 70 persen masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktifitas. Penlitian ini bertujuan untuk; 1) mengidentifikasi faktor-faktor penentu rute potensial SAUM; 2) mengidentifikasi persebaran pusat-pusat kegiatan; 3) menentukan koridor rute potensial SAUM di Mamminasata. Data penilitian berupa data primer yang diperoleh dari observasi lapangan dan hasil survey OD, sedangkan data sekunder diperoleh melalui NSPM, literatur, dan penelitian terdahulu serta instansi yang terkait. Teknik analisis menggunakan matriks asal-tujuan, analisis korelasi spearman, dan analisis berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) yakni kernel density, desire line, dan network analyst. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) faktor-faktor yang berkorelasi signifikan dengan intensitas rute merupakan bangkitan, tarikan, dan maksud perjalanan; 2) kecenderungan pola pergerakan menunjukkan pusat perkantoran pemerintah, pusat ekonomi dan bisnis, pusat pendidikan, pusat perbelanjaan dan hiburan, pusat rekreasi, dan pusat permukiman. Terdapat 41 ruas jalan yang dominan melayani perjalanan di Mamminasata. Jaringan jalan tersebut terbagi atas lima prioritas rute potensial, terdapat enam ruas jalan yang menjadi prioritas pertama; 3) sehingga ditemukan 9 koridor SAUM yang melayani pergerakan dari pusat permukiman menuju ke pusat kegiatan lainnya (Koridor 1, 2, 4, 6, 9), pergerakan komuter dari kabupaten sekitar menuju ke kota inti (Koridor 3, 7, 8) dan melayani pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di kawasan pusat kota (Koridor 5).

Kata kunci: SAUM, SIG, Mamminasata, Asal-Tujuan, Pola Pergerakan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Kota Makassar sebagai kota inti Kawasan Mamminasata menarik pergerakan dari dalam kota, suburban, serta kawasan sekitarnya (maros, sungguminasa, takalar) meningkatkan permintaan perjalanan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang tidak terkendali. Menurut Tamin (2000:29) kemacetan yang sering terjadi di kota besar di Indonesia biasanya timbul karena kebutuhan akan transportasi lebih besar daripada prasarana transportasi yang tersedia, atau prasarana tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mamminasata telah dilayani oleh SAUM Bus Rapid Transit (BRT) yang telah beroperasi sejak 2014. Namun 70 persen masyarakat Makassar masih memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas (Dithubdar, 2003).

Ruang lingkup penelitian ini terkait identifikasi rute potensial SAUM BRT berdasarkan faktor yang menentukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan rute potensial SAUM BRT berdasarkan pola persebaran penduduk, tata guna lahan, pola pergerakan, persebaran pusat kegiatan, dan karakteristik jaringan jalan yang kemudian dianalisis secara spasial berbasis SIG.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif berdasarkan perhitungan melalui *software* SIG.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari observasi lapangan dan hasil survey asal-tujuan, sedangkan data sekunder melalui NSPM, literatur, dan penelitian terdahulu serta instansi yang terkait. Data primer dari penelitian ini adalah asal dan tujuan pergerakan, waktu pergerakan, maksud perjalanan, penggunaan lahan, pusat-pusat kegiatan, dan jaringan jalan. Sedangkan data sekunder adalah, peta dasar lokasi, dokumen RTR Kawasan Metropolitan Mamminasata, data kependudukan, data koridor BRT, dan kajian literatur. Populasi pada penilitian ini adalah masyarakat yang melakukan perjalanan di Mamminasata. Diasumsikan bahwa yang melakukan perjalanan adalah yang berusia produktif (15-64 tahun). Jumlah sampel ditentukan berdasarkan Krecjie & Morgan dalam *Determining sample size for research activities* dengan tingkat kesalahan 5%.

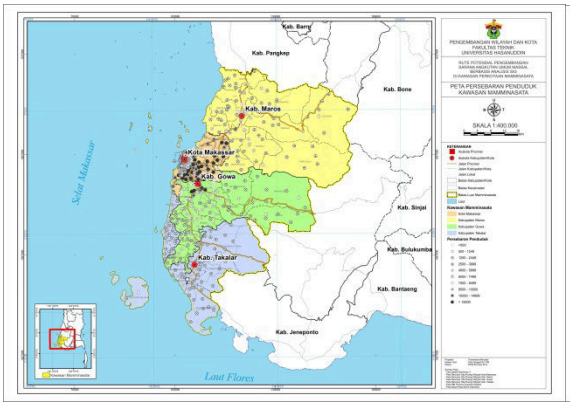
C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan Matriks Asal-Tujuan (MAT) merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi pola pergerakan. Terdapat tiga jenis analisis menggunakan *software* SIG diantaranya; 1) *Kernel Density* untuk mengetahui persebaran dan kepadatan penduduk berdasarkan spasial (Handayani, 2000); 2) *Desire Line (*garis keinganan) menunjukkan arah pergerakan arus lalulintas, menggambarkan ketebalan garis menunjukkan jumlah arus kendaraan dan panjang garis menunjukkan jarak antarzona yang dihubungkan; dan 3) *Network Analyst* yang digunakan dalam menentukan rute potensial SAUM di Mamminasata (ESRI, 2010).

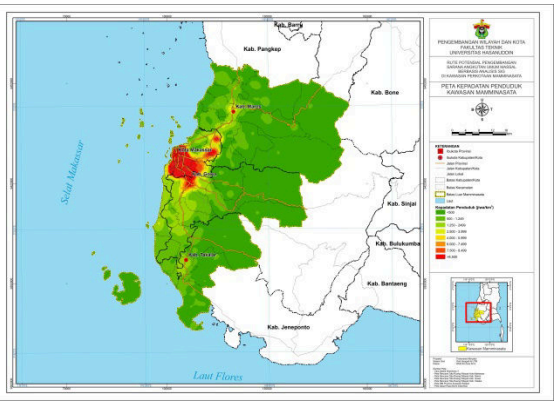
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kawasan Mamminasata tersebar pada 46 kecamatan yang kemudian terbagi pada 422 kelurahan/desa. Persebaran penduduk direpresentasikan menggunakan titik *graduated symbol*. Jadi apabila *symbol* memiliki warna semakin tebal maka penduduk yang berada di lokasi tersebut semakin besar (gambar 1). Titik persebaran tersebut melalui *tool kernel density* secara otomatis mencari kerapatan dan besaran nilai suatu titik dengan radius 250 m,yang menghasilkan peta kepadatan penduduk (gambar 2).



Gambar 1. Peta persebaran penduduk Mamminasata



Gambar 2. Peta kepadatan penduduk Mamminasata

Berdasarkan hasil perhitungan kernel density yang tampak pada peta kepadatan penduduk (gambar 2), kepadatan penduduk terkonsentrasi pada wilayah yang terdekat dengan pusat kota inti (Kota Makassar), adapun kepadatan tinggi juga tersebar pada pusat-pusat permukiman Kota Makassar diantaranya Kawasan Gunung Sari, Kawasan Tamalanrea, dan Kawasan Sudiang. Kepadatan tinggi juga tampak pada pusat kota Kabupaten Gowa. Sedangkan pada kota sekitar, kepadatan terlihat sedang pada bagian pusat kota kab. Takalar dan Kab. Maros.

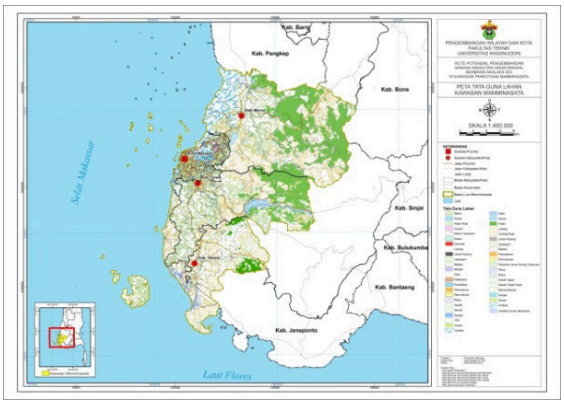
B. Pola Penggunaan Lahan

Jenis pemanfaatan lahan yang mempunyai aktivitas tinggi memberikan kontribusi besar terhadap arus lalu lintas diantaranya adalah pemukiman, perdagangan & jasa, pendidikan dan area publik.. Pemanfaatan lahan tersebut memiliki potensi *travel demand* yang tinggi sehingga mempengaruhi bangkitan dan tarikan di Mamminasata (Gambar 4).

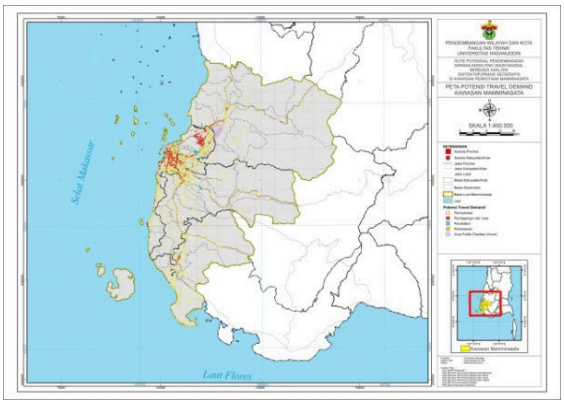
Tabel 1. Luas Lahan Potensi *Travel Demand* di Mamminasata

Kota/ Kabupaten	Luas (Ha)					
	Permu-kiman	Perdaga-ngan dan jasa	Perkan-toran	Pendi-dikan	Area Publik (Fasilitas Umum)	Jumlah
Makassar	6.653,65	1.166,64	89,44	237,81	417,79	8.565,34
Gowa	5.039,28	234,83	18,25	53,04	54,39	5.399,79
Maros	3.346,39	114,36	9,92	12,55	688,98	4.172,21
Takalar	969,04	94,89	8,79	10,14	30,79	1.113,66
Jumlah	16.008,36	1.610,72	126,40	313,55	1.191,96	19.250,99

Tabel di atas menunjukkan pemanfaatan lahan dengan potensi *travel demand* yang tinggi terbesar di Kota Makassar sebagai Kota Inti Kawasan Perkotaan Mamminasata. Selanjutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Takalar. Dengan kecendurungan fungsi lahan terbesar secara berturut-turut adalah permukiman, perdagangan dan jasa, area publik, pendidikan hingga perkantoran (Gambar 5).



Gambar 4. Peta penggunaan lahan Mamminasata

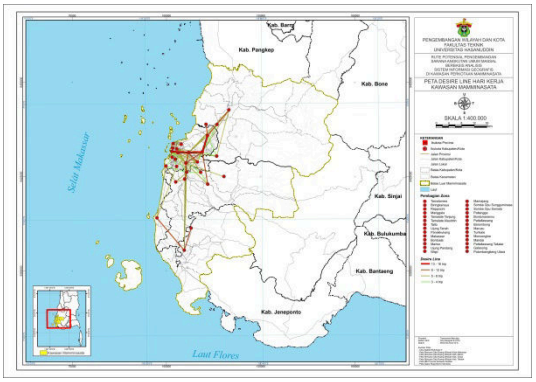


Gambar 5. Peta potensi bangkitan tarikan Mamminasata

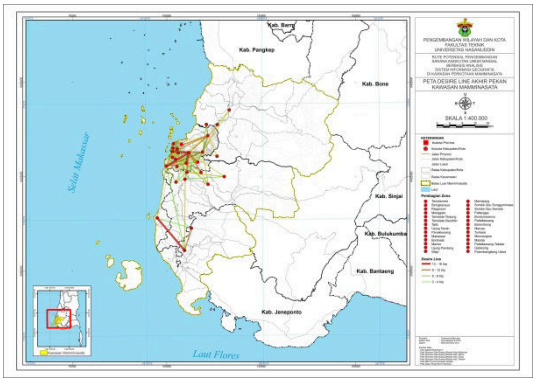
C. *Pola Pergerakan*

Identifikasi pola pergerakan dilakukan dengan membagi wilayah penelitian menjadi 28 zona yang ditentukan berdasarkan potensi bangkitan dan tarikan pergerakan serta jaringan jalan utama yang melayani. Berdasarkan data pola pergerakan, ditemukan bahwa pada hari kerja, pergerakan terbesar adalah yang berasal dari dan menuju zona 9 yakni kecamatan panakkukang dengan bangkitan 9,4 % dan tarikan 9,7 %.

Pergerakan terendah berasal dan menuju Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dengan bangkitan 0,7% dan tarikan 0,8%. Terdapat pergerakan dalam zona yang cukup tinggi, diantaranya zona 1 (Tamalanrea) 13 trip, zona 2 dan 4 (Biringkanaya dan Manggala) 10 trip, dan zona 9 (Panakkukang) 9 trip. Pada akhir pekan, pergerakan terbesar adalah pergerakan yang berasal dari dan menuju zona 9 yakni kecamatan panakkukang dengan jumlah 23 %. Pergerakan terendah terjadi berasal dan menuju Kecamatan Polombangkeng Kabupaten Takalar dengan jumlah 0,7 %.T erdapat pergerakan dalam zona yang cukup tinggi dari beberapa zona, diantaranya zona 9 (Tamalanrea) 20 trip, zona 7 (Tallo) 10 trip, dan zona 18 (Pallangga) 8 trip.



Gambar 6. Peta *Desire Line* hari kerja



Gambar 7. Peta *Desire Line* akhir pekan

Kecenderungan pergerakan pada hari kerja berasal dari permukiman di wilayah suburban menuju zona dengan fungsi-fungsi lahan pemerintahan, perkantoran swasta dan pendidikan. Tampak pada peta pola pergerakan dominan terjadi berurutan pada zona 23, zona 25, zona 2, zona 1, zona 9. dan zona 13 (Gambar 6). Pada akhir pekan, pola pergerakan yang terjadi cenderung menyebar ke beberapa zona dominan yang merupakan kawasan permukiman dengan zona-zona yang memiliki fungsi lahan komersil dan rekreasi. Zona tersebut diantaranya zona 5, zona 9, zona 13, dan zona 15 (Gambar 7).

D. Persebaran Pusat-pusat Kegiatan

Berdasarkan kecenderungan pada data pekerjaan, maksud dan lokasi tujuan perjalanan, kemudian dilakukan pengklasifikasian untuk menunjukkan pusat-pusat kegiatan utama. Persebaran pusat-pusat kegiatan kemudian menjadi dasar penentuan jaringan jalan yang menjadi penghubung kegiatan di Kawasan Perkotaan Mamminasata. Penentuan jaringan jalan tersebut berdasarkan *Network Analyst*.

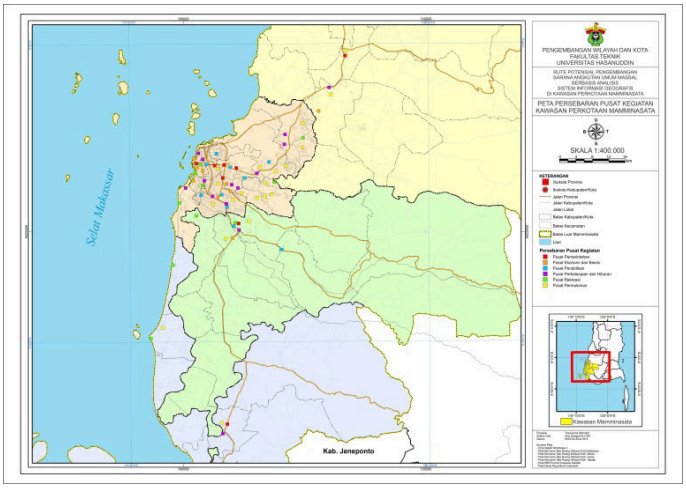
Pusat kegiatan diklasifikasikan menjadi enam jenis, diantaranya, pusat pemrintahan untuk PNS dengan maksud perjalanan bekerja; pusat ekonomi dan bisnis untuk maksud perjalanan bekerja dan pertemuan (*meeting*); pusat pendidikan untuk maksud perjalanan sekolah dan kuliah; pusat perbelanjaan dan hiburan untuk maksud perjalanan belanja, makan, dan jalan-jalan; pusat rekreasi untuk maksud rekreasi dan olahraga; serta pusat permukiman untuk maksud perjalanan pulang dan berkunjung.

Tabel 2. Pengklasifikasi Pusat Kegiatan Berdasarkan Jumlah Perjalanan

Zona	Kecamatan	Pusat Pemerinta-han	Pusat Ekonomi dan Bisnis	Pusat Pendidi-kan	Pusat Perbelanjaan dan Hiburan	Pusat Rekreasi	Pusat Permukiman
1	Tamalanrea	7	7	9	29	12	39
2	Biringkanaya	3	14	1	20	10	43
3	Rappocini	11	37	2	20	3	24
4	Manggala	1	7	1	13	9	39
5	Tamalate 1	2	18	0	48	11	13
6	Tamalate 2	2	6	1	4	1	14
7	Tallo	0	6	2	6	2	16

Zona	Kecamatan	Pusat Pemerinta-han	Pusat Ekonomi dan Bisnis	Pusat Pendidi-kan	Pusat Perbelanjaan dan Hiburan	Pusat Rekreasi	Pusat Permukiman
8	Ujung Tanah	0	10	1	13	2	15
9	Panakkukang	17	30	5	81	2	33
10	Bontoala	1	6	7	5	0	18
11	Makassar	20	9	0	3	3	8
12	Mariso	0	3	0	8	4	8
13	Ujung Pandang	20	24	0	30	50	2
14	Wajo	1	21	0	32	2	1
15	Mamajang	1	7	0	26	1	4
16	Somba Opu 1	14	10	1	27	10	17
17	Somba Opu 2	2	3	0	13	7	16
18	Pallangga	5	5	0	22	7	17
19	Bontomarannu	1	2	9	3	5	11
20	Pattallassang	0	3	0	5	3	22
21	Barombong	0	3	0	8	10	18
22	Marusu	0	4	0	3	1	16
23	Turikale	11	5	0	7	3	17
24	Moncongloe	1	3	0	0	4	19
25	Mandai	1	1	1	7	2	12
26	Pattallassang	7	11	0	18	4	18
27	Galesong	2	13	0	7	10	21
28	Polombangkeng	0	1	0	2	2	17
	Jumlah	130	269	40	460	180	494

Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, kemudian dilakukan pemilihan pusat-pusat kegiatan yang menjadi prioritas berdasarkan dominasi asal-tujuan. Prioritas pusat kegiatan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menentukan arah pengembangan rute potensial SAUM di Kawasan Perkotaan Mamminasata (gambar 8).



Gambar 8. Peta Persebaran Pusat Kegiatan di Mamminasata

E. Penentuan Koridor Rute Potensial SAUM BRT Mamminasata

1. Jaringan Jalan Potensial

Jaringan jalan yang melayani pergerakan di Mamminasata ditentukan berdasarkan asal-tujuan pergerakan dengan asumsi masyarakat mengetahui dan melalui rute terpendek. Jaringan jalan tersebut diseleksi berdasarkan yang melayani pusat-pusat kegiatan prioritas.Kemudian diidentifikasi berdasarkan kriteria yang menentukan rute potensial SAUM, diantaranya, (1) jaringan jalan penghubung antar pusat perkotaan di Mamminasata; (2) jaringan jalan penghubung pusat-pusat kegiatan; (3) Intensitas penggunaan jalan; (4) banyaknya lajur dari setiap jalur.

Keempat kriteria yang telah diidentifikasi kemudian dilakukan pembobotan dengan ketentuan masing-masing adalah kriteria (1), (2), dan (3) dinilai dengan skala ordinal, apabila ya akan diberi nilai 1, dan tidak diberi nilai 0. Pada kriteria (4),

dilakukan pembobotan menjadi 3 tingkatan, intensitas tinggi dengan nilai 2, sedang dengan nilai 1, dan rendah 0.

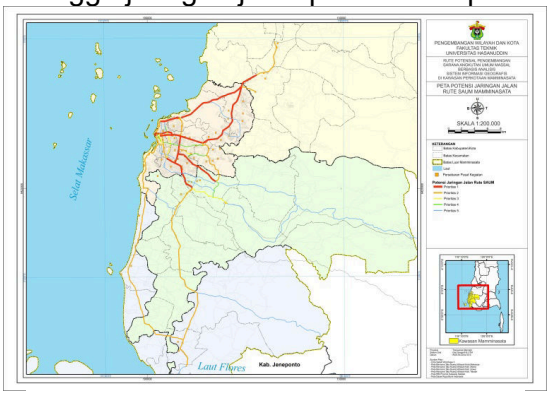
Tabel 3. Kriteria Jaringan Jalan di Mamminasata

No.	Nama Ruas Jalan	Penghubung Pusat Perkotaan	Penghubung Pusat Kegiatan	Intensitas Penggunaan Jalan	Banyaknya Lajur dari Setiap Jalur
1.	Jl. Poros Makassar-Maros	1	1	83	2
2.	Jl. Sultan Hasanuddin (Poros Sungguminasa)	1	1	157	2
3.	Jl. Poros Sungguminasa-Takalar	1	1	151	1
4.	Jl. Poros Galesong-Jl.Barombong-Jl. Tanjung Merdeka	1	1	71	1
5.	Jl. Bonto manai	0	1	12	1
6.	Jl. A. Tonro Gowa-Jl. Mustafa Dg. Bunga	0	1	35	1
7.	Jl. Hertasning-Jl. Tun Abd. Razak	1	1	118	2
8.	Jl. Abd. Kadir- Jl. Tamangapa Raya-Jl. Antang Raya-Jl. Dr. Leimena	1	1	77	1
9.	Jl. Perintis Kemerdekaan	1	1	218	3
10.	Jl. Sultan Alauddin	1	1	110	2
11.	Jl. Tol Ir. Sutami-Jl. Tol Reformasi	1	1	21	3
12.	Jl. Urip Sumoharjo	1	1	263	3
13.	Jl. Jend. Sudirman-Jl. Dr. Sam Ratulangi	0	1	37	2
14.	Jl. AP Pettarani	1	1	172	4
15.	Jl. Veteran Selatan-Jl. Veteran Utara-Jl. Bandang	1	1	20	2
16.	Jl. Ahmad Yani-Jl. G. Bulusaraung-Jl. Mesjid Raya	1	1	123	4
17.	Jl. G. Bawakaraeng-Jl. Kartini	1	1	89	4
18.	Jl. Haji Bau	1	1	19	4
19.	Jl. Nusantara	1	1	30	2
20.	Jl. Metro Tanjung Bunga	1	1	57	2
21.	Jl. Pasar Ikan-Jl. Ujung Pandang-Jl. Penghibur	1	1	46	3
22.	Jl. Poros Malino	0	1	42	1
23.	Jl. Malengkeri-Jl. Dg. Tata	0	1	23	1
24.	Jl. Abd. Dg. Sirua	0	1	49	1
25.	Jl. Landak	0	1	9	1
26.	Jl. Bontolempangan-Jl. Arif Rate	0	1	44	2
27.	Jl. Boulevard	0	1	39	2
28.	Jl. Cendrawasih	0	1	18	1
29.	Jl.Pengayoman	0	1	22	2
30.	Jl. Sultan Hasanuddin-Jl. Slamet Riyadi	0	1	34	2
31.	Jl. Todopuli Raya	0	1	32	1
32.	Jl. Ujung Bori-Jl. Borong Raya-Jl. Batua Raya	0	1	22	1
33.	Jl. Kima Raya	0	1	10	2
34.	Jl. Tamalanrea Raya	0	1	42	1
35.	Jl Paccerakkang	0	1	17	1
36.	Jl. Sunu	0	1	11	1
37.	Jl. Tentara pelajar	0	1	14	2
38.	Jl. Sulawesi	0	1	11	2
39.	Jl. Poros Macanda	0	1	22	1
40.	Jl. HM. Yasin Limpo	0	1	28	1
41.	Jl. Adhyaksa	0	1	11	1

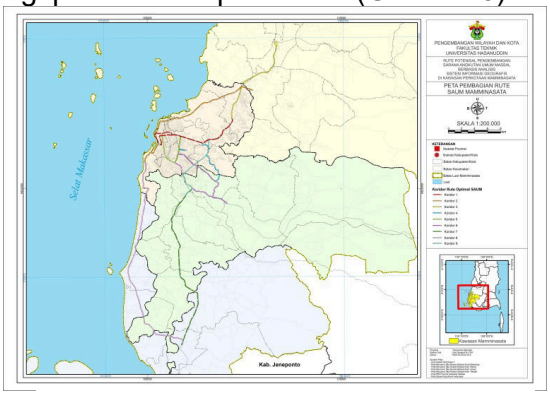
Berdasarkan karakteritik diatas diketahui bahwa, terdapat 41 ruas jalan yang dominan melayani perjalan,18 diantaranya merupakan jalan penghubung antar pusat perkotaan di mamminasata, keseluruhan ruas jalan merupakan penghubung antar pusat kegiatan. Intensitas penggunaan jalan paling tinggi merupakan Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. AP. Pettarani. Banyaknya lajur pada setiap ruas jalan jumlah terbesar adalah empat dan terkecil adalah satu. Hasil perhitungan tersebut kemudian di konversi ke dalam peta jaringan jalan potensial berikut (Gambar 5).

2. *Koridor Rute Potensial BRT SAUM di Mamminasata*

Pembagian rute SAUM, dilakukan dengan teknik overlay dari peta jaringan jalan potensial dengan *desire line* (menunjukkan kecenderungan pola pergerakan). Sehingga jaringan jalan potensial dapat terbagi pada beberapa koridor (Gambar 6).



Gambar 9. Peta Potensi Jaringan Jalan sebagai Rute SAUM



Gambar 10. Peta Pembagian Koridor Rute SAUM BRT Mamminasata

Overlay beberapa faktor tersebut meng-hasilkan delapan koridor rute optimal, diantaranya; 1) tiga koridor melayani pergerakan dari pusat-pusat permukiman menuju ke pusat kegiatan lainnya dan sebaliknya (Koridor 1, 2, 4, 6); 2) tiga koridor lainnya melayani pergerakan komuter dari kabupaten sekitar menuju ke kota inti. (Koridor 3, 7, 8); 3) satu koridor melayani pergerakan yang meng-hubungkan pusat-pusat kegiatan di kawasan pusat kota (Koridor 5).

IV. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Faktor-faktor yang berkorelasi signifikan dengan intensitas rute berdasarkan analisis korelasi spearman merupakan bangkitan, tarikan, dan maksud perjalanan; 2) Kecenderungan pola pergerakan menghasilkan pusat perkantoran pemerintah, pusat ekonomi dan bisnis, pusat pendidikan, pusat perbelanjaan dan hiburan, pusat rekreasi, dan pusat permukiman. Terdapat 41 ruas jalan yang dominan melayani perjalanan, 18 diantaranya merupakan jalan penghubung antar pusat perkotaan di mamminasata. Intensitas penggunaan jalan paling tinggi merupakan Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Perintis Kemerdekaan, dan Jl. AP. Pettarani. Banyaknya lajur pada setiap ruas jalan jumlah terbesar adalah empat dan terkecil adalah satu; 3) Jaringan jalan terbagi atas lima prioritas, terdapat enam ruas jalan yang menjadi prioritas pertama. Sehingga ditemukan 9 koridor SAUM yang melayani pergerakan dari pusat permukiman menuju ke pusat kegiatan lainnya (Koridor 1, 2, 4, 6, 9), pergerakan komuter dari kabupaten sekitar menuju ke kota inti (Koridor 3, 7, 8) dan melayani pergerakan menghubungkan pusat-pusat kegiatan di pusat kota (Koridor 5).

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Perhubungan Darat.. 2002. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur. Departemen Perhubungan RI

Esri, 2010. *Network Analyst Tutorial*.

Handayani, Wiwandari, 2000. Dinamika Persebaran Penduduk Jawa Tengah: Perumusan Kebijakan Perwilayahan Dengan Metode *Kernel Density*

Tamin. Ofyar Z. 2000. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Bandung: Penerbit ITB

Identifikasi Pengaruh Infrastruktur Transportasi Terhadap Gejala Peri Urbanisasi Studi Kasus Pulau Jawa

Hadiyan Wijaya[1], Delik Hudalah[1]
[1]Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan kebijakan,
Institut Teknologi Bandung
Email: wijayahadiyan@gmail.com; d.hudalah@sappk.ib.ac.id

Abstrak

Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sebagai infrastruktur yang menjadi satu salah satu kebijakan utama dalam pemerintahan Jokowi. Secara umum pengembangan infrastruktur memiliki dampak terhadap perubahan wilayah, hal ini dilihat melalui perubahan wilayah peri urban sebagai batas antara perkotaan dan perdesaan dengan karakteristik menjadi bersifat lebih mengkota atau dapat disebut dengan fenomena peri urbanisasi. Peran infrastruktur terutama bagian transportasi sebagai penunjang aksesibilitas penduduk terhadap kegiatan pada umumnya maupun pendukung produktivitas bagi kegiatanindustri.Penelitian ini secara sederhana mengkategorikan kabupatendan kota berdasarkan sektor kegiatan mayoritasnyasebagai indikator wilayah peri urban.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi jalan saja belum cukup signifikan sebagai variabel yang menentukan tingkat peri urbanisasi yang terjadi dalam suatu wilayah.

Kata kunci: infrastruktur transportasi jalan, peri urban, peri urbanisasi

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat menerapkan pembangunan infrastruktur sebagai arah kebijakan yang menjadi prioritas. Dalam kebijakan tersebut direncanakan pembangunan infrastruktur penghubung kota-kota strategis di Pulau Jawa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berupa peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur jalan tol di sepanjang Pulau Jawa sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Negara Indonesia. Tol yang dibangun untuk menghubungkan kota-kota disepanjang Jalan Raya Pantura ini dikenal dengan sebutan Tol Trans Jawa. Infrastruktur vital ini dibangun untuk menghubungkan kota-kota dari ujung Timur hingga ujung Barat Pulau Jawa sehingga tercipta akses yang memadai diantara pusat-pusat kegiatan.

Pembangunan infrastruktur pengubung antar wilayah erat kaitanya dengan perubahan yang terjadi di sepanjang wilayah yang dilalui oleh infrastruktur. Perubahan yang terjadi di sepanjang wilayah perlaluan tersebut menjadi bersifat lebih kota. Hal ini disebabkan karena kedekatan terhadap akses yang diberikan oleh infrastruktur menjadi faktor pendorong perubahan yang terjadi yakni kecenderungan pembangunan mengarah menuju infrastruktur jalan utama sebagai faktor penarik. Hal ini telah menjadi karakteristik tersendiri bagi pertumbuhan perkotaan di Asia yang bersifat tumbuh secara pesat di wilayah peri-urban dan bersatunya koridor perkotaan antar kota besar (Firman dan Dharmaptani, 1995). Selain itu pembangunan infrastruktur terutama transportasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh pihak industri yang mengutamakan peningkatan produktivitas dengan terbukanya akses terhadap bahan baku, energi, dan pasar (Dmurger, 2001). Hal-hal ini menarik kegiatan untuk berlokasi di lokasi yang memiliki akses yang baik sehingga secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan peningkatan aktivitas terutama industri, pedagangan dan jasa di wilayah tersebut.

Di Negara berkembang peri-urbanisasi terjadi dengan sangat pesat, Dalam dua dekade yang akan datang jumlah penduduk Peri urban akan bertambah sebesar 200

juta atau memberikan tambahan sebesar 40% penduduk peri urban (Webster, 2002). Peri-urbanisasi yang terjadi di Asia timur dibedakan dari wilayah lainnya karena perubahan sosial-ekonomi yang pesat dari kehidupan perdesaan menjadi perkotaan. Sementara itu terjadi pula kehadiran fisik yang dinamis akibat keterkaitan fungsional perkotaan dan perdesaan (Hudalah, Winarso, dan Woltjer, 2007). Hal ini dipicu dengan maraknya pembangunan di wilayah peri-urban sebagai hasil dari pertumbuhan jaringan terhadap kapitalisme global (goldblum dan Wong, 2000; Leaf, 2002 dalam Hudalah, Winarso, dan Woltjer, 2007)

Dalam kasus pengembangan pariwisata, pengembangan sektor ekonomi tersebut dapat menjadi sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Pertumbuahan ekonomi ini masuk ke wilayah-wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah desa maupun peri urban melihat pengembangan wisata yang ada sebagian besar mengandalkan keindahan alam dan lingkungan yang eksotis. Hal ini memicu tumbuhnya pelayanan yang mendukung penembangan pariwisata tersebut seperti sektor perdagangan, jasa perjotelan dan sektor industri kerajinan. Pengembangan kepariwisataan mendukung terjadinya proses peri urbanisasi yang terjadi di Indonesia.

Pengembangan kepariwisataan ini selayaknya didukung oleh pengembangan infrastruktur terutama yang mendukung akses terhadap objek wisata sehingga objek tersebut dapat diakses oleh wisatawan. Dalam hal ini infrastruktur transportasi dianggap memiliki peran terhadap pengembangan wisata dan pengembangan wilayah pada umunya sehingga terjadi proses peri urbanisasi yang lebih tinggi akibat adanya pertumbuhan ekonomi yan gdipicu oleh ketersediaan akses terhadap wilayah tersebut.

Makalah ini disusun menjadi empat bagian yakni pendahuluan yang berisi pengantar dan kerangka tulisan, bagian kedua adalah mertoda yang berisi dasar teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, bagian ketiga adalah hasil dan pembahasan, bagian keempat adalah kesimpulan yang berisi keluaran dari penelitian.

II. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK WILAYAH PERI URBAN

Yang dimaksud dengan wilayah peri urban menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Wilayah Peri urban

No	Sumber	Definisi Peri urban
1	Pryor (1968)	Zona transisi dalam hal karakteristik penggunaan lahan, sosial, dan demografi yang terbentang antara (a) wilayah lanjutan pembangunan area perkotaan dari pusat kota dan (b) wilayah pendukung yang bersifat perdesaan.
2	McGee (1991)	Wilayah yang berada di sekitar kota yang berada dalam jangkauan *commuting* sehari-hari dari pusat kota
3	Direktorat Jenderal Penataan Ruang-PU (2006)	Kawasan yang terdapat di sekitar kota besar atau metropolitan yang memiliki karakteristik secara umum penggunaan lahan yang campur aduk antara pertanian dan non-pertanian.
4	Zhao et.al. (2007)	Peri urban merupakan wilayah penghubung antara area perkotaan dengan perdesaan.
5	Winarso et.al (2008)	Wilayah peri urban secara umum didefinisikan sebagai zona transisi yang terletak pada lapisan kulit luar kota adminsistrasi yang memiliki karakteristik perdesaan dan perkotaan
6	Yunus (2008)	Wilayah peri urban merupakan wilayah yang terletak

No	Sumber	Definisi Peri urban
		di antara dua wilayah yang memiliki kenampakan perkotaan di satu sisi dan kenampakan kedesaan di sisi yang lain

Sumber: Pryor (1968), McGee (1991), Direktorat Jenderal Penataan Ruang-PU (2006), Zhao et.al. (2007), Winarso et.al (2008), Yunus (2008)

Berdasarkan definisi peri urban yang telah ditinjau maka dapat didefinisikan kembali bahwa yang dimaksud dengan wilayah peri urban adalah wilayah yang terletak berdekatan atau di sebelah kota administrasi yang memiliki keterkaitan yang erat dengan pusat kota serta memiliki karakteristik perdesaan dan perkotaan. Sedangkan karakteristik yang digunakan untuk menentukkan wilayah peri urban secara terukur digunakan ciri demografi dan ekonomi sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Wilayah Peri Urban

No	Aspek	Karakteristik Peri urban
1	Demografi	a. **Tenaga kerja** yang terdapat pada wilayah peri urban menyesuaikan dengan ragam aktivitas perdesaan dan perkotaan di wilayah tersebut b. Memiliki **kepadatan penduduk** yang lebih rendah dibandingkan perkotaan serta lebih padat dibandingkan perdesaan
2	Ekonomi	c. Wilayah peri urban memiliki **aktivitas** perdesaan dan perkotaan

Sumber: Pryor (1968), Yunus (2008), Ravetz, J. (2012)

Tingkat peri urbanisasi wilayah peri urban dimana terdapat aktivitas campuran kekotaan dan kedesaan di sana dapat dilihat berdasarkan proporsi kegiatan di wilayah tersebut. Semakin tinggi aktivitas kekotaan di sana maka semakin tinggi pula tingkat kekotaan di di wilayah peri urban tersebut. Aktivitas kekotaan dari sisi ekonomi dan tenaga kerja dilihat dari proporsi pendapatan dan tenaga kerja di sektor industri, perdagangan dan jasa yang bersifat heterogen sebagai ciri kekotaan. Sedangkan dari karakteristik kepadatan penduduk, wilayah peri urban memiliki kepadatan yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan.

III. METODE

Studi dilakukan pada wilayah Pulau Jawa diawali dengan mengidentifikasi wilayah yang termasuk dalam kategori peri urban. Pengkategorian wilayah peri urban dilakukan menggunakan indikator proporsi pendapatan daerah dan tenaga kerja tiap sektor serta kepadatan penduduk relatif terhadap wilayah disekitarnya. Kemudian setiap indikator diberikan bobot yang sama sebagai indikator wilayah peri urban. Untuk proporsi sektor yang mencerminkan ciri kedesaan dikalikan 0 sedangkan yang mencerminakan ciri kekotaan dikalikan dengan 1. Kemudian proporsi ciri kekotaan dan kedesaan tiap indikator peri urban diklikan dengan 33.33%, hal ini dilakukan karena indikator yang digunakan sebanyak 3 buah dan nilai maksimal yang akan dicapai adalah 100 dengan pembagian kategori wilayah ke dalam 5 kelas yakni desa (skor <=20%), Peri urban 1 (20%<skor<=40%), peri urban 2 (40%<skor<=60%), peri urban 3 (60%<skor<=80%), dan kota (skor<80%). Hasil dari analisi ini mengkategorikan wilayah peri urban di Pulau Jawa ke dalam 3 kelas yakni peri urban 1 (Potential urban) , peri urban 2 (semi urban), dan peri uban 3 (dominantly urban)

Analisis berikutnya adalah proses identifikasi faktor penyebab terjadinya proses peri urbanisasi. Infrastruktur transportasi yang digunakan sebagai variabel prediktor utama adalah panjang jalan. Hipotesis yang digunakan adalah semkin panjang jalan

yang terdapat dalam suatu wilayah maka akses terhadap wilayah tersebut semakin terbuka, sehingga semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut terutama dalam di sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai aktivitas yang mencirikan kekotaan. Metoda analisis yang digunakan untuk mengetahui signifikansi faktor peri urbanisasi adalah meroda analisis regresi sehingga signifikansi dan koefisien variabel prediktor dapat digunakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai untuk tiap indikator karakteristik wilayah peri urban sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik tiap kelompok wilayah peri urban

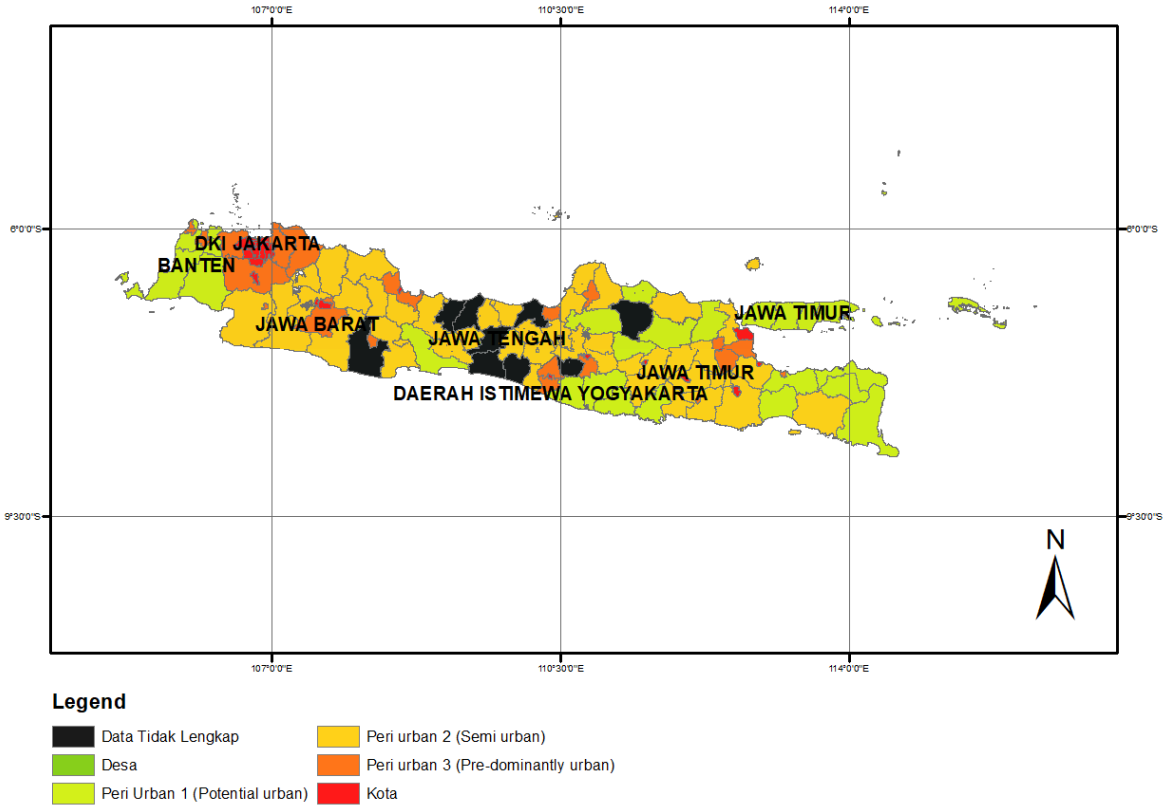
Kategori	Peri urban 1 (potential urban)	Peri urban 2 (semi urban)	Peri urban 3 (pre dominantly urban)
Proporsi PDRB sektor primer	43%	26%	7%
Proporsi PDRB sektor sekunder	21%	33%	48%
Proporsi sektor tersier	36%	46%	46%
Proporsi TK Primer	51%	34%	10%
Proporsi TK Sekunder	17%	24%	36%
Proporsi TK Tersier	33%	42%	54%
Kepadatan penduduk	685.716117	1367.514048	2796.6352

Sumber: Hasil analisis, 2017

Untuk setiap kategori wilayah peri urban, dapat dilihat bahwa peningkatan karakteristik kekotaan pada wilayah peri urban merupakan peralihan kegiatan sektor primer menjadi sekunder dan tersier. Hal ini dapat dilihat proporsi kegiatan kekotaan pada wilayah peri urban yang ditandai oleh proporsi sektor sekunder dan tersier baik pada pendapatan wilayah dan tenaga kerja semakin meningkat untuk tiap kategori nya. Bagitu pula dengan kepadatan penduduk wilayah di mana semakin padat penduduk semakin menunjukkan ciri kekotaan.

Sedangkan secara spasial dapat dilihat bahwa wilayah peri urban yang memiliki karakteristik kekotaan dominan cenderung memliki jarak yang relatif lebih dekat kepada kota-kota besar di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dimana di sekitar kota-kota besar di Pulau Jawa Seperti Jakarta, Surabaya, Cirebon, Malang, Yogyakata tampak berkarakteristik wilayah peri urban dengan kategori peri urban 3. Hal ini dicirikan dengan pendapatan wilayah di dominasi oleh sektor industrri, perdagangan dan jasa, Tenaga kerja cenderung berada pada sektor sekunder dan tersier serta kepadatan penduduk yang cenderung lebih tinggi di bandingkan wilayah peri urban lainnya namun masih lebih rendah dibandingkan pusat kota.

Setelah mengetahui wilayah yang termasuk ke dalam kategori wilayah peri urban, maka dilakukan analisis regresi menggunakan variabel prediktor panjang jalan setiap Kabupaten dan kota dengan variabel tingkat kekotaan peri urban sebagai variabel dependent. Hasil analisis menggunakan software PASW menunjukkan besarnya R square sebagai indikator signifikansi model yang digunakan hanya sebesar 3.29 (Tabel Model summary). Hal ini menunjukkan bahwa variabel prediktor panjang jalan saja belum cukup untuk menentukkan tingkat peri urbanisasi yang terjadi pada suatu wilayah. Selain itu model regresi ini menunjukkan persamaan y = a+ bx berupa: y = 0.483 + 4.01 x 10^-5 X dimana y adalah tingkat kekotaan wilayah, a adalah konstanta, b adalah koefisien prediktor dan x adalah panjang jalan.



Gambar 1. Peta Kategori Peri urban di Pulau Jawa

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.574[a]	.329	.323	.17122	.329	53.916	1	110	.000	.996

a. Predictors: (Constant), SMEAN(panjang_jalan)

b. Dependent Variable: Tingkat Peri urban

Sumber: Hasil analisis PASW, 2017**Coefficients[a]**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.483	.020		24.159	.000
	SMEAN(panjang_jalan)	4.010E-5	.000	.574	7.343	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Peri urban

Sumber: Hasil analisis PASW, 2017

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan pola perkembangan wilayah peri urban semakin bersifat kekotaan apabila semakin mendekati kota. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan yang lebih erat kepada perkotaan dibandingkan wilayah dengan jarak yang lebih jauh. Hasil penelitian lainnya adalah terdapat kota dengan status administrasi kota akan tetapi masih memiliki sifat sebagai peri urban, bahkan memiliki karakteristik kegiatan perdesaan yang cukup signifikan seperti kota seperti Kota Banjar dan Kota Batu yang masuk ke dalam kategor peri urban 2 dan Kota Sukabumi serta Kota Tasikmalaya yang masuk ke dalam Kategori peri urban 3. Hal ini menunjukkan bahwa status sebagai kota bukan berarti memiliki karakteristik kota secara keseluruhan.

Hasil regresi menunjukkan bahwa panjang jalan saja belum cukup akurat untuk digunakan sebagai satu-satunya faktor yang menunjukkan tingkat peri urbanisasi yang terjadi dalam suatu wilayah. Terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan kekotaan di wilayah peri urban.

DAFTAR PUSTAKA

(2014, Agustus 28). Retrieved November 4, 2016, from Kompasiana.com: http://beritadaerah.co.id/2014/08/28/jalur-pantura-berperan-penting-bagi-perekonomian-indonesia/

Black, J. (1981). *Urban Transport Planning.* London: British Library Cataloguing in Publication Data.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, D. P. (2006). *Metropolitan di Indonesia: Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang.* Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.

Fahmi, F. Z., Hudalah, D., Rahayu, P., & woltjer, J. (2014). Extended urbanization in small and medium-sized cities: The case of Cirebon, Indonesia. *Habitat Interbational*, 1-10.

Hudalah, D., Viantari, D., Firman, T., & Woltjer, J. (2013). INDUSTRIAL LAND DEVELOPMENT AND MANUFACTURING IN GREATER JAKARTA. *Urban Geography*, 950-971.

Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2007). Peri-urbanisation in East asia: A New Challange for Planning? *IDPR*.

Lauwis, M. (2016). Identifikasi Wilayah dan Karakteristik Megaregion di Indonesia Berdasarkan Aktivitas Pergerakan Barang (studi Kasus: Wilayah Operasi PT JNE di Jawa Bagian Barat).

Lin, G. C.-S. (1994). Changing Theoritical Perspectives on Urbanisation in Asian Developing Countries.

Manheim, M. L. (1979). *Fundamental of Transportation System Analysis, Volume 1.* MIT Press Series in Transportation Studies.

McGee, T. G. (2008). Managing the ual-urban transformation in East Asia in the 21st century. *Sustainability Science*, 155-167.

Primantara, Y. (2010). *Identifikasi Gejala Peri-Urbanisasi Jabodetabekjur berdasarkan aspek ekonomi wilayah.* Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung.

Pryor, R. J. (1968). Defining the rural urban fringe. *Social force vol. 47 No. 2*, 202-215.

Ravetz, J., Fertner, C., & Nielsen, T. S. (2012). The Dynamics of Peri-Urbanization. In K. Nilsson, S. Pauleit, S. Bell, C. Aalbers, & T. S. Nielsen, *Peri-Urban Futures:*

Scenarios and models for land use change in Europe (pp. 3-44). Heidelberg: Springer.

(2014). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.* Kementerian BAPPENAS.

Statistik, B. P. (2016). *Provinsi, Kabupaten, Kota di Pulau Jawa Dalam angka 2016.* Pulau Jawa: Badan Pusat Statisti.

Tamin, O. Z. (2000). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi.* Bandung: Penerbit ITB.

Vina. (2014, 09 22). *europian post-master in urbanism|student-blog*. Retrieved November 05, 2016, from emurbanism.weblog.tudelft.nl: http://emurbanism.weblog.tudelft.nl/2014/09/22/whymegaregionsmatter/

Webster, D. (2002). *On The Edge: Shaping th Future of Peri-Urban East Asia.* Stanford: Stanford University Press.

Winarso, H., Hudalah, D., & Firman, T. (2015). Peri-urban Transformation in the Jakarta Metropolitan Area. *Habitat International*.

Woltjer, J. (2014). A Global review on Peri-Urban Development. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 1-16.

Yunus, H. S. (2008). *Dinamika Wilayah Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota.* Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Zasada, I., & Berges, r. (2011). Environment and landscape. In A. Piorr, J. Ravetz, & I. Tosics, *Pei-Urbanisation in Europe* (pp. 72-75). Copenhagen: Research Gate.

Zhao, Y.-F., Shi Xue-Zheng, Huang, B., Yu, D.-s., Wang, H.-J., Sun, W.-X., et al. (2007). Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China. *Soil Science society of China*, 44-51.

PENGEMBANGAN JALUR WISATA KABUPATEN BANTAENG

Ihsan, Rindami Patikaisyah, Isfa Sastrawati,
Venny Veronica Natalia, dan Suci Anugrah Yanti
Laboratorium Perencanaan Wilayah, Pariwisata, dan Mitigasi Bencana
Departemen Pengembangan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar
Email: ace.ihsan@gmail.com; rindamipatikaisyah@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar pada 24 kabupaten/kota, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Bantaeng. Keberadaan potensi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kabupaten Bantaeng menuntut ketersediaan jaringan transportasi yang dapat mendorong minat wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Namun, kurangnya aksesibilitas menyebabkan tidak optimalnya pengembangan kawasan wisata. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ODTW yang potensial, mengetahui ketersediaan aksesibilitas penunjang wisata, dan menyusun konsep pengembangan wisata dan aksesibilitas terhadap konektivitas antar objek wisata dengan menggunakan tiga analisis, yaitu analisis deskriptif, analisis spasial, dan analisis Photo Mapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Potensi wisata Kabupaten Bantaeng yang dapat dikembangkan berjumlah 25 objek wisata; Aksesibilitas penunjang wisata Cluster Barat diakses cenderung menggunakan kendaraan pribadi, jarak terjauh adalah 24 km dengan waktu tempuh 56 menit. Cluster Tengah diakses menggunakan transportasi umum dan pribadi, jarak terjauh adalah 13 km dengan waktu tempuh 30 menit. Cluster Timur cenderung diakses menggunkan kendaraan pribadi, jarak terjauh adalah 30 km dengan waktu tempuh 50 menit; Konsep pengembangan wisata terbagi menjadi tiga tema, yaitu agrowisata, Cultural Tourism, dan Nature Tourism. Rute wisata dibagi menjadi 25 rute yang saling terintegrasi agar wisatawan dapat mengakses keseluruhan objek wisata di Kabupaten Bantaeng.

Kata kunci: ODTW, Aksesibilitas, Wisata, Kabupaten Bantaeng

I. PENDAHULUAN

Kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran, dan menghapus kemiskinan. Oleh sebab itu, banyak daerah yang mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang dimilikinya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Potensi objek wisata yang dikembangkan menjadi ODTW di Kabupaten Bantaeng berdasarkan RTRW Kabupaten Bantaeng 2012-2032 terdapat tiga jenis, yaitu objek wisata alam seperti Air Terjun Bissappu dan Permandian Alam Eremerasa, objek wisata budaya seperti Rumah Adat Balla Lompoa dan Masjid Tua Tompong, serta objek wisata buatan seperti Hutan Wisata Gunung Loka dan Kawasan Agrowisata. Potensi objek-objek wisata tersebut dapat membantu pembangunan pada sektor pariwisata di Kabupaten Bantaeng.

Keberadaan ODTW di Kabupaten Bantaeng memicu pergerakan tranportasi ke kawasan wisata. Ketersediaan jaringan transportasi dapat mendorong minat wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Namun, kurangnya aksesibilitas menjadikan tidak optimalnya pengembangan kawasan wisata di daerah tersebut.

Faktor aksesibilitas terkait dengan efisiensi dan efektifitas jarak, waktu, biaya, dan rute perjalanan. Hal ini berarti mempersingkat waktu dan mengurangi biaya perjalanan.

Aksesibilitas yang tinggi memudahkan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata ke objek tujuan yang diinginkan dengan adanya konektivitas antar objek sehingga setiap objek wisata dapat dijangkau atau tidak terlampaui pada saat melakukan perjalanan wisata yang dapat menjadi kesenjangan antar objek wisata.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ODTW yang potensial, mengetahui ketersediaan aksesibilitas penunjang wisata, dan menyusun konsep pengembangan wisata dan aksesibilitas terhadap konektivitas antar objek wisata

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu gejala atau fenomena dengan menggunakan logika ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan secara kualitatif dengan memberi penjelasan deskriftif (data dalam bentuk kalimat, skema dan gambar) mengenai atraksi, amenitas (fasilitas) penunjang wisata, dan aksesibilitas, serta pengembangan potensi dan aksesibilitas sebagai konsep perencanaan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode purposive sampling dengan karakteristik wisatawan setiap objek wisata. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan survei langsung ke lokasi penelitian, wawancara/kuisioner, dan dokumentasi.

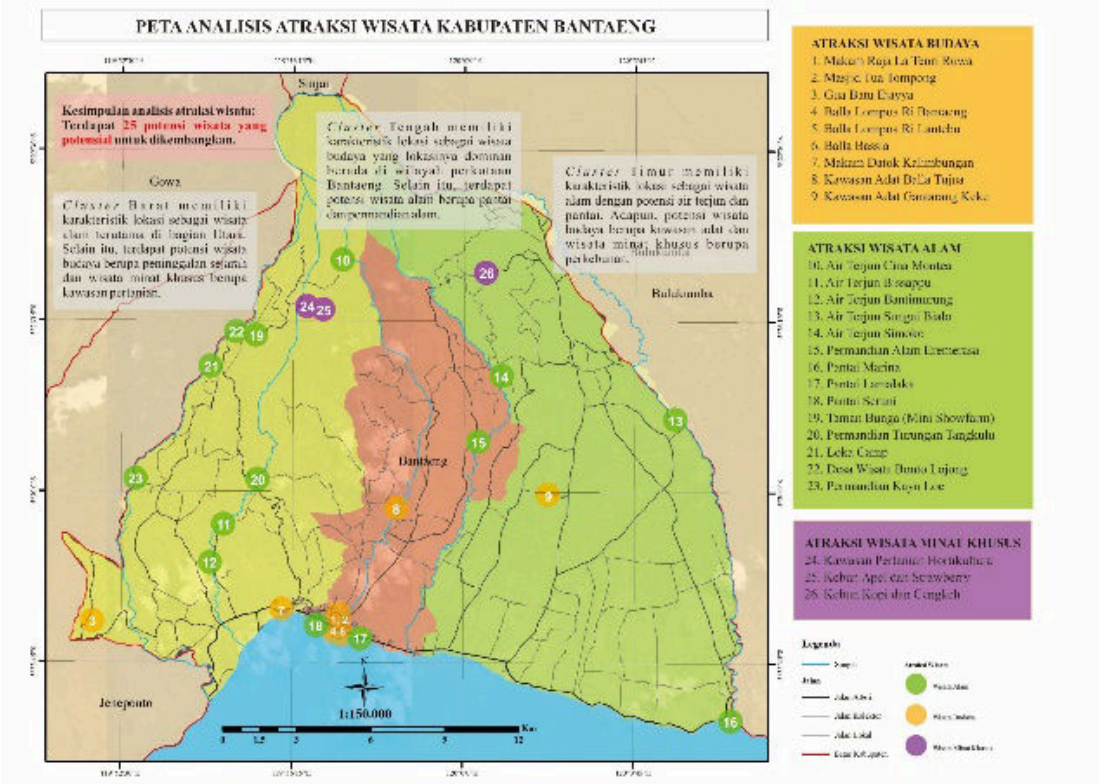
Teknik analisis data yang digunakan, yaitu analisis deskriptif, analisis spasial, dan analisis Photo Mapping. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas serta konsep yang direncanakan dengan didukung analisis spasial dan photo mapping

Penelitian ini akan dilakukan selama ± 4 bulan . Adapun, lokasi perencanaan ini berada di Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Bantaeng, Kecamatan Bissappu, Kecamatan Eremerasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kecamatan Sinoa, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Uluere

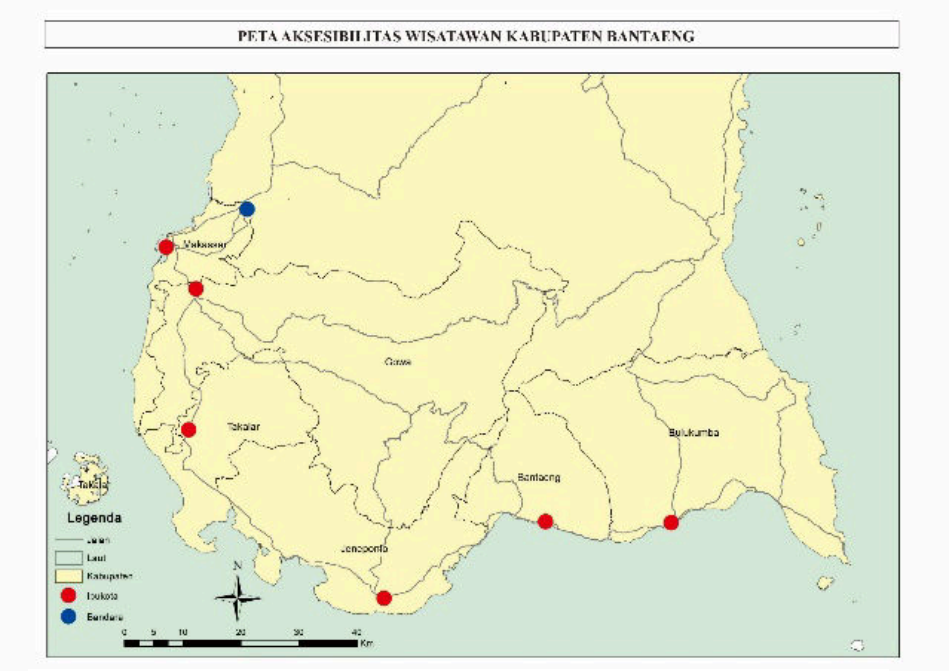
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Analisis Atraksi Wisata

Potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil observasi berjumlah 26 objek wisata yang terdiri atas 9 (sembilan) objek wisata budaya, 14 objek wisata alam, dan 3 (tiga) wisata minat khusus. Namun, objek wisat yang potensial untuk dikembangkan hanya berjumlah 25 objek wisata.



Gambar 1. Peta Analisis Atraksi Wisata Kabupaten Bantaeng



Gambar 2. Peta Analisis Aksesibilitas Wisatawan Kabupaten Bantaeng

Objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan berjumlah 25 lokasi yang akan ditingkatkan pengembangannya menjadi industri wisata dan sebagai dasar perencanaan untuk menentukan jalur wisata Kabupaten Bantaeng. Untuk memudahkan analisis potensi wisata di Kabupaten Bantaeng, wilayah kajian akan dibagi menjadi tiga cluster, yaitu Cluster Barat, Cluster Tengah, dan Cluster Timur. Ketiga cluster tersebut memiliki karakteristik atraksi wisata masing-masing, Cluster Barat didominasi oleh atraksi wisata alam, yaitu air terjun dan agrowisata di wilayah dataran tinggi Kabupaten Bantaeng, Cluster Tengah didominasi oleh atraksi wisata budaya, yaitu Balla Lompoa (rumah adat), sedangkan Cluster Timur didominasi oleh atraksi wisata alam, yaitu air terjun.

1. Analisis Aksesibilitas Wisata

✓ *Analisis Aksesibilitas Berdasarkan Daerah Asal Wisatawan*

Wisatawan yang ingin berkunjung ke Kabupaten Bantaeng terdiri atas wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik berasal dari Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Bulukumba sedangkan wisatawan mancanegara berasal dari Belanda dan Jerman.

✓ *Moda dan Biaya Transportasi Berdasarkan Daerah Asal Wisatawan*

Wisatawan yang berasal dari Kota Makassar dapat menggunakan transportasi pribadi dan umum. Untuk transportasi umum, wisatawan dapat menggunakan bus mini yang berkapasitas delapan orang dengan biaya Rp. 85.000 per orang dan mobil sewa yang dapat dijumpai pada Terminal Maliangkeri dengan biaya Rp. 50.000 hingga Rp. 60.000 per orang.

Wilayah lain yang berada di sekitar Kabupaten Bantaeng seperti Bulukumba, Jeneponto, Takalar, dan Gowa dapat menggunakan transportasi pribadi dan umum. Untuk transportasi umum, wisatawan dapat dijumpai di terminal regional masing-masing daerah dan mobil yang lewat di jalan arteri. Biaya perjalanan dari Kabupaten Bulukumba dan Jeneponto dengan menggunakan mobil sewa sebesar Rp. 5.000 hingga Rp. 15.000 per orang. Biaya perjalanan dari Kabupaten Takalar sebesar Rp. 15.000 hingga Rp. 25.000 per orang. Sementara itu, biaya perjalanan dari Kabupaten Gowa sebesar Rp. 40.000 hingga Rp. 50.000 per orang.

✓ *Jarak dan Waktu Perjalanan*

Analisis jarak dan waktu perjalanan wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Bantaeng dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jarak dan Waktu Perjalanan

Asal	Jarak dan Waktu
Mancanegara (Bandara Sultan Hasanuddin)	Jarak yang ditempuh adalah 151 km dengan estimasi waktu perjalanan selama 3 jam 23 menit
Makassar (Pusat Kota)	Jarak yang ditempuh adalah 134 km dengan estimasi waktu perjalanan selama 3 jam 19 menit
Gowa	Jarak yang ditempuh adalah 125 km dengan estimasi waktu selama 2 jam 48 menit.
Takalar	Jarak yang ditempuh adalah 97 km dengan estimasi waktu perjalanan selama 2 jam
Jeneponto	Jarak yang ditempuh adalah 33 km dengan estimasi waktu perjalanan selama 41 menit
Bulukumba	Jarak yang ditempuh adalah 29 km dengan estimasi waktu perjalanan selama 37 km

✓ *Analisis Moda dan Biaya Transportasi Wisata Kabupaten Bantaeng*

Moda transportasi yang digunakan wisatawan untuk melakukan mobilitas adalah moda transportasi darat yakni angkutan umum dan kendaraan pribadi. Namun, wisatawan cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju ke objek wisata. Pengembangan transportasi khusus pariwisata, seperti mini bus sangat diperlukan untuk memaksimalkan aksesibilitas wisatawan menjangkau objek-objek wisata yang menjadi.

✓ *Analisis Kondisi Jalan Menuju Objek Wisata Kabupaten Bantaeng*

Kondisi jalan yang berada di Cluster Barat, yaitu perkerasan jalan aspal dan beton dengan lebar jalan tiga sampai lima meter. Namun, beberapa memiliki kondisi jalan rusak yakni terdapat lubang yang menjadi salah satu penghambat pergerakan. Selain itu, kondisi jalan yang berbelok-belok dan menanjak sehingga wisatawan harus selalu waspada dan berhati-hati terutama menuju objek wisata yang berada di bagian Utara cluster ini.

Cluster Tengah memiliki kondisi jalan yang lebih baik daripada Cluster Barat dikarenakan cluster ini merupakan kawasan perkotaan Kabupaten Bantaeng. Perkerasan jalan yang terdapat di cluster ini adalah perkerasan jalan aspal dengan lebar tiga sampai tujuh meter.

Cluster Timur memiliki perkerasan aspal dengan lebar tiga sampai delapan meter. Beberapa jalan mengalami kerusakan sehingga terdapat jalan yang berlubang terutama yang berada di bagaian Utara cluster yang menuju ke wilayah daratan tinggi.

Kesimpulan analisis kondisi jalan menuju objek wisata berdasarkan cluster adalah kondisi jalan yang berada di Cluster Barat, Cluster Tengah, dan Cluster Timur memiliki perkerasan jalan aspal, namun di bagian Utara Cluster Barat dan Timur terdapat jalan dengan kondisi berlubang yang menjadi penghambat dalam aksesibilitas wisatawan.

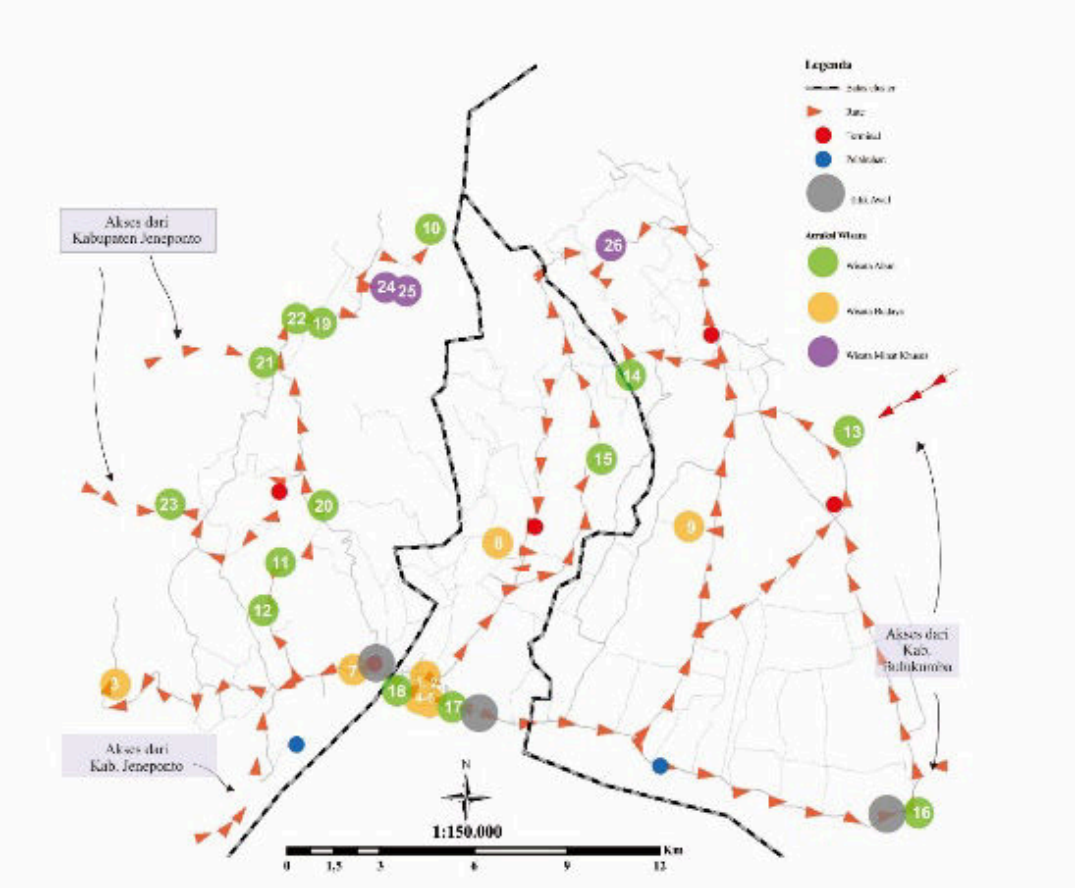
✓ *Analisis Rute Wisata Transportasi Kabupaten Bantaeng*

Perjalanan wisatawan pada Cluster Barat, dapat diawali dari Terminal Bantaeng menuju ke potensi wisata budaya, yaitu Gua Batu Ejayya dan Makam Datok Kalimbungan, kemudian dilanjutkan dengan wisata alam Air Terjun Bantimurung, dan Air Terjun Bissappu. Setelah itu, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan ke bagian Utara cluster. Objek wisata yang dapat dikunjungi di bagian Utara, yaitu wisata alam dan wisata minat khusus antara lain Loka Camp, Permandian Kayu Loe (mengarah ke Barat perbatasan Bantaeng-Jeneponto), jika melanjutkan ke arah Utara menuju wilayah dataran tinggi Kabupaten Bantaeng dapat dijumpai objek wisata Desa Wisata Bonto Lojong, Taman Bunga (Mini Showfarm), Kawasan Pertanian Hortikultura, Kebun Apel dan Strawberry, dan Air Terjun Cina Montea. Perjalanan menuju bagian Utara tersebut, wisatawan dapat menikmati panorama alam yang hijau oleh lahan pertanian.

Perjalanan wisatawan pada Cluster Tengah dapat diawali dari pusat Kabupaten Bantaeng di Kecamatan Bantaeng menuju objek wisata terdekat. Jika wisatawan ingin mengawali perjalanan menuju arah Utara cluster ini dapat dijumpai objek wisata alam Permandian Eremerasa dan wisata budaya di Kawasan Adat Balla Tujua. Apabila wisatawan ingin mengawali perjalanan hanya di wilayah perkotaan dapat diawali dengan mengunjungi wisata budaya dan wisata alam. Wisata budaya antara lain: Makam Raja La Tenri Ruwa, Masjid Tua Tompong, Balla Lompoa Ri Bantaeng, Balla Lompoa Ri Lantebu, dan Balla Basia yang letaknya berdekatan sehingga dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Selain itu, terdapat wisata alam yang dapat dikunjungi di wilayah perkotaan Bantaeng yaitu Pantai Lamalaka dan Pantai Seruni.

Perjalanan wisatawan pada Cluster Timur dapat diawali dengan mengunjungi wisata alam di Pantai Marina terutama wisatawan yang berasal dari Kabupaten Bulukumba karena letak cluster ini berada di bagian Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Setelah puas dengan menikmati keindahan alam tersebut,

wisatawan dapat menuju ke arah Utara cluster. Objek wisata yang terdapat di bagian Utara diawali dengan wisata budaya Kawasan Adat Gantarang Keke di Kecamatan Gantarang Keke, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi wisata alam Air Terjun Sungai Bialo, Air Terjun Simoko, serta Kebun Kopi dan Cengkeh tujuan, terutama objek wisata yang cenderung kurang diminati karena susahnya akses menuju ke lokasi tersebut.



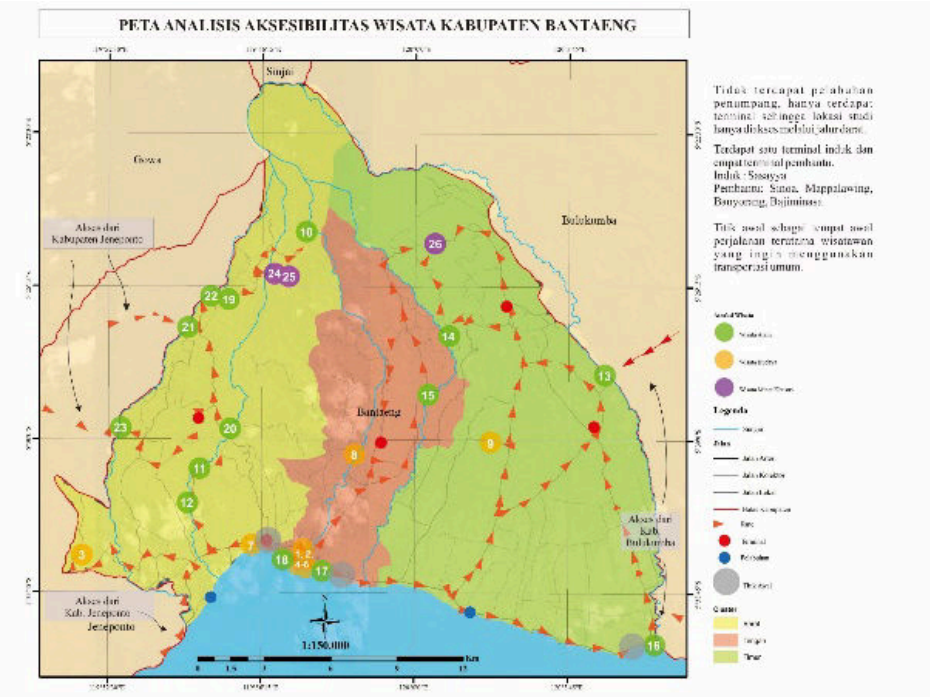
Gambar 3. Peta Skema Rute Wisata Kabupaten Bantaeng

✓ *Analisis Jarak dan Waktu Perjalanan Wisata Kabupaten Bantaeng*

Tabel 2. Analisis Jarak dan Waktu Perjalanan

Cluster	Jarak Terjauh & waktu	Jarak Terdekat & waktu	Keterangan
Cluster Barat	24 km/ 56 menit	1,2 km / 5 menit	Lokasi objek wisata ini berada di jalan arteri sehingga mudah untuk dijangkau. Hambatan untuk mengakses objek wisata di cluster ini terutama di bagian Utara adalah jalanan yang menanjak dan berliku-liku karena merupakan daerah dataran tinggi dan tidak terdapat jalan alternatif lain. Selain itu, penanda untuk menuju lokasi masih minim sehingga wisatawan harus bertanya kepada masyarakat sekitar
Cluster	13 km/ 30	750 m/ 2	Lokasi cluster ini merupakan pusat dari

Cluster	Jarak Terjauh & waktu	Jarak Terdekat & waktu	Keterangan
Tengah	menit	menit	Kabupaten Bantaeng sehingga amenitas dan aksesibilitas untuk melakukan kegiatan wisata dapat berlangsung dengan lancar.
Cluster Timur	30 km/ 50 menit	14 km/ 23 menit	Lokasi cluster ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bulukumba.



Gambar 4. Peta Analisis Aksesibilitas Wisata Kabupaten Bantaeng

B. Perencanaan

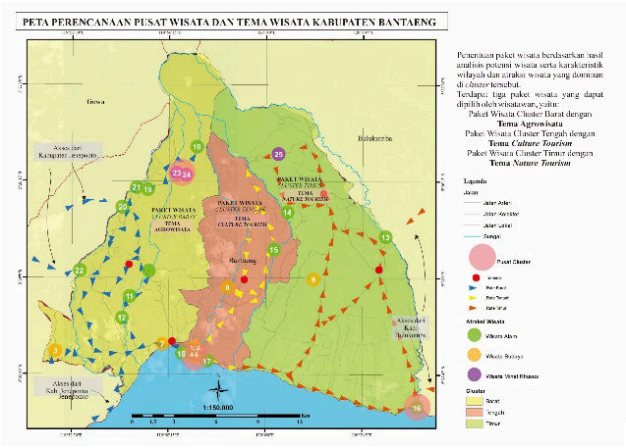
1. Perencanaan Tema dan Pusat-Pusat Wisata

Tema wisata di masing-masing *cluster* berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi wisata yang dominan di *cluster* tersebut. Berikut adalah penentuan tema dari hasil analisis potensi wisata di Kabupaten Bantaeng.

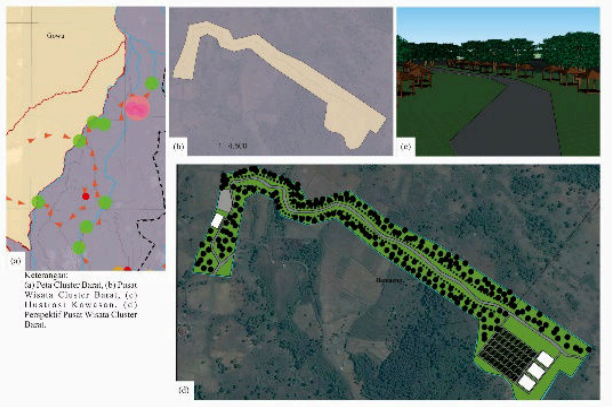
Tabel 3. Perencanaan Tema dan Pusat-Pusat Wisata

Paket Wisata Cluster Barat (Tema Agrowisata)	Karakteristik Cluster Barat adalah memiliki keindahan alam yang masih alami dengan lahan pertanian di sekitarnya terutama bagian Utara cluster yang merupakan kaki Gunung Lompobattang. Atraksi wisata yang dominan pada cluster ini adalah wisata alam yang dipadukan dengan atraksi wisata minat khusus (agrowisata). Pusat dari cluster ini berada di bagian Utara karena terdapat lima objek wisata yang letaknya berdekatan di kawasan tersebut. Penetapan bagian Utara sebagai pusat wisata Cluster Barat dapat mendorong pembangunan pariwisata di wilayah tersebut terutama pengembangan amenitas penunjang wisata yang masih sangat minim. Amenitas wisata cluster ini tersedia di masing-masing objek wisata seperti tempat makan dan minum, tempat parkir, toilet, gazebo, dan pos jaga/loket, kecuali masjid, tempat penginapan dan toko souvenir yang tersedia pada beberapa lokasi yang dapat dijangkau oleh beberapa objek wisata.

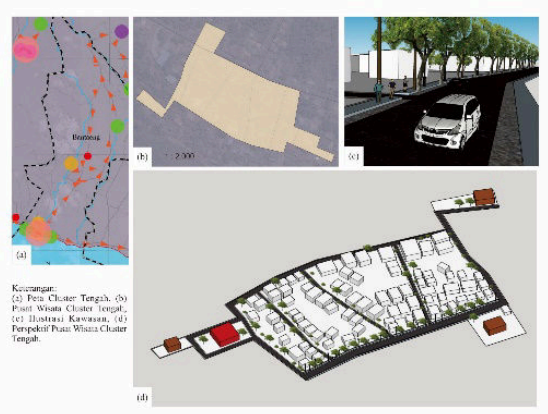
Paket Wisata Cluster Tengah (Tema *Cultural Tourism*)	memiliki keindahan alam yang berupa panorama laut dan bangunan-bangunan bersejarah seperti rumah adat, masjid, serta terdapat pemakaman raja-raja. Atraksi wisata yang dominan di cluster ini adalah wisata budaya dengan dipadukan wisata alam. Pusat dari cluster ini berada di bagian perkotaan Bantaeng yang memiliki atraksi budaya yang letaknya berdekatan sehingga dapat diakses dengan mudah. Konsep pengembangan kawasan ini bertema heritage dengan penetapan pusat dimaksudkan agar menjadi salah satu pendorong pelestarian warisan budaya di Kabupaten Bantaeng dikarenakan nilai-nilai sejarah yang sudah mulai pudar di zaman modern sekarang. Amenitas wisata cluster ini tersedia di masing-masing objek wisata seperti tempat makan dan minum, tempat parkir, toilet, gazebo, dan pos jaga/loket, kecuali masjid, tempat penginapan dan toko souvenir yang tersedia pada beberapa lokasi yang dapat dijangkau oleh beberapa objek wisata..
Paket Wisata Cluster Timur (Tema *Nature Tourism*)	memiliki keindahan alam yang berupa pantai dan air terjun. Atraksi wisata yang dominan di cluster ini adalah wisata alam. Pusat dari cluster ini berada di wilayah pesisir, yaitu Pantai Marina yang terletak di jalan arteri merupakan jalan poros Bantaeng-Bulukumba. Konsep untuk kawasan ini adalah waterfront. Untuk kawasan ini telah dilakukan pengembangan sehingga amenitas yang telah dimiliki tergolong lengkap, hanya perlunya pengadaan sarana rekreasi air seperti banana boat, flying fish, dan rolling donut. Amenitas objek wisata cluster ini tersedia di masing-masing objek wisata seperti tempat makan dan minum, tempat parkir, toilet, gazebo, dan pos jaga/loket, kecuali masjid, tempat penginapan dan toko souvenir yang tersedia pada beberapa lokasi yang dapat dijangkau oleh beberapa objek wisata..



Gambar 5. Peta Rencana Pusat Wisata



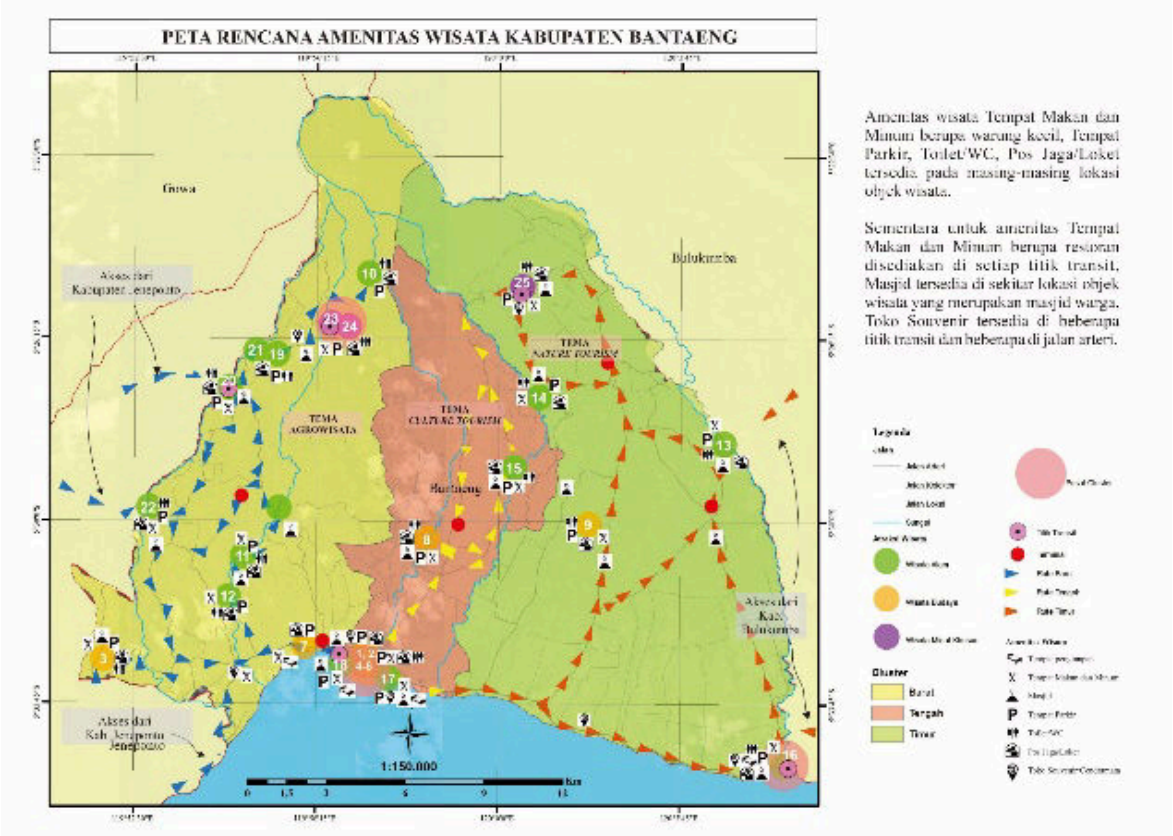
Gambar 6. Ilustrasi Perencanaan Pusat Wisata *Cluster* Barat



Gambar 7. Ilustrasi Perencanaan Pusat Wisata *Cluster* Tengah



Gambar 8. Ilustrasi Perencanaan Pusat Wisata *Cluster* Timur



Gambar 9. Peta Rencana Amenitas Wisata

2. *Perencanaan Rute Wisata Kabupaten Bantaeng*

Berdasarkan pembagian paket wisata akan dikembangkan rute-rute wisata yang dapat memudahkan wisatawan untuk menjangkau seluruh potensi wisata yang ada.

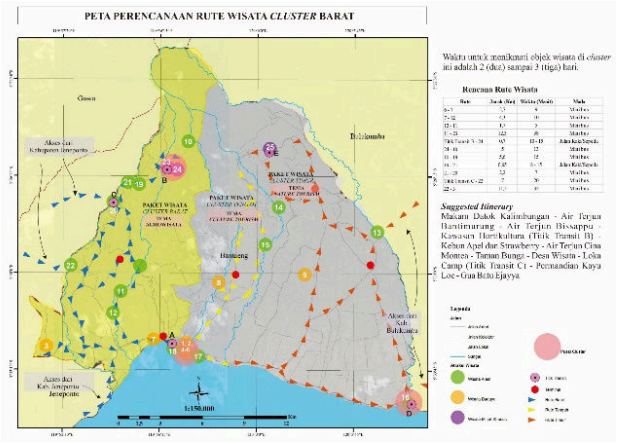
Tabel 4. Paket Wisata, Jarak, dan Waktu Perjalanan Menurut *Cluster*

Paket Wisata Cluster Barat	Perjalanan menuju pusat wisata berjarak 20 km dengan waktu tempuh 45 menit, wisatawan dapat terlebih dahulu mengunjungi objek wisata yang letaknya sebelum pusat wisata seperti air terjun dan situs sejarah. Moda transportasi yang digunakan adalah bus mini yang berkapasitas 12 orang dan terdapat beberapa objek wisata yang dapat diakses menggunakan sepeda maupun berjalan kaki.
Paket Wisata Cluster Tengah	Perjalanan dilakukan dari pusat Kota Bantaeng, letak objek wisata yang terdapat di wilayah ini memiliki jarak yang dekat sehingga mudah untuk diakses. Jarak menuju pusat *cluster* adalah 1,6 km dengan waktu tempuh 5 menit. Moda transportasi yang digunakan adalah bus mini yang berkapasitas 12 orang dan terdapat beberapa objek wisata yang dapat diakses menggunakan sepeda maupun berjalan kaki.
Paket Wisata Cluster Timur	Perjalanan dilakukan dari wilayah pesisir *cluster* ini sebagai lokasi penginapan wisatawan dan juga sebagai pusat *cluster*. Jarak pusat *cluster* dari Kota Bantaeng adalah 17 km dengan waktu tempuh 30 menit. Moda transportasi yang digunakan adalah bus mini yang berkapasitas 12 orang.

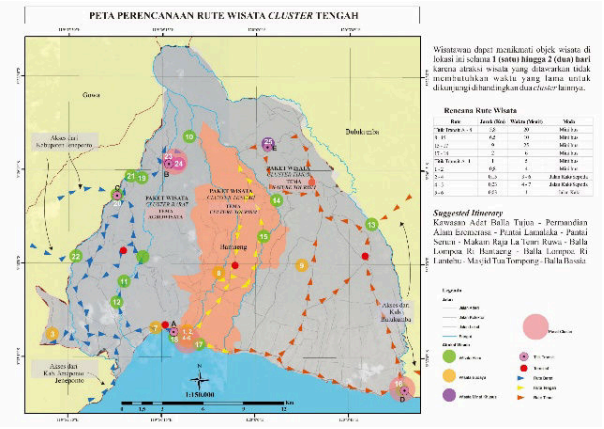
Untuk dapat menikmati keseluruhan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bantaeng, dapat dimulai dari *Cluster* Tengah yang merupakan wilayah perkotaan Bantaeng karena objek wisata di *cluster* ini memiliki akses yang mudah. Wisatawan dapat menikmati objek wisata di lokasi ini selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari karena atraksi wisata yang ditawarkan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dikunjungi kecuali permandian alam yang membutuhkan waktu tiga sampai lima jam untuk menikmatinya dengan waktu tempuh 30 menit. Wisata alam berupa pantai dapat dikunjungi pada malam hari untuk bersantai.

Setelah berwisata di *Cluster* Tengah, wisatawan dapat memilih menuju *Cluster* Timur atau *Cluster* Barat. Wisatawan yang berkunjung ke *Cluster* Barat dapat memulai perjalanan dengan mengunjungi wisata budaya: makam dan gua, kemudian mengunjungi wisata alam air terjun. Setelah puas menikmati keindahan alam tersebut, wisatawan menuju pusat wisata di wilayah dataran tinggi Bantaeng dan akan menginap di wilayah tersebut. Waktu untuk menikmati objek wisata di *cluster* ini adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari. Wisatawan yang berasal dari arah Kabupaten Jeneponto dapat mengunjungi *cluster* ini pertama kali.

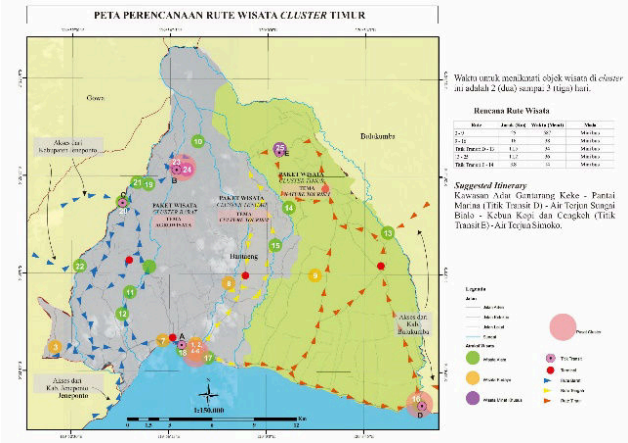
Untuk wisatawan dari *Cluster* Barat yang ingin berkunjung ke *Cluster* Timur, dapat langsung menuju wilayah bagian Tengah dengan mengunjungi wisata budaya. Kemudian menuju ke pusat *cluster* yang berada di wilayah pesisir untuk menginap di lokasi tersebut. Setelah itu, wisatawan dapat menikmati malam di lokasi pantai serta esok hari mengunjungi wisata alam air terjun dan wisata minat khusus. Waktu untuk menikmati objek wisata di *cluster* ini adalah 2 (dua) sampai (tiga) hari. Wisatawan yang berasal dari arah Kabupaten Bulukumba dapat mengunjungi *cluster* ini pertama kali.



Gambar 10. Peta Rencana Rute Wisata *Cluster* Barat



Gambar 11. Peta Rencana Rute Wisata *Cluster* Tengah



Gambar 12. Peta Rencana Rute Wisata *Cluster* Timur

IV. KESIMPULAN

- ✓ Potensi wisata Kabupaten Bantaeng yang dapat dikembangkan berjumlah 25 objek wisata yang terdiri dari 9 (sembilan) atraksi wisata budaya, 13 atraksi wisata alam, dan 3 (tiga) atraksi wisata minat khusus.
- ✓ Aksesibilitas penunjang wisata Kabupaten Bantaeng dibagi menurut *cluster*¸ yaitu Barat, Tengah, dan Timur. *Cluster* Barat diakses cenderung menggunakan kendaraan pribadi, jarak terjauh adalah 24 km dengan waktu tempuh 56 menit. *Cluster* Tengah diakses menggunakan transportasi umum dan pribadi, jarak terjauh adalah 13 km dengan waktu tempuh 30 menit. *Cluster* Timur cenderung diakses menggunkan kendaraan pribadi, jarak terjauh adalah 30 km dengan waktu tempuh 50 menit.
- ✓ Konsep pengembangan wisata berdasarkan tiga *cluster*, yaitu Barat, Tengah, dan Timur yang memiliki tema masing-masing. Cluster Barat bertema agrowisata, Cluster Tengah bertema *Cultural Tourism,* dan *Nature Tourism* yang ditentukan berdasarkan hasil analisis atraksi wisata. Untuk rute wisata terbagi menjadi 25 rute yang saling terintegrasi agar wisatawan dapat mengakses keseluruhan objek wisata di Kabupaten Bantaeng.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng (2012), *Tourism Bantaeng.*

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bantaeng Tahun 2012-2032.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Kebutuhan Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Pariwisata Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Muhammad Baiquni[1], Djoko Wiyono[2], T. Yoyok Wahyu Subroto[3], Yulia Arisnani W[4], Esti Camporaningsih[2]

[1]Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[2]Pusat Studi Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[3]Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
[4]Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: mbaiquni@ugm.ac.id dan baiquni99@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata dipandang sebagai aktivitas yang dapat mendorong perkembangan desa yang mempunyai potensi situs arkeologi, potensi geologi, serta potensi lansekap perbukitan seperti di Desa Sambirejo, yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Candi Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Riset ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan fasilitas dan infrastruktur terkait pengembangan pariwisata yang belakangan ini popular dikalangan wisatawan. Penelitian terkait kebutuhan fasilitas dan infrastruktur pariwisata ini dilaksanakan dengan metode RRA (Rapid Rural Appraisal), survai wisatawan, wawancara mendalam dan sarasehan bersama komunitas pengelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tebing breksi Desa Sambirejo menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Perkembangan jumlah pengunjung terus meningkat bersamaan dengan popularitas sebagai tempat atraksi wisata dan selfie foto lansekap yang menawan. Terkait dengan fasilitas dan infrastruktur dirasakan masih kurang memadahi, sehingga perlu pembenahan dan pengembangan lebih lanjut.

Kata kunci: Pariwisata, Fasilitas dan Infrastruktur, Desa Sambirejo

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prambanan terdapat komplek candi yang merupakan *World Heritage* yang diakui UNESCO. Desa Sambirejo termasuk bagian dari KSPN yang terdapat candi yang terletak di perbukitan dengan tingkat kemiringan lahan antara 15 sampai dengan 80 derajat. Belakangan ini Desa Sambirejo dikenal dengan obyek wisata Taman Tebing Breksi dengan infrastruktur jalan yang sebagian masih belum memadahi untuk akses bus pariwisata.

Sebagai bagian dari KSN Candi Prambanan, sebagian wilayah desa Sambirejo masuk dalam zona III yaitu kawasan yang diperuntukan bagi permukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau, atau fasilitas tertentu lainnya yang disediakan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan di zona I pada umumnya dan pendukung kelestarian Candi dan fungsi taman wisata pada khususnya. Di kawasan Sambirejo juga terdapat Candi Ijo. Salah satu candi yang masuk dalam kompleks KSN Candi Prambanan yang letaknya paling tinggi di antara candi-candi lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Ijo dibangun sekitar abad IX, di Bukit Ijo atau Gumuk Ijo yang ketinggiannya sekitar 410 m di atas permukaan laut.

Kawasan Sambirejo juga ditetapkan sebagai bagian dari Gunung Purba dengan SK Kepala Badan Geologi Nasional nomor 1157.K/73/BGL/2014 tentang Penentuan Cagar Alam Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam SK tersebut dicantumkan bahwa terdapat Geotapak Endapan Vulkanik Purba Candi Ijo yang berlokasi di Bukit Ijo, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Geotapak ini merupakan produk super erupsi Gunungapi Purba Semilir dengan keunikan batuan dan fosil yang 1) memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai

laboratorium alam, 2) memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau, dan 3) memiliki tipe geologi unik.

Dengan dua posisi strategis Desa Sambirejo tersebut maka maka kawasan ini merupakan kawasan yang dilindungi, artimya tidak dilakukan aktivitas apapun yang sifatnya merusak keutuhannya. Adanya penambangan batu breksi di kawasan ini merupakan ancaman yang serius. Kerusakan lingkungan akibat penambangan sudah terlihat. Jalur-jalur gersang akibat lalu lintas truk yang mengangkut hasil tambang terlihat jelas dari atas bukit. Disana-sini terlihat dataran yang berasal dari bukit yang ditambang habis. Perubahan topografi karena pertambangan ini berpengaruh terhadap bentuk lansekap secara keseluruhan. Padahal kawasan ini mempunyai potensi yang relatif mencukupi untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan wisata dengan perpaduan situs arkeologi Candi Ijo dan lansekap yang unik.

Desa Sambirejo sebagai desa wisata perlu dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang memadahi. Untuk itu perlu dikaji kebutuhan riil warga desa dan wisatawan, sehingga berguna untuk perencanaan dan perancangan infrastruktur dan fasilitas yang juga harus memperhatikan fungsi pariwisata selain fungsi umum bagi masyarakat. Hal ini berarti bahwa Pengembangan Desa Sambirejo sebagai salah satu daya tarik wisata yang menyatu dengan destinasi pariwisata *archeological-park* kawasan komplek Candi Prambanan dan sekitarnya.

B. Permasalahan

Desa Sambirejo sebagai kawasan wisata yang baru berkembang pesat terdapat permasalahan terkait dengan keadaan dan ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang masih terbatas untuk melayani kebutuhan wisatawan maupun masyarakat setempat. Perkembangan jumlah wisatawan yang terus meningkat memerlukan fasilitas wisata yang memadahi, terutama masa puncak liburan menyebabkan kesemrawutan lalu lintas dan dapat membahayakan keamanan wisatawan. Infrastruktur jalan yang menanjak dan sempit menyebabkan bus pariwisata mengalami kesulitan untuk naik menuju lokasi tebing breksi maupun candi-candi disekitarnya.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi karakteristik objek-daya tarik wisata di Desa Sambirejo, hubungannya dengan objek-daya tarik wisata *archeological park* kawasan strategis nasional (KSN) Prambanan.
2. Menganalisis keadaan dan ketersediaan serta kebutuhan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di Desa Sambirejo.

II. METODE PENELITIAN

Secara garis besar pendekatan penelitian ini adalah untuk menemukan *sustainable tourism* dimana pariwisata berkembang, lingkungan dan alam tidak rusak, demikian pula sosial ekonomi dan masyarakat setempat dapat berkembang dengan baik.

Metode penelitian dimulai dengan *Rapid Rural Appraisal* (RRA) melakukan observasi dan survai lapangan untuk pemetaan obyek dan daya tarik wisata, kemudian dilakukan survai kuesioner dengan sampel wisatawan untuk menggali kebutuhan-kebutuhan fasilitas dan infrastruktur parwisata berdasar atas kunjungannya pada objek daya tarik wisata; selanjutnya dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber kunci pengelola wisata dan tokoh masyarakat serta pamong desa dan instansi terkait.

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, peta, dan tabel. Narasi deskriptif yang dilengkapi dengan tabel pendukung digunakan untuk menyajikan identifikasi karakteristik DTW. DTW maupun potensi DTW yang sudah

dipetakan disajikan dalam bentuk peta sebaran DTW dan potensi DTW. Sedangkan analisis keadaan dan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pariwisata menggunakan skor.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata merupakan aktivitas manusia yang mencakup tingkah laku manusia, penggunaan sumberdaya dan berinteraksi dengan masyarakat, ekonomi dan lingkungan (Bull, 1995 dalam Sukarsa, 1999). Hal ini tercantum pula dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yangdisediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Aspek-aspek dalam pariwisata tersebut saling berhubungan dan hubungan tersebut dijabarkan dalam sistem pariwisata.

Gunn dan Var (2002) menggambarkan sistem pariwisata sebagai hubungan permintaan dan penawaran. Pasar wisatawan merupakan sisi permintaan (*demand*) dalam pariwisata. Aspek penawaran (*supply*) adalah perjalanan dan destinasi yang terdiri dari transportasi, atraksi, fasilitas dan jasa layanan bagi wisatawan serta informasi dan promosi pariwisata. Beberapa faktor yang mempengaruhi pariwisata adalah sumberdaya alam, kultural, kewirausahaan, permodalan, tenaga kerja, kompetisi, komunitas atau masyarakat, kebijakan pemerintah, dan organisasi-organisasi terkait kepariwisataan.

Burns dan Holden (1995:22) menyatakan bahwa isu-isu penawaran biasanya berkisar mengenai ketersediaan komunikasi, pelayanan, transportasi, akomodasi dan atraksi (termasuk juga aset-aset kultural, perbelanjaan, even-even besar serta fenomena alam yang unik). Sementara itu, aspek permintaan dipengaruhi oleh tiga faktor dasar (Burns dan Holden, 1995:24) yaitu: 1) Sosial, politik, ekonomi dan teknologi; 2) Pola perjalanan dan pergerakan; 3) Motivasi wisatawan dan proses pengambilan keputusan. Aspek permintaan dan penawaran tersebut dihubungan dengan pemasaran. Dalam perencanaan pengembangan pariwisata, konsepsi pariwsata sebagai sistem penawaran dan permintaan merupakan basis dari perencanan dan pengelolaan pariwisata yang efektif. Salah satu dari keduanya tidak boleh lebih mendominasi. Sisi permintaan dan penawaran ini harus berjalan dengan seimbang jika menginginkan kegiatan pariwisata yang dikembangkan berkelanjutan baik secara fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Perencanaan pengembangan pariwisata dilakukan dalam berbagai level. Inskeep (1991) menyebutkan bahwa level perencanaan pengembangan pariwisata terdiri dari: 1) level internasional; 2) level nasional; 3) level regional; 4) level sub regional; 5) level kawasan (area); 6) level site; dan 7) level fasilitas. Hal ini juga tercantum dalam UU No 9 tahun 2010 tentang Kepariwisataan, meski tingkatannya lebih sederhana dimana hanya menyebutkan perencanaan pembangunan kepariwisataan dalam tiga level yaitu rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Setiap level perencanaan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan meliputi: 1) industri pariwisata; 2) destinasi pariwisata; 3) pemasaran; dan 4) kelembagaan kepariwisataan.

Dalam perencanaan pembangunan pariwisata terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan dan harus direncanakan dengan baik. Inskeep (1991) menyebutkan bahwa komponen tersebut adalah: 1) Atraksi dan aktivitas wisata; 2) Akomodasi (bagian dari fasilitas wisata); 3) Fasilitas dan layanan pariwisata lainnya; 4) Transportasi (bagian dari infrastruktur); 5) Infrastruktur lainnya; 6) Pengelola/institusional elemen. Dari komponen diatas terlihat bahwa fasilitas dan infrastruktur merupakan bagian yang harus direncanakan dengan baik bersama dengan komponen lainnya.

Fasilitas merupakan sarana untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, bisa disebut juga kemudahan. Sehingga dalam konteks pariwisata, yang dimaksud fasilitas adalah segala sarana yang membuat aktivitas wisata berjalan dengan lancar atau kemudahan yang diberikan kepada wisatawan untuk melakukan aktivitas wisata. Akomodasi adalah bagian dari fasilitas. Fasilitas lain yang dibutuhkan diidentifikasi sesuai dengan potensi dan arah pengembangan atraksi dan aktivitas wisata dalam sebuah destinasi.

Infrastruktur disebut juga sebagai prasarana yaitu segala sesuatu yg merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Infrastruktur yang memadai penting dalam pembangunan pariwisata. Seringkali keterbatasan infrastruktur menjadi isu utama dalam pembangunan pariwisata di negara berkembang. Elemen infrastruktur yang biasanya dibutuhkan disebuah destinasi wisata adalah: sistem transportasi, air bersih, listrik, pembuangan dan pengolahan sampah dan limbah, drainase, dan komunikasi. Infrastruktur yang direncanakan dengan baik tidak hanya mendukung pengembangan pariwisata namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Infrastruktur yang baik dan memadai mendukung pemeliharan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran.

Studi tentang infrastruktur pariwisata telah dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Abdullah, dkk. (2014) menyebutkan bahwa infrastruktur seharusnya dibangun dengan sistem pemeliharaan yang jelas dan sistematis, tantangan utama bukan dalam penyediaan infrastruktur yang penting bagi kelangsungan aktivitas pariwisata namun pada pemeliharaan sehingga infrastruktur tersebut dapat berfungsi dengan optimal. Diperlukan pula untuk mengadopsi pendekatan konsultatif dan melibatkan para stakeholder yang terkait terutama masyarakat dan komunitas yang terkait langsung dalam perencanaan, desain dan pengelolaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata (Fallon and Kriwoken, 2002).

Transportasi merupakan salah satu elemen infrastruktur yang penting bagi perkembangan destinasi. Transportasi disini tidak hanya berbicara tentang cara perpindahan wisatawan, namun dengan sistem jaringan transportasi yang baik rute wisata dapat dikembangkan dan dioptimalkan bagi kepentingan wisatawan. Terkadang wisatawan memilih untuk mencari alternatif destinasi wisata lain jika destinasi wisata yang dituju susah dicapai atau dengan kata lain tidak tersedia sistem transportasi yang efektif dan efisien (Prideaux, 1999).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Desa Sambirejo

Secara administratif Desa Sambirejo terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Pereng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten
- Sebelah selatan : Desa Sumberharjo dan Gayamharjo, Kecamatan Prambanan
- Sebelah timur : Desa Katekan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten
- Sebelah barat : Desa Madurejo dan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan.

Desa ini terletak pada ketinggian antara 150-425 meter dpal (di atas permukaan air laut), terdiri dari 8 dusun dengan jumlah 19 Rukun Warga dan 45 Rukun Tetangga[1]. Desa Sambirejo memiliki luas keseluruhan 83,9 km^2 dengan kepadatan 66,9 jiwa/km^2.[2] Pada tahun 2015, Desa Sambirejo berpenduduk 5.637 jiwa dengan 2.089 kepala keluarga[3]. Jumlah penduduk laki-laki adalah 2.817 orang dan jumlah penduduk perempuan adalah 2820 orang.

[1] Kecamatan Prambanan dalam Angka, 2016
[2] Kecamatan Prambanan dalam Angka, 2016
[3] Profil Desa Sambirejo, 2015

Sambirejo terletak di wilayah perbukitan. Sekitar 90% bentang alam Desa Sambirejo berupa pengunungan berbatu dan tanah liat. Desa ini termasuk dalam ketegori iklim tropika basah dengan tipe iklim sedang dengan kelembaban 70-80%. Temperatur udara tahunan rata-rata berkisar antara 31,64 -35,57 ºC. Curah hujan rata-rata 1749,70 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 83,80 hari/tahun (Makarim, 2005). Desa Sambirejo merupakan desa yang termasuk dalam satuan perbukitan dengan relief kasar, kisaran kemiringan lereng 30-80% dan tingkat resistensi batuan cukup tinggi. Litologi penyusunan satuan ini antara lain breksi batu apung, batu pasir tufan, batu lempung tufan, breksi andesit, dan larva andesit (Makarim, 2005).

Mayoritas lahan di desa ini pada umumnya ditanami dengan tanaman penghijauan seperti pohon jati, sonokeling, mahoni, sengon jawa, nangka, akasia, serta beberapa tanaman perkebunan seperti melinjo, pete, dan kelapa, sebagian kecil lahan dimanfatkan untuk ladang bila musim penghujan tiba. Jenis tanah yang dominan di desa ini adalah litosol tidak berstruktur, adapun ciriciri tanah ini adalah batuan induk berasal dari batu gamping, terdapat pada daerah dengan relief berbukit hingga pegunungan, (solum tanah dangkal 9 kurang dari 15 cm), berada di atas batuan keras yang belum mengalami perkembangan horizon. Keadaan ini menunjukkan bahwa erosi lebih besar dari proses perkembangan tanah. Selain itu, sebagain besar desa ini keadaan topografinya berupa perbukitan dengan kemiringan terjal.

Lahan persawahan di Sambirejo tercatat sekitar 173 hektar sawah tadah hujan. Semenatara itu, tanah kering berupa ladang hampir dua kali lipat persawahan yaitu 378,65 hektar. Tanah kas desa cukup luas yaitu 88 hektar dan hutan rakyat terdiri dari 165 hektar. Tanah pertanian yang ada di Sambirejo dimilki oleh 1.881 keluarga, dengan masing-masing kepemilikan kurang dari 1 ha.

B. Daya Tarik Wisata di Desa Sambirejo

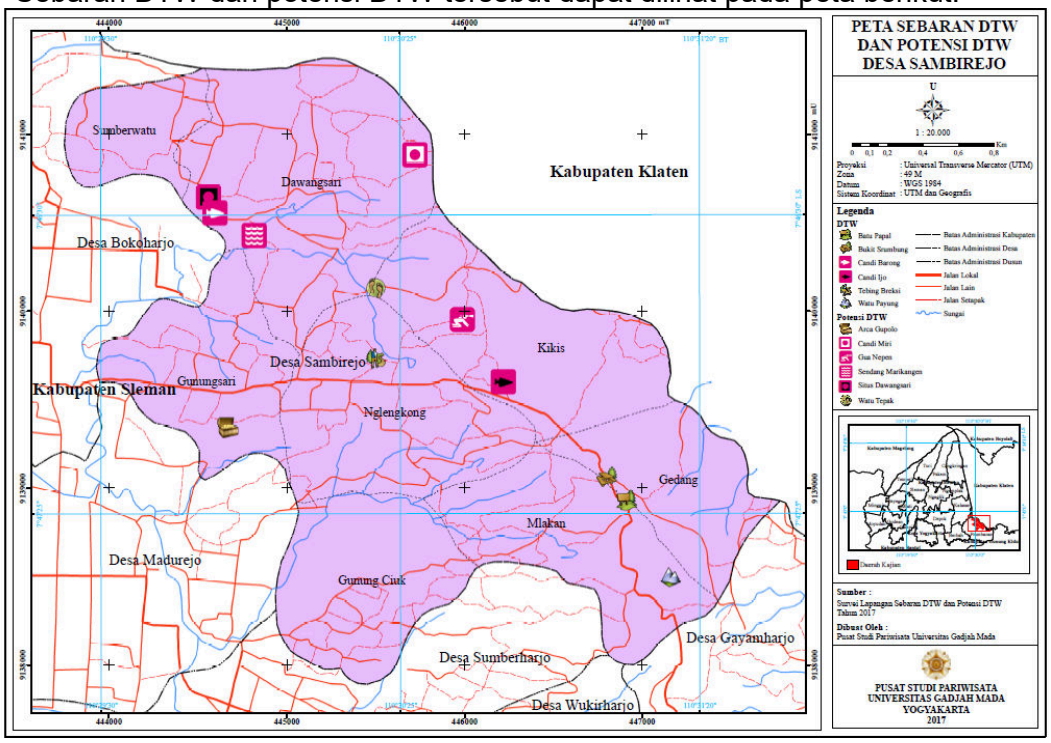
Saat ini Desa Sambirejo dikenal dan identik dengan Taman Tebing Breksi, namun sebenarnya banyak daya tarik wisata lain yang ada di kawasan ini yang dikelola sebelum adanya Taman Tebing Breksi. Contohnya adalah Candi Ijo yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY. Selain itu terdapat Candi Barong dan sebuah resort yang dikelola oleh swasta. Selain Candi Ijo dan Candi Barong, masyarakat juga mulai mengembangkan daya tarik wisata alternatif. Dalam survey yang dilakukan, tercatat sekitar 12 daya tarik wisata maupun potensi daya tarik wisata yang tersebar di Desa Sambirejo, yaitu:

Tabel 1. DTW dan Potensi DTW di Desa Sambirejo

DTW Dikembangkan		**Potensi DTW**	
1.	Tebing Breksi	1.	Arca Gupolo
2.	Candi Ijo	2.	Candi Miri
3.	Batu Papal	3.	Gua Nepen
4.	Bukit Srumbung	4.	Sendang Marikangen
5.	Candi Barong	5.	Situs Dawangsari
6.	Watu Payung	6.	Watu Tepak

Sumber: Survey Lapangan, 2017

Sebaran DTW dan potensi DTW tersebut dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 1 Peta Sebaran DTW dan Potensi DTW Desa Sambirejo

Perkembangan desa wisata ini perlu dikaji baik dari segi fasilitas dan infrastruktur pariwisata, sehingga dapat direncanakan ke depan yang lebih baik untuk mengantisipasi jumlah wisatawan yang terus meningkat. Berikut ini identifikasi dan analisis 6 obyek dan daya tarik wisata berikut ketersediaan 17 jenis fasilitas dan infrastruktur Desa Sambirejo.

1. Tebing Breksi

Tebing Breksi yang terletak di Dusun Nglengkong, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta (koordinat 445498,61 mT dan 9139732,17 mU). Tebing Breksi dikategorikan sebagai DTW alam buatan. Luas kawasan Tebing Breksi yang telah dikembangkan adalah sekitar 1-2 Ha, sedangkan luas keseluruhan kawasan sekitar pendukung obyek wisata ini adalah 20 Ha[4]. Sebelum dijadikan DTW Tebing Breksi merupakan lokasi tambang batu alam, dengan jenis matrik Breksi. Hasil tambang berupa bahan untuk pondasi bangunan, patung, kerajinan (asbak), dan batu tempel untuk candi. Tebing Breksi saat ini dalam status mulai berkembang dan dikelola oleh Satuan Pokdarwis “Lowok Ijo”.

Tim peneliti UPN mengadakan penelitian di Tebing Breksi dan menemukan bahwa Tebing Breksi adalah singkapan kejadian alam pada jutaan tahun yang lalu. Kemudian Tebing Breksi dijadikan laboratorium alam untuk edukasi, sehingga ditetapkan sebagai Kawasan Geoheritage berdasarkan keputusan Kepala Badan Geologi No 1157K/40/BGL/2014 Tanggal 2 Oktober 2014.

Akses menuju ke Taman Tebing Breksi, dari pertigaan Pasar Prambanan ke selatan mengendarai kendaraan bisa bus, minibus, mobil, motor maupun bersepeda. Jalan menuju ke lokasi sudah beraspal, badan jalan dibagian yang datar selebar 11 meter dilengkapi dengan drainase, sedangkan lebar jalan di perbukitan atas adalah 8 meter. Rambu-rambu telah tersedia dan penerangan jalan juga relatif sudah dinilai

[4] Informasi dari Pengelola Tebing Breksi

memadai di sepanjang jalan menuju Tebing Breksi. Jarak tempuh yang akan dilalui oleh wisatawan dari Pasar Prambanan adalah 15 menit. Setelah sampai di Tebing Breksi wisatawan akan menemukan jalan di lokasi. Jalan menuju lokasi Tebing Breksi masih berdebu, tidak ada trotoar, tersedia drainase dan terdapat sepuluh lampu jalan.

Sarana dan prasarana Tebing Breksi terbilang lengkap. Tebing Breksi memiliki jaringan listrik yang bersumber dari PLN dan berfungsi dengan baik. Kemudian di Tebing Breksi juga tersedia jaringan drainase alami dan buatan. Keduanya berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan pengelolaan limbah, umumnya berfungsi dengan baik. Limbah dikumpulkan di suatu tempat untuk limbah padat dan cair dibuang ke jaringan drainase.

Di Tebing Breksi, terdapat dua jaringan air bersih yakni PAM dan tangki. Jaringan ini dinilai pengelola berfungsi dengan baik. Kemudian, perihal komunikasi, banyak operator seluler yang dapat digunakan di Tebing Breksi seperti telkomsel, indosat, xl, dll. Namun jaringan-jaringan ini terbilang belum stabil. Sehingga, pengelola Tebing Breksi memberikan akses WIFI yang dapat diketahui sandinya dengan menanyakan kepada pengelola.

Sarana krusial seperti toilet umum pun tersedia di Tebing Breksi, pengelolanya adalah Satuan Pokdarwis “Lowok Ijo”. Toilet umum ini dijaga oleh pengelola, dan dikenakan biaya Rp 2.000,- tiap penggunaannya. Jumlah petugas kebersihannya adalah 60 orang, pembersihannya dilakukan secara bergilir dan diulang tiap dua jam sekali. Di kawasan Tebing Breksi terdapat banyak tempat warung penjual makanan. Mulai dari stan-stan kecil di sekitar panggung, hingga jejeran rumah makan. Terdapat 18 pedagang kaki lima yang hanya berjualan saat hari libur di dekat panggung terbuka dan 16 rumah makan yang berjualan hampir tiap harinya.

Tempat parkir di Tebing Breksi terbagi menjadi tiga yaitu parkir untuk bus, mobil, dan motor. Parkir bus terletak di depan pintu masuk, mobil di dekat pusat informasi, dan motor di depan jejeran rumah makan. Kawasan parkir dapat memuat 40 bus, 40 minibus, 100 mobil, dan 600 motor. Seluruh kawasan parkir perkerasannya adalah batuan limbah serta dilengkapi dengan penerangan berjumlah dua buah, dan dapat ditambahkan sewaktu-waktu.

Bagi pengunjung yang ingin menunaikan ibadah shalat di Tebing Breksi, juga disediakan tempat ibadah yakni berupa mushala di dekat tempat makan. Mushala ini dapat menampung 60 orang, dan dilengkapi dengan toilet serta tempat wudhu. Di kawasan ini terdapat satu pusat informasi di dekat parkir mobil. Selain itu, juga terdapat loket retribusi yakni di pintu masuk. Untuk parkir motor dikenakan biaya sebesar Rp3.000,- sedangkan mobil dikenakan biaya sebesar Rp5.000,-. Untuk tiket masuk pengelola tidak mengenakan biaya, namun pengunjung diminta memberikan uang seikhlasnya.

Fasilitas lainnya adalah tempat berteduh, pengelola menyediakan gazebo di lokasi Taman Tebing Breksi. Terdapat tiga gazebo di atas tebing dan dua gazebo di bawah Taman Tebing Breksi. Total terdapat lima gazebo. Pengunjung dapat melakukan beberapa aktifitas di area Taman Tebing Breksi yakni mengambil foto, *outbond*, menonton pentas seni, berkemah, *jeep tour*, *motor trail*, foto *pre wedding*, pesta pernikahan, temu komunitas, *gala dinner*, dan pengajian. Dari sekian banyak segmen pasar, pengelola berasumsi bahwa pasar potensial Tebing Breksi adalah wisatawan keluarga.

Menarik untuk dicatat bahwa perkembangan jumlah pengunjung baru tercatat berkembang satu tahun terakhir. Sejak Juli 2016 sampai Juli 2017 terjadi peningkatan angka yang cukup signifikan. Pada bulan liburan panjang Desember dan Januari terlihat kunjungan wisatawan meningkat tajam. Para pengunjung biasanya merangkai dengan kunjungan ke beberapa obyek dan daya tarik wisata lainnya di Desa Sambirejo.

Tabel 2. Jumlah Pengunjung Tebing Breksi Tahun 2016

Bulan	Jumlah Pengunjung (orang)	
	2016	2017
Januari	2.190	83.106
Februari	1.742	60.467
Maret	2.380	55.317
April	5.920	67.001
Mei	9.017	63.537
Juni	7.586	58.070
Juli	36.668	87.772
Agustus	24.143	-
September	36.746	-
Oktober	40.282	-
November	37.292	-
Desember	111.457	-
Total	**315.423**	**475.270**

Sumber: Pengelola Tebing Breksi, 2017

2. Candi Ijo

Candi Ijo merupakan DTW budaya yang terletak di Groyokan Sambirejo Prambanan Sleman pada posisi koordinat 446219,10 mT dan 9139599,79 mU. Kompleks percandian bercorak Hindu ini dinamakan sesuai dengan lokasinya yakni berada di lereng bukit padas yang bernama Gunung Ijo yang memiliki ketinggian ± 427 dpl. Penyebutan nama Desa "Ijo" yang berarti hijau untuk pertama kalinya disebut di dalam Prasasti Poh yang berasal dari tahun 906 masehi.

Di dalam prasasti tersebut ditulis tentang seorang hadirin upacara yang berasal dari desa Wuang Hijo. Candi ijo adalah kompleks percandian yang berteras-teras yang semakin meninggi ke belakang. Pola ini berbeda dengan pola-pola percandian yang terletak di dataran Prambanan. Karena kebanyakan memusat ke tengah. Status pengembangan kompleks Candi Ijo dinilai sudah cukup berkembang. Pengelola Candi Ijo adalah Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).

Untuk dapat menjangkau kompleks candi ijo, dari pertigaan Pasar Prambanan, pengunjung dapat menyewa minibus, moda transportasi online, mobil atau juga dapat menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi jalan menuju lokasi Candi Ijo berupa jalan beraspal dengan perkiraan lebar 8-11 m. Sepanjang jalan tersedia banyak rambu-rambu yang dapat mengarahkan pengunjung agar sampai ke Candi Ijo. Jarak yang akan ditempuh pengunjung dari pertigaan Pasar Prambanan adalah sekitar 10 menit. Perkerasan jalan di lokasi berupa konblok.

Candi Ijo memiliki jaringan listrik yang bersumber dari PLN, jaringan ini dinilai berfungsi dengan baik. Pengelolaan limbah warung makan bergantung pada perseorangan, hal ini dikarenakan lokasinya yang terletak di luar lokasi candi. Di beberapa sisi candi dapat ditemukan petugas kebersihan. Tempat sampah diletakan tersebar di beberapa bagian candi, seluruhnya berjumlah 18. Di area candi utama terdapat 12 tempat sampah dan di bagian bawah candi tersedia 6 tempat sampah. Ketersediaan tempat sampah ini sudah memadai, karena lokasi candi terbilang bersih.

Di kompleks Candi Ijo terdapat dua toilet umum yang tidak dijaga oleh petugas dan pengunjung dikenakan biaya sukarela. Toilet ini terletak di dekat loket karcis masuk. Fasilitas warung makan umumnya dikelola oleh warga sekitar dan terletak di sekitar kompleks Candi Ijo (diluar). Kira – kira terdapat 5 warung makan dan 8 pedagang kaki lima.

Fasilitas parkir Candi Ijo terletak di luar kompleks candi, beberapa di antaranya terletak berdampingan dengan warung makan. Fasilitas parkir ini dikelola oleh warga sekitar dengan membayar pajak pada dinas perhubungan. Pada dasarnya, fasilitas parkir disediakan hanya untuk mobil dan kendaraan pribadi, sehingga belum bisa menampung bus. Pusat informasi wisata terletak di dalam bangunan yang sama, yakni di loket retribusi. Pengelola loket pusat informasi dan loket retribusi adalah BPCB.

3. Candi Barong

Candi Barong atau yang juga biasa dinamai Candi Sari Sorogedug merupakan daerah tempat wisata budaya yang terletak di Dusun Sumberwatu Sambirejo Prambanan Yogyakarta pada posisi 444596,03 mT dan 9140555,40 mU. Dulunya Candi Barong adalah tanah perorangan, dan menyatu dengan gundukan Candi Abang.

Luas kawasan Candi Barong secara keseluruhan adalah 32.000 m^2 sedangkan kawasan Candi Barong yang telah dikembangkan adalah sebesar 20.000m^2. Candi Barong seringkali disebut sebagai Candi Terunik Se-Yogyakarta, karena gapuranya tidak berada di tengah candi utama. Kawasan Candi Barong terdiri dari tiga lokasi yaitu Candi Miri, Situs Ndawangsari, dan Arca Ganesha. Candi Barong kadang digunakan sebagai tempat ibadah pengikut Hindu, khususnya pemujaan Dewa Wisnu dan Dewi Sri.

Sebelum menjadi DTW kawasan Candi Barong adalah sawah milik perorangan. Saat ini Candi Barong sudah berkembang. Pengelolanya adalah dua instansi yakni Pemda dan BPCB. Pemda menangani retribusi dan pengembangan, sedangkan BPCB bertanggung jawab atas lingkungan candi. Untuk menjangkau Candi Barong, dari pertigaan Pasar Prambanan, pengunjung dapat menyewa minibus, jeep tour, atau menggunakan kendaraan pribadi (mobil/motor). Kondisi jalan menuju Candi Barong dari arah Prambanan sudah beraspal, sedangkan dari Candi Barong menuju Candi Ijo masih berupa tanah dan batuan sungai kering. Lebar jalan menuju lokasi adalah 2,5 m. Kemudian rambu – rambu menuju Candi Barong sudah tersedia, tetapi masih jumlah terbatas dan bentuknya sederhana yakni terbuat dari papan kayu. Penerangan Candi Barong telah tersedia di beberapa sisi dan dinilai pengelola sudah tercukupi.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana Candi Barong telah tersedia namun belum memadai. Jaringan listrik Candi Barong bersumber dari PLN dan kantor Candi Barong. Keduanya dinilai berfungsi dengan baik oleh petugas. Kawasan Candi Barong belum memiliki saluran drainase karena daya serap tanah yang tinggi. Saat ini pun belum tersedia warung makan di Candi Barong, karena SK yang melarang masyarakat untuk mendirikan bangunan berjarak 0 – 400 m dari kawasan Candi Barong.

Dalam menjaga kebersihan Candi Barong, terdapat 7 orang petugas yang bertanggungjawab untuk membersihkan kompleks Candi Barong. Dalam satu hari petugas kebersihan membersihkan kawasan Candi Barong hanya sekali. Sampah didominasi daun yang berjatuhan. Di Candi Barong telah tersedia sepuluh tempat sampah. Dalam pengelolaannya, sampah plastik dibakar, dan sampah daun dijadikan pupuk.

Dari aspek ketersediaan air bersih, Candi Barong telah memiliki sumber air bersih yakni PAM dan sumur kantor. Dua – duanya berfungsi dengan baik. Beberapa operator seluler menjangkau Candi Barong seperti Telkomsel dan Indosat, tetapi kualitas jaringannya belum stabil. Candi Barong mempunyai empat toilet umum yang dikelola oleh pihak BPCB. Dua terletak di dalam situs dan sisanya di dekat kantor. Toilet ini dijaga oleh pihak keamanan maupun petugas kebersihan. Pengunjung yang menggunakan toilet dapat membayar secara sukarela. Ada tujuh pertugas kebersihan yang bertanggungjawab atas kebersihan toilet, mereka bekerja secara bergantian.

Umumnya toilet ini dibersihkan tiga kali dalam sehari. Namun kondisi seluruh toilet belum baik sepenuhnya, karena dua diantaranya rusak.

Di Candi Barong belum tersedia warung makan dan pedagang kaki lima, hal ini terkait SK yang melarang warga untuk mendirikan rumah makan di jarak 0-400 m di dekat candi. Hanya ada kawasan parkir yang dikelola secara perorangan dan perkerasan parkir tersebut masih berupa tanah. Kawasan parkir ini diperkirakan bisa memuat 15 mobil dan 100 motor. Kawasan parkir dinilai belum memadai karena saat ini belum bisa menampung minibus dan bus serta tidak dilengkapi dengan penerangan.

Saat ini fasilitas ibadah khususnya mushola belum tersedia di Candi Barong. Pengunjung yang ingin menunaikan shalat dialihkan ke gazebo dekat pintu masuk. Kemudian, tim SAR juga belum ada di Candi Barong, hanya ada petugas keamanan yang berjaga di pos. Pusat informasi wisata dapat dijumpai di seberang Candi Barong. Pusat informasi ini juga merupakan loket retribusi. Petugas keamanan dari BPCB juga turut bertugas untuk mengarahkan pengunjung.

Saat ini kebanyakan pengunjung Candi Barong adalah wisatawan nusantara, namun jangkauan pasarnya telah mencapai lingkup internasional. Candi Barong ramai dikunjungi saat musim liburan, satu harinya dapat mencapai 2000 pengunjung. Kemudian jam ramai kunjungan Candi Barong adalah pukul 16.00-18.00 WIB. Wisatawan datang ke Candi Barong untuk melakukan beberapa hal seperti kegiatan edukasi bagi mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia, penelitian arkeologi dan kebudayaan, pembuatan karya tulis siswa SMA, piknik dan vakansi, serta *outbond*.

4. Watu Papal

Watu Papal adalah DTW alam, berupa lahan kosong yang berada di tepi tebing dan terdapat sebuah batu besar dengan view pemandangan yang menarik. Lokasi Batu Papal adalah dusun Mlakan dengan koordinat 446912,18 mT dan 9138933,16 mU. Luas kawasan yang telah dikembangkan sekitar 400 M^2.

Watu papal ini mulai dibuka untuk wisatawan sejak 2016 dengan tiket masuk + parkir sebesar Rp. 5000,00 untuk motor dan Rp. 10.000,00 untuk mobil, watu papal ini buka setiap hari mulai jam 05.00-20.00, Watu papal ini letaknya berada di tanah pribadi milik salah satu warga. Tanah ini berupa bukit pekarangan yang terletak dibelakang rumah, lalu batunya diambil untuk dijadikan renovasi bangunan, sampai suatu saat terjadi peristiwa besar yaitu gempa jogja pada bulan Mei 2006, saat gempa itulah tebing tersebut mengalami longsor yang mengakibatkan ada sebuah batu besar yang ada di bukit tersebut patah, padahal dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa batu besar tersebut angker/ ada makhluk astral yang menunggui batu tersebut, sehingga ketika terjadi longsor warga tidak ada yang berani memindahkan / memotong batu tersebut agar rapi, sehingga untuk memotong batu tersebut pemilik lahan meminta bantuan salah satu orang yang berasal dari jawa timur.

Sekitar tahun 2007-2009 tempat tersebut dibuka untuk dijadikan gardu pandang, sehingga banyak orang yang sering bermain di lokasi tersebut dikarenakan tempat tersebut memiliki pemandangan yang bagus, dan baru sekitar 2016 kemarin pemilik lahan mengembangkan gardu pandang tersebut sebagai salah satu DTW yang ada di Sambirejo tersebut, dengan biaya pemilik lahan, menghabiskan dana kurang lebih 40 juta. Watu papal ini memiliki persaingan yang berat dari lokasi DTW yang ada disekitarnya, pasalnya watu papal ini letaknya berada di pertengahan antara watu payung dan bukit srumbung, yang dimana watu payung dan bukit srumbung juga menawarkan atraksi yang sama juga.

Untuk menuju ke lokasi pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil atau motor atau menggunakan fasilitas jeep tour yang tersedia dari tebing breksi. Jika dari jalan Prambanan-Piyungan maka pengunjung akan melihat plang

yang bertuliskan watu papal. Jarak tempuh dari pertigaan prambanan kurang lebih 7.3 km. Lokasi dari DTW tersebut di samping jalan yang sudah beraspal dengan lebar kurang lebih 3 meter dengan penerangan jalan yang mencukupi.

Pengunjung sebagian besar adalah wisatawan lokal dan regional jawa yang mengikuti tour dari jeep yang ada di tebing breksi. Peak season nya pada saat libur lebaran, tahun baru, libur sekolah, dan hari sabtu- minggu, untuk low season terjadi ketika hari-hari aktif bekerja dan bulan puasa, sedangkan untuk peak hour terjadi pada pukul 05.00 dan 15.00, sedangkan untuk low hour terjadi pada pukul 11.00-14.00, sedangkan untuk aktivitas wisatawan yang ada disana yaitu untuk menikmati sunset dan sunrise, selain itu juga banyak wisatawan yang sekedar berfoto-foto di spot foto yang disediakan pengelola, yang berkunjung kesini merupakan semua usia rata tapi yang paling banyak yang kalangan muda, pemilik tidak bisa menyebutkan jumlah pengunjung secara pasti karena tidak adanya tiket masuk, namun diperkirakan sekitar 5000 pengunjung setelah dibuka sejak 2016 lalu.

5. Bukit Srumbung

Bukit srumbung dibuka sejak 26 mei 2017. Bukit srumbung ini menempati lahan milik pribadi. Jika pengunjung memandang sebelah timur di pagi hari, maka mereka akan mendapati sunrise dengan latar kawasan klaten dan solo. Disisi barat daya wisatawan dapat melihat sunset dengan latar kawasan jogja. Rencana dan ide untuk menjadikan bukit srumbung ini sebagai tempat wisata dimulai sekitar pertengahan 2016. Ide tersebut pada awalnya muncul setelah pak jumiran memiliki seorang teman yang mengelola salah satu DTW di daerah ndlingo yaitu di pinus pengger.

Dari situlah pemilik lahan yaitu Pak Jumiran memiliki angan-angan untuk membuat DTW di bukit srumbung tersebut sebagai wadah untuk masyarakat sekitar memiliki pekerjaan yang layak seperti halnya yang ada di tebing breksi. Pak Jumiran mengerjakan sendirian dan di bantu dengan adik-adiknya dalam membuat akses utama menuju atas bukit. Setelah itu Pak Jumiran membuat salah satu gazebo dan spot-spot foto sebanyak 2 buah, dan sebuah toilet. Pengunjung tidak dipatok harga tertentu, hanya diminta untuk membayar seikhlasnya. Keuntungan yang diperoleh nantinya akan di bagi hasil dengan warga, sehingga bisa menjadi sumber tambahan dana bagi masyarakat sekitar.

Akses menuju ke lokasi bisa menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil atau motor. Letaknya berada di samping jalan utama maka sudah bagus dan berupa aspal dengan lebar kurang lebih 3 meter dan sudah memiliki penerangan disepanjang jalan menuju DTW, jarak tempuh dari pertigaan Prambanan kurang lebih 7 km. Untuk kondisi jalan yang ada di lokasi sendiri masih beralaskan batu dan tanah, hal ini memang disengaja oleh pengelola dikarenakan mereka ingin membangun DTW yang ramah lingkungan/ bisa menyatu dengan alam, sedangkan untuk lampu penerangan yang ada di lokasi hanya berada di samping parkiran saja jadi di atas bukitnya belum ada penerangan yang memadahi.

Pengunjung sebagian besar adalah wisatawan domestik yang berasal dari wilayah sumatra dan pulau jawa serta beberapa dari wisatawan lokal. Meski tidak banyak, beberapa wisatawan mancanegara berkunjung ke tempat ini yaitu: dari amerika serikat sebanyak 3 orang, dari malaysia sebanyak 3 orang dan dari papua newgini sebanyak 4 orang. Peak season terjadi di hari sabtu, minggu, hari libur nasional, dan musin liburan. Low season pada hari-hari kerja (senin-jumat). Peak hour terjadi pada pukul 05.00 wib dan pukul 16.00 wib, sedangkan untuk low hour terjadi pada pukul 10.00 wib dan pukul 12.00 wib.

6. Watu Payung

Kawasan ini dibuka sejak pertengahan juni 2017, tepatnya di bulan puasa. Watu payung terletak di tanah pribadi milik salah satu warga. Pada dasarnya spot watu

payung ini sudah lama diketahui masyarakat sekitar karena sejak lama masyarakat sekitar sering menghabiskan waktu untuk melihat pemandangan disana karena memang view yang ditawarkan disana menarik. Pengunjung bisa melihat rawa jombor dan gunung lawu dari watu payung. Setelah booming Tebing Breksi dan Candi Ijo maka masyarakat sekitar memiliki inisiatif untuk mengelola kawasan watu payung tersebut agar menjadi DTW melalui kekuatan gotong royong masyarakat sekitar. Saat ini banyak pengunjung yang mengetahui DTW tersebut dan kawasan ini menjadi salah satu titik henti jeep tour yang ada di tebing breksi.

Sebelumnya lokasi watu payung hanya sebuah pekarangan kebun yang ditanami pohon jati. Saat ini telah masuk pada tahap perintisan pariwisata, karena baru saja dibuka dan masih perlu dukungan fasilitas dan infrastruktur agar layak disebut DTW. Kawasan ini juga mempunyai susuan organisasi pengelola dengan total pengelola 30 orang dengan penanggung jawab Bapak Paiman. Pengelola DTW tersebut berasal dari warga sekitar. Pengunjung yang masuk ke Watu Payung hanya diminta membayar seikhlasnya, sementara yang dipatok hanyalah ongkos parkir yaitu Rp2.000,- per kendaraan.

Untuk menuju ke lokasi kita bisa menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil atau motor, atau bisa menggunakan fasilitas jeep tour yang tersedia dari tebing breksi, apabila dari pertigaan jalan raya prambanan dari arah jogja kita belok kanan lalu dari arah jalan raya piyungan prambanan kita bisa ambil jalan menuju arah ke candi ijo, terbing breksi, dan batu papal nanti tinggal lurus saja sampai arah ke batu papal, nanti masih lurus lagi sampai ketemu ada semacam plang dan baliho yang bertuliskan watu payung/ songgo langit, nanti tinggal belok saja ke arah tersebut kira-kiran 200 meter jarak DTW dari jalan utama, nanti jalan untuk menuju lokasi setelah belok dari jalan aspal akan meliwati jalan tanah dan berbatu, lebar jalan kurang lebih 3 meter, untuk penerangan jalannya menuju ke watu payung sendiri belum tersedia, rencana pengelola akan mengembangkan 2 jalan, yaitu yang satu jalan khusus untuk offroad jeep tour yang dari breksi dan yang satu jalan utama untuk kendaraan pribadi, namun saat ini yang tersedia baru jalan yang dilalui jeep wisata tersebut.

Jarak tempuh dari pertigaan prambanan kurang lebih 7.5 km. Untuk kondisi jalan yang ada di lokasi sendiri masih beralaskan tanah, sedangkan untuk lampu penerangan yang ada di lokasi hanya berada di samping parkiran dan ada beberapa lampu yang menerangi di kawasan DTW khususnya yang letak nya di dekat spot-spot foto.

Pengunjung sebagian besar dari wisatawan lokal dan regional jawa yang mengikuti tour dari jeep yang ada di tebing breksi. Peak season terjadi waktu lebaran/musim liburan, hari jumat, sabtu, dan minggu serta ketika ada event outdor seperti kemah. Low season terjadi ketika hari-hari aktif bekerja. Peak hour terjadi pada pukul 16.30-18.00, sedangkan untuk low hour terjadi pada pukul 11.00-14.00. Aktivitas wisatawan yang ada disana antara lain: menikmati sunset dan sunrise, berfoto-foto di salah satu yang menjadi spot khas di sini yaitu batu payung, dan ada beberapa yang berkunjung untuk edukasi seperti meneliti batu-batuan yang ada di sana.

Fasilitas dan infrastruktur di enam DTW tersebut diatas dapat dipilah menjadi tujuh belas jenis. Jika diberi skor maka terlihat bahwa Tebing Breksi meraih nilai tertinggi, yaitu diatas 3. Artinya, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata di DTW ini relatif lengkap dan kondisinya juga baik. Hal ini tidak mengherankan, mengingat pemerintah daerah telah melakukan investasi besar-besaran di kawasan ini. Selama tiga tahun berturut-turut (2015-2017) berbagai fasilitas dan infrastruktur di bangun dengan desain yang modern dan dinamis. Anugerah terbaik adalah Tebing Breksi sangat “instagramable”, sehingga wisatawan berbondong-bondong berkunjung ke kawasan ini untuk berfoto-foto.

Sementara itu nilai terendah diperoleh oleh Watu Payung. Kawasan ini memperoleh nilai di bawah 2. Nilai ini tidak diartikan bahwa kondisi fasilitas dan

infrastruktur di kawasan ini buruk, namun belum memadai karena: 1) tidak semua jenis fasilitas dan infrastruktur tersedia; 2) fasilitas dan infrastruktur yang tersedia masih relatif sekedarnya. Hal ini terjadi karena kawasan Watu Payung terhitung baru dan lahan lokasi DTW merupakan milik pribadi. Jika hak milik lahan adalah pribadi, pengembangan kawasan sepenuhnya menggunakan dana pribadi/swasta yang mungkin jumlahnya terbatas sehingga fasilitas dan infrastruktur yang dibangun belum lengkap.

Rangkuman analisis ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pariwisata di enam DTW Desa Sambirejo dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Ketersediaan dan Kondisi Fasilitas dan Infrastruktur

17 Fasilitas dan Infrastruktur		Taman Breksi	Candi Ijo	Batu Papal	Bukit Srumbung	Candi Barong	Watu Payung
1.	Jaringan Listrik	4	4	3	0	3	2
2.	Jaringan drainase	4	3	0	0	2	0
3.	Pengelolaan Limbah	4	3	0	0	0	0
4.	Petugas Kebersihan	4	4	3	3	3	3
5.	Tempat Sampah	4	4	3	3	0	3
6.	Jaringan Air Bersih	4	3	2	0	3	0
7.	Jaringan Telekomunikasi	2	3	2	2	2	2
8.	Toilet umum	4	3	3	2	2	3
9.	Warung Makan	3	0	2	2	0	0
10	Pedagang Kaki lima	3	0	0	0	0	0
11	Parkir	3	2	3	2	2	3
12	Fasilitas Ibadah	4	0	3	0	0	0
13	SAR	0	0	0	0	0	0
14	Pusat Informasi Wisata	3	3	3	3	3	3
15	Loket Restribusi	3	3	3	3	3	3
16	Fasilitas Berteduh/Gazebo	2	0	3	3	0	0
17	Signage	2	3	2	2	2	2
	Nilai Rata-rata	**3,12**	**2,24**	**2,06**	**1,47**	**1,47**	**1,41**

Keterangan nilai: 0 (tidak ada), 1 (sangat buruk), 2 (buruk), 3 (baik), 4 (sangat baik)

IV. KESIMPULAN

Desa Sambirejo mempunyai potensi daya tarik wisata alam dan budaya yang cukup banyak. Potensi ini akan menguntungkan bagi masyarakat lokal Sambirejo jika dikembangkan dengan serius. Hal ini di dukung oleh pemerintah daerah yang memberikan dukungan penuh dengan pengembangan Kawasan Tebing Breksi melalui bantuan pembangunan atraksi dan fasilitas-fasilitas pendukung. Masyarakat lokal juga mulai menyadari potensi yang dimiliki dan mulai menata diri dengan mengembangkan kelembagaan pengelola desa wisata dan membuka usaha pelayanan dan jasa bagi wisatawan yang berkunjung.

Saat ini Desa Sambirejo dengan Taman Tebing Breksi dan candi-candi disekitarnya menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Perkembangan jumlah pengunjung terus meningkat bersamaan dengan popularitas sebagai tempat atraksi wisata dan selfie foto lansekap yang menawan. Terkait dengan

fasilitas dan infrastruktur dirasakan masih kurang memadai, perlu dilakukan pembenahan dan pengembangan. Kendala dalam hal pembiayaan pembangunan fasilitas dan infrastruktur khususnya untuk DTW yang berada pada lahan pribadi perlu dipecahkan agar pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di Desa Sambirejo dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

_____. (2016). *Kecamatan Prambanan Dalam Angka 2016*. BPS Kabupaten Sleman.

_____. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Prambanan 2016*. BPS Kabupaten Sleman.

_____. (2015). *Profil Desa Sambirejo*. Pemerintah Desa Sambirejo.

Abdullah, Shardy, Abdul, Razak Arman, and Jaafar, Mastura. 2014. Public Tourism Infrastructure: Challenges in the Development and Maintenance Activities. *SHS Web of Conferences* . Volume 12, 2014. 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR)

Burns, Peter and Holden, Andrew. (1995). *Tourism: A New Perspective*. Prentice Hall International. United Kingdom.

Fallon, Liza D and Kriwoken, Lorne K . 2002. Community involvement in tourism infrastructure the case of the Strahan Visitor Centre, Tasmania*. Tourism Management*. Volume 24, Issue 3, June 2003, Pages 289–308

Gunn, Clare A. dan Var, Turgut. (2002). *Tourism Planning: basics concepts cases*. Ed. 4. Routledge, New York.

Pamularsih, Tyas R. (2016). *Strategi Pengembangan Tebing Breksi Sambirejo Sebagai Atraksi Pariwisata Berbasis Daya Dukung Kawasan*. Tesis. Magister Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Tidak Dipublikasikan.

Pearce, Douglas G. (1987). *Tourism Today: A Geographical Analysis*. Longman Scientific and Technical. England.

Prideaux, Bruce. 1999. The Role Of The Transport System In Destination Development. *Tourism Management*. Volume 21, Issue 1, February 2000, Pages 53–63.

Sukarsa, I. Made. (1999). *Pengantar Pariwisata*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur.

Tema 3

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
TERHADAP KEPARIWISATAAN

Quality of Life (QOL) Masyarakat Lokal pada Destinasi Wisata Desa Gili Indah

Dian Dinanti [1], Hadi Abdurrahman [1], Nindya Sari [1]

[1] *Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang*

Email: dinanti@ub.ac.id *; hadiabdurrahman@gmail.com ; nindya.s@ub.ac.id*

ABSTRAK

Sekali masyarakat menjadi suatu destinasi wisata, maka lingkungan dan kehidupan masyarakat yang berada di destinasi tersebut akan terkena dampak pariwisata dan secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap kualitas hidup (Quality Of Life) masyarakat lokal tersebut (Uysal, 2009; Kim, 2002; Aref, 2011). Identifikasi terhadap QOL masyarakat lokal pada suatu destinasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, karena dukungan dari masyarakat lokal pada suatu destinasi sangat penting dalam perencanaan, pengembangan dan keberlanjutan suatu kegiatan pariwisata (Kim, 2002). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana QOL masyarakat lokal di destinasi wisata Desa Gili Indah serta variabel apa yang berpengaruh dominan dalam membentuk QOL tersebut dengan membandingkan QOL antara ketiga Daerah Tujuan Wisata yang ada di Desa Gili Indah (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan). Hasil analisis menunjukkan bahwa QOL masyarakat lokal di Destinasi wisata Gili Air dan Meno masih masuk dalam kategori baik, sedangkan QOL masyarakat lokal di DTW Gili Trawangan sudah masuk dalam kategori buruk. Hasil analisis juga menunjukkan variabel yang berpengaruh dominan dalam membentuk QOL masyarakat lokal pada ketiga gili adalah variabel health & safety well-being.

Kata kunci: Quality of Life, Pariwisata, Dampak, Masyarakat Lokal.

I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupkan salah satu sektor unggulan nasional yang yang berkembang cukup pesat saat ini, termasuk bagi Kabupaten Lombok Utara (KLU). Salah satu kawasan yang sedang dikembangkan dan sudah menjadi tujuan wisatawan domestik dan asing saat ini adalah kawasan wisata Desa Gili Indah (Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan). Destinasi Wisata Desa Gili Indah tidak hanya menjadi unggulan pariwisata bagi pemda KLU, namun juga telah menjadi unggulan pariwisata NTB.

Angka kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Wisata Desa Gili Indah pada tahun 2012 mencapai ±400.000 wisatawan, angka tersebut mampu memberikan sumbangan sekitar 40% dari 1 juta kunjungan wisatawan yang di targetkan dalam program Visit Lombok Sumbawa I tahun 2012 (Ninik, dkk, 2014). Dari catatan Dinas Pariwisata KLU diperoleh informasi bahwa angka kunjungan wisatawan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2015, kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Wisata Desa Gili Indah sudah mencapai 454.173 wisatawan dengan di dominasi oleh wisatawan asing, yaitu sebesar 87% dan sisanya merupakan wisatawan domestik, yaitu hanya 13%. Semakin tingginya angka kunjungan wisatawan yang berkunjung merupakan salah satu indikator berkembang atau meningkatnya sektor pariwisata pada suatu destinasi. Perkembangan sektor pariwisata, khususnya di Destinasi Wisata Desa Gili Indah sudah memberikan dampak ekonomi berupa terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) KLU dari sektor pariwisata.

Peningkatan PAD KLU dan jumlah kunjungan wisatawan yang terus mengalami peningkatan tersebut merupakan suatu keberhasilan yang patut di apresiasi, namun di sisi lain keberhasilan tersebut juga perlu diwaspadai. Doxey (dalam Page & Hall, 2003)

mengatakan bahwa “large number of visitors cause tensions and ultimately lead to antagonism”. Seiring dengan perkembangan pariwisata dan kunjungan wisatawan yang terus meningkat, terjadi perubahan-perubahan sikap negatif yang ditunjukkan masyarakat bergantung pada dampak yang mereka rasakan. Sekali masyarakat menjadi suatu destinasi wisata, maka lingkungan dan kehidupan masyarakat yang berada di destinasi tersebut akan terkena dampak pariwisata dan secara tidak langsung akan berdampak juga terhadap kualitas hidup *(Quality Of Life)* masyarakat lokal tersebut (Uysal, 2009; Kim, 2002; Aref, 2011).

Menurut WHO, *Quality Of Life* (QOL) didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian mereka. Sedangkan Aref (2011) mendefinisikan QOL sebagai berikut “*Quality of life is a degree of well-being felt by an individual or a group of people*”. Semakin banyak dampak negatif yang dirasakan masyarakat lokal akibat kegiatan pariwisata pada suatu destinasi tersebut, maka semakin buruk QOL masyarakat lokalnya. Sebaliknya apabila pariwisata pada suatu destinasi tersebut lebih banyak memberikan dampak positif, maka akan semakin baik pula QOL masyarakat lokalnya (Uysal, 2009).

Identifikasi terhadap QOL masyarakat lokal pada suatu destinasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, terutama bagi tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Karena dukungan dari masyarakat lokal pada suatu destinasi sangat penting dalam perencanaan, pengembangan dan keberlanjutan suatu kegiatan pariwisata (Kim, 2002). Oleh sebab itu, kajian terkait Identifikasi QOL masyarakat lokal di Destinasi Wisata Desa Gili Indah menjadi hal yang menarik untuk dilakukan, selain agar pembangunan pariwisata tidak hanya terfokus pada aspek fisik, namun juga memperhatikan tingkat kualitas hidup masyarakat setempat sebagai tuan rumah.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan pada ketiga gili yang ada di Destinasi Wisata Desa Gili Indah, yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Penelitian ini merupakan kajian deskriptif konfirmatory dengan membandingkan QOL masyarakat lokal pada 3 lokasi wisata tersebut serta variabel yang yang berpengaruh dominan dalam membentuk QOL tersebut. Empat variabel yang digunakan adalah material well-being, community well-being, emotional well-being dan health and safety well-being (Kim, 2002). masing-masing variabel tersebut diukur dengan 23 indikator (Tabel 1) yang diadopsi dari penelitian sebelumnya (Kim, 2002; Aref, 2011; Pradono, dkk, 2005)

Sample dalam penelitian ini adalah 326 orang yang merupakan masyarakat lokal yang menetap di Destinasi Wisata Desa Gili Indah dengan proporsi masing-masing 109 orang pada masing-masing gili (Gili Air, Meno dan Trawangan).

Lima skala likert digunakan untuk menilai persepsi masyarakat pada masing-masing indikator atau butir kuisioner dengan nilai 1 untuk “sangat tidak setuju” hingga nilai 5 yang menunjukkan “sangat setuju”. Penilaian terhadap QOL masyarakat lokal di Destinasi Wisata Desa Gili Indah dibagi dalam empat klasifikasi berdasarkan nilai total rata-rata (total mean score) pada empat variabel penelitian. Klasifikasi “sangat buruk” apabila nilai total rata-rata 1-2, klasifikasi buruk apabila nilai total rata-rata antara 2.1-3, klasifikasi baik apabila nilai total rata-rata antara 3.1-4, dan klasifikasi sangat baik apabila nilai total rata-rata antara 4.1-5. Variabel dan indikator dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian sebelumnya (Kim, 2002; Pradono, 2010; dan Aref, 2011).

Sedangkan untuk menganalisis variable yang berpengaruh dalam membentuk QOL digunakan *Confirmatory Factor Analysis (CFA).* Empat variabel endogen yang digunakan untuk mengidentifikasi QOL masyarakat lokal di kawasan pariwisata Desa Gili Indah adalah *Material well-being* dengan 8 indikator, *Community well-being, Emotional well-being* dengan masing-masing 4 indikator dan *Health and safety well-*

being dengan 7 indikator.

Karena variabel laten tidak dapat diukur secara langsung, maka dalam penelitian ini digunakan model CFA second order, yaitu dengan melakukan pengukuran dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan dengan bantuan perangkat lunak smart PLS 3.0, yaitu salah satu software statistik yang sering digunakan dalam banyak penelitian

Tabel 1. Variabel dan indikator penelitian

Variabel Endogen	**Indikator Penilaian *(Observed Variable)***
Material well-being (MW)	Pajak tempat tinggal (MW1) Biaya hidup (MW2) Harga kebutuhan pokok (MW3) Harga lahan (MW4) Pendapatan (MW5) Ketersediaan lapangan kerja (MW6) Kesempatan kerja (MW7) Peluang bisnis baru (MW8)
Community well-being (CW)	Kehidupan sosial *(neighborhood)* (CW1) Pelayanan umum (CW2) Fasilits umum (CW3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat (CW4)
Emotional well-being (EW)	Waktu luang (EW1) Kualitas waktu luang (EW2) Kenyamanan dan keamanan dalam beribadah (EW3) Aktivitas budaya lokal (EW4)
Health & safety well-being (HSW)	Kesehatan (HSW1) Kualitas air bersih (HSW2) Kualitas udara (HSW3) Kebersihan lingkungan (HSW4) Perilaku *alcoholism* (konsumsi minuman keras) (HSW5) Keamanan di lingkungan tempat tinggal (HSW6) Kenyamanan di lingkungan tempat tinggal (HSW7)

Sumber: Kim (2002), Aref (2011), Pradono (2010)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

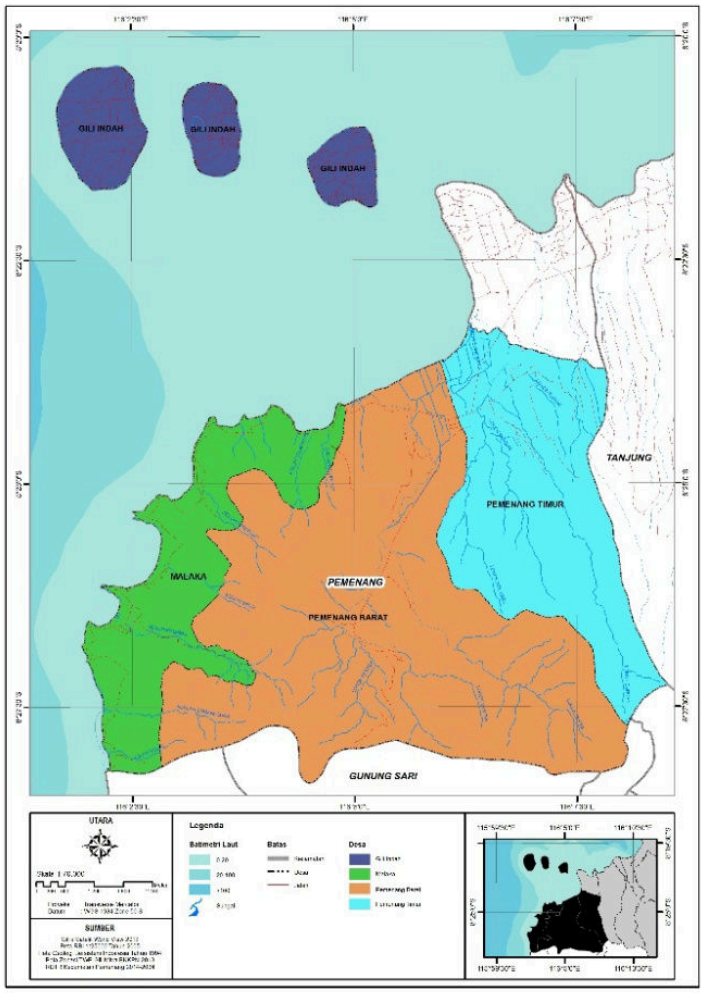
A. Gambaran Umum Wilayah Studi

1. Kondisi Geografis

Desa Gili Indah merupakan salah satu dari empat desa yang berada di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Desa Gili Indah terdiri dari tiga pulau kecil (gili) yang masing-masing gili tersebut berdiri sebagai dusun, yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan dengan luas wilayah 716 ha (Tabel 2). Sebelah utara Desa Gili Indah berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan berbatasan dengan Selat Lombok, sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Sire dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa (gambar 1)

Tabel 2. Luas wilayah Desa Gili Indah

Dusun	**Luas Wilayah (Ha)**
Gili Air	179,15
Gili Trawangan	351,89
Gili Meno	185,36
Luas Total	716,40



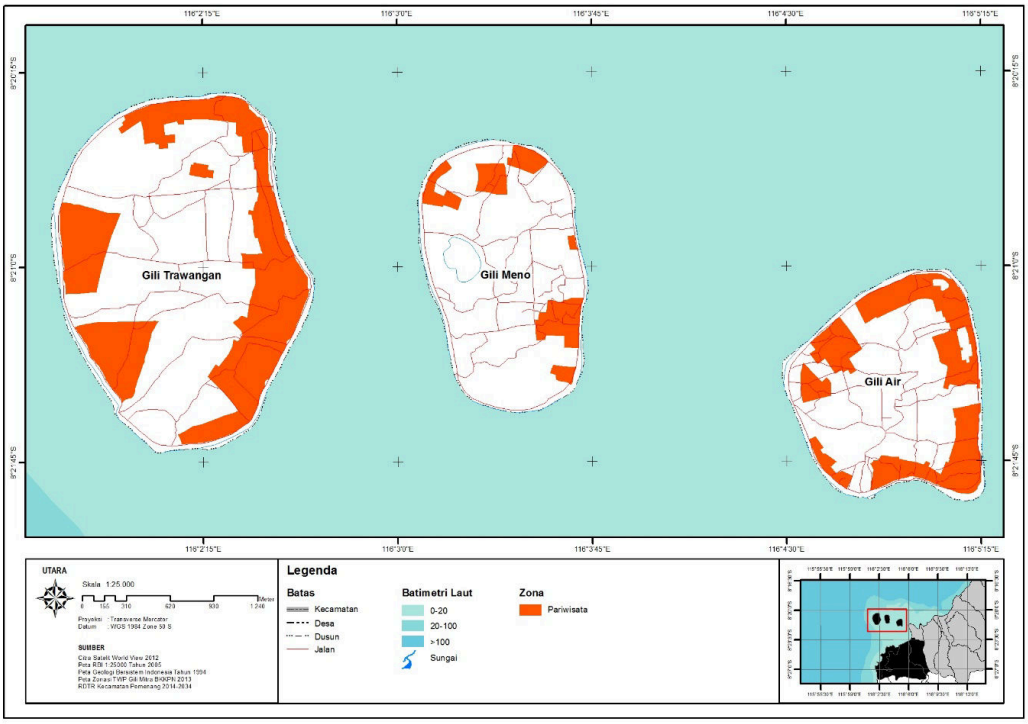
Gambar 1. Peta Orientasi Desa Gili Indah

2. Zona Pariwisata

Pada butir tujuan penataan ruang (Perda Kabupaten Lombok Utara No.9 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Lombok Utara) disebutkan bahwa pengembangan wisata menjadi salah satu prioritas pengembangan budidaya wilayah. Hal tersebut akan diwujudkan dengan beberapa strategi, yaitu mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pariwisata serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung. Dalam perda tersebut juga disebutkan bahwa kawasan wisata Desa Gili indah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi. Sedangkan dalam peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat No.7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) disebutkan bahwa kawasan wisata Desa Gili Indah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) berupa kawasan wisata pantai, bawah laut, olahraga berbasis bahari dan budaya

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pemenang tahun 2014-2034, zona wisata pada Destinasi Wisata Desa Gili Indah paling besar terdapat di Gili Trawangan, yaitu seluas 118,35 ha, kemudian Gili Air seluas 60,67 ha, dan yang paling kecil adalah zona wisata di Gili Meno, yaitu hanya seluas 22,76 ha (Gambar 2).

Gili Trawangan memang merupakan gili yang paling jauh dari pulau utama Lombok dibandingkan dengan dua Gili lainnya, namun Gili trawangan merupakan gili yang paling besar dan paling ramai dikunjungi. Karena memang fasilitas pendukung kegiatan pariwisata seperti kafe, hotel, bar, restoran, dll sudah lebih lengkap dan beragam dibandingkan kedua gili lainnya, yaitu Gili Air dan Gili Meno. Zona pariwisata Gili Meno terletak ditengah-tengah, yaitu antara dua gili lainnya. zona pariwisata Gili Meno masih belum terlalu ramai sehingga kebanyakan wisatawan yang berkunjung adalah mereka yang memang bertujuan untuk relaksasi ditengah kesunyian. Gili Air merupakan Gili dengan jumlah penduduk lokal paling banyak dibandingkan dengan Gili Trawangan dan Gili Meno. Suasana pada zona pariwisata Gili Air tidak terlalu ramai, tidak juga sepi. Kawasan zona pariwisata Gili Air masih mempertahankan daya tarik alami dari pedesaan.



Gambar 2. Zona Pariwisata

3. Demografi

Jumlah penduduk Desa Gili Indah adalah 4.560 jiwa dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Dusun Gili Air (Tabel 3)

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Gili Indah Dirinci Berdasarkan Dusun & Jenis Kelamin

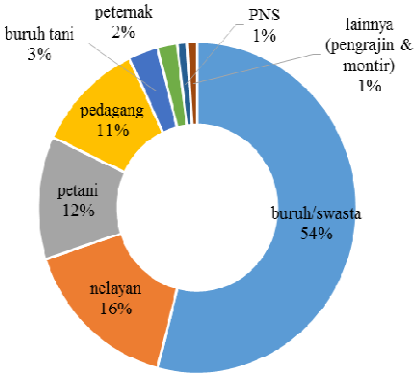
Dusun	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
Gili Air	1.087	898	1.985
Gili Meno	358	318	676
Gili Trawangan	1.011	888	1.899
Jumlah	2.456	2.104	4.560

Sumber : Buku data rekapitulasi jumlah penduduk Desa Gili Indah, 2015

4. Mata Pencaharian

Berdasarkan data statistik Kecamatan Pemenang tahun 2015, sebagian besar masyarakat lokal di Desa Gili Indah bermatapencaharian sebagai buruh atau pekerja swata, khususnya yang berkaitan dengan industri pariwisata seperti transportasi,

akomodasi/penginapan, cafe, rumah makan/warung/restaurant, dan kegiatan usaha jasa pariwisata lainnya (Gambar 2)



Gambar 2. Mata pencaharian masyarakat Desa Gili Indah

5. *Agama*

Menurut agama atau kepercayaan yang dianut, mayoritas penduduk Desa Gili Indah menganut agama Islam (90%), sisanya beragama Hindu dan Kristen.

6. *Bahasa*

Disamping bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, masyarakat Desa Gili Indah juga menggunakan bahasa sasak, yaitu bahasa daerah yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Desa Gili Indah juga mempelajari bahasa Inggris yang digunakan untuk berkomunikasi dengan wisatawan asing yang berkunjung. Rata-rata penduduk lokal Desa Gili Indah belajar berkomunikasi dengan bahasa inggris secara otodidak. Karena memang sebagian besar wisatawan yang berkunjung adalah wisatawan mancanegara. Rata-rata masyarakat lokal belajar berbahasa inggris secara otodidak, mereka dengan sendirinya terbiasa menggunakan bahasa inggris untuk dapat berkomunikasi dengan para wisatawan asing.

7. *Adat & Kebudayaan Masyarakat*

Sebagai Daerah Tujuan Wisata, Desa Gili Indah masih menjaga adat dan budaya lokal yang sudah ada dan diwariskan secara turun-temurun. Pitana (2005) menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata akan cenderung berdampak pada perubahan sosial dan budaya pada masyarakat penerima atau masyarakat lokal akibat kedatangan wisatawan dengan berbagai macam budaya yang dibawanya. Namun sampai saat ini, masih dijumpai budaya-budaya masyarakat lokal Desa Gili Indah seperti nyongkolan, mandi safar, maulidan, maleman dan presean (stick fighting). Ada juga rudat, yaitu kelompok seni Islam berupa tarian yang diiringi musik dan syair-syair islami.



(a) **(b)**

Gambar 3. Beberapa tradisi adat masyarakat Desa Gili Indah

Keterangan :
(a) Presean
(b) Tradisi Mandi Safari

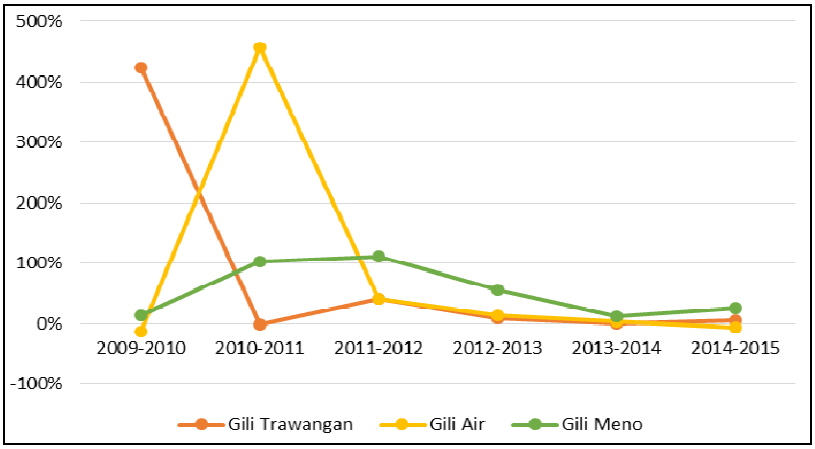
8. *Wisatawan*

Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata Desa Gili Indah terus mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, kunjungan wisatawan tertinggi terjadi di Gili Trawangan, yaitu sebanyak 333.546 kunjungan wisatawan atau sebesar 73% dari total jumlah keseluruhan kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan kedua terbanyak adalah Gili Air, yaitu 79.147 kunjungan atau sekitar 17% dan kunjungan wisatawan terkecil adalah Gili Meno, yaitu sebanyak 41.480 kunjungan wisatawan atau hanya sekitar 9%. Tingginya jumlah wisatawan pada kawasan wisata Gili Trawangan salah satunya disebabkan karena Gili Trawangan sudah lebih dahulu berkembang dan dikenal banyak wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal tersebut juga dimungkinkan karena memang kawasan wisata Gili Trawangan berkembang dengan konsep pariwisata massive dan terbuka. Berbeda dengan Gili Meno yang yang lebih berkembang dengan konse exclusive dan private, serta Gili Air yang berkembang dengan lebih mempertahankan nilai budaya local. Dengan konsep pengembangan yang demikian, wisatawan yang berkunjung lebih didominasi oleh wisatawan mancanegara, terutama wisatawan yang berkunjung ke Gili Trawangan. Sehingga dapat diasumsikan bahawa kondisi tersebut akan dapat mempengaruhi perbedaan QOL pada masyarakat lokal pada ketiga gili.

Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2015 sebanyak 394.049 (87%), sedangkan kunjungan wisatawan nusantara hanya sebesar 60.124 (13%).

Puncak kunjungan wisatawan tertinggi yang berkunjung ke kawasan wisata Gili Trawangan terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 424%. Hal tersebut merupakan hal yang wajar mengingat kawasan wisata Gili Trawangan dengan popularitas dan konsep pengembangan yang berbeda dari Gili Air dan Meno. Namun pada tahun berikutnya, kunjungan wisatawan yang berkunjung cenderung menurun. Wisatawan justru mulai banyak mengunjungi Gili Air dan Meno. Pada tahun 2011, kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Gili Air dan Meno mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Wisatawan yang berkunjung ke Gili Air meningkat sebesar 457% dari jumlah kunjungan pada tahun sebelumnya. Begitu juga dengan Gili Meno, peningkatan angka kunjungan wisatawan meningkat sebesar 102% dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wisatawan sudah mulai berpindah menuju Gili Air dan Gili Meno. Kondisi tersebut sesuai dengan teori siklus hidup pariwisata yang dikemukakan oleh butler (dalam Pitana, 2005) yang mengatakan bahwa, seiring tingkat perkembangannya, suatu destinasi akan mengalami penurunan kwalitas dan daya dukung sehingga wisatawan sudah mulai mencari dan mengunjungi destinasi baru.



Gambar 4. Pertumbuhan kunjungan wisatawan

B. Quality Of Life (QOL) Masyarakat Lokal di Destinasi Wisata Desa Gili Indah

Hasil analisis QOL menunjukkan bahwa nilai rata-rata total keempat variabel di Gili Trawangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Gili Air dan Gili Meno, khususnya pada variabel material well-being (MW) dan health and safety well-being (HSW) (Tabel 4).

Tabel 4. Klasifikasi QOL pada Destinasi Wisata Desa Gili Indah

Dimensi	Gili Air	Gili Meno	Gili Trawangan
Material well-being	3,05	3,08	2,87
Community well-being	3,41	3,57	3,02
Emotional well-being	3,52	3,47	3,24
Health and safety well-being	3,53	3,51	2,66
Total mean scores	3,37	3,40	2,94
Kriteria QOL	Baik	Baik	Buruk

Sumber : Hasil analisis



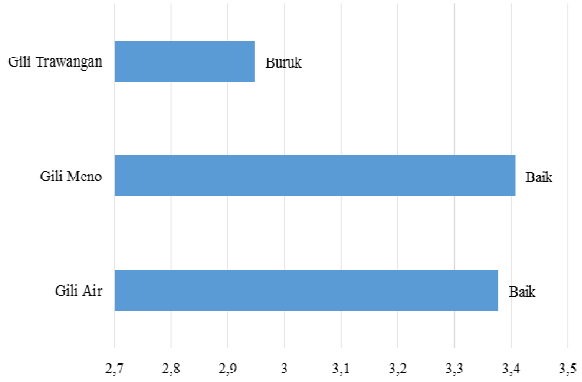
Gambar 5. Grafik nilai rata-rata per variabel

Pada Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata total (total mean score) berdasarkan empat variabel QOL di Gili Air adalah 3,37, nilai rata-rata total Gili Meno adalah 3,40, dan nilai rata-rata total Gili Trawangan adalah 2,94. Gili Meno memiliki nilai rata-rata total tertinggi karena mayoritas responden masih merasa puas dengan item-item (indikator) pada keempat variabel diatas. Dengan kata lain bahwa kegiatan pariwisata di Destinasi Wisata Gili Meno masih belum memberikan dampak negatif yang begitu signifikan terhadap kehidupan mereka, justru lebih banyak memberikan dampak positif. Begitu juga dengan Gili Air, nilai rata-rata total pada Destinasi Wisata Gili Air adalah 3,37, nilai kedua tertinggi setelah Gili Meno.

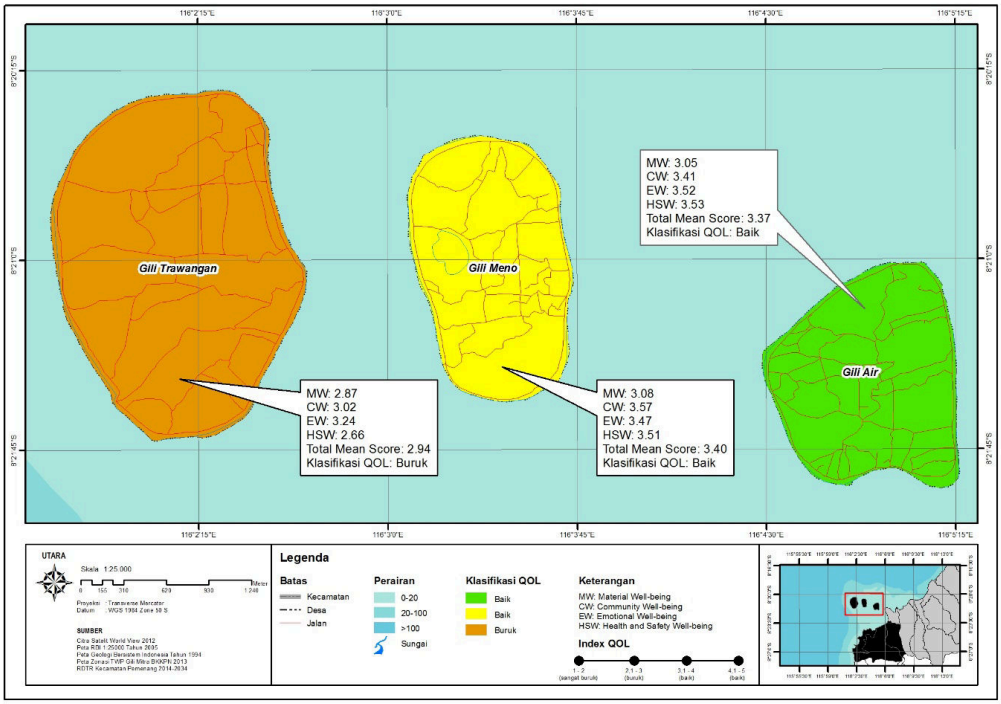
Mayoritas responden di DTW Gili Air juga memberikan respon yang hampir sama dengan masyarakat lokal di Gili Meno. Berbeda dengan Gili Trawangan, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata total jawaban responden DTW Trawangan jauh lebih rendah dibandingkan dengan Gili Air dan Gili Meno, yaitu hanya 2,94. Mayoritas responden sudah merasa bahwa kegiatan pariwisata cenderung memberikan dampak yang buruk terhadap beberapa aspek kehidupan mereka, seperti harga lahan, biaya hidup dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, lingkungan yang kotor akibat sampah dari kegiatan pariwisata serta tingkat keamanan dan kenyamanan yang mereka rasa sudah mulai berkurang.

Perbedaan persepsi dan sikap yang ditunjukkan masyarakat lokal pada ketiga gili sudah jelas dipengaruhi sejauh mana pariwisata ditempat tersebut sudah berkembang. Berbeda tingkat perkembangannya, berbeda pula sikap yang ditunjukkan masyarakat lokal pada destinasi tersebut (Butler dalam Pitana, 2005 & Doxey dalam Hall, 2003). Hal terebut sesuai dengan temuan bahwa memang nilai rata-rata total pada Gili Trawangan lebih rendah dibandingkan Gili Air dan Gili Meno dikarenakan DTW Gili Trawangan sudah lebih dahulu berkembang. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa DTW Gili Trawangan memang berkembang sebagai pariwisata

massive dan terbuka, sedangkan Gili Air dan Meno lebih berkembang dengan konsep pariwisata exclusive, private dan pariwisata budaya. Daerah Tujuan Wisata wisata Gili Trawangan sudah lebih dahulu berkembang dibandingkan Gili Air dan Gili Meno, sehingga dampak negatif, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan sudah mulai banyak dirasakan masyarakat lokal. Selain itu, dimungkinkan juga karena wisatawan yang berkunjung ke Gili Air dan Meno masih sangat sedikit dibandingkan Gili Trawangan, mengingat bahwa memang DTW Gili Air dan Gili Meno lebih berkembang dengan konsep pariwisata exclusive, private dan pariwisata budaya, berbeda dengan Gili Trawangan yang lebih berkembang dengan konsep pariwisata massive dan terbuka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa QOL masyarakat lokal di DTW Gili Air dan Gili Meno masih masuk dalam kategori baik, sedangkan QOL masyarakat lokal di DTW Gili Trawangan sudah masuk dalam kategori buruk



Gambar 6. Total Mean Score Dan Klasifikasi QOL Masyarakat Lokal Kawasan Wisata Desa Gili Indah



Gambar 7. *Quality Of Life* Masyarakat Lokal di Kawasan Wisata Desa Gili Indah

C. Analisis variabel yang berpengaruh dominan dalam membentuk QOL masyarakat Desa Gili Indah

Analisis variable yang berpengaruh terhadap QOL dilakukan dengan menggunakan analisis CFA. Besarnya kontribusi masing-masing item dalam mengukur variabel laten dapat diketahui melalui loading factor masing-masing item. Sedangkan besarnya kontribusi variabel laten terhadap konstruk endogen ditunjukkan dengan nilai weight. Berikut besarnya kontribusi item (indikator penilaian) terhadap variabel laten dan variabel laten terhadap konstruk endogen (QOL).

Tabel 5. Output analisis CFA pada Gili Air

Variabel	Dimensi	Item	Weight Dimensi	Loading Item
Quality of Life (QOL)	*Material well-being* (MW)	MW2	0.304	0.770
		MW3		0.748
		MW4		0.753
		MW5		0.627
		MW6		0.871
		MW7		0.878
		MW8		0.605
	Community well-being (CW)	CW1	0.207	0.706
		CW2		0.800
		CW3		0.878
		CW4		0.870
	Emotional well-being (EW)	EW1	0.191	0.882
		EW2		0.790
		EW4		0.961
	Health & safety well-being (HSW)	HSW1	0.376	0.921
		HSW2		0.970
		HSW3		0.926
		HSW4		0.599
		HSW6		0.893
		HSW7		0.866

Tabel 6. Output analisis CFA pada Gili Meno

Variabel	Dimensi	Item	Weight Dimensi	Loading Item
Quality of Life (QOL)	Material well-being (MW)	MW2	0.332	0.575
		MW3		0.784
		MW4		0.624
		MW5		0.871
		MW6		0.878
		MW7		0.806
		MW8		0.672
	Community well-being (CW)	CW1	0.158	0.606
		CW2		0.838
		CW3		0.718
		CW4		0.615

Variabel	Dimensi	Item	Weight Dimensi	Loading Item
	Emotional well-being (EW)	EW1	0.199	0.873
		EW2		0.771
		EW4		0.962
	Health & safety well-being (HSW)	HSW1	0.394	0.912
		HSW2		0.969
		HSW3		0.925
		HSW4		0.589
		HSW6		0.886
		HSW7		0.825

Tabel 7. Output analisis CFA pada Gili Trawangan

Variabel	Dimensi	Item	Weight Dimensi	Loading Item
Quality of Life (QOL)	Material well-being (MW)	MW2	0.337	0.842
		MW3		0.805
		MW4		0.602
		MW5		0.824
		MW6		0.873
		MW7		0.859
		MW8		0.590
	Community well-being (CW)	CW1	0.211	0.670
		CW2		0.855
		CW3		0.847
		CW4		0.835
	Emotional well-being (EW)	EW1	0.188	0.855
		EW2		0.783
		EW4		0.947
	Health & safety well-being (HSW)	HSW1	0.353	0.894
		HSW2		0.950
		HSW3		0.876
		HSW4		0.578
		HSW6		0.879
		HSW7		0.827

Dari hasil analisis faktor konfirmatori *(Comfirmatory Factor Analysis),* didapat persamaan pengukuran QOL masyarakat lokal di DTW Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan sebagai berikut:

- Model pengukuran QOL masyarakat lokal di DTW Gili Air:
  QOL = 0.304MW + 0.207CW + 0.191EW + 0.376HSW (1)
- Model pengukuran QOL masyarakat lokal di DTW Gili Meno:
  QOL = 0.332MW + 0.158CW + 0.199EW + 0.394HSW (2)
- Model pengukuran QOL masyarakat lokal di DTW Gili Trawangan:
  QOL = 0.337MW + 0.211CW + 0.188EW + 0.353HSW (3)

Model menunjukkan bahwa keempat variabel diatas membentuk QOL secara positif dan signifikan. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi level pengukuran pada

keempat variabel laten tersebut cenderung dapat memperbesar nilai QOL masyarakat lokal di kawasan wisata Gili Air. Dengan kata lain, semakin besar dampak positif yang dirasakan masyarakat dari keberadaan pariwisata, maka semakin baik pula persepsi yang mereka berikan dan secara otomatis juga akan semakin baik pula QOL nya

Model diatas menunjukkan bahwa keempat variabel *(material well-being, community well-being, emotional well-being* dan *health & afety well-being)* membentuk QOL secara positif dan signifikan. Selain itu, model diatas juga menginformasikan bahwa variabel *health & safety well-being* (HSW) merupakan variabel yang paling dominan dalam membentuk QOL di destinasi wisata Desa Gili Indah

IV.KESIMPULAN

Berdasarkan nilai QOL menunjukkan bahwa nilai rata-rata total (total mean score) empat variabel laten eksogen (material well-being, community well-being, emotional well-being dan health & Safety well-being) pada Gili Trawangan lebih rendah dibandingkan dengan Gili Air dan Gili Meno. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden pada Daerah Tujuan wisata Gili Trawangan memandang keberadaan pariwisata mulai memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap kehidupan mereka, dibandingkan dengan wisata di Gili Meno dan Gili Air. Hasil analisis QOL menunjukkan bahwa tingkat QOL masyarakat lokal di Gili Air dan Gili Meno masih masuk dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata kepuasan untuk Gili Air adalah 3,29 dan Gili Meno adalah 3,40. Namun, tingkat QOL masyarakat lokal pada kawasan wisata Gili Trawangan sudah masuk dalam kategori buruk dengan nilai rata-rata kepuasan sebesar 2,94

Perbedaan persepsi dan sikap yang ditunjukkan masyarakat lokal pada ketiga gili sudah jelas dipengaruhi oleh sejauh mana pariwisata ditempat tersebut sudah berkembang. Berbeda tingkat perkembangannya, berbeda pula sikap yang ditunjukkan masyarakat lokal pada destinasi tersebut (Butler dalam Pitana, 2005 & Doxey dalam Hall, 2003). Hal terebut sesuai dengan temuan bahwa memang nilai rata-rata total pada Gili Trawangan lebih rendah dibandingkan Gili Air dan Gili Meno dikarenakan kawasan wisata Gili Trawangan sudah lebih dahulu berkembang dan pada kondisi eksisting sudah menunjukkan adanya perubahan yang significant berupa penurunan kualitas lingkungan, ekonomi dan social masyarakat di Gili Trawangan

Kegiatan pariwisata di kawasan wisata Gili Meno masih belum memberikan dampak negatif yang begitu signifikan terhadap kehidupan mereka, justru lebih banyak memberikan dampak positif. Begitu juga dengan Gili Air, nilai rata-rata total pada kawasan wisata Gili Air adalah tertinggi setelah Gili Meno. Mayoritas responden di kawasan wisata Gili Air juga memberikan respon yang hampir sama dengan masyarakat lokal di Gili Meno. Namun demikian, perbedaan nilai antara Gili Air dan Meno menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata terutama dari sisi jumlah kunjungan wisatawan yang menuju Gili Air sudah mulai meningkat.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis CFA diketahui bahwa dimensi health and safety well-being merupakan dimensi yang paling dominan dalam membentuk atau menjelaskan variabel latennya, yaitu QOL secara keseluruhan baik di Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan.

DAFTAR PUSTAKA

Aref, Fariborz. 2011. *The Effects of Tourism on Quality Of Life: A Case Study Of Shiraz, Iran.* Life Science Journal. Vol.8.

Budilestari, Ninik, dkk. (2014). Permasalahan Lingkungan Di Sempadan Pantai Taman Wisata Perairan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Jurnal Kepariwisataan Indonesia Vol.09 No.1 Maret 2014.

Ghozali, Imam., 2006. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Kim, Kyungmi. 2002. *The Effects Of Tourism Impacts Upon Quality Of Life Of Reridents In The Community.* Virginia Polytechnic Institute and State Universiry.
P.Nkemngu, Achi-Angyi. 2015. *Quality of Life and Tourism Impacts: a Community Perpective.* African Journal of Hospitality Vol.4.
Page, S. & Hall, C.M. 2003, Managing Urban Tourism, Prentice Hall, Harlow.
Pitana, Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta. Andi.
Uysal, Muzaffer. *Quality of Life of Residents and Sustainability in The Destination Community.* Virginia Polytechnic Institute and State University.

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA (KASUS STUDI KAMPUNG DI KOTA SEMARANG)

Holi Bina Wijaya[1], Muhammad Indra Hadi Wijaya[1] dan Putri Prasetyan[1],

[1]P5 UNDIP, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota,
Universitas Diponegoro
Email: p5undip@yahoo.com

ABSTRAK

Dinamika perkembangan perkotaan di Kota Semarang tidak terlepas dengan perkembangan kampung kota di dalamnya. Pada beberapa kasus, aktivitas masyarakat, bentuk fisik kampung, serta nilai-nilai sejarah dalam kampung kota merupakan potensi wisata yang tersembunyi, yang membutuhkan peran pihak-pihak untuk memunculkan daya tarik wisata tersebut. Tulisan ini menemukenali bahwa peran kewirausahaan lokal telah mampu menghidupkan potensi wisata ini tidak hanya berkontribusi positif terhadap usaha ekonomi, tetapi juga pengembangan sosial bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan ini dipengaruhi oleh adanya transformasi bentuk kewirausahaan menjadi kewirausahaan sosial pada pengembangan kegiatan wisata di kampung kota. Kewirausahaan sosial ini telah mendorong terbentuknya kampung kota menjadi kampung kreatif yang menyajikan atraksi dan layanan wisata. Dalam konteks ekonomi, kewirausahaan sosial ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis pribadi, melainkan berkontribusi pada keuntungan dan nilai tambah usaha pariwisata untuk kepentingan masyarakat kampung.

Kata kunci: Kewirausahaan sosial, kampung kota, pariwisata

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kota-kota di Indonesia tidak bisa lepas dari keberagaman budaya asli suatu daerah. Kebudayaan asli kota-kota di Indonesia saat ini masih sedikit tersisa di antara kampung-kampung kota. Kampung kota di Indonesia tumbuh disaat pemerintahan kolonial Belanda saat membangun kota modern dan kampung menjadi inisial bagi tempat orang pribumi (Kustiw an, Ukrin, & Aulia, 2015). Dalam perkembangannya hunian yang dibangun secara madniri oleh masyarakat di daerah perkotaan sering disebut sebagai kampung kota. Setiawan (2010) dalam proses perkembangan kota kampung masih mendapat kesempatan untuk memberi wujud dan makna kehidupan perkotaan yang lebih baik dan khas di Indonesia. Hal ini menegaskan setiap kampung memiliki karakteristik tersendiri, karena tiap kampung merepresentasikan kekhasan sejarah, kemampuan dan usaha.

Berawal dari karakteristik kampung kota, pada masa lalu kampung-kampung memiliki peran dan fungsi penunjang aktivitas kota. Di Semarang kampung kota memiliki keterkaitan dengan sejarah pemerintahaan kolonial Belanda. Seperti halnya kampung diberi nama Semarang yang diberi nama sesuai dengan profesi atau mata pencarian penduduknya, begitu juga dengan keadaan di Kota Semarang, yakni kampung-kampung tradisional yang berkembang di sekitar pusat pemerintahan Kotapraja Semarang diberi nama sesuai dengan nama profesi dari mayoritas penduduknya. Profesi penduduk itu sendiri, muncul sebagai akibat logis dari permintaan pasar dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tinggal di wilayah pusat-pusat pemerintahan. Beberapa toponim yang terletak di pusat pemerintahan Semarang kuno seperti Kulitan, Jagalan, Bustaman Kauman dll.

Melihat kemajuan kota dengan kemajuan modernitas dan pembangunan yang pesat sebagaimana kota-kota dengan konsep keteraturan, permasalahan muncul seperti kampung kota mulai tersisih dan terkucilkan. Selain itu terdapat beberapa kampung kota yang tidak dipertahankan keberadaannya. Kawasan permukiman

tersebut dibiarkan berkembang mengikuti perkembangan kawasan perdagangan jasa. Kampung kota yang tidak dipertahankan ini karena berada pada posisi startegis yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Upaya pelestarian kampung kota di semarang dilakukan dengan berbagai hal salah satunya dari sector ekonomi dan sosial. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam konteks sosial ekonomi. Menggali kembali potensi dari setiap karakteristik kampung melalui kewirausahaan. Dalam prosesnya kewirausahaan di kampung sedikit banyak bertransformasi menjadi kewirausahaan sosial memberikan kontribusi keuntungan dan nilai tambah usaha dalam pariwisata untuk kepentingan masyarakat. Hal ini menjadikan implementasi kewirausahaan sosial dalam beberapa kasus berpotensi membentuk kawasan pariwisata melalui kampung kreatif melalui difusi inovasi usaha.

Makalah ini disusun dalam empat bagian utama. Bagian pertama berupa pendahuluan, memberikan latar belakang dan kerangka penelitian. Bagian kedua menjelaskan materi dan metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Kemudian, bagian ketiga menguraikan pembahasan kerangka teoretis dan temuan empiris kampung, kewirausahaan sosial, dan pariwisata di Semarang. Diambil dari bagian di atas, bagian keempat menyajikan kesimpulan dari makalah ini.

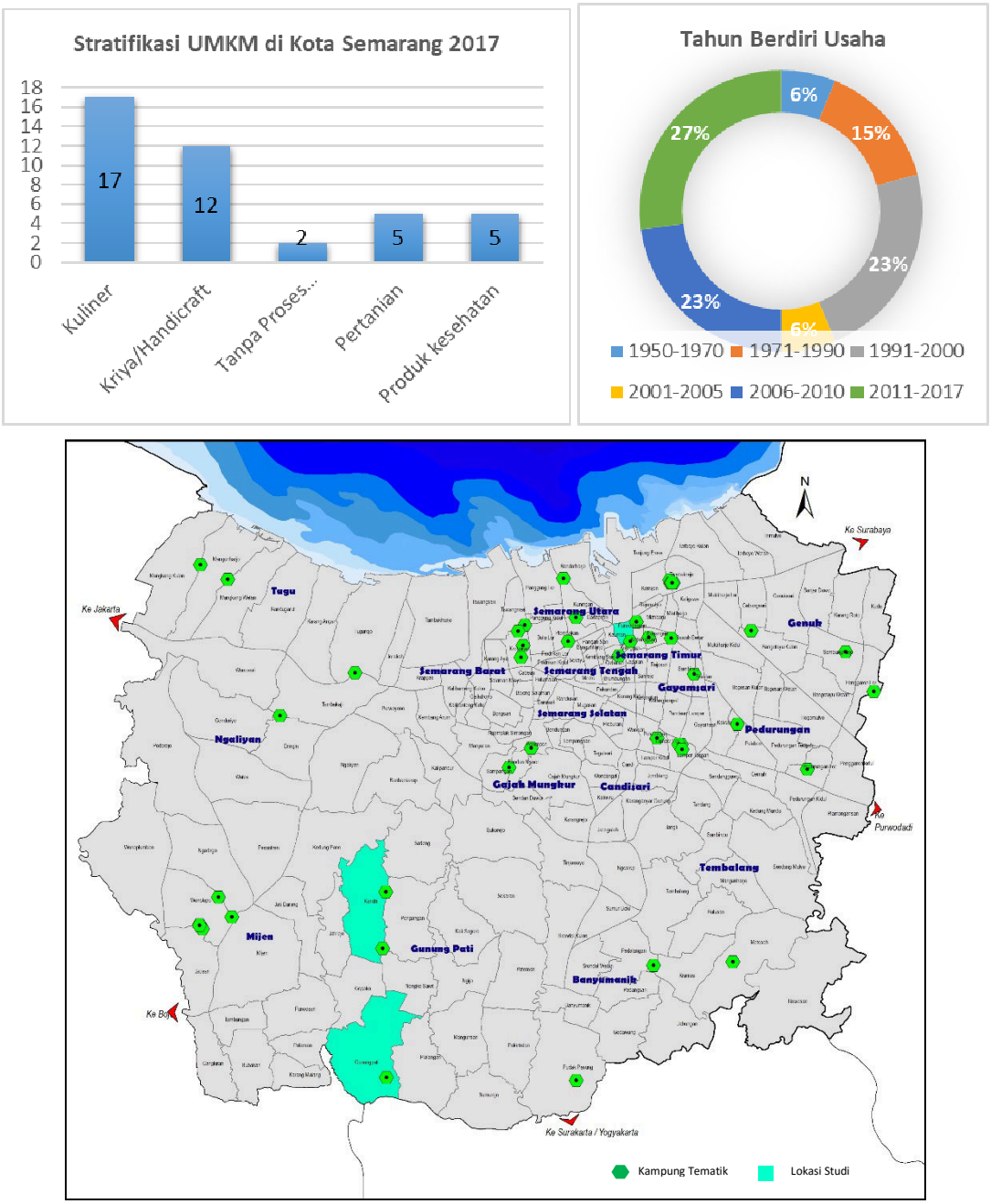
II. METODE

Kajian kewirausahaan sosial dalam pengembangan pariwisata dilakukan di beberapa kampung tematik di Kota Semarang dengan tema kepariwisataan. Komponen yang ditelaah meliputi kegiatan usaha yang ada di dalam kampung, kegiatan wisata yang terjadi, serta hubungan dan transformasi kegiatan usaha, pariwisata, serta aspek sosial kemasyarakatan lokal, khususnya hubungan pengusaha dalam pengembangan pariwisata kampung.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui survey intansi dari institusi pemerintah. Data primer dikumpulkan melalui pertama survey penyebaran kuesioner di setiap kecamatan di Kota Semarang untuk identifikasi kampung yang memiliki tematik pariwisata dan di identifikasi 3 kampung (Kampung Malon, Kampung Bustaman dan Kampung Aquaponik Kandri). Kedua, wawancara dengan pemangku kepentingan seperti Bappeda, kelompok usaha di kampung terpilih, dan pelaku usaha. Sedangkan untuk masyarakat kampung meliputi pemimpin masyarakat setempat, organisasi pemuda (karang taruna), LSM lokal untuk mengetahui sejarah Kampung. Materi yang digali mencakup isu-isu yang berkaitan dengan pembentukan, organisasi dan prioritas strategis dan dampaknya dalam hal kewirausahaan sosial di kampung kota.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki kampung tematik di wilayahnya. Keberadaan kampung tematik ini tak lain berkat adanya peran dari Walikota Semarang yang menginisiasi adanya kampung tematik tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan meminta setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang untuk mempersiapkan 1 kampung tematik di wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Rencana ini dimulai sejak akhir tahun 2016, yaitu tepatnya pada Bulan September dengan jumlah sebanyak 32 kampung tematik.



Gambar 1. Stratifikasi UMKM dan Peta Sebaran Kampung Tematik Kota Semarang

Pembentukan kampung tematik ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas kampung kumuh yang ada di Kota Semarang agar dapat menjadi wilayah yang nyaman untuk ditinggali. Dengan meningkatnya kualitas kampung kumuh tersebut, diharapkan lokasi wisata yang ada di Kota Semarang. Dengan menggunakan konsep klaster, didapatkan 7 kampung yang menggunakan konsep kewirausahaan sosial di Kota Semarang, yaitu Desa Wisata Aquaponik, Kampung Batik Malon, Kampung Bugangan, Kampung Bustaman, Kampung Pengolahan Bandeng, Kampung Ikan Asap, dan Kampung Makanan Ringan Siroto. Dari ketujuh kampung tersebut, terdapat 3 kampung yang memiliki potensi pariwisata yang dapat berkembang, yaitu Kampung Bustaman, Kampung Batik Malon, dan Kampung Aquaponik Kandri.

A. Profil Usaha Pariwisata di Kampung-Kampung Kota Semarang

1. Kampung "Gulai Kambing" Bustaman

a. Sejarah dan Perkembangan Kampung Bustaman

Kampung Bustaman dikenal sebagai kampung "kambing" karena banyaknya penjual kambing di kampung ini. Kampung Bustaman ini didirikan oleh K.H. Bustaman sekitar 350 tahun yang lalu. Pada mulanya, Kampung Bustaman merupakan sebuah pusat penjualan kambing di Kota Semarang dengan adanya lima juragan kambing yang ada di kampung ini. Adapun masing-masing juragan tersebut masing-masing memiliki empat hingga lima pekerja yang membantu kegiatan usahanya. Dengan banyaknya kegiatan jual beli kambing di kampung ini, dapat dipastikan juga adanya banyak produk sisa dari penjualan daging kambing tersebut. Bahan-bahan sisa selain daging yang tidak terpakai atau tidak terjual dimanfaatkan dengan baik oleh Mbah Klenteng (mayarakat Kampung Bustaman) untuk membuat produk olahan baru. Produk sisa dari penjualan kambing, seperti jerohan dsb diolah oleh Mbah Klenteng untuk membuat gulai. Semakin lama, pengolahan gulai kambing ini semakin banyak dilakukan oleh masyarakat sehingga akhirnya Kampung Bustaman menjadi terkenal sebagai Kampung Gulai Kambing.

Seiring dengan perkembangan perkotaan Semarang dan pertumbuhan kota yang pesat memaksa eksistensi kampung-kampung lama di Semarang redup. Di bidang usaha semakin banyak pedagang kambing yang muncul di Kota Semarang di luar Kampung Bustaman. Kegiatan penjualan kambing saat ini semakin berkurang dan akhirnya terhenti sama sekali tanpa adanya pedagang yang berjualan di kampung tersebut yang tersisa adalah pedagang Gulai Kambing.



Sumber: Dokumentasi Peneliti dan Hysteria 2017.

Gambar 2. Aktivitas Kampung Bustaman dan Festival Tengok Bustaman

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi demografi di kampung Bustaman yang Berada di Kelurahan Purwadinatan memiliki 4.689 penduduk dengan 1.051 keluarga dan memiliki kepadatan penduduk 9569/km^2. Sebagian besar penduduk di wilayah ini bekerja di sector informal seperti buruh industry, bangunan dan pedagang. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi hal yang menarik di kampung ini adalah terdapat di Gang Gedung Sepuluh yang terdiri atas 10 rumah dihuni lebih dari 100 jiwa.

Adanya aktivitas yang diprakarsai oleh suatu komunitas perkotaan bernama Hysteria memberikan nafas baru bagi aktivitas perdagangan kambing di Kampung Bustaman. Aktivitas bertajuk "Tengok Bustaman" ini menghidupkan kembali aktivitas perdagangan kambing di kampung ini. Aktivitas "Tengok Bustaman" tersebut menjadikan Kampung Bustaman menjadi suatu kampung tematik yang memiliki spesialisasi di bidang kambing. Hal ini diperkuat dengan adanya penjual gulai yang berasal dari dalam maupun luar kampung tersebut. Saat ini terdapat 3 juragan kambing serta 21 penjual gulai, yang terdiri atas 9 orang asli Kampung Bustaman dan

12 orang pendatang (dari Demak dsb), di Kampung Bustaman.

Potensi Kampung Bustaman ini selain dari penjualan daging kambing dan gulai ini juga dalam bidang pengemasan makanan (gulai dan bumbu gulai). Kedua komoditas ini akan dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi para pengusaha apabila diolah sedemikian rupa dan dijual keluar kota. Namun pada kenyataannya, kegiatan pengemasan ini belum sepenuhnya dilakukan oleh para pedagang. Daging kambing dan bumbu gulai yang diproduksi masih hanya dijual di wilayah lokal Kota Semarang.

c. *Perkembangan Wisata Kampung Bustaman*

Terkait dengan perkembangan pariwisata, Kampung Bustaman memiliki potensi wisata sejarah, mengingat kampung ini memiliki peninggalan sejarah dalam bentuk bangunan dan budaya. Potensi ini akan sangat membantu pengusaha di Kampung Bustaman dalam mengembangkan usahanya. Namun, potensi ini masih menemui kendala dengan adanya keterbatasan ruang di dalam mengelola kampung tersebut. Kondisi inilah yang menjadikan kegiatan pariwisata di Kampung Bustaman menjadi kurang berkembang.

2. Kampung Batik Malon

a. *Sejarah dan Perkembangan Kampung Batik Malon*

Kampung Batik Malon merupakan suatu lokasi yang ada di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Kampung batik Malon ini merupakan salah satu kampung batik yang ada di Kota Semarang selain Bubakan. Inisiasi Kampung Batik di Kota Semarang awalnya dilakukan oleh Pak Mar, seorang pendatang dari Jakarta, pada tahun 2005 di Bubakan. Awal mulanya, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Mar menuai banyak resistensi dari masyarakat setempat. Masyarakat malah lebih memilih untuk menjual batik dari luar Kota Semarang, seperti Solo dan Pekalongan. Hal ini diperparah pula dengan adanya bencana banjir rob yang dialami oleh daerah ini. Akibatnya, usaha batik di wilayah ini pun semakin surut.

Kemudian, pada tahun 2010 usaha Pak Mar sebagai *champion* tersebut berpindah lokasi ke Kecamatan Gunungpati, tepatnya di Kelurahan Malon. Di kelurahan ini, Pak Mar merintis kampung batik alam. Adapun kegiatan utama yang dilakukan di kampung ini, yaitu pelatihan dan edukasi bagi komunitas lokal terkait proses pembatikan dengan bahan alami. Usaha Pak Mar ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat lokal karena sebagian besar masyarakat merupakan pegawai yang ingin beralih ke usaha batik agar dekat dengan rumah.



Gambar 3. Aktivitas Kampung Alam Malon

Dukungan yang didapat oleh Pak Mar yaitu terkait pengembangan batik khas Semarang (motif Semarangan) untuk dilakukan proses usahanya di Kampung Batik Malon. Kampung batik malon terdiri dari 4 kelompok + 2 toko yang sudah mampu berdiri sendiri (zie & salma), dengan anggota setiap kelompok ±10 orang. Pelaku usaha batik di kampung ini sebagian besar masih merupakan pemula dalam usaha batik. Nilai positif yang dimiliki oleh para pelaku usaha tersebut adalah dimilikinya semangat tinggi dalam menjalankan usaha tersebut.

b. *Perkembangan Wisata Kampung Malon*

Geliat perkembangan batik di Kampung Malon bisa dibilang memang belum lama

terbetuk. Warga terinspirasi oleh pengembangan sentra batik dan potensi alam di sekitar mereka. Sebab, kawasan perbukitan di Gunung Pati memang menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Potensi yang dimiliki oleh wilayah ini seperti goa kreo, Waduk Jatibarang, agrowisata buah-buahan, serta pemancingan.

Perkembangan wisata di kampung Alam Malon sebagai sebagai *eco edu tourism* (wisata edukasi alam) dinisiasi oleh msayarakat sekitar dan mendapat dukungan dari berbagai pihak (akademisi dan swasta). Mendorong pengembangan kampung tersebut, pihak dari akademisi dan swasta memberikan support dengan memberi pendampingan kepada masyarakat setempat. Dengan adanya dukungan dari segala pihak, Kampung Malon menjadi kampung tematik pada tahun 2016.

Disisi lain, kampung yang terkenal dengan penghasil batik Kampung Batik Malon masih memiliki kelemahan, yaitu suplai bahan baku yang masih berasal dari luar Semarang, pemasaran produk yang masih di sekitar Jawa Tengah dan nasional dan infrastruktur yang perlu di tingkatkan.

3. Desa Wisata Aquaponik Kandri

a. *Sejarah dan Perkembangan Kampung*

Kampung aquaponik di Desa Kandri ini secara formal diresmikan pada Bulan September 2016. Tetapi perkembangan Kampung Aquaponik Kandri tidak lepas dari dari Desa Wisata Kandri yang berada satu Kelurahan. Desa Wisata Kandri yang berada di sisilain desa dikukuhkan pada tahun 2013 yang awal mulanya sebagai desa binaan wisata sebuah organisasi mahasiswa AIESEC.

Berbeda dengan kampung-kampung yang tumbuh secara natural Kampung Aquaponik tumbuh dari pengembangan perumahan. Sejarah perkembangan Kampung Aquaponik ini sendiri di awali oleh Pak Syafie warga dari perumahan Kandri Pesona yang menyalurkan hobi bertanam. Bapak Syafei, yang juga merupakan anggota aquaponik Indonesia pada tahun 2014 karena terdorong dari usaha untuk ramah lingkungan yang belum banyak dikembangkan oleh masyarakat. Hal ini juga menjadi potensi usaha yang menjajikan dengan trend bercocok tanam bagi masyarakat perkotaan.

Ketertarikan warga terhadap aquaponik mendorong Pionir memberikan pelatihan dan pengarahan dalam pembuatan aquaponik. Perkembangan aquaponik saat ini memiliki anggota kelompok aquaponik ini berjumlah 64 orang yang mayoritas merupakan penduduk yang tersebar pada 9 RT di lingkup Perumahan Kandri Pesona Asri. Kondisi usaha di kampung ini belum mencapai kapasitas produksi sehingga anggota yang lain hanya sebatas untuk keperluan keluarga sehari-hari.



Gambar 4. Aktivitas Desa Wisata Kandri dan Kampung Tematik Aquaponik

b. *Perkembangan Wisata Kampung*

Perkembangan wisata di Kandri membangkitkan potensi lain yang sebenarnya hanya untuk hobi menjadi potensi wisata dilakukan setelah warga menyadari dari hasil kegiatan festifal Aquaponik Nasional. Pengembangan menjadi wisata edukasi merupakan yang ditawarkan kampung ini. Produk yang di tawarkan dari wisata ini adalah pelatihan membuat aquaponik dan melihat kondisi kampung. Pengembangan kampung dengan program pemerintah kampung tematik membantu dalam pemasaran produk wisata dan infrastruktur penunjang wisata.

B. Manajemen usaha dan kepemimpinan

1. Manajemen usaha

Perkembangan usaha di kampung tematik tidak lepas dari bagaimana manajemen usaha yang diterapkan dan kepemimpinan seorang "*champion"*. Farid, (2015) menjelaskan bahwa manejemen usaha di kawasan kampung/desa harus memiliki rencana dan keberlanjutan usaha, disisi lain kolaborasi dengan pemerintah juga menjadi kunci pengembangan usaha.

Dari kampung tematik yang terpilih sebagai kasus sebagian kampung masih melakukan manajemen kekeluargaan. Seperti Kampung Bustaman dalam mengkoordinasi usaha yang dijalankan sebagai sentra kuliner gulai kambing hanya di naungi oleh kelompok/paguyuban pedagang gulai. Dalam pengelolaan usaha sendiri pelaku masih sederhana belum ada rancangan usaha (*business plan)*. Belum adanya standar dalam melakukan usaha juga menjadikan kualitas produk tidak terjaga.

Di kampung Bustaman yang berbeda adalah dalam konteks manajemen usaha pariwisata peran pihak luar dalam hal ini NGO local dari Kota Semarang memberikan pendampingan di beberapa event wisata yang telah diselenggarakan secara rutin (Tengok Bustaman I, II & III). Pendampingan ini dinilai penting dalam mengedukasi pelaku usaha dan masyarakat terkait pengelolaan dan keberlanjutan usaha.

Berbeda dengan kampung Bustaman, wisata Kandri dan kampung batik Malon yang mulai menerapkan manajemen usaha sector pariwisata, tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Di kampung wisata Kandri yang terbagi menjadi dua sector wisata yang dikembangkan wisata alam (tradisional) dan aquaponik dimana lebih menekankan terhadap pelatihan dalam pembuatan aquaponik. Pengorganisasian pelaku usaha juga dilakukan menerapkan peran pelaku usaha dalam mendukung sector wisata. Seperti terdapat pelaku usaha *homestay*, pedagang makanan dan atraksi wisata. Sedangkan kampung aquaponik masih bersifat kekeluargaan hal ini karena tujuan dari adanya aquaponik awalnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Sedangkan untuk penjualan produk dan pelatihan hanya dilakukan oleh seorang.

Sedangkan di kampung wisata alam Malon sama halnya dengan Kampung Kandri tetapi yang membedakan adalah kampung ini di bentuk dari kampung yang dengan produk utama batik dan berlanjut ke pengembangan *ecotourism* atau wisata berwawasan lingkungan. Pengelolan di kawasan wisata alam Malon yang dijalankan berangkat dari inisiasi Pak Marhino selaku *champion* dan gabungan beberapa kelompok-kelompok usaha dalam hal ini batik dan wisata alam dan di fasilitasi oleh akademisi, swasta dan pemerintah melalui kelurahan. Sedangkan manajemen usaha sepenuhnya dilakukan oleh kelompok.

2. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan atau *champion* sebagai faktor kunci di setiap inovasi dan perkembangan yang dilakukan di kampung hampir semua berasal dari pelaku usaha. Yang sedikit berbeda Kampung Bustaman yang sempat meredup karena desakan perkembangan Kota di hidupkan kembali oleh pihak dari luar dalam ini NGO yang awalnya untuk konservasi kampung lama di Semarang dengan pemberdayaan masyarakat local seperti organisasi pemuda. Kepemimpinan dalam usaha dilakukan oleh juragan-juragan (pengusaha kambing) yang mengetahui sejarah pasti di kampung ini untuk membangkitkan usaha dan kegiatan di Bustaman. Karena masyarakat di kampung ini sebagian besar adalah pendatang dan orang asli hanya sedikit tersisa.

Berbeda dengan Kampung Bustaman, kampung Malon dan Kampung Aquaponik tumbuh dan berkembang dari adanya *champion* yang merupakan pendatang. Pelaku ini membawa inovasi (batik dan aquaponik) dan diterapkan ke kampung dengan pelatihan ke masyarakat. Proses bertukar informasi ini tidak hanya teknologi tetapi juga dengan manajemen pengelolaan dan pemasaran. Dari usaha yang dilakukan

mereka mampu memberdayakan masyarakat di lingkungannya.

Kepemimpinan pelaku usaha dalam pengembangan kampung baik di ketiga wilayah studi memiliki peran pengembangan kampung sepertu kondisi sosial ekonomi dan pariwisata. Pelaku usaha mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun kampung. Mereka juga memiliki peran dalam memberikan inovasi dan kreatifitas.

C. Perkembangan kegiatan usaha dan pariwisata

Kampung tematik di Kota Semarang sebagai salah satu stimulant memiliki keterkaitan dengan potensi usaha yang ada di wilayah kampung itu sendiri. Banyak kampung tematik yang terbentuk dari mayoritas usaha yang tumbuh menjadi identitas kampung. Kampung tematik juga menjadikan kewirausahaan berkembang mendorong kegiatan pariwisata.

Kampung Bustaman yang awalnya merupakan pusat penjualan kambing dan kuliner gulai di Kota Semarang mengalami kemunduran seiring dengan pembangunan Kota. Keterbatasan lahan untuk usaha dan munculnya pedagang-pedagang lain di Kota Semarang menjadi faktor utama. Perkembangan di Kampung Bustaman mulai tumbuh kembali dengan agenda wisata Tengok Bustaman. Agenda ini juga mendorong kembali kegiatan usaha kuliner yang secara langsung memberikan timbal balik bagi masyarakat Bustaman. Saat ini terdapat 7 juragan dengan 12 pedagang gulai yang sebagian berasal dari luar Bustaman. Peningkatan jumlah pelaku usaha seiring dengan perkembangan kampung yang semakin terkenal. Beberapa pelaku merupakan dari orang luar Semarang yang ingin bekerja sebagai pedagang gulai.

Sejalan dengan ini pelaku usaha mulai mengenalkan kembali sejarah Kampung Bustaman dan menjadi komoditas wisata. Masyarakat menjadikan karakteristik dan potensi kuliner sebagai objek wisata. Sehingga kegiatan ini dijadikan agenda wisata setiap 2 tahunan.

Berbeda dengan Bustaman, Kampung Wisata Batik Alam Malon terbentuk dari adanya kegiatan usaha batik yang dirintis *Champion*. Dari usaha yang dikembangkan pelaku usaha mulai membangun kampung dengan tujuan utama mendukung kegiatan produksi. Jumlah pelaku usaha batik di kampung ini juga berkembang dari awal hanya seorang inisiator berkembang menjadi 4 kelompok usaha. Dari keempat kelompok ini memiliki 2 toko yang digunakan sebagai pemasaran produk. Karakteristik dari batik yang menggunakan pewarna alam menjadikan batik Malon memiliki potensi bersaing dengan batik lain dan menjadi cirikhas Kota Semarang.

Mendukung kegiatan batik *champion* menginisiasi wisata untuk menggali potensi alam untuk kegiatan wisata dan menjadi kegiatan pendukung usaha batik. Peran stakeholder luar (akademisi dan swasta) dalam memberikan pelatihan dan inovasi dalam pengelolaan wisata memberikan dorongan tersendiri. Pengembangan wisata di wilayah ini memiliki produk wisata terkait batik (pelatihan dan pembuatan batik) dan wisata alam.

Bersamaan dengan Malon, Kampung Wisata Kandri juga di bentuk dari kegiatan pelaku usaha yang awalnya pelaku usaha hanya bertani mulai mengoptimalkan potensi alam dan budaya. Dari potensi yang di kembangkan ini merubah masyarakat untuk mulai membangun wisata. Masyarakat lain dilibatkan turut aktif dalam kegiatan wisata selain itu juga mendapatkan keuntungan dari wisata ini. Sedikit berbeda dengan kampung Aquaponik di Kandri perkembangan usaha kini berkembang yang awalnya hanya dilakukan oleh seorang dan kini memiliki 40 anggota yang sebagian besar masih untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Kampung Aquaponik juga menjadi kampung wisata edukasi dimana atraksi yang ditawarkan adalah pelatian dalam membuat aquaponik.

D. Kewirausahaan sosial pada kegaiatan wisata

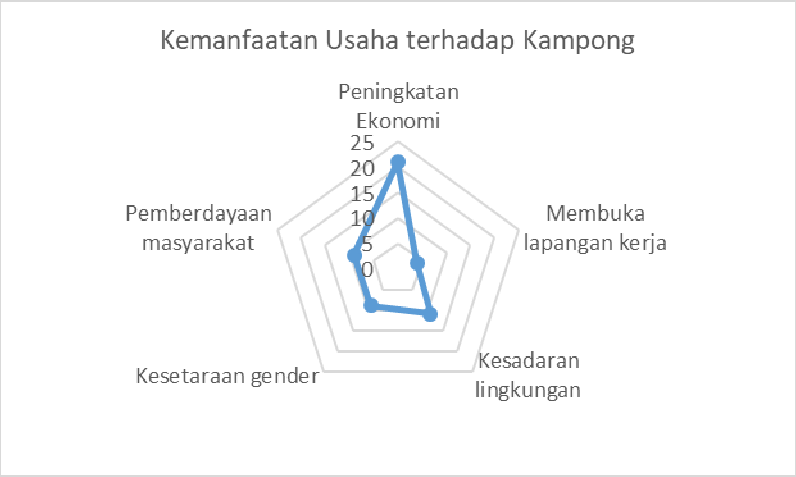
Dilihat dari beberapa studi kasus dari kampung tematik di Kota Semarang banyak

kampung tematik sebagai tujuan wisata tumbuh dari kesadaran pelaku usaha dengan potensi kampung. Dari faktor dalam melihat karakteristik kewirausahaan sosial seperti besarnya usaha, pelatihan dan kondisi finansial beberapa kampung tematik pelaku usahanya telah bertransformasi menjadi kewirausahaan sosial.

Pertama dari besaran usaha, dari tiga contoh kampung tematik pelaku usaha yang mulai besar dan mampu mandiri mulai memberikan kemanfaatan terhadap lingkungan. Sebagai contoh di Kampung Batik Alam Malon, dimana pelaku usaha dengan jumlah anggota 40 dalam 4 kelompok telah mampu memproduksi batik secara mandiri dan memiliki pasar. Pasar dari produk ini juga mampu menembus local dan nasional. Perkembangan usaha yang semakin besar pelaku ini mulai mengajak masyarakat untuk membatik selain untuk pendapatan masyarakat juga memenuhi kebutuhan produksi. Kondisi ini juga sejalan dengan pelaku usaha di Kampung Aquaponik dimana pelaku dimana perkembangan usaha yang bermula dari hobi menjadi usaha yang sedang dikembangkan dengan anggota hingga 40 di kampung Kandri Pesona Asri. Saat ini pelaku tidak hanya menjual produk tetapi memberikan edukasi kepada warga dengan pengembangan wisata.

Kedua adalah pelatihan baik di Kampung Batik Alam Malon, Kampung Bustaman dan Kampung Aquaponik pelaku usaha atau *champion* ini memberikan edukasi kepada masyarakat akan potensi usaha yang di kembangkan. Untuk Aquaponik selain untuk kebutuhan keluarga produk juga memberikan edukasi akan lingkungan. Begitu juga dengan pengusaha batik di Malon melatih masyarakat membatik dan mulai menggali potensi alam yang dimiliki dan bagaimana mengelolanya. Sedangkan di Bustaman kesadaran akan konservasi bangunan dan potensi kuliner menjadi bagian dari pelatihan. Dari ketiga kampung ini dalam memberikan pelatihan ke masyarakat melibatkan unsur dari luar dimana akademisi, LSM, Swasta dan Pemerintah memiliki peran didalamnya.

Faktor yang ketiga adalah finansial, faktor ini memang menjadi alat ukur yang tidak sama dari satu contoh dengan contoh lain. Dari beberapa lokasi kampung tematik kewirausahaan sosial tidak semuanya di bentuk oleh kondisi finansial yang cukup, tetapi bagaimana kesadaran akan potensi lingkungan yang harus di kembangkan. Dari segi ekonomi yang dapat dilihat adalah bagaimana pariwisata memberikan dampak terhadap ekonomi warga. Di Kampung Malon dengan keberadaan wisata ini mendorong masyarakat meningkatkan pemasukan ekonomi, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat di Bustaman dimana pedagang local juga di untungkan dengan adanya tamu/wisatawan.



Gambar 5. Kemanfaatan Usaha terhadap Pembangunan Kampung

Kewirausahaan sosial secara garis besar mendorong pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan wisata di beberapa kampung di Kota Semarang. Pemberdayaan dilakukan dengan Inovasi dan kreatifitas usaha. Dari ketiga faktor diatas saling berkaitan untuk melihat transformasi pelaku usaha menjadi kewirausahaan sosial.

IV. KESIMPULAN

Kota Semarang memiliki keragaman fitur geografis, di mana letak daerah pesisir dan dataran tinggi. Karakteristik unik ini berdampak pada proses kegiatan usaha. Karakteristik kegiatan usaha dilihat dari lokasi bahan baku untuk kegiatan usaha. (1) Wilayah pesisir mendukung usaha perikanan; Ini menyediakan pasokan bahan baku yang melimpah, sehingga pertumbuhan kegiatan usaha terkait perikanan seperti bandeng presto dan sebagainya. (2) Daerah pegunungan produk agrikultur kegiatan usaha juga terkait dengan petanian dan alam. (3) Sedangkan di daerah pusat kota memaksa pengusaha untuk berkreasi dalam menghadapi kebutuhan penghuni yang semakin meningkat; jumlah penduduk yang besar di pusat kota merangsang kegiatan usaha bersifat jasa (makanan, properti, dan lain-lain).

Sedangkan fenomena kampung kota merupakan akibat dari transformasi kota dan menyisakan kawasan hunian (kampung) dengan sejarah, kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur. Tetapi potensi dari sejarah yang ditinggal cukup menarik digali kembali, karena kampung kota di Semarang terbentuk dari pusat-pusat kegiatan usaha pada waktu dulu. Seperti Kampung Bustaman dan Kampung Wisata Kandri yang mampu kembali berbenah dan menghidupkan kembali kegiatan usaha yang telah ada.

Perkembangan pariwisata pada kampung kota dewasa ini mulai tumbuh baik dari kesadaran masyarakat maupun peran stakeholder lainnya. Di dalam masyarakat peran pelaku usaha yang bertransformasi menjadi kewirausahaan sosial menjadi faktor pendorong pariwisata di kampung. Terlepas dari peran kewirausahaan local dalam menghidupkan pariwisata di kampung-kampung, pemerintah juga memiliki andil sebagai stimulan awal melalui implementasi program Kampung Tematik seperti di Kampung Malon dan Kampung Kandri. Disisi lain peran swasta dan akedemisi juga memberi kemanfaatan lebih seperti Kampung Bustaman dengan LSM-nya.

Sekor pariwisata saat ini menjadi salah salah satu strategi pemasaran produk kegiatan usaha yang dinilai efisien. Dilain sisi pariwisata menjadi strategi yang efisien juga dalam penataan kawasan kampung kota dengan meningkatkan kesadan kembali akan potensi kampung. Bustaman sebagai kampung lama dengan adanya agenda tahunan “Tengaok Bustaman” membuat masyarakat sadar akan lingkungan yang harus di jaga. Wisata edukasi Aquaponik mendorong masyarakat perkotaan untuk mulai bercocok tanam baik untuk lingkungan maupun dari segi pengeluaran keluarga. Sedangkan Kampung Malon juga menerapkan strategi yang sama dalam pemasaran produk batik dengan mengkaitkan dengan potensi alam yang dimiliki.

Pemberdayaan masyarakat menjadi hasil dari perubahan pelaku usaha menjadi kewirausahan sosial. Pelaku usaha tidak lagi berorientasi terhadap keuntungan tetapi mulai peduli akan kondisi lingkungan. Dalam kontek wisata strategi yang efisien dalam memasarkan produk adalah menyatukan produk dan promosi produk, dimana kegiatan wisata sebagai wadah promosi. Masyarakat kampung kota tidak lagi pasif dengan usaha yang berkembang di wilayahnya tetapi mulai berperan aktif dengan pariwisata yang di kembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, K. (2005). The Sources of Innovation and Creativity. Education, (September 2005), 1–59. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9320-5

Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial

entrepreneurship: Same, different, or both? Entrepreneurship: Theory and Practice, 30(1), 1–22. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x

Brock, D. D., & Kim, M. (2011). Social Entrepreneurship Education Resource Handbook. SSRN Electronic Journal, (March). https://doi.org/10.2139/ssrn.1872088

Brock, D. D., & Steiner, S. (2009). Social Entrepreneurship Education: Is it Achieving the Desired Aims? North, 1–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1344419

Curry, J. A., Donker, H., & Michel, P. (2016). Sosial entrepreneurship and indigenous people. Journal of Co-Operative Organization and Management, 4(2), 108–115. https://doi.org/10.1016/j.jcom.2016.09.002

Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Conceptions of Sosial Enterprise and Sosial Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. Journal of Sosial Entrepreneurship, 1(920117410), 32–53. https://doi.org/10.1080/19420670903442053

Dutta, S. (2016). The Global Innovation Index 2016. (S. Dutta, B. Lanvin, & S. Wunsch-Vincent, Eds.), Stronger Innovation Linkages for. https://doi.org/978-2-9522210-8-5

Fernandez Donoso, J. (2017). A simple index of innovation with complexity. Journal of Informetrics, 11(1), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.10.009

Farid, S. M. (2015). Tourism Management in World Heritage Sites and its Impact on Economic Development in Mali and Ethiopia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *211*, 595–604. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.078

Heryati. (2011). Kampung Kota Sebagai Bagian Dari Permukiman Kota Studi Kasus : Tipologi Permukiman Rw 01 Rt 02 Kelurahan Limba B Dan Rw 04 Rt 04 Kel.Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

Kustiwan, I., Ukrin, I., & Aulia, A. (2015). Identification of the Creative Capacity of Kampung ' s Community towards Sustainable Kampung (Case Studies : Cicadas and Pasundan Kampung, Bandung): A Preliminary Study. Procedia - Sosial and Behavioral Sciences, 184(August 2014), 144–151. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.074

Landry, C. (2011). The Creativity City Index. City, Culture and Society, 2(3), 173–176. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2011.09.003

Sihombing, A. (2004). The Tranformation of Kampungkota: Symbiosys between Kampung and Kota, a Case Study from Jakarta. Department of Architecture, University of Indonesia, Jakarta.

Szczygielski, K., Grabowski, W., Pamukcu, M. T., & Tandogan, V. S. (2017). Does government support for private innovation matter? Firm-level evidence from two catching-up countries. Research Policy, 46(1), 219–237. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.10.009

Turner, J. F. C. (1972). Housing as a Verb, (August)

Faktor Pengaruh Keberlanjutan Pariwisata Budaya Pada Kampung Lawas Maspati, Surabaya

Ni Ketut Ratih Larasati[1], Dian Rahmawati[1]

[1] *Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota,Institut Teknologi Sepuluh Nopember,Surabaya*
Email:larasratih96@gmail.com;dnrahmawati@gmail.com

ABSTRAK

Kampung Lawas Maspati adalah salah satu asset budaya dengan nilai historis dan beragam daya tarik pariwisata budaya yang berada di pusat Kota Surabaya. Modernisasi perkotaan dan pembangunan kota memberi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pariwisata budaya di Kampung Lawas Maspati. Selain itu, beberapa faktor lain seperti kurangnya peran stakeholder untuk melestarikan dan mengoptimalkan aset budaya pada kampung sebagai produk pariwisata menunjukkan jika Kampung Lawas Maspati masih memerlukan pendampingan dan strategi pengembangan untuk dapat merealisasikan elemen-elemen dalam pariwisata budaya yang berkelanjutan. Studi dalam artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya yang Berkelanjutan pada Kampung Lawas Maspati. Fokus bahasan pada artikel ini adalah mengenai faktor pengaruh keberlanjutan pariwisata budaya pada Kampung Lawas Maspati yang diperoleh berdasarkan potensi eksisting kampung, dan indikator pariwisata budaya yang berkelanjutan. Tujuan dalam studi ini adalah mengidentifikasi faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi keberlanjutan pariwisata budaya pada Kampung Lawas Maspati berdasarkan tiga elemen pariwisata budaya yang berkelanjutan yaitu kualitas hidup masyarakat setempat, perlindungan terhadap aset budaya, dan kualitas pengalaman wisatawan.Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya adalah observasi, wawancara (*in depth interview*), dan kuesioner. Sedangkan, teknikanalisisyang digunakan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, analisiskonten, dan IFAS EFAS. Hasil analisis faktor internal dan eksternal menunjukkan jika kampong Lawas Maspati berada pada posisi yang menguntungkan dengan factor kekuatan dan peluang yang dominan dan growth strategy sebagai focus utama strategi pengembangan.

Kata kunci: kampung, pariwisata budaya yang berkelanjutan, IFAS EFAS

I. PENDAHULUAN

Pariwisata budaya adalah jenis pariwisata dengan budaya berupa gagasan, aktivitas, dan artefak sebagai potensi daya tarik utamanya (Ismayanti, 2010). World Trade Organization dalam D'auria (2009) menyatakan jika pariwisata budaya adalah industri yang berkembang dengan pesat sejak tahun 90-an melebihi perkembangan industri pariwisata lainnya. Salah satu penyebab semakin diminatinya wisata budaya adalah adanya kerinduan terhadap nilai-nilai yang lebih dalam seperti agama, seni, dan sastra terutama oleh wisatawan mancanegara yang sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan modern (Albizzia, Zamroni, & Rofiqoh, 2009). Hal yang sama juga dinyatakan oleh Mediasworo (2015), dimana modernisasi sebuah kota menyebabkan terjadinya gejala arus balik kebudayaan yang kembali mencari nilai nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga diprediksi bahwa era ekonomi kreatif berbasis budaya akan mendominasi masa depan

Sebagai kota pahlawan, Surabaya memiliki beragam warisan budaya yang terwujud dalam bentuk kesenian, kearifan lokal, dan bangunan atau kawasan bersejarah. Namun pada kenyataannya, pengelolaan warisan budaya tersebut baik

sebagai daya tarik pariwisata belum dilakukan secara optimal (Bappeko Surabaya, 2012). Fakta lapangan berdasarkan catatan Tim Von Faber Cagar Budaya Surabaya, menunjukkan dari total 256 unit bangunan kini tinggal 150 unit saja yang tercatat oleh surat keputusan walikota Surabaya (Yudhinata, 2014). Permasalahan ini tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus dikarenakan budaya merupakan unsur yang penting dalam membentuk karakter, keunikan, dan citra budaya yang khas pada sebuah kota (Madiasworo, 2015).

Kampung merupakan salah satu ciri khas Kota Surabaya, yang sekaligus memberi karakter yang khas pada permukiman di kota ini. Berada pada kawasan kota lama Surabaya, adalah Kampung Lawas Maspati yang menonjol dengan potensinya untuk berkembang menjadi destinasi wisata yang unggul dengan daya tarik budaya hidup dan bangunan bersejarah. Atas dasar inisiatif warga setempat, kampung ini resmi ditetapkan oleh Walikota Surabaya bersama dengan PT. Pelindo III sebagai Kampung Wisata Lawas Maspati (Kompas.com, 27 Januari 2016). Wisata budaya yang berkembang pada Kampung Lawas Maspati memiliki tiga kedudukan penting. Pertama sebagai salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang ada pada kampung (Supriharjo & Rahmawati, 2016). Kedua, sebagai media mengenalkan sejarah Kota Surabaya dan budaya lokal setempat kepada masyarakat luas. Ketiga, aktivitas pariwisata dapat menggerakkan perekonomian kreatif yang secara langsung berpotensi untuk memberi nilai tambah bagi pendapatan warganya. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan jika pariwisata pada kampung memegang peranan penting untuk menjaga eksistensi kampung di tengah suatu kawasan pusat kota yang semakin moden.

Menurut Bharuna dalam Suardana (2011) pariwisata yang berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat menciptakan hubungan yang seimbang dan harmonis di antara tiga elemen pariwisata yaitu kualitas pengalaman wisatawan, kualitas sumberdaya pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat setempat. Modernisasi perkotaan dan pembangunan kota memberi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan pariwisata budaya di Kampung Lawas Maspati. Selain itu, beberapa faktor lain seperti kurangnya peran stakeholder untuk melestarikan dan mengoptimalkan aset budaya pada kampungsebagai produk pariwisata menunjukkan jika Kampung Lawas Maspati masih memerlukan pendampingan dan strategi pengembangan untuk dapat merealisasikan elemen-elemen dalam pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Studi dalam artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya yang Berkelanjutan pada Kampung Lawas Maspati. Terdapat dua tahapan penelitian yang dilakukan, dimana tahapan pertama adalah mengidentifikasi potensi dan faktor pengaruh keberlanjutan pariwisata budaya pada Kampung Lawas Maspati. Sedangkan tahapan kedua penelitian ini adalah penyusunan strategi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan pada Kampung Lawas Maspati. Fokus bahasan pada artikel ini adalah mengenai faktor pengaruh keberlanjutan pariwisata budaya pada Kampung Lawas Maspati yang diperoleh berdasarkan potensi eksisting kampung, dan indikator pariwisata budaya yang berkelanjutan.

II. METODE

A. *Metode Pengumpulan Data*

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi terhadap fenomena yang terjadi pada lokasi studi (Supriharjo et al, 2013). Pendekatan deduktif digunakan karena penelitian ini menggunakan teori maupun konsep terkait pariwisata budaya yang berkelanjutan. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya adalah observasi, wawancara (*in depth interview*), dan kuesioner. Stakeholder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu masyarakat, pemerintah dan

wisatawan. Wawancara (*in depth interview*) akan dilakukan pada responden masyarakat dan pemerintah, sedangkan penyebaran kuesioner akan dilakukan pada responden wisatawan.

Responden masyarakat dipilih dengan menggunakan kombinasi dari teknik pengambilan sampel purposive sampling dan snowball sampling. Proses sampling akan terus berjalan sampai diperoleh informasi yang cukup memadai, dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian. Sedangkan responden pemerintah adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya. Jumlah sample responden wisatawan ditentukan berdasarkan rumus slovin yaitu sebanyak 38 responden. Proses perolehan data dilakukan berdasarkan variabel penelitian yang merupakan hasil dari kajian pustaka mengenai teori dan konsep mengenai pariwisata budaya yang berkelanjutan. Variabel penelitian merupakan hal yang akan diteliti yang memiliki ukuran baik bersifat kualitatif maupun kualitatif. Variabel dan indikator dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Indikator	Variabel
Persepsi masyarakat terhadap pariwisata budaya	Sikap masyarakat terhadap pariwisata Pengetahuan masyarakat terhadap pelestarian aset budaya pada kampung
Perekonomian lokal masyarakat	Ketersediaan modal untuk pengembangan ekonomi lokal oleh masyarakat Jenis lapangan kerja di bidang pariwisata
Perlindungan dan pelestarian budaya pada kampung	Peraturan dan program pemerintah terkait pelestarian dan perlindungan terhadap budaya pada kampung Upaya pelestarian dan perlindungan budaya oleh masyarakat
Kepuasan wisatawan	Persepsi terhadap daya tarik pariwisata Kualitas pelayanan Kualitas pengalaman wisatawan

Sumber : Larasati & Rahmawati (2017)

B. *Analisis Identifikasi Faktor Pengaruh Keberlanjutan Pariwisata Budaya pada Kampung Lawas Maspati*

Identifikasi faktor pengaruh keberlanjutan pariwisata budaya pada kampung dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Observasi pada kampung dilakukan untuk memperoleh karakteristik kampung dan sebagai tahapan awal untuk mengidentifikasi potensi pada kampung. Observasi dilakukan berdasarkan variabel daya tarik pariwisata, fasilitas pendukung pariwisata, karakteristik masyarakat dan karakteristik penggunaan lahan pada kampung. Sedangkan wawancara pada responden masyarakat dan pemerintah dilakukan berdasarkan variabel persepsi masyarakat terhadap pariwisata budaya, perekonomian lokal masyarakat, dan perlindungan terhadap budaya setempat. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor keberlanjutan pariwisata budaya dari sisi kepuasan wisatawan. Teknik analisis pada hasil wawancara akan dilakukan dengan menggunakan analisis konten atau analisis isi yang merupakan teknik untuk menyusun kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karateristik-karakteristik pesan tertentu secara obyektif dan sistematis. Sedangkan analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menginterpretasikan hasil kuesioner pada wisatawan yang berkunjung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Potensi dan Karakteristik Kawasan Kampung Lawas Maspati

1. Daya Tarik Pariwisata

Daya tarik pariwisata pada Kampung Lawas Maspati dapat dibedakan menjadi daya tarik budaya yang bersifat tangible (berwujud fisik), dan non-tangible (berwujud non-fisik). Daya tarik wisata yang berwujud fisik pada kampung adalah bangunan bersejarah (rumah 1907, sekolah Ongko Loro, Makam Mbah Buyut Suruh dan Rumah Raden Sumiharjo), lingkungan kampung yang asri, produk lokal unggulan kampung, musik patrol maspati, dan dolanan atau permainan khas kampung. Sedangkan daya tarik non-tangible yang masih ada pada kampung berupa budaya parikan (pantun khas Surabaya), dan budaya gotong royong yang masih kental.



Sumber : Dokumentasi penulis, 2017

Gambar 1. Budaya Musik Patrol Kampung Lawas Maspati (kiri) dan Rumah Raden Sumiharjo(kanan)

2. Karakteristik Masyarakat

Kegiatan pariwisata pada Kampung Lawas Maspati secara langsung dikelola oleh masyarakat setempat. Hasil observasi menunjukkan jika warga setempat memiliki tingkat keguyuban yang tinggi dimana dapat dilihat dari berbagai kegiatan kepedulian lingkungan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat hingga berhasil memperoleh penghargaan pada program *Green and Clean* Kota Surabaya. Selain itu, Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang aktif dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan pada kampung seperti kegiatan kebersihan kampung, maupun kegiatan pariwisata seperti menyambut tamu wisatawan. Kelompok tersebut diantaranya adalah kelompok ibu-ibu PKK, tim pariwisata RT dan RW, serta kelompok karang taruna.

3. Karakteristik Penggunaan Lahan Pada Kampung

Pola penggunaan lahan pada kawasan Kampung Lawas Maspati didominasi oleh perumahan dan perdagangan & jasa. Penggunaan lahan pada perdagangan dan jasa yaitu berupa pertokoan yang sifatnya mengelompok pada sisi jalan-jalan utama yaitu pada Jalan Bubutan, Jalan Penghela, Jalan Tembaan, dan Jalan Semarang.Beberapa rumah pada Kampung Lawas Maspati memiliki fungsi sebagai tempat usaha selain sebagai tempat tinggal. Rumah-rumah tersebut memanfaatkan ruang depan pada hunian mereka sebagai tempat untuk berusaha seperti menjual dagangan makanan, membuat produk kerajinan tangan, dan lain sebagainya.



Sumber : Dokumentasi penulis, 2017

Gambar 3. Potensi *Home Based Enterprises* pada Kampung Lawas Maspati

B. Faktor-Faktor Pengaruh Keberlanjutan Pariwisata Budaya pada Kampung Lawas Maspati

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner diperoleh beberapa faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, dan faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan pariwisata budaya pada Kampung Lawas Maspati. Analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal dalam penelitian ini akan menjadi landasan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan dari pariwisata budaya pada Kampung Lawas Maspati.Penyusunan tabel IFAS dan EFAS dilakukan dengan meberikan bobot dan rating pada masing-masing faktor internal dan eksternal yang telah teridentifikasi pada proses perolehan data. Bobot diberikan pada masing-masing faktor dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai dengan 1,0 (penting). Selanjutnya nilai rating juga diberikan pada masing-masing faktor. Dimana pada faktor kekuatan dan peluang rating yang diberikan adalah 4 (sangat berpengaruh) hingga 1 (tidak berpengaruh), sedangkan pada faktor kelemahan dan tantangan rating yang diberikan adalah 1 (sangat berpengaruh) hingga 4 (tidak berpengaruh).

Tabel 2. Analisis IFAS

Kekuatan/ *Strengths*	**Rating**	**Bobot**	**Skor**
Partisipasi dan keguyuban warga	3.71	0.12	0.44
Pengetahuan warga pada nilai-nilai budaya pada kampung sebagai aset yang perlu dilestarikan dan dilindungi	2.43	0.12	0.29
Daya tarik pariwisata budaya yang beragam (*intangible dan tangible*).	2.71	0.11	0.29
Fasilitas pendukung pariwisata	2.57	0.10	0.26
Kegiatan pelestarian lingkungan berbasis masyarakat	2.86	0.09	0.26
Inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk lokal	3.43	0.09	0.31
Kelemahan/*Weaknesses*	**Rating**	**Bobot**	**Skor**
Pemahaman warga terhadap nilai sejarah pada kampung	3.86	0.16	0.63
Pendampingan dalam pengembangan perekonomian lokal oleh warga	3.14	0.15	0.48
Jumlah keuntungan dari aktivitas pariwisata dalam sisi ekonomi	3.71	0.13	0.49
Kondisi bangunan bersejarah yang menjadi daya tarik pada kampung	3.71	0.12	0.46
Kualitas produk hasil *home based enterprises*	2.14	0.12	0.26

Sumber : Larasati & Rahmawati, 2017

Tabel 3. Analisis EFAS

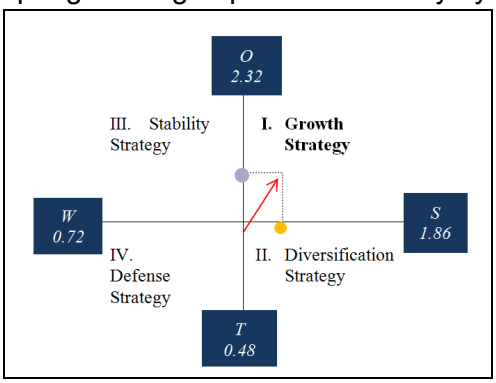
Peluang/Opportunities	**Rating**	**Bobot**	**Skor**
Tingkat kepuasan wisatawan	3.86	0.16	0.63

Persepsi/Pandangan wisatawan terhadap daya tarik pada kampung	3.14	0.15	0.48
Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan pariwisata pada kampung	3.71	0.13	0.49
Dukungan pemerintah terhadap pengembangan kampung	3.71	0.12	0.46
Kedekatan kampung dengan objek wisata sejarah di sekitarnya	2.14	0.12	0.26

Tantangan/Threats	**Rating**	**Bobot**	**Skor**
Biaya perawatan dan perbaikan bangunan yang memiliki nilai sejarah	3.86	0.16	0.63
Daya beli wisatawan terhadap produk dan kuliner lokal	3.14	0.15	0.48
Kunjungan wisatawan	3.71	0.13	0.49

Sumber : Larasati & Rahmawati, 2017

Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS (pada Tabel 2 dan Tabel 3), faktor kekuatan memiliki total skor sebesar 1.86, sedangkan faktor kelemahan memiliki total skor sebesar 0.72. Sedangkan pada hasil analisis faktor eksternal, skor pada faktor peluang adalah sebesar 2.32, dan faktor tantangan yaitu 0.48. Dari hasil analisis tersebut, kemudian dapat ditentukan koordinat pada diagram cartesius bertujuan untuk memperoleh strategi yang tepat dalam pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan pada Kampung Lawas Maspati. Koordinat (x) memiliki nilai 1.14, sedangkan koordinat (y) berada pada nilai 1.85, dimana nilai tersebut menunjukkan posisi strategi utama yang merupakan growth strategy. Kampung Lawas Maspati dapat dikatakan berada pada situasi yang sangat menguntungkan. Faktor kekuatan yang dimiliki Kampung Lawas Maspati dapat memanfaatkan faktor peluang yang ada untuk menjadi keuntungan bagi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan.



Sumber : Larasati & Rahmawati, 2017

Gambar 4. Diagram Cartesius SWOT

IV. KESIMPULAN

Faktor pengaruh keberlanjutan pariwisata budaya pada Kampung Lawas Maspati berdasarkan hasil analisis dapat dibedakan menjadi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Sedangkan berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal, strategi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan pada Kampung Lawas Maspati adalah growth strategy. Strategi tersebut menunjukkan jika pariwisata budaya pada kampung berada pada posisi yang menguntungkan karena memiliki faktor peluang dan kekuatan yang lebih dominan. Dapat disimpulkan jika beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam Kampung Lawas Maspati meliputi

strategi yang dapat memanfaatkan faktor peluang dan kekuatan yang ada. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan menunjukkan terdapat empat strategi utama pengembangan yang dapat diimplementasikan pada Kampung Lawa Maspati. Strategi tersebut diantaranya adalah strategi optimalisasi pengelolaan pariwisata budaya, strategi optimalisasi potensi home based enterprises pada kampung untuk mendukung kegiatan pariwisata, pemanfaatan budaya intangible pada kampung sebagai produk pariwisata budaya dab pengelolaan aset budaya tangibe pada kampung melalui peluang kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, K. A., & Supriharjo, R. (2011). Pengembangan Kawasan Wisata Budaya di Kampung Lama Bubutan.

Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata.* Jakarta: PT. Grasindo.

Madiasworo, T. (2015). Melestarikan Kota Pusaka Kita. *Buletin Cipta Karya*, 10-14.

Bappeko Surabaya. (2012). *Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Lama Surabaya.* Surabaya: Bappekko Surabaya.

Swarbrooke, J. (1999). *Sustainable Tourism Management.* London: CAB International.

Cros, H. D., & McKercher, B. (2015). *Cultural Tourism.* New York: Routledge.

Ismayanti, “Pengantar Pariwisata”. PT. Grasindo. (2010).

Albizzia, O., Zamroni, M. I., & Rofiqoh, Z. “ Potensi Kampung Prawirodirjan Gondomanan Sebagai Kampung Wisata Eksotik”. Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta : 12-20, (2009).

Mediasworo, T. “Melestarikan Kota Pustaka Kita”. Buletin Cipta Karya, 10-14. (2010).

Cros, H. D., & McKercher, B. “Cultural Tourism”. New York : Routledge. (2015).

Pearce, J. A., & Robinson, R. “Strategic Management : Formulation, and Control”. Columbus McGraw-Hill Higher Education. (2008).

Silas, johan. “Kampung Surabaya Menuju Metropolitan”. Yayasan Keluarga Bhakto dan Surabaya Post. (1996).

Supriharjo, D. R., & Rahmawati, D. “Factors Influencing Community-Based Heritage Sustainability in Kampung Kemasan, Gresik”. Procedia-Social and Behavioral Sciences : 489-502. (2016).

Bappeko Surabaya. “Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Lama Surabaya”. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya. (2012).

Nurdiani, N. “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”. ComTech Vol. 5 No. 2, 1110-1118. (2014).

Supriharjo, R., Rahmawati, D., & Pradine, K. “Diktat Metodologi Penelitian”. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya. (2013).

Winny, A. “Identification of Spesific Characteristic of Kampung Jayengan as Community-Based Industrial Tourism”. Social and Behavioral Sciences 227, 485-292. (2016).

Swarbrooke, J. “Sustainable Tourism Management”. CAB International. London. (1999).

Suardana, W. “Dekontruksi Kebijakan Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan di Bali”. Analisis Pariwisata Vol. 11, 16-22. (2011).

Silas, Johan. “Kampung Wisata Surabaya”. Surabaya Post. (1990).

Ketangguhan Komunitas dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan: Pelajaran dari Peristiwa Bom Bali

Wayan Nanda Khrisna Pratama[1], dan Putu Gde Ariastita, ST., MT. [1]

[1] Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
Laboratorium Pengembangan dan Perancangan Kota
Email: nanda.khrisna9@gmail.com; ariastita@gmail.com

ABSTRAK

Tragedi Bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002 merupakan suatu bencana yang disebakan oleh faktor manusia. Ledakan Bom Bali tersebut terjadi di kawasan Kelurahan Legian-Kuta yang dimana merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemulihan kondisi pariwisata di kawasan tersebut disebabkan masyarakat melakukan upaya dalam bertahan hidup dan bangkit dari keterpurukan serta menjaga keamanan, yang merupakan bentuk ketangguhan komunitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif kualitatif, yang dimana penentuan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling yang selanjutnya dilakukan in depth interview terhadap masing-masing sampel yang telah ditetapkan. Hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan terdapat sepuluh faktor ketangguhan komunitas masyarakat yang mendukung pariwisata berkelanjutan adalah (1) pengetahuan, (2) pengetahuan akan budaya lokal, (3) kepercayaan akan nilai-nilai spiritualitas, (4) koordinasi antara elemen masyarakat, (5) kerjasama antara elemen masyarakat, (6) organisasi yang berkembang dalam masyarakat, (7) ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan, (8) program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat, (9) perencanaan jangka panjang yang terpadu dan berorientasi terhadap tanggap bencana, dan (10) fasilitas umum.

Kata kunci: Ketangguhan Komunitas, Pariwisata Berjelanjutan, Bom Bali

I. PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling dimininati di dunia. Pariwisata merupakan penyumbang utama atau *leading sector* dalam provinsi yang seluas 5.780 km^2 tersebut. Hal ini dilihat dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali, dimana sektor pariwisata menempati urutan pertama dari lima sektor penyumbang terbesar pada PDRB Provinsi Bali. Tingkat kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor-sektor penunjang pariwisata. Keterkaitan antara tingkat kunjungan wisatawan dengan sektor-sektor penunjang pariwisata dapat dilihat dari semakin banyak wisatawan yang melakukan kunjungan ke Bali sehingga semakin banyak bermunculan hotel, penginapan, restoran, tempat hiburan, jasa pariwisata hingga usaha-usaha kecil menengah yang berkaitan dengan industri pariwisata. Data statistik pariwisata Bali menunjukkan pada tahun 1997 hingga tahun 2001, sektor pariwisata menyumbang dengan rata-rata sebesar 19% pada PDRB yang terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran (Bali dalam Angka 2001, 2002; 235).

Namun pada tahun 12 Oktober 2002 terjadi ledakan Bom Bali di Sari Club, Paddy's Pub, dan Kantor Konsulat Amerika Serikat yang menewaskan sekitar 202

orang dan melukai sekitar 209 orang[1]. Tragedi ledakan bom Bali tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan pariwisata di Bali, yang salah satunya mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 5.23% (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2005;15-16). Akibat peristiwa ini (Bom Bali 2002) pemerintah Jepang, Australia, Taiwan, Inggris dan Jerman memberlakukan *Travel Warning* bagi warga negaranya yang ingin berkunjung ke Bali. Dampak Bom Bali I sangat signifikan bagi industri pariwisata di Bali. Pasalnya industri pariwisata merupakan sektor utama perekonomian di Bali yang tentunya berdampak pada ekonomi masyarakat, hal ini ditandai dengan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 3.5%, penurunan jumlah kerja 4.2%, penurunan upah riil 47% dan pendapatan rumah tangga menurun sebesar 22.6%. Penurunan pendapatan rumah tangga ini membuat masyarakat Bali mengadopsi sejumlah strategi bertahan hidup diantaranya berganti status pekerjaan, berganti lapangan pekerjaan, dan menambah jam kerja (Suriastini, 2010).

Dua tahun pasca ledakan Bom Bali I (tahun 2004) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mengalami peningkatan sebesar 46.85% dari tahun 2003. Namun kondisi yang stabil ini kembali terguncang karena terjadi ledakan Bom Bali II di kawasan Jimbaran dan Kuta pada 1 Oktober 2005. Sehingga kunjungan wisatawan mancanegara pasca ledakan Bom Bali II pada tahun 2006 menurun sebesar 9% dari tahun 2005 (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Juni 2012:26). Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap kondisi pariwisata yang berbanding lurus dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya di Bali. Salah satu dampak sosial yang dialami masyarakat adalah perubahan mentalitas yang menyebabkan meningkatnya gelombang solidaritas, kecendrungan kearah spiritual, dan politisasi adat yang mengarah pada tindakan-tindakan diskriminatif terhadap penduduk non-Bali atau pendatang (Couteau, 2003). Dengan meningkatnya gelombang solidaritas masyarakat Bali mengusulkan konsep sistem keamanan berlapis dalam mengelola dan menjaga keamanan Bali, dimana masyarakat Bali dilibatkan secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah Bali (Faisal, 2005).

Dengan mulai pulihnya keamanan, kepercayaan asing juga memberikan hasil yang positif secara bertahap. Salah indikator yang menujukkan kestabilan kondisi tersebut adalah kunjungan wisatawan mancanegara yang mulai mengingkat dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Pada tahun 2009 wisatawan mancanegara yang berkunjung meningkat sebesar 14.39% dari tahun 2008. Dilanjutkan pada tahun 2013 yang menunjukkan pertumbuhan wisatawan meningkat sebesar 11.16% persen dari tahun 2012 (Bali dalam Angka 2014). Jika dibandingkan pada data kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2002, maka pertumbuhan kunjungan wisatawan sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 menunjukkan kondisi pariwisata Bali sudah pulih.

Kembali bangkit dan pulihnya suatu kawasan dari krisis maupun bencana menunjukkan kawasan tersebut merupakan kawasan yang tangguh (*ICLEI Briefing Sheet*, 2011). Bencana merupakan peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Tragedi Bom Bali I dan Bom Bali II merupakan salah satu bentuk bencana yang disebabkan oleh faktor manusia.

Ketangguhan perlu dipahami sebagai manfaat sosial dari upaya kolektif untuk membangun kapasitas kolektif dan kemampuan untuk menghadapi tekanan (*ICLEI Briefing Sheet*, 2011). Masyarakat bertindak sebagai otak dari kota, yang dimana

[1] http://news.liputan6.com/read/2117622/12-10-2002-bom-bali-i-renggut-202-nyawa diakses 30 September 2016

mengarahkan kegiatan, menanggapi kebutuhan, dan belajar dari pengalaman, sehingga saat terjadi bencana jaringan komunitas masyarakat harus mampu bertahan dan berfungsi dengan baik di bawah kondisi yang ekstrim. Sebuah kota tanpa masyarakat tangguh akan sangat rentan terhadap bencana (Godschalk, 2003). Masyarakat Bali yang mengalami dua kali bencana terorisme mampu bangkit dan pulih dan menyebabkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan langsung dengan kehidupan pariwisata tetao lestari dan berkelanjutan.

Upaya untuk bangkit dari keterpurukan yang dilakukan masyarakat baik secara individu, kelompok, pemerintah maupun lembaga terkait berhubungan dengan peningkatan kapasitas. Kapasitas memiliki peranan penting dalam mengurangi resiko bencana. Resiko bencana berbanding lurus dengan potensi ancaman dan kerentanan namun berbanding terbalik dengan kapasitas (Harkunti, 2015). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketangguhan komunitas masyarakat dalam membangun ketangguhan kawasan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Kawasan Legian-Kuta Bali.

II. METODE

Artikel ini adalah bagian dari penelitian "Faktor-Faktor Ketangguhan Kawasan Akibat Peristiwa Bom Bali di Kelurahan Kuta". Jenis penelitian ini adalah penelitian deduktif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang tidak diukur dengan angka. Dalam metode penelitian, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan bagian dari teknik *non probability sampling*. Teknik *purposive sampling* teknik menentukan sampel memakai beberapa pertimbangan tertentu yang dapat berupa kritera-kriteria responden, sehingga data-data yang terkumpul dapat merepresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketangguhan komunitas masyarakat dalam membangun ketangguhan kawasan (Sugiono, 2010). Setelah menentukan responden penelitian, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, sehingga penggalian informasi dapat dilakukan secara komperhensip dan lengkap.

Hasil dari wawancara mendalam diproses menggunakan teknik *content analysis. Content analysis* adalah suatu teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis. Alur yang digunakan dalam melaksanakan *content analysis,* pertama menentukan kategori yang digunakan dalam analisis dengan menetapkan kode sesuai dengan variabel penelitian, selanjutnya pendataan dokumen hasil wawancara mendalam dengan kode yang telah ditentukan sebelumnya dan terakhir adalah interpretasi dan penafsiran data. Pada tahap interpretasi data, penulis menentukan tingkat kepentingan variabel dengan menggunakan skala kepentingan rendah, sedang dan tinggi secara subjektif berdasarkan hasil dari wawancara mendalam. Sehingga dalam analisis ini dapat mereduksi variabel penelitian yang telah ditetapkan maupun dapat memunculkan variabel baru. Penjabaran hasil analisis dilakukan dengan menampilkan hasil analisis berupa kesimpulan secara deskriptif, dan menggunakan bagan sebagai ilustrasi yang mendukung hasil analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Input yang menjadi bahan untuk analisis adalah transkrip hasil wawancara mendalam berdasarkan variabel penelitian. Variabel penelitian didapatkan berdasarkan hasil sistesa kajian pustaka, adapun variabel awal yang terbagi dalam tiga aspek berikut:

1. **Aspek Sosial Masyarakat**, dengan variabel pengalaman masa lalu; pengetahuan; pengetahuan akan budaya lokal; keahlian; dan kepercayaan akan nilai-nilai spiritual yang terangkum dalam indikator kapasitas individu. Selanjutnya variabel

koordinasi antara elemen masyarakat; kerjasama antara elemen masyarakat; kepercayaan antara elemen masyarakat; kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat; dan organisasi yang berkembang dalam masyarakat yang terangkum dalam indikator kapasitas kelompok masyarakat.

2. **Aspek Ekonomi,** dengan variabel pekerjaan yang dimiliki masyarakat; investasi yang dimiliki masyarakat dan ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan yang terangkum dalam indikator penghasilan dan investasi masyarakat.
3. **Aspek Sistem Tata Kelola,** dengan variabel program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat pada indikator daya dukung pemerintah. Selanjutnya variabel perencanaan jangka panjang yang terpadu dan berorientasi terhadap tanggap bencana dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pada indikator perencanaan

Wawancara dilakukan kepada responden penelitian yang sebelumnya dipilih menggunakan teknik *purposive sampling.* Responden penelitian berjumlah tujuh orang responden yang terdiri dari tokoh masyarakat, kalangan pemerintah, akademisi dan masyarakat terdampak. Responden dari tokoh masyarat terdiri dari Kelihan Banjar Pengabetan (R1) dan Bendesa Adat Kuta (R2). Adapun dari Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Ketua LPM Kelurahan Kuta (R3). Sedangkan responden dari pihak akademisi terdiri dari dua Dosen PWK UNHI (R4 dan R7). Selanjutnya dari responden dari masyarakat terdampak yiatu korban tidak langsung Bom Bali II (R5) dan terakhir dari pihak pemerintah yaitu Kepala Bidang 1 BPBD Kabupaten Badung (R6). Masing masing responden ditandai dengan kode “R” untuk memudahkan dalam melakukan analisis serta penarikan kesimpulan.

Analisis dilakukan dengan memilah dan memilih pendapat responden terkait dengan variabel penelitian. Selanjutnya menentukan skala kepentingan dari pendapat responden tersebut, dengan memperhatikan pemahaman responden akan variabel, pengulangan yang dilakukan dan penekanan yang disampaikan responden teradap variabel tersebut. Selain itu apabila responden memberikan variabel baru variabel tersebut akan disesuaikan dengan tinjauan pustaka terlebih dahulu, dan apabila responden lain memberikan pernyataan yang sama maka variabel baru akan dimasukkan dalam daftar variabel. Setelah melakukan penafsiran tentang skala kepentingan, perlu menandai skala kepentingan rendah dengan warna merah, sedang dengan warna biru dan tinggi dengan warna hijau. Beriku adalah analisis matriks kesesuaian yang dapat diperhatikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Pendataan Hasil Analisis Responden terhadap Variabel Penelitian

No	Indikator	Variabel	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Kesimpulan
		Aspek Sosial Masyarakat								
1	Kapasitas Individu	Pengalaman masa lalu	V	V	V					Tidak Signifikan
		Pengetahuan		V	V	V	V	V	V	Valid
		Pengetahuan akan budaya lokal	V	V	V	V		V	V	Signifikan
		Keahlian								Tidak Signifikan
		Kepercayaan akan nilai-nilai spiritualitas	V	V	V	V		V		Signifikan
	Kelompok /Komunitas Masyarakat	Koordinasi antara elemen masyarakat	V	V	V	V		V		Signifikan
		Kerjasama	V	V	V		V	V	V	Signifikan

No	Indikator	Variabel	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Kesimpulan
		antara elemen masyarakat								
		Kepercayaan antara elemen masyarakat			V		V			Tidak Signifikan
		Kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat		V				V		Tidak Signifikan
		Organisasi yang berkembang dalam masyarakat	V	V	V		V	V		Signifikan
		Aspek Ekonomi								
2	Penghasilan dan investasi masyarakat	Pekerjaan yang dimiliki masyarakat	V	V			V			Tidak Signifikan
		Investasi yang dimiliki masyarakat		V	V					Tidak Signifikan
		Ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan	V		V	V	V			Signifikan
		Aspek Sistem Tata Kelola								
3	Daya dukung pemerintah	Program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat	V	V	V		V	V		Signifikan
	Perencanaan	Perencanaan jangka panjang yang terpadu dan berorientasi terhadap tanggap bencana		V				V	V	Signifikan
		Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana		V						Tidak Signifikan
		Aspek Fisik								
4	Fasilitas	Fasilitas Umum		V	V	V	V		V	Signifikan
		Fasilitas Kesehatan					V			Tidak Signifikan
	Aksesbilitas	Desain Tata Letak Akses Keluar-Masuk Kawasan			V					Tidak Signifikan

No	Indikator	Variabel	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	Kesimpulan
		Jalur Evakuasi					V			Tidak Signifikan
		Kondisi jalan						V		Tidak Signifikan

Sumber: dikutip dari Tugas Akhir "Faktor-Faktor Ketangguhan Kawasan akibat Peristiwa Bom Bali di Kelurahan Kuta"

Berdasarkan Tabel 3.1 faktor yang menyebabkan ketangguhan diulas pada masing-masing aspek terhadap tujuh responden. Pada masing-masing aspek terdapat beberapa variabel, apabila responden menyatakan variabel tersebut berpengaruh maka diberi tanda "v" pada kolom variabel. Variabel dinyatakan signifikan apabila telah memenuhi setengah dari jumlah responden, namun apabila tidak mencapai setengah tetapi tingkat kepentingannya tinggi maka variabel dapat dinyatakan signifikan. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3.1, terdapat beberapa variabel yang tereduksi karena tidak signifikan, dalam hal ini responden tidak meyatakan bahwa variabel itu berpengaruh atau variabel berpengaruh namun dalam tingkat kepentingan yang rendah. Sedangkan dalam analisis tersebut terdapat variabel baru yang terangkum dalam aspek fisik, variabel-variabel ini secara tersirat diungkapkan oleh responden yang kemudian disesuaikan dengan teori pada tinjauan pustaka, sehingga dapat ditetapkan menjadi variabel baru. Adapun faktor yang menyebabkan ketangguhan komunitas dalam membangun ketangguhan kawasan yaitu.

1. Pengetahuan.
2. Pengetahuan akan budaya lokal.
3. Kepercayaan akan nilai-nilai spiritualitas.
4. Koordinasi antara elemen masyarakat.
5. Kerjasama antara elemen masyarakat.
6. Organisasi yang berkembang dalam masyarakat.
7. Ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan.
8. Program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat.
9. Perencanaan jangka panjang yang terpadu dan berorientasi terhadap tanggap bencana.
10. Fasilitas Umum.

Sepuluh faktor tersebut terdiri dari empat aspek yaitu aspek sosial masyarakat, aspek ekonomi, aspek sistem tata kelola dan aspek fisik. Mambangun ketangguhan kawasan juga berarti berupaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana yang selaras dengan meningkatkan kapasitas. Kapasitas memiliki dua komponen yaitu komponen fisik dan komponen sosial, dalam penelitian ini komponen sosial termasuk dalam aspek sosial masyarakat dan sistem tata kelola, sedangkan komponen fisik termasuk dalam aspek ekonomi dan aspek fisik.

Aspek sosial masyarakat terbagi menjadi dua yaitu kapasitas individu dan kapasitas kelompok, dimana kapasitas individu merupakan wujud sikap, pengetahuan dan kesadaran individu terhadap bencana, sedangkan kapasitas kelompok merupakan jaringan berkelanjutan yang dibangun dari kapasitas individu. Dalam penelitian ini hasil yang ditunjukkan pada kapasitas individu adalah pengetahuan, pengetahuan akan budaya lokal dan kepercayaan akan nilai-nilai spiritual. Pengetahuan memberikan sudut pandang dan wawasan baru kepada individu untuk menilai, memantau dan bertindak terhadap suatu ancaman. Selain itu pengetahuan terhadap budaya lokal memberikan perlindungan dan kewaspadaan diri secara alami dan turun temurun bagi individu yang tinggal di wilayah tersebut.

Masyarakat Bali tentunya tidak terlepas akan kepercayaan akan nilai-nilai spiritualitas, oleh karenanya ketangguhan dibangun dari adanya kesadaran dan kepercayaan akan nilai-nilai spiritual dengan mengintropeksi diri dan berupaya bangkit dari keterpurukan. Sedangkan kapasitas kelompok dibangun dengan adanya koordinasi serta kerjasama antara elemen masyarakat sehingga membentuk jaringan serta ikatan yang kuat antara elemen mayarakat, sehingga lmbat laun akan bermunculan organisasi yang berkembang dalam masyarakat yang secara swadaya sebagai bentuk keberlanjutan dalam menjaga dan membangun kawasan.

Aspek ekonomi pada hasil penelitian ini adalah ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaannya. Pada kawasan pariwisata tidak terlepas akan perkembangan pola prilaku masyarakatnya. Kehidupan pariwisata menjadi salah satu budaya baru dalam bertahan hidup, terjadinya peristiwa Bom Bali membuat sejumlah usaha perekonomian masyarakat terpuruk satu-satunya upaya masyarakat adalah membangkitkan kembali usaha perekonomian tersebut seperti took cinteramata, restoran, jasa travel, spa dan lainnya. Ketergantungan akan pekerjaannya dalam bidang pariwisata mendorong masyarakat untuk berusaha bangkit dari keterpurukan sehingga mampu menstabilkan kondisi perekonomian.

Aspek sistem tata kelola terdiri dari daya dukung pemerintah dan perencanaan. Daya dukung pemerintah berupa program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat, yang berupaya untuk meningkatkan kapasitas individu, kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pemerintah harus memiliki perencanaan jangka panjang yang terpadu dan berorientasi terhadap tanggap bencana sehingga kejadian yang sama tidak berulang kembali dan dapat membangun ketangguhan seiring dengan membangun pariwisata yang berkelanjutan. Terakhir aspek fisik yaitu fasilitas umum merupakan *tools* dan kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri akibat bencana. Fasilitas umum sangatlah berpengaruh dalam membangun ktangguhan kawasan terlebih lagi pada kawasan pariwisata. Semua variabel ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dalam membangun ketangguhan kawasan dimulai dari membangun komunitas masyarakat dengan mengembangkan kapasitas tidak hanya kapasitas sosial namun kapasitas fisik perlu diperhatikan.

IV. KESIMPULAN

Membangun ketangguhan kawasan berawal dari membangun ketangguhan komunitas masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai otak dari kota, yang dimana mengarahkan kegiatan, menanggapi kebutuhan, dan belajar dari pengalaman, sehingga saat terjadi bencana jaringan komunitas masyarakat harus mampu bertahan dan berfungsi dengan baik di bawah kondisi yang ekstrim. Sebuah kota tanpa masyarakat tangguh akan sangat rentan terhadap bencana. Ketangguhan bertujuan untuk tetap mempertahankan kondisi, struktur dan indentitas pasca krisis ataupun bencana. Pariwiasata menjadi salah satu sektor unggulan di Bali dan memberikan kontribusi yang besar untuk perekonomian. Akibat ledakan Bom Bali I dan Bom Bali II kondisi pariwisata sempat mengaami keterpurukan, namun masyarakat berupaya untuk bangkit dan menghidupkan kemali pariwisata sehingga kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Bali kembali stabil.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis dari hasil wawancara mendalam terhadap tujuh orang responden. Responden terdiri dari tokoh masyarakat, kalangan pemerintah, akademisi dan masyarakat terdampak. Analisis dilakukan satu persatu terhadap masing-masing responden dengan memperhatikan tiga aspek awal yaitu aspek sosial masyarakat, aspek ekonomi dan aspek sistem tata kelola. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan

matriks kesesuaian. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa, faktor yang menyebabkan ketangguhan komunitas dalam membangun ketangguhan kawasan terdiri dari empat aspek yaitu aspek sosial masyarakat, aspek ekonomi, aspek sistem tata kelola dan aspek fisik. Terdapat aspek baru yang muncul dari hasil analisis yaitu aspek fisik.

Analisis menunjukkan aspek sosial masyarakat terdiri dari variabel pengetahuan, pengetahuan akan budaya lokal, kepercayaan akan nilai nilai spiritual, koordinasi antara elemen masyarakat, kerjasama antara elemen masyarakat dan organisasi yang berkembang dalam masyarakat. Aspek ekonomi terdiri dari ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan. Aspek sistem tata kelola terdiri dari program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan kesejahteraan masyarakat serta perencanaan jangka panjang yang terpadu dan berorientasi terhadap tanggap bencana. Terakhir aspek fisik terdiri dari fasilitas umum.

Ketangguhan komunitas masyarakat dibangun mulai dari membangun kapasitas masyarakat. Kapasitas masyarakat dibangun dengan memperhatikan aspek sosial masyarakat dan aspek sistem tata kelola, namun perlu diperhatikan dalam membangun ketangguhan komunitas masyarakat pada kawasan pariwisata perlu memperhatikan aspek ekonomi dan aspek fisik yang terangkum dalam kapaistas fisik. Sehingga dalam mendukung parwisata berkelanjutan ketangguhan komunitas perlu dikembangkan dimulai dari membangun kapasitas sosial dan kapasitas fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Coaffee, J. (2009). Terrorism, Risk and The Global City: Towards Urban Recilience. England: Ashgate Publishing Limited.

Colussi, M. (1960). *The Community Resilience Manual.* Port Alberni: Centre for Community Enterprise.

Couteau, J. (2003). After the Kuta Bombing: In Search of the Balinese Soul. *Antropologi Indonesia 70*, pp. 41-59.

Donoghue, E. M., & Sturtevant, V. E. (2007). Social Science Constructs in Ecosystem Assesments: Revisting Community Capacity and Community Reciliency. *Society and Natural Resources*, 889-912

Faisal, E. (2005). *Dampak Aksi Teroris Terhadap Pariwisata Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional : Studi Kasus Bom Bali.* Pascasarjana-Universitas Indonesia. Program Studi Kajian Stratejik Ketahanan Nasional.

Godsclhalk, D. R. (2003). Urban Hazard Mitigation : Creating Resilient Cities. *Natural Hazard Review*, pp. 136-143.

Harkunti. (2015). *Materi Kuliah : Pengenalan Kuliah Manajemen Bencana Terpadu*. Bandung: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

I.C.L.E.I Local Goverments for Sustainanility . (2011). *Briefing Sheet Towards Urban Resilience.* Germany: Capacity Center Kaiser-Friedrich-Strasse 7.

Suriastini, N. (2010). *Kontribusi Strategi Bertahan HIdup Rumah Tangga Pasca-Tragedi Bom Bali I pada Peningkatan Kesejahteraan Materi: Menggunakan Data Penel Rumah Tangga.* Yogyakarta: SurveyMETER Yogyakarta

The Rockefeller Foundation. (2014, November 1). *Report:City Resilience Framework – 100 Resilient Cities.* Retrieved from 100 Resilient Cities: https://www.rockefellerfoundation.org/report/city-resilience-framework-2/ diakases pada 30 September 2016

Pratama, Wayan Nanda Khrisna. (2017) *Faktor-Faktor Ketangguhan Kawasan akibat Peristiwa Bom Bali di Kelurahan Kuta*. Tugas Akhir. Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Kajian Komponen Konsep *Community Based Tourism*

Nindya Sari[1], Dzacki Rendy S[1] dan Kartika Eka Sari[1]
Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya , Malang
Email: nindya.s@ub.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan saat ini berusaha melibatkan partiipasi masyarakat, begitu juga dalam pembangunan pariwisata. Pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Desa Ngadisari adalah salah satu pintu menuju objek wisata Gunung Bromo yang memiliki potensi kegiatan pariwisata. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait potensi objek wisata Gunung Bromo, membuat masyarakat lebih memilih bertani dari pada bekerja di sektor pariwisata. Padahal banyak sekali peluang yang bisa diambil dari kegiatan wisata Gunung Bromo. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji komponen Community Based Tourism (CBT) di Desa Ngadisari yang termasuk dalam kawasan wisata Gunung Bromo. Hasil akhirnya adalah tingkatan kontribusi dalam mengukur potensi masyarakat berdasarkan komponen CBT di ketiga dusun Desa Ngadisari. Konsep CBT yang dikaji meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan politik. Identifikasi gambaran komponen CBT dalam potensi masyarakat dilakukan dengan metode CFA (Confirmatory Factor Analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran kontribusi dalam mengukur potensi masyarakat di dusun Cemorolawang dari yang paling besar sampai terendah adalah komponen Budaya, Ekonomi, Sosial, Lingkungan dan Politik. Sedangkan di Dusun Ngadisari urutan kontribusi dalam mengukur potensi masyarakat pariwisata Gunung Bromo adalah komponen lingkungan, budaya, ekonomi, sosial dan politik. Urutan kontribusi dalam mengukur potensi masyarakat di dusun Wonosari adalah komponen budaya, Sosial, ekonomi, lingkungan dan politik.

Kata Kunci : komponen CBT, *Confirmatory Factor Analysis*

I. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigma*). Konsep tersebut merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global. Dari beberapa ulasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (Sastrayuda, 2010).

Pentingnya partisipasi dalam pembangunan pariwisata memberikan arti bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi, seperti menarik

investor luar, harus melibatkan warga (Bryson, 2007). Dalam proses pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan warga hendaknya tidak saja dijadikan objek, melainkan sebagai subyek dalam menentukan arah perkembangan masyarakat, sehingga jika warga masyarakat menolak investasi yang masuk, maka pemerintah juga tidak dapat memaksakan kehendaknya (Raharjana, 2010).

Pembangunan pariwisata juga diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat lokal, karena masyarakat memiliki banyak pengetahuan tentang kondisi obyektif wilayahnya, sehingga dalam pengembangan pariwisata diperlukan pendekatan terhadap masyarakat setempat sebagai suatu model pendekatan perencanaan partisipatif. *Community Based Tourism* (CBT) sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. *Community Based Tourism* (CBT) bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi para investor, namun lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat setempat (Hadiwijoyo, 2012).

Desa Ngadisari adalah salah satu desa yang terdapat di Kawasan Wisata Gunung Bromo. Penduduk Desa Ngadisari beraktivitas di bidang pertanian dan pariwisata. Selain menjadi salah satu pintu masuk menuju Gunung Bromo, Desa Ngadisari ini merupakan kawasan wisata yang paling ramai terutama pada hari libur. Salah satu daya tarik wisata di Desa Ngadisari ini adalah adat istiadat Suku Tengger yang masih terjaga dan sangat kuat pengaruhnya pada kehidupan masyarakat. Masyarakat Tengger memiliki kekhasan tersendiri dan keunikan yaitu upacara adat dan ritual keagamaan yang digelar di Kawasan Gunung Bromo, salah satunya adalah upacara Kasada (Lindasari, 2009). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029 yang mengarahkan Desa Ngadisari menjadi Desa Wisata berbasis masyarakat yang dapat memperkaya obyek wisata bagi pengunjung untuk menambah obyek wisata bagi pengunjung untuk menambah obyek yang sudah ada di dalam kawasan TN BTS.

Warga desa berpengaruh besar terhadap pengembangan wisata, karena warga desa mengetahui dan memahami sejauh mana potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu keterlibatan masyarakat desa sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa hasil yang akan di dapat berkaitan dengan keuntungan dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Peran warga desa dalam dalam pembangunan wisata harus dikembangkan dan diletakan dalam integrasi antara warga desa dengan proses pembangunan wisata (Raharjana, 2010).

II. METODE

A. Variabel

Kajian ini menggunakan enam variabel yaitu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Definisi operasional mengenai variabel penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi tentang konsep yang terkandung dari variabel penelitian tersebut.

1. Variabel Ekonomi
   Variabel ekonomi digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi yang ada di Desa Ngadisari Kecamatan sukapura yang menjadi pendukung pariwisata Gunung Bromo. Variabel ini menggunakan sub variabel yaitu pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Sub variabel pendapatan masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat. Sedangkan sub variabel kesempatan kerja untuk mengetahui berapa besar tingkat peluang kerja masyarakat Desa Ngadisari sebagai pendukung pariwisata Gunung Bromo.
2. Variabel Sosial
   Variabel sosial membahas mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga dan kualitas hidup masyarakat Desa Ngadisari. Untuk mengidentifikasi

tingkat kesejahteraan masyarakat keluarga dapat digunakan indikator yaitu pendapatan rumah tangga, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis, kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan dan bagaiamana kehidupan beragama masyarakat sekitar. Sedangkan untuk mengidentifikasi kualitas hidup masyarakat Desa Ngadisari dapat menggunkana indikator sumber mata pencaharian masyarakat Desa Ngadisari, penghasilan, kesempatan kerja masyrakat Desa Ngadisari.

3. Variabel Budaya
   Variabel budaya adalah variabel untuk mengetahui bagaimana karakteristik budaya masyarakat Desa Ngadisari. Dikenalnya kesenian atau budaya daerah keluar oleh wisatawan, dengan diminatinya kesenian dan kerajinan oleh para wisatawan, membuat penduduk lokal bergairah untuk mendalami seni budaya sendiri. Pariwisata mengakibatkan adanya pertemuan dua budaya yang berbeda antara budaya yang dimiliki oleh masyarakat lokal Desa Ngadisari dengan budaya wisatawan, sehingga perlu adanya penghormatan antar kedua budaya.
4. Variabel Lingkungan
   Variabel lingkungan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik lingkungan yang diakibatkan dari Desa Ngadisari yang menjadi pendukung pariwisata Gunung Bromo. Untuk melihat karakteristik lingkungan Desa Ngadisari digunakan sub variabel yaitu kepedulian akan perlunya konservasi Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologi yang tetap mendukung suatu kehidupan, melindungi keanekaragaman hayati, menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya. Sub variabel berikutnya adalah bagaimana ketersedian air bersih.
5. Variabel Politik
   Variabel politik ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan partisipasi penduduk Desa Ngadisari mengenai peningkatan komunitas yang lebih luas, mekanisme yang menjamin hak masyarakat Desa Ngadisari dalam pengelolaan Sumber Daya.

B. Analisis Faktor Konfirmatori

Fungsi dari analisis faktor konfirmatori ini bertujuan untuk mengetahui nilai kontribusi komponen *Community Based Tourism* (CBT) dalam mengukur potensi masyarakat di masing masing dusun Desa Ngadisari, sehingga dapat diketahui gambaran potensi masyarakat Desa Ngadisari dalam pengembangan penggunaan konsep *Community Based Tourism* (CBT). Langkah awal yang harus dilakukan sebelum mencari nilai kontribusi adalah mengidentifikasi apakah data-data dan komponen dari CBT tersebut sudah valid atau tidak dan keakuratan/ketepatan suatu data yaitu dengan cara melihat nilai convergent valdity dan reliabilitas konstruk. Setelah mengetahui bahwa data dan komponen CBT tersebut valid dan akurat maka dapat ditentukan tingkatan kontribusi komponen *Community Based Tourism* (CBT) dalam mengukur potensi masyarakat di masing masing dusun Desa Ngadisari.

C. Sampel Penelitian

Populasi sebesar 502 KK dan berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel dalam penelitian ini diasumsikan sebesar 5% sehingga didapatkan 176 sampel KK sebagai responden. Besaran atau ukuran sampel ini sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namum, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka semakin kecil jumlah sampel (Hendry, 2010). Lokasi yang menjadi kajian adalah 3 dusun di Desa Ngadisari dibagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun Wonosari, Dusun Ngadisari, dan Dusun Cemorolawang. Responden didistribusikan pada 3

dusun dengan komposisi Dusun Wonosari 48 responden, Dusun Ngadisari 59 responden dan Dusun Cemorolawang 69 responden.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik pariwisata Desa Ngadisari

Desa Ngadisari memiliki obyek wisata unggulan untuk di kunjungi yaitu Gunung Bromo yang menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Daya tarik utama terletak pada status gunung yang masih aktif dan juga dapat dengan mudah di kunjungi dan didaki. Banyak hal yang dapat ditawarkan di Wisata Gunung Bromo sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung yaitu pemandangan matahari terbit, lautan pasir Gunung Bromo, padang savana bromo dan kawah gunung Bromo. Faktor budaya atau adat yang menjadi pendukung daya tarik bagi wisatawan. Tetap terjaganya budaya dan adat istiadat dari masyarakat Suku Tengger yang pada umumnya merupakan pemeluk agama Hindu.

Sebagian besar masyarakat Desa Ngadisari (95%) bercocok tanam di kebun, ladang dan lahan pertanian yang terdapat di lereng Gunung Bromo. Sedangkan sebagian kecil dari mereka (5%) berprofesi sebagai pegawai negeri, buruh, dan pengusaha jasa (Lindasari, 2009:38). Dari data tersebut menunjukkan bahwa minat dan peluang di bidang pariwisata masih sedikit, padahal banyak peluang yang bisa diperoleh dari perkembangan kegiatan wisata Gunung Bromo. Masyarakat kurang memahami jika perkembangan kegiatan pariwisata bisa dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat diantaranya pengusaha penyelenggaraan akomodasi, pengusaha penyediaan makanan dan minuman, usaha perjalanan perjalanan wisata dan pramuwisata (pemandu wisata) lokal. Selain itu juga memanfaatkan potensi alam desa dan budaya desa sebagai daya tarik pendukung kawasan wisata Gunung Bromo.

B. Kajian komponen CBT

Kajian komponen CBT di Desa Ngadisari dilakukan dengan menggunakan analisis Faktor Konfirmatori. Analisis ini merupakan salah satu metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah model pengukuran yang dibangun sesuai dengan yang dihipotesiskan. *Loading factor* (muatan faktor) menyatakan besarnya keragaman indikator yang dapat dijelaskan oleh faktornya, atau kontribusi indikator dalam mengukur faktornya (variabel latennya) (Hartanto, 2014, h.7). Indikator yang dominan dalam hasil CFA adalah indikator yang memiliki *loading factor* paling besar.

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum mencari nilai kontribusi adalah mengidentifikasi apakah data-data dan komponen dari CBT tersebut sudah valid atau tidak dan keakuratan/ketepatan suatu data yaitu dengan cara melihat nilai convergent valdity dan reliabilitas konstruk. Setelah mengetahui bahwa data dan komponen CBT tersebut valid dan akurat maka dapat ditentukan tingkatan kontribusi komponen *Community Based Tourism* (CBT) dalam mengukur potensi masyarakat di masing masing dusun Desa Ngadisari.

1. **Pengujian *Convergent Validity***

   Convergent Validity dimaksudkan untuk mengetahui valid tidaknya indikator pertanyaan dalam mengukur variabel. *Convergent Validity* setiap indikator dalam mengukur variabel ditunjukkan oleh besar kecilnya *loading faktor*. Suatu indikator dikatakan valid apabila *loading faktor* suatu indikator bernilai positif dan lebih besar 0.5.

Tabel 1 Pengujian *Convergent Validity*

Variabel	Indikator *Community Based Tourism* (CBT)	*Loading*		
		Estimate	SE	CR
Potensi Masyarakat **Cemoro Lawang**	**Sosial**	0.965	0.005	198.07*
	Budaya	0.983	0.003	344.31*
	Lingkungan	0.964	0.007	140.09*
	Politik	0.946	0.010	98.27*
	Ekonomi	0.977	0.005	199.31*
Potensi Masyarakat **Wonosari**	**Sosial**	0.961	0.012	80.24*
	Budaya	0.976	0.008	126.88*
	Lingkungan	0.950	0.006	149.78*
	Politik	0.758	0.036	20.92*
	Ekonomi	0.960	0.009	112.18*
Potensi Masyarakat **Wonosari**	**Sosial**	0.962	0.007	140.31*
	Budaya	0.970	0.007	133.07*
	Lingkungan	0.972	0.005	207.82*
	Politik	0.957	0.008	125.23*
	Ekonomi	0.965	0.005	178.43*

Berdasarkan hasil analisis model pengukuran dapat diketahui bahwa semua indikator *Community Based Tourism* (CBT) dari variabel potensi masyarakat di masing-masing wilayah, yaitu Cemoro Lawang, Wonosari, dan Ngadisari menghasilkan *loading faktor* yang lebih besar dari 0.5. Dengan demikian indikator tersebut dapat dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel yang bersesuaian dengan indikator tersebut.

2. **Pengujian Reliabilitas Konstruk**

Pengujian reliabilitas konstruk dilakukan menggunakan ukuran reliabilitas konstruk (*Cronbach's Alpha*) atau menggunakan jumlah varian keseluruhan dalam indikator yang dijelaskan oleh konstruk latent (*Average Variance Extracted (AVE)*) atau biasa disebut *discriminant reliability*. Kriteria pengujian apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar sama dengan 0.70 dan nilai *discriminant reliability* lebih besar sama dengan 0.50 maka dapat dinyatakan kontruk telah reliabel.

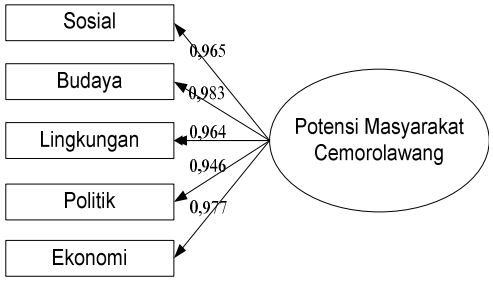
Tabel 2 Pengujian Reliabilitas Konstruk

Variabel	AVE	*Alpha*
Potensi Masyarakat **Cemoro Lawang**	0.936	0.973
Potensi Masyarakat **Wonosari**	0.854	0.934
Potensi Masyarakat **Ngadisari**	0.932	0.957

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai *discriminant reliability* (AVE) untuk semua variabel lebih besar dari nilai cut off sebesar 0.50. Dengan demikian berdasarkan nilai *discriminant reliability* variabell potensi masyarakat di ketiga wilayah Cemoro Lawang, Wonosari, dan Ngadisari dinyatakan reliabel. Selanjutnya nilai *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel lebih besar dari nilai cut off sebesar 0.50. Dengan demikian berdasarkan nilai *Cronbach's Alpha* variabell potensi masyarakat di ketiga wilayah Cemoro Lawang, Wonosari, dan Ngadisari dinyatakan reliabel.

- **Kontribusi Indikator Pengukur Variabel Potensi Masyarakat di Wilayah Cemoro Lawang**

  Besarnya muatan atau kontribusi indikator dalam mengukur variabel potensi masyrakat di wilayah Cemoro Lawang dapat diketahui melalui *loading factor* masing-masing indikator. Model pengukuran variabel potensi masyarakat Dusun Cemorolawang adalah sebagai berikut :

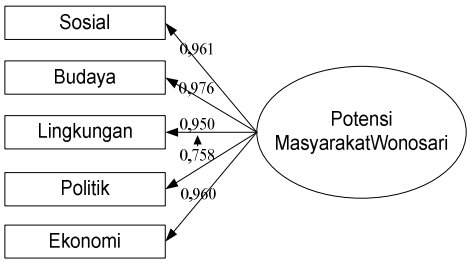


Gambar 14. Model hubungan Variabel potensi masyarakat Dusun Cemorolawang

Berdasarkan perhitungan untuk mengetahui tingkatan variabel *Community Based Tourism* (CBT) yang berpengaruh dalam potensi masyarakat obyek wisata Gunung Bromo di Dusun Cemoro Lawang didapatkan hasil bahwa komponen budaya merupakan komponen yang paling dominan dalam mengukur variabel Potensi masyarakat di Cemoro Lawang dengan nilai *loading factor* 0,983. Dengan kata lain, kontribusi komponen budaya dalam mengukur variabel potensi masyarakat di Cemoro Lawang sebesar 98.3%. Selanjutnya komponen paling tinggi kedua yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Cemoro Lawang adalah komponen ekonomi dengan nilai *loading factor* 0,977. Paling tinggi ketiga komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Cemoro Lawang adalah komponen sosial dengan nilai *loading factor* 0,965. Urutan keempat komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Cemoro Lawang adalah komponen lingkungan dengan nilai *loading factor* 0,964. Kemudian urutan kelima komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Cemoro Lawang adalah komponen politik dengan nilai *loading factor 0,946*.

- **Kontribusi Indikator Pengukur Variabel Potensi masyarakat di Wilayah Wonosari**

  Besarnya muatan atau kontribusi indikator dalam mengukur variabel potensi masyarakat di wilayah Wonosari dapat diketahui melalui *loading factor* masing-masing indikator. Model pengukuran variabel potensi masyarakat Pariwisata Dusun Wonosari adalah sebagai berikut:

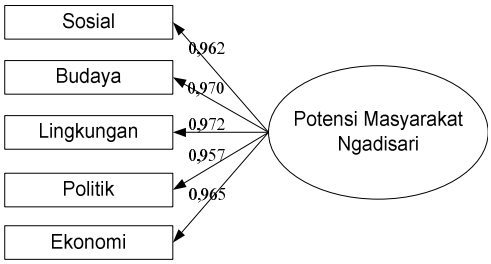


Gambar 15. Model hubungan Variabel potensi masyarakat Dusun Wonosari

Berdasarkan perhitungan untuk mengetahui tingkatan variabel *Community Based Tourism* (CBT) yang berpengaruh dalam potensi masyarakat obyek wisata Gunung Bromo di Dusun Wonosari diperoleh hasil bahwa komponen budaya merupakan komponen yang paling dominan dalam mengukur variabel Potensi masyarakat di Wonosari dengan nilai *loading factor* 0,976. Selanjutnya komponen paling tinggi kedua yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Wonosari adalah komponen sosial dengan nilai *loading factor* 0,961. Paling tinggi ketiga komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Wonosari adalah komponen ekonomi dengan nilai *loading factor* 0,960. Urutan keempat komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Wonosari adalah komponen lingkungan dengan nilai *loading factor* 0,950. Kemudian urutan kelima komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Wonosari adalah komponen politik dengan nilai *loading factor* 0,758.

- **Kontribusi Indikator Pengukur Variabel Potensi masyarakat di Wilayah Ngadisari**

Besarnya muatan atau kontribusi indikator dalam mengukur variabel potensi masyarakat di wilayah Ngadisari dapat diketahui melalui *loading factor* masing-masing indikator. Model pengukuran variabel potensi masyarakat Pariwisata Dusun Ngadisari adalah sebagai berikut :



Gambar 16. Model hubungan Variabel potensi masyarakat Dusun Ngadisari

Berdasarkan perhitungan untuk mengetahui tingkatan variabel *Community Based Tourism* (CBT) yang berpengaruh dalam potensi masyarakat obyek wisata Gunung Bromo di Dusun Ngadisari didaptkan hasil bahwa komponen lingkungan merupakan komponen yang paling dominan dalam mengukur variabel Potensi masyarakat di Ngadisari dengan nilai *loading factor* 0,972. Selanjutnya komponen paling tinggi kedua yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Ngadisari adalah komponen budaya dengan nilai *loading factor* 0,970. Paling tinggi ketiga komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Ngadisari adalah komponen sosial dengan nilai *loading factor* 0,962. Urutan keempat komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Ngadisari adalah komponen ekonomi dengan nilai *loading factor* 0,965. Kemudian urutan kelima komponen yang mengukur variabel Potensi masyarakat di Ngadisari adalah komponen politik dengan nilai *loading factor* 0,957.

IV. Kesimpulan

Pada penelitian ini ditujukan untuk melihat kesiapan masyarakat untuk mendukung kegiatan wisata di kawasan Gunung Bromo dengan menggunakan komponen CBT. komponen yang dianalisa akan menunjukkan kondisi masyarakat di tiga dusun yang terdapat di Desa Ngadisari dan mengetahui komponen yang memiliki prioritas kontribusi mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Prioritas kontribusi ini untuk mengukur potensi masyarakat di masing masing dusun Desa Ngadisari,

sehingga dapat diketahui gambaran potensi masyarakat Desa Ngadisari dalam pengembangan pariwisata dengan menggunakan konsep *Community Based Tourism* (CBT)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan PCA dari komponen CMB di 3 dusun dalam wilayah Desa Ngadisari menunjukkan prioritas kontribusi yang berbeda-beda. Karakteristik dari tiap dusun menjadi factor yang menyebabkan perbedaan kondisi tersebut. Komponen budaya memberi kontribusi terbesar untuk Dusun Cemoro Lawang dan Wonosari,dan menjadi komponen kedua untuk Dusun Ngadisari. Ketiga dusun tersebut memiliki kesamaan suku yang berarti memiliki kesamaan budaya yaitu budaya masyarakat Tengger. Pada umumya masyarakat Suku Tengger masih memegang teguh adat istiadat. Masyarakat mampu mengenalkan budaya lokal dengan baik, masyarakat siap untuk membuka diri terhadap wisatawan yang datang, masyarakat bisa bersosialisasi dengan baik dengan wisatawan, masyarakat menghormati budaya yang dibawa oleh wisatawan dan masyarakat tidak terpengaruh kebudayaan luar. Namun pada Dusun Wonosari masih ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mengenalkan budaya lokal. Budaya menjadi potensi yang sangat besar untuk bisa mendukung kegiatan wisata apalagi masyarakat masih sangat teguh memegang adat istiadat sehingga keberlanjutan budaya masyarakat Tengger masih tetap terjaga.

Komponen politik memiliki kontribusi paling rendah di 3 dusun yang dikaji. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata masih lemah. Demikian juga dengan kekuasaan dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan pariwisata. Peran pemerintah khususnya pemerintah desa menjadi salah satu penyebab kurang aktifnya masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata Gunung Bromo. Selain itu peran komunitas sudah lama menghilang karena organisasi dan SDM yang tidak memadai. Hampir seluruh kegiatan dan pengelolaan pariwisata Gunung Bromo di kuasai oleh perhutani. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal dari adanya pariwisata Gunung Bromo tersebut.

Satu komponen yang memiliki kontribusi yang berbeda adalah komponen lingkungan. Hanya pada Dusun Ngadisari didapatkan hasil bahwa komponen lingkungan memiliki kontribusi terbesar dibandingkan 4 komponen yang lain. Kondisi di Dusun Ngadisari memiliki lingkungan yang terjaga keasliannya dan masyarakat masih peduli untuk melakukan konservasi alam. Bagi masyarakat Dusun Ngadisari alam menjadi sumber kehidupan utama yaitu untuk dikelola sebagai lahan pertanian. Lokasi yang agak jauh dengan kawasan wisata Gunung Bromo,mengakibatkan dusun ini tidak banyak dikunjungi wisatawan. Masyarakat pun akhirnya lebih banyak yang bergerak dibidang pertanian daripada pariwisata. Imbas pariwisata tidak banyak dirasakan di Dusun Ngadisari.

Desa Ngadisari terutama merupakan kawasan pendukung kegiatan pariwisata Gunung Bromo. Namun sampai sejauh ini pengaruh kegiatan wisata Gunung Bromo ternyata hanya dirasakan di Dusun Cemorolawang dan Dusun Wonosari. Lokasi Dusun Cemorolawang yang dekat dengan Gunung Bromo mengakibatkan banyak kegiatan pendukung wisata yang berlokasi di dusun tersebut. Masyarakat banyak yang terlibat dalam kegiatan wisata seperti menjadi guide, menyewakan jip dan menyewakan rumah untuk penginapan. Fokus kegiatan wisata memang pada kawasan Gunung Bromo. Desa sekitarnya hanya sebagai lokasi untuk menunjang kegiatan wisata berupa penyedia fasilitas pariwisata. Belum ada rencana untuk mengangkat potensi lain dari desa sekitar Gunung Bromo supaya bisa mengangkat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Perbedaan prioritas kontribusi ini akan menjadi pertimbangan untuk mengarahkan penanganan dan pengembangan desa supaya bisa mendukung kegiatan wisata kawasan Gunung Bromo. Berdasarkan prioritas bisa digambarkan kelemahan dan kekuatan dari masing-masing dusun berdasarkan komponen CBT.

DAFTAR PUSTAKA

Bollen K.A. 1989. *Structural Equation with Laten Variabels,* New York: Departement of Sociology, John Wiley & Sons,

Bryson, John M, 2007. *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations* : *A guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers

Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo 2006. RIPPDA Kabupaten Probolinggo 2007-2017

Ditjen Pariwisata. 2009. Undang-Undang no.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Jakarta: Ditjen Pariwisata

Ditjen Pariwisata. 2009. Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2015. Jakarta: Ditjen Pariwisata

Ekasari, D. F. 2012. *Pemodelan SEM dengan Generalized Structured Component Analysis (GSCA): Studi Kasus Penentuan Struktur Model Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh

Lindasari. 2009. *Gunung Bromo dan Keunikan Masyarakat Tengger Sebagai Objek Wisata di Jawa Timur.* Jurnal. Medan: Universitas Sumatra Utara

Raharjana, Destha Titi. 2010. Membangun pariwisata bersama rakyat: kajian partisipasi lokal dalam membangu desa wisata di dieng plateu. *Jurnal*

Sastrayuda, Gumelar. 2010. Pengembangan dan pengelolaan Resort leuser*. Jurnal*

Suansri, Potjana.2003. *Community Based Tourism Handbook.* Thailand: REST Project.

Hendry. 2010. Penentuan populasi dan sampel. Jakarta: https://teorionline.wordpress.com/2010/01/24/populasi-dan-sampel/. (diakses 23 maret 2015)

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ghozali, Imam. 2008. Generalized Structural Component Analysis (GSCA) Model Persamaan Struktural Berbasis Komponen. Semarang: Universitas Diponegoro

Kabupaten Probolinggo 2009. RTRW Kabupaten Probolinggo 2010-2029

Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, nomor: sk. 47 /iv-21/bt.1/2013

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Okura, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru

Apriyan Dinata[1], Asy-Syaukani[1]

[1]Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
Jalan Kaharuddin Nasution No.113, Pekanbaru, 28284 Indonesia
Email: apriyandinata@gmail.com and apriyan_dinata@yahoo.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat adalah salah satu pilar keberhasilan di dalam pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat di dalam pengembangan pariwisata dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat secara aktif di dalam pengambilan keputusan. Selain itu, adanya kepastian masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari kepariwisataan. Desa Wisata Okura Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru telah ditetapkan oleh pemerintah kota sebagai salah satu desa wisata sejak tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di dalam pengembangan Desa Wisata Okura. Selain itu, juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam pengembangan Desa Wisata Okura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebanyak 165 responden telah dilakukan wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang diukur berdasarkan partisipasi pemikiran, tenaga, sumbangan finansial, materi dan keterampilan berada dalam kategori rendah dengan nilai rata-rata 39%. Hasil penelitian juga menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah tingkat pendidikan.

Kata kunci: pariwisata, partisipasi masyarakat, desa wisata, okura

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting di Indonesia. Kepariwisataan yang ada di Indonesia diarahkan sebagai sektor andalan, sehingga diharapkan akan mampu untuk mendorong perekonomian daerah dan nasional. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, tujuan pembangunan kepariwisataan di Indonesia, adala: a). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b). Meningkatkan kesejahteraan rakyat; c). Menghapus kemiskinan; d). Mengatasi pengangguran; e). Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; f). Memajukan kebudayaan; g). Mengangkat citra bangsa; h). Memupuk rasa cinta tanah air; i). Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan j). Mempererat persahabatan antar bangsa.

Menurut Argyo Demartoto dalam Nurdiyanto (2015) pengembangan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama termasuk membangun bersama masyarakat sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya kepada masyarakat setempat. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan (Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan).

Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat diantaranya yaitu : a). Memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata, b). Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata, c).

Memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut Isbandi dalam Nurdiyanto (2015) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Panudju dalam Ripai (2013), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.

Menurut Khairuddin dalam Mudatsir (2010) partisipasi dalam pengembangan pariwisata sangat penting dimasyarakatkan kepada semua pelaku yang terlibat. Partisipasi tidak berarti hanya berasal dari rakyat dan masyarakat, atau hanya dari pemerintah saja, tetapi partisipasi harus datang dari semua pihak masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta, jadi jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah kemampuan sistem pengelolaan sumber daya obyek wisata untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan untuk mengambil bagian secara aktif, mulai dari kegiatan identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

Menurut Hamijoyo dan Iskandar dalam Mudatsir (2010), bahwa ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran.

Menurut Mudatsir (2010), salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di muka bumi ini adalah karena faktor pendidikan. Ripai (2013) menyatakan bahwa setelah mengetahui bahwa faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka selanjutnya bagaimana pengaruh penghasilan/pendapatan dalam pembangunan. Menurut Siagian dalam Nurdiyanto (2015) faktor yang turut mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah kepemimpinan tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya yang mendorongnya untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor kesadaran masyarakat itu sendiri (Siagian dalam Nurdiyanto, 2015).

Faktor usia tentunya memiliki pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk berperan serta. Slamet dalam Mudatsir (2010) menyatakan bahwa ada hubungan antara usia dengan keanggotaan seseorang untuk ikut dalam suatu kelompok atau organisasi. Selain itu ada beberapa fakta juga yang mengindikasikan bahwa usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berperan serta.

Terwujudnya daya cipta dan kreasi masyarakat yang bukan hanya dapat memelihara yang ada, tetapi juga dapat menciptakan berbagai kreasi baru sehingga berbagai jenis wisata mulai dari wisata budaya, belanja, alam, olah raga, riset dan lain sebagainya, dapat berkembang secara variatif dan berkelanjutan (Mudatsir, 2010).

Provinsi Riau memiliki berbagai macam potensi kepariwisataan yang tersebar disetiap daerah, salah satunya Desa Okura, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

Desa Okura memiliki potensi sebagai desa wisata karena lokasi yang berada di tepi Sungai Siak Pekanbaru ini masih dihuni oleh penduduk asli Melayu, sebagian rumah masih mempertahanakan arsitektur rumah panggung yang terbuat dari kay dan jembatan kayu yang masih menghiasi setiap belakang rumah mereka.

Sebagai desa tua, berbagai kebudayaan dan tradisi nenek moyang masih terjaga dan dipelihara di desa ini.Desa Wisata Okura kelurahan Tebing Tinggi. Masih

adanya pengobatan tradisional, permainan gasing, dan bahasa serta adat Melayu masih digunakan di dalam kehidupan keseharian warga masyarakat.

Setelah ditetapkan sebagai kawasan desa wisata oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dengan No. 84 Tahun 2010 tentang penetapan kawasan desa wisata kota Pekanbaru, berbagai potensi potensi yang dimilikinya belum sepenuhnya dikembangkan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian sehingga keberadaan desa wisata dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal pada khususnya.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi penelitian ini mengenai tingkat partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di dalam pengembangan Desa Wisata Okura, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi Masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Okura Kelurahan Tebing Tinggi, di Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata Okura Kelurahan Tebing Tinggi, di Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek peneletian berada di Desa Wisata Okura, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Rumbai Pesisir, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Perawang Kabupaten Siak
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- Sebelah utara :berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- Sebelah selatan :berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh

B. Populasi dan sampel

Populasi

Populasi adalah keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat perhatian. Adapun populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat yang ada di Desa Wisata Okura, yaitu RW 04 dan RW 05 Kelurahan Tebing Tinggi Okura sebanyak 283 KK.

Sampel

Penentuan jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin (Nugroho et. al., 2009). :$n = \frac{N}{1+Ne^2}$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
e = Derajat kepercayaan

Berdasarkan rumus diatas, ukuran sampel yang dianggap sudah dapat mewakili populasi dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, adalah sebanyak 165

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Observasi lapangan yaitu salah satu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung yang ditinjau kepada obyek yang menjadi sasaran penelitian.
b. Telaah pustaka adalah pengumpulan data informasi dari berbagai litetarur dan laporan.
c. Kuesioner Pengumpulan data primer, khususnya penyebaran kuesioner telah dilakukan dari tanggal 24 Maret 2017 hingga 17 April 2017.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Partisipasi Masyrakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Okura

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Okura adalah wujud dukungan yang diberikan masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan program-program pengembangan yang telah berlangsung di Desa Wisata Okura.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengembangan yaitu dilakukan dengan pengukuran terhadap tingkat sumbangan yang diberikan masyarakat, berupa tingkat partisipasi buah pikiran/ide, partisipasi tenaga, partisipasi sumbangan finansial (uang), partisipasi sumbangan materi (barang), partisipasi keterampilan.

Pengukuran tingkat partisipasi untuk setiap komponen dilakukan dengan interpretasi skor perhitungan (Riduwan dan Akdon, 2007), sebagai berikut :

Y = skor tertinggi likert (5)× jumlah responden
X = skor terendah likert (1) × jumlah responden

Y = 5 x 165 = 825
X = 1 x 165 = 165
Rumus Interval: I = 100 / 5 = 20
(Intervalnya jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Kriteria interpretasi skor berdasarkan interval (Riduwan dan Akdon, 2007)::

- 0% - 19,99% = Sangat Rendah
- 20% - 39,99% = Rendah
- 40% - 59,99% = Sedang
- 60% - 79,99% = Tinggi
- 80% - 100% = Sangat Tinggi

B. Tingkat Partisipasi Pikiran/Ide

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat partisipasi dalam bentuk musyawarah yang diadakan dengan masyarakat di Desa Wisata Okura tergolong rendah dengan nilai skor 34,2%, dan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam memberikan pendapat atau ide-ide tergolong rendah dengan nilai skor 33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Ide/Pikiran

No	Tingkat Partisipasi Ide/Pikiran Ket: SS=sangat setuju, S=setuju, KS=kurang setuju, TS=tidak setuju, dan STS=sangat tidak setuju	Jawaban		Frekuensi Skor
1	Musyawarah dengan masyarakat yang diadakan di Desa Wisata Okura	SS	4	20
		S	8	32
		KS	17	51
		TS	43	86
		STS	93	93

		Total		**282**
2	Memberikan saran atau pendapat dalam pertemuan musyawarah	SS	3	15
		S	9	36
		KS	10	30
		TS	48	96
		STS	95	95
		Total		**272**

Sumber : Hasil Analisis, 2017

C. Tingkat Partisipasi Tenaga

Tabel 2 berikut memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. Berdasarkan data didapatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga yang diukur berdasarkan kegiatan gotong royong termasuk dalam keategori sedang, dengan nilai skor 43,3%, sedangkan dari aspek keikutertaan dalam kegiatan gotong royong didapati nilai skor 42,2% yang juga termasuk dalam kategori sedang.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Tenaga

No	Tingkat Partisipasi Tenaga	Jawaban		Frekuensi Skor
1	Kegiatan gotong royong dalam pengembangan Desa Wisata Okura	SS	10	50
		S	17	68
		KS	31	93
		TS	39	78
		STS	68	68
		Total		**357**
2	Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dalam pengembangan Desa Wisata Okura	SS	13	65
		S	17	68
		KS	23	69
		TS	34	68
		STS	79	79
		Total		**349**

Sumber : Hasil Analisis, 2017

D. Tingkat Partisipasi Sumbangan Finansial/Uang

Tabel 3 berikut memperlihatkan jawaban dari keseluruhan responden yang berjumlah 165 oang berkenaan dengan partisipasi dalam bentuk finansial.

Tabel 3: Tingkat Partisipasi Sumbangan Finansial/Uang

No	Tingkat Partisipasi Sumbangan Finansial (uang)	Jawaban		Frekuensi Skor
1	Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan finansial atau uang guna membantu pengembangan Desa Wisata Okura	SS	2	10
		S	5	20
		KS	18	54
		TS	42	84
		STS	98	98
		Total		**266**

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan data di atas, nilai skor yang diperoleh adalah sebesar 32,2% yang berarti bahwa partisipasi masyarakat Desa Wisata Okura dalam bentuk sumbangan finansial atau uang tergolong rendah.

E. Tingkat Partisipasi Sumbangan Materi/Barang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat masyarakat Desa Wisata Okura dalam bentuk sumbangan materi atau barang masih tergolong rendah, dengan nilai skor 35,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Tingkat Partisipasi Sumbangan Materi/Barang

No	Tingkat Partisipasi Sumbangan Materi (barang)	Jawaban		Frekuensi Skor
1	Partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan materi atau barang guna membantu pengembangan Desa Wisata Okura	SS	4	20
		S	6	24
		KS	19	57
		TS	52	104
		STS	84	84
		Total		**289**

Sumber : Hasil Analisis, 2017

F. Tingkat Partisipasi Keterampilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk menampilkan kesenian dan budaya lokal tergolong tinggi, dengan nilai skor 66,4%, sedangkan partsipasi dalam kegiatan pembuatan kerajinan tangan tergolong rendah dengan nilai skor 37,1%. Untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Sumbangan Keterampilan

No	Tingkat Partisipasi Keterampilan	Jawaban		Frekuensi Skor
1	Penampilan kesenian budaya oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata di Desa Wisata Okura	SS	24	120
		S	54	216
		KS	38	114
		TS	49	98
		STS	0	0
		Total		**548**
2	Keterampilan membuat barang kerajinan tangan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata di Desa Wisata Okura	SS	5	25
		S	9	36
		KS	24	72
		TS	46	92
		STS	81	81
		Total		**306**

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyrakat di dalam pengemabngan Desa Wisata Okura, yang dinilai dalam bentuk sumabngan pemikiran/ide, tenaga, finansial/keuangan dan materi/barang dapa dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat di Desa Wisata Okura

No	Bentuk Partisipasi	Skor
1	Partisipasi Pemikiran/Ide-ide	33,6
2	Partisipasi Tenaga	42,7

3	Partisipasi Finansial/Uang	32,2
4	Partisipasi Materi/Barang	35,0
5	Partisipasi Keterampilan	51,7
Jumlah		**195,2**
Skor Rata-rata		**39,0**

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Hasil penelitian ini cukup menarik karena nilai skor rata-rata dari partisipasi masaryakat di dalam pengemabngan Desa Wisata Okura, berada dalam ketegori rendah (39%). Partisipaisi dalam bentuk sumabgnan keterampilan dengan nilai skor yang paling tinggi 51,7% yang berada dalam kategori partisipasi sedang, sedangakan nilai skor yang paling rendah adalah partisiapsai dalam bentuk sumabgnann finnasil/uang dengan nilai skor 32,2% yang masuk dalam kategori partisipasi rendah.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengembangan Desa Wisata Okura dilakukan dengan pengukuran terhadap tingkat pendidikan, pendapatan, kepemimpinan pemerintah, usia, dan kesadaran/kemauan pribadi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Sedangkan Interpretasi nilai skor berdasarakan perhitungan (Riduwan dan Akdon, 2007):

Y = skor tertinggi likert (5) × jumlah responden
X = skor terendah likert (1)× jumlah responden
Y = 5 x 165 = 825
X = 1 x 165 = 165
Rumus Interval : I = 100 / Jumlah skor (likert)
I = 100 / 5 = 20

(Interval jarak dari terendah 0% hingga tertinggi 100%)

Kriteria interpretasi skor berdasarkan interval (Riduwan dan Akdon, 2007):

- 0% - 19,99% = Sangat Rendah
- 20% - 39,99% = Rendah
- 40% - 59,99% = Sedang
- 60% - 79,99% = Tinggi
- 80% - 100% = Sangat Tinggi

Tabel 9. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Parsipasi

No	Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	Nilai Skor(%)
1.	Pendidikan	74,3
2.	Pendapatan	60,1
3.	Kepemimpinan Pemerintah	36,6
4.	Usia	63,7
5.	Kesadaran/Kemauan Pribadi	36,1

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarakan Tabel 9 di atas faktor yang paling mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi masyarakat Desa Wisata Okura adalah faktor tingkat pendidikan dengan nilai skor 74,3% yang termasuk kategori berpengaruh tinggi, yang berarti bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengembangan Desa Wisata Okura. Kemudian diikuti faktor usia dengan skor 63,7% termasuk kategori berpengaruh tinggi, yang berarti bahwa faktor usia berpengaruh terhadap kemauan berpasrtisipasi masyarakat. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi

masyarakat Desa Wisata Okura adalah faktor penghasilan dengan skor 60,1% termasuk kategori berpengaruh tinggi, dilihat dari hubungan tingkat pendapatan terhadap partisipasi dalam bentuk sumbangan uang bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin sering memberikan sumbangan dalam bentuk finansial/uang.

Sedangkan faktor kepemimpinan pemerintah dengan skor 36,6% tergolong berpengaruh rendah, artinya kepemimpinan pemerintah belum bisa mendorong tingkat partisipasi masyarakat Desa Wisata Okura. Selanjutnya faktor kemauan/kesadaran pribadi merupakan faktor yang paling tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dengan nilai skor 36,1%. Jadi, faktor kemauan/kesadaran pribadi tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat atau dengan kata lain kesadaran masyarakat masih rendah.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Wisata Okura masih tergolong rendah dengan skor rata-rata sebesar 39,0%. Sedangkan tingkatan partisipasi yang paling tinggi adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keterampilan, berada dalam kategori sedang dengan skor yang dicapai 51,7%. Lalu disusul bentuk partisipasi masyarakat secara fisik (tenaga) yang mana skor yang dicapai 42,7% termasuk kategori sedang.

Sedangkat tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan barang (materi) berada dalam kategori rendah dengan skor yang dicapai 35,0%. Lalu partisipasi ide/pikiran jumlah skor yang dicapai yaitu 33,6% tergolong tergolong rendah. Dan tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk finansial/ uang (merupakan tingkat terendah dengan kategori rendah dengan skor yang dicapai 32,2%.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi masyarakat Desa Wisata Okura adalah tingkat pendidikan dengan nilai skor 74,3%, yang kemudian diikuti oleh faktor usia dengan nilai skor 63,7% , dan faktor pendapatan dengan nilai skor 60,1%. Faktor yang paling rendah pengaruhnya adalah dari aspek kesadaran/kemauan pribadi dengan nilai skor 36,1%.

Hasil penenlitian ini cukup menarik, karena dua faktor yang semestinya bisa menjadi pendorong utama pengembangan pariwisata, yaitu faktor kesadaran dan faktor kepemimpinan daerah justeru berada dalam kategori rendah dengan nilai skor masing-masing 36,1% dan 36,6%.

DAFTAR PUSTAKA

Gatot, Tanto dan Singgih, Mohamad Nur. (2013) *Model Pengembangan Desa Wisata secara Mandiri, Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan*. Universitas Merdeka, Malang.

Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung : Humaniora.

Mudatsir, Ahmad, (2010).*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata Mattampa di Kecamatan Bungkoro Kabupaten Pangkep, Skripsi tidak diterbitkan*, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UIN alauddin Makassar.

Nugroho, Firman dan Amrifo,Viktor. 2009. Edisi Revisi Buku Ajar Statistika Dasar. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau.

Nurdiyanto, Sigit (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pengembangan Desa Wisata*. Program Studi Ilmu Kesehatan Sosial, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Priyatno, Duwi. 2012. Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS. Yogyakarta : ANDI OFFSET

Ripai, Andi, (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar*. Skripsi tidak diterbitkan Program Studi Ilmu Pemerintahan Daerah, Universitas Hassanudin, Makassar.

Riduwan dan Akdon. 2007. Rumus dan Data dalam Analisis Statistika untuk Penelitian (Administrasi Pendidikan-Bisnis-Pemerintahan-Sosial-Kebijakan-Ekonomi-Hukum-Manajemen-Kesehatan). Alfabeta. Bandung.

UU No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan

Revitalisasi Desa Tua Sillanan - Tana Toraja Menjadi Kawasan Wisata Berkelanjutan Berbasis Budaya Lokal

Arifuddin Akil[1], Ananto Yudono[1]

[1] Departemen PWK, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar
E-mail arifuddinak@yahoo.co.id; yudono69@gmail.com

ABSTRAK

Sillanan merupakan salah satu desa adat tua Tanah Toraja yang tergolong unik dan legendaris, namun kurang dikenal akibat aksesibilitas yang minim. Keunikan Sillanan di era modern ini ditunjukkan oleh masih lestarinya warisan budaya lokal seperti tatanan adat alu' todolo yang terimplementasi pada kehidupan sehari-hari, kelestarian lingkungan alami, rumah adat tongkonan, makam adat di leang karst, dan keharmonisan hidup antara masyarakat dengan flora dan faunanya. Namun demikian kondisi desa adat mulai menunjukkan gejala degradasi seperti pergeseran pemahaman budaya asli dan kearifan lokal masyarakat, rendahnya dukungan infrastruktur dan fasilitas sosial ekonomi yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemajuan ipteks perlu menjadi pendorong pengembangan perdesaan terutama terjadinya keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan SDA dan SDB yang ada, agar dapat tercipta potensi usaha yang produktif dan berkelanjutan. Studi ini bertujuan untuk merevitalisasi desa adat Sillanan menjadi kawasan wisata yang dapat meningkatkan identitas budaya lokal serta kualitas kawasan permukiman dan kesejahteraan masyarakat. Metode kajian dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara untuk mengetahui potensi, permasalahan, dan harapan masyarakat, yang selanjutnya dianalisis untuk menentukan konsep pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Hasil studi berupa revitalisasi desa adat Sillanan menjadi desa yang mandiri dan berkelanjutan melalui penataan kawasan termasuk infrastruktur dan fasilitas lingkungan, pelestarian warisan budaya, SDA, dan nilai-nilai kearifan lokal, menjadi kawasan wisata dan museum hidup tempat pemahaman nilai-nilai lokal.

Kata-kata kunci: Revitalisasi, desa adat Sillanan, wisata budaya

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Tanah Toraja merupakan salah satu kawasan strategis Provinsi Sulawesi Selatan dengan fungsi kawasan wisata. Berbagai keragaman potensi wisata yang dimiliki terutama berupa potensi wisata berbasis sumberdaya alam dan potensi wisata berbasis budaya menjadikan daerah ini dikenal hingga ke macanegara. Keberhasilan Toraja dalam menarik wisatawan untuk berkunjung telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong ekspor hasil-hasil industri kerajinan serta sebagai sumber devisa daerah. Potensi wisata yang digemari wisatawan tersebut dominan mengarah wilayah asli yaitu di daerah perdesaan, termasuk yang paling terpelosok sekalipun. Gejala tersebut terlihat dari adanya kejenuhan terhadap bentuk wisata modern dan ingin kembali merasakan kehidupan di alam pedesaan serta berinteraksi dengan masyarakat dan aktifitas sosial budayanya menyebabkan berkembangnya pariwisata perdesaan atau disebut desa wisata. Hadiwijoyo mendefinisikan desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya (Hadiwijoyo, 2012).

Menurut (Damanik, 2013), jika dibandingkan dengan potensi wisata di kawasan perkotaan, maka pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi budaya dan SDA yang relatif lebih otentik, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan. Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, merupakan substansi dari pemberdayaan masyarakat (Kartasasmita, 1997). Tujuan pembangunan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujud apabila pembangunan bukan hanya ekonomik semata, tetapi pembangunan yang bersifat sosial dan budaya. Dalam hal ini pengembangan pariwisata perdesaan berkelanjutan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungan perdesaan perlu mendapat pemenuhan tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal tersebut telah tercakup dalam kaidah perencanaan berkelanjutan. Namun demikian setiap pembangunan periwisata perdesaan juga perlu mengacu kepada kearifan lokal yang dimiliki untuk menghindari perilaku membangun yang cenderung kurang terarah dan kurang mempertimbangkan kondisi keamanan lingkungan.

Salah satu desa di Tanah Toraja yang menjadi desa tertua yang mengembangkan potensi budaya dan wisata SDA-nya adalah Desa Sillanan. Daya tarik yang dimiliki adalah pola tatanan ruang desa berbasis Tongkonan yang masih lestari sebagai imlikasi dari adat leluhur Alu'todolo, arsitektur tradisional rumah penduduk yang sangat unik, hutan campuran yang masih terjaga pertumbuhannya, dan adat istiadat masyarakat lokal yang tetap dipertahankan. Pengembangan desa tua Sillanan tidak terlepas dari peran aktif masyarakat lokal. Oleh sebab itu diperlukan adanya situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki pola berpikir yang sadar wisata (Andriyani, 2017). Penerapan sikap sadar wisata diharapkan akan mengembangkan pemahaman dan pengertian yang proporsional di antara berbagai pihak, sehingga pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pariwisata (Nursaid, 2016). Semangat kebersamaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi spirit kehidupan di desa Tua Sillanan. Menurut Kartasasmita pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasasmita, 1997). Namun demikian terdapat permasalahan penting terkait keberlanjutan kegiatan masyarakat yang kurang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat memang hidup rukun tetapi pendapatannya masih relatif rendah. Hal ini terlihat dengan wujud lingkungan permukiman yang belum tertata, kurang bersih, serta tidak dilengkapi dengan fasilitas sosial budaya yang memadai seperti sekolah, pusat kesehatan, pusat pelatihan kerja, dan lainnya. Diperkirakan faktor tersebut menjadi salah satu akar penyebab melemahnya kunjungan wisatawan ke Sillanan akhir-akhir ini, Kondisi inilah yang menjadi motivasi utama untuk merevitalisasi kawasan maupun kelembagaan adat. Diharapkan kepariwisataan yang berkembang melalui desa wisata Sillanan tidak saja akan memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat setempat namun lebih luas akan memperkuat ketahanan sosial budaya bangsa dan negara. Karena itu revitalisasi kawasan desa adat Sillanan dianggap penting dalam membantu mengatasi masalah dan mengarahkan rencana pembangunan kawasan dan masyarakatnya.

II. METODE

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi desa wisata Sillanan Tanah Toraja dalam upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis keunikan budaya lokal dan sumberdaya alam yang sekaligus memberi arahan terhadap pemberdayaan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dibahas dalam kerangka deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap masyarakat dan pengelola desa wisata, aktivitas masyarakat sehari-hari di lingkungan Desa adat Sillanan, kondisi fisik desa wisata, serta sarana dan prasarana desa wisata. Bentuk wawancara yang dilakukan berupa semi terstruktur yang bersifat terbuka dimana subyek tahu tentang maksud dan tujuan wawancara. Partisipan dalam pengumpulan data dipilih dari orang yang dianggap tahu tentang masyarakat dan kondisi fisik desa wisata Sillanan yaitu meliputi unsur Kepala Desa, pegawai pariwisata, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda setempat. Teknik analisis menggunakan: 1) pendekatan budaya dan arsitektur yaitu meliputi: mengaitkan antara budaya dan wujud bagunan (Egenter, 1992), 2) analisis permasalahan, dan penyelesaian masalah yang dikatkan dengan program pengembangan kawasan desa berkelanjutan (P2KDB) sebagai program pemerintah. Metode analisis dilakukan sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Fisik dan Sosial Budaya Desa Sillanan

Desa Sillanan adalah nama sebuah perkampungan tradisional masyarakat Toraja terletak di Kecamatan Gandangbatu Sillanan yang memiliki luas wilayah 108,63 Km² dengan Koordinat Geografis berada pada Mebali 03°13'58" LS dan 119°49'42" BT. Terletak 35 kilometer ke arah selatan Rantepao. Batas geografis sebelah Utara Kecamatan Makale Selatan, sebelah Selatan Kabupaten Enrekang, sebelah Timur Kecamatan Mengkendek, dan sebelah Barat Kecamatan Rano dan Kecamatan Makale Selatan. Secara administratif Kecamtan Gandangbatu Sillanan terdiri dari 3 kelurahan dan 9 Lembang (desa). Dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Tanah Toraja, Sillanan Kecamatan Gandangbatu Sillanan berperan sebagai pusat pelayanan lingkungan sekitarnya. Akses menuju Desa Sillanan dapat melalui jaringan jalan kolektor perimer meliputi Jalan lingkar wisata poros lingkar ruas jalan Mebali – Sillanan – Benteng Deata hingga Tondon Mamulu, Jaringan jalan kolektor sekunder penghubung jalan lingkar Wisata ke desa adat Sillanan. Di samping itu juga dapat dilayani melalui transportasi udara yaitu Bandar Udara Pongtiku di Rantetayo dan akan dikembangkan lagi di Kunyi Kec. Mengkendek. Mata pencaharian penduduk dominan sebagai petani kopi yang dikembangkan di sela-sela struktur tanah yang berbatu-batu.



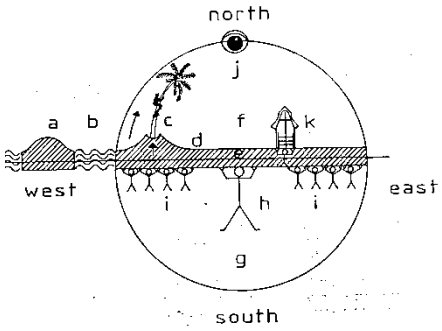
Gambar 1. Akses jalan menuju Sillanan yang sempit serta pra-sarana air bersih dan saluran drainase yang kurang efektif.



Gambar 2. Bentuk tipologi rumah masyarakat Sillanan saat ini yang terbuat dari konstruksi kayu. Bentuk rumah ini mengadopsi bentuk rumah To Ugi (Orang Bugis) yang praktis dan mudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh adat Sillanan: Rupang Karurukan, 65 th (Ketua Lembaga Adat), Matius Panggau (kepala lembang), dan Abe Assa (kepala dusun) mengungkapkan bahwa masyarakat Sillanan memiliki perdedaan mencolok dengan desa adat lainnya di Toraja yaitu dalam hal kebersamaan dan kerukunan yang demokratis tanpa membedakan masyarakat menurut kasta. Perbudakan dihapuskan pada tahun 1909 oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari adat tersebut terungkap dalam berbagai upacara seperti *Rambu Tuka* berarti suka cita atau dalam hal ini perkawinan, upacara memasuki rumah baru. Menurut adat Toraja yang paling penting adalah upacara Rambu Solo yaitu upacara pemakaman. Aluk Todolo (Aturan dari leluhur) dianut oleh masyarakat Toraja. Setelah Puang Matua menurunkan Aluk kepada Datu La Ukku sebagai manusia pertama, kemudian memberikan kekuasaan kepada para Deata atau Dewa untuk menjaga dan me-melihara manusia. Oleh karena itu Deata disebut pula sebagai Pemelihara yang menurut Aluk Todolo tidak tunggal tetapi di golongan menjadi tiga yaitu: Deata Langi' (Sang Pemelihara Langit menguasai seluruh isi langit dan cakrawala), Deata Kapadanganna (Sang Pemelihara Bumi, menguasai semua yang ada di muka bumi) dan Deata Tangngana Padang (Sang Pemelihara di bawah permukaan Tanah/bumi). Masing-masing golongan terdiri dari beberapa Deata yang menguasai gunung, sungai, hutan dan lain-lain.

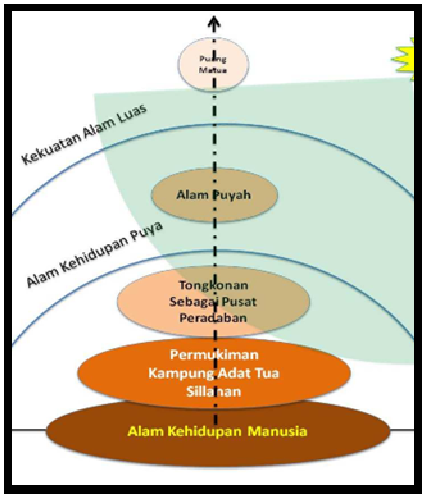
Selain kepada Deata dengan kekuasaan masing-masing Puang Mattua atau Sang Penguasa juga memberikan kepercayaan kepada To Membali Puang yang juga diwajibkan dipuja dan disembah karena merekalah yang memberi berkah kepada para keturunannya. Pemujaan kepada ketiga unsur yang masing-masing berupa kelompok Deata tersebut, oleh masyarakat penganut Aluk Todolo diungkapkan dalam bentuk upacara-upacara ritual dengan berbagai sajian, persembahan atau korban. Persembahan ini bermacam-macam bentuk, tempat dan arahnya disesuaikan dengan ketiga unsur tersebut di atas. Adanya kepercayaan terhadap para Dewa tersebut terkait dengan pandangan masyarakat Toraja terhadap makrokosmos. Jowa Imre Kis-Jovak peneliti dari Belanda, membuat intepretasi kosmologi dari Aluk Todolo seperti pada gambar berikut:



Legenda:
a. Pangko'. b. Tasik (laut). c. Gunung Bamba Puang. d. Puya (Tanah dari semua yang berjiwa). e. Padang/lino Dunia Tengah. f. Langi. g. Dunia Bawah. h. Pong Tulak Padang. i.Roh di dalam bumi. j. Puang Matua di Zenith atau Ulunna Langi. k. Tongkonan.

Gambar 3. Kosmologi Masyarakat Toraja (Kis-Jovak)

Selanjutnya, kosmologi masyarakat Toraja juga diungkapkan oleh Indrianto, dkk, bahwa secara keseluruhan, antara kehidupan manusia, kehidupan alam Puya dan pengaruh kekuatan alam yang lebih luas dalam kehidupan manusia, merupakan satu kesatuan kehidupan secara utuh. Indrianto menggambarkan bahwa alam puya merupakan alam suci yang menghubungkan antara alam kehidupan manusia dan Pong Matua (Indratno, 2014). Kalau pandangan alam Puya pada peneliti Kis-Jovak di atas menunjukkan bahwa alam Puya di samping secara horisontal juga terdapat pada dimensi vertikal yaitu terletak di bawah tanah, pandangan Indrianto mengemukakan bahwa alam Puya hanya terletak secara horizontal.



Gambar 4. Kosmologi Masyarakat Toraja (Indrianto, dkk, 2014)

B. Kawasan Wisata Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya di Kabupaten Tana Toraja sangat diperlukan untuk peninggalan sejarah dan warisan budaya. Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah Tongkonan. Pola wilayah tata ruang Tana Toraja diarahkan menggunakan tatanan khas berbasis kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat berupa sistem Tongkonan. Salah satu dari tujuh elemen teraga sistem Tongkonan yakni *Banua Merambu* yang terdiri dari komponen rumah, alang (lumbung) dan halaman komunal adalah merupakan inti dari pembentukan pola permukiman yang ada di wilayah Tana Toraja (Luther, 1997). Unit Tongkonan yang ada di Tana Toraja sebagai pengikat dari pembentukan suatu kawasan permukiman (Lullulangi, 2007), (Luther, 1997). Di tempat ini terdapat bangunan-bangunan megalit berupa menhir maupun kuburan batu yang berkaitan dengan tradisi dan upacara-upacara adat masyarakat Toraja yang hingga kini masih diselenggarakan. Dari upacara-upacara adat itu, wisatawan akan mendapatkan gambaran mengenai fungsi dan peranan peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut terhadap kehidupan masyarakat.



Gambar 5. Sistem dan bentuk Tongkonan yang ada di Desa Tua Sillanan

Berbagai peninggalan budaya tetap terjaga kelestariannya melalui upaya revitalisasi objek-objek peninggalan serta melestarikan budaya lokal *Alu' Todolo.* Beberapa kawasan wisata sosial budaya yang dimaksud terdiri atas: kuburan Adat Lemo, sistem kehidupan tongkonan Kaero, sistem kehidupan tongkonan Desa Adat Sillanan, sistem kehidupan tongkonan dan kuburan Pattan, serta tongkonan Desa Sillanan juga menawarkan pemandangan alam yang indah dan agrowisata kopi dan

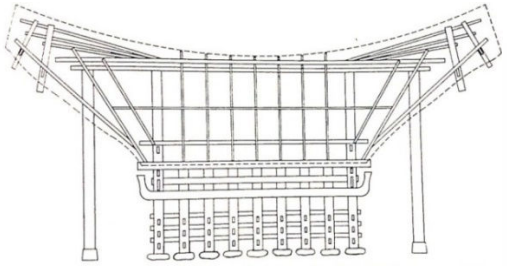
sayur mayur. Sillanan dapat dicapai dengan menggunakan angkutan umum Makale – Mebali. beratap batu Tumakke di Rembon yang usianya sudah melebihi 600 tahun.

C. Tongkonan Desa Tua Sillanan

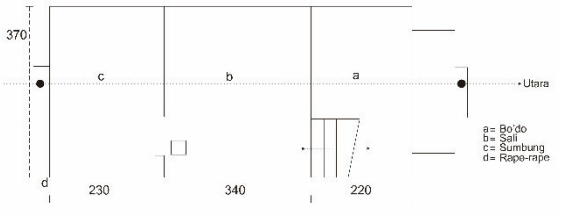
Kampung adat tua Sillanan merupakan salah satu dari dua belas heritage Toraja yang diusulkan menjadi warisan budaya dunia. Konsepsi *tongkonan* sebagai persekutuan rumpun keluarga yang bertitik tolak dari satu nenek moyang dan terwujud dalam bangunan rumah adat. Tongkonan bukanlah sekedar arsitektur fisik melainkan sebuah ruang kebudayaan yang dirangkai oleh dinamika kehidupan masyarakat Toraja. Aktifitas tongkonan tidak terbatas pada aktivitas fisik melainkan sampai pada aktivitas sosial budaya, upacara adat, membina kekerabatan, serta aspek ekonomi dan politik (Indratno, 2014), (Constantinus, 2003). Tongkonan dapat ditafsirkan sebagai ikatan afektif antara manusia dan lingkungannya. Dalam perspektif ini, tongkonan akan berkaitan dengan mental individu, emosional, hubungan antar individu atau kelompok, dan nilai yang disandang oleh masyarakat Toraja. Tongkonan tidak hanya dilihat sebagai satu bangunan tersendiri melainkan kelompok rumah adat berikut dengan sumberdaya pendukungnya. Dalam konteks ini tongkonan juga dapat dipandang sebagai tatanan permukiman, dimana tongkonan merupakan pusat dari sebuah tondok (tata permukiman tradisional Toraja). Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Atapnya melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Bagian dalam ruangan dijadikan tempat tidur dan dapur. Tongkonan digunakan juga sebagai tempat untuk menyimpan mayat.

Tongkonan berasal dari kata *tongkon* (artinya duduk bersama-sama). Disebut *tongkon* karena berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan adat. Di rumah adat inilah, keluarga berkumpul untuk berdiskusi. Bangunan adat ini dibangun dengan orientasi menghadap ke Utara (dianggap sebagai sumber kehidupan). Di depan *tongkonan* terdapat lumbung padi, yang disebut *'alang*'. Tiang-tiang lumbung padi ini dibuat dari batang pohon palem (*bangah*) (Sumber:http//torana39.wordpress.com, 2011). Orang Toraja menganggap *tongkonan* sebagai simbol 'ibu', sedangkan *alang* sebagai 'bapak'. Ruang dalan rumah terbagi tiga bagian, yaitu bagian utara, tengah dan selatan (lihat Gambar 7). Bagian utara berfungsi sebagai ruang tamu dan tempat tidur anak, bagian tengah yang disebut *'sali'* berfungsi sebagai ruang makan, pertemuan keluarga, tempat menyemayamkan orang mati, dan dapur, serta bagian selatan disebut '*sumbung*', merupakan ruang tidur untuk kepala keluarga (Lullulangi, 2007), (Constantinus, 2003).

Dalam tinjauan kosmologi, konsep tata ruang skala *tongkonan* dapat dilihat dari konsep pembagian berdasarkan alam atas-tengah-bawah. Dalam bangunan *Tongkonan* klasifikasi tersebut juga berlaku, dimana *tongkonan* harus selalu menghadap ke depan (utara) dan pembagian ruangnya berdasarkan atas-tengah-bawah. Sebagai pusat dari mikrokosmos maka semua aktivitas manusia terutama yang berkaitan dengan upacara ritual, harus berpatokan kepada *tongkonan*. Karena itu menurut Indrianto, I. et all (2014), sistem nilai keruangan perkampungan adat tua Sillanan sangat bergantung pada pemahaman orientasi ruang arah mata angin dengan tata letak *tongkonan* di Sillanan mengikuti konsep kosmologis sebagai gambaran dari klasifikasi kosmos.

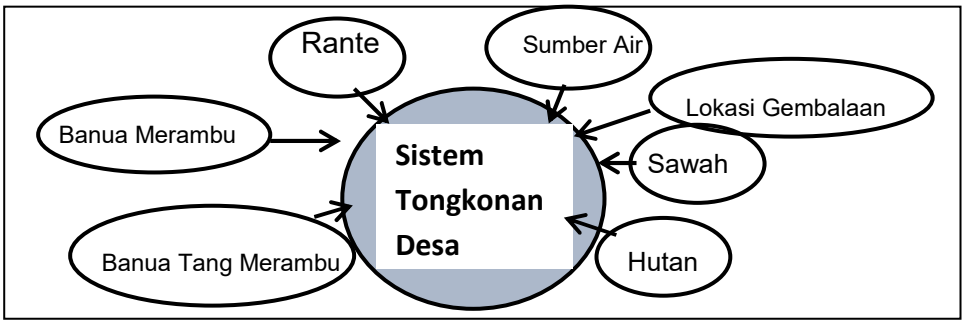


Gambar 6. Struktur dan Konstruksi Bangunan Tongkonan

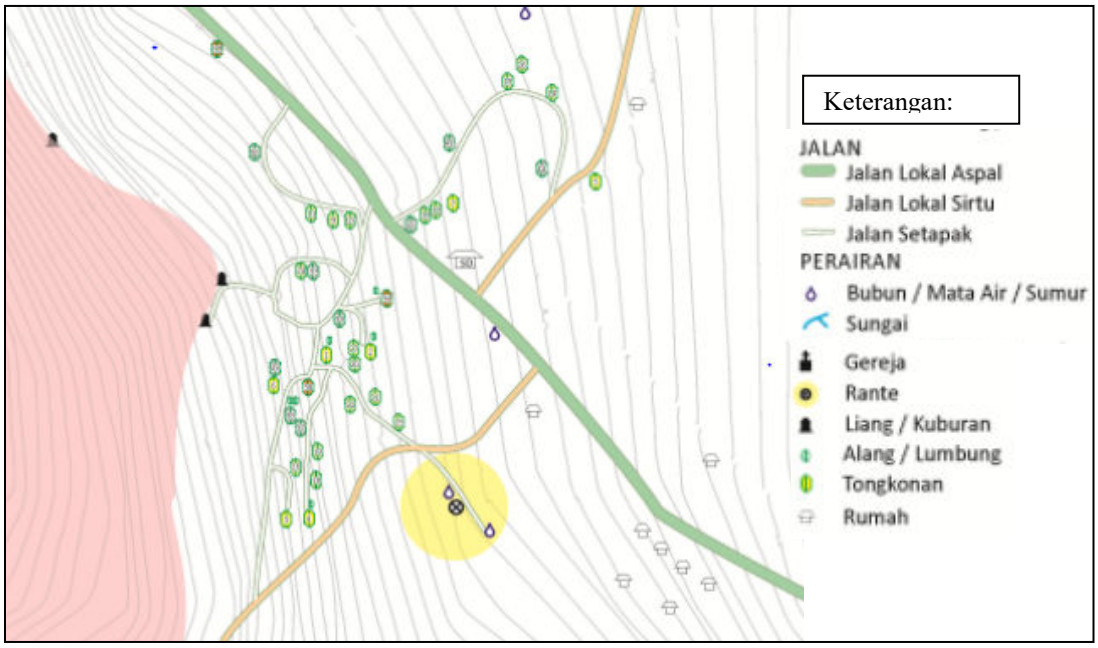


Gambar 7. Denah Rumah Tongkonan

Kondisi elemen adat tongkonan di desa tua Sillanan sat ini masih relevan dengan keberadaan 7 (tujuh) elemen tongkonan yaitu: elemen banua merambu, banua tang merambu, rante, sumber air, lokasi kandang/gembala, hutan, dan sawah. Adapun lokasi Bubun dan *Rante* Sarapuk berada di sebelah timur situs Tongkonan Layuk sebagai tempat melaksanakan upacara *Rambu Tuka'*. Lokasi Liang berada di sebelah barat situs Tongkonan Layuk, masing-masing berfungsi sebagai tempat melaksanakan upacara *Rambu Solo'* dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas penguburan. Lokasi *Rante Simbuang* tidak masuk dalam aturan klasifikasi kosmos yang berpusat di Tongkonan, karena dianggap sebagai mikrokosmos tersendiri yaitu sebagai simbol dari suatu perkampungan adat atau suatu kesatuan adat tertentu pada waktu difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara kematian, sehingga penempatannya bisa di mana saja yang penting strategis dan memungkinkan untuk menampung banyak orang. Selanjutnya, lokasi *bubun* (sumur) terletak pada arah selatan agak ke timur (tenggara) dari situs Tongkonan Layuk karena fungsinya adalah sebagai tempat pelaksanaan upacara untuk meminta perlindungan kepada Puang Matua, agar air suci yang diambil dari tempat tersebut terhindar dari gangguan roh-roh jahat; tata letak bangunan sangat ditentukan pula oleh konsep kosmos tersebut. Konsep kosmologi Aluk Todolo memahami kepercayaan terhadap alam kehidupan setelah mati (alam arwah), yaitu terdiri dari alam *Bombo* dan alam *Puya*.



Gambar 8. Skema Sistem Tongkonan yang ada di Desa Tua Sillanan



Gambar 9. Peta Eksisting Desa Tua Sillanan (Sumber: Indratno dkk, 2014)

Khusus di Sillanan-Pemanukan (*Tallu Lembangna*) yang dikenal dengan istilah *Ma'duangtondok* terdapat tongkonan yaitu *Tongkonan Karua* (delapan rumah tongkonan) dan *Tongkonan A'pa'* (empat rumah tongkonan). Banyak rumah adat yang konon dikatakan tongkonan di Sillanan, tetapi menurut masyarakat setempat, bahwa yang dikatakan tongkonan hanya yang 12 bangunan tersebut di atas. Rumah adat yang lain disebut *banua pa'rapuan*. Bangunan tongkonan di Sillanan adalah rumah adat dimana turunannya memegang peranan dalam masyarakat adat setempat. Keturunan dari tongkonan menggambarkan strata sosial masyarakat di Sillanan. Sebagai contoh *Tongkonan Pangrapa'* (pemegang kekuasaan pemerintahan).

D. Program Pengembangan Kawasan Desa Tua Sillanan

1. Analisis 7 Atribut Pengembangan Desa Lestari

Berdasarkan pada hasil pengamatan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat Sillanan, menunjukkan bahwa hingga kini masih terikat dengan sistem kesadaran kolektif terkait sosial budaya yang dipahami. Adat istiadat yang terbentuk selanjutnya membentuk aturan pranata dan kelembagaan secara turun temurun. Salah satu kegiatan ritual adat yang masih dilaksanakan dan melibatkan lembaga adat adalah upacara pelaksanaan *rambu solo'* dan *rambu tuka'* serta berbagai elemen ikutannya. Kegiatan adat tersebut sangat terkait dengan perwujudan tatanan permukiman yang dikembangkan dari tujuh elemen fisik tongkonan seperti yang dikemukakan di atas. Hal tersebut mendorong terbentuknya konservasi dan pendayagunaan sosial budaya, serta pengembangan kearifan lokal masyarakat setempat. Namun demikian upaya elestarikan budaya dan kearifan lokal relatif rendah dan sebaliknya hal tersebut cenderung punah.

Wujud fasilitas dan pranata yang telah terbentuk tersebut sangat bersinergi dengan dukungan potensi sumberdaya alamnya seperti terbentuknya permukaan topografi lahan yang berbukit, tanah yang subur dengan sumber air yang memadai, tumbuhnya berbagai vegeasi yang potensil seperti komoditi kopi yang berkualitas tumbuhan hutan kayu dan bambu serta batuan karst yang mendukung ketersediaan bahan bangunan. Iklim yang sejuk dengan pemandangan yang sangat berpotensi menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun demikian, untuk menuju ke arah tersebut, kondisi fisik kawasan sangat membutuhkan dukungan berbagai sistem infrastruktur yang relatif mahal. Disisi lain pemerintah setempat masih terbatas dalam

pengembangan jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, dan pengelolaan sumberdaya air, dan lain-lain.

Walaupun komunitas masyarakat telah memahami budaya modern yang berkembang sejak tahun 1907, namun demikian mereka tetap tunduk dengan budaya yang telah dipahami. Budaya yang mementingkan persamaan dan persaudaraan tersebut, hingga kini tetap dipertahankan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan. Hal inilah yang tetap membentuk komunitas perdesaan inklusif yang demokratis yang membedakan dengan kawasan lain di daerah Utara yang relatif khirarkis. Kehidupan yang rukun tersebut juga sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan yang relatif berkembang sifat individualis dan materialistis. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa bahwa pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Namun demikian fenomena ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas dan prasarana lingkungannya menjadi faktor serius diselesaikan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan masyarakat saat ini. Penyelesaian hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Beberapa permasalahan kawasan yang mewarnai desa adat Sillanan saat ini dengan mengacu pada 7 atribut program pengembangan kawasan desa berkelanjutan (P2KDB) sebagai berikut:

- Upaya pelestarikan budaya relatif rendah dan bahkan cenderung punah.
- Cenderung terjadi pergeseran pemahaman budaya secara umum, yang terlihat dengan bervariasinya pandangan pemahaman budaya masyarakat. Hal ini perlu ditunjang dengan berbagai strategi dalam hal pendidikan dan pelatihan.
- Kondisi fisik kawasan sangat membutuhkan dukungan berbagai sistem infrastruktur seperti jaringan jalan utama dan pedestrian, listrik, telekomunikasi, dan pengelolaan sumberdaya air.
- Kehidupan masyarakat masih belum memenuhi kebutuhan sosial budaya jika diukur dari ketersedian fasilitas berdasarkan standar *MDGs* seperti sekolah, pusat kesehatan, pusat ibadah, pusat pelatihan kerja, dan lainnya.
- Kehidupan masyarakat belum memenuhi standar kesejahteraan yang dapat diukur dari masih rendahnya pendapatan masyarakat dibandingkan masyarakat kota dan keberadaan fasilitas ekonomi. Hal ini perlu upaya pengembangan usaha masyarakat yang produktif dan berkelanjutan.
- Kawasan adat saat ini relatif kurang menarik dan kurang tertata, belum dilengkapi fasilitas lingkungan, serta sarana pariwisata sebagai ODTW.
- Kelembagaan desa adat belum terkelola secara maksimal, sehingga kegiatan adat tidak dinamis dan produktif.

2. Analisis Kebutuhan Pengembangan Desa secara Berkelanjutan

Dalam paradigma pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan dikemukakan tentang pentingnya pemenuhan tiga dimensi dalam pengembangan kawasan. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (UNIDO, 2012; (Tweed, 2007). Pemenuhan ketiga dimensi tersebut akan berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan kualitas lingkungannya. Hal tersebut telah tercakup dalam kaidah perancangan dalam mewujudkan kebutuhan hidup masyarakat. Kemajuan ipteks perlu menjadi pendorong dalam pengembangan perdesaan. Namun demikian setiap pembangunan desa juga perlu mengacu kepada kearifan lokal seperti metode seleksi lokasi, daya dukung lahan, dan peningkatan peran dan fungsi suatu kawasan. Perilaku membangun saat ini cenderung kurang terarah dan kurang tertata, terutama dengan pembangunan hunian yang sebagian tanpa mempertimbangkan kondisi keamanan lingkungan seperti erosi atau longsor. Di lain pihak terdapat beberapa lahan basah yang belum terolah secara produktif. Dalam

rangka pengelolaan hutan adat secara otonomi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan keputusan No 35/ 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat termasuk upaya mengembalikan hutan adat ke masyarakat adat. Hal tersebut searah dengan UU 6/2014 tentang Desa bahwa: peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku. Perencanaan kawasan desa adat tua Sillanan dianggap penting dalam membantu mengatasi masalah dan mengarahkan rencana pembangunan kawasan.

Berdasarkan pembahasan tentang potensi fisik lahan dan permasalahan kawasan desa tua Sillanan, maka dapat dikemukakan kebutuhan pengembangan kawasan berupa fungsi-fungsi ruang sebagai berikut: a) Menciptakan ruang hunian heritage banua merambu, yaitu kawasan perumahan kelompok Tongkonan Layu' dan tongkonan Doa; b) Menata perletakan ruang hunian masyarakat umum di sebelah utara jalur jalan poros desa dengan bentuk arsitektur rumah To Ugi; c) Membebaskan ruang hunian masyarakat di sebelah barat daya jalan poros desa untuk menciptakan view yang menarik dari arah rumah adat ke arah persawahan; d) Menata ruang hunian baru untuk mempertahankan kelestarian budaya Toraja Sillanan, sekaligus menjadi daerah objek wisata; e) Mempertahankan ruang kawasan bukit karst sebagai *liang*; f) Mengembangkan prasarana desa untuk pengembangan ruang kawasan rante dan sumber air; g) Mempertahankan ruang kawasan persawahan menjadi lahan penggembalaan kerbau pada daerah sisi-sisinya.

3. Konsep Tata Ruang Kawasan Inti Desa Wisata Budaya Sillanan

Berdasarkan analisis potensi lahan, permasalahan dan kebutuhan pengembangan kawasan, maka skenario pengembangan kawasan desa tua Sillanan sebagai berikut:

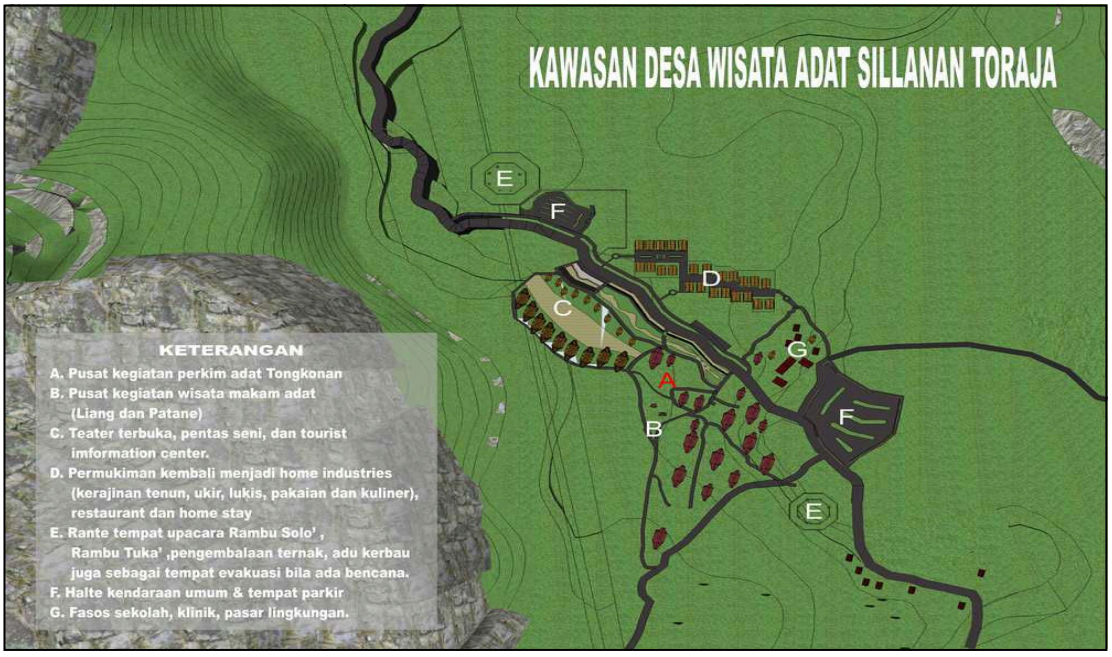
Pertama, Konsep Umum Pengembangan Kawasan Hijau. Berdasarkan kondisi eksisting dan konsep berkelanjutan di atas, dapat dikemukakan konsep berupa: kawasan hutan sekitar gunung Karst dan kawasan hutan terbatas lainnya sebagai kawasan konservasi, serta pengembangan kebun rakyat menjadi kawasan agropolitan. Berdasarkan data empiris lapangan, eksisting daerah tersebut dimanfaatkan untuk permukiman, pariwisata, dan pertanian. Agar terwujud konsistensi perencanaan, maka konsep umum pengembangan kawasan desa adat Sillanan adalah pengembangan fungsi utama kawasan hijau, khususnya tanaman hutan. Pengendalian bahaya alam dalam perencanaan kawasan Sillanan lebih bersifat pengembangan area hijau yang sejalan dengan budaya lokalnya. Selain daripada itu juga dilakukan konservasi terhadap peninggalan bangunan bersejarah desa Sillanan baik banua tongkonan maupun keenam elemen penunjangnya.

Kedua, Konsep Umum Pengembangan Pariwisata. Untuk mendukung kegiatan desa berkelanjutan yang produktif akan dikembangkan ekonomi desa berupa industri kreatif, khususnya sektor pariwisata. Kegiatan wisata searah dengan potensi lahan dan iklim, terutama berupa wisata budaya, agrowisata, wisata alam, dan wisata sejarah. Wisata budaya, agrowisata dan wisata alam dapat dilakukan dengan memfasilitasi pengunjung untuk menikmati perjalanan santai dan menarik yang dilengkapi dengan prasarana penunjang dan teater terbuka. Wisata penunjang berupa kegiatan belanja dapat dilakukan dengan menyiapkan berbagai souvenir bernuangsa lokal dan kunjungan pada kegiatan home industri (ukir, tulis), kuliner, dan home stay. Sedangkan kegiatan wisata sejarah, dapat dilakukan pada beberapa tempat sebagai objek sejarah, baik pada lingkup desa maupun kawasan. Para masyarakat sekitar termasuk para petani dan anak-anak putus sekolah diikutsertakan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bekerjasama dengan Dinas Purbakala dan Dinas Pariwista Tana Toraja serta pengusaha yang tertarik dalam wisata sejarah yang dapat dipadukan dengan wisata obyek-obyek sejarah di wilayah jalur lingkar wisata Toraja.

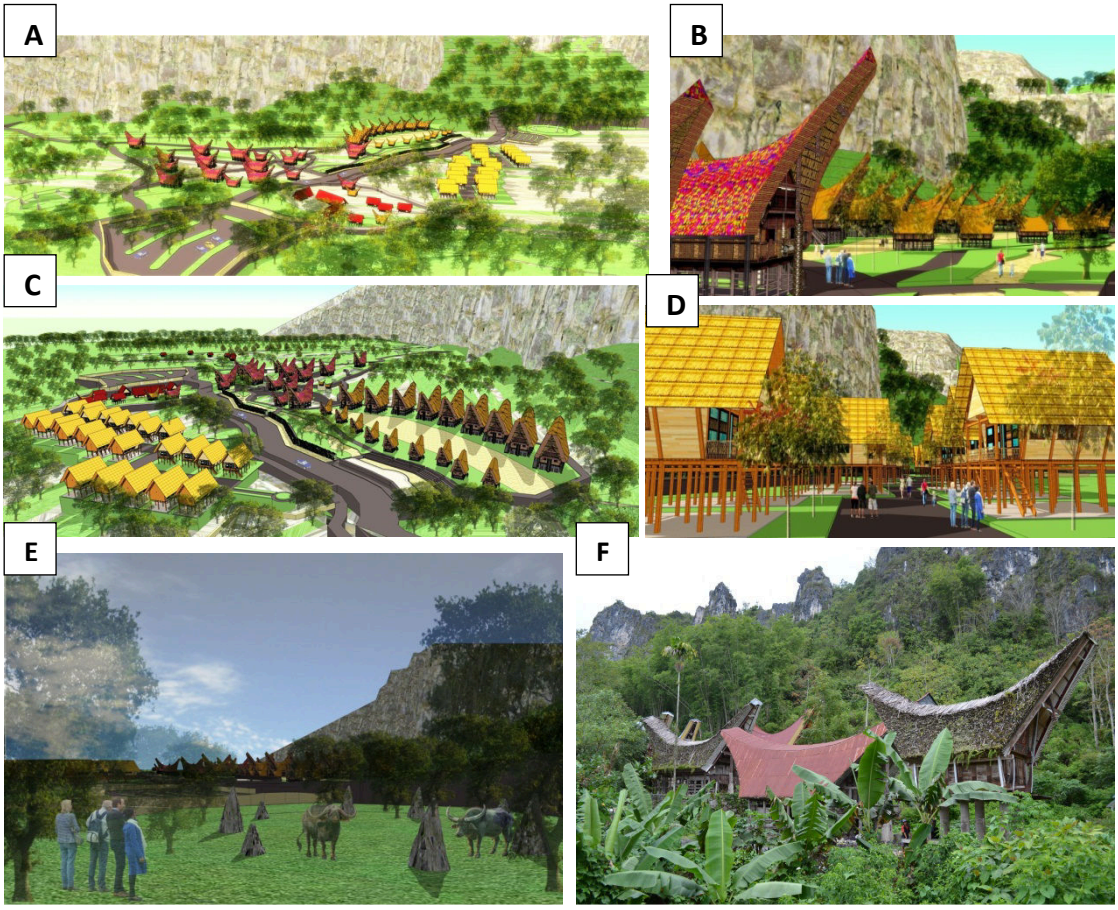
Ketiga, Konsep Umum Pengembangan Permukiman berbasis budaya. Secara umum pengembangan permukiman lebih difokuskan pada penataan atau pemindahan

permukiman yang kurang teratur di sepanjang jalur jalan poros Sillanan – Perindingan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan panorama menarik dari kawasan permukiman adat ke arah dataran rendah persawahan. Rumah-rumah yang dipindahkan tersebut pada kawasan pinggiran sawah dengan arsitektur rumah campuran Arsitektur Bugis-Toraja akan dijadikan sebagai kawasan pusat home industri. Selanjutnya lahan semak yang kurang potensial yang terletak di sebelah barat laut kawasan rumah adat, akan dikembangkan menjadi kawasan perumahan adat. Rumah adat tersebut terdiri atas jejeran rumah-rumah tongkonan yang berhadapan lumbung. Di antara bangunan tongkonan dan lumbung akan dibangun jalur pedesterian yang lebar. Adapun kawasan rumah adat dan kawasan *banua tangmerambu* tetap dikonservasi sesuai dengan kondisi alamnya. Rumah-rumah yang tidak teratur akan diatur tata letaknya.

Keempat, Konsep Umum Pengembangan Kawasan Rante dan Leang. Rante merupakan salah satu elemen pendukung tongkonan. Di Sillanan terdapat dua unit rante yaitu Rante Bubun Tondok dan Rante To' Doa. Rante pertama dilengkapi dengan sumber mata air. Karena kedua rante tersebut terletak pada daerah pintu gerbang kawasan desa inti baik dari arah barat laut maupun arah tenggara. Di sekitar rante tersebut masing-masing ditempatkan area parkir sekaligus tempat penjualan souvenir. Kawasan Liang tetap dipertahankan pada kawasan bukit Kars di zona inti dengan fungsi untuk mlindungi desa serta kawasan Patani (kuburan). Untuk jelasnya, konsep tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: 10.
Site plan pengembangan (Revitalisasi) Desa Tua Sillanan sebagai Wisata Budaya



A) & C) Perpektif perencanaan kawasan desa wisata; B) Penataan perumahan haritage bangunan Tongkonan; D) Perencanaan perumahan masyarakat umum; E) Penataan kawasan *Rante*); F) Konservasi tanaman hutan, sawah, dan makam (liang) kars.

Gambar 11. Bentuk perencanaan kawasan wisata budaya Desa Tua Sillanan, yang terdiri atas rencana site, bangunan, lingkungan, dan lansekap (alam)

IV. KESIMPULAN

1. Desa wisata adat Sillanan merupakan salah satu desa di Tanah Toraja dengan daya tarik berupa pola tata ruang desa dan arsitektur bangunan tradisional (tongkonan) yang khas. Akumulasi budaya turun temurun yang bersumber dari adat *Alu' Todolo* selanjutnya termanifestasi dalam lingkungan spasial berupa permukiman adat dan bangunannya. Perkembangan budaya, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang ada relatif bertahan dan dipertahankan keasliannya hingga saat ini.
2. Tulisan ini mengajak kepada komunitas adat desa tua Sillanan, pemerintah terkait, serta seluruh pemerhati untuk tetap menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, SDA yang mempesona, serta wujud SDB unik yang telah diwariskan, agar dapat diturunkan secara berkelanjutan, serta menjadi benteng bagi masuknya pengaruh budaya asing yang bertentangan. Keseluruhan wujud lingkungan binaan tersebut terbentuk menjadi objek menarik yang dapat dikemas menjadi wisata budaya. Hal tersebut perlu diiringi dengan peran masyarakat dan pemerintah setempat dalam mengelola objek wisata melalui program peningkatan kualitas SDM seperti, pelatihan, pembinaan teknis, dan perbaikan fasilitas pendidikan. Perkembangan wisata budaya tersebut akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Revitalisasi wisata berbasis keunikan budaya dan SDA dilakukan melalui 4 konsep: 1) pengembangan hutan sekitar gunung Karst dan hutan terbatas sebagai kawasan konservasi, serta pengembangan kebun rakyat menjadi kawasan agropolitan, 2)

pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mendukung kegiatan desa yang produktif seperti industri kreatif, 3) pengembangan permukiman difokuskan pada penataan permukiman yang kurang teratur di sepanjang jalur jalan poros Sillanan – Perindingan, lahan kurang potensial di sebelah barat laut dikembangkan menjadi kawasan perumahan adat, sedang kawasan rumah adat dan kawasan *banua tangmerambu* tetap dikonservasi, 4) kawasan rante, sumber air dan liang tetap dipertahankan dalam kawasan inti dengan fungsi masing-masing sebagai pusat kegiatan budaya dan tempat makam.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, A. A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah
(Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional, 23*(1), 1-16.

Constantinus, A. D. (2003). Tongkonan : Arsitektur Rumah Adat Toraja (Tipologi dan Tata Bangunan). *Program Studi Teknik Arsitektur UGM, Yogyakarta.*

Damanik, J. (2013). Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan. *Book, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

Egenter, N. (1992). Architectural Anthropology, *Research Series, 1. Structura Mundi, Lausanne, Switzerland.*

Hadiwijoyo, S. S. (2012). Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat. *Book. Yogyakarta: Book Graha Ilmu*.

Indratno, I. e. a. (2014). Refleksi Ruang Tongkonan (Studi Kasus: Kampung Adat Tua Sillanan, Tana Toraja). *Paper Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.

Kartasasmita. (1997). Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat. *Book. Jakarta: Bappenas, Jakarta.*

Lullulangi, M. d. S., O. (2007). Arsitektur Tradisional Toraja. *Paper,Universitas Negeri Makasar,.Sulawesi Selatan.*

Luther, B. (1997). Perkembangan Sistem Spasial Rumah Adat (Tongkonan) di Toraja (Suatu Tinjauan Sistem Keruangan Terhadap Fungsi, Bentuk dan Susunan). *Paper,Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.

Nursaid, A. (2016). Peran Kelompok Batik Tulis Giriloyo Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY. *Jurnal Ketahanan Nasional, 22*(2), 217-236.

Tweed, C. and S., M. (2007). Built Cultural Heritage and Sustainable Urban Development, Journal Landscape and Urban Planning. *Journal Landscape and Urban Planning, 83*, 62-69.

Penyusunan Rencana Penataan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat di Nglinggo, Kabupaten Kulonprogo

Dyah Widiyastuti[1],T. Yoyok Wahyu Subroto[2], dan Henry Brahmantya[3]

[1] *Fakultas Geografi,UGM, Yogyakarta*
[2] *Fakultas Teknik,UGM, Yogyakarta*
[3] *Pusat Studi Pariwisata, UGM, Yogyakarta*

Email:dwidiyastuti@ugm.ac.id; yoyok_ws@ugm.ac.id;henrypuspar@ugm.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan kegiatan pariwisata seharusnya bertumpu pada keunikan, kekhasan dan otentinsitas daya tarik itu sendiri. Pengembangan kegiatan pariwisata di suatu obyek sebaiknya dikelola dengan mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan (Middleton, 1997). Peluang sektor pariwisata di Kabupaten Kulonprogo di masa depan akan semakin besar pasca pembangunan Pelabuhan Adikarto, pabrik baja dan bandara internasional. Maka upaya pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Peluang ini mulai ditangkap oleh Desa Wisata Nglinggo yang geliat pariwisatanya dimulai sejak tahun 2013 dan sudah memberikan kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Desa Wisata Nglinggo sudah dikenal luas oleh masyarakat karena menawarkan keindahan panorama perbukitan Menoreh serta kesejukan hamparan kebun teh. Permasalahan umum dalam pengelolaan desa wisata ini adalah belum dimilikinya rencana pengembangan kawasan daya tarik wisata agar pengembangan wisata ke depannya lebih mampu memberikan pelayanan berkualitas bagi masyarakat.

Penyusunan rencana penataan obyek wisata berbasis masyarakat di Nglinggo Kabupaten Kulonprogo dilaksanakan melalui skema program IPTEKS bagi masyarakat dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat. Hal ini mengingat keberhasilan jangka panjang pengembangan pariwisata di suatu daerah, seperti di Desa Wisata Nglingggo, sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas. Semangat masyarakat desa wisata Nglinggo adalah modal dasar keberhasilan kegiatan ini. Hasil kegiatan penyusunan rencana penataan kawasan ini selain berupa dokumen masterplan perencanaan dan pengembangan pariwisata kawasan kebun teh Nglinggo yang mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai pemilik kawasan.

Katakunci:desa wisata, masterplan, perencanaan, berbasis masyarakat

I. PENDAHULUAN

Pengembangan kegiatan pariwisata bertumpu pada keunikan, kekhasan dan otentisitas daya tarik itu sendiri. Agar dihasilkan kelangsungan kegiatan pariwisata disebuah objek sebaiknya pengembangannya dikelola dengan mengacu prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara umum geliat pariwisata yang berlangsung di desa Nglinggo yang berjalan sejak tahun 2013 sampai sekarang sudah banyak memberikan sumbangan bagi warga masyarakat dan ekonomi desa.

Melihat respon pasar dan semangat masyarakat Desa Wisata Nglinggo dalam pengembangan usaha wisatanya, maka pihak pengelola patut untuk segera memiliki panduan (*guide line*) agar ke depannya penataan dan pembangunan fasilitas wisata lebih tertata dan mampu mewujudkan destinasi wisata desa Nglinggo lebih berdaya saing. Selain itu antusias wisatawan yang menginap di *homestay* juga menjadi salah satu pemikiran untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas *homestay*.

II. METODE

Dalam menjalankan kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dijalankan dengan metode partisipasi (*participatory method*). Tim pengabdian masyarakat secara bersama melibatkan masyarakat dan pengelola pariwisata desa Nglinggo untuk terlibat sejak awal dalam menyusun perencanaan kawasan ini. Tindakan ini diambil agar hasil perencanaan yang dihasilkan bersifat *bottom up* dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai subjek dalam mengikuti dan menjalankan proses perencanaan ini (Damanik, dkk, 2015)

Adapun metode yang dijalankan guna mendukung program pengabdian pada masyarakat ini adalah:

- obervasi lapangan untuk mendapatkan gambaran atas fenomena (*eksisting*) yang berlangsung di objek wisata kebun teh.
- wawancara mendalam kepada informan, yaitu tokoh kunci dibidang pariwisata setempat ataupun tokoh masyarakat, baik formal dan informal. Wawancara mendalam ditujukan kepada informan terpilih yang dipandang mampu memberikan informasi komprehensif seputar kondisi eksisting dan perencanaan ke depan atas objek wisata di desa Nglinggo.
- FGD (rembug warga warga) dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dalam rangka penajaman program yang dihasilkan, dengan melibatkan segenap pihak terkait serta masyarakat sebagai pemain sentral untuk kegiatan pariwisata di desa Nglinggo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kulon Progo memiliki berbagai potensi wisata yang dapat dikembangkan baik itu wisata budaya seperti kesenian tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini, wisata alam seperti wisata pantai, pegunungan dan gua-gua maupun wisata minat khusus seperti desa wisata. Pengembangan desa wisata sedang menjadi program utama di Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar desa wisata. Desa wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo antralain Nglinggo, Banjarasri, Pendoworejo, Banjaroya, Kalibiru, Jatimulyo, Sidoharjo, Purwoharjo dan Sermo. Desa Wisata Nglinggo initerletak pada pegunungan menoreh yang secara atministratif merupakan wilayah dari dua dusun, yaitu Nglinggo Barat danNglinggo Timur, di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY.

A. Gambaran Desa Wisata Nglinggo

a. Sejarah Dusun Nglinggo

Menurut cerita yang turun temurun, keberadaan dusun Nglinggo tidak terlepas dariperistiwa sejarah Pangeran Diponegoro. Diceritakan bahwa pada jaman itu ada tiga orang pengikut setia Pangeran Diponegoro, yang bernama Ki Linggomanik, Ki Dalem Tanu, dan Gagak Roban mendapatkan wilayah menoreh, yang sekarang meliputi Kulon Progo, Magelang dan Purworejo, sebagai wilayah kosentrasi bergerilyanya melawan Kompeni Belanda. Sebagai pusat perjuangan dipilihlah lokasi yang berada di puncak pegunungan menoreh. Sebuah tempat yang strategis untuk menyusun strategi kan mengamati pergerakan kompeni Belanda. Tempat ini kemudian dinamakan Nglinggo, diambil dari nama pemimpinnya yaitu Ki Linggo Manik. Sebagai bukti sejarah, saat ini kita bisa menjumpai adanya tiga petilasan yang banyak ditumbuhi pepohonan besar berumur ratusan tahun. Tempat ini sekarang masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat dan menjadi obyek wisata spiritual.

b. *Daya Tarik Wisata Dusun Nglinggo*

Desa Wisata Nglinggo berada pada ketinggian 900-1000 mdpl sehingga sehari-hari desa ini berhawa sejuk disiang hari dan dingin dimalam hari. Jika kabut mulai

menyelimuti desa ini pada pagi hari dan menjelang sore, seolah-olah kita berada di “Negeri Atas Awan”. Berbekal panorama yang elok serta adat-istiadat dan budaya yang menarik maka pada tahun 2004 desa ini ditetapkan sebagai Desa Wisata Nglinggo dan pada tahun 2009 mendapat gelar sebagai desa wisata terunik.

Tabel 1. Aktivitas di Desa Wisata Nglinggo

Daya Tarik	Aktivitas yang dapat Dilakukan
Air terjun Watu Jonggol	Tracking ke air terjun Watu Jonggol dan menikmati pesona alam bukit Menoreh)
Bukit Menoreh	Tracking di Bukit Menoreh diantara perkebunan kopi dan teh
Agro perkebunan kopi & teh	Tracking ke perkebunan teh dan kopi sambil menikmati pesona alam bukit Menoreh dan hawa sejuk perbukitan
Kesenian tradisional	Pertunjukan kesenian tradisional tarian Lengger Tapeng & Jathilan oleh masyarakat
Kuliner tradisional	Membuat dan menikmati kuliner nasi jagung & gula aren Menyeduh sendiri dan menikmati sajian kopi dan teh asli Nglinggo

Sumber: Data lapangan, 2017



Sumber: Data Lapangan, 2017

Gambar 1. Potensi Air Terjun Watu Jonggol dan Objek Wisata Kebun Teh Nglinggo



Sumber: Data lapangan, 2017

Gambar 2. Salah satu homestay di Desa Wisata Nglinggo

Dilihat dari potensi wisata yang ada, Dusun Nglinggo menawarkan tiga atraksi utama, yang terdiri dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata home industry (industri

rumahan). Atraksi alam perbukitan, perkebunan dan air terjun dan dapat dinikmati dengan kegiatan tracking sambal menikmati panorama bukit Menoreh dan kesejukan udara perbukitan. Potensi wisata home industri menawarkan kegiatan pembuatan gula aren, pengolahan kopi dan teh dimana pengunjung bisa belajar membuat sekaligus menikmati produksi asli dari Dusun Nglinggo.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Penataan Kawasan Wisata

Program pengabdian masyarakat ini disusun berbasis atas kebutuhan mitra agar dihasilkan rumusan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Secara spesifik untuk program pengabdian masyarakat desa Nglinggo yang diusulkan tahun 2017 ini hanya membatasi pada aspek teknis berupa penyusunan rencana penataan objek wisata Kebun Teh dan peningkatan kualitas *homestay*.

a. Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Wisata

Permasalahan umum yang ditemukan dan sesuai dengan kebutuhan pengelola pariwisata setempat adalah belum dimilikinya dokumen berupa *master plan* perencanaan dan pengembangan pariwisata Kawasan Kebun Teh. Keindahan kawasan perbukitan dengan perkebunan teh dan kopi tersebut menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Di beberapa titik, masyarakat secara mandiri sudah mulai membangun beberapa fasilitas untuk pengunjung, misalnya gapura penanda kawasan wisata, warung kopi/teh, warung makanan, parkir dan *homestay*.

Dokumen rencana yang disusun di dalamnya berisikan aspek-aspek perencanaan dan pengembangan yang dibutuhkan baik untuk lokasi atau objek wisata dan aspek pendukung lainnya, seperti pengembangan amenitas (*homestay*, tempat parkir, warung makan, mushola, panggung hiburan, dan lainnya) serta aksesibilitas penunjang di objek wisata. Dalam proses pembuatan rencana pengembangan tersebut melibatkan masyarakat, pengelola desa wisata dan pengelola *homestay*. Peran serta masyarakat cukup aktif dalam diskusi dan kegiatan lapangan, karena merekalah yang paling memahami kondisi dan potensi desa mereka. Meskipun begitu. Pendampingan dari akademisi dan pemerintah tetap sangat dibutuhkan terkait pemahaman masyarakat Nglinggo tentang aspek pariwisata yang masih minim. Penyediaan fasilitas wisata secara mandiri oleh masyarakat perlu diapresiasi dan diantisipasi sehingga tidak terjadi persaingan tidak sehat diantara pelaku wisata maupun pengembangangan yang akhirnya mengurangi daya tarik wisata di kawasan ini.

b. Pelatihan Pengelolaan Homestay

Di desa wisata Nglinggo sudah terdapat *homestay* yang dikelola secara individu, dengan pengelolaan yang belum professional. Terdapat kendala pengembangan SDM, terkait dengan kepemanduan, pelayanan prima dan ketrampilan *soft skills* lainnya yang dibutuhkan sebagai pelaku pariwisata. Melalui kegiatan pengabdian ini, disusun modul pengelolaan *homestay* yang dibarengi dengan pelatihan kepada mereka. Peran serta masyarakat sangat baik dengan mengikuti pelatihan secara serius. Diperlukan pelatihan-pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola *homestay* maupun desa wisata.

IV. KESIMPULAN

Pentingnya peran masyarakat dalam menentukan bahwa keberhasilan jangka panjang industri pariwisata, termasuk di desa Nglinggo sangat tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan dari komunitas.

Pada akhirnya, metode partisipasi ini diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan juga mendapatkan legitimasi dari masyarakat sebagai pemiliki kawasan. Pengembangan destinasi desa Nglinggo ke depan diharapkan tetap memegang prinsip *community based tourism*, sehingga proses pengorganisasian dan pengendalian sangat ditentukan peran serta masyarakat.

Dari masing-masing tahapan yang hendak dijalankan di atas, guna menghasilkan kemanfaatan optimal, sejak awal proses berlangsung selalu menjadikan masyarakat dan pengelola pariwisata sebagai mitra. Komunikasi dan kerjasama yang baik dengan mitra diharapkan mampu menjadikan dokumen hasil dari kerja bersama masyarakat ini dipastikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan pengembangan pariwisata desa Nglinggo. Evaluasi secara periodic juga dijalankan oleh tim pengabdian bersama mitra untuk melihat sejauh mana realisasi dari rencana yang sudah dihasilkan. Bila terdapat kendala dalam implementasinya segera dicarikan solusinya, baik yang bersifat teknis ataupun lainnya.

Para pengelola dayatarik wisata di kawasan wisata Nglinggo belum memiliki pemahaman terhadap pentingnya sebuah masterplan sebagai panduan dalam pengembangan kegiatan pariwisata

DAFTAR PUSTAKA

Bintarto. 1983. Interaksi Desa-Desa dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Damanik, Anton, dkk. 2015. Membangun Pariwisata dari Bawah. UGMPress.

Moch. Soerjani. 1997. Kependudukan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. U.I. Pres. Jakarta.

Masri Singarimbun. 1989. Metodologi Penelitian. Pustaka. Jakarta

Otto Soemarwoto. 1988. Ekologi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Djambatan. Jakarta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: CV. Alfabeta

Implementasi Desa Adat dan Peran Komunitas Masyarat dalam Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di Nusa Penida dan Sekitarnya

Indrayani

Mahasiswa Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan
Pasca Sarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar
E-mail : indraaryaweda@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan meliputi keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Terkait dengan ketentuan tersebut, guna mengetahui lebih lanjut kondisi kepariwisataan Indonesia khususnya di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali, maka dilakukan penelitian terhadap implementasi desa adat dan peran komunitas masyarakat dalam pengembangan kawasan strategis di Nusa Penida dan sekitarnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif, partisipatif dan deskriftif kualitatif. Kekayaan keanekaragaman hayati laut Nusa Penida mendorong masyarakat Nusa Penida bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya meliputi Desa Adat, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, LSM internasional seperti The Nature Conservancy, Coral Triangle Center dan Conservation International Indonesia, LSM lokal serta perguruan tinggi telah bekerja keras untuk melindungi dan melestarikannya. Sebagai sumberdaya wisata, Nusa Penida memiliki beragam kekayaan budaya sebagai daya tarik wisata budaya yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya dalam bentuk warisan budaya kebendaan atau bersifat berwujud (tangible), antara lain: benda dan bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, pura, peninggalan sejarah, dan permukiman tradisional di desa-desa adat.

Kata Kunci : Keanekaragaman hayati, budaya, komunitas masyarakat dan desa adat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa periode terakhir, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2015 tercatat 10.230.775 orang, mengalami peningkatan 5,16% dibanding tahun 2014. Selama periode 2010-2015, laju pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Indonesia rata-rata 7,89% pertahun. Kondisi ini menunjukkan perkembangan kepariwisataan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa (Kementerian Pariwisata, 2016).

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, dan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan

spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

Kedepannya kepariwisataan akan terus mengalami perkembangan positif ditinjau dari jumlah kunjungan dan perolehan devisi. Beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan kepariwisataan nasional yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju yang menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya; (2) berkembangnya teknologi informasi dan transportasi yang menyebabkan semakin meningkatnya aksesibilitas destinasi pariwisata; (3) Indonesia masih memiliki banyak ragam dan keunikan daya tarik wisata yang terus dikembangkan untuk memberikan berbagai pilihan destinasi bagi wisatawan; dan (4) kebijakan pembangunan nasional yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.

Kawasan PariwisataNusa Penida dan sekitarnya merupakan salah satu dari 80 KSPN yang ditetapkan di Indonesia dan salah satu KSPN dari 10 KSPN di Provinsi Bali. Dengan ditetapkannya Nusa Penida di Kecamatan Klungkung, Provinsi Bali sebagai KSPN maka pembangunan kepariwisataan di wilayah ini diharapkan lebih maju dan terarah serta berkelanjutan sehingga perannya dalam pembangunan semakin signifikan dan penting ditinjau dari berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai sosial, budaya dan lingkungan hidup.

Perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata di Nusa Penida dan sekitarnya pada prinsipnya adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat bagi pengembangan potensi (produk pariwisata), pasar, spasial, SDM, manajemen, dan lain-lain sehingga tumbuh dan berkembang prositif serta berkelanjutan bagi pengembangan wilayah, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Pembangunan kawasan paiwisata di Nusa Penida dan sekitarnya saat ini mulai berkembang pesat hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bangunan vila, hotel, penginapan, caffe dan restoran sebagai penunjang kegiatan pariwisata serta pembukaan tanah kavling di daerah sekitar tebing dengan view laut untuk permukiman baru dan investasi masyarakat yang tinggal diluar Nusa Penida dan sekitarnya. Untuk itu perlu dipikirkan upaya-upaya melestarikan budaya dan lingkungan hidup di Nusa Penida dan sekitarnya dari kerusakan yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata yaitu dengan melibatkan peran desa adat dan komunitas masyarakat dalam kegiatan pariwisata di Nusa Penida dan Sekitarnya. Sehingga dengan begitu pembangunan dan perkembangan kawasan strategis pariwisata di Nusa Penida dan sekitarnya bisa dilaksanakan secara serasi dan terpadu tanpa merusak tatanan budaya dan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan konsep pembangunan berlandaskan Tri Hita Karana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penulisan ada yaitu (1) Bagaimana konsep pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di Nusa Penida dan sekitarnya ?; (2) Bagaimana implementasi Desa Adat dan Peran Komunitas Masyarakat dalam mencegah dampak yang ditimbulkan akibat pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di Nusa Penida dan sekitarnya?.

C. Maksud Penulisan

Kawasan strategis pariwisata Nusa Penida mengalami perkembangan yang paling pesat di Bali dalam 5 tahun terakhir, baik ditinjau dari pasar maupun industri pariwisata. Terkait dengan hal tersebut maksud penulisan yaitu perluperencanaan dan pengelolaan lebih lanjut sumber daya alam dan lingkungan di Nusa Penida dan

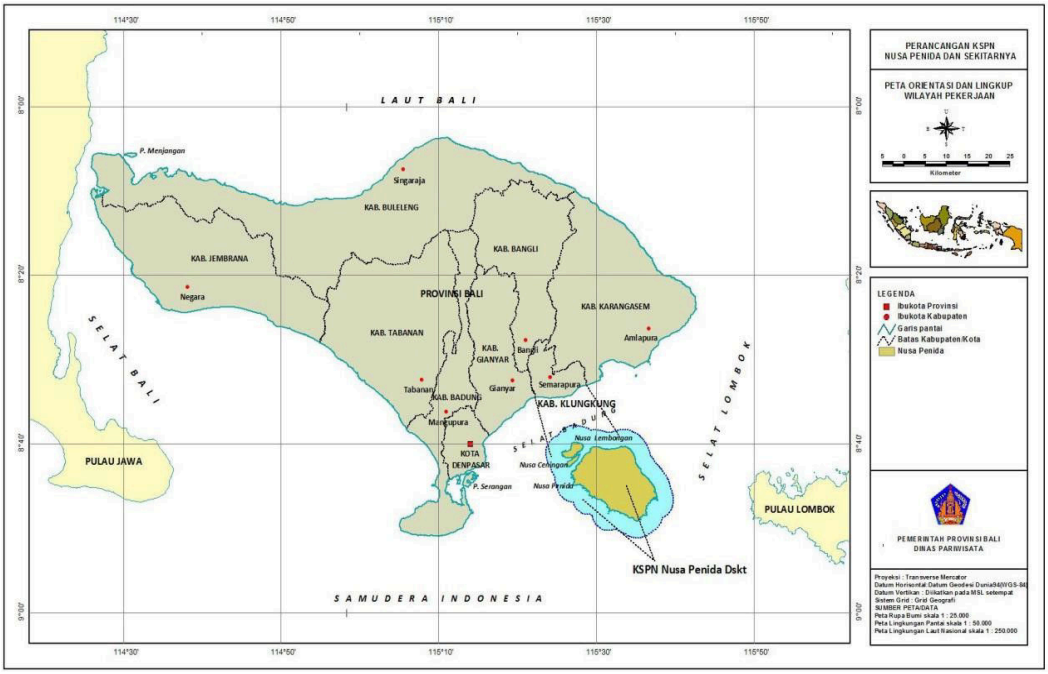
sekitarnya agar tetap lestari sesuai konsep pembangunan yang berkelanjutan.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Kawasan Strategis Pariwisata Nusa Penida dan sekitarnya perlu didorong pengembangannya lebih kuat dan diarahkan lebih tepat untuk meningkatkan keunggulan daya saing dan berkelanjutan. Dalam rangka : meningkatkan perekonomian masyarakat dan wilayah, perolehan devisa negara, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pelestarian budaya dan lingkungan hidup dan mendorong pengembangan infrastruktur.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Nusa Penida dan Sekitarnya sesuai dengan Peta KSPN Nusa Penida dan sekitarnya yang tercantum pada Lampiran III PP No. 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS. Secara administratif, lingkup wilayah pekerjaan ini yaitu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali (Gambar 1.1).



Gambar 1 Peta Orientasi dan Ruang Lingkup Kawasan Strategis Pariwisata Nusa Penida dan Sekitarnya

F. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu perencanaan pembangunan wilayah dan pengelolaan lingkungan terkait dengan perencanaan kawasan pariwisata di Nusa Penida dan sekitarnya sehingga pembangunan yang dilakukan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara parktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi (1) pemerintah dalam merumuskan penataan ruang kawasan dan strategi pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida, (2) swasta

dalam menentukan tempat dan jenis kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan dalam suatu wilayah, dan (3) masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidupnya sesuai dengan Konsep Tri Hita Karana.

II. METODE PENULISAN

Metode penulisan yang digunakan untuk memberikan hasil yang terbaik dalam penyampaian makalah ini dengan beberapa pendekatan yaitu :

a. **Pendekatan berkelanjutan, inkremental dan fleksibel** – perencanaan merupakan proses kontinyu dengan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan umpan balik, namun tetap dalam kerangka kerja untuk menjaga tujuan dan kebijakan dasar dari pembangunan pariwisata nasional. Pendekatan inkremental dan fleksibel mengandung arti bahwa perkembangan pariwisata berlangsung secara bertahap dan antisipatif terhadap perubahan-perubahan.
b. **Pendekatan sistem** – pariwisata dipandang sebagai sistem yang saling berkaitan dan harus direncanakan dengan memanfaatkan teknik analisis sistem.
c. **Pendekatan komprehensif** – berkaitan dengan pendekatan sistem, seluruh aspek dalam pembangunan kepariwisataan yaitu dimensi destinasi pariwisata, kelembagaan, industri dan pemasaranan yang dianalisis dan direncanakan secara komprehensif.
d. **Pendekatan terintegrasi** – berkaitan dengan pendekatan sistem dan komprehensif, pembangunan kepariwisataan Nusa Penida dan sekitarnya direncanakan dan dikembangkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi baik untuk pariwisata sendiri maupun secara keseluruhan terkait pengembangan wilayah. Dengan demikian, pembangunan pariwisata di suatu wilayah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.
e. **Pendekatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan** – perencanaan pembangunan kepariwisataan Nusa Penida dan sekitarnya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial dan budaya mengingat alam dan sosial budaya merupakan aset pariwisata. Perencanaan juga dilakukan melalui analisis daya dukung lingkungan guna mewujudkan pariwisata yang berkeberlanjutan.
f. **Pendekatan partisipasi masyarakat** - perencanaan pembangunan kepariwisataan Nusa Penida dan sekitarnya dilakukan dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait sehingga pengembangan pariwisata dapat diterima dan dapat menghasilkan manfaat sosial ekonomi bagi sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di dalam perencanaan pariwisata aspek sosial budaya mutlak diperlukan, dalam rangka melihat kemungkinan adanya potensi ataupun permasalahan yang mungkin timbul bila pariwisata dikembangkan.
g. **Pendekatan implementatif** – kebijakan, strategi, rencana dan rekomendasi pengembangan pariwisata diformulasikan bersifat realistik dan dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan teknik-teknik implementasi. Sehingga dalam perencanaan memuat indikasi program-program yang diperlukan serta jangka waktu implementasi program tersebut berdasarkan urutan prioritas.

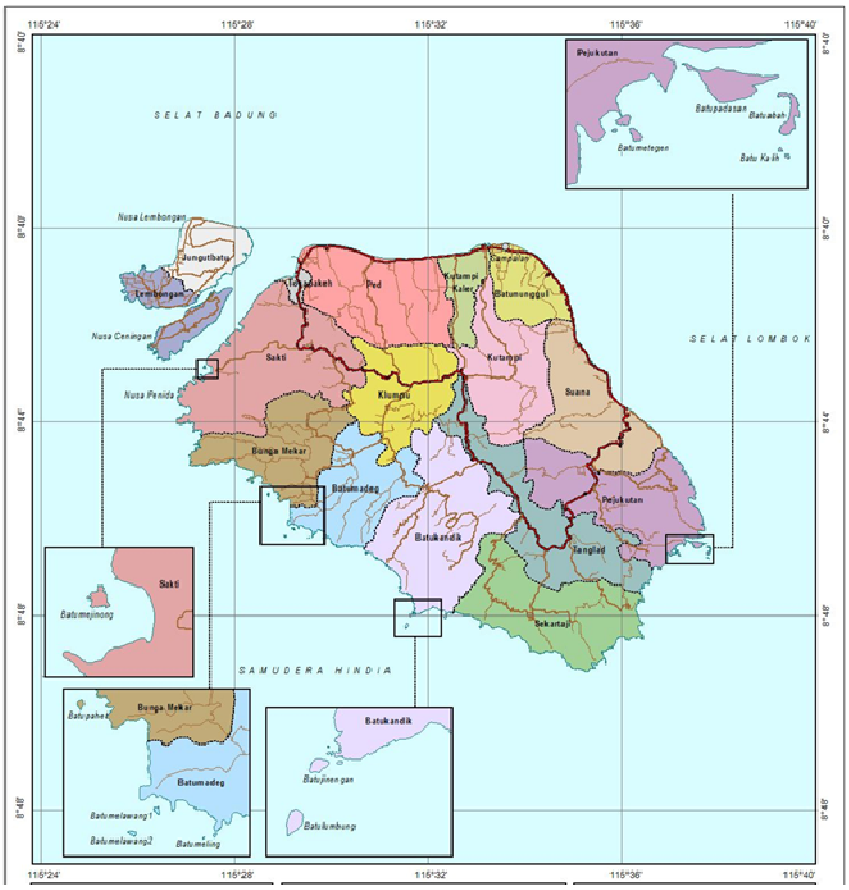
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kawasan Strategis Pariwisata Nusa Penida dan Sekitarnya

Kawasan Nusa Penida merupakan satu kesatuan wilayah administrasi Kecamatan Nusa Penida, di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Kecamatan Nusa Penida merupakan wilayah kepulauan terdiri atas 3 pulau utama yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, dengan luas wilayah 202,84 km2 atau 64,4% dari luas wilayah Kabupaten Klungkung yang luasnya 315 km2. Secara administrasi

KecamatanNusaPenidamempunyaibatas-bataswilayahsebagaiberikut : sebelah utara SelatBadung, timur SelatLombok, selatan SamuderaHindia dan barat SelatBadung.

Kecamatan Nusa Penida terdiri atas 16 desa. Pulau Nusa Penida terdiri atas 14 desa, Nusa Lembongan terdiri atas 2 desa yaitu Desa Jungutbatu dan Desa Lembongan, sedangkan Nusa Ceningan termasuk kedalam wilayah Desa Lembongan.Pulau-pulau kecil Kawasan Nusa Penida memiliki bentukan geologi (genesis dan struktur geologi) alami khas atau unik yaitu karst batugamping dan batuan mengandung fosil foraminifera. Berdasarkan keunikan ini maka Nusa Penida ditetapkan sebagai Kawasan Lindung Geologi dengan kategori Kawasan Cagar Alam Geologi untuk menjaga keutuhan bentang alam beserta ekosistemnya.



Gambar 2. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Nusa Penida dan Sekitarnya

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Nusa Penida menurut Ketinggian Tempat

		Luas menurut								
		0-	**25-**	**50-**	**100-**	**200-**	**300-**	**400-**	**500**	
1	Lembonga	501	118	75,						6
2	Ceningan	100	98,	100	16,					3
3	NusaPenid	973	921	214	570	537	239	169	61	192
	Jumlah	**157**	**113**	**231**	**572**	**537**	**239**	**169**	**61**	**202**

Sumber : Hasil analisis peta rupa bumi 2010

Di sisi lain, struktur karst Kawasan Nusa Penida membentuk landskap yang unik dan memiliki panorama yang indah yang bernilai pariwisata, berupa karst kerucut atau Cone Karts. Landskap karst kerucut ini sebagai interior dari pulau yang ditutupi dengan bukit-bukit berbentuk kerucut. Oleh karena itu, di Nusa Penida banyak terdapat

bukit-bukit indah sebagai daya tarik wisata, seperti Bukit Blubuh di Desa Tanglad yang kini dikenal luas dengan nama Bukit Telletubbies.

Sebagai penghubung Samudera Pasifik dan Samudera Hindia menjadikan laut di kawasan ini sangat mendukung beragaman dan tingginya produktivitas terumbu karang dan habitat pelagik, serta sebagai koridor utama migrasi bagi cetasean. Pulau-pulau di wilayah ini menyediakan habitat atau lokasi peneluran (nesting site) bagi beberapa spesies genting (endangered species) seperti penyu laut. Kombinasi antara arus yang kuat dan tebing-tebing berundak dasar laut menyebabkan banyaknya muncul upwelling air dingin yang dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan ketahanan terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jika dilindungi dengan tepat, laut di kawasan ini dapat menjadi kantong-kantong bagi kehidupan laut dan perikanan yang produktif dengan ketahanan terhadap perubahan iklim. Habitat laut menawarkan keunikan yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata khususnya wisata cetacean, manta dan hiu paus.

Posisi Nusa Penida yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia tanpa halangan menyebabkan gelombang laut di perairan ini tergolong tinggi karena gelombang angin dibangkitkan dari jarak yang jauh. Pada kondisi cuaca ekstrim, gelombang laut menjadi faktor yang mempengaruhi keselamatan pelayaran dan aktivitas wisata bahari.

Ombak atau gelombang angin yang pecah merupakan salah satu daya tarik wisata di Kawasan Nusa Penida. Pecahnya gelombang disebabkan amplitudo gelombang mencapai level kritis dimana energi gelombang ditranspormasi menjadi energi kenetik turbulensi. Terdapat tiga tipe gelombang pecah yait tipe spilling, plunging, surging dan collapsing yang dipengaruhi antara lain oleh morfologi dan kelerengan dasar laut, kedalaman, dan angin. Tipe gelombang pecah (ombak) yang cocok untuk berselancar (surfing) adalah tipe plunging yaitu gelombang pecah terjadi ketika dasar laut curam atau terjadi perubahan kontur dasar laut yang tiba-tiba, seperti adanya karang atau gundukan pasir di dasar laut. Puncak gelombang menjadi jauh lebih curam, menjadi vertikal, kemudian bagian atasnya menggulung dan turun ke lembah gelombang, melepaskan sebagian energinya dalam kekuatan yang besar. Gelombang pecah tipe plunging ini terdapat di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, yang menjadi pulau kecil ini sebagai salah satu tempat berselancar terfavorit di Indonesia.

Keanekaragaman hayati, baik di wilayah daratan maupun perairan laut merupakan sumberdaya yang penting bagi suatu destinasi. Beberapa destinasi pariwisata mengandalkan aspek keunggulannya dari keberadaan keanekaragaman hayati, baik pada tingkatan ekosistem mapun spesies. Pariwisata berbasis keanekaragaman hayati memiliki pangsa pasar tersendiri khususnya ekoturis dan petualang. Sebagai gugusan pulau-pulau kecil dengan geologi karst yang tandus, Nusa Penida memiliki sumberdaya “berkah” berupa keanekaragaman hayati daratan dan perairan laut yang bernilai pariwisata tinggi.

Nusa Penida juga merupakan wilayah dengan keanekaragaman jenis satwa yang tinggi. Keanekaragaman hayati ini disamping bernilai konservasi yang tinggi juga memiliki nilai pariwisata sebagai daya tarik wisata ilmiah, hobi dan petualangan, ditambah lagi dengan hadirnya jalak bali di alam liar dan penangkaran Nusa Penida Bird Sanctuary telah menjadikan Nusa Penida sebagai salah satu destinasi wisata pengamatan burung (bird watching) dan wisata ilmiah.

Daya tarik wisata merupakan faktor yang memotivasi minat kunjungan wisatawan ke suatu destinasi. Kawasan Nusa Penida merupakan destinasi bertema wisata bahari tetapi juga memiliki daya tarik wisata alam di wilayah daratan dan daya tarik wisata budaya yang beragam. Daya tarik wisata alam bahari di Nusa Penida lebih ragam dibandingkan destinasi pesaing. Di kawasan ini terdapat daya tarik wisata

bahari unggulan yang memiliki pasar pariwisata minat khusus yang tidak terdapat di seluruh destinasi pesaing yaitu ombak (surf) dengan atraksi wisata surfing, mangrove untuk atraksi mangrove tour dan megafauna (pari manta dan Mola mola).



Gambar 3. Pulau-pulau Kecil di Kawasan Nusa Penida

B. Peran Desa Adat dan Komunitas Masyarakat

Berdasarkan data BPS Kabupaten Klungkung 2016 jumlah desa di Kecamatan Nusa Penida sebanyak 16 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 45.460 jiwa terdiri dari 22.630 jiwa laki-laki dan 22.830 jiwa perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk adalah 224 jiwa/km^2. Jumlah penduduk menurut desa berkisar 515–3.989jiwa, terbanyak di Desa Peddan terkecil di Kampung Toyapakeh. Kepadatan penduduk menurut desa berkisar 83–799 jiwa/km^2, paling padat di Desa Jungut batu dan paling jarangdi Desa Sekartaji. Selain Toyapakeh, kepadatan penduduk relatif tinggi (diatas 500 jiwa/km^2) terdapat pula di Desa Jungut batu dan Lembongan. Kepadatan penduduk relatif rendah (250 jiwa/km^2 atau kurang) selain Desa Sekartaji yaitu Desa Sakti, Bunga Mekar, Tanglad, Pejukutan, Batumadeg, Batukandik, Kutampi dan Ped seperti diuraikan pada Tabel 2.

Peran serta Desa Adat sangat besar dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup salah satunya yaitu dengan melibatkan pecalang untuk ikut serta menjaga pantai dan terumbu karang.

Sedangkan untuk komunitas masyarakat yang aktif berperan antara lain LSM peduli lingkungan TNC (*The Nature Conservancy)* dengan Program TCT (*Coral Triangle Center)* yang aktif dalam konservasi terumbu karang. Dan asosiasi pemandu wisata serta pemilik hotel.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan konservasi yang dilaksanakan sudah dilaksanakan kerja sama antara POKJA yang disebut UPT KKP dengan masyarakat Nusa Penida (Desa Adat) untuk melindungi ekosistem penting pesisir seperti terumbu karang. Dan seluruh pelaksanaan program CTC yang dilaksanakan berada dibawah aturan adat yang berlaku di Nusa Penida.

Tabel 2. Jumlah dan Sebaran Penduduk di Kecamatan Nusa Penida Tahun 2015

		LuasWilayah	Penduduk(Jiwa)			Kepadatan
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sakti	13,16	1.663	1.630	3.293	250
2	BungaMekar	19,73	1.280	1.342	2.622	133
3	Batumadeg	13,56	1.036	1.048	2.084	154
4	Klumpu	13,58	1.764	1.711	3.475	256
5	Batukandik	21,66	1.760	1.932	3.692	170
6	Sekartaji	15,39	658	616	1.274	83
7	Tanglad	15,24	963	995	1.958	128
8	Pejukutan	10,84	1.318	1.374	2.692	248
9	Suana	10,42	1.510	1.484	2.994	287
1	Batununggul	13,45	1.990	1.970	3.960	294
1	Kutampi	13,14	1.469	1.451	2.920	222
1	KutampiKaler	10,75	1.428	1.433	2.861	266
1	Ped	21,15	1.985	2.004	3.989	189
1	Toyapakeh	0,65	246	269	515	792
1	Lembongan	6,15	1.983	1.975	3.958	644
1	Jungutbatu	3,97	1.577	1.596	3.173	799
	Jumlah	**202,84**	**22.630**	**22.830**	**45.460**	**224**

Sumber:BPS Kabupaten Klungkung (2016)

C. Konsep Pelestarian Sumber Daya Alam dan LingkunganHidup

Memperhatikan nilai-nilai alam dan sosial budaya serta isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Nusa Penida dan sekitarnya, maka dirumuskan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan yang sesuai dengan kondisi dan situasi kepariwisataan Nusa Penida dan sekitarnya sebagai berikut :

1. Berkelanjutan
   Berkelanjutan merupakan prinsip dasar pembangunan kepariwisataan Nusa Penida. Pariwisata berkelanjutan mempunyai dimensi lingkungan, ekonomi dan sosial-budaya. Lingkungan merupakan sumber daya terpenting dalam pariwisata Nusa Penida, sehingga kerusakan lingkungan dapat menjadi ancaman keberlanjutannya. Menjamin keberlanjutan pembangunan kepariwisataan, seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan Nusa Penida telah sepakat bahwa kepariwisataan di daerah ini diselenggarakan dalamkonsep“**ekowisata**”melalui pendekatan “**ekonomibiru**” (*blueeconomy*) untuk menjamin keberlanjutan.
2. Katerpaduan
   Pembangunan kepariwisataan berdemensi luas bersifat lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, lintas disiplin ilmu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan Nusa Penida hendaknya diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip keterpaduan. Keterpaduan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan antara PemerintahPusat, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Akselerasi
   Untuk kawasan Nusa Penida, akselerasi pembangunan aksesilibitas pariwisata (pelabuhan, jalan dan jembatan) dan prasarana umum (air bersih, listrik, persampahan dan air limbah) sangat diperlukan untuk mengimbangi pesatnya laju pertumbuhan industri pariwisata.

4. Konsistensi dan Kesinambungan
   Konsistensi dan kesinambungan diperlukan agar penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dapat diarahkan sesuai dengan sasaran dan target-target jangka panjang yang telah ditetapkan.
5. Kepastian Hukum
   Kepastian hukum juga diperlukan untuk menjamin kondisi kepariwisataan yang kondusif, tertib dan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan.
6. Kemitraan
   Pola kemitraan yang ideal dikembangkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan adalah kemitraan “horisontal” dan kemitraan antara sektor publik,sektor swasta dan masyarakat (termasuk LSM danmedia).
7. Berbasis ilmiah dan ilmu pengetahuan
   Untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip-prinsip ilmiah dan pengambilan keputusan perlu dibangun jaringan komunikasi yang efektif antara komunitas ilmiah dan pengambil kebijakan.
8. Partisipasi masyarakat
   Penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan mutlak menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, Agar masyarakat lokal mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian
9. Membangun kapasitas lokal (local capacity building)
   Aplikasi pembangunan dilakukan melalui proses pembelajaran dimana *stakeholders* terlibat langsung, juga perlu dikembangkan program-program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen.
10. Manfaat
    Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan kepariwisataan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan pribadi dan jati diri masyarakat serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
11. Keterbukaan (Transparansi)
    Penyelenggaraan kepariwisataan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
12. Akuntabilitas
    Bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dan hasil-hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata di Nusa Penida dan sekitarnya pada prinsipnya adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat bagi pengembangan potensi (produk pariwisata), pasar, spasial, SDM, manajemen, dan lain-lain sehingga tumbuh dan berkembang prositif serta berkelanjutan bagi pengembangan wilayah, kesejahteraan masyarakat serta pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu peran serta desa adat dan

komunitas untuk mengawasi, menjaga dan ikut dalam pengelolaan maupun pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup agar sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Astiti, Ni Komang Ayu dan D. Abdillah. 2005. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Mendukung Kegiatan Religi dari Manusia Prasejarah di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Laporan Penelitian Subbid. Laboratorium Artefak dan Ekofak, Bidang Arkeologi Sejarah dan Arkeometri. Jakarta.

BPS Kabupaten Klungkung. 2016. Kabupaten Klungkung Dalam Angka 2016. Semarapura.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. 2013. Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Provinsi Bali. Denpasar.

Geria, M. 1997. Survei Ikonografi Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Laporan Penelitian A Balai Arkeologi Denpasar (tidak terbit).

Hidayah, A. R. 2010. Sisa Fauna Situs Gua Gede Nusa Penida Bali. Balai Arkeologi Denpasar. Denpasar.

Kotler, P. 2001. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat. Jakarta.

Pemerintah Provinsi Bali. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Denpasar

Pemerintah Kabupaten Klungkung. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 1Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan. 2016. Pesona Bawah Laut Kawasan Karst Nusa Penida. http://www.mgi.esdm.go.id/content/pesona-bawah-laut-kawasan-karts-nusa-penida.

Presiden Republik Indonesia. 2011. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Jakarta.

Reindrawati, D. 2010. *Motivasi Ekoturis dalam Pariwisata Berbasis Alam (Ekoturism) : Studi kasus di Wana Wisata Coban Rondo, Malang*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Vol 21, No. 2 (2010): 187-192. Universitas Airlangga. Surabaya.

Pendekatan Kebijakan Fiskal dalam Konteks Pengembangan Pulau-Pulau Kecil

Samsul Ma'rif

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang
Email: samsulmarif1612@gmail.com

ABSTRAK

Pulau kecil dengan keterbatasan sumber daya daratan di satu sisi dan potensi sumber daya kelautan yang besar di sisi lainnya dihadapkan pada upaya pembangunan yang berkelanjutan. Upaya penyeimbangan pertumbuhan pulau antara orientasi ekonomis dan ekologis memerlukan pendekatan pembangunan yang khas. Strategi pengembangan pulau-pulau kecil bila dilakukan dengan pendekatan konvensional tidak dapat secara cepat berkembang. Hal ini terjadi mengingat pulau-pulau kecil aksesibilitasnya dengan pusat-pusat pertumbuhan masih banyak yang belum memadai. Dengan demikian maka pendekatan pembangunan seyogyanya diorientasikan pada upaya pemerataan. Salah satu bentuk upaya pemerataan ini adalah sistem alokasi berupa kebijaksanaan fiskal.

Kata kunci: pulau kecil, kebijakan fiskal

I. PENDAHULUAN

Pulau-pulau kecil secara fisik memiliki karaktersitik unik yaitu sumberdaya daratan sangat terbatas, namun memiliki sumberdaya kelautan yang melimpah ruah. Bila dikaitkan dengan permasalahan yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil, maka sebenarnya potensi pulau-pulau kecil sangatlah besar artinya bagi pemenuhan kekurangan sumberdaya. Berarti pula apabila dikembangkan secara terencana dan berkelanjutan, niscaya dapat menjadi basis kegiatan ekonomi regional. Pengembangan melalui ekonomi wilayah menciptakan pusat pertumbuhan baru bagi suatu kawasan sekaligus mempercepat pembangunan bagi kawasan-kawasan yang selama ini terabaikan oleh kebijakan paradigma daratan.

Pengembangan ekonomi wilayah pulau-pulau kecil dapat menjadi jembatan penghubung atas terjadinya disparitas wilayah maupun sektoral. Dari disparitas wilayah keberadaan pulau-pulau kecil dapat dikembangkan menjadi pusat kegiatan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan aktivitas jasa-jasa yang memungkinkan bisa berkembang sehingga kawasan di sekitarnya menjadi tidak terisolir atau tertinggal. Dari segi disparitas sektoral, pengembangan pulau-pulau kecil membangiktkan pertumbuhan sektor-sektor kegiatan, dari yang semula bersifat potensi menjadi aktual.

Permasalahan perlindungan ekosistem agar lestari di satu sisi dan pemanfaatan potensi yang dimiliki untuk mensejahterakan masyarakat atau kawasan di sekitarnya pada sisi yang lain adalah pada akhirnya menjadi issue sentral dalam membuat visi pembangunan pulau-pulau kecil. Masalah pertumbuhan dan pelestarian dapat dilihat sebagai fenomena *trade off*. Implikasi dari ini adalah pada bagaimana membuat suatu formula gambaran masa depan pulau-pulau kecil. Artinya bagaimana menentukan model yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi wilayah, tanpa memberikan dampak negatif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan.

Beranjak dari permasalahan itu maka penyusunan model rencana pembangunannya harus diorientasikan pada upaya penggambaran secara komprehensif-integral mengenai pengembangan ekonomi wilayah yang bersifat optimal dan berkelanjutan. Optimal yang dimaksudkan di sini adalah suatu pencapaian dari fungsi tujuan dengan mengkombinasikan keterbatasan sumberdaya yang tersedia

menurut ukuran nilai tertentu. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh salah satu sumberdaya tidak menyebabkan sumberdaya yang lain terabaikan. Berkelanjutan yang dimaksudkan di sini manfaat yang diperoleh didapat secara proporsional dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Jadi jelaslah bahwa model pengelolaan pulau-pulau kecil yang memiliki potensi dan keterbatasan, memerlukan alokasi penataan yang diupayakan sedemikian rupa agar pemanfaatan tersebut memberi hasil yang optimal. Dalam arti penataan struktur tata ruang selain diperlukan untuk mempertinggi kesempatan ekonomi yang dimiliki ruang juga diarahkan untuk tidak mengeksploitasi potensi sumberdaya yang dimiliki oleh ruang secara berlebihan sehingga akan terjadi suatu keberlanjutan (*sustained*).

Namun pada kenyataannya, tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah pulau-pulau kecil justru menempati strata yang paling rendah apabila dibandingkan dengan segmen masyarakat lainnya. Demikian pula, di beberapa wilayah pulau-pulau kecil sudah mulai muncul fenomena pengelolaan yang melampaui daya dukung lingkungan.

Paradoks pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil tersebut, tentu saja harus diakhiri. Langkah ke arah itu, menurut analisis para pakar, dapat dimulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil secara terpadu (Dahuri, 2001). Dengan sistem pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil secara terpadu, diharapkan akan terwujud suatu sistem pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan, sebagaimana diisyaratkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3).

Untuk mewujudkan sistem pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil terpadu tersebut, seyogyanya dilakukan secara terpadu, yang melibatkan kegiatan antar sektoral. Akan tetapi, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, pemerintah belum pernah melakukan suatu kebijakan khusus pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil. Selama ini, kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pulau-pulau kecil hanya dilakukan berdasarkan pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektor dan dunia usaha terkait.

Dalam satu dekade belakangan ini, banyak pihak berkepentingan yang memanfaatkan sumberdaya pulau-pulau kecil dari jenis yang sama atau di wilayah pulau-pulau kecil yang sama, khususnya di wilayah pulau-pulau kecil yang pembangunannya pesat. Masing-masing pihak yang berkepentingan memegang dasar hukum dan kebijakan dari instansi pusat yang berwenang. Kebijakan tersebut, memuat tujuan dan sasarannya masing-masing dalam memanfaatkan sumberdaya pulau-pulau kecil. Untuk mencapainya, setiap instansi menyusun perencanaan sendiri, sesuai dengan tugas dan fungsi sektornya, tetapi kurang mengakomodasi kepentingan sektor lain, daerah, masyarakat setempat, dan lingkungannya. Perbedaan tujuan, sasaran, dan rencana memicu kompetisi pemanfaatan dan tumpang tindih pengelolaan. Tumpang tindih perencanaan dan kompetisi pemanfaatan memicu konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan.

Persoalan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil semakin krusial menyusul diberlakukannya otonomi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pulau-pulau kecil. Kewenangan pemerintah daerah meliputi kewenangan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumberdaya alam, dan tanggung jawab untuk melestarikannya.

Otonomi daerah di wilayah pulau-pulau kecil tersebut telah menimbulkan perbedaan penafsiran, dimana sebagian pemerintah daerah menerjemahkan seolah-olah kewenangan tersebut sebagai kedaulatan. Sehingga timbul kesan adanya pengkapling-kaplingan laut di sekitar kawasan pulau-pulau kecil, berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi ini masih berbenturan dengan penerapan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha di wilayah pulau-pulau kecil.

Untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta mengoptimalkan manfaat pengembangannya, maka diperlukan suatu model pembangunan pulau-pulau kecil. Dalam kerangka tersebut maka makalah ini bermaksud untuk menjelaskan salah satu model pembangunan pulau-pulau kecil yang dapat diterapkan adalah dengan pendekatan fiscal sebagai bagian dari konsep Keynessian dalam model pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana penerapakan kebijakan fiskal dapat dilakukan sebagai upaya memajukan pembangunan di pulau-pulau kecil.

II. PERSPEKTIF TEORITIS PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL

Perspektif teoritis mengenai bagaimana pengembangan pulau-pulau kecil dilakukan beragam pandangan yang berkembang. Mulai dari yang berorientasi pada aspek lingkungan sampai dengan yang berorientasi ekonomi. Pada hakikatnya sudut pandang dalam melihat pembangunan di pulau-pulau kecil terbagi dalam dua kutub yang saling bertolak belakang. Pendapat yang pertama melihat bahwa aspek konservasi sebagai prioritas, sehingga dampak negatif akibat pengaruh manusia harus diminimalkan atau ditiadakan. Konsekuensinya pembangunan pulau-pulau kecil relatif stagnan. Pendapat yang kedua melihat bahwa melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kemajuan pulau-pulau kecil akan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya. Upaya pemanfaatan sumberdaya secara intensif adalah cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Konsekuensi dari pendapat kedua ini adalah tidak terkontrolnya pola pemanfaatan sumberdaya sehingga pada suatu waktu akan habis atau menipis (Dahuri, 2000).

Di antara dua pandangan tadi, ada pendapat ketiga yang melihat perlunya pengkombinasian antara pola pemanfaatan menurut ekonomi dan pola pemanfaatan menurut konservasi. Kombinasi ini mencerminkan suatu alokasi optimal sumberdaya tersedia, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Prinsip yang mendasari ini adalah konsep pareto optmal.

Tiga kelompok model pembangunan pulau-pulau kecil di atas masing-masing memiliki basis teoritis. Sebagai suatu pilihan, pendapat pertama dan kedua berada pada posisi ekstrim sehingga berlaku prinsip biaya yang diluangkan, dan daripadanya akan menghasilkan kondisi yang tidak dikehendaki baik secara produktif, maupun konsumtif. Artinya berada di luar wilayah yang tercapaikan untuk suatu posisi tawar menawar.

Pada pendapat ketiga, salah satu konsep yang dikenal adalah agromarine, yaitu pendekatan pembangunan pulau-pulau kecil yang kegiatan utamanya bertumpu pada kegiatan pendayagunaan sumber daya laut (penangkapan ikan, budidaya laut, industri pengolahan laut) yang dikombinasikan dengan kegiatan pertambakan dan pertanian dalam arti luas. Pada perkembangannya konsep ini diperluas dengan memasukkan kombinasi dari pendayagunaan jasa-jasa lingkungan kelautan (pariwisata bahari). Adapun dasar yang menyangga konsep ini adalah 1) kesesuaian dan daya dukung lingkungan, 2) pendekatan agribisnis, 3) pendekatan kemitraan. Ketiganya harus diterapkan sebab akan menciptakan keberlanjutan pada dua sisi, yaitu ekologis dan ekonomis (Dahuri, 2000).

Pendapat ketiga namun dengan modifikasi yang bernuansa ekonomis adalah dikenal dengan nama konsep penerapan kebijakan fiskal. Konsep ini lebih banyak diilhami oleh pendapat Keynessian mengenai permintaan agregat. Pertumbuhan ekonomi kawasan pulau-pulau kecil digerakkan oleh adanya kenaikan dalam permintaan pada pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja dengan melibatkan sisi pengeluaran (pasar output) dan sisi penerimaan (pasar faktor produksi). Dalam hal ini dinyatakan kebijakan fiskal (pasar output) melalui pembelanjaan konsumsi, investasi,

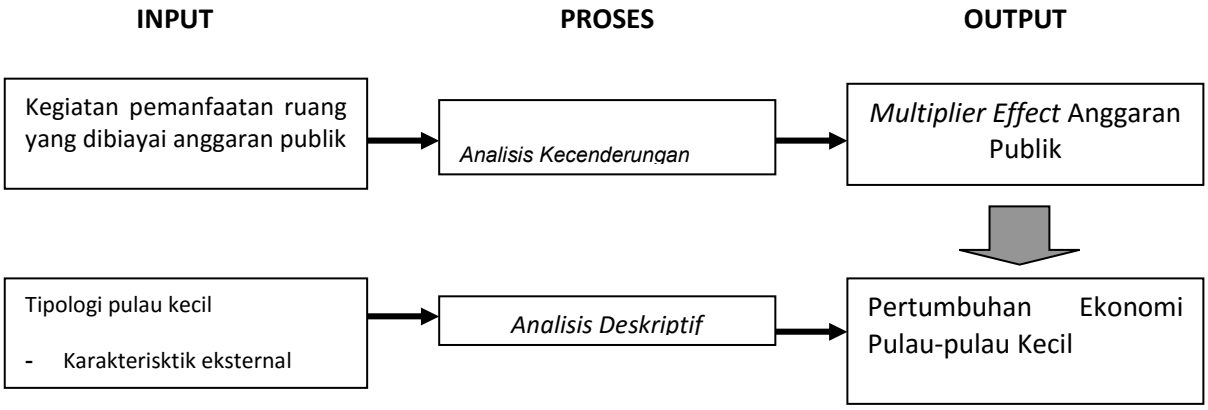
pengeluaran pemerintah yang bertambah akan menyebabkan tambahan kapasitas produksi. Penambahan kapasitas produksi ini akan mempengaruhi permintaan pada faktor produksi. Melalui proses multiplier akan tercipta tambahan aktivitas ekonomi yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan.

III. METODE KAJIAN

Sebagai langkah awal untuk mengetahui implementasi kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan pulau-pulau kecil adalah dengan menguraikan pemanfaatan ruang ke dalam indikasi program yang sumber pembiayaannya dibebankan pada anggaran publik. Pemanfaatan ruang hakikatnya representasi dari perencanaan ruang yang memadukan berbagai kegiatan struktur ruang dan pola ruang.

Untuk menjawab permasalahan bagaimana penerapan fiskal tersebut, makalah ini ingin mencoba menjelaskannya melalui pendekatan kajian deskriptif-konseptual secara sederhana. Menurut Sugiyono (2010:147) kajian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Konsep yang diterapkan sebagai representasi fiskal adalah model keynes berupa belanja barang dan jasa, gaji pegawai dan *transfer payment*.

Secara prosedural tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan diagnosa dirangkum sebagaimana digambarkan berikut:

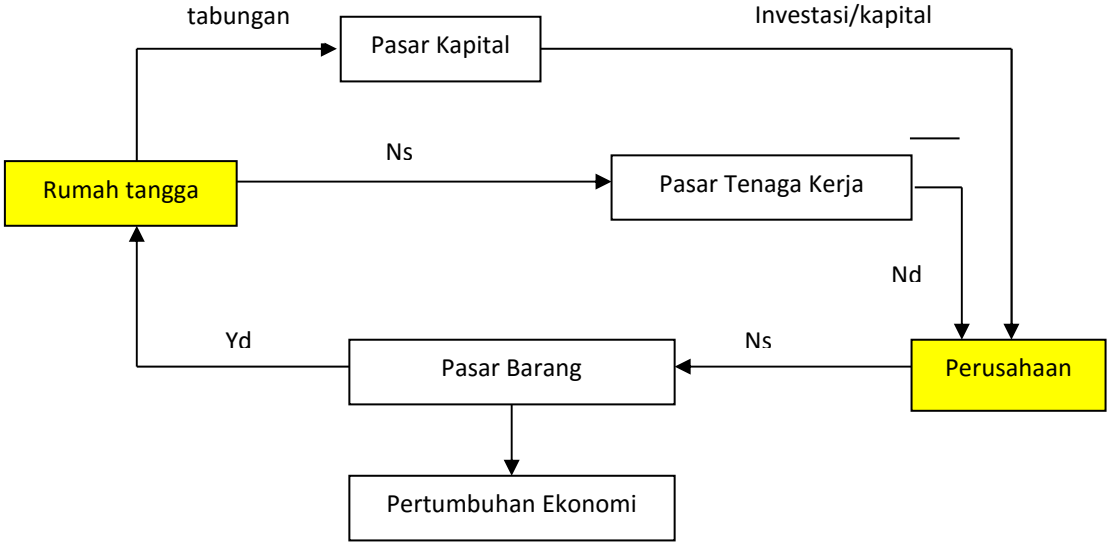


Gambar 1.Kerangka Analisis

IV. PEMBAHASAN

A. Pendekatan Makro Ekonomi Keynessian bagi Pembangunan Pulau-pulau Kecil

Dengan menggunakan kerangka analisisis ekonomi makro Keynessian, hubungan antara pertumbuhan output kawasan pulau-pulau kecil dengan peningkatan jumlah tenaga kerja setempat yang bekerja digambarkan secara mekanistis sebagai berikut (Lihat Gambar 1). Suatu perusahaan atau unit usaha di sektor kepariwisataan membuat produk dan menjualnya (Ys) di pasar setempat dan pasar eksternal, sedangkan rumah tangga baik yang berasal dari dalam kawasan pulau-pulau kecil maupun luar membelinya (Yd).



Gambar 2. Hubungan antara Pertumbuhan Output Pulau-Pulau Kecil dengan Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja di Pulau-Pulau Kecil

Melalui mekanisme pasar output dapat terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan di dalam ekonomi kawasan pulau-pulau kecil, dan harga output terbentuk serta jumlah output yang diperlukan pasar dapat ditentukan. Di pasar tenaga kerja, rumah tangga di kawasan pulau-pulau kecil menawarkan jasanya sebagai tenaga kerja (Ns) dan perusahaan yang bergerak di sector tertentu membelinya. Lewat mekanisme pasar tenaga kerja terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dan harga (upah/gaji) terbentuk dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan bisa ditentukan.

Apabila permintaan atau konsumsi rumah tangga di pasar output meningkat (Yd), misalnya karena peningkatan pendapatan masyarakat pulau-pulau kecil, maka produksi dari sisi penawaran di pasar output di pulau-pulau kecil juga meningkat (Ys), dan terjadilah pertumbuhan output. Keadaan ini terjadi dengan asumsi bahwa kapasitas produksi yang ada belum sepenuhnya dipergunakan dan tingkat fleksibilitas penawaran sangat tinggi,. Apabila di semua pasar output di pulau-pulau kecil dan di pasar kawasan sekitarnya (kawasan yang lebih luas) terjadi peningkatan output yang diproduksi oleh unit-unit usaha yang berlokasi di pulau-pulau kecil, maka secara agregatif terjadi pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau kecil. Dengan dimisalkan rasio harga faktor produksi konstan dan teknologi tidak tidak berubah, untuk memenuhi permintaan rumah tangga yang meningkat di pasar output perusahaan kepariwisataan yang bersangkutan memerlukan ekstra tenaga kerja untuk bisa memproduksi ekstra output yang diminta tersebut. Ini berarti permintaan terhadap tenaga kerja di pasar tenaga kerja bertambah (Nd).

Implikasi dari peningkatan input dari factor produksi akan menciptakan tambahan output kapasitas produksi yang ditawarkan. Hal ini berarti peluang bagi terciptanya kesempatan kerja baru melalui pemanfaatan faktor produksi tenaga kerja untuk tambahan produksi akibat tambahan input produksi tersebut. Jadi tambahan input factor produksi berhubungan secara linier dengan kapasitas output produksi sektoral yang dapat diciptakan.

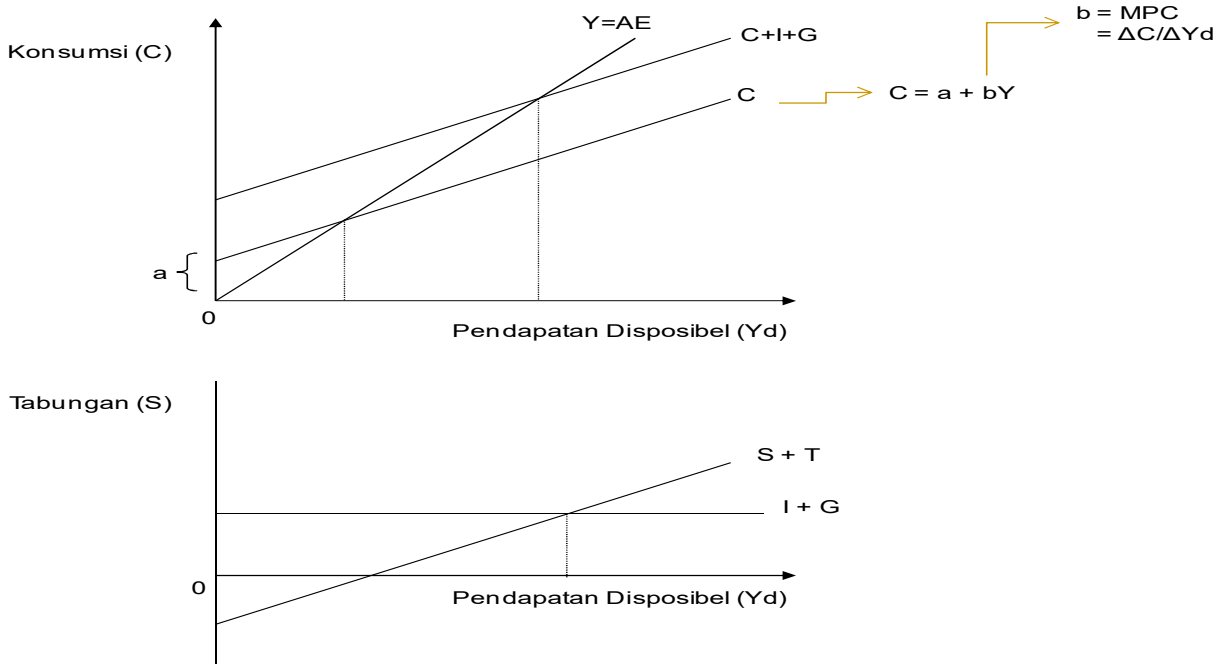
Permasalahannya adalah pada investasi yang akan dilakukan di pulau-pulau kecil seyogyanya melibatkan banyak komponen pelaku (perusahaan) baik bersifat publik maupun privat. Investasi yang dilakukan oleh publik melalui kebijakan fiskal, secara langsung dampak yang ditimbulkan dapat terlihat dari besarnya nilai investasi yang digunakan yaitu berupa pengeluaran pembangunan dan secara tidak langsung

terlihat dari besarnya nilai upah/gaji yang diberikan akibat investasi tersebut pada komponen (rumah tangga) yang terlibat di dalam kawasan pulau-pulau kecil.

Sebagai gambaran, apabila dilakukan investasi sebesar satu miliar misalnya dan diketahui nilai kecenderungan berkonsumsi (MPC) sebesar (0,8), maka kebijakan publik karena pengeluaran pembangunan akan mempunyai dampak berganda sebesar lima miliar. Sementara itu melalui pengeluaran untuk gaji akan menghasilkan dampak berganda sebesar empat miliar. Gambaran di atas untuk pengeluaran pembangunan publik (Δ G) formulasinya adalah (1/1-MPC x Δ G), sedangkan untuk gaji/upah (Δ W) formulasinya adalah (MPC/1-MPC x Δ W).

Kecenderungan berkonsumsi (MPC) merupakan perbandingan antara perubahan dalam konsumsi dengan perubahan pendapatan. Ada dua daerah yang muncul dalam kaitan perbandingan ini, yaitu daerah yang disebut sebagai "dissaving" dan "saving". Posisi dissaving berada di sebelah kiri ekuilibrium yang berarti C > Yd. Sementara saving berada di sebelah kanan ekuilibrium yang berarti C < Yd. Ada dua pilihan dalam kondisi C < Yd, yaitu melakukan konsumsi pada sektor lain yang bersifat tambahan atau pelengkap dari kebutuhan sebelumnya atau melakukan tabungan sebagai investasi. Biasanya tambahan konsumsi pada sektor primer relatif lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi pada sektor sekunder maupun tersier. Hal ini adalah sebagai cermin dari pemenuhan tingkat kepuasan.

Kedua hal ini yaitu konsumsi dan investasi merupakan penentu pertumbuhan kawasan. Adapun gambaran tentang fungsi konsumsi dijabarkan pada tampilan berikut.



Gambar 3. Fungsi Konsumsi dan Fungsi Tabungan

B. Mekanisme Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Pulau-pulau Kecil

Selain konsumsi masyarakat, investasi dunia usaha berperan dalam mekanisme pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), peran dari sektor publik sebagai pelaku ekonomi khususnya belanja pemerintah juga dapat menentukan pertumbuhan kawasan. Dengan pengertian seperti ini pulau-pulau kecil sebagai salah satu kawasan yang relatif penting secara geostrategis pembangunan bisa ditumbuhkembangkan melalui belanja publik tadi.

Strategi pengembangan pulau-pulau kecil bila dilakukan dengan pendekatan konvensional tidak dapat secara cepat berkembang. Hal ini terjadi mengingat pulau-pulau kecil aksesibilitasnya dengan pusat-pusat pertumbuhan masih banyak yang belum memadai. Dengan demikian maka pendekatan pembangunan seyogyanya diorientasikan pada upaya pemerataan. Salah satu bentuk upaya pemerataan ini adalah sistem alokasi berupa kebijaksanaan fiskal.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan melalui APBN yang mempunyai dua sisi yaitu sisi pengeluaran dan sisi pendapatan. Sisi pengeluaran tediri dari tiga pos yaitu: (1) pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa; (2) pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, (3) pengeluaran "transfer payment" seperti subsidi, pembayaran pensiun, dan lain-lainnya. Sisi pemasukan terdiri dari: (1) pajak, (2) pinjaman masyarakat, (3) pinjaman luar negeri, (4) pinjaman bank sentral (Boediono, 1986).

Pengeluaran pemerintah ini dapat memberi dampak makro pada ekonomi penduduk, karena pemerintah mengedarkan "uang inti" kepada masyarakat (Samiadji, 1994). Melalui kegiatan ini terjadi peningkatan permintaan agregat (Z), tingkat harga (P) dan tingkat produksi (Q). Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa (G) alan menggeser kurve Z dan akan menentukan P dan Q yang baru. Sekanjutnya P dan Q baru akan mempengaruhi permintaan uang (L) dan selanjutnya perubahan L akan mengubah tingkat bunga (r), P dan Q. Perubahan ini berlangsung secara siklus pertama, kedua, ketiga sampai tercapai keseimbangan. Kenaikan G pada putaran pertama terjadi perubahan Z sebesar:

$$Z = (1\text{-}c)^{-1}.G$$

Kelipatan $(1\text{-}c)^{-1}$ dikenal sebagai faktor pelipat, dimana c adalah *marginal propensity to consume* (MPC) yang besarnya $0<c<1$.

Dengan pola yang sama, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai (W) dan *transfer of payment* (R) akan mempengaruhi permintaan agregat (Z) dengan perubahan sebesar:

$$Z = (1\text{-}c)^{-c}.W$$

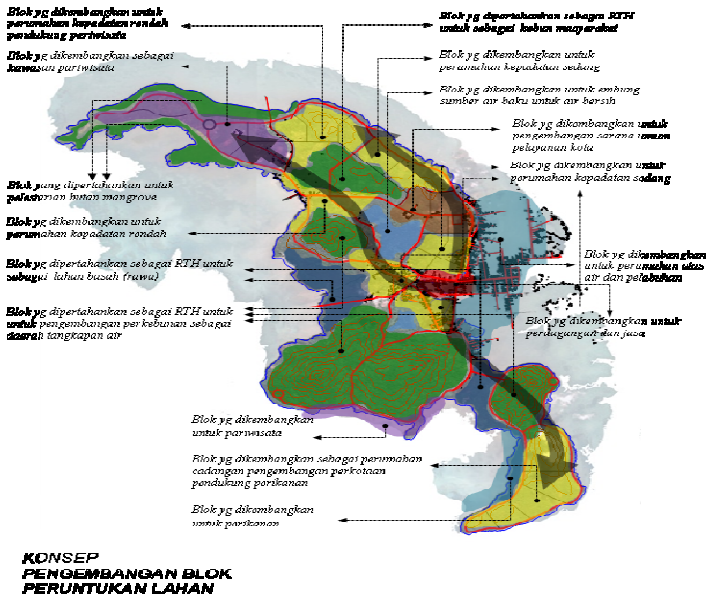
$$Z = (1\text{-}c)^{-c}.R$$

Faktor pelipat untuk W dan R yaitu $(1\text{-}c)^{-c}$ lebih kecil dari *multiplier* untuk pembelian barang dan jasa (G) yaitu $(1\text{-}c)^{-1}$.

Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penambahan peredaran uang (uang inti) akan meningkatkan volume ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Uang inti melalui alokasi fiskal yang bersumber dari pembiayaan publik dapat berbentuk belanja barang dan jasa, gaji pegawai maupun *transfer payment.*

Pada kasus di Pulau Sedanau di Kabupaten Natuna sebagai ilustrasi sampel misalnya, anggaran publik yang berasal dari sumber Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat ditelusuri melalui alokasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD Kecamatan Bunguran Selatan. Pulau Sedanau dalam hal ini adalah pusat pemerintahan dari Kecamatan Bunguran Selatan. Jika dianggap bahwa Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sedanau sebagai fungsi dari Renstra OPD Kecamatan Bunguran Selatan maka kumulatif dari jumlah uang beredar yang berada di Pulau Sedanau dapat dikalkulasikan.

Penjabaran pemanfaatan ruang yang menguraikan perwujudan besaran anggaran dapat ditelusuri dari rencana jaringan prasarana dan rencana pola ruangnya. Merujuk pada RDTR Sedanau diilustrasikan sebagai berikut:



Sumber: Draft RDTR Sedanau (2017)

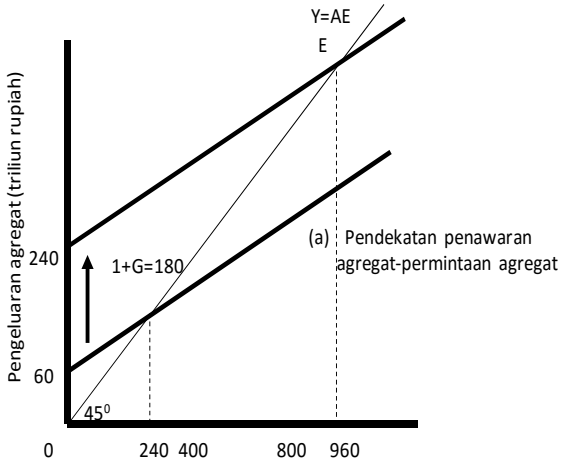
Gambar 4. Rencana Pola Ruang dan Jaringan Prasarana Pulau Sedanau

Berdasarkan rencana tata ruang Pulau Sedanau, dikaitkan dengan rujukan pada Gambar 3 di atas, jika diketahui bahwa:

C = 60 + 0,75Y dan S = -100 + 0,25Y
T = 40,
I = 120,
G = 60.

Dengan demikian pendapatan Pulau Sedanau pada keseimbangan adalah

Y = C + I + G
= 60 + 0,75Y +120 + 60
0,25Y = 240
Y = 960

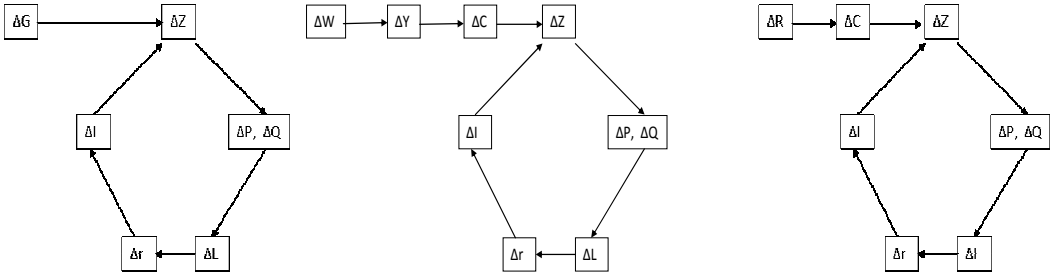


Gambar 5. Keseimbangan Pendapatan Pulau Sedanau

Tabel 1. Pengaruh Pajak Tetap ke Atas Konsumsi dan Tabungan RT

Y	T	C	S	I	G	AE=C+I+G	Keadaan Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0	40	60	-100	120	60	240	EKSPANSI
240	40	240	-40	120	60	420	
480	40	420	20	120	60	600	
720	40	600	80	120	60	780	
960	**40**	**780**	**140**	**120**	**60**	**960**	**SEIMBANG**
1200	40	960	200	120	60	1040	KONTRAKSI
1440	40	1040	260	120	60	1220	

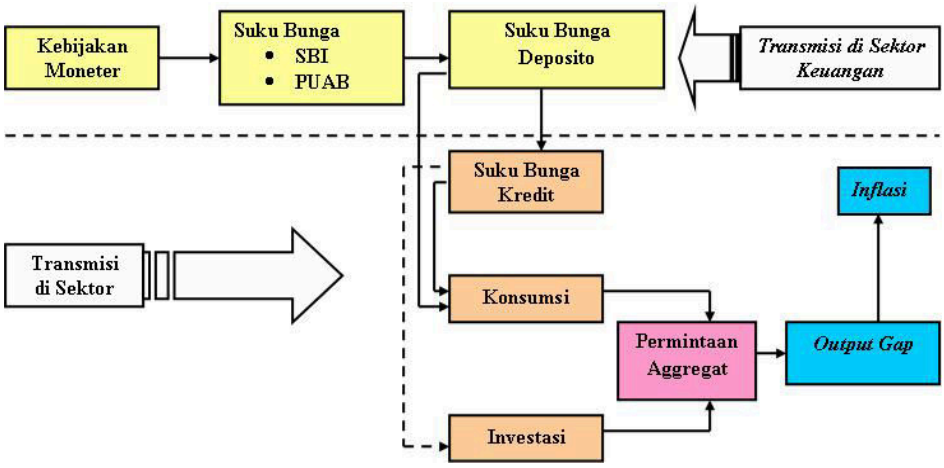
Kaitan antara kebijakan fiskal untuk pengembangan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dengan peran kebijakan moneter. Hal ini berkaitan dengan besarnya peredaran uang dalam suatu ruang. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan pulau-pulau kecil melalui sistem alokasi pembiayaan dapat ditempuh dengan penerapan kebijakan fiskal. Peran kebijakan moneter oleh bank sentral dalam konteks ini adalah melalui kebijakan penetapan uang beredar yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan memberikan porsi yang pro pada peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat yang terkait dengan kondisi pulau-pulau kecil adalah melalui pembelian barang dan jasa, gaji pegawai dan *transfer of payment*.



Pembelian barang dan jasa | Gaji pegawai | *Transfer payment*

Gambar 6. Permintaan Agregat

Konsekunesi secara tidak langsung dari peran kebijakan moneter oleh bank sentral terhadap pasar uang karena adanya pembiayaan (pinjaman) pemerintah adalah jumlah uang beredar pada masyarakat. Kenaikan uang beredar akan menurunkan tingkat bunga (r) dan selanjutnya meningkatkan pengeluaran investasi (I). Kenaikan I melalui proses berlipat akan meningkatkan permintaan agregat.



Gambar 7. Mekanisme Transmisi Moneter Saluran Suku Bunga

V. KESIMPULAN

Pendekatan fiskal dapat dijadikan model pengembangan pulau-pulau kecil karena berorientasi pada sistem alokasi pemerataan. Pertumbuhan ekonomi pulau-pulau kecil yang relative secara geografis terpencil, skala ekonomis terbatas maka pada tahap awal diperlukan stimulant dari komponen belanja pemerintah. Melalui belanja pemerintah akan terjadi proses *multiplier effect* pada kawasan tersebut. Untuk mengaplikasikan pendekatan ini maka dukungan perbankan baik bank sentral maupun bank umum dalam domain kebijakan moneter sangat menentukan karena mempengaruhi kebijakan tersebut melalui otoritasnya sebagai penentu jumlah uang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

Boediono, 1986. Ekonomi Makro, BPFE-UGM. Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, 2017, Draft Rencana Detail Tata Ruang Sedanau.

Dahuri, R., S. P. Ginting, J. Rais, M. J. Sitepu, 1996, Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pulau-pulau kecil dan Lautan secara Terpadu, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 2000. Konsepsi Pendekatan Penataan Ruang dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, makalah pada Temu Pakar "Penyusunan Konsep Tata Ruang Pulau-pulau Kecil", Jakarta.

_____, 2000, Konsep Pengembangan Wilayah Pulau-pulau kecil dan Pulau-pulau Kecil, makalah pada Kegiatan Apel Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Surabaya.

Samiadji, Bambang T., 1994, Pendekatan Fiskal untuk Pengembangan Daerah Frontier, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 5 No. 4-11. Februari 1994.

Sugiono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung

Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 mengenai Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat

Dampak Pariwisata terhadap Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep

Heru Purboyo HP[1], Khairatul Ummah[1]

[1]PWK-SAPPK, ITB
Email: herupur@pl.itb.ac.id; purboyohp@gmail.com

Masyarakat yang tinggal di pulau kecil memiliki banyak keterbatasan dalam kehidupannya, mulai dari aksesibilitas yang sulit, ketergantungan yang tinggi terhadap hasil tangkapan ikan, kemiskinan, dsb. Meskipun demikian, pulau kecil memiliki keindahan alam yang luar biasa sehingga menjadikannya sebuah daya tarik wisata seperti yang terjadi di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep. Pariwisata dipandang sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penghidupan berkelanjutan masyarakat setempat. Riset ini bertujuan untuk menganalisis dampak kegiatan pariwisata terhadap penghidupan berkelanjutan masyarakat Pulau Gili Labak. Langkah yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi aset penghidupan masyarakat setempat. Penilaian aset penghidupan dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai responden. Aset penghidupan terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal finansial. Hasilnya, dampak paling baik terdapat pada modal alam dan modal sosial.

Kata kunci: dampak pariwisata, penghidupan berkelanjutan, pulau gili labak, sumenep

I. PENDAHULUAN

A. Pariwisata Pulau dan Dampaknya bagi Warga

Menurut Yoeti (2008), terdapat 2 dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan pariwisata, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tersebut berupa meningkatnya perekonomian daerah dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Sedangkan dampak negatif terjadi pada aspek sosial budaya dan aspek lingkungan. Pada aspek sosial budaya, dampak negatif terjadi akibat pertemuan budaya masyarakat lokal dengan budaya yang dibawa wisatawan serta interaksi keduanya. Sedangkan pada aspek lingkungan hidup, dampak negatif berkaitan dengan pencemaran limbah dan eksploitasi alam. Meskipun demikian, menurut Ramos,dkk (2016) tidak selamanya pariwisata menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Dari hasil penelitiannya di Battle Harbour, pariwisata justru memberikan dampak positif dengan melindungi sejarah dan budaya lokal. Itu dikarenakan situs pariwisata tersebut menceritakan sejarah penting kawasan tersebut, memberikan refleksi budaya, serta membuat pengunjung menghargai lingkungan setempat.

Shareef (2003) mengungkapkan bahwa pulau kecil memiliki kondisi ekonomi berbeda karena terbatasnya sumberdaya alam yang berasal dari laut dan darat. Tumbuhnya pariwisata menjadi sumber kegiatan ekonomi yang diandalkan. Perbedaan juga dimiliki pulau kecil adalah adanya keragaman etnis, sistem politik, pengalaman sejarah, kerentanan ekonomi dan lingkungan, kerapuhan ekologi, serta jenis risiko menghadapi investor swasta.

Butle, dalam Nerd (2017) menjelaskan hubungan antara pembangunan pariwisata dengan masyarakat lokal ke dalam 6 (enam) tahapan evolusi, yaitu 1.*exploration,* yaitu tahap ketika masih sedikit wisatawan yang berkunjung dengan fasilitas seadanya (sangat sedikit bahkan tidak ada), 2.*involvement* adalah tahap di mana masyarakat lokal mulai terlibat dalam pariwisata, atraksi dan fasilitas mulai

terbangun (seperti penginapan), dan mulai berkembang musim wisatawan, 3.*development* merupakan tahapan yang terjadi ketika jumlah wisatawan pada musim puncak dapat melebihi jumlah populasi masyarakat lokal, 4.*consolidation*, yaitu tahap ketika pertumbuhan pariwisata melambat namun jumlah wisatawan tetap tinggi, dan pariwisata tidak disenangi dan ditentang masyarakat lokal, 5.s*tagnation* adalah masa jenuh, yaitu ketika jumlah wisatawan mencapai puncaknya, daya dukung sudah tercapai bahkan lebih, pariwisata menyebabkan permasalahan lingkungan sosial-ekonomi, 6.*decline* terjadi apabila pariwisata sudah tidak mampu lagi bersaing, fasilitas wisata digantikan oleh kegiatan non-wisata, dan semakin lama akan menjadi pariwisata kumuh. Selain Decline, juga bisa terjadi Rejuvenation atau peremajaan dengan mengubah samasekali atraksinya dan menemukan kembali daya tarik baru.

Menurut Crompton (1993), terdapat 4 (empat) reaksi perilaku masyarakat lokal terhadap pariwisata di lingkungannya, yaitu 1.*embracement*, yaitu masyarakat sangat welcome dengan kehadiran wisatawan, 2.*tolerance*, yaitu masyarakat menyadari sisi positif dan negatif dari pariwisata sehingga ada elemen yang disukai maupun tidak disukai, 3.*adjustment*, yaitu masyarakat lokal terbiasa dengan kegiatan pariwisata bahkan seringkali mengganti jadwal aktivitasnya untuk menghindari keramaian wisatawan, 4. *withdrawal*, yaitu masyarakat mulai menarik diri dari komunitasnya.

B. Pariwisata Gili Labak sebagai Pilihan Penghidupan Berkelanjutan Masyarakatnya

Sebagai wilayah yang berada paling timur di Kepulauan Madura, Kabupaten Sumenep memiliki potensi pesisir yang luas dengan terdiri dari 126 pulau. Pariwisata menjadi sektor yang gencar dikembangkan oleh pemerintah setempat, salah satunya dengan program Visit Sumenep 2018 yang menargetkan 1 juta kunjungan wisatawan (Lismari, 2017). Arus kunjungan wisatawan ke Pulau Madura terus meningkat karena adanya Jembatan Suramadu (Sulistiowati, 2015). Pulau Gili Labak merupakan daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumenep yang populer sejak 3 tahun terakhir. Kepopuleran objek wisata tersebut akibat peran dari media sosial, media cetak, dan banyaknya blog yang dibuat oleh pengunjung yang pernah berkunjung ke Pulau Gili Labak. Dengan mengandalkan keindahan taman laut yang dimiliki, wisata Gili Labak telah menarik pengunjung domestik maupun pengunjung mancanegara. Menurut Hidayat (2016), jumlah pengunjung Gili Labak pada Januari-Maret 2016 mencapai 9.660 orang.

Permasalahan keterbatasan aksesibilitas yang jauh dari pusat pelayanan menjadi kendala utama yang dialami masyarakat. Mereka harus menempuh perjalanan laut dengan menghabiskan bahan bakar solar yang mahal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Prospek pariwisata di Gili Labak yang cukup menjanjikan dapat memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam sektor pariwisata guna memperoleh keuntungan, dan peluang tebangunnya fasilitas, hingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

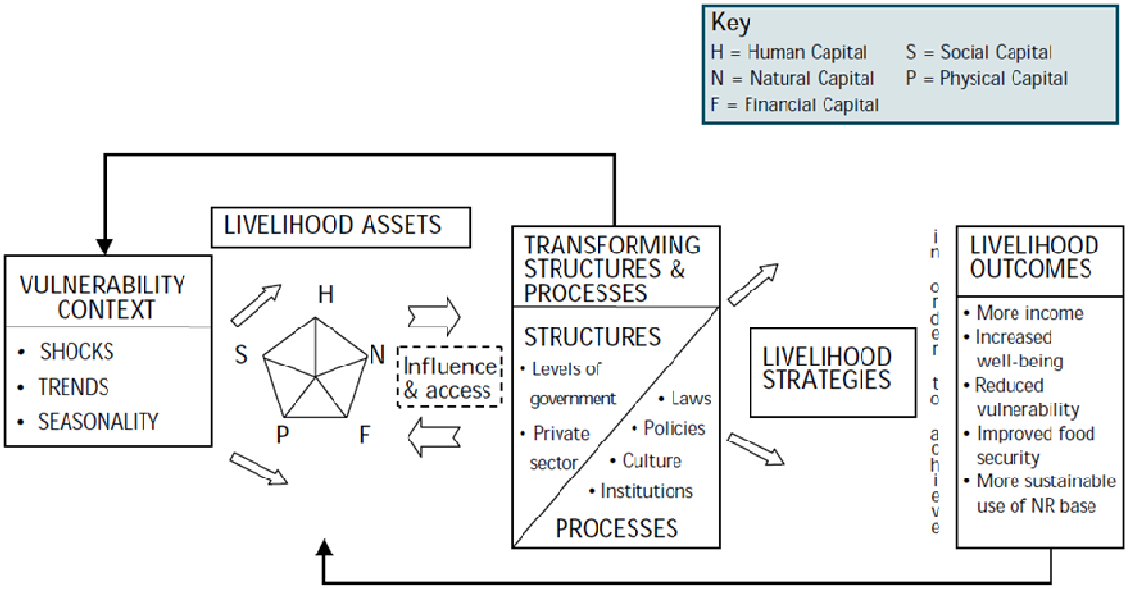
Permasalahan juga terjadi sejak pariwisata tersebut mulai ramai. Wisatawan mancanegara yang berkunjung dengan mengenakan pakaian mini menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat karena dikhawatirkan dapat menodai budaya lokal (Wirananda, 2016). Selain permasalahan tersebut, pada tahun 2015 telah ada upaya pengajuan kepemilikan Pulau Gili Labak oleh 3 orang warganya. Permintaan tersebut ditolak karena secara administrasi, tanah Gili Labak milik negara (Jawa Pos Radar Madura, 2015). Pembangunan penginapan tanpa pengajuan izin ke Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menambah permasalahan yang terjadi setelah perkembangan pariwisata di pulau tersebut (Arifin, 2016).

Berbagai permasalahan yang terjadi baik yang telah dialami masyarakat, maupun permasalahan-permasalahan yang muncul setelah pariwisata berkembang

menjadi tantangan bagi masyarakat Gili Labak. Di sisi lain, mereka harus mampu melanjutkan hidupnya bahkan untuk keturunan mereka. Makalah ini mencoba mengungkapkan dampak pariwisata terhadap penghidupan berkelanjutan masyarakat setempat.

C. *Sustainable Livelihood dalam Konteks Pariwisata*

Menurut *Department for International Development/ DFID* (1999) penghidupan berkelanjutan adalah penghidupan terdiri dari kapabilitas, aset (material dan sosial), dan aktivitas yang dilakukan untuk hidup. Penghidupan dikatakan berkelanjutan apabila dapat mengatasi dan pulih dari tekanan dan guncangan, mempertahankan atau meningkatkan kapabilitas dan asetnya untuk sekarang dan masa yang akan datang dengan tidak merusak sumberdaya alam yang ada. Elemen pokok dalam kerangka yang dirumuskan oleh DFID adalah sebuah struktur analitis untuk memahami secara luas dan sistematis mengenai berbagai faktor yang membatasi atau meningkatkan peluang penghidupan serta menunjukkan hubungan satu dengan lainnya.



Gambar 1. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan

Kerangka kerja penghidupan berkelanjutan menjadikan masyarakat sebagai fokus utama. Penghidupan masyarakat bersifat dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak selamanya seimbang. Salah satu penyebab kedinamisan tersebut adalah konteks kerentanan. Kerentanan yang dimaksud dapat berupa kegiatan yang sebelumnya tidak ada dalam kehidupan masyarakat. Kerentanan ini menimbulkan terjadinya intervensi terhadap sistem penghidupan masyarakat. Pada riset ini, pariwisata digunakan sebagai konteks kerentanan yang bersifat *shocks.* Pariwisata hadir dalam penghidupan masyarakat Giri Labak dan kemudian menjadi populer dalam waktu singkat.

Aset penghidupan menunjukkan kekuatan dan kelemahan masyarakat. Aset penghidupan terdiri dari 5 jenis modal, yaitu manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial. Modal manusia terdiri atas ketrampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja, dan kondisi kesehatan yang baik. Kesemuanya dapat memungkinkan masyarakat untuk menggunakan berbagai strategi dalam mencapai tujuan penghidupannya. Modal sosial adalah segala sumber sosial yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuan penghidupannya. Hal tersebut dapat dilihat dari jaringan dan

keterhubungan, keanggotaan warga dalam kelompok formal dan kerjasama yang terdapat di masyarakat. Modal alam bersifat sangat luas, mulai dari barang publik yang tidak akan habis (atmosfer dan keanekaragaman) sampai pada sumberdaya untuk keperluan produksi (pohon, lahan, dsb). Modal fisik terdiri dari lingkungan fisik (infrastruktur) yang membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan berfungsi untuk menambah produktivitas. Komponen modal fisik misalnya adalah transportasi, bangunan yang aman, pasokan air bersih, listrik, dan komunikasi. Modal finansial berupa 2 sumber, yaitu modal tersimpan dan pemasukan rutin. Modal tersimpan dapat berupa uang tunai, deposito bank, atau aset cair seperti perhiasan dan ternak. Sedangkan pemasukan rutin adalah seperti transfer dari pemerintah.

Struktur dan proses terdiri atas institusi, organisasi, kebijakan, dan peraturan yang membentuk penghidupan. Struktur dan proses bekerja pada semua tingkatan, mulai dari tingkat rumah tangga sampai pihak-pihak luar yang terlibat. Mereka bisa berupa sektor publik atau pemerintahan dan juga swasta.

Strategi penghidupan berupa kesempatan yang tersedia, pilihan kegiatan, dan atau keputusan atau kesepakatan warga atas hal-hal tertentu yang muncul. Strategi tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami guna mencapai hasil akhir penghidupan yang diharapkan (livelihood outcomes).

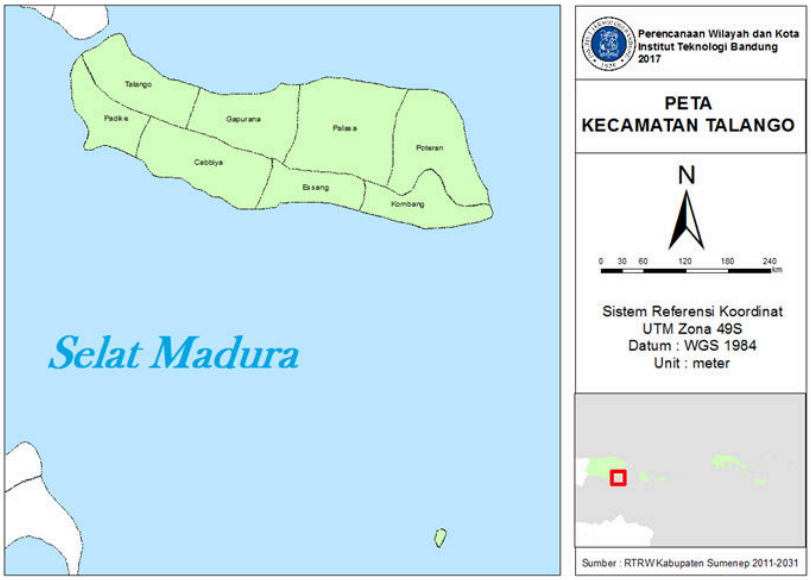
Outcome penghidupan merupakan capaian dari strategi penghidupan. Pada riset ini, *outcome* merupakan dampak yang ditimbukan dari perkembangan pariwisata di Pulau Gili Labak.

II. METODE

A. Konteks Riset: Gili Labak di Kabupaten Sumenep dan Kepulauan Madura

Kabupaten Sumenep merupakan suatu wilayah administrasi di Jawa Timur dan juga merupakan bagian dari Kepulauan Madura. Kabupaten Sumenep terdiri dari 126 pulau. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan di kabupaten Sumenep sebanyak 674.926 orang.

Kabupaten Sumenep mempunyai luas wilayah 2.093,47 km2. Pulau Gili Labak merupakan salah satu pulau kecil dari 125 pulau lain. Gili Labak terletak jauh berada di sebelah Selatan kabupaten Sumenep. Terdapat 37 keluarga bertempat tinggal di pulau tersebut yang memiliki luas mencapai 14 hektar. Seluruh keluarga yang ada bergabung menjadi satu rukun tangga, yaitu RT 05 RW 03 dan termasuk dalam desa Kombang, kecamatan Talango.



Gambar 2. Peta Kecamatan Talango

Akses menuju Pulau Gili Labak tidak begitu sulit. Tetapi karena letaknya yang jauh dari perkotaan sekaligus terpisahkan oleh lautan menyebabkan waktu tempuh menjadi panjang. Bagi wisatawan dan pengunjung yang berangkat dari Pulau Jawa, maka perjalanan dimulai dari Kota Surabaya. Butuh waktu 6 jam untuk tiba pulau Gili Labak.

B. Metode Survey

Terdapat 2 (dua) jenis metode pengumpulan data yang akan dipakai, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data sekunder digunakan peneliti untuk mencari landasan teori dan gambaran umum. Jurnal dan paper, media populer, serta dokumen resmi merupakan sumber data sekunder yang digunakan peneliti.

Sumber data primer yang digunakan terdiri dari:

1. Kuesioner

Kuesioner berisi sejumlah daftar pernyataan singkat. Responden diminta memberikan penilaian antara 1-5 pada setiap pernyataan. Nilai 1 berarti tidak setuju, nilai 2 berarti kurang setuju, nilai 3 berarti biasa saja, nilai 4 berarti setuju, dan nilai 5 berarti sangat setuju. Daftar pernyataan berkaitan dengan dampak kegiatan pariwisata terhadap aset penghidupan masyarakat yang terdiri dari modal manusia, modal sosial, modal alam, modal fisik, dan modal finansial. Responden adalah mereka yang merupakan satu perwakilan untuk setiap keluarga yang saat survey dilakukan berada di Pulau Gili Labak dan sudah cukup umur.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai perubahan struktur dan proses yang mempengaruhi penghidupan masyarakat. Narasumber yang dipilih adalah Kepala Rukun Tetangan dan anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Peneliti membangun relasi yang baik dengan narasumber dengan menyampaikan maksud riset dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang umum atau ringan terlebih dahulu secara tidak terstruktur. Jika percakapan dirasa berjalan dengan baik, peneliti mengubah teknik menjadi wawancara terstruktur dengan mulai menanyakan opini narasumber dan menggali lebih dalam terkait apa yang ingin diketahui. Wawancara juga dilakukan terhadap instansi terkait, yaitu Bappeda dan Disparbudpora Kabupaten Sumenep.

3. Observasi

Teknik ini dilakukan guna mendapatkan informasi tambahan, seperti pengamatan langsung terhadap aktivitas masyarakat, keberadaaan infrastruktur, kualitas sumberdaya alam, dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Warga Gili Labak

Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan tersebut telah berlangsung sejak lama yang konon turun temurun dari nenek moyang mereka. Berdasarkan cerita masayarakat, berkembangnya permukiman di pulau Gili Labak bermula dari nenek moyang mereka yang merupakan pelaut, yang singgah di pulau tersebut dalam perjalanannya mencari ikan. Awalnya singgah dilakukan hanya sementara, sebagai ristirahat sambil menunggu hingga cuaca baik kembali. Kemudian di antara yang singgah ada yang tinggal dan menetap. Semakin lama yang tinggal semakin banyak sehingga menjadi sebuah permukiman.

Nelayan berangkat ke tengah laut pagi hari kemudian pulang pada siang atau sore hari. Waktu pulang tergantung pada cuaca dan musim ikan. Menangkap ikan dilakukan secara manual menggunaan jaring-jaring maupun dengan memasang perangkap ikan di dasar laut. Jika tangkapan ikan sudah dirasa cukup banyak, mereka akan menjualnya ke pulau-pulau sekitar. Mereka juga menyisihkan beberapa ikan untuk

diolah sendiri sebagai pelengkap nasi. Bagi warga lain yang tidak bekerja sebagai nelayan (biasanya ibu-ibu), akan memulai hari dengan membersihkan lingkungan rumahnya dan area pantai. Kesibukan mereka kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci, dan beristirahat. Pada malam hari, beberapa warga ada yang langsung beristirahat di dalam rumah dan ada pula yang berkumpul bersama sambil bercengkerama dengan tetangga terdekatnya. Obrolan bisa berlangsung terus sampai menjelang waktu tidur. Satu per satu warga mulai masuk ke dalam rumah. Ada juga warga yang tidak beranjak kembali ke rumah dan tidur di tempat yang sama.

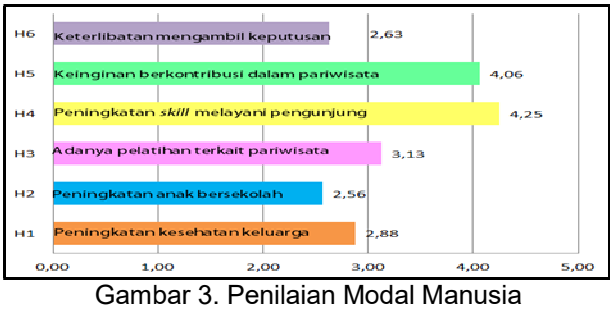
B. Pengunjung/ Wisatawan Gili Labak

Pada bulan-bulan Januari-Maret tahun 2016, jumlah wisatawan di Gili Labak mancapai 9.660 orang. Sebagian besar dari wisatawan hanya singgah beberapa jam saja. Namun, saat weekend dan libur panjang biasanya akan lebih banyak wisatawan yang menginap. Bagi wisatawan yang ingin menginap, beberapa warga telah menyediakan penginapan kecil yang bisa ditempati secara rombongan. Selain di penginapan, wisatawan juga bisa bermalam dengan mendirikan tenda di pinggir pantai.

C. Aset Penghidupan

1. Modal Manusia

Berdasarkan gambar 3, dampak paling baik terjadi pada peningkatan kemampuan melayani pengunjung dengan skor 4,25. Hal tersebut dapat terlihat bagaimana masyarakat setempat menyambut ramah pengunjung. Kemudian keinginan berkontribusi dalam sektor pariwisata juga besar dengan skor 4,06. Namun, hanya sekelompok warga saja yang dapat memiliki usaha di bidang pariwisata karena warga lainnya terkendala oleh modal. Pelatihan-pelatihan juga didapatkan, salah satunya adalah pelatihan ekowisata oleh PT Santos. Sedangkan pada kesehatan keluarga dan jumlah anak bersekolah cenderung tidak ada perubahan karena untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat harus pergi ke pulau seberang. Tidak ada fasilitas pendidikan dan kesehatan sama sekali di Gili Labak. Keduanya mendapatkan skor berturut-turut 2,88 dan 2,56. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dinilai rendah, yaitu 2,63. Selama ini, kebijakan yang telah diputuskan Pemerintah disampaikan kepada Kepala Desa kemudian dilanjutkan ke Ketua RT Gili Labak dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang beranggotakan 11 orang. Panjangnya rantai birokrasi tersebut membuat informasi yang disampaikan tidak merata ketika diterima oleh masyarakat setempat.

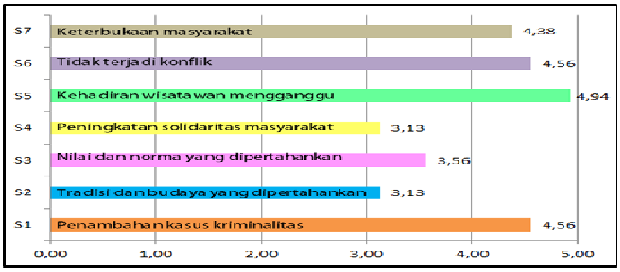


Gambar 3. Penilaian Modal Manusia

Skor rata-rata yang diberikan masyarakat terhadap dampak pariwisata pada modal manusia adalah sebesar 3,25. Hal ini berarti bahwa secara umum pengaruh kegiatan pariwisata terhadap modal manusia masyarakat Pulau Gili Labak cukup signifikan.

2. Modal Sosial

Berdasarkan gambar 4, kehadiran wisatawan yang tidak mengganggu, tidak terjadi konflik, kasus kriminalitas tidak bertambah, dan masyarakat yang cenderung lebih terbuka memiliki nilai tertinggi dengan skor masing-masing adalah 4,94; 4,56; 4,56; dan 4,38. Selanjutnya diikuti oleh nilai dan norma yang masih dipertahankan dengan skor 3,56, tradisi dan budaya lokal yang masih dipertahankan dan solidaritas yang meningkat dengan skor sama yaitu 3,13.



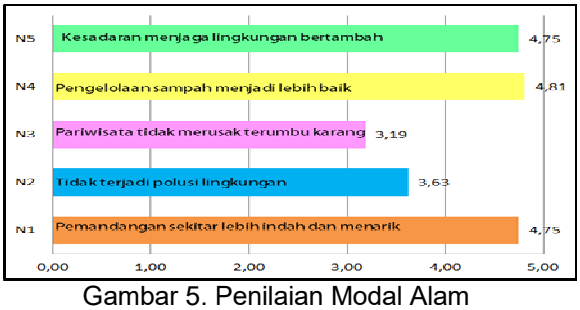
Gambar 4. Penilaian Modal Sosial

Masyarakat tidak terganggu oleh kehadiran wisatawan. Jika ada wisatawan yang mengadakan acara di Gili Labak, seperti pesta malam tahun baru, masyarakat justru ikut terhibur. Untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, acara diperbolehkan berlangsung hanya sampai pukul 22.00 WIB. Tidak terjadi pula kasus kriminalitas seperti pencurian dan mabuk-mabukan. Namun, di beberapa warung warga sudah ada yang menjual minuman keras. Sedangkan pada nilai dan norma, serta tradisi dan budaya lokal tetap terjaga karena dibuat peraturan khusus. Salah satu peraturannya adalah dengan menghimbau pengunjung untuk berpakaian sopan. Solidaritas masyarakat pun sangat erat, karena pada dasarnya mereka saling membantu ketika ada tetangganya yang kesusahan. Contohnya ketika ada seorang warga yang hendak ke pulau seberang, warga lain akan menitip belanja kebutuhan pokok untuk menghemat biaya transportasi.

Secara keseluruhan, skor yang diberikan responden mengenai dampak pariwisata terhadap modal sosial mereka adalah sebesar 4,04. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa secara umum, dampak pariwisata terhadap modal sosial masyarakat Pulau Gili Labak signifikan.

3. Modal Alam

Menurut hasil kuesioner, pengelolaan sampah yang lebih baik memiliki skor tertinggi, yaitu sebasar 4,81. Sedangkan pemandangan sekitar yang lebih indah dan lebih menarik, serta kesadaran menjaga lingkungan yang meningkat memiliki skor sama, yaitu 4,75. Selanjutnya adalah tidak terjadinya pencemaran lingkungan dan tidak ada kerusakan terumbu karang yang memiliki skor masing-masing 3,63 dan 3,19. Skor dampak kegiatan pariwisata terhadap modal alam secara keseluruhan sebesar 4,23. Maka dapat dikatakan bahwa secara umum dampaknya baik secara signifikan.

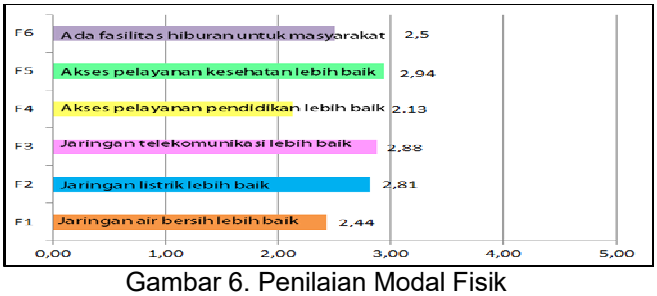


Gambar 5. Penilaian Modal Alam

Pengelolaan sampah yang baik dapat terlihat dengan tersedianya banyak tempat sampah. Selain itu, sampah organik akan ditimbun dalam tanah. Untuk sampah pastik akan dibakar. Sedangkan sampah botol akan dikumpulkan untuk dijual ke pengepul. Kesadaran dalam menjaga lingkungan oleh masyarakat ditunjukkan dengan kegiatan bersih-bersih pantai yang mereka lakukan setiap pagi seusai sholat Subuh. Pemandangan sekitar menjadi lebih indah dengan ditanamnya banyak pohon cemara. Pencemaran lingkungan tidak terjadi karena pengelolaan sampah sudah baik. Sedangkan pencemaran udara sangat sedikit dari asap api unggun dan asap pembakaran sampah. Air laut di Pantai Gili Labak juga masih sangat bersih. Kerusakan terumbu karang tidak terjadi, karena ada peraturan jika ada wisatawan yang merusak atau membawa pulang spesies karang maka akan dikenai denda.

4. Modal Fisik

Secara umum, penilaian respon mengenai dampak pariwisata terhadap modal fisik di pulau Gili Labak masih rendah yaitu dengan skor 2,61. Artinya, tidak ada perubahan antara sebelum dan sesudah sektor pariwisata berkembang di pulau mereka. Pada elemen akses mendapatkan pelayanan kesehatan lebih baik, jaringan telekomunikasi lebih baik, dan jaringan listrik yang lebih baik berturut-turut diberi skor 2,94; 2,88; dan 2,81. Selanjutnya terbangunnya fasilitas rekreasi/hiburan untuk masyarakat diberi skor 2,5, jaringan air bersih yang lebih baik diberi skor 2,44, dan akses pelayanan pendidikan lebih baik diberi skor 2,13 oleh responden.



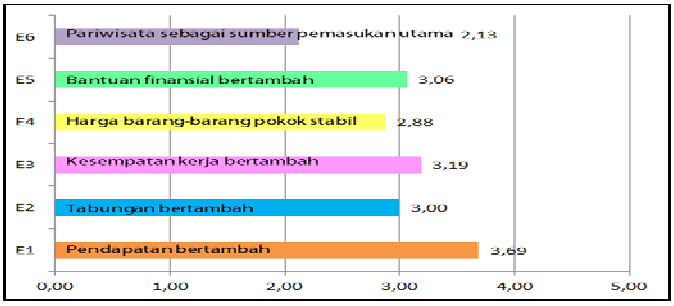
Gambar 6. Penilaian Modal Fisik

Tidak ada sarana kesehatan dan pendidikan di Pulau Gili Labak sehingga, masyarakat setempat harus ke pulau seberang untuk mendapatkan aksesnya. Seluruh anak usia sekolah tinggal di pulau seberang untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan untuk jaringan telekomunikasi, tidak ada BTS yang dibangun. Jaringan telekomunikasi hanya mengandalkan pancaran dari pulau lain, sehingga jaringannya tidak stabil. Kemudian untuk mendapatkan energi listrik, masyarakat mengandalkan panel surya yang berkapasitas kecil sehingga hanya mampu menyalakan listrik sekitar 3 jam saja. Beberapa warga ada yang membeli genset untuk menyalakan listrik lebih lama jika dibutuhkan. Begitu pula dengan air bersih, mata air yang muncul di pulau tersebut merupakan air payau, sehingga masih terasa asin. Untuk memenuhi kebutuhan MCK, mereka harus membeli air tawar di pulau seberang dengan harga Rp5.000,- per jergen/ galon kapasitas 25 liter. Untuk fasilitas rekreasi/hiburan, mereka menggunakan ranjang beristirahat untuk mengobrol dengan tetangganya. Tidak ada hiburan lain karena mereka sibuk bekerja.

5. Modal Finansial

Dapat dilihat pada gambar 7, skor tertinggi diberikan pada tambahan pemasukan yang didapatkan dari sektor pariwisata. Selanjutnya skor terhadap terbukanya kesempatan kerja, tambahan jumlah tabungan, dan bantuan finansial bertambah masing-masing adalah 3,19; 3,06; dan 3,00. Sedangkan skor terendah pada elemen kestabilan harga pokok dan pariwisata sebagai sumber pemasukan

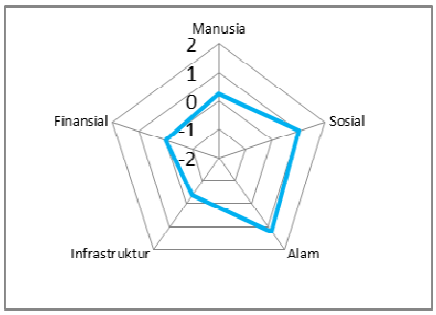
utama dengan skor 2,88 dan 2,13. Secara keseluruhan, penilaian masyarakat mengenai dampak pariwisata terhadap modal finansial adalah biasa saja, yaitu dengan skor 2,99.



Gambar 7. Penilaian Modal Finansial

Sejak pariwisata berkembang di Pulau Gili Labak, sebagian kecil masyarakat mendapatkan keuntungan dari hasil membuka usaha di bidang pariwisata, seperti warung dan penginapan. Peningkatan pendapatan mencapai Rp453.000,- setiap bulan. Jumlah tersebut kemudian bisa ditabung. Kesempatan kerja menjadi bertambah meskipun masih temporer. Misalnya penanaman cemara yang diberi upah Rp1.000,-/pohon, kegiatan kerja bakti seminggu sekali, penjaga toilet, penjaga warung, dsb. Pada dasarnya, pekerjaan utama masyarakat masih nelayan. Sektor pariwisata belum menjadi sumber pemasukan utama bagi mereka. Tidak ada bantuan finansial (cash). Bantuan yang diberikan berupa pelatihan ekowisata. Harga barang-barang pokok tergolong stabil, karena selama ini masyarakat membelinya di pulau seberang.

Untuk memudahkan peneliti dalam melihat di mana posisi masing-masing dampak terhadap modal dalam digram pentagon, maka hasil analisis per jenis modal dikonversikan dari rentang 1 sampai 5 menjadi rentang -2 sampai 2. Dengan diagram pentagon, akan dapat digambarkan dengan mudah modal mana yang memiliki dampak positif terbesar maupun modal yang belum memiliki dampak memuaskan berdasarkan perspektif responden.



Gambar 8. Diagram Pentagon Aset Penghidupan

Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa dampak kegiatan pariwisata yang paling dirasakan responden adalah dampak terhadap modal alam dan modal sosial. Sikap masyarakat yang semakin terbuka dan kondisi alam yang semakin dijaga mendapatkan perspektif positif dari responden. Sedangkan untuk dampak pariwisata terhadap modal manusia dan modal finansial tidak dirasakan begitu signifikan. Keterampilan yang dimiliki masyarakat belum dapat dimanfaatkan dalam memperoleh penghasilan secara optimal. Ditambah dengan masalah tidak meratanya keuntungan finansial yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat setempat. Sedangkan modal fisik akibat kegiatan pariwisata memiliki index yang paling rendah. Masalah keterbatasan akses dan fasilitas dasar lain merupakan masalah yang umum terjadi pada wilayah pedasaan yang cenderung terisolasi dan

terpencil.

D. Struktur dan Proses

Mereka yang terlibat dalam pariwisata di Gila Labak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta berproses dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Pada mulanya di Gili Labak, terdapat kelompok pengawas yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melihat potensi Pulau Gili Labak sebagai destinasi pariwisata, maka pada tahun 2011 Disparbudpora Kabupaten Sumenep meminta kelompok tersebut difungsikan untuk menangani pariwisata yang kemudian disebut sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis Gili Labak terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 7 anggota lain di bawahnya. Anggota kelompok bergabung secara sukarela. Mereka bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung, serta bertanggungjawab untuk mengurus pariwisata di Gili Labak.

Pemerintah setempat mendorong sektor swasta untuk menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam membangun pulau-pulau di Kabupaten Sumenep. PT Santos merupakan salah satu perusahaan migas yang beroperasi di Kabupaten Sumenep, yang mulai mendukung program pengembangan pariwisata. Indonesia Ecotourism Program bekerjasama dengan PT Santos memberikan bantuan pelatihan ekowisata di Gili Labak pada November 2016.

E. Strategi

Dalam RTRW Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, wilayah perairan laut Pulau Gili Labak ditetapkan sebagai kawasan lindung terumbu karang. Sedangkan taman lautnya ditetapkan sebagai kawasan peruntukan wisata alam. Berhubung kemudian Gili labak menjadi populer, Pemerintah menyiapkan Masterplan dan DED pulau Gili Labak. Selain itu, Pemerintah juga menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) pada tahun 2016 dan ditargetkan selesai pada tahun 2017. Direncanakan pula pembentukan UPT Pantai Gili Labak yang akan menjadi kepanjangan tangan dari Disparbudpora.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata Gili Labak, Disparbudpora Kabupaten Sumenep beberapa kali bekerjasama dengan pihak lain untuk memberikan pelatihan kepada Pokdarwis. Juga dilakukan penanaman terumbu karang, pembersihan pantai secara rutin, dan pelarangan penangkapan burung setempat. Pada 1 Agustus 2017, telah dilakukan pelepasan ribuan ekor ikan kerapu di perairan Gili Labak guna menjaga kelestariannya. Peraturan-peraturan untuk wisatawan juga ditetapkan untuk menjaga lingkungan, seperti himbauan membuang sampah pada tempatnya, pelarangan menyalakan api unggun di lokasi tertentu, serta denda bagi yang merusak terumbu karang.

Pengelolaan tiket masuk menjadi tanggungjawab Pokdarwis. Hasil penjualan tiket kemudian dikelola agar bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan Peraturan Desa Kombang, 20% dari hasil penjualan tiket menjadi milik desa, 20% untuk kas kebutuhan Gili Labak dan 60% dibagikan kepada setiap rumah tangga di Gili Labak. Kas kebutuhan Gili Labak digunakan untuk menunjang pariwisata, seperti pembayaran tenaga kebersihan, pembangunan pos jaga, dan pembuatan tempat bersantai/berteduh wisatawan. Pokdarwis dan warga setempat melakukan pertemuan rutin setiap bulannya untuk membahas bersama mengenai penjualan tiket dan hal lain yang berkaitan dengan wisata Gili Labak.

F. Livelihood Outcome

Perkembangan pariwisata memberikan perubahan terhadap Pulau Gili Labak. Beberapa warung yang menjual kebutuhan sehari-hari dan makanan mulai dibangun oleh warga setempat. Juga dibangun rumah gubuk kecil sebagai penginapan untuk

wisatawan. Tidak ada tarif tetap sewa penginapan setiap malamnya, namun biasanya untuk satu rombongan yang menempati satu gubuk penginapan dikenai tarif Rp.200.000,- sekali pakai.

Selain penginapan kecil milik warga, ada pula sebuah penginapan yang dibangun oleh bukan warga Gili Labak. Penginapan tersebut tidak memiliki izin bangunan karena lahannya bukan dimiliki oleh warga Gili Labak. Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah sebagai upaya pencegahan penjualan tanah ke pihak luar pulau. Meskipun bermasalah, penginapan tersebut tetap ditawarkan kepada wisatawan dengan tarif Rp.500.000,-/malam. Karena harga yang dinilai terlalu mahal, sangat jarang wisatawan yang menyewanya.

Secara keseluruhan, tidak banyak wisatawan yang menginap. Ketua Pokdarwis mengatakan bahwa jumlah terbanyak wisatawan yang menginap dalam satu bulan sebanyak 100 orang. Sebagian besar wisatawan hanya berkunjung setengah hari saja. Sebagian lain menginap di penginapan kecil milik warga secara rombongan dalam 1 gubuk penginapan kecil. Sebagian lain memilih untuk mendirikan tenda di pinggir pantai.

Sejak pariwisata berkembang, jenis kesempatan kerja semakin bervariasi. Jika pada mulanya pekerjaan utama warga setempat adalah nelayan, namun kemudian terdapat beberapa pekerjaan lain yang bisa dilakukan seperti menjadi penjaga toilet, tenaga kebersihan, dan penjaga warung. Bagi warga yang melakukan kegiatan bersih pantai dan lingkungan sekitar (sebagai tenaga kebersihan) akan mendapatkan upah sebesar Rp25.000,- setiap 3 jam.

IV. KESIMPULAN

Dampak perkembangan pariwisata terhadap aset penghidupan warga Gili Labak yang paling baik terjadi adalah pada modal alam dan modal sosial. Pada modal alam, pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik. Meskipun modal sosial dinilai baik, namun peneliti melihat terdapat potensi konflik sosial yang dapat terjadi. Hal tersebut berhubungan dengan adanya kecemburuan sosial yang terjadi akibat tidak meratanya keuntungan yang diperoleh dari sektor pariwisata. Hal ini terkait dengan nilai yang diberikan pada modal finansial cenderung rendah. Dampak positif yang kurang signifikan terjadi pada modal manusia. Penyebabnya antara lain tingkat pendidikan yang masih rendah dan akses mendapatkan pelayanan kesehatan yang sulit. Hal tersebut berhubungan dengan modal fisik yang bahkan dinilai sangat kurang dampaknya, karena fasilitas-fasilitas dasar belum terpenuhi.

Untuk tetap mencapai penghidupan yang berkelanjutan setelah adanya kegiatan pariwisata, maka dilakukan perubahan struktur dan proses. Berdasarkan model Butler, pariwisata di Pulau Gili Labak masih berada pada tahap kedua atau *involvement* di mana masyarakat mulai terlibat dalam sektor pariwisata. Sedangkan menurut model Ap dan Crompton, masyarakat setempat berada pada tahap pertama atau *embracement* yaitu sangat *welcome* terhadap wisatawan. Oleh karena itu, proses dan struktur dalam masyarakat pun mulai menyesuaikan terhadap sistem baru sebagai antisipasi terhadap berbagai kerentanan atau dampak negatif yang mungkin terjadi nantinya. Penyesuaian tersebut dapat dilihat dengan dibentuknya Pokdarwis dan pembuatan peraturan setempat untuk menjaga aset penghidupan yang mereka miliki. Selain itu, komitmen Pemerintah untuk mengembangkan wisata tersebut adalah dengan penyusunan RIPPDA, masterplan, dan DED. Dibentuk pula UPT Pantai Gili Labak yang akan mengelola wisata tersebut. Pada sektor privat, CSR untuk mendukung pengembangan wisata Gili Labak diberikan.

Melihat dampak positif yang lebih banyak daripada dampak negatif kegiatan pariwisata terhadap penghidupan masyarakat di Gili Labak, sebaiknya

pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan namun dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya penghidupan masyarakatnya. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk mendorong dampak positif pariwisata di antaranya dimulai dengan pelatihan ketrampilan pembuatan souvenir dan rencana produksinya, menjaga nilai dan budaya setempat, perluasan kesempatan tiap lapisan masyarakat untuk berkontribusi di sektor pariwisata sehingga dapat memperkecil kesenjangan, pemberian modal dan pendirian koperasi, serta pemenuhan infrastruktur dasar yang layak. Selanjutnya bisa dikembangkan lagi dengan penambahan infrastruktur pendukung dan jenis atraksi wisata.

Berdasarkan Ap dan Crompton, tahapan selanjutnya yang akan dialami masyarakat Gili Labak adalah tahap *tolerance.* Mereka akan menyadari sisi positif dan sisi negatif dari kehadiran wisatawan. Sedangkan berdasarkan Butler, tahap selanjutnya yang akan dihadapi adalah tahap *development* yang salah satu cirinya yaitu pada musim puncak, jumlah wisatawan akan melebihi populasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan terkait jumlah wisatawan yang berkunjung. Misalnya dengan pembatasan jumlah wisatawan ke Gili Labak serta pendistribusian wisatawan ke objek wisata kepulauan di sekitar Gili Labak. Selain itu, sistem *ticketing* juga perlu diperbaiki. Petugas perlu menghitung secara langsung jumlah wisatawan sebelum turun dari perahu, sehingga jumlah pembayaran tiket masuk oleh agen travel sesuai dengan jumlah wisatawan yang berkunjung. Keterlibatan masyarakat yang menurun dan adanya perubahan fisik lingkungan yang tidak diinginkan juga menjadi ciri dari tahap ini. Diperlukan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan yang membuat masyarakat dapat bertahan dalam sektor pariwisata, misalnya kemampuan menggunakan *multilingual* bagi yang bekerja sebagai *tour guide* dan inovasi produk souvenir. Penetapan harga penginapan juga perlu disesuaikan dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Guna mencegah perubahan fisik dan lingkungan yang tidak diinginkan, maka setiap pembangunan yang akan dilakukan perlu didiskusikan dan dipikirkan secara matang konsekuensinya antara Pokdarwis, warga setempat, dan UPT Pantai Gili Labak jika sudah terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Hairul (16 Desember 2016). Soal Penginapan Di Gili Labak Sumenep, Ini Kata Kepala BPPT. Diakses pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 01.48 WIB dari https://www.suarajatimpost.com/read/3504/20161216/215621/soal-pengina pan -di-gili-labak-sumenep-ini-kata-kepala-bppt/.

Hidayat, Slamet (7 April 2016). Disbudparpora: 9.660 Wisatawan Kunjungi Pantai Pulau Gililabak. Diakses pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 00.28 WIB dari http: //www.antarajatim.com/lihat/berita/175553/disbudparpora-9660-wisatawan - kunjungi-pantai-pulau-gililabak.

Jawa Pos Radar Madura (18 Agustus 2015). Pemkab Sumenep tentang Penguasaan Gili Labak. Diakses pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 00.56 WIB dari http://radarmadura.co.id/2015/08/pemkab-sumenep-tentang-penguasaan-gili-labak/.

Ap, John dan Crompton, John L.,. 1993. “Residents’ Strategies in Responding to Tourism Impacts”. Journal of Travel Research 31, 1: 47-50.

Lismari, Endang. 2017. Menuju Visit Sumenep Year 2018 (1). Diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 19.49 WIB dari http://duta.co/menuju-visit-sumenep-year-2018-1/.

Nerd, Numpty. The Butler Model of Tourism Development. Diakses pada tanggal 21 April 2017 pukul 22.56 WIB dari http://www.numptynerd.net/tourism-the-butler-model.html.

Ramos, Howard, dkk. 2016. “Assessing the Tangible And Intangible Benefits of Tourism: Perceptions of Economic, Social, And Cultural Impacts in Labrador’s Battle Harbour Historic District”. Island Studies Journal, Vol. 11, No.1, pp. 209-226.

Shareef, Riaz. 2003. “Small Island Tourism Economies: A Bird’s Eye View”. Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation, vol.3: Socio-economic Systems, Townsvilee, Autralia, pp. 1124-1129.

Sulistiowati, Tri (7 April 2015). Pariwisata Sumenep Makin Mekar Berkat Suramadu. Diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 19.50 WIB dari http://industri. kontan.co.id/news/pariwisata-sumenep-makin-mekar-berkat-suramadu.

Sumenep Dalam Angka Tahun 2016. Diakses pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 14.24 WIB dari https://sumenepkab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/ Sumenep-Dalam-Angka-2016.pdf.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Diakses pada tanggal 19 Maret 2017 pukul 20.05 WIB dari http://www.kemenpar.go.id/userfiles /file/4636_1364-UUTentangKepariwisataannet1.pdf.

Wirananda, Prengki (7 September 2016). Imbau Wisatawan Gili Labak Tak Berpakaian Mini. Diakses pada tanggal 11 Juni 2017 pukul 23.57 WIB dari http://radarmadura.jawapos.com/read/2016/09/07/3594/imbau-wisatawan-gili-labak-tak-berpakaian-mini.

Yoeti, Oka A. 2008. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Karakter Tata Kehidupan Masyarakat Desa Ketep Sebagai Desa Wisata Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang

Eppy Yuliani[1], Al Aswad[1], Metafia Ardiyani[1]

[1]*Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota*
Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung
eppy@unissula.ac.id; epp.yul@gmail.com ; alaswad@unissula.ac.id; metafia@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Magelang menerapkan strategi Desa Pusat Pertumbuhan sebagai pengembangan wilayah pedesaan.Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang tahun 2010 – 2030 bahwa Desa Ketep merupakan Desa Pusat Pertumbuhan berbasis wisata di Kecamatan Sawangan.Desa Ketep memiliki potensi sumberdaya alam berupa pertanian holtikultura yang tumbuh subur serta kesenian yang terdapat dimasing-masing Dusun.Sebagai Desa Wisata, Desa Ketep memiliki permasalahan berupa tingkat pendidikan penduduk masih statis tamat SD sehingga tingkat pengetahuan masyarakat masih minim, rawan bencana longsor serta kekeringan. Tujuan penelitian adalah untuk menemukansi karakterTata Kehidupan Masyarakat Desa Ketep sebagai Desa Wisata di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.
Metode yang digunakan untuk analisis yaitu Deskriptif Kualitatif dengan analisis karakter daerah, karakter masyarakat, dan karakter tata kehidupan Desa serta tata kehidupan masyarakat Desa Ketep.
Kesimpulan (1) Karakter daerah Desa Ketep masih mencirikan sebagai wilayah pedesaan, akan tetapi terdapat ciri pedesaan yang telah memudar di Desa Katep yaitu tidak ditemuinya lumbung padi. (2) Karakter masyarakat Desa Ketep masih mencirikan karakteristik masyarakat Desa, meskipun sudah mengalami perubahan yaitu proporsi usia dewasa lebih besar dibandingkan usia anak. Selain itu masyarakatnya sudah mulai mengalami perubahan dengan adanya upaya inovasi pengolahan produk. (3) Karakter tata kehidupan desa dalam tata organisasi masih mencirikan wilayah pedesaan. Sedangkan pemerintahan desa sudah mengalami perubahan, yaitu keikutsertaan 6 besar lomba desa tingkat provinsi. (4) karakter tata kehidupan masyarakat bidang sosial masih sangat erat sebagai karakter wilayah pedesaan. di bidang budaya sudah mengalami perubahan pada kesenian Grasakan Dusun Dadapan. Di bidang ekonomi masih dominasi sektor pertanian, tetapi sudah terdapat inovasi pengembangan produk jagung menjadi keripik jagung.

Kata Kunci : Tata Kehidupan, masyarakat, desa wisata

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indoenesia memiliki dua karakteristik daerah yaitu pedesaan dan perkotaan.Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di pedesaan dan sisanya 35% hidup di perkotaan.Akan tetapi tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, derajat kesehatan, ketersediaan kemudahan wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan (Raharjo Sasmita, 2006: 1). Sehingga terjadi kesenjangan karena pembangunan lebih konsentrasi di Kota. Salah satu strategi pengembangan wilayah pedesaan adalah Desa pusat pertumbuhan. Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) merupakan strategi pengembangan pedesaan di Kabupaten Magelang. Terdapat 21 DPP pada RTRW Kab. Magelang th. 2010 – 2030, salah satunya adalah Desa Ketep. Terpilihnya DPP Desa Ketep didukung pula oleh Studi Identifikasi KTP2D th. 2013 oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Desa Ketep memiliki beberapa potensi diantaranya sebagai Wisata Ketep Pass, Geografis yang mendukung pertanian holtikultura, Kesenian tradisional, Sumber Mata Air dan Peran Penting dusun Gondangsari sebagai sumber air. Akan tetapi besarnya potensi di Desa Ketep memiliki permasalahan pada aspek sosial Masyarakat Desa Ketep , yang tergolong masih statis dengan tingkat pendidikan dominan adalah tamat SD, wilayah yang Rawan Longsor dan Kekeringan, Belum ada Pengelolaan limbah dan sampah, serta Wilayah topografi yang curam.

Potensi yang tinggi serta isu pengembangan wilayah Desa Ketep tetapi memiliki permasalahan menyangkut tata kehidupan masyarakat yang belum optimal sebagai pusat pertumbuhan, maka perlu adanya kajian untuk mengetahui "bagaimana karakter tata kehidupan masyarakat Desa Ketep sebagai Desa Pusat Pertumbuhan di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang".

B. Tujuan dan Sasaraan

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik Tata Kehidupan Masyarakat Desa Ketep sebagai Desa Pusat Pertumbuhan berbasis wisata di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Sedangkan sasaran pada laporan ini untuk mencapai tujuan dijabarkan meliputi (1) Mengidentifikasi Wilayah Desa Ketep kondisi eksisting, (2) Mengidentifikasi Penduduk atau masyarakat Desa Ketep, (3) Mengidentifikasi Tata Kehidupan Desa (Tata Organisasi dan Kelembagaan) di Desa Ketep, (4) Menganalisis Karakter Tata Kehidupan Masyarakat Desa Ketep sebagai Desa Wisata di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

C. Tinjauan pustaka

- Unsur Desa

  Menurut Bintarto (1983) terdapat tiga unsur – unsur Desa yang saling terkait sehingga menjadi satu kesatuan, unsur tersebut meliputi Daerah, Penduduk dan tata kehidupan / kelakuan.

- Ciri Desa

  Menurut Wisadirana tahun 2004: 21 bahwa Desa di Indonesia pada umumnya mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:

- Tepi desa terdapat pintu dari kayu yang merupakan gerbang untuk masuk ke desa
- Tepi desa biasanya dikelilingi dengan tanaman bambu
- Terdapat makam dengan tanaman kamboja
- Terdapat Balai Desa, tempat mengantor seorang kepala Desa beserta perangkatnya
- Ditandai adanya lumbung desa
- Ditandai dengan kehidupan yang tenang dan damai serta keakraban diantara penduduknya
- Biasanya ditandai dengan model perkampungan yang memanjang sepanjang jalan-jalan yang ada di desa dan pola perkampungan saling berhadapan satu sama lain. Pola perkampungan yang terakhir ini biasanya dihuni oleh beberapa rumah / keluarga yang masih memiliki hubungan kerabat
- Dipimpin oleh seorang kepala desa dengan beberapa perangkat desa
- Masyarakatnya sebagian besar hidup dari tanah pertanian dan pemeliharaan ternak

- Tipologi Desa

  Tipologi Desa menurut perkembangan masyarakat. Menurut dirjen PMD Depdagri (1972) dalam wisadirana 2004 tipologi masyarakat desa terbagi menjadi 5 (lima) tipe desa yaitu Tipe masyarakat desa tradisional atau Pra Desa, Tipe Desa Swadaya, Tipe desa swakarya (desa peralihan), Desa swasembada, dan Desa Pancasila

- Karakteristik Masyarakat Desa

  Menurut Roucek dan Warren Tahun 1962 dalam Sumpeno tahun 2011 yaitu (1) Peranan kelompok primer sangat besar, (2) Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat, (3) Hubungan lebih bersifat intim dan awet, (4) Struktur masyarakat bersifat homogen, (5) Tingkat mobilisasi sosial rendah, (6) Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi, dan (7) Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.

  Menurut Redfield dalam wisadirana tahun 2004 sebagai yaitu (1) Jumlahnya kecil, dengan tempat tinggal yang terpencil, jauh dari keramaian kota; (2) Relatif bersifat homogen dengan rasa persatuan yang kuat; (3) Memiliki sistem sosial yang teratur dengan perilaku tradisionalnya, (4) Rasa persaudaraan yang kuat; dan (5) Taat pada ajaran-ajaran agama dan menurut kepada pemuka masyarakat

  Menurut Wisadirana tahun 2004 Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang dapat diartikan sebagai suatu organisasi dan sistem sosial; Suatu masyarakat keluarga; dan Sebagai masyarakat peternalistik.
- Ciri Kehidupan Masyarakat Desa

  Ciri Kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia (Sujogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 1983) yaitu Konflik dan persaingan, Kegiatan bekerja, Sistem tolong menolong, Jiwa gotong royong, dan Musyawarah dan Jiwa Musyawarah
- Ciri - Ciri Pusat Pertumbuhan

  Ciri – ciri pusat pertumbuhan dikemukan oleh Tarigan (2005: 162 -163) ada 4 (empat) yaitu (1) Adanya hubungan internal dari bebagi macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi; (2) Adanya efek pengganda (*multiple effect*); (3) Adanya konsentrasi geografis; dan (4) Bersifat mendorong wilayah belakangnya
- Pengaruh Pusat Pertumbuhan

  Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap lingkungan dikemukakan oleh Khosim, A dan Kun Marlina Lubis tahun 2006, yaitu (a) Pengaruh Pusat Pertumbuhan terhadap pemusatan dan persebaran sumberdaya alam; (b) Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi; dan (c) Pengaruh Pusat Pertumbuhan terhadap perubahan sosial budaya masyarakat

II. METODOLOGI

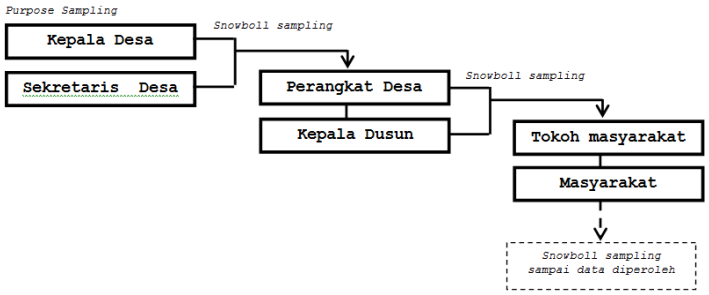
A. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan rasionalistik.Menurut Sujarweni (2014) bahwa penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dll.Parameter yang digunakan meliputi wilayah, kependudukan, tata kehidupan, tata kehidupan masyarakat Desa.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dengan cara Wawancara ke perangkat dan tokoh masyarakat serta observasi lapangan.

Teknik Pengambilan Sampling



Teknik Pengolahan dan Penyajian Data dengan Deskripsi, Peta, Foto atau Gambar.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis

- Karakter Daerah Desa Ketep

Karakter daerah Desa Ketep dominasi Topografi lebih dari 60%.Dengan karakter tersebut berpotensi dikembangkan meliputi pertanian tanaman holtikultura serta wisata gardu pandang Ketep Pass. Keberadaan obyek wisata Ketep Pass, menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Desa ketep masih mencirikan daerah pedesaan yang didukung luas lahan pertanian yang jauh lebih tinggi dibandingkan luas lahan permukiman. Hasil bumi pertanian berupa sayuran, seperti wortel,kobis, kembangkol, tomat, jagung manis, banyak dipasarkan sebagai buah tangan wisatawan. Berikut gambar lokasi desa Ketep.



Gambar 1. Kondisi morfologi Desa Ketep

- Karakter Masyarakat Desa Ketep

Karakter masyarakat Desa Ketep masih mencirikan masyarakat pedesaan yaitu pendidikan terakhir dominasi tamat SD, gotong-royong, jiwa gotong royong, musyawarah dan jiwa musayawarah.Selain itu masyarakat Desa Ketep juga masih memegang teguh adat istiadat yang berupa merti dusun.Merti dusun ini rutin dilakukan setiap tahunnya.



Gambar 2. Gotong royong masyarakat Desa Ketep

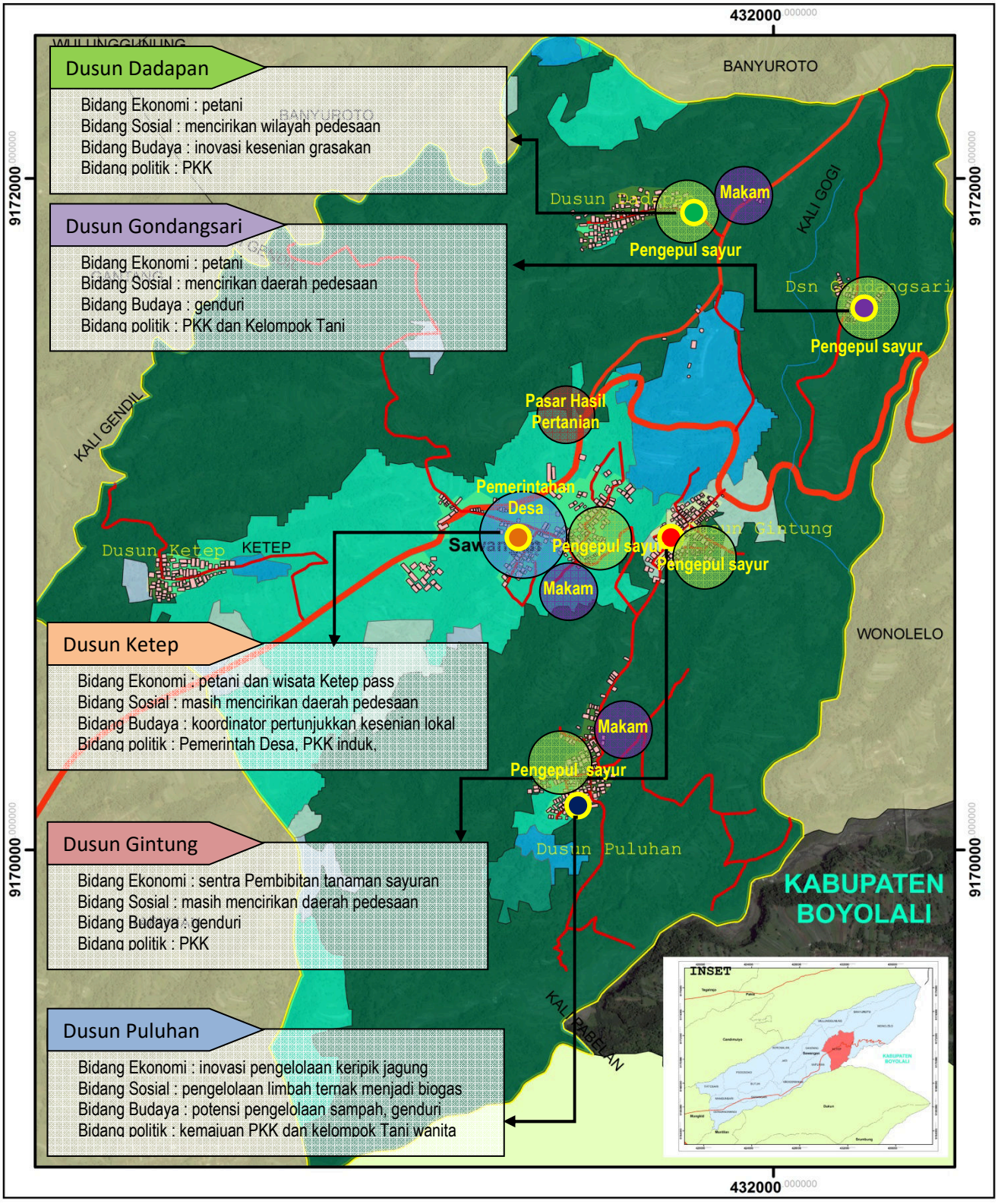
- Karakter Tata Kehidupan Desa Ketep

Karakter organisasi masih mencirikan daerah pedesaan yaitu masyarakat merupakan unit organisasi.Pemerintah Desa Ketep sudah mengalami

perubahan sebagai daerah pedesaan.keikutsertaan dalam lomba Desa tingkat Provinsi dimana Desa Ketep masuk dalam 6 besar pada tahun 2015 merupakan bukti peningkatan Pemerintahan desa Ketep.

- Karakter Tata Kehidupan Masyarakat Desa Ketep
  - Bidang Ekonomi
    Karakter tata kehidupan masyarakat di bidang ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian. Untuk perkembangan ekonomi pertanian masih musiman yaitu industri rumah tangga pembuatan keripik jagung yang sudah dijadikan studi banding provinsi untuk ke Kabupaten Kendal.
  - Bidang Sosial
    Interaksi masyarakat desa Ketep masih mencirikan wilayah pedesaan yaitu gotong-royong dan musyawarah yang masih membudidaya di Desa Ketep.
  - Bidang budaya
    Masyarakat Desa Ketep masih memegang teguh budaya adat istiadat berupa merti dusum yang rutin dilakukan setiap tahunnya.Terdapat perkembangan kebudayaan yaitu kesenian Grasakan Dusun Dadapan yang mengkombinasikan musik, tarian serta kostum lebih modern.

- Temuan Studi
  Ciri daerah pedesaan Desa Ketep yang telah mengalami perubahan adalah
  1. Karakter Daerah yang telah berubah adalah (a) Tepi desa sudah tidak dikelilingi oleh tanaman bambu dan (b) Sudah tidak ditemui lumbung pada sebagai ciri pedesaan
  2. Karakter Masyarakat yang telah berubah adalah (a) Proporsi jumlah anak sudah tidak cukup besar (dominasi usia dewasa) dalam struktur kependudukan dan (b) inovasi peningkatan nilai ekonomi jagung menjadi keripik jagung (meskipun masih musiman tergantung permintaan konsumen dan hari-hari besar tertentu, seperti hari idul fitri).



JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2016

PETA TOPOGRAFI DESA KETEP
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

KETERANGAN

- jln prov
- Jalan Lain
- Jalan Lokal
- Jalan Setapak
- SUNGAI

LERENG

- 0 - 8 %
- 8 - 15 %
- 15 - 30 %
- 30 - 45 %
- 45 - 60 %
- > 60 %

ORIENTASI

N, W, E, S

SKALA

1 :15.774 m

0 55 110 220 330 440 m

SUMBER

1 RTRW KABUPATEN MAGELANG TH. 2010 - 2030
2 PETA CITRA
3 PETA DESA KETEP TH 2015

3. Karakter Tata Kehidupan Desa yang telah berubah adalah

   Fungsi pemerintah Desa di Desa Ketep komunikasi dengan kegiatan unit terkecil. Perangkat Desa meliputi kepala Dusun yang mempermudah komunikasi u/ masyrakat masing-masing dusun. Selain itu Pemerintah Desa telah terlibat dalam pengembangan Desa yang mendukung perkembangan Desa
4. Karakter Tata Kehidupan Masyarakat Desa yang berubah adalah (a) Status sosial di Desa Ketep sudah tidak dipengaruhi oleh bentuk bangunan rumah yang dimiliki dan (b) Desa Ketep masih menjunjung tinggi adat istiadat yang turun temurun (adanya acara rutin tahunan ketika merti dusun di bulan rajab atau rajaban, terdapat keunikan yaitu kegiatan rajaban yang berupa penyajian hidangan kepada tamu siapa saja yang berkunjung dan diwajibkan untuk menyantap hidangan yang tersedia.

IV. KESIMPULAN

1. Karakter daerah Desa Ketep masih mencirikan sebagai wilayah pedesaan, akan tetapi terdapat ciri pedesaan yang telah memudar di Desa Katep yaitu tidak ditemuinya lumbung padi.
2. Karakter masyarakat Desa Ketep masih mencirikan karakteristik masyarakat Desa, meskipun sudah mengalami perubahan yaitu proporsi usia dewasa lebih besar dibandingkan usia anak. Selain itu masyarakatnya sudah mulai mengalami perubahan dengan adanya upaya inovasi pengolahan produk.
3. Karakter tata kehidupan desa dalam tata organisasi masih mencirikan wilayah pedesaan. Sedangkan pemerintahan desa sudah mengalami perubahan, yaitu keikutsertaan 6 besar lomba desa tingkat provinsi.
4. Karakter tata kehidupan masyarakat bidang sosial masih sangat erat sebagai karakter wilayah pedesaan. di bidang budaya sudah mengalami perubahan pada kesenian Grasakan Dusun Dadapan. Di bidang ekonomi masih dominasi sektor pertanian, tetapi sudah terdapat inovasi pengembangan produk jagung menjadi keripik jagung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adisasmita, Rahadjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: GrahaIlmu.

____. 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bintarto.1983. *InteraksiDesa – Kota*.Jakarta:Ghalia Indonesia.

BPS Kabupaten Magelang. 2014. “Kecamatan Sawangan Dalam Angka 2014”.

Dharma, Satya dkk.1973. *Mobilitas Ulang-alik Penduduk Pedesaan*.Semarang: SatyaWacana.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. 2014. “Rencana Induk Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) Paket II Tahun anggaran 2014”.

Gulo, W. 2002.*MetodologiPenelitian*. Jakarta: PT GramediaWidiasarana Indonesia.

Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa.* Jakarta: Balai Pustaka.

Kukiinski, Antoni R. 1972. *Growth Poles and Growth Centres in Regional Planning*.Netherlands : Mouton & Co.

Mulyanto, H.R. 2008. *Prinsip-prinsip pengembangan wilayah*. Yogyakarta:GrahaIlmu.

Narbuko, Choliddan Abu Achmadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:BumiAksara.

Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Analisisnya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Putra, Nusa. 2013. *PenelitianKualitatif IPS*. Bandung : PT RemajaPosdakarya.

Sirojuzilam. 2006. *TeoriLokasi*. Medan : USU Press.

SubanadanSudrajat. 2009. *Dasar-dasarPenelitianIlmiah.*Bandung: PustakaSetia.

Sujarweni, Wiratna. 2014. *MetodologiPenelitian*. Yogyakarta: PustakaBaru Press.

Sumanto.2002. *PembahasanTerpaduStatistikadanMetodologiRiset (Buku 1 danBuku 2).* Yogyakarta: PenerbitAndi.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *PerencanaanDesaTerpadu.* Banda Aceh: Read.

Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional TeoridanAplikasi.*Jakarta: BumiAksara

Wangsadinata, Wiratman dan G.Suprayitno. *Rosseno: Jembatan dan Menjembatani*. Jakarta: YayasanObor Indonesia

Warpani, Suwardjoko. 1984. *Analisis Kota &Daerah.*Bandung: ITB

Wiriaatmadja, Soekandar. 1973. *Pokok-pokokSosiologiPedesaan.*Jakarta: CV. Yasaguna.

Wisadiranan, Darsono. 2004. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Penerbitas Universitas Muhammadiyah Malang.

Yunus, HadiSabari. 2010. *MetodologiPenelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: PustakaPelajar.

PerUndang-Undangan

Peraturan Daerah KabupatenMagelang No. 5 Tahun 2015 tentangRencana Tata Ruang Wilayah KabupatenMagelangTahun2010-2030

Peran Program Desa Produktif Nasional dalam Peningkatan Industri Rumah Tangga di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember

Ratih Novi Listyawati[1]

[1]*Magister Perencanaan Kota dan Daerah,Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta*
Email:ratihnovilistyawati@gmail.com

ABSTRAK

Program Desa Produktif Nasional merupakan salah satu program pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan lapangan kerja di desa sehingga dapat meminimalisir urbanisasi desa ke kota. Desa Tutul dicanangkan menjadi desa produktif nasional olehKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2013. Guna mencapai tujuan yang diharapkan oleh program, enam kegiatan dilaksanakan di Desa Tutul. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan peran program desa produktif nasional dalam peningkatan industri rumah tangga di Desa Tutul ditinjau dari kondisi sebelum dan setelah program dijalankan dengan metode Before and After Comparisons serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program memiliki peran besar dalam peningkatan jumlah industri rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan pergeseran mata pencaharian pendudukdengan faktor utama yang berpengaruh adalah pelatihan dan pendanaan sebagai bagian dari kegiatan program.

Katakunci:Program Desa Produktif Nasional,Industri Rumah Tangga, Mata Pencaharian.

I. PENDAHULUAN

Desa Produktif menurut Dirjend Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (2011) merupakan suatu desa yang masyarakatnya memiliki kemauan dan kemampuan memanfaatkan secara kreatif dan inovatif seluruh potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas pedesaan.Nilai tambah yang dimaksud melalui efisiensi, efektivitas, dan kualitas produksi.

Program desa produktif nasional merupakan sebuah terobosan yang dirancang pemerintah guna meminimalisir urbanisasi desa ke kota karena telah berkembangnya lapangan kerja yang ada di desa. Dengan mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui perluasan lapangan kerja dan berusaha diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat desa untuk tetap tinggal di desa dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Desa Tutu merupakan bagian dari Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Desa. Desa Tutul memperoleh penghargaan sebagai desa produktif nasional pada tahun 2013. Dengan potensi yang dimiliki desa yaitujumlah *home industri* yang ada sejumlah 1.057 (Proposal Pembangunan Outlet Kerajinan, 2016) yang tersebar di empat dusun dan menyerap tenaga kerja sejumlah 2.728 jiwa. Jumlah tersebut terus berkembang seiring dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari program, adalah:

1. Pelatihan teknis dan pelatihan manajemen;
2. Fasilitasi program (pelatihan wirausaha, padat karya produktif);
3. Pendampingan (pemasaran, permodalan, bimbingan konsultasi, produksi dan teknologi);
4. Kemitraan (jejaring) lokal/ nasional/ internasional;
5. Pendanaan.

Tujuan dari adanya program desa produktif secara rinci (Modul Desa Produktif-Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan, 2014), yaitu:

a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki desa.
b) Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas.
c) Memperluas kesempatan kerja dan berusaha.
d) meningkatkan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai program desa produktif nasional, mengantarkan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran program desa produktif nasional terhadap peningkatan industri rumah tangga dan pergeseran mata pencaharian masyarakat desa.

II. METODE

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan deduktif yaitu penelitian yang berangkat dari teori dan kajian pustaka yang selanjutnya menjadi acuan dalam mengkaji objek penelitian yaitu pengaruh program terhadap perkembangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dan kualitatif dikombinasikan menjadi database besar dan digunakan secara berdampingan untuk memperkuat satu sama lain (Creswell, 2009).

B. Metode analisis

Analisis peran program desa produktif nasionaldalam perkembangan Desa Tutul dilakukan dengan teknik deskriptif melalui pendekatan *Before and After Comparison*. Dalam bukunya, Patton dan Sawicky (1986) mengemukakan bahwa pendekatan tersebut merupakan metode yang mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya suatu kebijakan atau program diimplementasikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

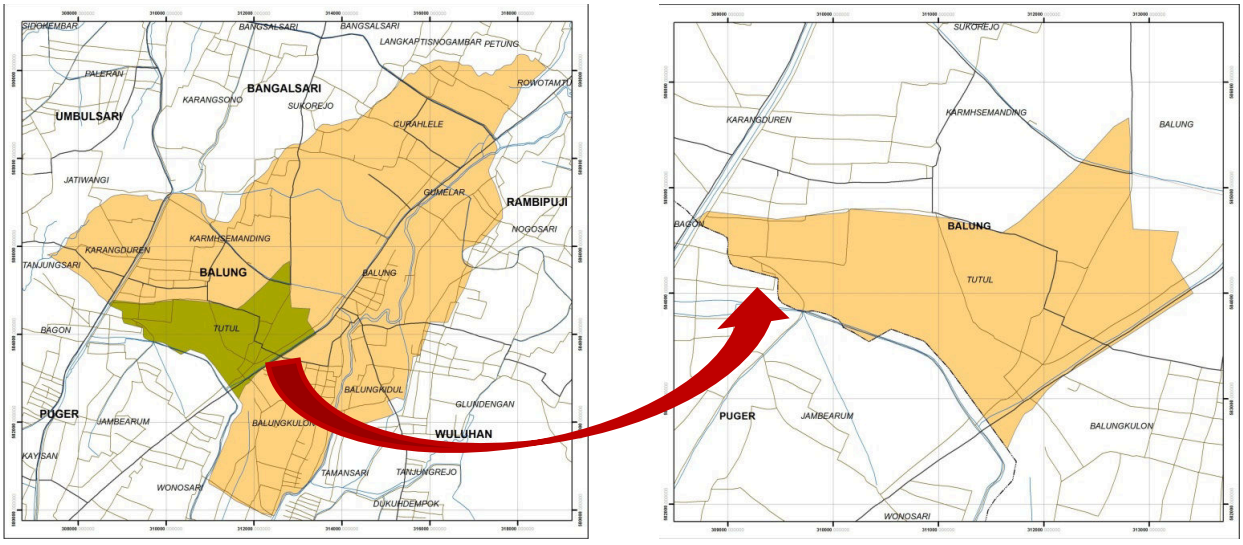
A. Desa Tutul

Desa Tutul adalah salah satu desa di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan luas 565, 77 Ha.Desa Tutul terbagi menjadi empat dusun diantaranya:

1) Dusun Maduran,
2) Dusun Krajan,
3) Dusun Kebon dan
4) Dusun Karuk.

Secara astronomis desa ini terletak pada posisi 28ºC – 37ºC Lintang Selatan dan 110°10′-111°40′ Bujur Timur dan pada ketinggian 30 mdpl dengan curah hujan rata-rata mencapai 1.257 mm. Jumlah penduduk penghuni desa adalah sebesar 9.543 jiwa dan 2.780 KK. Batas wilayah Desa Tutul adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Desa Balunglor, Desa Karangsemanding, Desa Karangduren, Kecamatan balung.
Sebelah Selatan	: Desa Jambearum, Kecamatan Puger
Sebelah Timur	: Desa Balungkulon dan Desa Balung Lor, Kecamatan Balung.
Sebelah Barat	: Desa Bagon, Kecamatan puger dan DesaKarangsemanding, Kecamatan Balung.



Sumber: Hasil Analisis ArcGis. 2017

Gambar 1. Peta Orientasi Desa Tutul terhadap Kecamatan Balung

B. *Program Desa Produktif Nasional*

Kegiatan yang merupakan bagian dari program desa produktif nasional dan telah dilaksanakan di Desa Tutul, diantaranya:

1) Pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Manajemen
2) Pelaksanaan Pelatihan Usaha Mandiri (Wirausaha)
3) Pelaksanaan Pelatihan Padat Karya Produktif
4) Pendampingan
5) Pameran-pameran
6) Pendanaan

Keseluruhan kegiatan tersebut dilakukan di Desa Tutul dengan target sasaran adalah masyarakat di Desa Tutul yang bermata pencaharian sebagai pengrajin. Kegiatan pertama dilaksanakan setelah pencanangan desa produktif nasional di Desa Tutul pada tanggal 12 Januari 2013.

Tabel 2. Kegiatan Program Desa Produktif

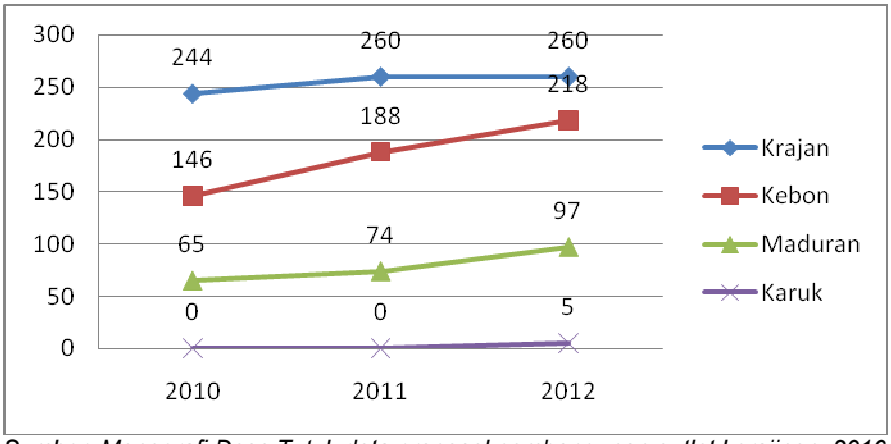
No.	Kegiatan	Sasaran	Tujuan
1	Pelatihan Teknis dan manajemen	Pengrajin di Desa Tutul	• Meningkatkan keterampilan masyarakat • Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk. • Meningkatkan inovasi dan variasi usaha kerajinan
2	Fasilitasi Program: • Pelatihan Wirausaha • Pelatihan Padat Karya Produktif	Pengrajin di Desa Tutul	• Meningkatkan jumlah kelompok usaha masyarakat • Bervariasinya mata pencaharian penduduk karena berkembangnya sektor sekunder. • Menekan tingkat pengangguran agar warga menjadi produktif
3	Pendampingan	Lembaga-lembaga di Desa Tutul	• Meningkatkan peran kelembagaan

No.	Kegiatan	Sasaran	Tujuan
4	Pameran-pameran	Industri rumah tangga di Desa Tutul	• Memperkenalkan produk dan memperluas pemasaran
5	Pendanaan	Industri rumah tangga di Desa Tutul	• Merangsang pertumbuhan usaha baru • Mengembangkan usaha kecil yang belum berkembang

Sumber: Survei Primer, 2016

C. Jumlah Industri

Sebelum masuknya program, industri di Desa Tutul masih tergolong homogen.Lapangan kerja yang tersedia di sektor industri masih minim dibandingkan dengan kondisi saat ini. Jumlah industri pada tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan, walau tidak signifikan, bahkan di Dusun Krajan, pada tahun 2011 ke 2012 jumlah industri sama. Sektor industri yang ada masih berfokus pada kerajinan asesoris manik-manik seperti kalung, gelang dan tasbih.



Sumber: Monografi Desa Tutul, data proposal pembangunan outlet kerajinan, 2016

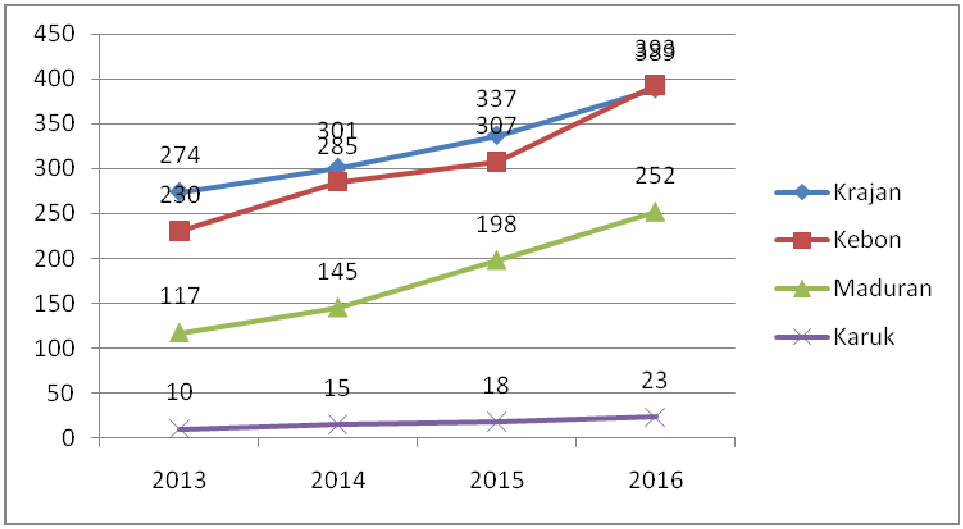
Gambar 2. Perkembangan Jumlah Industri di Desa Tutul Sebelum Adanya Program

Perkembangan jumlah lapangan kerja terutama pada jumlah industri di setiap dusun yang ada di Desa Tutul. Dusun Kebon memiliki jumlah industri yang meningkat setiap tahunnya.Dusun Karuk merupakan dusun dengan jumlah industri paling sedikit, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Dusun Karuk merupakan petani.

Setelah adanya program pada tahun 2013, serta kegiatan-kegiatan yang pengembangan keterampilan yang dilaksanakan, ketersediaan lapangan kerja di Desa Tutul menjadi semakin variatif. Industri kreatif yang menjamur di Desa memiliki berbagai spesialisasi tersendiri masing-masing industri, misalnya industri kerajinan khusus asesoris manik-manik seperti gelang, kalung, dan tasbih.Adapula kerajinan yang membuat spesialisasi alat-alat dapur seperti talenan, sendok kayu, supit dan cobek kayu.Sementara terdapat juga industri kerajinan spesialisasi serbuk kayu yang kemudian di kirim kepada konsumen untuk dijadikan aromaterapi.

Tidak hanya industri kerajinan, industri minuman berkarbonasi juga saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena kemudahan penjualan dan keuntungan yang besar.Industri ini menyasar konsumen anak-anak SD. Karyawan biasanya setiap pagi mengambil dua tabung minuman untuk kemudian dijual ke sekolah-sekolah.Industri minuman ini menyerap banyak karyawan. Pemerintah desa pernah membawa nama industri minuman berkarbonasi ini menjadi pemenang dalam sayembara industri kreatif yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Industri ini mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 2.728 orang (data proposal pembangunan outlet kerajinan, 2016).Jumlah keseluruhan industri yang ada di Desa Tutul adalah 1.057 dengan sebaran pada tabel berikut.



Sumber: data proposal pembangunan outlet kerajinan, 2016

Gambar 3. Grafik Perkembangan Jumlah Industri Setelah Adanya Program

Pada perkembangan jumlah industri, dapat dilihat pada grafik perkembangan di setiap dusunnya.Dusun Karuk merupakan dusun yang didominasi oleh petani, sehingga keberadaan industri di dusun tersebut sangat minim dibandingkan dengan dusun lainnya.Dusun Krajan merupakan dusun dengan variasi industri yang beragam dan jumlah industri yang terbilang paling banyak.Mengingat Dusun Krajan merupakan pusat aktivitas desa, selain itu industri-industri yang paling besar dan banyak menyerap tenaga kerja ada di Dusun Krajan.Dusun Kebon juga memiliki jumlah industri yang cukup banyak dengan variasi kerajinan yang beragam, mulai dari manik-manik hingga peralatan dapur, maupun serbuk kayu untuk kemudian dijadikan aromaterapi.Dusun Maduran juga memiliki jumlah industri yang cukup banyak untuk menyerap tenaga kerja.

D. Mata Pencaharian

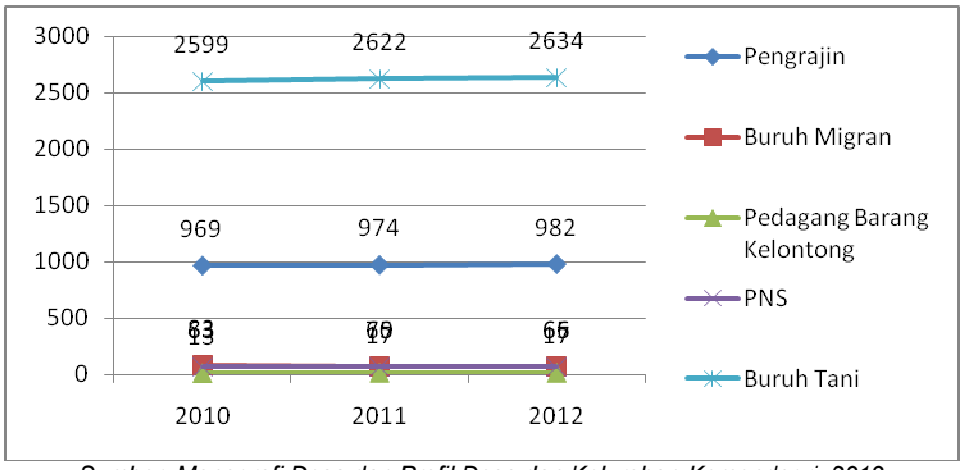
Di dalam data penduduk menurut mata pencaharian menggambarkan kegiatan penduduk dalam pengembangan ekonomi desa.Dari data penduduk dapat dilihat mengenai angka partisipasi tenaga kerja (daya serap tenaga kerja) atau tingkat pengangguran suatu wilayah.

Pengrajin merupakan mata pencaharian sampingan bagi masyarakat di Desa Tutul yang pekerjaan utamanya sebagai petani.Namun juga bagi pengrajin yang telah memiliki pangsa pasar yang besar, membuat kerajinan tangan merupakan kegiatan utama untuk meningkatkan perekonomian. Hal inilah yang mendasari mengapa di Desa Tutul dicanangkan menjadi desa produktif nasional, karena masyarakatnya tidak ada yang pengangguran, ibu rumah tangga pun bisa bekerja di rumah menjadi desainer pernak-pernik kerajinan tangan. Usaha kerajinan yang telah maju, biasanya mempekerjakan masyarakat setempat baik yang pengangguran maupun ibu rumah tangga, sehingga tidak ada lagi pengangguran dan ibu rumah tangga pun juga produktif dengan bekerja dirumah sendiri sebagai pengrajin.

Tidak sedikit pula masyarakat yang juga memanfaatkan limbah hasil pertanian untuk diolah menjadi pernak-pernik kerajinan tangan. Namun saat ini, mayoritas bahan baku kerajinan tangan diimpor dari luar desa. Gambaran inilah yang membuktikan bahwa meski penggunaan lahan untuk pertanian lambat laun akan semakin sempit, masyarakat masih memiliki keterampilan untuk meningkatkan perekonomian mereka

walau sumber pendapatan mereka tidak harus dari hasil pertanian melainkan dari hasil kerajinan tangan.

Benar adanya pendapat Bintarto (1983) yang menyatakan bahwa faktor kemampuan membangun penduduk desa lebih menentukan proses perkembangan desa dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam artian bahwa yang terpenting dalam meningkatkan perkembangan desa ialah meningkatkan sumber daya masyarakatnya terlebih dahulu.

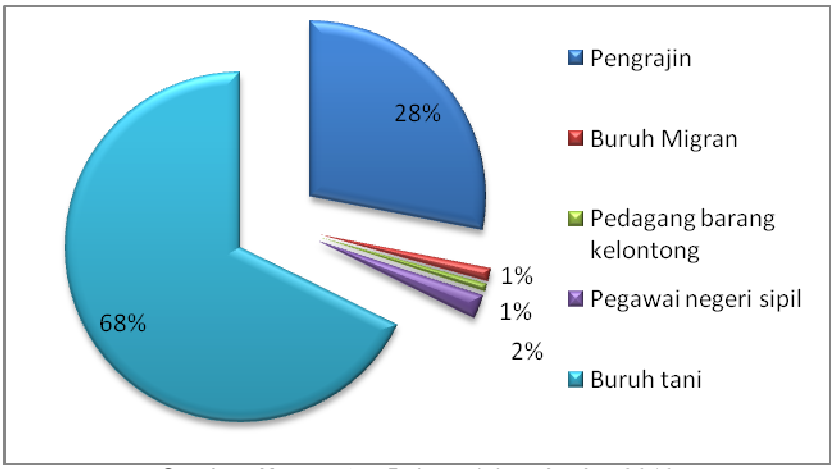


Sumber: Monografi Desa dan Profil Desa dan Kelurahan-Kemendagri, 2013

Gambar 4. Perkembangan Mata Pencaharian Penduduk Sebelum Adanya Program

Perkembangan mata pencaharian penduduk di Desa Tutul mengalami peningkatan setiap tahunnya. Buruh tani misalnya, pada tahun 2010 hingga 2012 mengalami peningkatan, begitu pula dengan jumlah pengrajin yang juga meningkat namun dengan jumlah yang tidak terlalu signifikan. Pedagang dan PNS juga mengalami peningkatan.

Mata pencaharian dibagi berdasarkan sektor perekonomian yang berkembang di Desa Tutul.



Sumber: Kecamatan Balung dalam Angka, 2016

Gambar 5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tutul

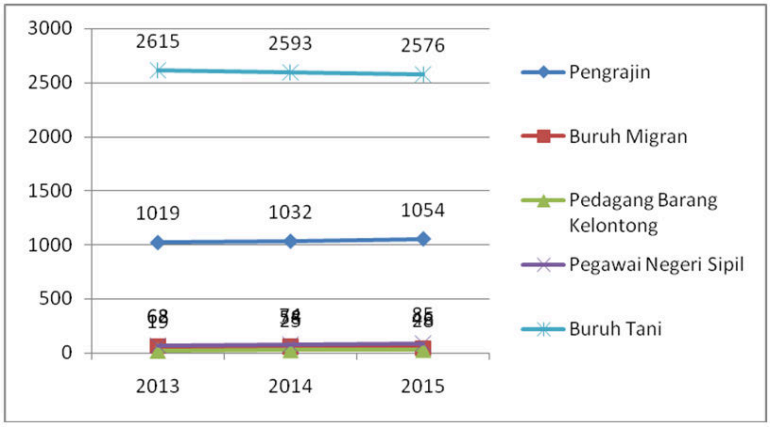
Sektor utama yang berkembang di Desa Tutul diantaranya pertanian dan pengrajin.Tidak hanya dua sektor tersebut, terdapat tiga mata pencaharian yang dimiliki oleh penduduk desa, namun dalam jumlah kecil. Mata pencaharian sebagai buruh tani merupakan jumlah terbesar pekerjaan yang dimiliki mayoritas penduduk yaitu 67,7%. Dilanjutkan dengan mata pencaharian sebagai pengrajin sebanyak

28,1%, PNS sebesar 2,3%, serta mata pencaharian lain seperti buruh migran dan pedagang sebesar 1,9%.



Sumber: Survei Primer, 2016
Gambar 6. Pengrajin di Desa Tutul

Jika dilihat dari persentase masyarakat bermata pencaharian petani yang lebih dari 50% (2.542 orang) serta luas lahan pertanian yang cenderung tetap (391,8 Ha). Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan lahan akan semakin sempit seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga sektor pertanian perlu dilakukan diversifikasi di masa depan untuk dapat menghasilkan produktivitas yang lebih baik dengan lahan yang terbatas.



Sumber: Monografi Desa, 2016 dan Profil Desa dan Kelurahan-Kemendagri, 2017
Gambar 7. Grafik Perkembangan Mata Pencaharian Penduduk Desa Tutul Setelah Program

Jumlah petani pada tahun 2013 hingga 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan produktivitas sektor pertanian menurut mereka perkembangannya tidak secepat sektor industri rumah tangga yang ada di Desa Tutul. Sehingga mereka lebih memilih untuk ikut bekerja di industri, dan melepaskan mata pencaharian sebagai buruh tani.Selain itu, pada tahun pencanangan desa sebagai desa produktif nasional pada tahun 2013, program dan bantuan yang masuk banyak diberikan pada sektor industri kerajinan rumah tangga, inilah yang menjadikan industri di Desa Tutul berkembang pesat.

Program desa produktif nasional di Desa Tutul memberikan peluang besar terhadap berkembangnya mata pencaharian penduduk.Industri yang semakin berkembang setalah banyaknya program yang masuk ke desa, menimbulkan peluang kerja yang semakin meningkat.Industri kerajinan dan industri minuman yang berkembang, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik masyarakat Desa Tutul maupun luar desa.Mobilitas tenaga kerja yang masuk ke desa semakin meningkat.Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga industri yang

semakin maju.Masyarakat yang sebelumnya menganggur, banyak yang kemudian bergabung ke industri untuk bekerja, dan masyarakat yang telah bekerja di sektor lainnya seperti pertanian maupun swasta, juga banyak yang bergabung di industri sebagai pekerjaan sampingan.Etos kerja masyarakat yang tinggi ini banyak berperan dalam meningkatkan perkembangan desa ke arah yang lebih baik.

E. Peran Program Desa Produktif Nasional dalam Peningkatan Industri Rumah Tangga dan Pergeseran Mata Pencaharian

Tabel 3. Peran Program Desa Produktif Nasional

Indikator	Perkembangan Desa		Peran Program Desa Produktif Nasional
	Sebelum adanya program	Setelah adanya program	
Jumlah kelompok usaha dan pertambahan kelompok usaha baru	• terdapat 580 industri pada tahun 2012. (Data proposal pembangunan outlet kerajinan, 2016) • Rata-rata pertambahan jumlah kelompok usaha 62 usaha/tahun.	• Terdapat 1057 industri pada tahun 2016. (Data proposal pembangunan outlet kerajinan, 2016) • Rata-rata pertambahan jumlah kelompok usaha 115 usaha/ tahun, hingga pada tahun 2016 jumlah usaha bertambah 197 usaha dari tahun sebelumnya.	• Jumlah kelompok usaha meningkat seiring pelatihan wirausaha yang dilaksanakan guna mendorong peserta pelatihan untuk tidak takut membuka usaha sendiri. • Pendanaan sebagai bagian dari program desa produktif memberikan sebuah bantuan permodalan bagi usaha yang belum berkembang karna terkendala modal dan masyarakat yang ingin merintis usaha namun tidak memiliki modal. Melalui bantuan dana, dapat meningkatkan jumlah usaha yang ada di Desa Tutul. Pertambahan jumlah kelompok usaha yang sebelum ada program hanya 62 usaha pertahunnya, setelah adanya program pertambahan jumlah usaha meningkat menjadi 115 dari setiap tahunnya.
Mata pencaharian penduduk di sektor sekunder dan/ atau tersier	Sektor primer merupakan mata pencaharian utama penduduk karena jumlah petani semakin meningkat dari tahun 2010 sejumlah 2.599 jiwa	Masyarakat mulai beralih dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri). Jumlah petani mulai menurun dari 2.615 pada tahun 2013 ke	Pelatihan wirausaha juga bertujuan agar masyarakat tidak hanya berpangku pada sektor primer saja, melainkan juga dapat mengembangkan sektor sekunder sebagai tambahan penghasilan bagi

Indikator	Perkembangan Desa		Peran Program Desa Produktif Nasional
	Sebelum adanya program	Setelah adanya program	
	hingga 2.634 jiwa pada tahun 2012. Jumlah pengrajin juga meningkat dari 969 ke 982 pada tahun 2012.	2.576 pada tahun 2015, dan jumlah pengrajin yang semakin meningkat dari 1.019 (2013) ke 1.054 pada tahun 2015.	mereka. Seiring perkembangannya, jumlah pengrajin semakin meningkat, dan jumlah petani dan buruh tani yang semakin berkurang. Hal ini dikarenakan kesempatan kerja yang semakin meningkat di sektor sekunder (industri) karena meningkatnya jumlah kelompok usaha, serta semakin berkurangnya lahan produktif, sehingga petani mulai merambah sektor sekunder.

Sumber: Hasil Analisis, 2017

IV. KESIMPULAN

Hasil analisis menyatakan bahwa peran program desa produktif nasional mampu memberikan peningkatan jumlah industri rumah tangga sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat di Desa Tutul. Kesempatan kerja yang tinggi di sektor sekunder (industri) ini menghasilkan pergeseran mata pencaharian penduduk dibuktikan dengan berkurangnya mata pencaharian penduduk pada sektor pertanian (petani) serta meningkatnya jumlah pengrajin di Desa Tutul. Secara keseluruhan penelitian, pembelajaran yang dapat diambil adalah:

1. Program merupakan sebuah stimulan bagi desa untuk dapat berkembang. Program ada, namun potensi desa kecil, tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan desa. Begitu pula sebaliknya.
2. Jika pemerintah ingin program desa produktif berhasil di desa-desa lain, maka sebelum program diterapkan, diharapkan dapat menggali terlebih dahulu potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut.
3. Guna memberikan program yang tepat sasaran dan tidak berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, maka sasaran program sebaiknya mengacu pada peningkatan potensi sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Kecamatan Balung dalam Angka tahun 2013-2016.

Bintarto, R. 1983. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Creswell, J.W. 2009.Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Dalam Negeri. 2016. Profil Desa dan Kelurahan di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Jakarta.

Monografi Desa Tutul tahun 2011-2016

Patton C.V. dan Sawicki, D.S. 1986.*Basic Methods of Policy Analysis and Planning.* New York: Prentice Hall.

Pemerintah Desa Tutul. 2016. Proposal Pembangunan Outlet Kerajinan. Jember

SK Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas No: 144/Lattas/XII/2010 tentang Pelaksanaan Pembinaan Desa Produktif
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengembangan Agroekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Nagari Koto Malintang Kabupaten Agam

Harne Julianti Tou[1] Melinda Noer[2] Helmi[2] Sari Lenggogeni[3]

[1]Mahasiswa Program Studi Ilmu-ilmu Pertanian, Pasca Sarjana, Universitas Andalas
[2]Dosen Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas
[3]Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
Alamat email : iyun_tou@yahoo.com

ABSTRAK

Konsep agroekowisata merupakan gabungan dari konsep agrowisata dan ekowisata, yang dimaknai sebagai pengembangan suatu kawasan wisata berbasis pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, seperti kegiatan pengelolaan pertanian dan mengambil hasil pertanian. Sedangkan ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Nagari Koto Malintang merupakan salah satu nagari di Kabupaten Agam yang berada di pinggir Danau Maninjau. Yang memiliki potensi sumber daya alam berupa hutan, lahan pertanian dan danau. Nagari ini memiliki Pohon terbesar di Indonesia yakni Pohon Binu sejenis pohon Madang. Makalah ini mengkaji pengembangan agroekowisata di Nagari Koto Malintang berbasis partisipasi masyarakat. Metode analisis dengan cara mengidentifikasi potensi pengembangan agroekowisata yang dimiliki di Nagari Koto Malintang serta menilai seberapa besar peran serta masyarakat dalam pengembangan agroekowisata. Berdasarkan hasil analisis, Nagari Koto Malintang yang memiliki hutan rakyat dan Danau Maninjau bisa menjadikan objek wisata tersebut sebagai lokasi pendidikan maupun penelitian. Selain itu juga Pengembangan model pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari itu kini dapat ditemui di beberapa jorong di Nagari Koto Malintang yakni, Jorong Rambai, Macang, Alai dan Tanjung Alai. Pelestarian pemanfaatan sumber daya secara lestari ini dilakukan masyarakat dengan menunjuk penjaga hutan dan juga melakukan penanaman hutan baik yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun perantau.

Kata kunci: Lingkungan, Koto Malintang, Agroekowisata

I. PENDAHULUAN

Konsep agroekowisata merupakan gabungan dari konsep agrowisata dan ekowisata, yang dimaknai sebagai pengembangan suatu kawasan wisata berbasis pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Agrowisata adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, seperti kegiatan pengelolaan pertanian dan mengambil hasil pertanian. Sedangkan ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Makalah ini mengkaji pengembangan agroekowisata di Nagari Koto Malintang berbasis partisipasi masyarakat. Nagari Koto Malintang merupakan salah satu nagari di Kabupaten Agam yang berada di pinggir Danau Maninjau. Yang memiliki potensi sumberdaya alam berupa hutan, lahan pertanian dan danau. Nagari ini memiliki Pohon terbesar di Indonesia yakni Pohon Binu sejenis pohon Madang.Dengan potensi sumberdaya alam yang nagari ini memungkinkan bagi nagari ini mengembangkan agroekowisata dengan berbasis partisipasi masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam makalah ini menggunakan pendekatan kualitiatif, yakni dengan cara mengidentifikasi potensi pengembangan agroekowisata yang dimiliki di Nagari

Koto Malintang serta menilai peran serta masyarakat dalam pengembangan agroekowisata. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara kepada wali nagari dan tokoh masyarakat, guna memperoleh gambaran tentang peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selain itu juga pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi atau mengunjungi lokasi Nagari Koto Malintang, guna mengumpulkan potensi nagari yang bisa dikembangkan dalam pengembangan agroekowisata. Pengumpulan data sekunder untuk memperoleh infomasi tentang monografi nagari atau gambaran umum Nagari Koto Malintang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan literatur

Kebijakan pedesaan saat ini wacana telah diubah menjadi sudut pandang yang menekankan nilai spasial daerah pedesaan dengan menempatkan pedesaan ruang setara dengan sektor pertanian (Brandth & Haugen, 2011; Seong, Cho, Lee, & Min, 2004; Woods, 2005). Sebagai daerah pedesaan diberkahi dengan berbagai kualitas bersejarah, alam dan sosial itu adalah umum bahwa pariwisata menyebar dalam hubungannya dan dikombinasikan dengan kegiatan pertanian. Fenomena ini disebut oleh pakar pertanian dan pariwisata sebagai agrowisata, wisata pedesaan atau pariwisata pertanian (Fleischer & Tchetchik, 2005 ; dalam Yang [8]).

Wisata pedesaan yang merupakan bagian dari ekowisata, sedangkan ekowisata bagian dari wisata berkelanjutan (wood, 2002 dalam Nugroho, 2011). Dimana wisata pedesaan (*rural Tourism*) menggambarkan tentang lokasi wisata tersebut dilakukan sementara ekowisata (*ecotuorism*) berkaitan dengan tema atau visi kegiatan wisata. Sementara wisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) merupakan sektor ekonomi. Ekowisata berpijak pada tiga kaki sekaligus yakni wisata pedesaan, wisata alam dan wisata budaya.

Agrowisata sendiri merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha di bidang pertanian. Melalui pengembangan agrowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, kita bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya.Ekowisata merupakan suatu konsep pariwisata yang mencerminkan wawasan lingkungan dan mengikuti kaidah-kaidah keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Secara umum pengembangan ekowisata dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Unsur-unsur yang harus ada dalam pengembangan ekowisata diantaranya; sumber daya alam, sejarah dan budaya, kekayaan keanekaragaman hayati merupakan daya tarik utama bagi pangsa pasar ekowisata sehingga kualitas, keberlanjutan, dan pelestaraian sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya, menjadi sangat penting untuk pengembangan ekowisata.

Konsep agroekowisata yang merupakan pengembangan dari *ecotourism* yang menawarkan pengalaman langsung kepada pengunjung (wisatawan) tentang kehidupan di daerah pertanian. Pengunjung mendapatkan kesempatan menyaksikan dan melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petani. Agroekowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) sebagai objek wisata. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian. Melalui pengembangan agroekowisata yang menonjolkan budaya lokal dalam memanfaatkan lahan, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan, serta memelihara budaya maupun teknologi lokal (*indigenous knowledge*) yang umumnya telah sesuai dengan kondisi lingkungan alaminya. (Deptan, 2011).

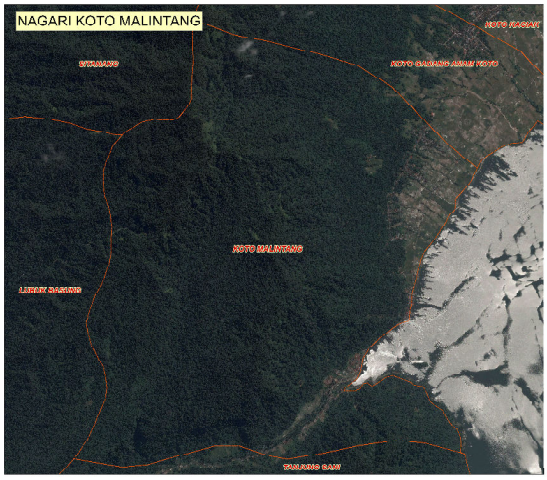
Menurut Sutawan (2009) agroekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan pariwisata yang obyeknya adalah usaha tani dengan aktivitas–aktivitas yang terkait seperti kegiatan penelitian dan eksplorasi sumberdaya pertanian. Agroekowisata merupakan wisata dalam bentuk perjalanan ke tempat khusus yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata untuk berekreasi atau mengisi waktu senggang lainnya dengan tujuan untuk menikmati, mengagumi, menghargai, dan mempelajari alam, lingkungan, dan budaya pertanian pada suatu daerah/areal pertanian dengan tujuan untuk melestarikan/ mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan uraian di atas, agroekowisata dimaksudkan sebagai salah satu bentuk kegitan pariwisata yang obyeknya adalah usahatani dengan aktivitas aktivitas yang terkait dengannya, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan pelestarian lingkungan agar dapat mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata. Di samping itu, juga memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal. Pemberdayaan bagi masyarakat setempat dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan agroekowisata. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat antara lain:

(1) mengelola pengusahaan agroekowisata melalui badan usaha bersama seperti koperasi;
(2) menyediakan jasa penginapan/akomodasi pada rumah-rumah penduduk;
(3) menjadi pemandu wisata;
(4) menyediakan jasa kuliner/ konsumsi yang merupakan khas daerah setempat dengan penyajian tradisional namun bersih dan sehat;
(5) terlibat dalam kegiatan penyajian atraksi wisata;
(6) menyediakan jasa transportasi tradisional; dan
(7) menjual souvenir atau kenang-kenangan (Sutawan, 2009).

Berdasarkan paparan tentang agroekowisata, dapat disimpulkan bahwa agroekowisata menghendaki peran serta pengunjung baik sebagai penikmat maupun sebagai partisipan dalam seluruh aktivitasnya.

B. Profil nagari koto malintang

Nagari Koto Malintang berada di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Nagari Koto Malintang terdiri dari 5 jorong, Yakni Jorong Alai, Jorong Ambacang, Jorong Pauah Taruko, Jorong Muko-Muko dan Jorong Rambai. Luas Nagari Koto Malintang 1.783 Ha. Dengan Jumlah penduduk sebanyak 3.814 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 2,14 Jiwa/Ha. Dengan jumlah kepala Keluarga 1.002 KK. Untuk lebih jelasnya tentang Nagari Koto Malintang dapat dilihat pada peta berikut ini:



Sumber : Peta Citra, 2017

Gambar 1. Peta Nagari Koto Malintang

Jumlah penduduk di Nagari Koto Malintang sebanyak 3.814 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Jorong Muko-muko sebanyak 1.134 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit di Jorong Pauh Taruko sebanyak 566 jiwa. Kondisi georafis wilayah nagari terbentang dengan hamparan mayoritas areal persawahan, perbukitan dan tepian danau. Penggunaan lahan di Nagari Koto Malintang di dominasi oleh hutan seluas 1.431 Ha atau 80,2% dari luas nagari. Sementara penggunaan lahan pertanian (sawah) hanya 9,8% dari luas nagari atau seluas 174 Ha. Penggunaan lahan lainnya yakni kebun rakyat seluas 98 Ha. Penggunaan lahan paling sedikit adalah pekarangan yakni 80 Ha atau 4,5% dari luas wilayah.

Nagari Koto Malintang memiliki lahan perbukitan yang cukup luas yang membentang sepanjang Nagari Koto Malintang dibawah bukit barisan. Lahan yang tersedia tersebut dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman unggulan yang disebut dengan PARAK. Parak berlokasi di hutan rakyat dengan Jenis tanaman perkebunan produktif seperti ; Kopi, Cengkeh, durian, petai, kasivera dan berbagai jenis kayu untuk dijadikan kayu olahan.Kawasan hutan yang dimiliki Nagari Koto Malintang,sebagian besar merupakan hutan lindung dan hutan rakyat. Bahkan juga masih ada pohon - pohon yang berukuran besar di Parak. Seperti Pohon Binu sejenis pohon Madang, yang merupakan pohon terbesar di Indonesia. Dalam bidang perikanan masyarakat memanfaatkan kondisi georagfis wilayah yang memiliki tepian/ Danau Maninjau, sehingga masyarakat banyak berusaha melakukan penangkapan ikan secara bebas di danau dengan berbagai peralatan tangkap ikan.

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nagari Koto Malintang terdapat berbagai objek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan karena didukung oleh keindahan alam dan udara yang sejuk berbagai objek wisata yang dapat dikembangkan.Nagari Koto Malintang ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Agam. Dari 11 objek wisata alam yang ada di Kecamatan Tanjung Raya, 4 objek wisata alam ada di Nagari Koto Malintang, yakni Air Terjun Gadih Ranti, Danau Maninjau, Pulau Legenda dan Taman Hutan Raya.



Sumber : Hasil Survei, 2017

Gambar 2. Objek wisata Danau Maninjau di Nagari Koto Malintang



Sumber : Hasil Survei, 2017

Gambar 3. Objek wisata Air Tigo Raso di Nagari Koto Malintang

C. Analisis pengembangan agroekowisata berbasis partisipasi masyarakat

Potensi yang dimiliki oleh Nagari Koto Malintang, baik berupa hutannya yang luas, lahan pertanian, Danau Maninjau dan objek wisata yang dimilikinya memungkinkan nagari ini sebagai desa wisata seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam. Merujuk pada potensi yang dimiliki oleh Nagari Koto Malintang, sebenarnya akan dapat meningkatkan pendapatkan masyarakat setempat jika pengembangan desa wisata Nagari Koto Malintang berbasis agroekowisata dapat dikembangkan.

Pembangunan suatu wilayah akan terlaksana secara baik jika ditopang oleh tiga stakeholder, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Masing-masing stakeholder hendaknya dapat memberikan sumbangsih atau berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan suatu wilayah baik di level makro maupun di tingkat terendah sekalipun. Sehingga dengan modal kebersamaan dan kepedulian masyarakat dalam pengembangan wilayah akan dapat meningkatkan pendapatan bagi wilayah itu sendiri dan terutama bagi masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan melalui kegiatan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut melibatkan warga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Peran pemerintah dalam pemeliharaan kurang berperan, pemerintah daerah setempat hanya menyalurkan bantuan pemberian bibit pohon daridinas kehutanan provinsi. Sementara pihak swasta belum berperan sama sekali dalam pemeliharaan hutan. Masyarakat yang lebih banyak berperan,baik dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan. Baik itu dari masyarakat anak nagari atau anak rantau. Wujud dari peran serta masyarakat berupa pemanfaatan hutan untuk perkebunan dan penanaman 1.000 pohon untuk pelestarian hutan dan bisa di manfaatkan oleh masyarakat setempat. Dalam pemeliharaan hutan Kerapan Adat Nagari (KAN)Koto Malintang sangat menekankan untuk menjaga hutan dan hanya boleh di manfaatkan untuk kepentingan rakyat seperti berkebun. Pengembangan model pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari itu kini dapat ditemui di beberapa jorong di Nagari Koto Malintang yakni Jorong Rambai, Macang, Alai dan Tanjung Alai.Hutan sebagai sumberdaya alam juga dapat dijadikan sebagai lokasi pendidikan maupun penelitian bagi siswa-siswa dan akademisi.Pelestarian pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari ini dilakukan masyarakat dengan menunjuk penjaga hutan.Dampak dari tingginya peran serta masyarakat anak nagari dalam menjaga kelestarian hutan mendapat apresiasi dari negara, sehingga dapat penghargaan kalpataru di tahun 2014.



Sumber : Hasil Survei, 2017

Gambar 5. Kalpataru Nagari Koto Malintang



Sumber : Hasil Survei, 2017

Gambar 4. Pohon Binu, Hutan dan Hamparan Sawah
Objek agroekowisata di Nagari Koto Malintang

Dalam bidang pertanian pada umumnya masyarakat nagari memiliki lahan untuk digarap menjadi lahan persawahan dengan bercocok tanam padi, disamping itu juga dimanfaatkan untuk menanam cabe, jagung, palawija dan lainnya. Demikian juga dengan sektor perikanan, yang memanfaatkan Danau Maninjau guna penangkapan ikan dan budidaya ikan keramba jaring apung. Beberapa areal persawahan juga dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bidang perikanan dengan membuat kolam pembibitan ikan yang nantinya akan dibudidayakan di perairan danau. Namun demikian semua aktifitas perkebunan, pertanian dan perikanan tersebut belum dikaitkan dengan sektor pariwisata. Dalam artian aktifitas tersebut belum dijadikan atraksi wisata. Merujuk pada konsep agroekowisata dan desa wisata yang telah dikemukan sebelumnya, pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan keseharian yang dilakukan masyarakat desa. Dengan demikian, maka dari potensi alam dan aktifitas masyarakat Nagari Koto Malintang dari kegiatan ekonominya, bisa bernilai jual dalam sektor wisata. Selain dari aktivitas wisata itu sendiri, seperti memancing, berperahu dan sebagainya. Karena aktifitas wisata itu sudah ada di kawasan wisata Taman Muko-muko yang berada di Jorong Muko-muko. Belum adanya keterkaitan aktifitas sektor perkebunan, kehutanan, pertanian dan perikanan dengan aktifitas sektor pariwisata atau yang dikenal dengan konsep agroekowisata di nagari ini karena belum adanya pemahaman dari anak nagari dan juga belum adanya pengarahan dan penyuluhan dari dinas pariwisata. Sehingga program pengembangan nagari lebih bersifat pembangunan fisik nagari saja tanpa memperhatikan keterkaitan sektor tadi.

Kegiatan agroekowisata akan dapat menambah peluang usaha bagi masyarakat setempat sehingga mampu meningkatkan finansial masyarakat seperti yang telah di jelaskan Sutawan (2009). Adapun peluang usaha yang dapat dilakukan masyarakat Nagari Koto Malintang seperti menyediakan *home stay* atau jasa penginapan di rumah-rumah masyarakat,menjadi pemandu wisata, menyediakan jasa kuliner/ konsumsi yang merupakan khas daerah, menyediakan atraksi wisata baik budaya maupun pertanian, menjual souvenir atau kenang-kenangan dan menyediakan jasa transportasi tradisional. Untuk dapat terwujud peluang usaha tadi akan lebih baik dimulai dari keolmpok masyarakat, yang berawal dari kelompok tani yang bisa di berdayakan jadi kelompok sadar wisata. Dari kelompok sadar wisata tadi maka bisa diwujudkan melalui badan

usaha seperti koperasi. Agar kegiatan agroekowisata di Nagari Koto Malintang dapat terwujud maka perlu peran dari instansi terkait seperti dinas pertanian, dinas perikanan dan dinas kehutanan serta terutama sekali dinas pariwisata Kabupaten Agam. Maka dari itu butuh program pengembangan agroekowisata di Nagari Koto Malintang ini baik berupa penyuluhan, pelatihan dan studi banding.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Nagari Koto Malintang telah memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama hutan lindung dan hutan rakyat. Namun untuk dapat mewujudkan menjadi desa wisata berbasis agroekowisata masih perlu pembinaan dari pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asyari, Hasbullah (2015) "*Buku Pegangan Desa Wisata*" Pustaka Zeedny, Jogjakarta

Banowati, Eva dan Sriyanto (2013) "*Geografi Pertanian*" Penerbit Ombak, Yogyakarta

Hadiwijoyo, Suryo Sakti (2012) " *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*" Graha Ilmu, Jogyakarta

Mahi, Ali Kabul (2016) "*Pengembangan Wilayah, Teori dan Aplikasi*" Prenadamedia Group, Jakarta

Nugroho, Iwan (2011) "*Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*" Pustaka Pelajar, Yogjakarta

Saragih, Jef Rudianto (2015) "*Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*" Pustaka Pelajar, Jogjakarta

Wahidi, Roestanto (2015) "Membangun Perdesaan Modern" Indec, Bogor

Yulianti, Yayuk dkk (2000) *" Sosiologi Pedesaan"* Leppera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Yusuf, Muri (2014) "*Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*" Prenadamedia Group, Jakarta

Jurnal :

Mircea, Bârsan, dan Lia-Dorica Dogaru, (2015) "Advantages and Limits for Tourism Development in Rural Area (Case Study Ampoi and Mure ú Valleys)," *Science Direct*, 32 , 1050–59

Yang, Z., Cai, J. & Sliuzas, R. (2010) *Agro-tourism enterprises as a form of multi-functional urban agriculture for peri-urban development in China*. Habitat Int.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan ekowisata di Daerah

_____(2009) "*Kamus Penataan Ruang*" Dirjen Tata Ruang, Kementerian Agraria da Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

Pengukuran Kampung Seni Nitiprayan, Yogyakarta Sebagai *Art Based Creative District (ABCD)*

Ratri Winahyu[1], M. Sani Roychansyah[2] dan Dyah Titisari Widyastuti[3]

[1]Magister Desain Kawasan Binaan,
[2]Fakultas Teknik Arsitektur,
[3]Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta
Email: [1]ratriwin@gmail.com, saniroy@ugm.ac.id, [2] dyahtitisariw@ugm.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi kreatif mempengaruhi kota dari berbagai aspek, yang kemudian menuntut kota untuk meningkatkan kompetensi dalam kreativitas. Hal ini juga mempengaruhi Yogyakarta yang dikenal sebagai kota tujuan pariwisata dan pendidikan. Karakteristik pendidikan di Yogyakarta selatan yang lebih mengarah ke seni dan budaya menumbuhkan potensi dibidang industri kreatif, salah satunya di Kampung Seni Nitiprayan yang dikenal sebagai tempat tinggal para seniman. Posisi wilayah yang strategis, berjarak 3 km dari pusat kota Yogyakarta serta termasuk dalam area aglomerasi kota membuat Nitiprayan tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kawasan dengan karakteristik rural-urban. Selain itu, adanya isu fenomena gentrification, yaitu keluarnya penduduk asli dan masuknya pendatang terutama yang berprofesi sebagai seniman dan pekerja seni, membuat perubahan pada setting fisik kawasan Nitiprayan dan sekitarnya. Untuk mengembangkan potensi Nitiprayan sebagai sebuah kluster kreatif, perlu adanya pengukuran mengenai prinsip-prinsip kluster kreatif berbasis seni (Art Based Creative District) di kawasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang membahas mengenai prinsip-prinsip kluster kreatif berbasis seni dengan melihat kondisi eksisting setting fisik yang ada di Nitiprayan dan sekitarnya. Hasil yang ada akan memperlihatkan celah antara prinsip-prinsip Art Based Creative District (ABCD) dan eksisiting yang terjadi di kawasan.

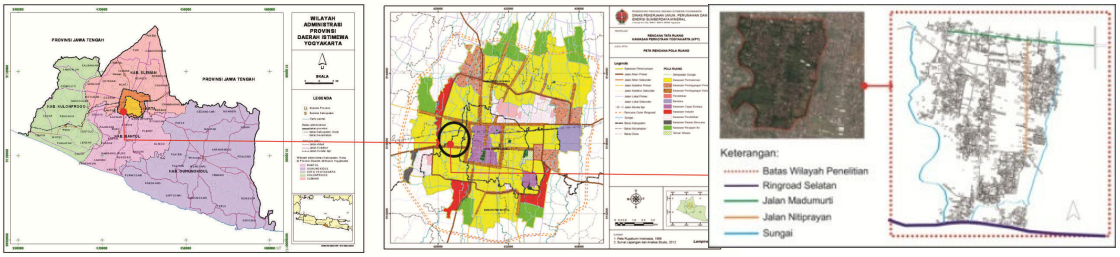
Kata kunci: Klaster, Kreatif, Kampung,Seni, ABCD.

I. PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif dan industri kreatif telah diperbincangkan sejak tahun 2006 oleh pemerintahan Indonesia dengan perancangan Kreatif tahun 2009 meliputi 16 sub sektor. Pemerintahan melalui BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif) menyiapkan kota-kota di Indonesia, salah satunya Yogyakarta untuk diajukan ke UNESCO sebagai kota kreatif. Yogyakarta dikenal sebagai kota tujuan wisata dan pendidikan. Menurut BPS DIY tahun 2015, Yogyakarta memiliki 146 institusi. Hal ini berdampak pada keberagaman dan kemudahan pemanfaatan dan distribusi pengetahuan di Yogyakarta. Dalam hal pendidikan, Yogyakarta memiliki dualisme karakteristik, yaitu di area Yogyakarta utara dan selatan. Yogyakarta utara lebih mengarah ke karakter borjuis sedangkan Yogyakarta selatan mengarah pada karakter bohemian. Karakter borjuis, yaitu kaum yang mendefinisikan keberhasilan, kesuksesan dalam wadah uang dan produktivitas. Karakter bohemian, yaitu sekumpulan orang yang suka otonomi, mendefinisikan sukses bukan dalam angka-angka melainkan sebuah kebahagiaan yang tidak mempunyai standar nilai tertentu (Brooks, 2000). Karakter bohemian di Yogyakarta selatan dipengaruhi oleh pendidikan yang lebih mengarah ke seni dan budaya ditandai pada banyaknya institusi pendidikan berbasis seni dan budaya. Selain itu, terdapat banyak galeri dan *art space* di Yogya selatan dengan perbandingan 8:1 daripada bagian utara. Hal ini menjadi potensi industri kreatif di Yogya selatan. Salah satunya adalah Kampung Seni Nitiprayan yang berada di Kelurahan Ngestiharjo, Bantul.

Berada di area strategis dan berjarak 3 km dari pusat kota serta masih masuk

dalam area aglomerasi kota Yogyakarta, membuat Nitiprayan memiliki karakteristik *rural-urban*. Isu *gentrification* muncul karena keluarnya masyarakat asli dan masuknya pendatang, dalam hal ini adalah pekerja seni dan seniman. Nitiprayan kemudian dikenal sebagai Kampung Seniman, karena banyaknya seniman yang tinggal di kampung tersebut. Hal ini kemudian berdampak pada *setting* fisik yang berubah dari Nitiprayan, yaitu munculnya galeri, komunitas dan tempat seni di Nitiprayan.



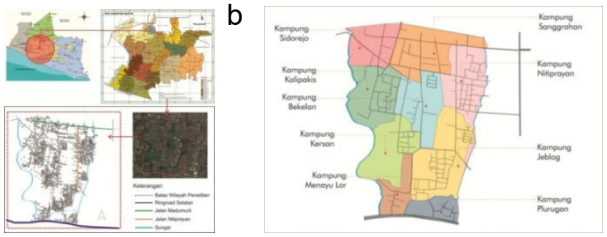
Gambar 1. Peta Lokasi Kawasan Kampung Seni Nitiprayan

Perkembangan Nitiprayan dengan berbagai pengaruh seperti lokasi yang strategis, masuknya pendatang yang menetap dan pengaruh perkembangan perkotaan membuat kampung ini mulai bergeser karakteristiknya menjadi sebuah wilayah industri kreatif. Disebutkan dalam Landry (2008) terdapat tujuh kriteria sebuah wilayah dapat diwujudkan menjadi kawasan kreatif dari berbagai aspek, yaitu kualitas personal; kepemimpinan; keragaman jenis dan bakat manusia; budaya organisasi; identitas lokal; ruang perkotaan dan fasilitas; serta dinamika jejaring. Aspek-aspek inilah yang mungkin mempengaruhi bagaimana Nitiprayan berkembang, selain dari sisi kreatifitasnya juga dari sisi keruangannya. Untuk menjadikan Kampung Nitiprayan dan sekitarnya sebagai sebuah kluster kreatif, maka perlu ditemukan kondisi ideal untuk Kampung Nitiprayan dan sekitarnya sebagai sebuah ABCD melalui pengukuran kondisi nyata yang terjadi di Nitiprayan melalui prinsip-prinsip ABCD. Sehingga timbul pertanyaan penelitian: Bagaimana tingkat prinsip *Art Based Creative Design* (ABCD) di Kampung Seni Nitiprayan?

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, variable dan keadaan yang terjadi di lapangan secara faktual. Metode ini meliputi pengumpulan data, menganalisis, menginterpretasi data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada analisis data. Kawasan penelitian ini berada 3 km dari pusat kota Yogyakarta dan masih masuk kedalam area aglomerasi Yogyakarta. Data yang akan diambil berada di kawasaan Kampung Nitiprayan dan sekitarnya, yaitu Padukuhan Jeblog, Kersan, Kalipakis di Kelurahan Ngestiharjo dan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Kampung Nitiprayan ini akan diteliti berdasarkan sebaran potensi area seni yang merupakan satu kesatuan entitas meliputi Kampung Nitiprayan, Padukuhan Jeblog, Kersan dan Kalipakis. Dalam peta RDTR kabupaten Bantul, 2016, Kampung Nitiprayan, Jeblog dan Kalipakis masuk dalam zona rumah kepadatan tinggi, sedangkan padukuhan Kersan dan Bekelan berada di zona rumah kepadatan sedang. Kawasan penelitian akan dibatasi pada persebaran kegiatan kreatif berbasis seni.

a b



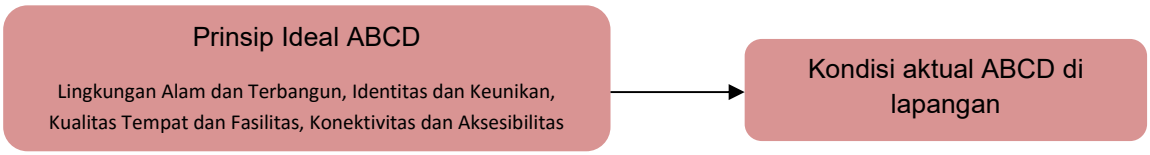
Gambar 2 (a) Peta Lokasi Penelitian; (b) Peta area Penelitian

Data yang diambil pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan angket kuisioner di lapangan menggunakan variable dari *setting* fisik yang terjadi di lokasi amatan serta data sekunder diperoleh dari informasi yang telah dipublikasikan. Pada tahap pertama akan dilakukan pengukuran setting fisik yang ada di Kampung Nitiprayan dan sekitarnya menggunakan variable prinsip ABCD, yaitu lingkungan alam dan terbangun, identitas dan keunikan, kualitas tempat dan fasilitas, konektivitas dan aksesibilitas menggunakan metode observasi langsung.

Tahap kedua akan dilakukan mengambilan data menggunakan angket kuisioner, meliputi 100 responden, terdiri dari 50 masyarakat lokal kawasan yang dibagi menjadi masyarakat asli dan pendatang, serta 50 pengunjung kawasan mengunakan teknik sampel *purposive*. Dari data setting fisik dan kuisioner kemudian didapat seberapa baik Kampung Seni Nitiprayan sebagai sebuah *Art Based Creative District* (ABCD). Prinsip ACBD sendiri didapat dari teori 7 kriteria kreatif kluster oleh Landry (2008), 7 nilai-nilai kawasan kreatif dari Florida (2002) dan teori kreatif kluster di area urban dengan kepadatan rendah oleh Selada (2010). Kemudian ditentukan 2 poin sebagai unsur ABCD, yaitu fisik dan nonfisik. Unsur Non fisik di penelitian ini kemudian hanya digunakan sebagai data pendukung.

Tabel 1. Unsur ABCD dalam Penelitian

	Teori Creative Cluster			Unsur ABCD dalam Penelitiar	
No	Florida (2002)	Landry (2008)	Selada (2010)	Analisis Peneliti (2016)	
1	Pasar Tenaga Kerja	Kualitas Personal	Keadaan Sosial dan Aset Simbolik	Fisik	-Lingkungan Alam dan Terbangun
2	Gaya Hidup	Kepemimpinan	Pemerintahan		-Identitas dan
3	Interaksi sosial	Keragaman Jenis dan Bakat Manusia	Aktivitas Ekonomi dan Fasilitas Kebudayaan		Keunikan Kawasan
4	Keberagaman	Budaya Organisasi	Lingkungan Alam dan Terbangun		-Kualistas Tempat dan Fasilitas
5	Identitas	Identitas Lokal	Konektivitas		-Konektivitas dan
6	Keunikan Tempat	Ruang Perkotaan dan Identitas			Aksesibilitas
7	Kualitas Tempat	Dinamika Jejaring		Non Fisik	-Aktivitas Pendukung

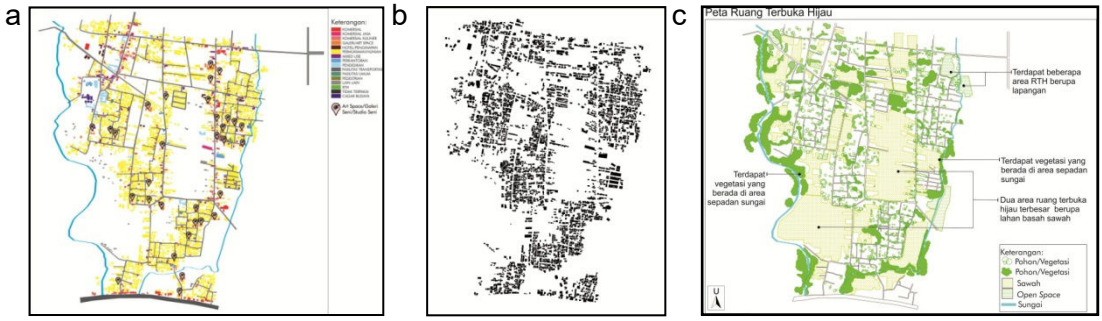


Gambar 3. Prinsip ABCD

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LINGKUNGAN ALAM DAN LINGKUNGAN TERBANGUN

Kondisi ideal lingkungan alam dan terbangun dalam prinsip ABCD memiliki perbandingan yang seimbang, atau mencapai 40:60 antara alam dan terbangun.Lingkungan alam yang dimaksud masih baik, terjaga dan terdapat ruang terbuka publik yang dapat dijangkau masyarakat. Lingkungan terbangun mempunyai keberagaman fungsi guna lahan. Jumlah galeri yang cukup banyak dan berada di satu kawasan, menjadi pusat dan terdapat sebaran fungsi lain yang mendukung atmosfer kreatif di sekitar galeri seperti komersial kuliner, restoran, kafe, dan penginapan di sekitar galeri.



Gambar 4 (a) Peta fungsi guna lahan dan sebaran galeri di kawasan; (b) Peta *figure groun kawasan*; (c) Peta kondisi vegetasi di kawasan (kanan)

Gambar 4 menunjukan fungsi bangunan terdapat lebih dari 80% adalah residensial. Konsentrasi sebaran galeri terbesar ada di area Kampung Nitiprayan dengan pelingkup fungsi pendukung komersial, dan penginapan yang masih tersebar dan sedikit. Terdapat konsentrasi galeri terbesar kedua di padukuhan Jeblog dengan pelingkup area residensial. Untuk lingkungan terbangun dapat dilihat dari area solid peta *figure ground* yang terkonsentrasi di beberapa bagian. Sedangkan lingkungan alam dapat dilihat dari area void yang cukup besar pada peta *figure ground*, serta untuk lingkungan alam dilihat dari kondisi vegetasi pada gambar 4. c yang masih sangat mendominasi. Apabila asumsi setiap rumah memiliki KDB 60% ditambah dengan lahan basah berupa sawah dan ladang di kawasan, maka lingkungan alam di Nitipryan dan sekitarnya memiliki KLH lebih dari 40% yang merupakan nilai minimal cakupan area hijau.

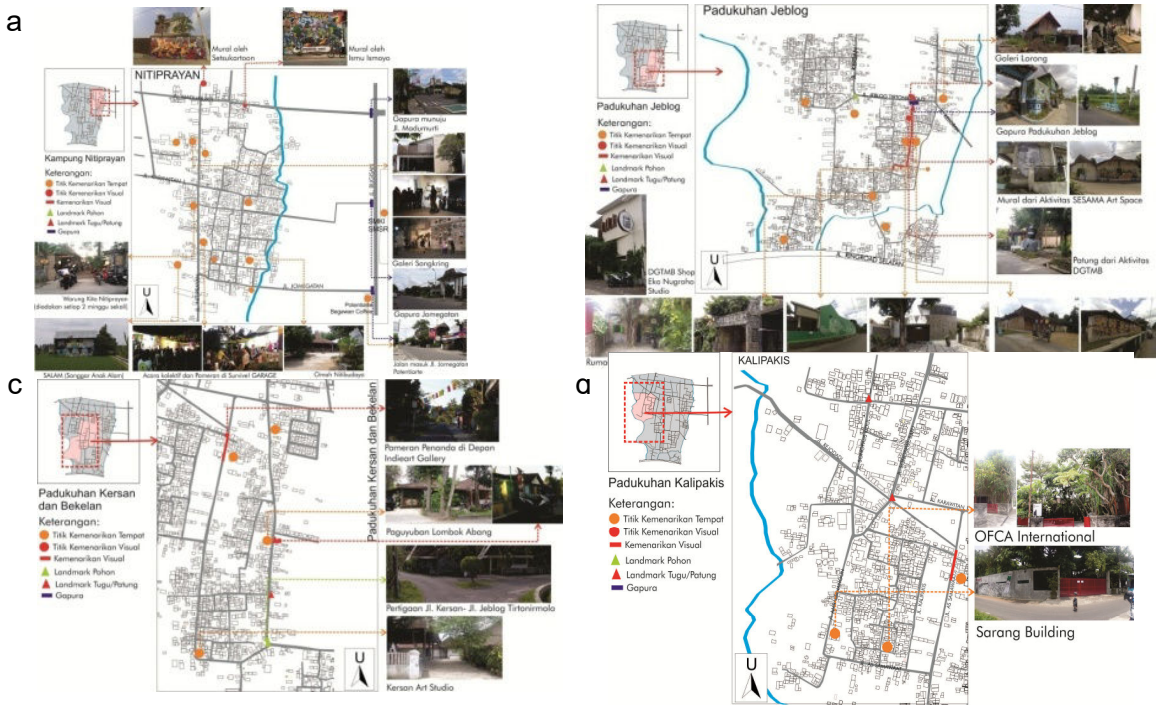


Gambar 5 (a) Bangunan Galeri Sangkring; (b) Area Residensial di Nitiprayan; (c) Kondisi Vegetasi di Nitiprayan

Sedangkan dari kuisioner, responden menyatakan kondisi lingkungan hijau kawasan Nitiprayan masih mendominasi dengan angka 75.6% oleh 50 masyarakat lokal dan 63.2% cukup mendominasi oleh 50 pengunjung kawasan. Setting fisik dengan vegetasi yang lebih dari 40% didukung hasil kuisioner memperlihatkan bahwa lingkungan alam di Nitiprayan masih mendominasi dibanding lingkungan terbangunnya.

B. IDENTITAS DAN KEUNIKAN

Identitas dan keunikan diukur dari kejelasan karakter kawasan atau citra kawasan sebagai kawasan seni. Selain itu juga dilihat dari keadaan atraktivitas seperti *landmark*, pintu masuk dan pemandangan yang khas atau unik dan kreatif, serta kondisi *signage* atau penanda yang unik dan kreatif. Identitas juga dapat dilihat dari citra kawasan dan banyaknya bangunan berbasis seni seperti galeri, *art space* dan banyaknya komunitas yang ada di kawasan.

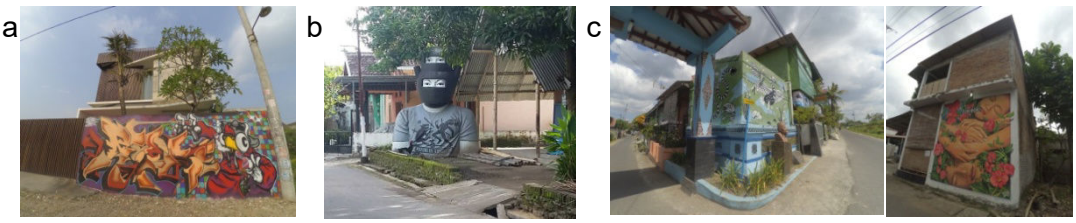


Gambar 6 (a) Titik-titik Atraktivitas di Kampung Nitiprayan; (b) Padukuhan Jeblog; (c) Padukuhan Kersan; (d) Padukuhan Kalipakis

Kampung Nitiprayan dikenal sebagai kampung seni atau kampung seniman yang ada di Yogyakarta berawal dari banyaknya jumlah seniman yang tinggal kemudian berkembang dengan munculnya galeri-galeri seni di kawasan ini.Tercatat 116 orang seniman yang tingga menetap (Profil Desa Ngestiharjo, 2016) dan 54 orang mahasiswa jurusan seni serta pekerja seni yang tinggal sementara (Data dari kepala desa Padukuhan Jomegatan, 2017), terdapat 45 orang seniman yang tinggal menetap (Bappeda Bantul, 2016) dan yang tinggal secara sementara terdapat 63 di sekitar lokasi penelitian (data dari kepala desa Padukuhan Jeblog, Kersan, Kalipakis dan Plurugan, 2017). Jumlah galeri di lokasi penelitian ada sekitar 18, dan terdapat 27 studio seni pribadi, 2 komunitas teater, 3 komunitas kolektif seni, 7 komunitas seni dan budaya dan 1 sekolah berbasis seni, yaitu SALAM.

Kawasan Nitiprayan memiliki pintu masuk dari berbagai arah, tetapi tidak ada gapura khusus yang menandakan kawasan seni. Atraktivitas terbentuk dari keunikan fasad bangunan galeri dan aktivitas yang dilakukan galeri. Ditemukan beberapa *landmark* yang unik hasil dari aktivitas galeri disekitarnya dan pemandangan unik yang diperoleh dari mural dibeberapa tempat di kawasan.

a b c



Gambar 7 (a) Mural di Kampung Nitiprayan; (b) Landmark di Padukuhan Jeblog; (c) Mural di Padukuhan Jeblog

Data dari responden masyarakat lokal menyatakan citra kawasan sebagai kawasan seni kuat dengan angka 64.8% dan 73.6% pengunjung cukup kuat. Selain itu, atraktivitas yang dipengaruhi oleh aktivitas galeri dapat dilihat dari presepsi faktor kemenarikan kawasan untuk dikunjungi, hasilnya terdapat 66.4% masyarakat lokal menyatakan berpengaruh kuat dan 88.8% pengunjung menyatakan sangat berpengaruh kuat. Hal ini memperlihatkan bahwa Nitiprayan dan sekitarnya secara *setting* fisik masih kurang kuat untuk memenuhi kondisi ideal ABCD, sedangkan dari presepsi masyarakat hasil kuisioner, citra kawasan masih cukup kuat sebagai kawasan seni dan aktivitas galeri menjadi kemenarikan tersendiri untuk dikunjungi.

C. KUALITAS TEMPAT DAN FASILITAS

Kualitas tempat di prinsip ABCD diperlihatkan dari keberagaman langgam bangunan tua dan muda di kawasan, adanya area preservasi, serta jumlah dan jenis fasilitas publik yang memadai. Nitiprayan berada di area aglomerasi kota Yogyakarta dengan fungsi residensial yang mendominasi, memiliki karakter bangunan kampung dengan ketinggian 1 lantai yang mulai bercampur dengan karakter modern kota. Untuk langgam bangunan, terdapat keberagaman dari bangunan *modern* dan bangunan tradisional yang khas seperti rumah atap kampung hingga joglo tetapi tidak terlalu banyak. Fasad galeri sendiri membuat keunikan tersendiri dengan fasad *modern* kontemporernya, selain itu karakter fasad rumah tinggal lain di kawasan hampir serupa.

a b



Gambar 8. (a) Bangunan Berlanggam Tradisional; (b) Langgam Modern



Gambar 9. Bangunan Galeri yang ada di Kawasan

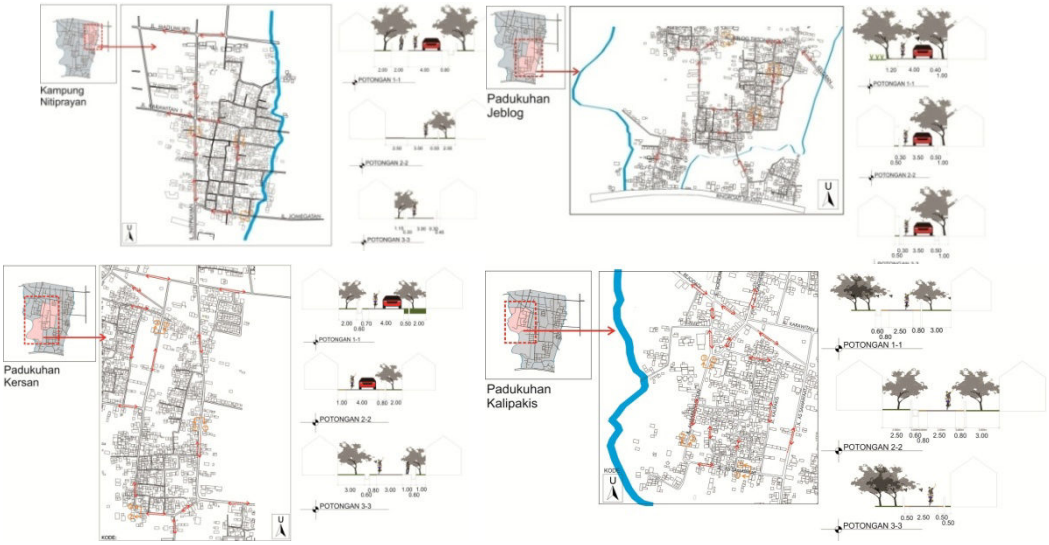
Kawasan memiliki satu area preservasi, yaitu cagar budaya yang ada di Padukuhan Kalipakis. Sedangkan untuk keadaan amenities atau fasilitas publik

seperti street furniture hampir tidak ditemukan di kawasan. Kawasan memiliki fasilitas listrik dan, hanya saja saat malam, kawasan masih gelap. Dari hasil kuisioner, fasilitas pendukung menurut 50 masyarakat 78.8% menyatakan baik dan 50 pengunjung 47.2% kurang baik, memperlihatkan fasilitas yang masih kurang baik untuk pengunjung. Dari setting fisik dan kuisioner yang ditemukan untuk prinsip kualitas tempat dan fasilitas, dinilai kurang cukup baik karena kurang memiliki kualitas tempat dan fasilitas yang kurang baik untuk sebuah kluster kreatif berbasis seni.

D. KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS

Konektivitas dan aksesibilitas dalam prinsip ABCD ditentukan dengan kejelasan serta kemudahan akses dan konektivitas sirkulasi di dalam kawasan. Hal ini dapat dilihat dari sistem transportasi, jenis atau moda transportasi, jenis sirkulasi hingga sistem parkir di kawasan.Selain itu, konektivitas juga dapat dilihat dari jejaring atau kondisi keterbukaan sosial dalam masyarakat yang ada di kawasan.

Kawasan Nitiprayan hanya berjarak 3 km dari pusat kota Yogyakarta membuat Nitiprayan mudah untuk dicapai, tapi kawasan ini berada diluar jangkauan transportasi publik seperti bus. Jalan di kawasan merupakan jalan lokal dan lingkungan dengan jalan lokal 4-6 meter dan jalan lingkungan 2-4 meter. Sistem jalan memakai 2 lajur kendaraan dan tidak mempunyai jalur pedestrian dan jalur sepeda khsusus. Moda transportasi yang mendominas adalah kendaraan bermotor roda dua, juga terdapat kendaraan bermotor roda 4 dan sepeda.



Gambar 10. Sistem Lajur Jalan dan Potongan Jalan di Kawasan

Sistem parkir yang ada di kawasan Nitiprayan dan sekitarnya terdapat parkir on dan *off street*. Parkir *off street* muncul dari bangunan yang menyediakan lahan parkir kendaraan, sedangkan parkir *on street* muncul karena tidak ada area khusus untuk parkir atau lahan parkir *off street* tidak mencukupi sehingga timbul luapan kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Hampir seluruh jalan di kawasan digunakan sebagai parkir *on street*.

a  b  c  d 

Gambar 11 (a) Kondisi Parkir di Sangkring saat malam hari; (b) Kondisi parkir di Warung Kita Nitiprayan; (c) Kondisi parkir *on street* Survive!Garage; (d) Kondisi parkir *off street* Survive! Garage

Hasil Kuisioner untuk presepsi masyarakat lokal pada kemudahan aksesibilitas kawasan adalah mudah diakses dengan nilai 75.2% dan 63.6% cukup mudah diakses. Sedangkan nilai untuk lokasi yang strategis, masyarakat lokal menyatakan lokasi strategis 75.6% dan 63.2% cukup strategis bagi pengunjung. Untuk kondisi keterbukaan sosial, masyarakat lokal 82% baik dan sangat baik 79.6% bagi pengunjung. Hasil ini memperlihatkan bahwa secara *setting* fisik, Nitiprayan memiliki aksesibilitas yang kurang baik karena sulit dijangkau dengan transportasi publik, serta konektivitas yang kurang baik karena masih berupa jalan lokal dan lingkungan tanpa adanya jalur pedestrian dan jalur sepeda yang disendirikan. Sedangkan menurut presepsi masyarakat lokal, konektivitas dan aksesibilitasnya cukup baik dan cukup mudah diakses. Dari hasil observasi dan hasil kuisioner yang telah dilakukan, terdapat beberapa fakta di lapangan yang menjadi konsentrasi dalam penelitian. Berikut prinsip ideal ABCD dan pengukuran kondisi actual ABCD di lapangan.

Tabel 2. Prinsip ABCD dalam Penelitian

Unsur ABCD dalam Penelitian		Prinsip dalam ABCD	Indikator	Penilaian	Konteks Nitiprayan
FISIK	Lingkungan Alam	Lingkungan Alam yang seimbang dan alami (presentase alam minimal 40%)	-Vegetasi	Ada, cukup banyak	Lingkungan alam yang mendominasi, dinilai memenuhi prinsip ABCD.
			-Ruang Terbuka	Terdapat ruang terbuka berupa Sawah dan ladang pribadi Dominasi lebih dari 40%	
	Lingkungan Terbangun	Lingkungan terbangun bervariasi, menarik dan seimbang dengan lingkungan alam.	-Sebaran Bangunan	Sebaran di sekitar galeri masih kurang kuat	Lingkungan terbangun memiliki potensi seni, tapi masih kurang kuat dalam variasi fungsi guna lahannya, dinilai cukup memenuhi prinsip ABCD.
			-Fungsi Bangunan	Fungsi bangunan didominasi area residensial dan kurang bervariasi	
			-Kepadatan Bangunan	Terdapat konsentrasi kepadatan di titik-titik	
	Identitas dan Keunikan	Identitas yang unik, kuat dan autentik/asli	-Kejelasan karakter kawasan (citra kawasan)	Citra sebagai Kampung seni cukup kuat, dengan karakter kawasan kurang menonjol	Kejelasan citra kawasan kurang kuat. Tapi mempunyai potensi atraktivitas keunikan dalam hal seni dilihat dari jumlah galeri dan art space, sayangnya belum
			-Atraktivitas (landmark, gate, view)	Atraktivitas ada, kurang kuat dan kurang menyebar	
			-Signage	Signage kurang, hampir tidak ada	

				tersebar ke seluruh kawasan dengan rata. Dianggap belum cukup memenuhi prinsip ABCD.
Kualitas Tempat dan Fasilitas	Kualitas tempat yang lengkap dan beragam, fasilitas atau amenities dengan kondisi yang baik	- Langgam bangunan	Variasi langgam ada yang modern dan tradisional, untuk keseluruhan masih kurang kuat, masih banyak bangunan dengan fasad yang hampir serupa	Variasi langgam masih kurang banyak, dengan area preservasi yang kurang baik. Tidak memiliki fasilitas yang mencukupi, membuat kawasan tidak memenuhi prinsip ABCD.
		- Preservasi	Hanya terdapat 1 area preservasi dan kondisi kurang baik	
		- Jenis Fasilitas	Fasilitas hanya berupa listrik, penerangan, untuk street furnitur hampir tidak ditemukan	
		-Jumlah Fasilitas	Fasilitas seperti street furniture hampir tidak ditemukan	
Konektivitas dan Aksesibilitas	Ada konektivitas antar area yang baik. Tingkat aksesibilitas kawasan yang tinggi. Jalur pedestrian yang baik, ada transportasi publik yang menghubungkan antar kawasan. Sistem Parkir yang baik	-Sistem Transportasi	Tidak ada transportasi publik yang masuk ke kawasan	Kondisi konektivitas cukup, tapi memiliki tingkat aksesibilitas yang kurang baik kerena masih susah dijangkau oleh pengunjung pejalan kaki, belum ada transportasi publik. Area parkir yang belum ditata. Hal-hal ini membuat
		-Sistem Sirkulasi	Jalan dengan 2 lajur kendaraan, lebar masih kurang/sempit. Tidak ada jalur pedestrian Moda transportasi terbatas, didominasi kendaraan pribadi	
		-Jenis/Moda transportasi	Moda transportasi terbatas, didominasi	

		kendaraan pribadi	kawasan belum memenuhi prinsip ideal ABCD.
	-Sistem Parkir	Sistem parkir masih belum ditata, hampir semua berupa parkir *on street* dan tidak ada kantung parkir yang jelas.	

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kondisi ABCD di lapangan masih jauh dari kondisi ideal ABCD yang menjadi sebuah prinsip kawasan kreatif. Banyak kondisi *setting* fisik yang tidak memenuhi variabel dari prinsip ABCD. Tetapi hal ini berbeda halnya dengan citra kawasan sebagai sebuah Kampung Seni yang telah melekat di telinga masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil kuisioner yang memiliki presepsi nilai ABCD cukup baik dari masyarkat, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang kemudian bisa mengintegrasikan kawasan menjadi sebuah kampung yang kreatif dan dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan.

IV. KESIMPULAN

Sebuah kreatif kluster berbasis seni yang baik akan terbentuk apabila dapat memenuhi prinsip-prinsip ABCD. Hal ini menjadi dasar karena ekosistem kreatif menjadi dasar untuk mengundang orang kreatif datang, kemudian atmosfer kreatif tercipta sehingga kreativitas dapat muncul. Ini menjadi penting untuk menciptakan sebuah lingkungan kreatif sebagai dasar pengembangan ekonomi kreatif. Sayangnya, dalam pengukuran Kampung Seni Nitiprayan yang dilakukan, ternyata mendapatkan hasil yang kurang atau cukup buruk untuk memenuhi prinsip ideal ABCD.

Hal ini diperlihatkan melalui pemenuhan nilai Kampung Nitiprayan melalui prinsip ABCD. Nitiprayan dalam hal kondisi lingkungan alam dan terbangun, kondisi eksisting hanya memenuhi prinsip lingkungan alamnya, sedangkan prinsip lingkungan terbangunnya masih kurang cukup kuat. Nitiprayan secara *setting* fisik, dinilai melalui identitas dan keunikan kawasan, kualitas tempat dan fasilitas kawasan, serta konektivitas dan aksesibilitas kawasan masih dibawah ukuran prinsip kawasan sebagai ABCD. Tetapi, berbeda dengan presepsi masyarakat di kawasan, mereka menilai bahwa kawasan Nitiprayan dan sekitarnya telah memiliki identitas dan keunikan serta tingkat konektivitas dan aksesibilitas kawasan yang mudah dan cukup baik. Masyarakat menilai cukup puas dengan Kampung Seni Nitiprayan sebagai ABCD, tapi berbeda halnya dengan temuan di lapangan. Hal ini menunjukan butuhnya kawasan Nitiprayan dan sekitarnya untuk lebih meningkatkan kualitas *setting* fisiknya dengan menyesuaikan prinsip-prinsip yang ditentukan sebagai sebuah *Art Based Creative District* (ABCD).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. (2016). Bantul dalam Angka, Yogyakarta, BPS Kabupaten Bantul

Brooks, David. (2000). *Bobos in Paradise*. New York: Simon and Schuster.

Florida, Richard. (2002). *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.

Landry C. (2000). *The Creative City : Toolkit for Urban Innovators, Earthscan Publication Ltd. London*

Kelurahan Ngestiharjo. (2016). Profil Desa Ngestiharjo 2016. Kelurahan Ngestiharjo kabupaten Bantul

Jurnal :

Selada, Catarina, da Cunha Inês Vilhena, Tomás, Elisabete. 2010. *Creative Clusters in Low Density Urban Areas: A Case Study Approach.* INTELI, nº 11, 4º - 1070-072 Lisboa, Portugal

Pengembangan Desa Wisata Karangtengah Berbasis Kearifan Lokal

Dwinda Tanaya Cipta[1], **Ratna Eka Suminar**[2]

Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada
Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaa
Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Email:dwindatanaya@gmail.com ; ratnaekasuminar@gmail.com

ABSTRAK

Desa Wisata Karangtengah adalah desa wisata yang berada di lokasi rawan bencana longsor dan gempa bumi namun memiliki potensi kearifan lokal yang menarik jika dijadikan sebagai daya tarik wisata. Potensi tersebut berupa wisata alam, kerajinan, kesenian, dan kuliner. Akan tetapi, pengelolaan potensi wisata belum maksimal sehingga kegiatan wisata kurang hidup dan tidak menarik wisatawan. Untuk mengatasi itu, diperlukan rekomendasi yang tepat dalam penataan kawasan, pengembangan kegiatan wisata, serta peningkatan kapasitas kawasan dalam menghadapi bencana alam. Rekomendasi ditemukan dengan metode gap analysis dan partisipatif melalui elaborasi teori kearifan lokal, kepariwisataan, dan kebencanaan dengan melibatkan stakeholder dalam memberikan informasi masalah serta masukan rekomendasi. Adapun hasil temuan rekomendasi dalam pengembangan Desa Wisata Karangtengah mengandung 3 (tiga) nilai terapan yaitu kearifan lokal, atraktif, dan kenyamanan. Kearifan lokal memuat konsep desa wisata yang menjadikan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata. Atraktifmemuat konsep desa wisata yang menawarkan berbagai kegiatan wisata serta mengajak wisatawan berinteraksi langsung dengan masyarakat.Kenyamanan memuat penyediaan fasilitas desa wisata, aksesibilitas, serta RTH publik agar masyarakat dan wisatawan nyaman. Rekomendasi pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Desa Karangtengah tidak menyebabkan keterpaksaan karena keunikan wisata berasal dari desa itu sendiri dan tidak akan menghilangkan identitas desa dan masyarakat setempat.

Kata kunci: pariwisata, desa wisata, kearifan lokal, partisipasi masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah wisata yang banyak diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara karena memiliki beragam potensi wisata. Salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki beragam daya tarik wisata adalah Kabupaten Bantul.

Visi dalam RIPPARDA “Bantul Menjadi DestinasiPariwisata Utama Indonesia yang Bernuansa Harmoni Alam dan Budayauntuk Kesejahteraan Masyarakat”, menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mengedepankan pembangunan kepariwisataan berbasis alam dan budaya.Kondisi alam yang cukup majemuk serta eksotisme budaya yang dimiliki membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Bantul, salah satunya adalah desa wisata.Salah satu desa wisata di Kabupaten Bantul yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah Desa Wisata Karangtengah yang berada di Kecamatan Imogiri.

Desa Karangtengah merupakan salah satu desa yang mengalami kerusakan cukup parah ketika bencana gempa bumi melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 27 Mei 2006 silam.Kejadian gempa bumi yang melanda Kabupaten Bantul pada tahun 2006 silam tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk mengembangkan potensi Desa Wisata Karangtengah.

Potensi wisata yang dapat dikembangkan di Desa Wisata Karangtengah adalah

kearifan lokal masyarakat yang masih dilakukan dalam kehidupan sehari- hari seperti batik tulis dengan pewarna alami, kerajinan keris, tradisi *wiwitan* dalam menyambut musim tanam padi, serta adanya petilasan Watu Wedok yang berhubungan dengan sejarah berdirinya Makam Raja- Raja Imogiri. Selain itu, terdapat potensi wisata alam, kesenian, dan kuliner yang dapat dikembangkan di desa wisata ini.

Sutarso (2014) mengatakan bahwa produk budaya lokal memiliki nilai-nilai yang tinggi, baik nilai-nilai yang bersifat filosofis maupun sosiologis yang dianggap lebih eksotis jika dibandingkan dengan budaya massa (*mass culture*). Potensi kearifan lokalyang dimiliki Desa Karangtengah dapat menjadi daya tarik wisata jika dikemas dengan paket wisata yang menarik.

Akan tetapi dalam pengembangannya, jumlah wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Karangtengah terus menurun sehingga diperlukan rekomendasi untuk perbaikan dalam penataan kawasan wisata. Selain penataan kawasan wisata dan pengembangan kegiatan wisata, mulai meningkatnya tren wisatawan untuk menginap di *homestay* yang disediakan Desa Wisata Karangtengah juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana alam.Rekomendasi dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah setempat dalam pengembangan desa wisataberbasis kearifan lokal, khususnya untuk Desa Wisata Karangtengah.

1.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup kawasan penelitiansecara administratif berada di Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul seluas ±185 Ha dengan skala 1:7.250. Deliniasi perencanaan menggunakan batas fungsional desa wisata yaitu di Dusun Mojolegi dan Karangrejek. Desa Wisata Karangtengah memiliki batas- batas sebagai berikut:

Utara : Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri
Timur : Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo
Selatan : Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri
Barat : Dusun Pucunggrowong, Dusun Karangtengah



Sumber : Google Map, 2016 dan analisis penulis, 2016

Gambar 1.Peta Lokasi Perencanaan

1.3 Tujuan

Rekomendasi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan wisata dengan menjadikan Desa Wisata Karangtengah yang atraktif, nyaman, serta mengedepankan kearifan lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata.

II. METODE

Gap analysis merupakan salah satu alat evaluasi kinerja pelayanan publik, khususnya dalam upaya mengembangkan desa wisata dan penanggulangan

bencana.Metode ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara tolok ukur perencanaan yang merupakan hasil elaborasi dari teori kearifan lokal, kepariwisataan, kebencanaan, serta elemen perancangan *desa* dari elemen perancangan kota oleh Shirvani (1985) dengan kondisi eksisting lapangan.Kesenjangan antara tolok ukur dengan kondisi lapangan kemudian dijadikan sebagai acuan rekomendasi pengembangan desa wisata.

Tabel 1.Tolok Ukur dan Pedoman Rekomendasi

Variabel	Tolok Ukur	Pedoman
Guna Lahan	Permukiman penduduk berada pada zona aman bencana	Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014
	Kegiatan wisata tidak membahayakan wisatawan	
Sirkulasi dan parkir	Mampu menghubungkan antar kegiatan wisata	Shirvani (1985), 5A Tourism Western Australia (2009)
	Jarak tercepat dan ternyaman yang menghubungkan zona evakuasi dan dapat diakses oleh kendaraan pemberi bantuan	Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, Buku Panduan Fasilitator Desa Tangguh Bencana Tahun 2015
	Memiliki tempat parkir pada pusat kegiatan wisata	Preseden Desa Wisata Pentingsari
Atraksi dan Fasilitas Wisata	Destinasi wisata menawarkan kegiatan yang beragam	5A Tourism Western Australia (2009), syarat desa wisata (Hadiwijoyo, 2012), kunci kesuksesan pariwisata perdesaan (Wilson, 2001)
	Potensi wisata dikelola menjadi paket atau kegiatan yang menarik	5A TWA (2009),), syarat desa wisata (Hadiwijoyo, 2012), kunci kesuksesan pariwisata perdesaan (Wilson, 2001), Bentuk Kearifan Lokal (Koentjaraningrat, 1990)
	Terpenuhinya fasilitas di wisata alam Boekit Hijau, tempat pelatihan kerajinan, ruang atraksi kesenian, masjid, rumah makan, tempat pelatihan, homestay untuk mengakomodasi wisatawan	Shirvani (1985), Bentuk Kearifan Lokal Koentjaraningrat (1990), dimensi kearifan lokal menurut Ife (2002) dalam Unayah (2006)
	Kondisi fisik fasilitas wisata baik	Shirvani (1985), Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014
	Memiliki bentuk atau corak identitas kawasan	Shirvani (1985), dimensi kearifan lokal menurut Ife (2002) dalam Unayah (2006), Bentuk Kearifan Lokal Koentjaraningrat (1990)
Ruang Terbuka Publik	Ruang terbuka mikro belum terpenuhi karena hanya terdapat 2 lapangan sepakbola dan 1 lapangan badminton sebagai RTH publik yang berfungsi sebagai Ruang terbuka meso	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Nurfatimah (2011)
	Terdapat fasilitas pendukung evakuasi bencana (tenda pengungsian, genset, P3K, dan saluran air)	Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, Buku Panduan Fasilitator Desa Tangguh Bencana Tahun 2015
Media Informasi Desa Wisata	Papan informasi wisata yang informatif dan dwibahasa	Shirvani(1985)
	Terdapat papan informasi bencana dan papan penunjuk jalur evakuasi bencana yang merata dan mudah dibaca	Landscape Architect's Pocket Book (2009) dalam Nurfatimah (2011)

Sumber: Penulis (2017)

Selanjutnya penulis melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang berisi presentasi sekaligus konsultasirekomendasi dengan para *stakeholder* Desa Wisata Karangtengah, yaitu kepala pokdarwis, perwakilan pihak kelurahan, pengrajin batik dan keris, serta kepala FPRB Desa Karangtengah. Kegiatan FGD bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam serta kesepakatan rekomendasi dalam pengembangan desa wisata. Metode partisipatif ini diharapkan juga mampu membangun kesadaran masyarakat atas permasalahan dan membangkitkan motivasi untuk menangani permasalahan desa wisata.

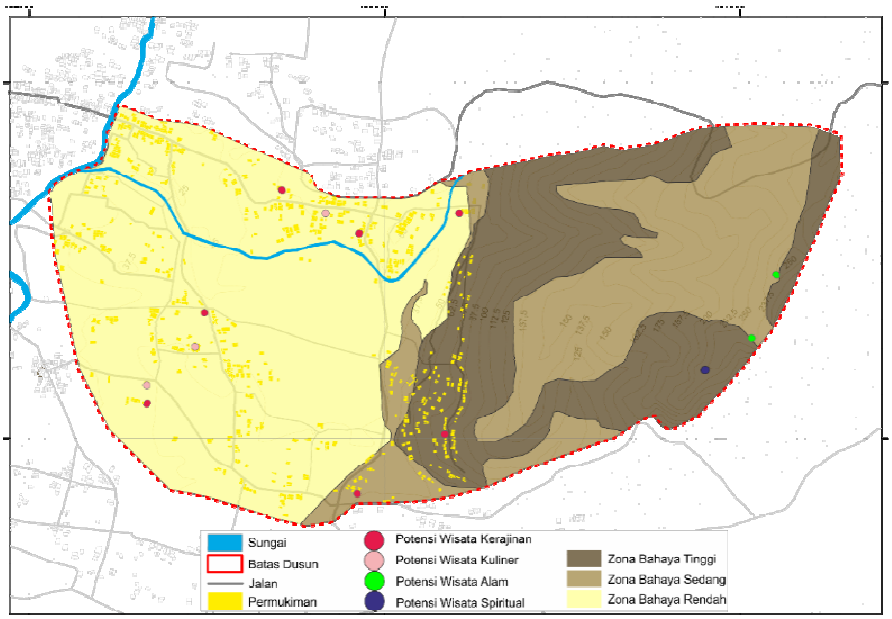
III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan FGD yang dilakukan bersama para stakeholder Desa Wisata Karangtengah diperoleh kesepakatan yang berbentuk rekomendasi dalam pengembangan Desa Wisata Karangtengah selanjutnya.

3.1 Rekomendasi

1. Guna lahan

Pada keadaan eksisting, Pemanfaatan lahan sebagai kawasan wisata belum sepenuhnya optimal karena masih terkonsentrasi di desa wisata bagian bawah. Kegiatan wisata di kawasan Boekit Hijau sudah tidak aktif akibat menurunnya daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Boekit Hijau.Selain itu, pemilihan lokasi permukiman serta kegiatan produksi kerajinan masih berada di zona bahaya longsor. Keadaan ini tentunya membahayakan masyarakat serta wisatawan jika tidak adanya pengaturan kegiatan wisata di zona bahaya tersebut.



Sumber: Penulis (2017)

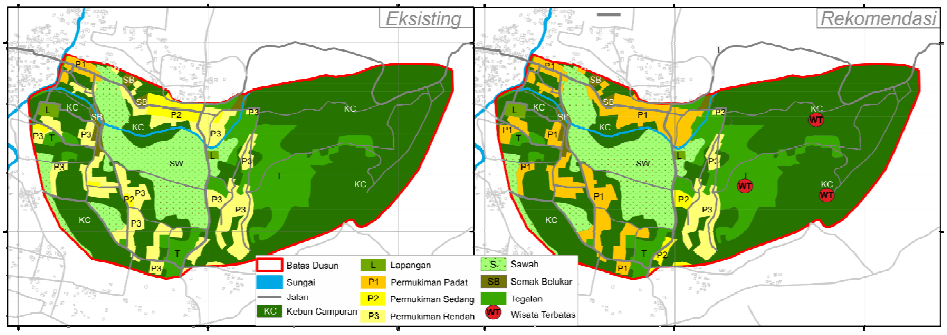
Gambar2.Peta Kerawanan Tanah Longsor terhadap Atraksi Wisata

Rekomendasi pemanfaatan guna lahan berupa pembatasan kepadatan permukiman dan kegiatan wisata yang berada di zona bahaya bencana. Kepadatan permukiman dibagi menjadi 3(tiga) kelas yaitu permukiman berkepadatan tinggi, sedang, dan rendah.

Permukiman berkepadatan tinggi diperbolehkan dibangun di zona aman. Pada zona aman ini kegiatan wisata tidak dibatasi. Pada zona bahaya sedang, hanya diperbolehkan untuk dibangun permukiman dengan kepadatan sedang. Selanjutnya untuk zona bahaya tinggi hanya boleh dibangun permukiman berkepadatan rendah. Pembatasan kepadatan permukiman pada zona bahaya bertujuan untuk mengurangi risiko bahaya.Selain pembatasan kepadatan permukiman pada zona bahaya,

pengaturan terhadap kegiatan wisata juga dilakukan. Hal ini mengingat pada kawasan Boekit Hijau memiliki potensi wisata untuk dikembangkan karena terdapat potensi wisata spiritual petilasan Watu Wedok serta pemandangan alam yang indah.

Jenis kegiatan wisata yang diperbolehkan pada area wisata terbatas adalah kegiatan wisata yang tidak memerlukan pembangunan fisik, seperti *camping,outbound* alam, dan *tracking* sepeda gunung. Selain itu, dengan tetap mempertahankan kawasan Boekit Hijau sebagai kawasan yang asri sebagai area perkebunan rakyat juga dilakukan.



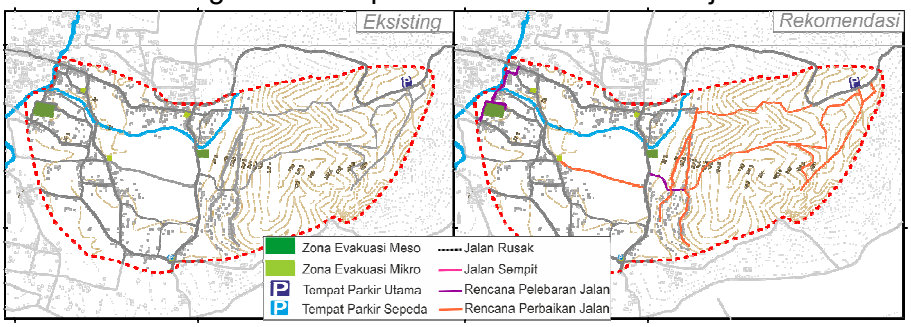
Sumber: Penulis (2017)

Gambar3.Peta Guna Lahan Eksisting dan Rekomendasi

2. Sirkulasi dan parkir

Sirkulasi dan parkir dapat mempengaruhi aksesibilitas pada sebuah destinasi wisata. Semakin baik aksesibilitas, maka semakin tinggi daya tarik dari destinasi wisata tersebut. Pada kondisi eksisting, beberapa ruas jalan di desa wisata rusak sehingga sirkulasi wisatawan menuju atraksi wisata terganggu serta dapat menghambat dalamproses evakuasi ketika terjadi bencana. Selain itu, belum terdapat tempat parkir untuk mengakomodasi wisatawan di sekitar wisata kerajinan dan kesenian. Penyediaan tempat parkir masih berada di desa wisata bagian atas.

Rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah perbaikan ruas jalan yang rusak serta penyediaan tempat parkir di desa wisata. Perbaikan jalan dan penyediaan tempat parkir. tersebut bertujuan untuk memudahkan wisatawan menuju atraksi wisata serta berguna dalam proses evakuasi ketika terjadi bencana.



Sumber: Penulis (2017)

Gambar4.Peta Sirkulasi Eksisting dan Rekomendasi

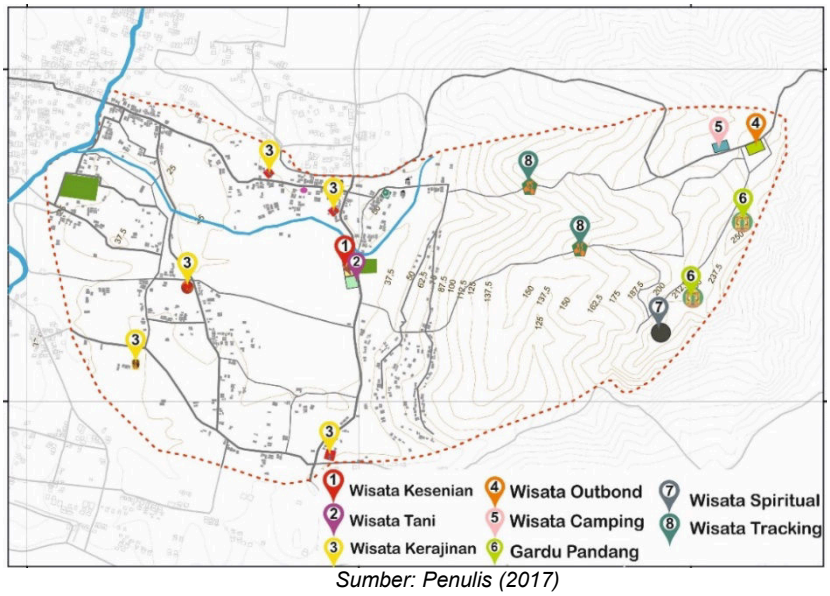


Sumber: Penulis (2017)

Gambar5. Kondisi Jalan Eksisting dan Rekomendasi

3. Atraksi Wisata dan Fasilitas Wisata

Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pengembangan ragam kegiatan wisata agar semakin banyak pilihan yang dapat dilakukan wisatawan ketika berada di Desa Wisata Karangtengah. Ragam kegiatan wisata yang dapat dikembangkan adalah dengan pemanfaatan kearifan lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata yang unik dan khas dari Desa Karangtengah. Pengembangan kegiatan wisata menyebar di pusat-pusat kegiatan yang ada di desa wisata.



Sumber: Penulis (2017)

Gambar6.Peta Rekomendasi Atraksi Wisata

Kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata adalah wisata kesenian, kerajinan, wisata sepeda gunung, outbound, dan camping di alam bebas, wisata spiritual watu wedok, serta wisata tani. Dalam kegiatan wisata tersebut, wisatawan dapat berinteraksi dan belajar langsung dari masyarakat setempat.



Sumber: Penulis (2017)

Gambar7.Ilustrasi Kegiatan Wisata

Untuk mendukung aktivitas wisata, penyediaan fasilitas wisata juga harus diperhatikan agar wisatawan dapat dengan nyaman menikmati atraksi wisata. Fasilitas wisata direncanakan untuk memberikan rasa kenyamanan dan kesan para wisatawan melalui bentuk yang berciri khas kawasan. Selain untuk memberikan kenyamanan dan kesan untuk wisatawan, bentuk bangunan merupakan bagian dari bentuk kearifan lokal yang bersifat *tangible (*Koentjaraningrat, 1990).

Rekomendasi dalam penyediaan fasilitas Desa Wisata Karangtengah adalah penyediaan ruang pelatihan kerajinan dan kesenian, perbaikan pendopo di area camping ground, serta penyediaan pusat desa wisata yang berfungsi sebagai sekretariat desa wisata, sentra kuliner, serta *showroom* kerajinan Desa Wisata Karangtengah.

Bentuk arsitektural jawa seperti joglo dan limasan dipilih dalam perencanaan beberapa fasilitas di desa wisata karena berdasarkan pengalaman gempa 2006 silam, rumah dengan berbentuk limas dan joglo tersebut memiliki ketahanan terhadap gempa. Penyediaan fasilitas wisata yang unik dan memiliki ciri khas kawasan juga dapat memberikan kesan bagi wisatawan ketika mengunjungi Desa Wisata Karangtengah. Pembangunan dan perbaikan fasilitas wisata yang memiliki ciri khas kawasan dilakukan di pusat- pusat kegiatan wisata, seperti pusat desa wisata, ruang pelatihan kerajinan maupun kesenian.



Sumber: Penulis (2017)

Gambar8.Kondisi Eksisting dan Ilustrasi Kondisi Rekomendasi Fasilitas Wisata

5. Ruang terbuka

Kekeluargaan di pedesaan seringkali ditunjukkan dengan berkumpulnya masyarakat pada sore hari untuk berbincang- bincang. Pada kondisi eksisting, kebutuhan masyarakat terhadap ruang terbuka publik yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi di sekitar permukiman warga belum terpenuhi. Pemanfaatan lahan kosong sebagai ruang terbuka publik yang atraktif di sekitar permukiman warga sangat mungkin untuk dilakukan.

Ruang terbuka publik berperan sebagai ruang aktivitas masyarakat maupun untuk menambah daya tarik wisatawan. Selain itu ruang terbuka publik dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul dan zona evakuasi ketika terjadi bencana. Pengalaman bencana

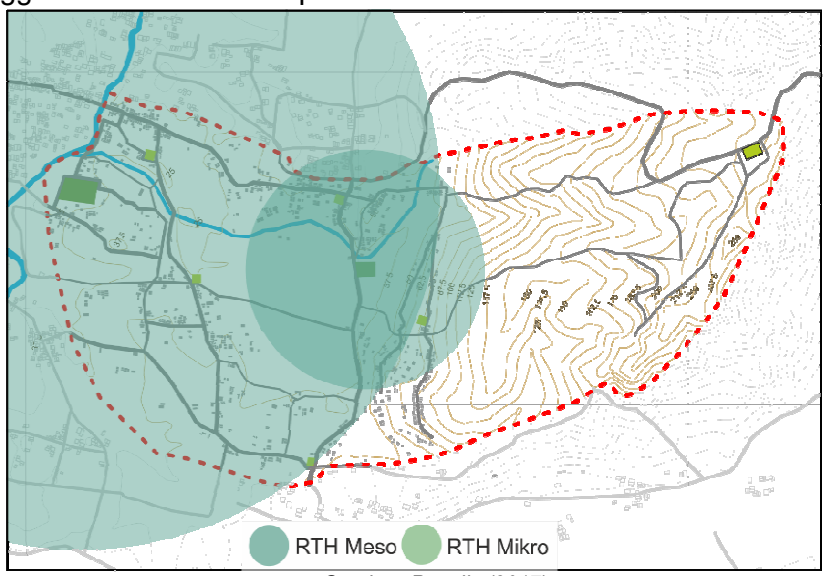
gempa bumi pada tahun 2006 silam memberikan pelajaran pada masyarakat Desa Karangtengah untuk lebih *aware* bahwa ketika terjadi bencana gempa bumi sebisa mungkin untuk mencari tanah lapang atau tanah kosong sebagai tempat evakuasi sementara maupun sebagai tempat pengungsian.Rekomendasi penyediaan ruang terbuka berlandaskan pada standar minimal ruang terbuka berdasarkan luas minimal serta jumlah penduduk yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Standar luas ruang terbuka dan zona evakuasi

Zona	Lokasi	Luas	Daya Tampung
Mikro	RT	350 m2	60 KK / 250 jiwa / 5 tenda peleton
Meso	RW	3850 m2	625 KK / 2500 jiwa / 55 tenda peleton

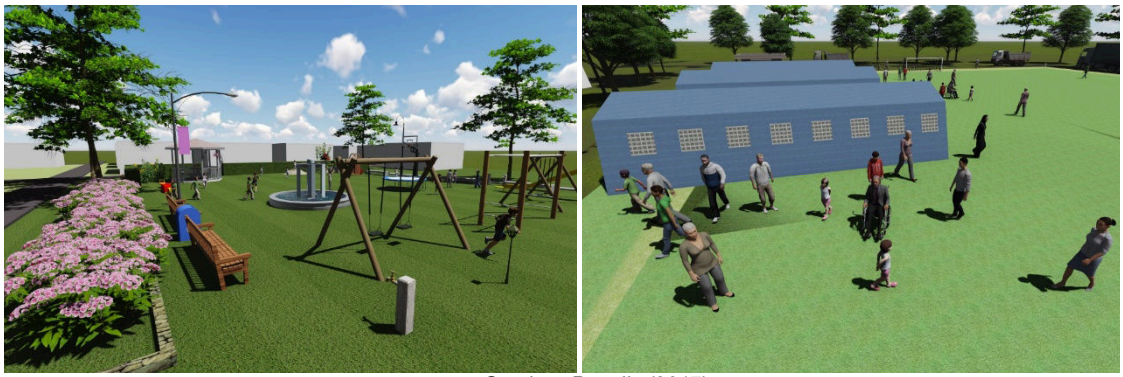
Sumber: Nurfatimah (2011)

Berdasarkan standar di atas, dengan jumlah penduduk saat ini sebanyak 1.819 jiwa maka dibutuhkan sebanyak 5 ruang terbuka publik mikro serta 2 ruang publik meso. Saat ini terdapat dua ruang terbuka berupa lapangan sepak bola sebagai zona evakuasi meso dengan luas 2000 m^2 dan 6.500 m^2. Luas ini telah memenuhi standar zona evakuasi meso sehingga tidak ada rencana penambahan zona evakuasi meso.



Sumber: Penulis (2017)

Gambar9.Peta Rekomendasi RTH Publik



Sumber: Penulis (2017)

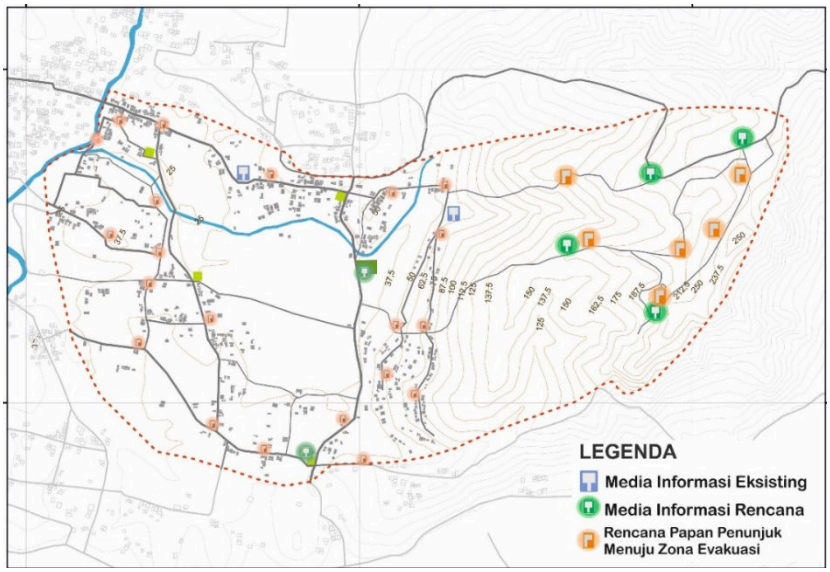
Gambar10. Ilustrasi Kondisi Ruang Terbuka Hijau Publik

6. Media Informasi Desa Wisata

Media informasi bertujuan untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi mengenai persebaran kegiatan wisata serta memudahkan wisatawan maupun

masyarakat ketika proses penyelamatan menuju ruang terbuka ketika terjadi bencana.Pada kondisi eksisting, belum terdapat media informasi berupa peta persebaran atraksi wisata serta hanya terdapat 2 titik penunjuk atraksi wisata.

Persebaran yang merata serta penambahan konten bahasa inggris pada media informasi dan papan penunjuk atraksi diperlukan untuk memudahkan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara mendapatkan informasi mengenai persebaran lokasi atraksi wisata. Papan penunjuk atraksi wisata akan diletakkan pada setiap persimpangan jalan, media informasi mengenai desa wisata diletakkan di setiap *stop area* yang dilalui oleh wisatawan.



Sumber: Penulis (2017)

Gambar11.Peta Rekomendasi persebaran Media Informasi

Selain papan penunjuk atraksi wisata, diperlukan pula papan penujuk jalur evakuasi bencana yang mudah dipahami oleh wisatawan maupun masyarakat setempat. Sebagai desa wisata, penyediaan papan penunjuk evakuasi diperlukan karena ketika terjadi bencana dapat mengarahkan pergerakan masyarakat dan wisatawan menuju zona evakuasi Desa Wisata Karangtengah sehingga risiko korban bencana dapat diminalisir.



Gambar12.Ilustrasi Media Informasi Wisata dan Bencana

Sumber: Penulis (2017)

IV. KESIMPULAN

Desa Wisata Karangtengahmemiliki kearifan lokal yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Akan tetapi pengembangan desa wisata belum maksimal

dalam pengelolaan ragam aktivitas wisata maupun sarana dan prasarana wisata sehingga kunjungan wisatawan terus menurun. Kapasitas kawasan dalam

Rekomendasi yang diberikan disesuaikan dengan kearifan lokal setempat serta kesepakaan para *stakeholder*. Pada guna lahan, rekomendasi yang disepakati adalah pengaturan kepadatan permukiman dan kegiatan wisata yang berada di zona bahaya bencana untuk mengurangi resiko bencana. Pada sirkulasi dan parkir, rekomendasi yang disepakati adalah penyediaan tempat parkir serta perbaikan dan pelebaran ruas jalan untuk memudahkan wisatawan menuju atraksi wisata maupun dalam proses evakuasi ketika terjadi bencana.

Kearifan lokal yang dijadikan sebagai atraksi wisata adalah wisata kesenian, kerajinan, wisata sepeda gunung, outbound, dan camping di alam bebas, wisata spiritual watu wedok, serta wisata tani. Dalam penyediaan fasilitas wisata juga tetap memperhatikan kearifan lokal serta memiliki ciri khas kawasan, yaitu berbentuk joglo dan limasan.

Rekomendasi dalam penyediaan ruang publik adalah pemanfaatan lahan kosong sebagai ruang terbuka publik yang atraktif di sekitar permukiman wargayang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi masyarakat serta zona evakuasi ketika terjadi bencana. Rekomendasi yang terakhir adalah penambahan pada media informasi desa wisata untuk memudahkan wisatawan menuju atraksi wisata serta menuju zona aman ketika terjadi bencana.

Penerapan konsep kearifan lokal sebagai roh utama dalam pengelolaan pariwisata di Desa Karangtengah tidak menyebabkan adanya keterpaksaan. Hal ini dikarenakan keunikan wisata berasal dari desa itu sendiri tanpa harus meniru desa wisata lain. Dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal masyarakat tidak akan menghilangkan identitas desa dan masyarakat setempat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Hadiwijoyo, S. S., 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat.*Salatiga: Graha Ilmu.

Nurfatimah, Cici. (2011). *Perencanaan Lanskap Permukiman untuk Mitigasi Bencana Gempa Bumi Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Shirvani, Hamid. (1985). *Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold. Tourism Western Australia. (2009). *FIVE A's OF TOURISM.* Australia : TWA

Unayah, N. (2016). "Identifikasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil" dalam Jurnal *Sosio Informa vol. 2, no. 01*

Wilson, S., Fesenmaier, D. R., Fesenmaier, J. & Van Es, J. C., 2001. Factors for Successin Rural Tourism Development. *Journal of Travel Research,* Volume 40, pp. 132-138.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014

Perka BNPB No. 1 Tahun 2012

Buku Panduan Fasilitator Desa Tangguh Bencana Tahun 2015

Buku Analisis Kearifan Lokal Ditinjau dari Keragaman Budaya Kemendikbud RI

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

PEMANFAATAN DAYA TARIK PUSAKA BUDAYA SEBAGAI POTENSI PARIWISATA PUSAKA DESA BELANDINGAN

Ni G.A.Diah Ambarwati Kardinal[1], I Gusti Putu Anindya Putra [2]
I Nyoman Harry Juliarthana[3]

[1]Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota
[2] Fakultas Teknik
[3] Universitas Hindu Indonesia , Denpasar
Email: diahkardinal@gmail.com[1], igpanindya@gmail.com[2,] harryjr_jutaugm@yahoo.com[3]

ABSTRAK

Pariwisata Pusaka sebuah terminologi yang mulai akrab dengan telinga masyarakat Bali seiring penetapan Subak menjadi Warisan Budaya Dunia. Sesungguhnya tak hanya subak, potensi pusaka lainnya di Bali masih banyak yang belum terinventarisir dan terkelola secara baik. Bali memiliki banyak desa tua atau yang lazim disebut sebagai desa Bali Aga. Beberapa desa bali aga sudah terkenal dan menjadi objek wisata . Belandingan adalah sebuah desa bali aga pegunungan di kecamatan kintamani Kabupaten Bangli. Letaknya yang terpencil dan masih jarang dikunjungi oleh masyarakat mengakibatkan sulitnya mendapatkan informasi tentang desa tersebut. Keutuhan pola ruang, keunikan tradisi yang masih lestari hingga saat ini didukung oleh bentang alam yang indah menjadikan desa belandingan memiliki daya tarik pusaka budaya yang dapat dikembangkan sebagai pariwisata pusaka desa. Desa Belandingan juga termasuk 15 desa pendukung kawasan pariwisata Gunung Batur . Gunung Batur dinobatkan sebagai geopark dunia oleh UNESCO pada tahun 2013 sehingga Gunung Batur menjadi Geopark dunia pertama di Indonesia. Untuk melakukan identifikasi terhad ap daya tarik pusaka Budaya Desa Belandingan sebagai arahan dalam perencanaan pariwisata pusaka desa didasarkan kepada klasifikasi pusaka budaya yang tercantum pada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003. Penelitian menggunakan metodelogi kualitatif eksploratori melalui metode survey. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Dengan dibuatnya identifikasi daya tarik pusakabudaya akan menjadi dasar dalam perencanaan pariwisata pusaka Desa Belandingan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa bali aga pegunungan lainnya.

Kata kunci: Desa Bali Aga, Pusaka Budaya, Pariwisata Pusaka, Kearifan Lokal

I. PENDAHULUAN

Pariwisata Pusaka sebuah terminologi yang tampaknya mulai akrab dengan telinga masyarakat Bali seiring penetapan Subak menjadi Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012. Namun sesungguhnya tak hanya subak, potensi pusaka lainnya di Bali masih banyak yang belum terinventarisir dan terkelola secara baik.

Bali memiliki banyak desa-desa tua atau yang lazim disebut sebagai desa Bali Aga. Beberapa desa bali aga sudah dikenal luas oleh masyarakat dan menjadi objek wisata yang terkenal seperti desa bali aga Tenganan Pengringsingan di Kabupaten Karangasem, Penglipuran, Bayung Gede, Pengotan yang terletak di Kabupaten Bangli. Selain desa tersebut, sesungguhnya masih banyak desa bali aga yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Pariwisata Pusaka Desa namun belum mendapatkan penanganan ataupun tergarap maksimal.

Belandingan adalah sebuah desa bali aga pegunungan di kecamatan kintamani Kabupaten Bangli. Letaknya yang terpencil dan masih jarang dikunjungi oleh masyarakat mengakibatkan sulitnya mendapatkan informasi tentang desa tersebut. Desa Belandingan diperkirakan telah ada sejak zaman bali kuna, yaitu pada masa sebelum datangnya empu kuturan. Bentuk-bentuk rumah pada jaman itu berupa

rumah-rumah sederhana yang disebut dengan kubu masih dapat dijumpai saat ini. Pola permukiman terbagi atas blok-blok perumahan berdasarkan garis keturunan. Dibeberapa blok rumah tampak memiliki *pelinggih* dewa kembar dan pelinggih hyang manik. .Pola desa menyerupai pola linear dimana jalan utama desa memanjang dari arah utara selatan yang merupakan pusat permukiman tradisional . Namun arah hadap rumah tidak langsung menghadap ke jalan utama melainkan ke jalan-jalan yang kecil yang ada didepan blok barulah didalam blok tersebut halaman menjadi satu dan tidak terdapat sekat bangunan. Pola lingkungan mendekati pola linier dengan lintasan-lintasan jalan yang membentuk pola lingkungan yang sesuai dengan transis lokasi kemiringan dan lereng-lereng alam. Selain kompleks desa induk juga terdapat rumah-rumah yang menyebar di daerah tegalan membentuk sub lingkungan.

Sistem *Hulu-apad* yang menjadi ciri khas sistem masyarakat di desa bali aga tetap dipertahankan hingga saaat ini. Demikian juga keunikan dalan tradisi pernikahan, kematian dan tradisi-tradisi lainnya memberikan suatu nilai tambah yakni potensi pariwisata bagi desa Belandingan.

Desa Belandingan termasuk 15 desa pendukung kawasan pariwisata Gunung Batur berdasarkan Destination Management Organization (DMO). 15 desa tersebut yakni desa batur utara, desa batur selatan, desa batur tengah, desa buahan, desa trunyan, desa suter, desa pinggan, desa kintamani, desa songan A, Desa Songan B, Desa Kedisan, Desa Abang Songan, Desa Abang Batu dinding, Desa Sukawasa dan Desa Belandingan.

Gunung Batur sendiri dinobatkan sebagai geopark dunia oleh UNESCO pada tanggal 22 september 2013 sehingga Gunung Batur menjadi Geopark dunia pertama di Indonesia. Status tersebut menjadikan masyarakat Desa Belandingan ingin menata kawasannya menjadi desa wisata. Dalam penataannya menjadi desa wisata hendaknya keunikan pola ruang desa, sosial budaya, arsitektur haruslah terlindungi. Seluruh potensi yang dimiliki oleh desa belandingan dapat dikategorikan sebagai daya tarik pusaka yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata pusaka Desa Belandingan. Sebelum dilakukan perencanaan dan pengembangan harus didahului dengan identifikasi pusaka yang dimiliki oleh Desa Belandingan agar perencanaan yang dilakukan menjadi tepat. .

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi daya tarik pusaka yang ada di Desa Belandingan. Jenis penelitian yang digunakan untuk menginventarisir daya tarik pusaka yang ada di desa belandingan adalah penelitian eksploratori. Jenis penelitian eksploratori ini dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh keterangan, informasi data daya tarik pusaka yang ada di Desa Belandingan. Dalam penelitian sosial ada beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu survei, studi kasus, eksperimen, sejarah, dan analisis arsip. Pendekatan penelitian kualitatif eksploratori yang dianggap sesuai dengan penelitian ini adalah metode survey untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Belandingan

Desa Belandingan merupakan desa yang sangat unik dan terpencil. Dimana pada mulanya desa Blandingan berdiri, desa ini dipimpin oleh seorang Dukuh yang bernama Penunjung Tutur yang berstana di sebelah Pura Manik Muncar. Dahulu kala desa Blandingan terdiri dari 2 desa yang dipimpin oleh orang yang sama yaitu Dukuh Penunjung Tutur. Pada masa kepemimpinan Dukuh Penunjung Tutur inilah kedua desa diberi nama Bala dan Tandingan yang terdiri dari 1700 warga dari 17 keturunan, keadaan sosial ini desa menyebutnya dengan istilah Sepa Satus.

Secara geografis lokasi desa pertama berada didaerah permukiman yang saat ini mengalami perkembangan dan yang satu lagi berada dibalik bukit atau di Pura Puseh Meneng. Dahulu terdapat 2 sumber mata air yaitu yang satu berada di Manik Muncar dan satu lagi berada di Sau dan kemudian pembagian sumber mata air inilah yang menjadi malapetaka dan menyebabkan ketegangan dua daerah tersebut. Kemudian pada saat itu, pemimpin desa ingin keadilan bagi rakyatnya maka dibuatlah aturan bahwa warga yang berada di wilayah permukiman sekarang diharuskan mengambil air di wilayah balik bukit, begitu pula sebaliknya, warga di balik bukit diharuskan mengambil air di wilayah permukiman sekarang.

Namun hal ini menjadi polemik yang akhirnya menyebabkan terbunuhnya kepala desa oleh warga yang merasa tidak senang akan aturan yang dibuat oleh karena masih-masing desa telah merasa memiliki masing-masing sumber air. Akhirnya jumlah penduduk semakin sedikit hingga menjadi 7 jiwa karena adanya konflik dan lambat laut perkembangan warga bertambah yang dikarenakan para pendatang dari desa sekitar seperti desa Sukawana. Dan sekarang tersisa penglingsir sejumlah 17 orang termasuk dari 7 orang yang selamat. Perkembangan pertumbuhan penduduk inilah yang pada akhirnya menyebabkan 2 desa yaitu desa Bala dan Tandingan menjadi satu desa yaitu desa Blandingan.

Selain sejarah pembentukan desa Blandingan, terdapat pula sejarah pembentukan Pura di Desa Blandingan yang merupakan sebuah sejarah Pura yang memiliki hubungan yang erat dengan sejarah asal mula desa Blandingan. Pura-pura di Desa Blandingan yaitu Pura manik Muncar, Pura Bale Agung, Pura Penetegan, Pura Batu Gede, Pura Dukuh, Pura Dalem, dan Pura Sang Hyang Song. Pura Manik Muncar juga memiliki hubungan dengan Desa Tianyar Karangasem, sedangkan Pura Sang Hyang Song memiliki keterkaitan dengan Desa Songan.

B. Karakter Desa Belandingan

Secara Administratif Desa Belandingan masuk ke dalam Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Jarak Desa Belandingan dari ibu Kota Proinsi Bali yaitu Denpasar adalah 67 Km . Jarak dari Ibukota Kabupaten adalah 30 Km dan jarak dari ibukota kecamatan adalah 5 Km . Batas Administrasi Desa Belandingan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Tembok (Kabupaten Buleleng)
Sebelah Selatan : Desa Songan A
Sebelah Timur : Desa Songan B
Sebelah Barat : Desa Pinggan dan Desa Siakin

Jumlah penduduk 1116 orang dengan jumlah KK sebanyak 320 . Luas wilayah Desa Belandingan mencapai ± 2.022 Ha. Desa Belandingan berada pada ketinggian ±1250 m diatas permukaan laut sehingga berhawa sejuk. Karena terletak di ketinggian, maka view dari desa kearah sekitarnya yakni ke Gunung dan Danau Batur sangat indah.Karena mata pencaharian penduduknya mayoritas adalah petani sayuran, maka sangat umum menjumpai pemandangan kebun sayur di punggung perbukitan desa.

Desa Belandingan terdiri atas satu desa dinas yang secara adat terbagi atas 12 *banjaran*. Masyarakat desa belandingan terdiri atas beberapa klan keluarga (soroh) yakni tangkas, Celagi Manis, Pasek Gelgel, Pasek kayu selem, Panji, Pasek Tangga, Kemoning dan Pande. Belandingan tidak mengenal adanya kasta.

C. Identifikasi Pusaka Desa Belandingan

Sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Pelesatrian Pusaka Indonesia 2003, Pusaka Indonesia adalah Pusaka Alam, budaya dan gabungan antar keduanya yang disebut pusaka saujana. Pusaka Budaya terbagi atas pusaka budaya ragawi (*Tangible Cultural Heritage*) dan pusaka budaya tak ragawi (*Intangible cultural heritage*). Pusaka budaya ragawi adalah semua pusaka budaya yang mempunyai raga atau berbentuk benda. Secara garis besar budaya ragawi dapat dibedakan menjadi pusaka budaya bergerak dan pusaka budaya ragawi tak bergerak. Pusaka Budaya ragawi bergerak adalah pusaka budaya ragawi yang dengan mudah dapat dipindahtempatkan.Contohnya adalah keramik, tekstil, kereta , dll. Pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka ragawi yang tidak dapat dipindahtempatkan tanpa mengubah atau merusak pusaka-pusaka budaya ragawi yang dimaksud. Pusaka ini memiliki kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari lokasi keberadaannya. Apabila dipisahkan dari lokasi keberadaannya, nilai dan makna pusaka budaya ragawi tersebut menjadi berubah, bahkan dapat hilang sama sekali. Termasuk dalam kategori pusaka budaya ragawi tak bergerak adalah pusaka bangunan dan monument. Pusaka budaya tak ragawi adalah suatu kekayaan masa lalu yyang sifatnya abstrak, tidak berwujud secara fisik, tetapi mengandung nilai, manfaat, makna, keahlian, dll yang sangat tinggi dan berharga bagi kehidupan (Adisakti, 2010)

1. Pusaka Budaya Ragawi

A. Pola Permukiman dan Rumah Tradisional

Pola Permukiman dan Rumah tradisional termasuk dalam pusaka Ragawi tak bergerak. Pola permukiman yang diterapkan di desa Belandingan adalah Pola linier (linier pattern) dengan arah memanjang ke timur-barat. Orientasi desa mengarah ke utara *kaja/hulu* yakni Perbukitan yang menjadi latar dari Pura Bale Agung dan selatan mengarah ke Danau Batur. Pola linier seperti ini umum dijumpai pada desa-desa bali aga. Terdapat 2 core utama desa yang menjadi penghubung antar jalan setapak atau gang/pedestrian yang menuju setiap pekarangan rumah. Jadi core disini merupakan pusat orientasi ruang dan orintasi gerak penduduk dalam setiap kegiatan.

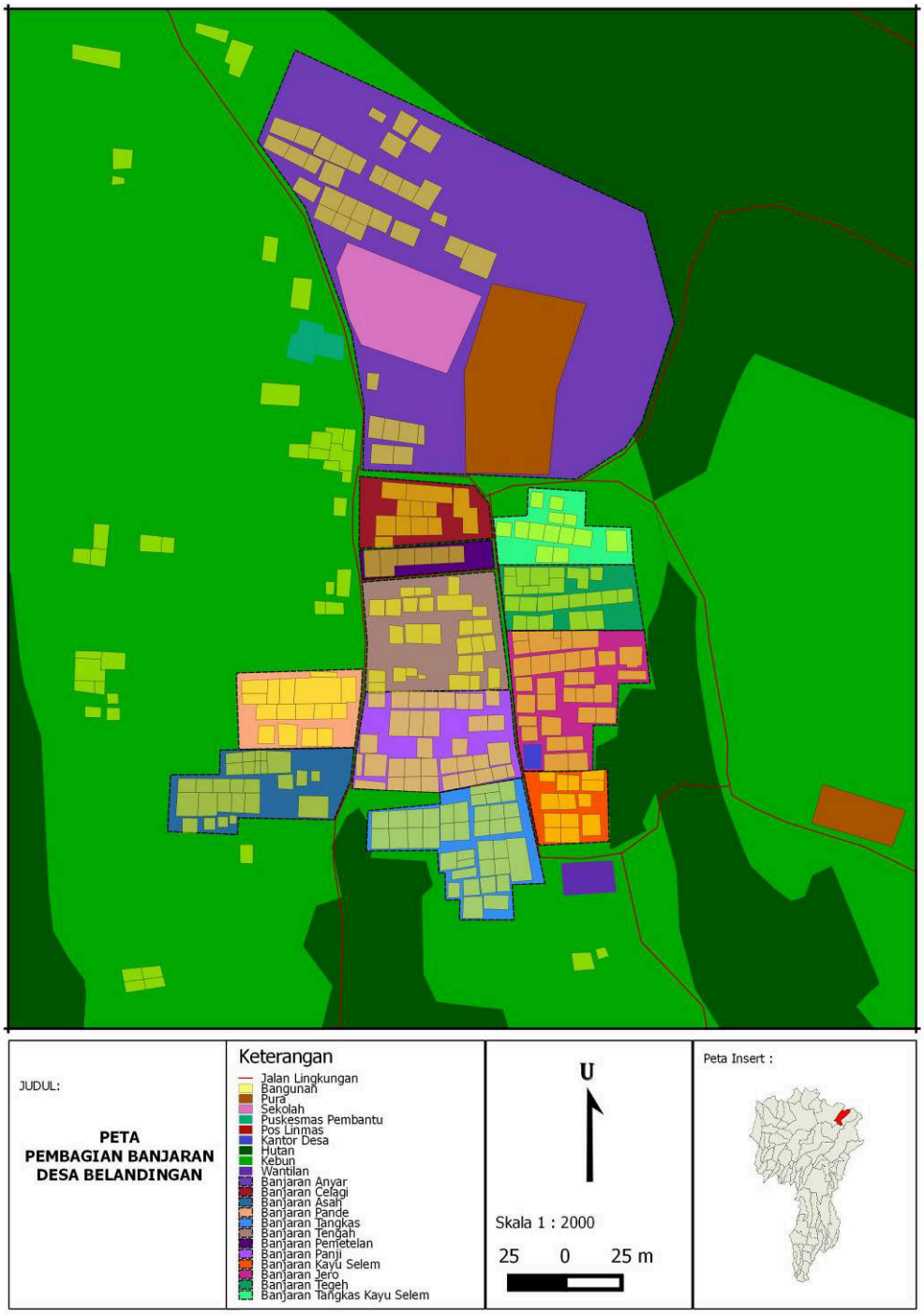
Tabel 1. Pembagian Banjaran Di Desa Belandingan

No	Nama Banjaran/dadia	*Soroh*	Jumlah KK
1	Kaja Kangin	1. Tangkas Kori Agung	10
		2. Celagi Manis (Karangasem)	50
		3. Pasek Gel Gel	40
		4. Pasek Kayu Selem	10
		5. Panji	5
2	Tegeh	1. Celagi Manis (Karangasem)	50
		2. Pasek Tangga (Siakin)	30
		3. Kemoning (Klungkung)	20
		4. Pande Taman Bali	25
3	Jero	1. Pasek Gel-Gel	40
		2. Pasek Kayu Selem	7
		3. Tangkas Kori Agung	20
		4. Panji	5
		5. Tangga	35

4	Kayu Selem	1.	Pasek Kayu Selem Songan	7
5	Tangkas	1.	Tangkas Kori Agung	20
6	Panji	1.	Panji	5
7	Tengah	1.	Tangga	30
		2.	Celagi Kaja	
8	Celagi Manis	1.	Celagi	20
9	Asah	1.	Kemoning	25
10	Pande	1.	Pande	27
11	Anyar	Campuran		30
12	Pemetelan	Tangga		7

Sumber: Survey , 2017

Permukiman terbagi atas 12 *banjaran* dimana pada masing-masing banjaran terdiri atas beberapa keluarga dari klan/*soroh* yang berbeda. struktur rumah berderet tanpa adanya tembok pembatas antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya dalam 1 blok persial dadia. Dalam satu blok persil *dadia* memiliki sanggah dadia. Antar blok persil dadia dibatasi oleh tembok dimana pintu masuknya dicapai dari gang tersebut. 1 KK mendapat jatah lahan sekitar 200 m^2 . Rumah tradisional tersebut menggunakan material dinding dan atap dari bambu. Terdapat beberapa perubahan pada bangunan-bangunan tersebut karena menggunakan material 'modern' seperti beton dan genteng dan juga adanya bentukan rumah baru karena bantuan bedah rumah dari Pemerintah Provinsi Bali. Namun saat ini kesadaran masyarakat mulai timbul untuk kembali mempertahankan rumah tradisionalnya. Satu unit rumah tradisional memiliki fungsi yang lengkap yakni dapur, ruang tidur , tempat sembahyang dan penyimpanan hasil panen seperti bawang. Untuk Kamar mandi harus diletakkan pada area selatan pada persil.

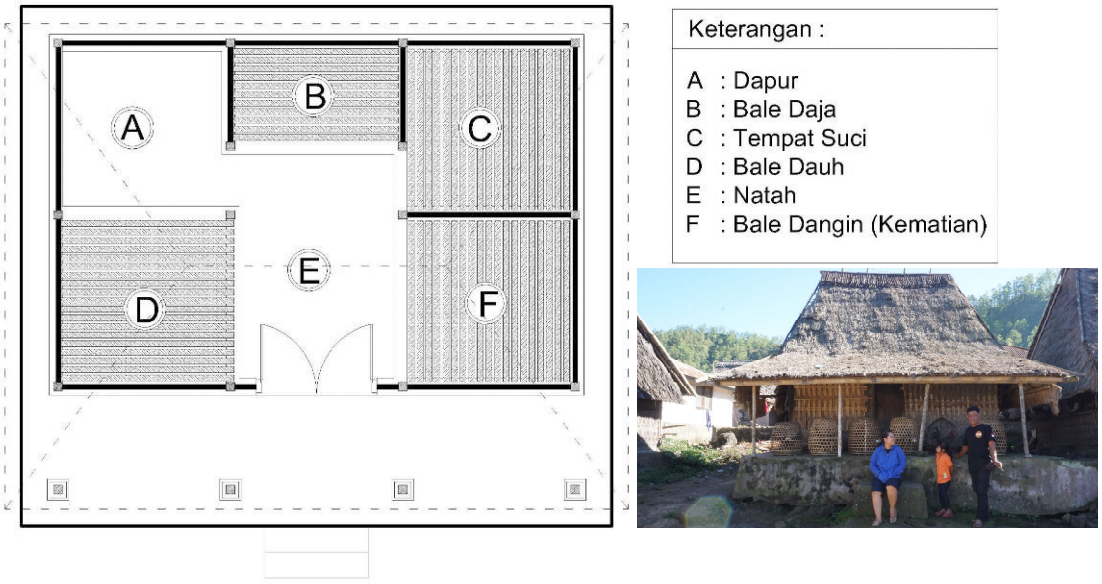


Sumber : survey 2017

Gambar 1. Blok Persil Dadia



Gambar 2. Blok Persil Dadia



Sumber : Survey 2017

Gambar 3. Satu Unit Rumah Tradisional

B. Pura

Pura dimasukkan dalam Pusaka Ragawi Desa Belandingan. Keunikan Pura di Belandingan seperti di Pura Sang Hyang Song dan Pura Batu Gede, dimana pelinggihnya berbentuk batu besar . Pada foto tampak pelinggih berbentuk batu

besar di Pura Batu Gede . Lubang pada pelinggih batu tersebut didalamnya terdapat air yang digunakan sebagai tirtha. Disini kita bisa melihat suatu tradisi yang kuna yang tetap bertahan hingga saat ini.

Sedangkan Pura Sang Hyang Song secara administrative masuk ke dalam Desa Songan tetapi Lahannya seluas 100 hektar merupakan milik Desa Belandingan. Disini juga terdapat pelinggih berbentuk batu besar tetapi tidak sembarangan orang boleh ke area Pelinggih berbentuk batu ini. Hanya Jero Mangku Gde, Jro Dasaran, sekaa truna deha yang bertugas mempersiapkan banten yang .



Sumber : Survey 2017

Gambar 4. Pelinggih Batu di Pura Batu Gede

C. Keris

Desa Belandingan memiliki satu keris yang menjadi pusaka Desa bernama Dukuh Sakti yang *distanakan* di Pura Dukuh. Masyarakat sendiri tidak mengetahui secara detail sejarah dari keris tersebut.

2. Pusaka Budaya Tak Ragawi

Belandingan tetap kukuh melaksanaan tradisi Uniknya tradisi-tradisi tersebut terwariskan secara lisan saja. Kuatnya kepatuhan pada apa yang sudah terlaksana selama ini menjadikan segala tradisi tetap bertahan.

A. Sistem Kekerabatan

Struktur masyarakat Desa Adat Belandingan merupakan struktur masyarakat horizontal tanpa mengenal adanya sistem warna yang membedakan status sosial masyarakat. Hal ini yang membedakan dengan dengan struktur masyakat bali dataran yang pada umumnya menerapkan sistem warna. Prinsip keturunan masyarakat Desa Belandingan adalah patrilinial yakni garis laki-laki. Anak Laki-laki tertua menjadi pewaris rumah tua. Anak laki-laki lainnya akan tinggal di kebun /*mondok*.

Terdapat tiga golongan dalam masyarakat, yakni krama seladi yang ngayah penuh adat, seladi tunggal adalah krama yang sudah ditinggal oleh pendamping hidupnya sehingga kewajiban *peturunnya* hanya setengah dan teruna bunga.

B. Struktrur Pemerintahan

Pemerintahan desa adat disebut Prajuru Desa. Wilayah Desa dibagi menjadi kiwa (kiri) dan tengen (kanan) dilihat dari arah Pura Bale Agung. : Setiap orang akan

mendapat giliran menempati posisi dalam pemerintahan ini sesuai urutan dalam pernikahan. Susunan Prajuru Desa Belandingan adalah sebagai berikut:
Posisi paling atas adalah jero kubayan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam adat, dibantu oleh jero bau dan saya. Saat ini desa dipimpin oleh Kepala Dusun dan Kepala desa.



Sumber : Survey 2017

Gambar 5. Struktur Prajuru Adat Desa Belandingan

Sistem sosial masyarakat yang tidak mengenal kasta menjadikan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berparsipasi dalam seluruh kegiatan masyarakat. Tugas-tugas penting dalam masyarakat seperti menjadi seorang *jro mangku gede*, jro dasaran didapatkan melalui petunjuk dari ida sang sesuhunan. Biasanya diawali karena sakit yang sulit disembuhkan dan kemudian meminta petunjuk kepada "Jro" didapatkan bahwa "si sakit" harus menjadi seorang jro atau seorang jro mangku. Bahkan salah satu yang terunik adalah pengangkatan seorang mangku gede yang saat ini bertugas ditunjuk saat sang mangku masih berumur 3 bulan. Menurut informasi dari narasumber di Desa Belandingan, untuk jro dasaran ini memiliki kemiripan dengan yang terdapat di desa batur.



Sumber : Survey 2017

Gambar 6. Jro Dasaran yang ada di Desa Belandingan

C. *Organisasi Sosial*

Terdapat organisasi-organisasi dalam masyarakat. Organisasi –organisasi tersebut memegang peranan penting dalam kegiatan di desa. Contohnya pada saat kegiatan *piodalan*, maka seluruh masyarakat berperan sesuai dengan organisasinya masing-masing.

Tabel 2. Organisasi dalam Masyarakat Des Belandingan

No	Nama Sekaa	Tugas
1	Teruna Deha	Laki dan perempuan minimal 15 tahun – sebelum menikah
2	Sekaa Igel	Yang Sudah menikah , Tugas Menari untuk upacara
3	Sekaa Ebat	Yang Sudah menikah , Tugas membuat kelengkapan ebat untuk upacara
4	Sekaa Angkut	Mengangkut keperluan upacara
5	Seka Gong	Memainkan perangkat gong saat upacara
6	Seka Ganti	Bertugas untuk membeli barang keperluan upacara . Hanya untuk yang sudah menikah. Anggotanya laki-laki saja
7	Seksi Lampu	Terbentuk setelah masuk PLN. Bertugas untuk menyiapkan keperluan lampu pada saat upacara
8	Sekaa Shanti	Tugas Mekidung pada saat upacara

Sumber : Survey 2017

D. *Keunikan Budaya*

1. *Upacara Agama Di pura*

Masyarakat masih memegang teguh pelaksanaan upacara di masing-masing

Pura. Terdapat 9 Pura di Desa. Pura Pemagpagan dan Penegtegan terkait dengan profesi penduduk sebagai petani. Di Pura Batu Gede biasanya warga memohon kesembuhan terhadap penyakit khususnya penyakit kulit yang diderita. Pura Manik Muncar , tirthanya digunakan untuk upacara tidak hanya di Belandingan, tetapi juga oleh masyarakat dari Desa Tianyar.

Tabel 3. Pura di Desa Belandingan

No	Nama Pura	Waktu Pujawali
1	Pura Puseh	Purnam Kapat Jagi menuju Kalima
2	Pura Bale Agung	Tri Kahyangan Desa
3	Pura Dalem	Purnama Ka Dasa
4	Pura Manik Muncar	Purnama kasa
5	Pura Dukuh	Tumpek Landep
6	Pura Batu Gede	Tumpek Landep
7	Pura Pemagpagan	Tilem ketiga
8	Pura Penegtegan	Purnama Katiga
9	Pura Sang Hyang Song	Purnama nuju sasi Karo

Sumber : Survey 2017

Pelaksanaan upacara di pura sangat menarik. Satu hal yang unik adalah pelaksanaan prosesi upacara selalu dimulai pada malam hari hingga selesai yang biasanya berlangsung hingga dini hari. Persiapan upacara dilakukan sehari sebelumnya atau disiang harinya.Saat persiapan seluruh sekaa dan teruna bunga terlibat. Peturun dari masing-masing kk juga dibawa ke pura sehari sebelum acara atau dising hari sebelum upacara berlangsung

Runtutan upacara tidak pernah berubah karena warga tidak pernah berani merubahnya. Pada saat piodalan tersebut kita dapat menyaksikan tari-tarian yang hanya ditarikan di pura. Selain teruna bunga, tarian lainnya ditarikan oleh sekaa igel.

Tabel 4. Tarian di Desa Belandingan

No	Nama Tarian	Ilustrasi
1	Baris Teruna oleh Teruna	
2	Rejang Bunga oleh Para Bunga	

3	Baris Tumbak Selem oleh Sekaa Igel		
4	Baris Tumbak Barak oleh Sekaa Igel		
5	Baris Tutup Oleh Sekaa Igel		
6	Tari Perang-perangan dan Bojog-bojogan oleh Sekaa Igel		

Sebelum tari perang-perangan dan bojog-bojogan ditarikan, maka malang (peturun warga yang dipersembahkan) yang sudah disiapkan oleh *klian ebat* dan *saya* dibagikan kembali kepada warga . Malang tersebut tersusun dari jaja Uli Putih barak, nasi, lawar dan sate.



Gambar 7. Malang Yang Dibagikan Kepada Warga Seusai Upacara

Pelaksanaan upacara tersebut menjadi pelestarinya berbagai jenis bebantenan di Desa Belandingan. Para *Bunga* juga ikut membantu proses pembuatan banten. Bentuk bebantenan di Desa ini berbeda dengan yang penulis ketahui di bali dataran.



Gambar 8. Berbagai Jenis Bebantenan di Desa Belandingan

Selain piodalan di kesembilan pura tersebut juga terdapat upacara ngaturang prani sehari sebelum hari raya nyepi di tegal suci yang menjadi satu area dengan pura Bale Agung. Pelaksanaan nyepi di desa ini juga berbeda dengan tempat yang lain dimana nyepi hanya dilakukan semenjak pukul 8 pagi-5 sore saja.



Gambar 9 . Suasana Meprani di Tegal Suci sehari Sebelum Nyepi

3. Upacara di Di Tingkat Rumah Tangga

A. Upacara Pernikahan dan kelahiran

Bila mempelai perempuan berasal dari soroh pasek gel-gel , kemoning dan celagi ada aturan tersendiri yang disebut raja-raja. Misalnya dari soroh pasek kayu selem akan mengambil wanita dari soroh pasek, maka wajib menyerahkan 1 celeng mecaling, 1 kambing majenggot, kelap 200 butir, beras 8 pikul atau sekitar 800 kg, ayam 50 ekor, bebek 14, bumbu masak selengkapnya dan kayu bakar. Bila dirasakan berat, barang-barang tersebut bisa diserahkan setelah berumah tangga bahkan bisa dilaksanakan oleh anak cucunya, tapi dalam pelaksanaannya tidak boleh dicicil, harus sekalian.

Belandingan tidak mengenal upacara mesangih atau potong gigi. Upacara lainnya yang dilakukan adalah ngetelun, 12 hari, 42 hari, 3 bulan dan yang terbesar upacara 6 bulan.

B. Upacara Kematian

Desa Belandingan memiliki empat buat setra yakni serta biasa, Setra Ulah Pati, setra Anak Alit dan setra untuk yang sudah mewinten (Jro Mangku Gede, Jro

Dasaran). Membawa jenasahnya ke setra pun unik. Yang biasanya ditandu oleh 4 orang, tapi di belandingan hanya oleh 2 orang aja. Posisi jenasah yang dikubur untuk laki-laki menghadap ke bumi dan perempuan menghadap ke langit , dan arah kepala ada di timur (kangin).

C. Upacara Mecaru Desa

Dilaksanakan setiap Tilem Keenem dengan caru berupa satu ekor sapi, 14 ekor bebek belangkalung, ayam berumbun, ayam putih, ayam selem, biing dan putih siungan. Upacara mengambil tempat di pempatan agung desa.

III. KESIMPULAN

Desa Belandingan sangat kaya akan Pusaka Budaya baik ragawi maupun non Ragawi. Hanya saja Pusaka budaya ragawi mengalami ancaman yang cukup serius menyangkut pola desa dan bangunan tradisional karena terjadi perubahan-perubahan yang diakibatkan juga oleh tindakan bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan permukiman baru juga harus mempertimbangkan kelestarian dari pola desa yang sudah ada.

Pusaka non ragawi yang sudah terwariskan dari beberapa generasi secara lisan tampaknya perlu dipikirkan untuk dituliskan karena apapun yang berdasarkan ingatan saja, sangat kuat kemungkinan faktor hilang dari ingatan.

Dari identifikasi pusaka budaya yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pusaka budaya yang ada di Desa Belandingan sangat banyak dan dapat menjadi modal yang kuat untuk dijadikan daya tarik sebagai wisata desa.

DAFTAR PUSTAKA

Adishakti, Laretna T. (2010). Pendidikan Pusaka Indonesia. Yogyakarta. Badan Pelestarian Pusaka Indonesia

Alit, I Ketut. (2004). Morfologi Pola Mukiman Adati Bali. Jurnal Pemukiman Natah Vol.2 Agustus

Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin. (2003).Perumahan dan Permukiman Tradisional Bali. Jurnal Permukiman Natah Vol 1. No 1 Februari

Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin. (2009).Arsitektur & Kebudayaan Bali Kuno . Denpasar. Udayana University Press

"*Dieng Culture Festival*" Memperkuat *Brand Image* Destinasi Lewat Ajang Festival

Destha Titi Raharjana[1],Heddy Shri Ahimsa-Putra[2], Djoko Wijono[2], Hendrie Adji Kusworo[3]

[1] Dosen Kajian Pariwisata
[2] Sekolah Pascasarjana UGM.
[3] Tenaga Ahli di Puspar UGM.

ABSTRAK

Studi ini berpijak pada argumen adanya relasi yang kuat dari sebuah perhelatan khususnya dalam bentuk festival kebudayaan yang mampu memperkuat citra destinasi pariwisata. Penguatan citra destinasi perlu didukung dengan keunikan serta keberlanjutan event yang salah satu tujuannya penyelenggaraan event tersebut adalah untuk memasarkan destinasi. Tujuan penulisan paper ini adalah untuk mengupas model perencanaan event wisata, khususnya sebuah festival kebudayaan agar perhelatan yang diselenggarakan mampu mendorong hadirnya wisatawan. Adapun event wisata yang dikaji adalah Dieng Culture Festival (DCF) sebuah perhelatan kebudayaan khas Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kawasan Pariwisata Dataran Tinggi Dieng (KPDTD) memiliki keragaman daya tarik alam, daya tarik budaya dan buatan yang mampu menarik minat wisatawan. Termasuk dengan adanya perhelatan tahunan Dieng Culture Festival (DCF) semakin meningkatkan popularitas Dieng. Fokus kajian ini diarahkan pada urgensi perencanaan sebuah acara (event) dan dampaknya terhadap destinasi.

Pengumpulan data dijalankan dengan metode studi pustaka, observasi, partisipasi observasi serta wawancara mendalam. Hasilnya, Dieng Culture Festival (DCF) yang bermula dari inisiasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pendawa mampu secara rutin dilaksanakan dengan puncak acara pemotongan rambut anak gimbal setiap tahunnya. Perhelatan festival ini bahkan sudah menjadi agenda pariwisata nasional didukung kementerian dan pemerintah daerah serta lembaga lain. Pemerintah dan masyarakat serta pengelola pariwisata mengakui dampak baik adanya Dieng Culture Festival (DCF).Pada akhirnya, festival kebudayaan, seperti halnya Dieng Culture Festival (DCF) dinilai strategis sekaligus mampu memperkuat brand image Dieng serta mengangkat derajat perekonomian masyarakat setempat.

Kata kunci : Perencanaan *Event*, *Brand Image*, Destinasi, *Dieng Culture Festival*, Banjarnegara

I. PENDAHULUAN

Upaya segenap pihak memajukan daerahnya dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki memang menjadi keharusan. Berlakunya otonomi daerah mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk berpacu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sektor pembangunan yang dinilai strategis memicu perkembangan wilayah dan ekonomi lokal adalah sektor kepariwisataan. Dalam konteks otonomi daerah, pengembangan sektor jasa ini menarik untuk diamati, khususnya yang berlangsung di Kawasan Pariwisata Dataran Tinggi Dieng (KPDTD). Secara adminstrasi wilayah wisata ini berada pada dua pangkuan pemerintah daerah yakni Kabupaten Banjarnegara dan

Kabupaten Wonosobo. Pemerintah daerah di kedua wilayah beserta masyarakatnya telah menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi alternative selain usaha pertanian sayur-mayur yang hingga kini masih dijalankan warga setempat.

Kawasan pariwisata Dieng hingga saat ini masih mampu menarik orang berwisata. Hasil survai Raharjana (2011) memperlihatkan minat orang datang ke destinasi Dieng ada tiga hal, 40.91% ke Dieng karena ingin bersantai sembari menikmati panorama alam, sebanyak 18,19% memilih mengunjungi candi dan sebanyak 12,12% ingin belajar budaya lokal. Kawasan pariwisata Dieng sebagai sebuah destinasi memang menawarkan beragam atraksi bagi para pewisata salah satunya adalah keunikan budaya, adanya tradisi ruwat rambut gimbal yang hingga saat ini masih dilestarikan (Raharjana, 2012; Mubin, 2016; Sukatno, 2004). Ketenaran destinasi perlu ditunjang dengan sebuah perhelatan atau penyelenggaraan *event* pariwisata. Saputro (2014) menyebutkan *event* seni budaya pada sebuah destinasi merupakan modal yang memiliki keunikan sehingga sulit ditiru daerah lain (kompetitor). Pengemasan *event* yang menarik dipercaya mampu memperkuat *positioning* dalam mempromosikan identitas sebuah daerah wisata sekaligus menghadirkan atraksi wisata (Ooi, 2009).

II. METODE & PERSPEKTIF TEORITIS

Artikel ini mengupas perhelatan budaya masyarakat Dataran Tinggi Dieng yang dilaksanakan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa Kabupaten Banjarnegara. Kajian ini dikembangkan untuk melihat arti penting perencanaan *event* guna mendorong keberhasilan pelaksanaan DCF serta memberikan analisis mendalam atas *event* yang sudah berlangsung selama ini berikut dengan dampak yang dihasilkan dari penyelenggaraan *event* DCF. Metode penggalian data dilakukan dengan cara studi pustaka, observasi saat adanya *event* DCF, melakukan partisipasi observasi pada saat berlangsungnya event dengan terlibat menjadi wisatawan, dan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan. Beberapa informan yang menjadi *key person*, di antaranya ketua kelompok sadar wisata Dieng Pandawa, pelaku usaha, pemilik homestay, dan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.

Dalam konteks proses berwisata, wisatawan pada saat melakukan perjalanan wisata mereka dipastikan akan menikmati produk. Umumnya produk terdiri dari atas tiga komponen, yaitu sumber daya yang terdapat pada suatu destinasi, fasilitas wisata serta transportasi yang membawa dari tempat asal wisatawan ke daerah wisata tertentu. Lebih lanjut, produk wisata (Hermantoro, 2014) adalah setiap produk yang dipasarkan dengan tujuan untuk menarik kunjungan. Produk ini dapat diartikan sebagai pengalaman total yang mampu memperkaya pengalaman wisatawan sejak dari kedatangan sampai dengan kepulangannya. Produk wisata diharapkan memberikan pengalaman total bagi wisatawan. Untuk itu produk memerlukan tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu (1) pengalaman (*experiential*) berupa festival, aktivitas, komunitas, makan minum dan hiburan; (2) emosi (*emotional*) berupa manusia, sejarah, budaya *hospitality* serta (3) fisikal (*physical*) berupa infrastruktur, sumber daya alam, restoran, dan lain sebagainya. Kepuasan wisatawan merupakan faktor penarik kunjungan wisata yang efektif. Ukuran baik buruknya kualitas produk wisata adalah besarnya *repeater* yang mencerminkan kepuasan wisatawan. Atraksi disebuah destinasi tidak dapat dilepaskan dengan fungsinya yaitu guna menahan wisatawan lebih lama tinggal. Atraksi ditujukan untuk memberikan hiburan, pendidikan, menyaksikan sesuatu yang menarik. Salah satu atraksi penarik bagi magnet wisatawan adalah penyelengaraan sebuah *event*.

Seperti halnya Yogyakarta yang secara rutin sejak tahun 1989 menggelar Festival Kesenian Yogyakarta (FKY). *Event* seni budaya ini merupakan sebuah *event*

besar yang menyajikan berbagai kesenian baik kesenian tradisional, kontemporer ataupun alternative (Saputro, 2014). FKY telah menjadi identitas yang tidak terpisahkan dari Yogyakarta. Penyelenggaraan FKY mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota peradaban (Harian Jogja, 26/6/2013). *Event* FKY berperan untuk menjaga kelestarian seni budaya serta memberikan semangat bagi seniman lokal untuk berkarya lebih maksimal. Sama halnya halnya dengan Kota Solo dengan *event* Solo Batik Carnival (2011), kota Jember dengan *Jember Fashion Carnival*, serta beragam penyelenggaran *event* pariwisata di daerah lainnya yang semuanya bertujuan untuk mengolah kreatfitas, keunikan serta mendorong penguatan destinasi pariwisata masing-masing daerah (Hermantoro, 2011; OECD, 2017).

Allen (Abdullah, 2009, dalam Saputro, 2014) mendefinisikan *event* sebagai ritual istimewa, pertunjukan, penampilan, perayaan yang pasti direncanakan dan dapat dibuat acara khusus, atau untuk mencapai tujuan sosial, budaya dan tujuan bersama. Noor (2009, dalam Saputro, 2014) mendefinisikan *event* sebagai sesuatu yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting baik secara individu atau kelompok. Saputro (2014) mendefinsikan *event* sebagai sebuah kegiatan yang dapat berwujud atraksi ritual keagamaan, tradisi, budaya, olah raga dan lain sebagainya yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar mereka memperoleh informasi atau pengalaman penting serta tujuan lain yang diharapkan penyelenggara. Sulaksana (2007) menjelaskan bahwa *event* merupakan salah satu instrument komunikasi *below in line* yang banyak digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk kepada khalayak. Ruslan (2007 dalam Saputro, 2014) mengartikan *event* sebagai media komunikasi untuk menarik perhatian dan liputan media pers dan umum terhadap lembaga atau produk tertentu yang ditampilkan.

Getz (2008) menyebutkan *event* dalam kaitannya dengan perencanaan destinasi mempunyai peran penting, di antaranya (a) ***Event sebagai atraksi*** *(attraction)*, kegiatan pariwisata merupakan atraksi/daya tarik tersendiri bagi sebuah destinasi. Atraksi adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat/dinikmati; (b) ***Event sebagai pemberi citra destinasi*** *(image maker)*; melalui kegiatan *event* sebuah destinasi dapat memasarkan dirinya untuk memberikan kesan dan pandangan terhadap destinasi yang ditawarkan; (c) ***Event sebagai pendorong tumbuhnya atraksi wisata*** *(animators of static attractions)*. Melalui kegiatan *event*, dapat ditunjukkan segala bentuk atraksi yang merupakan ajang aktivitas dan kreativitas pelaku *event*; dan (d) ***Event sebagai penggerak tumbuhnya pembangunan sektor lain*** *(catalyst for other development)*. Melalui *event*, pertumbuhan sektor lain secara tidak langsung tumbuh untuk melengkapi kegiatan *event* yang dilaksanakan.

Lebih penting lagi lainnya yang mendasar dari pariwisata *event* adalah untuk mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara (Congcong, 2014; Getz, 2008). Getz juga menyampaikan, tidak semua *event* yang ditawarkan mampu menarik bagi wisatawan. Gunn (2002) menyebutkan atraksi merupakan promosi paling efektif dalam mengemas kegiatan *event*. Atraksi dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan sebuah *event* menjadi menarik atau tidak. Kegiatan *event* pariwisata yang dijalankan tentunya memerlukan sebuah perencanaan. Penetapan tujuan diharapkan mempengaruhi bagaimana keberhasilan *event* dalam memberikan pengaruh kepada *audience* untuk dapat menyaksikan dari produk atau jasa yang dikenalkan.

Terkait dengan perencanaan *event* managemen, Harris dan Allen (2002, dalam Saputro, 2014) membagi perencanaan ke dalam dua tingkat perencanaan *event* yaitu (a) perencanaan strategis yang membahas gambaran besar tentang sasaran jangka panjang *event*, termasuk di dalamnya strategi yang dibutuhkan untuk mencapainya, dan (b) perencanaan operasional membahas langkah-langkah tertentu

yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi tersebut. Christie & McAteer (2006, dalam Saputro, 2014) membagi perencanaan *event* ke dalam dua kategori yaitu (i) *event business plan* dan (ii) *event action plan*. Lebih lanjut dijelaskan Christie dan McAteer bahwa setiap *event* yang diselenggarakan yang tidak hanya sekali, maka penyelenggaraannya memerlukan business plan yang berisikan rencana strategis untuk proyeksi tiga-lima tahun ke depan. Sedangkan *event action plan* adalah sebuah perencanaan operasional yang menjelaskan detail-detail kegiatan. Abdullah (2009, dalam Saputro, 2014) menjelaskan dalam perencanaan *event* adalah harus mengandung 5W+1H, yaitu: *what,when,why,who,where* dan *how*, yakni apa nama dan maksud diadakan *event*, kapan, dimana akan diadakan, mengapa diaadakan, siapa yang terlibat dan yang dituju serta bagaimana penyelenggaraannya.

Dibidang perencanaan *event* pariwisata, Goldbatt (2002, dalam Saputro, 2014) membagi perencanaan *event* dalam beberapa tahapan agar *event* dapat berjalan efektif dan efisien. Tahapan tersebut meliputi : (a) *Research*, riset dilakukan untuk menentukan kebutuhan, keinginan dan harapan dari target pasar. Dari riset yang dikerjakan akan mampu melihat *trend* yang sedang berkembang, mengembangkan sistem penyediaan layanan baru dan memecahkan masalah kecil sebelum terjadi masalah besar dalam penyelenggaraan; (b) *Design*, tahap ini merupakan kelanjutan dari proses riset yang dilakukan. Umumnya, proses ini dimulai dengan adanya *brainstroming* mengenai tema dan konsep acara, bagaimana dekorasi dan artistik, hiburan yang disajikan, strategi komunikasi yang akan digunakan dan sebagainya. Pada fase ini biasanya juga dilakukan kajian (studi) kelayakan *event* untuk menyaring ide-ide kreatif yang muncul; (c) *Planning*, tahap ini dilaksanakan setelah analisis situasi dan bersamaan dengan tahapan disain. Tahapan ini penyelenggara *event* mulai melakukan beberapa hal, di antaranya penganggaran, waktu yang dipakai, pertimbangan tempat, menentukan tim kerja, menentukan pengisi acara, bagaimana mempersiapkan layanan pendukung, bagaimana produksi, bagaimana mencari sponsor dan sebagainya; (d) ***Coordination***. Selaku manajer/koordinator acara harus mampu melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain agar dapat bekerja secara simultan dengan satu tujuan yang sama. Di tahap ini terkait dengan bagaimana komunikasi dengan internal panitia, stakeholder, dan sponsor dapat dijalankan efektif, dan (e) ***Evaluation*.** Evaluasi dapat dilakukan disetiap fase secara menyeluruh.Cara melakukan evaluasi dapat dijalankan dengan menggunakan survai kepuasan serta melakukan pencatatan berapa jumlah peserta dan pengunjung. Cara lain untuk evaluasi adalah melalui monitoring dengan menugaskan orang lain untuk mengamati *event*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Cikal bakal Penyelenggaraan DCF

Kehadiran mahasiswa UGM dengan beragam disiplin ilmu di desa mereka Kemunculan *Dieng Culture Festival* (DCF) turut diprakarsai mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UGM tahun 2010 yang berkesempatan melakukan KKN di desa Dieng Kulon. Waktu itu ide festival laksanakan sebagai salah satu agenda penutupan pelaksanaan KKN.merupakan pengalaman pertama terlebih dengan model *live in*. Mahasiswa waktu itu tinggal menetap dan berbaur dengan warga Dieng Kulon sekitar 2 bulan,. Mereka bertugas mendorong pengembangan masyarakat, khususnya di sektor pariwisata sesuai dengan tema yang diusung mahasiswa KKN saat itu. Proses adaptasi serta kerjasama di antara mahasiswa bersama warga, diwakili Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa dalam mengembangkan sektor pariwisata menjadikan program kerja Pokdarwis untuk

memberdayakan kemandirian warga sekaligus melakukan pengembangan wilayah dapat berjalan baik.

Gagasan penyelenggaraan *event* wisata dalam bentuk DCF merupakan bukti adanya upaya memperkuat *brand image* Dieng bagi masyarakat luas sekaligus sebagai wahana penguatan budaya lokal khas Dieng. Pertimbangan mendasar yang mendorong lahirnya *event DCF* tidak lain adalah untuk memperlihatkan kepada khalayak luas bila Dataran Tinggi Dieng, khususnya yang terletak di Banjarnegara Jawa Tengah memiliki keunikan. Keragaman keunikan baik yang bersumber dari alam dan budaya. Dari sisi keunikan alam, Dataran Tinggi Dieng yang berada di ketinggian 2.300 mdpal tidak hanya memiliki perbedaan temperatur yang ekstrem dibandingkan dengan di dataran rendah. Kekayaan alam di bumi Dieng lainnya antara lain kawah, telaga, serta potensi panas bumi atau yang kemudian dikembangkan *geothermal*. Sementara untuk keunikan budaya yang dimiliki negeri Khayangan ini selain terdapatnya banyak candi peninggalan Hindu serta tradisi lokal yaitu pencukuran rambut anak gimbal yang hanya terdapat di wilayah Wonosobo dan Banjarnegara.

Tujuan penyelenggaraan DCF untuk mengenalkan destinasi Dieng ke luar sehingga dipandang perlu untuk membuat *event* yang mampu menarik wisatawan. Secara umum tujuan penyelenggaraan DCF adalah : (a) sebagai upaya pelestarian budaya asli (khas) Dieng, (b) sebagai bentuk kegiatan sosial yaitu membantu anak gimbal dari keluarga yang orang tuanya kurang mampu untuk memenuhi permintaan sang anak serta beragam prosesi kegiatan ritual memotong rambut gimbal yang semestinya disediakan, dan (c) sebagai upaya mendorong pemberdayaan masyarakat sekaligus DCF sebagai media promosi pariwisata.

1.2. Analisis Perecanaan Event DCF

Proses dalam menyelenggarakan perhelatan DCF didasari beragam pengkajian. Pihak pengelola menjelaskan, DCF dapat dilangsungkan sebab adanya motivasi untuk mengenalkan Dieng sebagai tempat wisata yang pantas dikunjungi dengan keunikan budayanya (Soehada, 2013). Awalnya pihak Pokdarwis memiliki pandangan bahwa Dieng sebagai destinasi yang luar biasa belum dilengkapi dengan *event* budaya yang dikemas menjadi *event* unggulan. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pun dipandang belum secara maksimal melengkapi objek wisata dengan *event* yang sifatnya regular. Ketidakpahaman mengembangkan *event* wisata juga disadari pengurus Dieng Pandawa, mereka sama sekali awalnya tidak percaya diri apakah mampu mewujudkan *event* yang ternyata dapat berkelanjutan hingga saat ini[2]. Sejak 2010 Dieng Kulon ditetapkan sebagai desa wisata diharapkan mampu mendorong masyarakat khususnya yang sudah memiliki potensi di bidang usaha pariwisata untuk lebih bergairah dalam merespon pariwisata. Adanya *event* DCF dinilai mampu mendongkrak nama Dieng sehingga turut mengangkat pendapatan masyarakat.

a. Disain Event

Disain penyelenggaraan DCF selalu mengalami perkembangan. Materi DCF memuat sajian utama yang tidak terlepas dari tema budaya, khususnya pencukuran/pemotongan rambut gimbal, *event* pentas seni tradisional, pagelaran wayang kulit, larungan rambut anak gimbal. Contoh pada perhelatan pada tahun 2014, *event* DCF dilaksanakan bulan Agustus 2014 terdapat beberapa *event* tambahan sebagai pendukung yang juga disiapkan antara lain pameran produk,

[2] Tahun 2016, merupakan perhelatan DCF yang ke 8.

minum Purwaceng massal, bakar jagung, jalan sehat, pesta lampion, festival film Indie hingga Jazz Atas Awan. Tema utama dalam setiap *event* DCF adalah pada rituil pemotongan atau pencukuran rambut anak gimbal. Prosesi inilah yang selalu dijadikan unggulan oleh penyelenggara. Tahun 2014 *event* DCF dilangsungkan selama 3 hari 2 malam dengan rincian sebagai berikut.

Tabel. 1. Contoh Run Down Acara DCF Tahun 2014

Hari Pertama	**1.** Pagelaran wayang kulit
	2. Screening Festival Film Indie
Hari kedua	3. Napak Tilas
	4. Jalan santai
	5. Pesta balon
	6. Minum Purwaceng Bareng
	7. Bakar Jagung
	8. Pesta lampion
	9. Pagelaran jazz atas awan
Hari ketiga	10. Rangkaian proses pencukuran rambut gembel
	11. Pengumuman Festival Film Indie

Sumber : Diolah dari Pokdarwis Dieng Pandawa, 2014

Disain acara yang ditawarkan terdiri atas acara yang berbasis tradisi dan kontemporer. Beberapa acara berbasis tradisi, seperti tampak di poster di antaranya :

(a) rituil pencukuran rambut gimbal
(b) parade kesenian
(c) pameran kerajinan dan expo
(d) minum Purwaceng bareng
(e) jagung bakar massal

Sementara untuk acara pendukung yang bersifat kontemporer di antaranya : (a) pesta kembang api, (b) festival film Indie, (c) pesta balon dan lampion, dan (d) pagelaran *Jazz atas Awan*. Adanya dua jenis acara, yaitu acara utama yang berbasis tradisi dan juga adanya acara pendukung berbasis non tradisi/kontemporer menjadi salah satu strategi dalam rangka mendongkrak wisatawan penikmat DCF. Berikut disampaikan *itinerary* yang ditawarkan oleh panitia untuk menarik wisatawan menyaksikan DCF dalam bentuk paket wisata. Konsumen yang disasar adalah dari kota Jakarta dan sekitarnya.

OPEN TRIP HEMAT DIENG CULTURE FESTIVAL 5

START FROM JAKARTA

Hari Pertama :29 Agustus 2014
18.00 : Meeting Point Terminal Kp. Rambutan, Jakarta
19.00 : Perjalanan Menuju Dieng
Hari Kedua: 30 Agustus 2014
09.00 : Chek In Homestay, Sarapan
10.00 : Menuju Kawah Sikidang
11.00 : Explore Hutan Wisata Telaga Warna,Pengilon Dan Pertapaan Goa
12.00 : Ishoma
12.30 : Menuju Area Dieng Culture Festival Dieng
13.00 : Gelar Pentas Seni Tradisional
15.00 : Pagelaran Wayang Kulit
18.00 : Kembali Ke Homestay Ishoma
19.00 : Menuju Komplek Candi Arjuna
19.30 : Bakar Jagung Massal Dan Penerbangan Lampion

20.00 : Pertunjukan Jazz Atas Awan Dan Pesta Kembang Api
23.00 : Kembali Ke Homestay
Hari Ketiga : 31 Agustus 2014
03.00 : Bangun Tidur Persiapan Melihat Golden Sunrise Bukit Sikunir
03.30 : Menuju Desa Tertinggi Di Pulau Jawa (Desa Sembungan)
04.30 : Tracking Bukit Sikunir
05.00 : Menikmati Sunrise Dan Suasana Negeri Atas Awan
06.00 : Kembali Ke Parkiran Mobil
06.30 : Kembali Ke Homestay
07.00 : Istirahat,Sarapan, Mandi Dan Packing
08.00 : Acara Kirab Budaya Keliling Desa Dieng Bersama Anak Gimbal Dan Kesenian
10.00 : Jamasan Atau Memandikan Anak Berambut Gimbal
10.30 : Prosesi Pencukuran Anak Berambut Gimbal
11.30 : Acara Ngalap Berkah
13.00 : Acara Pelarungan Rambut Gimbal
13.30 : Pagelaran Seni Budaya
14.30 : Kembali Ke Jakarta

Fasilitas :

- Transportasi Jakarta-Dieng AC (Pp)
- *Homestay*
- Makan 3x
- *Guide*
- Tiket Area Masuk DCF 5
- ID Card
- Tiket :Telaga Warna, Kawah Sikidang, Candi Arjuna, Festival Jazz Diatas Awan
- Tshirt Exclusive DCF 5
- Syall Exclusive DCF 5
- Lampion
- Jagung Bakar
- Purwaceng 1 Gelas/Peserta

Harga Paket: Rp. 750.000,-/ Pack
Keterangan : Dp 300rb paling lambat 30 Juni

b. Planning/Perencanaan

Tindakan perencanaan dalam tahap ini sangat menentukan. Setelah disain acara ditentukan, kemudian diupayakan dapat diwujudkan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam melakukan perencanaan *event*, penyelenggara mulai memikirkan waktu penyelenggaraan, tim kerja, upaya mencari sponsor, upaya penyiapan acara pendukung, strategi promosi dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kebutuhan dana yang diperlukan untuk *event* DCF dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan (lihat tabel 2). Kondisi tersebut tentunya mendorong penyelenggara harus memikirkan berbagai cara untuk merencanakan melakukan penggalian sumber dana.

Tabel. 2. Gambaran Kebutuhan Dana Operasional DCF

Tahun	Waktu pelaksanaan	Biaya Operasional
2010	2 hari	Rp 45.000.000,-
2011	3 hari/2 malam	Rp 80.000.000,-
2012	2 hari/1 malam	Rp 125.000.000,-
2013	2 hari/2 malam	Rp 165.000.000,-
2014	3 hari/2 malam	Rp 600.000.000,-

Sumber : Diolah dari Pokdarwis Dieng Pandawa, 2014

Tim kerja yang sudah dibentuk selanjutnya melaksanakan tugasnya masing-masing guna mengupayakan kebutuhan dana serta segala persiapan dapat diperoleh agar pelaksanaan DCF dapat berlangsung lancar seperti direncanakan.

c. Koordinasi

Keberhasilan sebuah *event* pariwisata sangat ditentukan adanya kesamaan pandangan serta kerjasama serta koordinasi yang baik disemua pihak. Semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan sejak awal hingga berakhirnya *event*. *Event* DCF ini jelas memerlukan energy besar untuk melakukan segala persiapannya. Tabel 3, berikut memperlihatkan kebutuhan dana dari masing-masing *event* DCF yang sudah dilaksanakan beserta pihak-pihak yang sudah mendukung *event* DCF selama ini.

Tabel. 3. Dukungan Kebutuhan Dana DCF

Tahun	Waktu pelaksanaan	Biaya Operasional	Sumber pendanaan
2010	2 hari	Rp 45.000.000,-	Swadaya panitia, pemda Wonosobo, pemda Banjarnegara, sponsor
2011	3 hari/2 malam	Rp 80.000.000,-	Swadaya panitia, peserta paket, pemda Wonosobo, Banjarnegara dan sponsor
2012	2 hari/1 malam	Rp 125.000.000,-	Swadaya panitia, peserta paket, Pemda Provinsi, Pemda banjarnegara, dan sposor
2013	2 hari/2 malam	Rp 165.000.000,-	Swadaya panitia, peserta paket, pemda Provinsi, pemda Banjarnegara, sponsor
2014	3 hari/2 malam	Rp 600.000.000,-	Swadaya panitia, peserta paket, pemda Provinsi, pemda Banjarnegara, sponsor

Sumber : Diolah dari Pokdarwis Dieng Pandawa, 2014

Dari berbagai tabel di atas dapat diperhatikan untuk kebutuhan dana operasional saja, dapat dicukupi dengan dukungan semua pihak. dukungan berbagai pihak yang coba dirangkul penyelenggara menggupayakan mendapatkan sumber pendanaan, baik dari pemerintah, swasta, swadaya dan sponsor yang diharapkan mendukung acara DCF.

Dari sisi muatan agenda kegiatannya, *event* DCF sangat mengangkat bermuatan lokal. Sebagian besar warga desa Dieng Kulon terlibat baik sebagai pendukung, pemain kesenian misalnya. Ada juga beberapa kelompok kesenian yang dipersembahkan dari desa tetangga, misalnya Desa Dieng Wetan, Desa Jojogan, Desa Karang Tengah, Desa Simpangan, Desa Pawuhan, Desa Kepakisan, Desa Pekasiran,. Sementara dari pihak sponsor yang mendukung antara lain : PT Geodipa Energy unit Dieng, PT Surya Yudha, BKK BPR, Perusahaan Rokok Aroma, Telkomsel dan beberapa produk makanan. Dari pihak pemerintah kegiatan DCF ini turut didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara dan Bappeda Banjarnegara.

d. Evaluasi dan Dampak dari Perhelatan DCF

Kegiatan DCF yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 tentunya tidak luput dari kekurangan. Terlebih hampir seluruh panitia adalah warga masyarakat desa yang sepenuhnya mengelola *event* ini. Berpijak dari pengalaman dan evaluasi pelaksanaan tahun 2009, *event* wisata berupa DCF dipandang memiliki prospek baik karena mampu mengangkat Dieng sebagai *branding* destinasi. *Event* ini juga sebagai jawaban atas kebutuhan para tour operator untuk menawarkan paket wisata ke Dieng. Selama ini pengelola menyadari masih terbatas dana promosi dan *event* pariwisata yang dilaksanakan pemerintah.

Tabel 4. Penyelenggaraan DCF dan Dampak Ekonomisnya

Tahun	Waktu pelaksanaan	Biaya Operasional	Sumber pendanaan	Keuntungan/ Kerugian
2010	2 hari	Rp 45.000.000,-	Swadaya panitia, pemda Wonosobo, pemda Banjarnegara, sponsor	Defisit 1,5 juta
2011	3 hari/2 malam	Rp 80.000.000,-	Swadaya panitia, peserta paket, pemda Wonosobo, Banjarnegara dan sponsor	Defisit 3 juta
2012	2 hari/1 malam	Rp 125.000.000,-	Swadaya panitia, peserta paket, Pemda Provinsi, Pemda banjarnegara, dan sposor	Untung 4,5 juta
2013	2 hari/2 malam	Rp 165.000.000,-	Swadaya panitia, peserta paket, pemda Provinsi, pemda Banjarnegara, sponsor	Untung 10 juta
2014	3 hari/2 malam	Rp 600.000.000,-	Swadaya panitia, peserta paket, pemda Provinsi, pemda Banjarnegara, sponsor	Untung 30 juta

Sumber ; data primer, panitia DCF 2014, Pokdarwis Dieng Pandawa.

Beberapa evaluasi yang dirasakan penting antara lain; (a) peningkatan pelayanan untuk *event* DCF yang dakan dilaksanakan tahun berikutnya. Masukan ini diperoleh dari saran pengunjung via blog/website DCF; (b) melengkapi dan menambah *event* pendukung yang potensial; serta (c) melakukan manajemen *event* DCF agar lebih baik dengan mendisain acara lebih menarik sekaligus (d) berupaya secara maksimal untuk mendapatkan sponsor pendanaan *event* DCF yang lebih kuat. Dari lima kali *event* DCF yang berhasil dilaksanakan, seperti tampak pada tabel 4 *event* DCF dipandang memiliki dampak positif meskipun awalnya (2010-2011) mengalami kerugian. Kerugian ekonomi dipandang sebagai pengalaman untuk belajar memperbaiki dan melakukan peningkatan. Hal ini terbukti di tahun 2012,2013 dan 2014 panitia mendapatkan keuntungan, bukan saja dari meningkatkan jumlah pengunjung namun juga diperolehnya uang kas bagi Pokdarwis. Kebanyakan wisatawan adalah domestic (75%), 20% masyarakat local dan 2% wisman. Beberapa wisman yang gabung dalam *event* DCF ini adalah dari Malaysia, Singapore, Jepang dan beberapa Negara Eropa.

Tabel 5. Kunjungan wisatawan dikala DCF

Tahun	Tamu / Peserta Paket DCF	Wisatawan Umum	Jumlah
2010	100	750	850 orang
2011	400	2500	2900 orang
2012	700	5000	5700 orang
2013	1200	10000	11200 orang
2014	3000	27000	30000 orang

Sumber ; data primer, DCF 2014, Pokdarwis Dieng Pandawa.

Sementara dari dampak lainnya yang dirasakan oleh pemerintah, pokdarwis dan masyarakat Dieng umumnya dapat dicermati pada tabel 6 . berikut.

Tabel. 6. Dampak *Event* DCF

Stakeholders	Dampak (kualitatif) yang dirasakan
Pemda Banjarnegara	Jumlah pengunjung Dieng meningkat. Kenaikan PAD yang sebelum ada DCF hanya 300 juta/tahun sekarang mencapai 3 miliar/tahun.
Pokdarwis Dieng Pandawa	Menambah pendapatan Menambah jaringan kerja dengan desa Menambah jaringan kerja dengan biro perjalanan (BPW)
Bagi pelaku wisata Dieng	Menambah pendapatan bagi semua masyarakat Dieng dan sekitarnya

Sumber: Data primer, panitia DCF 2014, Pokdarwis Dieng Pandawa.

Event DCF yang menjadi *ikon* bagi destinasi Dieng yang mampu memberikan keuntungan positif bagi pemerinta. E*vent* DCF ternyata mampu mendongkrak PAD dengan meningkatnya kunjungan wisatawan. Bagi kelompok sadar wisata, *event* pariwisata yang dilaksanakan telah mampu memberikan peningkatan pendapatan, menambah jaringan kerja antardesa sekaligus mengembangkan jejaring dengan pihak biro perjalanan (BPW). Sementara bagi pelaku wisata Dieng, tentunya *event* DCF ini memberikan keuntungan sekaligus menambah pendapatan bagi pelaku wisata di Dieng. Beragam usaha, khususnya *homestay* dan sektor kerajinan makanan yang dihasilkan dan siapkan oleh masyarakat banyak meraup keuntungan. Belum lagi dari sisi pemandu wisata lokal, banyak yang mendapatkan *jobs* dari adanya *event* DCF ini.

IV. KESIMPULAN

Perhelatan tahunan *Dieng Culture Festival* (DCF) sejak 2010 sampai saat ini dilangsungkan oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata Dieng Pandawa. Hal ini semakin mampu memberikan keyakinan diri kepada masyarakat setempat bahwa mereka mampu menyelenggarakan *event* budaya yang ternyata dapat mendongkrak nama besar Dieng. *Event* pariwisata yang dikemas dengan muatan budaya tradisi dan kontemporer sudah terbukti mampu memberikan dampak ekonomi ataupun social sekalgus budaya bagi segenap pelaku/pemangku kepentingan.

Perencanaan *event* yang dijalankan secara konsisten dengan mengikuti lima komponen, mulai dari riset, disain, planning, koordinasi serta evaluasi diharapkan secara sistemik akan mampu memberikan peningkatan pada *event* DCF dimasa mendatang. *Event* DCF mampu meningkatkan *brand image* Dieng sebagai sebuah destinasi. Hal ini terbukti dari peningkatan kunjungan wisatawan dari setiap *event* DCF. Bagi pemerintah daerah Banjarnegara semestinya patut mendukung *event* yang awalnya digagas oleh komunitas. Harapannya, agar *event* DCF ini selalu mendapatkan dukungan penganggaran yang memadai oleh pemerintah, selain upaya dilakukan secara mandiri oleh pengelola untuk mendapatkan sumber pendanaan agar pelaksanaan DCF kelak kemudian hari akan dapat berlangsung meriah dengan tetap menonjolkan nilai budaya Dieng, sebagai *ikonnya*.

Ucapan terima kasih :
Disampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang telah berkenan mendukung penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih untuk mas Alif Fauzi, Ketua Pokdarwis Dieng Pandawa, Desa Dieng Kulon, Banjarnegara, Bapak Ibnu, kepala UPTD Dieng-Banjarnegara, bapak Muhson, pemilik homestay Asoka, Dieng Kulon, dan tim sekretariat DCF, yang telah memberikan banyak informasi dan pengalaman terkait dengan *event* DCF. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Studi Pariwisata UGM Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada saya sehingga dapat

berpartisipasi dalam seminar ini. Terima kasih juga kepada pihak panitia seminar nasional yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk *sharing* pada kesempatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abddullah, Iqbal Alan. (2009). *Manajemen Konferensi dan Event*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Allen, J., O'Toole, et al. (2002). *Festival and Special Event Management*. New Jersey : John Wiley & Sons Inc.

Getz, Donald. (2008) "*Event* Tourism : Definition, Evolution and Research", *Tourism Management,* Vol. 29, hlm : 403-428.

Christie, Marie, dan Lesley McAteer. (2006). *Event Management : a Pratical Guide*. Edinburgh : *Event* Scotland.

Congcong, Tang. (2014). "The Study of Festival Tourism Development of Shanghai", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 5 No. 4 (Special Issue-March).

Goldblatt Joe. *(*2002). "*Special Events*. Third edition. New York : John Wiley and Sons.

Gunn, Clare A. (2002). *Tourism Planning* Fourt Edition. New York : Routledge.

Hermantoro, Henky. (2011). *Creative Based Tourism : Dari Wisata Rekreatif menuju Wisata Kreatif*. Depok : Penerbit Aditri.

Hermantoro, Hengky. (2014). *Kepariwisataan, Destinasi Pariwisata Produk Pariwisata*. Depok : Penerbit Aditri.

Lieper, N. (2004). *Tourism Management*. Pearson Education : Australia.

Made, Ni Eka Mahadewi, (2012 " Atraksi, Produk Wisata dan *Event* Wisata : Dari Teori ke Praktik". *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, Agustus 2012, Vol. 2 No. 1. Hlm : 1-10.

Moh. Soehadha, (2013). "Ritual Rambut Gembel dalam Arus Ekspansi Pasar Wisata. *Walisongo,* Volume 21, Nomor 2, November, hlm : 347-363.

Mubin, Nurul. (2016). Rituil Cukur Rambut Gimbal : Studi Makna Rituil bagi Pendidikan Moral Lingkungan dalam Komunitas Muslim Penghayat Kepercayaan Tunggal Sabdo Jati di Kawasan Dataran Tinggi *Dieng*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Noor, Ani. (2009). *Manajemen Even*. Cetakan 1, Bandung : Alfabeta.

Ooi, Chan Seng & Jesper Strandgaard. (2009). *City Branding and Film Festivals: the case of Copenhagen*. Pedersen Copehagen Business School Creative Encouters Working paper # 28.

OECD, (2017) "Major Events as Catalysts for Tourism". OECD Tourism Papers, 2017/02. OECD Publishing, Paris.

Raharjana, Destha Titi . 2012. "Membangun Pariwisata Bersama Rakyat : Kajian dalam Membangun Desa Wisata Dieng Plateau". *Jurnal Kawistara*, Vol.3, No. 3 hlm : 225-237.

Saputra, Johan. (2014). "Perencanaan *Event* Management Festival Kesenian Yogyakarta sebagai Media Komunikasi Identitas Yogyakarta", *Skripsi*. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta. Tidak diterbitkan.

Sukatno, Otto, CR. (2004). *Dieng Poros Dunia : Menguak Jejak Peta Surga Yang Hilang*. Yogyakarta : IRCiSOD.

Sulaksana, Uyung. (2007). *Integrated Marketing Communications : Teks dan Kasus*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Reformulasi
Konsep Ekoturisme Berbasis Partisipasi Masyarakat

Wara Indira Rukmi[1]
[1]*Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang*
[1]*Email: wara_indira@yahoo.com*

ABSTRAK

Belajar dari kegagalan penyelesaian persoalan kerusakan lingkungan atau relasi disharmonis antara manusia dan lingkungan alam selama ini, maka perlu menempatkan pemahaman filosofis sebagai *standpoint* terhadap persoalan lokal-kontemporer relasi manusia dengan alam. Ini hanya dapat digali melalui pemahaman tentang relasi manusia dengan ruang atau lingkungan. Dalam kerangka pandangan tersebut, maka konsep "**ekoturisme**" adalah alat untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yang memegang teguh dan menerapkan nilai yang dikandung dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia dan konsep *sustainable and responsible tourism* seperti yang dirumuskan oleh UNWTO (2005). Dalam hal ini, pemahaman tentang budaya atau cara manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan serta sikapnya terhadap ruang hidup dan kehidupannya adalah titik tolak bagi upaya preskriptif-implementatif berkenaan dengan pelestarian budaya dan lingkungan, khususnya basis praksis pengembangan dan keberlanjutan sektor ekonomi-pariwisata.

Trend pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan yang menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pembangunan berlandaskan pandangan politikal-ekonomi liberal, dikhawatirkan menuai runtuhnya makna penting dari objek itu sendiri. Eksistensi sebuah jalinan ruang alam dan buatan dengan pandangan hidup-kehidupan, gagasan, cita-cita, orientasi nilai dan sistem kepercayaan dari suatu individu/kelompok yang terwariskan dari generasi ke generasi, yang menjadi identitas lokal dan perlu dilestarikan. Karena itu, penerapan **ekoturisme harus dikembalikan kepada tujuan dasarnya, yaitu pelestarian**. Demikian, sehingga reformulasi konsep ekoturisme signifikan untuk dilakukan.

Kata kunci: Ekoturisme, Partisipasi Masyarakat, Reformulasi

I. PENDAHULUAN

> "*Every time we travel, for whatever reason, we are part of a global movement; a movement that has the power to drive inclusive development, create jobs and build the sustainable societies we want for our future; a movement that builds mutual understanding and can help us safeguard our shared natural and cultural heritage*."

Dikutip oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia (2015) dari pernyataan Sekjen UNWTO (2012), bahwa setiap kali kita melakukan perjalanan untuk alasan apa pun, kita adalah bagian dari gerakan global. Sebuah gerakan yang memiliki kekuatan untuk mendorong pembangunan yang inklusif, menciptakan lapangan kerja dan membangun masyarakat berkelanjutan yang kita inginkan untuk masa depan kita. Sebuah gerakan membangun rasa saling pengertian dan membantu menjaga warisan alam dan budaya bersama. Dengan tujuan tersebut, semestinya wisata tak saja menawarkan eskapisme, yang dipahami sekadar sebagai sebuah jalan keluar dari rutinitas keseharian dengan iming-iming keindahan alam, surga-surga dunia, dan atau lorong-lorong perkotaan yang menawarkan sejuta romantisme. Meski tujuan tak

menemukan realitanya, namun karena keduanyalah maka pariwisata senantiasa dipandang dengan positif.

Beberapa tahun terakhir, terutama pada era pemerintahan Indonesia saat ini, pariwisata menggeliat menjadi primadona dan dicap sebagai juru selamat dari rutinitas yang dianggap membosankan. Dengan kemasan industri yang cantik, pariwisata menjadi sumber pemasukan utama bagi negara.[3] Tak dapat dihindari, pariwisata pun identik dengan bisnis, perhotelan, *hospitality*, dan banyak hal lain yang terkait dengan mendatangkan, memanjakan dan mengeruk "kantong" wisatawan di destinasi. Seperti yang tersirat dibalik slogan yang melekat pada peringatan World Tourism Day 2015, "*1 Billion Tourists*, *1 Billion Opportunities*". Harapan munculnya sejuta peluang yang bermuara pada tujuan devisa negara.

Di Indonesia, studi kritis tentang pariwisata masih merupakan barang langka. Hal ini mungkin disebabkan oleh segala keindahan yang ditawarkan. Gejala yang sama juga berlaku di dunia. Namun demikian, pada tahun 1970-an mulai tampak adanya perkembangan analisis kritis soal pariwisata. Holden (2016) mencatat bahwa status pariwisata sebagai "*smokeless industry*" pada era tersebut, mulai digugat. Banyak ahli juga membeberkan berbagai dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, juga terhadap budaya lokal. Holden menyatakan bahwa wisata budaya etnik mencapai puncaknya sekitar tahun 1980-an. Analisis kritis tentang ekses negatif pariwisata pun bermunculan pada waktu tersebut. Di Indonesia, Bali dan Toraja menjadi contoh muram objek pariwisata yang sering diekspos.

Gigantisme sektoral yang terjadi di Indonesia tak dapat dipungkiri dipicu oleh industri pariwisata yang selalu menempati urutan ke-4 atau ke-5 penghasil devisa bagi negara dalam beberapa tahun terakhir. Dengan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2019 sebesar 20 juta dan wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 275 juta, maka pemerintah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dan memberikan anggaran belanja yang naik cukup signifikan demi tercapainya target utama pembangunan (Kemenpar RI, 2015). Tak dapat dipungkiri, target pembangunan kepariwisataan adalah identik dengan target utama pembangunan. Implikasinya, demi tercapainya target tersebut, maka komodifikasi budaya kontemporer hingga warisan leluhur dan atau lanskap alamiah --pegunungan dan lautan-- dianggap sah dan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Sejalan dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan kepariwisataan yang memegang teguh dan menerapkan nilai dalam prinsip penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia dan konsep *sustainable and responsible tourism* yang dirumuskan UNWTO (2005), yaitu: 1) kepariwisataan berbasis budaya, yang dimengerti sebagai kegiatan kepariwisataan berlandaskan nilai-nilai agama, budaya, adat-istiadat dan tradisi bangsa Indonesia; 2) kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu bertujuan utama mensejahterakan masyarakat setempat dengan memberdayakan, peran serta langsung serta kepemilikan secara proporsionalitas untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan 3) kepariwisataan berbasis lingkungan, menempatkan alam pada kedudukan yang sama sebagai ciptaan Tuhan, menggunakan sekaligus melestarikan alam agar dapat dimanfaatkan oleh

[3] Disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata (DBPDIP Kemenpar) pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kemenpar dalam tema "Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan dalam Rangka Pencapaian Target 12 JutaWisman dan 260 Juta Wisnus 2016", bahwa kontribusi sektoral pariwisata terhadap PDB tahun 2014 sebesar 9% akan ditingkatkan menjadi 15% di tahun 2019. Selain itu, devisa sebesar 140 triliun dan serapan tenaga kerja sebesar 11 juta pada tahun 2014, akan ditingkatkan menjadi 280 triliun dan 13 juta pada tahun 2019.

generasi yang akan datang; maka tulisan ini mengajukan refleksi kritis tentang konsep "ekoturisme berbasis partisipasi masyarakat".

Dalam kerangka tujuan tersebut, maka pemahaman tentang budaya atau cara manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan serta sikapnya terhadap ruang hidup dan kehidupannya adalah *standpoint* bagi upaya preskriptif-implementatif dalam pelestarian budaya dan lingkungan, sebagai basis praksis pengembangan dan keberlanjutan sektor ekonomi pariwisata.

II. METODE

Tulisan ini didasarkan pada kajian yang bersifat *desk study* dan dikategorikan dalam jenis penelitian *content analysis*. Pilihan jenis penelitian ini menuntut berlakunya beberapa prinsip, yaitu 1) melakukan analisis hanya terhadap isi teori atau dokumen yang tersedia secara sekunder; 2) analisis dilakukan terhadap: definisi, tema, topik, ideologi, paradigma, dan atau pernyataan-pernyataan khusus; 3) dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan cara mendialogkan dengan sumber lain yang relevan; dan 4) membangun generalisasi ilmu dan atau teori, sehingga hasil akhirnya harus memberikan sumbangan teoritik yang relevan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen sekunder atau tertulis, sehingga tidak menuntut adanya kunjungan lapangan.

Prinsip analisis dalam metode *content analysis* adalah melakukan analisis *inter-textual* atau memaknai teks melalui dialog dengan teks lain. Langkah analisis dalam metode ini adalah: 1) penentuan unit analisis; 2) kategorisasi unit analisis; 3) pemaknaan unit-unit yang serumpun berdasarkan karakteristiknya; 4) pemaknaan melalui dialog dengan teks atau sumber-sumber teori lain; dan 5) konsepsualisasi atau teorisasi hasil dialog (no 4).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembangunan: perkembangan paradigmatis

Terminologi "pembangunan" selama ini dimengerti sebagai sebuah kata benda yang berarti proses atau usaha yang dilakukan demi tercapainya tujuan peningkatan kondisi: 1) lahiriah seperti sandang, pangan, papan; 2) batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; dan 3) hidup berkeadilan sosial yang meliputi seluruh rakyat (Salim, 1987; Fakih, 2001). Dalam pengertian tersebut, "pembangunan" dapat dimengerti sebagai sebuah "perubahan sosial". Lebih dari itu, "pembangunan" dipahami pula sebagai sebuah pandangan ideologis, teoritis dan praktik perubahan sosial. Karenanya, membicarakan pembangunan adalah membicarakan keyakinan ideologis atau "isme" yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan sosial.

Gagasan tentang pembangunan mengalami perkembangan luar biasa dan seolah menjadi "agama" karena janjinya untuk menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Dalam naungan payung paradigma filsafat positivisme hingga fenomenologis, gagasan tersebut berkembang dalam kerangka pandangan *instrumental knowledge* menuju pandangan interpretatif dan *critical* atau *emancipatory knowledge* (Barrel dan Morgan, 1979; Black, 1991; McMichael, 1996; Fakih, 2001). Pandangan *instrumental knowledge*, meyakini bahwa pengetahuan dimaksudkan untuk mendominasi objek --manusia, benda dan alam--, dan kebenaran bersifat universal-general, sehingga dapat diberlakukan pada semua fenomena sosial dengan cara mempertahankan objektivitas. Pandangan ini mempercayai bahwa rakyat tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri. Karena itu, para ahli, perencana, dan teknisi muncul sebagai agen solutif terhadap setiap persoalan rakyat. Sementara itu, pandangan interpretatif dalam ilmu sosial lebih menekankan pada upaya membangun pemahaman secara sungsuh-sungguh terhadap hakekat persoalan. Tujuan ini diyakini dapat teraih melalui pemahaman mendalam tentang hakekat objek, dengan membangun

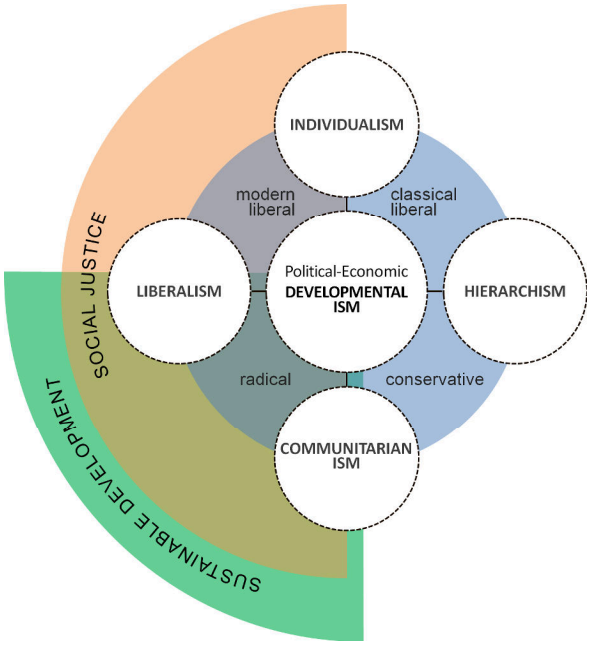
subjektivitas dan menolak cara berpikir deterministik dan reduksionistik. Meski menjadi tradisi besar dalam perkembangan pengetahuan, namun kalangan ilmuwan sosial menganggap bahwa pengetahuan dalam naungan pandangan ini tidak dimaksudkan sebagai proses yang membebaskan. Anggapan ini mengarahkan pada munculnya pandangan baru, yaitu pandangan *critical* atau *emancipatory knowledge* yang dipahami sebagai proses atau gerakan mempercepat perubahan untuk pembebasan manusia dari ketidakadilan. Seperti halnya pandangan interpretatif yang menolak cara berpikir deterministik dan reduksionistik, pandangan kritis meyakini bahwa pengetahuan tidak mungkin bersifat netral. Berbeda dengan *instumental knowledge*, pandangan kritis ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses perubahan, penciptaan dan pengontrol pengetahuan mereka. Demikian, sehingga dalam pandangan ini subjektivitas, keberpihakan dan kesadaran berperan penting dalam membangun pengetahuan.

Pada akhirnya, pandangan *critical* atau *emancipatory knowledge* menjadi dasar ideologis dan teoritik bagi gerakan partisipatoris, baik dalam riset maupun praksis proses perubahan sosial. Dalam pembangunan, pandangan ini juga menaungi model pendekatan pembangunan politikal-ekonomi.

B. Pembangunan: pendekatan politikal-ekonomi

Pada prinsipnya, ekonomi dan politik dibedakan dalam tiga hal, yaitu 1) tujuan; 2) arena dan lembaga; dan 3) aktor utama atau pelaku (Clark, 1991). Ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan melalui pasar sebagai institusi, dengan pelaku-pelaku individual yang dominan. Politik mencapai tujuan keadilan kolektif menggunakan institusi pemerintah, dengan masyarakat sebagai pelaku utama. Sementara itu, politikal-ekonomi sebagai sebuah alternatif yang berupaya mengintegrasikan antara market dan pemerintah untuk mencapai tujuan kolektif, yaitu kesejahteraan dan keadilan.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, dikenal pandangan *individualism*, *hierarchism*, *communitarianism*, dan *egalitarianism* yang menjadi asumsi dasar dari paradigma politikal-ekonomi. Pandangan filosofis ini menjadi dasar kategorisasi paradigma dalam pendekatan politikal-ekonomi, yaitu: paradigma liberal klasik, radikal, konservatif, dan modern liberal (neo liberal). Penganut *paradigma liberal klasik* meyakini bahwa kesejahteraan ekonomi dapat dicapai melalui pembentukan hierarki sosial yang menjamin kebebasan individual. Dipengaruhi oleh semangat *enlightenment*, kelompok radikal memberikan respon kepada paradigma liberal klasik dengan menawarkan rekonstruksi sosial melalui egalitarianisme. Dalam *paradigma radikal* diyakini bahwa pembangunan manusia dan ekonomi hanya tercapai bila seluruh masyarakat diberdayakan melalui pembentukan lembaga-lembaga kolektif, penguatan partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya secara kolektif. Paradigma ini menjadi ide dasar dari gerakan-gerakan politik progresif yang berkembang luar biasa di United State demi tercapainya reformasi kapitalisme ekonomi melalui institusionalisme. Sebuah tradisi berpikir dalam kerangka pandangan radikal yang mempercayai pentingnya peran pemerintah sebagai pengontrol dan pengarah kegiatan perekonomian untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Sebagai respon terhadap semangat *enlightenment*, muncul *paradigma konservatif* yang dipengaruhi semangat *romanticism*. Penganut paradigma konservatif meyakini pentingnya mempertahankan hierarki sosial untuk mencapai tujuan-tujuan individual. Pandangan ini menganggap bahwa kekuatan hierarki sosial adalah cermin loyalitas dan persatuan antar individu dalam masyarakat. Kaum *neo liberal* atau dikenal sebagai *moderm liberal* merespon dengan proposisi bahwa kesejahteraan bersama adalah jaminan pembangunan kapasitas individu secara optimal. Dalam kerangka tujuan tersebut, maka pemerintah diperlukan untuk membangun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.



Gambar 1. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam payung paradigma politikal-ekonomi.

Pergeseran paradigma tersebut tentu saja diikuti oleh pergeseran konsep pembangunan. Belakangan, konsep pembangunan berkelanjutan muncul dan diyakini sebagai jawaban atas persoalan-persoalan kemanusiaan dan lingkungan yang terjadi oleh praktik-praktik pembangunan sebelumnya.

C. *Pembangunan Berkelanjutan: keadilan sosial dan*

> "*...development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need.*"

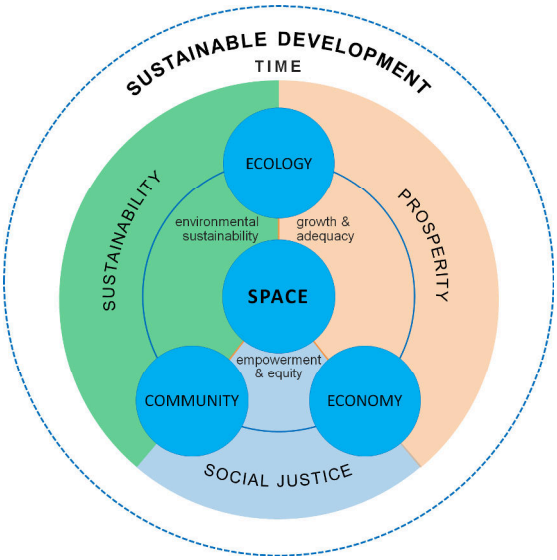
Sejak tahun 1987, sudah dinyatakan oleh World Commission bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan manusia saat ini dengan jaminan terpenuhinya kebutuhan generasi di masa mendatang oleh sumber daya yang ada. Dalam pengertian tersebut, maka semestinya dipahami bahwa keadilan sosial dan kelestarian sumber daya adalah ruh dalam setiap upaya pembangunan saat ini. Karenanya, pembangunan berkelanjutan sebenarnya adalah sebuah etika politik pembangunan, yang didalamnya terkandung komitmen moral tentang tatacara pencapaian tujuan dalam pembangunan.

Tersirat dari 17 tujuan yang ingin dicapai, terdapat tiga perspektif dasar dari pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial-budaya (manusia), dan lingkungan hidup (ekologi). Sejalan dengan pandangan Hoehn (1996), ketiganya dipahami sebagai sebuah kesatuan integratif yang tidak dapat saling menegasikan. Demikian, sehingga perlu merenungkan kembali pandangan maupun orientasi pembangunan yang berlaku. Benarkah menempatkan satu aspek sebagai aras utama, dan kedua aspek lainnya sebagai penunjang dalam orientasi pembangunan? Jika ketiganya memiliki bobot yang sama, bagaimana halnya dengan pandangan tentang pembangunan yang kontekstual? Yang terikat oleh ruang, pelaku, dan waktu. Bukankah setiap ruang, setiap komunitas, setiap waktu memiliki persoalan dan membutuhkan pemecahan yang khas?

Ketika “politik” dipahami dalam pengertian “strategi”, maka kecenderungan reduktif antar aspek pembangunan berkelanjutan tersebut sangat mungkin terjadi. Pencapaian kesejahteraan --baik individu atau masyarakat—dengan mendorong pertumbuhan pendapatan, bermuara pada munculnya persoalan fundamental yaitu

menempatkan manusia dan lingkungan sekedar sebagai faktor produksi. Meski secara teoritik keberdayaan manusia adalah tujuan yang dicita-citakan, tetapi bagaimana realitanya? Apakah keberdayaan itu cukup hanya dipahami dari turunnya angka kemiskinan, dari kemampuan produktif yang meningkatkan nilai tambah, kehadiran dalam sejumlah kelembagaan, kehadiran dalam setiap acara yang diprogramkan lembaga formal setempat? Terpenuhinya kursi-kursi atau lembar-lembar absensi? Apakah keberdayaan tidak terkait erat dengan eksistensi individu maupun komunitas setempat? Apakah kehadiran sama dengan keberadaan? Sama dengan eksistensi? Apakah eksistensi hanya terjadi secara eventual? Bagaimana kesehariannya?

Implementasi keadilan sosial sebagai ruh pembangunan menuai kesangsian mendasar, dan persoalan partisipasi masyarakat pun memerlukan refleksi mendalam. Bagaimana dengan kelestarian lingkungan?



Gambar 2. Konsep pembangunan berkelanjutan.

D. Ekoturisme: Trend pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Selama ini ditemukan hubungan kontradiktif antara praktik pembangunan (developmental) dan pelestarian. Beberapa pihak menganggap bahwa pelestarian berorientasi ekosentrisme dan mengabaikan kehidupan manusia di dalamnya. Sementara itu, praktik *developmental* dianggap berlandaskan pada pandangan antroposentrisme, sehingga berbuah kerusakan lingkungan alam.

Ekoturisme, yang muncul pada tahun 1900-an, memberi jawaban atas hubungan kontradiktif tersebut. Kemunculannya dilatar belakangi oleh anggapan bahwa pariwisata merupakan kegiatan ekonomi global terbesar yang dapat menjadi jalan untuk menyediakan sumber pembiayaan bagi upaya konservasi alam dan meningkatkan nilai lahan yang dibiarkan dalam kondisi alamiahnya (Lindberg and Donald, 1993). Seiring dengan pandangan tersebut, muncul kesadaran bahwa aktivitas konservasi alam tak dapat dilangsungkan dengan mengorbankan warga yang selama ini hidup dalam lingkungan tersebut. Masyarakat lokal berhak mendapat keadilan atas ruang hidupnya. Ekoturisme menggabungkan komitmen kuat terhadap alam dan tanggung jawab sosial. Dapat dikatakan bahwa ekoturisme adalah wujud gerakan pembangunan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan pandangan UNEP (*United Nations Environmental Program)* terhadap ekoturisme terutama dalam hal keterkaitannya dengan

konservasi, keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan. Ekoturisme sebagai alat pembangunan dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan dasar Konvensi Keanekaragaman Hayati, yakni :

1. melindungi keanekaragaman hayati dan budaya;
2. mempromosikan penggunaan secara berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati, dengan menghasilkan pendapatan, lapangan kerja di ekoturisme;
3. membagikan keuntungan dari pembangunan ekowisata secara adil terhadap masyarakat lokal, dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan manajemen ekoturisme (Wood, 2002).

Demikian, sehingga **ekoturisme adalah identik dengan *sustainable tourism***. Prinsip sustainabilitas mengacu pada terbangunnya keseimbangan aspek lingkungan, sosio-kultural; dan ekonomi berkelanjutan dalam pengembangan kegiatan wisata (UNEP and UNWTO, 2005).

Di Indonesia, partisipasi menjadi konsep yang problematis, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ekoturisme. Masyarakat Ekoturisme Internasional (*The International Ecotourism Society-TIES*) menuntut pemenuhan prinsip dasar untuk mencapai tujuan ekoturisme, yaitu:

1. menghormati budaya lokal serta sensitif terhadap keberadaan dan pengembangan budaya; menghindari dampak negatif yang dapat merusak integritas atau keunikan lingkungan;
2. mendidik wisatawan mengenai pentingnya konservasi dengan menyediakan layanan informasi atau pendidikan bagi pengunjung dalam menikmati alam dan atau budaya lokal;
3. menekankan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri pariwisata, dan meneliti agar pembangunan pariwisata tidak melampaui daya dukung sosial dan lingkungan;
4. melakukan penanganan kegiatan wisata yang memberikan efek terbaik dalam memelihara kelestarian ekologi melalui penggunaan infrastruktur yang bersahabat dengan lingkungan;
5. menjadikan aspirasi pengunjung sebagai masukan dalam mengembangkan kegiatan wisata;
6. memberikan kontribusi pendapatan untuk konservasi lingkungan dan warisan budaya setempat;
7. mengarahkan pendapatan bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat lokal berkelanjutan;
8. mempertahankan presentase pendapatan yang tinggi bagi negara penyelenggara pariwisata dengan mengutamakan penggunaan fasilitas dan jasa lokal (Wood, 1996; 2002).

Dalam tujuan tersebut, tersirat bahwa kelestarian budaya lokal dan lingkungan alam setempat yang terwariskan dari generasi ke generasi, juga keadilan bagi masyarakat lokal untuk mendapat kesempatan mengelola dan mencapai kesejahteraan hidupnya adalah tujuan dasar dalam pengembangan ekoturisme. Mempertimbangkan hal tersebut, semestinya disadari bahwa partisipasi sosial atau partisipasi masyarakat, yang selama ini digunakan sebagai basis upaya preskriptif pariwisata atau perencanaan pembangunan seperti yang dilakukan dalam riset-riset terapan lain, sebenarnya adalah bagian dari budaya hidup atau potensi *cultural living* dalam sebuah ruang lokal di Indonesia. Dalam hal ini “partisipasi masyarakat” tidak ditempatkan sebagai basis penerapan perencanaan pembangunan, dengan argumentasi bahwa “gotong-royong” sebagai konsepsi lokal dari “partisipasi

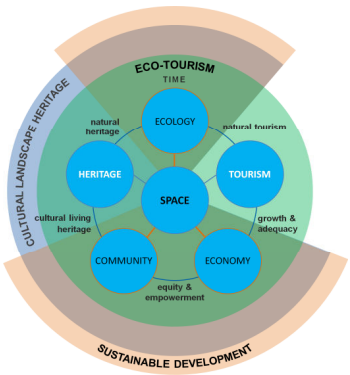
masyarakat" adalah salah satu tradisi yang telah terwariskan dari generasi ke generasi (Pangarsa, 2006; Rukmi, 2014; 2015). Karena itu, "*partisipasi masyarakat*" semestinya dipahami sebagai bagian dari "*cultural heritage*" itu sendiri. Jadi, mengapa dalam tradisi pembangunan Indonesia saat ini, khususnya ekonomi-pariwisata, partisipasi masyarakat atau gotong-royong diposisikan sekadar sebagai alat pembangunan?

Mengingat sejarah perkembangannya yang panjang, di Indonesia problem tersebut terjadi karena konsep partisipatif ini muncul dari tradisi hidup masyarakat Barat yang khas. Tradisi partisipasi kontradiksi dengan tradisi hidup masyarakat Barat yang dominan individualis, berbasis konsumen, dan dominasi rasionalisme yang menolak sosialisasi dengan kelompok-kelompok masyarakat tradisional. Karenanya, menumbuhkan kesadaran, yang menjadi fokus dasar dalam gerakan partisipasi, adalah sebuah tantangan berat bagi para pelaku pembangunan dalam menyelesaikan persoalan sosialisasi pada konsumen-konsumen yang pasif. Implikasinya, tokenisme justru muncul dan menciptakan citra keberhasilan sosialisasi antar komunitas.

Tujuan pembangunan, ekoturisme, yang telah dirumuskan disosialisasikan pada kelompok masyarakat lokal. Ketika masyarakat lokal tersebut dikumpulkan untuk mendapat informasi tentang program pembangunan yang akan dilakukan atas diri mereka dan ruang hidupnya demi kesejahteraan, apakah telah diketahui kesejahteraan dalam pandangan mereka? Apakah mereka memang betul-betul memerlukan peningkatan pendapatan untuk memenuhi kesejahteraannya? Dalam konteks kelestarian lingkungan, apakah sudah dipahami bagaimana masyarakat berhubungan dengan lingkungan hidupnya? Bagaimana mereka memandang lingkungannya?

Program-program pengembangan tiba-tiba datang, diinformasikan dan "dikonsultasikan" kepada rakyat, tetapi mereka sebenarnya sangat sedikit atau bahkan tidak punya sama sekali kekuatan untuk mempengaruhi keputusan dalam program-program tersebut. Jadi, sebenarnya siapa yang diberdayakan dalam proses partisipatif tersebut? Persoalan *hospitality* sudah bukan lagi rahasia merupakan perilaku hidup masyarakat tradisional di Indonesia yang terwariskan secara turun-temurun. Mengundang, memuliakan, dan membawa tamu dalam kehidupan keseharian, juga bekerja sama dengan sesama warga tak sekadar kebiasaan, namun disadari sebagai kewajiban dan kebutuhan bagi masyarakat lokal setempat. Jadi, mengapa harus diajarkan dan diperjual belikan?

Program-program ekoturisme berbasis partisipasi masyarakat sebenarnya penuh lubang. Lubang yang membuat terperosok ke dalam "kosmetikanisasi", eksploitasi, ko-optasi demi jaminan tercapainya motif-motif yang telah dirumuskan, dan kolonisasi pandangan. Jika direnungkan kembali, penyimpangan dari idealisme awal perumusan konsep tersebut menyimpan kejahatan tersembunyi. Dehumanisasi yang menuai *socio-cultural cost* tak ternilai di kemudian hari.



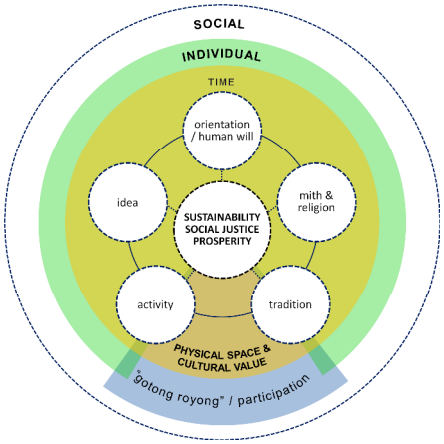
Gambar 3. Relasi ekoturisme, ruang, dan konsep pembangunan berkelanjutan.

E. Pemahaman kembali konsep sustainable and responsible tourism: reformulasi.

Bukan berarti sikap skeptis terhadap konsep ekoturisme berbasis partisipasi masyarakat dapat dibenarkan. Yang diperlukan adalah pemahaman kembali ruh dari konsep ekoturisme yang menjadi manifestasi pembangunan berkelanjutan, yaitu keadilan sosial dan kelestarian. Berdasarkan kasus-kasus implementatif yang terjadi, maka reformulasi konsep ekoturisme berbasis partisipasi masyarakat perlu dipertimbangkan dalam kerangka: 1) tujuan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat; 2) peran lembaga lokal atau tradisional dalam setiap pengambilan keputusan atau perencanaan program; dan 3) hak keterlibatan individu dan komunitas sebagai subjek dalam setiap proses pembangunan.

Tujuan pengembangan ekoturisme diarahkan pada tercapainya kesejahteraan dan keadilan bersama. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka diperlukan pemahaman tentang konsepsi "kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian" yang menjadi azas hidup masyarakat setempat dan bersumber dari pandangan hidup (keyakinan religius dan atau kepercayaan mitologis), orientasi nilai, kesatuan ide yang mewujud dalam tradisi dan sikap perilaku dalam beraktivitas keseharian (Rukmi, 2015; 2016). Pengungkapan konsepsi lokal tersebut akan menjadi landasan penting dalam upaya pencapaian kepentingan dan pengembangan karakter *individual* untuk memberikan kontribusi pada kesejahteraan dan keadilan bersama. Demi mencapai kesejahteraan kolektif dan melindungi lingkungan, maka pengembangan ekoturisme perlu mempertahankan keteranyaman individu-individu tersebut dalam jalinan kerjasama kooperatif atas dasar tanggung jawab bersama. Karenanya, regulasi-regulasi lokal dalam upaya perlindungan lingkungan yang diproduksi berdasar konsensus bersama harus mendapat dukungan. Demikian, sehingga *kekuatan sosial* yang ada sangat memungkinkan dan memfasilitasi individu untuk melakukan kontrol atasnya.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka diharapkan lubang-lubang penerapan konsep ekoturisme berbasis partisipatif tak lagi ditemukan. Pengungkapan pengetahuan lokal masyarakat, penghargaan terhadap individu dan lembaga sosial setempat tidak memungkinkan para perencana untuk berjarak dengan lingkungan, yaitu manusia dan alam setempat. Inilah humanisasi yang dicita-citakan konsep pembangunan berkelanjutan dan ekoturisme secara khusus.



Gambar 4. Ekoturisme berbasis warisan kultural-lingkungan.

IV. KESIMPULAN: EKOTURISME BERBASIS OBJEK

Kesadaran bahwa ekoturisme menjadi bagian dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengarahkan pada kesadaran baru bahwa keadilan sosial dan kelestarian sumber daya adalah ruh dalam setiap upaya pengembangannya. Keinginan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial, berdampak pada banyak upaya penerapan konsep ekoturisme berbasis partisipasi masyarakat.

Di Indonesia, partisipasi masyarakat menjadi konsep yang problematis. Program-program ekoturisme berbasis partisipasi masyarakat yang dijalankan sangat memungkinkan untuk terperosok ke dalam lubang dehumanisasi. Karena itu reformulasi konsep ekoturisme berbasis partisipasi masyarakat harus didasarkan pada upaya pengungkapan pengetahuan lokal yang berazas pada potensi kultural masyarakat, serta penghargaan terhadap karakter individual dan lembaga sosial setempat. Hal ini mustahil untuk dapat dilakukan oleh para perencana atau peneliti dengan mempertahankan objektivitas dan mengabaikan keberpihakan terhadap lingkungan, yaitu manusia dan alam lokal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat diposisikan kembali sebagai bagian dari nilai kultural yang harus dilestarikan. Akhirnya, konsep ekoturisme perlu dirumuskan kembali untuk menempatkan objek, yaitu objek warisan budaya (manusia) dan lingkungan alam lokal, sebagai basis pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, M. (2011). Pengelolaan Ekowisata Petungkriyono Berbasis Partisipasi Masyarakat, *Prosiding, Seminar dan Lokakarya Nasional "Ekowisata Petungkriyono Berbasis Kewirausahaan"*. Pekalongan: Universitas Pekalongan, 24 – 25 September 2011.

Attar, M., Luchman, H. dan Bagyo, Y. (2013). Analisis Potensi dan Arahan Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Ekowisata Di Kecamatan Bumiaji – Kota Batu. *Journal Of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol. 1 No. 2 April, 2013.

Black, J.K. (1997). *Development in Theory and Practice*. Boulder, CO: Westview Press.

Clark, B. (1991). *Political Economy. A Comparative Approach*. New York: Praeger.

Djaelani, MS. (2011). Etika Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Econosains.* Vol. IX No. 1 Maret 2011.

Fakih, M. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fandeli, C.; Raharjana,D.T.; Kaharudin. (2003). *Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Objek Wisata (Perencanaan Model Kelembagaan, Pasar dan Paket Wisata Pedesaan Sekitar Gunung Merapi) Yogyakarata.* Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.

Fowler, P.J. (2003). *World Heritage Cultural Landscapes 1992 – 2002*. Paris, Perancis : UNESCO World Heritage Centre.

Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand.

James, P.E and Martin, G. (1981). *All Possible Worlds: A History of Geographical Ideas*. New York: John Wiley & Sons.

Morgan, D. (1979). *Merchant of Grain*. New York: Viking.

Pannell, S. (2006). *Reconciling Nature and Culture in a Global Context: Lessons form the World Heritage List*. Australia: James Cook University.

Roseland, M. (1997). *Eco-City Dimensions: Healthy Communities, Healthy Planet*.

Rukmi, W.I.; Achmad, Dj.; Sudaryono S.; Heddy S.A. (2016). *The Construction of Spatial Concept Based Upon Beliefs and Life Orientation. Nobility Building Space of Majapahit Ancient City, Indonesia*. Proceeding. *Sriwijaya International Conference on Engineering, Science and Technology* (SICEST). Bangka: Universitas Sriwijaya, 9-10 November 2016.

Rukmi, W.I. (2015). *Ruang Kemulian: Konstruksi Gerak Meruang Dalam Kawasan Pusat Situs Purbakala Majapahit*. Tidak dipublikasikan. Disertasi. Yogyakarta: UGM.

Rukmi, W.I.; Achmad, Dj.; Sudaryono S.; Heddy S.A. (2015). *Monopluralitas Dalam Ruang Pusaka Majapahit di Trowulan*. Proceeding. Seminar Nasional dan Workshop Sustainable Culture Architecture and Nature (SCAN) #6. Finding the Fifth Element. Yogyakarta: UAJY, 21 Mei 2015.

Sudaryono. (2000). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian untuk Program S2 MPKDI.* Yogjakarta: UGM.

Suryawan, I.B. (2013). Pengelolaan Potensi Ekowisata di Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Analisis Wisata*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2013, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar.

UNEP and UNWTO. (2005). *Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers.*

UNESCO. (2012). *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.* Http://whc.unesco.org/archive/opguide12-en.pdf. Paris: UNESCO World Heritage Centre.

HAMBATAN STRUKTURAL PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA PENDIDIK SMK PARIWISATA DI PULAU LOMBOK

Janianton Damanik[1], M. Baiquni[1], T. Yoyok Wahyu Subroto[1], Subagio[1], & Wijaya[1]
[1]Universitas Gadjah Mada, Kompleks Bulaksumur J-3, Yogyakarta
[4)] IKIP Mataram, Jl. Pemuda No 59A Mataram
email: djaypuspar@ugm.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan sumber daya manusia guru tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan secara menyeluruh. Meskipun sering mengikuti pelatihan kompetensi di sejumlah forum, hal itu tidak otomatis meningkatkan mutu sumber daya mereka, karena masih ada sejumlah variabel, antara lain struktur dan kelembagaan yang memengaruhi secara kuat, namun secara faktual sulit diatasi oleh guru tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan tersebut yang selama ini cenderung diabaikan padahal sangat menentukan pembentukan mutu guru. Sebelas orang guru di 3 SMK Pariwisata di Pulau Lombok dipilih secara purposif sebagai informan. Pemilihan secara purposif dimungkinkan karena mereka adalah informan-informan kunci yang mengalami atau berhadapan langsung dengan isu yang dikaji. Mereka diwawancarai secara mendalam masing-masing selama antara 2 hingga 3 jam. Hasil kajian mengungkap tiga persoalan yang dihadapi oleh SMK Pariwisata di lokasi studi, yaitu (a) pendidikan guru yang tidak linier dan beban kerja mengajar mereka berlebih; (b) pemahaman terhadap materi pembelajaran bertumpu pada kurikulum yang belum linked and matched dengan kebutuhan industri pariwisata; (c) jenjang karir dan pangkat yang sulit terpenuhi akibat persyaratan administratif yang rumit. Hambatan struktural ini sering menjadi penentu tinggi-rendahnya mutu dan konpetensi guru. Oleh sebab itu, kebijakan afirmatif perlu dirumuskan untuk mereduksinya, antara lain pemangkasan birokrasi kepangkatan dan rasionalisasi beban kerja.

Kata kunci: hambatan struktural, sumber daya manusia, guru, SMK Pariwisata, Pulau Lombok.

I. PENDAHULUAN

Industri pariwisata Lombok terus berkembang dan membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh dan serius. Salah satu di antaranya adalah tindakan untuk meningkatkan kompetensi teknis SDM. Sumber SDM pariwisata ada pada guru atau dosen di sekolah dan akademi pariwisata. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru dan dosen perlu terus dilakukan, sehingga mereka mampu mendidik calon SDM pariwisata yang unggul.

SDM merupakan faktor utama dan strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan pariwisata (Damanik, 2016). Sumber daya manusia yang berkualitas, kuat dan berdaya saing tinggi penting artinya dalam pembangunan pariwisata. SDM yang berdaya saing tinggi dan berkualitas merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan di era globalisasi yang diwarnai dengan semakin ketatnya persaingan serta tiadanya batas antar negara dalam interaksi hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk memenangkan dan menangkap peluang yang ada, pengembangan sumber daya manusia perlu ditekankan pada penguasaan kompetensi yang fokus pada suatu bidang,

termasuk pariwisata yang pada gilirannya mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam mewujudkan sumber daya manusia seperti yang dicita-citakan tersebut diperlukan kerja keras untuk menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang berat. Pembangunan sektor pariwisata menghadapi permasalahan mendasar antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia pengelola, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Daya saing sumber daya manusia pariwisata Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Masih rendahnya daya saing tersebut dapat dilihat dari ketimpangan antara proporsi SDM pada level operasional dibandingkan dengan SDM pada level manajemen, pemikir maupun perencana.

Fakta yang tidak dapat diabaikan adalah rendahnya mutu tenaga kerja pariwisata, baik di tingkat front-liners (ILO – Pemprov NTT, 2011, dalam Damanik, 2016) maupun di tingkat penyusun kebijakan (Kristianto, 2013; Kusworo dan Damanik, 2002). Diduga hal ini disebabkan oleh pendidikan dan keterampilan yang diberikan di tingkat SMK, akademi, sekolah tinggi, hingga universitas belum sesuai dengan output yang ditentukan, sehingga para lulusan kurang mampu bersaing di pasar kerja. Selain itu, kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja pariwisata cenderung tidak mencukupi sebagaimana dipersyaratkan pasar kerja (Rahman dan Tjokropandojo, 2014).

Masalah lain yang belum banyak dielaborasi dalam berbagai kajian adalah hambatan struktural pengembangan sumber daya manusia tenaga pendidik. Berbeda dengan kajian SDM di tingkat pelaksana jasa pariwisata, masih sedikit studi mengenai tenaga pendidik yang berperan sebagai transformator dan fasilitator utama calon tenaga kerja pariwisata. Diskursus menangani masalah mutu SDM masih berhenti di hilir, yaitu kualifikasi calon tenaga kerja. Persoalan SDM juga menyangkut hinga ke hulu, yakni berkaitan dengan kompetensi tenaga pendidik (Chili, 2014, dalam Damanik, 2016).

Tenaga Pendidik adalah ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Anak didik adalah anggota masyarakat yang akan masuk ke dalam dunia pendidikan (persekolahan) dan akan dikembalikan kepada masyarakatnya. Sekolah membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama dan nilai-nilai kehidupan, serta keterampilan hidup supaya mereka dapat hidup dengan baik dalam masyarakat sekembalinya dari sekolah. Dalam masyarakat, siswa diharapkan pada tingkat minimal mereka dapat membantu dirinya sendiri (self help) dan selebihnya diharapkan dapat membantu orang lain, memberikan kontribusi bagi masyarakatnya, dan mampu menjadi ujung tombok bagi komunitas/kelompoknya bahkan negaranya. Proses pembekalan komponen-komponen untuk hidup tersebut menjadi tugas guru sebagai tulang punggung di sekolah (Suryana, 2008).

Sebagaimana diakui, guru memainkan peran strategis dalam proses pembelajaran dan alih-pengetahuan kepada murid (UNESCO, 1998: 20; Harden & Crosby, 2000). Kompetensi mereka dalam proses pembelajaran sering menjadi sorotan publik, karena masih rendah (Kompas, 22 April 2015, dalam Damanik, 2016) dan tidak sesuai dengan standar regional maupun internasional. Rendahnya mutu tersebut diduga akibat kesalahan metode rekrutmen guru, kemiskinan pendidikan dan pelatihan, dan ketiadaan jaminan karier (Wahyudi, 2015).

Kondisi ini disebabkan pendidikan dan keterampilan yang diberikan di sekolah-sekolah pariwisata dari tingkat SMK sampai dengan Diploma atau Program Setara Diploma dan Strata 1 lebih memprioritaskan pada pendidikan dan pelatihan praktis (*practical skills*) untuk SDM pariwisata di tingkat pelaksana (*practical workers*) dan kurang memberi perhatian pada pembekalan keilmuan yang dapat mempersiapkan SDM berkompetensi tinggi.

Mengacu pada pendapat Suryana, Asep, 2008 terkait permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengembangan tenaga pendidik dapat diidentfikasi sebagai berikut : (1) tuntutan era global terhadap lembaga pendidikan; (2) implikasi pelaksanaan otonomi daerah terhadap pendidikan; (3) implikasi pasar terbuka terhadap peningkatan mutu pendidikan; (4) tuntutan mutu SDM Indonesia untuk bersaing; (5) tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan dalam kerangka pendidikan nasional; (6) rendahnya kualifikasi dan kompetensi sebagian dari pendidik dan tenaga kependidikan; (7) rendahnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; (8) rendahnya penghargaan pemerintah terhadap profesi guru; (9) kurang meratanya distribusi guru pada tataran nasional; (10) lemahnya koordinasi antar lembaga terkait (Pemerintah Daerah, Depdiknas, Depag, Kanwil Depag); (11) kurang sinergisnya program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan antar lembaga terkait; (12) kurang diberdayakannya forum KKG/MGMP, KKS/MKKS, KKPS dan MKPS dalam peningkatan profesionalisme guru; (13) guru *mismatch* di TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/MALB, dan SMK/MAK; (14) kurang seimbangnya distribusi guru di daerah perkotaan dan daerah perdesaan, khususnya di daerah terpencil; (15) kebijakan pemerintah ”zero growth”; (16) manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, kurang berfungsi efektif; (17) kebutuhan guru dalam kerangka penuntasan program wajib belajar sembilan tahun sangat mendesak; (18) penjaminan mutu pendidikan harus dilaksanakan; (19) pembangunan nasional memerlukan SDM yang handal, produktif, kreatif dan inovatif; dan (20) SDM yang handal, produktif, kreatif dan inovatif hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan yang bermutu dengan guru yang kompeten, profesional dan sejahtera

Masih menurut Suryana (2008) untuk mengatasi hambatan diatas, diperlukan strategi pengembangan tenaga pendidik di level sekolah menengah :

a) Pengembangan kompetensi;
    - Mengacu pada perkembangan Iptek
    - Mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki guru
    - Mengacu pada kurikulum yang berlaku
    - Harus dapat diukur atau ditunjukkan dengan indikator tertentu
    - Substansi akademik dapat dipertanggungjawabkan
    - Dapat ditingkatkan ke struktur kemampuan yang lebih tinggi dan mampu meningkatkan kemampuan pengetahuan dan wawasan guru.
    - Pengembangan kompetensi;
b) Pengembangan profesi;
    - Berpatisipasi dalam pelatihan berbasis kompetensi
    - Berpartisipasi dalam kursus dan program pelatihan tradisional
    - Membaca dan menulis jurnal
    - Berpartisipasi dalam kegiatan konferensi atau pertemuan ilmiah
    - Menghadiri perkuliahan umum atau presentasi ilmiah
    - Melakukan penelitian
    - Melakukan magang
    - Menggunakan media pemberitaan
    - Berpartisipasi dalam organisasi profesional
    - Mengunjungi profesional lain
    - Bekerjasama dengan profesional lainnya di sekolah
    - Mengikuti program pendidikan dan latihan
    - Mengikuti pertemuan profesi secara reguler
    - Melaksanakan gagasan untuk meningkatkan kinerja sekolah

c) Pembinaan mutu pendidik;
    - Pembinaan guru merupakan bagian dari program pengembangan sekolah
    - Tujuan pembinaan guru adalah meningkatkan mutu kinerja yang bersangkutan
    - Pembinaan profesionalisme guru adalah program jangka panjang
    - Pelatihan bukan satu-satunya pilihan dalam pembinaan profesionalisme guru
    - Mengirim untuk mengikuti program diklat
    - Mengikuti pertemuan profesi secara reguler
    - Menyediakan sarana/prasarana untuk belajar mandiri
    - Mendorong untuk mengajukan, membuat dan melaksanakan gagasan
    - Melaksanakan supervisi
    - Memberikan penghargaan
    - Memberiberikan pengakuan
d) Pembinaan karir;
   Pembinaan karier melalui:
    - Promosi kenaikan pangkat, golongan dan jabatan fungsional guru yang didasarkan pada kinerja individu
    - Diarahkan untuk memberikan kepuasan kerja yang diperoleh guru
    - Mobilitas horizontal adalah terbukanya peluang bagi guru untuk pindah dari sekolah yang satu ke sekolah lainnya yang sama jenis dan jenjangnya
    - Mobilitas vertikal adalah terbukanya peluang bagi guru untuk pindah dari satu jenjang dan jenis sekolah ke jenis sekolah yang tidak sama dan atau ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi
e) Peningkatan kesejahteraan
   Penghargaan diberikan kepada guru :
    - Berprestasi dan berdedikasi tinggi
    - Menemukan inovasi pembelajaran, antara lain: metode, media, alat peraga, teknologi tepat guna, dsb
    - Pemberian penghargaan guru berdedikasi tinggi diberikan kepada guru-guru yang bertugas di daerah terpencil

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi yang beragam dan mendalam dari sumber data yang bervariasi (Baxter dan Jack, 2008). Penggunaan beragam sumber data menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kelangkaan dan kualifikasi kebutuhan tenaga pendidik pariwisata terhadap berbagai bidang kompetensi yang diperlukan. Data primer diperoleh melalui in-depth dengan informan yang dipandang merepresentasikan keterwakilan lembaga pendidikan pariwisata di Pulau Lombok. Para informan memiliki profesi sebagai pendidik, yaitu guru yang berperan pada lembaga pendidikan kepariwisataan. Informan dipilih secara purposif, masing-masing tiga orang guru atau dosen dari setiap lembaga pendidikan kepariwisataan di Pulau Lombok. Sebelas orang guru di 3 SMK Pariwisata di Pulau Lombok dipilih secara purposif sebagai informan. Pemilihan secara purposif dimungkinkan karena mereka adalah informan-informan kunci yang mengalami atau berhadapan langsung dengan isu yang dikaji. Mereka diwawancarai secara mendalam masing-masing selama antara 2 hingga 3 jam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi NTB terdiri atas 2 (dua) pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Pulau Lombok memiliki luas sekitar 4.738,65 km^2 atau 23,51% dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS NTB, 2016). Pulau Lombok adalah salah satu dari gugusan kepulauan Nusantara yang terletak di sebelah timur Pulau Bali dan sebelah barat Pulau Sumbawa. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat semacam "ekor" di sisi barat daya. Di pulau ini terdapat empat kabupaten yakni, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan satu Kota, yaitu Kota Mataram. Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di pulau Lombok ini terdapat berbagai macam suku, agama, budaya dan adat istiadat. Sebagian besar penduduk pulau ini didiami oleh suku Sasak yang merupakan penduduk asli dan beberapa penduduk imigran seperti Suku Bali, Bugis, Jawa, Sumbawa, Bima, Arab dan Cina. Lapangan pekerjaan utama masyarakat Lombok adalah petani, nelayan, kerajinan tangan, pertukangan dan jual-beli (BPS NTB, 2015).

Pulau Lombok yang merupakan tempat destinasi yang paling populer di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak wisatawan lokal maupun wisatawan dari mancanegara yang mengunjungi pulau yang masih hijau dan yang identik dengan panorama gunung dan lautnya itu. Letaknya dekat atau persis berada di timur Pulau Bali, maka dari itulah, Lombok sering dijadikan sebagai tujuan wisata alternatif atau bahkan utama selain Pulau Dewata Bali yang memang sudah terkenal sejak lama. Wisata Lombok yang ditawarkan begitu bervariasi, mulai dari bangunan hingga spot diving.

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau terindah yang menawarkan beragam pesona keindahan alam yang masih alami dan bervariasi, mulai dari peninggalan sejarah, budaya, gunung, bahari (spot diving) hingga yang tidak kalah menarik adalah perpaduan yang unik antara kebudayaan Islam, Sasak dan Hindu. Di pulau ini terdapat Gunung Rinjani yang merupakan daerah tujuan para wisatawan khususnya para pendaki. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi ke dua di Indonesia yang di jadikan sebagai salah satu Taman Nasional karena keindahan Gunung Rinjani yang tampak anggun dan mempesona. Keindahan pulau ini dapat dilihat dari banyaknya objek wisata yang menjadi tujuan utama berlibur seperti Senggigi, Gili (Air, Meno dan Trawangan) dengan pesona keindahan alamnya serta beberapa objek lain yang tak kalah menarik lainnya.

Terdapat banyak daya tarik wisata di Lombok yang telah dijadikan destinasi sejak awal dunia pariwisata tumbuh, seiring dengan berkembangnya dan semakin ramai dikunjungi, daya tarik wisata yang lain pun mulai di explorasi dan dikenalkan ke khalayak, daya tarik dulunya tersembunyi dan asing terdengar kini menjadi tujuan favorit. Lombok menawarkan beragam keindahan alam dan budaya yang selalu menarik perhatian para wisatawan, baik itu pantai, pulau kecil, air terjun, gunung, perbukitan dan kampung tradisional. Tempat wisata ini tersebar di seluruh Pulau Lombok dan memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Bahkan menempatkan Lombok pada peringkat 5 dan pulau kecilnya, yaitu Pulau Gili Trawangan pada peringkat 6 sebagai pulau terfavorit kunjungan wisata di Asia dengan jumlah wisatawan ke Lombok sekitar 2 juta kunjungan (*https://www.dilombok.com/tempat-wisata-di-lombok/353*).

Saat ini NTB umumnya dan Pulau Lombok khususnya sedang fokus pada pengembangan destinasi wisata syariah dengan membidik wisman dari

Timur Tengah yang dalam tahun terakhir ini jumlah kunjungan dari kawasan ini mengalami peningkatan. Destinasi wisata syariah ini diperkuat dengan terpilihnya Nusa Tenggara Barat sebagai peraih penghargaan pada ajang World Halal Tourism Awards (WHTA) 2016. Dari tiga kategori nominasi yang diikuti, Lombok khususnya NTB berhasil meraih gelar juara, yaitu Desa Sembalun kembali terpilih sebagai destinasi bulan madu halal terbaik (World's Best Halal Honeymoon Destination) 2016, Novotel Lombok Resort & Villas sebagai resor halal tepi pantai terbaik (World's Best Halal Beach Resort) dan situs www.wonderfullomboksumbawa.com sebagai situs pariwisata halal terbaik dunia (World's Best Halal Travel Website). Tahun sebelumnya, 2015 NTB terpilih sebagai World's Best Halal Honeymoon Destination dan World's Best Halal Tourism Destination pada acara puncak Penghargaan World Halal Travel Summit 2015 di Abu Dhabi, 20 Oktober 2015[4]. Respons atas penghargaan Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata halal, pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata langsung menargetkan pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat sekitar 3 juta orang[5]. Untuk mencapai angka ini salah satunya adalah melakukan pembenahan di destinasi wisata dan pelayanan seperti persoalan keamanan dan kenyamanan. Jumlah kunjungan wisatawan ke NTB juga mengalami peningkatan. Data dari Badan Pusat Statistik BPS NTB menunjukkan, jumlah kunjungan wisatawan pada 2015 hanya mencapai 2,2 juta wisatawan. Jumlah itu diperoleh dari jumlah frekuensi penerbangan dalam setahun yang mencapai 11.535 untuk kedatangan dan 11.519 keberangkatan. Jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang pada tahun itu hanya mencapai 2.212 wisatawan (BPS NTB, 2016).

Sejalan dengan pesatnya perkembangan kepariwisataan di NTB, pembangunan sektor pariwisata menghadapi permasalahan mendasar antara lain masih terbatasnya SDM pengelola, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Sejalan dengan perkembangan kepariwisataan, sejak 10 tahun terdapat penambahan jumlah lembaga lembaga pendidikan bidang kepariwisataan terutama pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan. Perkembangan ini dipandang sebagai respon masyarakat dan pemerintah terhadap perkembangan pariwisata (Informan A). Di Kota Mataram terdapat lima SMK yang memiliki Jurusan Perhotelan dan/atau Perjalanan Wisata, satu Akademi Pariwisata, dan satu Program Studi Pariwisata di universitas. Sekitar lima tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendirikan satu unit SMK Pariwisata, dilanjutkan pembangunan Politeknik Pariwisata Lombok tahun 2016 (Rahman, 2016).

Pemetaan isu SDM Pariwisata di NTB diawali dengan kegiatan *workshop* di Yogyakarta sebagai dasar model SDM pariwisata yang dianggap sudah cukup mumpuni yang nantinya akan dipadu-padankan dengan masalah yang ada di NTB. Kegiatan didasarkan pada kebutuhan untuk memetakan persoalan mutu dan ketersediaan SDM pariwisata yang akan disuplai oleh

[4] Siaran Pers Kementerian Pariwisata (21/10/2015), Kado 1 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi-JK dari Kemenpar RI Sabet 3 Penghargaan di World Halal Travel Summit 2015, www.kemenpar.go.id; diakses 23 Oktober 2015.

[5] http://travel.kompas.com/read/2015/10/28/080900727/NTB.Targetkan 3 Juta Wisatawan

lembaga pendidikan pariwisata. Dilanjutkan dengan pelaksanaan workshop di Mataram, Lombok, yang lebih difokuskan pada masalah-masalah tematik yang terjadi di lembaga pendidikan di daerah tersebut.

Dari hasil pemetaan isu dilapangan (Puspar UGM, 2015), ditemukan 10 hal terkait kondisi SDM SMK Pariwisata di Pulau Lombok, *Pertama*, ada kesatuan pemahaman pemangku kepentingan bahwa kondisi SDM pariwisata masih belum memenuhi standar yang dibutuhkan di industri itu sendiri. Artinya ada kesenjangan antara apa yang disyaratkan oleh industri dengan apa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan, khususnya di tingkat sekolah menengah. Lulusan sekolah kejuruan pariwisata tetap memerlukan pelatihan-pelatihan tematik ketika mereka diterima bekerja di industri. Artinya, institusi pendidikan bukanlah jembatan terakhir bagi lulusan untuk menjangkau kompetensi teknis-operasional di dalam industri, sehingga dunia industri atau lembaga pelatihan masih memiliki peran strategis untuk mengarahkan lulusan siap-pakai di dunia kerja.

Kedua, pemahaman yang sama tersebut telah mendorong masing-masing pemangku kepentingan untuk melakukan kerjasama yang bersifat insidentil maupun permanen sesuai dengan kapasitas lembaga masing-masing. Kerjasama tersebut berwujud izin magang siswa sekolah di usaha pariwisata, pertukaran informasi antara sekolah dengan usaha pariwisata, izin visitasi ke usaha pariwisata, sampai undangan sekolah kepada manajer hotel untuk memberikan pembelajaran praktek dan soft skill di sekolah. Kerjasama seperti ini dapat menjadi embrio kelembagaan yang menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja (*link and match*).

Ketiga, terdapat kecenderungan umum di semua lembaga pendidikan, bahwa penyerapan siswa terhadap materi pembelajaran berbasis kurikulum sesungguhnya cukup baik atau tuntas. Kemampuan kognitif mereka menerima materi pelajaran termasuk baik. Namun demikian, hal-hal yang berkaitan dengan etika dan estetika masih dipandang sangat kurang. Padahal, dalam dunia kerja kedua faktor ini sangat berperan untuk menentukan mutu layanan di tingat *front-liners*. Artinya, ada kebutuhan khusus sekolah untuk memberikan materi pembelajaran ekstra terkait dengan pembentukan karakter khusus ini.

Keempat, pelaksanaan kurikulum yang belum konsisten antar sekolah. Sekolah masih sulit untuk meninggalkan kurikulum lama yang secara praktis sedang berjalan, sebaliknya mereka juga tidak mudah untuk melaksanakan kurikulum baru karena masih harus beradaptasi dengan teknik dan materi pembelajaran. Meskipun demikian diakui bahwa materi kurikulum pada dasarnya mampu memberikan bekal kompetensi teknis kepada siswa. Pemahaman terhadap kurikulum baru dan keputusan tegas untuk menjalankannya menjadi salah satu keinginan bersama para guru.

Kelima, latar belakang pendidikan guru sekolah kejuruan pariwisata relatif sama dengan latar belakang pendidikan guru sekolah menangah umum. Artinya, hampir tidak ada guru yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan. Mereka direkrut berdasarkan latar belakang lembaga pendidikan tinggi pendidikan, yakni institut keguruan atau universitas pendidikan. Hal ini cukup menarik karena input guru juga menentukan proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Tampaknya

pengetahuan dasar yang paling disyaratkan dalam rekrutmen guru masih umum, yakni kemampuan mengajar atau mentransfer ilmu-ilmu dasar (antara lain bahasa) kepada anak didik. Pemahaman dan penguasaan atas substansi materi pembelajaran tematik (antara lain kepariwisataan dan *hospitality*) menjadi tanggungjawab mereka setelah masuk ke sekolah. Hal ini diserahkan sepenuhnya kepada guru relatif ada mutu tenaga pendidik.

Keenam, mutu input siswa di sekolah kejuruan pariwisata tidak tergolong baik, dalam arti kualitas akademiknya lebih rendah dari siswa sekolah menengah umum. Ada dua indikator yang digunakan untuk hal ini. Pertama, kebanyakan siswa tersebut adalah hasil saringan yang tidak lulus dari sekolah menengah umum. Kedua, mereka menjadikan sekolah kejuruan pariwisata sebagai pilihan kedua atau ketiga, bukan pilihan pertama. Hal ini diakui menjadi salah satu faktor yang menentukan perlambatan atau inefektivitas proses pembelajaran. Para guru membutuhkan usaha-usaha yang ekstra untuk meningkatkan daya serap pembelajaran siswa di dalam maupun di luar sekolah.

Ketujuh, fasilitas pendidikan dan rasio tenaga pendidik dengan siswa masih belum memadai untuk menjamin proses pembelajaran berlangsung efektif dan optimal. Ada ketimpangan fasilitas pembelajaran dan rasio guru-siswa antara sekolah negeri dan swasta. Di sekolah kejuruan negeri hal itu tidak terlalu menonjol. Sebaliknya di sekolah swasta ketimpangannya sangat ekstrem. Di Kabupaten Lombok Utara misalnya, ada sekolah yang sekitar 300 murid hanya diajari oleh seorang guru yang latar belakang pendidikannya juga bukan berbasis kepariwisataan. Dalam hal fasilitas, banyak sekolah swasta yang tidak memiliki laboratorium yang memadai meskipun hanya sebatas *kitchen* yang menjadi media praktek pembelajaran. Sebaliknya di sekolah negeri, fasilitas pendidikan tersebut relatif lengkap dan dapat mengakomodasi kebutuhan praktek siswa di dalam sekolah.

Kedelapan, kesenjangan kebutuhan perusahaan dengan sekolah pada masa-masa magang siswa. Sesuai dengan kurikulum, siswa diberikan masa magang di industri selama maksimal 3 bulan. Meskipun demikian, waktu tersebut dipandang tidak cukup oleh industri, sebab proses pengenalan dan pembiasaan di dalam dunia kerja membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Industri memandang tingkat *turn-over* siswa magang yang terlalu sering kurang menguntungkan bisnis. Oleh sebab itu ada usulan untuk mendorong pemerintah melalui dinas pendidikan agar mengeluarkan *affirmative policy* yang membolehkan siswa magang sampai 6 bulan. Meskipun dipandang agak sulit, namun usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari guru maupun pihak dinas pendidikan.

Kesembilan, ada kelangkaan tindakan taktis dari pemerintah untuk memfasilitasi lulusan masuk ke dunia kerja. Artinya pemerintah menyerahkan urusan kesempatan kerja sepenuhnya pada mekanisme pasar, meskipun ada fakta bahwa pencari kerja menghadapi banyak rintangan untuk memasuki dunia kerja. Diperlukan suatu strategi terobosan *(exit strategy)* untuk menjamin rekrutmen lulusan sekolah kejuruan, khususnya di daerah, agar anak didik yang berasal dari daerah setempat memiliki peluang untuk terserap ke dalam pasar kerja.

Kesepuluh, masalah *attitude* dan *personal character* menjadi isu utama dalam proses penguatan kapasitas siswa. Hal ini dipandang sangat krusial, karena dua alasan berikut. *Pertama*, siswa masih tergolong usia remaja yang memiliki kepribadian sangat instabil dan sulit diarahkan pada suatu pola berfikir dan bertindak tertentu. *Kedua*, ketika lulus sekolah, mereka sebenarnya berada pada masa remaja-akhir. Artinya dunia kerja belum menjadi pilihan utama. Hal ini berdampak pada pembentukan sikap dan perilaku yang sering kurang cocok dengan dunia kerja.

Jika dilihat dari tabel diatas, ada semacam sikap pesimistis dan pasrah dari pengelola sekolah yang hanya bisa menerima siswa "sisa" karena sebenarnya SMK adalah pilihan kedua para siswa yang tidak diterima di sekolah menengah umum. Kemudian, kesan yang timbul di kalangan SMK adalah sekolah buangan. Ditambah lagi dengan sikap skeptis pemerintah yang sepertinya menganak tirikan Sekolah Menengah Kejuruan. Masih ditambah pula dengan dunia industri yang mempunyai anggapan bahwa para lulusan SMK belum cukup memiliki mental pekerja yang profesional. Hal-hal tersebut menjadikan semakin terpuruknya kualitas SMK di kalangan dunia pendidikan dan dunia industri serta menimbulkan dampak pada kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Pengelolaan SMK Pariwisata di Pulau Lombok dihadapkan pada hambatan-hambatan struktural, pada 3 (tiga) aspek :

1. Tenaga Pendidik (Guru)
   Terdapat beberapa persoalan sumberdaya manusia tenaga pendidik :
   a) Banyaknya guru pariwisata yang tidak linier
      Pada saat ini sebagian besar guru-guru produktif yang mengajar di SMK Pariwisata mengalami ke tidak linieran dalam mengajar di sekolah kejuruan. Tidak linier pada penjelasan diatas, maksudnya adalah kebanyakan guru yang mengajar mata pelajaran produktif di SMK bukanlah seseorang yang memiliki kompeten di bidang kejuruan tersebut, contohnya guru mata pelajaran Bahasa Inggris mengajar mata pelajaran produktif boga. Fenomena ini terjadi, akibat kurangnya guru-guru atau lulusan dari sekolah pariwisata yang mengajar dan menjadi guru produktif di sekolah kejuruan.
   b) Guru terlalu disibukkan dengan urusan administrasi sehingga sering meninggalkan jam mengajar. Misalnya guru disibukan dengan mengurus kenaikan pangkat sehingga tidak bias melakukan tugas pokoknya sebagai pengajar SMK.
2. Fasilitas Sarana dan Prasarana/Kelengkapan
   Hambatan ketersediaan sarana dan prasarana/kelengkapan dikemukan sebagai berikut :
   a) Rasio Peralatan
      Pada saat ini sebagian besar SMK Pariwisata yang ada di Lombok rasio peserta didik dengan fasilitas belum sesuai, kecuali sekali tertentu yang sudah menjadi sekolah rujukan tetapi untuk sekolah-sekolah yang baru membuka jurusan pariwisata masih lebih banyak peserta didik daripada fasilitas yang ada.
   b) Standarisasi Peralatan
      Kualitas peralatan yang digunakan praktek oleh peserta didik untuk jurusan UPW, APH, Tata Boga dan Tata Busana saat ini masih memakai peralatan yang tidak memenuhi standar DU/DI sehingga peserta didik mengalami

kesulitan saat mereka harus mengikuti program prakerin ataupun ketika mereka akan terjun langsung di dunia kerja

c) Kelengkapan Perlengkapan

Banyak sekolah bermunculan tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas yang ada. Bahkan tidak sedikit sekolah pariwisata sampai mampu meluluskan peserta didik tetapi belum memiliki alat dan bahan praktek di sekolah, sehingga peserta didik tidak pernah praktek praktek dan tidak mampu melaksanakan program dan uji kompetensi keahlian dengan baik dan lancar. Seperti pendapat informan dari SMK Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur "

Perkembangan pariwisata sangat cepat, dan sudah sangat membangun karena di Lombok Timur telah dibuka SMK Pariwisata Sembalun. Tetapi ada permasalahan fasilitas di sekolah ketika ujian UKK, dan masalah kekurangan guru. Karena kekurangan fasilitas dan guru, kami hanya bisa menerima 32 siswa, sedangkan yang mendaftar sekitar 50 peminat, sehingga banyak orang tua dan siswa yang merasa kecewa. Semoga di tahun depan memberikan kebijakan untuk SMK Pariwisata dengan penambahan guru dan fasilitas.

Hal senada disampaikan oleh informan dari SMKN 1 Lingsar Kabupaten Lombok Barat berikut ini.

"Terkait sarana pendukung juga masih sangat minim di sekolah kami. Jadi bagaimana dengan kompetensi siswa yang dihasilkan oleh sekolah karena sarana dan prasarananya juga sangat minim. Fasilitas yang kami miliki terbatas, sementara pendaftaran siswa baru setiap tahunnya mengalami peningkatan".

d) Pemerataan Peralatan

Untuk menghindari penumpukan atau pemusatan bantuan pengadaan alat dan bahan praktek, maka perlu adanya pemetaan agar semua sekolah pariwisata memperoleh kesempatan yang sama dalam menyiapkan peserta didik baik secara teori maupun praktek keahlian jurusannya.

Terkait pemerataan bantuan peralatan yang tidak merata dialami oleh sekolah menengah kejuruan berstatus swasta, seperti dikemukakan informan berikut ini.

"Kita memperoleh bantuan dana dari pemda, yaitu mini hotel baru saja selesai dibangun, cukup membantu sekolah kami untuk berkembang. Kemudian kita diminta sekolah rujukan di SMK di Kabupaten Lombok Barat, jurusan pariwisata. Persoalan kami adalah lahan untuk pengembangan, kami tidak mempunyai lahan lagi untuk mengembangkan".

Minimnya sarana dan prasarana pembelajaran di SMK Pariwisata juga dikemukan oleh informan dari salah satu SMKN dari Lombok Barat

"Selama kurang lebih 5 tahun berjalan kami baru memiliki RKAB, dan itu sangat terbatas, dari ruangan belajar kami 11, baru ada 2, masih sangat kurang untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Seringkali kami berdayakan ruangannya saja untuk kantor, sementara ruangan belajar

belum juga maksimal alias terbatas. Baru saja ada pembangunan ruang praktek dapur, untuk yang lain masih kami butuhkan"

e) Kompetensi Sistem Reservasi Komputer (CRS) / Computerized Reservation System (CRS)
Dalam praktek dan menyiapkan peserta didik sekolah masih kesulitan dalam memproses reservasi dan penerbitan tiket domestik ataupun internasional. Bahkan untuk mendapatkan Official Air Guide (OAG) dan buku Passenger Air Tarif (PAT) guna memenuhi standar uji kompetensi keahlian pun sekolah tidak bisa kecuali memesan ke Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), namun itupun belum tentu mendapat balasan atau kiriman referensi yang dibutuhkan oleh sekolah.

3. Kurikulum
Beberapa hambatan terkait kurikulum SMK Pariwisata di Pulau Lombok :
a) Buku pariwisata / produktif minim sementara KTSP dan K13 menerapkan literasi
b) Pariwisata berwawasan budaya dan penyusunan kurikulum dengan kearifan lokal
c) Kurikulum belum link and match dengan pihak industri
d) Melibatkan dudi dalam penyusunan kurikulum sehingga *link and match*
e) Kurikulum intra dan ekstra harus sesuai dengan budaya lokal Lombok
f) Kurikulum bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri dan pemegang kebijakan, sebagaimana disampaikan oleh informan dari Hotel Sheraton Senggigi Lombok (2017) berikut ini

"Kami dari industri hotel menyarankan perlu sinkronisasi kurikulum antara sekolah menengah kejuruan, akademi dan industri. Kurikulum harus menyesuaikan kebutuhan industri hotel yang seringkali berubah dengan cepat, karena industri sifatnya global. Industri perhotelan dan restoran bergerak cepat, maka siswa perlu dibekali dengan kompetensi yang benar-benar siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri.

g) Sekolah kurang di *back up* dengan pihak industri
h) Keterlibatan Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja sehingga lulusan siswa SMK Pariwisata diserap di industri
i) Ada sinergi dalam penyusunan kurikulum dan komitmen pemegang kebijakan
j) Guru SMK Pariwisata dididik mengikuti program Bahasa Asing (Inggris, Arab, Jepang, Korea, Jerman, Prancis, dll)
k) Kurikulum SMK Pariwisata semestinya harus menghasilkan tenaga terampil siap kerja untuk itu dalam penyusunan kurikulum harus melibatkan dunia usaha dan dunia industri dan pemegang regulasi lokal agar ada sinergi dan komitmen dalam proses pendidikan dan penyerapan tenaga kerja.

IV. KESIMPULAN

Studi ini mengungkap banyak hambatan terkait tiga aspek dalam pengembangan sumber daya di SMK Pariwisata di Pulau Lombok, yaitu hambatan guru, ketersediaan sarana-prasarana/kelengkapan pembelajaran dan hambatan kurikulum. Tiga aspek hambatan diatas dipandang sebagai salah satu kendala dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran di kelas untuk mencapai kualifikasi kompetensi lulusan. Jika dirunut dari 3 aspek, diantaranya yang paling mendasar adalah (a) pendidikan guru yang tidak linier dan beban kerja mengajar mereka

berlebih; (b) pemahaman terhadap materi pembelajaran bertumpu pada kurikulum yang belum *linked and matched* dengan kebutuhan industri pariwisata (hotel dan *travel agent*); (c) jenjang karir dan pangkat yang sulit terpenuhi akibat persyaratan administratif yang rumit. Hambatan struktural ini sering menjadi penentu tinggi-rendahnya mutu dan konpetensi guru.

Rekomendasi sesuai hasil penelitian, yaitu kebijakan afirmatif perlu dirumuskan untuk mereduksinya, antara lain pemangkasan birokrasi kepangkatan, rasionalisasi beban kerja dan minimalisasi urusan keadministrasian bagi guru, sehingga fokus pada kegiatan belajar mengajar. Pemeratan bantuan pemerintah terkait fasilitas baik sekolah negeri maupun swasta (prinsip keadilan).

Kurikulum SMK Pariwisata didorong menghasilkan tenaga terampil siap kerja, untuk itu dalam penyusunan kurikulum harus melibatkan dunia usaha dan dunia industri dan pemegang regulasi lokal agar ada sinergi dan komitmen dalam proses pendidikan dan penyerapan tenaga kerja. Memberikan tawaran secara terbuka kepada tenaga pendidik untuk melakukan praktek magang kerja di bidang industri pariwisata, untuk kurun waktu antara satu hingga dua bulan. Perlunya kesempatan bagi pendidik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan tematik kontekstual bidang kepariwisataan secara berkala sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang tersedia di lembaga pendidikan masing-masing. Adanya kesempatan dan dukungan beasiswa bagi para pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2011. "*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* 2011-2025". Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta.

Anonim, 2010. Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014. Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Anonim, 2009. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Baum, Tom (1993). Human Resources Issues in International Tourism. Butterworth – Heinemann. Oxford.

Bappeda Provinsi NTB. 2013. Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2012. Mataram: BPS.

Chili, N.S., 2014. The Ecology of Teaching: Efficiency, Efficacy and Effectiveness of Teaching and Learning of Tourism in Township High Schools. Journal of Human Ecology, 48(2): 299-312.

Damanik, J, dkk. 2016. Kompetensi Pendidik Bidang Kepariwisataan di Pulau Lombok. Jurnal Ilmu Pendidikan UNM, Jilid 22, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 108-116.

Damanik, J, 2008. Internasionalisasi Program Studi Sebagai Pilihan Strategis Untuk Meningkatkan Daya Saing SDM Pariwisata. Jurnal Kepariwisataan Indonesia Vol.3, No.3, September 2008.

Kusworo, H.A., & Damanik, J. 2002. Pengembangan SDM Pariwisata Daerah: Agenda Kebijakan untuk Pembuat Kebijakan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(1): 105-120.

Liu, A & Wall, G., 2006. Planning Tourism Employment: a development Country Perpective", Tourism Management, Vol. 27, hal. 159 – 170

Picard, M., 2006. Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris Ecole francaise d'Extreme-Orient.

Puspar UGM, 2008. Heritage Tourism in East Nusa Tenggara: Contributing to the Millennium Development Goals. Yogyakarta, Puspar UGM.

Suryana, Asep. 2008. Paradigma Baru Pengembangan Tenaga Pendidik. Makalah Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia

Pengembangan Pariwisata Aik Nyet Berbasis Masyarakat Sebagai Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buwun Sejati

Sri Apriani Puji Lestari [(1)], Agus Kurniawan[(1)]

[(1)]Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: sriaprianipuji@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan kerjasama berbagai pihak. Sehingga pengembangan pariwisata tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Pengembangan pariwisata akan berjalan dengan baik apabila semua pihak berperan aktif, terutama peran serta masyarakat di kawasan wisata. Kerjasama berbagai pihat tersebut demi demi keberlangsungan industri pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi/daya tarik wisata Aik Nyet, menggambarkan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Aik Nyet di Desa Buwun Sejati. Dari hasil identifikasi tersebut dirumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sebagai model pemberdayaan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan kualitatif disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi/daya tarik wisata Aik Nyet: daya tarik alam, sosial budaya, dan kuliner. Bentuk partisipasi masyarakat Buwun Sejati dalam pengembangan potensi wisata tersebut yaitu partisipasi langsung (aktif) dan partisipasi tidak langsung (pasif). Dan strategi yang dihasilkan yaitu: Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, sosialisasi dan pendidikan tentang kepariwisataan, serta memberikan/penguatan akses dan kesempatan kesempatan beruasaha/memanfaatkan potensi wisata yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Buwun Sejati.

Kata Kunci: Wisata Aik Nyet, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat.

I. Pendahuluan

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki banyak potensi pariwisata, diantaranya wisata alam, kuliner, keanekaragaman budaya dan tradisi, serta masih banyak potensi lainnya. Dengan adanya potensi tersebut diperlukan perencanaan dan pengembangan pariwisata sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan kerjasama berbagai pihak. Sehingga pengembangan pariwisata tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Menurut I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri (2005: 96-97) dibutuhkan kerjasama antara para *stakeholders* untuk menggerakan pariwisata, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pengembangan pariwisata akan berjalan dengan baik apabila semua pihak berperan aktif, terutama peran serta masyarakat di kawasan wisata. Kerjasama berbagai pihat tersebut demi demi keberlangsungan industri pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat

Salah satu potensi wisata yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok adalah Taman Wisata Aik Nyet yang merupakan salah satu

wisata alam yang menyuguhkan permandian umum dengan nuansa hutan wisata. Lokasinya terletak di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Pariwisata Aik Nyet diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun kenyataannya masyarakat Desa Buwun Sejati mempunyai tingkat sosial ekonomi yang relatif rendah. Hal tersebut menggambarkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Aik Nyet, akibat dari pengetahuan masyarakat tentang kepariwisataan terutama pentingnya peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih minim.

Penelitian ini mengkaji bentuk partisipasi masyarakat Desa Buwun Sejati dalam pengembangan wisata Aik Nyet, serta merumuskan strategi terkait pengembangan wisata berbasis masyarakat. Dengan terumuskannya strategi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat Desa Buwun Sejati.

II. Tinjauan Literatur

Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013:215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Murphy (1988), Larry Dawyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) dalam Sunaryo (2013:219) menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut.

Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut (Sunaryo, 2013:219)

1. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
2. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.
3. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan terkenal dengan istilah pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (CBT). Penerapan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan pembangunan pariwisata dengan perencanaan yang partisipatif. Definisi *community based tourism* yaitu model pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal dengan memberi kesempatan dalam mengelola dan membangun pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki keterkaitan dengan industri atau usaha pariwisata, sehingga distribusi keuntungan merata kepada komunitas di pedesaan/pesisir dan pulau-pulau kecil (Putra, 2015). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggung-jawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan keuntungan berupa peningkatan pendapatan, mendukung pembangunan berwawasan lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal, menambah sumber pendapatan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan pada satu usaha saja, dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* sebagai berikut:

1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematik dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu pasrtisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisatan yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism*, yaitu (Sunaryo, 2013:140):

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Pendidikan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal

III. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan kualitatif disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Zuriah (2007: 47) mengungkapkan bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi maupun daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran umum objek wisata Aik Nyet

Kawasan objek wisata alam Aik Nyet adalah sebuah wisata alam hutan yang terletak 9 km dari pusat Kecamatan Narmada, wisata alam Aik Nyet berada dalam posisi yang sangat strategis karna terletak didekat pusat Kota Mataram (sekitar 60 km). Untuk menuju ke lokasi tersebut jika dari Kota Mataram, dapat menggunakan salah satu dari dua alternatif jalan yakni, jalur utara (Lingsar) atau jalur selatan (Narmada). Letak objek wisata alam Aik Nyet tersebut tepatnya berada pada wilayah administrasi Desa Buwun Sejati, desa tersebut merupakan salah satu desa yang terletak paling ujung dari 21 desa yang berada di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat setelah pemekaran dari Desa Sesaot pada tahun 2011. Secara Administrasi wilayah Desa Buwun Sejati dengan luas wilayah desa yaitu 1.414,18 Ha.

Dari segi ekonomi, mata pencaharian masyarakat di Desa Buwun Sejati cukup bervariasi. Sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian yang sangat luas, maka untuk mata pencaharian utama masyarakat pun lebih didominasi sebagai petani dan buruh tani dengan jumlah penduduk mencapai

4.209 Jiwa sebagai petani pemilik dan petani penggarap yaitu 1.462 Jiwa sedangkan sebagai buruh tani 1033 Jiwa. Selain itu masyarakat melakukan kegiatan berdagang disektor pariwisata yaitu dengan berjualan disekitaran kawasan objek wisata alam Aik Nyet.

B. Daya tarik wisata Aik Nyet

Berdasarkan kondisi geografis kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, potensi sumberdaya wisata alam Aik Nyet sangat diminati oleh wisatawan yang berkunjung. dengan potensi daya tarik atraksi alam yang masih alami.

1. *Daya tarik alam*

Kondisi daya tarik keindahan wisata alam hutan pada kawasan objek wisata alam Aik Nyet merupakan keindahan alam yang sangat terjaga kelestariannya dimana dalam objek wisata tersebut banyak sekali menyajikan panorama alam yang bisa memikat wisatawan untuk menyaksikan keindahan dari ketinggian, keindahan bentang alam dalam kawasan hutan menjadikan suasana yang berbeda bagi wisatawan yang berkunjung dan dimanfaatkan sebagai tempat berfoto-foto oleh wisatawan, karna memberikan panorama alam yang indah.



Sumber : Survey Primeri, 2017

Gambar 1. Daya Tarik ALam Wisata Aik Nyet

2. *Daya tarik sosial budaya*

Berdasarkan data kepariwisataan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, terdapat beberapa jenis atraksi kesenian tradisional utama yang tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Barat termasuk di Desa Buwun Sejati yakni Gendang Beleq, Colokak, Kecimol dan Rudat. Jenis atraksi tersebut hanya bisa dinikmati wisatawan ketika berlangsungnya acara adat seperti Sorong Serah Ajikrame dan Nyongkolan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan lembaga adat untuk memeriahkan acara adat pernikahan. Sedangkan khusus untuk kesenian Rudat, biasanya ditampilkan saat acara besar agama islam, sehingga wisatawan yang ingin melihat atraksi kesenian tersebut dapat datang ketika bertepatan dengan peringatan hari-hari besar agama islam.



Sumber : Survey Primer di Desa Buwun Sejati, 2017

Gambar 2. Atraksi Kesenian Nyongkolan

3. *Daya tarik kuliner*

Kegiatan wisata belanja dan kuliner dapat dikatakan menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan yang berkunjung pada kawasan objek wisata alam Aik Nyet. Jenis masakan kuliner yang disediakan oleh masyarakat yang bekerja menjadi pedagang yang bermukim disekitan objek wisata dengan berjualan secara langsung diarea wisata dengan menyediakan lapak-lapak skala kecil untuk tempat duduk bagi para pengunjung yang menikmati kegiatan wisata tersebut.



Sumber : Survey Primer di Wisata Alam Aik Nyet (2017)

Gambar 3. Dava Tarik Kuliner wisata Aik Nvet

Jenis masakan atau kuliner yang disajikan oleh masyarakat sangat beragam, seperti halnya pada daerah Lombok lainy. Adapun jenis masakan yaitu sate Bulayak, pelecing kangkung, soto ayam kampong, kue lupis serta anek abuah-buahan dan olahan hasil alam yang berada pada area hutan sekitaran kawasan wisata.

Dengan potensi yang ada tersebut, wisatawan dapat melakukan beberapa kegiatan wisata seperti bersepeda, hiking dan tracking sambil menikmati suasana hutan yang asri.

C. Fasilitas Wisata

Untuk mendukung wisata Aik Nyet, tersedia beberapa fasiltas. Upaya-upaya peningkatan infrastruktur yang dilakukan pemerintah yakni penambahan penunjuk jalan, perluasan dan perbaikan tempat parkir, penyediaan kamar mandi, tempat peristirahatan dan gazebo untuk pengunjung, tempat duduk, jalan menuju permandian, jalan masuk menuju hutan, serta pembatas yang melingkari sumber mata air yang menjadi kolam permandian. Sedangkan untuk jalan atau akses menuju lokasi belum ada perbaikan dan belum ada pelebaran jalan. Hal ini mengakibatkan pengunjung mesti berhati-hati dalam berkendara terlebih lagi pada saat musim hujan jalanan menjadi licin dan becek.



Sumber : Survey Primer , 2017

Gambar 3. Fasilitas Wisata Aik Nyet

D. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Buwun Sejati

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya

(Pitana, 1999 : 78 dalam Yulianie, 2015). Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut menjadi kontrol yang sangat efektif dan menjamin pengembangan suatu obyek wisata sesuai dengan perencanaan. Pengaturan ketentuan tentang daya tampung suatu obyek wisata harus dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat lokal dan tidak berdasarkan atas kepentingan seseorang atau golongan.

Masyarakat Buwun Sejati tidak terlibat dalam semua proses perencanaan dan pengelolaan Wisata Aik Nyet. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan pariwisata serta kurang gencarnya sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu pasrtisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari pembangunan pariwisata. Di Desa Buwun Sejati, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat hanya terlibat/berpartisipasi terkait dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari aktivitas kepariwisataan. Meninjau dari bentuk partisipasi masyarakat yang ada, maka dapat ditemukan bahwa ada dua bentuk partisipasi masyarakat di Desa Buwun Sejati, yaitu partisipasi langsung (aktif) dan partisipasi tidak langsung (pasif).

Bentuk partisipasi langsung (aktif) masyarakat antara lain: penyediaan dan pengelolaan tempat parkir, penyediaan sarana transportasi, menyediakan makan dan minum (warung makan di lokasi wisata). Keberadaan potensi wisata Aik Nyet mendorong terbentuknya kelompok sadar wisata yang diprakarsai oleh sejumlah pemuda di Dusun Aik Nyet. Kelompok tersebut yang sampai sekarang memiliki 33 anggota aktif. Kelompok tersebut mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan wisatawan, yaitu pengelolaan tempat parkir dan retribusi/biaya masuk lokasi wisata.

Selain partisipasi langsung yang bersentuhan dengan aktivitas kepariwisataan masyarakat juga secara tidak sadar sebenarnya ikut berpartisipasi. Bentuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terwujud dalam bentuk menjaga kenyamanan dan kebersihan serta melestarikan lingkungan lokasi wisata terutama hutan yang ada di kawasan tersebut.

Kenyamanan merupakan salah satu faktor yang menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Apalagi setelah bermunculan peristiwa yang mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan di Indonesia, seperti konflik lokal, bencana alam, aksi terorisme, serta peristiwa lainnya. Kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan untuk melakukan suatu perjalanan ke suatu destinasi pariwisata. Salah satu tokoh pemuda menyebutkan bahwa keamanan di kawasan wisata Aik Nyet aman dan terkendali. Apalagi adanya sistem kekerabatan dalam hubungan sosial masyarakat desa sehingga hal ini mencegah munculnya konflik sosial. Situasi keamanan yang kondusif merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi salah sau potensi dalam pengembangan pariwisata Aik Nyet.

Bentuk partisipasi masyarakat secara tidak langsung juga tercermin dalam upaya masyarakat menjaga kelestarian hutan dan kebersihan lingkungan. Hal ini terkait dengan potensi andalan wisata Aik Nyet yang berupa alam yang asri. Sungai yang ada di kawasan wisata tersebut merupakan salah saut sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Narmada (untuk pengairan/irigasi).

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata Aik Nyet dari persepektif yang berkaitan dengan distribusi keuntungan yang diterima oleh masyarakat dari

pembangunan pariwisata dinlai masih kurang. Hal ini terlihat dari mata pencaharian dominan masyarakat adalah petani (baik petani pemilik, penggarap maupun buruh tani) dibandingkan dengan masyarakat yang perannya sebagai pedagang di lokasi wisata. Sehingga penerima manfaat dari segi ekonomi hanya sebagian kecil masyarakat. Sedangkan dari persepektif partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada keterlibatan masyarakat sama sekali.

E. Strategi pengembangan pariwisata Aik Nyet berbasis masyarakat sebagai model pemberdayaan masyarakat.

Dari gambaran bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata Aik Nyet yang dinilai masih kurang. Perlu dirumuskan strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat yang dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat. Dengan model tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan bekerja sama dengan pihak lainnya seperti pemerintah dan swasta. Sehingga tercipta industri pariwisata yang berkelanjutan. Untuk memastikan hal tersebut maka perlu memfasilitasi keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengembangan dan mengoptimalkan manfaat sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan kepariwisataan di kawasan wisata Aik Nyet.

Untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan mengoptimalkan manfaat dari kegiatan kepariwisataan Aik Nyet, maka dirumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sebagai model pemberdayaan masyarakat:

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
   Hal tersebut diwujudkan dengan penguatan kapasitas dan peran masyarakat Desa Buwun Sejati dalam kegiatan dan proses pembangunan. Mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Sehingga masyarakat memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata yang ada di desa mereka. Adapun pihak yang bertanggung-jawab dalam proses/kegiatan tersebut adalah pemerintah setempat, dinas terkait, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah. Adapun tahap pelibatan masyarakat dalam kegiatan dan proses pembangunan: Perencanaan, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses mengidentifikasi potensi dan masalah pariwisata Aik Nyet, serta perumusan rencana dan program pengembangan pariwisata; Pelaksanaan, yaitu pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan rencana dan program pengembangan pariwisata sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Buwun Sejati; Pengawasan, yaitu pelibatan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangan pariwisata Aik Nyet kedepannya.
2. Sosialisasi dan pendidikan tentang kepariwisataan, sehingga mayarakat memiliki pengetahuan terkait mekanisme pengelolaan potensi pariwisata. Misalnya, pelatihan atau penyuluhan tentang cara menghasilkan nilai tambah dari produk pertanian dan peternakan, serta pelatihan terkait pengembangan pariwisata, sehingga pada akhirnya mampu menciptakan produk- produk kepariwisataan.
3. Memberikan/penguatan akses dan kesempatan kesempatan beruasaha/memanfaatkan potensi wisata yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Buwun Sejati.
   Penduduk Buwun Sejati, sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, dan hingga saat ini masih menjadikan kegiatan pertanian sebagai sektor utama dalam kegiatan ekonomi. Disela-sela kegiatan bertani, masyarakat diharapkan lebih kreatif untuk menghasilkan pendapatan tambahan diluar dari kegiatan bertani. Seperti menyewakan sepeda bagi wisatawan, menjual kuliner khas, membuat kerajinan tenun dan cendera

mata, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan pariwisata tersebut mereka lakukan dikala senggang atau sedang tidak perlu mengolah lahan sawahnya, dengan demikian kegiatan ekonomi baru yang muncul tidak menghilangkan kegiatan ekonomi yang sudah ada yaitu pertanian.

Adanya kegiatan pariwisata akan menciptakan hubungan ekonomi antar sektor, sebagai contoh, hasil pertanian dan peternakan yang dihasilkan oleh para petani dan peternak selain dipasarkan ke wilayah lain dan dikonsumsi sendiri juga digunakan sebagai bahan baku yang dikelola pemilik warung. Karena hasil ternak tersebut bisa untuk men-suply kebutuhan pemilik warung sebagai bahan baku pembuatan sate yang menjadi salah satu menu andalan (sate bulayak).

Dengan penguatan akses dan kesempatan memanfaatkan potensi wisata yang ada akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pengembangan pariwisata berbasis masyarakat bahwa pengembangan pariwisata harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, diketahui bentuk partisipasi masyarakat Buwun Sejati dalam pengembangan potensi wisata Aik Nyet yaitu partisipasi langsung (aktif) dan partisipasi tidak langsung (pasif). Dan strategi yang dihasilkan yaitu: mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, sosialisasi dan pendidikan tentang kepariwisataan, serta memberikan/penguatan akses dan kesempatan kesempatan berusaha/memanfaatkan potensi wisata yang ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Buwun Sejati.

DAFTAR PUSTAKA

Pitana, Gede, dan Gayatri Putu. (2005). *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Kanisius

Putra, I Nyoman Darma. (2015). *Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali*. Denpasar: Buku Arti.

Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.

Yulianie, Fatrisia. (2015). Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata "*Rice Terrace*" Ceking, Gianyar, Bali. *JUMPA Volume 2 Nomor 1, Juli 2015. JUMPA 2 [1] : 165 - 184 ISSN 2406-9116*. Diakses pada 1 Agustus 2017 dari Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Jumpa/Article/View/15380

Zuriah, Nurul. (2007). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

PERAN KELOMPOK MASYARAKAT SEMBALUN COMMUNITY DEVELOPMENT CENTRE DALAM MENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL GUNUNG RINJANI

Maria Christina Endarwati, ST. MIUEM[1]
Royal Sembahulun, SH[2]
[1] *Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang*
[2]*Tokoh Masyarakat Desa Sembalun – Kab. Lombok Timur*

ABSTRAK

Keterlibatan masyarakat dalam beberapa aspek memang sangat diperlukan terutama dalam pengembangan hal-hal yang langsung dapat meningkatakan taraf hidup masyarakat tersebut. Salah satu sektor yang sangat memerlukan keterlibatan masyarakat salah satunya adalah sektor Pariwisata. Pariwisata merupakan kunci pembangunan, kesejahteraan dan kebahagian. Pariwisata saat ini sudah menjadi salah satu primadona dunia dan menjadi sumber pendapatan bagi beberapa negara di dunia. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap, sehingga sektor pariwisata tersebut merupakan salah satu yang menjadi andalan pemasukan negara terbesar selain sektor Migas. Dalam merencanakan kawasan strategis nasional pariwisata nasional, telah dilakukan peran serta salah satu kelembangaan yang dikelola oleh masyarakat lokal di Desa Sembalun, salah satu kaki Gunung Rinjani. Keterlibatan dalam pemilihan lokasi, mobilasasi personil dalam ikut serta dalam pemetaan, menetukan kebutuhan dalam design Kawasan Agrowisata Sembalun serta melakukan sosialisasi terhadap pemilik lahan merupakan salah satu hal yang bisa dikembangkan untuk daerah lain dalam merencanakan sektor pariwisata.

Kata Kunci :*Peran serta masyarakat, KSPN Rinjani, Kepariwisataan*

I. PENDAHULUAN

Pariwisata memiliki arti yang sangat luas, telah banyak teori kepariwisataan yang telah dirumuskan oleh banyak ahli-ahli pariwisata. Menurut Mill (2000), pariwisata adalah aktivitas yang terjadi apabila seseorang wisatawan melakukan perjalanan, mencakup segala sesuatu mulai dari perencanaan perjalanan itu sendiri, perjalanan ke tempat tertentu, tinggal di tempat itu, kembali dan kenangan yang didapat sesudahnya. Aktivitas perjalanan meliputi pembelian-pembelian yang dilakukan serta interaksi yang terjadi antara pihak tuan rumah dan tamunya. Menurut Suwantoro (1997) istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam aktivitas yang terjadi apabila seseorang melakukan perjalanan (mencakup segala sesuatu mulai dari perencanaan perjalanan, tinggal untuk sementara waktu, hingga kembali beserta kenangan yang didapat) dengan tujuan-tujuan tertentu akibat adanya daya tarik wisata dari daerah tujuan wisata tersebut yang didukung dengan fasilitas penunjang lainnya (Ross, 1998).

Indonesia saat ini juga sedang dalam tren pengembangan pariwisata.Hal ini terlihat dari pariwisata Indonesia yang juga banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan juga wisatawan mancanegara.Banyaknya jumlah wisatawan yang

mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia menjadi salah satu sumber pemasukan daerah dan juga negara. Oleh sebab itu pemerintah berupaya meningkatkan daya saing industri pariwisata yang ada di Indonesia. Dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan. Pembanguan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi: industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Selanjutnya pada peraturan pemerintah No.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS) Tahun 2010-2015 merupakan amanat dari undang-undang No.10 tahun 2019 tentang kepariwisataan yang mengatur pembangunan kepariwisataan Indonesaia. Wilayah pengembangan destinasi pariwisata nasional diarahkan pada 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dan 88 Kawasan Strategis Nasional (KSPN). KPPN menunjukkan kawasan pengembangan pariwisata di seluruh Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk DPN dan KSPN. DPN merupakan destinasi pariwisata berskala nasional, sedangkan KSPN merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, social dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam,daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Antara KPPN, DPN dan KSPN dijelaskan pada rincian wilayah sebagai berikut :

1. Sumatra, terdiri dari 55 KKPN di 11 DPN dan 20 KSPN;
2. Jawa, terdiri dari 48 KSPN di 11 DPN (termasuk DPN Krakatau – Ujung Kulon) dan 23 KSPN;
3. Bali dan Nusa Tenggara, terdiri dari 33 KPPN di 8 DPN dan 21 KSPN;
4. Kalimantan, terdiri dari 25 KPPN di 7 DPN dan 9 KSPN;
5. Sulawesi, terdiri dari 28 KPPN di 5 DPN dan 8 KSPN; dan
6. Maluku dan Papua, terdiri dari 33 KPPN di 8 DPN dan 7 KSPN.

Melihat potensi yang luar biasa dalam pengembangan kepariwisataan di Indonesia (Susantio, 2008) maka perlu dilakukan perencanaan yang terintegrasi dalam hal ini dalam bidang tata ruang, infrastruktur, telekomunikasi, sarana dan prasarana, sistem jaringan jalan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan hingga implementasi rencana pengembangan. Sembalun Community Development Centre (SCDC) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dilibatkan langsung dalam merencanakan pengembangan KSPN Rinjani mulai dari tahap pemilihan lokasi sampai dengan rencana design yang nantinya akan dikembangakan bersama sejalan dengan kondisi fisik serta potensi yang ada di Sembalun. Keterlibatan masyarakat ini diperlukan karena masyarakat harus turut serta dalam membangun dan merasakan hasil pembangunan di sektor pariwisata yang ada di wilayah mereka, sehingga apabila pariwisata berkembang dengan baik maka mereka tidak menjadi penonton di wilayah mereka sendiri.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat di desa Sembalun yang merupakan salah satu desa kecil yang ada di kaki Gunung Rinjani untuk terlibat langsung dalam penyusunan Rencana Induk Dan Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) wilayah Rinjani di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah dalam rangka pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yang strategis, sesuai dengan karakteristik fungsi yang ditetapkanya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, untuk mendukung terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana caranya agar pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) wilayah Rinjani bertujuan untuk dapat memberi arahan bagi pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yang strategis, sesuai dengan karakteristik dan fungsi yang ditetapkannya sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, untuk mendukung terwujudnya kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan kelembagaan masyarakat yang ada di desa Sembalun tersebut.

C. SASARAN

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

1. Terpetakannya aspek pembangunan kepariwisataan meliputi : destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan di wilayah KSPN,
2. Teranalisanya potensi, permasalahan, dan isu strategis aspek pembangunan kepariwisataan yang mendukung fungsi KSPN,
3. Terciptanya perencanaan yang komprehensif dan holistik di KSPN berdasarkan asas perencanaan tata ruang, aspek kepariwisataan, serta keterlibatan masyarakat.

III. SEMBALUN COMMUNITY DEVELOPMENT CENTRE (SCDC)

Sembalun Community Development Centre atau disingkat dengan SCDC merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang berada di Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Sumberdaya alam yang dimiliki Sembalun sangat potensial untuk dikembangkan khususnya untuk pariwista. Keindahan alam, udara sejuk, budaya, karakteristik masyarakat yang ramah dan suka menolong, serta berbagai factor pendukung lainnya menjadikan sembalun sebagai satu obiek yang sangat tepat untuk berwisata.Sembalun merupakan salah satu pintu masuk yang paling efektif untuk melakukan pendakian Gunung Rinjani yang belakangan telah berkembang menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan asing, dan masyarakat telah menikmati langsung manfaatnya. Namun demikian, manfaat dari pengembangan pariwisata dikawasan ini masih lebih besar dinikmati oleh orang luar Sembalun.Berbagai peluang yang terbuka dapat mengembangkan masyarakat terutama ekonomi untuk mendorong masyarakat lebih sejahtera masih terkendala oleh rendahnya sumberdaya manusia. Hal ini menjadi salah satu kendala yang cukup menghambat kemajuan yang berdampak pada minimnya tingkat partisifasi masyarakat dalam pembangunan, Lembaga Pusat Pengembangan Masyarakat Sembalun di dirikan pada tanggal 22 April 2009.

A. Visi dan Misi

1. Visi

Terciptanya manusia yang mandiri dan bermartabat melalui pengembangan sumber daya local.

2. Misi

1) Meningkatkan kwalitas SDM melalui pengembangan pendidikian alternatif.
2) Memfasilitasi pengembangan wirausaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat local.
3) Memfasilitasi pengembangan bakat dan kreatifitas generasi muda sebagai upaya untuk mendukung kemandirian masyarakat.
4) Memfasilitasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam pemanfaatan sumber daya alam.

B. Program

1. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia

Sebagai upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang produktif dan kreatif, CDC melakukan pendekatan kebersamaan dan kebebasan mengeksplor sumberdaya yang di miliki oleh masyarakat, untuk selanjutnya memberi dorongan dan motifasi sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang pada gilirannya melahirkan manusia mandiri.

Sebagai langkah awal dalam upaya pengembangan masyarakat, CDC membuka kegiatan mengajar bahasa inggris sebanyak 7 kelas yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu kelas anak usia 3-6 tahun, kelas anak 7-13 tahun dan kelas dewasa 15 tahun keatas yang tersebar di 4 desa sekecamatan Sembalun.

Di samping itu, CDC juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti program magang dalam rangka meningkatkan keahliannya.Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, CDC melihat peluang sector usaha yang memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberi nilai kepada masyarakat seperti pariwisata, pertanian organic, workshop (bengkel kreatifitas) dan kegiatan usaha produktif lainnya.

Disamping kondisi masyarakat yang memang kesulitan dalam mengeksplor potensi yang dimilikinya, juga memang sudah menjadi tanggungjawab CDC dalam membuka dan merintis berbagai lapangan kerja khususnya bagi mereka yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan yang di adakan oleh CDC yaitu Kursus dan magang. Pada kondisi yang semuanya terbatas, CDC juga memiliki tanggungjawab untuk mempasilitasi berbagai kegiatan dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka mengambangkan dan memberdayakan masyarakat.

2. Konservasi Sumberdaya Alam

Isu pemanasan global yang kini menjadi isu internasional sudah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk mengantisivasi dan mengatasinya, dan jauh sebelum CDC di dirikan kami telah aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan khususnya isu hutan. Dalam menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, sumberdaya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dimana untuk sector ekowisata, alam merupakan objek utama sehingga kelestariannya harus dijaga dengan berbagai kegiatan dan upaya seperti reboisasi, pengendalian pengambilan kekayaan hayati yang ada yang dapat mempengaruhi ekosistim yang ada dalam kawasan alam itu sendiri serta berbagai kegiatan lain yang terkait dengan itu. Dalam prinsip pemberdayaan masyuarakat yang kami lakukan, bagaimana memberi ruang kepada

masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang sebanyak-banyaknya tanpa mengabaikan hak generasi mendatang atas sumberdaya alam dan dengan tidak mengabaikan fungsi ekosistim alam itu sendiri.

3. Pertanian Organik

Sebagai daerah pertanian, Sembalun juga tidak terlepas dari sistim pertanian kimiawi. Penggunaan pestisida tidak lagi merujuk pada rekomendasi penggunaan yang dianjurkan sehingga menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap obat-obatan kimia (pestisida). Disamping itu, jelas setiap komoditi pertanian memiliki kandungan residu kimiawi yang tinggi, yang mengancam keberlanjutan sistim pertanian, dan yang lebih menakutkan adalah keamanan dalam mengkonsumsi hasil pertanian itu sendiri. Melihat kondisi ini, maka perlu melakukan upaya nyata dalam menjaga kelanjutan pertanian dengan altertatif pertanian organic yang dapat memberikan jaminan keamanan mengkonsumsi dan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap obat-obatan dan pupuk kimia. CDC dalam melaksanakan program ini disamping praktek langsung sebagai pembuktian nyata, juga melakukan kampanye hidup sehat dengan makan makanan hasil pertanian organik.

4. Pariwisata

Potensi pariwisata di Sembalun sangat banyak. Keberadaan gunung Rinjani (gunung api aktif) yang menjadi salah satu tujuan wisata, budaya masyarakat, kondisi alam yang natural tanpa terjamah, aktifitas masyarakat baik pertanian, kerajinan maupun kegiatan-kegiatan tradisional lainnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan dan menjadi komoditi pariwisata yang memiliki nilai jual yang tak habis-habisnya. Pengembangan pariwisata didorong kearah yang sesuai dengan prisip pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi local sebagai komoditas yang memiliki nilai jual dengan management pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan dimana hal tersebut dapat terrealisasi dengan konsep menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

5. **Wira Usaha Sosial**

Masyarakat yang mampu berwirausaha adalah cita-cita besar dari SCDC dan menjadi keharusan bagi mereka khususnya yang telah mengikuti program SCDC dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia seperti kursus bahasa inggris, magang dan program pengembangan lainnya.

6. Wisata Paralayang

SCDC menginisiasi terbentuknya Club Para Layang Sembalun di bawah Naungan Fasi NTB sejak tahun 2013, dalam 2 tahun terahir Club Paralayang Sembalun berkembang pesat dan telah melahirkan pilot-pilot muda berbakat yang berasal dari sembalun. Olahraga Paralayang tidak hanya diperuntukan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan kejuaraan namun juga sangat menjanjikan ketika di kemas menjadi atraksi wisata terbang seprti di Puncak Bogor dan di Gunung banyak Malang. Sembalun kedepan akan di arahkan seperti di bogor dan di malang yang tentunya akan menciptakan banyak lapangan kerja serta menunjang kemajuan pariwisata minat khusus di sembalun.

C. Kepengurusan Sembalun Community Developmen Center

Ketua	: Royal Sembahulun
Sekretaris	: Mujiono
Bendahara	: Feri Cahyadi

Divisi

Humas	: Ahmad Setiadi.Spd
Advokasi	: Handanil. SH
Pengembangan SDM	: Hanafi Harun.Spd
	Yunia lestari
Lingkungan Hidup	: Murtindih
Pengelolaan SDA	: Hamka Abdul Malik

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN KSPN RINJANI

Peran serta masyarakat dalam merencanakan proses pembangunan sudah banyak dilakukan di berbagai sektor pembangunan yang ada di Indonesia. Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatukegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja ke dalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian *"a valuentaryprocess by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them"* (Deepa Naryan, 1995), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung penghasilan, gender, suku, pendidikan mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran danpendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Berdasarkan hal tersebut kegiatan pelibatan masyarakat tersebut meliputi kegiatan pelibatan langsung kelompok masyarakat SCDC yang diwakili oleh beberapa anggota yang memang mempunyai pengetahuan di bidang pariwisata, hal pertama yang dilakkan adalah mengadakan beberapa kali forum grup discussion antara kelompok masyarakat, perangkat desa, pemangku kebijakan di kawasan Gunung Rinjani, dan dinas pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah diadakan FGD dalam menyusun rencana dan target kerja, maka perserta dibekali dengan pelatihan *mapping*. Pelatihan *mapping* tersebut melibatkan tenaga pendidik dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Malang, setelah dianggap mampu, maka dapat langsung melakukan pemetaan titik lokasi dilapangan, lalu didigitasi hingga dianalis sampai dalam tahap design perencanaan.

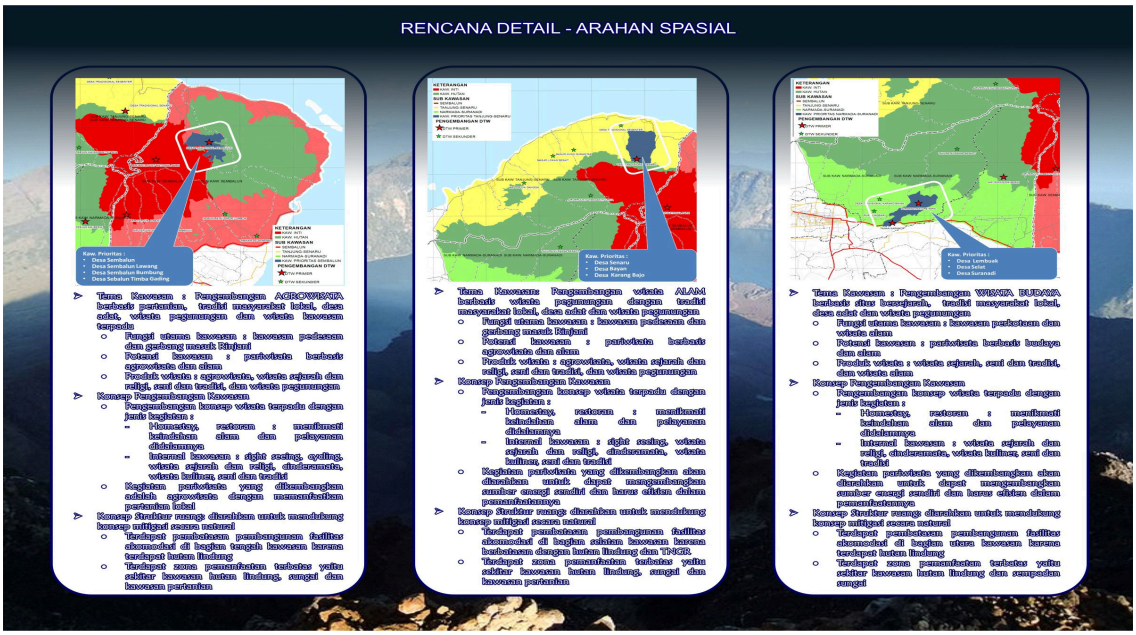
IV. ANALISA KERUANGAN DAN POTENSI KSPN RINJANI

A. Analisa Pola Ruang dan Struktur Ruang KSPN Rinjani

Dengan menggunakan kawasan penyangga dari batas KSN Gunung Rinjani maka struktur kawasan menggunakan struktur kawasan dari kajian KSN Gunung rinjani, sehingga terdapat singkronisasi kebijakan dan perencanaan kedepan, arahan pola dan struktur ruang pada KSPN Rinjani adalah :

1. Pusat Pelayanan Primer, merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan utama terhadap fungsi Kawasan Gunung Rinjani meliputi perlindungan resapan air dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan pemanfaatan hasil hutan, serta simpul utama transportasi yang menghubungkan ke/dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). meliputi kawasan perkotaan PKL Tanjung.
2. Pusat Pelayanan Sekunder merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan sekunder untuk fungsi Kawasan Gunung Rinjani yang meliputi perlindungan resapan air dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan kehutanan, serta simpul transportasi yang menghubungkan ke/dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan/atau melayani beberapa kecamatanmeliputi kawasan perkotaan PKL Narmada, PKL Bayan, PKL Kopang, dan PKL Masbagik
3. Pusat Pelayanan Tersier merupakan kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas pelayanan tersier untuk fungsi Kawasan Gunung Rinjani meliputi perlindungan resapan air dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan kehutanan, serta simpul transportasi yang menghubungkan ke/dari kawasan peruntukan dan/atau satu kecamatan, meliputi kawasan perkotaan Pringgabaya, Gangga, dan Sembalun.

Pemanfaatan ruang yang ada didalam KSPN Rinjani-Lombok sebagian besar adalah pemanfaatan ruang sebagai Kawasan Lindung Nasional melalui Taman Nasional Gunung Rinjani yang merupakan kawasan suaka alam,pelestarian alam, dan cagar budaya. Taman Taman Nasional Gunung Rinjani berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan bagian dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara. Hal ini secara tidak langsung menjadi dasar dalam mempertimbangkan pemanfaatan ruang baik dari konteks pembangunan tata ruang dan pariwisata di tingkat nasional, provinsi, dan kedua kabupaten tersebut. Dalam konsep spasial kawasan KSPN Gunung Rinjani di bagi menjadi dua kawasan inti dan kawasan penyangga. Kawasan inti menggunakan batas kawasan dari Taman Nasional Gunung Rinjani sedangkan kawasan penyangga menggunakan kawasan KSN Gunung Rinjani. Kawasan penyangga sendiri terdiri dari dua, yaitu penyangga dengan pemanfaatan budidaya seperti permukiman, pertanian, perdagangan dan aktifitas sejenisnya. Pemanfaatan dari kawasan penyangga beikutnya adalah kawasan lindung, dengan batas deliniasi kawasan penyangga lindung dari batas hutan milik Dinas Kehutanan. Hal ini mempunyai tujuan agar tidak terjadi penggunaan lahan perencanaan pada kawasan yang tidak semestinya seperti kawasan lindung yang mempunyai fungsi penyangga, konservasi.



Gambar 1. Rencana Detail Arahan Spasial KSPN Rinjani

B. Potensi Pariwisata KSPN Rinjani

Destinasi pada kawasan KSPN Rinjani terbagi menjadi dua yaitu destinasi mandiri dan destinasi kawasan. Destinasi mandiri berbentuk satu ODTW sedangkan destinasi kawasan terdiri dari beberapa ODTW yang saling terkait dan menguatkan dari segi budaya maupun identitas dan kelembagaan. Destinasi kesatuan berupa kawasan. Destinasi Kawasan antara lain :

1. Destinasi Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani merupakan destinasi wisata alam, terdiri dari beberapa DTW, yaitu DTW Alami :
    - Sebau
    - Kembang Kuning
    - Otak kokok
    - Danau segara anak
    - Puncak Gunung Rinjani
    - Goa susu, Payung Manik
    - Air terjun Sendang Gile
    - Air Terjun Jeruk Manis
2. Destinasi Kawasan Sembalun merupakan destinasi wisata lama dengan pengembangan agrowisata, terdiri dari beberapa DTW, yaitu DTW Budaya, alami, dan budaya:
    - Desa Adat Beleq
    - Acara budaya :
    - Permainan Rakyat Begasingan
    - Festival Gendang Beleq
    - Permainan Rakyat Perisaian
    - Mengayu-Ayu
    - Wayang Uwong
    - Cupak Grantang
    - Lembah Sembalun
    - Bukit Pegasingan
    - Jalur menuju TNGR
    - Rencana Taman Agrowisata Sembalun
3. Destinasi Kawasan Senaru merupakan kawasan dengan destinasi wisata alam, terdiri dari beberapa DTW, yaitu DTW budaya dan alami :

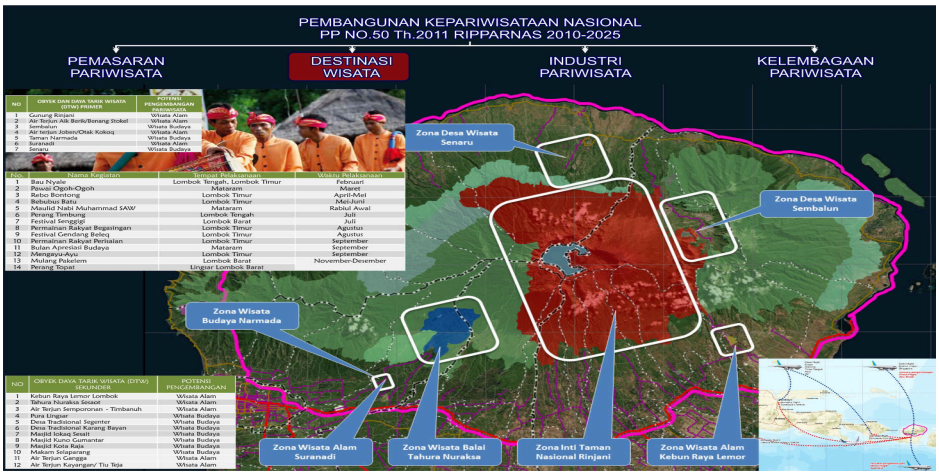
- Desa Adat Senaru
- Masjid Bayan
- Air Terjun Sindanggile
- Air Terjun Tiu Kelep
- Jalur menuju TNGR

4. Destinasi Kawasan Narmada merupakan kawasan dengan destinasi wisata budaya, terdiri dari beberapa DTW, yaitu DTW Budaya dan Alami:
    - Taman Narmada
    - Pura Lingsar
    - Desa Adat Karang Bayan
    - Taman Suranadi

Sedangkan destinasi mandiri berupa DTW yang berdiri sendiri adalah :

1. Air Terjun Gangga
2. Air terjun Bayan
3. Taman Wisata Kerandangan
4. Air Terjun Aik Berik
5. Air Terjun Joben
6. Air Terjun Semporonan-Timbanuh
7. Lemon Spring
8. Pura Lingsar
9. Desa Tradisional Karang Bayan
10. Makam Batulayar
11. Candi Batu Bolong
12. Masjid lokaq Sesait
13. Masjid Kuno Gumantar
14. Desa Tradisional Segenter
15. Masjid Kota Raja
16. Makam
17. Selaparang

DTW Primer yaitu daya tarik wisata utama di kawasan yang sesuai dengan arahan KSPN Rinjani dalam RIPARNAS, RIPARDA, RTRWP, RTRWK serta merupakan salah destinasi unggulan di Lombok yaitu memiliki daya tarik wisata budaya, keunikan bentang alam, dan memiliki komponen aksesibilitas dan amenities yang baik.



Gambar 2. Rencana Pengembangan KSPN Rinjani

C. PERENCANAAN KSPN RINJANI

Tema penanganan : ”REFORMULASI AGROWISATA SEMBALUN SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL KAWASAN PENUNJANG GUNUNG RINJANI”

Visi Taman Agrowisata Sembalun adalah:

- Menjadi agrowisata berbasis wisata desa yang mampu memandirikan desa dan masyarakatnya.

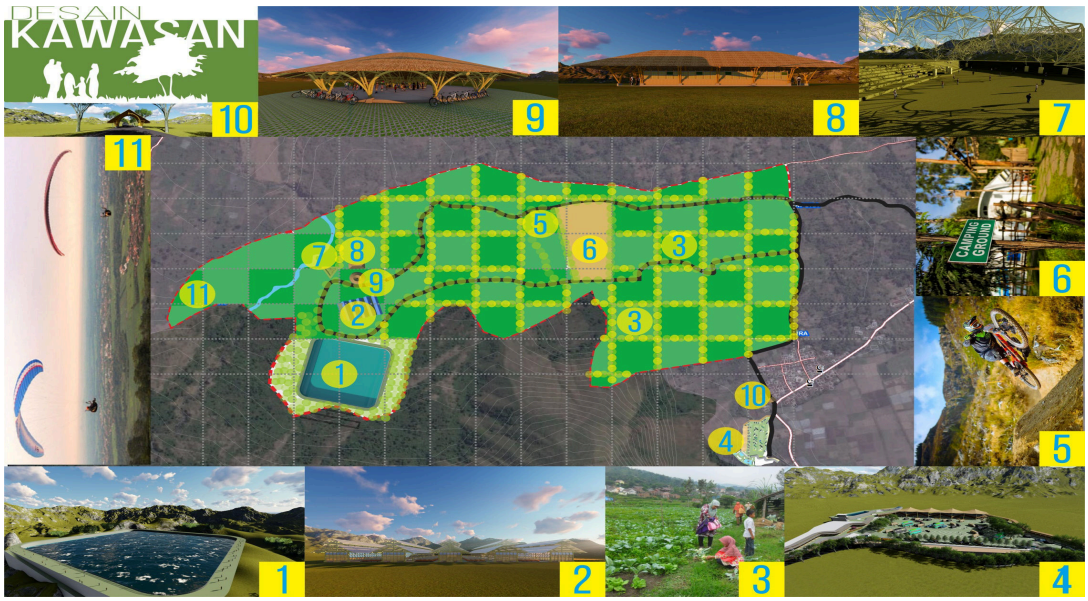
Misi Taman Agrowisata Sembalun adalah:

- Menciptakan desa yang mandiri dengan pengembangan ekonomi kreatif melalui agrowisata;
- Menjadi pusat wisata edukasi pertanian pertama di Lombok;
- Mendidik masyarakat mengembangkan potensi desa sesuai sapta pariwisata (aman, tertib, sejuk, bersih, indah, ramah dan kenangan).

Manfaat pengelolaan profesional agro wisata :

- Meningkatkan konservasi lingkungan
- Meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam
- Memberikan nilai rekreasi
- Meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan
- Mengembangkan ekonomi masyarakat
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Membuka kesempatan berusaha
- Mengembangkan lama tinggal dan belanja wisatawan
- Daya dukung promosi
- Meningkatkan produksi dan kualitas

Penataan kawasan Taman Agrowisata Sembalun meliputi beberapa tahap utama yaitu pembangunan bangunan penunjang, pembangunan pedestrian berupa trotoar dan fasilitas pejalan kaki, pembangunan rest area, penataan parkir, pembangunan fasilitas fungsional seperti balai Kriya, green hause bibit, amphiteater, dan gapura serta kantor pengelola. Terdapat juga fasilitas pendukung berupa embung untuk sumber air dari kegiatan pertanian pada Taman Agrowisata Sembalun



Gambar 3. Desain Pengembangan KSPN Rinjani

2. KESIMPULAN

Sangat penting sekali dalam merencanakan suatu pengembangan kawasan turut melibatkan peran serta masyarakat serta mengimplementasikan tujuan dan aspirasi mereka dalam perencanaan, sehingga nantinya perencanaan tersebut memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar wilayah perencanaan. Keterlibatan SCDC dalam ikut merencanakan kawasan pariwisata di Desa Sembalun merupakan salah satu bukti nyata yang dapat direplikaskan di beberapa wilayah yang lain.

3. REFERENSI

1. Mill, Robert Christine, (2000), *Tourism The International Bussiness*. Jakarta : PT. Garfindo Perkasa.
2. Ross, Gleen F. (1998). Psikologi Pariwisata. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
3. Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Jakarta : Depdiknas Bappenas Adicitrakaryanusa. Jakarta.
4. Hamijoyo. (2007). Partisipasi Dalam Pembangunan. Jakarta : Depdikbud RI.
5. Susantio, Djulianto. Memaksimalkan Potensi Pariwisata di Indonesia. Http:/www.sinarharapan.co.id/ feature /wisata (15 maret 2008).

KAJIAN RUANG HIDUP BERDASARKAN *HOME-RANGE* MASYARAKAT PESISIR DESA MEDANA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA

Fariz Primadi Hirsan[1] Gaffar Azwaz[2]

[1]Program Studi PWK Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Mataram
[2]Program Studi PWK Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah, Mataram
[1]fariz.primadi@gmail.com
[2]gafaroazwaz55@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pengelolaan kawasan pesisir terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya yang terjadi di wilayah pesisir Desa Medana dengan berbagai macam keberagaman pemanfaatan ruang dan tempat. Terlibatnya berbagai kepentingan menjadi faktor yang intens dalam memicu kompleksitas pemanfaatan ruang pada kawasan. Hasil kajian dari penelitian menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat pesisir Desa Medana terlihat dari bentuk mata pencaharian yang sangat kompleks (beragam). Dimana masyarakatnya tidak hanya berprofesi sebagai nelayan. Hubungan sosial yang tinggi melahirkan ruang-ruang yang pemakaianya secara kolektif (bersama), kesamaan profesi, pola bangunan serta elemen pembentuk permukiman mempengaruhi hubungan kekerabatan yang tinggi dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Orientasi pergerakan yang cenderung mengarah ke laut melahirkan suatu kebudayaan yang identik dengan bentuk mata pencaharian masyarakatnya sebagai nelayan yaitu ritual nyawen (sedekah laut). Ruang hidup masyarakat pesisir Desa Medana lahir dan tumbuh berdasarkan ketiga nilai tersebut. Aktivitas *home-range* masyarakat pesisir Desa Medana tidak hanya terjadi didalam wilayah teritori pesisir Desa Medana, dalam memenuhi kebutuhan lain yang tidak terpenuhi di wilayah teritori pergerakan masyarakat pesisir Desa Medana harus keluar dari kawasan teritorinya seperti kewilayah bagian timur (Desa Tanjung dan Desa Sokong), selain itu juga pergerakan mengarah kewilayah bagian barat yaitu wilayah 3 Gili (Meno, Air dan Trawangan).

Kata-kata kunci : masyarakat pesisir, ruang hidup dan *home-range*

I. PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan kawasan pesisir terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di beberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Salah satunya yang terjadi di wilayah pesisir Desa Medana dengan berbagai macam keberagaman pemanfaatan ruang dan tempat, Salah satu permasalahan tersebut ialah kerusakan lingkungan perairan pesisir akibat aktivitas penambangan kapur yang dilakukan masyarakat mengakibatkan kerusakan areal terumbu karang. Terlibatnya berbagai kepentingan baik dari kegiatan pariwisata, masyarakat, dan kebudayaan menjadi faktor yang intens dalam memicu kompleksitas pemanfaatan ruang pada kawasan.

Pemanfaatan ruang-ruang masyarakat dikawasan permukiman pesisir sudah mendapatkan gangguan yang disebabkan pola pengembangan yang tidak memperhatikan konteks perilaku dan budaya masyarakat hingga pengembangan yang dilakukan hanya dalam konteks pertumbuhan ekonomi semata.

Pengelolaan wilayah pada kawasan pesisir sebagaimana pengelolaan wilayah pada kawasan lainnya, dimana tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal diatas, maka dilakukan ***"Kajian Ruang Hidup Berdasarkan Home-range Masyarakat Pesisir Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara".*** Ruang hidup merupakan tempat atau area yang

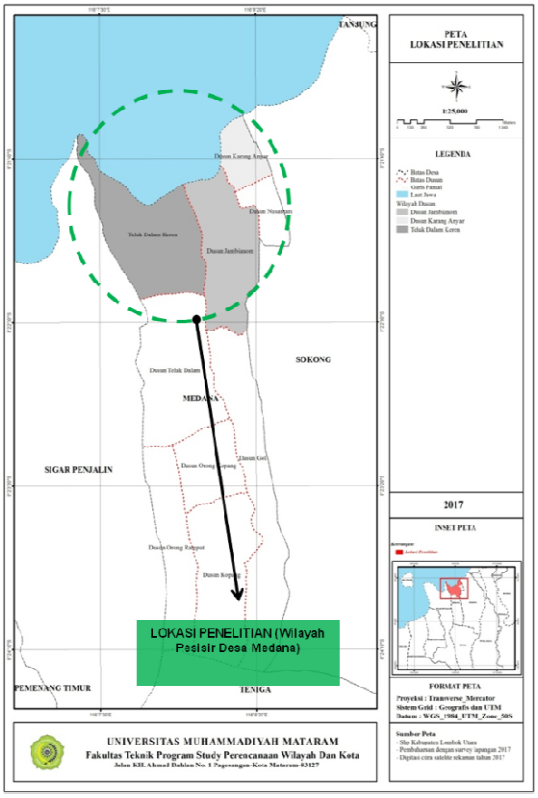
ditetapkan berdasarkan nilai-nilai budaya dan sosial ekonomi masyarakatnya. Sedangkan *Home-range* merupakan Jangkauan area yang akrab bagi seseorang atau suatu kelompok. Home-range bukan hanya jangkauan daerah di dekat tempat tinggal, tetapi juga bisa jangkauan daerah tempat kerja dan sebagainya.

Maka dari itu, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, untuk mengetahui bagaimanakah kondisi ruang hidup masyarakat pesisir Desa Medana Kecamatan Tanjung dan bagaimanakah *home-range* berdasarkan tempat aktivitas masyarakat pesisir Desa Medana Kecamatan Tanjung ?

II. METODE

Lokus penelitian berada di Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kab. Lombok Utara, dengan alasan :

1) Aktivitas masyarakatnya yang beragam (kompleks)
2) Karakter sosial masyarakatnya yang berbeda-beda
3) Kebudayaan yang masih kuat dijalankan
4) Kerusakan lingkungan laut (ekosistem terumbu karang)



Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode induktif yaitu menekankan pada pengamatan terlebih dahulu lalu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan tersebut.

Adapun pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

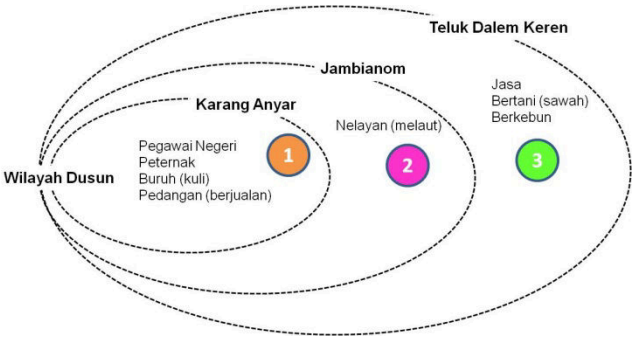
1) Reduksi data (menajamkan analisis).
   Dilakukan 2 point analisis yaitu analisis terkait kondisi ruang hidup masyarakat (ekonomi, sosial dan budaya), kemudian dilakukan analisis *home-range* (wilayah jelajah) baik didalam maupun di luar wilayah teritorinya.
2) Penyajian data (data hasil reduksi diorganisir)
   Hasil dari analisis yang telah di lakukan akan dituangkan dalam bentuk gambar atau sketsa sehingga memudahkan dalam memahami penelitian ini.
3) Verifikasi (penarikan kesimpulan)
   Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Ruang Hidup Masyarakat Pesisir

a) Ekonomi

Aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat pesisir Desa Medana sangat bervariasi dilihat dari jenis mata pencaharaian masyarakat, potensi dari masing-masing ketiga dusun sangat mempengaruhi bentuk mata pencaharian masyarakat. Secara umum mayoritas dari masyarakat pesisir Desa Medana bekerja sebagai nelayan dan bercocok tanam (bertani dan berkebun).



Gambar 1. *Mata pencaharian masyarakat pesisir Desa Medana*

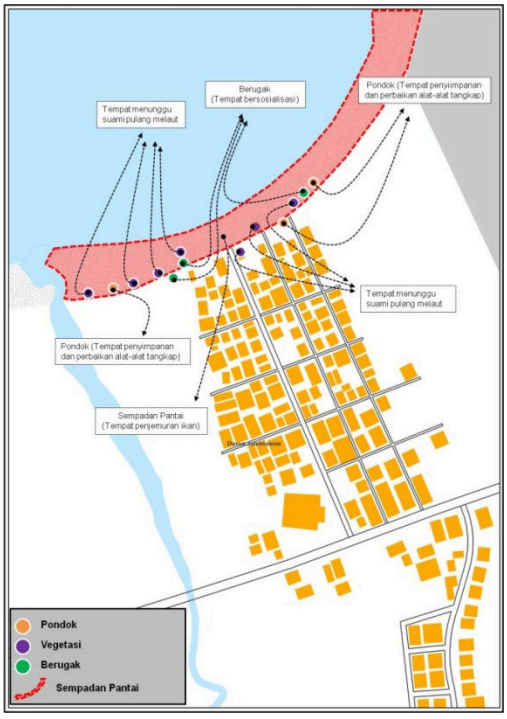
b) Sosial

Sistem kekerabatan antara sesama warga terlihat dari hubungan keseharian dalam berbagai kegiatan atau aktivitas misalnya kegiatan gotong royong. Menandakan masih kentalnya rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.



Gambar 2. *Gotong royong pembangunan pondok*

Hubungan kekerabatan antar warga juga terlihat jelas dari pemakain ruang-ruang yang terbentuk karena adanya nilai kebersamaan pada tempat tersebut sehingga melahirkan ruang yang disebut ruang aktifitas kelompok. Lahirnya ruang-ruang tersebut menggambarkan kedekatan antar sesama warga nelayan dengan kepentingan dan berdasarkan profesi yang sama.





Berugak



Vegetasi Alam



Pondok



Penjemuran ikan

Gambar 3. *Titik sebaran ruang aktivitas kelompok*

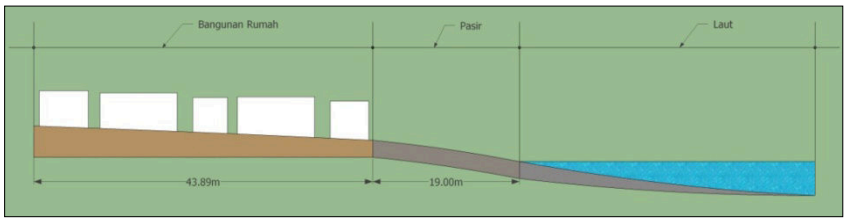
Dari ketiga dusun yang ada di wilayah pesisir Desa Medana memiliki karakter hubungan sosial yang berbeda-beda. Jika masyarakat pesisir Dusun Jambianom dengan mayoritas penduduknya sebagai nelayan lebih terbuka dan hubungan kekerabatan yang dekat antar sesama. Berbeda dengan masyarakat Dusun Teluk Dalem Keren dan Kr. Anyar, sistem kekerabatan kedua dusun tersebut cenderung lebih tertutup. Elemen-elemen pembentuk ruang dalam bermukim menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat.

(1) Rumah

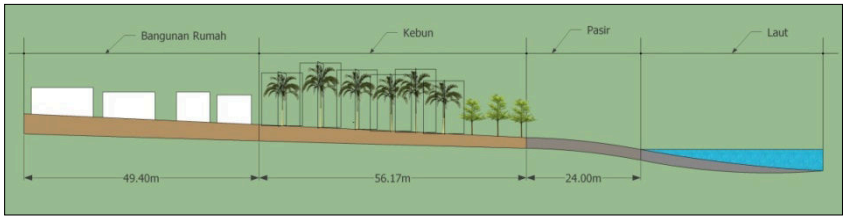
Pola permukiman masyarakat pesisir Desa Medana secara umum mengikuti jalan dengan susunan masa bangunan yang menghadap kearah jalan. Pola pertapakan bangunan rumah di wilayah Pesisir Desa Medana dikelompoknya menjadi 2 jenis yaitu.

(a) Rumah diatas darat yaitu bentuk pola pertapakan yang terdapat di wilayah Dusun Kr. Anyar dan Teluk Dalem Keren.

(b) Rumah diatas darat tepi perairan yaitu bentuk pola pertapakan yang terdapat di wilayah Dusun Jambianom.



Gambar 4. *Pola pertapakan bangunan rumah Dusun Jambianom*



Gambar 5. *Pola pertapakan bangunan rumah Dusun Kr. Anyar dan Teluk Dalem Keren*

Sedangkan jenis rumah yang ada dari segi material dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu rumah permanen dengan material batu bata dan bangunan rumah non permanen dengan material berbahan kayu dan dinding. Bale panggung (rumah panggung) hanya ditemui di perkampungan nelayan jambianom. Dalam struktur ruang bale panggung terdapat ampik. Ampik merupakan bagian dari atap rumah yang menjorok ke luar. Dalam pemakaiannya ampik merupakan tempat duduk antar sesama dan tempat menerima tamu. Nilai kebersamaan dalam kehidupan sosial terlihat dari struktur ruang dari ampik yang pergunakan sebagai tempat duduk berkumpul antar sesama warga.



Gambar 6.
Ampik bale

(2) *Berugak* dan *plangkan*

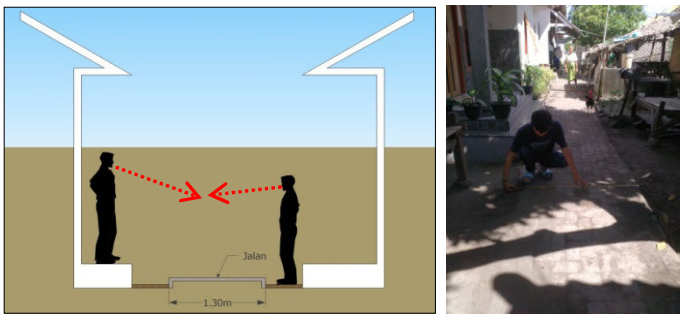
Hubungan antar sesama warga juga terlihat dari pemakain berugak dan plangkan. Berugak dan plangkan memiliki fungsi sebagai ruang bersantai, berkumpul antar sesama warga dan ruang penerimaan tamu. Menerapkan konsep hidup bertetangga (bersilaturrahmi). Berugak dan plangkan banyak dijumpai di perkampungan nelayan jambinom,



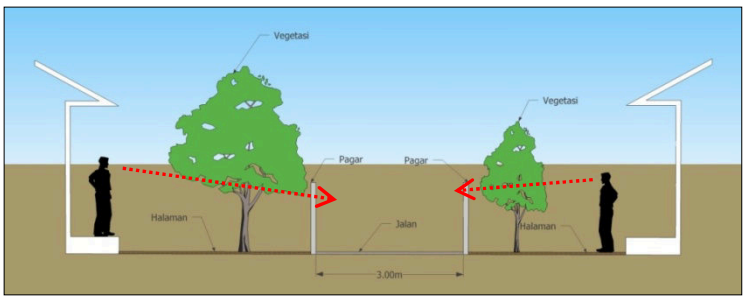
Gambar 7.
Berugak dan plangkan

(3) Pagar dan halaman

Kondisi permukiman di wilayah Dusun Jambianom terlihat dari bangunan yang saling berhadapan tanpa halaman dan pagar dengan jalan sebagai pemisah antar bangunan rumah, memberikan pengaruh terhadap hubungan dan kedekatan sesama warga hunian. jarak antar bangunan yang saling berdekatan memberikan kemudahan dalam kedekatan berkomunikasi antar sesama warga. Sedangkan Untuk wilayah Dusun Karang Anyar tiap bangunan rumah memiliki halaman dan berpagar tembok. Pagar yang menjadi pembatas bangunan rumah memberikan kesan kehidupan sosial masyarakatnya yang tertutup. Secara eksternal penghuni bangunan mengisolasikan dirinya dari kehidupan sekitatnya.



Gambar 8. *Bangunan rumah berhadapan (Ds. Jambianom)*







Gambar 9. *Bangunan rumah berpagar dan halaman (Ds. Karang Anyar dan Teluk Dalem Keren)*

c) Budaya

(1) Kehidupan religi

Kehidupan religi masyarakat pesisir Desa Medana mayoritas beragama muslim dan sebagian kecil beragama hindu yaitu sebagian dari masyarakat Dusun Kr. Anyar. Sistem kepercayaan masyarakat hindu terlihat pada upacara sembahyang yang dilakukan.



Gambar 10. *Pemanfaatan ruang makro upacara sembahyang umat hindu*

Upacara keagamaan dalam sistem kebudayaan islam :

- Upacara kelahiran
- Upacara perkawinan
- Upacara kematian

(2) Sistem tradisi (ritual)

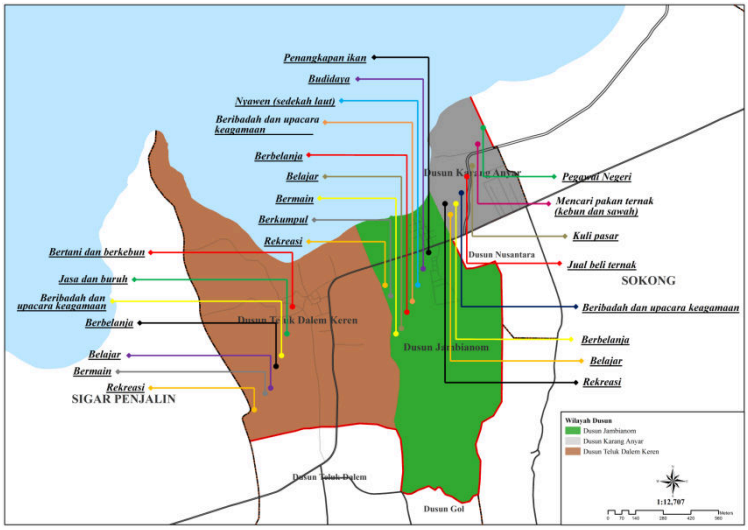
Tradisi nyawen (sedekah laut) merupakan wujud syukur kepada sang pencipta yang kuasa atas rahmat atau rezeki yang berikan atas sumberdaya laut. ritual nyawen dipercaya oleh masyarakat sebagai ritual menolak bala segala mara bahaya selama melaut menganggap laut dihuni oleh kekuata gaib sehingga perlu diberi sesaji (larung sesaji). Sehingga secara teologis, memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memilki kekuatan magis, sehingga perlu perlakuan yang khusus.



Gambar 11. *Pemanfaatan ruang mikro & makro upacara nyawen*

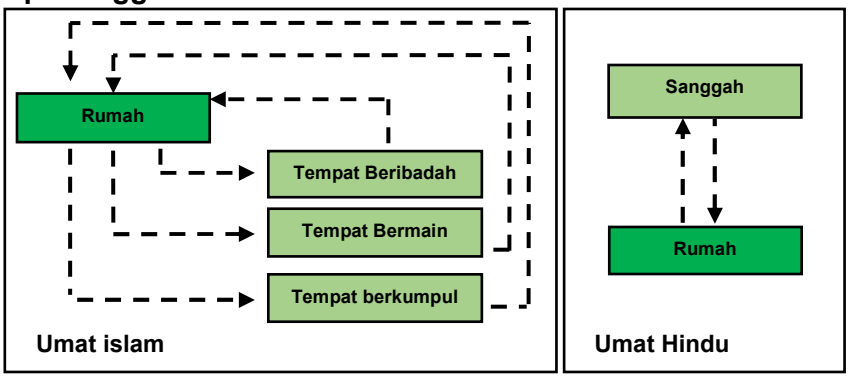
2. Analisis Home-range

Home-range adalah konsep yang berhubungan dengan perilaku teritorial. Istilah ini pada mulanya dipakai untuk mengidentifikasi perilaku teritorial pada hewan. Home-range dalam kehidupan masyarakat pesisir Desa Medana merupakan rangkaian tempat yang digunakan dan dikenalnya. Menurut Ralph Taylor kawasan *home-range* manusia adalah jangkauan daerah yang akrab bagi seseorang. Kawasan yang akrab ini tidak hanya rumahnya, tetapi bisa juga meliputi daerah-daerah yang dekat dengan rumah, tempat kerja, atau tempat tinggal atau tempat berkumpul saat berhenti sejenak dari pekerjaan, tempat-tempat aktivitas manusia. Berikut adalah home-range masyarakat pesisir desa medana berdasarkan tempat aktivitas (kegiatan) serta bentuk orientasi pergerakan ketempat-tempat tersebut.



Gambar 12. *Aktivitas masyarakat pesisir Desa Medana*

a) Tempat tinggal



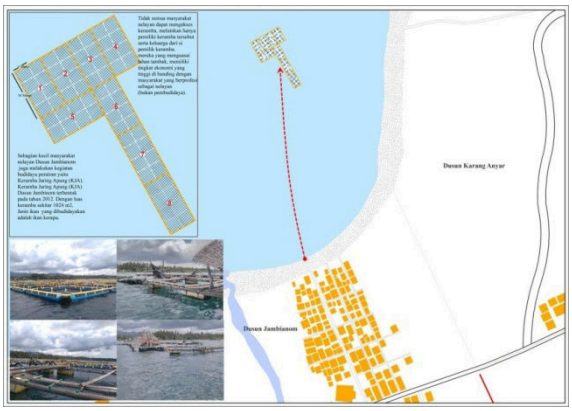
Gambar 13. *Orientasi pergerakan disekitar tempat tinggal*

Bentuk pergerakan masyarakat pesisir Desa Medana disekitar wilayah tempat tinggalnya mengarah ke tempat beribadah, tempat tempat bermain, tempat berkumpul.

b) Tempat bekerja

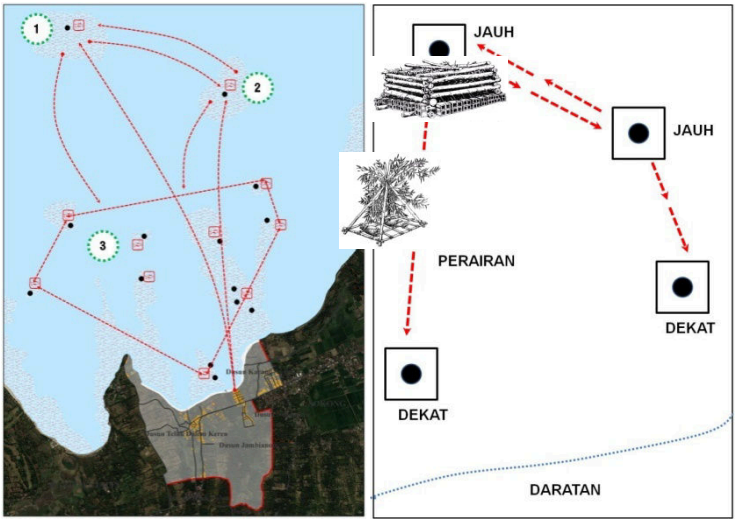
(1) Laut

- **Kegiatan budidaya perairan**
  Keramba jaring apung merupakan bentuk kegiatan budidaya laut yang telah dilakukan masyarakat nelayan Jambinom. Aktivitas tersebut berlangsung sejak tahun 2012.



Gambar 14. *Pergerakan ke laut (budidaya perairan)*

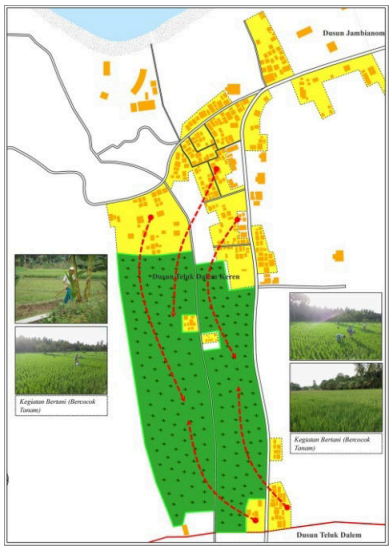
- **Kegiatan penangkapan**
  Dalam kegiatan penangkapan pergerakan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Desa Medana hanya mampu menjangkau lautnya sampai pada jarak 3 mil dengan kedalaman 140 meter (*zona epipelagis)*. Kebanyakan jenis ikan hasil tangkapan nelayan yaitu ikan teri, ikan ikan belanak, ikan sarden. Adapun alat tangkap lainnya yang di gunakan masyarakat nelayan pesisir Desa Medana yaitu rumpon dalam bahasa masyarakat lokal biasa disebut taket.



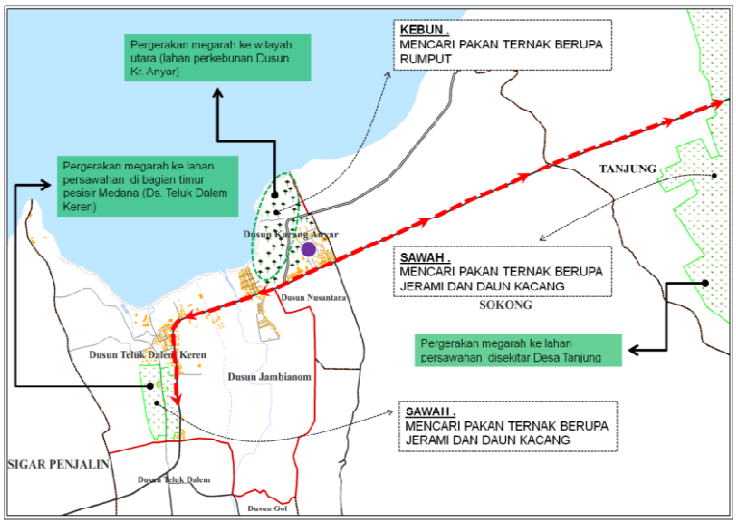
Gambar 15. *Orientasi pergerakan disekitar rumpon*

Orientasi pergerakan nelayan yang terbentuk pada kawasan rumpon (taket) yaitu nelayan biasanya cendrung mengakses rumpon yang lokasinya paling jauh terlebih dahulu baru kemudian menuju titik-titik rumpon yang terdekat.

(2) Sawah (ladang) dan kebun
Pergerakan masyarakat pesisir Medana juga mengarah ke persawahan (ladang). kegiatan bertani mendorong pergerakan ke tempat tersebut.



Gambar 16.
Pergerakan ke sawah (ladang)

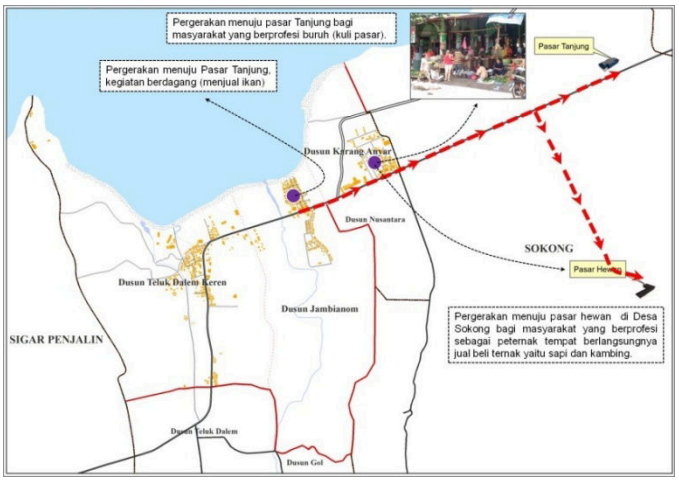


Gambar 17. *Pergerakan ke kebun dan sawah*

Sebagian dari masyarakat pesisir Desa Medana bekerja sebagai peternak yaitu khususnya masyarakat Dusun Kr. Anyar. Dalam memenuhi sumber kebutuhan pakan ternak pergerakan masyarakat mengarah ke areal persawahan di wilayah timur dan barat pesisir Desa Medana dan sebagian ke areal perkebunan yang ada disekitarnya.

(3) Pasar

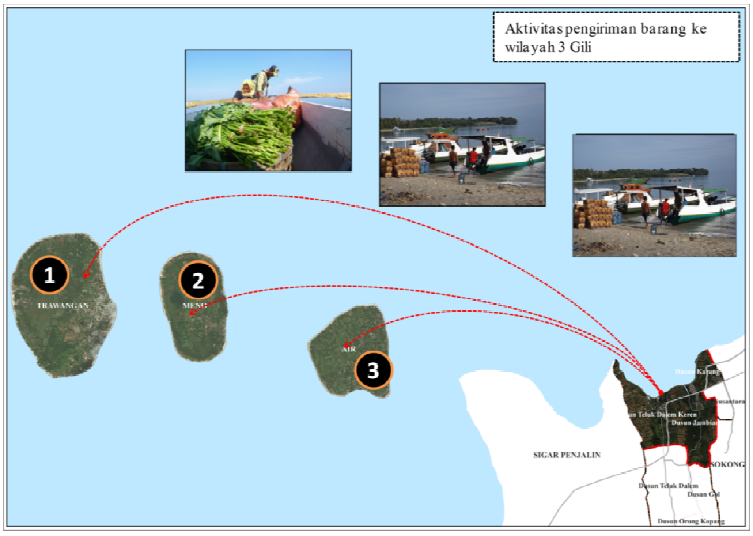
Home-range masyarakat pesisir Desa Medana yang terjadi diluar wilayah teritorinya yaitu pergerakan yang mengarah ke wilayah Desa Sokong. Pergerakan yang mengarah ke wilayah Desa Sokong tertuju pada 2 simpul kegiatan yaitu pasar tanjung dan pasar hewan.



Gambar 18. *Pergerakan ke pasar tanjung dan pasar hewan*

(4) Kawasan 3 gili (TRAMENA)

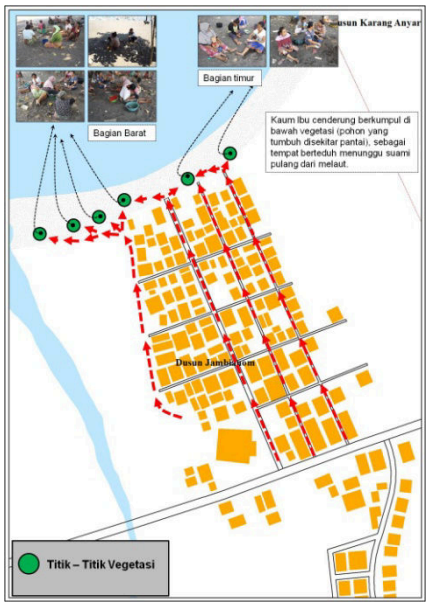
Kawasan *home-range* masyarakat pesisir Desa Medana juga sampai ke wilayah 3 Gili (Tramena) yaitu Trawangan, Meno dan Air. Merupakan bentuk pergerakan masyarakat pesisir di luar wilayah teritorinya yaitu kegiatan pengiriman barang.



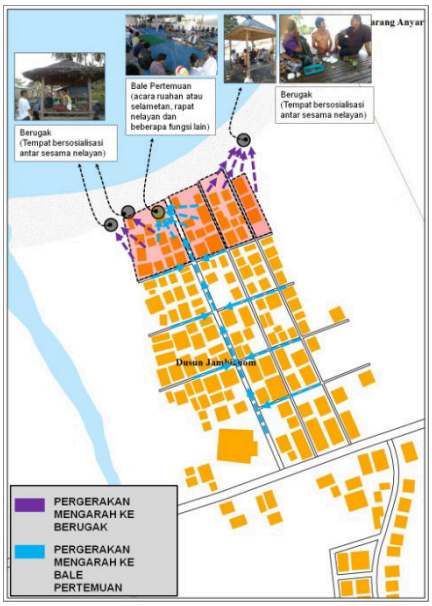
Gambar 19. *Pergerakan ke kawasan 3 gili (Trawangan, Meno dan air)*

c) Tempat berkumpul

Tempat-tempat berkumpul masyarakat nelayan cendrung mengarah dan terjadi disekitar kawasan pantai misalnya ibuk-ibuk cenderung berkumpul di bawah vegetasi atau pohon besar yang terdapat disekitar pantai ketika menunggu suami pulang melaut. Para nelayan juga cenderung berkumpul di berugak-berugak yang terdapat di sekitar kawasan pantai yaitu sebagai alternatf bercakap-cakap antar sesama nelayan



Gambar 20.
Ibu-ibu cenderung berkumpul disekitar vegetasi

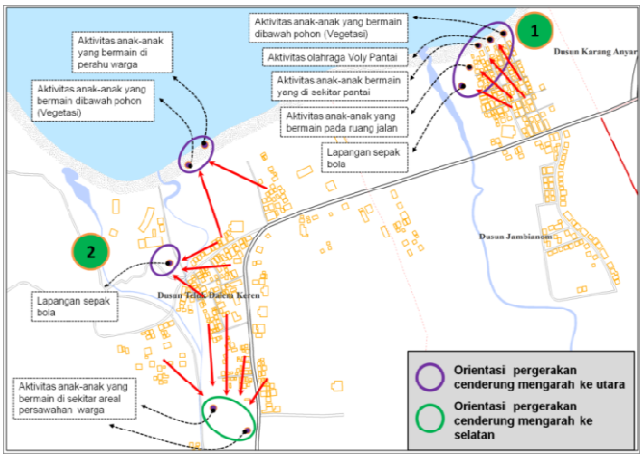


Gambar 21.
(berugak dan gedung serbaguna)

.

d) Tempat bermain

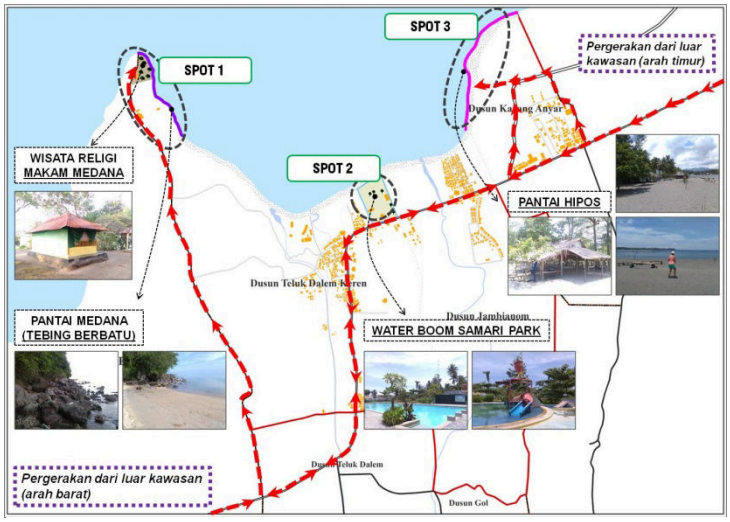
Karakter dari tempat-tempat bermain yang dipakai dipengaruhi oleh jenis mata pencaharian masyarakat yang ada di wilayah dusun tersebut. Tempat-tempat bermain masyarakat Jambianom lebih berorientasi kearah pantai (utara) sesuai dengan mata pencaharian sebagaian nelayan.



Gambar 22. *Pergerakan ke tempat bermain*

e) Tempat rekreasi

Spot-spot pantai yang sering menjadi titik pergerakan masyarakat yaitu pantai hipos, situs makam medana menjadi tempat ziarah dan kegiatan sepiritual dan taman air (water boom) samari park. Menjadi tujuan pergerakan masyarakat pesisir Desa Medana maupun masyarakat dari luar pesisir Desa Medana. Arah pergerakan yang terbentuk mengarah ke timur dan kearah barat. Pergerakan yang terjadi tidak harus cenderung tertuju ke arah makam maupun pantai medana, waterboom dan ke pantai hipos. Pergerakan masyarakat ke tempat-tempat tersebut terbentuk secara bebas sesuai keinginan dan tujuan.



Gambar 23. *Pergerakan ke tempat rekreasi*

f) Tempat belajar

Kebutuhan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendorong pergerakan masyarakat pesisir Desa Medana ke tempat-tempat belajar yang ada. Untuk pendidikan tingkat dasar sudah terpenuhi dalam wilayah. Untuk tingkat pendidikan menengah dalam



Gambar 24. *Pergerakan ke tempat belajar*

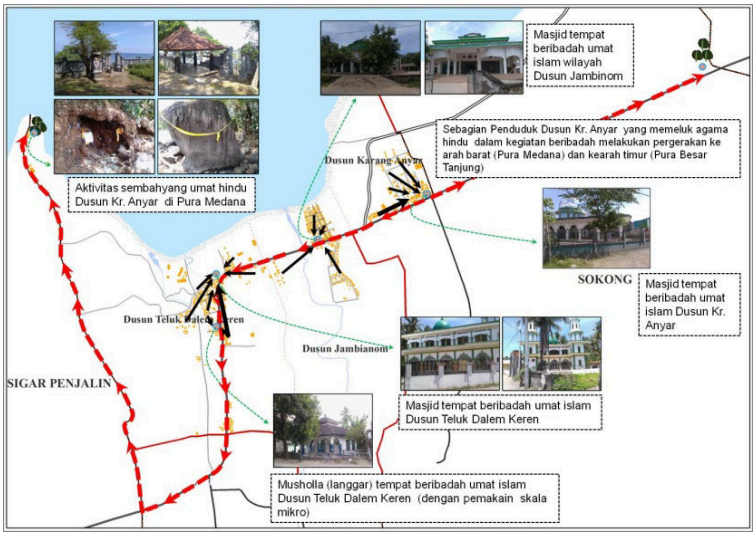
pemenuhannya pelajar harus bergerak kewilayah timur pesisir Medana yaitu Desa Sokong dan sekitarnya.

g) Tempat beribadah

Pergerakan masyarakat pesisir dalam kegiatan beribadah di kelompokan berdasarkan agama. Untuk umat muslim kegiatan beribadah masih dalam lingkup wilayah teritori pesisir Desa Medana.

Sedangkan umat hindu untuk kegiatan beribadah sehari-hari masih berlangsung di didalam lingkup huniannya yaitu sanggah.

Sedangkan untuk upacara besar keagamaan pergerakan mengarah ke pura dalam Tanjung



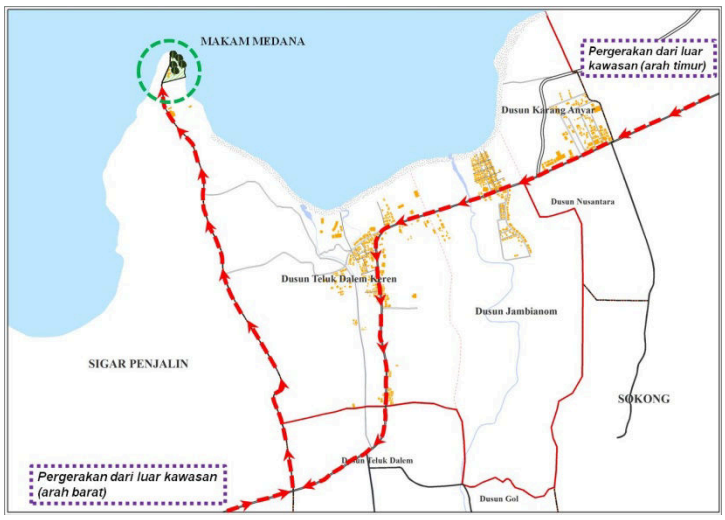
Gambar 25. *Pergerakan ke tempat beribadah*

1. Tempat upacara keagamaan

- Upacara kelahiran (ngurisang)

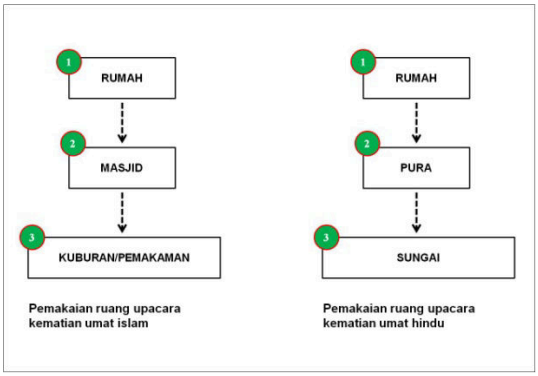


Gambar 26. *Pemakaian ruang upacara kelahiran*

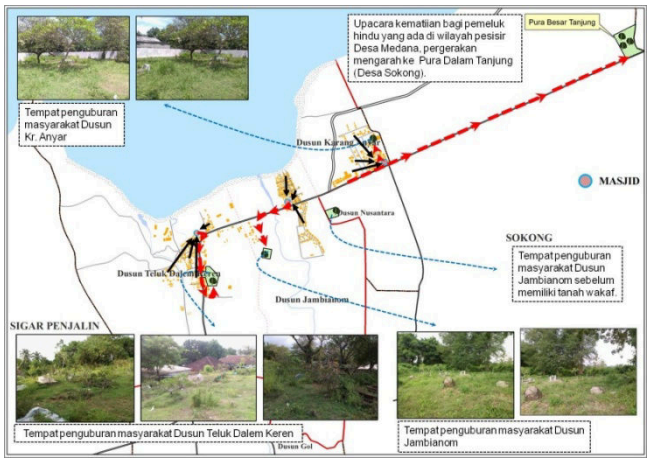


Gambar 27. *Pergerakan ke makam Medana*

- Upacara Kematian



Gambar 28. *Pemakaian ruang upacara kematian*



Gambar 29. *Pergerakan ke tempat pemakaman (upacara kematian)*

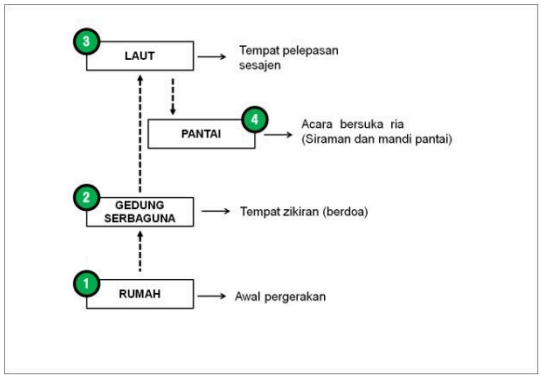
Home-range masyarakat pesisir Desa Medana juga terlihat dari bentuk kegiatan upacara kematian. Baik upacara kematian umat islam maupun umat hindu. Pergerakan yang terbentuk pada upacara kematian umat islam masih berlangsung pada kawasan home-range lingkup wilayah pesisir Desa Medana. sedangkan umat hindu dalam melangsungkan upacara kematian pergerakan mengarah ke pura dalam Tanjung.

- Upacara *Nyawen* (sedekah laut)

  Ritual nyawen (sedekah laut) merupakan bentuk kebudayaan yang masih dijalankan oleh masyarakat nelayan Jambinom. Ritual nyawen di adakan setiap 1 tahun sekali Prosesi jalannya ritual tersebut berlangsung di gedung (bale) serbaguna yang terletak di bagian utara permukiman nelayan.



Gambar 30. *Pergerakan ke gedung serbaguna (tempat ritual nyawen)*



Gambar 31. *Pemakaian ruang upacara nyawen*

3. Pengaruh Home-range Terhadap Lingkungan

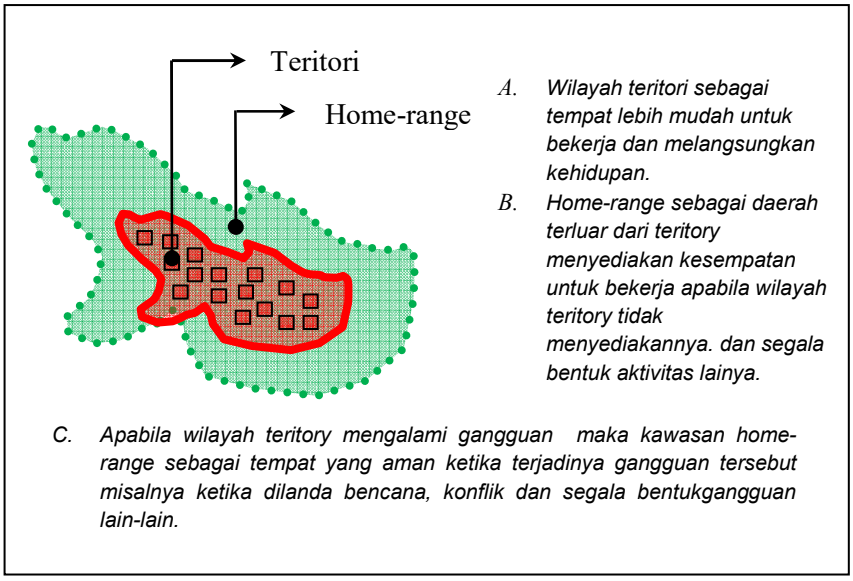
Sebelum tahun 2000 wilayah pesisir Desa Medana Kecamatan Tanjung dikenal sebagai kawasan penghasil kapur. Eksploitasi pengambilan batu karang sebagai bahan pembuatan kapur dilakukan secara besar-besaran. Bentuk dari prilaku *home-range* masyarakat yang terjadi di wilayah teritorinya. Aktivitas *home-range* masyarakat pesisir yang berlangsung diwilayah teritorinya terjadi tanpa melihat dampak dari aktivitas tersebut terhadap lingkungan sekitar.

Setelah konflik yang terjadi dengan masyarakat nelayan Jambianom dengan masyarakat Dusun Teluk Dalem Keren, karena dampak dari kegiatan tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat nelayan Jambinom. Aktivitas pengambilan batu karang mulai berhenti setelah terbitnya awig-awig (hukum lokal) pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Lombok Utara

Kegiatan bongkar muat naik turun barang kedalam kapal yang terlihat dibagian timur pantai Teluk Dalem Keren merupakan bentuk dari alih profesi masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang batu karang.

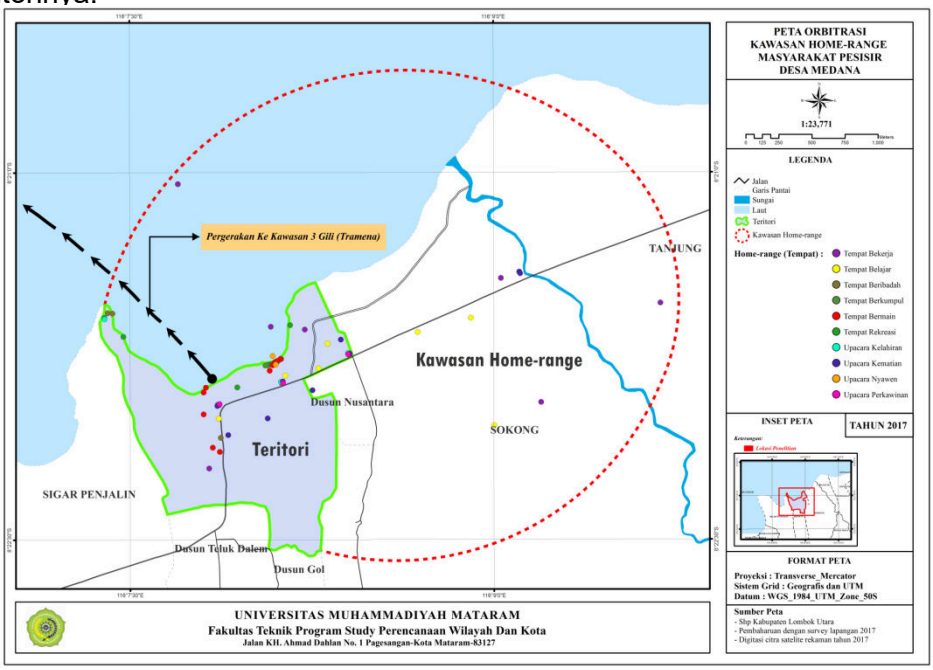
4. Pengaruh Teritori Terhadap Home-range

Hubungan antara *home-range* dengan teritori dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 32. *Hubungan teritori dengan kawasan home-range*

Wilayah *home-range* memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah teritori, hubungan antara wilayah teritori dengan wilayah home-range (wilayah jelajah) terlihat dari bentuk aktivitas-aktivitas masyarakat pesisir yang berlangsung pada suatu tempat. Pola pergerakan yang dilakukan masyarakat pesisir terhadap suatu tempat diluar wilayah teritorinya karena wilayah teritori tidak mampu memenuhinya. Sehingga masyarakat harus bergerak keluar dari wilayah teritorinya (pesisir Desa Medana) tetapi masih dalam ranah kawasan *home-rangenya*. Artinya jika aktivitas berlangsung diluar wilayah teritori maka hal tersebut merupakan bentuk dari *home-range* masyarakat pesisir diluar wilayah teritorinya.



Gambar 33.
Orientasi Home Range Masyarakat Desa Medana

IV. KESIMPULAN

1. *Home-range* masyarakat pesisir Desa Medana beradasarkan tempat meliputi tempat tinggal, tempat bekerja, tempat beribadah, bermain, belajar, berkumpul, rekreasi dan tempat melakukan upacara keagaamaan.
2. Aktivitas *home-range* masyarakat pesisir Desa Medana tidak hanya terjadi didalam wilayah teritori pesisir Desa Medana, dalam memenuhi kebutuhan lain yang tidak terpenuhi di wilayah teritori pergerakan masyarakat pesisir Desa Medana juga cenderung keluar dari ranah teritorinya (wilayah inti)
3. Bentuk dari aktivitas masyarakat pesisir Desa Medana tergantung pada tempat yang menjadi tujuan pergerakannya, misalnya *home-range* berdasarkan tempat bekerja tujuan pergerakan mengarah ke laut, sawah (ladang), kebun, dan pasar. Bentuk aktivitas pergerakan mengarah kelaut yaitu kegiatan penangkapan dan budidaya perairan sedangkan untuk pergerakan ke sawah dan kebun yaitu kegiatan bertani dan mencari pakan ternak. Begitu juga dengan tempat-tempat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Doxiadis. 1974. Ruang kehidupan *(Sell)*, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Maya Sita. 2010. “Klaim Terhadap Ruang (Studi Kasus Pada Rusun Sukaramai Medan)”. *Tesis,* Pascasarjana Universitas Indonesia.

Rina Sabrina, Antariksa, Gunawan Prayitno, 2010, *“Pelestarian Pola Permukiman Tradisional Suku Sasak Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur”,* Vol. 1 No. 2, diakses tanggal 10 mei 2017.

Syafrudin. 2009. “Pergeseran Pola Permukiman Berbasis Budaya Lokal di Desa Hu’u Kabupaten Dompu NTB”. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA, DESA SUKARARA, KEC. JONGGAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Sri Rahmi Yunianti[1], Laylan Jauhari[1]
[1,]Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Jalan Grafika No. 2, Yogyakarta
Email : rahmi.yunianti190693@gmail.com; laylan0210@gmail.com

Abstrak

Partisipasi ialah salah satu model pendekatan yang menyertakan peran aktif komunitas lokal dalam upaya pengembangan sebuah desa, baik untuk meningkatkan potensi maupun sebagai tujuan wisata. Desa Sukarara memiliki potensi alam yang asri dengan ciri khas pedesaan yang kental, adanya warisan sejarah rumah tradisional khas Sasak serta potensi utama kegiatan pelestarian budaya sosial, melalui kegiatan kaum wanita yang setiap hari menenun kain tradisional khas Pulau Lombok, yang disebut dengan "nyesek". Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat hingga saat ini. Dengan beberapa potensi tersebut, maka Desa Sukarara dapat dikembangakan sebagai salah satu alternatif tujuan pariwisata di Pulau Lombok terutama wisata budaya.Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi atau peran masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Sukarara sebagai desa wisata. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil kajian, diketahui bahwa masyarakat Desa Sukarara memiliki kesiapan sebesar 84 % untuk pengembangan sebagai desa wisata. Kesiapan yang ditunjukkan dari aspek sosial sebesar 91%, aspek lingkungan 95%, dan aspek ekonomi 67%. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat terimplementasikan mengingat kesiapan masyarakat yang cukup baik. Diharapkan dengan hasil kajian dalam penelitian ini, dapat memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam arahan pengembangan potensi Desa Sukarara sebagai alternatif destinasi pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah.

Kata Kunci : partisipasi, pengembangan desa wisata.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa wisata saat ini sangat dimininati oleh masyarakat sebagai objek wisata yangmengenalkan ciri sekaligus sebagai sarana dalam menemukan arti sejarah dan makna filosofi yang terdapat di suatu daerah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dimaksud dengan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Daya tarik wisata bisa dilihat dari berbagai aspek kepariwisataan yang banyak dimiliki di suatu daerah seperti halnya daya tarik wisata kehidupan desa yang biasa disebut dengan desa wisata.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa, akan memberikan nilai lebih karena masyarakat berperan sangat penting dalam lingkungan desa tersebut. Sastrayuda, 2010:21 mengungkapkan pentingnya suatu pendekatan dalam proses pembangunan pemodelan agar dalam upaya pembangunan tetap berorientasi kepada kepentingan masyarakat setempat, lingkungan dan peletakan atau pembagian zonasi yang tepat dan penataan. Pendekatan partisipatif yang dilaksanakan diharapkan akan memberikan ruang bagi perkembangan aktifitas yang berorientasi kompetisi dan tanggung jawab sosial oleh anggota komunitas itu

sendiri. Pentingnya partisipasi dalam pembangunan memberikan arti bahwa segala hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan ekonomi, seperti menarik investor luar, harus melibatkan warga (Bryson, 1995; 207 dalam Destha 2010).Secara prinsip, partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill (PTO PNPM PKK, 2007 dalam Mudiyanto, 2011).

Penerapan dan pengembangan pariwisata yang mengedepankan keikutsertaan masyarakat di wilayah Indonesia saat ini telah berkembang dengan cukup baik. Hal ini, selain bertujuan untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional agar memiliki referensi tujuan dan jenis wisata yang berbeda dengan jenis wisata pada umumnya, juga untuk membina potensi budaya masyarakat tersebut agar dapat dikelola secara mandiri sehingga dapat bermanfaat untuk kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan tujuan tersebut, maka pengembangan wisata budaya di wilayah Nusa Tenggara Barat saat ini telah berkembang menjadi salah satu destinasi tujuan wisata utama di wilayah ini.

Desa Sukarara adalah nama sebuah desa kecil yang merupakan salah satu pusat kerajinan tenun tradisional yang letaknya di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Lokasi Desa Sukarara ini sekitar 25 Km dari kota Mataram atau sekitar 30 menit perjalan. Keunikan dari desa ini ialah sebagian besar perempuan yang ada di Desa Sukarara ini bekerja sebagai penenun. Salah satu diantara jenis wiasata yang terkenal di wilayah ini adalah hasil kerajinan tenun tradisional khas Lombok atau yang lebih sering disebut dengan songket. Selain hasil kerajinan yang telah dikenal luas tersebut masih ada potensi lain yang menarik di desa ini berupa kearifan masyarakat yang masih menjalankan aturan-aturan *(awiq-awiq)* desa yang tetap dipertahankan, seperti gadis yang tidak bisa membuat kain songket tidak boleh menikah, kawin lari serta tata cara adat perkawinan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat di desa tersebut sampai dengan mempertahankan rumah tinggal seperti yang telah tetapkan oleh nenek moyang jauh sebelumnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031 Desa Sukarara termasuk dalam Program Pengembangan Objek Wisata Budaya (Kehidupan Masyarakat) dengan produk kerajinan tenun tradisional dan kampung tradisional. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka desa Sukarara dapat diarahkan dengan pengembangan beberapa potensi yang ada, seperti pengembangan ekonomi lokal dengan kerajinan tenun, rumah-rumah tradisional, tradisi hidup masyarakat, kesenian tradisional, dan lingkungan alam yang asri sebagai salah satu tujuan wisata pedesaan di Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan kajian mengenai peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa Sukarara sebagai desa wisata. Sehingga dari peranan tersebut, akan diketahui persepsi yang berasal dari masyarakat. Melalui tahapan penyerapan aspirasi dari masyarakat ini, diharapkan akan memberikan masukan dan arahan perencanaan yang lebih baik dimasa yang akan datang pada pengembangan desa wisata di Desa Sukarara.

2. Ruang Lingkup

a. Lingkup Lokasi

Lingkup lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh wilayah administrasi Desa Sukarara yang terbagi menjadi 10 dusun. Selanjutnya

dalam penelitian ini masuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang secara administrasi berbatasan dengan :

- Utara : Desa Puyung, Nyerot dan Batutulis
- Selatan : Desa Batujai
- Timur : Desa Puyung
- Barat : Desa Ungga Kec.Praya Barat Daya dan Desa Labulia

b. Lingkup Materi

Dalam penelitian ini terdapat beberapa aspek yang akan menjadi fokus utama peneliti sebagai kajian yang terangkum dalam lingkup :

1. Deskripsi potensi sosial, ekonomi dan lingkungan Desa Sukarara;
2. Analisis partisipasi masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengatahui potensi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan Desa Sukarara untuk dikembangkan sebagai desa wisata.
b. Untuk mengetahui peran masyarakat Desa Sukarara dalam pengembangan desa sebagai desa wisata.

4. Manfaat

a. Menjadikan desa Sukarara sebagai salah satu destinasi wisata khususnya dalam hal wisata budaya di Kabupaten Lombok Tengah.
b. Terjaganya budaya masyarakat desa Sukarara.
c. Memberikan kemandirian bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi yang telah ada.

II. METODE

1. Metodedan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian deskriptif dengan proses analisa secara kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat dekripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu (Suryana, 2010:18).

2. Variabel Penelitian

Mengingat tema penelitian ini yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, maka variabel yang diamati dalam penelitian ini yakni masyarakat selaku partisipan langsung dilapangan serta beberapa potensi yang terdapat di DesaSukarara yang dapat menjadi modal utama untuk dikembangkan sebagai desa wisata berupa aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori

Menurut Gumelar S. Sastrayuda, 2010 jika desa wisata dikembangkan, maka desa wisata harus memiliki manfaat terhadap:

1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
2. Pemberdayaan Sosial Budaya
3. Pemberdayaan Lingkungan Desa

Wayan Pantiyasa, 2013 menjabarkan bahwa dalam penetuan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, dapat dipergunakan variabel sikap masyarakat terhadap pengembangan. Adapun variabel-variabel tersebut diantaranya :

1. Keamanan
2. Ketertiban

3. Kebersihan
4. Keindahan
5. Kesejukan
6. Keramahtamahan
7. Kenangan

Kajian teori mendasar yang lain dijabarkan oleh Faris Zakaria, 2014 yang menjelaskan beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pembentukan sebuah desa wisata, yakni :

Tabel 1. Kajian Teori Komponen Desa Wisata

No	Sumber Teori	Komponen Desa Wisata
1.	Gumelar (2010)	1. Keunikan, keaslian, sifat khas 2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa. 3. Berakitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung 4. Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.
2.	Puta (2006)	1. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya, khas daerah setempat. 2. Lokasi Desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual. 3. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya. 4. Kasesbilitas dan infrastruktur mendukung program Desa Wisata. 5. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.
3.	Prasiasa (2011)	1. Partisipasi masyarakat lokal 2. Sistem norma setempat 3. Sistem adat setetmpat 4. Budaya setempat

Sumber : Zakaria Faris, dkk 2014

Dengan demikian, melihat beberapa potensi di Desa Sukarara yang memiliki beberapa keunikan berupa pusat kegiatan kerajinan tenun, atraksi budaya, rumah tradisional serta pemandangan alam yang menarik, memungkinkan desa Sukarara dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata budaya di pulau Lombok.

3.2 Potensi Desa

1. Sosial (Atraksi Seni dan Budaya)

Desa Sukarara merupakan salah satu desa dengan matapencaharian pokok penduduknya yakni sebagai petani dimana diketahui potensi sumberdaya alam yang masih tersedia hingga saat ini. Disamping itu, penduduk Desa Sukarara juga dikenal sebagai salah satu desa pengrajin kain tenun tradisonal (songket). Seiring berkembangnya potensi pariwisata Pulau Lombok, maka Desa Sukarara juga mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu desa tujuan wisata dan berbelanja oleh-oleh khas Pulau Lombok.Adapun berdasarkan hasil pengamatan

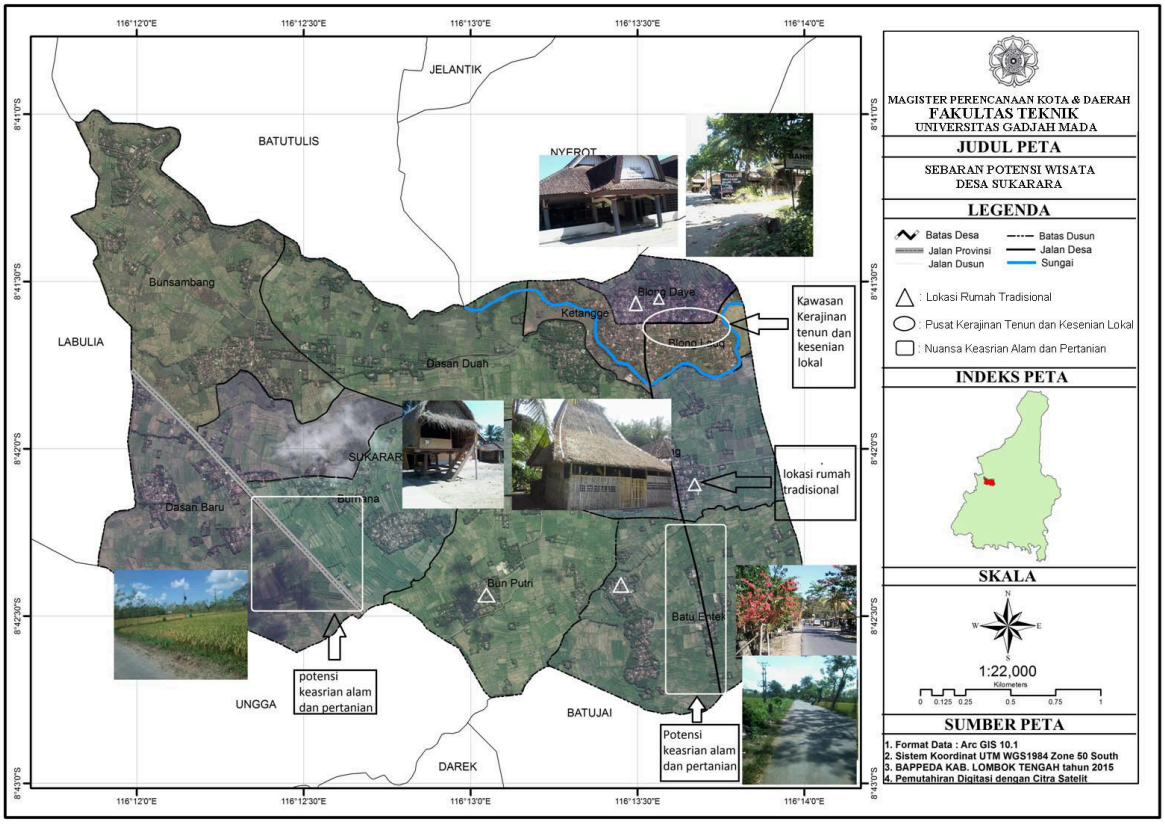
dilapangan terdapat beberapa potensi utama di desa Sukarara yang dapat dikembangkan untuk menuju desa wisata yakni sebagai berikut :

Tabel 2. Jenis dan Lokasi Potensi Wisata di Desa Sukarara

No.	Jenis	Lokasi
1.	Kesenian lokal	Dusun Blong Lauq
2.	Kerajinan Tenun	Dusun Blong Lauq dan Blong Daye
3.	Rumah Tradisional	Tersebar di semua dusun
4.	Keasrian alam dan pertanian	Tersebar di wilayah desa

Sumber : Hasil Survei, tahun 2015

Gambar berikut menjelaskan mengenai sebaran beberapa kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kegaitan atraksi wisata di Desa Sukarara :



Dari berbagai potensi tersebut, kegiatan menenun dan penjualanhasil tenun menjadi potensi utama desa Sukarara, sehingga banyak masyarakat yang menamakan desa Sukarara ini sebagai kampung tenun. Keberadaan pengrajin tenun tradisional tersebut menjadisalah satu daya tarik utama wisatawan berkunjung ke Desa Sukarara. Selain itu, dari potensi sosial budaya dengan keberadaan salah satu bangunan rumah tradisional suku *Sasak* serta tatanan adat istiadat yang masih dilestarikan hingga saat ini dapat menjadi nilai tambah bagi perkembangan Desa Sukarara untuk menjadi desa wisata di Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Berikut gambaran beberapa objek wisata yang dapat dinikmati di Sesa Sukarara :



2.a 2.b 2.c

Gambar 2.a. Tempat Kerajinan Tenun. 2.b. Rumah Tradisional, 2.c. Keasrian Alam dan Lingkungan Desa Sukarara

Adanya kegiatan pengrajin tenun di Desa Sukarara juga menjadi salah satu kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap pendapatan baru bagi penduduk desa. Hal ini dapat terlihat dari mulai berkembangnya *artshopp* dan *showroom* tempat pembuatan kain tenun yang tersebar di seluruh wilayah Desa Sukarara.

2. *Potensi Lingkungan*

Kondisi lingkungan yang dapat dilihat dari desa Sukarara yakni suasana alam desa yang hijau dengan dominasi lahan pertanian tertata dengan baik disepanjang jalan desa memberikan kesan keindahan dan kealamian desa Sukarara semakin terlihat. Suasana khas pedesaan tersebut, sampai dengan saat ini masih dijaga keberadaannya oleh masyarakat sebagai pembentuk cirri khas desa dan kegiatan utama masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Suasana pedesaan asri yang ini memberikan daya tarik lebih bagi desa Sukarara selain dari kegiatan sosial budaya dan ekonomi yang telah dijalankan masyarakat.

Selain itu, keasrian lingkungan permukiman masyarakat desa Sukarara cukup tertata dengan baik terlihat dari masih banyaknya tanaman-tanaman hijau sebagai penyejuk dan pohon buah yang terdapat di tiap rumah dan permukiman masyarakat. Kesejukan suasana alam pedesaan dengan cirri khas hijau akan terasa ketika memasuki jalan lingkungan dan gang-gang desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakrat desa Sukarara sepenuhnya memahami akan pentingnya menjaga keasrian lingkungan tanpa diarahkan oleh siapapun sehingga menjadikan suasana tersebut secara tidak langsung sebagai bentuk usaha masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan baik di rumah maupun lingkungan sekitar.



Gambar 3: Suasana Keindahan dan kealamian Desa Sukarara

3. *Potensi Ekonomi*

A. Usaha Ekonomi Rakyat

Usaha ekonomi yang digeluti masyarakat hingga saat ini sebagai pengerajin tenun dilakukan oleh 2.815 orang pengerajin yang tersebar di seluruh desa,

digeluti oleh sebagian besar kaum wanita dewasa dan pedagang sebagai pemilik *atrshop.*

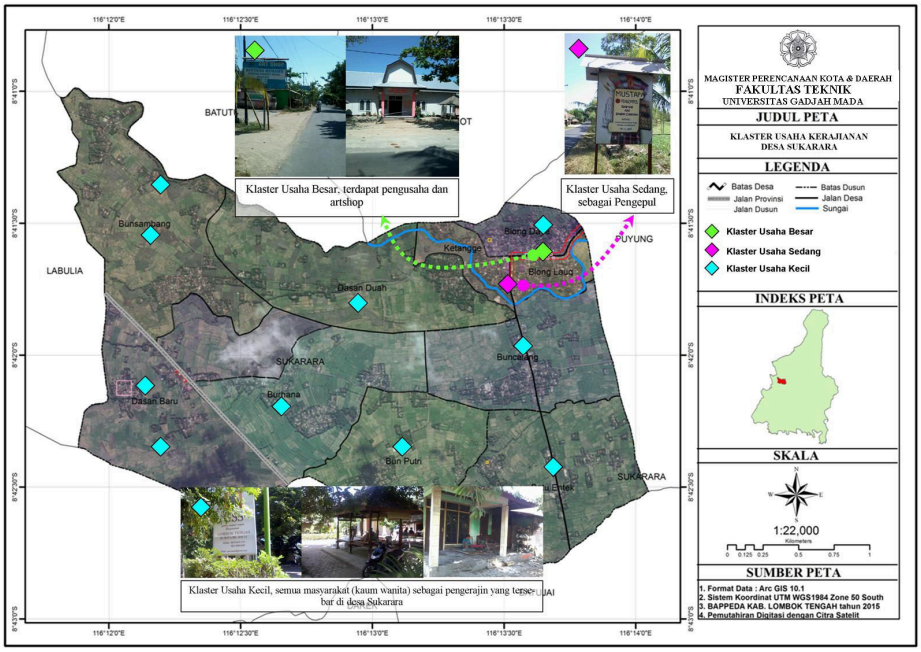
B. *Kemitraan*

Terdapat lembaga Asosiasi tenun dan KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan) sebagai tempat pengelola, perkumpulan dan peminjaman modal usaha pengerajin dan dibantu oleh lembaga keuangan milik swasta dan pemerintah seperti KUD.

C. *Klaster Usaha*

- Klaster kecil merupakan penenun di masing-masing ibu rumah tangga dengan kegiatan hanya membuat dan menjual langsung hasil kerajinan kepada pengepul.
- Klaster Sedang pengusaha yang mengambil barang tenunan dari masing-masing ibu rumah tangga (pengepul)
- Klaster Besar yakni pengusaha sekaligus pemilik artshop yang menjual langsung baranng hasil kerajinan kepada wisatawan.

Berikut gambaran klaster usaha kerajinan tenun yang tersebar di seluruh Desa Sukarara :



Gambar 4. Peta Sebaran Klaster Usaha Kerajinan Tenun Desa Sukarara

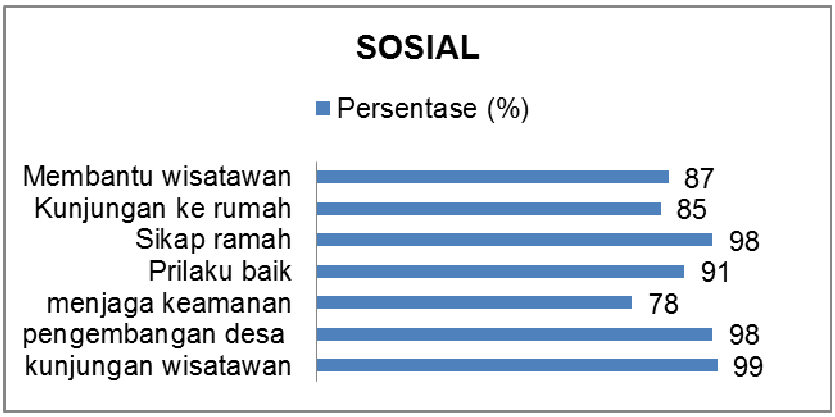
3.3 Partisipasi Masyarakat

Dari hasil analisa ditemukan bahwa masyarakat Desa Sukarara dapat berpartisipasi dalam pengembangan desa sebagai desa wisata. Masyarakat sangat mendukung kegiatan pengembangan pariwisata desa terbukti dengan peran yang dilakukan yakni mempertahankan ciri khas adat budaya terutama yang termuat dalam mengembangkan potensi kerajinan tenun yang dihasilkan.Hal ini didukung dengan hasil obsevasi diwilayah Desa Sukarara, bahwa secara keseluruhan penduduk setuju jika wisatawan datang ke Desa Sukarara.

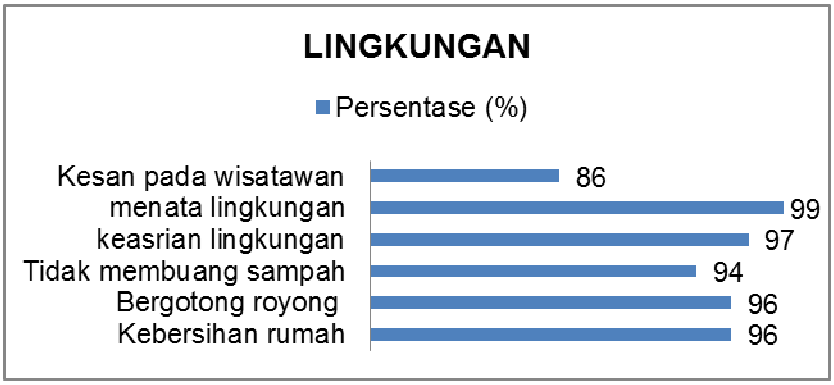
Selain itu dari dari hasil pengumpulan data melalui kuisioner terhadap 100 orang penduduk dari seluruh dusun di Desa Sukarara diketahui bahwa masyarakat memiliki kesiapan sebesar 84 % untuk pengembangan sebagai desa wisata. Kesiapan yang ditunjukkan dari aspek sosial sebesar 91% yang dilihat dari kesiapan atraksi budaya, sikap masyarakat terhadap kunjungan wisatawan. Aspek

lingkungan 95% mencakup kesiapan dari segi penjagaan lingkungan sekitar, dan aspek ekonomi 67% dengan kegiatan pertanian dan kerajinan yang dirasa sudah mampu menunjang kebutuhan keseharian dan kunjungan wisatawan.

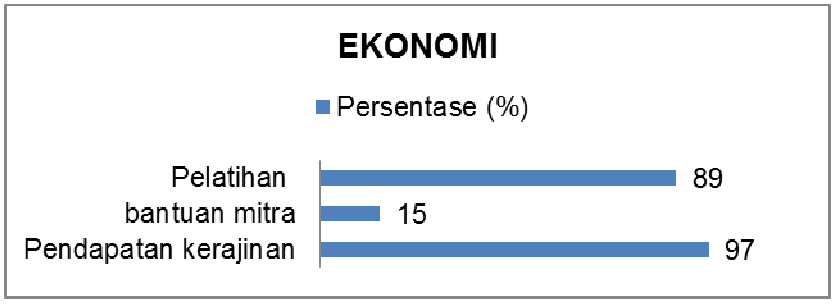
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dapat terimplementasikan mengingat kesiapan masyarakat yang cukup baik. Untuk lebih rinci mengetahui hasil persepsi masyarakat sesuai dengan variabel penelitian dapat dilihat pada gambar dan table tabel berikut :



Gambar 5. Grafik Persepsi Aspek Sosial Masyarakat Desa Sukarara



Gambar 6. Grafik Persepsi Aspek Lingkungan Masyarakat Desa Sukarara



Gambar 7. Grafik Persepsi Aspek Ekonomi Masyarakat Desa Sukarara

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pada aspek ekonomi belum secara optimal mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan desa dilihat dari 15 % masyarakat belum dapat bermitra dengan pihak luar baik guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu upaya dengan cara mengoptimalkan Koperasi Unit Desa dan lembaga keuangan/simpan pinjam desa untuk mengorganisir kegiatan permodalan usaha kerajinan.

Tabel 3. Persepsi Masyarakat dalam Upaya Pengembangan sebagai Desa Wisata

No.	Aspek	Persepsi Masyarakat
1	**Sosial**	- Masyarakat setuju jika dikunjungi oleh wisatawan sebagai desa wisata. - Masyarakat setuju jika desa Sukarara dikembangkansebagai desa wisata, - Masyarakat dapat menjaga keamanan wisatawan. - Masyarakat dapat membantu wisatawan jika dibutuhkan. - Masyarakat dapat bersikap baik terhadap wisatawan.
2.	**Lingkungan**	- Masyarakat dapat menerima kunjungan kerumah - Masyarakat dapat membantu wisatawan jika dibutuhkan. - Masyarakat siap menjaga kebersihan rumah setiap saat. - Masyarakat siap untuk gotong royong - Masyarakat siap tidak membuang sampah sembarangan - Masyarakat siap menjaga keasrian lingkungan. - Masyarakat siap untuk menata lingkungan dan pekarangan rumah. - Masyarakat dapat membuat kesan yang baik.
3.	**Ekonomi**	- Usaha dibidang kerajinan dapat membantu ekonomi - Menggunakan modal sendiri tidak dengan mitra - Pelatihan dapat membina model dan motif hasil kerajinan

Sumber: Hasil kajian, tahun 2015

Beberapa persepsi masyarakat dalam hal sosial, ekonomi dan lingkungan tersebut menujukkan bahwa masyarakat menginginkan kegiatan pengembangan desa Sukarara dijadikan sebagai desa wisata. Hal ini sesuai dengan pernyataan langsung masyarakat bahwa jika dikembangkannya desa Sukarara sebagai desa wisata akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tentunya hal ini sebagai respon yang baik dari masyarakat yang mengingikan perubahan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat. Namun, terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang perlu dipertimbangkan diantaranya :

A. Jika pengembangan sebagai desa wisata yang dilakukan, maka pengelolaan secara penuh dilakukan oleh masyarakat sebagai “pemilik” desa Sukarara. Sehingga tidak akan terjadi eksploitasi sumberdaya alam setempat dari luar yang dapat merusak lingkungan dan menguragi pemasukan masyarakat di bidang ekonomi akan berkurang terutama pada mata pencaharian utama pertanian.
B. Penjagaan keamanan seluruh desa yang belum optimal, disebabkan letak permukiman antar dusun yang cukup jauh akan menyulitkan penjagaan keamanan secara luas. Saat ini sering terjadi aksi pencurian pada malam hari dan secara kolektif masyarakat menjaga keamanan desa dengan dibantu pihak berwajib.
C. Koordinasi seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan demi kepentingan bersama, terutama untuk kegiatan wisata, karena kegiatan menjaga keamanan tentu tidak hanya dilakukan pada malam hari, namun untuk kegiatan sehari-hari

ketika wisatawan datang berkunjung ke desa Sukarara juga sangat penting untuk dilakukan.

D. Dengan adanya kegiatan pengembangan, masyarakat sangat berharap akan perbaikan yang lebih baik dan menyeluruh untuk seluruh wilayah desa, sehingga meningkatnya kepedulian dan kepekaan masyarakat untuk mendukung setiap kegiatan wisata yang dilakukan baik untuk desa dan terutama untuk diri sendiri.
E. Adanya penataan di lingkungan masyarakat sebagai desa wisata, tentu akan meningkatkan pula kerjasama seluruh masyarakat dalam membangun dan mengembangkan desa secara lebih aktif dan mandiri.
F. Sikap masyarakat yang menyatakan bahwa perilaku yang baik dalam menyambut wisatawan merdapat menjadi nilai tambah dari kegiatan pengembangan Desa Sukarara sebagai desa wisata. Adapun perilaku sehari-hari yang dapat ditunjukkan oleh masyarakat kepada wisatawan yakni menerima pengunjung dengan baik dan ramah, sebisa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wisatawan, dan sebagainya.
G. Bantuan usaha kerajinan tenun yang diharapkan dapat diberikan oleh lembaga keuangan lainnya sehingga dapat memaksimalkan usaha yang saat ini dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi kerajinan tenun.

Aktifitas masyarakat desa Sukarara yang saat ini sedang giat melakukan promosi usaha kerajinan kain songket, meupakan sebuah upaya untuk mengembangkan desa sebagai tujuan wisata belanja dan oleh-oleh pertama di Pulau Lombok, hal ini didukung dengan akses menuju desa yang mudah ditempuh dari Bandara Internasional Lombok. Untuk itu masyarakat harus berusaha berprilaku baik ketika wisatawan datang berkunjung ke desa maupun tempat usaha kerajinan, sehingga dengan begitu dapat memberikan kesan yang baik bagi wisatawan. Hal ini dilakukan agar wisatawan dapat kembali datang ke desa Sukarara mengenang prilaku baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjamu kedatangan wisatawan tidak hanya sekedar untuk membeli cendramata namun juga untuk kenangan terhadap sikap maupun prilaku baik yang diberikan oleh masyarakat.

Aspirasi masyarakat tersebut dapat menjadi sebuah arahan bagi upaya pengembangan kedepan, dimana masyarakat ialah sebagai pelaku utama kegiatan, pemerintah dan pihak swasta hanya sebagai fasilitator. Selain itu, perencanaan pengembangan yang akan dilakukan ke depan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus melakukan pendekatan secara langsung untuk mengetahui aspirasi masyarakat desa sebagai upaya pelibatan secara aktif.

IV. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yakni :

1. Desa Sukarara dapat dikembangkan sebagai desa wisata dengan beberapa potensi utama yakni dari aspek sosial budaya keberadaan pengrajin tenun, rumah tradisonal dan adat istiadat yang masih dijaga hingga saat ini, sedangkan potensi ekonomi mulai berkembang dengan adanya *artshopp* dan *showroom* yang menjadi sarana penduduk dalam memasarkan hasil kerajinan sehingga dapat menjadi alternatif pemasukan baru bagi masyarakat, serta potensi keasrian dan kebersihan lingkungan yang menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Sukarara.
2. Berdasarkan hasil persepsi dalam kuisioner yang diajukan untuk mengetahui tingkat partisiapasi masyarakat, dapat simpulkan bahwa secara keseluruhan masyarakat setuju dalam mendukung pengembangan desa Sukarara sebagai salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

4.2 *Saran*

1. Kepada Pemerintah
   Perlu dilakukannya pelaksanaan kegiatan pengembangan desa wisata lebih cepat serta perlu dilakukannya sosialisasi secara intensif kepada masyarakatterkait tahapan pengembangan desa wisata sebagai upaya peningkatan kemajuan kepariwisataan di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Kepada Masyarakat
   Dalam hal partispasi, sebaiknya masyarakat dapat membentuk suatu komitmen yang kuat agar pengembangan yang akan dilakukan tetap berlangsung sesuai dengan keinginan bersama. Sebab pengembangan desa wisata tidak akan berlangsung tanpa adanya komitmen dalam satu tujuan untuk mengembangkan desa menjadi lebih baik.
3. Kepada Akademisi
   Untuk pengembangan karakter desa yang lebih spesifik, perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam aspek ekonomi mengingat keunggulan atau potensi desa yang cukup besar dari bidang ekonomi yang terkait dengan perdagangan dan jasa hasil kerajinan tenun Songket, serta aspek sosial budaya terkait dengan keberadaan warisan sejarah (rumah tradisional) serta adat istiadat masyarakat yang masih terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Destha Raharjana, T. 2010. Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau. Jurnal Kawistara. Program Studi Kajian Pariwisata UGM.

Mudiyanto, Eko. 2011. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Karanggeneng, Purwobinangun, Pakem, Sleman. Staf Pengajar Program Studi Agribisnis UPN Veteran Yogyakarta. Jurnal SEPA, Vol 7. No.2.

Pantiyasa, Wayan I. 2013. Strategi Pengembangan Potensi Desa Menjadi Desa Wisata di Kabupaten Tabanan. Jurnal Ilmiah Hospitality Management, Vol. 4 No. 1. Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah.

Sastrayuda, S. Gumelar. 2010. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata. Handout Mata Kuliah ConceptResort and Leasure.

Suryana, 2010. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta. Universitas Pendidikan Indonesia.

Zakaria, Faris dkk. 2014. Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Jurnal Teknik POMITS, Vol. 3 No. 2. Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS Surabaya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BERBASIS BUDAYA LOKAL

Kariaman Sinaga, Suwardi Lubis, Marlon Sihombing, Ritha F. Dalimunthe
Program Studi S3 Perencanaan Wilayah, USU Medan
e-mail: sinagakariaman@yahoo.com

Abstrak

Dalam pengembangan destinasi wisata suatu daerah sangat diperlukan adanya implementasi kebijakan yang dapat menselaraskan antara program pembangunan secara nasional dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerah.Kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sebagai regulator penting untuk mengikutsertakan swasta dan masyarakat agar pengembangan destinasi wisata yang dilakukan dapat berjalan secara efektif.Menghadapi persaingan global saat ini, pengembangan wisata berbasis budaya lokal memiliki peluang besar karena kecenderungan negara-negara maju untuk memenuhi kebutuhan rohani setelah terpenuhinya kebutuhan materi.Namun dalam pengembangan destinasi wisata yang dilakukan harus tetap mengedepankan nilai-nilai budaya lokal sebagai identitas atau perwujudan dari nasionalisme.Untuk keberhasilan pengembangan destinasi wisata berbasis budaya lokal perlu didukung oleh kebijakan publik,sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan pelestarian budaya.Dalam penerapan kebijakan publik menuntut adanya aspek kemauan politik,aspek keadilan,dan aspek koordinasi.Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya lokal sejalan dengan konsep pengembangan wilayah yang memerlukan pemahaman tentang kondisi fisik geografis,sosial,ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda antar wilayah,sehingga penetapan kebijakan pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi,potensi,dan permasalahan pada suatu wilayah.

Kata Kunci:Implementasi,Pengembangan,Kebijakan,Destinasi Wisata,Budaya Lokal

I. Pendahuluan

Keberhasilan pengembangan destinasi wisata yang dilakukan secara nasional maupun daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, swasta, dan masyarakatnya untuk memahami dan memaknai potensi budaya yang ada di daerahnya.Pemahaman terhadap budaya merupakan kunci keberhasilan pengembangan destinasi wisata dalam persaingan global (Hana Panggabean et all.2014:13).Hal ini sejalan semangat pembangunan nasional di berbagai sektor yang berhubungan dengan nasionalisme.

Aktivitas kepariwisataan yang berbasis budaya menjadi peluang untuk memperkuat budaya yang merupakan kekayaan nasional sekaligus menjadi nilai jual yang dimiliki suatu masyarakat untuk dapat bersaing dalam bidang pariwisata.Hal ini juga merupakan strategi untuk menghindari dampak negatif dari kegiatan pariwisata itu sendiri karena dalam pengembangannya tetap memperhatikan nilai-nilai budaya.

Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya lokal menjadi salah satu bagian penting untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.Budaya lokal merupakan bagian dari inti aktivitas pariwisata yang merupakan keinginan setiap wisatawan yaitu: *to see*, *to learn*, *to taste*, *and to experience of something* di suatu detinasi.Wisatawan memiliki keinginan untuk belajar tentang adat istiadat dan kebiasaan lokal serta mengalami berbagai kegiatan budaya yang akan menjadi pengalaman pribadinya.

Keberhasilan Provinsi Bali dalam mengelola destinasi wisata merupakan kesuksesan dari pemerintah, swasta dan masyarakatnya untuk menjaga dan

memajukan nilai-nilai budaya.Melalui pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya lokal akan diperoleh keuntungan ganda yaitu selain mendapatkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya juga mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan budaya yang ada pada masyarakatnya.

Sebagai suatu peluang, bahwa negara-negara yang telah maju perekonomiannya ditandai dengan terpenuhinya akan kebutuhan barang-barang mewah akan beralih kepada kebutuhan yang bersifat rohani seperti keinginan untuk mencari pengalaman atau pengetahuan baru tentang budaya masyarakat lain (H.Oka, 1982: 91-92).Dengan demikian memajukan destinasi wisata budaya mejadi peluang besar untuk memanfaatkan tingkat kebutuhan masyarakat pada negara-negara maju untuk mendapatkan peningkatan pendapatan daerah dan masyarakatnya.

Peluang dari negara-negara maju harus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan devisa dan kesejahteraan masyarakat secara luas.Untuk memaksimalkannya maka dilakukan kebijakan ditingkat nasional maupun di tingkat daerah atau kebijakan yang bersifat top down maupun kebijakan yang bersifat botton up.Hal ini untuk menjawab tantangan implementasi yang ternyata lebih berat dibandingkan pada tahap pengambilan keputusan atau secara politis.Hal ini berdasarkan pada pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pariwisata yang hingga saat ini yang secara umum belum menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat tetapi lebih mensejahterakan sebagian masyarakat saja.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, pengembangan destinasi pariwisata mengalami dilema antara tuntutan secara nasional dengan tuntutan secara internasional.Oleh karenanya dibutuhkan kebijakan berupa regulasi yang dapat menjaga budaya lokal agar tetap menjadi acuan atau pedoman dalam proses pengembangan destinasi wisata.Tanpa adanya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi pedoman dalam pengembangan maka pengembangan yang dilakukan tidak memiliki karakter dan lemah dalam keberlanjutannya.

Pengembangan wilayah (regional develovment) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup suatu wilayah.Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berbeda antar wilayah, sehingga penetapan kebijakan pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan pada wilayah yang bersangkutan.(Andri,2006).

II. Pembahasan

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan wisata berbasis budaya lokal agar menjadi daya tarik wisata meliputi:kebijakan publik, SDM, partsipasi masyarakat, dan pelestarian budaya.

1.Kebijakan Publik

Secara umum dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi dan informasi telah menjadikan wilayah atau suatu negara berada dalam persaingan global yang menuntut kesiapan atau daya tahan yang tinggi untuk dapat menghadapi persaingan.Maka sangat diperlukan strategi pengembangan budaya yang sejalan dengan pengembangan destinasi pariwisata yang unik sesuai dengan keinginan wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.Hal ini berkaitan dengan tuntutan kemampuan dalam menetapkan kebijakan yang dapat menghadapi persaingan global tersebut.

Pengembangan destinasi wisata budaya lokal akan memperkuat rasa kebangsaan atau cinta kepada tanah air.Siagian (1994) dalam Erda Rindarsih (2015:23) menyatakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu

bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).Kebijakan yang dilakukan secara lokal maupun nasional merupakan kebijakan untuk memperkuat nasionalisme.

Sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam maka indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat memanfaatkan kekayaan budaya bangsa.Melalui kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan pemanfaatannya potensi budaya bangsa pada sebesar-besarnya kepentingan publik.Dalam penerapannya sangat diperlukan adanya sinergitas yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan kebijakan pengembangan destinasi wisata adalah:

a.Aspek Keadilan

Suatu kebijakan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat dengan dikeluarkannya suatu peraturan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi.Hal ini diperlukan agar program yang dijalankan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat.Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat merupakan subjek dan sekaligus objek dari pengembangan destinasi pariwisata.Masyarakat akan merasa ikut bertanggungjawab atas program pengembangan destinasi wisata yang dijalankan pemerintah apabila aturan yang ditetapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Untuk itu, dalam proses perumusan kebijakan harus mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar dapat diterima untuk dijalankan.Dengan mengikutsertakan masyarakat dan swasta dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata maka aturan yang akan dilaksanakan juga akan dengan mudah dipahami untuk dilaksanakan.

Dalam menegakkan asas keadilan, kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan destinasi wisata dapat di bedakan berdasarkan pada wilayah yang menjadi sasaran.Kebijakan publik bervariasi menurut wilayah yang diintervensi, tujuan yang ingin dicapai, kelompok sasaran yang dituju, dan substansi perubahan yang diharapkan.(Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti,2012:24).Dalam hal ini maka pemanfaatan potensi budaya yang ada pada suatu wilayah harus diikuti dengan aturan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakatnya.

Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antar wilayah dalam pembangunan kepariwisataan.Bagi suatu daerah yang telah maju kepariwisataannya harus diperlakukan berbeda dengan daerah yang belum maju kepariwisataannya agar tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah.Hal ini juga berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan amanat dari pembangunan secara nasional.

b.Kemauan Politik (Political Will)

Suatu kebijakan merupakan hasil dari proses politik yang berlangsung baik pada level nasional maupun level daerah.Hal ini berkaitan dengan pilihan sektor pembangunan yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan suatu daerah yang harus melewati suatu proses politik.Pada situasi tertentu kebijakan pembangunan destinasi wisata lebih diarahkan pada bidang yang sesuai dengan keinginan pemerintah sebagai regulator.

Sejalan dengan luasnya sektor pembangunan yang akan dilakukan di Indonesia maka prioritas terhadap pembangunan pariwisata baik yang dilakukan secara nasional maupun daerah merupakan sektor yang sangat strategis.Hal ini disebabkan karena pembangunan pariwisata memiliki *multiflier effect* yang sangat tinggi sehingga akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.

c.Koordinasi

Salah satu aspek krusial yang paling mempengaruhi tumbuh kembang industri pariwisata adalah masalah peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pariwisata.Peraturan dan perundang-undangan pariwisata mencakup aspek yang sangat luas dan bersifat lintas sektor antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, seperti:a) aturan mengenai keimigrasian yang terkait dengan paspor dan visa yang merupakan domain kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b) aturan mengenai *international aviation agreements* yang merupakan domain Kementerian Perhubungan dll.(Judisseno, 2017:96).

Kordinasi yang dilakukan antar kementerian juga mencakup pengembangan destinasi wisata budaya yang akan menjadi daya tarik kunjugan wisata.Kunjungan wisatawan asing masih dominan pada Bali sebagai tujuan wisata menunjukkan kualitas kordinasi baik secara nasional dan daerah dapat dikatakan masih rendah.

Dalam kaitannya dengan pengembangan destinasi wisata, pembangunan darah bukan hanya merupakan bentuk yang lebih kecil dari rencana pembangunan nasional.Pembangunan daerah mempunyai watak atau ciri tersendiri, serta memiliki pola dan *spirit* yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.Itulah sebabnya pembangunan daerah seyogyanya dilihat sebagai sub-sistem pembangunan nasional.Jadi bukan sekedar serpihan dari siistem pembangunan nasional.Sebagai suatu sub-sistem, pembangunan daerah memiliki kebulatan tersendiri, yang bersifat fungsional bagi keseluruhan sistem pembangunan nasional.(Usman, Sunyoto, 2010:13).

Kegagalan menempatkan pembangunan daerah sebagai subsistem dari keseluruhan sistem pembangunan nasional, bukan hanya mempersulit untuk memperoleh hasil yang optimal, melainkan juga dapat merusak proses pembangunan nasional.Dengan demikian, perencanaan dan implementasi pembangunan daerah cukup kompleks, mengingat di samping kebutuhan mengakomodasi kepentingan-kepentingan nasional yang berada di daerah, tetapi juga kemampuan mengidentifikasikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah.

Maka dalam pengembangan destinasi wisata sebagai bagian dari program pembangunan nasional dapat dikoordinasikan agar program yang dijalankan dapat memenuhi aspirasi dari masyarakat.Koordinasi juga sangat diperlukan dengan instansi lainnya untuk menghindari adanya duplikasi program, imitasi rencana, dan dapat saling tular dalam keunggulan atau strategi pembangunan pada berbagai instansi.

2.Sumber Daya Manusia.

Meskipun dalam proses penetapan kebijakan telah melaui proses yang mengikutsertakan masyarakat atau kebijakan yang membangun sinergitas namun tetap saja program pengembangan destinasi wisata suatu wilaya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia baik sebagai aparatur pemerintah dan juga masyarakatnya.Sejalan dengan konsep pengembangan wilayah bahwa pembangunan suatu wilayah merupakan sesuatu yang kompleks sehingga keberhasilannya didukung oleh banyak pihak.

Pengembangan destinasi wisata perlu didukung oleh sumber daya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap wisatawan,Pelayanan yang dimaksud termasuk layanan birokrasi yang dikendalikan oleh pemerintah (Kang Lin Peng: 2016).Pergeseran dari industri agraris kepada kewirausahaan harus didukung oleh sumber daya manusia dengan pendekatan interdispliner untuk mempelajari dan mengembangkan sistem pelayanan menuju yang lebih baik.

Pengembangan destinasi wisata berpusat pada manusia (people centered develovment) untuk peningkatan pengelolaan sumber daya yang ada di daerah yang menekankan pada pembelajaran dan strategi perumusan program.Tujuan yang ingin di

capai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya.Dalam hal ini, Moelyarto (1999) mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat meliputi:

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi masyarakat setempat dibuat ditingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Toleransi yang besar terhadap adanya variasi.Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang dengan sentralistik.
4. Budaya kelembagaannya ditandai dengan adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.
5. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara para pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat dan pemerintah lokal yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada.

3.Partisipasi Masyarakat

Program pembangunan pariwisata yang baik harus mengikutsertakan beberapa elemen berikut: konservasi atas biodiversiti berkelanjutan, mengikutsertakan masyarakat lokal, memberikan intrepretasi dan menambah pengalaman, mendorong melakukan aksi positif, mendorong berkembangnya industri kecil, konservasi sumberdaya tidak terbarukan, memfokuskan pada partisipasi lokal dan kesempatan berusaha pada masyarakat pedesaan.(Wood,2002, dalam Erda Rindarsih 2015:23).

Masyarakat merupakan tuan rumah (host) yang akan mengadapi wisatawan, sehingga masyarakat harus memiliki kesiapan untuk menjadi tuan rumah yang baik.Hal ini akan memberikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung untuk melihat budaya masyarakat.Selanjutnya sinergitas antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat menentukan dalam memajukan atraksi budaya yang menjadi salah satu ketertarikan seseorang untuk mengunjungi suatu destinasi wisata.

Nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam masyarakat merupakan asset atau potensi kebijakan yang dapat diadopsi dalam pengembangan alternatif dan rekomendasi kebijakan.Untuk dapat memasukkan nilai-nilai budaya lokal yang mulia maka pemerintah harus mengembangkan sikap demokratis dan melibatkan berbagai pihak.Dengan demikian demokratisasi dan partisipasi akan dikembangkan dengan amat luas dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata.

Partisipasi merupakan komponen dasar dari pemerintahan yang demokratis sehingga dalam menghasikan kebijakan harus memberikan kesempatan yang luas kepada warganya.Partisipasi dapat diperoleh melalui diskusi, pembelajaran, atau negosiasi dan kerjasama agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara efektif (Benedetto Grazella all.et.,2016: 38-48).

Partisipasi dimulai dari perencanaan pembangunan wilayah yang merupakan upaya terorganisir untuk menetapkan sasaran pembangunan ekonomi wilayah, mengumpulkan dan menganalisis informasi, membangkitkan dan mengevaluasi berbagai aktivitas dalam kerangka pembangunan wilayah yang strategis (Sirojuzilam: 2008).Dalam hal ini perencanaan pemanfaatan sumber daya publik yang benar-benar seksama baik sektor swasta petani, pengusaha kecil, organisasi volunter, koperasi dan perusahaan besar harus turut ambil bagian dalam proses perencanaan.

4.Pelestarian Budaya

Budaya merupakan potensi yang sangat tiggi nilainya bagi suatu bangsa karena identitas suatu bangsa merupakan acuan dari pembangunan yang dijalankan oleh suatu negara.Kebijakan yang berkaitan dengan perundang-undangan dalam pengembangan destinasi wisata harus berdampingan dengan nilai-nila- budaya yang ada di masyarakat.

Untuk membangun destinasi wisata sangat diperlukan keselarasan dengan budaya masyarakat lokal, karena melalui keselarasan tersebut maka program pengembangan destinasi wisata akan berjalan secara berkelanjutan.Budaya masyarakat yang dimaksud mencakup pemberdayaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi, bahasa, kesenian, adat istiadat, yang menuntut adanya penguatan melalui peraturan perundang-undangan sebagai suatu kebijakan.

Pengembangan destinasi wisata tidak hanya berorientasi pada ekonomi semata-mata namun tetap memperhatikan kelestarian budaya sesuai dengan idiologi bangsa.Menurut Amartya Sen dalam Warjio Ph.D (2016:66) menyatakan bahwa pembangunan harus dilihat sebagai kebebasan.Menurut Sen dengan menekankan pada kemerdekaan manusia, membuat pandangan ini berbeda dengan pandangan-pandangan sempit pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, industrialisasi, kemajuan teknologi, dan modernisasi sosial.

Sejalan dengan pelestarian budaya diatur dalam PP No.43 tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan dengan: 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swwakelola oleh desa, 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, 3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas,potensi, dan nilai kearifan lokal, 4)Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa dan Pembangunan Desa,6) Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalampenyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa, 8) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa, 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

III. Simpulan

1.Pengembangan destnasi wisata berbasis budaya lokal harus didukung oleh kebijakan yang lahir dari hasil kesepakatan antara pemerintah, swasta (pengusaha), dan masyarakat.
2.Kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, menjalin koordinasi antar instansi, dan menunjukkan kemauan yang kuat untuk memajukan wisata berbasis budaya lokal.
3.Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat berinovasi sesuai dengan pergeseran dari kehidupan pertanian agraris menuju pada pelayanan pariwisata yang memiliki dampak yang kluas terhadap kesejahteraan masyarakat.

4.Pengembangan destinasi wisata sesuai dengan pengembangan suatu wilayah yang merupakan bagian dari perencanaan wilayah untuk memanfaatkan suatu wilayah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IV. Daftar Pustaka

Andri, 2006, Perspektif Pembangunan Wilayah Pedesaan, Jurnal Inovasi, Vol 6 (18)

Agus, Et.al.2012.Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Bonedetto Grazella all.et,2015.Procedia Environmental Sciences, Elsevier Bv,Ecosmart, Http:// creativecommos.org./licences.Vol.28.No.6.2016 pp.125-1244

Damanik,Janianton,Et.all.2015.Membangun Pariwisata Dari Bawah,Gajah Mada University Press,Yogyakarta

Judisseno, Rimsky K,2017.Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataan,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moeljarto.1999.Politik Pembangunan Sebuah Analisis,Konsep,Arah dan Strategi, Tiara Wacana Yogya,Yogyakarta.

Panggabean,Hana.Et.al.2014.Kearifan Lokal Keunggulan Global, Elex Media Komputindo,Jakarta.

Peng.Kang Lin.2016.Inovasi Wirausahawan Sosial Melalui Aktivisme,Jurnal Perhotelan Kontemporer, Vol.28 ISS 6 Hal.1225-1244

Peraturan Pemerintah No.43 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sirojuzilam.2008.Disparitas Ekonomi & Perencanaan regional.Pustaka Bangsa USU Press.Medan

Usman, Sunyoto,2010. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar.

Warjio, Ph.D, 2016. Politik Pembangunan; Paradoks, Teori, Aktor, dan Idiologi,PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Tema 4

PENGELOLAAN LINGKUNGAN
TERHADAP KEPARIWISATAAN

Konfigurasi Kota Yang Efektif Untuk Memitigasi Urban Heat Island (UHI) Melalui Koridor Ventilasi di Kota Bandung, Indonesia

Eliana[1], dan Teti Armiati Argo[1]

[1]Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung, Bandung
Email: eliana@students.ac.id; targo@pl.itb.ac.id

ABSTRAK

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa, 54 persen dari penduduk dunia menetap di perkotaan pada tahun 2014. Figur ini terus meningkat seiring dengan urbanisasi dan juga menyebabkan pertumbuhan kota secara vertikal dan kenaikan urban heat island (UHI). Adakah solusi untuk mengatasi kepadatan kota tanpa mengkompromikan kenyamanan termal penduduknya? Penelitian yang ada mengklaim pentingnya konfigurasi bangunan dalam memitigasi faktor panas. Namun studi yang ada untuk memitigasi UHI melalui konfigurasi bangunan untuk menciptakan koridor ventilasi umumnya dilakukan pada skala kecil dan tidak pada skala perencanaan kota. Maka penelitian akan melakukan pendekatan pada skala kota dengan mengkombinasikan berbagai data seperti tata guna lahan, suhu area, rencana tata ruang, dan konfigurasi bangunan. Kota Bandung sebagai area perkotaan yang berkembang pesat akan menjadi fokus pada penelitian ini. Pertimbangan mengenai konfigurasi bangunan dan ventilasi kota yang umumnya terlewatkan pada tahap awal perencanaan akan bermanfaat bagi kenyamanan termal dan konsumsi energi penduduk kota di kemudian hari. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perencana dan pembuat kebijakan dalam merencanakan pembangunan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan harus menjadi pertimbangan bagi perencana untuk memastikan baik pertumbuhan ekonomi maupun lingkungan yang baik bagi kehidupan generasi mendatang.

Kata kunci: berkelanjutan, pembangunan; Urban Heat Island (UHI); koridor ventilasi; konfigurasi kota

I. PENDAHULUAN

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, 54 persen populasi dunia berada di daerah perkotaan pada tahun 2014 dan penduduk perkotaan mengkonsumsi dua pertiga penggunaan energi global. Perkembangan yang meningkat karena urbanisasi juga telah meningkatkan Urban Heat Island (UHI) (Wong, Nichol, To, & Wang, 2010), yang menyebabkan meningkatnya konsumsi energi untuk mencapai kenyamanan termal (Stan Cox, 2012). Jika kondisi ini terus berjalan seperti yang mereka lakukan sejauh ini, apa yang akan terjadi dalam sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan? Kepadatan yang terus meningkat dan suhu yang terus meningkat, apakah ini akan menyebabkan malapetaka yang lebih besar? Adakah solusi untuk mengatasi hal ini tanpa mengorbankan kenyamanan termal penduduk perkotaan?

Penelitian yang ada mengklaim peran penting konfigurasi bangunan dalam mengurangi faktor panas (Ng, Yuan, Chen, Ren, & Fung, 2011; Unger, 2004; Yim, Fung, Lau, & Kot, 2009), yang akan menghasilkan Pengurangan konsumsi energi dan implikasi signifikan terhadap keberlanjutan global. Pembangunan berkelanjutan harus menjadi pertimbangan perencana saat merencanakan kota untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup yang baik bagi generasi mendatang. Konfigurasi yang efektif mencakup poros perkotaan, celah antara bangunan, tinggi

bangunan dan volume, dan sebagainya. Namun, studi terkini mengenai mitigasi pulau panas perkotaan melalui koridor angin sebagian besar telah dilakukan dalam skala kecil dan tidak dalam tahap perencanaan kota (Blocken, Janssen, & van Hooff, 2012; Rajagopalan, Lim, & Jamei, 2014; Wong, Nichol, Untuk, & Wang, 2010). Penting bagi perencana untuk menilai skala perkotaan untuk menentukan kualitas akhir kota (Shi, Zhu, Duan, Shao, & Wang, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengetahuan dengan menilai koridor angin pada skala perkotaan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan menggabungkan lebih banyak data seperti penggunaan lahan; suhu tanah; Rencana tata ruang; dan konfigurasi perkotaan.

Sebagian besar kota muncul dengan cepat di Asia dan Afrika dimana hampir 90% peningkatan populasi perkotaan di dunia berada (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan, 2014). Hanya terdapat panduan terbatas tentang pembangunan perkotaan untuk negara-negara berkembang di Asia dan Afrika dimana kawasan perkotaan berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini membahas konfigurasi perkotaan untuk mengurangi UHI, dengan fokus di Kota Bandung di Indonesia sebagai salah satu daerah perkotaan yang berkembang pesat di negara berkembang di Asia. Mengingat konfigurasi perkotaan di sepanjang koridor angin pada tahap awal perencanaan akan menjadi manfaat berharga bagi kenyamanan termal dan penggunaan energi penduduk perkotaan di masa depan. Dalam praktiknya, penelitian ini berharap bisa menjadi masukan berharga bagi perencana dan pembuat kebijakan saat merencanakan pembangunan kawasan perkotaan untuk memastikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

II. METODE

A. Gambaran Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konfigurasi bangunan efektif sepanjang koridor ventilasi untuk mengurangi panas kota pulau. Studi ini dikategorikan sebagai rancangan studi cross sectional dan non eksperimental. UHI di daerah tersebut telah dikonfirmasi oleh penelitian sebelumnya, penulis menelusuri konfigurasi bangunan yang bisa membentuk efek pulau panas di daerah tersebut. Kota Bandung dipilih sebagai studi kasus untuk mewakili kota tropis khas di benua Asia dan Afrika dengan kepadatan penduduk yang berkembang pesat. Perancangan studi kasus digunakan untuk memahami fenomena lebih detail, fokus, dan holistik. Penelitian tentang konfigurasi angin dan perkotaan untuk mengurangi efek panas pulau pada perencanaan kota kota Bandung akan menggunakan metode penelitian campuran. Meski sebagian besar penelitian akan bersifat kualitatif, terutama dalam menarik kesimpulan.

Desain penelitian didasarkan pada pengumpulan dan sintesis data sekunder dan primer. Pada awal penelitian, beberapa data sekunder akan dikumpulkan dari instansi pemerintah. Dengan menggunakan rencana angin dan tata ruang yang ada, penulis akan menentukan potensi angin koridor di kota Bandung. Penelitian sebelumnya mengenai suhu permukaan di kota Bandung kemudian digabungkan dengan penggunaan lahan dan potensi wind corridor untuk menemukan koridor dengan suhu tinggi. Akhirnya, populasi bangunan di daerah bermasalah (potensi angin koridor dengan suhu tinggi) akan dipilih sebagai populasi penelitian. Sebuah studi lapangan dilakukan untuk mengamati konfigurasi bangunan di daerah bermasalah pemodelan gabungan dan kontras dengan pedoman kualitatif yang dikumpulkan melalui studi literatur.

B. Pengumpulan Data

Data sekunder (angin yang berlaku, rencana tata ruang, pulau panas di kota Bandung) dikumpulkan dari instansi pemerintah dan penelitian sebelumnya, sedangkan data primer (konfigurasi bangunan) dikumpulkan melalui observasi lapangan. Untuk memastikan data sekunder valid dan akurat, masing-masing data sekunder akan diambil dari instansi pemerintah sesuai keahliannya. Sedangkan data primer dikumpulkan dari observasi lapangan karena penulis meyakini bahwa metode ini akan memberikan informasi lebih detail, lebih kaya, dan akurat di lapangan.

Populasi penelitian untuk pengamatan lapangan akan diambil dari bangunan di daerah koridor ventilasi perkotaan potensial dengan suhu permukaan tinggi. Alih-alih memilih sampel acak, area ini terbatas pada jumlah yang mungkin untuk seluruh bangunan di area tersebut. Hal ini karena setiap bangunan di daerah yang dipilih saling berhubungan dalam menciptakan fenomena UHI, oleh karena itu koridor ventilasi harus diperhatikan secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap bangunan di daerah tersebut akan diidentifikasi dan diklasifikasikan lebih lanjut sesuai indikator.

C. Analisa

Pertama, untuk mengetahui potensi koridor ventilasi di kota Bandung, beberapa jalur arteri akan dipilih dari rencana tata ruang kota Bandung sesuai data angin yang berlaku. Koridor ventilasi yang berpotensi dipilih melalui data suhu permukaan dan data penggunaan lahan untuk mengetahui daerah dengan suhu tertinggi sepanjang koridor dan kemungkinan penggunaan lahan yang meningkatkan suhu daerah.

Selanjutnya, pengamatan lapangan dilakukan di daerah bermasalah untuk menemukan konfigurasi bangunan yang ada. Hasilnya kemudian akan dilanjutkan dengan pemodelan dan klasifikasi sesuai dengan beberapa indikator dan variabel, sebagai berikut: volume elemen built-up (tinggi, luas permukaan, bentuk bangunan, permeabilitas bangunan), jarak elemen built-up, dan lebar koridor ventilasi.

Langkah terakhir adalah dengan membandingkan data dengan pedoman kualitatif untuk memahami konfigurasi di situs yang berkontribusi terhadap fenomena pulau panas perkotaan. Hasil temuan ini diharapkan dapat menemukan konfigurasi bangunan yang efektif untuk mengurangi fenomena pulau panas di sepanjang koridor ventilasi dalam konteks negara tropis. Pedoman kualitatif diambil berdasarkan Penilaian Ventilasi Udara untuk Pembangunan (lihat Tabel1 dan Tabel 02) yang merupakan panduan teknis yang disediakan oleh Departemen Perencanaan Hong Kong untuk pengembangan skala besar pada tahap awal sebelum melakukan penilaian ventilasi udara setelah perancangan selesai (Ng, 2009).

Tabel 1. Panduan Kualitatif Tingkat Distrik

Tingkat Distrik	
Susunan Tapak	• Pembagian tapak untuk menghindari tapak yang panjang dan linier
Jalur Udara	• Menyediakan jalur udara sepanjang arah angin umum • Jalur udara berupa jalur terbuka melalui perkotaan dengan kepadatan tinggi/bangunan tinggi • Menghubungkan area fasilitas publik, setback bangunan, dan area tanpa bangunan untuk membentuk jalur udara
Orientasi Jalan, Pola, dan Pelebaran	• Menyejajarkan arah jalan utama/ jalan besar atau hingga 30 derajat dari arah angin umum • Panjang grid jalan yang tegak lurus dari arah angin umum sependek mungkin

	• Memperkenalkan skema pelebaran jalan dan menyelaraskan bagian depan plot pembangunan yang lebih panjang di sepanjang arah angin yang ada • Memperkenalkan setback dan area tanpa bangunan terutama bagi tapak besar yang menghadap ngarai perkotaan yang sempit
Tapak di Tepi Laut	• Blok bangunan sepanjang tepi perairan harus memiliki skala, ketinggian, serta susunan yang sesuai untuk menghindari angin yang datang dari arah laut dan angin secara umum
Profil Ketinggian	• Mengadaptasi variasi ketinggian bangunan sepanjang distrik dengan ketinggian semakin rendah menuju arah angin umum • Mendesentralisasi bangunan-bangunan rendah dan ruang terbuka di lingkungan yang padat untuk menciptakan ruang-ruang pernapasan • Menghindari kepadatan bangunan tinggi yang menghambat pergerakan angin
Penghijauan dan Penyusunan Ruang Terbuka serta Zona Pejalan Kaki	• Memaksimalkan penghijauan pada ruang terbuka dan sisi bukit • Penanaman pohon yang tinggi dan rimbun pada pedestrian

Sumber: Departemen Perencanaan Hong Kong, 2016.

Tabel 2. Panduan Kualitatif Tingkat Tapak

Tingkat Tapak	
Struktur Podium	• Hindari perkembangan pembangunan yang terhubung dan padat, struktur podium yang besar, serta memiliki koefisien dasar bangunan (KDB) yang besar • Mengadopsi podium berundak untuk mengarahkan angin ke ketinggian pejalan kaki
Susunan Bangunan	• Menyediakan jarak yang memadai antara blok bangunan pada arah yang tegak lurus dengan arah angin dominan • Sejajarkan sumbu blok bangunan secara paralel atau sampai 30 derajat ke arah angin umum
Permeabilitas Bangunan	• Membuat jarak antara blok bangunan, podium dan blok bangunan di atasnya, serta pada berbagai ketinggian bangunan
Bentuk dan Ketinggian Bangunan	• Mengadopsi konsep bangunan berundak dan membangun bentuk yang dapat mengoptimalkan potensi angin dari pembangunan itu sendiri
Lansekap	• Memaksimalkan jumlah dan jenis dari ruang terbuka hijau bagi masing-masing bangunan • Penanaman pohon yang tinggi dan rimbun pada alun-alun dan area yang menjorok ke dalam
Hambatan	• Hindari hambatan/halangan yang menonjol ke arah jalur udara • Hindari struktur jalan yang ditinggikan secara masif sejajar dengan bangunan tinggi • Papan nama yang menonjol harus disusun vertikal
Bahan Dingin	• Gunakan material dingin pada trotoar, jalan, dan fasad bangunan

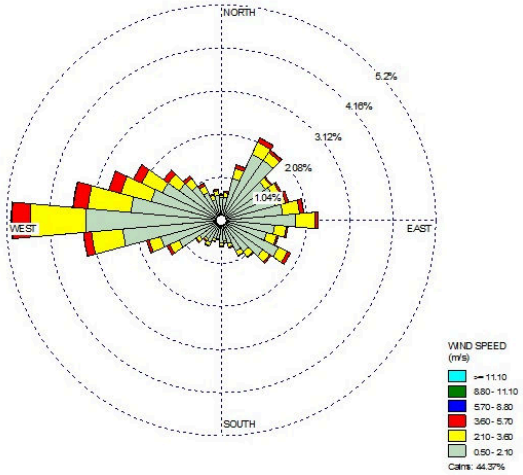
- Menyediakan elemen untuk mendinginkan seperti pohon dan badan air ketika memungkinkan

Sumber: Departemen Perencanaan Hong Kong, 2016.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Arah Angin*

Menurut data BMKG (2017), angin di area Bandung secara dominan menuju ke arah Barat berdasarkan data periode 2007-2016 (lihat Gambar1.)

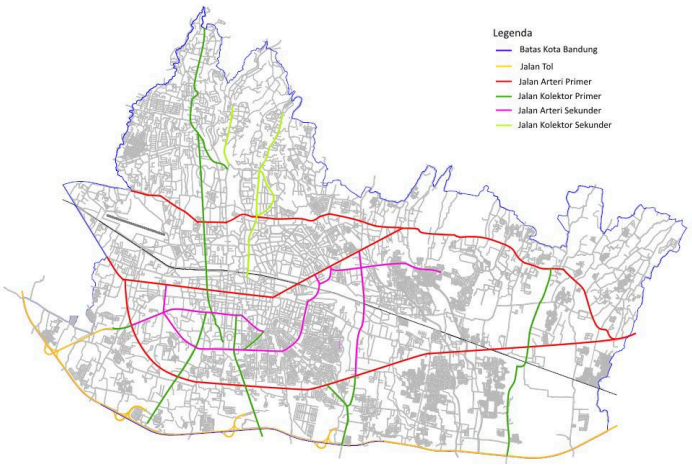


Sumber: Stasion Geofisika Kelas I Bandung, oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 31 Agustus 2017

Gambar 1. Arah dan Kecepatan Angin Tahunan (m/s) (2007-2016).

B. *Klasifikasi jalan di Kota Bandung*

Berdasarkan hirarki maka jalan di kota bandung diklasifikasikan jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, dan jalan kolektor sekunder. Jalan arteri primer merupakan jalan yang memiliki lebar badan jalan > 8 m dan tidak terputus. Jalan arteri primer kota Bandung terdiri dari Jalan Jendral Sudirman, Jalan Asia Afrika, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Ujung Berung, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Dr. Junjunan, Jalan Pasteur, Jalan Cikapayang, Jalan Surapati, Jl. PHH. Mustofa (lihat Gambar 2.)

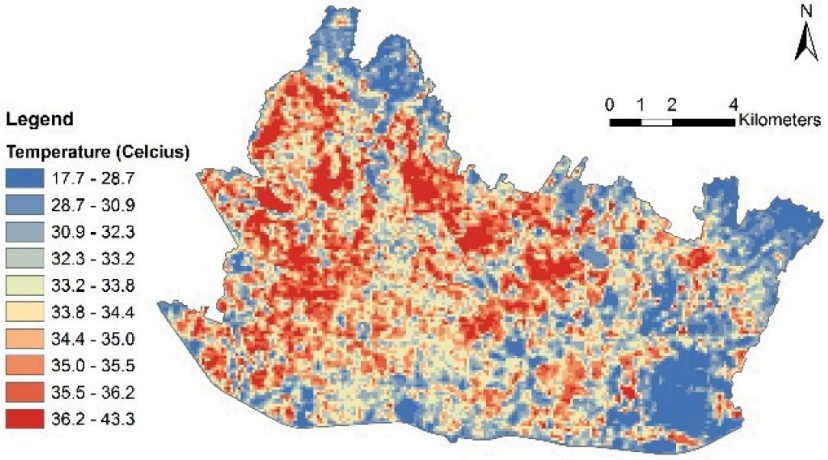


Sumber: Diadaptasi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung, 31 Agustus 2017

Gambar 2. Klasifikasi Jalan Kota Bandung berdasarkan Hirarki

C. *Suhu Permukaan Kota Bandung*

Suhu permukaan Kota Bandung yang tinggi berpusat pada arah tengah dan barat kota. Suhu permukaan yang dingin terpadat pada area selatan dan timur Kota Bandung. Data yang ada menunjukkan suhu permukaan Kota Bandung pada tahun 2014 dengan suhu antara 18 - 43°C (lihat Gambar 3.)

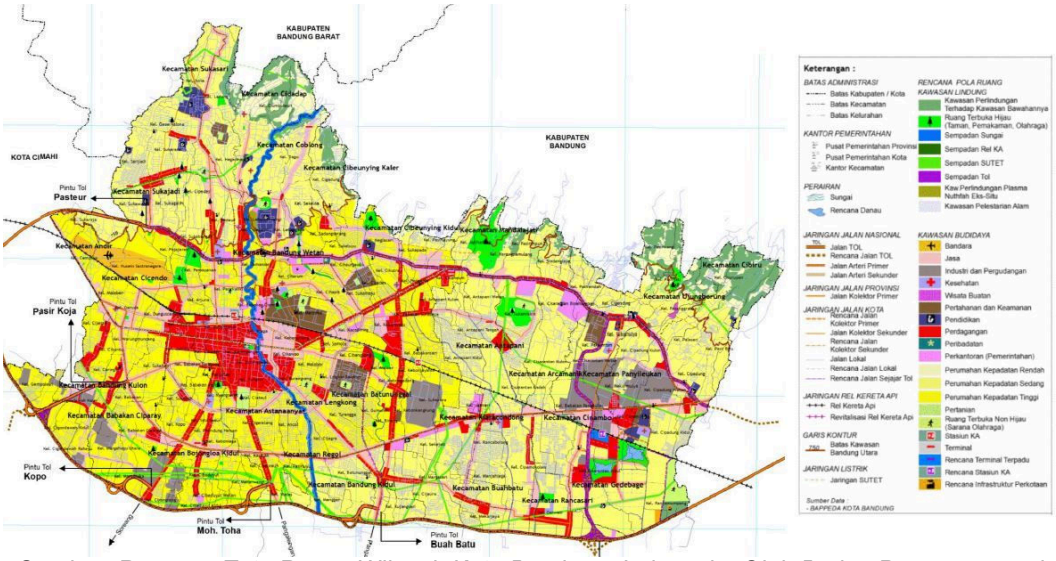


Sumber: Analisa Suhu Permukaan untuk Perencanaan Ruang Terbuka di Kota Bandung, Indonesia. Oleh Wardhana, Inu Kusuma. September 2015

Gambar 3. Suhu Permukaan Kota Bandung tahun 2014

D. *Land Use*

Area komersil yang terdiri dari perdagangan dan jasa berpusat pada area Barat dan tengah kota, serta sepanjang jalan arteri dan kolektor. Penggunaan lahan secara komersil berpotensi meningkatkan suhu area dikarenakan kepadatan bangunan yang ada (Hsieh & Huang, 2016).



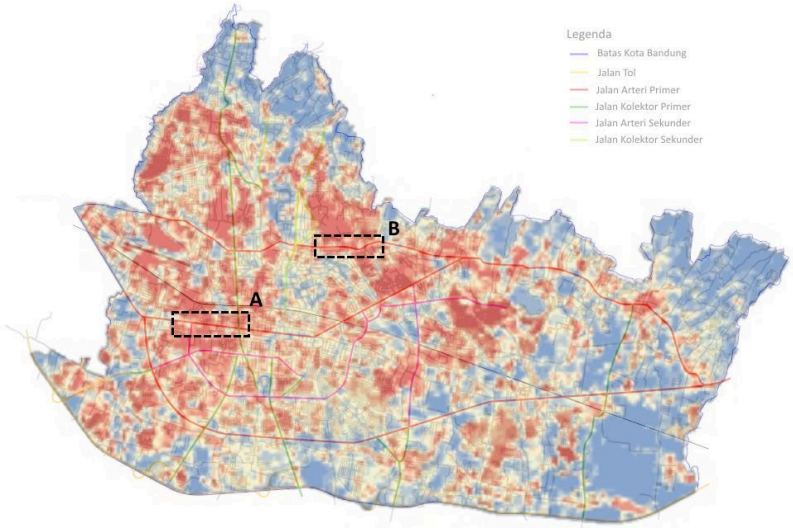
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, Indonesia. Oleh Badan Perencanaan dan Pemerintahan Daerah. 2011

Gambar 3. Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung (2011-2031)

E. *Potensi Koridor Ventilasi*

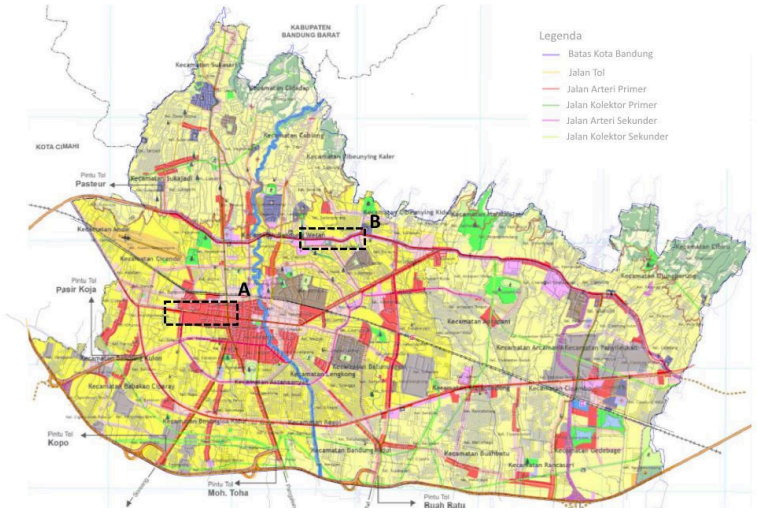
Terdapat tiga jalur yang berpotensi sebagai koridor ventilasi berdasarkan hirarki jalan dan arah angin umum. Ketiga jalur tersebut adalah Jalan Jendral Sudirman -

Jalan Asia Afrika, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Dr. Junjunan - Jalan Raya Ujung Berung. Berdasarkan peta suhu permukaan kota maka area A di sepanjang Jalan Jendral Sudirman dan area B di sepanjang Jalan Surapati menunjukkan area yang memiliki suhu permukaan tertinggi (lihat Gambar 4.)



Gambar 4. Peta Analisa Jalan berdasarkan Hirarki dan Suhu Permukaan Kota Bandung

Berdasarkan tata guna lahan, area A didominasi oleh penggunaan lahan sebagai fungsi perdagangan yang berpotensi meningkatkan UHI sedangkan area B didominasi oleh fungsi permukiman (lihat Gambar 5.)



Gambar 5. Tata Guna Lahan di Koridor Ventilasi yang Memiliki Suhu Permukaan Tinggi

Berdasarkan hirarki, suhu permukaan, dan tata guna lahan maka konfigurasi bangunan sepanjang area A akan dipilih sebagai fokus penelitian. Panjang area A adalah 1 km dan dibatasi oleh Jalan Astana Anyar/ Jalan Gardujati serta Jalan Jamika.

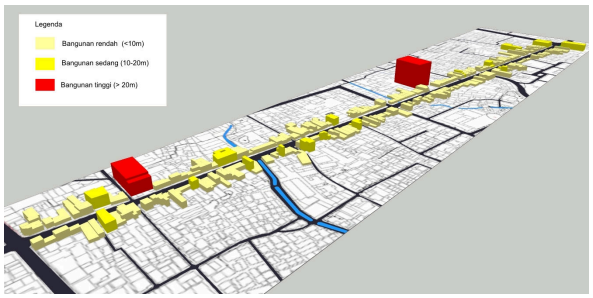
F. Observasi Lapangan dan Pemodelan

Observasi di lapangan dilakukan untuk menemukan ketinggian masing-masing blok bangunan serta bentuk dan jarak diantaranya. Bangunan dikategorikan berdasarkan ketinggian, dimana bangunan rendah merupakan bangunan yang memiliki ketinggian di bawah 10 meter (1-3 lantai). Bangunan sedang memiliki ketinggian 10 – 20m (4 – 6 lantai), sedangkan bangunan tinggi memiliki ketinggian di atas 20m. Pada tapak sebagian besar bangunan merupakan bangunan rendah dengan kurang dari

10% bangunan sedang dan 2 buah bangunan tinggi dengan ketinggian di atas 20m (lihat Gambar 6 dan Gambar 7).



Gambar 6. Blok Bangunan pada Area A berdasarkan Ketinggian Bangunan



Gambar 7. Blok Bangunan sepanjang Area A berdasarkan Ketinggian Bangunan

Tidak terdapat jarak antara blok bangunan satu dan lainnya, pada bangunan tidak memiliki permeabilitas. Blok bangunan umumnya menempel pada pedestrian dan lantai di atasnya memiliki sempadan bangunan yang sama dengan lantai di bawahnya.



Sumber: Google Map ,2015

Gambar 8a. Suasana Area A dengan Ketinggian Blok Bangunan sepanjang Area A (kiri) dan Gambar 8b. Pemodelan ketinggian Blok Bangunan dari arah Jalan Astana Anyar (kanan)

G. Perbandingan dengan kualitatif guideline

Berdasarkan pedoman kualitatif maka perbandingan akan dilakukan pada tingkat distrik dan tingkat tapak. Pada area penelitian pembagian tapak panjang dan linier dengan satu jalan lokal membelah tapak. Jalan Jendral Sudirman merupakan jalur arteri utama yang terbuka di antara kawasan dengan kepadatan tinggi. Tidak terdapat hubungan antara fasilitas publik, setback bangunan, maupun area tanpa bangunan. Orientasi Jalan Jendral Sudirman merupakan satu dari tiga jalan arteri yang sejajar dengan arah angin umum ke arah Barat. Tidak terdapat perlebaran jalan di Jalan Jendral Sudirman, bangunan yang ada menempel satu dengan yang lain hingga membentuk satu blok yang memanjang di sepanjang Jalan Jendral Sudirman. Tidak terdapat setback bangunan secara umum, hanya dua bangunan tinggi dengan tapak yang besar memiliki setback bangunan. Sementara bangunan-bangunan dengan tapak besar lainnya menempel pada pedestrian dan hanya kurang dari 5% bangunan dengan tapak kecil memiliki setback bangunan. Ketinggian bangunan secara umum tidak bervariasi. Kepadatan bangunan sangat tinggi di area Jalan Jendral Sudirman namun secara keseluruhan bangunan-bangunan di area tersebut merupakan bangunan rendah. Tidak terdapat pohon tinggi dan rimbun sepanjang pedestrian.

Pada tingkat tapak nyaris seluruh bangunan terhubung dan padat dan memiliki Koefisien Dasar Bangunan yang besar. Kurang dari 5% bangunan mengadopsi podium berundak. Tidak terdapat jarak antara blok bangunan sepanjang jalan. Sumbu blok bangunan individual tegak lurus terhadap jalan, namun dikarenakan tidak terdapat jarak antara satu bangunan dan bangunan lainnya maka sumbu massa blok secara keseluruhan sejajar dengan jalan. Tidak terdapat jarak antara podium dan bangunan di atasnya, tidak terdapat permeabilitas bangunan pada bangunan tingkat tinggi di jalan. Tidak terdapat ruang terbuka hijau untuk masing-masing bangunan maupun pohon yang tinggi pada alun-alun dan area setback. Tidak terdapat hambatan yang menonjol ke arah jalur udara maupun struktur jalan yang ditinggikan. Papan nama yang menonjol disusun secara horisontal sepanjang jalan. Material yang digunakan pada trotoar, jalan, maupun fasad bangunan tidak mempertimbangkan suhu material di bawah paparan sinar matahari. Tidak terdapat pohon untuk mendinginkan suhu sepanjang jalan dan terdapat satu badan air yang membelah tapak yaitu Sungai Citepus.

Kondisi area saat ini didominasi oleh bangunan rendah yang memungkinkan jalur angin untuk bergerak dengan cukup baik, namun elemen pendingin seperti pohon dan material dingin tidak terdapat pada jalur tersebut. Kepadatan blok bangunan serta tidak adanya setback membuat jalur angin pada tingkat pedestrian cenderung sempit. Berdasarkan tata guna lahan yang diperuntukan untuk area A maka pertumbuhan kearah vertikal harus diantisipasi. Pembangunan bangunan tinggi sepanjang area A perlu memiliki setback terhadap jalan raya serta mengadaptasi desain bangunan berundak. Perlunya jarak antara blok bangunan satu dengan lainnya untuk mendukung pergerakan angin serta penanaman pohon tinggi dan rimbun sepanjang pedestrian. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang saat ini nyaris mencapai 100% perlu dikurangi pada pembangunan bangunan tinggi. Bangunan tinggi perlu memiliki jarak antara podium dan lantai di atasnya untuk memudahkan pergerakan angin pada koridor ventilasi. Masing-masing bangunan perlu memiliki ruang terbuka hijau baik pada atap bangunan ataupun pada ruang setback bangunan. Papan nama perlu ditinjau secara seksama agar tidak menambah hambatan terhadap laju angin pada koridor ventilasi. Material dingin dapat menjadi pertimbangan untuk digunakan pada trotoar, jalan, maupun fasad bangunan di area ini. Badan air yang berada di tapak perlu dioptimalkan keberadaannya.

IV. KESIMPULAN

Secara umum ketinggian bangunan pada area A saat ini tidak menghalangi laju angin umum. Namun setback bangunan, kepadatan blok bangunan dan kurangnya penghijauan serta material dingin yang digunakan pada area tersebut menyebabkan suhu permukaan yang tinggi. Perkembangan bangunan ke arah vertikal di koridor ventilasi ini perlu diantisipasi dengan menerapkan setback bangunan, jarak antara blok bangunan, menambah permeabilitas bangunan, serta mengurangi cakupan luasan dasar blok bangunan. Di samping konfigurasi bangunan elemen pendingin seperti pohon tinggi yang rimbun dan badan air perlu dioptimalkan sepanjang koridor ventilasi.

Perkembangan kota secara vertikal akan mempengaruhi perubahan kenyamanan thermal dan kesehatan penduduknya. Maka diperlukan perhatian dan guideline untuk pembangunan vertikal pada area-area yang berpotensi menjadi koridor ventilasi sebuah kota dan memiliki pertumbuhan pembangunan yang pesat. Hal ini untuk mencegah terhambatnya pergerakan angin yang penting bagi kesehatan dan kenyamanan kota di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2017, Agustus). Arah dan Kecepatan Angin Tahunan 2007-2016.

Badan Perencanaan dan Pemerintah Daerah Kota Bandung. (2011). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung 2011-2031.

Blocken, B., Janssen, W. D., & van Hooff, T. (2012). CFD simulation for pedestrian wind comfort and wind safety in urban areas: General decision framework and case study for the Eindhoven University campus. Environmental Modelling & Software, 30, 15–34. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2011.11.009

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. (2012). Klasifikasi Jalan Kota Bandung Berdasarkan Hirarki.

Emmanuel, M. R. (2005). An Urban Approach to Climate-sensitive Design: Strategies for the Tropics. Taylor & Francis.

Francesco Musco. (2016). Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario. Switzerland: Springer Nature.

Google Maps. (2014). Jalan Jendral Sudirman. Retrieved from https://www.google.co.id/maps/@-6.9201212,107.5983027,3a,75y,278.98h,91.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sw7YRqeOuHREItQ28glft9Q!2e0!7i13312!8i6656?hl=en

Golany, G. S. (1996a). Urban design morphology and thermal performance. Atmospheric Environment, 30(3), 455–465. https://doi.org/10.1016/1352-2310(95)00266-9

Hsieh, C.-M., & Huang, H.-C. (2016). Mitigating urban heat islands: A method to identify potential wind corridor for cooling and ventilation. Computers, Environment and Urban Systems, 57, 130–143. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2016.02.005

Morris, C. J. G., Simmonds, I., & Plummer, N. (2001). Quantification of the Influences of Wind and Cloud on the Nocturnal Urban Heat Island of a Large City. Journal of Applied Meteorology, 40(2), 169–182. https://doi.org/10.1175/1520-0450(2001)040<0169:QOTIOW>2.0.CO;2

Wardhana, I. K. (2015, September). Analisa Suhu Permukaan untuk Perencanaan Ruang Terbuka di Kota Bandung, Indonesia.

Ng, E. (2009). Policies and technical guidelines for urban planning of high-density cities – air ventilation assessment (AVA) of Hong Kong. Building and Environment, 44(7), 1478–1488. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.06.013

Ng, E., Yuan, C., Chen, L., Ren, C., & Fung, J. C. H. (2011). Improving the wind environment in high-density cities by understanding urban morphology and surface roughness: A study in Hong Kong. Landscape and Urban Planning, 101(1), 59–74. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.01.004

Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 108(455), 1–24. https://doi.org/10.1002/qj.49710845502

Planning Department of Hong Kong. (2005, November). Technical Guide for Air Ventilation Assessment for Developments in Hong Kong. Planning Department of Hong Kong. Retrieved from http://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/comp_s/avas/avas_eng.html

Planning Department of Hong Kong. (2016, June). Summary of Hong Kong Planning Standards and Guidelines. Planning Department of Hong Kong.

Priyadarsini, R., Hien, W. N., & Wai David, C. K. (2008). Microclimatic modeling of the urban thermal environment of Singapore to mitigate urban heat island. Solar Energy, 82(8), 727–745. https://doi.org/10.1016/j.solener.2008.02.008

Rajagopalan, P., Lim, K. C., & Jamei, E. (2014). Urban heat island and wind flow characteristics of a tropical city. Solar Energy, 107, 159–170. https://doi.org/10.1016/j.solener.2014.05.042

Rees, W., & Wackernagel, M. (2008). Urban Ecological Footprints: Why Cities Cannot be Sustainable—and Why They are a Key to Sustainability. In J. M. Marzluff, E. Shulenberger, W. Endlicher, M. Alberti, G. Bradley, C. Ryan, … C. ZumBrunnen (Eds.), Urban Ecology (pp. 537–555). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-0-387-73412-5_35

Santamouris, M., & Asimakopoulos, D. N. (2001). Energy and Climate in the Urban Built Environment. Earthscan.

Shahmohamadi, P., Che-Ani, A. I., Ramly, A., Maulud, K. N. A., & Mohd-Nor, M. F. I. (2010). Reducing urban heat island effects: A systematic review to achieve energy consumption balance. International Journal of Physical Sciences, 5(6), 626–636.

Shi, X., Zhu, Y., Duan, J., Shao, R., & Wang, J. (2015). Assessment of pedestrian wind environment in urban planning design. Landscape and Urban Planning, 140, 17–28. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.03.013

Stan Cox. (2012, July 10). Cooling a Warming Planet: A Global Air Conditioning Surge. Yale E360. Retrieved from http://e360.yale.edu/features/cooling_a_warming_planet_a_global_air_conditioning_surge

Statistic of Bandung City. (2015). Bandung City in Figures. Statistic of Bandung City.

Suder, A., & Szymanowski, M. (2014). Determination of Ventilation Channels In Urban Area: A Case Study of Wrocław (Poland). Pure and Applied Geophysics, 171(6), 965–975. https://doi.org/10.1007/s00024-013-0659-9

Unger, J. (2004). Intra-urban relationship between surface geometry and urban heat island: review and new approach. Climate Research, 27(3), 253–264. https://doi.org/10.3354/cr027253

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights. New York: United Nations. Retrieved from https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.Pdf

Wong, M. S., Nichol, J. E., To, P. H., & Wang, J. (2010). A simple method for designation of urban ventilation corridors and its application to urban heat island analysis. Building and Environment, 45(8), 1880–1889. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.02.019

Yim, S. H. L., Fung, J. C. H., Lau, A. K. H., & Kot, S. C. (2009). Air ventilation impacts of the “wall effect” resulting from the alignment of high-rise buildings. Atmospheric Environment, 43(32), 4982–4994. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.07.002

Pengembangan Ekowisata Berbasis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan Pantai

(Studi Kasus Pulau Marsegu Kabupaten Seram Bagian Barat)

Henderina Lelloltery[1], Satyawan Pujiatmoko[2], Chafid Fandelli[2], M.Baiquni[3]

[1]Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

[2]Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

[3]Jurusan Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

h_lellol@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai kesesuaian lahan dan daya dukung kawasan Pantai untuk pengembangan ekowisata di TWA Pulau Marsegu. Metode yang digunakan adalah metode survey, dengan pengambilan data primer dan sekunder melalui teknik observasi. Pengambilan data primer meliputi data lingkungan perairan,lingkungan fisik pantai,luas areal yang digunakan untuk kegiatan wisata pantai dan waktu yang digunakan oleh wisatawan di kawasan pantai. Analisis data menggunakan indeks kesesuaian pantai dan daya dukung kawasan pantai.Kawasan yang berpasir putih menempati daerah sebelah timur bagian tengah sampai ke utara Pulau Marsegudengan panjang 1,68 km. Kawasan berpasir putih dengan lebar 20 - 30 meter memberikan ruang bagi berbagai kegiatan wisata, ditunjang oleh pemandangan alam laut yang indah, serta kecerahan perairan yang tinggi (90 %), kecepatan arus yang rendah (0,16 m/det) menyebabkan pantai ini dapat menjadi destinasi wisata yang menjanjikan.Hasil analisis indeks kesesuaian ekowisata pantai menunjukan bahwa kawasan berpasir putih di Pulau Marsegu "Sangat Sesuai" untuk kegiatan wisata dengan nilai IKW = 95, 42. Demikian juga hasil analisis daya dukung kawasan menunjukkan bahwa kawasan berpasir putih di Pulau Marsegu memiliki daya dukung kawasan sebesar 68 orang/hari.

Kata kunci: Kesesuaian Ekowisata Pantai, Daya Dukung Kawasan, Pengembangan Ekowisata

I. PENDAHULUAN

Sumber Daya Alam pesisir dan laut menyimpan banyak potensi keanakearagaman hayati maupun kondisi lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jasa lingkungan termasuk ekowisata.Keanekaragaman hayati tersebut memberikan berbagai bentuk dan warna yang mampu menyajikan keindahan alam pulau-pulau kecil yang berpotensi untuk pengembangan ekowisata bahari. Kegiatan ekowisata bahari memiliki nilai keuntungan ekonomi yang tinggi jika dimanfaatkan secara lestari. (Cesar dkk., 2003)

Wilayah pesisir dan laut yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata berupa pemandangan pantai dan keaslian lingkungan seperti kehidupan di bawah air. Pengembangan pantai sebagai tempat ekowisata merupakan jasa lingkungan dari sumberdaya yang cenderung akan memberikan manfaat pada kepuasan batin seseorang yang dikarenakan mengandung nilai estetika tertentu (Ali, 2004).

Pulau Marsegu merupakan salah satu pulau yang berada di teluk kotania dengan beberapa pulau lainnya seperti pulauBuntal, pulau Osi, pulau Tatumba dan pulau

Burung dimana kawasan pesisir dan perairan pulau-pulau tersebut termasuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Marsegu.Pulau-pulau ini merupakan pulau karang yang subur dan hijau sehingga menjadi habitat yang baik bagi berbagai jenis vegetasi dan satwaliar. Pulau-pulau ini dikelilingi oleh perairan denganpanorama bawah laut yang indah dan menarik, dengan beragam jenis ikan, terumbu karang, dan biota laut lainnya.(BKSDA, 2010).

Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Maluku(2010) menyatakan bahwa kawasan pesisir Pulau Marsegudalam pemanfaatan potensinya akan diutamakan sebagai kawasan wisata khususnya wisata bahari seperti snorkeling, diving, berenang, berperahu, memancing, menikmati panorama alam.Salah satu pantai yang mempunyai pemandangan yang indah dengan pasir putih, dan berhadapan dengan rangkaian daratan pulau seram adalah pantai pasir putih di pulau Marsegu.

Pulau marsegu terletak di tengah laut,memilikipantai pasir putih sepanjang 1,6 km yang membentang di sebelah timur bagian tengah sampai ke bagian utara pulau. Dari panjang garis pantai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai daerah rekreasi atau daerah wisata (Sukandarimudi, 2009). Pantai pulau Marsegu memiliki kondisi fisik pantai dengan pasir putih yang indah, topografi pantai yang landai, kedalaman perairan yang rendah, lebar pantai yang memadai yang berbagai aktivitas serta kondisi fisik perairan dengan kecerahan air laut yang tinggi dan kondisi arus yang rendah menjadikan kawasan pantai pasir putih di Pulau Marsegu mendukung untuk kegiatan wisata pantai.Kondisi fisik pantai dan fisik perairan ini sangat mendukung kegiatan ekowisata pantai sesuai dengan kriteria kesesuaian pantai untuk ekowisata (Yulianda, 2007).

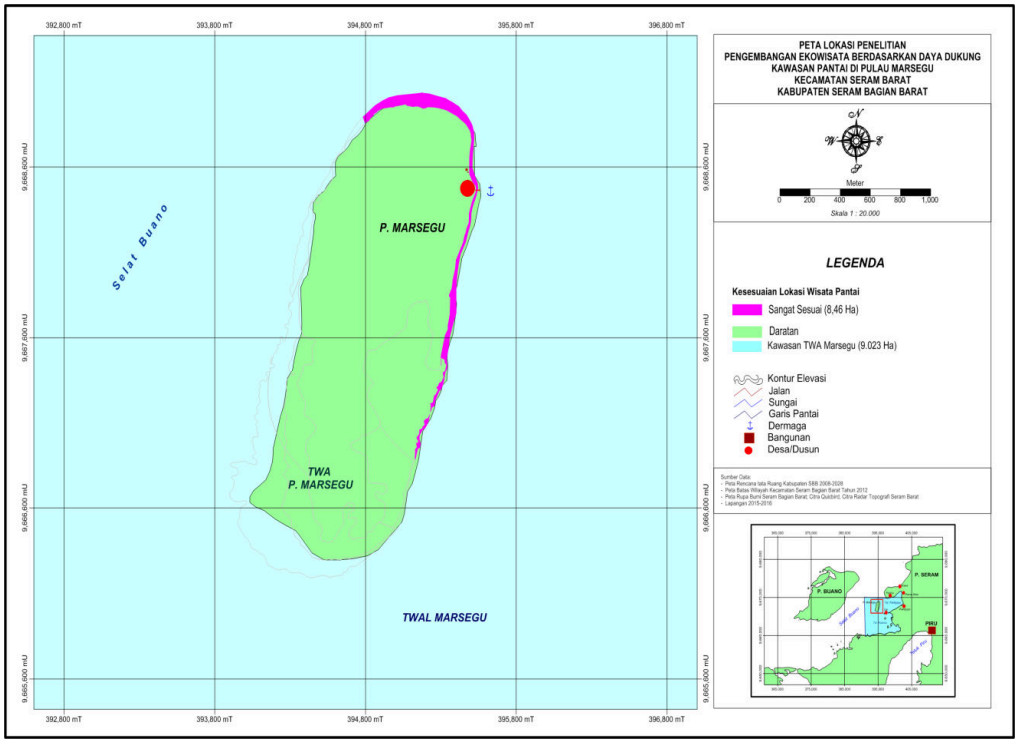
Aktivitas wisata yang dapat dilakukan meliputi berenang, mandi, memancing, menikmati panorama alam, berfoto, olah raga pantai, maupun pengamatan satwaliar. Hal ini menjadikan kawasan ini sangat potensial untuk kegiatan ekowisata pantai. Potensi sumberdaya untuk ekowisata baik fisik pantai maupun fisik perairan sampai saat ini belum dapat dikembangkan secara optimal. Belum optimalnya kegiatan wisata di sebabkan kurangnya dukungan pemerintah dalam halketerbatasan fasilitas penunjang baik sarana akomodasi maupun transportasi. Fasilitas yang ada belum memadai, ditambah dengan masih rendahnya sumberdaya manusiadi sekitar Pulau Marsegu sehingga belum berkembang menjadi suatu kawasan wisata pantai yang memadai. Maka saat ini kebutuhan akan data dan informasi tentang kondisi dan keberadaan sumberdaya termasuk kesesuaian kawasan dan daya dukung kawasan pantai di Pulau Marsegu penting untuk dimiliki dalam pengembangan wisata pantai pada waktu mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah 1)Mengkaji kesesuaian kawasan pantai di Pulau Marsegu untuk kegiatan ekowisata pantai, dan 2) Menganalisis daya dukung(*Carrying capacity*) kawasan pantai Pulau Marsegu untuk kegiatan ekowisata pantai.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Marsegu Kabupaten Seram Bagian Barat (Gambar 1). Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan selama 3 bulan pada bulan Juni sampai Agustus2016.Peta Lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah kamera digital, tongkat Duga, *SecchyDisk,GPS*,*current meter*dan alat tulis.Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, dan peta wilayah.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu data – data yang secara langsung diperolehdilapangan melalui observasi, survey dan wawancara dengan masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yangdiambil melalui dinas- dinas yangterkait di dalam penelitian ini.

Pengamatan kondisi karakteristik pantai dilakukan terhadap beberapa parameter yang berhubungan dengan kesesuaian wisata pantai sesuai dengan (Yulianda,2007) yang dimodifikasi dengan tujuan penelitian meliputi tipe pantai, penutupan lahan pantai,matrial dasar perairandilakukan dengan pengamatan visual, pengamatan biota berbahaya dilakukan dengan pengamatan visual dan snorkeling di sekitar pantai. Pengukuran lebar pantai menggunakan roll meter,sedangkan ketersediaan air tawar diukur dengan mengukur jarak sumber air bersih dengan lokasi pantai pasir putih tempat dilakukan aktivitas ekowisata pantai. Sedangkan kondisi lingkungan perairan yang diamati meliputi kecerahan di ukur dengan *secchy disk* dan kecepatan arus diukur dengan *current meter*.

2. AnalisisData

a. Analisis Matrik Kesesuaian untuk Wisata Pantai

Analisis kesesuaian pemanfaatan wisata pantai mencakup penyusunan matrik kesesuaian, pembobotan dan peringkat, serta analisis indeks kesesuaian setiap kategori wisata pantai. Menurut Yulianda (2007) kesesuaian ekowisata bahari kategori wisata pantai mempertimbangkan 10 parameter dan penilaiannya dikelompokkan

dalam beberapa klasifikasi seperti ditunjukkan pada tabel 3. selanjutnya penentuan indeks kesesuaian untuk wisata pantai menggunakan rumus :

$$IKW = \sum_{t=1}^{n} \left(\frac{Ni}{Nmax} \right) \mathbf{x}\ 100\ \%$$

Keterangan:IKW : Indeks Kesesuaian Wisata; Ni: Nilai parameter ke-i (bobot × skor); Nmax:Nilai maksimum dari suatu kategori wisata

Tabel1.Matriks Kesesuaian Ekowisata Pantai

No	Parameter	Bobot	Standar Parameter	Skor
1	Tipe pantai	5	Pasir Putih	3
			Pasir Putih sedkit karang	2
			Pasir hitam, berkarang sedikit terjal	1
			Lumpur, Berbau, terjal	0
2	Lebar pantai (m)	5	> 15	3
			10 – 15	2
			3 -<10	1
			<3	0
3	Kedalaman perairan (m)	5	0 -3	3
			3 – 6	2
			>6 - 10	1
			> 10	0
4	Kemiringan pantai(˚)	3	<10	3
			10 – 25	2
			>25 – 45	1
			>45	0
5	Kecepatan Arus(m/detik)	3	0 -0,17	3
			0,17 – 0,34	2
			0,34 –0,51	1
			> 0,51	0
6	Material dasar perairan	3	Pasir	3
			Kurang berpasir	2
			Pasir berlumpur	1
			Lumpur	0
7	Kecerahan perairan (%)	1	>80	3
			> 50 – 80	2
			20 -50	1
			<20	0
8	Penutupan Lahan pantai	1	Kelapa lahan terbuka	3
			Semak belukar rendah, savana	2
			Belukar tinggi, hutan	1
			Bakau,pemukiman,pelabuhan	0
9	Biota berbahaya	1	Tidak ada	3
			Bulu babi	2
			Bulu babi, ikan pari	1
			Bulu babi, ikan pari, lepu, hiu	0
10	Ketersediaan air tawar (km)	1	<0,5	3
			0,5 – 1	2
			>1 – 2	1
			>2	0
			∑N=	
			∑Nmaks= 48	
			IKW	

Sumber: Yulianda (2007)

Ketentuan kelas kesesuaian untuk ekowisata pantai sebagai berikut (modifikasi, Yulianda, 2007)

S1 = sangat sesuai dengan IKW 83 – 100 %
S2 = sesuai, dengan IKW 50 – 83 %
N = tidak sesuai dengan IKW< 50 %

Kelas kesesuaian ekowisata bahari kategori wisata pantai dibagi tiga kelas yang didefenisikan sebagai berikut; 1) Kelas S1, sangat sesuai: kawasan ekosistem pantai yang sangat sesuai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pantai secara lestari, tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti terhadap kondisi kawasan dan tidak terlalu memerlukan masukan untuk pengembangannya sebagai obyek ekowisata pantai; 2) Kelas S2 sesuai : kawasan ekosistem pantai sesuai untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pantai secara lestari. Faktor pembatasnya mempengaruhi kawasan tersebut, sehingga diperlukan upaya tertentu dalam membatasi pemanfaatan yakni upaya konservasi dan rehabilitasi yang melindungi ekosistem ini dari kerusakan; dan 3) Kelas N tidak sesuai: kawasan ekosistem pantai yang mengalami kerusakan yang tinggi atau tidak memiliki keunggulan fisik kawasan sehingga tidak memungkinkan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata pantai. Sangat disarankan untuk dilakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan teknologi dan dengan tambahan biaya serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk pemulihannya melalui konservasi dan rehabilitasi kawasan tersebut.

b. Analisis Daya Dukung Kawasan

Analisis daya dukung wisata digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan alam untuk mentolerir gangguan atau tekanan dari manusia terhadap sumberdaya alam. Dengan demikian daya dukung wisata adalah jumlah wisatawan yang menggunakan suatu areal untuk berwisata yang masih dapat didukung oleh areal tersebut dengan di tandai tanpa adanya perubahan pada kualitas wisata (Douglas, 1975 *dalam* Fandeli, 2002).

Perhitungan daya dukung kawasan meliputi; Daya dukung fisik (PCC) adalah kemampuan maksimum secara fisik untuk dapat menampung jumlah wisatawan pada waktu tertentu, dinyatakan dengan rumus:

$$PCC = A \, x \, \frac{V}{a} \, x \, Rf$$

Keterangan:*PCC =Phisical Carrying Capacity*(orang/m^2/hari); A=Luas areal yang digunakan untuk wisata (m^2); V/a = Jumlah pengunjung/m^2(orang/m^2); Rf = faktor rotasi (besarnya Rf = lamanya waktu buka kawasan ekowisata/waktu rata-ratakunjungan(Fandeli,2002).

Diasumsikan bahwa: a) Setiap orang membutuhkan panjang garis pantai 50 m, karena pengunjung melakukan berbagai aktivitas; b) Waktu kegiatan pengunjung untuk melakukan aktivitas wisatapantai adalah 3jam; dan c) Waktu yang tersedia untuk kegiatan wisata pantai dalam satu hari adalah 6 jam/haridengan demikian nilai faktor rotasi adalah 2 (Yulianda, 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pulau Marsegu terletak di Kecamatan seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. Pulau Marsegu terletak di teluk kotania dan berada bersama pulau-pulau kecil lainnya yang tidak berpenghuni. Kawasan daratan Pulau Marsegu dalam pemanfaatannya ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung Pulau Marsegu seluas 240,20 Ha sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 10327/Kpts-II/2002,tanggal 30 Desember 2002. Sedangkan wilayah pesisir dan lautnya dengan luas 11.000 Ha ditunjuk sebagai Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Marsegu dengan

SK Menhutbun No. 114/Kpts-II/1999, tanggal 05 Maret 1999 dan diperbaharui dengan SK Menhutbun No. 854/Menhut-II/2014dengan luas9.023 Ha (BKSDA, 2015).

Kawasan daratan Pulau Marsegu memiliki potensi sumberdaya alam hayati yang tinggi dengan memiliki 4 tipe hutan meliputi hutan mangrove, hutan sekunder, hutan pantai dan daerah alang-alang. Pulau Marsegu menjadi habitat bagi kelelawar, berbagai jenis burung laut dan antropoda besar seperti kepiting kenari ((*Birgus lotre)* (Irwanto, 2007)). Potensi perairan dan laut sekitar pulau marsegu memiliki sumberdaya perairan yang tinggi seperti terumbu karang, berbagai jenis ikan, padang lamun, mangrove dan biota lainnya (BKSDA, 2010).

Kecamatan Seram Barat beriklim tropis dan iklim musim. Musim Barat umumnya berlangsung pada bulan Desember sampai bulan Maret, sedangkan pada bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur. Musim Timur berlangsung pada bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober disusul oleh masa Pancaroba pada bulan Nopember yang merupakan transisi ke musim Barat.

Kondisi perairan sekitar Pulau Marsegu, secara fisik kimia umumnya normal dimana kecepatan arus rata-rata 0,16 m/det. Suhu perairan rata-rata 28,66^{o}C, suhu ini sangat baik untuk kehidupan organisme laut tropis dan sesuai untuk kegiatan wisata.Hal ini sejalan dengan pendapat Bengen(2002) yang menyatakan bahwa suhu perairan yang optimal berkisar dari 23 s/d 35 °C dimana suhu perarian sekitar Pulau Marsegu berada pada kisaran suhu tersebut. Secara umum disekitar perairan Pulau Marsegu terlihat zonasi yang berurutan dari tepi tubir ke darat yang dimulai dari zona terumbu karang, lamun, mangrove dan terakhir pantai.

Kondisi pantai Pulau Marsegu sendiri memiliki tubir yang baik. Pantainya landai dengan lebar antara 20-30 meter sebelum jatuh membentuk tubir yang tidak terlalu curam, sehingga cocok digunakan untuk aktivitas wisata seperti mandi dan berenang di pantai. Garis pantai yang terbentang sepanjang 1,68 km memberikan ruang kepada wisatawan untuk dapat melakukan berbagai aktiviatas wisata.Kedalaman perairan antara 0 – 3 meter serta arus gelombang yang kecil di sekitar pantai pasir putih memungkinkan aktivitas wisata dapat berjalan dengan baik.

Kondisi kualitas Lingkungan Perairan

Kecepatan arus

Arus perairan pantai merupakan salah satu parameter lingkungan yang digunakan dalam menentukankesesuaian lahan untuk pariwisata berenang dan penyelaman.Kecepatan arus sangat erat kaitannya dengan keamanan wisata dalam berenang. Arus yang lemah sangat baik untuk kegiatan berenang, sedangkan arus yang sangat kuat berbahaya karena dapat menyeret orang-orang yang sedang mandi atau berenang di pantai (Nybakken, 1992) *dalam* (Yulisa dkk., 2016).

Berdasarkan hasil penelitian kecepatan arus di perairan pantaiPulau Marsegu pada musim peralihan dua (MP2) mengalir mengikuti gerakanangin yang bertiup dari arah barat laut disamping arus yang disebabkan oleh gerakan pasang surut. Pola arus permukaan hasil pengukuran mempunyai kecepatan berkisar antara0,058 s/d 0,247 m/det, rata-rata 0,167 m/det.Arus di sebelah timur dan barat Pulau Marsegu mempunyai pergerakan sejajar pantai(*longshore current*), sedangkan di sebelah utara dan selatan mempunyai pergerakan arus dating dan meninggalkan pantai (*rip current*). Dari kedua arus pantai ini, arus dengan pergerakan sejajar baik untuk kegiatan wisata. Lokasi pantai pasir putih berada di sebelah timur Pulau Marsegu sehingga bentuk arus ini baik dan tidak berbahaya bagi kegiatan berenang maupun menyelam.Hasil pengukuran kecepatan arus ini, di dukung dengan nilai kesesuaian wisata pantai oleh Yulianda, 2007 yaitutermasuk dalam kategori (S1) yaitu *"sangat sesuai"*untuk kegiatan wisata pantai.Hasil penelitian ini jika dibandingkan dengan hasil penelitian Yulisa dkk.(2016), kecepatan arus di pantai Laguna berkisar 0,016 m/detik. Kecepatan arus

ini berhubungan dengan kenyamanan dan keselamatan pengunjung yang akan melakukan akitivitas ekowisata pantai di lokasi pantai pasir putih pulau marsegu.

Kecerahan

Kecerahan sangat dipengaruhi oleh padatan tersuspensi dan kekeruhan, keadaan cuaca. Waktu pengukuran dan ketelitian orang yang melakukan pengukuran (Effendi, 2003) *dalam* (Yulisa dkk., 2016).Kecerahan perairan sangat berhubungan erat dengan kegiatan ekowisata pantai, karena berkaitan dengan kenyamanan wisatawan dalam melakukan aktivitas mandi dan berenang.

Hasil pengukuran kecerahandengan *secchi disk*di sekitar pantai pulau Marsegu adalah90 %.Hasil pengukuran ini jika dibandingkan dengan nilai kesesuaian wisata pantai oleh Yulianda(2007) maka hasil pengukuran tersebut sesuai untuk kegiatan wisata pantai.Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi perairan sekitar pantai pasir putih Pulau Marsegu masih dalam kondisi baik dan tidak ada pencemaran. Kecerahan perairan yang baik ini juga dipengaruhi oleh rendahnya turbulensi karena arus dan gelombang.Kondisi perairan dengan kecerahan yang tinggi di dukung oleh letak Pulau Marsegu di tengah-tengah laut sehingga tidak ada pengaruh air sungai, limbah aktivitas manusia maupun bahan-bahan anorganik yang tersuspensi seperti lumpur dan pasir halus, sehingga dasar perairan masih tampak dengan pengamatan visual.

Hasil pengukuran kecerahan di perairan pantai pulau marsegu jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut untukwisata bahari, nilai kecerahan air laut untuk kegiatan wisata adalah > 6 m. Sedangkan nilai kecerahan perairan dari pengukuran *secchi disk* adalah > 10 meter melebihi nilai baku mutu sehingga perairan ini sangat layak untuk kegiatan wisata pantai seperti mandi dan berenang.

B. Karakteristik Pantai

Karakteristik pantai yang diamati di lokasi penelitian berkaitan dengan wisata pantai adalah kedalaman perairan, tipe pantai, matrial dasar perairan, kemiringan pantai, penutpan lahan pantai dan biota berbahaya.Hasil pengukuran karakteristik pantai dapata dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Pantai Pasir Putih Pulau Marsegu

No	Parameter	Kondisi	Bobot	Skor	Nilai
1	Kedalaman Peraiaran	0 – 3 m	5	3	15
2	Tipe pantai	Pasir putih	5	3	15
3	Lebar pantai	20 – 30m	5	3	15
4	Matrial dasar perairan	Pasir	3	3	9
5	Kemiringan pantai (°)	7°	3	3	9
6	Penutupan lahan pantai	Hutan	1	1	1
7	Biota berbahaya	Bulu Babi	1	3	3
7	Ketersediaan Air tawar (km)	0,8 km	1	2	2

Berdasarkan hasil pengukuran pada Tabel 2, dapat diketahui beberapa parameter karakteristik pantai Pulau Marsegu adalah sebagai berikut:

Kedalaman Perairan

Karakteristik kedalaman perairan menjadi faktor penting dalam penentuan suatu kawasan untuk dijadikan kawasan wisata pantai karena berhubungan dengan kegiatan mandi dan berenang oleh wisatawan. Hal ini berhubungan dengan keselamatan wisatawan. Kedalaman perairan yang dangkal cukup baik untuk dijadikan sebagai tempat aktivitas mandi dan berenang.Hasil pengukuran kedalaman perairan di pantai

pasir putih pulau Marsegu berkisar antara 0 – 3 meter dengan rata-rata kedalaman 2 meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristik kedalaman perairan, pantai Pulau Marsegu sangat sesuai untuk ekowisata pantai. Oleh karenanya kedalaman perairan pantai pasir putih di Pulau Marsegu aman untuk kegiatan ekowisata pantai. Hal ini sesuai dengan pendapatHutabarat dkk, 2009 bahwa kedalaman perairan ideal(0 – 3 m) untuk aktivitas berenang dan bermain, karenanya sesuai untuk ekowisata wisata pantai.

Tipe Pantai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe pantai di Pulau Marsegu adalah pantai pasir putih. Tipe pantai pasir putih ini dapat dijumpai di bagian timur pulau marsegu, hal ini sesuai dengan pendapat Yulianda (2007) bahwa untuk kegiatan wisata pantai sangat baik jika suatu pantai merupakan pantai pasir putih, dibandingkan dengan pantai berbatu atau berkarang, hal ini disebabkan karena dapat menganggu kenyamanan wisatawan dalam aktivitas wisata khususnya mandi dan berenang.Kondisi ini berbeda dengan pantai di bagain barat Pulau Marsegu yang merupakan pantai berbatu karang terjal dan dibagian barat sebelah selatan yang merupakan pantai berbatu terumbu dan endapan pasir serta pantai terumbu pasir berlumpur dengan vegetasi mangrove yang padat.Hal ini menyebabkan pantai bagian barat Pulau Marsegu tidak dapat digunakan oleh wisatawan untuk melakukan aktivitasnya. Hasil pengamatan secara visual terhadap warna pasir di pantai pulau marsegu adalah warna putih dengansedimen yang halus sampai agak kasar (sedang). Jenis dan warna pasir memberikan nilai tersendiri bagi estetika pantai, dimana pantai yang memiliki warna pasir putih sering diminati oleh wisatawan (Pangesti, 2007) *dalam* (Hazeri, 2014).

Lebar Pantai

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa lebar pantai di Pulau Marseguberkisar 20 - 30 meter.Lebar pantai ini memungkinkan wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas wisata seperti bermain pasir, menikmati pemandangan pantai dan laut, berfoto dan bermain di tepi pantai. Lebar pantai di Pulau Marsegu sudah lebih dari 15 meter dan berdasarkan pendapat Yulianda(2007) sudah sangat sesuai untuk kegiatan wisata pantai. Lebar pantai di Pulau Marsegu juga didukung oleh kelandaian pantai, dimana pantai pasir putih di Pulau Marsegu cenderung datar sampai landai dengan kemiringan 8^{o} sehingga mempengaruhi keamanan dan kenyamanan wisatawan dalam melakukan aktivitasnya seperti mandi, berenang dan bermain di tepi pantai. Menurut Yulianda(2007) pantai menurut bentuknya terdiri dari pantai datar, landau, curam dan terjal, dan pantai yang sesuai untuk kegiatan wisata pantai adalah pantai yang datar dan landai.

Matrial Dasar Perairan

Pengamatan terhadap matrial dasar perairan dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilapangan secara visual. Berdasarkan hasil dilapangan maka matrial dasar perairan di pantai pasir putih Pulau marsegu adalah pasir. Matrial dasar perairan berpasir menurut Yulianda(2007) sangat sesuai untuk kegiatan wisata pantai. Demikian juga Margomgom *dalam* Hazeri(2014) bahwa matrial dasar perairan berupa pasirsangat sesuai untuk aktivitas wisata pantai seperti berenang dan mandi karena memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

Penutupan Lahan Pantai

Penutupan lahan pantai di sekitar pantai Pulau Marsegumasih di dominasi oleh hutan tinggi dan belukar.Jenis-jenis yang dijumpai meliputi *pongomia pinnatam*, *Terminalia cattapa*, *Ficus benjamina*.Pada bagian utara pantai di Pulau marsegu lebih

banyak dijumpai belukar dan alang-alang. Penutupan lahan pantai menurut Yulianda(2007),cukup sesuai untuk kegiatan wisata pantai. Dalam hubungan dengan pengembangan ekowisata pantai maka diperlukan pengelolaan pada kawasan hutan pantai.

Pengamatan Biota Berbahaya

Kegiatan wisatapantai tidak lepas dari ada tidaknya biota berbahaya pada kawasan pantai karena berhubungan dengan kenyamanan dan kepuasan wisatawan tanpa ada rasa takut dan kuatir terhadap kawasan pantai tempat melakukan berbagai aktivitas. Biota berbahaya pada wisatawan di kawasan wisata pantai berupa karang api, landak laut, bulu babi, ubur-ubur dan ular laut. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, lokasi pantai Pulau Marsegu terdapat biota berbahaya seperti bulu babi. Sesuai dengan kategori Yulianda (2007) maka keberadaan bulu babi lokasi pantai dan perairan pulau marsegu termasuk dalam kategori (S2), artinya bahwa kawasan pantai pulau marsegu dapat dilakukan kegiatan wisata namun perlu juga dilakukan kegiatan lapangan untuk meminimalkan keberadaan bulu babi ini.Walaupun dalam jumlah yang kecil, sehingga wisatawan dapat melihat keberadaan bulu babi karena kecerahan perairan yang tinggi. Walaupun demikian keberadaan bulu babi menjadi faktor pembatas bagi kegiatan wisata pantai dan harus di kelola sehingga tidak menganggu aktivitas wisatawan di lokasi pantai Pulau Marsegu.

Ketersediaan Air Tawar

Ketersediaan air bersih berupa air tawar sangat diperlukan untuk menunjang fasilitas pengelolaan maupun pelayanan ekowisata. Hal ini juga merupakan menjadi kriteria penilaian terhadap kelayakan prioritas pengembangan ekowisata pantai (Handayawati, 2010).

Hasil analisis pada matriks kesesuaian wisata pantai, maka keterserdiaan air bersih termasuk dalam kategori S2 (*sesuai*), artinya ketersediaan air bersih perlu dilakukan pengelolaan sehingga dapat mendukung kegiatan wisata. Pulau marsegu memiliki 2 buah sumur air tawar, namun karena jarak antara sumber air tawar dengan lokasi wisata pantai pasir putih Pulau Marsegu adalah 800 m menyebabkan air bersih menjadi faktor pembatas dalam mendukung kegiatan wisata terutama ketersediaan air bersih bagi wisatawan. Oleh karena itu pengelola kawasan perlu menyediakan fasilitas air bersih, sehingga ketersediaan sumber air di lokasi wisata dapat terpenuhi.

C. Kesesuaian Ekowisata Pantai

Kawasan TWA Pulau Marsegu kaya akan potensi wisata bahari termasuk wisata pantai. Lokasi wisata pantai dalam kawasan TWA Pulau Marsegu yang sering dikunjungi adalah pantai sebelah timur bagian tengah sampai ke utara di Pulau Marsegu sepanjang 1,6 Km.

Pengamatan terhadap paramater yang diukur pada analisis kesesuaian untuk wisata pantai meliputi kedalaman perairan, tipe pantai, lebar pantai, material dasar perairan, kecepatan arus, kemiringan pantai, kecerahan perairan, penutupan lahan pantai, ada tidaknya biota berbahaya, dan ketersediaan air tawar. Hasil analisis kesesuaian ekowisata pantai menunjukkan bahwa pantai pasir putih di Pulau Marsegu memilik skor tinggi denganpersentase nilai kesesuaian 96,42 % sehingga termasuk dalam kategori sangat sesuai (SS) untuk kegiatan wisata pantai.

Tingginya nilai kesesuaian untuk wisata pantai di Pantai Pasir Putih Pulau Marsegu disebabkan karena diperoleh nilai tertinggi pada parameter kesesuaian yang diukur, seperti tipe pantai pasir putih dengan kemiringan yang landai, lebar pantai yang luas mencapai 30 m, Kecepatan arus yang tidak terlalu kuat, perairan yang jernih sehingga dasar perairan yang dihuni oleh terumbu karang dapat terlihat jelas keindahannya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Pantai Pasir Putih di Pulau

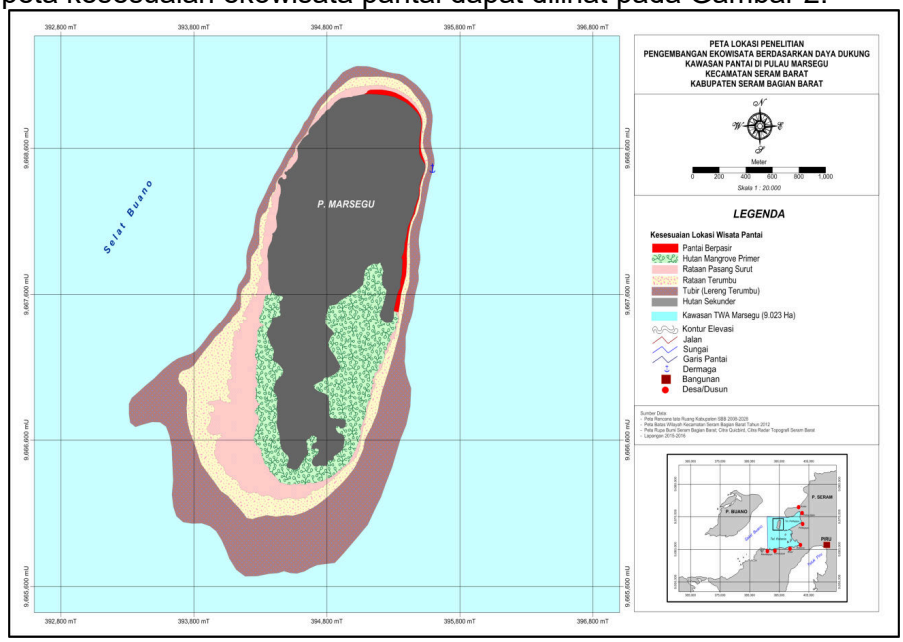
Marsegu memiliki kesesuaian yang tinggi. Penilaian Kesesuaian wisata pantai dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian Kesesuaian untuk WisataPantaidi Pulau Marsegu

Parameter	Kondisi	Bobot	Skor	Nilai
Kedalaman Perairan	0 – 3m	5	3	15
Tipe pantai	Pasir putih	5	3	15
Lebar pantai	20 – 30m	5	3	15
Matrial dasar perairan	Pasir	3	3	9
Kecepatan arus (m/detik)	0,16m/detik	3	3	9
Kemiringan pantai (°)	7°	3	3	9
Kecerahan perairan (%)	80 – 90 %	1	3	3
Penutupan lahan pantai	Hutan	1	1	1
Biota berbahaya	Bulu Babi	1	2	2
Ketersediaan Air tawar (km)	0,8 km	1	2	2
Jumlah				80
Persentasi Kesesuaian				95,42
Kategori Kesesuaian				S1

Keterangan:S1= Sangat Sesuai; S2= Sesuai
Sumber: Hasil analisa

Berdasarkan perhitungan indeks kesesuaian ekowisata bahari untuk wisata pantai diperoleh nilai 95,42 %, hal ini menunjukkan bahwa pantai pasir putih Pulau Marsegu *"sangat sesuai"*dijadikan sebagai kawasan untuk ekowisata pantai. Hasil analisis ini memungkinkandapat dilakukan berbagai aktivitas wisata pantai meliputi renang, berjemur, bermain air, bermain pasir, menikmati pemandangan dan juga snorkeling bagi pemula.
Berdasarkan table 2, dapat diketahui bahwa parameter lingkungan perairan dan karakteristik pantai di Pulau marsegu mendukung untuk kegiatan ekowisata pantai. Gambar peta kesesuaian ekowisata pantai dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Kesesuaian Ekowisata Pantai di Pulau Marsegu

D. Analisis Daya Dukung Kawasan Pantai di Pulau Marsegu

Daya dukung kawasan adalah jumlah wisatawan yang menggunakan suatu areal untuk berwisatayang masih dapat didukung oleh areal tersebut dengan ditandai tidak

adanyaperubahan pada kualitas lingkungan(Douglass, 1975*dalam* Fandeli, 2002).Daya dukung merupakan cara menerapkan konsep dimana ada pembatasan dalam pemanfaatan sumberdaya.Hal ini untuk menjaga kelestarian sumberdaya secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan sumberdaya dan lingkungannya. Menurut Clark (1996) *dalam* Johan dkk. (2011)menyatakan bahwa daya dukung yang ada lebih sering diterapkan sebagai batas kegiatan wisata.

Luas areal yang digunakan untuk kegiatan wisata di pantai pasir putih adalah seluas 8,46 ha maka hasil analisis daya dukung kawasan pantai pasir putih di Pulau Marsegu di peroleh bahwa kegiatan wisata pantai adalah 68 orang/hari.Dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang mengunjungi pantai Pulau Marsegu sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat dan pengelola akomodasi di Pulau Osi berkisar30 - 40 orang/bulan, sehingga dapat dikatakan bahwa pantai ini dapat menampung seluruh kegiatan wisatawantanpamelebihi daya dukung kawasan atau dapat dikatakan bahwa batas daya dukung kawasan masih belum terlampaui daya dukungnya. Untuk itu dapat dilakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan kawasan namun tetap menjaga kelestarian kawasannya.

IV. KESIMPULAN

Kawasan pantai pasir putih di Pulau Marsegu dapat dilakukan kegiatan ekowisata pantai, dengan nilai indeks kesesuaian ekowisata pantai IKW (95,42 %) termasuk kategori "*sangat sesuai*" dengan daya dukung kawasan ekowisata pantai adalah 68 orang/hari.

DAFTAR PUSTAKA

Ali,D.2004. Pemanfaatan potensi sumberdaya pantai sebagai Obyej wisata dan Tingkat kesejahtraan masyarakat sekitar Lokasi Wisata (Studi Kasus di Kawasan Wisata Pantai Kartini Jepara). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang

Balai Konservasi Sumberdaya Alam.2010. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Wisata Alam Pulau Marsegu periode 2011- 2030 Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku,Ambon.

Balai Konservasi Sumberdaya Alam.2015. Laporan Tahunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BKSDA Maluku.

Bengen, D.G. 2002. Sinopsis Ekosistem Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya, Bogor. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. Bogor

Cesar H,L.,Burke and Pet – Soede. 2003. The Economic of World Wide Coral Reef Degradation. Cesar Environmental Economic.Consulting: Arnhen (Netherlands)

Fandeli, C. 2002. Dasar-Dasar Management Kepariwisataan Alam. Liberty.Yogyakarta

Handayawati. 2010. Potensi Wisata Alam Pantai-Bahari. PM PSLP PPSUB Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.2002. Blue Print Pariwisata. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Hazeri,G.2014. Studi Kesesuaian Pantai Laguna Desa Merpas Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur sebagai Daerah Pengembangan Pariwisata dan Konservasi. Skripsi.Fakultas Pertanian. Universitas Bengkulu, (tidak dipublikasikan)

Irwanto, 2007. Analisis vegetasi untuk Pengelolaan Hutan Lindung Pulau Marsegu Kabupaten Seram Bagian Barat. Thesis Universitas Gadjah Mada.

Johan, Y., F. Yulianda, V.P. Siregar, dan I. Karlina. 2011. Pengembangan wisata bahari dalam pengelolaan sumberdaya Pulau-pulau kecil berbasis Kesesuaian dan daya dukung. Studi KasusPulau Sebesi Provinsi Lampung.Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Pulau-Pulau Kecil 2011.

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Tentang Baku Mutu Air Laut. Lampiran II tentang Baku Mutu Air Laut untuk Wisata Bahari.

Nybakken,J.W.1992. Biologi Laut.Suatu Pendekatan Ekologi. Gramedia Jakarta

Yulianda,F.2007. Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya

Yulisa, E.N., Y. Johan, dan D. Hartona. 2016. Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Ekowisata Pantai Kategori Rekreasi Pantai Laguna Desa Merpas Kabupaten Kaur. *Jurnal Enggano* 1: 97-111.

Evaluasi Jasa Lingkungan Kawasan Wisata Konservasi dengan Pendekatan *Travel Cost Method*

Kartika Eka Sari[1]dan Nindya Sari[1]
[1]Fakultas Teknik, UniversitasBrawijaya, Malang
Email: kartika_plano@yahoo.co.id; annodiva22@yahoo.com

ABSTRAK

Sektor pariwisata adalah satu satu sektor ekonomi yang kuat di Jawa Timur. sektor yang berkembang di Provinsi jawa timur . Berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Wisatawan merupakan wisatawan domestik dan mancanegara yang meningkat sebesar 68,2 % sehingga total wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 adalah sebanyak 7.526.833 jiwa. Beberapa objek wisata terkenal di Propinsi Jawa Timur, selain memberikan jasa rekreasi, tetapi juga memberikan jasa lingkungan yang diterima oleh pengunjung/wisatawan, yaitu Kebun Raya Purwodadi, Taman Safari Prigen dan Pemandian Air Panas Cangar. Travel Cost Method adalah salah satu metode yang digunakan untuk mevaluasi secara ekonomi, jasa lingkungan yang diterima oleh wisatawan dari objek wisata. Berdasarkan hasil analisis TCM, diketahui bahwa jasa lingkungan dipengaruhi oleh biaya perjalanan dan pendapatan per bulan. Manfaat yang didapatkan wisatawan di tiga objek wisata tersebut mengalami surplus, yang artinya manfaat yang di dapat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan wisatawan. Pada objek wisata Kebun Raya Purwodadi, dari ajsa budaya didapatkan nilai surplus sebesar Rp. 108.464/orang/kunjungan, sedangkan dari jasa pengaturan Kebun Raya Purwodadi, didapatkan nilai surplus sebesar Rp. 158.598/orang/kunjungan. Pada objek wisata Taman Safari Prigen di dapatkan nilai surplus sebesar Rp. 422.800/orang/kunjungan. Sedangkan pada objek wisata Pemandian Air Panas Cangar didapatkan surplus sebesar Rp. 75.218/orang/kunjungan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa jasa lingkungan yang akan di terima oleh wisatawan sangat tergantung dari kemudahan akses menuju ke objek (biaya perjalanan), selain itu juga dapat diketahui bahwa umumnya, manfaat dari objek wisata yang diterima oleh wisatawan lebih besar dari harga yang dibayarkan oleh wisatawan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk kelayakan pengembangan kawasan wisata berbasis lingkungan.

Katakunci:jasa lingkungan, wisata, biaya perjalanan

I. PENDAHULUAN

Konsep wisata lingkungan dikemukakan oleh Hector Ceballos-Lascurain sejak 1987 dimana wisata lingkungan adalah perjalanan bertanggung jawab ke tempat-tempat yang relatif masih belum tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan, flora dan fauna, serta bentuk manifestasi budaya masyarakat baik dari masa lalu hingga masa kini. Beberapa aspek kunci dalam wisata lingkungan adalah jumlah pengunjung disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan sosial masyarakat, pola wisata ramah lingkungan, pola wisata ramah budaya dan adat setempat, membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal, dan modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan World Wildlife Fund for Nature-Indonesia, 2009).

Pariwisata berkaitan erat dengan perjalanan yang dilakukan individu atau lebih menuju tempat lain (Suwantoro, 2004). Pariwisata saat ini merupakan sektor yang berkembang di Provinsi jawa timur . Berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun 2014

(BPS, 2014). Wisatawan merupakan wisatawan domestik dan mancanegara yang meningkat sebesar 68,2 % sehingga total wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 adalah sebanyak 7.526.833 jiwa.

Beberapa objek wisata yang memiliki konsep wisata lingkungan di Propinsi Jawa Timur adalah Kebun Raya Purwodadi, Taman Safari Prigen dan Pemandian Air Panas Cangar. Kebun Raya Purwodadi merupakan wisata berbasis lingkungan yang didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh Dr. L.G.M. Baas Becking. Kebun ini merupakan salah satu dari tiga cabang Kebun Raya Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi mengoleksi tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering. Kebun Raya Purwodadi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bernaung dibawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Kebun Raya Purwodadi, 2015).

Taman Safari Indonesia Prigen merupakan lembaga konservasi Ex-Situ yaitu kegiatan melindungi spesies hewan atau tumbuhan yang berada di luar habitat aslinya dan dalam pengawasan manusia yang telah terakreditasi oleh kementerian Kehutanan, LIPI akademik, dan perhimpunan kebun binatang Se-Indonesia. Berdasarkan Master Plan TAHURA tahun 2001, Wisata Pemandian Air Panas Cangar merupakan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soeryo sehingga area tersebut dapat mendukung pengembangan pariwisata alam, dimana wisata tersebut tidak langsung mengenalkan kepada pengunjung atau wisatawan untuk berpatisipasi dalam melindungi ekosistem yang ada. Ketiga objek wisata tersebut memiliki dua jasa yang ditawarkan kepada wisatawan sebagai konsumen, yaitu jasa wisata dan jasa lingkungan. Jasa lingkungan sering tidak terkuantifikasi dalam perhitungan nilai sumberdaya alam karena tidak memiliki nilai pasar dimana kegiatan konsumsi sumber daya alam oleh pengunjung wisata yang dapat menghasilkan manfaat atau biaya yang belum tercakup pada perhitungan proses konsumsi dari sumber daya alam tersebut (Prasetyia, 2015), Mengenai Value/nilai yang didapatkan oleh konsumen, objek wisata lingkungan memberikan jasa rekreasi sebagai output dari pemanfaatan sumberdaya lingkungan yang dilakukan. Jasa rekreasi merupakan nilai manfaat lingkungan yang intangible yaitu tidak dapat dikuantitatifkan secara langsung dalam satuan yang dapat diukur. Sehingga dibutuhkan suatu penilaian (valuasi) untuk mengetahui besaran manfaat objek sebagai tempat wisata sekaligus lembaga konservasi yang memanfaatkan lingkungan. Pendekatan biaya perjalanan atau Travel Cost Methode (TCM) merupakan cara untuk menduga nilai ekonomi sebuah kawasan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pengunjung (Raharjdo, 2002). Pendekatan TCM menganggap bahwa biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengunjung/wisatawan untuk menuju ke tempat wisata adalah sebagai nilai lingkungan yang wisatawan bersedia untuk membayarnya (Suparmoko, 2014).

II. METODE

Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan untuk menghasilkan model digunakan metode analisis regresi linier berganda karena menguji pengaruh lebih dari 1 (satu) variabel bebas terhadap variabel terikatnya.Analisis regresi linear berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) berguna untuk mencari hubungan antara dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas (X_1, X_2, X_3,..... X_n) dengan variabel dependen atau yang disebut variabel terikat (Y).Agar tercipta model regresi yang baik, maka pada penelitian ini digunakan metode *backward elimination*. Metode backward elimination bekerja dengan mengeluarkan satu per satu variabel bebas tidak signifikan dan dilakukan secara terus menerus hingga tidak ada variabel bebas yang tidak signifikan. Metode backward elimination bekerja dengan mengeluarkan satu per satu variabel bebas tidak signifikan dan dilakukan secara terus menerus hingga tidak ada variabel bebas yang tidak signifikan. Langkah-langkah metode backward sebagai

berikut:

1. Membuat model dengan meregresikan variabel terikat dengan semua variabel bebasnya.
2. Mengeluarkan satu per satu variabel bebas dengan melakukan pengujian terhadap parameternya menggunakan nilai probability terbesar.

Fungsi permintaan yang dihasilkan dari perhitungan regresi digunakan untuk menghitung nilai surplus konsumen sebagai nilai manfaat lingkungan. Untuk menghasilkan surplus konsumen per individu digunakan perhitungan integral terbatas dengan batas atas dan batas bawah. Surplus konsumen adalah kelebihan antara kepuasan yang dinikmati oleh konsumen dengan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh atau mengkonsumsikan suatu barang atau jasa. Untuk Menghasilkan Surplus Konsumen per Individu per tahun sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$SK = \int_{P0}^{P1} (a - bPx)\, dPx \qquad (1)$$

Keterangan :
SK = Surplus Konsumen
a = Konstanta
b= Koefisien regresi
Px = Harga atau jumlah biaya perjalanan
P1= Batas atas (biaya perjalanan tertinggi)
P0 = Batas bawah (biaya perjalanan terendah)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Wisata Kebun Raya Purwodadi

Kebun Raya Purwodadi dibuka untuk umum dan dibuka setiap hari mulai, dijelaskan pada tabel 1.

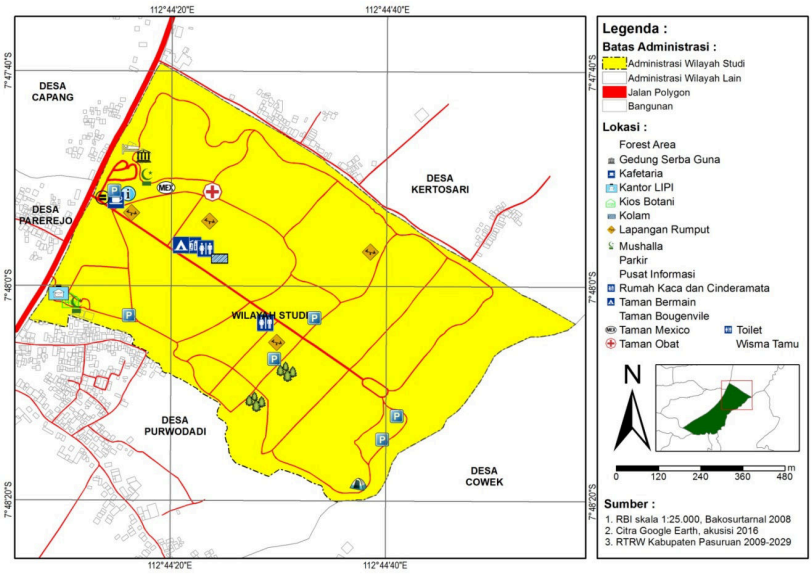
Tabel 1.Informasi Biaya Masuk Kebun Raya Purowdadi

Weekday	Senin – Jumat
Weekend	Sabtu - Minggu
Jam Buka	07.30 WIB – 16.00 WIB
Tarif Pengunjung	Rp. 6.000,00
TarifParkirSepeda Motor	Rp.2.000,00
TarifParkir Mobil	Rp. 3.000,00
Mobil Keliling	Rp. 10.500,00
Roda 2 (sepeda) keliling	Rp. 5.500,00
Bus/Truk	Rp. 5.500,00
SewaSepeda	Rp. 10.000/jam

Sumber: Kebun Raya Purwodadi, 2015

Kebun Raya Purwodadi juga memberikan pelayanan jasa berupa identifikasi tumbuhan, pelayanan jasa mengajar, pelayanan kunjungan rombongan, layanan pendidikan lingkungan (pemanduan ilmiah), layanan pendidikan lingkungan (pemanduan wisata/umum), layanan jasa pembimbingan penelitian, paket pendidikan lingkungan tematik, layanan jasa perpustakaan, pendampingan praktik kerja lapang, pemotretan prewedding, sewa fasilitas area, pelayanan rumah tamu untuk tamu dinas maupun tamu umum, pelayanan penyewaan ruang pertemuan (Gedung Serbaguna, Ruang Pertemuan, dan Kafe Gardenia), dan kegiatan syuting.

Dalam perkembangannya UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi diharapkan akan menjadi pusat konservasi dan penelitian tumbuhan dataran rendah kering Indonesia.



Gambar1.LokasiObjekWisataKebun Raya Purwodadi

B. Faktor yang mempengaruhi jumlah perjalanan ke Kebun Raya Purwodadi

Variabel yang mempengaruhi jumlah perjalan ke Kebun Raya Puwodadi digambarkan dalam model berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_{61}X_{61} + \beta_{62}X_{62} \quad (2)$$

Keterangan:

Y = Jumlah Kunjungan
X_1 = Biaya perjalanan
X_2 = Jarak
X_3 = Umur
X_4 = Jenis Kelamin
X_5 = Penghasilan rata-rata/individu/bulan
X_{61} = Pendidikan terakhir SMP
X_{62} = Pendidikan terakhir SMA/SMK

Berdasarkan analisisregresi linier berganda dengan model *backward elimination*, model terbaik yang didapatkan adalah

$$Y = 2.080236 - 0.0000163\ X_1 + 0.000000815\ X_5 \quad (3)$$

Keterangan:

Y = Jumlah Kunjungan
X_1 = Biaya perjalanan
X_5 = Penghasilan rata-rata/individu/bulan

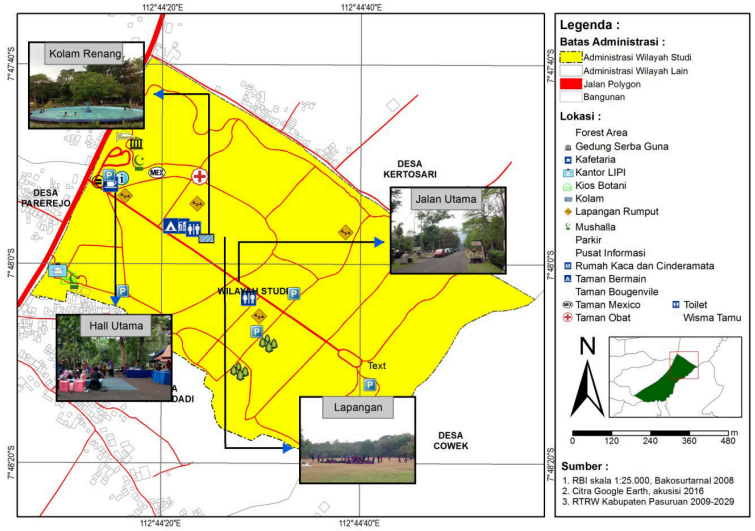
Dari model terbaik tersebut dapat diketahui 2 variabel bebas yang mempengaruhi jumlah permintaan kunjungan ke Kebun Raya Purwodadi, yaitu biaya perjalanan ke Kebun Raya Purwodadi dan penghasilan per bulan. Nilai konstanta sebesar 2.080236 dapat diartikan, apabila semua variabel bebas yang signifikan dianggap tidak berpengaruh (nol/konstan), maka jumlah permintaan kunjungan sebesar 2 kali / tahun.

C. Valuasi Lingkungan Kebun Raya Purwodadi

Model regresi yang dihasilkan sebelumnya dijadikan persamaan guna menghasilkan surplus konsumen. Persamaan tersebut sebagai berikut:

$$SK = \int_{10.000}^{125.000} (1{,}963841 - 0{,}0000322X_1)\ dP \quad (4)$$

Selanjutnya dari persamaan tersebut digunakan untuk menghasilkan surplus konsumen sebagai nilai ekonomi. Untuk menghasilkan surplus konsumen per individu per tahun digunakan integral terbatas dengan batas atas sebesar Rp. 125.000 dan batas bawah sebesar Rp. 10.000. Pada hasil perhitungan *Travel Cost Method* pada jasa budaya, manfaat yang diberikan oleh lingkungan di Kebun Raya Purwodadi sebesar Rp. 108.464,51 per individu per 1 kali kunjungan, sedangkan pada jasa pengaturan sebesar Rp. 158.598,07 per individu per satu kali kunjungan.

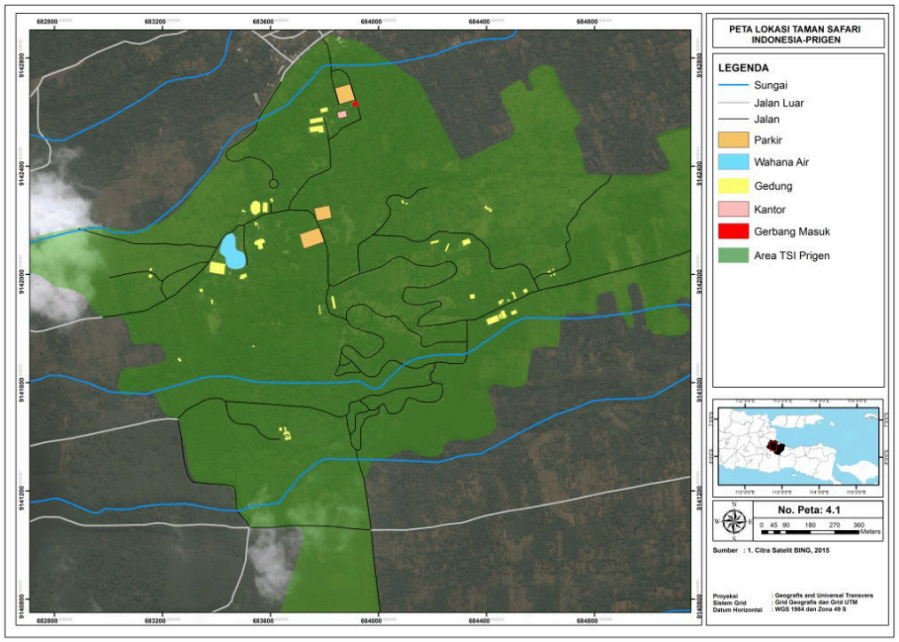


Gambar 2. Photo Mapping Objek Wisata Kebun Raya Purwodadi

D. Karakteristik Objek Wisata Taman Safari Prigen

Taman Safari Prigen ini dibangun pada kawasan seluas 350 hektar di wilayah kaki pegunungan Arjuna di Kecamatan Prigen, Kabupaten pasuruan, Jawa timur. Akses masuk Taman Safari Prigen terletak di Jalan Raya Malang-Surabaya. Taman Safari Prigen ini dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil dan juga kendaraan besar sepert Bus Wisata. Berada di ketinggian 800-1500 meter diatas permukaan laut memiliki suhu udara berkisar 20 – 25 derajat celcius.

Biaya masuk TSI bervariasi tergantung karakteristik pengunjung dan jenis aktifitas yang diinginkan pengunjung. Pada *weekday* harga tiket TSI berkisar antara Rp. 65.000 – Rp.115.000, pada *weekend* harga tiket TSI berkisar antara Rp.80.000 – 135.000. Sedangkan harga tiket TSI untuk wisatawan asing berkisar antara Rp. 120.000 – 160.000



Gambar 3. Lokasi Objek Wisata TSI Prigen

E. Faktor yang mempengaruhi jumlah perjalanan ke Taman Safari prigen

Hubungan variabel yang ada dapat digambarkan dalam fungsi berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 \quad (5)$$

Keterangan :

Y = Jumlah kunjungan (Kunjungan individu per tahun)
X_1 = Jarak (Km)
X_2 = Umur (Tahun)
X_3 = Penghasilan (Rupiah)
X_4 = Biaya Perjalanan (Rupiah)
b_0 = Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4, = KoefisienRegresi

Berdasarkan analisis regresi, model terbaik yang didapatkan adalah

$$Y = 2{,}783 - 0{,}008273\ X1 - 0{,}0004106\ x4 \quad (6)$$

Keterangan :

Y = Jumlah Kunjungan
X1 = Jarak (Km)
X4 = Biaya perjalanan (Rupiah)

Variabel bebas yang mempengaruhi jumlah perjalanan ke TSI adalah Jarak dan Biaya perjalan dengan nilai konstanta 2,783 yang dapat diartikan, apabila semua variabel bebas yang signifikan dianggap 0 (kontan), maka jumlah permintaan kunjungan ke TSI sebesar 3 kali/tahun

F. Valuasi Lingkungan Taman Safari Prigen

Persamaan yang dihasilkan sebelumnya diketahui terdiri dari nilai Konstanta, dan variabel biaya perjalanan. Persamaan model tersebut adalah sebagai berikut.

$$SK = = 2{,}783 - 0{,}008273\ X1 - 0{,}0004106\ x4 \quad (7)$$

Persamaan yang ada kemudian diintegralkan untuk menghasilkan surplus konsumen. Integral yang dilakukan merupakan integral terbatas dengan batas atas adalah biaya paling besar yang dikeluarkan responden yaitu sebesar Rp.380.000 dan batas bawah adalah biaya paling sedikit yang dikeluarkan responden yaitu

Rp.135.000

Berdasarkan analisis TCM, nilai manfaat lingkungan yang diberikan oleh TSI Prigen sebesar Rp. 422.988/kunjungan. Jika dibandingkan dengan harga tiket masuk TSI Prigen, maka dapat diketahui bahwa pengunjung TSI Prigen mendapatkan manfaat lingkungan yang lebih besar daripada yang dibayarkan.

G. Karakteristik Objek Wisata Cangar

Daya tarik utama di OWA Cangar yaitu berupa air panas alami yang bersum berdari kaki Gunung Welirang dengan suhu berkisar 35° - 45° C. Pemandian Air Panas Cangar memiliki 6 kolam renang air panas, *playground*, pendopo / aula, *camping ground,* warung/tempat makan, *green house*, pondok wisata dan lain-lain.

Biaya masuk ke objek wisata Cangar bervariasi tergantung jenis wisatawan dan aktifitas wisatawan. Lebih jelas dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.Informasi Biaya Masuk Objek Wisata Cangar

Hari	Harga
Wisatawan Nusantara (*Weekday* dan *Weekend*)	Rp 5.500 / orang
WisatawanMancanegara (*Weekday* dan *Weekend*)	Rp 25.000,00 / oramg
Faslitas Kolam Renang	Rp 5.000,00 / orang dewasa
Kamar Rendam	Rp 5.000,00 / orang

H. Faktor yang mempengaruhi jumlah perjalanan ke Objek Wisata Cangar

Hubungan variabel yang ada dapat digambarkan dalam fungsi berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 \quad (8)$$

Keterangan:

Y = Jumlah kunjungan permintaan di OWA Cangar (1 TahunTerakhir)

X_1 = Jeniskelamin

X_2 = Umur

X_3 = Tingkat pendidikan

X_4 = Pendapatan per bulan

X_5 = Jarak

X_6 = Motivasi

X_7 = Biayaperjalanan

Dari ketujuh variable bebas yang diuji hanya terdapat tiga variable bebas saja yang memiliki pengaruh signifikan terdapat jumlah kunjungan ke Objek Wisata Cangar, sehingga d idapatkan model terbaik sebagai berikut.

$$Y = 2{,}246803 + 0{,}671286\ X_4 - 0{,}00000229\ X_7 \quad (9)$$

Keterangan:

Y = Jumlah Kunjungan Permintaan dalam 1 TahunTerakhir (Kali/tahun)

X_4 = Pendapatan per Bulan (rupiah)

X_7 = BiayaPerjalanan (rupiah)

Berdasarkan model terbaiktersebut, diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi perjalanan wisata ke OWA Cangar adalah variable pendapatan per bulan dan biaya perjalanan dengan konstanta 2,246803 yang dapat diartikan, apabila ketiga variable bebas tidak mengalami perubahan/konstan maka jumlah kunjungan ke Objek Wisata Cangar sebesar 2 kunjungan/tahun.

I. Valuasi Lingkungan Objek Wisata Cangar

Persamaan yang dihasilkan sebelumnya diketahui terdiri dari nilai Konstanta, dan variabel biaya perjalanan. Persamaan model tersebut adalah sebagai berikut.

$$SK = \int_{12.750}^{66.040} (2{,}246803 - 0{,}00000209)\,dx$$

Dimana integral batas bawah sebesar Rp 12.750,- sebagai biaya perjalanan terendah dan integral batas atas sebesar Rp 65.040,- sebagai biaya perjalanan tertinggi.Berdasarkan analisis TCM, nilai manfaat lingkungan yang diberikan oleh Objek Wisata Cangar sebesar Rp. 37.609/kunjungan. Jika dibandingkan dengan harga tiket masuk Objek Wisata Cangar, maka dapat diketahui bahwa pengunjung Objek Wisata Cangar mendapatkan manfaat lingkungan yang lebih besar daripada yang dibayarkan.

Berdasarkanhasilanalisis yang telah dilakukan maka dapat dilakukan komparasi terhadap ketiga objek wisata alam di Jawa Timur tersebut sebagai berikut (Tabel 3).

Tabel 3.Surplus Pengunjung

Objek Wisata	Biaya Masuk	Faktor Jumlah Kunjungan	Nilai manfaat lingkungan	Surplus pengunjung
Purwodadi	Rp. 2.000 – Rp. 10.500	• Biaya Perjalanan • Pendapatan	Rp. 108.464	5.423 % - 1.032 %
Taman Safari Prigen	Rp. 65.000 – Rp. 160.000	• Jarak • Biaya Perjalanan	Rp. 422.988	650% - 264 %
Cangar	Rp.5.500 – Rp. 25.000	• Jenis Kelamin • Pendapatan • Biaya Perjalanan	Rp. 108.464	1.972% - 434%

Berdasarkan hasil regresi terhadap factor-faktor yang mempengaruhi permintaan perjalanan ke objek wisata, biaya perjalanan dan pendapatan termasuk dalam variable yang mempengaruhi permintaan perjalanan yang siginifikan, sedangkan di objek wisata TSI Prigen, variable jarak mempengaruhi permintaan perjalanan dikarenakan

Berdasarkan hasil analisis TCM pada ketiga objek wisata tersebut, dapat diketahui bahwa nilai manfaat yang dirasakan pengunjung di ketiga objek wisata tersebut lebih besar dari pisa biaya tiket yang dibayarkan pengunjung dengan range nilai surplus 264% - 5.423 %/1 kali kunjungan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan jasa ekosistem yang dirasakan pengunjung, Kebun Raya Purwodadi memiliki 2 jasa, yaitu jasa budaya dan jasa pengaturan. Sedangkan Jasa ekosistem yang di rasakan pengunjung TSI Prgen dan Objek wisata Cangar adalah jasa pengaturan. Sehingga dapat disimpulkan pengembangan objek wisata yang sesuai dengan manfaat yang dirasakan pengunjung lebih memprioritaskan fungsi objek wisata sebagai suatu ekosistem yang mampu mengatur iklim, siklus air dan biokimia, proses permukaan tanah, dan berbagai proses biologis.

Berdasarkan analisis *Travel Cost Method* dapat disimpulkan bahwa nilai manfaat yang dirasakan pengunjung lebih besar daripada nilai/ biaya yang dibayarkan oleh pengunjung. Perbedaan antara biaya yang dibayar dengan nilai manfaat yang dirasakan pengunjung Kebun Raya Purwodadi sebesar 5.423% - 1.032% atau sekitar 10 – 50 kali lipat harga tiket masuk. Sedangkan di TSI Prigen, nilai manfaat yang dirasakan pengunjung sekitar 650 % - 264% atau sekitar 2 sampai 6 kali lipat harga tiket yang harus dibayar pengunjung. Nilai manfaat lingkungan yang paling kecil adalah nilai manfaat yang dberika oleh Objek Wisata Cangar sebesar Rp. 108.464, tetapi jika dibandingkan dengan biaya tiket masuk, surplus yang dirasakan

pengunjung berkisar antara 1.972% - 434 % atau sekitar 4 – 19 kali lipat harga tiket masuk Objek Wisata Cangar.

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangkan untuk:

1. Kelayakan pengembangan kawasan wisata berbasis konservasi lingkungan. Hasil dari metode TCM dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan layak tidaknya kawasan wisata dikembangkan berdasarkan nilai manfaat yang dirasakan wisatawan
2. Pertimbangan ekonomis untuk peningkatan harga tiket masuk, karena berdasarkan hasil penelitian nilai manfaat yang dirasakan pengunjung lebih besar daripada nilai tiket masuk yang harus dibayar pengunjung
3. Alternatif atau konsep pengembangan wisata yang berbasis konservasi, karena dari hasil survey menunjukkan bahwa jasa ekosistem yang dominan dirasakan pengunjung adalah jasa pengaturan.

DAFTAR PUSTAKA

BadanPusatStatisti. 2015. JawatimurdalamAngka. www.jatim.bps.go.id

Raharjo, Achmad. 2002. MenaksirNilaiEkonomi Taman HutanWisataTawamangu: Aplikasi Individual Travel Cost Methode. ManusiadanLingkungan Vol IX No.2 Juli

Samsudin, Budioni, Hermawan. 2012. ValuasiEkonomi Taman Nasional Bunaken :Aplikasi TRAVEL COST METHODE (TCM). UniversitasPadjajaran

Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasarPariwisata. Andi : Yogyakarta

Suparmoko. 2014. ValuasiEkonomisumberdayaalamdanlingkungan. BPFE:Yogyakarta

DokumenTahunLembagaIlmuPengetahuan Indonesia Kebun Raya Purwodaya 2011 - 2015

Analisis Daya Dukung Lingkungan Pengembangan Pariwisata Kawasan Hutan Lindung Sekaroh Kabupaten Lombok Timur

Lalu Razieb Ariaharfi[1]

[1]*Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang*
Email: lalurazieb@gmail.com

ABSTRAK

Kawasan Hutan Lindung Sekaroh yang terletak di Kabupaten Lombok Timur merupakan area hutan yang tengah dikembangkan menjadi kawasan wisata karena memiliki beberapa destinasi wisata. Beberapa objek wisata yang ada di kawasan ini di antaranya adalah: Tanjung Ringgit, Pantai Pink, Pantai Segui, Pantai Penyisuk dan Pantai Sunut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis daya dukung lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh sebagai kawasan wisata. Metode yang digunakan adalah perhitungan berdasarkan rumus Cifuentes (1992) yang termodifikasi terdiri dari Daya Dukung Fisik (Physical Carrying Capacity/PCC), Daya Dukung Riil (Real Carrying Capacity/RCC) dan Daya Dukung Efektif (Effective Carrying Capacity/ECC). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi/survei lapangan, studi literatur, pembagian kuisioner serta wawancara terbatas. Hasil perhitungan daya dukung lingkungan diperoleh nilai PCC sebesar 765.004 pengunjung/hari; nilai RCC sebesar 34.489 pengunjung/hari dan nilai ECC sebesar 14.830 pengunjung/hari. Hasil RCC dan ECC tersebut belum termasuk perhitungan variabel indek diversitas flora dan fauna karena disebabkan kesulitan memperoleh data. Nilai ini dibandingkan dengan jumlah rata-rata pengunjung aktual saat ini yaitu 60 pengunjung/hari masih jauh di bawah nilai daya dukung efektif hasil perhitungan. Berdasarkan nilai daya dukung efektif yaitu nilai yang telah mempertimbangkan faktor kondisi biofisik lingkungan dan kapasitas menejemen, maka pengembangan obyek wisata di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh ke depan masih dapat dioptimalkan, dengan salah satunya melalui optimalisasi jumlah pengunjung sesuai daya dukung efektif sebesar 14.830 pengunjung/hari yang belum termasuk perhitungan indeks diversitas flora dan fauna, sehingga keseimbangan kondisi lingkungan dengan aktivitas wisata dapat tetap terjaga dan berkelanjutan.

Kata kunci: daya dukung lingkungan, metode cifuentes, wisata, hutan lindung sekaroh.

I. PENDAHULUAN

Kawasan Hutan Lindung Sekaroh terletak di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, memiliki beberapa destinasi wisata yang tengah dikembangkan pemerintah menjadi kawasan ekowisata. Hutan Lindung Sekaroh sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu blok inti yang luasnya 298,86 Ha dan blok pemanfaatan seluas 2.535,34 Ha. Rencana Kawasan Hutan Lindung Sekaroh yang akan dimanfaatkan untuk kawasan pariwisata adalah pada blok pemanfaatan, hal ini telah dijelaskan dalam Desain Tapak Kelompok Hutan Sekaroh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Rinjani Timur (Unit IV) tahun 2014. Blok pemanfaatan merupakan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap memerhatikan aspek lingkungan, sedangkan blok inti merupakan kawasan hutan yang keberadaannya tidak boleh diganggu gugat. Untuk blok pemanfaatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu blok pemanfaatan Jasling dan blok pemanfaatan Hkm. Blok pemanfaatan Jasling merupakan blok pemanfaatan yang dapat diperuntukan sebagai jasa lingkungan seperti mendirikan hotel, sedangkan blok pemanfaatan Hkm

merupakan hutan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai lahan untuk bercocok tanam.

Beberapa area wisata di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh di antaranya adalah Pantai Pink, Tanjung Ringgit, Pantai Sunut, Pantai Penyisuk dan Pantai Segui. Semua area wisata ini berada di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh blok pemanfaatan. Meskipun berada di kawasan hutan lindung, pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama investor melihat area wisata di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh memiliki potensi yang besar dan kemungkinan akan memberikan dampak signifikan bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Timur.

Menjadi satu-satunya area hijau di Kecamatan Jerowaru, Hutan Lindung Sekaroh memiliki iklim suhu udara yang cukup panas dan sangat jarang terjadi hujan. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat setempat yang seringkali mengambil dan menebang pohon secara ilegal di kawasan hutan lindung sekaroh (Fathul, 2015). Itu menyebabkan beberapa wilayah hutan menjadi gundul dan tandus. Padahal, sudah jelas tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pasal 47, bahwa setiap pemegang izin pemanfaatan hutan berkewajiban:

a. membuat rencana kerja untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin;
b. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberikan izin;
c. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 3 bulan sejak diberikan izin usaha, kecuali untuk izin pemungutan hasil hutan;
d. membuat laporan kegiatan secara periodik;
e. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan;
f. pemegang izin dalam bentuk Badan Usaha wajib menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku;
g. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;
h. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Untuk kewenangan pemberian izin, telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan pasal 37, bahwa izin usaha pemanfaatan kawasan:

a. diberikan oleh Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di dalam wilayah kabupaten/kota;
b. diberikan oleh Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Bupati atau Walikota dan instansi yang bertanggungjawab di bidang kehutanan setempat apabila berada di lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
c. diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada Gubernur, dan Bupati atau Walikota apabila berada di lintas provinsi.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan daya dukung lingkungan di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh untuk mengetahui kemampuan lingkungan menetralisasi parameter pencemar dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan seperti semula. Kemampuan daya dukung lingkungan di kawasan hutan untuk menampung jumlah wisatawan yang berkunjung serta pembangunan beberapa fasilitas sarana dan prasarana pariwisata termasuk di dalamnya. Hal tersebut tentu saja akan memiliki dampak langsung yang cukup besar terhadap kondisi hutan secara keseluruhan. Kondisi Hutan Lindung Sekaroh yang saat ini jauh dari fungsi utama hutan sebagai paru-paru dunia.

Pengertian (konsep) dan ruang lingkup daya dukung lingkungan menurut UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung

lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Siswantoro (2012) pada penelitiannya menyebutkan Daya dukung wisata juga merupakan daya dukung biogeofisik, sosial ekonomi dan sosial budaya dari suatu lokasi atau tapak wisata dalam menunjang kegiatan pariwisata tanpa menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kepuasan wisatawan dalam menikmati lokasi dan tapak wisata.

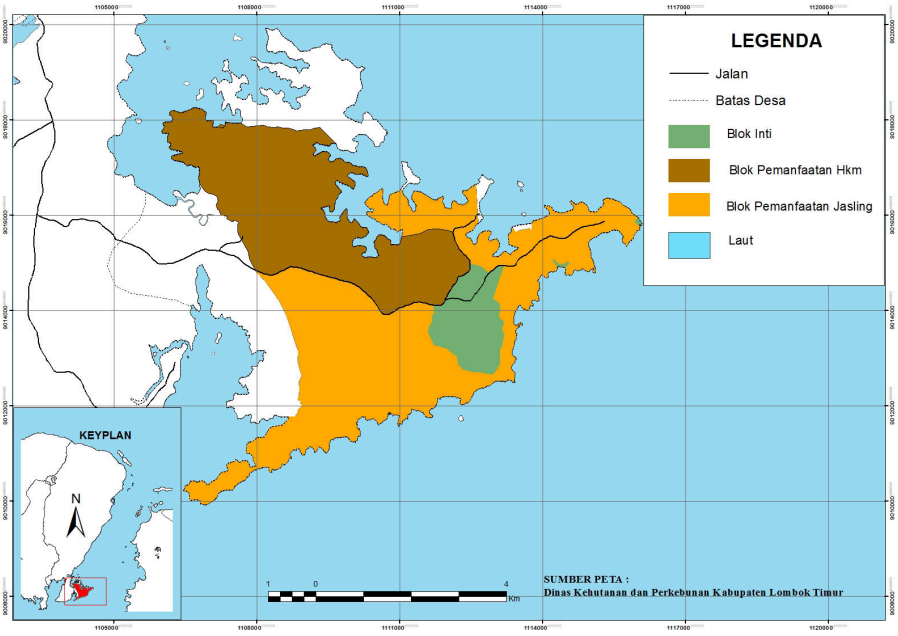
Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui daya dukung lingkungan di kawasan Hutan Lindung Sekaroh berdasarkan analisis daya dukung lingkungan dan persepsi wisatawan.

II. METODE

A. Lokasi dan Waktu

Penelitian daya dukung lingkungan berada di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh, Kecamata Jerowaru, Kabuaten Lombok Timur. Di kawasan hutan lindung yang memiliki luas 2.535,34 Hektar ini terdapat beberapa tempat wisata, di antaranya adalah Pantai Pink, Tanjung Ringgit, Pantai Segui, Pantai Sunut dan Pantai Penyisuk.

Kawasan Hutan Lindung Sekaroh terbagi dalam dua blok, yakni blok inti dan blok pemanfaatan. Blok inti memiliki luas 298,86 hektar dan blok pemanfaatan memiliki luas 2.535,34 hektar. Blok inti merupakan blok yang diperuntukan sebagai hutan lindung yang keberadaannya dilindungi. Sedangkan blok pemanfaatan merupakan kawasan yang keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Untuk blok pemanfaatan berdasarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Rinjani Timur tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu Blok Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Blok Pemanfaaan Jasling. Untuk perhitungan daya dukung lingkungan objek wisata di area Kawasan Hutan Lindung Sekaroh dilakukan pada awal tahun 2016.



Gambar 1. Peta Pembagian Blok

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik pengukuran langsung di lapangan yaitu berupa penyebaran kuesioner untuk mengetahui persepsi wisatawan terhadap variabel daya dukung lingkungan di kawasan studi.. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan melalui studi literatur dan pengumpulan informasi pustaka terkait dengan penilaian daya dukung lingkungan Kawasan Hutan Lindung Sekaroh yaitu antara lain diperoleh dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.

C. Analisis Data

Kerangka penilaian daya dukung lingkungan wisata pada Kawasan Hutan Lindung Sekaroh mengacu pada rumus perhitungan daya dukung wisata yang dikembangkan oleh Cifuentes (1992) dalam Siswantoro (2002). Kerangka ini mencoba untuk menetapkan jumlah kunjungan maksimum suatu area dimana didasarkan pada kondisi fisik, biologi dan kondisi-kondisi manajemen pada area, mempertimbangkan tiga tingkatan utama: daya-dukung fisik (Physical Carrying Capacity/PCC), daya-dukung riil (Real Carrying Capacity/RCC) dan daya-dukung efektif (Effevtive Carrying Capacity/ECC).

Rumus yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan wisata berdasarkan metode Cifuentes (1992) dalam Siswantoro (2002) adalah sebagai berikut:

1. Daya Dukung Fisik (PCC/*Phsycal Carrying Capacity*)

$$PCC = A \times 1/B \times Rf,$$

di mana;
A = luas area yang digunakan untuk wisata
B = luas area yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan untuk berwisata dengan tetap memperoleh kepuasan (untuk kegiatan piknik nilai B adalah 65m2)

2. Daya Dukung Riil (RCC/*Real Carrying Capacity*)

$$RCC = RCC = PCC \times {}^{100-Cf1}/_{100} \times {}^{100-Cf2}/_{100} \times \ldots \times {}^{100-Cfn}/_{100} \text{ atau,}$$

$$RCC = PCC \times Cf1 \times Cf2 \times ... Cfn,$$

di mana:
Cfn (Corrective Factor) = faktor pereduksi/koreksi ke-n terkait dengan variabel ke-n.
Mn = kondisi nyata pada variabel fn terhitung
Mt = batas maksimum pada variabel fn tersebut
Cfn = 1 - (Mn/ Mt)
Cf ..... Cfn = faktor-faktor koreksi dari parameter biofisik lingkungan suatu area wisata.

Untuk menghitung faktor koreksi Cfn digunakan rumus sebagai berikut:

$$Cfn = (Mn/Mt) \times 100\%$$

a) Curah hujan (Cf_1)

Musim hujan cukup mempengaruhi aktivitas wisata di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh yaitu dimana pada bulan-bulan dengan intensitas hujan tinggi dan banyak cenderung mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan yang datang. Perhitungan faktor koreksi curah hujan selama 10 tahun terakhir dengan membandingkan bulan kering dan bulan basah yaitu menggunakan persamaan:

$$\text{Indeks CH} = \Sigma\text{Bulan Basah} : \Sigma\text{Bulan Kering}$$

b) Erosivitas tanah (Cf_3)

Kepekaan tanah suatu area wisata sangat berpengaruh terhadap aktivitas wisata. Area wisata yang kepekaan tanahnya tinggi berarti mempunyai tingkat terjadinya erosi atau tanah longsor juga menjadi besar. Perhitungan faktor

koreksi erosivitas berdasarkan SK Menteri Pertanian No.873/KPTS/UM/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.

c) Kelerengan

Kelerengan atau kemiringan di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh menjadi variabel yang penting untuk mengukur daya dukung lingkungan terhadap aktivitas wisata. Untuk itu persepsi wisatawan terkait kelerengan di kawasan penelitian juga penting. Kemiringan yang menjadi dasar baik atau tidak baik adalah ketika wisatawan tidak nyaman dalam berwisata disebabkan karena kontur tanah yang miring atau tidak sesuai dengan yang diharapkan wisatawan. Perhitungan faktor koreksi kelerengan berdasarkan SK Menteri Pertanian No.873/KPTS/UM/11/1980.tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung

3. Daya Dukung Efektif (ECC/*Effective Carrying Capacity*)

ECC adalah daya dukung efektif (Effective Carrying Capacity); PCC adalah daya dukung fisik (Physical Carrying Capacity); MC adalah kapasitas manajemen area. Parameter terakhir ini didekati melalui kapasitas petugas pengelola pada area wisata, dengan menggunakan rumus (Siswantoro, 2012):

$$ECC = PCC \times MC,$$

di mana:
MC (Manajemen Capacity) = jumlah petugas pengelola.
MC = Rn/Rt x 100%
Rn = Jumlah Petugas Pengelola aktif
Rt = Jumlah Petugas Pengelola Tetap

Rn adalah jumlah petugas pengelola yang ada; Rt adalah jumlah petugas pengelola yang dibutuhkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Hutan Lindung Sekaroh secara geografis terletak di 116º30’10” – 116º35’39” BT dan 8º50’26” - 8º54’33” LS dan memiliki luas 2.834,2 hektar. Secara administratif Kawasan Hutan Sekaroh berada di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kawasan Hutan Lindung Sekaroh terbagi dalam dua blok, yakni blok inti dan blok pemanfaatan. Blok inti memiliki luas 298,86 hektar dan blok pemanfaatan memiliki luas 2.535,34 hektar. Blok inti merupakan blok yang diperuntukan sebagai hutan lindung yang keberadaannya dilindungi. Sedangkan blok pemanfaatan merupakan kawasan yang keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Untuk blok pemanfaatan berdasarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Rinjani Timur tahun 2014 dibagi menjadi dua, yaitu Blok Pemanfaatan HKm dan Blok Pemanfaaan Jasling.

Blok Pemanfaatan HKm merupakan area dari kawasan huan lindung sekaroh yang dapat diperuntukkan untuk masyarakat sekitar yang ingin bercocok tanam seperti jagung atau tebu dan berbagai jenis tumbuhan lainnya. Sedangkan blok Pemanfaatan Jasling merupakan area dari Kawasan Hutan Lindung Sekaroh yang diperuntukkan untuk pengembang usaha seperti contoh untuk mendirikan hotel dan berbagai kegiatan wisata lainnya.

Kawasan Hutan Lindung Sekaroh memiliki rata-rata jumlah wisatawan per harinya yaitu sekitar 60 wisatawan/hari. Sedangkan pada analisis didapatkan hasil Daya Dukung Efektif sebagai berikut:

A = 1.492,4 hektar
B = 65 m^2
Rf = 10/3 = 3,333
PCC = 14.924.000 m^2 x 1/65 m^2 x 3,333
PCC = 2.296 x 3,333 = 765.004 pengunjung/hari

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui nilai 765.004 pengujung/hari merupakan jumlah maksimum pengunjung yang secara fisik dapat mengunjungi areal Kawasan Hutan Lindung Sekaroh setiap hari dengan tetap memperoleh kepuasan. Nilai B ditentukan berdasarkan penelitian dari Douglass (1975) dalam Fandeli & Muhammad (2009) yang menghitung luas area yang dibutuhkan seorang wisatawan untuk tetap meperoleh kepuasan. Nilai B yang digunakan pada perhitungan nilai daya dukung fisik ini adalah untuk jenis aktivitas wisatawan berpiknik yaitu sebesar 65 m². Nilai PCC ini masih mengabaikan faktor-faktor biofisik di lapangan artinya pertimbangan kondisi lingkungan Kawasan Hutan Lindung Sekaroh masih belum digunakan dalam perhitungan daya dukung wisata.

Nilai PCC Kawasan Hutan Lindung Sekaroh jika dikaitkan dengan jumlah pengunjung aktual saat ini yaitu rata-rata 60 pengunjung/hari maka masih sangat jauh dibawah nilai daya dukung fisik hasil perhitungan yaitu 765.004 pengunjung/hari. Nilai rata-rata pengunjung yang datang merupakan nilai rata-rata harian yang datang mengunjungi teratur setiap hari dalam kurun waktu 1 tahun. Asumsi ini tidak mempertimbangkan waktu puncak (peak-season) maupun hari-hari sepi pengunjung (off-season).

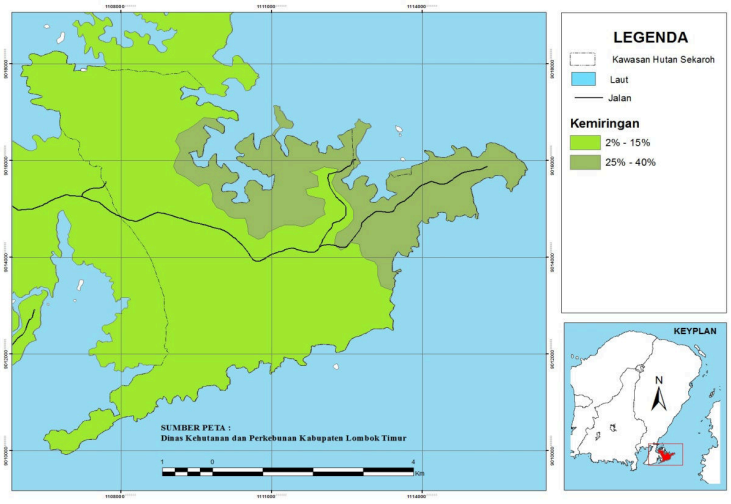
Hasil pengamatan di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh menunjukkan aspek biofisik yang dianggap sebagai faktor pembatas daya dukung lingkungan antara lain: curah hujan (Cf_1), kelerengan (Cf_2), erosivitas tanah (Cf_3), vegetasi (Cf4), dan satwa (Cf5). Perhitungan faktor koreksi menggunakan rumus dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Curah Hujan

Berdasarkan data curah hujan Kecamatan Jerowaru pada tahun 2005 sampai tahun 2015, diperoleh jumlah bulan kering (curah hujan <60mm) sebanyak 70 dan jumlah bulan basah (curah hujan >100 mm) sebanyak 46. Indeks nilai Q yang merupakan perbandingan jumlah bulan kering dan bulan basah selama sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 0,657.

2. Kelerengan

Keenam segmen tersebut merupakan jalan trek wisata dan areal utama wisata. Segmen-segmen tersebut merupakan areal yang aktif dilewati wisatawan. Jalur trek wisata dari pintu masuk menuju areal utama kondisinya relatif landai, hal ini terlihat dari peta kelerengan yang memiliki ketinggian stabil sepanjang jalan. Hanya saja kondisi jalan yang belum beraspal menakibatkan sebagian besar wisatawan mengeluhkan kondisi jalan yang buruk. Kondisi lokasi dengan kelerengan yang curam didapatkan di lokasi wisata Tanjung Ringgit dan Pantai Pink. Hal ini dikarena lokasi wisata tersebut langsung dabatasi oleh tebing yang cukup tinggi. Dari hasil tersebut didapatkan nilai kelerengan untuk Kawasan Hutan Lindung Sekaroh adalah 66 yaitu curam.



Gambar 2. Peta Kelerengan Kawasan Hutan Lindung Sekaroh

3. Erosi Tanah

Berdasarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Rinjani Timur yang disusun tahun 2014, jenis tanah yang berada di Kawasan Hutan Sekaroh adalah mediteran coklat, grumosol kelabu, regosol coklat dan litosol. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.873/KPTS/UM/11/1980, tanah tersebut masuk dalam kategori agak peka dan sangat peka sehingga didapat nilai 40,98 untuk kategori sangat peka. Sehingga didapatkan indeks kepekaan tanah pada Kawasan Hutan Sekaroh adalah sebesar 0,4.

Sebenarnya masih ada dua variabel yang juga penting untuk mengukur nilai Daya Dukung Riil, yaitu Indeks Diversitas Flora dan Indeks Diversitas Fauna. Namun, karena kesulitan memperoleh data yang disebabkan beberapa masalah pada lokasi studi, kedua variabel ini tidak dimasukkan.

Tabel 1. Parameter Perhitungan RCC

Parameter	**Nilai Indeks (x 100%)**	**Nilai Faktor Pengoreksi**
Indeks Kelerengan	0,66	0,34
Indeks Kepekaan Tanah	0,61	0,39
Indeks Curah Hujan	0,657	0,34
PCC =	765.004 Pengunjung/hari	
RCC =	34.489 Pengunjung/hari	

Sumber: hasil analisis 2016

Hasil perhitungan nilai RCC seperti pada tabel di atas menunjukkan jumlah maksimum pengunjung yang dapat mengunjungi Kawasan Hutan Lindung Sekaroh dengan mempertimbangkan faktor biofisik lingkungan. Kondisi biofisik yang cukup membatasi jumlah pengunjung adalah faktor koreksi satwa. Berdasarkan nilai indeks keragaman menunjukan keragaman satwa berada pada level sedang yang artinya tidak ada jenis satwa yang mendominasi dan keragaman jenis cukup stabil. Sehingga apabila daya dukung Kawasan Hutan Lindung Sekaroh terlampaui yaitu jumlah wisatawan yang datang melebihi kapasitas tampung area maka dapat menganggu kondisi habitat satwa dan vegetasi yang ada di lokasi obyek wisata. Faktor koreksi

terendah berikutnya adalah pada faktor biofisik kelerengan pada ruang petualangan dimana pada area ini tingkat kelerengan rata-rata termasuk karegori agak curam – curam sehingga membatasi jumlah pengunjung yang dapat ditampung area ini. Siswantoro (2012) menilai kondisi kelerengan turut mempengaruhi wisatawan dalam menikmati alam dimana lereng yang terjal akan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mendaki atau akan dapat berakibat kelelahan bagi wisatawan.

Selanjutnya dalam penilaian daya dukung lingkungan wisata adalah menghitung daya dukung efektif (Effective Carrying Capacity/ECC) yang dipengaruhi oleh kapasitas manajemen (Management Capacity) petugas pengelola di mana jumlah seluruh staf adalah 30 orang. Namun berdasarkan wawancara dengan manajer pengelola, staf yang bekerja efektif setiap hari di lapangan adalah 13 orang sehingga nilai kapasitas manajemen memberikan hasil nilai MC adalah 43%. Selanjutnya nilai ECC masing-masing ruang dapat ditentukan dengan hasil perhitungan seperti pada tabel berikut ini (Tabel 2).

Tabel 2. Perhitungan ECC

Perhitungan ECC	Hasil
Nilai RCC	40.576 pengunjung/hari
Nilai MC	43%
Nilai ECC	17.448 pengunjung/hari

Sumber: Hasil Analisis 2016

Mengacu hasil perhitungan daya dukung efektif (ECC) di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh membuktikan bahwa dengan jumlah petugas yang ada saat ini sudah cukup mampu melayani jumlah pengunjung yang datang setiap hari dimana rata-rata jumlah kunjungan saat ini sebanyak 60 pengunjung/hari dan ke depan masih dapat dioptimalisasikan jumlah pengunjung hingga mencapai 14.830 pengunjung/hari yang tanpa mencakup variabel flora dan fauna. Namun optimalisasi jumlah pengunjung baik berdasarkan nilai daya dukung riil maupun daya dukung efektif harus disertai dengan optimalisasi kapasitas petugas pengelola sampai dengan 100%.

IV. KESIMPULAN

Hasil penilaian daya dukung lingkungan wisata di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh berdasarkan metode Cifuentes (1992) dalam Siswantoro (2012) memberikan hasil, bahwa nilai daya dukung fisik (Physical Carrying Capacity/PCC) sebesar 765.004 pengunjung/hari; daya dukung riil (Real Carrying Capacity/RCC) sebesar 34.489 pengunjung/hari; dan daya dukung efektif (Effective Carrying Capacity/ECC). ECC sebesar 14.830 pengunjung/hari. Hasil ini masih belum termasuk variabel indeks diversitas flora dan fauna yang disebabkan karena kesulitan dalam memperoleh data di lokasi studi. Keseluruhan nilai ini masih berada cukup jauh di atas jumlah rata-rata pengunjung aktual saat ini yaitu 60 pengunjung/hari. Berdasarkan nilai daya dukung efektif yaitu nilai yang telah mempertimbangkan faktor kondisi biofisik lingkungan dan kapasitas manjamen (belum termasuk flora dan fauna), maka pengembangan Kawasan Hutan Lindung Sekaroh ke depan masih dapat dapat dioptimalkan, dengan salah satunya melalui optimalisasi jumlah pengunjung sebesar 14.830 pengunjung/hari sesuai daya dukung efektif sehingga

keseimbangan kondisi lingkungan dengan aktivitas wisata dapat tetap terjaga dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Fandeli, Chafid dan Muhammad. 2009. Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi Lansekap. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fathul. (2015). Gawah Sekaroh Dijarah. Lombok Post. 21 Oktober hlm. 1&5.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Rinjani Timur (Unit IV) tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Siswantoro. H. (2012). Kajian Daya Dukung Wisata Alam Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar. Tesis. Tidak dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.

Surat Keputusan Menteri Pertanian No.873/KPTS/UM/11/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Strategi Pengembangan Kawasan Agrowisata Kabupaten Lombok Utara

M. Rosulinanda[1], R.M Kunta Lamona W.S[1],Rani Nur Istiqomah[1], Riska Amanda[1], Ade Atmi Sri Hardini[1],Windhasari Retno Palupi[1], Fifin Anggraini[1]

[1]*Fakultas TeknikPerencanaan Wilaya dan Kota , Universitas Brawijaya, Malang*
Email: agropolitanklu@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang No. 26 tahun 2007, tentang penataan ruang kawasan Agropolitan Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirakhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Pembahasan mengenai kawasan agropolitan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penguraian konsep dan strategi pengembangan agropolitan Lombok Utara yang dikaitkan dengan sektor pariwisata sehingga menjadi kawasan agrowisata. Penentuan konsep dan strategi kawasan agropolitan didasari oleh hasil analisis LQ, analisis Growth Share, analisis Sub Sistem Agropolitan serta Force Field Analysis (FFA). Berdasarkan Analisis LQ dan Analisis Growth Share didapatkan 3 komoditas unggulan, yakni kakao, kopi dan kelapa. Hasil Analisis Sub Sistem Agropolitan berupa permasalahan utama serta potensi terkait proses input hingga output komoditas. Data berupa permasalahan serta potensi ini kemudian diolah dalam Force Field Analysis sebagai faktor penghambat dan faktor pendorong dari perumusan strategi agropolitan.

Kata Kunci: Agropolitan, Strategi, Agrowisata

I. PENDAHULUAN

Pertanian adalah sektor yang yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian di Indonesia, sektor ini mencakup berbagai sub sektor lainnya yakni usaha pertanian tanaman pangan, pertanian holtikultura, perkebunan, pertanian peternakan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Dengan Jenis usaha pertanian yang beragam tersebut seharusnya Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Adapun sektor pertanian ini tersebar merata di seluruh Indonesia, sehingga konsep pembangunan kawasan yang mengintegrasikan antara usaha pertanian dan juga Industri yang memungkinkan target pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan atau swasembada pangan. Konsep pembanguanan wilayah yang dapat mengintegrasikan segala sektor tersebut adalah Agropolitan, dimana berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007, tentang penataan ruang kawasan Agropolitan. KawasanAgropolitan adalah kawasan yang teridiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirakhi keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang masuk dalam daerah penerapan kawasan Agropolitan, dimana setiap Kabupaten di provinsi ini memiliki hak dalam mengembangkan kawasan agropolitan dengan memanfaatkan potensi dari komoditas unggulan dari sektor pertanian masing-masing. Kabuapaten Lombok Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk dalam daerah penerapan kawasan Agropolitan. Daerah ini memiliki potensi pertanian yang menonjol, dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahu 2013 sebesar 42%, kemudian jumlah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebesar 52,20% dari total penduduknya, kondisi ini juga didukung dengan berbagai

potensi komoditas unggulan setap subsistem pertanian seperti padi, jagung untuk budidaya pangan, kelapa, kakao, dan kopi sebagai budidaya perkebunan. Berdasarkan alasan tersebut maka kegiatan industri yang kemudian menjadi kegiatan agroindustri, konsep ini dapat diwujudkan dengan menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan Kabupaten Lombok Utara dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah tersebut berbasis potensi sektor pertanian unggulan yang ada di wilayah tersebut.diperlukan sebuah konsep pembangunan yakni Agropolitan, yang memanfaatkan produksi hasil pertanian di wilayah produksi, namun juga menghadirkan konsep agrowisata dengan mengembangkan potensi pariwisata yang terdapat di kawasan perkebunan yang berada di Kabupaten Lombok Utara.

II. METODE

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode analisis deskriptif, evaluatif, hingga preskriptif dalam perumusan visi, misi, dan strategi perencanaan kawasan agropolitan di Kabupaten Lombok Utara. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam proses perencanaan kawasan agropolitan Kabupaten Lombok Utara adalah inovatif strategic planning. Inovatif strategic planning adalah pendekatan perencanaan yang menekankan utama pada pendekatan keilmiahan, berorientasi kepada tindakan dan efektivitas dan menghasilkan rencana aksi sebagai rencana akhir.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan masalah agropolitan di Kabupaten Lombok Utara, nengetahui kriteria pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Lombok Utara serta menyusun strategi dan rencana pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Lombok Utara berdasarkan kriteria pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Lombok Utara.

III. PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis

a. Analisis Struktur Ruang Agropolitan

Struktur ruang kawasan agropolitan adalah wilayah-wilayah yang berhubungan secara fungsional dalam satu sistem kegiatan, yaitu:

1. Agropolitan *centre*, yaitu pusat pengumpul dan pemasaran
2. Agropolitan *district*, yaitu kawasan pusat pertumbuhan
3. *Hinterland* atau satuan kawasan pertanian.

Struktur tata ruang kawasan agropolitan dapat dilihat pada ketersediaan sarana dan prasarana, serta potensi wilayah yang dilakukan analisis untuk mengetahui dan menata kawasan agropolitan. Berikut adalah tabel 1 yang menunjukan hasil perhitungan struktur ruang kawasan agropolitan yang menggunakan dua kriteria penilaian yakni ketersediaan sarana pasar dan panjang jalan per Kecamatan.

Tabel 1 Analisis Struktur Ruang

No	Kecamatan	Pasar	Panjang Jalan (Km)	Jumlah Indeks	Indeks Akhir
1	Tanjung	0.20	0.30	0.50	**0.25**
2	Gangga	0.20	0.16	0.36	0.18
3	Kayangan	0.20	0.21	0.41	0.20
4	Bayan	0.20	0.27	0.47	0.23
5	Pemenang	0.20	0.06	0.26	0.13
Jumlah		**1.00**	**1.00**	**2.00**	**1.00**

b. Analisis Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

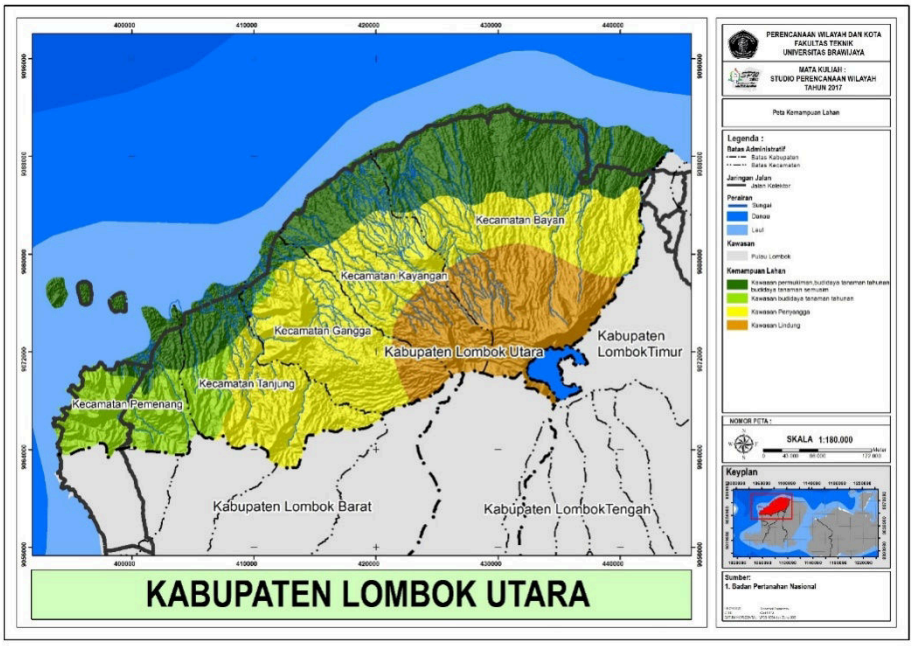
1. Kemampuan lahan
   Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.837/Kpts/Um/11/1980 dan No.683/Kpts/Um/8/1981 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi, terdapat kriteria penetapan fungsi kawasan sebagai penentuan kemampuan lahan yang memiliki tiga faktor yang dinilai sebagai penentuan kemampuan lahan yaitu :
2. Kelerengan lapangan.
3. Jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi.
4. Intensitas hujan harian rata - rata.

Penentuan penggunaan lahan dapat ditentukan dari penjumlahan ketiga faktor diatas dengan melihat kriteria umum menurut Surat Keputusan Menteri Pertanian No.837/ Kpts/ Um/ 11/ 1980 dan No.683/ Kpts/ Um/ 8/ 1981 adalah sebagai berikut:

a) Kawasan lindung, suatu lahan ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung, apabila besarnya skor kemampuan lahannya ≥175
b) Kawasan penyangga, Kawasan dengan jumlah nilai skor untuk kemampuan lahannya 124–174
c) Kawasan budidaya tanaman tahunan, Suatu satuan lahan ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi budidaya tanaman tahunan apabila besarnya nilai skor kemampuan lahannya ≤ 124
d) Kawasan budidaya tanaman semusim
e) Kawasan permukiman, Kawasan pemukiman memiliki nilai kemampuan lahan maksimal 124

Tabel 2 Analisis Kemampuan Lahan

No	Nama Kecamatan	Area	Jumlah	Fungsi Kawasan
1.	Pemenang	A	65	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim
		B	75	Permukiman, budidaya tanaman tahunan
2.	Tanjung	A	65	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim
		B	75	Permukiman, budidaya tanaman tahunan
		C	135	Kawasan Penyangga
		D	165	Kawasan Penyangga
3.	Gangga	A	65	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim
		B	95	Permukiman, budidaya tanaman tahunan
		C	135	Kawasan Penyangga
		D	165	Kawasan Penyangga
		E	175	Kawasan Lindung
4.	Kayangan	A	65	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim
		C	135	Kawasan Penyangga
		E	175	Kawasan Lindung
		F	195	Kawasan Lindung
5.	Bayan	A	65	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim
		C	135	Kawasan Penyangga
		E	175	Kawasan Lindung
		F	195	Kawasan Lindung



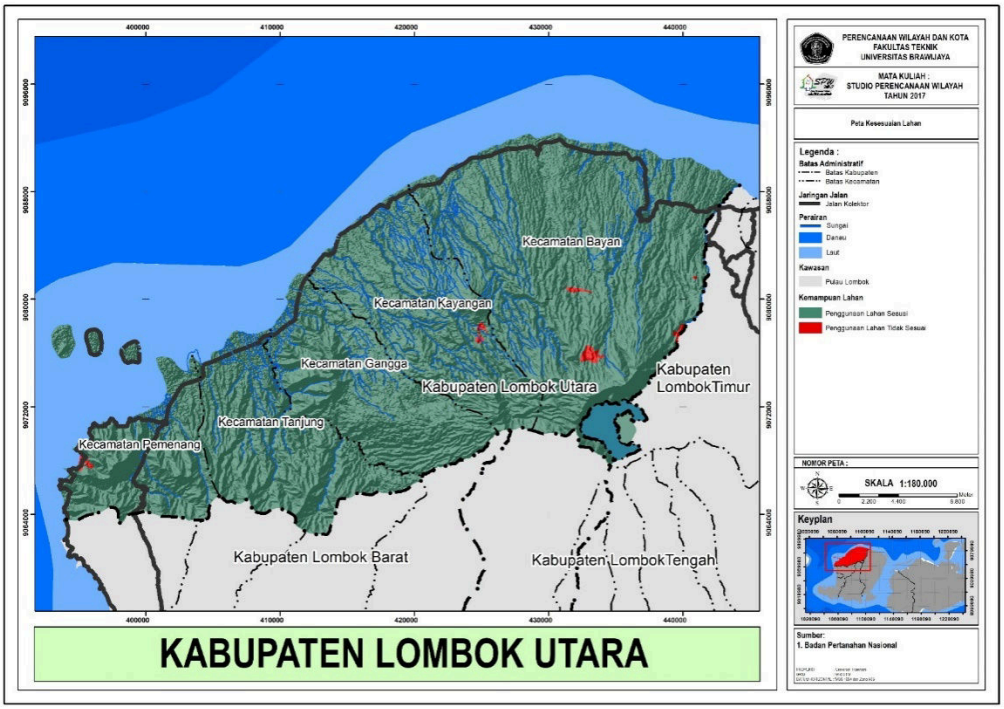
Gambar 1 Peta Kemampuan Lahan Pertanian Kabupaten Lombok Utara

5. Kesesuaian Lahan

Tabel 3 Kesesuaian Lahan

No	Nama Kecamatan	Zona	FungsiKawasan	kesesuaian
1	Pemenang	A	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		B	Kawasan budidaya tanaman tahunan	72,1 Ha Tidak Sesuai
2	Tanjung	A	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		B	Kawasan budidaya tanaman tahunan	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		C	Kawasan Penyangga	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		D	Kawasan Penyangga	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
3	Gangga	A	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		B	Kawasanbudidayatanamantahunan	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		C	Kawasan Penyangga	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		D	Kawasan Penyangga	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		E	KawasanLindung	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
4	Kayangan	A	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		C	Kawasan Penyangga	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan

No	Nama Kecamatan	Zona	FungsiKawasan	kesesuaian
		E	KawasanLindung	156 Ha Tidak Sesuai
		F	KawasanLindung	
5	Bayan	A	Permukiman, budidaya tanaman tahunan, budidaya tanaman Semusim	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		C	Kawasan Penyangga	6 Ha tidak sesuai
		E	KawasanLindung	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan
		F	KawasanLindung	Semua guna lahan sesuai dengan peruntukan



Gambar 2 Peta Kesesuaian Lahan Pertanian Kabupaten Lombok Utara

c. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan

Dalam menentukan komoditas unggulan pada penelitian ini menggunakan metode skoring. Dimana Skoring komoditas unggulan menggunakan empat kriteria skoring diantaranya adalah nilai LQ, nilai growth, nilai share dan kriteria non teknis lain seperti kebijakan dan juga peluang pasar. Selanjutnya setelah ditetapkan kriteria skoring adalah perhitungan. Perhitungan komoditas unggulan menggunakan rumus berikut (Mahi dkk, 2014).

$$_{i=1}^{n}NK = \sum N1 \; x \; B1 \qquad (1)$$

Keterangan :
NK = Nilai keunggulan komoditas
Ni = nilai faktor ke i
Bi = bobot faktor ke i (jumlah bobot = 1)
n = jumlah faktor penilai
Nk>2 = dikategorikan sebagai komoditas unggulan
Nk<2 = bukan kategori komoditas unggulan

Tabel 4 Analisis Komoditas Unggulan

Komoditas	LQ	GROWTH	SHARE	Aspek Non Teknis	Nilai Keunggulan (NK)
	Nilai Faktor (Ni)	Nilai Faktor (Ni)	Nilai Faktor (Ni)	Nilai Faktor (Ni)	
P. Kakao	5	2,00	4	5	4,00
cabai	5	5	2	2	3,50
Sapi	5	3	1	5	3,50
P. Kelapa	5	1	2	5	3,25
P. Kopi	5	1	2	5	3,25
Ubi Kayu	5	3	2	2	3,00
Ayam kampung	5	5	1	1	3,00

Berdasarkan hasil perhitungan komoditas unggulan di Kabupaten Lombok Utara sehingga diketahui komoditi perkebunan mendominasi 5 komoditi unggu yang ada di kabupaten Lombok Utara. Sehingga dalam penelitian ini didapat bahwa komoditi unggulan di KLU adalah komoditi perkebunan yang terdiri dari kakao, kopi, dan kelapa.

d. Analisis Subsistem Komoditi

1. Kakao

- *Hulu*

Tabel 5 Analisis Usaha Tani Hulu

Jenis	Analisis
Bibit	Perlunya program penyuluhan cara perkembangbiakan vegetative pada kakao melalui sambung samping dan pucuk, perlunya ada tempat pembibitan kakao.
Pupuk	Tidak terdapat permasalahan penyediaan pupuk untuk perkebunan kakao
Sumber Daya Manusia	Perlu adanya pembinaan kepada masyarakat bagaimana cara meningkatkan produktivitas kebun kakao.

- *On Farm*

Tabel 6 Analisis Usaha Tani On Farm

Jenis	Analisis
Ketersediaan Lahan	Perlunya perluasan lahan budidaya kakao dengan memanfaatkan hutan produksi untuk sebagai hutan rakyat untuk meningkatkan hasil produksi.
Sumber Daya Manusia	System kerjasama dalam penyediaan tanaga kerja ini perlu dipertahankan, karena dapat menunjang kegiatan perkebunan kakao.
Sistem Pertanian	Perlu adanya penyuluhan dari pemerintah terkait system pemupukan dan juga perawatan tanaman kakao sehingga meningkatkan jumlah produksi kakao.
Sarana dan Prasrna	Masih kurangnya peran kelompok tani dalam mengkoordinir kebutuhan alat dan prasarana perkebunana kakao.
	Biaya sewa lantai jemur meningkatkan baiay pascapanen, kemudian juga bantuan yang ada kurang bisa dimanfaatkan karena belum memnuhi kebutuhan petani.
Sistem panen dan pasca panen	Sudah ada pengolahan pasca panen, namun system panennya masih belum sesuai SOP.

- *Hilir*

Tabel 7 Analisis Usaha Tani Hilir

Jenis	Analisis
Hasil Produksi	Produksi kakao dapat memenuhi kebutuhan local dan juga luar provinsi
Pemasaran	Pemasaran sudah sampai luar pulau namun masih menggunakan tengkulak sehingga harga yang didapat lebih murah dari harga pasar.
Diversifikasi Produk	Sudah ada pengolahan menjadi biji kakao kering namun biaya tenaga dan waktu juga bertambah.

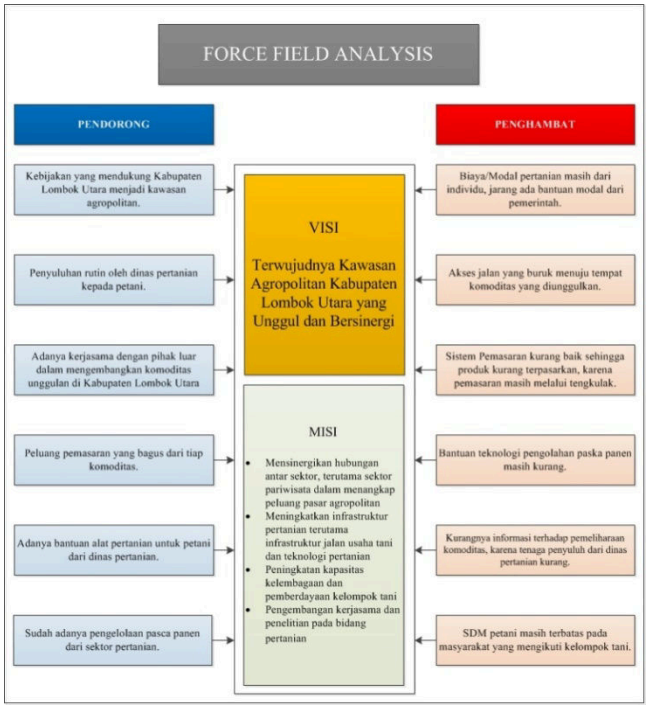
e. FFA (Force Field Analysis)

Force Field Analysis (FFA) merupakan suatu metode analisis untuk memperoleh gambaran lengkap yang menyeluruh mengenai berbagai kekuatan yang ada dalam isu utama suatu kebijakan dan juga untuk memperkirakan sumber dan tingkat kekuatan tersebut. Metode ini utamanya digunakan untuk menginformasikan pembuatan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam *force field analysis* perlu mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat yang ada di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan potensi dan masalah yang ada. Faktor pendorong dan faktor penghambat adalah sebagai berikut.

Tabel 8 FFA

No.	Nilai TNB	Faktor Pendorong	No.	Nilai TNB	Faktor Penghambat
1.	2.36	Kebijakan yang mendukung Kabupaten Lombok Utara menjadi kawasan agropolitan.	1.	2.31	Biaya/Modal pertanian masih dari individu, jarang ada bantuan modal dari pemerintah.
2.	1.48	Penyuluhan rutin oleh dinas pertanian kepada petani.	2.	1.63	Akses jalan yang buruk menuju tempat komoditas yang diunggulkan.
3.	1.27	Adanya kerjasama dengan pihak luar dalam mengembangkan komoditas unggulan di Kabupaten Lombok Utara	3.	1.13	Sistem Pemasaran kurang baik sehingga produk kurang terpasarkan, karena pemasaran masih melalui tengkulak.
4.	1.04	Peluang pemasaran yang bagus dari tiap komoditas.	4.	0.85	Bantuan teknologi pengolahan paska panen masih kurang.
5.	0.47	Adanya bantuan alat pertanian untuk petani dari dinas pertanian.	5.	0.49	Kurangnya informasi terhadap pemeliharaan komoditas, karena tenaga penyuluh dari dinas pertanian kurang.
6.	0.47	Sudah adanya pengelolaan pasca panen dari sektor pertanian dan sektor peternakan.	6.	0.48	SDM petani masih terbatas pada masyarakat yang mengikuti kelompok tani.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan bahwa total TNB faktor pendorong sejumlah 7,06 lebih besar dibandingkan dengan total faktor penghambat sejumlah 6,89. maka potensi pertanian yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara harus dapat dimaksimalkan dengan membuat beberapa strategi demi memaksimalkan potensi yang ada. Sehingga dari proses penilaian pada FFA dapat dihasilkan visi misi dan strategi perencanaan kawasan agropolitan Kabupaten Lombok Utara. Pada gambar 3 berikut adalah hasil analisis FFA.



Gambar 3 FFA

B. Rumusan Perencanaan

a. Visi

Berdasarkan hasil perumusan strategi pada *force field analysis* (FFA)maka didapatkan visi pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kawasan Agropolitan Kabupaten Lombok Utara yang Unggul dan Bersinergi ”

Visi Kawasan Agropolitan Kabupaten Lombok Utara memiliki dua tujuan yakni agropolitan yang **unggul** dan agropolitan yang **bersinergi.**

b. Misi

Dalam implementasi visi Kawasan Agropolitan Kabupaten Lombok Utara maka dibentuk misi nya adalah sebagai berikut :

1. Mensinergikan sektor pertanian dengan sektor lain, terutama sektor pariwisata dalam menangkap peluang pasar agropolitan
2. Meningkatkan infrastruktur pertanian terutama infrastruktur jalan usaha tani dan teknologi pertanian
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan kelompok tani
4. Pengembangan, penelitian dan kerjasama pada bidang pertanian

c. Strategi

1. Meningkatkan bantuan terhadap modal dan informasi pertanian serta kualitas aspek penunjang agropolitan Kabupaten Lombok Utara
2. Pengadaan input pertanian berupa bibit, pupuk, pestisida, dan alat pertanian.
    a. Pengadaan koperasi yang dikelolah oleh petani untuk memudahkan petani dalam mencari modal pertanian.
    b. Penyebaran informasi secara merata terkait sistem usaha tani oleh penyuluh ke ke kelompok tani di Kabupaten Lombok Utara.
2. Pengoptimalan kerjasama dalam peningkatan modal pertanian.
    a. Melakukan kerjasama dengan sektor pariwisata dan industri

b. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau bank dalam meningkatkan modal biaya pengelolaan.

3. Menjalin Kerjasama dengan lembaga penelitian pertanian
   a. Menjalin kerjasama dengan instansi pendidikuntuk penelitian peningkatan mutu kualitas produk pertanian
   b. Menjalin kerjasama dalam inovasi alat pengolahan hasil pertanian
   c. Menjalin kerjasama dengan lembaga pengembangan di bidang pertanian
4. Peningkatan aksesibilitas
5. Peningkatan SDM petani dengan penyuluhan dan pelatihan
6. Pengadaan alat pertanian pascapanen dalam mendukung terjadinya diversifikasi produk dari komoditas unggulan.

d. Arahan Struktur Ruang Kawasan Agropolitan KLU

Tabel 9 Arahan Struktur Ruang

Kecamatan	Fungsi	Arahan
Tanjung	Agropolitan Centre	Pusat pengumpulan komoditas hasil produksi Mengoptimalkan sistem kerja KUD di Kecamatan Tanjung
Gangga	Agropolitan District	Mempertahankan lahan yang ada agar tidak terjadi alih fungsi lahan Pemantauan dan pelatihan petani
Pemenang	Agropolitan District	Mempertahankan lahan yang ada agar tidak terjadi alih fungsi lahan
Kayangan	Hinterland	Mempertahankan lahan yang ada agar tidak terjadi alih fungsi lahan Pemberian alat bantu pertanian Perbaikan prasarana jalan
Bayan	Hinterland	Mempertahankan lahan yang ada agar tidak terjadi alih fungsi lahan Pemberian alat bantu Pertanian Perbaikan prasarana jalan

e. Zonasi Kawasan Pertanian (Agropolitan)

Tabel 10 Zonasi Kawasan Agropolitan

Lokasi	Fungsi Zonasi
Kecamatan Bayan	Kawasan lahan perkebunan kakao
	Kawasan lahan perkebunan kelapa
	Kawasan permukiman
Kecamatan Kayangan	Kawasan lahan perkebunan kakao
	Kawasan perkebunan kopi
	Kawsan permukiman
Kecamatan Gangga	Kawasan lahan kakao
	Kawasan lahan kopi
Kecamatan Tanjunng	Kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum
	Kawasan pengolahan dan industri
	Kawasan integrasi antar sektor
	Kawasan permukiman
Kecamatan Pemenang	Kawasan Pariwisata Unggulan Kabupaten

f. Rencana Pengembangan Komoditas unggulan

1. Kakao

- **Hulu**

Tabel 11 Rencana Pengembangan subsistem hulu

Rencana	Program	Tujuan
Pengembangan Koperasi Petani	Kegiatan Simpan Pinjam untuk pembiayaan pertanian. Disetiap Kecamatan yang dikelola oleh kelompok tani.	Menyediakan kebutuhan modal untuk pertanian kakao sehingga petani tidak terlilit hutang pada tengkulak.

- *On Farm dan Off Farm*

Tabel 12 Rencana pengembangan subsistem on farm dan off farm

Rencana	Program	Tujuan
Peningkatan Pengetahuan Petani	Pelatihan dan Penyuluhan.	Meningkatkan pengetahuan, melakukan pendekatan kepada petani dalam mengelola pertanian kakao yang baik dan bener sesuai SOP, agar meningkatkan produktiviatas komoditas kakao.
Rencana	Program	Tujuan
Pengembangan sarana pasca panen	Bantuan alat dan sarana penjemuran	Meningkatkan kemudahan pengelolaan pasca panen pada biji kakao. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi kerusakan pada biji kakao yang dhasilkan.

- *Hilir*

Tabel 13 Rencana pengembangan subsistem hilir

Rencana	Program	Tujuan
Meningkatkan Minat Masyarakat mengolah kakao	Kampung Wisata edukasi Kakao	Meningkatkan minat masyarakat dalam mengelola kakao dan juga memberikan nilai tambah pada produk kakao, dan juga memberikan pendapatan tambahan dari kegaitan wisata edukasi kakao
Membentuk Sistem Pemasaran	Sistem Pemasaran Satu Pintu	System pemasaran ini di koordinir oleh kelompok tani sehingga harga dapat diatur agar stabil dan menguntungkan petani.
	Sistem Pemasaran di area wisata	Penjualan produk olahan kakao di area wisata diperuntukan agar pendapatan petani bertambah.
	Sistem Pemasaran secara *e-marketting*	Penjualan produk secara online akan memudahkan pembeli dan penjal dalam pemasarannya

g. Rencana Pengembangan sarana dan jaringan Prasarana

1. Pengembangan sarana perindustrian

Tabel 14 rencana pengembangan sarana industri

Hasil Komuditas Unggulan	Hasil Produksik Industri	Jenis Industri	Lokasi Industri
Kelapa	*Virgin Coconut Oil* (VCO)	Industri skala rumah tangga	Kecamatan Tanjung
Kopi	- Bubuk Kopi Original - Bubuk Kopi Vanilla	Industri skala rumah tangga	Kecamatan Gangga
Kakao	- Bubuk Kakao	Industri skala rumah tangga	**K**ecamatan Gangga

2. Pengembangan jaringan jalan

Adapun pengembangan prasarana jalan adalah mengakomodir Rencana Pengembangan Prasarana Jalan didasasarkan RTRW :

- Mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pariwisata, perkebunan dan agroindustri.
- Mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan utara-selatan wilayah kabupaten.
- Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan meliputi seluruh ruas jalan yang ada.

3. Pengembangan Jaringan Irigasi

- Pemeliharaan jaringan irigasi yang ada dan bangunan pendukung irigasi serta serta sumber-sumber air untuk irigasi.
- Pengembangan sistem irigasi pada kawasan yang mengalami kesulitan air baku.

IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh tiga komoditas unggulan di Kabupaten Lombok Utara yang potensial untuk dikembangkan, yaitu kakao, kopi dan kelapa.
2. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh visi pengembangan agropolitan Kabupaten Lombok Utara yaitu “Terwujudnya Kawasan Agropolitan Kabupaten Lombok Utara yang Unggul dan Bersinergi”.
3. Berdasarkan analisis FFA didapatkan enam rumusan strategi pengembangan agropolitan Kabupaten Lombok Utara, yaitu meningkatkan bantuan terhadap modal dan informasi pertanian, pengoptimalan kerjasama dalam peningkatan modal pertanian yang didukung oleh kerjasama pihak luar, menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian pertanian dan instansi pendidikan, peningkatan aksesibilitas untuk mendukung pemasaran komoditas unggulan, peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan, serta pengadaan alat pertanian pascapanen untuk mendukung adanya diversifikasi produk.
4. Keterkaitan dengan pengembangan agrowisata di Kabupaten Lombok Utara dikaitkan dengan pengembangan Kampung Edukasi Kakao serta pengembangan diversifikasi produk komoditas unggulan untuk kemudian dipasarkan di kawasan pariwisata dalam menunjang kegiatan pariwisata di Kabupaten Lombok Utara. Strategi dan program yang telah dihasilkan sebelumnya difokuskan dalam pengembangan kawasan agrowisata dengan mengembangkan SDM, modal, serta produk yang dihasilkan agar berkualitas baik dan menunjang kegiatan pariwisata yang akan dilakukan di Kabupaten Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.26 tahun 2007. Tentang Penataan Ruang Kawasan Agropolitan.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Lombok Utara tahun 2016, Lombok Utara. 1101002.5208. diakses Februari 2017

RPJMD Kabupaten Lombok Utara 2016-2021

Renstra BKP NTB 2014-2018.

Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan (Agropolitan) Nasional dan Daerah Nomor 15 Tahun 2001

Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Agropolitan dan Minapolitan

Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional dan Daerah (Agropolitan)
Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan. Kimpraswil 2000
BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara 2016
PERDA RTRW Kabupaten Lombok Utara 2011-2031

Pengelolaan Sampah Organik "*Eco Garbage Enzyme*" Sebagai Pestisida Ramah Lingkungan Pada Tanaman Hidroponik Sayuran Hijau

Ni Wayan Yuliandewi

Pasca Sarjana P2WL, Universitas Mahasaraswati, Denpasar
Email: niwayanyuliandewi04@gmail.com

ABSTRAK

Limbah merupakan suatu bahan yang terbuang dari segala hasil aktivitas manusia ataupun proses alam yang tidak dimanfaatkan. Perencanaan pengelolaan/ pemilahan sampah tersebut dibuatkan suatu undang-undang yang diharapkan mampu untuk menangani permasalahan sampah agar dapat dikelola. Alternatif pengolahan sampah khususnya sampah organik yang dilakukan yaitu membuat pestisida yang ramah lingkungan yang disebut dengan eco garbage enzyme. Eco garbage enzyme adalah pemanfaatan sampah kulit buah dan sayur yang dicampurkan dengan gula merah dan air yang kemudian difermentasikan. Pemanfaatan eco garbage enzyme ini yaitu menghilangkan bau busuk, pembersihkan lantai rumah, pembersih toilet, pembersih dapur, pembersih sayuran, pembersih pakaian, pestisida, perawat kulit, dan memurnikan air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan eksperimen dengan dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Hasil dari penelitian ini, eco garbage enzyme mampu dijadikan sebagai pestisida ramah lingkungan dikarenakan sayuran tumbuh dengan subur yang ditunjukkan dari tanaman sayuran hijau tumbuh dengan panjang daun mencapai 15 cm dan tanaman sayur tidak diganggu oleh serangga dan fermentasi eco garbage enzyme mempengaruhi pertumbuhan sayuran hijau.

Kata kunci: eco garbage enzyme, limbah, pestisida, sayuran

I. PENDAHULUAN

Limbah merupakan suatu bahan yang terbuang dari segala hasil aktivitas manusia ataupun proses alam yang tidak dimanfaatkan. Berdasarkan wujudnya, limbah yang digolongkan menjadi tiga bagian salah satunya adalah limbah padat yang sering disebut dengan sampah. Sampah dapat bernilai ekonomi yang positif dan negatif, yang mana nilai ekonomi positif sampah jika dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki nilai yang tinggi. Nilai ekonomi negatif dari sampah apabila penanganannya baik membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang besar. Sampah dapat dipilah/ diolah berdasarkan sifat dan fase materi dari sampah tersebut. Berdasarkan fase materinya dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu fase padat, cair, dan gas. Pada fase gas, sampah dikatakan sebagai emisi yang dikaitkan dengan menimbulkan polusi. Sampah/ limbah padat diantaranya benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, botol kaca/ beling, dan yang lainnya sedangkan limbah cair dapat berupa rembesan cairan hasil pembusukan sampah yang disebut dengan lindi yang dapat mencemari air dan sungai (Pratama, et al, 2008). Menurut Slamet (2002), pemilahan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Selain itu, sampah juga dapat dipilah berdasarkan klasifikasinya yaitu sampah rumah tangga, sampah komersial, sampah bangunan, dan sampah fasilitas umum. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 mengatur tentang beberapa jenis sampah yang meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga (rumah makan, hotel, sekolah, rumah sakit, dan lainnya), dan sampah spesifik (sampah yang memerlukan penanganan khusus karena mengandung bahan berbahaya dan beracun). Pengelolaan sampah sekarang ini banyak

dimanfaatkan sebagai barang yang bernilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Ningsih (2015) menyebutkan pengelolaan dan pemanfaatan sampah rumah tangga yang bersifat organik dijadikan sebagai pupuk sedangkan anorganik berupa bunga dari berbagai jenis botol, tempat tissue, dan bross. Selain dimanfaatkan sebagai biogas dan briket, pengelolaan sampah dapat dijadikan sebagai pestisida. Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1973 menyebutkan salah satu pestisida yaitu insektisida merupakan zat kimia dan bahan lain serta jasad renik yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegas binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Yuantari (2011) menyebutkan banyak petani menggunakan pestisida organoklorin di dalam membasmi hama yang mana menurut petani dapat meningkatkan hasil namun sangat berbahaya untuk kesehatan dan mencemari lingkungan. Berdasarkan banyaknya temuan yang menyebutkan pestisida mengganggu kesehatan dan mencemari lingkungan, berbagai temuan pestisida yang ramah lingkungan dilaksanakan dengan upaya mengurangi pencemaran lingkungan dan menghasilkan hasil panen yang sehat. Alternatif pengolahan sampah khususnya sampah organik yang dilakukan yaitu membuat pestisida yang ramah lingkungan yang disebut dengan *eco garbage enzyme*. *Eco garbage enzyme* adalah pemanfaatan sampah kulit buah dan sayur yang dicampurkan dengan gula merah dan air yang kemudian difermentasikan. Pemanfaatan eco garbage enzyme ini yaitu menghilangkan bau busuk, pembersihkan lantai rumah, pembersih toilet, pembersih dapur, pembersih sayuran, pembersih pakaian, pestisida, perawat kulit, dan memurnikan air. Pestisida eco garbage enzyme ini digunakan khusus pada hidroponik tanaman sayuran hijau. Hidroponik yang merupakan budidaya tanaman yang menggunakan media air untuk mengefisienkan penggunaan air. Selain itu, penggunaan sayuran hijau sebagai objek pada penelitian ini dikarenakan sayuran hijau yang sebagian besar menggunakan pestisida. Hal ini didukung dengan hasil penelitian FDA (Food and Drug Administration) USA (2011) menyebutkan tanaman yang banyak mengandung pestisida adalah sayuran hijau sehingga penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan sampah khususnya sampah organik sebagai biopestisida melalui proses fermentasi tanpa mencemari lingkungan.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dikarenakan adanya perlakuan terhadap kelompok eksperiment dalam melakukan preparasi dan mengidentifikasi warna daun, jumlah daun, dan tinggi batang. Tempat dilaksanakan penelitian ini yaitu Sekolah Petra Berkat dan penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan. Variable dalam penelitian ini ada 2 yaitu variable bebas yaitu waktu fermentasi *eco garbage enzyme* dan variable terikatnya meliputi pengaruh pertumbuhan tanaman sayuran hijau yang berupa warna daun, banyak daun, dan tinggi tanaman. Sampel yang digunakan sebanyak 60 tanaman dengan jumlah populasi sebesar 150 tanaman dengan nilai ketelitian e 10%, hal tersebut dihitung berdasarkan rumus Slovin berikut (Slovin, 1960).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad (1)$$

Keterangan:
n = jumlah sampel yang diperlukan
N = jumlah populasi
e = sampel error

Pengumpulan data hasil penelitian diperhitungkan berdasarkan masa tanam yang dimulai dari hari ke 7, 14, 21, 28, dan 35. Data hasil penelitian juga dianalisis dengan menggunakan analisis RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan persamaan secara matematika ditunjukkan sebagai berikut (Sastrosupadi, 2000).

$$Yij = \mu + \tau i + \varepsilon ij \quad (2)$$

Keterangan:
i = 1, 2, …, t dan j = 1, 2, …, r
Y_{ij} = respon dari perlakuan ke- i dan ulangan ke-j
□□= rata-rata umum
□$_I$ = pengaruh perlakuan ke- i
□$_{ij}$ = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke- I dan ulangan ke- j

Selain dianalisis menggunakan RAL pada penelitian ini juga menggunakan Uji Duncan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap pertumbuhan dan keseluruhan uji tersebut dianalisis mengunakan program SPSS versi 20.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

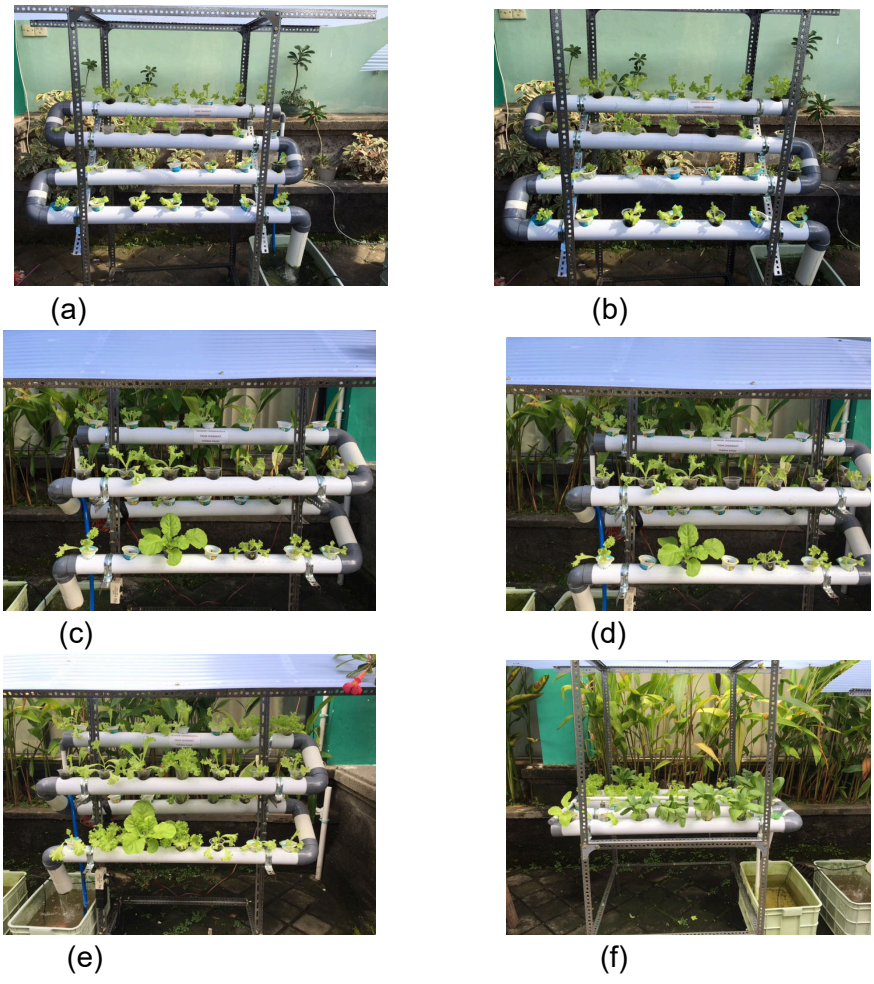
A. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian pertumbuhan tanaman dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan tanaman pada hari ke 7, 14, 21, 28, dan 35

Waktu fermentasi eco garbage enzyme	***Pertumbuhan tanaman sayuran hijau***	***Hari ke-***					***Tekstur permukaan daun***
		7	***14***	***21***	***28***	***35***	
Tanpa *eco garbage enzyme*	Warna daun	Hijau muda	Hijau muda	Hijau muda	Hijau tua	Hijau tua	Berlubang
	Jumlah daun	3	6	8	8	8	
	Tinggi tanaman	5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	
1 bulan	Warna daun	Hijau muda	Hijau muda	Hijau muda	Hijau tua	Hijau tua	Tidak berlubang
	Jumlah daun	4	5	6	7	7	
	Tinggi tanaman	4,7 cm	7,5 cm	9,5 cm	11,7 cm	14 cm	
2 bulan	Warna daun	Hijau muda	Hijau muda	Hijau muda	Hijau tua	Hijau tua	Tidak berlubang
	Jumlah daun	4	5	6	7	7	
	Tinggi tanaman	5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	

Gambar hasil penelitian ditunjukkan pada gambar 1 yang menunjukan pertumbuhan tanaman dari hari ke 7 sampai hari ke 35



(*Doc. Yuliandewi, 2017*)

Gambar 1. Pertumbuhan tanaman sayuran hijau menggunakan *eco garbage enzyme* (a) Hari ke 7; (b) Hari ke-14; (c) Hari ke-21; (d) Hari ke-28; (e) Hari ke-35; dan (f) Tanpa menggunakan *eco garbage*

Berikut merupakan hasil analisis uji Duncan menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi dengan pertumbuhan tanaman yang ditunjukkan pada gambar 2.

General Linear Model

[DataSet1] D:\Wik.sav

Between-Subjects Factors

		N
Waktu fermentasi	0	5
	1	5
	2	5

Multivariate Tests[a]

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.951	106.848[b]	2.000	11.000	.000
	Wilks' Lambda	.049	106.848[b]	2.000	11.000	.000
	Hotelling's Trace	19.427	106.848[b]	2.000	11.000	.000
	Roy's Largest Root	19.427	106.848[b]	2.000	11.000	.000
waktu_fermentasi	Pillai's Trace	.211	.707	4.000	24.000	.595
	Wilks' Lambda	.790	.687[b]	4.000	22.000	.608
	Hotelling's Trace	.264	.661	4.000	20.000	.627
	Roy's Largest Root	.259	1.556[c]	2.000	12.000	.251

a. Design: Intercept + waktu_fermentasi
b. Exact statistic
c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Jumlah daun	2.133[a]	2	1.067	.390	.685
	Tinggi tanaman	.901[b]	2	.451	.032	.968
Intercept	Jumlah daun	552.067	1	552.067	201.976	.000
	Tinggi tanaman	1448.451	1	1448.451	103.382	.000
waktu_fermentasi	Jumlah daun	2.133	2	1.067	.390	.685
	Tinggi tanaman	.901	2	.451	.032	.968
Error	Jumlah daun	32.800	12	2.733		
	Tinggi tanaman	168.128	12	14.011		
Total	Jumlah daun	587.000	15			
	Tinggi tanaman	1617.480	15			
Corrected Total	Jumlah daun	34.933	14			
	Tinggi tanaman	169.029	14			

a. R Squared = .061 (Adjusted R Squared = -.095)
b. R Squared = .005 (Adjusted R Squared = -.160)

Post Hoc Tests

Waktu fermentasi

Multiple Comparisons

Dependent Variable		(I) Waktu fermentasi	(J) Waktu fermentasi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
							Lower Bound	Upper Bound
Jumlah daun	LSD	0	1	.80	1.046	.459	-1.48	3.08
			2	.80	1.046	.459	-1.48	3.08
		1	0	-.80	1.046	.459	-3.08	1.48
			2	.00	1.046	1.000	-2.28	2.28
		2	0	-.80	1.046	.459	-3.08	1.48
			1	.00	1.046	1.000	-2.28	2.28
Tinggi tanaman	LSD	0	1	.520	2.3673	.830	-4.638	5.678
			2	.000	2.3673	1.000	-5.158	5.158
		1	0	-.520	2.3673	.830	-5.678	4.638
			2	-.520	2.3673	.830	-5.678	4.638
		2	0	.000	2.3673	1.000	-5.158	5.158
			1	.520	2.3673	.830	-4.638	5.678

Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 14.011.

Homogeneous Subsets

Jumlah daun

	Waktu fermentasi	N	Subset 1
Duncan[a,b,c]	1	5	5.80
	2	5	5.80
	0	5	6.60
	Sig.		.481

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 2.733.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

c. Alpha = .05.

Tinggi tanaman

	Waktu fermentasi	N	Subset 1
Duncan[a,b,c]	1	5	9.480
	0	5	10.000
	2	5	10.000
	Sig.		.838

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
Based on observed means.
The error term is Mean Square(Error) = 14.011.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

c. Alpha = .05.

Gambar 2. Hasil analisis Uji Duncan

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan pestisida alami *eco garbage enzyme* tanaman sayuran hijau memiliki tekstur permukaan daun yang tidak berlubang saat dipanen berbeda halnya dengan tekstur permukaan daun tanpa menggunakan *eco garbage enzyme*. Selain itu, tanaman sayuran hijau tampak layu tanpa menggunakan *eco garbage enzyme* daripada menggunakan *eco garbage enzyme* yang terlihat lebih segar. Berdasarkan hasil uji Duncan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan tanaman sayuran hijau dengan waktu fermentasi *eco garbage enzyme* yang ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan nilai subset pada uji Duncan yang berbeda dari waktu fermentasi 0 sampai 2 bulan, hal tersebut dikarenakan semakin lama waktu fermentasi maka kandungan yang terdapat di dalam *eco garbage enzyme* sangat diperlukan di dalam pertumbuhan tanaman seperti CO_2.

IV. KESIMPULAN

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu hasil pertumbuhan tanaman sayuran hijau yang menghasilkan tekstur perrmukaan daun yang baik apabila menggunakan *eco garbage enzyme* dan waktu fermentasi *eco garbage enzyme* mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang menunjukkan semakin lama waktu fermentasi hasil pertumbuhan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Food and Drug Administration. 2011. *Pesticide Monitoring Program: 2011 Pesticide Report*. Diakses pada 9 Oktober 2016, dari http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Pesticides/default.htm.

Ningsih, N.S. 2015. *Analisis Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Bisnis Pengolahan Sampah Oleh Siswa SMK)*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida.

Pratama, Y. & Soleh, A.Z. 2008. *Kajian Hubungan Antara Timbulan Sampah Domestik Dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Bandung: Seminar Nasional sains dan Teknologi-II.

Sastrosupadi, A. 2000. *Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian*. Malang: Kanisinus.

Slamet, J.S. 2002. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Slovin, M.J. 1960. *Sampling*. New York: Simon and Schuster Inc.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Yuantari, M.G.C. 2011. *Dampak Pestisida Organoklorin Terhadap Kesehatan Manusia dan Lingkungan Serta Penanggulangannya*. Semarang: Seminar Nasional: Peran Kesehatan Masyarakat dalam Pencapaian MDG's di Indonesia.

Pariwisata dan Perubahan Iklim di Indonesia: Persepsi Wisatawan di Kawasan Kuta, Bali

Nurrohman Wijaya[1], Alhilal Furqan[1], Astri Briliyanti[1], Fabian Indra Winandi[1], Hanry Kurnia[1] dan Tri Rahayu Wulansari[1]

[1] Program StudiPerencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, Kota Bandung
Email: nurrohman.wijaya@sappk.itb.ac.id; a.furqan@sappk.itb.ac.id; astri.briliyanti@gmail.com; fabianindra@gmail.com; handry.ik@gmail.com; echa.trirahayu@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan antara fenomena perubahan iklim dan pariwisata mulai banyak dikaji sejak satu dekade terakhir. Dampak perubahan iklim memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan pariwisata, khususnya wisata yang bergantung pada faktor alam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu perubahan iklim dan pariwisata menjadi penting untuk dilakukan studi terutama di negara Indonesia yang memiliki berbagai jenis objek wisata alam. Studi ini bertujuan untuk mengkaji persepsi wisatawan tentang pengaruh dampak perubahan iklim terhadap kegiatan pariwisata di kawasan wisata pesisir Kuta, Bali yang meliputi Pantai Kuta, Pantai Legian, dan Pantai Seminyak. Survei kuesioner dilakukan terhadap wisatawan domestik dan mancanegara di wilayah studi. Sebanyak 183 responden berhasil diperoleh dengan rincian sebanyak 121 wisatawan domestik dan 62 wisatawan mancanegara. Beberapa hal yang ditanyakan diantaranya adalah pemahaman wisatawan tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kegiatan wisata mereka. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas wisatawan sepakat bahwa kondisi iklim di dunia sedang mengalami perubahan, dan isu perubahan iklim merupakan hal penting untuk diperhatikan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Selain itu, mayoritas wisatawan, baik mancanegara dan domestik, cenderung melakukan perubahan perjalanan apabila terjadi dampak perubahan iklim yang memiliki kemungkinan mengganggu perjalanan wisata mereka. Hasil ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya, dan pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor pariwisata di masa mendatang dengan melakukan tindakan adaptasi dan mitigasi dalam rangka mengurangi dampak dan resiko yang akan terjadi.

Kata kunci: wisata alam, perubahan iklim, persepsi, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Fenomena perubahan iklim menjadi salah satu isu yang mulai banyak dikaji seiring dengan dampak yang telah ditimbulkannya, misalnya kenaikan muka air laut yang menyebabkan genangan air di daerah pesisir, anomali perubahan suhu dan curah hujan yang menimbulkan kekeringan dan banjir, serta kejadian cuaca ekstrim. Hal ini berpengaruh besar juga terhadap aktivitas ekonomi yang tergantung pada faktor alam, diantaranya pada sektor pariwisata, dimana sebagian besar sektor ini mengandalkan pada kondisi alam sebagai potensi wisatanya, misalnya pantai, bukit, sungai, dan keindahan alam. Aguilo et al. (2005) berpendapat bahwa sektor pariwisata sangat rentan terhadap pengaruh perubahan iklim dan bencana, karena pada umumnya sektor tersebut tergantung pada sinar matahari, laut dan bentangan alam.

Weir (2017) menyatakan bahwa studi tentang hubungan antara perubahan iklim dan pariwisata mulai banyak dilakukan sejak satu dekade terakhir. Misalnya, studi dari

Scott et al. (2012) yang membahas tentang bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim pada sektor pariwisata. Walaupun demikian, Weir (2017) berpendapat bahwa kaitan antara keduanya sudah teridentifikasi lama sejak jaman pra sejarah dimana kondisi iklim telah mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan perjalanan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena perubahan iklim menjadi hal penting untuk dikaji, khususnya terkait dengan kegiatan pariwisata. Hall (2008) mengkaji tentang perdebatan yang ada saat ini antara isu pariwisata dan fenomena perubahan iklim, diantaranya dia menemukan bahwa karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap isu resiko dan dampak perubahan iklim yang akan terjadi di suatu wilayah telah mengakibatkan kerusakan yang lebih besar di wilayah tersebut. Dia mengusulkan perlunya peningkatan kapasitas kepada para pelaku kepentingan, sehingga kegiatan adaptasi dan pengurangan resiko dapat teridentifikasi. Selain itu, Kajan dan Saarinen (2013) menyebutkan bahwa perlunya studi yang berfokus pada persepsi masyarakat dalam studi pariwisata. Studi terkini yang dilakukan oleh Wijaya dan Furqan (2017) dengan cara menyebarkan kuesioner secara online menunjukkan bahwa mayoritas wisatawan telah paham terhadap isu perubahan iklim, dan studi tersebut juga menemukan bahwa beberapa bencana yang ditimbulkan akibat dampak perubahan iklim telah mempengaruhi kegiatan wisata mereka.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki beberapa potensi wisata yang berfokus pada alam, salah satunya pantai. Studi ini berfokus pada kegiatan wisata yang ada di kawasan pantai Bali, dimana Bali merupakan salah satu daerah destinasi wisata andalan bagi sektor pariwisata Indonesia yang mampu meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan baik domestik dan mancanegara. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Bali karena memberikan pendapatan daerah yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan kajian persepsi wisatawan baik domestik maupun luar negeri terhadap pemahaman mereka tentang perubahan iklim yang berdampak pada kegiatan wisata mereka di kawasan pesisir Kuta, Bali yang meliputi Pantai Kuta, Pantai Legian dan Pantai Seminyak.

II. METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan survei kuesioner terhadap wisatawan yang sedang melakukan kegiatan wisata di salah satu objek wisata alam di Pulau Bali yaitu di kawasan pesisir Kuta yang terdiri dari tiga pantai utama yaitu Pantai Kuta, Pantai Legian dan Pantai Seminyak. Menurut Larry Cristensen (2004) dalam Sugiyono (2014:193), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada wisatawan domestik dan mancanegara yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2017. Beberapa hal yang ditanyakan diantaranya adalah karakteristik responden dan persepsi wisatawan tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap kegiatan wisata mereka. Survei dilakukan secara *purposive* dengan target responden yang telah ditentukan, dan menggunakan teknik *random sampling* di wilayah studi. Berdasarkan survei di lapangan, kebanyakan wisatawan tidak bersedia untuk mengisi kuesioner karena mereka merasa terganggu dan sebagian memiliki waktu yang terbatas. Namun demikian, kami berhasil memperoleh responden sebanyak 183 wisatawan meliputi 121 wisatawan domestik dan 62 wisatawan mancanegara. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*).

Secara rinci, pertanyaan yang diajukan terdiri dari tiga kategori yaitu: 1) persepsi wisatawan terhadap fenomena perubahan iklim, 2) sejauh mana pentingnya isu

perubahan iklim, dan 3) apa dampak dari perubahan iklim terhadap pariwisata. Khusus untuk persepsi dan respon wisatawan terhadap perubahan iklim akan dianalisis terhadap dua kategori wisatawan yaitu wisatawan mancanegara dan domestik, dalam rangka untuk mengetahui perbedaan antara keduanya. Dalam hal ini, wisatawan domestik adalah wisatawan yang berasal dari dalam negeri, sedangkan wisatawan mancanegara berasal dari luar negeri. Responden diberi beberapa pertanyaan terkait persepsinya terhadap perubahan iklim dan diminta untuk menilai dari skala 1 (tidak setuju) hingga 5 (setuju). Skala yang digunakan merupakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekolompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:136). Walaupun jumlah responden antara kedua jenis wisatawan tersebut tidak sama, tetapi hasil analisis dapat menunjukan kecenderungan tingkat pemahaman dan bagaimana mereka membuat suatu keputusan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Karakteristik responden*

Karakteristik responden dapat dilihat di Tabel 1. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin responden, jumlah responden laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan responden perempuan, dengan perbandingan 54,6% dan 45,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesediaan responden untuk mengisi kuesioner dilihat dari jenis kelamin adalah cenderung seimbang. Dilihat dari faktor usia, responden terbanyak adalah pada kategori umur 26-35 (42,1%), dan 17-25 (39,9%), sedangkan paling sedikit adalah responden pada kategori umur 56-65 (1,1%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden usia muda lebih berminat untuk mengisi kuesioner.

Tingkat pendidikan terakhir responden didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/SMK (43,2%), kemudian disusul tingkat pendidikan D3/S1 (27,7%). Berdasarkan hasil ini, responden minimal memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sedangkan, responden yang ‘tidak pernah/tidak tamat’’ memiliki jumlah yang paling sedikit yaitu sekitar 2%. Apabila dilihat dari tingkat pendapatan per bulan, sebagian besar responden memiliki pendapatan dalam rentang Rp. 2.600.000-6.000.000 (24%), disusul dengan pendapatan sebesar Rp. 1.000.000-2.600.000 (19,7%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan masyarakat berpenghasilan menengah.

Adapun dilihat dari jenis pekerjaan responden, sebagian besar merupakan pegawai swasta (30,1%), disusul dengan pelajar/mahasiswa (25,1%) dan wiraswasta (16.9%). Responden yang paling sedikit adalah ibu rumah tangga, dan petani/nelayan, yang masing-masing memiliki persentase sebesar 2,2%. Sedangkan, apabila dilihat dari jenis wisatawan, responden domestik (yang berasal dari Indonesia) lebih banyak dibandingkan responden mancanegara (yang berasal dari luar Indonesia), dengan perbandingan sebesar 66,1% dan 33,9%.

B. *Persepsi wisatawan terhadap fenomena perubahan iklim*

Bagian ini menjelaskan tentang seberapa besar tingkat kesepakatan wisatawan terhadap fenomena perubahan iklim yang terjadi saat ini. Persepsi wisatawan terhadap fenomena perubahan iklim dapat dilihat pada Gambar 1. Secara umum, wisatawan domestik dan mancanegara percaya bahwa iklim di dunia sedang mengalami perubahan. Mayoritas wisatawan domestik (38%) maupun mancanegara (50%) memiliki jawaban yang serupa terkait dengan kepercayaannya pada perubahan iklim, yakni pada skala ‘setuju’. Skala terbesar selanjutnya adalah ‘biasa saja’ dengan 28,1% pada wisatawan domestik, dan 29% pada wisatawan mancanegara. Hanya saja, terdapat 8,3% wisatawan domestik yang mengaku tidak mempercayai adanya perubahan iklim, sementara pada wisatawan mancanegara hanya 1,6%.

Tabel 1. Karakteristik responden

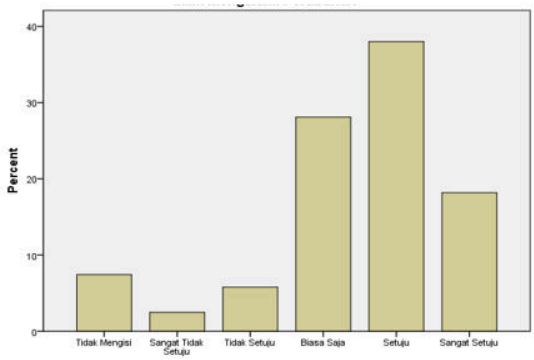
Item		*Frekuensi*	*%*
Jenis kelamin	Laki-laki	100	54.6
	Perempuan	83	45.4
Umur (tahun)	<16	10	5.4
	16-25	73	39.9
	26-35	77	42.1
	36-45	14	7.7
	46-55	6	3.3
	>55	3	1.6
Tingkat pendidikan	Tidak pernah/tidak tamat	4	2.2
	SD/SMP	19	10.4
	SMA	79	43.2
	D3/S1	69	37.7
	S2/S3	10	5.4
Pekerjaan	PNS/TNI/Polisi	10	5.5
	Pegawai swasta	55	30.1
	Buruh pabrik	12	6.6
	Ibu rumah tangga	4	2.2
	Petani/nelayan	4	2.2
	Wiraswasta	31	16.9
	Tidak bekerja	7	3.8
	Pelajar/mahasiswa	46	25.1
	Lainya	12	6.6
Pendapatan per bulan (Rupiah)	< 1,000,000	16	8.7
	1,000,001 – 2,600,000	36	19.7
	2,600,001 – 6,000,000	44	24.0
	6,000,001 – 10,000,000	21	11.5
	> 10,000,001	21	11.5
Jenis wisatawan	Domestik	121	66.1
	Mancanegara	62	33.9

Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa mayoritas responden paham tentang fenomena perubahan iklim yang memberikan dampak negatif di kawasan pantai khususnya, dan mereka juga sepakat bahwa daerah pantai rawan akan perubahan iklim, misalnya naiknya permukaan air laut, erosi pantai dan badai laut. Sebagian besar responden juga setuju bahwa dampak perubahan iklim di daerah pariwisata pantai sudah terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan sudah memiliki kesadaran terhadap adanya perubahan iklim di daerah objek wisata. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya dan Furqan (2017).

LOKAL

Iklim mengalami Perubahan

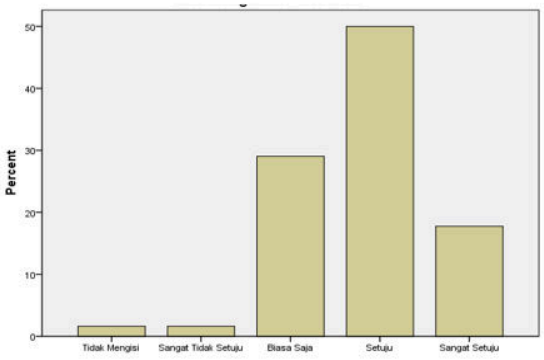
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Mengisi	9	7.4	7.4	7.4
	Sangat Tidak Setuju	3	2.5	2.5	9.9
	Tidak Setuju	7	5.8	5.8	15.7
	Biasa Saja	34	28.1	28.1	43.8
	Setuju	46	38.0	38.0	81.8
	Sangat Setuju	22	18.2	18.2	100.0
	Total	121	100.0	100.0	



ASING

Iklim mengalami Perubahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Mengisi	1	1.6	1.6	1.6
	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	3.2
	Biasa Saja	18	29.0	29.0	32.3
	Setuju	31	50.0	50.0	82.3
	Sangat Setuju	11	17.7	17.7	100.0
	Total	62	100.0	100.0	



Gambar 1. Persepsi wisatawan terhadap fenomena perubahan iklim

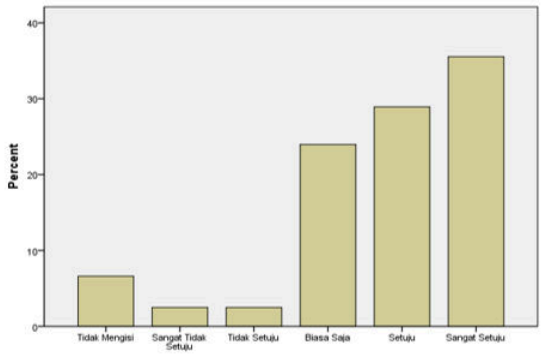
C. Persepsi wisatawan terhadap pentingnya isu perubahan iklim

Bagian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesepakatan wisatawan terhadap pentingnya isu perubahan iklim untuk diperhatikan. Dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa secara umum, wisatawan domestik dan mancanegara sepakat bahwa isu perubahan iklim penting untuk diperhatikan, khususnya dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim terhadap kegiatan wisata.

LOKAL

Perubahan Iklim harus Diperhatikan

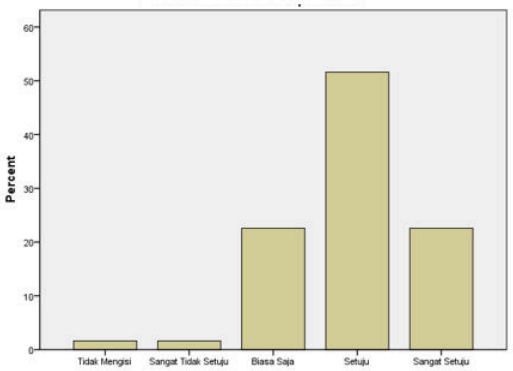
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Mengisi	8	6.6	6.6	6.6
	Sangat Tidak Setuju	3	2.5	2.5	9.1
	Tidak Setuju	3	2.5	2.5	11.6
	Biasa Saja	29	24.0	24.0	35.5
	Setuju	35	28.9	28.9	64.5
	Sangat Setuju	43	35.5	35.5	100.0
	Total	121	100.0	100.0	



ASING

Perubahan Iklim harus Diperhatikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Mengisi	1	1.6	1.6	1.6
	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	3.2
	Biasa Saja	14	22.6	22.6	25.8
	Setuju	32	51.6	51.6	77.4
	Sangat Setuju	14	22.6	22.6	100.0
	Total	62	100.0	100.0	



Gambar 2. Persepsi wisatawan terhadap pentingnya isu perubahan iklim

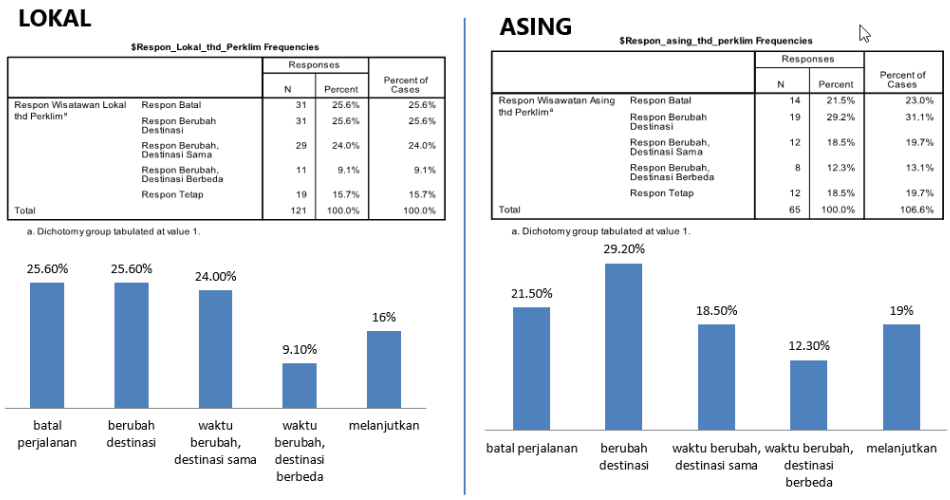
Menurut responden yang merupakan wisatawan domestik, mayoritas menjawab "sangat setuju" (35%), diikuti jawaban "setuju" (28,9%), dan "biasa saja" (24%). Jumlah jawaban "tidak setuju" (2,5%), "sangat tidak setuju" (2,5%), dan tidak mengisi (6,6%) relatif lebih rendah. Sedangkan, untuk responden yang merupakan wisatawan

mancanegara, jawaban mayoritas adalah “setuju” (51,6%), “sangat setuju” (22,6%), dan “biasa saja” (22,6%). Jumlah jawaban “sangat tidak setuju” relatif sangat rendah, yakni hanya sebesar 1,6%. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa baik wisatawan domestik maupun mancanegara, mayoritas mereka setuju bahwa perubahan iklim merupakan isu yang perlu diperhatikan terutama kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Meskipun banyak wisatawan domestik dan mancanegara yang memberikan jawaban “biasa saja” namun jumlah wisatawan yang menjawab “tidak setuju” sangat rendah. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan dukungan terhadap kebijakan atau langkah – langkah pemerintah atau pihak berwenang, maupun para pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perubahan iklim, terutama dalam usaha dan tindakan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, misalnya pembangunan pemecah ombak, penyebaran informasi, dan pembangunan tembok pelindung.

Selain itu, dari hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa wisatawan domestik dan mancanegara sudah mengetahui tentang terjadinya fenomena perubahan iklim yang akan memberi dampak terhadap pengembangan kawasan wisata. Melihat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gössling et al (2006). Dia menyatakan bahwa masih banyak wisatawan yang tidak mengetahui tentang isu fenomena perubahan iklim dan tidak menjadi pertimbangan mereka dalam membuat keputusan dalam berwisata atau bepergian. Hal ini, bisa terjadi karena rentang waktu di mana pada satu dekade yang lalu, isu dan juga dampak perubahan iklim belum begitu nyata seperti saat ini.

D. Respon wisatawan terkait dampak perubahan iklim

Bagian ini ditujukan untuk mengetahui jenis respon wisatawan mancanegara maupun domestik dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Terdapat berbagai jenis respon terhadap perubahan iklim, antara lain pembatalan perjalanan, perubahan destinasi, merubah waktu dengan destinasi yang sama, merubah waktu dan destinasi, dan tetap melanjutkan perjalanan. Jawaban responden dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Respon wisatawan domestik dan mancanegara terhadap dampak perubahan iklim

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa respon wisatawan domestik dan mancanegara terhadap respon perubahan iklim secara umum bervariasi. Jawaban responden wisatawan mancanegara dengan persentase yang paling besar adalah melakukan perubahan destinasi (29,20%), disusul dengan melakukan pembatalan perjalanan (21,50%). Jawaban dengan persentase paling sedikit adalah perubahan waktu dengan destinasi yang berbeda (12,30%). Sementara itu, pilihan untuk melanjutkan kegiatan wisata memiliki persentase sebesar 19%, 0,5% lebih besar

dibandingkan pilihan untuk merubah waktu perjalanan wisata dengan destinasi sama.

Adapun jawaban responden wisatawan domestik dengan persentase paling besar adalah melakukan perubahan destinasi dan pembatalan perjalanan dengan persentase keduanya sebesar 25,60%. Persentase tersebut hanya 1,6% lebih besar dibandingkan pilihan melakukan perubahan waktu dengan destinasi yang sama. Hanya 9.1% responden yang menjawab untuk melakukan perubahan waktu dengan destinasi berbeda.

Apabila ditinjau secara bersamaan antara hasil yang diperoleh dari dua jenis respon wisatawan di wilayah studi, wisatawan domestik dan mancanegara memiliki preferensi yang sama terkait respon akibat dampak perubahan iklim. Mereka cenderung merubah destinasi mereka dan membatalkan perjalanan. Sementara itu, paling sedikit responden yang akan merubah destinasi dan waktu dalam waktu bersamaan.

Dari hasil yang diperoleh pada Gambar 3, secara implisit terlihat bahwa perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap keputusan wisatawan secara umum. Keputusan wisatawan yang merubah destinasi atau membatalkan perjalanan, pada akhirnya dapat berdampak negatif pada keadaan pariwisata, seperti pergeseran puncak kunjungan. Dalam kasus perubahan iklim ekstrim, probabilitas adanya penurunan tingkat kunjungan pun akan semakin besar karena probabilitas wisatawan yang membatalkan atau merubah destinasi pun semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim dengan cara mengurangi resiko dan dampak yang akan ditimbulkannya.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini diperoleh temuan bahwa secara umum wisatawan mancanegara maupun domestik percaya bahwa iklim sedang mengalami perubahan. Mereka bahkan menganggap bahwa perubahan iklim ini merupakan isu yang penting untuk diperhatikan. Studi ini menunjukkan bahwa sudah ada perhatian dari wisatawan mengenai isu fenomena perubahan iklim. Mayoritas responden cenderung melakukan perubahan perjalanan ketika mereka mengetahui dampak yang terjadi akibat perubahan iklim di suatu objek wisata. Hal ini ditunjukkan yang secara tidak langsung dari jumlah kunjungan destinasi di suatu objek wisata. Hasil ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah khususnya dan pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan di masa mendatang terhadap pariwisata alam, khususnya wisata pantai. Salah satunya adalah memberikan edukasi dan informasi bagi wisatawan serta perlunya penggunaan teknologi peringatan dini. Hasil dari studi ini juga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan pariwisata untuk lebih memperhatikan dampak perubahan iklim terhadap kegiatan pariwisata alam, khususnya di destinasi wisata di Bali, dan umumnya di objek wisata alam yang terdapat di seluruh Indonesia. Selain itu, hasil ini dapat menjadi rekomendasi untuk mengusulkan tindakan penanganan untuk pengurangan resiko terhadap dampak perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Aguilo, E., Alegre, J., & Sard, M. (2005). The persistence of the sun and sand tourism model. *Tourism management*, *26*(2), 219-231.

Gössling, S., Bredberg, M., Randow, A., Sandström, E., & Svensson, P. (2006). Tourist perceptions of climate change: a study of international tourists in Zanzibar. *Current issues in tourism*, *9*(4-5), 419-435.

Hall, C. M. (2008). Tourism and climate change: Knowledge gaps and issues. *Tourism Recreation Research, 33*(3), 339-350, DOI:

10.1080/02508281.2008.11081557.
Kajan, E., & Saarinen, E. (2013). Tourism, climate change and adaptation: A review. *Current Issues in Tourism, 16*(2), 167-195, DOI: 10.1080/13683500.2013.774323.
Scott, D., Hall, C. M., & Stefan, G. (2012). *Tourism and climate change*: Impacts, adaptation and mitigation. Routledge.
Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
Weir, B. (2017). Climate change and tourism – Are we forgetting lessons from the past? *Journal of Hospitality and Tourism Management, 32*, 108-114.
Wijaya, N., & Furqan, A. (2017). Coastal tourism and climate-related disasters in an archipelago country in Indonesia: tourists' perspective. *Procedia Engineering* (*forthcoming*).

Daya Dukung Lingkungan Wisata Subak Jatiluwuh Kabupaten Tabanan Provinsi Bali

Rendiana Satya Pangestika[1], Nadhia Maharany Siara[1]

[1] *Universitas Brawijaya, Malang*
Email:rendiana22.rs@gmail.com; nadhiamaharany@gmail.com

ABSTRAK

UNESCO menetapkan Terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih sebagai Cultural Landscape of Bali Province yaitu The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy pada tanggal 29 Juni 2012. Peningkatan jumlah wisatawan akan memberikan dampak terhadap lingkungan yang disebabkan semakin banyaknya tekanan fisik terhadap daya dukungnya. Metode yang digunakan adalah untuk menganalisis daya dukung lingkungan wisata yaitu dengan menggunakan perhitungan rumus Cifuenter (1992) yang termodifikasi terdiri dari Daya Dukung Fisik, Daya Dukung Riil, Daya Dukung Manjemen dan Daya Dukung Efektif. Adapun hasil yang diperoleh untu nilai daya dukung fisik (PCC), nilai daya dukung riil (RCC) dan daya dukung efektif (ECC) yaitu dengan nilai 114.969 > 1.820 > 1.128.

Katakunci:Daya dukung fisik, daya dukung riil, daya dukung manajemen, dan daya dukung efektif

I. PENDAHULUAN

Sistem pertanian di Bali di kenal dengan istilah subak yang menjadi ciri khas dan daya tarik wisata. Sistem subak masuk ke dalam World Heritage UNESCO pada tahun 2012 yaitu sebagai *Cultural Landscape of Bali Province: Subak System as a Manifestation of Tri Hita Karana*. Luas subak yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yaitu seluas 20.720,2 Ha yang terbagi dalam empat situs yaitu kawasan Pura Ulun Danau Batur dan Danau Batur, kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan, kawasan Pura Taman Ayun, dan kawasan Catur Angga Batukaru. Berdasarkan Perda Provinsi Bali No.2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, bahwa sinergisme pembangunan sektor pariwisata dan pertanian sebagai sebuah buadaya masyarakat Bali yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyaraat serta pelestarian dan lingkungan. Subak Jatiluwih yang termasuk dalam kawasan Catur Angga Batukaru terletak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan dengan luas subak 305,80 Ha. Desa Jatiluwih merupakan desa wisata dengan potensi keindahan landscape dan sistem pertanian subak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengelola Wisata Subak Jatiluwih jumlah wisatawan yang berkunjung ke Desa Jatiluwih terus mengalami peningkatan pada tahun 2012 jumlah wisatawan sebanyak 97.099 orang, tahun 2013 sebanyak 101.560 orang, tahun 2014 sebanyak 165.158.

Peningkatan jumlah wisatawan serta pengembangan pariwisata juga dapat membawa pengaruh terhadap keberlanjutan Subak Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Subak memiliki peranan yang penting dalan pembangunan pariwisata (Pitana, 2003). Status warisan budaya dunia Subak Jatiluwih tersebut dapat masuk dalam kategori bahaya atau dihapus jika Subak Jatiluwih mendapat ancaman yang memeiliki efek buruk pada karakteristik situs tersebut. Ancaman tersebut dapat berupa penurunan jumlah spesies yang terancam punah, kerusakan keindahan alam karena kegiatan manusia seperti penerbangan, pencemaran, permukiman, pertambangan, proyek pembangunan, konflik bersenjata, bencana alam dan sebagainya (World Heritage Centre, 2017).

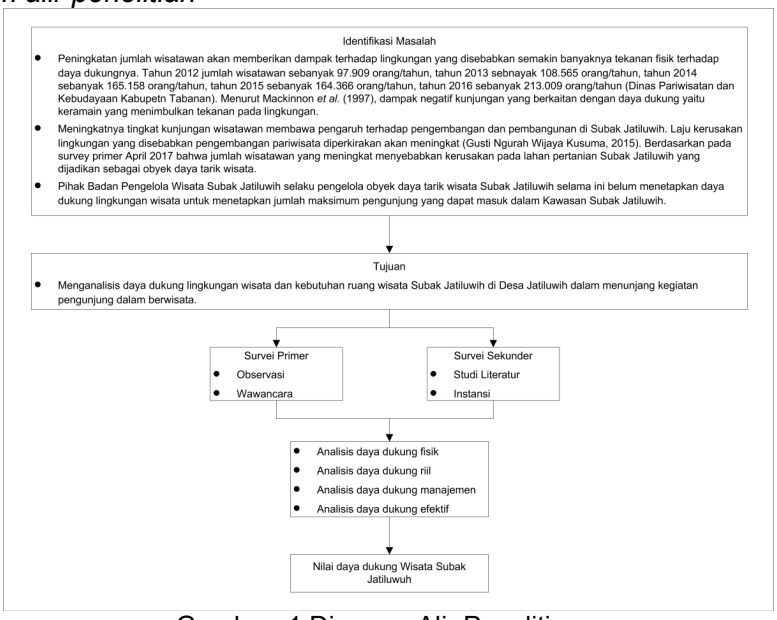
Hal yang mempengaruhi daya dukung lingkungan wisata salah satunya adalah faktor lingkungan biofisik lokasi wisata tersebut. Selain faktor fisik, daya dukung kawasan pariwisata juga berkaitan dengan faktor psikologis wisatawan. Menurut (Mackinnon, Mackinnon, & Thorsell, 1990) dampak negatif kunjungan yang berkaitan dengan daya dukung yaitu keramaian yang menimbulkan tekanan pada lingkungan, adanya perubahan tingkah laku satwa, erosi yang terjadi pada jalaur atau jalan setapak dantebing, pembangunan struktur wisata yang berlebihan, peningkatan polusi,

kebisingan, sampah dan ekstrasi sumberdaya alam, ciri-ciri penting budaya setempat mulai terancam hilang. Pembangunan wilayah destinasi serta dari kualitas objek daerah tujuan wisata yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi atau gangguan terhadap wisatwan dan lingkungan, terutama, kawasan konservasi (Fandeli C. d., 2009). Daya dukung pariwisata merupakan kemampuan obyek wisata alam untuk dapat menampung jumlah wisatwan pada luas dan satuan waktu tertentu (Soemarwoto, 2004).

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis daya dukung lingkungan wisata Subak Jatiluwih.

II. METODE

A. Diagram alir penelitian



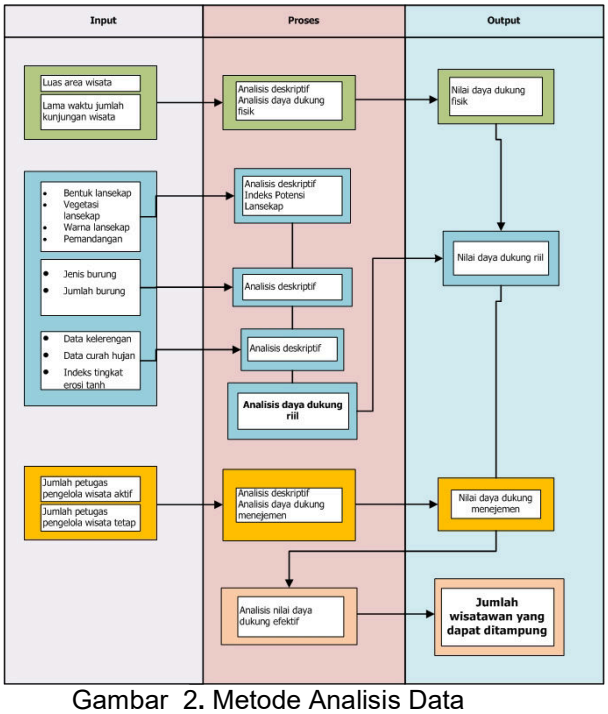
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

B. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpukan data dalam proses penelitian. Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu survei sekunder dan survei primer. Survei sekunder dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan survei primer dilakukan untuk memperoleh data primer.

C. Metode analisis data

Metode analisis dilakukan untuk mendeskripsikan tentang teknik analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan. Data yang dikumpulkan ditentukan berdasarkan permasalahan studi yang akan dibahas sekaligus mencerminkan tujuan studi yang akan dilakukan.



Gambar 2. Metode Analisis Data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wisata subak jatiluwuh

Kawasan Warisan Budaya Dunia Jatiluwih secara administratif berbatasan langsung dengan hamparan Gunung Batukaru dan Hutan Lindung Batukaru. Hal ini menjadikan Kawasan Jatiluwih menjadi salah satu kawasan strategis dari sudut kepentingan pariwisata. Berdasarkan konstelasi atau hubungan antar bagian wilayah, terdapat dua anlisa konstelasi yang dapat dijabarkan yaitu analisa konstelasi ditinjau dari aspek geografis dan ditinjau dari kebijakan sectoral. Analisa fungsi kawasan Warisan Budaya Dunia dalam konstelasi regional ditinjau dari aspek geografis.

Secara geografis, Kawasan Jatiluwih terletak di Kabupaten Tabanan, Bagian Barat Daya Provisnsi Bali, berbatasam langsung dengan hamparan Gunung Batukaru di bagian utara dan Hutan Lindung Batukaru di bagian barat. Kawasan WBD Jatiluwih mempunyai fungsi sebagai titik penunjang aktivitas penrtanian di Provinsi Bali. Keuntungan yang diperoleh oleh Kawasan Jatiluwih dari keberadaan areal perkebunan dan pertanian yang mengelilingan antara lain adalah bahwa secara tidak langsung telah menyediakan dan mempertahankan ruang terbuka hijau di Provinsi Bali, selain itu menjadi lumbung beras utama dan potensi wisata. Peran yang dimiliki Kawasan WBD Jatiluwih dalam konteks tersebut terutama terletak pada kewajiban untuk mempertahankan ruang terbuka hijau, serta mengambangkan potensi pertanian dan pariwisata.

Analisis fungsi kawasan WBD Jatiluwih dalam kontelasi regional ditinjau dari aspek kebijakan tata ruang Kabuapten Tabanan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan memiliki beberapa implikasi keruangan terhadap pola pemanfaatan ruang di Kawasan Jatiluwih. Peruntukan kawasan lindung fungsi yang direncanakan untuk Kawasan Jatiluwih meliputi kawasan hutan lindung (Hutan Lindung Batukaru) dan fungsi kawasan perlindungan setempat. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya Kawasan Jatiluwih menjadi fungsi kawasan pertanian dimana kegiatan pertanian dan pariwisata serta multiplier effect-nya menjadi titik tumpu.

UNESCO menetapkan Terasering sawah di Desa Wisata Jatiluwih sebagai Cultural Landscape of Bali Province yaitu The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy pada tanggal 29 Juni 2012. Penetapan subak sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO disebabkan memiliki nilai keluarbiasaan yang bersifat universal (outstanding universal value) yaitu Tri Hita Karana. Penetapan subak sebagai Warisan Budaya Dunia menurut UNESCO disebutkan bahwa "*cultural properties [that] represent the combined works of nature and of man .... They are in illustrative of the evolution of human society and settlement over time, under the influence of the physical constrains and/or opportunities presented by their natural environment and of successive social, economic and cultural force, both external and internal*". Berdasarkan definisi yang diberikan oleh UNESCO tersebut, bahwa subak sebagai warisan budaya dunia merupakan kombinasi antara alam dan hasil karya manusia, dalam perkembangannya harus memberikan manfaat bagi pelestarian alam serta keberhasilan dari aspek sosial, ekonomi, dan sumberdaya budaya.

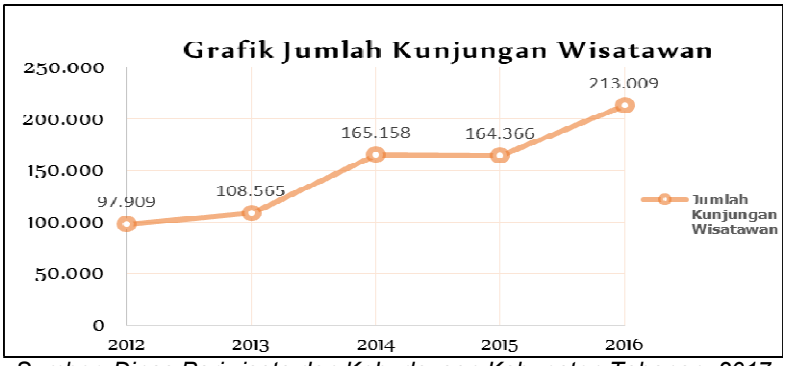
Subak Jatiluwih merupakan obyek daya tarik wisata di Desa Jatiluwih yang terletak di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Subak Jatiluwih sejak tahun 2012 mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai situs Warisan Budaya Dunia dengan pelestarian sistem irigasi tradisional. Subak Jatiluwih terbagi dalam 7 (tujuh) sub subak atau tempek dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 1. Sub Subak Jatiluwih

No.	Nama Sub Subak	Luas (Ha)	Anggota
1.	Sub Subak Telabah Gede	113	110
2.	Sub Subak Besi Kalung	48	55
3.	Sub Subak Kedamaian	56	60
4.	Sub Subak Kesambi	11	43
5.	Sub Subak Gunung Sari	37	57
6	Sub Subak Umakayu	36	30
7.	Sub Subak Umadui	21,7	40

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tabanan, 2017

Berdasarkan Tabel 1 Luas Sub Subak yang terluas yaitu terdapat pada Sub Subak Telabah Gede dengan luasan 113 Ha dengan 110 anggota. Sub Subak Telabah Gede merupakan subak yang terkenal dengan sebutan Subak Jatiluwih, karena letak Sub Subak Telabah Gede berada di tengah-tengah jalam utama Desa Jatiluwih. Sehingga wisatawan yang datang dapat secara langsung menikmati panorama alam sembari menikmati makanan ditepian restoran atau hanya dengan melewati menggunakan kendaraan.



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tabanan, 2017

Gambar 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Grafik jumlah kunjungan wisatawan pada Gambar 3 menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2012-2014 disebabkan karena subak jatiluwih mendapat penghargaan dari UNESCO sebagai salah satu situs warisan budaya dunia. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014-2015 sebesar 792 wisatawan berdasarakan Badan Pengelola Wisata Subak Jatiluwih disebabkan karena adanya isu global yaitu terorisme ISIS yang berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan.



Gambar 4 Monumen Unesco

Potensi obyek daya tarik wisata Subak Jatiluwih terdiri dari potensi alam social dan budaya. Potensi alam terdiri dari bentang alam atau landscape persawahan yang berundak-undak, sumber mata air dan air terjun, sedangkan potensi budaya terdiri dari sistem subak, upacara adat. Rangakaian upacara adat yang berhubangan sistem subak di Subak Jatiluwih yaitu:

1. Mapag toyo (menjemput air), yaitu upacara penjemputan air irigasi yang kelak akan digunakan untuk mengaliri areal persawahan yang biasanya dilakukan di bendungan atau tempat pembagi air.
2. Ngendangin, yaiti upacara yang dilakukan apabila terdapat anggota subak yang akan memulai mengolah lahan dengan tujuan memohon iin kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menifestasi sebagai Betara Sri agar memberikan kelancara dan kehidupan.
3. Ngurit atau mawiwih pantun merupakan upacara yang dilakukan pada saat membenihkan padi yang nantinya akan ditanam.
4. Ngerasikan, yaitu upacara yang dilakukan setelah sawah dibersihakan dan diratakan sebelum benih padi ditanam biasanya dilakukan di hulu maupun di hilir sawah.
5. Nandur atau menanam padi pada saat proses ini penanam biasanya mencari hari baik yang perhitungaanya disesuaikan dengan kelahiran anggota subak atau disebut mitra satru.
6. Upacara pada saat padi berumur satu bulan, yaitu ditandai dengan tumbuhnya tiga buku (ruas) pada batang padi yang diandaikan sebagai anak yang sudah lincah.
7. Upacara pada saat padi berumur dua bulan dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan karena padi sudah berkembang dengan baik.
8. Upacara padi saat padi berumur tiga bulan, diibaratkan padi sebagai manusia yang sudah menginjak masa remaha atau sudah akil balik, upacara dilakukan selain sebagai wujud syukur juga memohon kepada Tuhan agar

perkembangan tanaman padi sesuai yang diharapkan.

9. Upacara meikuh lasan, yaitu upacara yang dilakukan pada sat padai tumbuh malai sehingga Nampak seperti ekor kadal sehingga dinamakan meikuh lasan. Upacara ini bertujuan untuk memohon kepada Tuja agar malai yang sudah tumbuh dapat berkembang baik sehingga dapat dipanen pada saatnya nanti.
10. Upacara memanen padi, merias nini kaki dan nini manuh dilakuan sebagu wujud syukur kepada Tuhan atas manifestasunya sebagai Dewi Sri yang telah memberikan kelancara, kesuksesan dalam bertani.
11. Upacara padi di lumbung, dilakukan untuk memohon kepada Tuhan agar padi yang elah dipanen dapat disimpan dengan aman sehingga dapat digunakan sebagai bahan makan hingga panen berikutnya.
12. Upacara menurunkan padi, dilakukan pada saat padi di lumbung akan diturunkan untuk digunakan sebagai bahan pangan dengan tujuan agar padi yang akan diolah menjadi nasi dan berguna memberikan kebaikan.
13. Upacara mrelina dewa nini, bertujuan untuk melebur Dewa Nini yang digunakan pada saat menaikan padi ke lumbung dan sebagai wujud syukur kepada Tuhan.

Kegiatan wisata yang terdapat di obyek daya tarik wisata Subak Jatiluwih terdiri dari kegiatan tracking dan cycling. Obyek wisata Subak Jatiluwih juga telah memiliki papa informasi untuk jalur tracking dan cycling seperti pada Gambar 5.



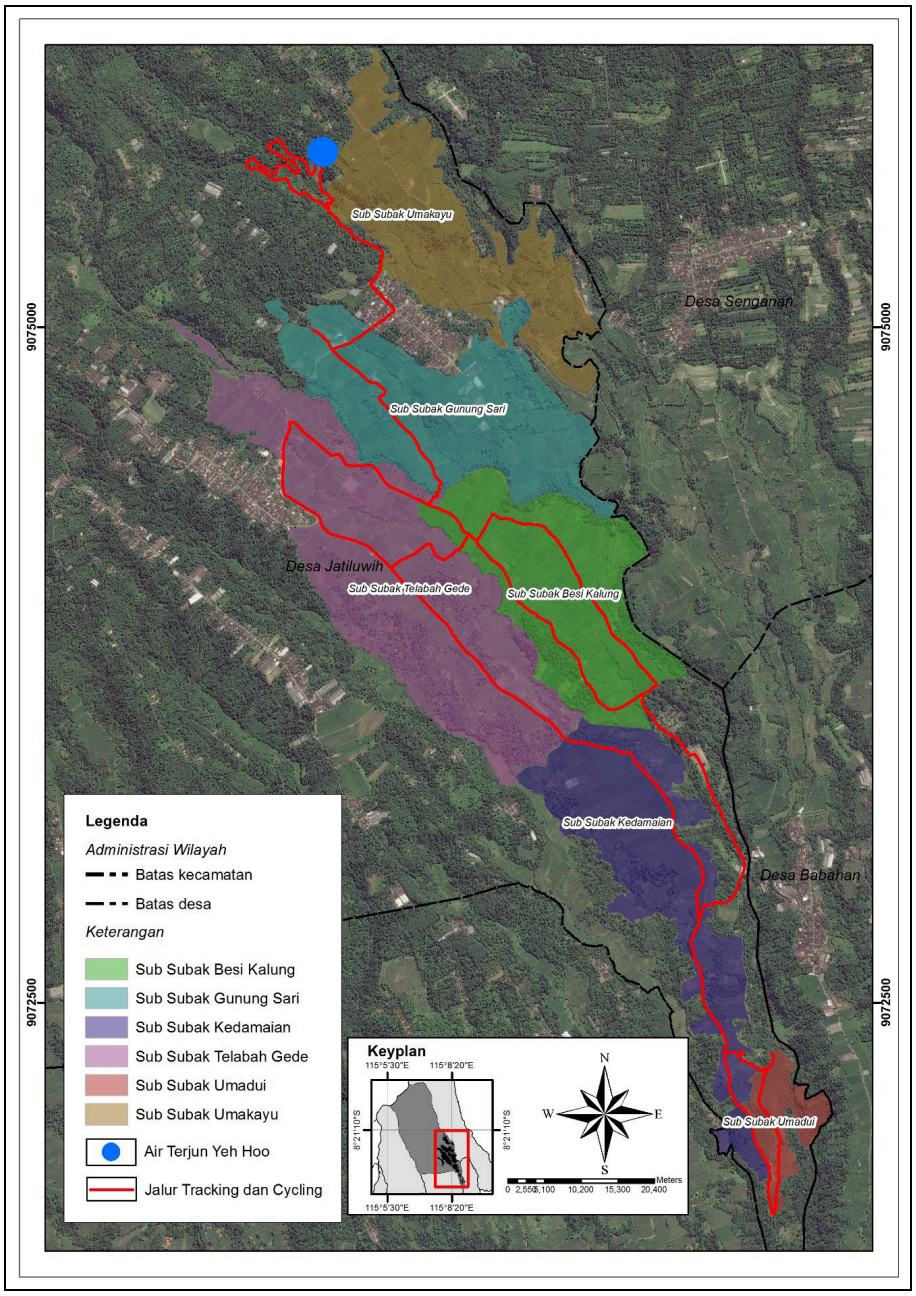
Gambar 5 Peta Jalur *Tracking*



Gambar 6 Jalur Tracking dan *Cycling*

yang indah melewati beberapa sub subak yaitu Sub Subak Telaban Gede, Sub Subak Kedamaian dan Sub Subak Besi Kalung selain itu juga terdapat pada jalan di tengah-tengah area persawahan. Jalur tracking yang terdapat pada Gambar 4.8 salah satu jalan yang berada pada Sub Subak Besi Kalung.

Jalur tracking menggunakan jalur yang sama dengan jalur cycling yaitu melalui Sub Subak Telah Gede, Sub Subak Kedamaian dan Sub Subak Besi Kalung. Jalur tracking terdiri dari beberapa track yaitu short track, semi midle track, midle track, long track, extra track jalur tersebut yang dikelola oleh Badan Pengelola Wisata Subak Jatiluwih. Salah satu jalur tracking yang memiliki jarak sedang yang berujung pada air terjun yaitu terdapat di Sub Subak Umakayu.



Gambar 7 Peta Jalur Wisata

B. *Analisis daya dukung fisik*

Daya dukung fisik dalam penelitian ini merupakan jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung (*Phisical Carrying Capacity*) oleh luas area subak jatiluwih yang dijadikan sebagai obyek wisata dengan pertimbangan kebutuhan wisatawan terhadap area tersebut untuk berwisata dengan nyaman dan faktor rotasinya. Berikut merupakan rumus jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung menurut (Fandeli & Muhammad., 2009).

$$PCC = A\ x\ \frac{1}{B}\ x\ R_f \quad (1)$$

Keterangan:

A :Luas area yang digunakan untuk wisata

B :Luas area yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan untuk berwisata dengan

tetap memperoleh kepuasan.

R_f:Faktor Rotasi yaitu jumlah kunjungan harian yang perkenankan ke satu lokasi, yang dihitung dengan persamaan:

$$R_f = \frac{Masa\ Buka}{Waktu\ rata - rata\ per\ kunjungan} \quad (2)$$

$$Rf = \frac{9}{3}$$

= 3

$$PCC = 2.491.000\ x\ \frac{1}{65} x3$$

= 114,969 orang/hari

Perhitungan daya dukung fisik dengan menggunakan Rumus (1) menunjukkan bahwa kawasan Subak Jatiluwih secara fisik pemanfaatannya mampu menampung sejumlah 114.969 orang/hari.

C. *Analisis daya dukung riil*

Daya dukung riil adalah jumlah kunjungan wisatawan yang dapat ditampung oleh suatu kawasan dengan mempertimbangkan faktor koreksi sesuai dengan karakteristik kawasannya. Berdasaraka kondisi kawasan di Subak Jatiluwih maka peneliti memakai beberapa faktor koreksi diantaranya yaitu landscape atau bentang alam, curah hujan, kelerengan, erosi tanah, fauna. Rumus perhitungan Real Carrying Capacity yaitu:

$$RCC=PCC \times Cf1 \times Cf2 \times \ldots \times Cfn \quad (3)$$

$$C_{fn} = 1 - \frac{M_n}{M_t} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan:

M_n : Kondisi nyata pada variable fn terhitung

M_t : Batas maksimum pada fn tersebut

C_{fn} : Faktor pereduksi atau koreksi ke-n terkait dengan variabel ke-n

a. *Faktor koreksi landscape*

Penilaian factor koreksi landscape dinilai berdasarkan poin kriteria pada masing-masing unsur lanskap yaitu bentuk (*landform*), vegetasi (*vegetation*), warna (*colour*), pemandangan (*scenery*), kelangkaan (*scarcity*) dan modifikasi structural.Berdasarkan penilaian landsekap yang terdiri dari enam sub subak yaitu Sub Subak Umakayu, Sub Subak Gununung Sari, Sub Subak Telabah Gede, Sub Subak Besi Kalung, Sub Subak Umadui dan Sub Subak Kedamaian diperoleh skor sebesar 15 dari total keseluruhan skor 27. Nilai indeks potensi lansekap kawasan wisata Subak Jatiluwih didapatkan hasil Mn yaitu 15 dan Mt 27 jumlah maksimum nilai potensi lansekap. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

$$Cf_1 = 1 - \frac{15}{27}$$

$$Cf_1 - 0.444$$

b. *Faktor koreksi curah hujan*

Curah hujan menjadi faktor koreksi dalam penelitian ini karena kegiatan wisata yang dilakukan di obyek wisata Subak Jatiluwih merupakan wisata outdoor, aktivitas wisatawan akan sangat dibatasi oleh kondisi cuaca di Kawasan Subak Jatiluwih. Semakin besar curah hujan yang terjadi makan akan menghambat kegiatan dan

kenyaman saat berwisata.

$$Q = \frac{\sum rata-rata bulan kering}{\sum rata-rata bulan basah} = \frac{22}{92} = 0{,}239 \quad (5)$$

Indeks nilai curah hujan pada kawasan wisata Subak Jatiluwih didapatkan hasil 0,239 sebagai Mn dan Mt yaitu bernilai 7. Nilai Mt 7 digunakan karena nilai tertinggi dalam klasifikasi Schmidi Fergusom. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan Rumus 3 maka diporeleh hasil sebagai berikut:

$$cf_2 = 1 - \frac{0{,}239}{7} = 0{,}966 \quad (6)$$

c. Faktor koreksi kelerengan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2030 termasuk dalam kelas klasifikasi kelas lereng 15-40 dengan keterangan sangat curam memiliki nilai 80 yang dijadikan sebagai nilai Mn. Penentuan nilai Mt untuk koreksi kelerengan didasarkan pada nilai maksimum yaitu 100 serta nilai maksimum Mt juga didasarkan pada studi terdahulu yaitu pada penelitian Silvia Lucyanti, Penilaian Daya Dukung Wisata di Obyek Wisata Bumi Perkemahan Palutungan Taman Nasional Gunung Ciremai Propinsi Jawa Barat. Sehingga berdasarkan Rumus 4. Diperoleh hasil sebagai berikut.

$$cf_3 = 1 - \frac{80}{100} = 0{,}20 \quad (7)$$

Faktor koreksi kelerengan Subak Jatiluwih yaitu 0,20 dengan klasifikasi curam berdasarkan SK. Menteri Pertanian N0. 837/KPTS/UM/11/1980 sehingga membatasi jumlah pengunjung yang dapat ditampung area ini. Menurut (Siswantoro, 2012) kondisi kelerengan turut mempengaruhi wisatawan dalam menikmati alam dimana lereng yang terjal akan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk mendaki.

d. Faktor koreksi erosi tanah

Penilaiana faktor koreksi erosi tanah berdasarkan pasa Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837 Tahun 1980 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung. Berdasarkan berdasarkan RTRW Kabupaten Tabanan Tahun 2010-2030 obyek wisata Subak Jatiluwih termasuk dalam klasifikasi jenis tanah andosol yaitu klasifikasi jenis tanah peka dengan nilai 30 sebagai Mn. Penilaian nilai Mt pada koreksi erosi tanah berdasarkan nilai maksimum yaitu 75. Sehingga berdasarkan Rumus 5 diperoleh hasil sebagai berikut.

$$cf_4 = 1 - \frac{30}{75} = 0{,}4 \quad (8)$$

e. Faktor koreksi fauna

Potensi fauna yang terdapat pada obyek wisata subak jatiluwih yaitu burung kokokan atau burung bangau putih merupakan burung yang telah mengalami kelangkaan, beberapa spesies family burung ini sudah termasuk dalam daftar satwa liar yang dilindungi seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti burung yang ditemukan dikawasan obyek wisata Subak Jatiluwih yaitu hanya terdapat satu jenis burung yaitu burung kokokan sehingga memiliki nilai yang rendah yaitu skor 1. Burung kokokan dapat ditemui di Subak Jatluwih terutama pada musim petani membajak sawahnya karena pada saat itu burung kokokan memakan cacing yang keluar dari tanah. Jika pada musim tanam maka sangat jarang bisa ditemui burung kokokan tersebut. Faktor koreksi fauna burung kokokan untuk nilai Mn yaitu 1. Penilaian nilai Mt untuk faktor koreksi burung yaitu 3,5 berdasarkan pada nilai batas

atas dalam kategori klasifikasi nilai indeks Shannom-Weaner, sehingga nilai faktor koreksi yaitu sebagai berikut.

$$cf_5 = 1 - \frac{1}{3,5} = 0,714 \quad (9)$$

Berdasarkan penilaian pada masing-masing faktor koreksi makan dapat dilihat kesimpulan pada Tabel 1

Tabel 15 Nilai Faktor Koreksi

Cfn	Faktor Koreksi	Nilai
cf_1	Landscape	0,444
cf_2	Kelerengan	0,2
cf_3	Kepekaan Erosi Tanah	0,4
cf_4	Curah Hujan	0,966
cf_5	Fauna	0,714

Nilai faktor koreksi secara keselurahan yaitu tiga dari lima faktor koreksi yaitu faktor koreksi landscape, kelerengan dan kepekaan erosi tanah memiliki nilai di bawah 0,5. Faktor koreksi curah hujan dan fauna memiliki nilai di atas 0,5. Faktor koreksi sebagai faktor pembatas di lokasi studi menunjukkan hasil yang cukup baik karena terdapat faktor korekasi yang mendekati nilai satu. Dalam penelitian ini nilai yang cukup mempengaruhi hasil analisis daya dukung lingkungan wisata subak di Desa Jatiluwih yaitu faktor koreksi curah hujan dan faktor koreksi fauna.

RCC=114.969 × 0,444 × 0,2 × 0,4 × 0,966 × 0,714

RCC=2.820

Jumlah pengunjung maksimum yang diperkenankan berkunjung ke ODTW Subak Jatiluwih dengan mempertimbangkan faktor koreksi (Cf) landscape, kelerengan, kepekaan erosi tanah, curah hujan dan fauna adalah 2.820 orang/hari.

D. Analisis daya dukung manajemen

Badan pengelola wisata Subak Jatiluwih dibentuk setelah adanya penetapan dari UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia hal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan No. 84 Tahun 2013 tentang struktur organisasi pengelola daya tarik Jatiluwih. Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih No. 1 Tahun 2014 dibentuklah managemen operasional daya tarik wisata Jatiluwih. Management capacity adalah jumlah petugas pengelola wisata dan hasil dari Management capacity (MC) nantinya digunakan dalam penentuan nilai Efective Carrying Capacity (ECC).. Berikut merupakan perhitungan analisis *management capacitiy.*

$$MC = \frac{R_n}{R_t} \text{ x } 100\% = \frac{29}{73} \text{ x } 100\% = 40\% \quad (10)$$

Berdasarkan persamaan di atas diperoleh nilai daya dukung menejemen sebesar 40%. Menurut Cifuentes(1992) kapasitas menejemen dapat diindikasikan dari beberapa variabel seperti dasar hukum, kebijakan dan peraturan, peralatan dan petugas. Perhitungan analisis daya dukung menejemen untuk mengantisipasi penurunan kapasitas menejemen terutama pada musim puncak kunjungan di obyek wisata (peak-seosen) dimana jumlah pengunjung melibihi kapasitas daya dukung.

E. Analisis daya dukung efektif

Daya dukung efektif di Subak Jatiluwih merupakan jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh Subak Jatiluwih pada waktu tertentu dengan mempertimbangan faktor koreksi dan juga mempertimbangkan kapasitas

manajemen yaitu ketersediaan petugas. Porelehan nilai daya dukung efektif mendapatkan input dari nilai daya dukung riil yang terdiri dari faktor-faktor koreksi yaitu landscape, curah hujan, kelerengan, erosi tanah dan fauna.

ECC = RCC x MC (11)

ECC=2.820×0,40 = 1.128 orang

Berdasarkan perhitungan Rumus 11, diporeleh nilai daya dukung efektif pada ODTW Subak Jatiluwih yaitu 1.128 orang per hari. Jumlah maksimal pengunjung yang berwisata sebanyak 1.128 orang per hari. Berdasarkan hasil perhitungan nilai daya dukung fisik (PCC), nilai daya dukung riil (RCC) dan daya dukung efektif (ECC) diperoleh persamaan PCC > RCC ≥ ECC dengan nilai 114.969 > 1.820 > 1.128. Jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung secara fisik atau luas wilayahnya adalah sebanyak 114.969 wisatawan/hari. Faktor koreksi pada daya dukung riil yang mempengaruhi ruang dan kegiatan wisatawan yang dapat ditampung adalah sebanyak 2.820 wisatawan/hari. Jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh ODTW Subak Jatiluwih berdasarkan faktor koreksi dengan mempertimbangkan kapasitas menejemennya adalah sebanyak 1.128 wisatawan per hari.

IV. KESIMPULAN

Nilai daya dukung fisik (PCC), nilai daya dukung riil (RCC) dan daya dukung efektif (ECC) yaitu dengan nilai 114.969 > 1.820 > 1.128. Artinya yaitu, jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung secara fisik dengan faktor luas wilayah adalah sebanyak 114.969 wisatawan/hari. Faktor koreksi pada daya dukung riil yang mempengaruhi ruang kegiatan wisatawan yang dapat ditampung adalah sebanyak 2.820 wisatawan/hari. Jumlah maksimum wisatawan yang dapat ditampung oleh ODTW Subak Jatiluwih berdasarkan faktor koreksi dengan mempertimbangkan kapasitas menejemennya adalah sebanyak 1.128 wisatawan per hari. Sehingga pada lokasi studi Subak Jatiluwih nilai daya dukung efektifnya sebesar 1.128/hari berada di bawah daya dukung karena pada kondisi actual jumlah pengunjung sebesar 585/hari.

DAFTAR PUSTAKA

Bappeda Kabupaten Tabanan. (2010). *RTRW Kabupaten Tabanan 2010-2030.* Tabanan: Bappeda Kabupaten Tabanan.

Cifuentes, M. (1992.). *Tourism Principles and Practice.* London: Longman Group.

Fandeli, C. d. (2009). *Prinsip-prinsip Dasar Mengkonservasi Lansekap.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fandeli, C., & Muhammad. (2009). *Prinsip - Prinsip Dasar Mengkonservasi Lansekap.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mackinnon, J. K., Mackinnon, G. C., & Thorsell, J. (1990). *Pengelolaan kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika (Terjemahan).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pertanian, K. (1980). *Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung.* Jakarta: Kementrian Pertanian.

Pemerintah Provinsi Bali. (2012). *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali.* Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.

Pitana, I. G. (2003). Rice-Based Culture and Tourism Development in Bali. *Jurnal Dinamika Kebudayaan, 5*(3), 115-121.

Siswantoro, H. (2012). Strategi Optimasi Wisata Massal di Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Grojogan Sewu. *Jurnal Ilmu Lingkungan, 10*(2), 100-110.

Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan pembangunan.* Jakarta: Djambatan.
World Heritage Centre. (2017, Juli 7). *List of World Heritage in Danger*. Retrieved from http://whc.unesco.org/en/danger/

Strategi Pengembangan *Ecotourism* Lereng Merapi Berbasis konsolidasi tanah di daerah istimewa yogyakarta

Sutaryono[1] dan Aristiono Nugroho[2]

[1]Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STPN
[2]Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Email: taryo_jogja@yahoo.com; aristiono
www.manajemenpertanahan.blogspot.com

Lereng Selatan Gunung Api Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan wisata yang berdampingan dengan Taman Nasional Gunung Merapi serta berada pada Kawasan Rawan Bencana. Sebagai kawasan rawan bencana, maka pengembangan pariwisata di kawasan ini menjadi sangat terbatas. Naskah ini, bertujuan untuk memformulasikan strategi pengembangan ecotourism setelah dilaksanakannya konsolidasi tanah. Content analisys dipilih sebagai metode yang tepat untuk mengkaji peluang dan tantangan yang memungkinkan diformulasikan strategi pengembangan ecotourism lereng merapi berbasiskan konsolidasi tanah. Observasi terhadap proses pelaksanaan konsolidasi tanah juga dilakukan untuk mengetahui potensi partisipasi masyarakat dalam pengembangan ecotourism. Hasilnya menunjukkan bahwa konsolidasi tanah memiliki tiga agenda sekaligus, yakni: (a) penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; serta (c) dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan ecotourism di kawasan rawan bencana Merapi adalah (a) pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan (b) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.

Kata kunci: ecotourism, konsolidasi tanah, pengembangan pariwisata

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Sebagai wilayah yang masuk kategori 'ring of fire', intensitas bencana di Indonesia relatif besar. Namun demikian, tingginya ancaman bahaya tersebut belum diantisipasi melalui penataan kawasan pasca terjadinya bencana. Penataan kawasan pasca bencana cenderung dilakukan secara sporadis, tanpa disain dan cenderung situasional yang jauh dari agenda keberlanjutan. Kondisi demikian, terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesai pasca terjadinya bencana.

Namun demikian, berbagai upaya harus dilakukan agar penataan kawasan pasca bencana dapat berkelanjutan dengan tetap menjamin adanya *livelihood* (penghidupan) bagi masyarakat korban bencana dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan munculnya bencana baru di kawasan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar kawasan pasca bencana dapat tertata, memberikan sumber penghidupan berkelanjutan dan memperkuat kelembagaan masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pengalaman penataan kawasan pasca bencana Erupsi Gunung Api Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 layak dikedepankan. Tidak sekedar penataan kawasan pasca bencana, tetapi masyarakat korban bencanapun melakukan inisiatif-inisiatif produktif dalam rangka mengupayakan sumber penghidupan baru (Aristiono & Sutaryono, 2015). Sebagian anggota masyarakat telah melakukan berbagai upaya kreatif untuk menggantikan sumber penghidupan sektor pertanian dan peternakan yang lenyap terkena erupsi maupun munculnya hamparan "padang pasir" di lereng Merapi bagian selatan. Masyarakat berhasil

menciptakan kondisi pasca bencana menjadi objek wisata baru yang dikenal dengan *lava tour*. Objek wisata baru ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka tempat parkir, menjadi tukang ojek, berjualan, dan menjadi pemandu wisata. Seiring dengan perkembangan wisata *lava tour*, maka layanan wisata bertambah menjadi layanan motor *trail* dan *jeep* wisata, bahkan berkembang pula menjadi museum merapi. Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan inisiatif untuk mengembangkan *ecotourism* Lereng Merapi pasca bencana.

Berkenaan dengan hal tersebut maka strategi pengembangan ecotourism pasca bencana melalui konsolidasi tanah di DIY menjadi pengalaman empirik yang layak dikedepankan. Konsolidasi tanah sebagai sebuah kebijakan penataan pertanahan perlu didorong dan dikembangkan, baik untuk penataan kawasan secara umum maupun utamanya untuk penataan kawasan pasca bencana yang memberikan peluang penghidupan secara berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Naskah ini bermaksud untuk mengelaborasi strategi pengembangan *ecotourism* pasca bencana Merapi di DIY setelah dilakukan penataan kawasan melalui kebijakan konsolidasi tanah.

Adapun tujuan naskah ini untuk mengkampanyekan pengembangan livelihood pada kawasan bencana melalui ecotourism serta mendorong penerapan kebijakan konsolidasi tanah untuk penataan kawasan, baik penataan kawasan secara umum maupun penataan kawasan pasca bencana.

II. METODE

Naskah ini disusun melalui metode *desk study* terhadap beberapa naskah, utamanya buku 'Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah' yang ditulis oleh Aristiono Nugoro dan Sutaryono (STPN Press, 2015). Pengalaman empirik selama proses konsolidasi tanah yang dilakukan Oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY pada tahun 2014, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan naskah ini. Deskriptif kualitatif digunakan untuk mengartikulasikan realitas dan gagasan masyarakat dalam rangka mengembangkan ecotourism pada kawasan pasca bencana.

Content analisys dipilih sebagai metode yang tepat untuk mengkaji peluang dan tantangan yang memungkinkan diformulasikan strategi pengembangan ecotourism Lereng Merapi berbasiskan konsolidasi tanah. Observasi terhadap proses pelaksanaan konsolidasi tanah juga dilakukan untuk mengetahui potensi partisipasi masyarakat dalam pengembangan *ecotourism*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ecotourism

UNESCO menjelaskan bahwa *ecotourism* (ekowisata) merupakan pariwisata bertanggung-jawab yang dilakukan pada tempat-tempat alami, serta memberi kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pandangan UNESCO yang memadukan kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini diadopsi dari pandangan TIES (*The International Ecotourism Society*) (UNESCO, 2009 dalam Aristiono & Sutaryono, 2014).

Definisi yang lain sebagaimana dikutip oleh Sitorus (2014), ekoturisme (ekowisata) dapat didefinisikan sebagai konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Rumusan ini mengandung prinsip-prinsip: (a) memiliki komitmen pelestarian lingkungan dan ekonomi berkelanjutan; (b) mengikuti kaidah-kaidah ekologis dan permusyawaratan

masyarakat setempat; (c) memberikan manfaat kepada masyarakat setempat; (d) peka dan hormat terhadap nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat; (e) memperhatikan perjanjian, peraturan, perundang-undangan baik ditingkat nasional maupun internasional.

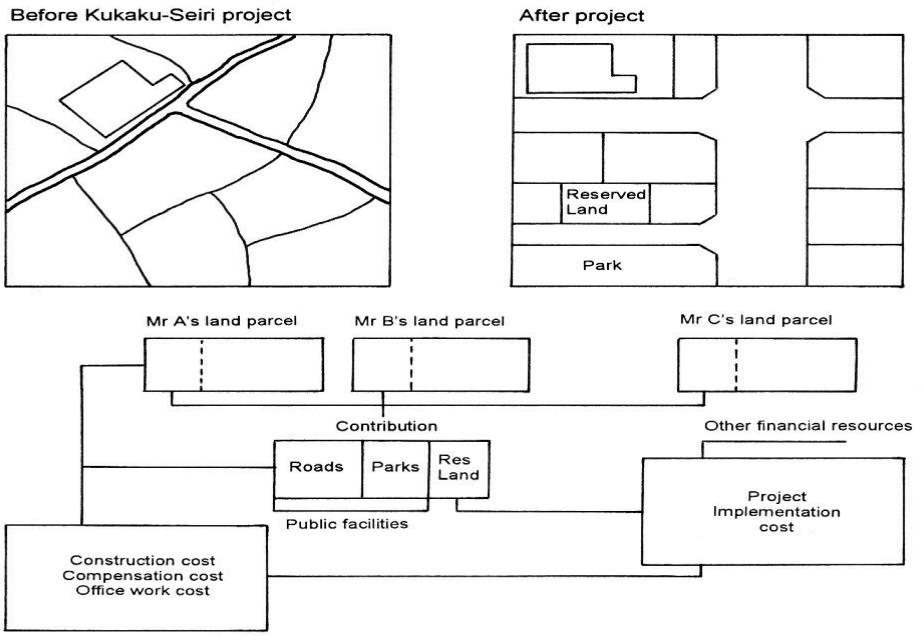
Prinsip-prinsip di atas secara praksis sudah ditunjukkan oleh masyarakat di lereng Merapi dalam upaya mengembangkan penghidupannya pasca terjadinya bencana. Meskipun pada awalnya belum menggunakan lebel *ecotourism*, tetapi komitmen untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi, berbasis partisipasi, untuk kemanfaatan masyarakat, penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sudah diterapkan. Dalam konteks ini masyarakat sudah mengembangkan wisata alam, wista edukasi, wisata petualangan serta wisata budaya. Di antaranya adalah: (a) Obyek wisata Pemandangan Alam Kaliadem; (b) Volcano Tour menggunakan Jeep; (c) Cross Adventure menggunakan motor trail; (d) Wisata Bukit Kali Kuning dan Bukit Klangon; (e) Bunker Kaliadem; (f) Goa Jepang; (g) Wisata Batu Alien dan Stonehenge di Cangkringan; (h) Wisata Spiritual Makam mBah Maridjan; (i) Museum Sisa Hartaku; (j) Desa Wisata Ledok Sambi, Petingsari dan Pulesari; serta (k) Wisata Kuliner khas Lereng Merapi (Jadah Tempe, Kopi Merapi).

Obyek-obyek wisata di atas, berbasiskan pada wisata alam, wisata budaya dan wisata edukatif yang kesemuanya menjadi *trigger* bagi munculnya usaha-usaha pendukung pariwisata berbasiskan potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Hal inilah praksis *ecotourism* di lereng Merapi pasca bencana yang diinisiasi oleh masyarakat setempat.

B. Konsolidasi Tanah Pada Kawasan Pasca Bencana Merapi

Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 mendefinisikan bahwa konsolidasi tanah sebagai kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai Rencana Tata Ruang serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan partisipasi masyarakat. Dalam konteks yang lain, konsolidasi tanah dimaknai sebagai kebijakan pertanahan yang dilakukan untuk menata kembali bidang-bidang tanah yang tidak tertib dan tidak teratur menjadi bidang-bidang tanah yang tertib dan teratur sesuai alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang, dengan mengandalkan partisipasi masyarakat (Sitorus, 2015). Hal di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilakukan secara simultan dalam suatu kegiatan konsolidasi tanah, yaitu: (a) penataan pertanahan yang meliputi penataan kembali penguasaan (terhadap ketidaktertiban penguasaan tanah) dan penggunaan tanah (terhadap ketidakteraturan penggunaan tanah); serta (b) usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.

Dalam konteks global, di Jepang dikenal dengan land readjustment, dimana sumbangan tanah digunakan untuk pembangunan infrastruktur (jalan dan fasilitas publik lainnya) sekaligus untuk membiayai pelaksanaan KT tersebut (Sitorus, 2014). Konsep land readjustment sebagaimana Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Konsep Dasar *Land Readjustment* (*Kukaku-Seiri*) di Jepang

C. Strategi Pengembangan Ecotourism Pasca Bencana

Secara keruangan kawasan lereng selatan Gunung Api Merapi adalah Kawasan Rawan Bencana yang hanya boleh digunakan untuk: (a) pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam; (b) tidak untuk hunian; dan (c) *land coverage ratio* paling banyak sebesar 5% (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2013).

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang paling realistis dan dapat dikembangkan di kawasan tersebut adalah pengembangan pariwisata, khususnya *ecotourism*. Untuk mewujudkan *ecotourism* sebagai sebuah strategi penghidupan bagi masyarakat, maka berbagai potensi di Lereng Merapi perlu dikonsolidasikan dan diintegrasikan ke dalam satu agenda bersama secara kelembagaan. Berkenaan dengan hal ini maka optimalisasi hasil konsolidasi tanah dan pengembangan kelembagaan perlu dilakukan secara simultan dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada secara optimal.

1. Optimalisasi Hasil Konsolidasi Tanah

   Konsolidasi tanah memiliki *output* (hasil) berupa sertipikat hak atas tanah dan outcome berupa kawasan yang mempunyai aksesibilitas yang lebih baik. Sertipikat hak atas tanah hasil konsolidasi tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, yang mampu memberi jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Sebagaimana diketahui konsolidasi tanah di Lereng Merapi menghasilkan kawasan yang tertata baik, sehingga berpeluang membentuk harmoni sosio-spasial dan dapat mensejahterakan masyarakat.

   Untuk mendukung peran *ecotourism* sebagai strategi penghidupan masyarakat, maka berbagai potensi di Lereng Merapi perlu dikonsolidasi dalam bingkai kelembagaan. Hal ini penting, agar pengelolaan, pengaturan, dan koordinasi dapat dilakukan secara optimal, sehingga segenap potensi dapat berdayaguna dan berhasil guna.

2. Pengembangan Kelembagaan

   Kelembagaan merupakan salah satu aspek pokok dalam pengembangan ecotourism. Dalam konteks Lereng Merapi, pengembangan kelembagaan perlu

dilakukan untuk mengelola ecotourism, khususnya mengelola kawasan pariwisata berbasis sumberdaya alam, yang mampu memberi kontribusi pada kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan ecotourism sebagai strategi penghidupan, paling tidak melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yang meliputi warga masyarakat, negara atau pemerintah serta sektor swasta dan dunia usaha. Masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengupayakan keterlibatan masyarakat agar berpartisipasi aktif di dalamnya. Sektor swasta dan dunia usaha berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian, sedangkan institusi negara atau pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif (Sumarto, 2004).

Berdasarkan pandangan tersebut, maka pengembangan kelembagaan masyarakat di Lereng Merapi mutlak diperlukan dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, sekaligus pemangku kepentingan lainnya, yakni pemerintah dan pelaku usaha. Dalam konteks ini maka relevan, ketika pengembangan kelembagaan difokuskan pada: **Pertama**, pengembangan kelembagaan oleh masyarakat di lingkungan warga masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses yang dijalankan, termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil (Sutaryono, 2008); **Kedua**, pengembangan kelembagaan oleh pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa harapan baru bagi pemerintah desa dan masyarakatnya, karena berdasarkan undang-undang ini desa dipandang sebagai sebuah entitas, yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-asetnya sebagai sumber penghidupan. Agar desa mampu memainkan peran dalam mempercepat kesejahteraan dan kemandirian, maka pembentukan dan atau pengembangan kelembagaan BUMDes mutlak diperlukan.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal

   Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada pada kawasan pengembangan *ecotourism* lereng Merapi perlu dilakukan secara bersama-sama, baik oleh warga masyarakat, kelembagaan masyarakat maupun oleh BUMDes dan Pemerintah Desa. Dalam hal ini sumberdaya yang ada dibedakan menjadi sumberdaya alam, ekonomi, sosial dan budaya. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ini digunakan sebagai alternatif strategi pengentasan kemiskinan *(poverty alleviation)* sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan wilayah.

IV. KESIMPULAN

1. Konsolidasi tanah pada kawasan bencana memiliki tiga agenda sekaligus, yakni: (a) penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah; (b) pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; serta (c) peningkatan penghidupan masyarakat secara partisipatif.
2. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan ecotourism di kawasan rawan bencana Merapi adalah: (a) optimalisasi hasil konsolidasi; (b) pengembangan kelembagaan masyarakat dan BUMDes; serta (c) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Aristiono Nugroho dan Sutaryono (2015). *Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah.* Yogyakarta: STPN Press

Direktorat Konsolidasi Tanah (2017). *Konsolidasi Tanah Sebagai Instrumen Untuk Mendukung Tata Ruang Berkelanjutan.* Materi Diskusi Bulanan PPPM-STPN, 4 Agustus 2017.

Sitorus, Oloan (2014). *KONSOLIDASI TANAH DI KAWASAN RAWAN BENCANA III MERAPI: (Mengintroduksi implementasi yang berbasis ekoturisme Di Kecamatan Cangkringan - Sleman).* Makalah pada Diskusi Bulanan dan Sosialisasi Konsolidasi Tanah di Merapi, PPPM-STPN, 4 Maret 2014.

Sitorus, Oloan. (2015). *Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional,* Yogyakarta: STPN Press.

Sumarto, H. (2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sutaryono (2008). *Pemberdayaan Setengah Hati*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama

Identifikasi Bentuk/Morfologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagai Fungsi Ekologis Penyerap Air Hujan di Kelurahan Kalirungkut, Surabaya

Tisa Angelia

Program Studi Manajemen Pembangunan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya
Email: tisaangelia78@gmail.com;

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pembangunan yang semakin pesat, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan sehingga menimbulkan banjir/genangan air di Kelurahan Kalirungkut. Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari infrastruktur hijau berupa jaringan interkoneksi dengan fungsi melestarikan nilai dan ekosistem serta memberi manfaat bagi manusia. Integrasi RTH tersebut dengan drainase kota berupa penyimpanan dan peresapan air. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi bentuk/morfologi RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan di Kelurahan Kalirungkut, dengan melihat tolak ukur penelitian yang ada, menarik kesimpulan analisa dan menjadikannya pedoman dalam pengembangan RTH sebagai fungsi ekologis tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa deskriptif komparatif. Pemilihan analisa deskriptif - komparatif dilakukan untuk menjabarkan hasil perbandingan kondisi eksisting RTH dengan standarisasi dalam penyediaan dan pengembangan RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan berdasarkan aspek-aspek penelitian yang ada.

Adapun hasil penelitian adalah identifikasi bentuk/morfologi RTH yang berpotensi dikembangkan sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan di beberapa kawasan Kelurahan Kalirungkut yaitu berupa pengendali air permukaan seperti taman hujan, parit dan sumur resapan, ketersediaan taman dan lapangan olahraga; ragam jenis vegetasi dengan morfologi penyerap air permukaan serta material pendukung RTH berupa kerikil dan grass block; memperhatikan standarisasi penyediaan RTH penyerap air permukaan; dan kemampuan penyerapan dari tutupan lahan yang ada. Pengembangan bentuk/morfologi RTH penyerap air hujan di Kelurahan Kalirungkut berdasarkan karakteristiknya dapat membantu mengurangi terjadinya banjir/genangan air perkotaan.

Kata Kunci : *Bentuk/Morfologi RTH, Ruang terbuka hijau, RTH penyerap air hujan*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan kota yang semakin pesat menyebabkan perubahan guna lahan dan meningkatnya aliran permukaan langsung dan menurunnya kuantitas air yang meresap ke dalam tanah dalam ruang terbuka hijau (RTH), sehingga terjadi banjir atau genangan air yang tertahan dipermukaan tanah (Kodoatie, 2013). Keberadaan RTH sebagai bidang yang mampu meresapkan air kedalam lapisan pembawa air di bawah tanah sangat diperlukan didalam suatu sistem drainase (Pamekas, 2013). Sistem drainase yang didukung oleh keberadaan RTH adalah sistem drainase berwawasan lingkungan.

Perubahan ketersediaan RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan dalam mendukung berkembangnya kawasan Rungkut sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, mengakibatkan RTH berkurang dan semakin tidak memadai

dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari banjir/genangan air, hal ini dapat dilihat dari terjadinya banjir/genangan air di wilayah Kecamatan Rungkut khususnya Kelurahan Kalirungkut. Keberadaan RTH di Kelurahan Kalirungkut perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penyerapan air yang ada, dimana kondisi RTH baik sebagai penyimpanan maupun peresapan air banyak yang tidak terawat dengan baik, bahkan tidak tersedia sesuai standarisasi yang ada di wilayah ini.

Perkembangan Kota Surabaya khususnya Wilayah Surabaya Timur semakin maju pesat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir ini. Banyak perubahan yang bisa dilihat dari perkembangan pembangunan. Salah satu perubahan yang ada bisa dilihat dari sebelum tahun 2010 sepanjang Jalan MERR IIC didominasi lahan pertanian dan permukiman penduduk, sedangkan saat ini Jumlah permukiman dan bangunan untuk usaha atau perdagangan dan jasa semakin banyak (Purwadio dkk, 2014). Perubahan ketersediaan RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air dalam mendukung berkembangnya kawasan Rungkut sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, mengakibatkan RTH masih belum memadai dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari banjir/genangan air, hal ini dapat dilihat dari terjadinya banjir/genangan air di wilayah Kecamatan Rungkut. Keberadaan banjir/genangan air selain dari faktor curah hujan di waktu musim hujan, juga karena kawasan Rungkut merupakan kawasan hilir tepat mengalirnya 4 sungai besar antara lain Sungai Wonokromo, Wonorejo, Kebon Agung, serta kali Perbatasan dan kawasan rawan air pasang terkait wilayah yang termasuk kawasan Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) (Vidianti, 2011).

Kelurahan kalirungkut yang merupakan bagian dari Kecamatan Rungkut, memiliki beberapa area genangan air. Dinas Binamarga dan Pematusan Kota Surabaya (2015) menjelaskan bahwa antara tahun 2011 sampai 2013 terdapat penambahan titik-titik genangan air, dari hanya 8 area titik genangan air menjadi 10 area genangan air di Kecamatan Rungkut. Penambahan titik genangan air tersebut juga berkaitan dengan luasan, lama dan tinggi genangan yang masih sedikit mengalami penurunan, bahkan tidak terjadi perubahan pada beberapa titik genangan air yang ada di Kecamatan rungkut sampai dengan tahun 2015. Titik genangan air tersebut berada disekitar luasan 0,15 ha sampai 72 ha, lama genangan air 40 menit sampai 90 menit, dan tinggi genangan air dari 4 cm sampai 30 cm. Dua area genangan air dengan bobot nilai tertinggi yang didapatkan dari penelitian overlay di Kecamatan Rungkut, menerangkan bahwa Perumahan Rungkut Harapan dan Perumahan Tulus Harapan di Kelurahan Kalirungkut berpotensi untuk dikembangkan RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan. Pengembangan RTH berkaitan dengan fungsinya sebagai penyerap air hujan diharapkan nantinya dapat menjadi alternatif mengurangi adanya genangan air di kawasan Kelurahan Kalirungkut dan Kecamatan Rungkut pada umumnya.

II. METODE

A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini terbagi dua, yaitu dengan teknik survey data primer dan survey data sekunder. Metode pengumpulan survey data primer dilakukan dengan observasi (pengamatan langsung) di lapangan. Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur yang sistematik, dimana dalam hal ini peneliti telah mengetahui aspek-aspek apa saja yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini dipersiapkan pedoman pengamatan secara detail dan menyediakan tabel cek list yang bisa digunakan sebagai pedoman pengamatan (Supriharjo, 2013:III-3).

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mencari studi literatur dan telaah dokumen. Studi literatur terkait berupa studi terdahulu mengenai bentuk-

bentuk pengendali air hujan, jenis vegetasi RTH dan perkerasan yang mudah menyerap air, penyediaan dan pengembangan RTH penyerap air hujan. Teori-teori tersebut didapat antara lain dari buku dan penelitian-penelitian sebelumnya. Telaah Dokumen atau survey Instansi, adalah mengumpulkan dan mempelajari data-data dari instansi pemerintahan yang terkait, seperti Bappeko, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan,Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

B. Metode Analisa

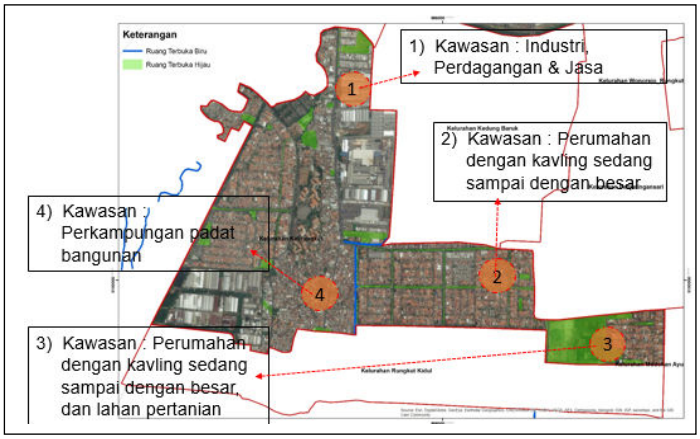
Metode analisis yang digunakan adalah kajian komparatif. Metode yang digunakan dalam kajian komparatif tersebut adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah serangkaian kajian yang tidak dinyatakan dalam angka-angka dan rumus melainkan dengan gambar, kata-kata dan kalimat menurut data pengambilan kesimpulan (Sugiyono, 2006). Teknik analisa deskriptif merupakan teknik untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat melalui kegiatan menyimpulkan data. Sedangkan teknik komparatif dalam penelitian ini yaitu membandingkan kondisi eksisting wilayah studi dengan standarisasi berdasarkan kebijakan pemerintah, sehingga dapat muncul suatu kondisi ideal secara aplikatif sebagai contohnya, dan dapat ditarik suatu generalisasi.

Teknik analisa ini menganalisa data berdasarkan aspek-aspek penelitian yang didapatkan dari kajian teori. Sedangkan, kondisi eksisting area penelitian didapatkan dari data primer berupa observasi dan data sekunder. Selain itu juga didapatkan data atau informasi dari responden pihak *expert* (ahli) yang mengerti tentang peraturan maupun seluk beluk tentang bentuk/morfologi RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Karakteristik Bentuk/Morfologi RTH Penyerap Air Hujan

Aspek-aspek internal penelitian didapatkan dari kajian terhadap teori-teori yang bersumber dari pakar-pakar yang ahli dibidangnya. Analisa deskriptif komparatif dilakukan dengan membandingkan standarisasi dan kebijakan yang mendukung penerapan aspek-aspek tersebut di Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut sebagai wilayah penelitian dengan kondisi eksisting wilayah studi yang didapat dari observasi. Analisa deskriptif komparatif akan dijelaskan pada masing-masing aspek penelitian yang ada berdasarkan beberapa kawasan yang ada di Kelurahan Kalirungkut.



Gambar 1. Pembagian wilayah studi di Kelurahan Kalirungkut berdasarkan kawasan

1. Aspek Peresapan dan Penyimpan Air Permukaan

Kondisi peresapan dan penyimpan air di Kelurahan Kalirungkut belum memadai sebagai RTH yang difungsikan sebagai penyerapan maupun penyimpan air hujan. Keberadaan bentuk-bentuk peresapan ataupun penyimpan air seperti kolam konservasi, *River side polder* seperti yang disebutkan dalam Kementerian PU Cipta Karya (2012) dan RDTR UP. Rungkut, belum tersedia karena keterbatasan lahan. Penyediaan sumur resapan yang pada umumnya adalah kelanjutan dari keberadaan penampung air hujan, belum tersedia dan perlu mempertimbangkan kondisi muka air tanah sebagai area yang memiliki muka air tanah 0-1,5m, serta lokasi tempat bangunan air tersebut akan dibangun. Biopori yang sudah diterapkan di beberapa perumahan, kurang berfungsi dan bermanfaat.

Kondisi padat bangunan untuk penyediaan bentuk pengendali air seperti penampung air dapat digunakan dibawah bangunan, baik secara mandiri maupun komunal. Penyediaan bangunan pengendali air tersebut membutuhkan kesadaran dari warga masyarakat baik di perkampungan padat bangunan dan perumahan. Sedangkan kerjasama yang baik dari pihak pengembang perumahan, pengusaha perdagangan dan jasa juga dibutuhkan dalam penyediaan bangunan pengendali air. Penggunaan parit resapan dan taman hujan (*bioretention*) berdasarkan teori Halief, Kartini dkk (2011), sebagai kolam konservasi kecil lebih sesuai untuk wilayah ini karena kondisi muka air tanah dan area yang sempit untuk penyediaan ruang terbuka. Sedangkan penggunaan biopori dianggap kurang sesuai karena kemampuan penyerapan yang masih kurang maksimal di beberapa perumahan.

Hasil analisa pada aspek pengendali air permukaan adalah wilayah Kelurahan Kalirungkut membutuhkan bangunan pengendali banjir yang sesuai dengan kondisi geomorfologis, masyarakat setempat dan kerjasama pengusaha perdagangan dan jasa, industri serta pengembang perumahan. Ketersediaan dari pengusaha dan pengembang perumahan dalam penyediaan bangunan pengendali air hujan berupa bozem mini yang membutuhkan lahan luas di area publik maupun privat. Dibutuhkan kesadaran masyarakat perkampungan padat bangunan maupun perumahan serta pemilik RTH privat lainnya dalam penyediaan sumur resapan dengan penampung air hujan, parit resapan dan taman hujan (*bioretention*) sebagai Ruang Terbuka Hijau penyerap air hujan.

2. Aspek Jenis RTH Binaan dan RTH Lindung

Kondisi RTH binaan dan RTH lindung yang dimiliki wilayah Kelurahan Kalirungkut masih belum dapat memenuhi ketentuan untuk menjadi RTH fungsi ekologis yang baik, seperti yang disebutkan dalam RDTR UP. Rungkut yaitu Kawasan Hijau Pertamanan Kota, 90% harus dihijaukan dan 10% untuk kelengkapan taman (jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang lainnya), Lahan Parkir menjadi bagian dari 40% dari luas lahan yang harus disediakan dalam RTH rekreasi, Pengembang Kawasan Perumahan diwajibkan megalokasikan lahannya untuk pengembangan makam sebesar 2% dan menyediakan jalur hijau yang sesuai dengan ketentuan tapak dari kepala daerah setempat, dan Melindungi kawasan sepanjang RTH fungsi tertentu seperti sepanjang SUTET, sempadan sungai dengan membangun jalur hijau dan taman pasif.

Kondisi RTH binaan berupa taman aktif belum memadai, taman aktif dan jalur hijau yang ada hanya 10.165 m² dari luas Kelurahan Kalirungkut 147,33 ha, selain itu wilayah ini tidak memiliki hutan kota, hanya terdapat lahan pertanian yang kecil luasannya. Keberadaan taman aktif maupun lapangan olahraga baik publik ataupun privat masih sedikit ketersediaannya, selain itu juga wilayah ini tidak memiliki hutan kota karena keterbatasan lahan. Keberadaan makam sebagai RTH binaan tidak seluruhnya disediakan oleh pengembang perumahan, begitu juga RTH sempadan

sungai kondisinya tidak terawat bahkan dapat dikatakan rusak. Keberadaan lahan parkir telah sesuai dengan ketentuan setiap bangunan, namun bahan penutup lahan parkir perlu dipertimbangkan untuk berfungsi sebagai ruang terbuka penyerap air hujan yang baik.

Hasil analisa pada aspek jenis RTH binaan dan lindung adalah RTH lindung diwilayah ini tidak dapat dikembangkan kecuali ada penyediaan dari pihak pengembang perumahan, pengusaha perdagangan dan jasa seperti perhotelan dan pendidikan ataupun warga masyarakat dengan pemerintah setempat. RTH binaan seperti taman dan lapangan olahraga dapat lebih mudah dikembangkan dengan adanya partisipasi warga masyarakat baik di perkampungan padat bangunan maupun perumahan dalam penyediaannya, serta kesadaran dari pihak swasta seperti pengembang perumahan dan pengusaha perdagangan dan jasa yang ada.

3. Aspek Ragam Jenis Vegetasi dan Material Pendukung RTH

Kesesuaian vegetasi tanaman pangan dengan jenis tanah yang ada di Kecamatan Rungkut berdasarkan teori dari Mulyanto (2013) yang terdiri dari tanaman padi (*Oryza sativa L.*), Jagung (*Zea mays L.*), dan Ketela Pohon (*Manihot utilissima*) sesuai dengan kondisi tanah alluvial di Kecamatan Rungkut, namun tidak dapat dikembangkan karena membutuhkan lahan yang luas yang sulit didapatkan di Kecamatan Rungkut. Kondisi tanah alluvial juga menjadikan lahan di wilayah ini tidak dapat dengan mudah ditanami oleh vegetasi berkayu besar.

Tabel 3.1 Kesesuaian Vegetasi Berkayu Besar dengan jenis tanah

Jenis Vegetasi	Karakteristik	Kesesuaian
Pinus (*Pinus merkusii)*	Pohon besar, batang lurus, silindris. Di tanah berpasir penyebaran akar mencapai 7 kali rata-rata tinggi. Di tanah lempungan (tekstur halus) akar pohon hanya menyebar satu setengah kali rata-rata pohon.	Tidak sesuai dengan kondisi tanah alluvial yang teksturnya halus atau tanah liat
Jati (*Tectonia grandis)*	Batang berbentuk bulat dan lurus. Jati akan tumbuh lebih baik di lahan dengan kondisi fraksi lempung, lempung berpasir atau liat berpasir.	Kurang sesuai dengan kondisi tanah alluvial yang berupa tanah liat
Mahoni (*Swietenia macrophylla)*	Batang bulat, percabangan banyak. Mahoni tidak memiliki persyaratan tipe tanah yang spesifik, dan tumbuh secara alami pada tipe tanah alluvial, vulkanik, laterik, dan tanah dengan kandungan liat yang tinggi. Mahoni juga tumbuh subur di pasir payau dekat dengan pantai.	Sesuai dengan kondisi tanah alluvial maupun pasir payau dekat pantai.

Sumber : Budianto dkk, 2010

Selain itu terdapat teori dan standarisasi tentang ragam jenis vegetasi yang dapat menyimpan air dalam jumlah besar, vegetasi tahan genangan lebih dari 40 hari (kandungan air tinggi) atau vegetasi sumber air baku (sekitar pantai), dan kegunaan dari vegetasi rumput dan bambu.

Tabel 3.2 Vegetasi Penyimpan Air dalam Jumlah Besar

Jenis Vegetasi	Karakteristik
Cangkring (*Erythrina fusca Lour*)	Ukuran pohon sedang, batang pendek, berduri, kadang berbanir hingga 2m, dapat tumbuh hingga 20m, tumbuh di habitat yang tergenang air dangkal

Palem (*Metroxylon sagu*)	Akar serabut yang ulet, batang diameter 60 cm, tinggi hingga 25 m, daun menyirip sederhana, tangkai daun sangat kuat, melebar pada pangkal dan berduri tajam, mampu tumbuh pada tanah berpasir atau tanah liat, dapat tumbuh di rawa atau aliran sungai
Pohon Loa (*Ficus racemosa*)	Berdaun hijau tua, halus dan mengkilap, memiliki sistem perakaran yang cocok untuk tumbuh di dataran rendah
Nangka dan Sukun (*Antocarpus elastica*)	Dapat tumbuh sampai 45-65 m, cabang mencapai 30m, diameter pohon sekitar 1,2-2 m, daun tersusun spiral dan berbentuk oval, permukaan daun berambut berwarna kuning hingga kecoklatan

Sumber : Ulfa dkk, 2015

Tabel 3.3 Vegetasi Sumber Air Baku

Nama Vegetasi	Nama Latin
Cemara Laut	*Casuarina equisetifolia*
Karet Munding	*Ficus elastica*
Manggis	*Garcinia mangostana*
Bungur	*Lagerstroemia speciosa*
Kelapa	*Cocos nucifera*
Damar	*Agathis loranthfolia*
Kiara Payung	*Filicium decipiens*

Sumber : Juknis NSPK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim, 2015

Tabel 3.4 Karakteristik Vegetasi Rumput dan Bambu

Rumput	Bambu
Vegetasi jenis ini baik untuk mengurangi erosi dengan akar tanaman yang berbentuk serabut yang merupakan anyaman atau jaring-jaring alami. Akar merupakan bagian terpenting karena mampu mengikat tanah dan menyerap air dari dalam tanah dan dilepas ke atmosfir melalui proses transpirasi yang dapat menurunkan tegangan air pori.	
Rumput yang berfungsi penguat pada saluran air atau saluran pembuangan air adalah : 1) Rumput palisade (*Brachiaria brizantha*), Rumput sinyal (*Brachiaria decumbens*), Rumput bahia (*Pasalumnotatum*).	
	Ciri lain dari Bambu pada umumnya adalah daun pipih/runcing, batang berongga, akar serabut. Jenis bambu di pulau Jawa antara lain : 1) Bambu Betung (*Dendrocalamus Asper*), Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*), Bambu Hitam (*Gigantochloa Atroviolacea*), Bambu Ater (*Gigantochloa Atter*), Bambu Gombong (*Gigantochloa Pseudoarundinacea*)

Sumber : Hartanto, 2007

Ragam jenis material pendukung RTH berupa perkerasan penutup lahan adalah bagian elemen pembentuk Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yaitu elemen keras dari Ruang Terbuka Hijau Binaan. Material pendukung tersebut memiliki kemampuan sebagai fungsinya menyerap air permukaan, dan tergantung pada jenis bahan masing-masing tutupan lahan tersebut.

Tabel 3.5 Kriteria Penyerapan Air Hujan beberapa Tutupan Lahan

Jenis Tutupan Lahan	Kemampuan Menghindari Rembesan Air Hujan
Jalan aspal, beton, dsb	70% - 95%
Jalan berbatu-batu (*paving block*)	50% - 70 %
Jalan berbatu dengan 50% rumput diantaranya (*grass block*)	60%

Jalan berkerikil	50%
Tanaman berguna, tanaman kota	5% - 15%

Sumber : Juknis Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan, Kementerian PU Cipta Karya, 2012

Vegetasi jenis pohon, perdu, semak dan rumput dapat ditemui di Kelurahan Kalirungkut, sebagai lahan yang telah diolah. Kondisi tanah sudah mengalami pengolahan dari kondisi tanah alluvial yang permeabilitas rendah menjadi tanah yang mendukung pertumbuhan beragam vegetasi. Namun luasan penutup lahan berupa vegetasi tersebut masih jauh dari cukup. Vegetasi yang sesuai dengan kondisi tanah alluvial, seperti pohon mahoni, palem, nangka. Vegetasi tahan genangan seperti pohon jati sampai pohon mahoni ditemui di wilayah ini. Begitu juga dengan vegetasi air baku, vegetasi jalur hijau jalan baik pohon, perdu, semak. Keberadaan jalur hijau jalan dengan ragam nya sebagian besar kurang terawat dengan baik terutama untuk vegetasi semak dan rumput. Vegetasi rumput tidak diperhatikan oleh pemilik bangunan terutama pada bangunan industri/pabrik, perdagangan dan jasa, dan permukiman. Penggunaan perkerasan mendominasi sebagai penutup lahan karena tuntutan akan ruang pada bangunan tersebut. Pada dasarnya kondisi tanah wilayah studi cocok untuk vegetasi pertanian dan palawija.

Hasil analisa pada aspek jenis vegetasi dan material pendukung RTH adalah menentukan jenis vegetasi yang berpotensi dikembangkan berkaitan dengan penyerapan air hujan yaitu vegetasi yang memiliki kemampuan tahan terhadap genangan serta memiliki sistem perakaran yang dalam baik di area privat (pekarangan) maupun publik, seperti : Jenis pohon besar dengan perakaran masuk kedalam tanah yaitu mahoni, cangkring, palem, pohon loa, nangka dam sukun. Untuk area mendekati pantai adalah vegetasi tahan genangan seperti cemara laut, karet munding, manggis, bungur, kelapa, damar dan kiara payung. dan juga vegetasi penutup lahan jenis bambu dan rumput. Untuk vegetasi perdu dan semak, dengan pengelolaan tanah dan penggunaan air dalam perawatan yang baik seperti canna, soka jepang, puring, pedang-pedangan, lili pita dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk vegetasi dilahan pertanian dan palawija kurang sesuai karena membutuhkan lahan yang luas. Material pendukung RTH yang berpotensi dikembangkan di wilayah studi adalah perkerasan lulus air yang dapat dengan mudah merembeskan air ketanah dengan cepat, seperti penggunaan kerikil dan *grass block.*

4. Aspek Penyediaan RTH

Berdasarkan kondisi eksisting penyediaan RTH berupa sub-reservoir (Pamekas, 2013), dimana Sub-Resevoir tersebut dapat disediakan dibawah atau diatas permukaan tanah dengan luas yang telah ditentukan, belum ditemui di wilayah studi. Untuk lahan yang sempit penyediaan sub-reservoir tersebut dapat diletakkan dibawah bangunan secara mandiri atau dibuat secara komunal, dengan kesepakatan warga masyarakat setempat. Penyediaan RTH secara keseluruhan sebagai fungsi penyerap air hujan yang berupa taman dan lapangan olahraga, seperti yang disebutkan dalam RDTR UP. Rungkut tentang penyediaan dan keharusan dalam mempertahankan keberadaan RTH privat maupun publik, belum dilakukan dengan baik. Kondisi RTH masih banyak yang tidak terawat dengan baik. Bahan perkerasan sebagai penutup tanah banyak yang menggunakan *paving blok* dan banyak mengurangi keberadaan rumput.

Secara keseluruhan kondisi eksisting penyediaan RTH sebagai fungsi ekologis yang terintegrasi dengan sistem drainase (drainase berwawasan lingkungan) belum ditemui di wilayah studi. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi warga masyarakat dan kemampuan finansial dalam menerapkan sistem drainase tersebut. Penyediaan RTH dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 25.347 jiwa dibutuhkan sekitar

100 unit taman berkualitas baik, sedangkan jumlah taman yang ada di wilayah studi masih 1 unit taman di Rungkut Asri Timur. Luasan taman dan jalur hijau untuk wilayah studi dengan jumlah penduduk yang ada seharusnya 12.750 m², namun masih tersedia sekitar 7.025 m².

Hasil analisa pada aspek penyediaan RTH adalah penyediaan RTH belum memadai sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan di wilayah studi, baik dari segi luasan, jumlah maupun kualitasnya. Sehingga karakteristik penyediaan RTH berupa penampung air hujan (PAH) dengan vegetasi pendukungnya sebagai penyerap air hujan berpotensi dikembangkan dalam mengurangi degradasi lingkungan tersebut.

5. Aspek Pengembangan RTH

Pengembangan RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan berdasarkan Permen PU No.12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, Perda No.12 Tahun 2014 Kota Surabaya, dan Juknis Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan, Kementerian PU Cipta Karya 2014, tidak terlepas dengan jenis penutup lahan dan kemampuan menyerap air dari jenis penutup lahan tersebut. Selain itu jenis tanah juga memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan menyerap air dari suatu ruang terbuka hijau yang ada di suatu wilayah. Setiap jenis tanah memiliki permeabilitas yang berbeda-beda. Jenis tanah di wilayah ini adalah alluvial dengan jenis batuan lempung pasiran, lanau dan lempung lanauan. Jenis tanah tersebut sangat sesuai untuk jenis tanaman pertanian dan palawija.

Tabel 3.6 Kriteria Nilai Koefisien Permeabilitas Tanah Beberapa Tutupan Lahan

Jenis Tutupan Lahan	Kemampuan Menghindari Rembesan Air Hujan
Kerikil	>10 cm/det
Pasir	10 - 0,01 cm/det
Lanau	0,01 – 0,00001 cm/det
Lempung	< 0,00001 cm/det

Sumber : Juknis Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan, Kementerian PU Cipta Karya, 2012

Secara keseluruhan kondisi eksisting wilayah studi memiliki banyak ragam jenis vegetasi, dari jenis pohon, perdu, semak dan rumput. Terdapat pula tanaman padi dan jagung. Namun, untuk bangunan perdagangan dan jasa sebagian besar tidak menyediakan vegetasi pohon atau penutup tanah/rumput, melainkan menutup lahan ruang terbuka hijau dengan perkerasan atau material pendukung RTH dari bahan batu-batuan. Kondisi tanah sudah banyak mengalami pengolahan dari tanah alluvial yang permeabilitas rendah menjadi tanah yang dapat mendukung pertumbuhan beragam vegetasi. Namun luasan penutup lahan berupa vegetasi tersebut masih jauh dari cukup. Vegetasi yang sesuai dengan kondisi tanah alluvial dan tahan genangan seperti jenis pohon mahoni, palem, nangka; jenis penutup lahan berupa vegetasi bambu dan rumput dapat ditemui di wilayah studi. Keberadan vegetasi rumput baik di area publik maupun privat tidak diperhatikan oleh pemilik bangunan terutama pada jenis bangunan industri/pabrik, perdagangan dan jasa, dan perumahan. Penggunaan perkerasan masih mendominasi karena tuntutan akan ruang pada bangunan tersebut. Pada dasarnya kondisi tanah untuk wilayah studi adalah jenis tanah subur yang cocok untuk vegetasi pertanian dan palawija.

Hasil analisa pada aspek pengembangan RTH adalah pengembangan RTH yang ada harus memperhatikan kemampuan serap air atau tingkat permeabilitas tanah dan koefisien *run-off* dari masing-masing penutup lahan. Vegetasi dengan nilai koefisien *run-off* yang paling rendah sangat berpotensi untuk dikembangkan di wilayah studi dalam mengurangi terjadinya genangan air disaat hujan deras, dan material pendukung RTH yang lulus air seperti grass block sangat sesuai untuk dikembangkan. Jenis tanah alluvial di wilayah studi dengan kandungan lempung

pasir dan liat, serta geologi lanau dan beberapa wilayah adalah lempung pasir, perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis vegetasi dan jenis peresapan air yang akan dikembangkan. Pengembangan vegetasi jenis pohon yang memiliki perakaran masuk jauh ke dalam tanah akan sangat baik untuk memberikan rongga bagi tanah sehingga memperbanyak merembeskan air ke dalam tanah, seperti pohon mahoni yang dapat hidup di tanah liat atau tanah liat berpasir. Berdasarkan jenis tanah, maka pengembangan RTH yang difungsikan sebagai badan air berupa bozem, kolam retensi atau taman hujan, parit resapan, sangat baik dikembangkan di wilayah Kelurahan Kalirungkut, baik secara komunal ataupun dari swadaya masyarakat dan pengusaha/pengembang dari perdagangan dan jasa dan perumahan yang ada.

B. Bentuk/Morfologi RTH Penyerap Air Hujan

Kondisi RTH penyerap air hujan di wilayah Kelurahan Kalirungkut belum memenuhi ketentuan sebagai penyerapan yang baik. Pesatnya perkembangan pembangunan menyebabkan lahan terbangun semakin bertambah dan berakibat ruang terbuka hijau berubah fungsi menjadi lahan terbangun ataupun ruang terbuka dengan perkerasan kedap air. Berdasarkan kebijakan pemerintah dan hasil pengamatan di wilayah studi, karakteristik aspek-aspek yang ada dibutuhkan untuk menentukan bentuk/morfologi RTH sebagai penyerap air hujan yang berpotensi dikembangkan di wilayah studi dalam menanggulangi masih adanya banjir/genangan air.

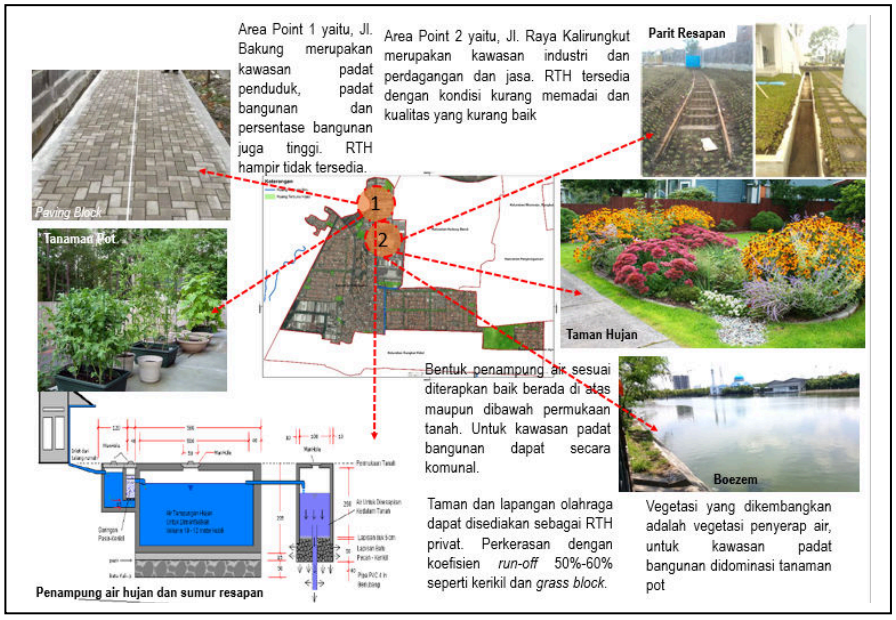
Analisa aspek-aspek karakteristik bentuk/morfologi RTH yang berpotensi dikembangkan menunjukkan keberadaan RTH yang difungsikan sebagai penyerap dan penyimpan air yang kurang memadai bahkan belum tersedia. Ragam jenis vegetasi penutup lahan belum memadai dalam memenuhi fungsinya sebagai fungsi ekologis dan fungsi lainnya dari RTH tersebut, begitu juga pemilihan jenis material pendukung RTH berupa perkerasan yang sebagian besar masih menggunakan penutup lahan kedap air. Selain itu, aspek jenis RTH alami seperti kawasan lindung/taman-taman nasional/hutan kota juga memiliki keterbatasan lahan dalam penyediaan maupun pengembangannya.

Sehingga berdasarkan hasil analisa didapatkan bentuk/morfologi RTH yang berpotensi dikembangkan di Kelurahan Kalirungkut secara umum adalah sebagai berikut :

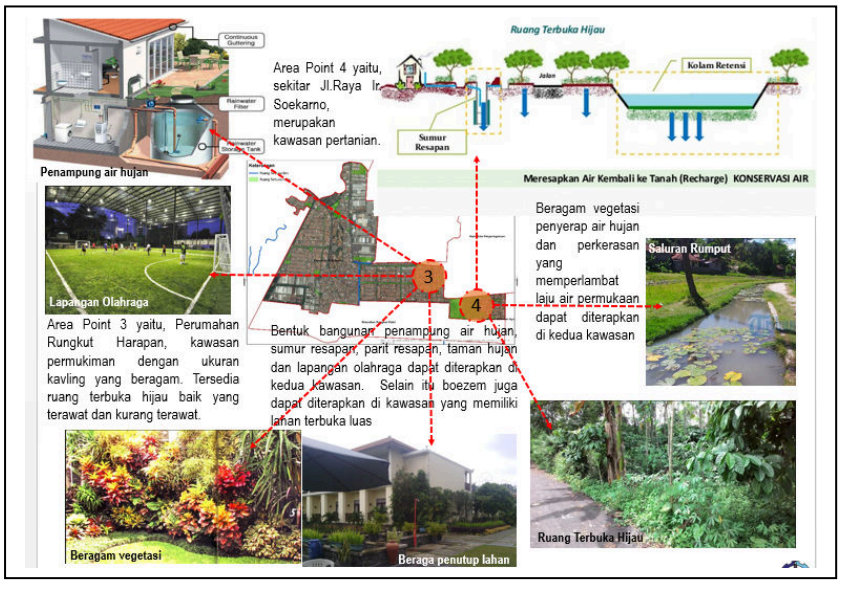
- RTH yang difungsikan sebagai badan air dengan bentuk berupa peresap air permukaan seperti kolam resapan/kolam konservasi/taman hujan (*bioretention*), penampung air hujan dengan sumur resapan dan saluran limpasan, parit resapan, dan bozem mini
- RTH binaan berupa taman dan lapangan olahraga
- Ragam jenis vegetasi dengan morfologi peresap air hujan yang paling utama adalah memperluas area tangkapan air hujan dengan penggunaan penutup tanah berupa rumput dan bambu yang memiliki akar serabut sebagai penahan tanah dari erosi, selain itu juga memperbanyak ragam vegetasi dalam suatu lahan dari pohon, perdu, semak dan rumput sebagai penghambat laju air permukaan. Jenis pohon besar dengan perakaran masuk kedalam tanah dan tahan genangan 40 hari lebih seperti mahoni, cangkring, palem, pohon loa, nangka dam sukun, serta cemara laut, karet munding, manggis, bungur, kelapa, damar dan kiara payung pada area sekitar pantai.
- Luasan RTH pekarangan baik untuk perumahan dan perdagangan dan jasa, peletakan sub-reservoir atau bangunan penahan air hujan dan luasan RTH pada sempadan sungai, air baku perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang ada
- Ragam jenis penutup lahan yang memiliki kemampuan penyerapan terhadap air hujan yang baik. Kemampuan penyerapan terhadap air adalah yang memiliki nilai

koefisien *run-off* 0.05 - 0.15 untuk tutupan berupa vegetasi dan 0.50 – 0.60 untuk material pendukung RTH, seperti penggunaan *grass block*, kerikil dan yang paling utama adalah keberadaan vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap air, dengan memperhatikan pengembangam kawasan sebagai kawasan permukiman, industri dan perdagangan dan jasa yang seimbang dengan keberadaan ruang terbuka hijau.

Bentuk/morfologi RTH sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan di wilayah Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut berdasarkan karakteristik aspek-aspek penelitian tersebut, selanjutnya dapat dilihat lebih detail pada gambar berikut :



Gambar 2. Bentuk/Morfologi RTH Penyerap Air Hujan Kawasan Padat Bangunan dan Perdagangan dan Jasa



Gambar 3. Bentuk/Morfologi RTH Penyerap Air Hujan Kawasan Permukiman dan Area Konservasi

IV. KESIMPULAN

Kelurahan Kalirungkut merupakan kelurahan dengan Ruang terbuka hijau yang fungsinya belum memadai sebagai penyerap air hujan. Hal ini dikarenakan kondisi lahan terbangun yang semakin luas sehingga menyebabkan ketersediaan RTH semakin berkurang. Banjir/genangan air yang terjadi di Kelurahan Kalirungkut memerlukan adanya pengembangan bentuk/morfologi RTH yang berfungsi sebagai penyerap air hujan.

Bentuk/morfologi RTH yang berpotensi dikembangkan di Kelurahan Kalirungkut sebagai fungsi ekologis penyerap air hujan dengan melihat kondisi ketersediaan lahan di beberapa kawasan yang ada baik sebagai RTH privat maupun RTH publik, adalah:

1. RTH di kawasan padat bangunan yang difungsikan sebagai badan air memiliki bentuk bangunan penahan air, seperti penampung air hujan yang berhubungan dengan sumur resapan dan perlu dipertimbangkan adanya saluran limpasan karena muka air tanah yang dangkal (1-1.5m), baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, secara komunal maupun di masing-masing bangunan. Selain itu juga dapat dikembangkan parit resapan di sepanjang jalan lingkungan. Morfologi RTH dengan kondisi area yang sempit, yaitu penggunaan perkerasan jalan berupa *grass block* yang memiliki koefisien *run-off* 50%-60%. Vegetasi dengan media pot, seperti tanaman berbuah dan berbunga. Penyediaan RTH taman dan lapangan olahraga dikawasan ini membutuhkan kesadaran warga masyarakat setempat, pihak pengembang properti dan perdagangan dan jasa.
2. RTH di kawasan Industri, Perdagangan & Jasa, dan Pendidikan yang difungsikan sebagai badan air memiliki bentuk bangunan penahan air dengan keberadaan lahan yang memadai pada sebagian RTH privat adalah penggunaan bangunan penampung air hujan dengan sumur resapan di pekarangan bangunan, baik di permukaan ataupun di bawah permukaan tanah. Sumur resapan tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi muka air tanah yang dangkal. Penerapan parit resapan, taman hujan, dan penyediaan bozem mini dikembangkan dengan kesadaran pihak pengusaha, dalam hal ini adalah pengusaha perhotelan/apartemen, pertokoan, pabrik, sekolah/perguruan tinggi.
   Morfologi RTH dengan kondisi area sebagai kawasan industri dengan banyak perkerasan, adalah dengan menggunakan kerikil ataupun *grass block* yang memiliki koefisien *run-off* 50%-60%. Penanaman jenis pohon dengan perakaran yang dalam, tahan genangan dan mampu meresapkan atau menyimpan air, dan dapat hidup di tanah dengan permeabilitas rendah, seperti mahoni, cangkring, palem, loa, nangka dan sukun. Vegetasi perdu dan semak, dan beragam rumput dan bambu.
3. RTH di kawasan Permukiman yang difungsikan sebagai badan air memiliki bentuk bangunan penahan air, yaitu penampung air hujan beserta sumur resapan di pekarangan rumah, saluran limpasan air dari sumur resapan, parit resapan baik di dalam pekarangan maupun di luar pekarangan rumah. Taman hujan ataupun bozem mini pada fasilitas umum yang bergantung pada kesadaran masyarakat perumahan tersebut dan juga pihak pengembang perumahan. Morfologi RTH dengan penggunaan perkerasan jalan berupa *grass block,* kerikil atau batu-batuan, dan rumput dengan koefisien rendah 5%-15%. Penanaman jenis pohon didalam pekarangan sesuai kavling dan di area publik dengan karakteristik memiliki perakaran yang dalam, tahan genangan dan mampu meresapkan atau menyimpan air,

dan dapat hidup di tanah dengan permeabilitas rendah, seperti mahoni, cangkring, palem, loa, nangka dan sukun. Vegetasi perdu dan semak, serta beragam rumput dan bambu. Penyediaan taman dan lapangan olahraga sangat dibutuhkan dan dapat diterapkan dengan adanya kesadaran dari warga di perumahan ataupun pengembang perumahan tersebut.

4. RTH di kawasan konservasi yang difungsikan sebagai badan air memiliki bentuk bangunan berupa kolam konservasi/taman hujan, bozem dan juga adanya parit resapan sepanjang jalan maupun jalur pedestrian. Morfologi RTH dengan memperbanyak penggunaan vegetasi penutup tanah, seperti rumput. Penanaman jenis pohon dengan perakaran yang dalam, transpirasi rendah, tahan genangan dan mampu meresapkan atau menyimpan air, dan dapat hidup di tanah dengan permeabilitas rendah, seperti mahoni, cangkring, palem, loa, nangka dan sukun. Selain itu juga cemara laut, karet munding, manggis, bungur, damar dan kiara payung. Vegetasi perdu dan semak, dan beragam jenis bambu. Selain itu dengan keberadaan ruang terbuka hijau yang lebih luas dari kawasan lainnya juga dapat dikembangkan taman pariwisata, dan mempertahankan adanya lahan pertanian dan tambak.

DAFTAR PUSTAKA

Budianto, dkk (2010). "Perbedaan Laju Infiltrasi pada Lahan Hutan Tanaman Industri Pinus, Jati dan Mahoni". *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Hal. 15-24.

Dinas Binamarga & Pematusan Kota Suarabaya, 2016, *Data Genangan Kota Surabaya 2010-2015.*

Halief dkk (2011). Pengembangan Teknik Bioretention dalam Mengatasi Limpasan Air Hujan. *Proceeding PESAT (Psikologi,Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil),* Vol.4, hal.51-56.

Hartanto, Daniel (2007). Konstribusi Akar Tanaman Rumput dan Bambu Terhadap Peningkatan Kuat Geser Tanah pada Lerengan. *Jurnal Teknik Sipil,* Vol. III No. 1 Hal. 39-49.

Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya (2012). Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.

Kodoatie, Robert J (2013). *Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota*, Yogyakarta : Andi.

Mulyanto (2013). *Kajian Rekomendasi Pemupukan Berbagai Jenis Tanah pada Tanaman Jagung, Padi dan Ketela Pohon di Kabupaten Wonogiri*. Skripsi Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pamekas, R (2013). *Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Permukiman*, Jakarta : Pustaka Jaya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2015. DRAFT JUKNIS tentang Norma, Standar, dan Kriteria Pemanfaatan Ruang.

Purwadio, Heru. Ariastita, Putu Gede. Sulistyarso, Haryo (2014). "Pemintakatan Kawasan Pengembangan Bangunan Tinggi Di Wilayah Surabaya Timur", *Penataan Ruang,* Vol 9, No 1, hal. 48-57.

Supriharjo, Rimadewi (2013). *Diktat Metodologi Penelitian,* ITS Surabaya.

Ulfa, Maria dkk (2015). Kajian Morfologi Tumbuhan pada Spesies Tanaman Lokal Berpotensi Penyimpan Air : Konservasi Air Karangmanggis, Boja, Kendal, Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Masyarakat Biodiversifikasi Indonesia,* Vol. 1 No. 3 Hal. 418-422.

Analisis Karakteristik Dinamika Tanah Berdasarkan Data *Mikrotremor* di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Uzlifatul Azmiyati*[1], Kirbani Sri Brotopuspito[2] dan Suprapto Dibyosaputro[3]

[1] Dosen Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Nahdlatul Ulama NTB,
Jln. Pendidikan No. 6 Mataram, 83125,
[2]Dosen Jurusan Geofisika FMIPA, Universitas Gadjah Mada,
Sekip Utara Bulaksumur, Yogyakarta 55281
[3] Dosen Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada,
Sekip Utara Bulaksumur, Yogyakarta 55281
**email: u.azmiyati@gmail.com*

ABSTRAK

Gempabumi diketahui sebagai fenomena alam yang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara moral maupun material. Berdasarkan beberapa kasus gempabumi merusak di dunia, diketahui bahwa tingkat kerusakan akibat gempabumi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kekuatan gempabumi dan jarak suatu daerah dari pusat gempabumi tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik dinamika tanah. Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang padat penduduk (6.741 jiwa/km^2) merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang rawan terhadap bencana gempabumi menjadi lokasi penelitian ini.Karakteristik dinamika tanah diperoleh berdasarkan analisis data mikrotremor yang ada di Kota Mataram dengan metode Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) yang menghasilkan nilai frekuensi alami tanah (f_0) dan faktor amplifikasi tanah (A_0). Frekuensi alami dan faktor amplifikasi menjadi input untuk menghitung karakteristik dinamika tanah lainnya yaitu periode dominan (T_g), danindeks kerentaran seismik (K_g).Hasil analisis menunjukkan bahwa pola spektrum mikrotremor Kota Mataram menghasilkan frekuensi alami rendah (0,13–10,96 Hz) dengan faktor amplifikasi tinggi (3,04–6,59), dan nilai periode dominan tinggi (0,02–2,25 detik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki lapisan sedimen yang tebal dan batuan dasar yang dalam. Indeks kerentanan seismik tingggi ditunjukkan di bagian barat Kota Mataram. Jika dilihat dari nilai ground shear strain yang dihasilkan maka Kota Mataram akan berpotensi mengalami getaran dan rekahan jika terjadi gempabumi.Hasil analisis dinamika tanah yang telah dilakukan dapat menjadi langkah dalam mitigasi bencana gempabumi di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

Kata kunci: Gempabumi, HVSR, KarakteristikDinamika Tanah, Mikrotremor, MitigasiBencana

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan daerah yang rawan terhadap bencana gempabumi tektonik. Hal ini disebabkan karena pertemuan antar lempeng tersebut yang membentuk daerah penunjaman atau subduksi (*subduction zone*). Oleh sebab itu kepulauan Indonesia memiliki aktivitas seismik yang tinggi.

Gempabumi telah dikenal sebagai fenomena alam yang menimbulkan efek bencana paling besar baik secara moril maupun materil, karena terjadi secara tiba-tiba dan sampai saat ini belum dapat diprediksi secara akurat kapan dan dimana terjadinya serta berapa kekuatannya. Beberapa bencana lain juga dapat disebabkan oleh gempabumi seperti tsunami, tanah longsor, kebakaran, banjir dan hancur serta robohnya bangunan gedung. Tidak ada langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gempabumi, hanya dampak yang ditimbulkannya yang dapat dikurangi. Pengetahuan mengenai gempabumi menjadi sangat penting karena berhubungan erat

dengan kehidupan manusia, khususnya di Kota Mataram. Mengingat Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa. Hal ini mendorong terjadinya migrasi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk. Kota Mataram yang padat penduduk (6.741 jiwa/km^2) akan meningkatkan potensi korban jika terjadi gempabumi (BPS Kota Mataram, 2013). Oleh sebab itu analisis bahaya gempabumi harus dilakukan.Beberapa kasus gempabumi merusak di dunia, diketahui bahwa tingkat kerusakan akibat gempabumi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kekuatan gempabumi dan jarak suatu daerah dari pusat gempabumi namun juga dipengaruhi oleh kondisi geologi lokal atau efek tapak lokal (*local site effect*) yang berhubungan dengan karakteristik dinamika tanah.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisiskarakteristik dinamika tanah yaitu faktor amplifikasi (A_0), frekuensi natural tanah (f_o), periode dominan (T_g), indeks kerentanan seismik (K_g), dan*ground shear strain* (γ). Hasil analisis ini dapat menjadi bagiandari langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana gempabumi pada waktu yang akan datang.

II. BAHAN DAN METODE

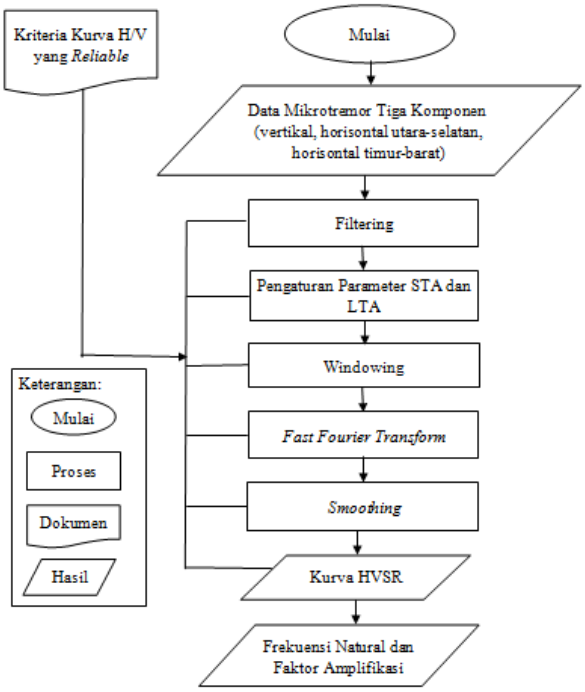
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil pengukuran *mikrotremor* di Kota Mataram yang telah dilakukan oleh Pusat Survei Geologi pada tahun 2013. *Mikrotremo* rmerupakan getaran alami (*ambient vibration*) bawah permukaan tanah yang diakibatkan oleh dua sumber utama yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia (Nakamura, 2008). Pengukuran *mikrotremor* yang menghasilkan nilai frekuensi lebih dari 1 Hz biasanya dihubungkan dengan sumber yang berasal dari aktivitas manusia, sedangkan jika nilai frekuensi yang dihasilkan lebih kecil dari 1 Hz (antara 0,005 dan 0,3 Hz) dikaitkan dengan sumber yang berasal dari aktivitas alam (Claudet et al., 2006). Pengukuran *mikrotremor* menghasilkan data getaran tanah berupa sinyal yang terekam dalam tiga komponen yaitu komponenvertikal (Z), horizontal utara-selatan (N-S) dan horizontal barat-timur (W-E). Data geologi berupa peta geologi wilayah Kota Mataram juga digunakan sebagai bahan untuk membantu menjelaskan hasilan alisis data *mikrotremor*.

Data mikrotremor di olah dengan menggunakan *software* Geopsy dengan menerapkan metode *Horizontal to Vertical Spectrum Ratio* (HVSR). Metode HVSR dinyatakan dengan membandingkan antara komponen horizontal dengan komponen vertical *mikrotremor* (Nakamura, 1989). Metode HVSR dinyatakan dalam persamaan 1.

$$\frac{S_{HS}}{S_{VS}} = \frac{\sqrt{[(S_{utara-selatan})^2 + (S_{barat-timur})^2]}}{S_{vertikal}} \quad (1)$$

S_{HS} adalah spectrum komponen horisontal di lapisan sedimen, sedangkan S_{VS} adalah spectrum komponen vertikal di lapisan sedimen.

Hasil dari analisis dengan metode HVSR adalah parameter frekuensii natural tanah (f_0) dan factor amplifikasi (A_0). Proses pengolahan *mikrotremor* dengan Geopsy diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1.Diagram AlirPengolahan Data Mikrotremor di Geopsy

Pada pengolahan data *mikrotremor* tersebut digunakan *bandpass* filter dengan rentang nilai 0,1 Hz – 20 Hz, lebar window 45 detik, dan koefisien *bandwidth* 15. Nilai frekuensi naturaldan faktor amplifikasi menjadi input untuk menghitung periode dominan tanah (T_g) dan indeks kerentaran seismik (K_g). Periode dominan tanah ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$T_g = \frac{1}{f_0} \qquad (2)$$

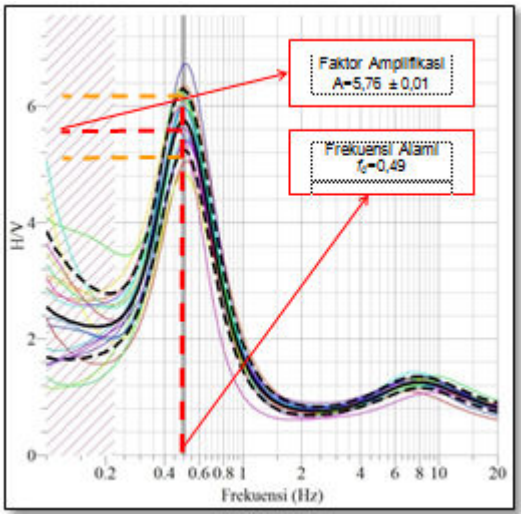
Sedangkan indeks kerentanan seismic ditentukan berdasarkan persamaan sebagai berikut:

$$K_g = \frac{A_0^2}{f_0} \qquad (3)$$

Interpolasis pasial dengan aplikasi GIS diterapkan pada masing-masing karakteristik dinamika tanah yang dihasilkan sehingga dapat diketahui persebaran spasialnya di Kota Mataram.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

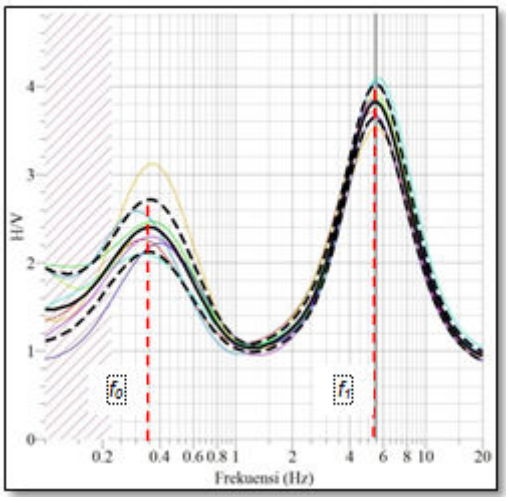
Hasil akhir pengolahan data *mikrotremor* dengan Geopsy adalah kurvas pektrum H/V yang menunjukkanpuncak spectrum pada frekuensi maksimum (dominan). Kurvas pektrum H/V yang dihasilkan seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2.Kurva Hasil Analisis HVSR padaTitik 104

Garis warna-warni menunjukkan nilai frekuensi yang telah dipilih pada proses windowing. Garis hitam tebal menunjukkan nilai frekuensi spectrum rata-rata yang dihasilkan, sedangkan garis hitam putus-putus menunjukkan nilai standar deviasi frekuensinya.

Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa kurvas pektrum H/V yang dihasilkan ada yang memiliki satu puncak dan dua puncak. Kurvas pektrum H/V dengan satu puncak dihasilkan pada titik-titik pengukuran yang dekat dengan pantai seperti pada titik 104 di atas. Sedang kan pada titik-titik pengukuran yang jauh dari pantai memiliki dua puncak spektrum H/V dengan nilai $f_0<f_1$ seperti pada titik 313 yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3.Kurva Hasil Analisis HVSR pada Titik 313

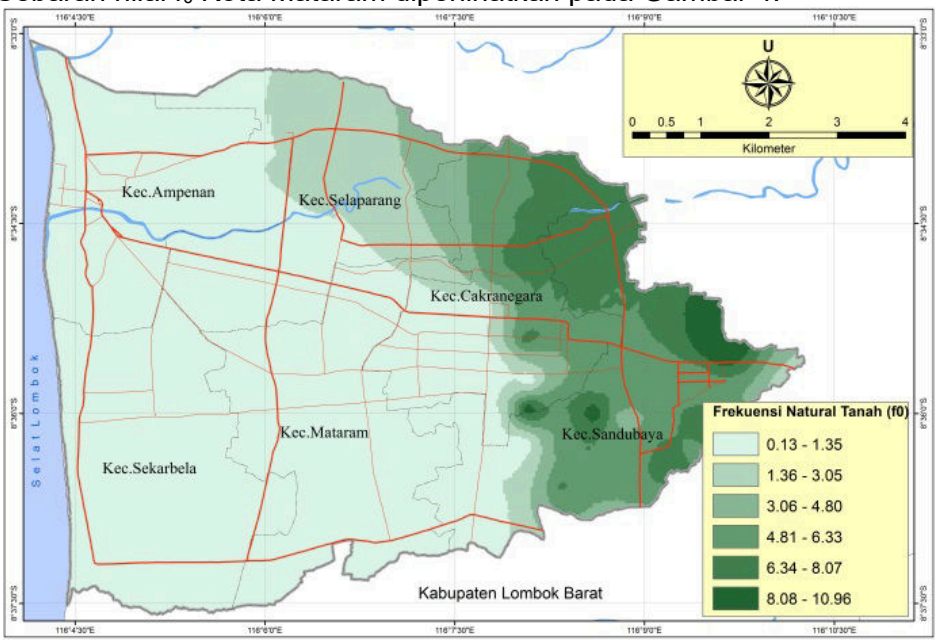
Menurut SESAME (2004), analisis HVSR yang menghasilkan dua puncak spektrum dengan $f_0<f_1$ mengindikasikan daerah tersebut memiliki lapisan sedimen (*soft deposits*)

yang tipis. Selain itu, kurva spektrum H/V dengan dua puncak juga mengindikasikan adanya pengaruh kegiatan industri di titik pengukuran.

I. *Frekuensi natural tanah (f_0) dan faktor amplifikasi (A_0)*

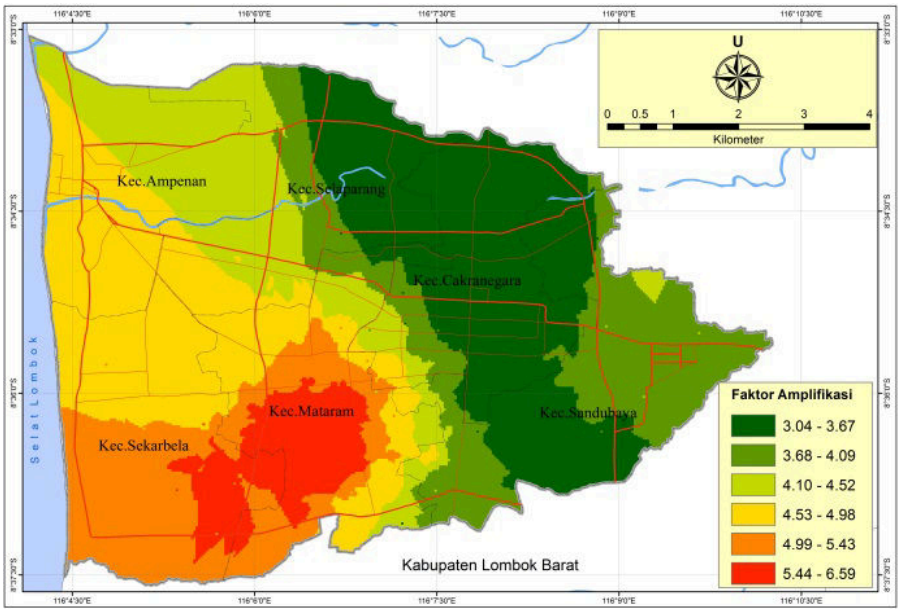
Parameter yang dihasilkan dari pengolahan data mikrotremor adalah frekuensi resonansi ataufrekuensi alami tanah (f_0) dan faktor amplifikasi (A_0). Frekuensi alami tanah adalah parameter penting yang harus diketahui untuk keperluan mitigasi bencana gempabumi karena berhubungan dengan perencanaan bangunan tahan gempabumi. Struktur bangunan yang memiliki nilai frekuensi alami sama dengan frekuensi alami tanah akan mengalami resonansi jika terjadi gempabumi. Efek resonansi akan memperkuat getaran bangunan sehingga menyebabkan bangunan robohdengancepat ketika terjadi gempabumi kuat. Thuladar (2002) menyatakan bahwa, selain bahaya resonansi getaran gempabumi, nilai frekuensi alami tanah yang sangat rendah rentan terhadap bahaya vibrasi periode panjang yang dapat mengancam gedung-gedung bertingkat tinggi.

Sebaran nilai f_0 Kota Mataram berkisar antara 0,13 Hz sampai 10,96 Hz. Nilai f_0 rendah tersebar dominan di bagian barat Kota Mataram yang mencakup Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, sebagian Kecamatan Cakranegara dan Selaparang. Nilai f_0 tinggi tersebar di bagian timur Kota Mataram yaitu di Kecamatan Sandubaya dan sebagian Kecamatan Cakranegara. Berdasarkan formasi geologinya nilai f_0 rendah diperoleh pada formasi aluvium yang tersusun atas kerakal, kerikil pasir, lempung, gambut, dan pecahan koral. Hal ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan Nakamura (1989), Nakamura et all. (1996), Parolai et all. (2001) yang menyatakan bahwa f_0 yang rendah berhubungan dengan tanah yang lunak dan ketebalan lapisan sedimen. Nilai f_0 yang rendah mengindikasikan lapisan batuan dasar di daerah tersebut semakin dalam, artinya bahwa daerah tersebut memiliki lapisan sedimen yang tebal. Nilai $f_0$dipengaruhi oleh kecepatan gelombang geser (Vs30) dan ketebalan lapisan sedimen. Hal inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan nilai f_0 di Kota Mataram. Nilai f_0 yang rendah yaitu kurang dari 1 Hz, juga menunjukkan bahwa getaran mikrotremor yang terekam lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas alam, seperti yang diungkapkan Claudet et all. (2006).Sebaran nilai f_0 Kota Mataram diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4.Peta Sebaran Frekuensi Natural Tanah Kota Mataram

Faktor amplifikasi (A_0) di Kota Mataram ditunjukkan pada Gambar 5. Terlihat bahwa nilai A_0 yang dihasilkan berkisar antara 3,04 sampai 6,59. Nilai A_0 tinggi dengan kisaran nilai antara 4,53 sampai 6,59 mendominasi di bagian barat Kota Mataram yaitu di Kecamatan Sekarbela, Mataram dan sebagian Kecamatan Ampenan. Sedangkan nilai A_0 rendah dengan kisaran nilai antara 3,04 sampai 4,09, ditunjukkan dengan warna hijau mendominasi bagian timur Kota Mataram yaitu di Kecamatan Selaparang, Cakranegara, dan Sandubaya. Faktor amplifikasi merupakan nilai yang menyatakan kelipatan amplitudogetaran tanah. Hal ini berarti bahwa faktor amplifikasi menunjukkan berapa kali tanah tersebut akan memperbesar kekuatan suatu gempa bumi.



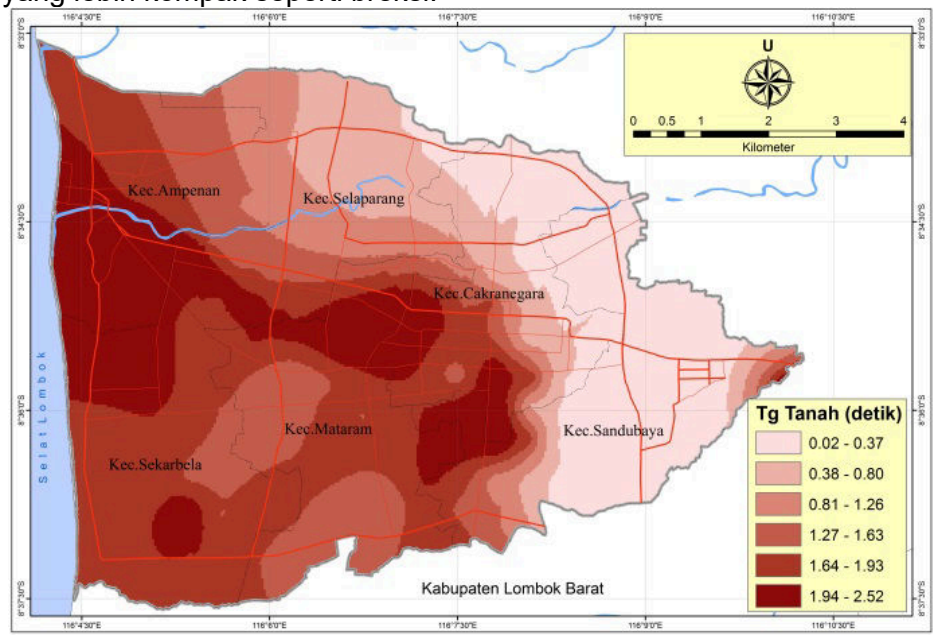
Gambar 5.Peta Sebaran Faktor Amplifikasi Tanah Kota Mataram

Pola spektrum mikrotremor di Kota Mataram menunjukkan pola spektrum yang menghasilkan frekuensi alami tanah (f_0) rendah dengan puncak spektrum (A_0) yang tinggi. Pola spektrum mikrotremor berhubungan dengan intensitas kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi, dimana frekuensi resonansi rendah dengan puncak spektrum tinggi dapat menimbulkan intensitas kerusakan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena nilai f_0 rendah menyebabkan amplifikasi atau penguatan yang tinggi terhadap gelombang gempabumi. Hal ini berarti bahwa jika terjadi suatu gempabumi, maka gelombang gempabumi tersebut akan dikuatkan sesuai dengan nilai amplifikasi di Kota Mataram serta dapat menghasilkan resonansi hingga menyebabkan kerusakan bangunan jika frekuensi alami bangunan sama dengan nilai f_0 tanah.Selain itu, f_0 yang rendah menimbulkan periode yang panjang atau tinggi sehingga gelombang gempabumi tersebut akan semakin lama terjebak di lapisan sedimen tanah yang kemudian dapat mengancam bangunan yang ada di atasnya.

II. *Periode dominan tanah (Tg)*

Periode dominan tanah (T_g) merupakan suatu besaran yang menyatakan jumlah dominan getaran yang terjadi di dalam lapisan tanah yang diukur pada waktu satu detik. Nilai $T_g$menjadi salah satu karakteristik dinamika tanah yang mencerminkan ketebalan lapisan sedimen wilayah setempat. Semakin besar nilai T_g di suatu tempat maka semakin tebal lapisan sedimen di tempat tersebut, demikian pula sebaliknya. Nilai T_g adalah berbanding terbalik dengan nilai f_0. Jika nilai f_0 rendah maka nilai T_g akan tinggi, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut nilai T_g dipengaruhi oleh nilai f_0.

Persebaran nilai T_g di Kota Mataram ditunjukkan pada Gambar 6 dengan kisaran nilai antara 0,02detik sampai 2,52 detik. Dapat dilihat bahwa nilai T_g tinggidominan di Kota Mataram bagian barat meliputi Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram, sebagian Kecamatan Cakranegara dan Selaparang. Sedangkan, nilai $T_g$rendah mendominasi bagian timur Kota Mataram yang meliputi Kecamatan Sandubaya, sebagian Kecamatan Cakranegara dan Selaparang. Nilai $T_g$yang tinggi di bagian barat Kota Mataram menunjukkan bahwa lapisan sedimen di wilayah ini lebih tebal jika dibandingkan dengan Kota Mataram bagian timur. Semakin ke timur lapisan sedimen semakin tipis. Jika dilihat dari kondisi geologi Kota Mataram, maka hal tersebut dapat diterima karena bagian barat Kota Mataram didominasi oleh formasi aluvium yang tersusun atas batuan kerikil, kerakal, pecahan koral, dan pasir. Sedangkan bagian timur Kota Mataram sudah mendekati formasi lekopiko dan kali babak yang terdiri dari batuan yang lebih kompak seperti breksi.



Gambar 6.Peta Sebaran Periode Dominan Tanah Kota Mataram

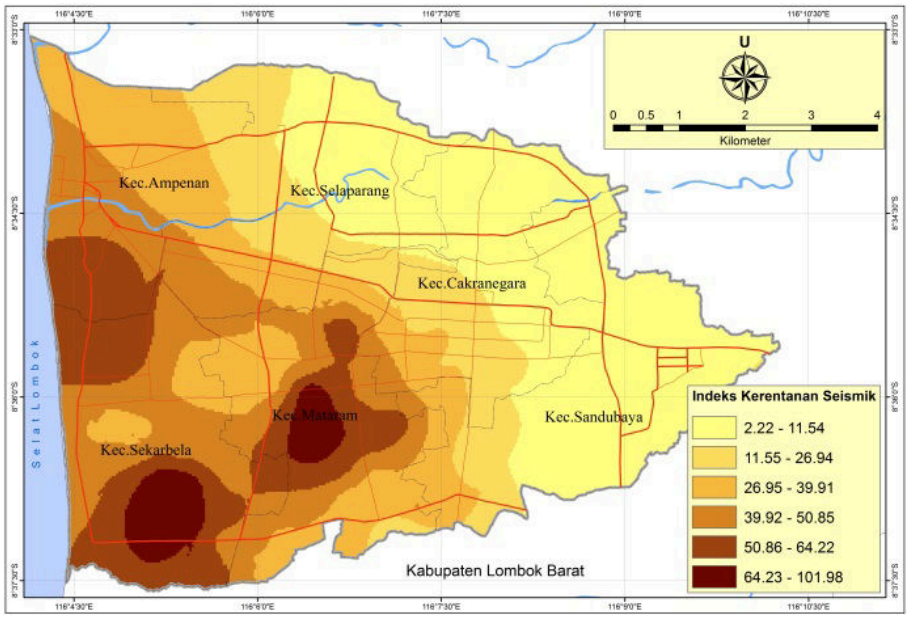
Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa nilai T_g tinggi menempati daerah yang memiliki nilai f_0 rendah. Hal ini berarti bahwa pada daerah tersebut memiliki lapisan sedimen yang tebal dan letak batuan dasar yang dalam. Penjelasan tersebut berlaku sebaliknya untuk daerah yang memiliki nilai T_g rendah dengan f_0 tinggi. Daerah yang memiliki nilai T_g rendah dengan f_0 tinggi menunjukkan bahwa lapisan sedimen di daerah tersebut lebih tipis dan letak batuan dasar yang dangkal.

Nilai periode dominan tanah yang tinggi dapat mengancam bangunan-bangunan yang berada di atasnya. Hal ini disebabkan karena periode tinggi atau panjang berarti bahwa suatu gelombang gempabumi tersebut akan bervibrasi lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berhenti. Semakin lama gelombang tersebut bervibrasi maka kesempatan untuk merusak bangunan di atasnya juga semakin besar.

III. Indeks kerentanan seismik (Kg)

Analisis yang telah dilakukan menghasilkan sebaran nilai *Kg* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 dengan kisaran nilai antara 2,22 sampai 101,98. Nilai *Kg* tinggi antara 39,92 sampai 101,98 mendominasi Kota Mataram bagian barat yaitu di Kecamatan Mataram, Sekarbela dan Ampenan. Nilai *Kg* rendah antara 2,22 sampai

26,94 mendominasi bagian timur Kota Mataram meliputi Kecamatan Sandubaya, Cakranegara dan sebagian Kecamatan Selaparang. Daerah yang memiliki nilai *Kg* tinggi adalah daerah yang dekat dengan laut. Kemudian nilai *Kg* semakin rendah ke bagian timur menuju wilayah yang lebih tinggi dan lebih jauh dari laut, yang lapisan sedimennya lebih tipis karena sudah dekat dengan formasi batuan yang lebih kompak.



Gambar 7.Peta Sebaran Indeks Kerentanan Seismik Kota Mataram

Nilai *Kg* yang tinggi di bagian barat Kota Mataram mengindikasikan tingkat kerentanan lapisan tanah permukaan yang tinggi di wilayah tersebut. Sedangkan nilai *Kg* yang rendah di bagian timur Kota Mataram mengindikasikan tingkat kerentanan lapisan tanah permukaan yang rendah. Hal ini merujuk pada definisi *Kg* yang merupakan suatu indeks atau angka yang menunjukkan gambaran tingkat kerentanan lapisan tanah di permukaan akibat terjadinya perubahan bentuk apabila terjadi gempabumi. Semakin tinggi nilai *Kg* maka kerentanan lapisan tanah permukaan terhadap gempabumi semakin tinggi, begitu sebaliknya semakin rendah nilai *Kg* maka kerentanan lapisan tanah permukaan terhadap gempabumi semakin rendah.

Berdasarkan nilai *Kg* yang dihasilkan, kerentanan lapisan tanah permukaan Kota Mataram tinggi terletak di bagian barat. Formasi geologi yang mendominasi bagian barat Kota Mataram adalah formasi aluvial yang tersusun atas kerakal, kerikil pasir, lempung, gambut, dan pecahan koral. Hal ini memperkuat indikasi bahwa wilayah ini memiliki tingkat kerentanan lapisan tanah yang tinggi jika terjadi gempabumi. Penelitian yang pernah dilakukan Daryono (2011) juga menghasilkan nilai Kg tinggi pada daerah dengan sedimen lunak. Di bagian timur Kota Mataram memiliki kerentanan yang rendah disebabkan karena wilayah ini sudah berdekatan dengan formasi geologi kalibabak dan lekopiko yang tersusun atas batuan yang lebih kompak atau solid jika dibandingkan formasi geologi aluvium.

Indeks kerentanan seismik yang tinggi di bagian barat Kota Mataram mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki potensi kerusakan bangunan yang tinggi atau parah jika terjadi gempabumi. Sedangkan di bagian timur Kota Mataram menunjukkan indikasi bahwa daerah tersebut memiliki potensi kerusakan bangunan yang rendah atau tidak parah jika terjadigempabumi, dilihat dari indeks kerentanan seismiknya.

Hasil dari analisis karakteristik dinamika tanah yang telah dilakukan dapat menjadi

tinjauan dalam membangun bangunan tahan gempa di Kota Mataram. Sebaran spasial yang dihasilkan dapat mempermudah zona siwilayah yang rawan terhadap bahaya gempa bumi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah frekuensi natural tanah Kota Mataram memiliki frekuensi natural yang rendah dengan factor amplifikasi tinggi. Nilaifrekuensi natural yang berbeda di Kota Mataram dipengaruhi oleh ketebalan lapisan sedimen. Frekuensi natural yang rendah menyebabkan periode dominan tanah yang tinggi. Indeks kerentanan seismik yang tinggi dominan di bagian barat Kota Mataram dikarenakan wilayah tersebut dominan terdiri dari lapisan sedimen pasir dan kerikil. Di bagian timur Kota Mataram, indeks kerentananseismik yang dihasilkan rendah karena material penyusun lapisan tanah lebih kompak.

Pada penelitian selanjutnya dapat mengkaji percepatan getaran maksimum tanah dan nilai ground shear strain di Kota Mataram. Kajian terhadap frekuensi alami bangunan dengan melakukan pengukuran *mikrotremor* langsung pada bangunan juga perlu dilakukan. Bangunan yang akan dibangun di Kota Mataram hendaknya dibangun dengan frekuensi alami yang tidak sama dengan frekuensi alami tanah yaitu rata-rata sebesar 1,5 Hz.

DAFTAR PUSTAKA

Claudet, S.B., Cotton, F., dan Band, P.Y.(2006). The Nature of Noise Wavefield and its Applications for Site Effects Studies.*Earth Science Review* 79 (2006) 205-227,doi:10.1016/j.earscirev.2006.07.004.

Daryono.(2011).*Indeks Kerentanan Seismik Berdasarkan Mikrotremor Pada Setiap Satuan Bentuk Lahan di Zona Graben Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Geografi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Nakamura, Y. (1989). A Method for Dynamic Characteristics Estimation of Subsurface Using Microtremor on the Ground Surface, *Quarterly Report Railway Technical Research Institute*, Tokyo, Vol. 30, 25-33.

Nakamura, Y., Sato, T., and Nishinaga, M.(1996). Local Site Effect Of Kobe Based On Microtremor Measurement.*System and Data Research Co*., Ltd, 3-25-3 Fujimidai, Kunitachi-shi, Tokyo, 186-0003, Japan.

Nakamura, Y.(2008). On The H/V Spectrum, *The 14th World Conference on Earthquake Engineering*, October 12-17, Beijing China.

Parolai, S., Bormann, P., dan Milkert, C.(2001). Assessment of the Resonansi Frequency of the Sedimentary Cover in the Cologne Area (Germany) Using Noise Measurements.*Journal of Earthquake Engineering*, Vol. 5, pp 541-564.

SESAME.(2004).*Guidelines For The Implementation of The H/V Spectral Ratio Technique on Ambient Vibration Measurements and Interpretation*. Deliverable D23.12, University of Potsdam, http://sesame-fp5.obs.ujf-grenoble.fr/SES_Reports.htm, diunduh jam 11.00 WIB, tanggal 10/12/2014.

Tuladhar, R., Cuong, N.N.H., dan Yamazaki, F.(2004).*Seismic Microzonation Of Hanoi, Vietnam Using Microtremor Observations*. In Proceedings of the 13th World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, August 1-6, 2004, Paper No. 2539

Pengaruh Karakteristik Wisatawan Terhadap Penilaian Kualitas Restoratif Kawasan Wisata Sanur, Bali

Wulan Dwi Purnamasari[1], I Gde Bintang Sena[1] dan Dian Kusuma Wardhani[1]

[1]Perencanaan Wilayah dan Kota FT, Universitas Brawijaya, Kota Malang
Email: wulanralando@gmail.com; itangsena15@gmail.com; dkwardhani@yahoo.com

ABSTRAK

Kemampuan suatu tempat untuk menyegarkan kondisi pikiran penggunanya dan menghilangkan dampak negatif dari kelelahan mental yang disebabkan oleh pemusatan perhatian secara terus-menerus merupakan pengertian dari kualitas restoratif. Tempat wisata sebagai lokasi pemulihan pikiran dari aktivitas harian seharusnya memiliki kualitas tersebut. Namun tidak semua tempat wisata menunjukkan kecenderungan kualitas restorarif yang baik sehingga penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas berwisata yang didapat oleh wisatawan dalam konteks wisata dan menilai faktor yang paling berpengaruh bagi penilaian kualitas restorarif menurut karateristik wisawatan. Lokasi penelitian terletak di kawasan wisata Sanur, Kota Denpasar. Metode yang digunakan yaitu Perceived Destination Restorative Qualities yang terdiri atas enam aspek berupa Compatibility, Extent, Mentally Away, Physically Away, Discord, Dan Fascination. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh kualitas restoratif di kawasan Pantai Sanur menurut karakteristik wisatawan seperti jenis kelamin dan kelompok usia (compatibility yang paling berpengaruh khususnya bagi wisatawan laki-laki dengan usia 18-25 tahun), asal wisatawan (mentally away, phisically away, dan discord paling berpengaruh khususnya bagi wisatawan domestik), aktivitas (mentally away dan phisically away berpengaruh khususnya bagi wisatawan dengan aktivitas sebagai pelajar/mahasiswa), serta teman perjalanan (extent dan fascination berpegaruh bagi wisatawan yang melakukan perjalanan dengan bepasangan).

Kata kunci: Kualitas, Restoratif, Wisatawan

I. PENDAHULUAN

Menurut Iso-Ahola (1980) kegiatan wisata merupakan salah satu cara yang paling populer bagi orang-orang untuk melepaskan diri dari *stress* yang ditimbulkan oleh kegiatan sehari-hari dan *stress* adalah salah satu efek samping dari pemusatan perhatian secara terus menerus. Pemulihan beban pikiran dengan melakukan kegiatan wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya adalah berwisata ke tempat wisata (Lehto, 2013). Tempat yang didominasi oleh keindahan alami yang mudah untuk dijangkau diketahui cenderung memiliki kualitas restoratif yang baik (Kaplan, 1995), serta kegiatan yang dilakukan haruslah bersifat menenangkan dan tidak menuntut perhatian terpusat.

Kualitas restoratif sebuah tempat merupakan gambaran kemampuan suatu tempat untuk menyegarkan kondisi pikiran penggunaannya dan mampu menghilangkan dampak negatif dari kelelahan mental yang disebabkan oleh pemusatan perhatian secara terus menerus (Kaplan, 1995 dan Hartig et. Al, 1997).

Penilaian terhadap kualitas restoratif menjadi pertimbangan dalam pengembangan sebuah kawasan wisata. Dengan kualitas restoratif yang baik, menunjukkan bahwa lokasi tersebut telah memenuhi apa yang dicari oleh wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Hal ini dikarenakan daerah tujuan wisata tersebut telah mencapai syarat dari masing-masing komponen restoratif.

Komponen tersebut terdiri atas *compatibility, extent, Mentally Away, Physically Away, Discord,* dan *Fascination.* Penilaian umumnya menggunakan skala likert 1-7 dengan nilai 1 yang berarti tidak sama sekali dan 7 yang berarti sepenuhnya restoratif.

Setiap komponen memiliki pengertian berbeda akan kawasan wisata yang dirasakan oleh wisatawan. (1) *Compatibility* didefinisikan sebagai kesesuaian daerah tujuan wisata dengan wisatawan. Apa yang didapat selama berada di lokasi wisata merepresentasikan karakter wisatawan tersebut. (2) *Extent* adalah gambaran keterhubungan antara kekayaan unsur dan ciri lingkungan yang dipersepsi oleh wisatawan sehingga wisatawan mampu membentuk gambaran mental dari daerah tujuan wisata. (3) *Mentally Away* yaitu gambaran karakteristik daerah tujuan wisata yang memungkinkan wisatawan merasa bebas dari beban pikiran sehari-hari. (4) *Physically Away* menggambarkan sejauh mana wisatawan merasa adanya perbedaan ruang fisik daerah tujuan wisata dengan lingkungan keseharian wisatawan. (5) *Discord* merujuk pada gangguan dan pengalihan perhatian yang dirasakan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. (6) *Fascination* memperlihatkan sejauh mana wisatawan merasa tempat wisata yang dikunjungi adalah tempat yang menarik dan tidak membosankan.

Pulau Bali menjadi *icon* wisata Indonesia dengan beragam jenis daerah tujuan wisata yang diberikan mulai dari pantai, gunung, bahkan kehidupan masyarakat yang membudaya. Salah satu kawasan yang selalu dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Pulau Bali adalah Kawasan Pariwisata Sanur. Selain karena menyuguhkan pemandangan alam pantai yang menawan, kawasan wisata ini juga mudah diakses dari pusat kegiatan Kota Denpasar. Namun pengembangan kawasan ini lebih kepada peningkatan pelayanan amenitas dan aksesibiltas yang merupakan pembangunan fisik tanpa menilai kualitas tempat wisata menurut wisatawan yang datang berkujung.

Hal ini terjadi tidak adanya alat analisis untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan mendasar wisatawan untuk berwisata dapat dipenuhi. Pendekatan analisa potensi Kawasan Pariwisata Sanur yang selama ini menggunakan pendekatan dari program wisata bahari, kondisi fasilitas, dan motivasi wisatawan (Gautama, 2011), tidak mampu menjelaskan pengalaman wisata yang dialami oleh wisatawan sehingga menghasilkan motivasi untuk berkunjung dan melakukan kegiatan wisata. Oleh karena ini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kualitas restoratif Kawasan Pariwisata Sanur berdasarkan karakteristik wisatawan dan mendapatkan komponen restoratif yang paling berpengaruh.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode kuantitatif atau metode ilmiah dan telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah seperti, konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode atau jenis penelitian ini menggunakan paduan metode kualitatif dan metode kuantitatif karena dalam pengambilan dan pengolahan data memadukan antara data yang diambil menggunakan pertanyaan terstruktur dan pertanyaan terbuka

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kawasan Pariwisata Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada peruntukkan Kawasan Pariwisata Sanur pada RDTR Kecamatan Denpasar selatan Tahun 2012-2032. Lokasi penelitian terbagi menjadi tujuh daerah tujuan wisata yaitu Pantai Matahari terbit, Pantai Sanur, Pantai Segara Ayu, Pantai Sindhu,

Pantai Karang, Pantai Batu Jimbar, dan Pantai Mertasari.

C. Variabel Penelitian

Penggunaan variabel mengacu pada tujuan penelitian ini. Tujuan pertama adalah mengetahui kualitas restoratif kawasan wisata Sanur dengan variabel utama (1) karakteristik wisatawan dan (2) persepsi wisatawan terhadap kualitas restoratif. Sedangkan untuk tujuan kedua yaitu mengetahui komponen restoratif yang paling berpengaruh, maka variabel yang digunakan adalah (3) nilai kualitas restoratif berdasarkan masing-masing karakteristik wisatawan.

D. Sampel Wisatawan

Pembagian wisatawan berdasarkan karakteristik pada tabel 2 berdasarkan Pitana&Diarta (2009) dan Lehto (2013) :

Tabel 1. Pembagian Karakteristik Wisatawan.

Karakteristik	Indikator
Umur	Kelompok Umur 1 (18-25 tahun), kelompok umur 2 (25-35 tahun)) kelompok umur 3 (35 tahun ke atas)
Jenis kelamin	Laki-laki, perempuan
Asal domisili	Lokal, domestik, mancanegara
Pekerjaan	Pelajar/mahasiswa, pegawai swasta, wiraswasta, lainnya
Teman Perjalanan	Sendiri, berpasangan, bersama keluarga, bersama kelompok kecil, bersama agen perjalanan/rombongan

Rumus Isaac dan Michael menjadi model perngambilan sampel wisawatan dengan signifikansi sebesar 5% dan N sebesar 580.450. Hasilnya adalah jumlah sampel sebanyak 348 sampel.

E. Metode Analisis

Analisis kualitas restoratif Kawasan Pariwisata Sanur dilakukan dengan input data Persepsi terhadap variabel *Compatibility, Extent, Mentally Away, Physically Away, Discord, dan Fascination* dari skala 1 hingga 7 yang diambil dari hasil survey kepada 348 sampel. Analisis dilakukan dengan metode analisis statistik deskriptif dengan menggunakan nilai modus skala masing masing pernyataan dan komponen restoratif yang didapat dari hasil isian kuesioner. Komponen restoratif yang digunakan dalam penelitian ini adalah komponen kualitas restoratif oleh Lehto (2013) seperti pada tabel 1 berikut :

Tabel 2. Komponen Kualitas Restoratif

Kode	Komponen
	Compatibility
c1	Destinasi wisata yang saya kunjungi ini sesuai dengan siapa saya
c2	Semua yang saya lihat di destinasi wisata ini harmonis satu dengan yang lain.
c3	Berada di destinasi wisata ini sesuai dengan keinginan pribadi saya
c4	Saya memiliki rasa kesatuan dengan destinasi wisata yang saya kunjungi
c5	Semua yang saya lihat di destinasi wisata ini sesuai pada tempatnya
c6	Destinasi wisata ini harmonis dengan alam sekitarnya
c7	Destinasi wisata ini adalah jenis tempat yang saya ingin untuk kunjungi
c8	Kegiatan wisata yang saya suka bisa dilakukan di destinasi wisata ini
c9	Kegiatan wisata yang saya lakukan di tempat wisata ini adalah kegiatan yang saya harapkan sebelum perjalanan ke destinasi wisata ini.
	Extent
e1	Saya menyaksikan ada berbagai macam hal yang terjadi di destinasi wisata ini
e2	Saya bisa melakukan banyak hal di tempat wisata ini
e3	Di setiap lokasi di dalam destinasi wisata ini, saya bisa melakukan hal yang berbeda
e4	Destinasi wisata ini cukup besar sehingga memungkinkan eksplorasi ke berbagai arah
e5	Destinasi wisata ini memungkinkan saya untuk mengeksplorasi secara ekstensif
	Mentally Away

Kode	Komponen
m1	Di destinasi wisata ini, saya bisa melupakan kewajiban saya
m2	Di destinasi wisata ini, saya merasa jauh dari segala hal
m3	Saat berada di tempat wisata ini, saya merasa terbebas dari rutinitas sehari-hari
m4	Di destinasi wisata ini, saya merasa terbebas dari segala hal yang biasanya harus saya lakukan
	Physically Away
p1	Berada di destinasi wisata ini, saya merasa berada di suasana yang berbeda dari suasana kehidupan saya sehari-hari
p2	Ketika di destinasi wisata ini saya melakukan hal-hal yang berbeda dari hal yang biasa saya lakukan di rumah
p3	Lingkungan destinasi wisata ini adalah lingkungan yang sangat berbeda dari lingkungan sehari-hari saya
	Discord
d1	Terdapat beragam hal yang mengalihkan perhatian dari kegiatan yang saya lakukan di destinasi wisata ini
d2	Destinasi wisata ini adalah tempat yang mudah dipahami
d3	Destinasi wisata ini adalah tempat yang teratur
d4	Destinasi wisata sangat sedikit gangguan/keramaian di tempat ini
	Fascination
f1	Bagi saya, mengunjungi destinasi wisata ini adalah pengalaman yang memikat hati
f2	Perhatian saya tertarik pada banyak hal mempesona tentang destinasi wisata ini
f3	Ada banyak hal yang bisa dijelajahi dan temukan di tempat wisata ini
f4	Setelah saya berwisata di destinasi wisata ini, Saya menemukan fakta bahwa destinasi wisata ini adalah destinasi wisata yang mempesona
f5	Berada di tempat wisata ini membuat saya bertanya-tanya tentang banyak hal

Simpulan nilai kualitas restoratif menggunakan nilai modus masing-masing komponen (Hasan, 2002). Interval yang digunakan adalah (a) 6-17 termasuk dalam kategori kurang, (b) internal 18-29 termasuk dalam kategori cukup, dan (c) interval 30-42 termasuk dalam kategori baik.

Data Hasil isian kuesioner dikelompokkan berdasarkan karakteristik wisatawan, kemudian dilakukan analisis faktor dengan menggunakan rotasi varimax dengan bantuan aplikasi SPSS versi 20. Dalam tahapan analisis faktor, pertama-tama dicari hasil uji KMO dan Bartlett yang bernilai lebih dari 0,5 , sehingga menunjukkan bahwa data adalah valid dan bisa digunakan dalam tahap selanjutnya. Kemudian data dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok baru berdasarkan eigenvalue lebih dari 1 dan dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi dan mewakili persentase variasi data paling tinggi.

Nilai loading factor dari kelompok baru tersebut, kemudian dilakukan rotasi varimax. Berdasarkan hasil rotasi varimax pada matriks komponen, didapat hasil kelompok komponen kualitas restoratif yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas restoratif berdasarkan karakteristik wisatawan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Wisatawan

1. Berdasarkan Usia Wisatawan

Umur responden yang berpartisipasi sebagai sampel, dimulai dari umur 18 tahun sampai dengan umur 62 tahun. Berdasarkan golongan pembagian umur dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, golongan umur dipilah menjadi: 1) 18 sampai dengan 25 tahun tergolong remaja akhir; 2) 26 sampai dengan 45 tahun tergolong Dewasa Awal; 3) 36 sampai dengan 45 tahun tergolong Dewasa Akhir; 4) 46 sampai dengan 55 tahun tergolong Lansia Awal; 5) 56 sampai dengan 65 tahun tergolong Lansia Akhir.

Tabel 3. Persebaran Kelas Umur Di Dalam Daerah Tujuan Wisata

Kelompok Umur	18-25 Remaja Akhir	26-35 Dewasa Awal	36-45 Dewasa Akhir	46-55 Lansia Awal	> 56 Lansia Akhir	Jumlah
Jumlah (Orang)	240	66	27	13	2	348
Persentase	69%	19%	8%	4%	1%	

Sumber: Survei Primer, 2016

2. *Berdasarkan Asal Wisatawan*

Jumlah responden berdasarkan asal domisili, wisatawan lokal sebanyak 188 orang, wisatawan mancanegara sebanyak 97 orang , dan wisatawan domestik sebanyak 63 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Kawasan Pariwisata Sanur dapat dinyatakan bahwa secara umum masih dikunjungi sebagai tempat wisata oleh wisatawan lokal dan mancanegara.

Tabel 4 Responden Berdasarkan Asal Domisili

Asal Domisili	Lokal	Domestik	Mancanegara	Jumlah (orang)
Jumlah (orang)	181	63	104	348
Persentase	52%	18%	30%	

Sumber: Survei Primer, 2016

3. *Berdasarkan Pekerjaan Wisatawan*

Jumlah responden yang ditemui dan diwawancara sebanyak 348 sampel menunjukkan bahwa berdasarkan pekerjaan wisatawan, pelajar/mahasiswa paling banyak ditemui dengan jumlah sebanyak 218 orang, Wiraswasta sebanyak 78 orang, dan Pegawai Swasta sebanyak 42 orang. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum dikunjungi sebagai tempat wisata oleh Pelajar/Mahasiswa, Wiraswasta, dan Pegawai Swasta dimana golongan tersebut merupakan golongan pekerjaan yang kesehariannya bekerja secara kognitif/menggunakan mental untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga membutuhkan sarana untuk melakukan penyegaran dari beban mental sehingga mampu melakukan pekerjaan kembali secara optimal.

Tabel 4 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Wisatawan	Pelajar/ Mahasiswa	Wiraswasta	Pegawai Swasta	Pengangguran	Pensiunan	Jumlah (orang)
Jumlah (orang)	216	78	44	8	2	348
Persentase	62%	22%	13%	2%	1%	

Sumber: Survei Primer, 2016

4. *Berdasarkan Teman Perjalanan Wisatawan*

Jumlah responden yang ditemui dan diwawancara sebanyak 348 sampel menunjukkan bahwa responden melakukan perjalanan dalam kelompok kecil sebanyak 123 orang, keluarga sebanyak 94 orang, dan berasangan sebanyak 70 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pola perjalanan wisatawan berdasarkan teman perjalanan di Kawasan Pariwisata Sanur secara umum kebanyakan dilakukan oleh wisatawan dengan kelompok kecil, keluarga, dan berpasangan.

Tabel 5 Tabel Responden Berdasarkan Teman Perjalanan

Teman Perjalanan	Sendiri	Berpasangan	Keluarga	Kelompok Kecil	Agen Perjalanan/ Rombongan	Jumlah (orang)
Jumlah (orang)	43	70	94	123	18	348
Persentase	12%	20%	27%	35%	5%	

Sumber: Survei Primer, 2016

B. Kualitas Restoratif Yang Paling Berpengaruh Dalam Karakteristik Wisatawan

Hasil analisis faktor dengan input data dari kualitas restoratif berdasarkan karakteristik wisatawan dapat dilihat pada tabel 6. Berikut :

	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9	e1	e2	e3	e4	e5	m1	m2	m3	m4	p1	p2	p3	d1	d2	d3	d4	f1	f2	f3	f4	f5
Jenis Kelamin																														
Laki-Laki	√	√	√	√	√	√	√																							
Perempuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√																					
Umur																														
Umur 1 (18-25 tahun)	√	√	√	√	√	√	√																							
Umur 2 (26-35 tahun)		√													√	√	√	√	√	√	√									
Umur 3 (>35 tahun)			√						√						√		√	√	√	√	√						√		√	
Asal																														
Lokal	√	√	√	√	√	√	√		√													√			√					
Domestik															√	√	√	√	√	√	√			√						
Mancanegara													√													√	√	√	√	√
Pekerjaan																														
Pelajar/Mahasiswa															√	√	√	√	√	√	√									
Wiraswasta					√				√						√	√	√	√	√	√	√									
Pegawai Swasta															√	√	√	√	√	√	√								√	
Teman Perjalanan																														
Sendiri															√	√	√	√	√	√	√									
Berpasangan										√	√	√	√	√												√	√	√	√	√
Keluarga															√	√	√	√	√	√	√									
Kelompok Kecil	√		√	√	√	√	√	√	√																					

Gambar 1. Komponen Kualitas Restoratif Paling Berpengaruh Berdasarkan Karakteristik Wisatawan

1. Pengaruh jenis kelamin terhadap nilai restoratif

Berdasarkan hasil survey didapatkan bahwa komponen yang mempengaruhi adalah *compatibility* dengan nilai tertinggi akan diberikan oleh laki-laki. Kelompok jenis kelamin ini berpendapat bahwa kawasan wisata Pantai Sanur merujuk pada kesesuaian daerah tujuan wisata dengan wisatawan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji KMO dan Bartlett, didapat lima kelompok baru berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 13,716, dan mewakili 45,718% variasi data. Berdasarkan hasil rotasi varimax pada matriks komponen, didapat hasil kelompok komponen kualitas restoratif yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas restoratif berdasarkan wisatawan laki-laki adalah komponen *Compatibility* (c1, c2 ,c3, c4, c5, c6, c7). Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan, hasil uji KMO dan Bartlett, didapat enam kelompok baru berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 13,147, dan mewakili 43,823 % variasi data. Berdasarkan hasil rotasi varimax pada matriks komponen, didapat hasil kelompok komponen kualitas restoratif yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas restoratif berdasarkan wisatawan perempuan adalah komponen *Compatibility* (c1, c2 ,c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9).

2. Pengaruh kelompok usia terhadap nilai restoratif

Terdapat perbedaab komponen restoratif pada masing-masing kelompok usia. Untuk kelompok usia I (18-25 tahun), komponen yang paling berpengaruh adalah *compatibility.* Hal ini terlihat dari hasil uji KMO dan Bartlett dimana didapat lima kelompok baru berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 13,716, dan mewakili 45,718% variasi data. Berdasarkan hasil rotasi varimax pada matriks komponen, didapat hasil kelompok komponen

kualitas restoratif yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas restoratif berdasarkan wisatawan kelompok umur 1 adalah komponen *Compatibility* (c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7). Kelompok usia II (26-35 tahun), komponen yang berpengaruh sejumlah 3 (*compatibility, mentally away, dan physically away*). Hal ini berdasarkan Didapatkan sembilan kelompok baru berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan hasil uji coba dimana didapatkan sembilan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 9,794 dan mewakili 32,648% variasi data. Berdasarkan hasil rotasi varimax pada matriks komponen, didapat hasil kelompok komponen kualitas restoratif yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas restoratif berdasarkan wisatawan kelompok umur 2 adalah komponen Compatibility (c2), Mentally Away, (m1, m2, m3, m4) dan Physically Away (p1,p2,p3). Terakhir adalah kelompok usia III (> 35 tahun) dimana komponen yang berpengaruh terdiri atas *Compatibility, Mentally Away, Physically Away, dan Fascination.*

3. Pengaruh asal wisatawan terhadap nilai restoratif

Berdasarkan hasil survey, terdapat 3 kelompok asal wisatawan kawasan Pantai Sanur. Kelompok pertama yaitu wisatawan lokal yang berasal dari Pulau Bali dengan persepsi wisatawan yaitu cukup memenuhi kebutuhan istirahat dan relaksasi yang diinginkan oleh wisatawan lokal. Komponen restoratif yang berpengaruh adalah *compatibility dan discord.* Terlihat dari hasil uji KMO dan Bartlett, didapat lima kelompok baru berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 14,570 dan mewakili 48,56% variasi data. Ini menunjukkan bahwa kawasan wisata Sanur merepresentasikan wisatawan lokal, namun masih terdapat gangguan di lokasi wisata yang ditunjukkan oleh nilai *discord* yang cukup tinggi. Kelompok kedua yaitu wisatawan domestik yang berasal dari luar Pulau Bali. Hasil survey menunjukkan bahwa penilaian kualitas restoratif oleh wisatawan domestik adalah baik dengan komponen yang berpengaruh yaitu *Mentally Away, Physically Away, dan Discord.* Hal ini terlihat dari hasil uji data dimana didapatkan lima kelompok baru Berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 13,885 dan mewakili 46,286% variasi data. Nilai ini menunjukkan bahwa kawasan wisata Sanur memungkinkan wisatawan merasa bebas dari beban pikiran yang sehari-hari dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan perbedaan ruang fisik yang berbeda dengan lingkungan harian wisatawan. Namun masih terdapat gangguan yang dirasakan oleh wisatawan selama berada di lokasi wisata. Untuk kelompok terakhir adalah wisatawan mancanegara yang menyatakan bahwa kawasan wisata Sanur cukup memenuhi kebutuhan istirahat dan relaksasi yang diinginkan oleh wisatawan mancanegara dengan komponen restoratif yang paling berpengaruh adalah *Extent dan Fascination.* Terbukti dari hasil uji KMO dan Bartlett dimana didapatkan delapan kelompok baru Berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 9,71, dan mewakili 32,4 % variasi data. Ini menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara merasa bahwa kawasan wisata Sanur adalah objek wisata yang menarik dan tidak membosankan karena lingkungannya mampuy membentuk gambaran mental yang merujuk pada kenangan selama berada di lokasi wisata.

4. Pengaruh *jenis pekerjaan terhadap kualitas restoratif*

Berdasarkan hasil survey untuk karakteristik pekerjaan wisatawan, didapat 3 kelompok kegiatan. Pertama adalah wisatawan yang beraktivitas sehari-hari sebagai mahasiswa atau pelajar. Jenis wisatawan ini mengindikasikan bahwa kualitas restoratif kawasan wisata Sanur cukup memenuhi kebutuhan istirahat dan relaksasi yang diinginkan oleh oleh mereka dengan komponen yang paling berpengaruh adalah *Mentally Away dan Physically Away.* Kondisi ini terlihat dari hasil uji KMO dan Bartlett. Didapatkan lima kelompok baru Berdasarkan eigenvalue lebih dari 1,

dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 14,079 dan mewakili 46,93% variasi data. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan wisata Sanur adalah tempat wisata yang menarik dan tidak membosankan sehingga dapat memberikan gambaran mental dan memori yang baik ketika nanti meninggalkan lokasi wisata. Kelompok wisatawa kedua adalah mereka yang beraktivitas sebagai wiraswasta. Wisatawan ini menunjukkan kualitas kawasan wisata Sanur cukup memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka saat berwisata. Sama halnya dengan kelompok wisatawan pelajar/mahasiswa, komponen restoratif yang berpengaruh pada kelompok wisatawan ini adalah *Mentally Away dan Physically Away.* Sedangkan untuk kelompok ketiga adalah pegawai swasta dimana komponen yang berpengaruh selain *Mentally Away dan Physically Away* adalah *fascination.* Terlihat dari hasil uji KMO dan Bartlett, didapatkan delapan kelompok baru Berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 11,292 dan mewakili 37,641% variasi data. Wisatawan ini berpendapat bahwa kawasan wisata Sanur adalah tempat wisata yang menarik dan tidak membosankan.

5. Pengaruh teman perjalanan terhadap penilaian kualitas restoratif

Berdasarkan hasil survey, wisatawan yang datang ke kawasan Saur dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama adalah wisatawan yang melakukan perjalan wisata sendiri dengan komponen yang paling berpengaruh adalah *Mentally Away dan Physically Away.* Terlihat dari hasil uji KMO dan Bartlett, didapatkan enam kelompok baru Berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 12,587 dan mewakili 41,95% variasi data. Kelompok kedua adalah wisatawan yang melakukan perjalanan dengan pasangan. Berbeda halnya dengan wisatawan yang melalukan perjalan wisata seorang diri, komponen restoratif yang paling berpengaruh adalah *Extent dan Fascination.* Ini menunjukkan bahwa wisatawan merasa nyaman dengan lokasi wisata karena dianggap menyenangkan sehingga dapat membentuk kawasan mental ketika wisatawan meninggalkan lokasi wisata. Kelompok ketiga adalah wisatawan yang melakukan perjalanan wisata dengan keluarga atau *family trip.* Komponen restoratif yang berpengaruh adalah *Mentally Away dan Physically Away.* Sama halnya dengan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata seorang diri, kawasan wisata Sanur memungkinkan wisatawa merasa bebas dari beban pikiran yang sehari-hari dihadapi dengan ruang fisik yang tercipta berbeda dengan lingkungan harian yang biasa mereka temui sehari-hari. Kelompok terakhir adalah wisatawan yang melakukan perjalanan wisata dalam kelompok kecil diluar anggota keluarga. Komponen restoratif yang berpengaruh adalah *compatibility.* Terlihat dari hasil uji KMO dan Bartlett, didapatkan enam kelompok baru Berdasarkan eigenvalue lebih dari 1, dengan kelompok yang memiliki eigenvalue paling tinggi 12,837 dan mewakili 42,79% variasi data. Nilai ini menunjukkan bahwa kawasan wisata Sanur merepresentasikan karakter wisatawan karena memberikan keleluasaan mereka dalam menikmati atraksi wisata secara bersama-sama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Komponen Kualitas Restoratif Paling Berpengaruh Berdasarkan Karakteristik Wisatawan didapat kesimpulan berupa :

A. Karakteristik wisatawan laki-laki dan perempuan, dari kelompok umur 18-25 tahun, asal wisatawan lokal dan bepergian dengan kelompok kecil paling dipengaruhi oleh komponen Compatibility, yang berarti kesesuaian antara keinginan wisatawan sebelum melakukan kegiatan wisata dengan kegiatan wisata yang bisa diakomodasi di Kawasan Pariwisata Sanur menjadi komponen yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas restoratif dari kelompok

wisatawan dengan karakteristik ini

B. Karakteristik wisatawan dari kelompok umur 26-35 tahun dan 35 tahun ke atas, asal wisatawan domestik, dan semua jenis pekerjaan yang berwisata bersama teman perjalanan sendiri dan keluarga paling dipengaruhi oleh komponen Mentally Away dan Physically Away yang berarti perasaan jauh dari kegiatan dan rutinitas sehari-hari serta lingkungan yang berbeda dari lingkungan sehari-hari dan lingkungan yang didominasi oleh keindahan alami yang terdapat di Kawasan Pariwisata Sanur menjadi komponen yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas restoratif dari kelompok wisatawan dengan karakteristik ini.
C. Karakteristik wisatawan mancanegara dan teman perjalanan berpasangan paling dipengaruhi oleh komponen Fascination yang berarti pesona Kawasan Pariwisata Sanur secara keseluruhan menjadi komponen yang paling berpengaruh dalam penilaian kualitas restoratif dari kelompok wisatawan dengan karakteristik ini

DAFTAR PUSTAKA

Hartig, T., Korpela, K., Evans, G. W. & Garling T.1997.A Measure Of Restorative Quality In Environments.Scandinavian Journal of Psychology.37, 378-393.

Hasan, M. Iqbal.2002.Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor. Ghalia Indonesia

Iso-Ahola, S.E.1980. Social Psychology of Leisure and Recreation. Dubuque. William C. Brown.

Kaplan, S.1995.The restorative benefits of nature towards an integrative framework. Journal of Environment Psychology, 15, 169-182.

Sugiyono.2011.Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung Alfabet

Xinran Y. Lehto. 2013. *Assessing the Perceived Restorative Qualities of Vacation Destinations.* Journal of Travel Research. Volme: 52 issue: 3, page(s): 325-33

Faktor Pemilihan Lokasi Bermukim Pada Kawasan Rawan Bencana Longsor Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat

Baiq Harly Widayanti
Ardi Yuniarman
Febrita Susanti[1]

Staf Pengajar Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram
Email: efpit_inter@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Faktor Pemilihan Lokasi Bermukim Pada Kawasan Rawan Bencana Longsor di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pola bermukim masyarakat beserta faktor penyebab dalam pemilihan lokasi bermukim di kawasan rawan bencana longsor. Metode pedekatan penelitian menggunakan metode partisipatif dengan quisioner dan wawancara mendalam terhadap responden. Metode analisa menggunakan pemetaan rumah-rumah masyarakat yang didukung oleh analisis tetangga terdekat dalam melihat pola bermukim. Teknik analisis skoring digunakan dalam mengukur faktor atau variabel yang sangat mempengaruhi masyarakat Desa Guntur Macan untuk tetap bermukim di kawasan rawan bencana. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pola permukiman berdasarkan pemetaan ada yang berbentuk cluster, linear dan menyebar sedangkan berdasarkan hasil analisis tetangga terdekat memiliki nilai T = 1,74 yang berarti memiliki pola tersebar merata (Dispared Pattern). Faktor bermukim masyarakat Desa Guntur Macan yang sangat mempengaruhi antara lain : transportasi yang dapat diakses oleh kendaraan umum roda emapat, tingkat kebisingan kawasan yang rendah, tidak adanya polusi yang menggangu kesehatan serta peluang kerja di lokasi bermukim sangat besar.

Kata Kunci : pola bermukim, faktor lokasi perumahan, analisis tetangga terdekat, rawan bencana

I. PENDAHULUAN

Desa Guntur Macan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Secara umum kondisi wilayah atau profil wilayah Desa Guntur Macan memiliki luas 2.749 Ha dengan 7 dusun, yaitu : Dusun Guntur Macan, Dusun Barat Kokoq, Dusun Ladungan, Dusun Poan Utara, Dusun Pancor, Dusun Apit Aik, dan Dusun Poan Selatan. Curah hujan di Desa Guntur Macan relatif tinggi kisaran 200 – 3.000 mm. Karakteristik wilayahnya berbukit dengan tekstur tanah lempungan / pasiran dan kemiringan tanah antara 0 – 90^{O}. Dengan kondisi tersebut Desa Guntur Macan sangat rentan terhadap terjadinya bencana longsor. Baru-baru ini tepatnya tanggal 19 Desember 2015 terjadi bencana longsor di desa tersebut yang menyebabkan korban jiwa, rumah hancur dan hilangnya harta benda warga karena tertimbun longsoran. Kejadian longsor di Desa Guntur Macan tidak hanya sekali ini terjadi namun pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi, dimana kejadian longsor pada tahun 1974 yang mengakibatkan korban jiwa dan rumah rusak sedangkan longsor pada tahun 2000 hanya mengakibatkan rusaknya 2 unit rumah.

Kondisi longsor ini selain karena topografi yang curam juga didukung oleh kondisi atau kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan kawasan perbukitan. Jumlah penduduk Desa Guntur Macan yaitu 2.240 jiwa dan 826 KK dengan 270 KK (33%) masyarakat bertempat tinggal di atas bukit yang rawan terhadap bencana longsor. Pada kawasan tersebut masyarakat menebang tanaman untuk dijadikan

kawasan permukiman, perkebunan dan peternakan disana yang menyebabkan semakin berkurang tanaman penyangga ataupun pengikat tanah di lokasi tersebut.

Dengan melihat kejadian bencana longsor yang setiap saat terjadi menyebabkan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi tidak aman dan nyaman karena masyarakat selalu dibayangi oleh bencana longsor yang setiap saat dapat terjadi. Namun, di sisi lain masyarakat masih terus bertahan untuk bermukim atau bertempat tinggal di kawasan perbukitan. Dengan melihat kebiasaan masyarakat untuk memilih bermukim di dataran tinggi sedangkan disisi lain kehidupan seharian mereka menjadi tidak aman dan nyaman menyebabkan perlu adanya identifikasi untuk mengetahui penyebab masyarakat bermukim di dataran tinggi. Sehingga, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui faktor-faktor penyebab pemilihan lokasi bermukim masyarakat di Desa Guntur Macan khusunya yang bermukim di dataran tinggi (kawasan bukit). Harapannya dengan mengetahui alasan bermukim masyarakat di lokasi kawasan perbukitan dapat memberikan masukan ataupun arahan baik bagi masyarakat setempat, aparatur pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menyediakan mendorong masyarakat untuk bermukim di tempat yang lebih aman dari bencana longsor.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimanakah pola bermukim masyarakat di Desa Guntur Macan?
2. Faktor-faktor penyebab pemilihan lokasi bermukim masyarakat pada kawasan rawan bencana longsor di Desa Guntur Macan?

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pola Permukiman

Menurut Sasongko dalam Pasundanie (2009) menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat dengan lingkungan akan membentuk organisasi ruang yang di dalamnya mengandung komposisi elemen pembentuk ruang dengan batasan tertentu. Faktor-faktor ekonomi, budaya, kelembagaan, adat istiadat serta pengaruh politik sangat menentukan sebaran pola dan struktur lingkungan fisik. Faktor-faktor tersebut akan membawa perkembangan dan perubahan struktur serta bentuk suatu tempat.

Secara spasial bentuk permukiman menurut Wiriaatmadja (1981) dalam Bachry, 2015 : 12, antara lain :

a. Pola permukiman dengan cara tersebar berjauhan satu dengan yang lain, terjadi pada daerah yang baru saja dibuka yang disebabkan karena belum adanya jalan besar.
b. Pola permukiman dengan cara terkumpul dalam sebuah kampung atau desa, memanjang mengikuti jalan lalu lintas, sedangkan tanah garapan berada di belakangnya.
c. Pola permukiman dengan cara terkumpul dalam sebuah kampung atau desa, sedangkan tanah garapan berada di luar kampung
d. Berkumpul dan tersusun melingkar mengikuti jalan. Pola permukiman ini melingkar mengikuti jalan sedangkan tanah garapan berada di belakangnya.

B. Analisis Tetangga Terdekat

Identifikasi pola sebaran kegiatan dalam wilayah dapat dilakukan dengan analisi tetangga terdekat. Analisis ini digunakan untuk menentukan pola sebaran kegiatan, apakah mengikuti random, mengelompok atau seragam yang ditunjukkan dari besarnya nilai T. Hasil dari analisis ini bisa memberikan gambaran terhadap

kecenderungan suatu kegiatan. Dengan pola tesebut dan dikaitkan dengan masalah dan tujua pembangunan maka dapat disusun kebijkanan lokasi suatu kegiatan.

Adapun rumus analisis tetangga terdekat (Muta'ali, 2015 : 126) :

$$T = \frac{\overline{ju}}{\overline{jh}}$$

Keterangan

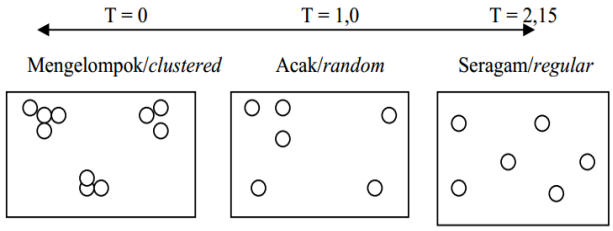
T : indeks penyebaran tetangga terdekat

$\overline{ju}$: jarak rata-rata yang di ukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat

$\overline{jh}$: jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola random $= \frac{1}{2\sqrt{p}}$

P : kepadatan titik dalam tiap km2 yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan luas wilayah dalam km2 (A), sehingga menjadi $\frac{N}{A}$

Dari nilai T, selanjutnya diinterpretasikan dengan *Continium Nearest Neighbour Analysis*, sebagai berikut:



Sumber : Hagget dalam Bintarto dan Hadisumarno (1982 : 76)

Gambar 1 Pola Analisa Tetangga Terdekat

Pola distribusi spasial secara umum terbagi menjadi tiga (Briggs, 2007) dalam (Muta'ali, 2015 : 127) :

a. Mengelompok (*Clustered*) yaitu beberapa titik terkonsentrasi berdekatan satu sama lain dan ada area besar yang berisi sedikit titik yang sepertinya ada jarak yang tidak bermakna.
b. Menyebar (*Dispersed/reguler*) yaitu setiap titik berjauhan satu sama lain atau secara jarak tidak dekat secara bermakna
c. Acak (*Random*) yaitu titik-titik muncul pada lokasi yang acak dan posisi satu titik dengan titik lainnya tidak saling terkait.

Menurut Nursi Sumaatmadja (1988) dalam Mut'ali, 2015 : 127 kriteria T adalah:

a. 0,00 – 0,70 pola bergerombol (*cluster pattern*)
b. 0,70 – 1,40 pola tersebar tidak merata (*random pattern*)
c. 1,40 – 2,14 pola tersebar merata (*dispared pattern*)

C. *Faktor Lokasi Bermukim*

Preferensi bermukim menurut Sinulingga (2005) dalam Armela, dkk (2015 : 38) adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk bermukim atau tidak bermukim di suatu tempat yang dipengaruhi oleh variabel-variabel.

Dalam melakukan penentuan lokasi bermukim terdapat alasan-alasan yang mendasarinya. Masyarakat tidak sekedar memilih lokasi yang tidak didasari pertimbangan, terdapat pertimbangan faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi bermukim. Menurut Drabkin dalam dalam Bachry, 2015 : 14 terdapat beberapa faktor yaitu :

a. Aksesibilitas, yang terdiri dari kemudahan transportasi dan jarak ke pusat kota
b. Lingkungan, terdiri dari lingkungan sosial dan fisik seperti kebisingan, polusi dan lingkungan yang nyaman.
c. Peluang kerja yang tersedia, yaitu kemudahan seseorang dalam mencari pekerjaan untuk kelangsungan hidupnya.
d. Tingkat pelayanan, lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang memiliki pelayanan yang baik dalam hal sarana dan prasarana.

III. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf, hasil wawancara, catatan, memo, hasil quisioner dan dokumen resmi lainnya. Penelitian Faktor Pemilihan Lokasi Bermukim Pada Kawasan Rawan Bencana Longsor dilakukan dengan tinjauan teori-teori terkait pola bermukim dan faktor pemilihan lokasi bermukim. Teori tersebut menjadi dasar dalam melakukan pengumpulan data di lapangan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga masyarakat Desa Guntur Macan yang bermukim di kawasan rawan bencana. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode teknik probability sampling yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jumlah sampel yang digunakan dihitung dengan rumus slovin untuk tingkat toleransi 10%, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = taraf tolerasi
sehingga dengan rumus diatas jumlah sampel penelitian ini adalah :

$$n = \frac{270}{1 + 270\ (0{,}1)^2}$$

$$n = 72{,}97$$

$$n = 80$$

C. *Peubah Yang Diamati*

Adapun variabel penelitian atau peubah yang digunakan antara lain :

Tabel 1 Variabel Penelitian

Variabel	Sub variabel	Indikator	Pilihan		
			1	2	3
Aksesibilitas	Transportasi	Ketersediaan transportasi umum	Dilewati angkutan umum roda empat	Dilewati angkutan umum roda dua	Tidak dilewati angkutan umum
	Jarak ke pusat kabupaten / provinsi	Jangkauan menuju pusat kabupaten / pusat provinsi	Terjangkau dengan jarak maksimal 4 Km	Terjangkau dengan jarak maksimal 10 Km	Tidak terjangkau dengan jarak lebih 10 Km
Lingkungan	Lingkungan fisik	Kebisingan	Permukiman berjarak < 2	Permukiman berjarak 2 km	Permukiman berjarak > 2 km

Variabel	Sub variabel	Indikator	Pilihan		
			1	2	3
			km dari pusat kebisingan	dari pusat kebisingan	dari pusat kebisingan
		Polusi	Polusi yang tidak mengganggu kesehatan	Polusi yang menimbulkan gangguan ringan seperti iritasi	Polusi yang menimbulkan gangguan berat seperti penyakit kronis
		Kenyamanan	Aman dari bencana	Rentan bencana ringan	Rentan bencana berat
Peluang kerja		Ketersediaan lapangan pekerjaan di lingkungan permukiman	Lokasi permukiman menyediakan lapangan pekerjaan dan lokasi pekerjaan berada di kawasan tersebut	Lokasi permukiman menyediakan lapangan pekerjaan namun lokasi pekerjaan tidak berada pada kawasan tersebut	Lokasi permukiman tidak menyediakan lapangan pekerjaan
Tingkat pelayanan	Sarana Prasarana	Kesesuaian standar penyediaan pemenuhan kebutuhan prasarana di lingkungan permukiman masyarakat	Memiliki sarana dan prasarana memadai dan lengkap	Memilki sarana dan prasarana lebih dari 3 memadai (Air Minum, Listrik, Sanitasi, Jalan, Drainase)	Memiliki sarana dan prasarana kurang dari 3 (Air minum, listrik)

Sumber : Sastra M (2006;132-133) dalam Bachry, 2015 : 14 dan Hasil Olahan Variabel, 2016

D. Teknik Skoring

Teknik skoring digunakan untuk melihat variabel bermukim mana yang paling mempengaruhi pemilihan lokasi bermukim di Desa Guntur Macan. Dalam teknik skoring semua variabel diberi skor yang sama, sehingga masing-masing indikator yang memiliki satuan sama. Pada penelitian ini menggunakan satuan persentase dari jawaban responden, sehingga dapat dibuat kelas interval, yaitu :

a. Jika jawaban reseponden terhadap pilihan 1 (variabel yang paling baik) sebesar 66% – 100% mengindikasi sangat berpengaruh
b. Jika jawaban reseponden terhadap pilihan 1 (variabel yang paling baik) sebesar 32% – 65% mengindikasikan berpengaruh
c. Jika jawaban reseponden terhadap pilihan 1 (variabel yang paling baik) sebesar 0% - 31% mengindikasi tidak berpengaruh

E. Metode Analisa Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan dengan menggunakan :

a. Analisis pola permukiman dengan memetakan pola permukiman masyarakat serta menggunakan analisis tetangga terdekat untuk mendukung analisis deskriptif tersebut

   Adapun rumus analisis tetangga terdekat (Muta'ali, 2015 : 126) :

$$T = \frac{\overline{ju}}{\overline{jh}}$$

   Keterangan

   T : indeks penyebaran tetangga terdekat

   $\overline{ju}$: jarak rata-rata yang di ukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang terdekat

   $\overline{jh}$: jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola

random

P : kepadatan titik dalam tiap km2 yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan luas wilayah dalam km2 (A)

b. Analisis Faktor bermukim menggunakan analisis skoring berdasarkan presentase jawaban dari masing-masing variabel.

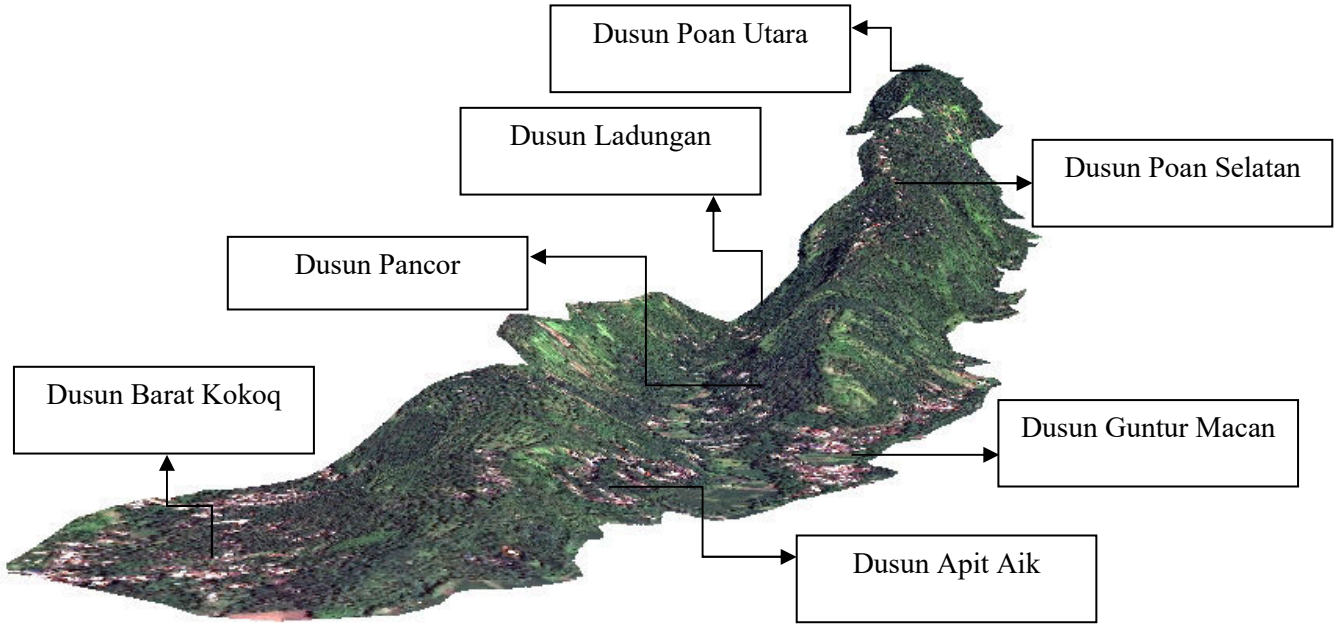
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Guntur Macan

Desa Guntur Macan adalah salah satu desa dari 16 desa yang ada di Kecamatan Gunung Sari yang memiliki luas wilayah sebesar 349,5 ha dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Hutan Negara yang langsung berbatasan dengan Kec, Pemenang Timur Kab. Lombok Utara
Sebelah Timur	:	Desa Dopang dan Desa Mambalan
Sebelah Selatan	:	Desa Dopang dan Desa Taman Sari
Sebelah barat	:	Desa Taman Sari

Desa Guntur Macan terdiri dari 7 dusun yaitu Dusun Barat Kokoq, Guntur Macan, Ladungan, Poan Selatan, Poan Utara, Pancor, Apit Aik. Desa Guntur Macan berjarak sekitar 2 kilometer dari Pusat Kecamatan Gunung Sari. Semua dusun yang ada di Desa Guntur Macan memiliki kemiringan lereng yang bervariasi mulai dari 0-8% sampai dengan lebih dari 40%. Dusun Apit Aik dan Dusun Barat Kokoq didominasi oleh kemiringan lereng yang relatif datar yaitu 0-8%, dan Dusun Poan Utara dan Poan Selatan didominasi oleh kemiringan lereng yang dapat dikategorikan sangat curam yaitu lebih dari 40%. Berdasarkan bentuk lahan kawasan, kedua dusun ini berada di atas perbukitan, sementara Dusun Guntur Macan, Pancor, dan Ladungan berada di kaki perbukitan. Secara umum wilayah desa Guntur Macan dapat dikatakan wilayah yang berada pada kemiringan sangat curam karena 105,6 ha atau sepertiga dari total luas wilayah Desa Guntur Macan berada pada kemiringan lebih dari 40 %.



Sumber;: Data Olahan, 2017

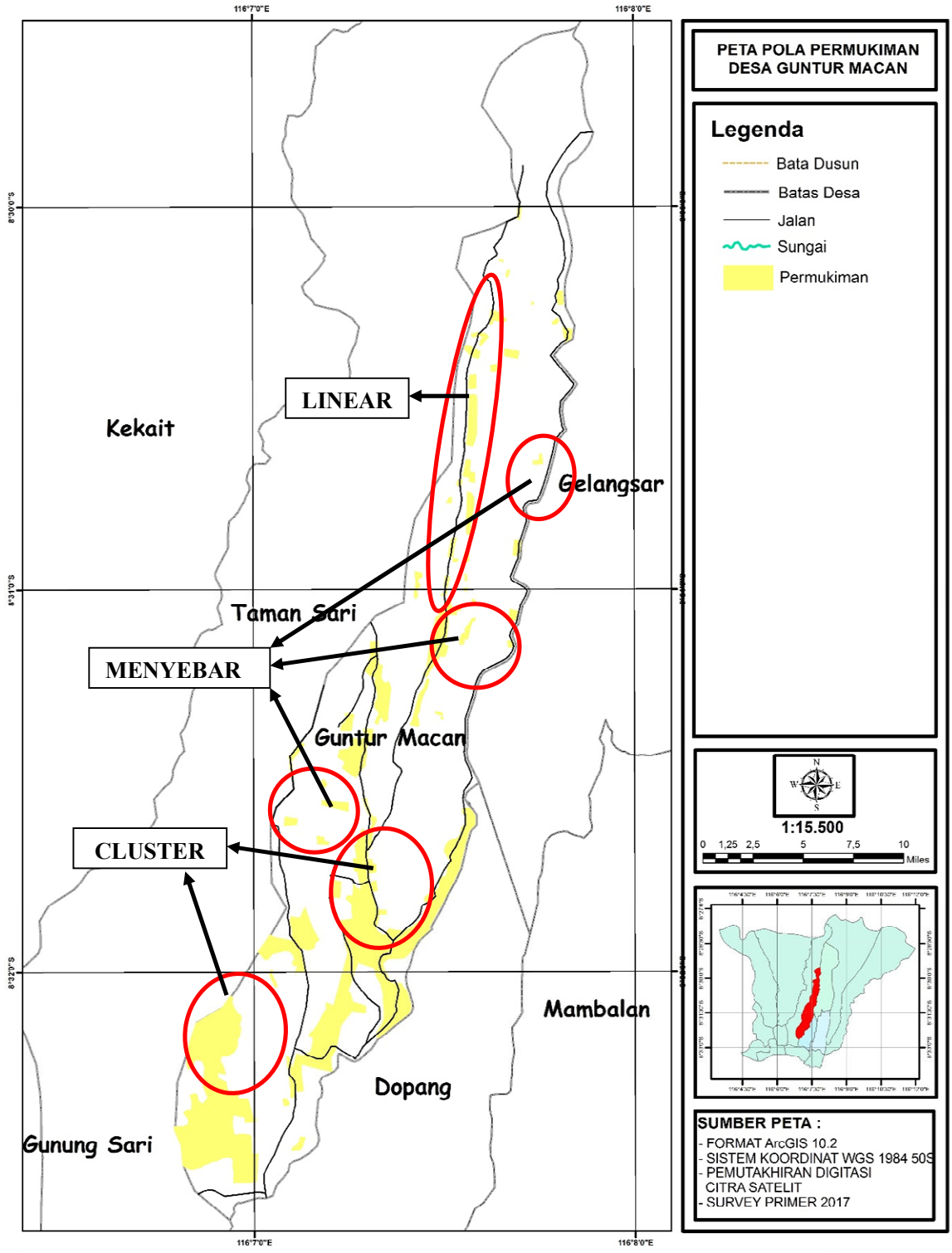
Gambar 2. Morfologi Kawasan

B. Analisis Pola Bermukim Masyarakat di Desa Guntur Macan

Pola bermukim masyarakat di Desa Guntur Macan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dapat diidentifikasi penyebab yang menimbulkan pola permukiman tersebut, antara lain :

a. Kondisi alam yang memiliki topografi beragam mulai dari datar hingga curam mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang memilih bertempat tinggal di lokasi dataran yang dekat dengan jalan sedangkan sebagian lagi memilih tempat tinggal di lokasi yang berdekatan dengan keluarga sehingga mereka membentuk clustered.
b. Pekerjaan atau mata pencaharian penduduk dimana masih banyak yang memilih bermukim dekat dengan lokasi pekerjaan yaitu kebun ataupun hutan hak yang mereka miliki.
c. Kekerabatan merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan pemilihan tempat tinggal. Masyarakat Desa Guntur Macan karena sudah turun temurun tinggal di lokasi tersebut sejak kecil, maka hingga mereka menikah dan memiliki anak tetap tinggal di sekitar wilayah tersebut. Semua penduduk di Desa Guntur Macan saling menjalin hubungan komunikasi sehingga interaksi sosial antara warga yang satu dengan yang lainnya juga sangat kuat. Hal ini juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan tepat tinggal bagi warga masyarakat Desa Guntur Macan.
d. Pendapatan sangat erat kaitannya dengan pekerjaan atau mata pencaharian. Masyarakat Desa Guntur Macan yang mayoritas pekerjaan mereka adalah petani memperoleh pendapatan rata-rata per bulan sangat pas-pasan dan tidak pasti jumlahnya. Pendapatan setiap bulan mereka sangat jarang dapat ditabung untuk membeli tanah ataupun rumah di lokasi yang lebih aman.

Hasil wawancara tersebut dikolaborasikan dengan pemetaan kawasan permukiman di Desa Guntur Macan yang dapat dilihat pada peta berikut. Dalam peta tersebut pola permukiman teridentifikasi membentuk **POLA MENYEBAR**. Jika diperhatikan pola menyebar ini terbentuk karena pada semua tempat terdapat kawasan permukiman baik yang berbentuk linear mengikuti jalan ataupun yang bebentuk *cluster* (mengelempok) dan adapula permukiman-permukiman yang terpisah antara satu dengan lainnya. Pola *cluster* terbentuk pada rumah-rumah penduduk berkelompok-kelompok yang saling berdekatan dengan kerabat meraka. Selain membentuk *cluster* terdapat juga pola memanjang atau *linear*. Pola *cluster* ini terbentuk karena masyarakat atau penduduk tinggal saling berdekatan satu dengan yang lain membentuk kelompok-kelompok permukiman Pola linear ini terbentuk dimana mereka mengikuti jaringan jalan dalam membangun rumah terutama masyarakat yang berada di Dusun Poan Utara dan Dusun Poan Selatan. Kondisi ini didukung oleh hanya ada satu jalan akses yang menuju ke kedua dusun tersebut. sedangkan, untuk pola-pola *cluster* berada pada kawasan permukiman yang berada di kawasan yang relatif datar.



Sumber;: Data Olahan, 2017

Gambar 3. Peta pola Permukiman

Selain menggunakan pemetaan di atas, yaitu memetakan rumah-rumah di Desa Guntur Macan kemudian dilihat pola permukiman yang terbentuk pada peta yang dibuat, analisis lainnya menggunakan analisis tetangga terdekat untuk melihat pola sebaran yang terbentuk.

Tabel 1 Pengukuran Jarak Antara Titik Permukiman Terdekat

No	Titik Ukur	Jarak Garis (Km)
1.	1-2	0.984
2.	2-3	0.404
3.	3-4	0.337
4.	4-5	0.689
5.	5-6	0.343
6.	6-8	0.341
7.	7-8	0.332
8.	8-9	0.303
9.	10-12	0.447
10.	11-10	0.527
	Jumlah Jarak	**4.707**

Sumber : Hasil Perhitungan ArcGis, 2017

Maka nila Ju (nilai rata-rata titik tetangga terdekat) adalah : 0.47
Untuk memperoleh jarak rata-rata yang diperoleh andai kata semua titik memiliki pola acak (Jh) menggunakan rumus :

$$Jh = \frac{1}{2\sqrt{p}}$$

P : Kepadatan titik dalam kilometer persegi
Untuk memperoleh nilai P (kepadatan titik dalam kilometer persegi menggunakan rumus :

$$P = \frac{\sum n}{L}$$

Dimana :
n = jumlah titik (12 titik kawasan permukiman)
L = luas wilayah Desa Guntur Macan (3,495 km2)

$$P = \frac{12}{3.495}$$

$P = 3.43$, maka

$$Jh = \frac{1}{2\sqrt{3.43}}$$

$$Jh = 0.27$$

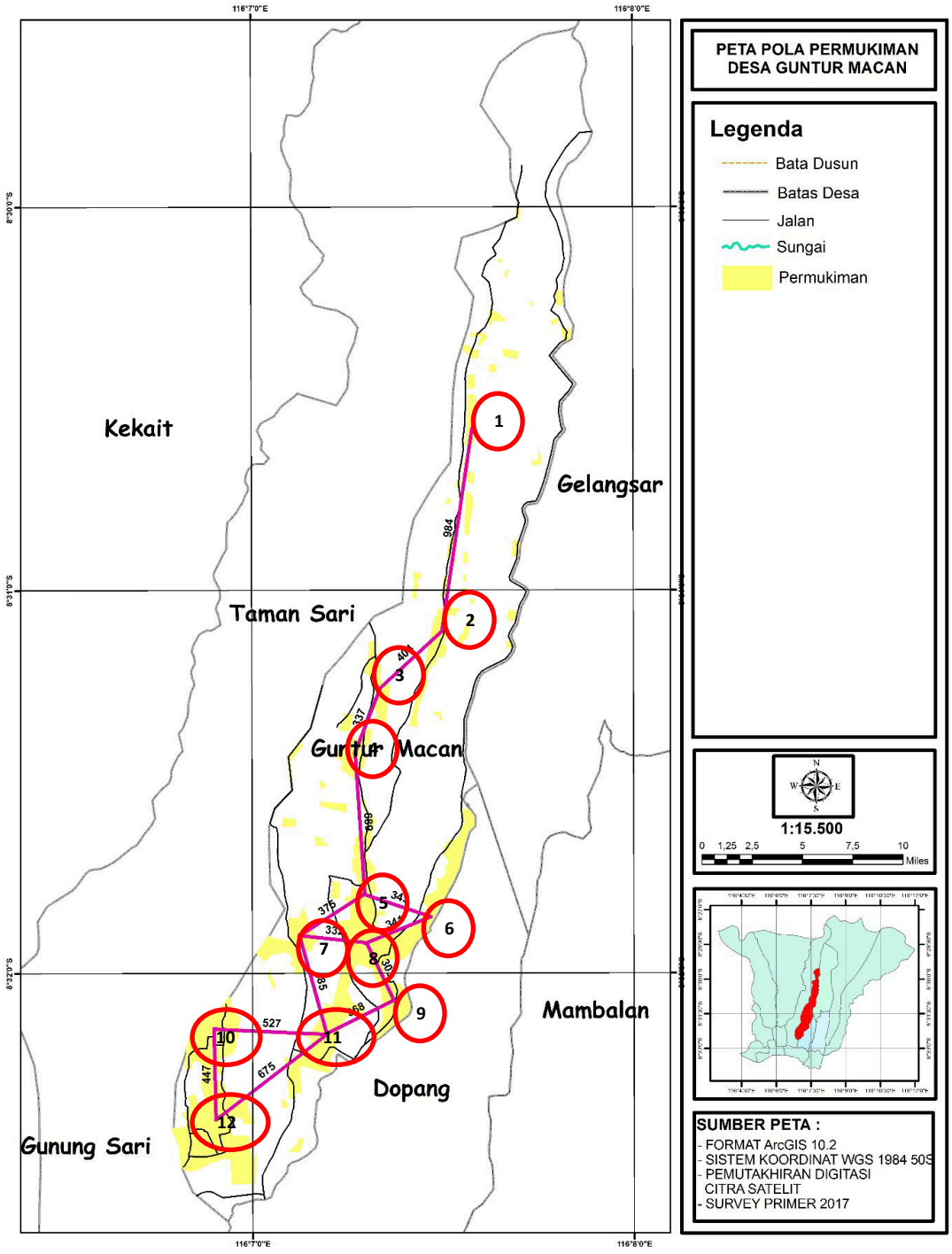
Maka nilai T untuk mengetahui nilai indeks penyebaran tetangga terdekat di Desa Guntur Macan menggunakan rumus :

$$T = \frac{Ju}{Jh}$$

$$T = \frac{0.47}{0.27}$$

$$T = 1.74$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka didapat nilai T = 1,74 yang artinya persebaran rumah di Desa Guntur Macan memiliki **POLA TERSEBAR MERATA** (***DISPERED PATTERN***). Pola permukiman tersebar merata biasanya dipengaruhi oleh topografi lahan yang memiliki kecenderungan daerah dataran tinggi, dimana penduduk mencari lahan untuk mendirikan permukiman pada kawasan yang tidak terjal, morfologi rata dan relatif aman.



Sumber;: Data Olahan, 2017

Gambar 4. Peta Pola Sebaran Kegiatan.

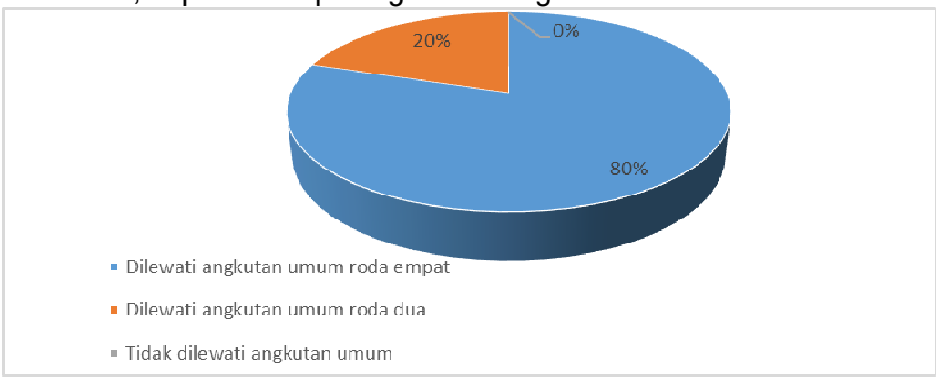
C. Analisis Faktor Bermukim Pada Kawasan Rawan Bencana Longsor

Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penduduk ataupun masyarakat di Desa Guntur Macan bermukim di kawasan rawan longsor maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab bermukim. Dengan menggunakan analisis skoring maka dapat dilihat variabel bermukim yang dominan mempengaruhi masyarakat Desa Guntur Macan bertahan bermukim di kawasan tersebut. Adapun variabel bermukiman yang digunakan, yaitu :

a. Transportasi

Transportasi merupakan aspek penting dalam bermukim. Semakin mudah suatu kawasan di akses maka perkembangan permukiman di kawasan tersebut juga akan semakin cepat. Namun dilihat dari aspek transportasi masih ada kawasan di Desa Guntur Macan yang belum dapat diakses oleh kendaraan umum roda 4 (empat). Berdasarkan hasil quisioner bagaimana pengaruh aksesibilitas terutama kemudahan transportasi kendaraan terhadap tempat bermukim, sebanyak 20% responden menjawab lokasi tempat mereka tinggal hanya dilalui oleh kendaraan umum roda 2 (dua) yang berupa ojek. Kendaraan roda 4 tidak dapat mengakses tempat tersebut karena medan yang terlalu curam dan kondisi jalan yang sempit dan rusak.

Untuk jawaban responden terhadap aspek transportasi yang mempengaruhi lokasi bermukim, dapat dilihat pada gambar diagram berikut.

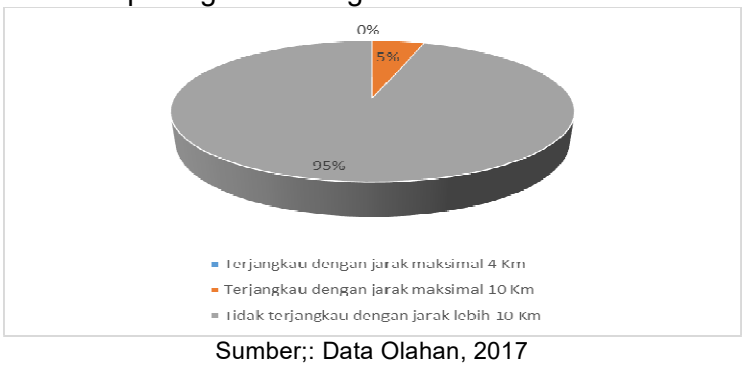


Sumber;: Data Olahan, 2017

Gambar 5. Persentase Jawaban Responden Untuk Aspek Transportasi

b. Jarak Lokasi dengan Pusat Kota/Pusat Kegiatan

Jarak lokasi dengan pusat kota atau pusat kegiatan dilihat dari jarak Desa Guntur Macan dengan Kota Mataram. Hal ini disebabkan karena jarak ke pusat Kota Mataram lebih dekat dibandingkan dengan jarak Desa Guntur Macan ke Gerung (ibukota Kabupaten Lombok Barat). Jika melihat peta jarak tempuh dari Desa Guntur Macan ke Kota Mataram berjarak ± 10 km, sedangkan jarak Desa Guntur Macan ke Kota Gerung ± 24 km. Pusat kegiatan yang terdekat dengan Desa Guntur Macan adalah Pasar Gunungsari yang berjarak ± 4 km. Berdasarkan hasil quisioner bagaimana pengaruh pusat kegiatan/pusat kota terhadap lokasi bermukim dapat dilihat pada gambar diagram berikut



Sumber;: Data Olahan, 2017

Gambar 6. Persentase Jawaban Responden Untuk Aspek Jarak Ke Pusat Kota

c. Kebisingan

Dalam pemilihan tempat tinggal salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor kenyamanan dari gangguan kebisingan. Sumber kebisingan di Desa Guntur Macan berasal dari kendaraan dan dari aktivitas menebang kayu.

Berdasarkan hasil wawancara aktivitas ini tidak menggangu kenyamanan tinggal masyarakat di Desa Guntur Macan. Kondisi ini didukung pula oleh lokasi desa yang berjarak cukup jauh dari pusat keramaian atau kegiatan. Untuk lebih jelasnya jawaban responden terhadap aspek kebisingan yang mampu mempengaruhi pemilihan lokasi bermukim di Desa Guntur Macan dapat dilihat pada gambar diagram berikut



Sumber;: Data Olahan, 2017

Gambar 7. Persentase Jawaban Responden Untuk Kebisingan

d. Polusi

Polusi udara juga merupakan salah satu faktor kenyamanan yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam memilih tempat tinggal. Polusi udara di Desa Guntur Macan tidak ada yang sampai menggangu kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil quisioner pengaruh polusi terhadap pemilihan tempat bermukim dapat dilihat pada gambar diagram berikut.



Sumber;: Data Olahan, 2017

Gambar 8. Persentase Jawaban Responden Untuk Polusi

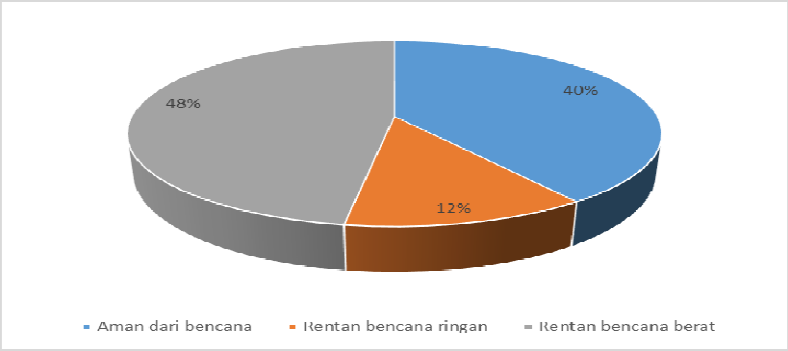
e. Kenyamanan

Kondisi kenyamanan dan aman dari bencana merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan bermukim. Pada saat penduduk merasa aman dan nyaman untuk menempati suatu kawasan maka penduduk akan betah untuk bertahan hidup di kawasan tersebut, namun sebaliknya jika penduduk merasa keamanan dan kenyamanan mereka terganggu pasti mereka akan memilih lokasi lain sebagai tempat tinggal mereka. Namun kondisi ini tidak berlaku bagi masyarakat di Desa Guntur Macan karena meskipun kawasan tersebut rentan terhadap bencana longsor masyarakat masih tetap bertahan

untuk tinggal dan hidup di desa tersebut. Berdasarkan hasil quisioner 40% masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal ditempat tersebut, dan sisanya 60% merasa mereka tinggal di lokasi yang kurang aman dan nyaman dari datangnya bencana longsor.

Berdasarkan tambahan informasi pada saat wawancara meskipun kawasan tersebut rawan dan rentan dari bencana, namun mereka merasa aman dan nyaman tinggal disana karena beberapa faktor lain, yaitu :

1. Masyarakat sudah tinggal turun temurun di kawasan tersebut
2. Masyarakat sudah merasa nyaman karena adanya ikatan emosional yang tinggi antara satu warga dengan warga lainnya
3. Masyarakat hanya memiliki lahan di lokasi tersebut sehingga mau tidak mau tetap memilih tinggal di tempat tersebut.

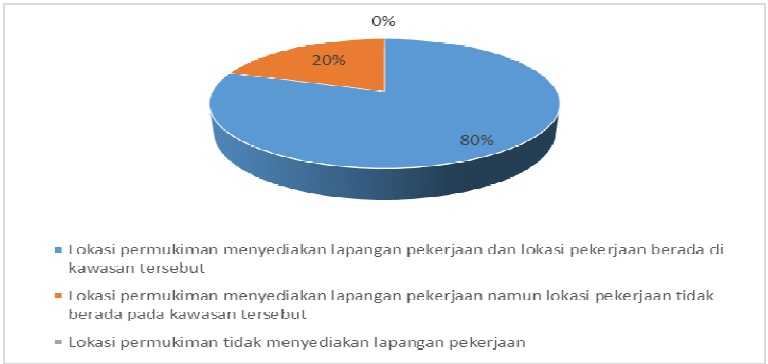


Sumber;: Data Olahan, 2017

Gambar 9. Persentase Jawaban Responden Untuk Aspek Kenyamanan

f. Peluang Kerja

Mata pencaharian sebagian besar penduduk di Desa Guntur Macan adalah sebagai petani, berkebun, peternak dan buruh tani. Jumlah penduduk yang memiliki lokasi mata pencaharian di Desa Guntur Macan sebanyak 79,46%, dimana tempat mereka bercocok tanam sangat dekat dengan tempat tinggal mereka. Kondisi tersebutlah yang mejadikan mereka untuk tetap bertahan tinggal di tempat tersebut. Berdasarkan hasil quisioner pengaruh peluang kerja terhadap pemilihan tempat bermukim dapat dilihat pada gambar diagram berikut.



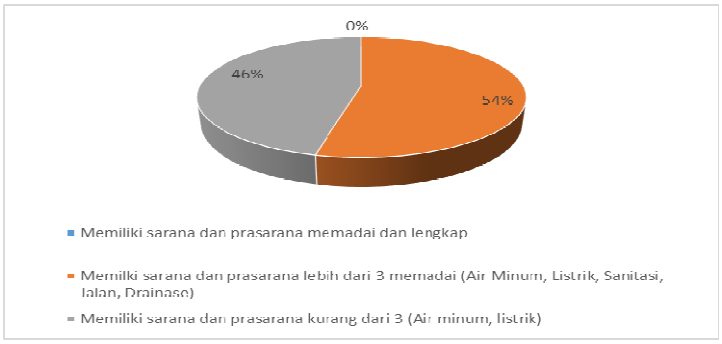
Gambar 10. Persentase Jawaban Responden Untuk Aspek Peluang Kerja

Sumber;: Data Olahan, 2017

g. Tingkat Pelayanan Fasilitas Sosial

Tingkat pelayanan fasilitas sosial yang dimaksud dalam variabel pemilihan lokasi bermukim terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi bermukim. Sarana prasarana permukiman antara lain : pendidikan, peribadatan, kesehatan, ruang terbuka hijau, perdangan dan jasa, jaringan air bersih, jaringan

jalan, sanitasi, jaringan listrik, jaringan persampahan, jaringan limbah dan jaringan drainase. Berdasarkan hasil quisioner pengaruh aspek tingkat pelayan terhadap pemilihan tempat bermukim dapat dilihat pada tabel berikut



Sumber;: Data Olahan, 2017.

Gambar 11. Persentase Jawaban Responden Untuk Aspek Peluang Kerja

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitan ini adalah :

a. Pola permukiman berdasarkan pemetaan memiliki bentuk cluster, linear dan menyebar pada titik yang berbeda sedangkan hasil perhitungan tetangga terdekat memiliki nilai T = 1,74 yang berarti memiliki pola tersebar merata (*Dispared Pattern*).
b. Faktor bermukim masyarakat Desa Guntur Macan menempati daerah rawan bencana yang sangat berpengaruh antara lain : aspek transportasi, kebisingan dan aspek polusi. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan lokasi bermukim, yaitu aman dari bencana. Faktor yang tidak berpengaruh yaitu : sarana dan prasarana dan jarak ke pusat kota.

DAFTAR PUSTAKA

Armela Tiara. 2015. Pengaruh Kondisi Permukiman terhadap Preferensi Bermukim Buruh Industri di Permukiman Tiban Kampung. *AGORA, Jurnal Arsitektur* Volume 15, Nomor 1 : 36-51

Bachry, A. A. S,. 2015. *Faktor Bermukim Masyarakat Terhadap Pola Persebaran Permukiman di Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Magetan*. Skripsi. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Bintarto, R, Hadisumarno S. 1982. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES

Muta'ali Lutfi, 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Pasundanie, Adhinda P.A. 2009. *Pola Permukiman Eks Karyawan BPM di Tarakan*. Tesis. Malang : Universitas Brawijaya

Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Di Pesisir Kabupaten Tuban Dalam Mewujudkan Permukiman Yang Berkelanjutan

Dr. Ir. Eko Budi Santoso[1], Lic.rer.reg, Arwi Yudhi Koswara, ST, MT[1]., Ketut Dewi Martha Erli, ST., MT[1]., Belinda Ulfa Aulia, ST., M.Sc[1]., Ema Umilia, ST., MT[1]., Sardjito, MT[1]

[1]Departemen PWK FADP ITS Surabaya

ABSTRAK

Pengembangan permukiman membutuhkan dukungan lingkungan agar tetap bisa ditinggali warganya. Pengembangan Kampung Kumuh di Pesisir Utara di Kecamatan Kota Tuban dilihat masih fokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan, drainase dan mck. Berdasarkan kondisi diatas diperlukan penelitian Strategi Penyediaan Permukiman yang Berkelanjutan dan Liveable di Kampung King King Kecamatan Kota Tuban. Konsep berkelanjutan dalam penelitian ini bertujuan meyediakan infrastruktut hijau, penyediaan sempadan pantai sebagai ruang konservasi yang bernilai wisata, dan pemanfaatan teknologi untuk pemenuhan permukiman yang liveable.(Hildur, 2002). Tahapan penelitian ini bertahap mulai indentifikasi potensi dan permasalahan penyediaan permukiman di kondisi eksisting Kampung Kumuh Kota Tuban memanfaatkan social mapping survey primer, faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyediaan permukiman yang berkelanjutan dan liveable berdasarkan persepsi stakeholder dengan analisis delphi, dan arahan pengembangan permukiman Kampung King King dengan analisis diskripsi.

Potensi Kampung Kumuh di Kelurahan King King Kota Tuban utamanya sebagai pariwisata, pemukiman perkotaan, pelabuhan tradisional, perikanan tangkap, dan infrastruktur umum, serta zona konservasi pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya. Hasil social mapping menunjukan kondisi lingkungan kurang tertata, penduduk ada tradisi nelayan, penduduk dominan bekerja di sektor informal, dan potensi wilayah ini dekat dengan daya tarik wisata religi Sunan Bonang Tuban. Hasil diskusi dengan akademisi, pemerintah dan masyarakat menyepakati perlunya memenuhi basicneeds sebagai solusi keberlanjutan permukiman. Keberlanjutan secara fisik memanfaatkan program kota tanpa kumuh (kotaku) yang dilaksanakan 2016. Keberlanjutan secara ekonomi diarahkan mengembangkan wisata kampung king king sebagai alternatif bekerja sebagai nelayan, dan keberlanjutan secara sosial dikembangkan dengan adanya kelompok sadar wisata. Sedangkan untuk mencapai liveable kampung memerlukan peningkatan penyediaan air bersih, jalan lingkungan dan fasilitas ruang terbuka hijau. Selain itu secara mikro diperlukan bedah rumah yang dinilai kurang layak huni di Kampung Kumuh Kecamatan Kota Tuban. Terakhir terkait dengan perubahan iklim, diperlukan pengembangan permukiman yang mengadopsi tahan bencana angin topan berupa tahan terhadap beban angkat dan tahan abrasi pantai berupa pemilihan bahan bangunan yang tahan abrasi.

Kata kunci : Permukiman kumuh, berkelanjutan, liveable

I. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya kawasan pesisir Kabupaten Tuban yang merupakan lokasi strategis di jalur PANTURA (Pantai Utara) dimana pada kawasan pesisir tersebut berkembang investasi dan kegiatan industri akan menarik arus urbanisasi penduduk ke wilayah pesisir di Kabupaten Tuban tersebut. Tingginya jumlah penduduk yang melakukan perpindahan tersebut memunculkan permasalahan baru mengenai kebutuhan lahan tempat tinggal bagi masyarakat pendatang. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, maka fenoma yang terjadi adalah munculnya kantong-katong

permukiman kumuh.Hasil penelitian sementara didapatkan rona kawasan permukiman kumuh di pesisir Kabupaten Tuban berada di Kelurahan Kingking. Dari hasil survei lapangan diketahui permasalahan utama kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Kingking tersebut adalah terkait penyediaan air minum, ketersediaan saluran drainase, dan kondisi proteksi kebakaran. Adapun berdasar skoring didapatkan kawasan permukiman prioritas di Kelurahan Kingking adalah pada RW 01.

Pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir yang sedang berjalan tidak lagi memperhatikan aspek keberlanjutan. Permasalahan utama yang terjadi kawasan pesisir Kabupaten Tuban adalah kondisi permukiman masyarakat pesisir yang kumuh dan tidak tertata. Kawasan pesisir sendiri berkaitan erat dengan permukiman para pekerja di kawasan industri dimana di sepanjang jalur PANTURA (Pantai Utara) telah berkembang banyak investasi pengembangan industri.Batasan permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kondisi tingkat kekumuhan di pesisir Kabupaten Tuban serta bagaimanakah langkah preventif yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan kawasan kumuh tersebut.

II. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data rimer dan sekunder.

A. Metode Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum kawasan pesisir Kabupaten Tuban serta persepsi dan preferensi *stakeholder*s tentang peningkatan kualitas permukiman kumuh di pesisir Kabupaten Tuban.Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan kuesioner.Kuisioner yang digunakan berupa tanya jawab semiterstruktur. Kuesioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yangalternatif jawabannya telah disiapkan, kemudian jawaban dari responden tersebut akan dieksplorasi lebih dalam untuk mendapatkan data yang fakta maupun opini responden terhadap pertanyaan yang diberikan. Pengumpulan data primer juga dilakukan melalui diskusi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait potensi dan permasalahan di lapangan serta strategi yang diusulkan.

B. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan survei literatur.Studi literatur dilakukan dengan meninjau isi dari literatur yang bersangkutan dengan tema penelitian ini, di antaranya berupa buku, hasil penelitian, dokumen rencana tata ruang (RTRW, RDTR, dan lainnya), peraturan perundang-undangan, serta artikel di internet dan media massa.

C. Teknik Analisis

Dalam menjawab tujuan penelitian diperlukan teknik analisis yang tepat untuk mengolah data dan informasi yang telah diperoleh. Adapun penjelasan metode analisis tiap sasaran adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Metode Analisis

No.	Sasaran	Tujuan Analisis	Input Data	Alat Analisis	Output
1	Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman serta menganlisis	Mengetahui kondisi kekumuhan di pesisir Kabupaten Tuban serta rangking kawasan prioritas	- survei Hasil	Analisis Skoring	Tingkta kekumuhan dan rangking kawasan prioritas

	kawasan kumuh prioritas					
2	Menggali potensi dan permasalahan permukiman kumuh	Mengidentifikasi potensi (kekuatan, peluang) dan permasalahan (kelemahan, ancaman) dalam penyediaan permukiman yang berkelanjutan di pesisir Kabupaten Tuban	- survei - *stakeholders*	Hasil persepsi	Analisis SWOT	Matriks Faktor Strategi (IFAS-EFAS)
		Menghitung rating dan bobot	Matriks Faktor Strategi (IFAS-EFAS)			Matriks SWOT
3.	Merumuskan strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di pesisir Kabupaten Tuban	Mengintepretasikan matriks urutan kinerja hasil perhitungan analisis SWOT dan melakukan prioritasi	Matriks SWOT		Deskripsi	Strategi prioritas peningkatan kawasan permukiman kumuh di pesisir Kabupaten Tuban

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel penelitian merupakan faktor atau hal yang diteliti dan memiliki ukuran, baik ukuran yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian akan mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

Tabel 2. Variabel Penelitian

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
A	**Identifikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)**		
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	• Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL meliputi pengaturan blok bangunan, ketinggian, dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
		Tingkat Kepadatan	• KDB melebihi ketentuan RDTR

		Bangunan	dan/atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu : - Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥250 unit/Ha - Untuk kota sedang dan kota kecil ≥200 unit/Ha
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • Keselamatan bangunan gedung (BG) • Kenyamanan BG dan kemudahan BG
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2x setahun
		Ketidaktersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan permukiman, yaitu saluran tersie dan/atau saluran lokal
		Ketidakterhubungan dengan Sistem	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak

		Drainase Perkotaan	dapat mengalir dan menimbulkan genangan
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Terknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/deomestik, komunal maupun terpusat
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana • Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik • Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu • Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga • Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R (*Reduce, Recycle, and Reuse*) pada skala lingkungan • Gerobak sampak dan/atau truk sampah, dan • Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut • Perwadahan dan pemilahan domestik • Pengumpulan lingkungan • Pengangkutan lingkungan • Pengolahan lingkungan
		Tidak Terpeliharanya	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana

		Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik pemeliharaan rutin dan/atau pemeliharaan berkala
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi yaitu • Pasokan air • Jalan lingkungan • Sarana komunikasi • Data sistem proteksi kebakaran lingkungan, dan • Bangunan pos kebakaran
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi yaitu • Alat Pemadam Api Ringan (APAR) • Mobil pompa • Mobil tangga sesuai kebutuhan, dan • Peralatan pendukung lainnya
B	**Identifikasi Pertimbangan Lain**		
8	Pertimbangan Lain	Nilai strategis lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada • Fungsi strategis kabupaten/kota, atau • Bukan fungsi strategis kabupaten/kota
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi • Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150jiwa/ha • Sedang yaitu kepadatan penduduk di bawah 151-200jiwa/ha • Tinggi yaitu kepadatan penduduk di bawah 201-400jiwa/ha • Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di bawah di atas 400jiwa/ha
		Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa • Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat
C	**Identifikasi Legalitas Lahan**		
9	Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa Kepemilikan sendiri dengan bukti dokumen

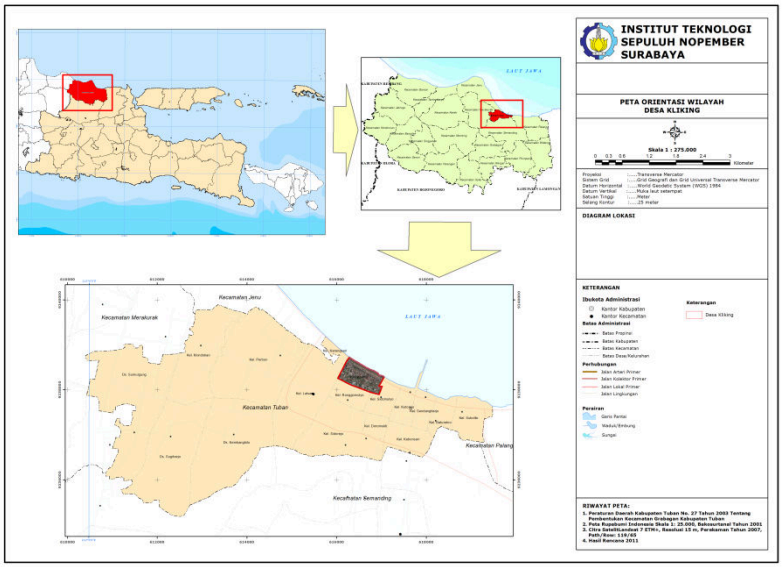
		sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah, atau Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemiliki tanah dengan pihak lain
	Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK)

Sebagai awalan dalam mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh di pesisir Kabupaten Tuban, dilakukan kegiatan diskusi dan pemetaan awal bersama dengan pihak Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tuban. Dari hasil diskusi didapatkan kesepakatan fokus lokasi permukiman kumuh di pesisir Kabupaten Tuban adalah pada Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban.

Kelurahan Kingking sendiri merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Tuban yang merupakan bagian dari Kabupaten Tuban. Kelurahan Kingking memiliki luas wilayah 34,25 Hektar yang terdiri atas 6 RW (Rukun Warga) dan 13 RT (Rukun Tetangga). Adapun jumlah penduduk Kelurahan Kingking Tahun 2015 adalah sebesar 4.679 Jiwa.

Batas administratif Kelurahan Kingking sendiri adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Kelurahan Sidomulyo
Sebelah Selatan : Kelurahan Ronggomulyo
Sebelah Barat : Kelurahan Karangsari dan Kelurahan Latsari



Gambar 1.Peta Orientasi Wilayah Desa Kliking

Secara umum, gambaran kondisi kawasan permukiman kumuh pada masing-masing RW di Kelurahan Kingking dijabarkan sebagai berikut:

Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di RW 01

RW 01 Kelurahan Kingking terdiri atas RT 01 dan RT 02. Secara garis besar, kondisi kawasan permukiman kumuh di RW 01 Kelurahan Kingking adalah sebagai berikut:

- Kondisi Kependudukan
  - Jumlah penduduk = 476 Jiwa
  - Jumlah KK = 119 KK
- Kondisi Bangunan Hunian
  - Jumlah rumah = 119 Unit
  - Jumlah rumah tidak teratur = 59 Unit
  - Jumlah rumah tidak sesuai standar = 29 Unit
- Kondisi Jalan Lingkungan
  - Panjang jalan >1,5 meter = 1.000 meter
  - Panjang jalan <1,5 meter = 900 meter
  - Panjang jalan dalam kondisi rusak = 100 meter
  - Panjang jalan yang tidak dilengkapi saluran = 100 meter
- Kondisi Drainase Lingkungan
  - Panjang saluran drainase = 900 meter
  - Panjang drainase yang rusak = 900 meter
- Kondisi Pelayanan Air Minum
  - Jumlah KK yang tidak terlayani sarana air minum yang layak = 82 KK, dimana pada RW 01 mayoritas belum terlayani oleh prasarana air untuk minum, mandi, dan cuci baik perpipaan maupun non perpipaan terlindungi yang layak
  - Jumlah KK yang tidak terpenuhi kebutuhan air minimum = 82 KK
- Kondisi Pengolahan Air Limbah
  - Jumlah rumah yang tidak memiliki jamban/akses umum = 4 Unit
  - Jumlah rumah dengan jamban yang tidak sesuai standar = 22 Unit
- Kondisi Pengelolaan Persampahan : Pengelolaan sampah domestik rumah tangga di RW 01 telah baik dimana sampah tersebut terangkut rutin oleh petugas untuk dibawa ke TPS/TPA yang ada.
- Kondisi Proteksi Kebakaran : Belum terdapat sarana pengaman bahaya kebakaran, dan beberapa lokasi tidak mendukung mobil PMK untuk dapat melintas (akibat jalan lingkungan <1,5 meter)
- Kondisi Legalitas Lahan dan Bangunan : Mayoritas sudah memiliki SHM/HGB/ Surat lainnya yang diakui Pemerintah.

Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di RW 02

RW 02 Kelurahan Kingking terdiri atas RT 01, RT 02, dan RT 03. Secara garis besar, kondisi kawasan permukiman kumuh di RW 02 Kelurahan Kingking adalah sebagai berikut:

- Kondisi Kependudukan
  - Jumlah penduduk = 952 Jiwa
  - Jumlah KK = 238 KK
- Kondisi Bangunan Hunian
  - Jumlah rumah = 238 Unit
  - Jumlah rumah tidak teratur = 140 Unit
  - Jumlah rumah tidak sesuai standar = 57 Unit
- Kondisi Jalan Lingkungan
  - Panjang jalan >1,5 meter = 300 meter
  - Panjang jalan <1,5 meter = 246 meter
  - Panjang jalan dalam kondisi rusak = 0 meter
  - Panjang jalan yang tidak dilengkapi saluran = 0 meter

- Kondisi Drainase Lingkungan
  - Panjang saluran drainase = 670 meter
  - Panjang drainase yang rusak = 150 meter
- Kondisi Pelayanan Air Minum
  - Jumlah KK yang tidak terlayani sarana air minum yang layak = 187 KK
  - Jumlah KK yang terpenuhi kebutuhan air minimal = 187 KK
- Kondisi Pengolahan Air Limbah
  - Jumlah rumah yang tidak memiliki jamban/akses umum = 25 Unit
  - Jumlah rumah dengan jamban yang tidak sesuai standar = 35 Unit
- Kondisi Pengelolaan Persampahan : Pengelolaan sampah domestik rumah tangga di RW 02 telah baik dimana sampah tersebut terangkut rutin oleh petugas untuk dibawa ke TPS/TPA yang ada.
- Kondisi Proteksi Kebakaran : Belum terdapat sarana pengaman bahaya kebakaran, dan beberapa lokasi tidak mendukung mobil PMK untuk dapat melintas (akibat jalan lingkungan <1,5 meter)
- Kondisi Legalitas Lahan dan Bangunan : Mayoritas sudah memiliki SHM/HGB/ Surat lainnya yang diakui Pemerintah.

Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di RW 03

RW 03 Kelurahan Kingking terdiri atas RT 01 dan RT 02. Secara garis besar, kondisi kawasan permukiman kumuh di RW 03 Kelurahan Kingking adalah sebagai berikut:

- Kondisi Kependudukan
  - Jumlah penduduk = 632 Jiwa
  - Jumlah KK = 158 KK
- Kondisi Bangunan Hunian
  - Jumlah rumah = 158 Unit
  - Jumlah rumah tidak teratur = 95 Unit
  - Jumlah rumah tidak sesuai standar = 15 Unit
- Kondisi Jalan Lingkungan
  - Panjang jalan >1,5 meter = 200 meter
  - Panjang jalan <1,5 meter = 960 meter
  - Panjang jalan dalam kondisi rusak = 0 meter
  - Panjang jalan yang tidak dilengkapi saluran = 150 meter
  - Jaringan jalan pada RW 03 didominasi oleh gang kecil dengan lebar jalan ≤1,5 meter. Sehingga dari segi aksesibilitas kurang layak karena hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki.
- Kondisi Drainase Lingkungan
  - Panjang saluran drainase = 520 meter
  - Panjang drainase yang rusak = 100 meter
- Kondisi Pelayanan Air Minum
  - Jumlah KK yang tidak terlayani sarana air minum yang layak = 158 KK
  - Jumlah KK yang terpenuhi kebutuhan air minimal = 158 KK
- Kondisi Pengolahan Air Limbah
  - Jumlah rumah yang tidak memiliki jamban/akses umum = 10 Unit
  - Jumlah rumah dengan jamban yang tidak sesuai standar = 10 Unit
- Kondisi Pengelolaan Persampahan : Pengelolaan sampah domestik rumah tangga di RW 03 telah baik dimana sampah tersebut terangkut rutin oleh petugas untuk dibawa ke TPS/TPA yang ada.
- Kondisi Proteksi Kebakaran : Belum terdapat sarana pengaman bahaya kebakaran, dan beberapa lokasi tidak mendukung mobil PMK untuk dapat melintas (akibat jalan lingkungan <1,5 meter)

- Kondisi Legalitas Lahan dan Bangunan : Beberapa warga di RT 01/RW 03 belum memiliki SHM/HGB/Surat lainnya yang diakui Pemerintah.

Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di RW 04

RW 04 Kelurahan Kingking terdiri atas RT 01 dan RT 02. Secara garis besar, kondisi kawasan permukiman kumuh di RW 04 Kelurahan Kingking adalah sebagai berikut:

- Kondisi Kependudukan
  - Jumlah penduduk = 492 Jiwa
  - Jumlah KK = 123 KK
- Kondisi Bangunan Hunian
  - Jumlah rumah = 123 Unit
  - Jumlah rumah tidak teratur = 81 Unit
  - Jumlah rumah tidak sesuai standar = 16 unit
- Kondisi Jalan Lingkungan
  - Panjang jalan >1,5 meter = 500 meter
  - Panjang jalan <1,5 meter = 500 meter
  - Panjang jalan dalam kondisi rusak = 0 meter
  - Panjang jalan yang tidak dilengkapi saluran = 300 meter
  - Jaringan jalan pada RT 01/RW 04 didominasi oleh gang kecil dengan lebar jalan ≤1,5 meter. Sehingga dari segi aksesibilitas kurang layak karena hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki.
- Kondisi Drainase Lingkungan
  - Panjang saluran drainase = 550 meter
  - Panjang drainase yang rusak = 100 meter
- Kondisi Pelayanan Air Minum
  - Jumlah KK yang tidak terlayani sarana air minum yang layak = 123 KK
  - Jumlah KK yang terpenuhi kebutuhan air minimal = 123 KK
- Kondisi Pengolahan Air Limbah
  - Jumlah rumah yang tidak memiliki jamban/akses umum = 1 Unit
  - Jumlah rumah dengan jamban yang tidak sesuai standar = 1 Unit
- Kondisi Pengelolaan Persampahan : Pengelolaan sampah domestik rumah tangga di RW 04 telah baik dimana sampah tersebut terangkut rutin oleh petugas untuk dibawa ke TPS/TPA yang ada.
- Kondisi Proteksi Kebakaran : Belum terdapat sarana pengaman bahaya kebakaran, dan beberapa lokasi tidak mendukung mobil PMK untuk dapat melintas (akibat jalan lingkungan <1,5 meter)
- Kondisi Legalitas Lahan dan Bangunan : Mayoritas sudah memiliki SHM/HGB/ Surat lainnya yang diakui Pemerintah.

Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di RW 05

RW 05 Kelurahan Kingking terdiri atas RT 01 dan RT 02. Secara garis besar, kondisi kawasan permukiman kumuh di RW 05 Kelurahan Kingking adalah sebagai berikut:

- Kondisi Kependudukan
  - Jumlah penduduk = 532 Jiwa
  - Jumlah KK = 133 KK
- Kondisi Bangunan Hunian
  - Jumlah rumah = 133 Unit
  - Jumlah rumah tidak teratur = 40 Unit
  - Jumlah rumah tidak sesuai standar = 8 Unit
- Kondisi Jalan Lingkungan

- Panjang jalan >1,5 meter = 2.950 meter
- Panjang jalan <1,5 meter = 100 meter
- Panjang jalan dalam kondisi rusak = 0 meter
- Panjang jalan yang tidak dilengkapi saluran = 750 meter

- Kondisi Drainase Lingkungan
  - Panjang saluran drainase = 2.200 meter
  - Panjang drainase yang rusak = 100 meter
- Kondisi Pelayanan Air Minum
  - Jumlah KK yang tidak terlayani sarana air minum yang layak = 50 KK
  - Jumlah KK yang terpenuhi kebutuhan air minimal = 50 KK
- Kondisi Pengolahan Air Limbah
  - Jumlah rumah yang tidak memiliki jamban/akses umum = 0 Unit
  - Jumlah rumah dengan jamban yang tidak sesuai standar = 0 Unit
- Kondisi Pengelolaan Persampahan : Pengelolaan sampah domestik rumah tangga di RW 05 telah baik dimana sampah tersebut terangkut rutin oleh petugas untuk dibawa ke TPS/TPA yang ada.
- Kondisi Proteksi Kebakaran : Belum terdapat sarana pengaman bahaya kebakaran, dan beberapa lokasi tidak mendukung mobil PMK untuk dapat melintas (akibat jalan lingkungan <1,5 meter)
- Kondisi Legalitas Lahan dan Bangunan : Mayoritas sudah memiliki SHM/HGB/ Surat lainnya yang diakui Pemerintah.

Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di RW 06

RW 06 Kelurahan Kingking terdiri atas RT 01 dan RT 02. Secara garis besar, kondisi kawasan permukiman kumuh di RW 06 Kelurahan Kingking adalah sebagai berikut:

- Kondisi Kependudukan
  - Jumlah penduduk = 504 Jiwa
  - Jumlah KK = 126 KK
- Kondisi Bangunan Hunian
  - Jumlah rumah = 126 Unit
  - Jumlah rumah tidak teratur = 85 Unit atau sebesar 67,5%, kondisi ini disebabkan oleh kondisi muka bangunan yang sebagian besar tidak menghadap langsung jalan dengan lebar minimal 1,5 meter. Kondisi kawasan permukiman seperti yang di tampilakan di atas dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat sekitar.
  - Jumlah rumah tidak sesuai standar = 8 Unit
- Kondisi Jalan Lingkungan
  - Panjang jalan >1,5 meter = 900 meter
  - Panjang jalan <1,5 meter = 950 meter
  - Panjang jalan dalam kondisi rusak = 0 meter
  - Panjang jalan yang tidak dilengkapi saluran = 200 meter
  - Jaringan jalan pada RT 01/RW 06 didominasi oleh gang kecil dengan lebar jalan $\leq$1,5 meter. Sehingga dari segi aksesibilitas kurang layak karena hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki.
- Kondisi Drainase Lingkungan
  - Panjang saluran drainase = 1.300 meter
  - Panjang drainase yang rusak = 400 meter
- Kondisi Pelayanan Air Minum
  - Jumlah KK yang tidak terlayani sarana air minum yang layak = 56 KK
  - Jumlah KK yang terpenuhi kebutuhan air minimal = 56 KK
- Kondisi Pengolahan Air Limbah
  - Jumlah rumah yang tidak memiliki jamban/akses umum = 0 Unit

- Jumlah rumah dengan jamban yang tidak sesuai standar = 2 Unit

- Kondisi Pengelolaan Persampahan : Pengelolaan sampah domestik rumah tangga di RW 06 telah baik dimana sampah tersebut terangkut rutin oleh petugas untuk dibawa ke TPS/TPA yang ada.
- Kondisi Proteksi Kebakaran : Belum terdapat sarana pengaman bahaya kebakaran, dan beberapa lokasi tidak mendukung mobil PMK untuk dapat melintas (akibat jalan lingkungan <1,5 meter).
- Kondisi Legalitas Lahan dan Bangunan : Mayoritas sudah memiliki SHM/HGB/ Surat lainnya yang diakui Pemerintah.

Berdasarkan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman kumuh prioritas diatas, maka didapatkan penilaian sementara permukiman kumuh prioritas di Kelurahan Kingking sebagai berikut:

Tabel 3.Penilaian Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas di Kelurahan Kingking

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PESISIR TUBAN					
				RW 01 Kel. Kingking	RW 02 Kel. Kingking	RW 03 Kel. Kingking	RW 04 Kel. Kingking	RW 05 Kel. Kingking	RW 06 Kel. Kingking
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN									
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	5	5	5	3	5
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	1	1	1	3	3
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1	1	1	1	1	1
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	1	1	1	1	1
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	1	1	1	1	1
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	5	5	5	1	1
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	5	5	5	1	1
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	1	1	1	1	1	1
		Ketidaktersediaan Drainase	Area tidak tersedia drainase lingkungan	1	1	1	1	1	1
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5	1	1	1	1	1
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan bau	5	1	1	1	1	1
		Kualitas Konstruksi Drainase	Area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	1	1	1	1	1
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Terknis	Area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standard teknis	1	1	1	5	1	1
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Area memiliki sarpras air limbah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1	1	1	5	1	1
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Area memiliki sarpras pengelolahan persampahan yang tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	1	1	1	1	1	1
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Area memiliki sistem persampahan yang tidak sesuai standar	1	1	1	1	1	1
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	1	1	1	1	1
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Area tidak memiliki prsarana proteksi kebakaran	5	3	3	3	3	3
		Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	5	5	5	5	5

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR DAN PARAMETER	LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PESISIR TUBAN					
				RW 01 Kel. Kingking	RW 02 Kel. Kingking	RW 03 Kel. Kingking	RW 04 Kel. Kingking	RW 05 Kel. Kingking	RW 06 Kel. Kingking
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN									
1	Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan lahan	Lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	+	+	+	+	+	+
		Kesesuaian RTR	Lokasi berada pada zona peruntukan peumahan atau permukiman sesuai dengan RTR	+	+	+	+	+	+
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAINNYA									
1	Pertimbangan Lain	Nilai strategis lokasi	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	5	5	1	1	1
		Kependudukan	Tingkat kepadatan penduduk pada lokasi	1	1	1	1	1	1
		Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau terpelihara	5	5	5	5	5	5
			NILAI KEKUMUHAN	53	37	37	40	29	31
			NILAI LEGALITAS LAHAN	0	0	0	0	0	0
			NILAI PERTIMBANGAN LAIN	11	11	11	7	7	7
			STATUS KEKUMUHAN	Kumuh Sedang	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan	Kumuh Ringan
			STATUS LEGALITAS LAHAN	Legal	Legal	Legal	Legal	Legal	Legal
			STATUS PERTIMBANGAN LAIN	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
			KLASIFIKASI	B1	C1	C1	C3	C3	C3
SKALA PRIORITAS PENANGANAN				**Prioritas 2**	**Prioritas 3**	**Prioritas 3**	**Prioritas 6**	**Prioritas 6**	**Prioritas 6**

Sumber: Hasil Analisa, 2017

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah mayoritas kondisi kekumuhan dari segi aspek fisik di Kelurahan Kingking adalah masuk dalam kategori kumuh sedang dan ringan, dimana permasalahan utama yang menonjol adalah pada penyediaan air minum, ketersediaan saluran drainase, dan kondisi proteksi kebakaran. Adapun kawasan permukiman kumuh prioritas berdasar hasil skoring berada pada RW 01 Kelurahan Kingking. Akan dilakukan peninjauan lebih detail terhadap kebutuhan penanganan pada RW 01 khususnya dan pada RW lainnya agar didapatkan rumusan strategi penanganan yang tepat guna.

Potensi Kampung Kumuh di Kelurahan King King Kota Tuban utamanya sebagai pariwisata, pelabuhan tradisional, perikanan tangkap, dan zona konservasi pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya. Hasil social mapping menunjukan kondisi lingkungan kurang tertata, penduduk ada tradisi nelayan, penduduk dominan bekerja di sektor informal, dan potensi wilayah ini dekat dengan daya tarik wisata religi Sunan Bonang Tuban. Hasil diskusi dengan akademisi, pemerintah dan masyarakat menyepakati perlunya memenuhi basicneeds sebagai solusi keberlanjutan permukiman, menjawab kekurangan penyediaan air minum, ketersediaan saluran drainase. Keberlanjutan secara ekonomi diarahkan mengembangkan wisata kampung sebagai alternatif bekerja sebagai nelayan, dan keberlanjutan secara sosial dikembangkan dengan adanya kelompok sadar wisata. Sedangkan untuk mencapai liveable kampung memerlukan jalan lingkungan dan fasilitas ruang terbuka hijau. Selain itu secara mikro diperlukan bedah rumah yang dinilai kurang layak huni di Kampung Kumuh Kecamatan Kota Tuban. Terakhir terkait dengan perubahan iklim dan kondisi proteksi kebakaran diperlukan pengembangan permukiman yang mengadopsi tahan bencana angin topan berupa tahan terhadap beban angkat dan tahan abrasi pantai berupa pemilihan bahan bangunan yang tahan abrasi dan tanggap kebakaran.

Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Wisata Gunung Salak Endah (GSE) Kabupaten Bogor

Janthy Trilusianthy Hidayat[1] ,Anton Apriansah[1]

[1]Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pakuan, Bogor.
Email: janthyhidayat@unpak.ac.id

ABSTRAK

Sektor pariwisata merupakan sektor pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan wilayah. Kebijakan perwilayahan pariwisata Kabupaten Bogor terdiri dari zona wisata Bogor Tengah, Bogor Barat dan Bogor Timur. Pariwisata di Kabupaten Bogor identik dengan kawasan Puncak (zona wisata Bogor Tengah), saat ini perkembanganya sudah maju, sedangkan kedua zona wisata lainnya masih lamban. Kawasan Wisata Gunung Salak Endah (GSE) berada di zona wisata Bogor Barat merupakan kawasan alternatif pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor namun masih lambat perkembangannya. Tujuan penelitian adalah identifikasi potensi dan kendala pengembangan serta identitifikasi persepsi masyarakat dan wisatawan di kawasan wisata GSE. Metode penelitian meliputi metode indeks persepsi dan metode deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap obyek wisata yang akan dikembangkan memiliki rata-rata indeks persepsi 3,5 dimana persepsi masyarakat dan wisatawan baik dan sangat baik sehingga pengembangan obyek wisata alam di kawasan wisata GSE dapat dilakukan, Kendala pada setiap obyek wisata yaitu fasilitas penunjang, manajemen pengelolaan serta aksesibilitas yang masih rendah.

Kata kunci: GSE, indeks persepsi, potensi, kendala, wisata alam,

I. PENDAHULUAN

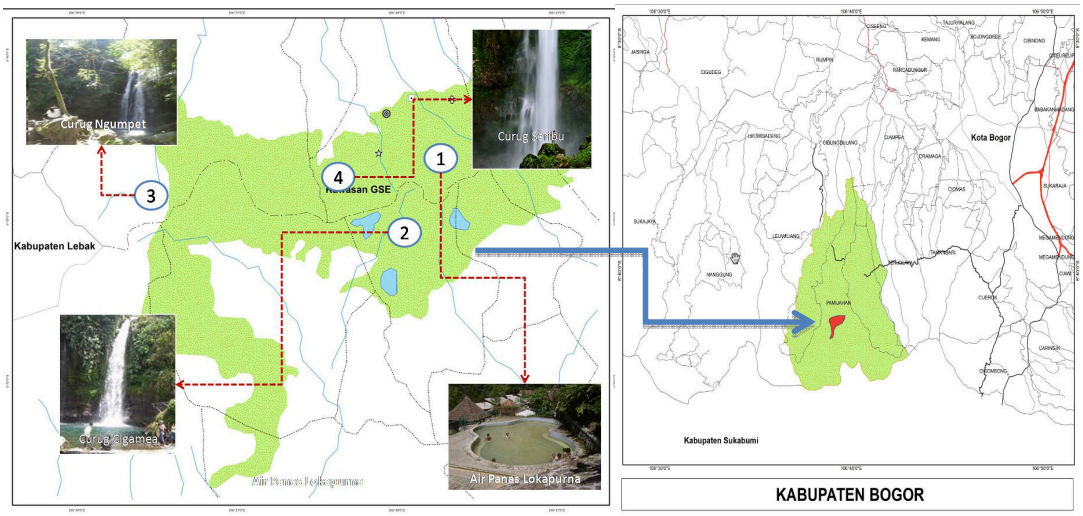
Pengembangan suatu wilayah dilakukan dengan menciptakan keseimbangan antar wilayah dimana dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral yaitu dengan mengutamakan pengembangan pada salah satu sektor pembangunan yang dapat mempengaruhi pengembangan pada keseluruhan suatu wilayah. Saat ini sektor pariwisata merupakan sektor pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan wilayah. Perwilayahan pariwisata Kabupaten Bogor berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 yaitu : zona wisata Bogor Tengah, Bogor Barat dan Bogor Timur. Kawasan wisata di Kabupaten Bogor identik dengan kawasan wisata puncak (zona wisata Bogor Tengah), saat ini perkembanganya sudah maju, sedangkan kedua zona wisata lainnya masih lamban. Salah satu obyek wisata menarik yang berada di zona wisata Bogor Barat adalah kawasan wisata Gunung Salak Endah (GSE), merupakan kawasan alternatif pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor namun masih lambat perkembangannya

Kabupaten Bogor memiliki banyak obyek wisata alam yang cukup berpotensi untuk dikembangkan selain di kawasan Puncak. Kawasan Pariwisata GSE terletak di sebelah Barat Kabupaten Bogor merupakan hamparan pegunungan yang masih alami, sejuk dan udaranya segar, tak heran apabila banyak orang menyebutnya sebagai puncak ke dua. Kawasan ini merupakan salah satu alternatif obyek pariwisata unggulan di daerah Bogor Barat. Obyek wisata alam yang layak dikunjungi dan menjadi obyek penelitian di kawasan GSE yaitu, Curug Seribu, Curug Cigamea, Curug Ngumpet dan air Panas Lokapurna. Dalam rangka pengembangan kawasan GSE dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi persepsi masyarakat dan wisatawasan dalam pengembangan masing masing obyek wisata yang terdapat di Kawasan Gunung Salak Endah.
2. Mengidentifikasi potensi dan kendala pengembangan obyek wisata alam di Kawasan Gunung Salak Endah.

II. METODE

Wilayah Studi Kawasan wisata GSE meliputi luasan sebesar 1545,36 Ha terletak pada Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan batas administrasi sebelah utara Kecamatan Cibungbulang, sebelah selatan Kabupaten Sukabumi, sebelah barat Kecamatan Leuwiliang dan sebelah timur Kecamatan Ciampea. Obyek wisata yang diteliti adalah obyek wisata alam yang terdapat pada Desa Gunung Sari dimana pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor meliputi :1. Curug Seribu, 2. Curug Cigamea, 3. Curug Ngumpet dan 4. Pemandian Air Panas Lokapura.



Gambar 1. Wilayah Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi lapangan dan penyebaran kuesioner untuk wisatawan, penduduk setempat dan pengelola dengan metode proporsional sampel dimana penyebaran dilakukan pada saat hari libur dan hari biasa.

Analisis persepsi wisatawan dan masyarakat menggunakan metode indeks persepsi, dilakukan untuk melihat keinginan ataupun kemauan pengunjung wisatawan terhadap pengembangan obyek-obyek wisata di Kawasan GSE. Informasi diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara pengunjung dari setiap obyek wisata.
Rumus indeks persepsi adalah :

$$IP = \frac{(Pv_I) \times 5 + (Pv_2) \times 4 + (Pv_3) \times 3 + (Pv_4) \times 2 + (Pv_5) \times 1}{\sum (Pv_I + Pv_2 + Pv_3 + Pv_4 + Pv_5)}$$

Dimana : IP = Indeks Persepsi
Pv_I = presentase persepsi dengan skala tinggi (sangat baik, sangat mudah)
Pv_2 = presentase persepsi dengan skala tingi (baik dan mudah)
Pv_3 = presentase persepsi dengan skala biasa saja
Pv_4 = presentase persepsi dengan skala rendah (tidak baik, tidak mudah)

Pv_5= presentase persepsi dengan skala sangat rendah (sangat tidak baik, sangat tidak mudah)

Analisa potensi dan kendala menggunakan metode deskriptif dengan menguraikan hasil indeks persepsi yang telah disusun sebelumnya serta hasil wawancara dan pengumpulan data visual di lokasi obyek wisata. Potensi dan Kendala pengembangan obyek wisata meliputi daya tarik obyek wisata aksesibilitas serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata di Kawasan GSE.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian persepsi wisatawan dan masyarakat terhadap obyek wisata Curug Cigamea, Curug Ngumpet, Curug Seribu serta Air Panas Lokapurna dilakukan berdasarkan perhitungan indeks persepsi dengan data yang didapat berdasarkan hasil kompilasi kuesioner dari wisatawan dan masyarakat.

Tabel 1. Nilai Indeks Persepsi Pada Setiap Obyek Wisata

No	Aspek Persepsi	Curug Seribu		Curug Cigamea		Curug Ngumpet		Lokapura	
		Nilai	Persepsi	Nilai	Persepsi	Nilai	Persepsi	Nilai	Persepsi
1	Dukungan Masyarakat	4.52	sangat baik	4.09	sangat baik	4.33	sangat baik	4.45	sangat baik
2	Keindahan Alam	4.70	sangat baik	4.52	sangat baik	4.61	sangat baik	2.70	cukup baik
3	Keamanan & Kenyamanan	3.70	baik	3.76	baik	3.91	baik	3.42	Baik
4	Aksesibilitas	3.30	baik	3.24	baik	3.15	baik	3.82	Baik
Rata Indeks Persepsi		4.05	sangat baik	3.90	baik	4.00	sangat baik	3.59	Baik

Sumber : Hasil Analisis

Nilai indeks persepsi untuk obyek wisata alam di kawasan GSE secara keseluruhan mempunyai nilai rata – rata 3.88 artinya persepsi masyarakat dan wisatawan terhadap obyek wisata alam di kawasan GSE ini baik terutama untuk Curug Seribu dan Curug Ngumpet memiliki rata-rata nilai persepsi yang sangat baik. Para wisatawan memiliki persepsi yang sangat baik terhadap keindahan alam dari obyek wisata tersebut kecuali terhadap obyek wisata pemandian Lokapura memiliki nilai cukup baik hal ini menunjukkan bahwa para wisatawan lebih menyukai keadaan/situasi alami karena keadaan di pemandian Lokapura sudah mengalami penambahan bangunan-bangunan yang mengurangi nilai kealamian pemandian air panas tersebut.

Aspek dukungan masyarakat menunjukkan nilai persepsi yang sangat baik dimana masyarakat setempat sangat terbuka terhadap kunjungan dan perilaku wisatawan serta keamanan juga kenyamanan masyarakat tidak terganggu. Hal ini merupakan modal utama untuk pengembangan kawasan wisata selanjutnya. Aspek keamanan dan kenyamanan di setiap obyek wisata memiliki nilai indeks persepsi yang baik. Berdasarkan kondisi saat ini memang aspek kenyamanan dan keamanan masih dapat dinilai baik hanya untuk pengembangan kawasan wisata GSE sebagai tujuan wisata alternatif di Kabupaten Bogor selain kawasan Puncak masih harus ditingkatkan. Begitu pula dengan aspek aksesibilitas lingkup regional meskipun saat ini memiliki nilai indeks persepsi yang baik untuk setiap obyek wisata alam di kawasan GSE ini tetapi belum cukup memadai sebagai daerah tujuan wisata alam lingkup kabupaten.

Berdasarkan penilaian kondisi saat ini melalui analisa indeks persepsi bahwa ke empat (4) Obyek wisata alam yang ada di Kawasan wisata GSE berpotensi untuk dikembangkan, namun demikian masih terdapat kendala-kendala yang dapat ditemu-kenali dalam rangka pengembangan kawasan wisata GSE sebagai alternatif tujuan wisata di Kabupaten Bogor. Pemandangan alam yang indah memang merupakan modal potensi alam pendukung utama pengembangan daerah tujuan wisata (Soekadijo, 2006) tetapi faktor kebijakan tetap diperlukan untuk pengembangan

selanjutnya. Kebijakan pengembangan kawasan wisata GSE termuat dalam kebijakan pariwisata didalam RTRW Kabupaten Bogor 2005-2025 dimana merupakan penegasan posisi sebagai kawasan obyek wisata yang akan berkembang dimasa yang akan datang dan termasuk dalam zona wisata Bogor Barat dalam perwilayahan pariwisata Kabupaten Bogor.

Keindahan alam dan keanekaragaman hayati menjadi modal dalam pengelolaan wisata dan mendukung untuk pengembangan kawasan wisata (Marpaung 2012). Obyek wisata yang ada di kawasan GSE sudah memiliki potensi keindahan alam. Selain itu juga memenuhi daya tarik dari wisatawan yang sudah berkunjung ke obyek wisata tersebut, keadaan ini sesuai dengan nilai indeks persepsi yang sangat baik.

Tabel 2. Potensi dan Kendala Pengembangan Kawasan GSE

No	Potensi Pengembangan	Kendala Pengembangan
1.	Dukungan masyarakat sekitar yang sangat baik dalam rangka pengembangan di semua obyek wisata sebagai Kawasan Wisata Alam	Manajemen pengelolaan yang ada masih kurang maksimal. Peningkatan Profesionalisme dalam pengelolaan dan pelayanan kepada wisatawan diharapkan dapat mempermudah para wisatawan untuk melakukan aktifitas wisata.
2.	Berdasarkan Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pengunjung obyek wisata di kawasan GSE memiliki *trend* Postifif, hal ini menunjukan kawasan GSE memiliki potensi pasar yang cukup baik sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan	Keterbatasan aksesibilitas menuju lokasi wisata (kawasan GSE) yang berupa sarana transportasi dan akses jalan berpengaruh terhadap pemilihan lokasi wisata yang dilakukan oleh wisatawan.
3.	Memiliki keindahan alam (pemandangan) yang indah dan obyek wisata alam yang unik berupa air terjun yang khas dan sumber air panas merupakan potensi sebagai daya tarik bagi kunjungan wisatawan.	Fasilitas yang ada masih tergolong sederhana, baik yang berupa fasilitas parkir maupun fasilitas penunjang wisata yang ada pada lokasi wisata tersebut.
4.	Sarana prasarana awal sudah memadai walaupun masih sederhana dengan indeks persepsi dari wisatawan cukup baik.	Pemeliharaan kualitas lingkungan dalam obyek wisata kurang menjadi perhatian. (sampah, jalan setapak menuju obyek wisata dll)

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pengunjung obyek wisata di kawasan GSE memiliki *trend* positif, hal ini menunjukan kawasan GSE memiliki potensi pasar yang cukup baik sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan. Dalam rangka pengembangan di kawasan wisata GSE partisipasi masyarakat setempat sangat diperlukan peranannya terutama kesiapan masyarakat dalam menerima kunjungan wisatawan serta kondisi sosial masyarakat tersebut terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Berdasarkan hasil penilaian indeks persepsi ternyata respon masyarakat setempat saat ini sangat baik dilihat dari keterbukaan mereka terhadap kunjungan wisatawan serta sudah merasakan pengaruhnya yang baik terhadap mereka dari sisi ekonomi. Berdasarkan kondisi sosial masyarakat di kawasan wisata GSE memiliki sistim sosial yang mendukung untuk pengembangan kawasan wisata GSE menjadi kawasan wisata alam untuk skala pelayanan yang lebih luas baik regional maupun nasional (Rachmawati 2010). Semua keadaan diatas ini merupakan potensi yang utama dalam rangka proses pengembangan kawasan wisata di kawasan GSE.

Kendala-kendala yang dapat ditemukenali di lokasi kawasan wisata GSE dalam rangka pengembangannya yaitu pengelolaan obyek wisata yang ada masih kurang maksimal, saat ini pengelolaan dilakukan oleh pemerintah daerah dan dinilai masih kurang profesional. Hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan kualitas lingkungan dalam obyek wisata kurang menjadi perhatian. (sampah, jalan setapak menuju obyek wisata dan lain-lain). Peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan dan pelayanan kepada wisatawan diharapkan dapat mempermudah para wisatawan untuk melakukan aktifitas wisata. Keterbatasan fasilitas yang ada, Baik dari sarana parkir maupun sarana perdagangan dan jasa yang ada pada sekitar area tersebut. Keterbatasan aksesibilitas menuju lokasi wisata (kawasan GSE) berupa sarana transportasi dan akses jalan masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap pilihan lokasi wisata yang dilakukan oleh wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata GSE.

Pengembangan obyek daya tarik wisata alam di kawasan GSE merupakan sub-sistem dari pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan wilayah pada umumnya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Arahan pengembangan pariwisata alam di kawasan GSE berdasarkan dari kebijakan yang terkait mengenai pengembangan pariwisata di Bogor bagian barat dan potensi kendala yang dimiliki oleh obyek wisata tersebut.

Potensi dan kendala obyek wisata alam di kawasan GSE merupakan suatu dasar untuk mengembangkan kawasan wisata alam. Berdasarkan kondisi saat ini untuk menambah daya tarik wisata alam di kawasan GSE perlu dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Wisata Petualangan
   Kondisi alam di obyek wisata alam cukup menantang merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang menyukai petualangan di alam, kegiatan ini mungkin dilakukan antara lain : menikmati keindahan/pemandangan alam, *tracking, hiking*, dan *outbond*.
2. Kemah Konservasi
   Kegiatan kemah konservasi ini ditujukan kepada pelajar atau mahasiswa, kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan kecintaan terhadap lingkungan.
3. Pendidikan dan Pelatihan
   Potensi obyek wisata alam sangat cocok untuk dijadikan tempat pendidikan dan pelatihan bagi wisatawan yang ingin mengetahui dan meneliti mengenai wisata alam.
4. Informasi dan Promosi Wisata
   Kegiatan informasi dan promosi wisata alam dapat dilakukan oleh pihak yang mengelola lokasi wisata tersebut dan/atau oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, informasi dan promosi wisata alam dilakukan dengan papan informasi, media massa/elektronik dan sebagainya. kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wisatawan mengenai potensi wisata alam di kawasan ini sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap wisata alam.
5. Pembuatan Souvenir
   Sebagai pemenuhan kebutuhan wisatawan yang berkunjung maka dapat dibuat souvenir agar wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata alam dapat membawa oleh-oleh ketika wisatawan kembali pulang sebagai kenag-kenangan.
6. Pengadaan Penginapan
   Penginapan dibuat sealami mungkin yang diutamakan adalah kenyamanan dan sanitasi yang baik. Penginapan dapat dibuat dalam bentuk pondok atau terbuat dari billik bambu.
7. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana dan prasarana fisik untuk menunjang kegiatan wisata alam adalah gerbang utama masuk kawasan, loket ticketing, pusat informasi dan promosi wisata, penginapan/pondok wisata, papan informasi, petunjuk arah dan papan himbauan, peta lokasi obyek wisata alam, pengadaan tempat sampah, kantor pos, jaringan telepon, jaringan listrik, bank, toko souvenir, tempat makan, jaringan air bersih, travel agen, taman bermain, kursi, meja dan gazebo, sarana peribadatan, sarana kesehatan dan lahan parkir.

Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Menuju Wisata alam di kawasan GSE disusun berdasarkan kebijakan (RIPPDA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 yaitu Pengembangan kawasan wisata dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata diprioritaskan di daerah yang belum berkembang. Sedangkan berdasarkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yaitu pengembangan kawasan pariwisata baru terutama wilayah Bogor bagian barat yang sesuai dengan potensi sumber daya alam dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta pengembangan sistem transportasi terutama di wiilayah Bogor bagian barat baik dalam bentuk peningkatan terhadap sistem transportasi yang ada maupun pengembangan baru atau tambahan.

Tujuan arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah:

1. merehabilitasi dan memelihara sarana dan prasarana transportasi yang ada agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya;
2. memenuhi ketentuan keselamatan operasi pelayanan transportasi yang berlaku baik nasional maupun internasional;
3. menciptakan iklim usaha di bidang jasa pelayanan transportasi yang adil dan terbuka sehingga badan usaha milik negara (BUMN), swasta maupun pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, terdorong untuk ikut berperanserta dalam penyediaan pelayanan jasa transportasi;
4. menyediakan pelayanan jasa transportasi minimal khususnya untuk daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan rencana transportasi jalan Kabupaten Bogor terdapat dua peningkatan fungsi jalan di kawasan GSE yaitu peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi kolektor primer dan peningkatan fungsi jalan lokal primer menjadi kolektor primer. Adanya rencana jalur transportasi darat tersebut, sehingga pengembangan pariwisata alam di kawasan GSE berupa aksesibilitas dan transportasi darat diarahkan menjadi satu jalur pariwisata. Arahan pengembangan jalur wisata alam ini dapat ditempuh melalui 3 (tiga) arah yaitu arah Kota Bogor, arah Jasinga dan arah Tangerang.

Aksessibilitas dan moda transportasi darat dari arah Kota Bogor menuju kawasan GSE kondisi baik, karena kondisi jalan yang sudah bagus dan angkutan umum yang sudah memadai untuk kebutuhan wisatawan yang ingin mengunjungi obyek wisata alam. Moda angkutan umum tersedia sehingga wisatawan dapat dengan mudah untuk mendapatkan kebutuhan moda angkutan umum menuju kawasan GSE. Kendala yang menghambat pertumbuhan wisatawan menuju ke kaawasan GSE yaitu kemacetan di banyak titik seperti terdapat di daerah Stasiun Bogor, Terminal Laladon dan Pasar Leuwiliang. Hal ini menjadi kendala untuk menawarkan obyek wisata di kawasan GSE bagi wisatawan khususnya yang berasal dari Bogor, Jakarta dan Bandung

Kondisi akasesibilitas dan moda transportasi umum menuju kawasan GSE dari arah Jasinga kondisinya baik, karena jalan sudah menggunakan perkerasan aspal dan moda angkutan umum memadai, karena angkutan umum ini satu jalur dari arah Kota Bogor. Kendala aksessibilitas dan moda transportasi umum yaitu masih minimnya prasarana pendukung seperti minimnya penerangan jalan umum, bengkel, rumah makan, SPBU dan lain sebagainya, sehingga wisatawan yang menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju lokasi wisata alam kesulitan untuk memenuhi sarana

penunjang perjalanan (SPBU dan begkel). Wisatawan yang akan ditawarkan atau dijaring berasal dari arah Jasinga berasal dari Jasinga, Lebak dan Rangkasbitung.

Dari arah Tangerang menuju kawasan GSE di daerah Parungpanjang kondisi jalannya sudah rusak, karena perkerasan yang menggunakan beton sudah hancur karena yang melewati jalan tersebut mayoritas truk besar yang bermuatan batu, pasir dan tanah merah. Kondisi jalan ini menjadi kendala bagi wisatawan untuk mengunjungi wisata alam di kawasan GSE dari arah Tangerang. Moda transportasi angkutan umum dari arah Tangerang wisatawan dapat menaiki bus umum dengan tujuan Kali Deres–Jasinga dan angkot dengan tujuan Parungpanjang–Jasinga-GSE, selain bus umum dan angkot wisatawan yang berasal dari Jakarta dapat menaiki Kereta Api dan wisatawan turun di Stasiun Parung Panjang dan dapat melanjutkan kembali dengan menaiki angkot menuju kawasan GSE. Kendala yang dihadapi oleh wisatawan yang berasal dari arah Tangerang adalah kondisi jalannya yang masih rusak, minimnya bengkel, minimnya SPBU, tidak adanaya penerangan jalan umum dan kondisi lingkungan yang sepi dari penduduk. Wisatawan yang akan ditawarkan atau dijaring wisatawan yang berasal dari Tangerang dan Jakarta.

Pada pengembangan jalur aksesibilitas menuju kawasan GSE dapat dikembangkan guna untuk meningkatkan jumlah wisatawan baik dari arah Kota Bogor, Jasinga maupun Tangerang. Jalur wisata ini di buat agar masyarakat dapat mengetahui jalur wisata dan dapat meningkatkan pengembangan wisata alam di kawasan GSE.

IV. KESIMPULAN

Obyek obyek wisata alam di kawasan GSE miliki karekteristik keindahan alam yang baik dan indah menjadikan obyek wisata tersebut mempunyai daya tarik yang tinggi untuk dikunjungi wisatawan. Sarana prasarana pendukung yang sudah memadai walaupun masih sederhana untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kawasan GSE. Berdasarkan *trend* kunjungan setiap tahun mengalami peningkatan. Dukungan masyarakat menunjukkan nilai positif yang menandakan bahwa masyarakat sekitar kawasan GSE mendukung dalam pengembangan kegiatan pariwisata di Kawasan GSE. Kendala pengembangan Kawasan GSE aksesibilitas masih rendah, manajemen pengelolaan yang masih sederhana dan fasilitas-fasilitas pendukung wisata yang tergolong kurang memadai. Dalam rangka pengembangan kawasan GSE diperlukan kebijakan yang tegas dari pihak pemerintah serta implementasi kebijakan tersebut. Saat ini sudah ada hanya belum menjadi prioritas. Kawasan wisata GSE saat ini masih sebagai kawasan wisata dengan lingkup pelayanan tingkat kabupaten, untuk pengembangan menjadi kawasan wisata dengan lingkup pelayanan lebih tinggi dan dapat menjadikan sebagai tujuan wisata alternative selain kawasan wisata Puncak, diperlukan pengembangan dengan meningkatkan potensi dan mengatasi kendala-kendala yang ada. Pengembangan kawasan wisata GSE sangat mendesak mengingat kawasan wisata Puncak saat ini dinilai sudah melampui batas daya dukung dan daya tamping kawasan. Peningkatan aksesibiltas menuju kawasan wisata GSE dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari arah kota Bogor, Jasingan dan Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

Budiharsono, Sugeng.(2011). Teknik Analisis Pembangunan Wilayah, Jakarta : Pradnya Paramita.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, (2016). Profil Pariwisata Kabupaten Bogor, Bogor : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Bogor.

Ismayanti. (2010). Pengantar Pariwisata**,** Jakarta : PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Marpaung, Happy. (2012). Pengetahuan Kepariwisataan, Bandung: Alfabeta.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (2006). Metode Penelitian Survai, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Rachmawati, Eva. 2010, Sistem Sosial Pengembangan Wisata Di Gunung Salak Endah. Jurnal Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tahun 2012. 35-44.
Soekadijo. (2006). Kepariwisataan Di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Perencanaan Lanskap Vulkanik yang Berkelanjutan dalam Mendukung Pariwisata Lokal. Studi Kasus: Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat

Nur Hepsanti Hasanah[1], Rezky Khrisrachmansyah[1,2], Ndaru Adi Pranoto[1], Bhre Wijaya Aroengbinang[1], Assa Kartika Prihabsari[1], Sitti Kurnia Apriliani[1]

[1]Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor
[2]Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Divisi Ekonomi dan Tata Ruang Wilayah (P4W-LPPM), Institut Pertanian Bogor, Bogor
Email: nhepsantihasanah@gmail.com; rezky_kh@ipb.ac.id; ndaruadipranoto@gmail.com; bhre.wij@gmail.com; assakart@hotmail.com;

ABSTRAK

Indonesia memiliki rangkaian gunung api yang terbentang dari timur hingga barat. Rangkaian formasi ini memberikan karakter lanskap yang unik yaitu berupa relief kontur yang bervariasi, jenis tanah, hingga jenis tanaman yang beraneka ragam. Perkembangan penduduk dan budaya tumbuh sejalan di sekitar gunung-gunung api tersebut. Salah satu rangkaian Gunung Api Purba yang pernah erupsi dan membentuk kawah besar adalah rangkaian Gunung Api Bandung Raya. Fenomena tersebut memberikan karakteristik lanskap Bandung Raya yang khas. Salah satu gunung yang berada di Rangkaian gunung api Bandung Raya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Lanskap di Tangkuban Perahu hingga saat ini menyimpan potensi lanskap yang besar, unik, subur, dan memiliki panorama yang indah. Masyarakat yang tinggal di sekitar Tangkuban Perahu telah berinteraksi lama dengan lanskap pegunungan api. Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang berada di Selatan Kaki Gunung Tangkuban Perahu memiliki bentuk dan karakter yang unik, dikarenakan berada pada area erupsi gunung api pada masa lampau. Saat ini, Kecamatan Lembang memiliki perkembangan urbanisasi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta aktivitas yang dinamis. Di lain pihak, bahaya letusan suatu waktu bisa terjadi kembali dan masyarakat perlu siap menghadapinya. Oleh karenanya diperlukan strategi mitigasi dan rencana ke depan yang responsif juga berkelanjutan untuk mengelola keseimbangan alam dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Potensi terbesar dari Kecamatan Lembang sebagai area Lanskap Gunung Api adalah pariwisata lokal baik dari segi wisata alam, agrowisata, geowisata, wisata pegunungan lainnya yang tentunya akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan dari studi ini adalah untuk menciptakan konsep desain mitigasi yang terintegrasi, berkelanjutan, sebagai area Lanskap Vulkanik yang memiliki potensi wisata lokal, serta memperkuat pola dan karakter dari lanskap gunung api. Metode dalam studi ini adalah menggunakan metode METLAND yang meliputi tiga tahap yaitu identifikasi lanskap yang memiliki kerawanan bahaya, identifikasi sumberdaya kritis, dan pengembangan fungsi lahan berdasarkan proyeksi daya dukung.

Kata kunci: Lanskap Gunung Api, Kecamatan Lembang, metode METLAND, pariwisata

I. PENDAHULUAN

Indonesia secara geomorfologi berada di ring api serta berada diantara pertemuan lempeng tektonik. Aktifitas tertinggi gempa di dunia ada di area ini. Gunung vulkanik purba membentuk cekungan Bandung dan rangkaian lanskap pegunungannya. Fenomena ini membentuk karakteristik lanskap yang khas dari Bandung Raya. Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung api purba yang di bawahnya terdapat area pemukiman yaitu wilayah administratif Kecamatan Lembang. Lanskap

yang ada saat ini merupakan interaksi antara manusia dan *landform* gunung vulkanik yang terjadi sejak lampau. Kecamatan Lembang merupakan area atau wilayah administratif yang terbentuk dan dipengaruhi oleh morfologi gunung vulkanik yang secara spasial memberika keunikan bentuk spasial.

Secara spasial karakter Kecamatan Lembang adalah berkontur, dengan ketinggian menanjak ke arah utara atau Tangkuban Perahu, beberapa aliran sungai mengalir di tengah wilayah, serta terdapat patahan di tengah wilayah tersebut. Di lain pihak, gunung api memiliki potensi kebencanaan tinggi yang terpendam, di mana suatu waktu dapat kembali muncul. Beberapa kejadian kebencanaan dari gunung api dapat terjadi seperti asap debu lahar panas dan dingin, longsor, yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup manusia.

Legenda Sangkuriang dipercayai oleh sebagian masyarakat Subang dan Bandung sebagai cerita rakyat yang mengawali pembentukan Gunung Tangkuban Perahu. Berdasarkan penelitian Van Bemmelen (1934) dapat diketahui bahwa Tangkuban Perahu terbentuk dari Erupsi Gunung Sunda Purba. Gunung ini meletus sekitar 50.000 tahun yang lalu. Erupsi tersebut membentuk kaldera besar dengan diameter 5-10 km. Di dalam kaldera terbentuklah gunung baru yaitu Tangkuban Perahu. Dikatakan Tangkuban Perahu karena bentuknya yang menyerupai perahu terbalik, hal ini karena akibat erupsi Gunung Sunda Purba saat itu. Berdasarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tahun 2013 Tangkuban Perahu sempat mengalami status siaga dengan kejadian 6 kali gempa dengan frekuensi rendah, dan 2 kali gempa vulkanik kecil serta 1 kali gempa besar.

Kecamatan Lembang juga memilki (sesar) patahan yang terbentang dari timur hingga barat. Patahan ini terjadi karena sejarah geografi dari aktifitas gunung api Tangkuban Perahu. Patahan adalah bentuk patah dari lapisan batu di bumi yang dapat menyebabkan batu menahan pergeseran/pergerakan batuan yang lain. Pergerakan ini akan menyebabkan gempa bumi tektonik, bahkan dapat menyebabkan longsor apabila kondisi tanah tidak stabil. Secara umum, sesar adalah area/ zona yang terdapat retakan di area batuan yang dapat mengalami pergeseran (Turner and Williams 2004). Ancaman lainnya dari gunung api adalah pergerakan lava yang dapat menghancurkan segalanya di sepanjang aliran lava. Beberapa bahan gas kimia berbahaya yang dihasilkan ketika terjadi letusan adalah CO, H_2S, dan SO_2. Gas berbahaya tersebut dapat melukai sistem pernafasan. Selain itu terdapat partikel abu yang dapat mengiritasi mata dan kulit manusia. Sedimen dari abu vulkanik, pasir, batuan, yang bercampur dengan air hujan akan menyebabkan sungai tercemar (Fisher 1998).

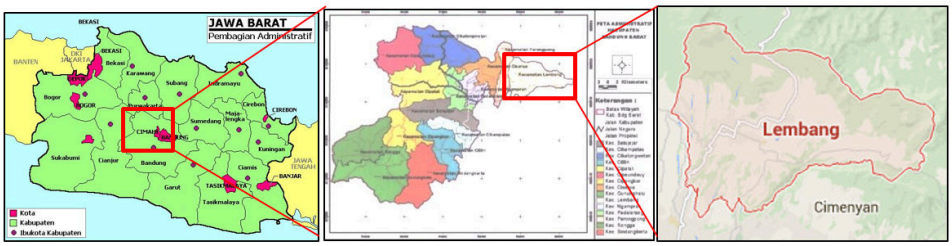
Tutupan lahan yang mendominasi di Kecamatan Lembang adalah lahan pertanian. Sektor pertanian merupakan potensi dalam pengembangan ekonomi di Kec. Lembang. Beberapa komoditi yang berpotensi diantaranya tanaman hortikultur khususnya sayuran, dan juga tanaman hias. Selain area pertanian di Kec. Lembang masih terdapat area hutan yang dilindungi dan dimanfaatkan untuk kampung hutan, taman hutan, tempat rekreasi publik dan wisata hutan alami yang tentunya dapat meningkatkan keragaman baik dari flora, fauna, serta sebagai koleksi tumbuhan dan pohon. Sebagai strategi mitigasi, hutan juga dapat menjadi area penyangga yang akan terkena dampak kebencanaan terlebih dahulu, tergantung dari lokasi di mana erupsi terjadi (Ardhitya 2014). Tujuan dari studi ini adalah untuk menciptakan konsep desain mitigasi yang terintegrasi, aman, tenang, dan berkelanjutan, sebagai area Lanskap Vulkanik yang memiliki potensi wisata lokal, serta memperkuat pola dan karakter dari lanskap gunung api.

II. METODE

A. Lokasi Studi

Lokasi studi berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (gambar

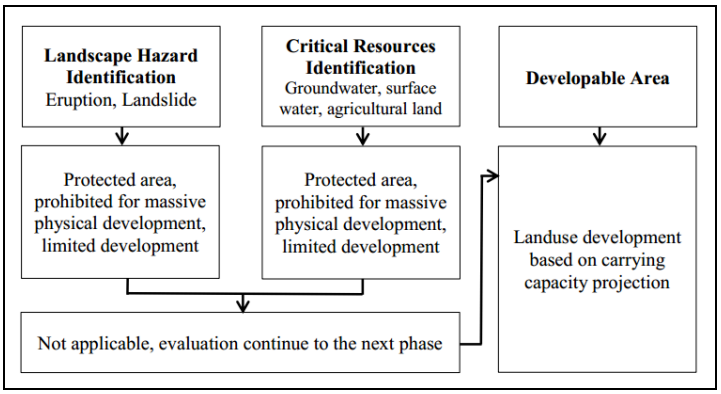
1). Studi dilakukan selama 4 bulan dari april hingga juli 2015.



Gambar 1. Lokasi Studi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat

B. Model Studi Perencanaan Landscape Metropolitan

Metode analisis METLAND (The Metropolitan Landscape Planning Study Model) digunakan dalam studi ini. Secara pentahapan terdiri dari tiga penilaian dengan variabel spesifik untuk melihat nilai penting yang dapat digunakan dalam memahami karakter lanskap/lingkungan. Tahapan terdiri dari : Fase 1 identifikasi zona bahaya, Fase 2 identifikasi area sumberdaya kritis, fase 3 identifikasi kesesuaian untuk pengembangan lahan. Adapun kerangka berfikir metode METLAND dapat dilihat pada gambar berikut.



Source: Modifikasi dari METLAND oleh Fabos and Caswell [3].

Gambar 2. Kerangka berfikir analisis lanskap untuk tujuan preservasi, proteksi, dan pengembangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Lanskap Rawan Bahaya

Acuan dasar untuk mengidentifikasi lanskap rawan bahaya/ bencana alam adalah peta resiko vulkanik dari Gunung Api Tangkuban Perahu, yang telah dikaji oleh R.D. Hadisantono et all tahun 2005. Peta tersebut memperlihatkan tiga zona pada area Kec. Lembang dan sekitarnya (Gambar 3 (kiri)). Zona III adalah zona dengan kerawanan bahaya vulkanik tinggi. Zona ini mencakup area yang terkena aliran lava, gas beracun, hujan abu, lahar panas, dan lemparan batu secara langsung. Zona III mencakup area inti Tangkuban Perahu yaitu kawah, yang berbahaya untuk aktifitas wisata. Zona II melingkupi area yang berpotensi terkena dampak dari aliran lava, gas beracun, hujan abu, dan lontaran batu. Zona II memiliki cakupan yang lebih luas dari zona sebelumnya, dan beberapa area pemukiman terdapat pada area ini. Beberapa rencana mitigasi diperlukan pada zona II ini. Zona I hanya mencakup area yang terkena dampak aliran lahar saja. Aliran lahar hanya mengalir pada sungai utama. Oleh karenanya sebelum terjadi letusan perlu dilakukan upaya konservasi di sepanjang sungai utama, pada studi ini diterapkan area penyangga selebar 50 M.

B. Identifikasi Area Sumberdaya Kritis

Setelah dilakukan identifikasi lanskap rawan bahaya, dilakukan pula identifikasi

sumberdaya potensial di Kecamatan Lembang. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan GIS, dengan supervised classification dari citra untuk mendapatkan tutupan lahan. Hasil dari klasifikasi tersebut dioverlay dengan peta sungai yang bersumber dari pemerintah jawa barat (gambar 3 (kanan)).

Tahap selanjutnya adalah menghitung kebutuhan area pertanian dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2030. Data awal yang digunakan adalah jumlah penduduk tahun 2013 sebesar 173 550 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk adalah 0,015. Dengan demikian Pt+U = 173 550 (1+0,015)18 – 173 550= 252 253 Jiwa.

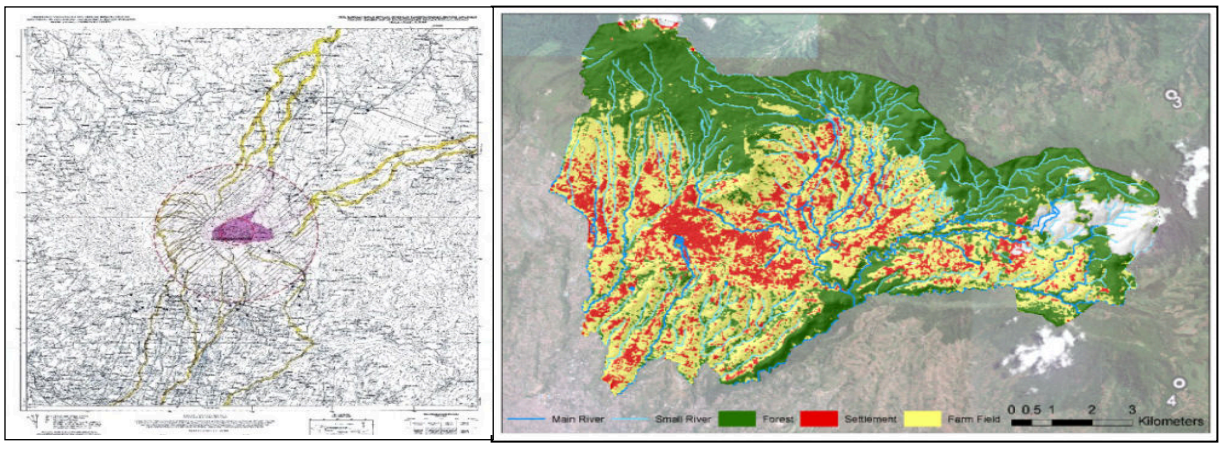
Data kebutuhan lahan pertanian dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia akan beras yaitu rata-rata 144 kg/ tahun. Setiap keluarga berjumlah 4 orang minimum memerlukan 0,02 ha lahan pertanian. Data ini kemudian dikalikan dengan proyeksi manusia. Sehingga Jumlah keluarga 252 254: 4= 63 063,5. Luas kebutuhan lahan pertanian adalah 63 063,5 x 0,02 ha= 1 261,27 ha. Dari analisis tersebut alokasi lahan pertanian dalam tata guna lahan harus lebih besar dari 1 261,27 ha.

C. Analisis Kesesuaian pemukiman

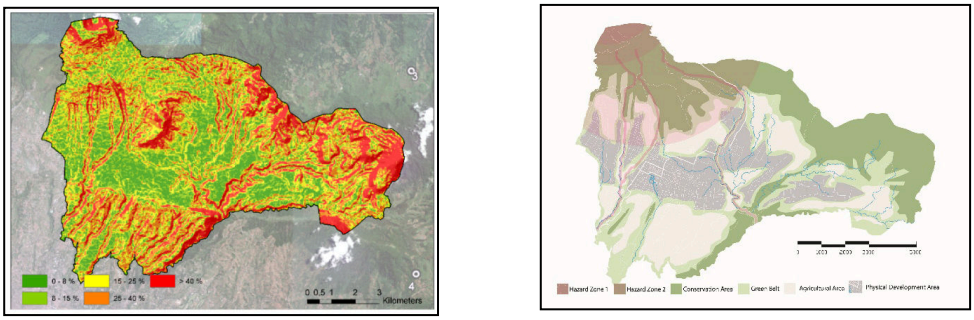
Area kesesuaian khususnya untuk masyarakat bermukim untuk pengembangan di masa yang akan datang bersumber dari kelas kemiringan lahan. Area dengan slope 0-15% dipertimbangkan sebagai area yang aman untuk manusia beraktifitas. Dengan mengkalkulasikan kembali kebutuhan manusia untuk tinggal, di mana ukuran standar satu orang untuk tinggal adalah 2 m x 4 m = 8 m^2, maka total area pemukiman adalah 252 254 x 8 m^2 = 2 018 032 m^2 atau setara dengan 201,8032 ha. Alokasi area pemukiman harus lebih besar dari 201,8032 ha, termasuk di dalamnya adalah akses sebesar 10% sehingga total area pemukiman 222 ha. Area pemukiman dianalisis berdasarkan data existing, sedangkan pengembangan fungsi lainnya seperti area komersial, industri, kantor, dan lainnya dianalisis berdasarkan proporsi standar minimum kesesuaian pengembangan kawasan.

D. *Zoning*

Berdasarkan METLAND analysis, tahap selanjutnya adalah mensintesa zona resiko bahaya, zona sumberdaya kritis, dan analisis kesesuaian pemukiman secara kongruen satu dengan yang lain dan sesuai dengan proporsi perhitungan kapasitas kebutuhannya baik area pertanian dan area pemukiman. Hasil sintesa ini kemudian diplotkan dan di-*superimpose* menjadi zona lanskap vulkanik.



Gambar 3. Analisis Zona Resiko Bahaya (kiri) dan Analisis area sumberdaya kritits (kanan) di Kec. Lembang



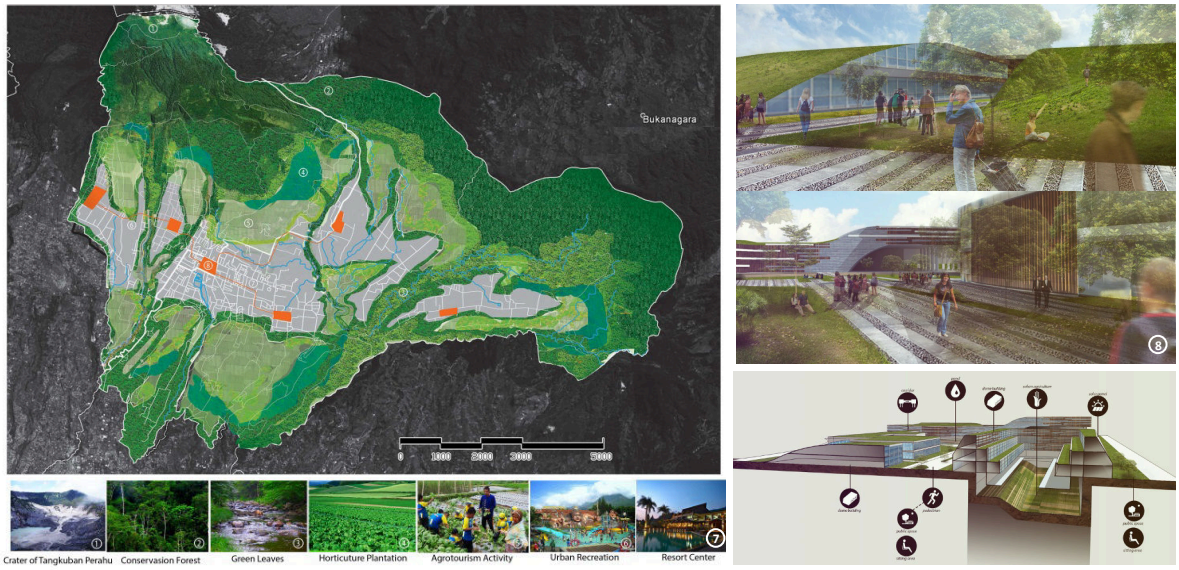
Gambar 4. Analisis Kesesuaian Pemukiman berdasarkan slope (kiri) dan Zoning Lanskap Vilkanik (kanan) di Kec. Lembang

Ruang atau subzona yang dikembangkan adalah *hazard zone, conservation zone, green belt, agricultural zone* and *physical development zone*. *Hazard zone* adalah area yang diproteksi dari pengembangan fisik dan ditujukan untuk hutan konservasi sepanjang area hutan alami hal ini ditujukan untuk memperkuat pertahanan kawasan dan dampak dari kebencanaan gunung api. *Agricultural zone* ditujukan sebagai area pertanian yang mewadahi aktifitas bertani, bercocok tanam, sumber energi khususnya pangan. *Physical development zone* ditujukan untuk area pemukiman, komersial, industri dan aktifitas fisik lainnya. *Green Belt Zone* adalah area yang berada pada tepi antar zona, area ini berfungsi sebagai transisi dan indikator untuk menjaga, memproteksi agar setiap zona yang memliki unit yang berbeda tidak mengalami alih fungsi lahan. Area *Greenbelt* ini juga berfungsi ekologis dan menjaga penduduk dari bahaya dampak bencana gunung api (gambar 4).

E. Rencana Lanskap Vulkanik dalam Pengembanan Wisata Lokal

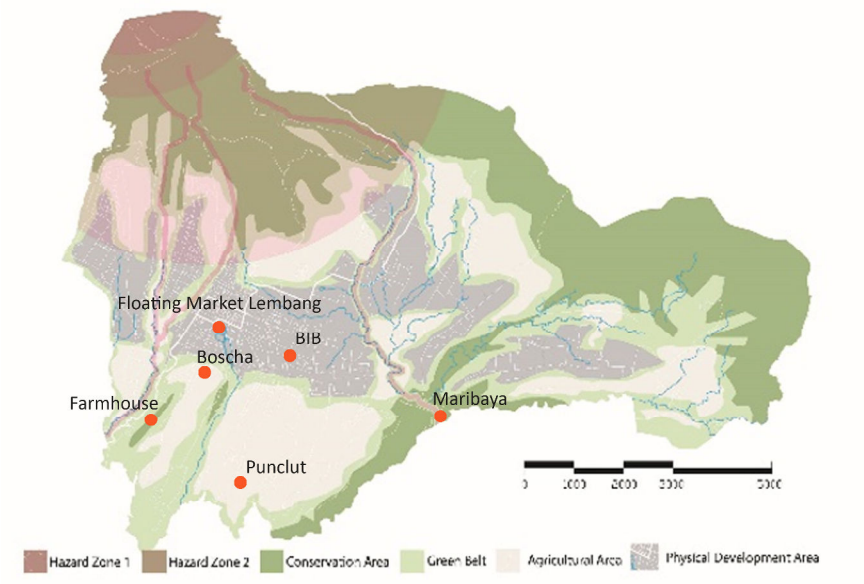
Konsep pendekatan yang diterapkan dalam studi ini mengacu pada empat aspek yaitu ekologi, evakuasi, ekonomi, dan edukasi (4E). Secara ekologi, isu yang diangkat adalah terkait kapasitas lahan yang mewadahi kenyamanan hidup masyarakat melalui RTH, *Green Linkage* atau sabuk hijau (yang menghbungkan antar *source, patch* dan *stepping stone*), dan area konservasi yang berfungsi ekologis dan *buffer* langsung terhadap erupsi. Evakuasi menekankan isu kebencanaan dari gunung api dengan bagaimana mempersiapkan mitigasi kebencanaan melalui proteksi area sumberdaya kritis seperti jalur hijau sungai, badan air, strategi land use (alokasi area dari hasil analisis kerawanan bencana), alokasi tempat berkumpul, dan jalur evakuasi yang aman. Ekonomi tentunya bagaimana meningkatkan nilai kawasan melalui wisata, beberapa strategi diantaranya mendorong promosi objek-objek wisata (seperti Puncak Punclut, Floating Market Lembang, Farm House Susu Lembang, Observatorium Bosscha, BIB Lembang, dan Air Terjun Maribaya), meningkatkan wisata berbasis sumber daya alam seperti agrowisata, wisata sejarah geologi, integrasi pasar dari produk-produk pertanian. Edukasi diperlukan untuk mengaktifkan/ merealisasikan ketiga aspek yang lain. Edukasi akan menciptakan kesadaran pada masyarakat dan menciptakan keberlanjutan. Beberapa strategi edukasi diantaranya informasi wisata terintegrasi, dan fasilitas yang memperkenalkan sejarah dan budaya khususnya di Kec. Lembang.

Secara detail, studi ini juga melakukan visualiasi fasilitas integrasi yang dinamakan “dome”. Dome merupakan fasilitas publik yang didesain menarik dan menyenangkan, dengan fungsi integrasi sebagai pusat aktifitas, landmark, area komersial, fasilitas kesehatan, namun mampu menampung warga ketika evvakuasi, dengan struktur bangunan yang tahan gempa. Terdapat enam bangunan dome yang tersebar secara merata di area yang aman di Kec. Lembang.



Gambar 5. Peta Rencana Lanskap Vulkanik (kiri) dan Ilustrasi "Dome" serta fitur aktivitsnya (kanan)

Studi ini lebih lanjut juga ingin melihat potensi keberadaan objek-objek wisata yang terdapat di Kecamatan Lembang. Adapun secara spasial dapat dilihat objek-objek wisata tersebut seperti Puncak Punclut, Floating Market Lembang, Farm House Susu Lembang, Observatorium Bosscha, BIB Lembang, dan Air Terjun Maribaya yang dioverlay dengan peta zon area lanskap vulkanik.



Gambar 6. Peta overlay objek wisata dengan zona lanskap vulkanik Kecamatan Lembang

Berdasarkan peta overlay dapat dilihat bahwa Objek wisata Floating Market Lembang dan BIB Lembang berada pada area pemukiman dan pengembangan fisik. Objek wisata Boscha dan Punclut berada pada area pertanian; Maribaya dan Farmhuse berada pada area konservasi. Dengan demikian dalam pengembangannya masing masing objek wisata perlu memperhatikan daya dukung lingkungan setempat,

serta pemangku kebijakan perlu memperhatikan pengembangan fasilitas ataupun pendukung lainnya disekitar area objek wisata tersebut.

IV. KESIMPULAN

Perencanaan Lanskap Vulkanik diperlukan dalam konteks kawasan yang memiliki potensi kerawanan bahaya alam seperti Kecamatan Lembang. Kecamatan Lembang berada dekat dengan Gunung Api Tangkuban Perahu dan sesar Lembang. Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini menggunakan pendekatan komprehensif baik dari segi mitigasi, ekologi, ekonomi, dan edukasi yang kesemuanya dapat diintegrasikan dan memperhatikan aspek kehidupan masyarakat seperti sosial-budaya, pangan, ekonomi, dan kesejarahan yang tentunya tetap mempertimbangkan kapasitas atau daya dukung lingkungan dari tipologi Lanskap Vulkanik Tangkuban Perahu.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhitya, Bagustio. (2014). Perencanaan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Tangkuban Perahu berbasis Mitigasi Di Lembang Jawa Barat. Bogor: IPB Press.

BNPB. (2000). Asmaradana Merapi. Jakarta: BNP

Brahmantyo, Budi, T, Bachtiar. (2009). Wisata Bumi Cekungan Bandung. Truedee Pustaka Sejati: Bandung

Fabos, JG. (1979). Planning The Total Landscape: A Guide To Intelligenct Land Use. Colorado: Westview Press.

Fabos, JG dan Caswell, SJ. (1976). Composite Landscape Assessment: Assessment Procedures for Spacial Resources, Hazards and Development Suitability; Part II of the Metropolitan Landscape Planning Model (METLAND). Massachusetts: Massachusetts Agricultural Experiment Station University of Masachusett.

Fisher, Q.J., Knipe, R.J., (1998). Fault sealing processes in siliciclastic sediments. In: Jones, G., Fisher, Q.J., Knipe, R.J. (Eds.), Faulting, Fault Sealing and Fluid Flow in Hydrocarbon Reservoirs. Geological Society Special Publication, vol. 147. 117– 134.

Noor, D. (2006). Geologi Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). (2013) Peningkatan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu dari normal ke waspada. Diakses pada 7 Januari 2015, dari alamat http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/aktivitas-gunungapi/239-peningkatan-status-g-tangkubanparahu-dari-normal-ke-waspada-5-10-2013

Turner, Jonathan and Williams, Gareth A. (2004). Sedimentary basin inversion and intra-plate shortening. Earth-Science Reviews, Vol. 65 No. 277-304 Tahun 2004. 279.

Desa Wisata Tangguh Bencana
Studi Kasus : Desa Kebonagung, Bantul, D.I. Yogyakarta

Ratna Eka Suminar[1], Nadiya Pranindita[2]

Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta[1,2]
ratna.es@ugm.ac.id[1], praninditanadiya@gmail.com[2]

ABSTRAK

Sejak tahun 2014 Indonesia mulai menempatkan pariwisata sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi melalui berbagai pendekatan pengembangan wisata alternatif, salah satunya desa wisata. Desa Kebonagung dikenal sebagai salah satu desa wisata pertanian dan budaya di Provinsi D.I. Yogyakarta. Beberapa rumah penduduk ditata sehingga menjadi tempat menginap (homestay) bagi para wisatawan dan potensi pertanian serta budaya seperti belajar membajak sawah dan membatik menjadi atraksi utama yang ditawarkan. Ada pula objek wisata Bendung Tegal yang terletak di ujung desa dimana wisatawan dapat belajar mengenai irigasi ataupun melakukan olahraga dayung. Namun lokasi Desa Kebonagung berada pada kawasan rawan bencana. Gempa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 lalu telah meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Bantul, termasuk Desa Kebonagung. Apalagi desa ini terletak di tepian Sungai Opak yang merupakan jalur sesar aktif pada saat terjadinya gempa. Selain gempa, ternyata Desa Kebonagung juga menghadapi ancaman bencana banjir dan angin ribut. Hal ini menyadarkan Pokdarwis Desa Kebonagung untuk tidak memisahkan pengelolaan desa wisata dan pengelolaan bencana karena bencana tidak hanya mengancam penduduk, tetapi juga wisatawan yang menginap di Desa Kebonagung. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara terhadap narasumber kunci, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seperti apa pengelolaan desa wisata yang terintegrasi dengan pengelolaan bencana di Desa Kebonagung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini penduduk Desa Kebonagung berhasil bangkit dan sekarang menjadi salah satu desa tangguh bencana di Bantul. Reputasi sebagai desa wisata pertanian dan budaya juga tetap dipertahankan, bahkan saat ini lebih berkembang lagi.

Keywords: desa wisata, desa tangguh bencana, manajemen pariwisata, manajemen bencana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pesat industri pariwisata telah terbukti mampu mendorong perkembangan ekonomi melalui berbagai sektor mulai dari pertanian hingga telekomunikasi. Pada tahun 2016, *United Nation – The World Tourism Organization* (UNWTO) menyatakan bahwa saat ini kemajuan bisnis pariwisata telah sejajar dengan perdagangan minyak, produksi makanan atau bahkan industri mobil. Pariwisata telah menjadi salah satu pemain penting dalam perdagangan internasional dan sumber pendapatan utama bagi banyak negara berkembang. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan kompetisi antardestinasi wisata karena kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan ekonomi bergantung pada kualitas wisata yang ditawarkan.UNWTO mencatat pada tahun 2015 sebanyak 279 juta wisatawan datang ke Asia Pasifik dan kurang lebih 8% dari total wisatawan berkunjung ke Asia Tenggara. Indonesia menjadi

salah satu negara favorit wisatawan mancanegara setelah Thailand, Myanmar, Laos, dan Filipina.

Sejalan dengan dinamika pengembangan secara global, gerak perkembangan pariwisatamerambah dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development, village tourism,* maupun *ecotourism*.Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ciri khas desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah (Sastrayuda, 2010).

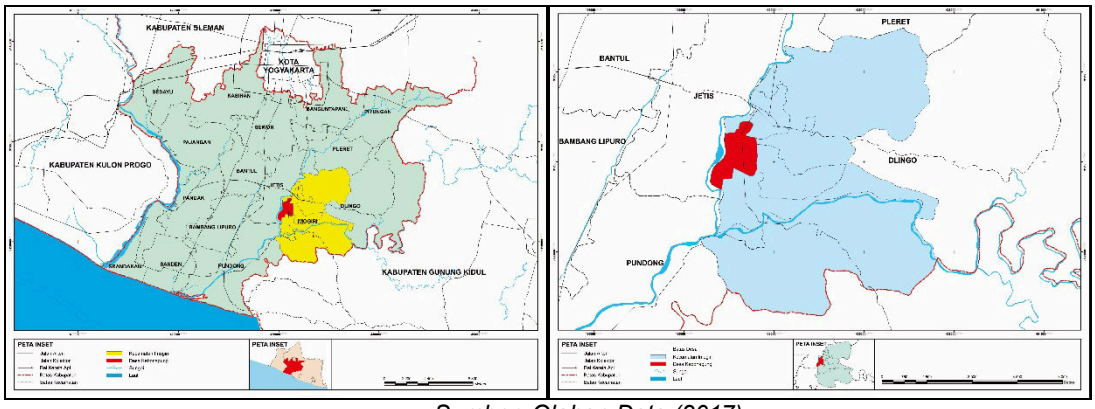
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir setiap wilayah memiliki kerentanan terhadap bencana alam dan mengancam industri pariwisata yang berkembang di wilayah tersebut.Faulkner (2001) mengungkapkan bahwa pertambahan jumlah kejadian bencana dapat memengaruhi industri pariwisata, baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Bencana merupakan ancaman yang waktu dan tempat terjadinya tidak dapat diprediksi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)pada tahun 2016 dari514 kabupaten dan kota di Indonesia, lebih dari 300 kabupaten/kota berada di zona rawan bencana. Selain itu, ProvinsiJawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Aceh merupakan lima provinsi tertinggi yang terpapar bencana selama tahun 2016.

Desa Kebonagung, merupakan salah satu desa wisata di Provinsi D.I. Yogyakarta dan berlokasi di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Desa Wisata Kebonagung dirintis sejak tahun 2003 dengan memanfaatkan potensi pertanian, budaya, dan keberadaan obyek wisata Bendungan Tegal. Namun pada tahun 2006, gempa besar berkekuatan 5,9 SR melanda Provinsi D.I.Yogyakarta dan telah meluluhlantakan seluruh wilayah Desa Kebonagung. Lalu Desa Kebonagung ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul sebagai desa rawan bencana karena lokasinya berada di lintasan Sesar Opak yang disinyalir sebagai pusat gempa tektonik pada sebelas tahun silam. Selain gempa bumi, bencana banjir dan angin ribut juga menjadi ancaman bagi Desa Kebonagung.

Meski sempat hancur akibat bencana gempa, Desa Kebonagung berhasil bangkit dan berkembang menjadi Desa Tangguh Bencana. Semangat yang besar juga muncul dari pengelola Desa Wisata untuk kembali membangun Desa Wisata Kebonagung. Kini tidak hanya diberi predikat sebagai Desa Tangguh Bencana, Desa Kebonagung juga berkembang menjadi salah satu Desa Wisata paling diminati wisatawan dari sisi pertanian dan budaya.

B. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebonagung, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Desa Kebonagung merupakan salah satu desa yang dilintasi Sungai Opak yang melintang dari sisi timur laut hingga selatan Provinsi D.I. Yogyakarta. Luas wilayah Desa Kebonagung adalah 187,11 Ha dan terbagi menjadi lima pedukuhan, yaitu Kanten, Mandingan, Kalangan, Tlogo, dan Jayan.Secara geografis, Desa Kebonagung berada pada ketinggian 100 m di atas permukaan laut. Jarak Desa Kebonagung dari ibukota kecamatan sejauh 2 km, jarak dari ibukota Kabupaten sejauh 8 km, dan jarak dari ibukota provinsi sejauh 17 km. Jumlah penduduk Desa Kebonagung sebesar 3.865 jiwa yang terdiri dari 1.915 pria dan 1.950 wanita (Badan Pusat StatistikKabupaten Bantul, 2016). Pengumpulan datapenelitiandilakukan selama bulan Mei – Agustus 2017 dengan substansi penelitian terkait manajemen desa wisata dan manajemen bencana yang diterapkan di Desa Kebonagung.



Sumber: Olahan Data (2017)

Gambar 1. Peta Konstelasi Wilayah Desa Kebonagung

C. *Tujuan*

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan desa wisata yang terintegrasi dengan pengelolaan bencana yang diterapkan di Desa Kebonagung, Kabupaten Bantul. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi desa wisata lainnya yang terletak pada kawasan rawan bencana untuk mengembangkan desa wisata yang tangguh bencana.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan *in-depth-interview* atau wawancara secara mendalam dengan narasumber terpilih yang terdiri dari aparat Pemerintah Desa Kebonagung, pengelolaDesa Wisata Kebonagung,anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Kebonagung,serta Tim Penanggulangan Bencana (PB) di tiap dusun. Daftar pertanyaan wawancara disusun berdasarkan tujuan penelitian dan merupakan pertanyaan terbuka agar penggalian informasi dari masing-masing narasumber dapat dilakukan lebih mendalam. Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Beberapa teori terkait manajemen bencana dan manajemen wisata digunakan sebagai landasan untuk pembahasan dan penarikan kesimpulan. Manajemen bencana di Desa Kebonagung telah diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana atau disingkat Destana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Adapun aspek-aspek Desa / Kelurahan Tangguh Bencana dalam Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2016 adalah:

a. Legislasi: peraturan untuk mengatur pengurangan risiko bencana.
b. Perencanaan: Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi Desa / Kelurahan, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana.
c. Kelembagaan: Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di setiap desa, Tim Relawan Penanggulangan Bencana di setiap dusun dan tingkat unit administrasi desa (RT dan RW), dan juga memperbaiki hubungan kerjasama dengan pihak berwenang untuk meningkatkan upaya pencegahan bencana
d. Pendanaan: dana dan rencana alokasi dana dari anggaran pemerintah daerah, swadaya masyarakat, pihak swasta, atau pihak lainnya
e. Pengembangan kapasitas: pemberian pengetahuan, pelatihan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya tim relawan dan masyarakat yang berpartisipasi dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan kapasitas

mereka dalam menghadapi bencana dan turut berperan dalam proses perencanaan, implementasi, serta evaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana

f. Penyelenggaraan penanggulangan bencana: program dan kegiatan penanggulangan bencana baik secara struktural maupun non-struktural, sistem peringatan dini (*early warning system*), manajemen waktu penyelamatan diri, dan semua bentuk kegiatan pengurangan risiko bencana dengan mengintervensi program pengembangan dan pembangunan baik fisik maupun non-fisik

Sedangkan kerangka manajemen wisata di suatu daerah rawan bencana menurut Faulkner (2001) merupakan perpaduan antara manajemen wisata dan manajemen bencana. Beberapa tahapan rencana perlu dilakukan mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Mistilis dan Sheldon (2005) juga menjelaskan bahwa manajemen wisata di kawasan rawan bencana perlu memperhatikan tingkat pengetahuan masing-masing *stakeholders* dalam menghadapi setiap siklus bencana, yaitu sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi.

Kerangka manajemen wisata di daerah rawan bencana menurut Faulkner (2001) terbagi menjadi enam tahapan, yakni *Pre-event, Prodormal, Emergency, Intermediate, Long-term (recovery)*, dan *Resolution*. Efektivitas masing-masing tahapan memiliki tiga persyaratan utama, yaitu koordinasi, konsultasi, dan komitmen. Komponen proses pelaksanaan dan keluaran dari setiap aksi di dalam kerangka tersebut harus meliputi penilaian risiko, skala prioritas, perjanjian, pengawasan kapabilitas komunitas, pusat informasi manajemen bencana, media dan pengawasan, sistem peringatan, fleksibilitas, keterlibatan, tingkat pengetahuan, dan pengulasan.

Tidak jauh berbeda dengan Faulkner, Mistilis dan Sheldon (2015) juga memiliki kerangka manajemen yang serupa meski melihat dari sisi tingkat pengetahuan tiap *stakeholders* terkait mitigasi bencana. Kerangka manajemen wisata bencana terbagi menjadi tiga tahap, yaitu *preventive planning stage, knowledge processing,*dan*knowledge dissemination and action.* Tahap pertama merupakan tahapan penilaian kerawanan bencana yang ada di daerah wisata. Dengan mengetahui tingkat kerawanan bencana, maka dapat dikembangkan strategi yang harus dilakukan. Setelah konsep dan strategi mitigasi bencana telah sesuai dan tepat dengan kondisi dan kebutuhan daerah, konsep tersebut perlu dibagikan kepada setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pariwisata mulai dari komunitas masyarakat hingga pemerintah. Pada tahap kedua ini akan diperlukan kerjasama antara pemeritah dengan para ahli untuk memeriksa kembali rencana yang telah disusun. Tahap terakhir adalah ketika rencana dan pengetahuan tersebut kemudian diimplementasi di lapangan.

Mendukung Mistilis dan Sheldon, Damanik (2017) juga menyebutkan bahwa manajemen bencana juga harus berfokus pada manajemen pengunjung. Manajemen pengunjung salah satunya adalah mengedukasi wisatawan terkait mitigasi bencana dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Membatasi jumah pengunjung sesuai dengan daya dukung fisik;
b. Membuat rute keluar-masuk yang berbeda di setiap atraksi wisata dan menghindari pola satu jalur karena akan mengacaukan pergerakan wisatawan;
c. Membuat jalur evakuasi yang steril dari rintangan atau hambatan sekecil apapun dan menjamin keamanan optimal ketika bencana terjadi; dan
d. Membuat tanda dan petunjuk tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wisatawan.



Sumber: (Faulkner, 2001)

Gambar 2. Tourism Disaster Management Framework

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kebonagung merupakan salah satu desa wisata yang cukup populer di Kabupaten Bantul. Pada awal mulanya, Pemerintah Kabupaten Bantul membangun sebuah bendungan di Sungai Opak pada tahun 1997 yang bernama Bendung Tegal untuk membantu irigasi persawahan di sekitarnya dan diresmikan sebagai obyek wisata pada tahun 1998. Lokasi Bendung Tegal ini terletak di Pedukuhan Jayan, Desa Kebonagung. Ternyata keberadaan Bendung Tegal ini mendatangkan banyak wisatawan terutama pada saat tertentu dimana terdapat atraksi lomba olahraga dayung dengan menggunakan perahu naga. Selain itu, Desa Kebonagung juga memiliki lahan pertanian yang luas dan mencakup sekitar 63% dari luas wilayahnya sehingga dapat menjadi potensi untuk kegiatan wisata pertanian. Kemudian pada tahun 2003, dibentuklah

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang pada akhirnya membidani terbentuknya Desa Wisata Kebonagung. Hingga saat ini pengelolaan Desa Wisata Kebonagung dipercayakan kepada Pokdarwis tersebut.



Sumber: Survey Lapangan (2017)

Gambar 3. Potensi Wisata Bendung Tegal (kiri) dan Lahan Pertanian (kanan) di Desa Kebonagung

Wisata pertanian dan budaya dipilih sebagai ciri khas Desa Wisata Kebonagung karena potensi sektor pertanian dan budaya tradisional yang masih dijaga oleh penduduk lokal. Wisatawan dapat ikut melakukan kegiatan pertanian bersama dengan penduduk lokal mulai dari menanam bibit padi, membajak sawak, menumbuk padi, dan menggembala itik. Selain itu, wisatawan juga dapat ikut membuat tempe atau membuat emping di rumah warga. Untuk dapat berkeliling desa, wisatawan dapat menggunakan sepeda ontel.Tidak hanya kegiatan wisata pertanian, Desa Wisata Kebonagung juga menawarkan wisata budaya kesenian tradisional seperti belajar gamelan. Wisatawan dikenalkan dan diajak belajar berbagai macam alat musik tradisional dan juga *macapat* atau menyanyikan sajak kuno jawa. Selain belajar musik tradisional, atraksi wisata budaya lainnya yang ditawarkandi Desa Kebonagung adalah membuat batik tulis, batik keramik, dan batik topeng kayu.

Selain memanfaatkan kedua potensi tersebut, inovasi obyek wisata baru juga turut dikembangkan. Pada tahun 2005, Museum Tani Jawa di Padukuhan Candran Desa Kebonagung diresmikan sebagai salah satu obyek wisata. Museum ini berisi berbagai macam alat tani tradisional, di antaranyaadalah *gejog lesung,* yang menjadi salah satu daya tarik Desa Wisata Kebonagung. Alat ini digunakan untuk menumbuk padi dan mengeluarkan suara yang membentuk irama musik. Pasca bencana gempa tahun 2006, pariwisata Desa Kebonagung mulai bangkit kembali berkat inisiatif masyarakat sendiri sejak akhir 2007. Kemudian pada tahun 2008Bendung Tegaljuga mulai gencar dipromosikankembali oleh pemerintah Kabupaten Bantul maupun pemerintah Desa Kebonagung.Di sini wisatawan dapat belajar tentang sistem irigasi lahan pertanian serta melakukan olahraga dayung.

Desa Wisata Kebonagung berkembang lebih pesat sejak mendapatkan bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pariwisata dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Bantuan pertama diberikan pada tahun 2009 sebesar Rp 50 juta dan digunakan oleh Pokdarwis untuk mengembangkan atraksi pariwisata seperti *Flying Fox* dan *Jathilan*, sertafasilitas pendukung seperti *Sound System*untuk pertunjukkan kesenian. Begitu juga bantuan kedua yang digulirkan di tahun 2010 sebesar Rp 60 juta digunakan untuk perbaikan peralatan pendukung pariwisata. Selain bantuan PNPM, pada tahun tersebut Desa Kebonagung juga menerima bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY berupa 20 unit sepeda ontel yang kemudian digunakan sebagai sarana transportasi bagi wisatawan untuk mengelilingi desa. Tahun 2011 Desa Kebonagung kembali mendapat bantuan yang nilainya semakin besar, yakni Rp 100 juta yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tempat

penginapan(*homestay).Homestay* di sini merupakan rumah-rumah warga yang memang sengaja ditata sehingga dapat dijadikan tempat penginapan bagi para wisatawan. Pada saat menginap, wisatawan akan disuguhkan makanan dan minuman tradisional khas Desa Kebonagung seperti sayur lodeh, tempe bacem, dan wedang uwuh. Para wisatawan juga akan diajak untuk melakukan kegiatan sosial yang sedang berlangsung, seperti Kenduri (doa bersama), Tahlilan (doa untuk orang meninggal), atau Ngeslupi (doa memasuki rumah baru)

Selain menjadi desa wisata, Desa Kebonagung juga merupakan salah satu percontohan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bantul. Hal ini bermula dari bencana gempa yang melanda Yogyakarta tahun 2006 silam. Desa Kebonagung merupakan salah satu desa dengan kerusakan terparah dan memakan korban terbanyak karena lokasi desa yang sangat dekat dengan lintasan Sesar Opak yang disinyalir menjadi sumber gempa. Tercatat jumlah korban di Desa Kebonagung sebanyak 1.200 orang dari 1.211 KK yang ada (Data Kependudukan Desa Kebonagung, 2009).

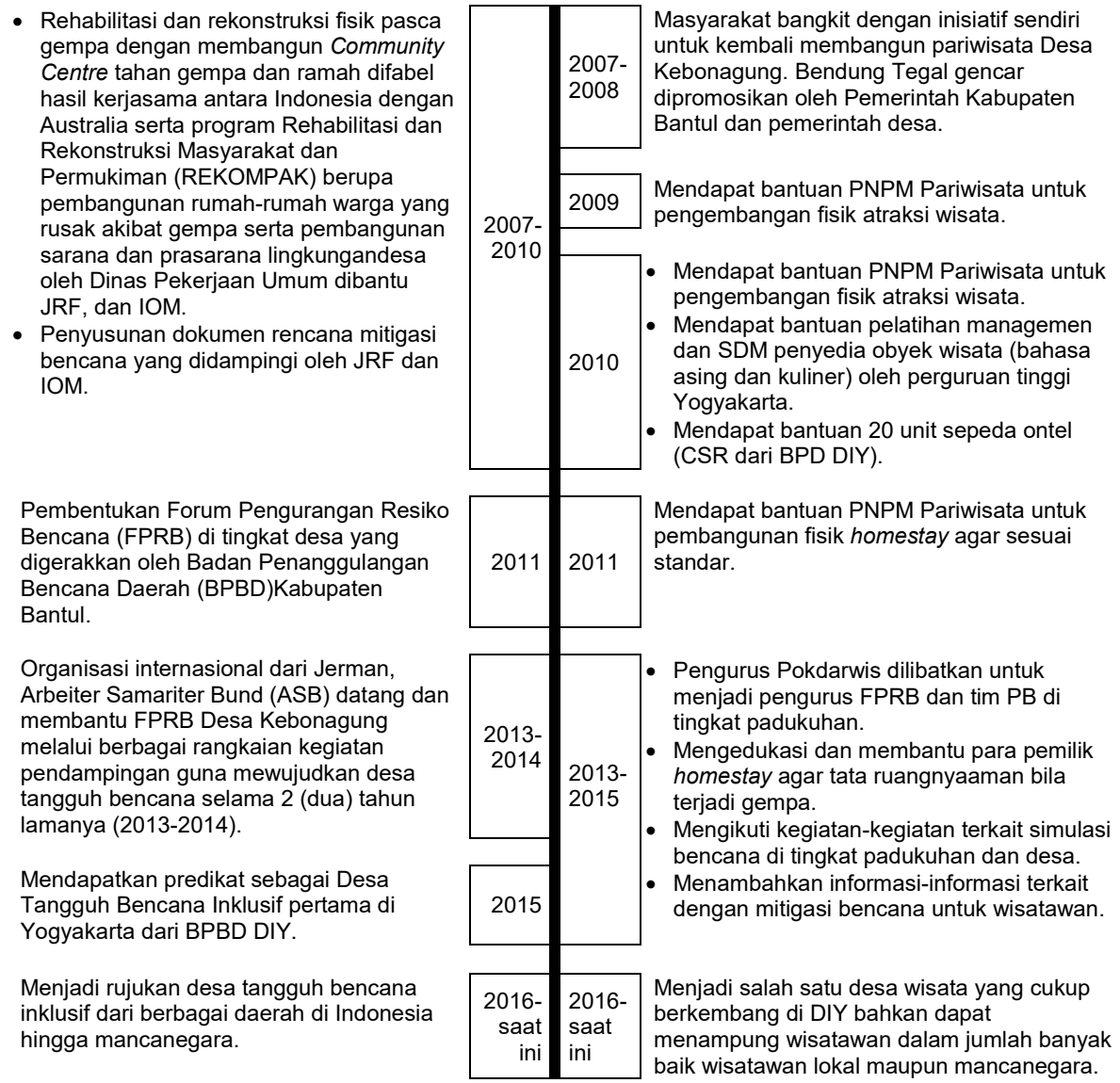


Sumber: Survey Lapangan (2017)

Gambar 4. Beberapa Komponen Pendukung Mitigasi Bencana di Desa Kebonagung

Pada tahun 2006 hingga tahun 2010 dilakukan rekonstruksi pascagempa yang dibantu oleh *Java Reconstruction Fund* (JRF) dan *International Organization for Migration* (IOM). Selain rekonstruksi fisik, mereka juga mendampingi pemerintah Desa Kebonagung dalam menyusun dokumen rencana yang terkait dengan mitigasi bencana. Pada tahun 2011, Desa Kebonagung mulai bangkit dengan membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Bersama dengan salah satu organisasi internasional dari Jerman, *Arbeiter Samariter Bund* (ASB) pada tahun 2013 Desa Kebonagung mempercepat pengembangan masyarakatnya untuk menjadi tangguh bencana. Meski terkesan terlambat memulai bangkit dari keterpurukan akibat bencana gempa, Desa Kebonagung berhasil membuktikan kekuatan komitmen mereka dengan menerima predikat sebagai Desa Tangguh Bencana Inklusif pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari BPBD DIY pada tahun 2015.

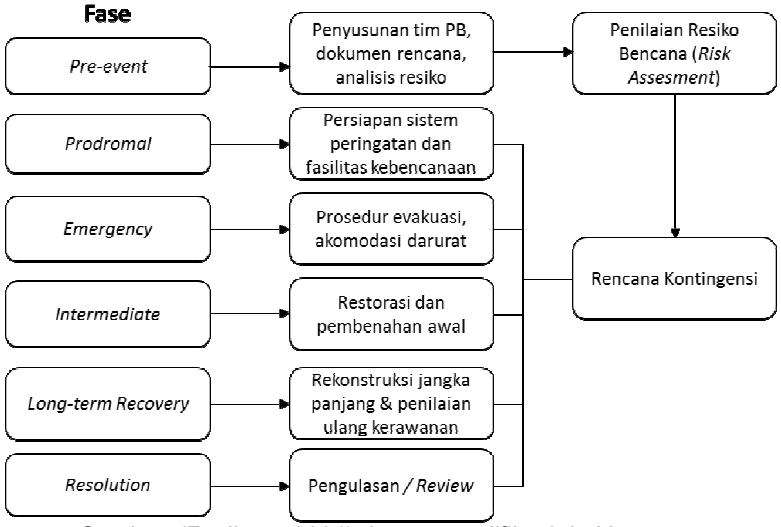
Sebagai Desa Tangguh Bencana		Sebagai Desa Wisata
	1997-1998	Pembangunan dan peresmian Bendung Tegal di Pedukuhan Jayan.
	2003	Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
	2005	Peresmian Museum Tani Jawa di Pedukuhan Candran.
Gempa tektonik	**2006**	**Gempa tektonik**



Sumber: Olahan Data (2017)

Gambar 5. Proses Perkembangan Desa Kebonagung sebagai Desa Wisata dan Desa Tangguh Bencana

Keberhasilan Desa Kebonagung untuk bangkit tidak hanya dalam konteks tangguh bencana saja, melainkan juga membangun kembali pariwisata yang sempat mati pasca bencana gempa. Bencana gempa bumi tahun 2006 tidak menjadi hambatan bagi masyarakat Desa Wisata Kebonagung untuk bangkit dan lebih berkembang.Apalagi kegiatan desa wisata juga merupakan penyokong kehidupan perekonomian masyarakat selain dari sektor pertanian. Keberhasilan ini tidak lain karena pemerintah Desa Kebonagung sukses mengintegrasikan antara manajemen wisata dan manajemen bencana yang diterapkan. Integrasi keduanya terwujud melalui koordinasi dan komitmen dari para pengelola, adanya partisipasi aktif dari masyarakat, dan ketersediaanfasilitas pendukung yang cukup memadai.



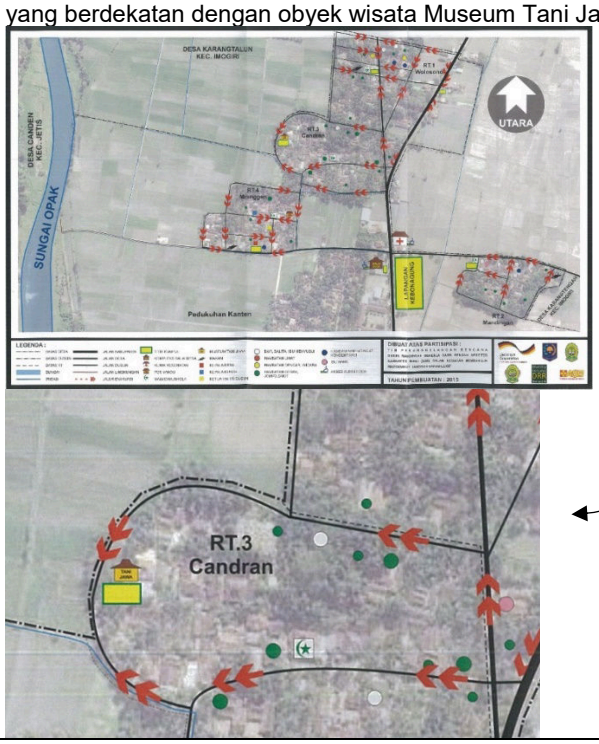
Sumber: (Faulkner, 2001) dengan modifikasi dari lapangan

Gambar 6. *Tourism Disaster Management Framework*

Manajemen wisata yang terintegrasi dengan manajemen kebencanaan yang diterapkan di Desa Wisata Kebonagung adalah seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Manajemen Desa Wisata yang Tangguh Bencana di Desa Kebonagung

Tahapan	Desa Kebonagung
Pre-event	1. *Membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) dan Tim Penanggulangan Bencana (PB).* FPRB dibentuk pada tahun 2011 di tingkat desa, sedangkan Tim PB dibentuk pada tahun 2013 di tingkat padukuhan. Masyarakat Desa Kebonagung mengembangkan diri untuk menjadi tangguh bencana berkat bantuan dari salah satu organisasi internasional dari Jerman, *Arbeiter Samariter Bund (ASB)* pada tahun 2013 sampai 2015. 2. *Menempatkan pengelola Desa Wisata (Pokdarwis) ke dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) maupun Tim Penanggulangan Bencana (PB).* Pembentukan dan penyusunan pengurus FPRB dan PB melibatkan masyarakat yang juga merupakan pengelola Desa Wisata (Pokdarwis). Pelibatan yang demikian akan membantu koordinasi antara kebutuhan desa wisata dengan desa tangguh bencana dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi Desa / Kelurahan, dan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana.
Prodormal	1. *Mengedukasi semua masyarakat terkait mitigasi bencana, baik penyedia jasa pendukung pariwisata maupun masyarakat secara umum.* Desa Kebonagung mendapatkan dukungan besar dari salah satu organisasi sosial internasional asal Jerman, *Arbeiter Samariter Bund* (ASB) dari tahun 2013 sampai 2015. ASB membantu membimbing dan mendampingi masyarakat Desa Kebonagung dalam proses pelaksanaan program pembangunan Desa Kebonagung Tangguh Bencana. Dengan mengedukasi masyarakat desa mengatasi kondisi sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi, kesiapan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana akan meningkat. Kapabilitas masyarakat lokal yang tinggi terkait mitigasi bencana akan membantu wisatawan untuk menghadapi situasi darurat ketika bencana terjadi. Berikut contoh poster prosedur keselamatan saat gempa dan tata ruang aman untuk bangunan tahan gempa.

Tahapan	Desa Kebonagung
	 
	2. *Jalur evakuasi jelas dan menempatkan titik kumpul di dekat obyek wisata.* Upaya secara fisik keruangan juga dilakukan untuk meningkatkan keamanan Desa Wisata Kebonagung. Setelah mendapat bantuan pemberdayaan dari ASB Jerman, Desa Kebonagung memiliki jalur evakuasi yang lebih jelas dan titik kumpul di setiap dusun dan pedukuhan. Titik kumpul juga diletakkan berdekatan dengan obyek wisata seperti Bendungan Tegal dan Museum Tani Jawa.Berikut contoh peta Evakuasi Pedukuhan Manding, Kebonagung dan letak titik kumpul yang berdekatan dengan obyek wisata Museum Tani Jawa 
Emergency	Setiap keluarga di Desa Kebonagung sudah mendapatkan pengetahuan dan pelatihan evakuasi bencana dan juga pembagian peran setiap anggota keluarganya jika terjadi bencana. Ketangguhan yang dimiliki masyarakatnya tentu akan membantu wisatawan untuk proses evakuasi. Selain kesadaran menyelamatkan diri dari masing-masing individu, ketangguhan bencana di Desa Kebonagung juga didukung oleh fasilitas kebencanaan seperti peralatan pertolongan pertama, pengeras suara, dan *Handy Talky* (HT).Dalam penanganan kesiapsiagaan dini, terdapat 7 (tujuh) buah *Handy Talky* (HT) beserta Radio Pancar Ulang yang merupakan hasil kerjasama dengan Radio Pancar Indonesia (RAPI) sebagai sarana penyaluran informasi cepat ketika terjadi bencana dari desa ke desa lain, kecamatan, kabupaten, hingga nasional.

Tahapan	Desa Kebonagung
Intermediate	Merupakan restorasi dan pembenahan awal untuk jangka waktu yang singkat sesaat setelah terjadinya bencana. Tim FPRB dan PB memiliki divisi komunikasi yang juga akan berperan dalam proses pemulihan. Selain itu, Desa Kebonagung juga telah menyiapkan lumbung penyimpanan pangan untuk situasi darurat jika terjadi bencana.
Long-term (recovery)	Merupakan rekonstruksi jangka panjang dan penilaian ulang tingkat kerawanansebagai lanjutan dari tahap sebelumnya untuk jangka waktu yang lama.Tingkat kerawanan Desa Kebonagung mengalami perubahan seiring dengan penilaian ulang akan ancaman bencana yang ada, tidak hanya dari gempa tetapi juga banjir dan angin ribut. Kesadaran akan keterbatasan untuk evakuasi bencana bagi beberapa kelompok seperti anak-anak, wanita, manula, penyandang disabilitas, dan wisatawan juga merupakan poin penting yang kemudian diakomodasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi fisik serta rencana mitigasi bencana di Desa Kebonagung
Resolution	Pengulasan/*review*bertujuan untuk perbaikan sistem dan manajemen. Hasil pengulasan didapatkan melalui pertemuan rutin para pengelola FPRB, PB, maupun Pokdarwis Desa Kebonagung maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, misalnya terkait simulasi bencana dan evakuasi.

Sumber: (Faulkner, 2001) dengan modifikasi dari lapangan

IV. KESIMPULAN

Pengembangan wisata di daerah yang rawan bencana bukan suatu hal yang mudah. Mengembalikan kepercayaan wisatawan atas jaminan keamanan dan keselamatan berwisata di daerah tersebut menjadi tantangan terbesar. Desa Kebonagung mengembangkan diri untuk menjadi desa wisata jauh sebelum terjadinya bencana gempa Yogyakarta pada tahun 2006. Pasca terjadinya gempa, Desa Kebonagung mulai bangkit dan mengembangkan kembali wilayahnya sebagai desa wisata bersamaan dengan desa tangguh bencana. Pengembangan dilakukan dengan mengintegrasikan antara manajemen wisata dengan manajemen bencana. Keduanya berfokus pada koordinasi antara pengelola dan rencana aksi, peningkatan kapabilitas penduduk lokal, serta kelengkapan fasilitas mitigasi bencana.Jika diidentifikasi dengan menggunakan skema Faulkner (2001), berikut adalah strategi yang dilakukan oleh Desa Kebonagung, yaitu : (1) tahap *Pre-event* dengan menempatkan pengelola desa wisata sebagai pengurus di Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan tim Penanggulangan Bencana (PB)untuk menjaga integrasi antara desa tangguh bencana dengan desa wisata; (2) tahap *Prodormal* dengan mengedukasi seluruh masyarakat termasuk penyelenggara jasa pendukung wisata dan wisatawan terkait dengan mitigasi bencana serta adanya jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas; (3) tahap *Emergency* denganadanya pembagian peran setiap anggota keluarga dan masyarakat ketika terjadinya bencana serta menyediakan sarana pendukung untuk kesiapsiagaan dini; (4) tahap *Intermediate* dengan pembentukan divisi komunikasi di FPRB dan PB untuk mendukung komunikasi pasca bencana serta penyiapan lumbung penyimpanan pangan untuk kondisi darurat; (5) tahap *Long-term recovery*dengan perhitungan ulang tingkat kerawanan bencana Desa Kebonagung dan pengakomodasian bagi kelompok tertentu untuk mitigasi bencana seperti anak-anak, wanita, manula, penyandang disabilitas, dan wisatawan; dan (6) tahap *Resolution* melalui pengulasanmelalui pertemuan rutin para pengelola maupun kegiatan-kegiatan terkait simulasi bencana dan evakuasi yang bertujuan untuk perbaikan sistem dan manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

Al.Indratno. Wisata 4 in 1 Desa Kebonagung Yogyakarta. Diakses pada 14 Juli 2017, dari alamat https://gudeg.net/direktori/587/wisata-4-in-1-desa-kebonagung-yogyakarta.html

Becken, Susanne, & Hughey, Kennet F.D. (2012). *Linking Tourism into Emergency Structures to Enhance Disaster Risk Reduction*. Tourism Management. 77-85.

Damanik, J.(2017). *Manajemen Pengunjung*. Kedaulatan Rakyat 8 Juli 2017. 1.

Faulkner, Bill.(2001). *Towards a Framework for Tourism Disaster Management*. Tourism Management. 135-147.

Hystad, Perry W., &Keller, Peter C. (2008). *Towards a Destination Tourism Disster Management Framework: Long-term Lessons from a Forest Fire Disaster*. Tourism Management. 151-162.

Kebonagung.(2009). Wisata Kebonagung. Diakses pada 14 Juli 2017, dari alamat http://wisatakebonagung.blogspot.co.id/

Mistilis,N., & Sheldon, P. (2005). *Knowledge Management for Tourism Crises and Disasters*. Jamaica: The University of West Indies Kingston.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa / Kelurahan Tangguh Bencana.

Sitam, N.(2016).*Asyiknya Liburan di Desa Wisata Kebonagung, Imogiri*. Diakses pada 14 Juli 2017, dari alamat www.nasirullahsitam.com

Sukma, A. (2017). Wisata Edukasi Bertani di Desa Wisata Kebonagung Imogiri. Diakses pada 14 Juli 2017, dari alamat http://www.lagilibur.com/2017/06/desa-wisata-kebonagung-bantul.html

UNWTO.(2016). *UNWTO Tourism Highlights, 2016 Editions*.UNWTO.

Penentuan Prioritas Pengembangan Pariwisata Berbasis Daya Dukung di Kawasan Puncak; Studi Kasus Lokasi Pariwisata di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Setyardi Pratika Mulya[1,2], Ernan Rustiadi[1,2], Andrea Emma Pravitasari[1,2]

[1)]Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Jl. Meranti No. 1 Kampus IPB Darmaga 16680
[2)]Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W), LPPM IPB
email:setya_pm@yahoo.com atau setyardi@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

*Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2035, pengelolaan Puncak diarahkan padatercapainya keseimbangan ekologi sebagai kawasan resapan air dan pengendali banjir.Namun demikian, kawasan Puncak berkembang pesat menjadi kawasan pariwisata.Keselarasan fungsi ekologi, sosial, ekonomi dan wisata di Puncak menjadi perhatian.Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Menganalisis daya dukung lahan berbasis kesesuaian lahan untuk lokasi wisata, (2). Identifikasi hirarki berdasarkan sarana prasarana pendukung pariwisata, dan (3). Menentukan prioritas pengembangan kawasan wisata berbasis daya dukung, pola ruang dan hirarki.Data yang digunakan pada penelitianini adalah data fisik wilayah, peta penggunaan tanah BPN (2012), pola ruang RTRW 2015-2035 Kabupaten Bogor dan potensi desa tahun 2014. Analisis yang digunakan adalah analisis kesesuaian lahan untuk lokasi wisata (piknik),SIG, skalogram,dan matriks logik.Kriteria kesesuaian lahan yang digunakan mengacu pada USDA (1968) dalam Hardjowigeno et al. (2007).Berdasarkan analisis dihasilkan (1).Kelas kesesuaian lahan untuk wisata terbagi menjadi tigakelas, yaitu:**sesuai** (S) seluas 0,02 hektar atau 0,01% dari luas lahan wisata, **sesuai bersyarat** (SB) 200 hektar (64%), dan **tidak sesuai** (TS) 111 hektar (36%), (2). Lokasi wisata **berhirarki 1** seluas 44 hektar (14%), **hirarki 2** seluas 43 hektar (13%) dan **hirarki 3** seluas 225 hektar (72%), (3). Pengembangan lokasi wisata dengan prioritas pertama (**P1**) seluas 48,03 hektar, prioritas kedua (**P2**) seluas 132,95 hektar, dan prioritas ketiga (**P3**) seluas 71,94 hektar.Lokasi wisata terluas tersebar di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan.Terbatasnya daya dukung lingkungan di kawasan Puncak untuk pariwisata perlu diantisipasi dengan mengatur kebijakan RTRW selanjutnya.*

***Kata kunci**: puncak, daya dukung, pariwisata, hirarki, tata ruang*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Secara Nasional, kawasan Puncak merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur) (Pradono et al, 2016). Kawasan ini dikategorikan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah pada aspek ekonomi dan lingkungan.Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan Puncak diarahkan untuk terselenggaranya keseimbangan ekologi sebagai kawasan resapan air dan pengendali banjir.

Kawasan Puncak memiliki beragam fungsi strategis, antara lain sebagai kawasan lindung dan tata air, sumber plasma nutfah, kawasan penyangga dan budidaya pertanian dan non pertanian. Dikarenakan posisi geografis yang strategis, kawasan Puncak juga dianggap sebagai kawasan *hinterland* yang menjaga kehidupan penduduk *urban* di sekitarnya seperti Depok, Bogor dan Jakarta.Eksistensi kawasan ini sangat diperhitungkan karena dampak permasalahan di dalamnya mempengaruhi kawasan-

kawasan penting disekitarnya. Kawasan puncak sebagai kawasan pariwisata memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dan pembangunan daerah namun demikian disisi lain dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial (Maggi et al, 2017).

Perkembangan pembangunan di kawasan Puncak sulit dikendalikan, sejak terbukanya jalur intensif Jakarta-Bandung pada tahun 1960-an. Dominasi pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan telah menyebabkan perubahan perkembangan fisik dan sosial yang pesat.Kondisi ini mengakibatkan perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukannya.Sebagai contoh, kawasan hutan, daerah pertanian, dan daerah resapan air telah berubah menjadi kawasan perumahan bahkan untuk industri, seperti halnya terindikasi terjadi di kawasan Puncak.Akibat dari perubahan fungsi ini munculnya persoalan lingkungan yang memiliki dampak ekologis seperti banjir, erosi, tanah longsor dan lain-lain, yang tidak saja terjadi di kawasan Puncak Bogor tapi juga pada kawasan-kawasan di sekitarnya.Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul ini mengindikasikan telah terlampauinya daya dukung lingkungan (*overshoot*) (Rachmawati et al, 2013).Tercatat, jumlah pengunjung ke kawasan Puncak yang berasal dari Bogor hanya 8% dan sisanya berasal dari Sukabumi (1,5%), Bandung (14%), Jakarta (70%) dan daerah lain (11%) (Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, 2004).

Peran multifungsi kawasan Puncak sebagai kawasan konservasi dan pariwisata memerlukan suatu penanganan yang terpadu dan komprehensif antar berbagai sektor, lembaga dan pemangku kewenangan lainnya dalam mengelola kawasan dengan baik (Dwikorawati, 2012).Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini adalah memperketat aturan di kawasan Puncak. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2008 tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur merupakan ketentuan yang memuat gambaran pengaruh kesadaran lingkungan pada pembangunan di kawasan ini. Sebelumnya, telah diterbitkan Pearturan Pemerintah (PP) nomor 13/1963, Keputusan Presiden (Keppres) 48/1983, Keppres nomor 79/1985, PP nomor 47/1997, dan Keppres 114/1999 yang pada waktunya peraturan-peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan operasional penataan di kawasan Puncak. Namun demikian, semuanya dianggap tidak relevan dengan dinamika pembangunan di lapangan, karena peraturan yang ada tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.Pentingnya perhatian terhadap daya dukung lingkungan terjadi ketika manusia menyadari bahwa daya dukung lingkungan memiliki keterbatasan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain, walaupun tidak mudah dalam menentukannya (Rusli et al, 2010). Menjadi persoalan bagi manusia bagaimana agar lingkungan beserta ekosistemnya mampu secara berkelanjutan mendukung kehidupannya dengan tingkat kesejahteraan yang dipandang memadai.Melihat permasalahan tersebut, maka penelitian ini diarahkan untuk meneliti daya dukung lingkungan kawasan puncak untuk pengembangan pariwisata. Hal ini ditujukan karena wilayah tersebut saat ini terus berkembang menjadi kawasan wisata dan terindikasi daya dukung lingkungannya telah terlampaui.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis daya dukung untuk menentukan prioritas pengembangan pariwisata berbasis analisis kesesuaian lahan (lokasi wisata/piknik) dengan mempertimbangkan pola ruang RTRW dan hirarki berdasarkan fasilitas pendukung.Ruang lingkup area studi dalam penelitian ini adalah kawasan Puncak yangtermasuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Cisarua. Lingkup datanya berupa sebaran lokasi pariwisata berdasarkan peta penggunaan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2012 skala 1:10.000. Lokasi wisata yang dimaksud adalah lokasi-lokasi menurut peta BPN berupa penggunaan untuk jasa pariwisata, taman, atau situ/danau/waduk. Beberapa peta dasar disajikan dalam lingkup kecamatan (Cisarua).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lokasi pariwisata dilokasi studi dilihat berdasarkan daya dukung lingkungan, pola ruang RTRW, dan hirarki serta menentukan prioritas pengembangannya. Sementara itu, tujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Menganalisis daya dukung lahan berbasis analisis kesesuaian lahan untuk lokasi wisata, (2). Identifikasi hirarki berdasarkan sarana prasarana pendukung pariwisata, dan (3). Menentukan prioritas pengembangan kawasan wisata berbasis daya dukung, pola ruang dan hirarki.

II. Metodologi

A. Metode yang digunakan

Metode yang digunakan terdiri dari analisis kesesuaian lahan, Sistem Informasi Geografi (SIG), skalogram, dan analisis matrik logik penentuan prioritas pengembangan.Analisis selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

1. Analisis Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Wisata (piknik)

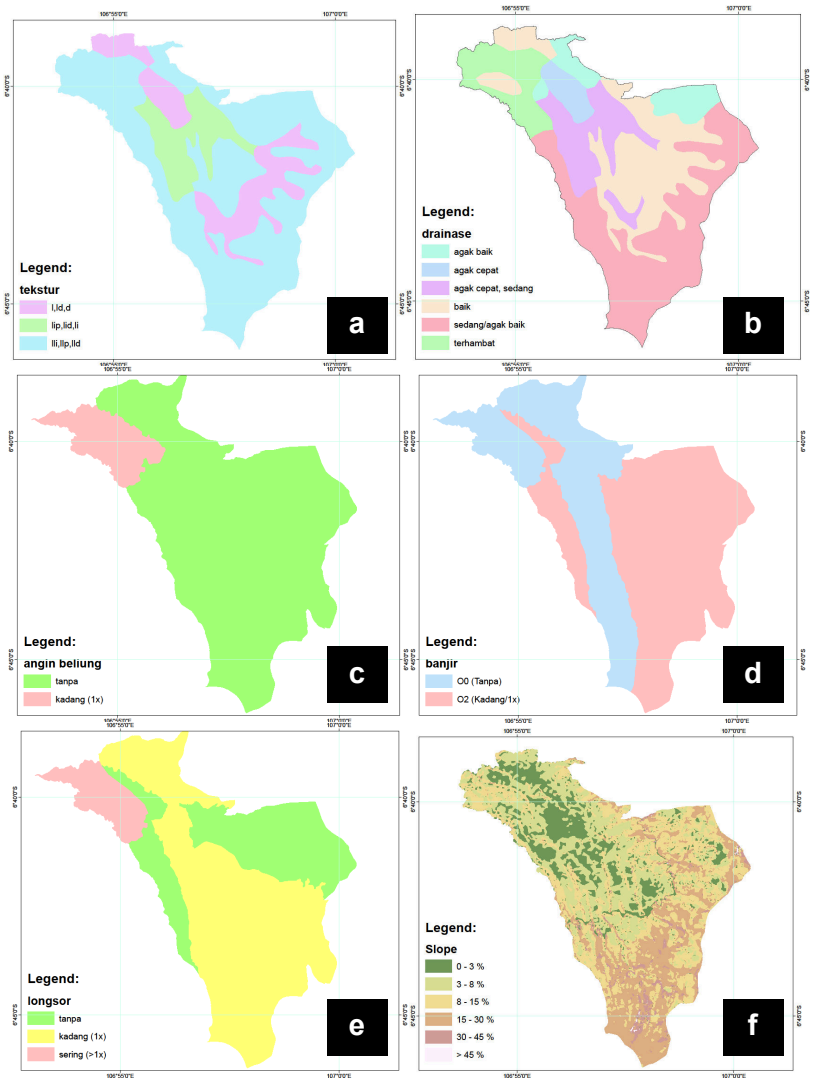
Konsep daya dukung menekankan kemampuan suatu daerah (wilayah) untuk mendukung jumlah maksimum populasi suatu spesies secara berkelanjutan pada suatu tingkat kebutuhan sumberdaya yang diperlukan (Ranganathan and Daily, 2003).Dengan demikian, kemampuan ini sangat tergantung pada kekayaan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu daerah dan tingkat kebutuhan sumberdaya oleh suatu organisme.Menurut Mathieson dan Wall, 1982, daya dukung pariwisata adalah jumlah maksimum manusia yang dapat ditampung di suatu lokasi tanpa mengakibatkan penurunan kualitas fisik lingkungan, tanpa mengakibatkan penurunan kualitas kenyamanan pengunjung wisata dan tanpa mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi, sosial, ekonomi, dan budaya di sekitar areal wisata. Dalam penelitian ini pendekatan analisis yang digunakan adalah dilihat dari kapasitas penyediaan (daya dukung) berbasis analisis kesesuaian lahan.

Analisis kesesuaian lahan adalah suatu teknik analisis penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini *(present)* atau setelah diadakan perbaikan *(improvement),* lebih spesifik lagi kesesuaian lahan tersebut ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungannya, yang terdiri atas iklim, tanah, topografi, hidrologi, dan atau drainase sesuai untuk penggunaan tertentu (Djaenudin *et al.,* 2003). Kriteria kesesuaian lahan untuk lokasi wisata(Tabel 1) yang digunakan mengacu padaUSDA, 1968 dalam Hardjowigeno et al, 2007(dimodifikasi).Prosesevaluasi lahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara *matching* (mencocokkan) antara karakteristik lahan dari setiap SPT dengan persyaratan kriteria kesesuaian lahan yang telah ditetapkan. Hasil analisis kesesuaian lahan yang diperoleh nantinya berupa kesesuaian lahan aktual.

Tabel 1. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Pariwisata

No	Kriteria (simbol)	Kelas Kesesuaian dan Faktor Penghambat		
		Sesuai (S)	Sesuai Bersyarat (SB)	Tidak Sesuai (TS)
1	Tekstur tanah permukaan*)	Lp, lph, lpsh, l, ld	Lli, llip, llid, pl, p	Lip, lid, li
2	Drainase tanah	Cepat, agak cepat, baik, agak baik.	Agak baik, dan agak jelek	Jelek, sangat jelek.
3	Kejadian angin puting beliung**)	Tidak pernah	1 kali kejadian per tahun	Lebih dari 1 kali per tahun
4	Kejadian banjir	Tanpa	Musiman	Permanen
5	Kejadian longsor**)	Tidak pernah	1 kali kejadian	Lebih dari 1 kali
6	Lereng (*slope*)	<8%	8-15%	>15%

Keterangan: *) lp=lempung berpasir, lph=lempung berpasir halus, lpsh=lempung berpasir sangat halus, l=lempung, ld=lempung berdebu, lli= lempung liat, llip=lempung liat berpasir, llid=lempung liat berdebu, pl=pasir berlempung, p=pasir, lip=liat berpasir, lid=liat berdebu, li=liat, p=pasir. **) modifikasi



Gambar 1. Peta Tematik untuk Penentuan Kesesuaian Lahan, yaitu peta (a). Tekstur tanah, (b). Drainase, (c). Kejadian Angin Puting Beliung, (d). Kejadian Banjir, (e). Kejadian Longsor, dan (f) Kemiringan Lereng.

2. Analisis Skalogram

Analisis skalogramdigunakan untuk mengetahui hirarki perkembangan lokasi wisata berdasarkan data jumlah fasilitas pendukung pariwisata. Semakin banyak dan beragamfasilitas yang ada di wilayah tersebut,tingkat perkembangan wilayah tersebut semakin tinggi. Metode ini mendeskripsikan bahwa hirarki yang tinggi (hirarki 1) terdapat pada wilayah yang memiliki jumlah jenis dan jumlah fasilitas pendukung pariwisata yang lebih banyak, dan begitupun sebaliknya.Wilayah dengan hirarki 1, menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki fasilitas penunjang pariwisata yang paling lengkap dibandingkan hirarki lainnya (hirarki 2 dan 3).

Data yang digunakan adalah data potensi desa Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 (BPS, 2014), dengan menggunakan 18 (delapan belas) parameter, yaitu: jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, praktek dokter, pasar, minimarket, toko, warung makan, restoran, hotel, penginapan, bank, SPBU, pemancar

radio, tower telekomunikasi, panjang jalan, dan panjang jembatan. Rumus matematis analisis skalogram adalah sebagai berikut (Rustiadi et al,2009):

$$IF_j = \sum_{k=1}^{m} \left[\frac{F_{ij}}{b_j} x \frac{a_i}{N} \right] \quad \text{..... (1)}$$

Dimana:

IFj = Indeks fasilitas pendukung pariwisata pada wilayah ke i
Fij = Jumlah fasilitas pendukung pariwisata i pada wilayah ke j
bj = Jumlah fasilitas pendukung pariwisata di wilayah ke j
ai = Jumlah kecamatan yang memiliki fasilitas pendukung pariwisata
m = Jenis fasilitas pendukung pariwisata yang ada
N = Jumlah wilayah (desa)

Dalam menentukan indeks fasilitas pendukung pariwisata**(IFj)**berikut hirarkinya, maka digunakan ketentuan sebagai berikut: hirarki 1 jika **IFj**> rataan (IFj) + Stdev (IFj), hirarki 2 jika rataan (IFj) <**IFj**< Rataan (IFj) + Stdev (IFj), dan hirarki 3 jika **IFj**< Rataan (IFj). Selanjutnya setelah diketahui hirarki desa maka dibuat peta distribusi spasial hirarkinya.

3. *Prioritas Pengembangan Lokasi Wisata Berdasarkan Kesesuaian Lahan, Pola Ruang RTRW, dan Hirarki Fasilitas Sarana Prasarana Wilayah*

Analisis prioritas pengembangan lokasi wisata dianalisis dengan menggunakan *tool* analisis geoinformasi spasial dengan teknik tumpang tindih informasi antara hasil analisis kesesuaian lahan, rencana pola ruang (RTRW), dan hasil analisis hirarki.Selanjutnya kombinasi ketiga variabel tersebut dijelaskan dalam matriks yang disajikan pada Tabel 2.Penentuan prioritas pengembangan didasarkan pada kombinasi ketiga parameter dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Parameter kesesuaian lahan menyajikan gambaran kondisi eksisting lokasi wisata berdasarkan kondisi fisiknya, sedangkan pola ruang RTRW memberikan gambaran lokasi wisata berdasarkan rencana pemanfaatannya 20 tahun mendatang (kebijakan daerah), dan hirarki menggambarkan kondisi eksisting fasilitas yang dimiliki masing-masing wilayah (desa) yang mendukung lokasi pariwisata didalamnya.Fasilitas pendukung pariwisata tersebut diantaranya fasilitas kesehatan, sosial, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya).Oleh karena itu, lokasi wisata yang diprioritaskan menjadi prioritas utama (P1) merupakan lokasi wisata yang sesuai dari berbagai aspek, baik fisik, kebijakan dan sarana prasarana pendukungnya, sehingga pengembangannya dapat didorong lebih besar lagi.Sementara itu, lokasi wisata yang menjadi prioritas ketiga (P3), sebaiknya tidak perlu dikembangkan lebih intens, karena memiliki keterbatasan khususnya dari aspek fisik maupun kebijakan.Prioritas kedua (P2) memiliki keterbatasan diantara P1 dan P3, yang berarti strategi pengembangannya dapat dilakukan apabila kendala dapat diselesaikan dengan baik.

Tabel 2. Matriks Prioritas Pengembangan Lokasi Wisata

		Kelas Kesesuaian Lahan untuk Pariwisata								
		Sesuai			Sesuai Bersyarat			Tidak Sesuai		
Pola Ruang RTRW	Hutan Konservasi	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**
	Kawasan Hutan Lindung	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**	**P3**
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	**P2**	**P2**	**P3**	**P2**	**P2**	**P3**	**P2**	**P3**	**P3**
	Kawasan Peruntukan Lahan Kering	**P1**	**P1**	**P1**	**P1**	**P2**	**P2**	**P2**	**P3**	**P3**
	Kawasan Peruntukan Perkebunan	**P1**	**P1**	**P1**	**P1**	**P2**	**P2**	**P2**	**P3**	**P3**
	Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	**P1**	**P1**	**P1**	**P1**	**P2**	**P2**	**P2**	**P3**	**P3**

	Permukiman Perkotaan Kepadatan Rendah	P1	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P3	P3
	Permukiman Perkotaan Kepadatan Sedang	P1	P1	P1	P1	P2	P2	P2	P3	P3
	Situ	P1	P1	P1	P1	P1	P2	P2	P3	P3
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
		Hirarki								

Keterangan: P1=Prioritas 1; P2=Prioritas 2; P3=Prioritas 3

Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan penelitian ini adalah 1).pengumpulan data, 2). pengolahan/analisis data, 3). penulisan hasil dan pembahasan. Data yang dikumpulkan antara lain; data potensi desa tahun 2014, peta penggunaan tanah Tahun 2012 Skala 1:10.000, peta RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, serta peta dasar dan tematik lainnya.

III. Hasil dan Pembahasan

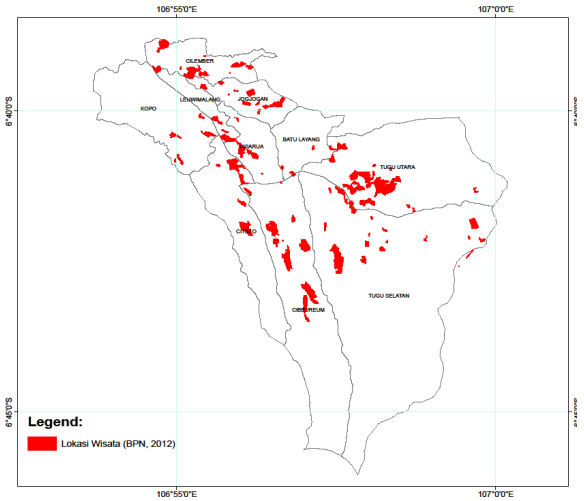
a. Penggunaan Lahan untuk Pariwisata

Menurut peta penggunaan tanah BPN tahun 2012, luas lahan yang dikategorikan sebagai kawasan wisata adalah seluas 312,57 hektar yang tersebar di beberapa desa. Kawasan wisata yang paling luas terdistribusi di Kecamatan Tugu Utara dan Tugu Selatan.Definisi lokasi pariwisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lahan dengan penggunaan (tanah) berupa jasa pariwisata, taman, dan situ/danau pada peta BPN (2012). Distribusi sebaran kawasan (lokasi) wisata selengkapnya sesuai disajikan pada Gambar 2 dan Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui lokasi pariwisata yang paling luas adalah di Tugu Utara yaitu seluas 79 hektar atau sekitar 25,3% dari luas total lokasi wisata dan kemudian diikuti oleh Desa Tugu Selatan (62 hektar) dan Cibeureum (61 hektar). Beberapa objek wisata yang terdapat di Desa Tugu Utara antara lain Bumi Perkemahan Taman Wisata Alam Citamiang, Telaga Saat dan lain sebagainya, sedangkan objek wisata di Tugu Selatan diantaranya adalah Cagar Alam Telaga Warna, Agrowisata Gunung Mas, Bukit Gantole dan lain sebagainya. Objek wisata tersebut merupakan lokasi favorit wisatawan yang berkunjung ke puncak.

Tabel 3. Distribusi luas lokasi pariwisata per desa

No	Desa	ha	%
1	Batu Layang	2.41	0.77
2	Cibeureum	61.19	19.58
3	Cilember	24.78	7.93
4	Cisarua	15.92	5.09
5	Citeko	16.59	5.31
6	Jogjogan	17.34	5.55
7	Kopo	21.78	6.97
8	Leuwimalang	11.18	3.58
9	Tugu Selatan	62.20	19.90
10	Tugu Utara	79.17	25.33
	Jumlah	**312.57**	**100.00**



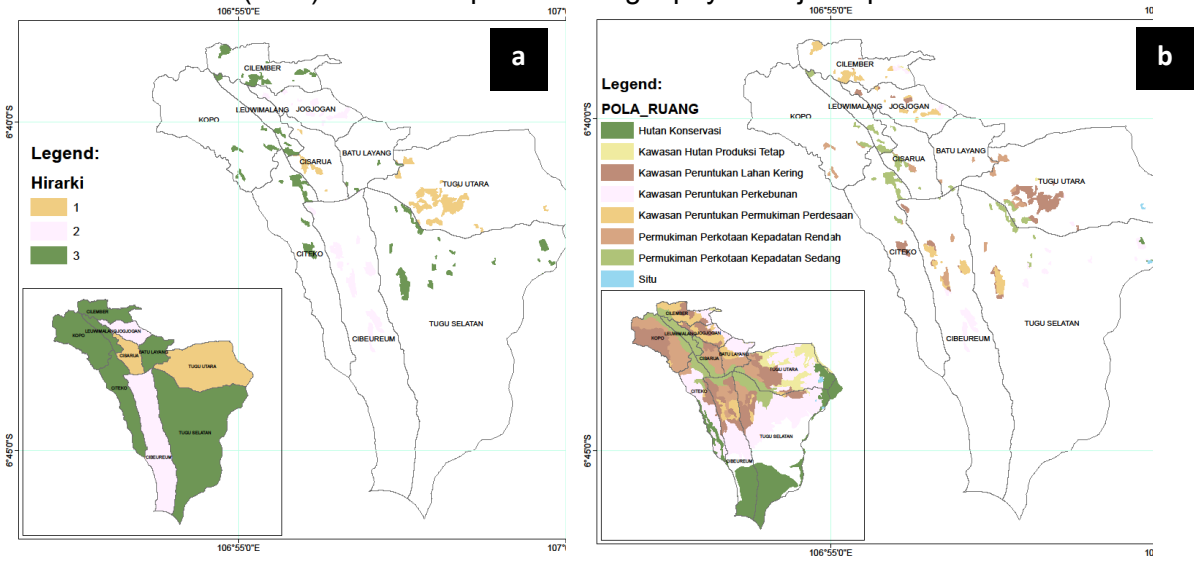
Gambar 2. Peta Sebaran Lokasi Pariwisata

b. Pola Ruang RTRW Lokasi Pariwisata

Menurut pola ruang RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, lokasi penggunaan tanah untuk pariwisata masuk pada 8 (delapan) nomenklatur pola ruang, yaitu hutan konservasi, kawasan hutan produksi tetap, kawasan peruntukan lahan kering, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan permukiman perdesaan, permukiman perkotaan kepadatan rendah, permukiman perkotaan kepadatan sedang, dan situ. Lokasi studi (pariwisata) yang paling luas adalah masuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas 99 hektar atau sekitar 31.79%, kemudian diikuti kawasan permukiman perkotaan kepadatan sedang seluas 83 hektar (26%), selanjutnya kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah seluas 74 hektar (23%). Gambaran spasial selengkapnya sesuai disajikan pada Gambar 3a.

c. Hirarki Perkembangan Desa Berdasarkan Fasilitas Pendukung Pariwisata

Hirarki perkembangan desa berdasarkan fasilitas pendukung pariwisata dilihat berdasarkan jumlah fasilitas kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lain sebagainya yang diperoleh dari data BPS 2014. Informasi yang disajikan dalam uraian berikut adalah dalam cakupan lokasi pariwisata.Hirarki desa dalam penelitian ini menunjukkan hirarki lokasi wisata, maksudnya adalah apabila suatu lokasi pariwisata berada pada Desa A, maka secara tidak langsung lokasi pariwisata tersebut memiliki hirarki seperti hirarki yang dimiliki oleh Desa A. Berdasarkan hasil perhitungan, luas lokasi wisata yang memiliki hirarki 1 seluas 44 hektar (14%), sedangkan hirarki 2 seluas 43 hektar (13%) dan hirarki 3 seluas 225 hektar (72%). Sebaran spasial selengkapnya disajikan pada Gambar 3b.



Gambar 3. Hirarki (a) dan Pola Ruang RTRW (b) Lokasi Studi

d. Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Wisata (piknik)

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, hasil analisis dapatdirinci sesuai disajikan pada Tabel 4 dan 5. Hasil analisis dibedakan menjadi dua, yaitu hasil analisis kesesuaian lahan pada tingkat kelas dan sub kelas. Analisis kesesuaian lahan tingkat kelas hanya menyajikan kelas kesesuaian lahannya saja (sesuai atau tidaknya), sementara itu analisis kesesuaian lahan tingkat sub kelas menyajikan hasil analisis selain kelasnya juga dengan menambahkan informasi pembatas lahannya.

Menurut hasil analisis kesesuaian lahan pada tingkat kelas, kesesuaian lahan yang paling luas untuk lokasi wisata di Kecamatan Cisarua adalah pada kelas kesesuaian lahan SB (sesuai bersyarat), yaitu seluas 200 ribu hektar atau sekitar 64% dari luas lokasi wisata, kemudian diikuti TS (tidak sesuai) sebesar 35% dan S (sesuai) sebesar 0.01%. Sebaran selengkapnya hasil analisis kesesuaian lahan pada tingkat kelas sesuai

disajikan pada Gambar 4a. Sementara itu, berdasarkan tingkat sub kelas, sub kelas kesesuaian lahan yang paling luas adalah TS.d, yang artinya tidak sesuai untuk permukiman dengan pembatas drainase tanah. Luas TS.d sebesar 301 ribu hektar atau sebesar 42 % dari luas kawasan Jabodetabekpunjur. Sebaran hasil analisis kesesuaian lahan pada tingkat sub kelas sesuai disajikan pada Gambar 4b.

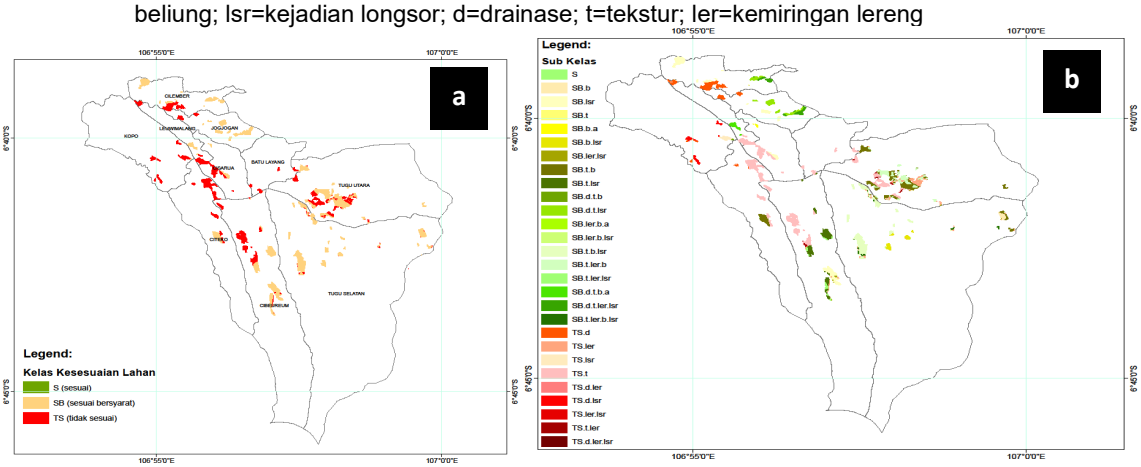
Tabel 4. Hasil Analisis Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Wisata pada Tingkat Kelas

No	Kelas	Luas (ha)	%
1	S	0.02	0.01
2	SB	200.63	64.19
3	TS	111.22	35.58
4	No Data	0.71	0.23
	Jumlah	**312.57**	**100.00**

Tabel 5. Hasil Analisis Kesesuaian Lahan untuk Lokasi Wisata pada Tingkat Sub Kelas

No	Sub Kelas	Luas (ha)	%	No	Sub Kelas	Luas (ha)	%
1	S	0.02	0.01	16	SB.t.ler.b	15.25	4.88
2	SB.b	11.03	3.53	17	SB.t.ler.b.lsr	1.45	0.46
3	SB.b.a	0.50	0.16	18	SB.t.ler.lsr	2.12	0.68
4	SB.b.lsr	31.24	10.00	19	SB.t.lsr	17.31	5.54
5	SB.d.t.b	0.15	0.05	20	TS.d	17.18	5.50
6	SB.d.t.b.a	3.07	0.98	21	TS.d.ler	0.09	0.03
7	SB.d.t.ler.lsr	5.79	1.85	22	TS.d.ler.lsr	0.00	0.00
8	SB.d.t.lsr	10.55	3.38	23	TS.d.lsr	9.03	2.89
9	SB.ler.b.a	0.00	0.00	24	TS.ler	7.69	2.46
10	SB.ler.b.lsr	1.01	0.32	25	TS.ler.lsr	0.01	0.00
11	SB.ler.lsr	2.11	0.68	26	TS.lsr	11.94	3.82
12	SB.lsr	33.27	10.64	27	TS.t	64.28	20.57
13	SB.t	0.02	0.01	28	TS.t.ler	0.99	0.32
14	SB.t.b	39.01	12.48	29	(blank)	0.71	0.23
15	SB.t.b.lsr	26.73	8.55		**Jumlah**	**312.57**	**100.00**

Keterangan: S=sesuai; SB=sesuai bersyarat; TS=tidak sesuai; b=kejadian banjir; a=kejadian angin puting beliung; lsr=kejadian longsor; d=drainase; t=tekstur; ler=kemiringan lereng



Gambar 4.Kesesuaian Lahan Lokasi Pariwisata di Kecamatan Cisarua (a) tingkat kelas, dan (b) tingkat sub kelas

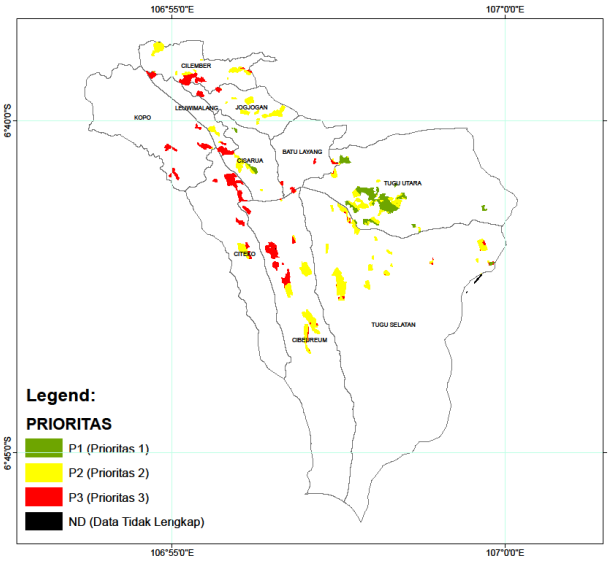
e. Prioritas Pengembangan Lokasi Wisata Berdasarkan Kesesuaian Lahan, Pola Ruang dan Hirarki

Analisis prioritas pengembangan lokasi wisata ini hanya berfokus pada lahan yang berdasarkan penggunaan tanahnya untuk aktivitas pariwisata.Prioritas pengembangan lokasi wisata merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memberikan prioritas/fokus pengembangan suatu lokasi wisata yang dapat dijadikan pedoman bagi pengelola kawasan atau pemerintah daerah pada umumnya.Dengan teridentifikasikannya prioritas pengembangan lokasi pariwisata maka dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah dalam konteks pengelolaan selanjutnya.Prioritas 1 artinya dalam konteks kesesuaian lahan, pola ruang dan hirarki tidak mengalami kendala apapun (*clear and clean*).Hal ini dapat dijadikan sebagai kawasan pariwisata unggulan berbasis sumberdaya lokal. Prioritas 2 artinya adalah lokasi wisata tersebut memiliki sedikit kendala di salah satu parameter yang digunakan, baik kesesuaian lahannya, atau pola ruangnya atau hirarkinya, sehingga prioritas pengembangannya lebih rendahdibandingkan prioritas 1, dan begitu juga untuk prioritas 3.

Berdasarkan hasil analisis diketahui lahan yang paling luas adalah pada prioritas 2 (P2) yaitu seluas 132 hektar atau 42% dari luas penggunaan tanah untuk pariwisata dan kemudian diikuti prioritas 3 (23%) dan prioritas 1 (15%). Simbol ND maksudnya adalah saat dilakukan tumpang susun terdapat data yang ada, terdapat salah satu atau lebih parameter yang kosong (tidak ada data), sehingga tidak dapat diidentifikasikan masuk kedalam prioritas yang mana. Hasil selengkapnya sesuai disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 5.

Tabel 6.Prioritas Pengembangan Lokasi Wisata

No	Prioritas	ha	%
1	P1 (Prioritas 1)	48.03	15.37
2	P2 (Prioritas 2)	132.95	42.53
3	P3 (Prioritas 3)	71.94	23.02
4	ND (Tidak lengkap)	59.65	19.08
	Jumlah	**312.57**	**100.00**



Gambar 5. Prioritas Pengembangan Pariwisata Lokasi Studi

IV. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Luas lokasi wisata di Kecamatan Cisarua hanya seluas 4% dari luas kecamatan (312.57 ha).Hasil analisis kesesuaian lahan lokasi wisata tersebut didominasi kelas kesesuaian sesuai bersyarat dengan pembatas yang dominan lereng, cakupannya sebesar 64,19% dari luas lokasi studi. Lokasi wisata yang memiliki hirarki 1 seluas 44 hektar (14%), hirarki 2 seluas 43 hektar (13%) dan hirarki 3 seluas 225 hektar (72%). Sementara itu berdasarkan pola ruang, kesesuaian lahan dan hirarkinya maka dapat diketahui lokasi studi yang diprioritaskan paling utama (P1) seluas 48,03 hektar, kemudian prioritas kedua (P2) seluas 132,95 hektar, dan prioritas ketiga (P3) seluas

71,94 hektar.Desa yang memiliki lokasi wisata yang luas adalah Desa Tugu Utara kemudian selanjutnya adalah Desa Tugu Selatan.

b. Saran

Beberapa parameter perlu dilakukan pendetilan informasi khususnya terkait lokasi spasial yang sering terjadi bencana, diantaranya banjir, longsor dan anginputing beliung.Data kuantitatif yang lebih banyak dalam membangun kriteria fasilitas pendukung juga menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

BPS. 2014. Potensi Desa. Badan Pusat Statistik. Jakarta

BPN. 2010. Peta Penggunaan Tanah Skala 1:10.000. Badan Pertanahan Nasional. Jakarta.

Dinas Pariwisata Seni dan Budaya.2004. Laporan Fakta dan Analisis Rencana Penataan Kawasan Wisata Puncak Kabupaten Bogor. Bogor (ID): Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, Pemerintah Kabupaten Bogor.

Djaenudin, D, Marwan, H, Subagjo, H, A, Hidayat. 2003. Petunjuk Teknis Evaluasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian. Balai Penelitian Tanah Pusat Penelitian Tanah dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat Badan Litbang Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.

Dwikorawati, I.S, 2012. Model Kebijakan Pengelolaan Pariwisata yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor. [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor

Hardjowigeno S, dan Widiatmaka. 2007. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

Maggi, E, F.L. Fredella. 2017. The Carrying capacity of a tourist destination; The case of a coastal Italian City. Universita degli Studi dell'Insubria. Italy.

Mathieson.A, Wall. G. 1982. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. Longman. New York.

Pradono, B. Faisal, Y. Adriani, R. Rikeu, R. Fajriasanti. 2016. Towerds Model of Community Economic Empowerment through Tourism Activities in Bogor Regency, West Java, Indonesia.International Journal of Economics and Financial Issues. 6 (6): 46-49.

Rachmawati, T, L Muta'ali, L.W. Santosa. 2013. Kajian Daya Dukung Bioekologi Kawasan Puncak Kabupaten Bogor.Majalah Geografi Indonesia. 28(2): 180-197.

Ranganathan, J. and Daily, G.C. 2003. Carrying capacity in P Demeny an McNicoll (Eds) Encyclopedia of Population, Macmillan Reference USA. New York

Rusli, S, S. Widiono, H. Indriana. 2010. Tekanan Penduduk, Overshoot Ekologi Pulau Sumatera, dan Masa Pemulihannya. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. 4(1):59-90.

Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*.Jakarta : Cresspent Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Konservasi Lingkungan Hidup dan Ekowisata : Tantangan Status Cagar Alam dalam Pelaksanaan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang

Teti A Argo[1], Muhajah Babny[2]

[1]*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB, Bandung*
[2]*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, ITB, Bandung*
Email: targo@pl.itb.ac.id; muhajahbabny@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata telah menjadi salah satu bentuk sumber pendapatan masyarakat yang bersifat egaliter, memiliki entry level yang mudah dan juga mendorong masyarakat mengembangkan identitas dan kapasitas lokalnya. Ketika obyek wisata yang di'jual'nya adalah suasana, nuansa alam maka pariwisata berganti label menjadi ekowisata. ***Ekses*** *dari perubahan ini tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam dalam menjalankan bisnis ekowisata, berakibat terjadinya komodifikasi dan erosi nilai jasa atau environmental services yang dijualnya. Status cagar alam (nature reserve) seperti Pulau Sempu di Kabupaten Malang merupakan salah satu jenis jasa lingkungan yang kemudian tergerus oleh ekowisata dan berakibat pada penurunan nilai jasa ekosistem. Studi ini mengarahkan pada rumusan yang diperlukan dalam mendudukkan jasa lingkungan berupa cagar alam dalam semangat perlindungan lingkungan, namun dapat menjadi bagian dari edukasi masyarakat serta tetap dapat menjaga perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan daerah. Metode penelitian studi ini menggunakan model kuesioner dan wawancara* ***yang dapat menunjukkan peran masyarakat dan penjaga cagar alam dalam membangun pemahaman baru terhadap perlindungan lingkungan hidup di daerah.*** *Kesimpulan awal dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menjadikan Cagar Alam Pulau Sempu sebagai daerah wisata tinggi, meskipun harus membayar mahal. Transportation cost sebagai representasi dari biaya untuk menikmati ala mini tidak dapat menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup dapat dipertahankan melalui bentuk ekowisata ini. Sebaliknya ekowisata pulau memerlukan pendekatan pendidikan, dan entry strategy maksimasi agar aset Pulau Sempu sebagai cagar alam dapat terjaga. Status cagar alam yang dipertahankan saat ini tanpa adanya pengelolaan terhadap mode edukasi masyarakat akan semakin membahayakan bahkan mematikan aset lingkungan hidup ini.*

Kata kunci: cagar alam, ekowisata berbasis masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, penataan ruang

I. PENDAHULUAN

Tidak banyak pemerintah daerah yang memahami dan mendalami bahwa memelihara keberadaan cagar alam dalam penataan ruang merupakan bagian dari membangun daerah secara berkelanjutan. Walaupun penataan ruang memiliki sifat menyeluruh dalam merepresentasikan berbagai kepentingan baik yang bersifat *human oriented, dominated* maupun yang bersifat *non human dominated*. Namun filosofi dari *non human oriented activities* dalam implementasi penataan ruang sangat bergantung pada makna dan semangat pembangunan yang dipahami dan diaplikasikan di daerah. Semangat pembangunan daerah mengarah pada pengembangan ekonomi dari aset-aset dalam penguasaan daerah sehingga menjadi sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat. Dalam kondisi kemampuan pengembangan ekonomi aset daerah (baik alam, buatan maupun manufaktur) yang masih terbatas, berbagai usaha dilakukan untuk mengkomersialisasikan dan menciptakan komoditas bagi berbagai aset ini. Upaya ini mengakibatkan berbagai aset

lingkungan hidup yang merupakan simpanan yang bersifat jangka panjang, harus mendapatkan interpretasi keekonomian (bersifat jangka pendek) dalam pembangunan daerah.

Cagar alam, atau *strict nature reserve* merupakan alokasi spasial yang dipercayakan kepada pemerintah daerah untuk dikelola (UU 5/2019 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya). Cagar alam memiliki filosofi yang mengarah pada pemeliharaan sumber daya alam dan habitat lingkungan hidup yang khas di daerahnya. Agar dapat juga ditunjukkan bahwa tidak semua aset daerah harus diutilisasi atau dimanfaatkan pada waktu kini. Bahkan konsep utilisasi pada kawasan cagar alam menduduki posisi lebih rendah dari pada pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Kawasan Pulau Sempu dalam RTRW Kabupaten Malang dinyatakan sebagai cagar alam. Pemanfaatannya terbatas hanya untuk kegiatan pelestarian sumberdaya alam yang ada di kawasan tersebut dengan cara membatasi pada kegiatan yang tujuannya hanya untuk pelestarian. Namun pada kenyataannya di kawasan tersebut juga berlangsung kegiatan wisata.

Lokasinya yang juga berdekatan dengan salah satu destinasi wisata yang populer di Kabupaten Malang yaitu Kawasan Sendang Biru, semakin mendukung adanya kegiatan wisata di Cagar Alam Pulau Sempu. Keindahan alam, danau dan sungai di Pulau Sempu secara *de facto* menjadi atraksi pariwisata (BBKSDA Jawa Timur 2015). Pengelola Cagar Alam mencatat kunjungan mencapai 22.856 orang di tahun 2014. Demikian pula infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata ini mulai terbentuk dan secara terorganisir seperti adanya pelayaran ke pulau, pemandu wisata, serta adanya penyediaan keperluan wisata di pulau tersebut.

Ketika kegiatan pariwisata dicetuskan sebagai cara untuk mengelola perlindungan linkungan hidup, ternyata tanpa adanya pemahaman tentang makna cagar alam dan apa yang harus dilindungi, aset daerah ini akan semakin tereksploitasi. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku wisatawan dalam membuang sampah, tererosinya jalur perlintasan pengunjung, sebagai salah satu buktinya.

Sampai saat ini, kunjungan wisatawan oleh pihak cagar alam dianggap sebagai bagian dari pendidikan tentang lingkungan hidup. Ini dapat menjustifikasikan masuknya wisatawan. Namun dengan pengertian yang cenderung ‘bebas’ seperti ini, dan belum dapat diterjemahkan sebagai proses fasilitasi dalam mengkaitkan antara memelihara lingkungan hidup sebagai aset daerah dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal. Studi ini menerjemahkan apakah hubungan antara pemeliharaan lingkungan hidup sebagai aset daerah dan pengembangan ekonomi lokal dapat selaras dan seimbang. Elemen lainnya apa yang dapat digunakan bagi upaya pemeliharaan lingkungan hidup.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan hidup seperti cagar alam tidak mudah untuk sejalan dengan pengembangan ekonomi yang berbasis masyarakat terutama jika penciptaan ekonomi tidak langsung berdampak pada pendapatan masyarakat (Kiss 2004) atau jika interpretasi ekowisata dengan memperhatikan skala lokal (social, economic, tradition) tidak terintegrasi dengan pemahaman internasional tentang ekowisata (Lai and Nepal, 2006). Studi ini akan secara spesifik mengamati *Pressure and Response* akibat adanya pariwisata yang dikemas seolah sebagai edukasi.

II. METODE

Studi ini menggunakan metode penelitian yang mengarah pada metode kualitatif dengan menggunakan wawancara terarah, observasi lapangan serta kuesioner singkat. Studi ini juga meliputi wawancara pada pelaku panyelenggara pariwisata, wisatawan, masyarakat, pemerintah daerah terutama BKSDA Jawa Timur, dan sub institusinya.

Kunjungan wisata CA Pulau Sempu tidak memiliki data pengunjung yang berwisata ke tempat tersebut, sehingga pengukuran sampel tidak dapat bergantung pada jumlah populasi dan tidak ada data dasar untuk penentuan jumlah sampel pada penelitian ini. Peneliti memperkirakan jumlah pengunjung yang datang pada Bulan Juli dapat mencapai 400 hingga 600 pengunjung berdasarkan rona awal, sehingga apabila digunakan rumus Slovin (Siregar, 2011)

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:
n = Jumlah Responden
N = Ukuran populasi dalam waktu tertentu
e = Perkiraan tingkat kesalahan

Dengan menggunakan tingkat kesalahan 10% maka didapatkan jumlah sampel adalah 80-85. Menurut Linacre dalam Sumintono dan Widhiarso (2014) ukuran sampel yang layak dalam pemodelan rasch untuk kisaran sampel 64-144 adalah 100.

Tabel 1 Ukuran Sampel dalam Pemodelan Rasch

Kalibrasi item stabil dalam	Tingkat Kepercayaan	Kisaran Sampel	Ukuran Sampel yang Layak
1 logit	95%	16-36	30
1 logit	95%	27-61	50
0,5 logit	95%	64-144	100
0,5 logit	95%	108-243	150

Sumber : Linacre dalam Sumintono dan Widhiarso (2014)

Oleh karena itu Peneliti memilih 100 responden yang akan diambil dalam penelitian ini, yang diidentifikasi sebagai pengunjung yang berwisata ke Cagar Alam Pulau Sempu. Dari pertimbangan ini diharapkan responden yang dipilih dapat mewakili populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti karena tidak ada pendataan secara spesifik.

Selanjutnya, penentuan narasumber pada wawancara ditentukan oleh aktor kunci dari masing-masing kelompok pengelola yaitu 2 orang petugas patroli Cagar Alam Pulau Sempu, 5 orang pemandu atau penunjuk jalan dan 1 orang koordinator nelayan tambang atau koordinator nelayan yang menyewakan perahu untuk penyeberangan ke Pulau Sempu. Penentuan ini menggunakan teknik kualitatif dengan *purposive sampling,* dengan pertimbangan narasumber yang dipilih memiliki pengetahuan yang cukup mengenai isu dalam penelitian ini dan memiliki keinginan untuk diwawancarai atau memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan. Selain itu mereka diasumsikan dapat merepresentasikan keseluruhan jawaban dari aktor lain dengan posisi yang sama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Ruang Cagar Alam Pulau Sempu

Rencana Tata Ruang Kabupaten Malang dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Malang telah mengakomodir Pulau Sempu sebagai fungsi cagar alam dengan strategi:

1) Mempertahankan dan menjaga kelestariannya
2) Membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di Pulau Sempu
3) Mengembalikan berbagai kehidupan terutama satwa yang nyaris punah di Pulau Sempu

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan dalam pasal 33, bahwa cagar alam

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengethuan;
b. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
c. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
d. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya

Dari kebijakan dan strategi pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu dapat terlihat bahwa tujuan utamanya untuk menjaga kelesatarian sumberdaya alam yang ada di kawasan tersebut dengan cara membatasi pada kegiatan yang tujuannya hanya untuk pelestarian. Dengan pernyataan tersebut juga dapat dikatakan bahwa kegiatan wisata tidak dapat berlangsung di cagar alam.

Tetapi rencana ini sangat berbeda dengan yang terjadi di lapangan. Data menunjukkan setiap tahunnya diketahui adanya kegiatan wisata yang ada di Cagar Alam Pulau Sempu berdasarkan dokumentasi wisatawan yang diunggah melalui media sosial dan bukti nyata saat penelitian berlangsung.



Sumber: https://langitrimba.wordpress.com/2014/11/22/camping-at-sempu-island/

Gambar 1 Potret Kegiatan Wisata di Tahun 2012



Sumber: https://bonitaphotoblog.wordpress.com/2013/05/31/road-to-sempu/

Gambar 2 Potret Kegiatan Wisata di Tahun 2013



Sumber: https://laksmiandina.wordpress.com/2014/10/29/serpihan-surga-itu-bernama-segara-anakan/

Gambar 3 Potret Kegiatan Wisata di Tahun 2015



Gambar 4 Potret Kegiatan Wisata Saat Penelitian 2016

Eksistensi kegiatan wisata yang terus berlangsung ini salah satunya disebabkan oleh kebutuhan ekonomi dari para pemandu yang menaruh harapan besar terhadap pendapatan dari kegiatan wisata ini sejak lama. Oleh karena itu kegiatan ini akan sulit untuk ditiadakan karena perekonomian sebagaian masyarakat yang tinggal di daerah

sekitar Cagar Alam Pulau Sempu sangat bergantung pada aktivitas wisata ini. Adapun aktor yang paling berdampak alngsung dari aktivitas ekonomi ini adalah pemilik homestay, pemandu atau penunjuk jalan dan nelayan tambang serta pemilik retail (pemilik toilet umum, penyewa sepatu untuk trekking, pedagang kaki lima).

B. *Karakteristik Responden dalam Memahami Ekowisata di Pulau Sempu*

Sebagian besar responden yang menjadi wisatawan adalah lulusan SMA (62%) berasal dari Jawa Timur (60%), dan mengaku dirinya sebagai pencinta alam. Mereka juga memiliki penghasilan yang menengah (kurang lebih Rp 1,5 juta per bulan), Apabila dikenali lebih lanjut maka motivasi pengunjung dalam mendatangi Pulau Sempu adalah murni untuk berwisata.

Tabel 2 Jenis Kegiatan Responden

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Responden
1	Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan	0
2	Wisata	85
3	Penelitian	0
4	Kegiatan lain yang menunjang budidaya	0

Dalam kategori pemahaman ini, dapat disampaikan bahwa tujuan yang disampaikan oleh pihak cagar alam tentang pendidikan bagi cagar alam belum merasuk pada pengalaman wisatawan. Pengalaman wisatawan tidak secara langsung digiring pada edukasi atau peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup.

Daya tarik utama dari kehadiran wisatawan adalah mengenai pemandangan alamiah (64%) yang masih murni, atau belum terganggu oleh kegiatan lainnya. Selain itu mereka tertarik untuk berenang atau bermain air (12%) dan trekking (8%).

Apabila diamati dari lama waktu berwisata, sekitar 68% responden menjawab satu hari, dan sisanya lebih dari satu hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan wisata di pulau ini adalah jenis wisata yang cukup dilakukan dalam waktu pendek dan tidak memerlukan persiapan yang matang sebelum berwisata. Umumnya juga menggunakan sarana motor (59%) sebagai transportasi menuju lokasi, angkutan umum (19%) dan mobil (15%). Angkutan umum pun sudah beragam dari yang tak terorganisir sampai yang terorganisir.

Hal penting berikutnya adalah mengenali aspek bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup di Pulau Sempu. Tampak ditunjukkan bahwa beberapa kondisi seperti pengetahuannya tentang Pulau Sempu sebagai cagar alam.

Tabel 3 Persentase Pengetahuan Pengunjung mengenai Cagar Alam

Pengetahuan Pengunjung mengenai cagar alam	Responden	Persentase
Responden yang tahu	52	61%
Responde yang tidak tahu	33	39%

Sebagian besar pengunjung mengetahui bahwa Pulau Sempu adalah cagar alam. Namun tidak banyak dari mereka memahami tentang pengertian dan fungsi cagar alam. Terkait cara berperilaku mereka paham dan setuju seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di cagar alam, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4 Persentase Setuju berdasarkan Item

No	Faktor	Item	Setuju	Netral	Tidak Setuju
N1	*Conservation orientation*	Cagar alam merupakan kawasan dengan fungsi perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam sehingga kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung di cagar alam	**56,5%**	25,9%	17,6%
N2	*Conservation orientation*	Ketika trekking dan berkegiatan lainnya mengikuti jalur yang telah ditentukan/diizinkan	**98,8%**	1,2%	0
N3	*Conservation orientation*	Bermaksud untuk berjalan di tempat yang tidak akan merusak/mengganggu tumbuhan dan hewan	**84%**	11%	5%
N4	*Conservation orientation*	Tidak memberi makan hewan selama berkegiatan di Cagar Alam Pulau Sempu	**97,6%**	2,4%	0
N5	*Conservation orientation*	Tidak bermaksud untuk mengganggu vegetasi dan makhluk hidup lainnya	**95%**	5%	0
N6	*Conservation orientation*	Mengunjugi tempat/spot yang boleh dikunjungi	**76,5%**	20%	3,5%
N9	*Enviromentally friendly behavior*	Berinisiatif mengutip sampah yang terlihat disekelilingnya meskipun bukan miliknya	**94,1%**	5,9%	0
N10	*Enviromentally friendly behavior*	Menulis pada batu maupun dahan pohon yang berada di Cagar Alam Pulau Sempu	17,6%	18,9%	**63,5%**
N11	*Pro-environmental behavior*	Dengan sukarela mengurangi kunjungan pada tempat yang sedang membutuhkan pemulihan dari dampak lingkungan	**78,8%**	14,1%	7,06%
N12	*Pro-environmental behavior*	Dengan sukarela berhenti mengujungi tempat yang membutuhkan perlakuan khusus untuk perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam	**74,1%**	21,2%	4,7%
N13	*Pro-environmental behavior*	Dalam kunjungan ini saya mempertimbangkan akibat dari kegiatan yang saya lalukan terhadap lingkungan	**89,5%**	5,8%	4,7%

C. Peran Pelaku Wisata dalam Membangun Pemahaman terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup

Pelaku wisata yang digarisbawahi dalam pembahasan ini adalah pengelola kegiatan wisata di CAPS yang terdiri dari petugas patroli Cagar Alam Pulau Sempu, pemandu atau penunjuk jalan dan nelayan tambang. Setiap aktor tersebut memiliki peran dalam keberlangsungan kegiatan wisata ini dan juga peran dalam memberikan pemahaman lingkungan kepada pengunjung.

Pemerintah atau BBKSDA Jawa Timur tidak memiliki peran secara langsung terhadap kegiatan wisata ini, akan tetapi memiliki kewenangan terhadap CAPS dalam mengeluarkan izin masuk kawasan CAPS yang disebut dengan SIMAKSI. BBKSDA Jawa Timur sudah memberikan larangan keras terkait kegiatan wisata di CAPS. Namun pada level lokal kegiatan ini tetap berlangsung karena konflik dengan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di kegiatan wisata di Cagar Alam Pulau Sempu.

Petugas patroli memiliki peran dalam memberikan izin masuk (bukan SIMAKSI) kepada pengunjung yang ingin masuk ke CAPS dengan tujuan wisata. Sebelum diizinkan masuk ke CAPS pengunjung dibekali wawasan tentang cagar alam dan peraturan mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam CAPS. Tidak jauh berbeda dengan Pemandu wisata.

Pemandu wisata atau penunjuk jalan meruapakan subjek utama yang berinteraksi dengan pengunjung yang sangat berpengaruh terhadap tindakan atau perilaku pengunjung. Pemandu wisata mempengaruhi tindakan atau perilaku pengunjung melalui penerapan larangan dan himbauan tindakan serta kendali pada tindakan saat berwisata di Cagar Alam Pulau Sempu. Selain itu, pemandu wisata juga sangat berpengaruh terhadap eksistensi kegiatan wisata. Pemandu wisata sangat setuju dengan adanya kegiatan wisata ini karena merupakan mata pencaharian mereka.

Nelayan tambang adalah nelayan yang menawarkan jasa kepada pengunjung yang ingin berkeliling Pulau Sempu, menuju Pulau Sempu maupun daerah sekitarnya. Tidak ada interaksi langsung antara pengunjung dengan nelayan tambang terkait dalam perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nelayan tambang hanya bertugas mengantar-jemput pengunjung ke lokasi wisata tanpa berkomunikasi langsung dengan pengunjung. Tidak ada interkasi antara nelayan dengan pengunjung mengenai pemahaman terhadap lingkungan hidup.

Dapat disimpulkan bahwa aktor yang memberikan pemahaman secara langsung kepada pengunjung terkait lingkungan hidup adalah petugas patroli dan pemandu wisata Cagar Alam Pulau Sempu. Dalam proses berwisata di Cagar Alam Pulau Sempu secara langsung para pengunjung sudah mulai ditanamkan mengenai pemahaman terhadap lingkungan hidup yang berupa pengertian, peran dan fungsi cagar alam, perilaku ramah lingkungan maupun perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hanya saja di lapangannya masih ditemukan adanya sampah di sepanjang jalur trekking terutama sampah di Segara Anakan, pepohonan yang rusak akibat aktivitas trekking pengunjung. Peran aktor tersebut dalam mendukung perilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan pada pengunjung masih dinilai lemah. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketegasa dalam mengawasi aktivitas pengunjung atau tidak ada sanksi dalam keberjalanan aktivitas wisata.

IV. KESIMPULAN

Beberapa temuan dapat dinyatakan bahwa jasa lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan adanya Cagar Alam Pulau Sempu, belum banyak dikenali oleh pemerintah daerah, maupun warga setempat akan kemanfaatan dan keberhasilannya. Bahwa sebagai cagar alam, tedapat upaya konservasi yang sedang berjalan dan memerlukan pendekatan kehati-hatian dan rentan (*environmentally sensitive*) yang diterjemahkan dalam program/kegiatan pemerintah daerah dalam pemeliharaannya.

Dari studi yang sudah dihasilkan ditunjukkan bahwa masyarakat telah mengembangkan pariwisata ke Pulau Sempu sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal. Pemahaman terhadap pariwisata sebagai ekowisata dikenali sebagai konsep yang perlu diusung dalam berwisata ke Pulau Sempu. Para wisatawan juga menunjukkan dirinya sebagai pencinta alam dan peduli terhadap pemeliharaan lingkungan hidup. Namun masih diperlukan integrasi antara tujuan cagar alam (fungsi edukasi, penelitian) dengan tujuan ekowisata. Selain itu, integrasi tersebut juga perlu

terus diperdalam dan dibenahi.

Kesimpulan berikutnya berharap kami dapat menunjukkan bahwa relasi antara cagar alam dan ekowisata dapat diperdalam melalui penjembatan seperti dukungan menerus dari pihak pemerintah daerah dan pemerintah pusat, keterlibatan swasta dan dunia pendidikan, serta kelompok masyarakat yang peduli konservasi lingkungan hidup. Konservasi tidak akan berhasil jika masyarakat tidak diakui peran dan kontribusinya, dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Mohammad. (2011). *Memahami Riset Perilaku dan Sosial.* Bandung: Pustaka Cendikia Utama.

Eriyanto. (2007). *Teknik Sampling Analisis Opini Publik.* Yogyakarta: LKiS.

Gunn, Clare A. (1988). *Tourism Planning.* New York: Taylor & Francis.

Hakim, L. (2004). *Dasar-dasar Ekowisata.* Malang: Bayumedia Publishing.

I Siregar, S. (2011). *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian.* Jakarta: Rajawali

Pers.smayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata.* Jakarta: Grasindo.

Keraf, A Sony. (2006). *Etika Lingkungan.* Jakarta: Kompas.

Sumintono, Bambang, dan Wahyu Widhiarso. 2014. *Aplikasi Model Rasch untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.* Cimahi: Trim Komunikata Publishing House.

Yoeti, Oka A. (1983). *Pengantar Ilmu Pariwisata.* Bandung: Angkasa

Jurnal :

Chiu, H Y, W I Lee, dan T H Chen. 2014. *Environmentally Responsible Behaviour in Ecotourism: Antecedents and Implications*. Journal of Tourism Management 321-329.

Dolnicar, S. 2006. *Nature-Conserving Tourist: The Need for A broader Perspective*. International Journal Of Tourism and Hospitality.93

Imran, Sophia, Khorshed Alam, dan Narelle Beaumont. 2014. "*Environmental Orientations and Environmental Behaviour: Perceptions of Protected Area Tourism Stakeholders*. Tourism Management (Elsevier) 290-299.

Kiss, A. 2004. *Is community based ecotourism a good use for diversity conservation funds?* Trends in Ecology and Evolution. 19(5); 1-9.

Lai, P. and S.K. Nepal. 2006. *Local Perspectives of Ecotourism Development in Tawushan Nature Reserve*, Taiwan. Tourism Management. 27: 1116-1129.

Lee, T H, F H Jan, dan C C Yang. 2013. *Conceptualizing and Measuring Environmentally Responsible Behavior from Perspective of Community-Based Tourist*. Journal of Tourism Management 36 454-468.

Muttaqin, Tataq, Ris Hadi Purwanto, dan Siti Nurul Rufiqo. 2011. *Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Ekowisata di Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang*. *GAMMA, Volume 6, Nomor 2, Maret 2011* 152-161.

Rofi. 2011. *Penilaian Potensi Wisata Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu berdasarkan Persepsi Wisatawan*.

Shamsub, H, dan L Lebel. 2012. *Identifying Tourist with Sustainable Behaviour*.

Journal of Environment Management & Tourism.

Situmorang, Yoppy Kurniawan. 2014. *Pemanfaatan Cagar Alam Pulau Sempu Kabupaten Malang Ditinjau dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*.

Vanhove, N. 2005. *The Economics of Tourism Destination.* Amsterdam: Elsevier.

Wood, K, dan S House. 1991. “The Good Tourist: A Worldwide Guide for The Green Traveler.” (Mandarin).

Yunus, L. 2005. *Simbiosis Mutualisme: Masyarakat dan Kawasan Cagar Alam*. Prosiding Seminar Nasional Membangun Teluk Bintuni Berbasis Sumberdaya Alam.

Website:

Andinalaksmi. 2014. *Serpihan Surga itu Bernaman Segara Anakan.* Diakses Agustus, 2016. *https://laksmiandina.wordpress.com/2014/10/29/serpihan-surga-itu-bernama-segara-anakan/*

BBKSDA Jawa Timur. 2015. *Statistik 2015*. Surabaya

Bonita. *Road to Sempu.* Diakses Agustus, 2016. https://bonitaphotoblog.wordpress.com/2013/05/31/road-to-sempu/

Gumebyar Pariwisata Kabupaten Malang. *Peta Pariwisata.* Diakses Agustus 21, 2016. http://gumebyar.malangkab.go.id/kab-malang.aspx.

Langit Rimba. 2014. Diakses Agustus, 2016. *Camping at Sempu Island. https://langitrimba.wordpress.com/2014/11/22/camping-at-sempu-island/*

Sistem Informasi Tata Ruang Provinsi Jawa Timur. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031.* Diakses Mei 2015. http://sitr.jatimprov.go.id/beranda/rtrw

UNEP. *United Nations Environment Programme.* Diakses Agustus 20, 2016. http://www.unep.org/resourceefficiency/Business/SectoralActivities/Tourism/FactsandFiguresaboutTourism/ImpactsofTourism/EnvironmentalImpacts/tabid/78775/Default.aspx.

UNWTO. 2014. *Glossary of tourism terms*. Diakses September 21, 2016. http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/Glossary+of+terms.pdf.

Inovasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Berbasis Ekowisata

Wisnu Sasongko[1] ,Oktarina Dwi Puspitasari[2], Adinda Zalzabila[3], Cindy Martha Clara[4], Frentika Pandin Pongtengko[5], Helanda Kresna Fresdatama[6], Sandra Erika Abrita[7], dan Yusuf Kurniawan Iskasari[8]

[1]Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang
[2-8]Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Malang
Email: dpoktarina@yahoo.com;
wisnusongko72@gmail.com;yusufkurniawaniskasari@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor yang berpengaruh sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak terkecuali di Lombok Barat. Sektor pariwisata mampu menunjang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lombok Barat sebesar 6,60 persen dari PDRB. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lombok Barat pariwisata dikelompokan menurut beberapa jenis, yaitu jenis wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Kondisi beragamnya wisata berbanding terbalik dengan pengembangan pariwisata yang lebih berkembang di Lombok Tengah. Tujuan penelitian ini untuk merencanakan konsep, strategi, dan arahan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dengan melihat potensi dan masalah sektor pariwisata. Potensi dan masalah tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis-analisis berikut Analisis Kondisi Fisik Dasar, Analisis Karakteristik Pariwisata, Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat, Analisis Supply dan Demand, Analisis Kelembagaan, Analisis Daya Saing, Analisis Kebijakan, Analisis Daya Dukung Kawasan Wisata, Analisis Nearest Neighborhood, Analisis Cluster, Analisis Potensi dan Masalah, Analisis IPA, Analisis MBA, Analisis FFA, dan Analisis Value Preposition.

Kata kunci: pariwisata, potensi dan masalah, perencanaan, pengembangan

I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu kebutuhan manusia yang semata mata tidak hanya untuk mendapatkan kesenangan, tetapi dengan berwisata tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, dan memperoleh pengalaman maupun wawasan baru mengenai kehidupan lingkungan sekitar. Pariwisata juga sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan perekonomian, karena mampu menaikan devisa suatu daerah. Pariwitasa mampu memberikan keuntungan bagi pendatang maupun orang yang berinvestasi pada objek wisata tertentu (Undang-undang).

Pulau Lombok memiliki 4 kabupaten dimana salah satunya adalah Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan data PDRB tahun 2016, sektor pariwisata menyumbang sebesar 6,60 persen. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri. Potensi pengembangan pariwisata ada di Lombok Barat misalnya perkembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di Lombok mengalami peningkatan seacara bertahap seiring dengan dilakukan berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata baik berskala nasional maupun internasional. Jumlah wisatawan setiap tahun meningkat hingga tahun 2014 menurut BPS jumlah wisatawan meningkat hingga 200 persen. Hal

tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan pariwisata. Salah satunya beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL) yang lebih besar dan frekuensi penerbangan lebih tinggi sehingga memudahkan akses ke Lombok dan sebagai gerbang awal wisatawan berkunjung ke Pulau Lombok.

Potensi Kabupaten Lombok Barat masih terdapat faktor penghambat perkembangan pariwisata, tingkat kriminalitas yang ada di Kawasan Sekotong cukup tinggi. Selain itu, permasalahan lingkungan juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat seperti di Kecamatan Sekotong dan Kecamatan Lembar. Mangrove yang dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tambak hasil konversi hutan mangrove yang terbengkalai, dengan pola penyusutan luasan ekosistem mangrove dengan kategori rusak berat 487,98 ha dan rusak ringan seluas 118,83 ha.

Berdasarkan konteks permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat membutuhkan pengembangan pariwisata yang melibatkan keiikutsertaan masyarakat secara langsung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan. Peran stakeholder juga harus turut serta demi mewujudkan pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang berbasis ekowisata untuk meningkatkan perokonomian daerah.

II. METODE

1. Metode penetuan sampel

Metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling adalah random sampling. Penentuan jumlah sampel wisatawan digunakan Sample Linear Time Function. Hal ini dikarenakan banyaknya wisatawan setiap tahunnya tidak sama. Sample linear time function adalah penentuan jumlah sampel berdasarkan esstimasi kendala waktu (Endang S. Sari: 58). Besarnya jumlah sampel (n) yang diambil menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{T - t_0}{t_1} \qquad (1)$$

Keterangan:
n = Jumlah sampel yang terpilih
T = Waktu yang tersedia untuk penelitian = 4 hari x 12 jam = 48 jam
t_0 = Waktu tetap = 10jam/hari x 4 hari = 40 jam
t_1 = Waktu yang digunakan untuk sampling unit = 15 menit = 0,25 jam

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa responden yang digunakan dalam penelitian sektor pariwisata Kabupaten Lombok Barat adalah 32 responden per orang dengan total keseluruhan adalah 224 responden.

2. Metode analisis

A. Analisis kondisi fisik dasar

Analisis kondisi fisik dasar merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang kondisi fisik dasar wilayah studi seperti kondisi topografi, klimatologi, geologi, dan kawasan rawan bencana. Kabupaten Lombok Barat terletak pada wilayah strategis yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia yang berarti pantainya memiliki keindahan berupa pasir putih, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah yang terdapat Bandara Internasional Lombok. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Mataram dan juga terdapat Pelabuhan Lembar di yang menghubungkan ke Pulau Bali. Sebelah Utara terdapat objek pariwisata strategis nasional berupa Gili Trawangan, sehingga Kabupaten Lombok Barat menjadi wilayah yang dilewati. Kondisi topologi atau ketinggian yang ada di Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi Ketinggian 0-100, 100-500, 500-1000, dan >1000 meter dpl.

B. Analisis karakteristik pariwisata

Analisis karakteristik pariwisata merupakan suatu analisa yang digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu objek wisata yang terdiri dari karakteristik dan kondisi objek wisata, informasi dan promosi, dan karakteristik masyarakat sekitar objek wisata.

C. Analisis sosial ekonomi masyarakat

Analisis sosial merupakan sebuah proses atau mekanisme yang akan membahas problematika pariwisata yang terjadi. Berdasarkan data dari Kabupaten Lombok Barat dalam angka tahun 2016, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Narmada dengan jumlah penduduk 96.052 orang. Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk 37.176 orang merupakan jumlah penduduk terkecil. Selain jumlah penduduk, berikut merupakan kepadatan penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. Sementara pada aspek kepadatan penduduk, jumlah tertinggi berada di Kecamatan Kediri dengan kepadatan 2737 orang/Km^2. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada pada Kecamatan Sekotong dengan kepadatan 116 orang/Km^2. Komposisi penduduk Kabupaten Lombok Barat berdasarkan usia terdiri dari penduduk dengan usia 0-14 tahun dengan jumlah 192.749 orang, penduduk dengan usia 15-64 tahun berjumlah 432.223 orang, dan penduduk berusia di atas 65 tahun berjumlah 29.920 orang. Dari komposisi terebut, maka dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Lombok Barat berusia 15 sampai 64 tahun.

D. Analisis supply dan demand

Analisis supply digunakan untuk memenuhi karakter dan kondisi produk pariwisata, sehingga nantinya akan lebih jelas pangsa pasar pariwisata yang menjadi sasaran dan pemasarannya sedangkan analisis demand adalah analisis yang melihat mengenai karakteristik sosial yang telah digunakan sebagai variabel untuk menjelaskan kondisi pasar (Yoeti, Oka., dalam Faris Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo, 2017).

E. Analisis kelembagaan

Analisis kelembagaan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui atau menganalisis kondisi kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata, yang meliputi pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat serta masyarakat yang bermukim di sekitar obyek wisata sehingga nantinya dapat diketahui tingkat efektifitas peran antar lembaga pada sektor pariwisata. Kelembagaan pengelola kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi lembaga formal dan lembaga informal. Lembaga formal terdiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, sedangkan lembaga informal terdiri dari pengelola pariwisata/ masyarakat, serta kelompok sadar wisata (POKDARWIS).

F. Analisis daya saing

Terdapat 8 indikator yang digunakan untuk membentuk indeks daya saing (World Travel and Tourism Council dalam Lili Adiwibowo dan Tim, 2011), sebagai berikut:

- *Human Tourism Indicator* (HTI)
- *Price Competitive Indicator* (PCI)
- *Infrastructure Development Indicator* (IDI)
- *Environment Indicator* (EI)
- *Technology Advancement Indicator* (TAI)
- *Human Resources indicator* (HRI)
- *Openess Indikator* (OI)

- *Social Development Indicator* (SDI)

G. *Analisis kebijakan*

Analisis kebijakan adalah analisis yang dilakukan terhadap kebijakan, baik kebijakan keruangan/spasial maupun sektoral di tingkat regional. Kebijakan tersebut meliputi RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan dokumen terkait pariwisata yang menjadi acuan serta landasan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata. Perundangan yang digunakan sebagai perbandingan adalah Undang-Undang No.10 Tahun 2009 dan PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 serta Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016.

H. *Analisis daya dukung kawasan wisata*

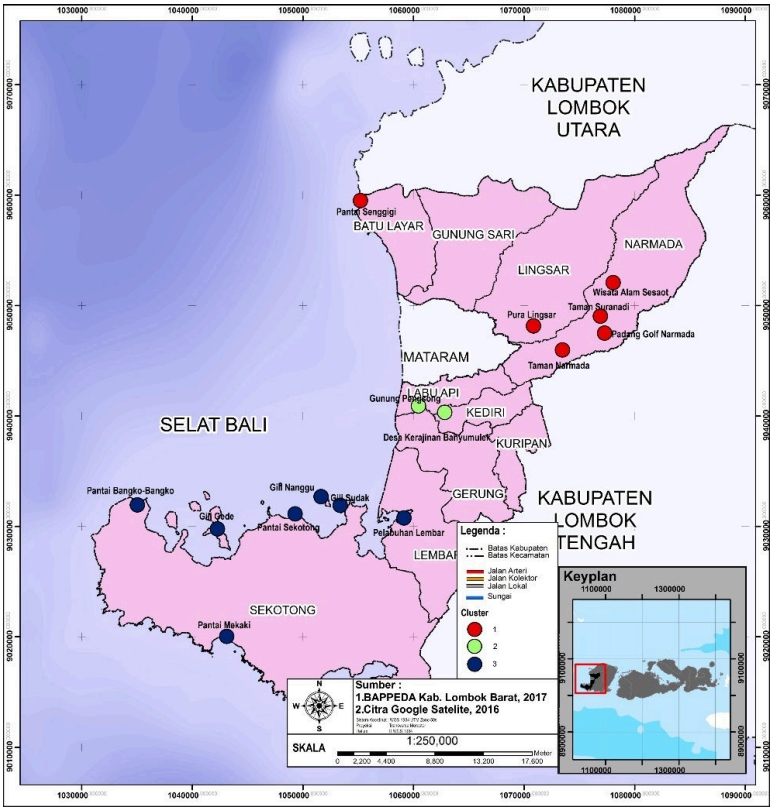
Analisis daya dukung kawasan wisata merupakan analisis yang digunakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pariwisata secara maksimal tanpa harus mengurangi kondisi/kualitas fisik lingkungan kawasan tersebut, selain itu untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Analisis daya dukung pariwisata dengan membandingkan panjang pantai dan jumlah maksimum wisatawan yang dikunjungi dalam periode tertentu.

I. *Analisis nearest neighborhood*

Analisis Nearest Neighborhood merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan pola persebaran dari titik-titik lokasi dengan memperhitungkan jarak, jumlah titik lokasi dan luas wilayah. Hasil akhir dari analisis nearest neighborhood berupa indeks, indeks yang dihasilkan antara 0 – 2,15. Pola persebaran cenderung memiliki tipe mengelompok (cluster) maka nilai indeks 0, pola persebaran seragam (regular) nilai indeks mendekati 2,15, dan pola persebaran acak (random) memiliki nilai indeks 1 atau nilai indeks berada di tengah. Kaitannya dengan pariwisata, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui pola persebaran pariwisata (Aruzzi, 2011).

J. *Analisis cluster*

Analisis Cluster merupakan alat analisis yang berguna dalam meringkas data atau sejumlah variabel untuk menjadi teliti berdasarkan pengelompokan objek-objek pada karakteristik tertentu. Tujuan analisis cluster tidak menghubungkan ataupun membedakan dengan sampel ataupun variable yang lain. Analisis cluster dalam penerapannya pada sektor pariwisata sebagai analisis cluster kegunaannya dalam kepariwisataan adalah mengelompokkan objek-objek wisata berdasarkan karakteristik tertentu seperti kedekatan antar objek wisata sehingga membentuk Objek Daya Tarik Wisata(ODTW) di Kabupaten Lombok Barat.



Gambar 1. Peta Cluster

K. Analisis potensi dan masalah

Analisis potensi dan masalah digunakan untuk menemukan potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Tujuan analisis potensi masalah adalah untuk mengangkat potensi dan menyelesaikan masalah di Kabupaten Lombok Barat.

L. Analisis IPA

Analisis IPA digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan kepentingan responden tekait dengan pariwisata. Hasil analisis IPA berupa diagram kartesius yang menunjukkan variabel yang pelu diselesaikan permasalahannya terlebih dahulu, karena memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun tingkat kepuasan bagi para pelaku pariwisata masih rendah (Tjiptono dalam Studio Perencanaan Wilayah Sektor Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 2017).

M. Analisis MBA

Market Basket Analysis merupakan suatu analisa atas perilaku konsumen secara spesifik dari suatu golongan atau kelompok tertentu. *Market Basket Analysis* berfungsi sebagai titik awal pencarian pengetahuan dari suatu transaksi ketika kita tidak tau pola apa yang spesifik dari apa yang akan dicari.

N. Analisis FFA

Forces Field Analysis merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam perubahan dan mengidentifikasi berbagai sebab dan pemecahan suatu permasalah. *Forces Field Analysis* digunakan untuk menganalisis faktor yang ditemukan dalam permasalahan yang kompleks. Selain itu juga membantu dalam mengidentifikasi faktor yang harus diatasi dan dipantau jika perubahan diharapkan dpat meraih kesuksesan. Sasaran utama Forces Field Analysis dalam upaya mempengaruhi kebijakan adalah menemukan cara untuk mengurangi

kekuatan penghambat sekaligus mencari peluang untuk mendapat keuntungan dari kekuatan pendorong (Start dan Hovland dalam Studio Perencanaan Wilayah Sektor Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, 2017).

O. Analisis value preposition

Value Preposition merupakan analisis yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan manfaat yang tercipta dari produk barang atau jasa kepada pasar yang dilayani. Syarat utama *Value Preposition* mampu meningkatkan kinerja bisnis dan mampu menghasilkan keuntungan dimana focus *Value Prepositon* adalah pelangganya. *Value Prepositon* secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 aspek utama yaitu; *Product to market excellent*, *Operational excellence*, dan *Customer intimacy.*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Lombok memiliki 4 kabupaten dimana salah satunya adalah Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lomok Barat Secara geografis berada di 115° 49,12' 04" - 116° 20' 15,62" Bujur Timur dan 8° 24' 33,82" - 8° 55' 19" Lintang Selatan, serta memiliki luas wilayah sebesar 1.053,92 Km². Sektor pariwisata Kabupaten Lombok Barat menyumbang PDRB sebesar 6,60 persen, dengan arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri. Potensi pengembangan pariwisata ada di Lombok Barat misalnya perkembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata di Lombok mengalami peningkatan seacara bertahap seiring dengan dilakukan berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata baik berskala nasional maupun internasional.

Jenis pariwisata di Lombok Barat yang beragam mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung menikmati keindahan wisata yang ditawarkan. Jenis-jenis pariwisata yang terdapat pada RTRW Kabupaten Lombok Barat dapat dikelompokan menurut beberapa jenis, yaitu jenis wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Berikut merupakan beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 1. Jenis Wisata di Kabupaten Lombok Barat

Wisata Alam	***Wisata Buatan***	***Wisata Budaya***
Pantai Senginggi	Padang Golf Narmada	Taman Narmada
Pantai Sekotong	Taman Suranadi	Pura Lingsar
Pantai Mekaki	Pelabuhan Lembar	Desa Kerajinan Banyumulek
Sesaot	-	-
Pantai Bangko-bangko		
Pulau Gili-gili	-	-
Gunung Pengsong	-	-



Gambar 2. Wisata alam Kabupaten Lombok Barat



Gambar 3. Wisata budaya Kabupaten Lombok Barat



Gambar 4. Wisata buatan Kabupaten Lombok Barat



Gambar 5. Peta persebaran objek wisata

Berdasarkan data hasil survei untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Lombok Barat perlu diketahui potensi dan masalah objek wisata. Potensi dan permasalahan daerah wisata dapat terangkum dalam analisis akar masalah yang dibobotkan berdasarkan pada hasil analisis FFA. Secara umum permasalahan utama

sektor pariwisata Kabupaten Lombok Barat adalah pengembangan pariwisata di beberapa kawasan yang masih rendah, sehingga jumlah wisatawan masih terpusat di kawasan utara Lombok Barat. Permasalahan tersebut menyebabkan permasalahan lain yang lebih khusus, permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

A. Kurangnya Destinasi Pariwisata yang belum dikelola

Kurangnya pengelolaan pada destinasi wisata alam, budaya, dan buatan. serta persebaran, kegiatan, dan kondisi destinasi tujuan wisata.

B. Industri pariwisata yang bergerak di bidang pariwisata masih kurang

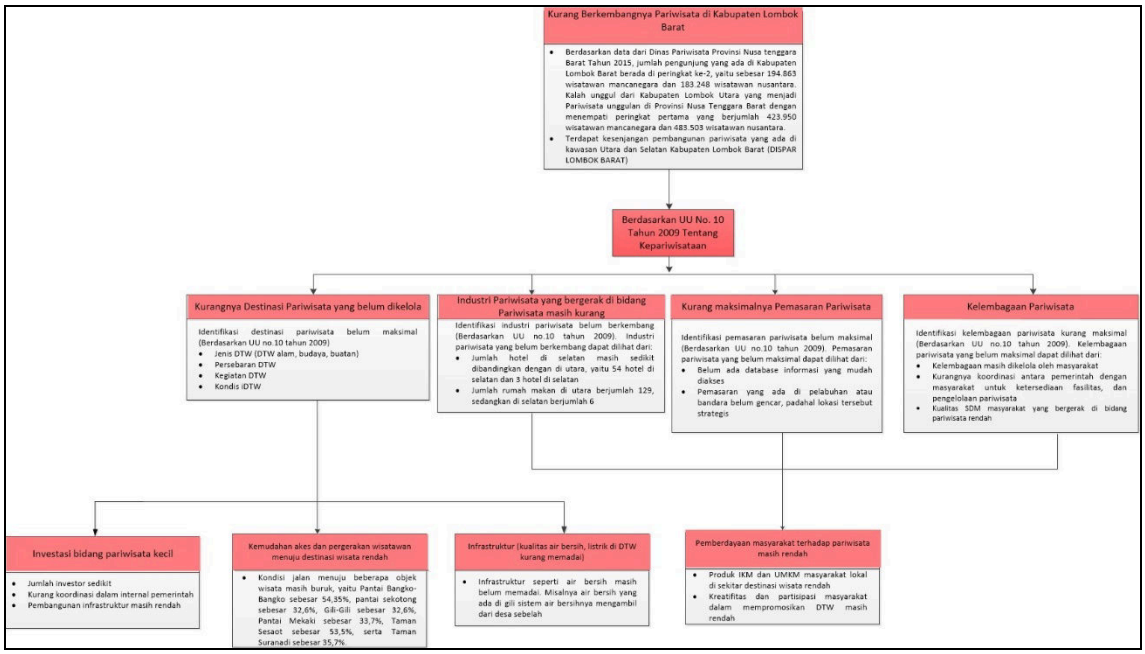
Jumlah hotel di selatan masihsedikit dibandingkan dengan di utara, yaitu 54 hotel di utara dan 3 hotel di selatan, selain itu, rumah makan di utara berjumlah 129 unit, sedangkan di selatan berjumlah 6 unit.

C. Kurang maksimalnya pemasaran pariwisata

Belum terdapat database informasi yang mudah diakses oleh wisatawan dan pemasaran yang ada di pelabuhan atau bandara gencar, padahal lokasi tersebut strategis.

D. Kelembagaan yang kurang bersinergi

Rendahnya pengembangan pariwisata tidak terlepas dari keberadaan kelembagaan. Kelembagaan yang ada Kabupaten Lombok Barat masih dikelola oleh masyarakat. Sehingga kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk ketersediaan fasilitas, dan lain-lain.



Gambar 6. Akar masalah

Permasalahan secara khusus dan umum dari hasil analisis akar masalah dapat di kaitkan dengan faktor pendorong dan faktor penghambat pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Faktor pendorong dan faktor penghambat diberikan bobot dan menghasilkan akumulasi nilai yang berdasarkan potensi dan permasalahan pariwisata, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan perencanaan.

Sangat tidak berpengaruh = 1
Tidak berpengaruh = 2
Cukup berpengaruh = 3
Berpengaruh = 4
Sangat berpengaruh = 5

Tabel 2. Penilaian dan pembobotan faktor pendorong dan faktor penghambat

Faktor Pendorong	*Nilai*	*Faktor Penghambat*	*Nilai*
Wisata alam pantai yang masih alami dan memiliki jenis pasir pantai yang beragam, seperti Pantai Sekotong dan Pantai Mekaki	4	Belum disediakannya infrastruktur air bersih di Gili Sudak	3
Terbentuknya kelembagaan dalam pengelolaan objek wisata baik dari pemerintah sebanyak 4 objek wisata, swasta sebanyak 4 objek wisata, dan masyarakat sebanyak 8 objek wisata	4	Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan fasilitas dan akses di objek wisata	4
Jumlah usia produktifnya lebih tinggi di bandingkan dengan usia lainnya sehingga dapat mempengaruhi proses pembangunan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat	3	Beberapa tempat wisata belum di promosikan seperti pantai di sekitar Kawasan Sekotong.	4
Pemerintah melakukan promosi dalam tingkat nasional dan internasional melalui event-event, seperti Festival Senggigi, Mekaki Marathon, dan Perang Topat	4	Aksesibilitas di kawasan selatan Lombok Barat masih buruk	5
Tersedianya tempat penginapan, sebanyak 105 unit, rumah makan sebanyak 148 unit, dan agen wisata sebanyak 91 agen di total objek wisata	4		
Keterkaitan antara sektor agropolitan, minapolitan, dan industry dapat dimanfaatkan untuk perkembangan sektor pariwisata	4		
Total	**23**		**16**

Nilai dari hasil analisis FFA merupakan salah satu dasaran yang menjadi titik tumpu dalam perencanaan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Perencanaan kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dibagi berdasarkan jenis wisata, antara lain wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya.

A. Wisata Alam

Rencana daya tarik untuk wisata alam yang ada pada Kabupaten Lombok Barat akan dilakukan pada objek wisata Pantai Senggigi, Sekotong, Pantai Mekaki, Sesaot, Pantai Bangko-Bangko, Gili, serta Gunung Pengsong. Berikut merupakan penjelasan rencana daya tarik untuk masing-masing objek wisata pada wisata alam.

Tabel 3. Rencana daya tarik wisata alam

Objek Wisata	*Atraksi Eksisting*	*Inovasi*
Pantai Senggigi	Menikmati keindahan alam Berjemur Berenang Berlayar Snorkling	Menambah permainan air atau water sport, seperti yang ada di Tanjung Benoa Bali yaitu flying board, rolling donut, flying fish, banana boat, jetski
Sekotong	Menikmati keindahan alam Berjemur	Penambahan fasilitas wisata seperti papan informasi wisata, papan penunjuk jalan menuju lokasi, kamar mandi, serta pusat oleh-oleh seperti yang ada di pantai senggigi
Pantai Mekaki	Menikmati keindahan alam berjemur	Mengadakan paket wisata snorkeling disertai dengan badan pengelola yang resmi dan fokus pada kepegurusan wisata snorkeling, seperti penyediaan alat-alat snorkeling. Selain itu

Objek Wisata	*Atraksi Eksisting*	*Inovasi*
		badan pengelola dapat memberikan dan menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan.
Sesaot	Menikmati keindahan alam Berenang	Memanfaatkan lahan yang dapat digunakan untuk area camping, seperti yang ada pada wisata Coban Rondo Kabupaten Malang
Pantai Bangko-Bangko	Menikmati keindahan alam Berjemur Diving Surfing	Mengadakan event surfing Internasional seperti di Krui, Pesisir Barat - Lampung
Gili-Gili	Menikmati keindahan alam Berjemur Snorkling Diving	Menambah atraksi wisata baru seperti berkuda atau bersepada mengelilingin gili
Gunung Pengsong	Menikmati keindahan alam Mendaki	Perbaikan area tracking menuju gunung pengsong disertai papan informasi terkait jalur tracking menuju puncak gunung

B. Wisata Budaya

Rencana daya tarik untuk wisata budaya yang ada pada Kabupaten Lombok Barat akan dilakukan pada objek wisata Taman Narmada, Pura Lingsar, serta Desa Kerajinan Banyu Mulek. Berikut merupakan penjelasan rencana daya tarik untuk masing-masing objek wisata pada wisata sosial budaya.

Tabel 4. Rencana daya tarik wisata budaya

Objek Wisata	*Atraksi Eksisting*	*Inovasi*
Taman Narmada	Menikmati keindahan alam Sarana edukasi Sarana ibadah Outbond	Adanya paket bermain tambahan seperti paint ball
Pura Lingsar	Menikmati keindahan budaya Beribadah bagi umat hindu Untuk rekreasi budaya	Tetap seperti fungsi dan atraksi awal. Diberlakukannya tiket masuk jika ingin mengunjungi Pura Lingsar, serta dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan objek wisata
Desa Kerajinan Banyu Mulek	Menikmati keindahan budaya Belajar membuat kerajinan dari gerabah	Adanya paket atau atraksi tambahan yaitu pembuatan gerabah secara langsung. Adanya paket belajar pembuatan gerabah

C. Wisata buatan

Rencana daya tarik untuk wisata buatan yang ada pada Kabupaten Lombok Barat akan dilakukan pada objek wisata Padang Golf Narmada, Taman Suranadi serta Pelabuhan Lembar. Berikut merupakan penjelasan rencana daya tarik untuk masing-masing objek wisata pada wisata buatan.

Tabel 5. Rencana daya tarik wisata buatan

Objek Wisata	*Atraksi Eksisting*	*Inovasi*
Padang Golf Narmada	Menikmati keindahan alam Melakukan olahraga golf	Dilakukan peningkatan kualitas pelayanan objek wisata
Taman Suranadi	Menikmati keindahan alam Rafting Dapat untuk melakukan penelitian Outbond	Penyediaan gazebo sebagai area untuk berkumpul dan beristirahat, memanfaatkan lahan kosong untuk area camping, serta penambahan permainan berupa paint ball
Pelabuhan Lembar	Menikmati keindahan alam Tempat penyebrangan	Peningkatan kualitas pelayanan

Arahan rencana lain yang digunakan untul pengembangkan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat yaitu pemasaran, rencana pengembangan industri dan kelembagaan, rencana pengelolaan lingkungan, insentif dan disinsentif kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, inovasi pegembangan pariwisata yang berbasis ekowisata berdasarkan pada kondisi eksisting pariwisata yang menggunakan beberapa analisis, sehingga pada analisis akar masalah menghasilkan permasalahan utama yaitu Kurangnya Destinasi Pariwisata yang belum dikelola, Industri pariwisata yang bergerak di bidang pariwisata masih, Kurang maksimalnya pemasaran pariwisata, dan Kelembagaan yang kurang bersinergi. Permasalahan utama dipadukan dengan faktor pendorong dan faktor penghambat yang memiliki nilai total faktor pendorong adalah 23 dan nilai total faktor penghambat adalah 6 dari beberapa variabel yang diuji.

Rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat difokuskan pada setiap jenis objek wisata. Jenis objek wisata di Kabupaten Lombok barat adalah wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Perencanaan yang dihasilkan dimaksudkan untuk mengurangi adanya kesenjangan pembangunan antara kawasan utara dan kawasan selatan Kabupaten Lombok Barat. Rencana yang terbentuk untuk pengembangan pariwisata adalah rencana pemasaran, rencana pengembangan industri dan kelembagaan, rencana pengelolahan lingkungan, insentif disinsentif. Hal ini tentunya perlu didukung dengan regulasi pemerintah dan kerjasama antar stakeholder yang bernaung dalam kepariwisataan serta mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata.

Daftar Pustaka

Buku:

Studio Perencanaan Wilayah. (2017). *Studio Perencanaan Wilayah Sektor Pariwisata Kabupaten Lombok Barat*. Malang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. 2016. *Kabupaten Lombok Dalam Angka*. Lombok: Badan Pusat Statiskitk

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) Tahun 2010 – 2025.

Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi NTB Tahun 2013 – 2028.

Jurnal:

Damayanti, Sarita Novie dan Rimadewi Suprihardjo. (2016*). Pembentukan Cluster Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di kota Yogyakarta*. Jurnal Teknik ITS, Vol. 5 No. 1: 2337-3520.

Zakaria, Faris dan Rima Dwi Suprihardjo. (2014). *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Teknik POMITS, Vol.3 No. 2. 2337-3520.

Wibowo, Lili Adi dan Tim. (2011). *Pembentukan Citra Taman Rekreasi DKI Jakarta Sebagai Green City Melalui Kualitas Peyampaian Jasa dan Valuecreation:*

PENDEKATAN KOLABORATIF DALAM PENGELOLAAN KEBUN RAYA UNTUK PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERKELANJUTAN

Anita Delina[1], Bakti Setiawan[2], Deva Fosterharoldas Swasto[2]

[1]Mahasiswa S2 MPKD, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, FT UGM, Yogyakarta
[2]Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta
[2]Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta
Email: Anita.Delina@mail.ugm.ac.id dan mpkd@ugm.ac.id

ABSTRAK

Perspektif kolaboratif mengarahkan untuk mendesain proses shared-resources dari stakeholder, dimana pendekatan keberlanjutan adalah kunci untuk memastikan semua stakeholder memiliki kontribusi. Ide ini mencoba untuk membuat implementasi dari kebijakan publik lebih harmonis, transparan dan membawa dampak yang bernilai. Makalah ini mengkaji tentang bagaimana pemerintah mengimplementasi pendekatan kolaboratif melalui manajemen barang publik yang melibatkan banyak stakeholder dalam prosesnya. Kebun Raya dipilih sebagai salah satu contoh studi kasus dari konsep pengelolaan kolaboratif Kebun Raya Baturraden Provinsi Jawa Tengah. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literatur. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pejabat pemerintah pusat dan daerah, akademisi, para ahli, perusahaan umum Perhutani dan komunitas masyarakat sekitar agar mendapatkan beragam perspektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa shared-resources para stakeholder ada yang tidak berlangsung secara terus menerus sementara perjanjian kerjasama antar stakeholder terus berlangsung dan diperbaharui setiap lima tahun. Selanjutnya, skema kolaborasi perlu untuk menyinkronkan semua kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan para stakeholder, sehingga pengelola kebun raya tidak terkendala dalam mengelola kebun raya.

Kata kunci: perspektif kolaboratif; shared-resources stakeholder; barang publik; dan Kebun Raya Baturraden, Jawa Tengah.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan global saat ini menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan aktivitas sektor publik baik terkait pembuatan dan implementasi kebijakan publik maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Penyesuaian tersebut diantaranya adalah penyelenggaraan sektor publik dengan pendekatan secara kolaboratif. Gagasan mengenai pendekatan kolaboratif dinyatakan oleh Borrini-Feyerabend *et. al.* (2007) sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih aktor-aktor bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin diantara mereka berbagi secara adil fungsi-fungsi manajemen, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban atas wilayah atau suatu sumber daya alam.

Pendekatan kolaboratif tersebut mencakup pembangunan konsensus dalam pembuatan kebijakan serta implementasinya dengan berbagi wewenang otoritas maupun *shared-resources* diantara para stakeholder. Melalui pendekatan kolaboratif ini dapat membangun saling ketergantungan diantara para stakeholder dalam mencapai tujuan bersama maupun pendapatan yang berharga bagi masing-masing stakeholder.

Terkait pengelolaan kolaboratif disampaikan oleh Dwiyanto (2010), bahwa ada banyak alasan mengapa pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dalam beberapa hal tidak lagi dapat dilakukan oleh organisasi tunggal. Lebih lanjut disampaikannya bahwa masyarakat juga menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan multidimensional, sumberdaya yang tersedia pada satu institusi tertentu sangat terbatas, dan kapasitas masing-masing institusi sangat kecil untuk menangani

berbagai masalah itu sendirian. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif dalam penyelenggaraan aktivitas sektor publik baik terkait pembuatan dan implementasi kebijakan publik maupun penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengelolaan bersama menurut Mitchell *et. al* (2000) merupakan suatu pendekatan yang menyatukan sistem-sistem pengelolaan pada tingkat lokal dan negara. Pengelolaan pada tingkat negara dilakukan oleh kantor pemerintah yang diberi wewenang khusus dan resmi untuk bidang-bidang pengelolaan sumber daya tertentu. Ciri dari bentuk pengelolaannya yaitu sangat terpusat dan hierarki, dimana kantor pusat yang menentukan seluruh kebijakan dan kantor lokal yang menerapkannya. Pendekatannya bisa dilakukan melalui "ilmu pengetahuan" dan "data ilmiah" serta perhitungan berdasarkan data yang ada. Dan pelaksanaannya berpedoman pada otoritas yang diberikan berdasarkan hukum dan peraturan. Salah satu contoh kasus pendekatan kolaboratif tingkat negara dalam mengelola aset publik adalah Pembangunan Kebun Raya Baturraden Provinsi Jawa Tengah.

Kebun Raya Baturraden adalah kebun raya daerah yang juga merupakan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) karena lokasi kawasannya berupa Hutan Produksi Terbatas. Ansell dan Gash (2007) dalam Nururrohmah (2016) menyatakan bahwa c*ollaborative governance* adalah sistem tata kelola yang disusun dimana satu atau lebih *public agencies* secara langsung melibatkan *stakeholder non-state* dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, *consensus-oriented,* dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Oleh karena itu kajian penerapan sistem kolaborasi dalam pengelolaan Kebun Raya Baturraden Provinsi Jawa Tengah sangat penting sebagai pembelajaran dan perbaikan pengelolaan kawasan kebun raya Indonesia kedepannya.

Tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana bentuk kolaborasi dalam pembangunan suatu kebun raya yang berkelanjutan, dimana dalam penerapan sistem kolaboratif melibatkan banyak pihak dengan berbagai kewenangan dan kepentingan. Sedangkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk merepresentasikan kebutuhan pendekatan kolaboratif yang dibentuk oleh otoritas hukum dan produk peraturan perundangan dalam mengelola barang publik berupa kawasan konservasi *ek-situ* kebun raya.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana pendapat Creswell (2014) bahwa laporan akhir dari penelitian kualitatif melibatkan suara dari partisipan, refleksivitas dari para peneliti, deskripsi dan penafsiran yang kompleks tentang permasalahan tersebut dan studi yang memperkaya literatur maupun memberikan seruan untuk aksi.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beragam aktor maupun narasumber. Para aktor maupun narasumber disini merupakan pihak yang terlibat maupun mengetahui tentang pembangunan Kebun Raya Baturraden. Para aktor maupun narasumber dari pembangunan kebun raya baturraden yaitu pejabat pemerintah pusat dan daerah, akademisi, para ahli, perusahaan umum Perhutani dan komunitas masyarakat sekitar.

Sementara data sekunder dikumpulkan dengan teknik analisis isi, yang sumbernya berasal dari situs resmi pemerintah dan stakeholder terkait serta publikasinya, dokumen pemerintah terkait kebijakan dan peraturan perundangan, jurnal penelitian dan serta buku-buku teori yang terkait. Selanjutnya, selama pengamatan yang dilakukan terhadap pembangunan Kebun Raya Baturraden, peneliti mengaku jujur kepada informan bahwa sedang melakukan proses penelitian (Fuad dan Nugroho (2013) dalam Nururrohmah

(2016). Pengamatan bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung lokasi penelitian dan menangkap fenomena situasi nyata untuk mendukung informasi.

Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan dikomparasi terhadap peraturan perundangan dan kerangka teori mengenai pendekatan kolaborasi. Hasil dari analisis tersebut dirangkai menjadi suatu konsep kolaborasi dalam pembangunan suatu kebun raya yang berkelanjutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Riset Situasi Awal Kebun Raya Baturraden

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 definisi kebun raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ek-situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Merujuk kepada peraturan presiden di atas, pembangunan kebun raya adalah kegiatan mendirikan kebun raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. Lebih lanjut dilihat dari sisi manajemen, Witono et. al. (2012) mengklasifikasikan tanggung jawab pengelolaan kebun raya menjadi: milik pemerintah pusat, milik pemerintah daerah provinsi, milik pemerintah daerah kabupaten/kota, milik universitas serta milik swasta/perorangan.

Meyers (2005) menyatakan bahwa sebelum melakukan identifikasi dan analisis stakeholder dari suatu kegiatan kolaborasi dalam mengelola sumber daya perlu dilakukan riset situasi awal yang mencakup faktor-faktor sejarah, konteks geografis, politis, hukum dan ekonomi sekarang. Melalui riset situasi awal (*background research*) dapat diketahui gambaran sejarah dari pembangunan Kebun Raya Baturraden maupun konteks kekinian dari kondisi geografis, politik, hukum dan ekonomi. Kesimpulan dari riset situasi awal tersebut yaitu: 1) Sejarah. Secara ide pemilihan lokasi memang digagas oleh tokoh politik, tetapi dalam penetapannya dilaksanakan berdasarkan prosedur dan peraturan terkait kebun raya yang berlaku; 2) Geografis. Kawasan Kebun Raya Baturraden berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan kondisi topografi bergelombang atau bergunung. Artinya dalam melakukan penebangan pohon harus dilakukan secara tebang pilih. Secara administratif, Kebun Raya Baturraden berada di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang disangga oleh 4 (empat) desa penyangga, yaitu Desa Kemutug Lor, Desa Karangmangu, Desa Karangsalam dan Desa Ketenger; 3) Politik. Aktivitas konservasi keanekaragaman hayati masuk dalam Prioritas Pembangunan Nasional; 4) Hukum. Regulasi terkait konservasi keanekaragaman hayati telah dilakukan multi *stakeholder* baik skala pusat maupun daerah; 5) Ekonomi, Kebun Raya Daerah termasuk dalam barang atau aset daerah yang memiliki nilai ekonomis.

B. Peran Kolaboratif pada Setiap Tahap dari Pembangunan Kebun Raya

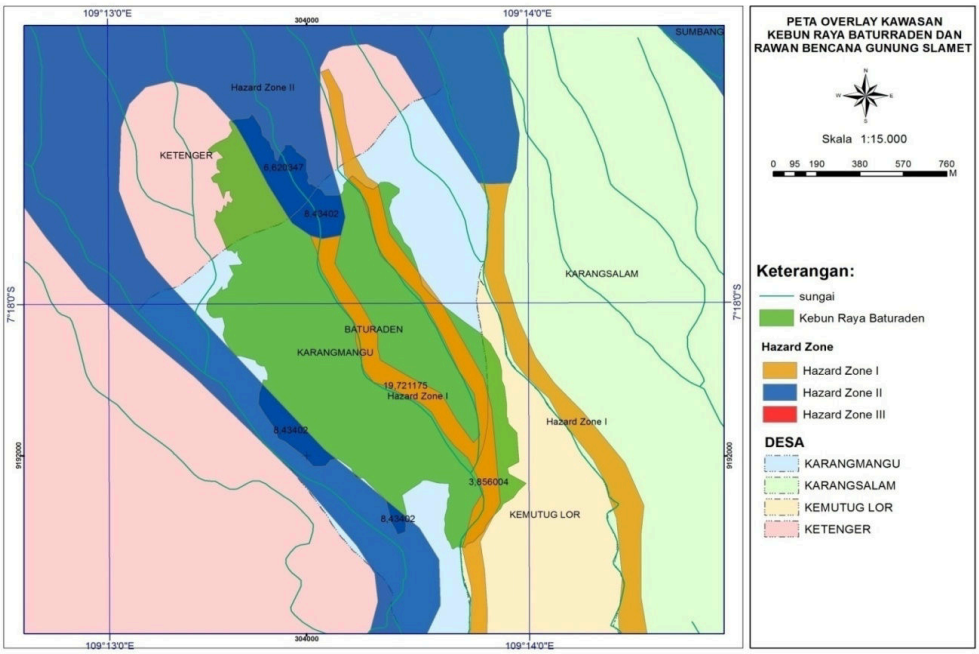
Pemilihan lokasi kawasan Kebun Raya Baturraden dipengaruhi aspek politis, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku terkait Pembangunan Kebun Raya. Hal tersebut ditandai dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah setelah gagasan pembangunan kebun raya disetujui di kecamatan Baturraden yaitu mengajukan surat permohonan Nomor 2.3./0179009 Tanggal 18 Oktober 2001 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Kebun Raya kepada Menteri Kehutanan serta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 552.3.05/06/2002 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Kebun Raya Baturraden kepada Menteri Kehutanan sesuai mekanisme permohonan dan penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDK).

Berkenaan dengan pemahaman tentang kebun raya, masih terdapat perbedaan interpretasi dari sebagian kelompok masyarakat terkait kawasan konservasi tumbuhan *ek-situ* (kebun raya). Kebun Raya Baturraden merupakan Kebun Raya Daerah yang berada di Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah ditetapkan oleh SK Menteri

Kehutanan Nomor SK.85/Menhut-II/2005 sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Hutan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan Lingkungan dalam bentuk Kebun Raya Baturraden. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa perlu diperjelas peran masyarakat sekitar kawasan khususnya dalam pembangunan Kebun Raya. Ini bertujuan agar bisa membedakan antara fungsi dan aktivitas dari Kebun Raya dengan kawasan hutan negara (baik yang memiliki fungsi sebagai hutan lindung, hutan konservasi maupun hutan produksi), hal ini terkait dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani dengan masyarakat sekitar kawasan Hutan Produksi Terbatas yang menjadi lokasi kawasan kebun raya itu sebelumnya.

Pembangunan Kebun Raya Baturraden berdasarkan amanat SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.85/Menhut-II/2005 dilaksanakan secara kolaboratif. Akan tetapi, terdapat ketidaksinkronan antara produk hukum maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh para *stakeholder* terkait keberadaan pembangunan kebun raya.

Salah satu dasar hukum dalam pembangunan infrastruktur Kebun Raya Baturraden yang disepakati oleh LIPI dan Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Banyumas 2011 - 2031. Dimana kedua peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa kawasan tempat Kebun Raya Baturraden adalah kawasan konservasi dan disatu sisi disebutkan juga kawasan rawan bencana vulkanik Gunung Slamet. Berangkat dari hal tersebut, Delina (2017) melakukan *overlay* terhadap Peta Kawasan kebun Raya Baturraden dengan Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Banyumas. Dan dari peta *overlay* tersebut Delina (2017) menyimpulkan bahwa kawasan Kebun Raya Baturraden berada pada kawasan rawan bencana vulkanik *hazard zone* 1 dan 2, yaitu berpotensi terlanda aliran lava, awan panas dan lahar hujan ketika Gunung Slamet meletus, seperti yang tertuang pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Peta Overlay Kawasan Kebun Raya Baturraden Terhadap Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Banyumas

Berkenaan dengan kawasan Kebun Raya Baturraden yang masuk dalam kawasan rawan bencana vulkanik Gunung Slamet *hazard zone* 1 dan 2, didalam pedoman Pembangunan Kebun Raya yang dikeluarkan baik oleh Presiden maupun Pusat

Konservasi Tumbuhan LIPI terkait pemilihan lokasi Kebun Raya yang merupakan kawasan konservasi *ek-situ*, belum mensyaratkan harus berada di kawasan yang tidak rawan bencana. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali berdasarkan definisi dan fungsi dari kebun raya sebagai kawasan konservasi *ek-situ* yang memiliki fungsi konservasi sebagai tempat koleksi tumbuhan di luar habitat aslinya. Apabila suatu kawasan kebun raya berada pada kawasan yang rawan tertimpa bencana alam, maka hal tersebut berpotensi menghilangkan fungsi-fungsi dari kebun raya tersebut.

C. Perspektif Kolaboratif Pembangunan Kebun Raya

Ditinjau dari aspek peran kolaboratif dalam tahap pembangunan kebun raya, pada Kebun Raya Baturraden ada *stakeholder* yang berperan pada semua tahap pembangunan kebun raya baik itu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengelolaan, baik yang sifatnya terus menerus atau rutin maupun yang sifatnya sekali atau beberapa kali saja. Namun, ada juga aktor yang berperan hanya pada tahap tertentu saja baik yang sifatnya rutin maupun tidak.

Kementerian Kehutanan RI dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.85/Menhut-II/2005 memberikan amanat kepada Balitbanghut Departemen Kehutanan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani, LIPI dan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengelola Kebun Raya Baturraden. Akan tetapi, dalam perjalanannya ternyata *shared-resources* antar *stakeholder* ada yang tidak berjalan secara rutin atau terus menerus. Padahal, perjanjian kerjasama untuk berkolaborasi mengelola Kebun Raya Baturraden tersebut terus berlangsung dan diperbaharui setiap lima tahun. Hal ini tidak sesuai dengan teori perspektif kolaborasi yang dinyatakan oleh Sopari (2014) baik kolaborasi sebagai keadaan, kolaborasi sebagai proses maupun kolaborasi sebagai pendekatan.

Perspektif kolaborasi sebagai keadaan, Sopari (2014) menyatakan bahwa keaadaan pada tatanan lokal, daerah ataupun nasional dimana dua pihak atau lebih berinteraksi dan berkontribusi bersama secara sinergis bagi efektifnya pencapaian tujuan bersama tatanan tersebut. Artinya, lima *stakeholder* yang diamanatkan oleh SK Menteri Kehutanan Nomor SK.85/Menhut-II/2005 seharusnya berinteraksi dan berkontribusi bersama (*shared-resources*) secara sinergis bagi efektifnya pencapaian tujuan Pembangunan Kebun Raya Baturraden. Akan tetapi, dalam pelaksananaannya *shared-resources stakeholder* ada yang sifatnya tidak rutin atau hanya sekali saja dalam aktivitas kolaborasi Pembangunan Kebun Raya Baturraden tersebut. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan di atas, pihak yang diserahkan amanat untuk mengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus dalam bentuk Kebun Raya Baturraden adalah Balitbanghut Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, LIPI, Perum Perhutani dan Pemerintah Banyumas. Namun pada implementasinya, Kebun Raya Baturraden tersebut merupakan Kebun Raya Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga alokasi sumber daya manusia dan biaya operasional dianggarkan secara rutin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peran kolaboratif dari Perhutani yaitu terkait lokasi kebun raya yang merupakan eks kawasan Hutan Produksi Terbatas yang sebelumnya dikelola oleh Perhutani dalam hal ini Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur. Maka semua tegakan Damar yang ada di kawasan tersebut adalah asset dari KPH Banyumas Timur, sehingga untuk penebangan dan pembukaan lahan untuk kebutuhan Kebun Raya Baturraden dianggarkan dan dilaksanakan oleh KPH Banyumas Timur. Untuk Pusat Konservasi Tumbuhan LIPI dalam hal bimbingan teknis terkait pembangunan kebun raya baik itu tenaga ahli, koleksi tanaman dan regulasi. Pemerintah Kabupaten Banyumas turut berperan dalam menyusun manajemen pengelolaan kebun raya serta menyinkronkan dengan pembangunan kabupaten karena kawasan kebun raya tersebut berada di wilayah kabupaten Banyumas. Sedangkan Balai Penelitian dan Pengembangan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan semua Kawasan Hutan

dengan Tujuan Khusus di Indonesia, perannya terhadap KHDTK Kebun Raya Baturraden tergolong tidak bersifat kontinyu yaitu pada tahun 2006 memberikan bimtek terkait: penjarangan & penebangan tegakan *Agathis*; teknik konservasi pohon langka; dampak pembukaan hutan terhadap tata air Kebun Raya Baturraden; serta kajian habitat maupun populasi burung dan mamalia. Berdasarkan wawancara dengan pihak balai, diperoleh informasi bahwa KHDTK yang dikelola adalah seluruh Indonesia, sedangkan KHDTK Kebun Raya Baturraden adalah salah satunya saja sehingga alokasi sumber daya manusia untuk mengelola dan biaya operasional memang tidak ada anggarannya secara rutin.

Selanjutnya dalam perspektif kolaborasi sebagai proses, kolaborasi Pembangunan Kebun Raya Baturraden meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengelolaan. Artinya, aktivitas kolaborasi yang disepakati antara Gubernur Jawa Tengah – Kepala LIPI – Kepala Balitbanghut Departemen Kehutanan – Direktur Utama Perum Perhutani – Bupati Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya diikat oleh suatu Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah – Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI – Kepala Balitbanghut Kementerian Kehutanan – Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah – Bappeda Kabupaten Banyumas meliputi semua tahap Pembangunan Kebun Raya Baturraden. Sebagaimana penanda perspektif kolaborasi sebagai proses yang dinyatakan oleh Sopari (2014) bahwa proses perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya menuju pencapaian tujuan bersama pada tatanan lokal, daerah ataupun nasional yang didalamnya berinteraksi dan berkontribusi dua pihak atau lebih. Berkaitan dengan tahap pembangunan Kebun Raya Baturraden, terdapat stakeholder yang berinteraksi dan berkontribusi tidak pada semua tahap pembangunan sementara kedudukannya para stakeholder tersebut terikat dalam suatu perjanjian kerjasama yang mencakup semua tahap pembangunan. Hal tersebut ditandai dengan perpanjangan surat perjanjian kerjasama setiap 5 (lima) tahun sejak kebun raya ditetapkan.

Kolaborasi dalam Pembangunan Kebun Raya Baturraden dilihat dalam perspektif kolaborasi sebagai pendekatan, hal tersebut sudah ada sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.85/Menhut-II/2005 terkait pemberian amanat untuk berkolaborasi mengelola Kebun Raya Baturraden dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Gubernur Jawa Tengah – Kepala LIPI – Kepala Balitbanghut Departemen Kehutanan – Direktur Utama Perum Perhutani – Bupati Kabupaten Banyumas yang selanjutnya diikat oleh suatu Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah – Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI – Kepala Balitbanghut Kementerian Kehutanan – Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah – Bappeda Kabupaten Banyumas. Hal tersebut sesuai dengan penanda perspektif kolaborasi sebagai pendekatan yang dinyatakan oleh Sopari (2014) yaitu metode atau cara untuk mendorong interaksi dan kontribusi dua pihak atau lebih dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam pencapaian tujuan bersama sebuah tatanan lokal, daerah ataupun nasional.

D. Pembangunan Kebun Raya yang Berkelanjutan

Keanekaragaman hayati merupakan isu global yang mendapatkan perhatian utama dari masyarakat dunia dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Witono, *et al.* (2012) Indonesia merupakan salah satu negara pusat keanekaragaman hayati dunia dengan jumlah tumbuhan sekitar 35.000 jenis atau lebih dari 10% jumlah jenis tumbuhan di dunia. Berdasarkan jumlah tersebut, sekitar 16.500 jenis merupakan tumbuhan endemik. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi merupakan suatu kekayaan yang unik dan mempunyai potensi genetik, jenis dan ekosistem yang besar pula.

Terancamnya kelestarian keanekaragaman hayati dapat diakibatkan oleh faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan yang bukan disebabkan oleh manusia. Sedangkan faktor

karena ulah manusia misalnya, perusakan habitat, misalnya membangun menjadi lahan pertanian, permukiman, pembangunan infrastruktur, pembakaran hutan, atau perburuan dan perdagangan terhadap satwa dan tumbuhan liar secara besar-besaran. (Wibisana, 2015)

Berbagai kebijakan internasional, nasional dan daerah dilakukan untuk konservasi keanekaragaman hayati. Salah satu bentuk konservasi tumbuhan *ek-situ* yang telah 'mendunia' adalah kebun raya. Kebun raya tidak hanya melakukan fungsi konservasi, tetapi juga melakukan fungsi penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Miller, *et.al* (2015) menyatakan bahwa kebun raya tempat koleksi hidup keanekaragaman hayati yang terpelihara dan terdokumentasi, pendidikan, konservasi dan penelitian, termasuk di dalamnya yaitu pengembangan tanaman pangan dan keberlanjutan pertanian.

Witono, *et al.* (2012) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia perlu memperhatikan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu arah pembangunan, pola pemanfaatan dan peran pemerintah dalam mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap ke daerah. Hal ini senada dengan pendapat Dwiyanto (2010) bahwa pemerintah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif dalam penyelenggaraan aktivitas sektor publik seperti pembangunan kebun raya baik terkait pembuatan dan implementasi kebijakan publik maupun penyelenggaraan pelayanan publiknya. Terkait upaya untuk merealisasikan tujuan dan fungsi dari kebun raya, Miller *et.al* (2015) menyatakan bahwa perlu membentuk suatu kemitraan dengan universitas dan lembaga penelitian yang terkait dengan kebun raya, institusi pemerintahan baik pusat maupun daerah, lembaga swadaya masyarakat serta kelompok industri.

Bagi pembangunan kebun raya yang dilaksanakan secara kolaboratif yaitu melibatkan banyak stakeholder, merujuk pendapat Wolff (2010) dan Wakka (2014) bahwa untuk sampai kepada terwujudnya kolaborasi (*collaboration*), ada 3 (tiga) aktivitas yang harus dilakukan dan menjadi landasan sehingga kegiatan kolaborasi tersebut dapat berjalan yaitu membangun jaringan kerja (*networking*), melakukan koordinasi (*coordination*) dan menjalin kerjasama (*cooperation*). Sopari (2014) menyatakan bahwa dalam perspektif kondisi, kolaborasi berarti keadaan dimana dua pihak atau lebih berinteraksi dan berkontribusi bersama (*shared-resources*) dalam pencapaian tujuan bersama sebuah tatanan, baik tatanan lokal, daerah maupun nasional.

Berkenaan dengan keberlanjutan suatu kegiatan yang sifatnya kolaboratif, Nururrohmah (2016) menyatakan bahwa perlu ditetapkan dalam suatu sistem kebijakan yang mengikat serta pewarisan norma-norma kolaborasi terutama dalam tubuh masyarakat dan lembaga maupun instansi terkait. Selain itu, Delina (2017) menyatakan bahwa perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder agar kebijakan maupun produk hukum yang dikeluarkan oleh masing-masing stakeholder berkaitan dengan pembangunan kebun raya tidak saling bertolak belakang.

IV. KESIMPULAN

Proses tata kelola barang publik pemerintahan bukanlah sebuah resep tertentu tetapi merupakan konstruksi yang unik dalam suatu situasi dimana sistemnya bersifat dinamis serta melibatkan lebih dari satu pihak (Nururrohmah, 2016). Sistem tata kelola dengan pendekatan kolaboratif tersebut bisa dimodelkan dan diprediksi melalui pendekatan perencanaan kolaboratif serta dikawal melalui kegiatan monitoring evaluasi. Makalah ini bertujuan mengkaji pendekatan kolaboratif dalam Pembangunan Kebun Raya Baturraden. Meskipun hasilnya belum merupakan model pendekatan kolaboratif terbaik, tetapi bisa menjadi lesson learned dan menambah khasanah keilmuan terkait pendekatan kolaborasi dalam pembangunan kebun raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Mitchell, B., Setiawan, B., dan Rahmi, Dwita H. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Di antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Witono, Joko Ridho., Purnomo, Danang Wahyu., Usmadi, Didi., Pribadi, Didit Okta., Asikin, Djauhar., Magandhi, Mahat., Sugiarti dan Yuzzami. 2012. *Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia*. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor. Bogor.

Wolff, Tom. 2010. *The Power of Collaborative Solution: Six Principles and Effective Tool for Building Healthy Communities.* San Francisco: Jossey-Bass.

Artikel dalam Handbook (Editorial)

Meyers, James. 2005. *Power Tools The Four Rs. International Institute for Environment and Development*.

Tesis / Laporan Penelitian

Delina, Anita. 2017. Kolaborasi dalam Pembangunan Kebun Raya Baturraden Provinsi Jawa Tengah. Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Nururrohmah, Zainab. 2016. *Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Tematik Kota Bandung*. Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Sopari, Hery. 2014. *Model Kolaborasi Perencanaan Antara Balai Taman Nasional Wakatobi dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari*. Program Pascasarjana. Universitas Hasanuddin. Makasar.

Wibisana, Andri Gunawan. 2015. *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. Jakarta.

Jurnal

Borrini-Feyerabend, G., Farvar, M. T., Nguinguiri, J. C. & Ndangang, V. A. 2007. *Comanagement of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning-by-Doing.* GTZ and IUCN, Kasparek Verlag, Heidelberg (Germany). Reprint 2007 [first publication in 2000].

Wakka, Abd. Kadir. 2014. *Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Volume 3 Nomor 1, April 2014: 47-55.

Miller, A.J., A. Novy, J. Glover, E.A. Kellogg, J.E. Maul, P. Raven and P. Wyse Jackson. 2015. Expanding The Role of Botanical Gardens in The Future of Food. Nature Plants, Published 1 June 2015, Artikel Number: 15078. DOI: 10.1038/NPLANTS.2015.78.

Peraturan Perundangan

Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya.

Penentu Tingkat Keberhasilan Implementasi Pembangunan Taman Kota Dalam Upaya Mewujudkan Kota Berkelanjutan

Meta Andan Sari[1] dan Retno Widodo Dwi Pramono[2]

[1)2)]Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: [1)]meta.andansari@gmail.com; [2]pramono_wid@yahoo.co.id;

ABSTRAK

Keberhasilan taman kota sebagai ruang terbuka publik di perkotaan merupakan hal yang penting dalam upaya menciptakan kota yang berkelanjutan. Banyak taman kota yang kurang optimal keberadaannya, sehingga tidak berhasil menjalankan fungsinya sebagai ruang terbuka publik. Keberhasilan pembangunan taman kota ditentukan oleh beberapa aspek yang diidentifikasi berbeda pada tiap kota. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi faktor penentu tingkat keberhasilan pembangunan taman kota. Kasus taman kota yang diangkat pada makalah ini berada di Batam. Batam merupakan kota yang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kondisi alam yang kurang subur. Selain itu Batam juga merupakan kota yang berbatasan dengan negara lain yang menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia. Makalah ini menggunakan metode eksidental sampling terhadap pengunjung taman kota. Dengan pendekatan evaluasi paska pelaksanaan, makalah ini mengungkapkan bahwa keberhasilan taman kota dipengaruhi oleh faktor desain dan perencanaan, faktor pengelolaan dan pemeliharaan, serta faktor pemilihan lokasi tapak.

Kata kunci: Keberhasilan Taman Kota, Ruang terbuka hijau publik, Evaluasi paska pelaksanaan, Kota Berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu elemen penting dari kota berkelanjutan. Secara spesifik pengembangan RTH turut mendukung capaian Millenium Development Goals (MDG's) yang memastikan keberlanjutan lingkungan hidup di perkotaan. Taman Kota merupakan salah satu bentuk dari pengembangan infrastruktur berkelanjutan di perkotaan.

Ada beberapa fungsi yang melekat pada keberadaan taman kota diantaranya meliputi fungsi sosial, fungsi visual dan estetika, fungsi rekreasi, fungsi ekologi, serta fungsi ekonomi (Permenpu No.05/PRT/M/2008; Permenpu No.12/PRT/M/2009; Carr,1996; CABE,1994; Carmona dkk,2003; Hakim,2002; Garvin,2011; Bakar,2002). Namun banyak taman kota di perkotaan yang kurang optimal keberadaannya, sehingga tidak berhasil menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Beberapa literatur telah menyebutkan bahwa keberhasilan suatu taman kota ditentukan oleh beberapa aspek antara lain desain, manajemen dan manusia (Philips, 1996) dan faktor finansial (Garvin, 2011). Namun demikian pada beberapa penelitian lain ditemukan bahwa terdapat faktor yang kontekstual yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya Rezvanpour dan Bayat (2017) yang menekankan pentingnya identitas bagi keberhasilan setiap rancangan ruang terbuka publik kota. Pada faktor yang menyangkut keragaman pengguna dan layanan, Saiedlue,dkk (2015) mengusulkan untuk merancang area yang merespons kebutuhan penduduk. Menurutnya merancang ruang yang sesuai untuk berbagai kelompok usia dengan keinginan yang sama yang pada akhirnya dapat memberikan lingkungan yang menyenangkan dan konstruktif.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan makalah ini bermaksud untuk

memverifikasi faktor-faktor penentu tingkat keberhasilan implementasi pembangunan taman kota dalam suatu konteks tertentu. Konteks, telah diakui menjadi aspek penting perencanaan, rancangan fisik dan manajemen ruang kota. Konteks dalam perencanaan lokal dibutuhkan untuk memaksimalkan implementasi dari perencanaan pembangunan (Gellent,2012). Bahkan aspek desain fisikpun memerlukan konteks untuk dapat menfasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat (Kooshali,2015).

Dalam makalah ini Batam dipilih sebagai wilayah yang diteliti karena Batam memiliki karakteristik lingkungan sosial yang multi etnis dengan pertumbuhan yang pesat. Hal tersebut disebabkan sebagai kota perbatasan, Batam tumbuh menjadi kota industri yang menarik minat pendatang dari seluruh wilayah Indonesia untuk bermigrasi ke Batam. Sehingga Batam memiliki pertumbuhan penduduk yang masuk dalam katagori tertinggi di Indonesia. Selain itu Batam memiliki karakteristik lingkungan alam yang sebagian besar kurang subur. Berdasarkan peta geologis kota Batam, hampir sebagian besar wilayah Batam dibentuk oleh formasi goungon yang memiliki karakteristik yang sulit ditanami dan sulit menyerap air. Kondisi alam yang kurang subur ini diduga mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi pembangunan taman kotanya.

II. METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan evaluasi paska pelaksanaan dengan metode studi komparatif. Pedoman oleh Bappenas (2009) mengkatagorikannya sebagai evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah program atau kebijakan diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Kriteria evaluasi yang menjadi fokus pada penelitian ini mencangkup empat dari lima kriteria yang dikemukakan oleh OECD (2002) yang meliputi efektivitas, efisiensi, dampak dan keberlanjutan.

Penelitian ini diawali dengan observasi secara makro terhadap seluruh taman yang ada di Batam untuk memilih secara purposif taman-taman yang diangap paling berhasil diantara yang lainnya. Hal tersebut dilakukan karena belum adanya justifiasi terhadap tingkat keberhasilan dari taman-taman yang diambil sebagai kasus. Indikator observasi yang dipakai adalah fungsi taman, pelaksana pembangunan, usia taman, luas taman dan lokasi taman. Table 1 di bawah ini adalah daftar taman yang ada di kota Batam.

Tabel 1. Data Taman Kota di Kota Batam

NO	Nama Taman	Lokasi	Dibangun Tahun	Luas	Dibangun / Dikelola	Kondisi guna lahan
1	Taman Kolam Bandara	Nongsa	-	Kurang dari 1 ha	-	Permukiman
2	Taman Engku Putri	Batam Center	2009	Lebih dari 1 ha	PEMKO BATAM	Pemerintahan/ Perdagangan
3	Taman Aspirasi	Batam Center	2007	Kurang dari 1 ha	PEMKO BATAM	Pemerintahan/ Perdagangan
4	Taman Kolam Batam Center	Batam Center	2007	Kurang dari 1 ha	PEMKO BATAM	Perdagangan
5	Taman Mustika Alam (Park Way)	Batam Center	2013	Kurang dari 1 ha	PEMKO BATAM	Perdagangan Pendidikan
6	Taman Gadjah Mada	Sekupang	2012	Lebih dari 1 ha	PEMKO BATAM	Permukiman
7	Taman Kolam Sekupang	Sekupang	2009	Kurang dari 1 ha	PEMKO BATAM	Hutan
8	Taman Wijayakusuma	Sekupang	2005	Kurang dari 1 ha	PEMKO BATAM	Pemerintahan/ Perdagangan
9	Taman Kartini (depan SMP 3)	Sekupang	2015	Kurang dari 1 ha	PEMKO BATAM	Pendidikan/ Permukiman
10	Taman Dendang Melayu	Sagulung	2011	Lebih dari 1 ha	PEMPROV KEPRI	Pariwisata

Sumber : Hasil Observasi, 2017

Di antara taman-taman tersebut, dua taman kota yang dianggap sesuai dan cocok

untuk diangkat menjadi kasus pada penelitian ini adalah **Taman Engku Putri (TEP)** dan **Taman Gajah Mada (TGM)**. Keduanya merupakan model taman yang berfungsi sebagai taman aktif yang dibangun oleh Pemerintah Kota Batam dan sama-sama taman yang diklaim oleh Pemerintah Kota Batam sebagai contoh taman yang berhasil di Kota Batam. Keduanya juga mewakili karakteristik taman yang berbeda di Batam. TEP merupakan salah satu taman terbesar yang terletak di pusat kota Batam, sedang TGM merupakan taman dengan luasan sedang yang terletak cenderung dipinggiran kota. Keduanya juga merupakan taman yang memiliki luas diatas 1 Ha dan sudah terbangun selama 5 tahun sehingga layak untuk dilakukan evaluasi. Kedua taman yang dipilih memiliki kondisi guna lahan dan kondisi geologis yang berbeda. TEP berada di pusat pemerintahan dan perdagangan, serta memiliki tanah yang relatif subur. Sedang TGM berada di permukiman dan perdagangan serta terletak pada kondisi tanah yang relatif tidak subur.

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dengan metode campuran antara kualitatif dan kualitatif yang diawali dengan pengamatan dan pemahaman terhadap kumpulan literatur yang berkaitan. Tinjauan literatur dilakukan terhadap teori dan peraturan yang terkait dengan taman kota sebagai ruang terbuka publik dan evaluasi program pembangunan. Dari tinjauan literatur tersebut kemudian ditemukan veriabel, sub variabel, indikator dan metode yang digunakan untuk menganalisa tingkat keberhasilan pembangunan taman kota di kota Batam sebagai upaya untuk mengidenifiasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil deduksi teori didapatkan variabel dan sub variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Variabel dan Sub Variabel Penelitian

VARIABEL	SUB.VARIABEL
Efisiensi	Input Pembiayaan Pembangunan
	Input Pembiayaan Pemeliharaan
Efektivitas	Output Fasilitas Fisik Pendukung Fungsi Sosial
	Output Fasilitas Fisik Pendukung Fungsi Viasual dan Estetika
	Output Fasilitas Fisik Pendukung Fungsi Rekreasi
	Output Fasilitas Fisik Pendukung Fungsi Ekologi
	Output Fasilitas Fisik Pendukung Fungsi Ekonomi
	Outcome Fungsi Sosial
	Outcome Fungsi Visual dan estetika
	Outcome Fungsi Rekreasional
	Outcome Fungsi Ekologi
	Outcome Fungsi Ekonomi
Dampak	Dampak Terhadap Kegiatan Ekonomi Sekitar
	Dampak Terhadap Properti Sekitar
Keberlanjutan	Upaya Pengelola
	Upaya Masyarakat

Sumber : Analisa Peneliti, 2017

Penggunaan data dalam makalah ini terdiri dari data primer berupa hasil obsevasi lapangan, penyebaran kuesioner dan wawancara.Data sekunder berupa data-data instansi yang terkait dengan program pembangunan kedua taman.

Populasi responden pada penelitian ini ditetapkan sebagai masyarakat yang mengunjungi Taman Engku putri dan Taman Gajah Mada.Sampel responden diambil dengan metode *non-probability sampling* yang didasarkan karena sampling frame tidak ada. Jenis metode *non-probability sampling* yang digunakan adalah aksidental sampling yang memungkinkan setiap orang yang dijumpai pada populasi yang ditentukan dapat menjadi sample pada penelitian ini (Nasution,2001).

Analisa tingkat keberhasilan taman kota dilakukan linier dengan jenis variabel yang ditetapkan yang mencangkup:

a. Analisa efektivitas taman kota yang melibatkan output dan outcome taman kota. Analisa tingkat efektivitas taman kota dilakukan berdasarkan dua sub variabel yaitu penilaian kualitas fisik taman dan penilaian pelaksanaan fungsi taman. Penilaian kualitas fisik taman dilakukan berdasarkan penilaian peneliti terhadap kualitas fasilitas fisik taman. Sedang penilaian terhadap pelaksanaan fungsi taman dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat yang mengunjungi masing-masing taman. Adapun fungsi taman yang dianalisa dalam makalah ini mencangkup lima kelompok fungsi taman yaitu; fungsi sosial, fungsi visual dan estetika, fungsi rekreasi, fungsi ekologi dan fungsi ekonomi.
b. Analisa efisiensi pembiayaan pembangunan yang melibatkan input pembiayaan pembangunan dan hasil analisa efektivitas yang telah dilakukan. Analisa tingkat efisiensi kedua taman yang diteliti dapat dilihat melalui hasil perbandingan cost-effectiveness. Cara tersebut akan membandingkan variabel input berupa anggaran pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah, dengan tingkat pencapaian (indeks efektivitas fungsi) dari masing-masing taman yang diteliti. Hasil dari perbandingan tersebut didapatkan angka indeks efisiensi yang dapat menggambarkan program pembangunan mana yang lebih efisien antara satu dengan yang lainnya.
c. Analisa dampak ekonomi yang dilakukan dengan mengamati dua sub variabel dampak, yaitu dampak pembangunan terhadap pertumbuhan kegiatan usaha dan dampak pembangunan terhadap pertumbuhan properti disekitar taman yang diteliti berdasarkan persepsi pengunjung yang menjadi responden.
d. Analisa prospek keberlanjutan taman kota diukur melalui penilaian responden terhadap hasil dari upaya pemerintah sebagai pengelola dan besarnya komitmen masyarakat sebagai pengguna untuk ikut berperan serta dalam upaya menjaga keberlanjutan fungsi taman.

Dengan membandingkan hasil analisa tingkat keberhasilan antara kedua taman yang diteliti tersebut ditemukan faktor yang kontekstual yang mendorong tingkat keberhasilan masing-masing taman yang diteliti. Faktor-faktor yang ditemukan tersebut sekaligus memverivikasi faktor-faktor yang ditemukan pada penelitian-penelitian tentang keberhasilan taman kota pada kota-kota lainnya yang telah dilakukan sebelumnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

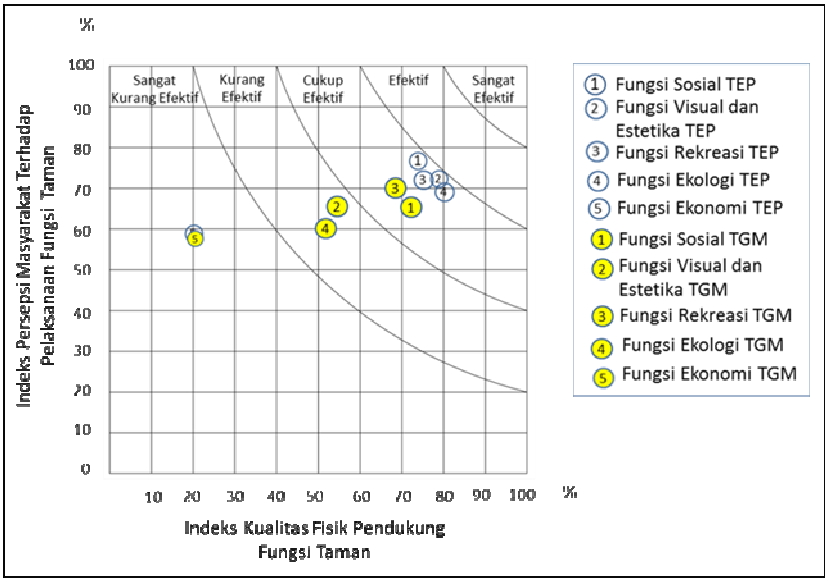
A. Tingkat Efektifitas Taman Kota

Tingkat efektifitas pada kedua taman kota yang diteliti digambarkan berdasarkan kombinasi indeks penilaian terhadap kedua sub variabel tersebut. Hasilnya dapat dilihat pada diagram XY pada Gambar 1, dimana sumbu x mewakili variabel penilaian terhadap kualitas fisik taman dan sumbu y mewakili penilaian terhadap pelaksanaan fungsi taman. Hasilnya memperlihatkan bahwa 4 dari 5 (80%) kelompok fungsi yang diteliti di TEP (lingkarang angka berwarna putih) berada pada wilayah cukup efektif. Keempat kelompok fungsi tersebut meliputi kelompok fungsi sosial, kelompok fungsi visual, kelompok fungsi rekreasi dan kelompok fungsi ekologi. Sedang pada TGM (lingkarang angka berwarna kuning), hanya 2 dari 5 kelompok fungsi (40%) yaitu fungsi rekreasi dan fungsi sosial yang berada pada wilayah cukup efektif.

Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat tiga kelompok fungsi yang dimiliki TGM berada dalam katagori tidak efektif dengan tingkatan kurang sampai dengan sangat kurang. Dua kelompok fungsi berada dalam katagori kurang efektif yang dimiliki TGM yaitu kelompok fungsi ekologi dan kelompok fungsi visual dan estetika. Kondisi tersebut

disebabkan oleh kondisi alami tapak taman yang kurang subur yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga mempengaruhi fungsi ekologi dan visual estetikanya.

Satu kelompok fungsi yang berada pada katagori sangat kurang efektif dimiliki oleh TGM maupun di TEP. Kelompok fungsi tersebut adalah kelompok fungsi ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam hal ini dengan tidak menyediakan fasilitas ekonomi di dalam taman mempengaruhi turunnya efektifitas fungsi ekonomi. Hal tersebut disebabkan fungsi ekonomi ternyata bukan menjadi tujuan langsung dibangunnya taman kota di Batam .



Sumber : Hasil Analisa, 2017

Gambar 1. Penilaian Tingkat Evektivitas Taman Kota Di Kota Batam

B. Efisiensi Taman Kota

Anggaran Pembiayaan program pembangunan taman kota ini dibedakan menjadi anggaran pembiayaan pembangunan dan anggaran pembiayaan pemeliharaan. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3, dimana jumlah anggaran pembiayaan pembangunan yang dimiliki TEP sampai saat penelitian dilakukan sudah mencapai Rp 533.444,- per meter perseginya, dengan indeks efektivitas taman yang didapat dari hasil analisa tingkat efektivitas adalah 80%. Sedang TGM hanya mencapai Rp 162.988,- per meter perseginya, dengan indeks efektivitas fungsi taman yang mencapai penilaian minimal cukup efektif adalah 60%. Sehingga didapatkan hasil perhitungan indeks efisiensi pembiayaan pembangunan pada TEP adalah 6,668, lebih besar dibanding TGM yang hanya 4,074. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TGM memiliki rasio pembiayaan pembangunan yang lebih efisiensi dari pada TEP.

Kecenderungan yang berbeda terjadi pada pembiayaan pemeliharaan pertahunnya.Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, anggaran pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Pemko Batam untuk TEP sudah mencapai Rp 1,395,677,725. Dengan luas mencapai 5.5 Ha, rata-rata anggaran per tahunnya per meter persegi mencapai Rp 6.344,-. Sedang TGM yang memiliki anggaran pemeliharaan sejak tahun 2014. Sampai dengan saat ini TGM telah menghabiskan dana sebesar Rp 355,250,000. Dengan luas 1.65 Ha, rata-rata anggaran pertahunnya per meter persegi mencapai Rp 7,177 per tahun. Sehingga hasil perhitungan Indeks efisiensi pembiayaan pemeliharaan yang dimiliki oleh TEP adalah 79.3, lebih kecil dibanding indeks efisiensi pembiayaan pemeliharaan yang dimiliki oleh TGM yang mencapai 179.4 untuk pencapaian tingkat efektifitas yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk pembiayaan pemeliharaan, TEP memiliki anggaran yang lebih efisien dari pada TGM.

Table 3. Hasil Analisa *Cost Effectivenes*

	Jumlah Anggaran Pembiayaan Pembangunan (dalam Rp/M²)	Jumlah Anggaran Pemeliharaan per tahun (dalam Rp/M²)	Indeks Pencapaian Efektivitas Taman	indeks efisiensi anggran pembangunan	indeks efisiensi anggran pembangunan
	a1	**a2**	**B**	**a1/b**	**a2/b**
TEP	533,444	6.344	80	6,668	79.3
TGM	162,988	7.177	40	4,074	179.4

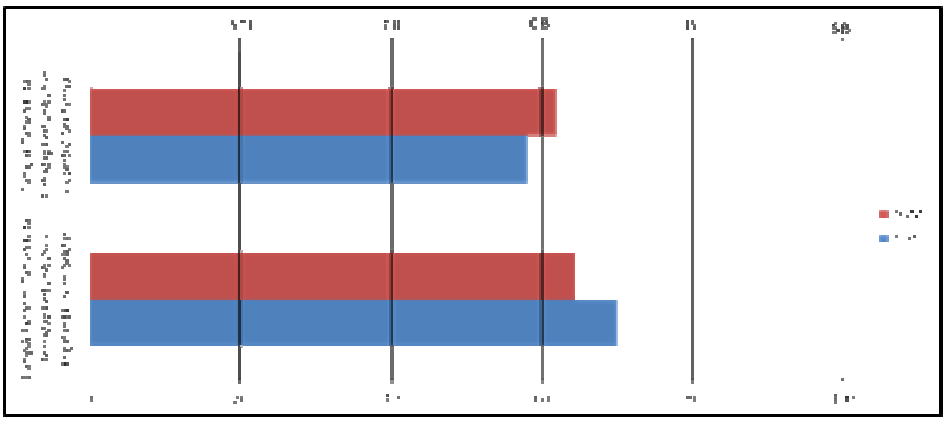
Sumber : Hasil Analisa, 2017

Berdasarkan hasil analisa efisiensi ditemukan bahwa besarnya pembiayaan mempengaruhi efisiensi pembangunan. Selain itu juga ditemukan bahwa kualitas (ketahanan) elemen fisik dan kemudahan pemeliharaan mempengaruhi biaya pemeliharaan Sehingga diperlukan pertimbangan kualitas yang sesuai dengan kemudahan pemeliharaan dan ketahanan. Selain itu pemilihan lokasi tapak yang kurang sesuai untuk vegetasi juga mempersulit pemeliharaan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan kualitas yang sesuai untuk sebuah taman tidak hanya meningkatkan efisiensi pembangunannya tapi juga efisiensi pemeliharaannya. Kualitas yang terlalu tinggi menyebabkan tidak efisiennya biaya pembangunan. Sedang kualitas yang tidak sesuai memperberat biaya pemeliharaan sehingga menyebabkan ketidak efisiensian biaya pemeliharaan. Perencanaan anggaran yang tepat, yang menitikberatkan pada kualitas hasil pembangunan, perlu diperhitungkan dengan baik.

C. Dampak Pembangunan Taman Kota

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa dampak ekonomi taman kota terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi baik di TEP maupun TGM berada pada katagori cukup terasa. Namun demikian TEP memiliki indeks persentase yang lebih tinggi dari pada TGM. Pada sub variabel dampak terhadap pertumbuhan properti, TGM memiliki katagori penilaian yang lebih tinggi dari pada TEP. TGM berada pada katagori cukup baik/ cukup terasa sedang TEP berada pada katagori tidak baik/tidak terasa.



Sumber : Hasil Analisa, 2017

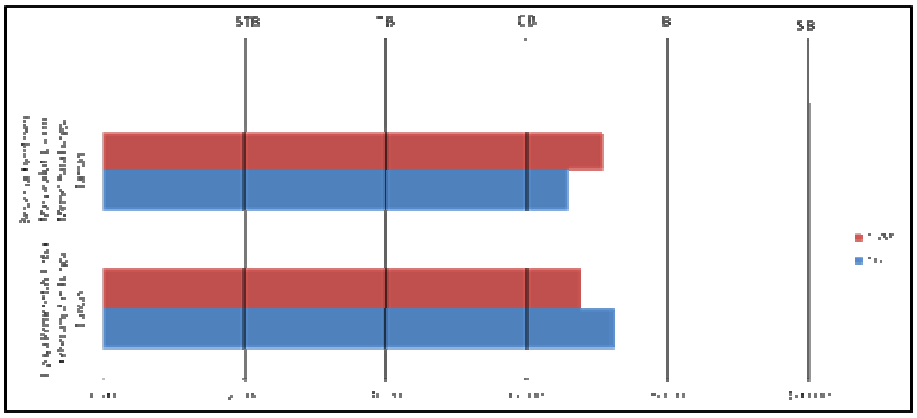
Gambar 2. Perbandingan Hasil Identifikasi Dampak Ekonomi TEP dan TGM

Pada TEP pengamatan dilapangan yang menunjukkan munculnya pedagang kaki lima yang cukup ramai di sekitar TEP. Hal tersebut tidak ditemui di TGM, walaupun TGM juga merupakan taman yang ramai dikunjungi. Hasil pengamatan di TGM menunjukkan hanya terjadi peningkatan intensitas kegiatan ekonomi di pertokoan sekitar taman. Perbedaan kondisi tersebut dikarenakan TEP berada di wilayah pusat

pemerintahan dan pusat perdagangan dengan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dari TGM. Kondisi ini mendorong timbulnya kegiatan ekonomi yang lebih tinggi di TEP dari pada di TGM. Akibatnya penilaian responden terhadap dampak taman kota terhadap kegiatan ekonomi di TEP lebih tinggi dari pada di TGM.

D. Keberlanjutan Taman Kota

Implementasi pembangunan yang berhasil harus dapat terus berfungsi dengan baik dan walaupun program pembangunan telah selesai dilakukan. Gambar 3 memperlihatkan perbandingan prospek keberlanjutan di kedua taman, dimana digambarkan bahwa prospek keberlanjutan TEP dan TGM berada pada kategori yang sama yaitu katagori cukup baik. Namun bila dilihat dari sub variabel pembentuknya, terdapat variasi penilaian yang berbeda di kedua taman yang diteliti. TEP memiliki penilaian terhadap Upaya Pemerintah yang lebih tinggi dari pada TGM. Sedang di TGM memiliki Komitmen Masyarakat yang dinilai lebih tinggi dibandingkan di TEP.



Sumber : Hasil Analisa, 2017

Gambar 3. Diagram Perbandingan Prospek Keberlanjutan Taman Kota Di Kota Batam

Kualitas fasilitas fisik taman berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pemeliharaannya. Upaya pemerintah menentukan penilaian indikator pemeriksaaan pada analisa kualitas fasilitas fisik taman. Tingginya upaya pemerintah yang dirasakan juga menentukan kualitas fisik taman. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas taman kota yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat keberhasilan taman kota. Namun upaya pemerintah ini tidak ditentukan oleh besar anggaran pembiayaannya. Pada TGM yang memiliki anggaran pemeliharaan yang besar ternyata upaya pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat lebih kecil dari TEP yang memiliki anggaran pembiayaan yang lebih kecil. Akan tetapi upaya pemerintah ini ditentukan ditentukan oleh karakter fasilitas fisik terkait dengan kemudahan pemeliharaan.

Komitmen masyarakat juga memegang peranan penting dalam keberlanjutan fungsi taman. Komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan fungsi akan melepas ketergantungan terhadap peran pemerintah terutaman dalam penyediaan anggaran pembiayaan. Rasa kepemilikan dan penghargaan terhadap taman mendorong timbulnya komitmen masyarakat yang lebih tinggi tersebut. Lokasi TGM yang dikelilingi oleh perumahan level menengah yang seperti dijelaskan diatas jarang memiliki fasilitas ruang terbuka hijau, mendorong masyarakat untuk lebih menghargai keberadaan taman ini. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa lokasi taman kota juga mendorong komitmen masyarakat tersebut. Hasil analisa menunjukkan bahwa peningkatan komitmen masyarakat

terlihat pada TGM yang berlokasi dekat dengan permukiman level menengah. Pada taman tersebut masyarakat pengunjungnya memperlihatkan kesediaan berkorban lebih besar.

Tabel 4 merupakan rangkuman hasi keempat analisa yang telah dilakukan. Rangkuman tersebut memperlihatkan tingkat keberhasilan masing-masing sub variabel pada kedua taman yang di teliti, dimana sebagian besar berada pada tingkat keberhasilan sedang. Hal itu dapat diartikan bahwa TEP dan TGM memiliki tingkat keberhasilan yang cenderung berada pada level tengah (tidak tinggi maupun tidak rendah). Namun demikian dapat dilihat bahwa terdapat varisi peniliaian terhadap variable-variable pada kedua taman. Perbedaan penilaian tersebut yang menjadi dasar dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi pembangunan taman kota.

Table 4. Rangkuman Hasil Penilaian dan Identifikasi Faktor Penyebab

Sub Variabel	Hasil Penilaian	Identifikasi Faktor Penyebab Berdasarkan Perbandingan
Efektifitas Fungsi Sosial	Kedua taman berada pada katagori cukup, hanya saja TEP memiliki hasil yang cenderung lebih tinggi dari TGM.	Desain dan perencanaan yang tepat dan sesuai kebutuhan pengunjung memaksimalkan penilaian efektivitas fungsi sosial taman. Semakin banyak jenis fasilitas yang dimiliki semakin banyak kebutuhan masyaakat yang dapat diwadahi. Begitu pula dengan penentuan kualitas elemen pembentuk taman, semakin baik kualitasnya semakin tinggi efektifitasnya.
Efektifitas Fungsi Rekreasi	Kedua taman berada pada katagori cukup dan memiliki penilaian cenderung hampir sama	Sama halnya dengan faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi sosial, kesesuaian fasilitas fisik dengan kebutuhan masyarakat untuk berekreasi menjadikan fungsi rekreasi dikedua taman ini dinilai cukup efektif.
Efektifitas Fungsi Visual dan Estetika	TGM berada pada katagori kurang, lebih rendah dari TEP yang berada pada katagori cukup.	Kondisi lingkungan tapak menentukan kualitas elemen soft scape yang mempengaruhi efektivitas fungsi visual dan estetika selain kualitas tampilan (desain) elemen fisiknya. TEP tidak hanya dipengaruhi oleh desain elemen pembentuk taman maupun landscapnyaakan tetapi kualitas visual elemen soft scape yang cenderung lebih rendah yang disbabkan kondisi lingkungan tapak yang kurang mendukung. Sehingga secara visual elemen soft scape menjadi tidak menarik walaupun memiliki desain landscape yang baik.
Efektifitas Fungsi Ekologi	TGM berada pada katagori kurang, lebih rendah dari TEP yang berada pada katagori cukup.	Kondisi lingkungan alami mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan penyerapan air sehingga mempengaruhi efektivitas fungsi ekologinya, walaupun luasan RTH nya lebih besar. Kondisi lingkungan alami tapak TGM yang berada pada formasi tanah goungo menyebabkan tanah dilokasi TGM sulit untuk hidup tumbuhan dan sulit menyerap air. Pemilihan lokasi tapak terkait dengan kondisi alaminya ini lebih mempengaruhi efektivitas fungsi ekologi taman dibanding dengan persentase daerah hijau pada kedua taman yang diteliti.
Efektifitas Fungsi Ekonomi	Kedua taman sama-sama berada pada katagori sangat kurang	Kebijakan pemerintah untuk tidak menyediakan fasilitas ekonomi pada kedua taman karena fungsi ekonomi bukan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Batam dalam pembangunan taman kota sehingga efektivitas fungsi ekonomi pada kedua taman cenderung sangat tidak efektif
Efisiensi Pembiayaan Pembangunan	TGM lebih efisien dari pada TEP	Besarnya pembiayaan mempengaruhi efisiensi pembangunan. Besar kecilnya pembiayaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah

Bersambung

Sambungan Tabel 3

Sub Variabel	Hasil Penilaian	Identifikasi Faktor Penyebab Berdasarkan Perbandingan
Efisiensi Pembiayaan Pemeliharaan	TEP lebih efisien dari pada TGM	Kualitas (ketahanan) elemen fisik dan kemudahan pemeliharaan mempengaruhi biaya pemeliharaan. Sehingga diperlukan pertimbangan kualitas yang sesuai dengan kemudahan pemeliharaan dan ketahanan. Selain itu pemilihan lokasi tapak yang kurang sesuai untuk vegetasi juga mempersulit pemeliharaan.
Dampak Terhadap Kegiatan Ekonomi Sekitar	Keduanya berada pada katagori cukup ,Namun TEP cenderung memiliki penilaian yang lebih tinggi	Perbedaan lokasi tapak kedua taman, TEP berada di wilayah pusat perdagangan dan jasa dengan skala yang dengan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dari TGM yang hanya dikelilingi pusat perdagangan dan jasa dengan intensitas kegiatan yang lebih rendah.
Upaya Pemerintah Dalam Keberlanjutan	Sama, hanya saja upaya pemerintah di TEP lebih dirasakan oleh masyarakat dibandingTGM	Upaya pemerintah untuk memelihara keberlanjutan fungsi taman berkaitan dengan tingkat kesulitan pemeliharaan elemen pembentuk taman, bukan semata - mata dengan biaya.
Komitmen masyarakat dalam keberlanjutan	Sama, hanya saja komitmen masyarakat di TGM lebihlebih kuat dibanding TEP	Rasa kepemilikan dan penghargaan terhadap taman mendorong timbulnya komitmen masyarakat yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lokasi taman kota juga mendorong komitmen masyarakat tersebut.

Sumber : Hasil Analisa, 2017

Dari rangkuman di atas dapat ditemukan bahwa ternyata peran desain dan perencanaan taman dalam menentukan kesesuaian kualitas fisik taman dengan kebutuhan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi taman. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Philips (1996) yang kemudian menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Partisipasi diperkirakan akan meningkatkan kontekstualitas dari rancangan. Dengan partisipasi masyarakat perencanaan akan dilakukan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan motivasi masyarakat untuk memanfaatkan fungsi taman kota. Dengan partisipasi masyarakat pemerintah akan mengetahui kecenderungan kebutuhan dan preferensi masyarakat dalam memanfaatkan taman kota. Dengan demikian Kontekstualitas diharapkan dapat meningkatkan efektifitas fungsi taman karena fasilitas fungsi yang tersedia akan sesuai dengan mayoritas kebutuhan masyarakat sekitar.

Sebenarnya, kontekstualitas dapat diaawali dengan pemilihan lokasi tapak yang tepat. Faktor pemilihan lokasi terkait karakterisitik alami tapak ini tidak ditemukan pada penelitian-penelitian keberhasilan taman kota pada kota-kota lain di Indonesia yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pada penelitian milik Syafrini,dkk (2010), Lestari, dkk (2014) dan Indriani (2013) yang seluruhnya dilakukan pada kota dengan karakterisitik alam yang subur. Pemilihan lokasi tapak memberikan konteks ekologi dan konteks sosial ekonomi yang bisa jadi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Pemilihan lokasi tapak dengan kualitas lingkungan yang tidak tepat menyebabkan vegetasi tidak dapat tumbuh maksimal. Kurangnya kualitas kesuburan tapak menyebabkan elemen soft scape tidak dapat berfungsi maksimal baik secara ekologi maupun visual dan estetika. Sehingga walaupun memiliki prosentase RTH yang mencukupi seperti yang dikemukakan oleh Fick dan Mulyani (2006) namun efektifitas fungsinya ekologinya tetap tidak maksimal. Selain mempengaruhi efektivitas taman, pemilihan lokasi tapak yang kurang sesuai untuk vegetasi juga mempersulit pemeliharaan yang pada akhirnya mempengaruhi efisiensi pemeliharaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor pemilihan lokasi juga mempengaruhi upaya pemeliharaan taman kota, bukan hanya faktor pembiayaan seperti halnya yang

dikemukakan Philips(1996) yang selama ini menjadi fokus utama dalam pemeliharaan.

Selain terkait dengan kualitas lingkungan alaminya, pemilihan lokasi juga tekait dengan dengan karakteristik guna lahan sekitarnya yang mempengaruhi besarnya dampak sosial ekonomi yang dirasakan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat dampak yang dirasakan berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Perbedaan tersebut disebabkan karena karakteristik guna lahan yang berada disekelilingnya mempengaruhi besarnya dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Demi keberlajutan, rancangan fisik Taman diharapkan mengkombinasikan karakteristik budaya masyakarat dengan kapasitas anggaran dan tata kelola pemerintah. Kapasitasa pengelolaan taman sebaiknya adalah perpadauan dari potensi partisipasi dengan anggaran. Potensi anggaran sendiri dapat ditekan dengan perencanaan kualitas fisik taman yang mempertimbangkan kemudahan pemeliharaan dan ketahanan sehingga tidak memperberat upaya pemeliharaan dan pengeloalaan oleh Pemerintah. Sedang potensi partisipasi dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan karakteristik budaya masyarakatnya. Pertimbangan tersebut mempengaruhi rasa kepemilikan dan penghargaan terhadapt taman kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut mempengaruhi komitmen masyarakat yang lebih baik dalam memelihara keberlanjutan fungsi taman.

Dari urian di atas dapat dilihat bahwa kontekstualitas dalam pembangunan taman kota merupakan hal penting yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada keberlanjutan kota. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemilihan lokasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat merupakan pendekatan kontekstual yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan. Pemahaman mendalam tantang kontekstualitas merupakan prekursor penting untuk menyesuaikan program pembangunan ke lokasi pelaksanaan. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh LaGro (2008).

IV. KESIMPULAN

Makalah ini menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan taman kota di Kota Batam berada pada tingkat sedang cenderung ke tingkat rendah. Sehinga dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan taman kota yang di lakukan oleh Pemerintah Kota Batam masih perlu ditingkatkan walaupun tidak berada pada tingkat yang gagal.

Taman kota yang terletak pada pusat kota dan pusat pemerintahan, serta terletak pada lokasi dengan kondisi lingkungan alami yang lebih mendukung, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik dari pada taman kota yang terletak relatif ke pinggir kota serta memiliki lingkungan alami yang kurang mendukung. Namun demikian taman kota yang terletak di pinggir kota memiliki dampak properti yang lebih baik, serta berhasil menarik komitmen masyarakat lebih besar dari pada taman yang berada di pusat kota.

Pada penelitian taman kota di Batam ini ditemukan bahwa faktor pemilihan lokasi tapak terutama terkait dengan kondisi alami tapak mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi pembangunan taman kota. Faktor tersebut tidak ditemukan pada wilayah kota Indonesia lainnya dengan kondisi lingkungan alami yang subur. Pemilihan lokasi tapak memberikan konteks ekologi dan konteks sosial ekonomi yang bisa jadi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Faktor desain dan perencanaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan taman kota. Secara kontekstual, karakteristik lingkungan, sosial masyarakatnya dan kebijakan pemerintah setempat sebagai pelaksana pembangunan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan taman kota tersebut. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sebagai target group dibutuhkan dalam perencanaan untuk meningkatkan kotekstualitas hasil rencana.

Pemerintah perlu mempertimbangkan lokasi berdasarkan karakteristik wilayah sekitar dan kondisi alami tapak untuk tingkat keberhasilan pembangunan taman kota

yang lebih baik. Selanjutnya diperlukan perencanaan secara kontekstual yang sesuai dengan karakteristik budaya masyakarat dengan kapasitas anggaran dan tata kelola pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bappenas (2009) PEDOMAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SEKTORAL. Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas : 2009

Bakar, J. A. (2002) A Design Guide of Public Parks in Malaysia. Johor : Penerbit Carmona, Heat, Oc dan Tiesdell (2003) Public Space Urban Space. The Dimmension Of Urban Design. Burlington: Architectural Press.

Carr, S. (1992) Public Space. New York : Cambridge University Press.

CABE (2004) The Value of Public Space. London : Urban Green Space Management.

Universiti Teknologi Malaysia.

Hakim.R. (2002) Komponen Perencanaan Arsitektur Landscape. Jakarta : Bumi Aksara

Frick, H. and Mulyani, T. H. (2006) Arsitektur Ekologis. Eko Arsitektur 2 Yogyakarta: Kanisius.

Garvin, A. (2011) Public Park :The Key To Livable Comunities. first edn. New York: Norton

LaGro,Jr (2008) Site analysis : a contextual approach to sustainable land planning and site design (2nd Ed). New Jersey : John Wiley& Sons,Inc

Nasution, S (2001) Metode Research (Penelitian ilmiah). Jakarta : Bumi Aksara

Phillips, Leonard E (1996) PARK : Design and Management. New York : Mc Graw-Hill

OECD (2002) Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, Paris: DAC.

Gallent, N., & Robinson, S. (2012). Ashford and its strategic planning context. In Neighbourhood planning: Communities, networks and governance (pp. 53-68). Policy Press at the University of Bristol.

Jurnal :

Indriani, Y (2013) , Tingkat Keberhasilan Taman Dengung di Kabupaten Sleman, D.I. Ygyakarta Sebagai Ruang Publik (Skripsi).Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada

Lestari.S.P, Noor.I, Ribawanto.H (2014), Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City , Studi pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.2.No.3. Malang : Universitas Brawijaya.

Kooshali,AD.,Azeri ARK.,Parvizi,R., Hosseini,S.B. (2015) Effect Of Environental Physical Element in Creating Residential Complex'S Vitality for Enhancement of Social Interaction. Asian Confrence on Environment- Behaviour Studies, AcE-B22015, 20-22 Fevruary 2015, Teheran-Iran.

Rezvanpour, Nasim and Bayat, Askan (2017), Determining effective urban design factors within the branding strategy due to brand city spaces and evaluating city spaces by comparing them to the presented factors. A case study of ChaharBagh Avn, Isfahan, Iran. International Conference – Alternative and Renewable Energy Quest, AREQ 2017, 1-3 February 2017, Spain

Saiedlue,S.,Hosseini,S.B., Yazdanfar,S.A., Maleki,S.N., (2015) Enhancing Quality of Life and Improving Living Standards through the Expansion of Open Space in Residential Complex. Asian Conference on Environment-Behaviour Studies, AcE-Bs2015, 20-22 February 2015, Tehran, Iran

Syafrini.R, Sangkertadi.T (2010) Evaluation Of Public Open Space Performance Through The Environmental Perception And Behavior Setting In Manado. ACTA Technica Corviniensis– Bulletin of Engineering. Romania : University Politehnica Timisoara.

Peraturan :

Pemerintah RI (2009) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

Pemerintah RI (2008) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan .

Kinerja Pengembangan Obyek Wisata Desa Budaya Pampang Berdasarkan Persepsi Pengunjung

Ardiyanto Maksimilianus Gai[1], Sina Lestari[2] dan Agustina Nurul Hidayati[3]

[1,2,3] *Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang*
Email: ardy_06pl@yahoo.co.id

ABSTRAK

Image tujuan wisata sangat dipengaruhi oleh keinginan wisatawan/pengunjung karena kualitas obyek wisata ditentukan oleh perbandingan antara harapan wisatawan dan kinerja pelayanan pariwisata. Desa Budaya Pampang merupakan salah satu obyek wisata budaya di Kota Samarida yang berdasarkan data Dinas Pariwisata jumlah pengunjungnya terus meningkat namun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kinerja obyek wisata Desa Budaya Pampang dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukan menurut persepsi pengunjung bahwa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan obyek wisata antara lain makanan khas daerah, fasilitas rekreasi, akomodasi, lembaga keamanan, pengelola destinasi, rumah makan, SDM, kemanan, pusat informasi wisata, dengan faktor penunjang antara lain pementasan budaya, pameran, komunitas, rambu wisata, tari-tarian, peninggalan sejarah, musik, toko cinderamata, warisan budaya, kerajinan, cinderamata, daya tarik wisata, dan budaya.

Kata kunci: pengunjung, persepsi, desa wisata, budaya

I. PENDAHULUAN

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti (1993). Saat ini Desa Wisata merupakan *trend* baru yang berkembang di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kecenderungan wisatawan yang lebih banyak tertarik pada wisata minat khusus seperti menikmati alam bebas dan *live in* (hidup bersama) dengan warga dalam suasana tradisional. *Trend* dalam berwisata yang semula berorientasi pada pariwisata massal, yang menyediakan atraksi wisata yang diminati dan dinikmati umum, saat ini cenderung bergeser ke pariwisata kelompok kecil, yang lebih menekankan pada pengalaman pribadi secara mendalam sesuai dengan minat kelompok. Obyek wisata lebih ditekankan pada kedalaman pengalaman yang terkait dengan alam dan budaya.

Wisata budaya menurut *International Council on Monuments and Sites* (ICOMOS) (2012) meliputi semua pengalaman yang didapat oleh pengunjung dari sebuah tempat yang berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya. Dalam pariwisata budaya pengunjung diajak untuk mengenali budaya dan komunitas lokal, pemandangan, nilai dan gaya hidup lokal, museum dan tempat bersejarah, seni pertunjukan, tradisi dan kuliner dari populasi lokal atau komunitas asli (sumber website resmi ICOMOS : http://www.icomos- ictc.org). Oleh karena itu pengembangan pariwisata budaya tidak lepas dari peran pengunjung. Image tujuan wisata sangat dipengaruhi oleh keinginan wisatawan/pengunjung dan keinginan wisatawan memiliki peran penting dalam membangun image sebuah obyek wisata karena kualitas obyek wisata tersebut dipengaruhi oleh perbandingan harapan wisatawan dan kinerja pelayanan pariwisata.

Desa Budaya Pampang merupakan salah satu daya Tarik wisata di Kota

Samarinda. Berdasarkan RTRW Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang penetapan Desa Pampang sebagai kawasan peruntukan pariwisata sejarah budaya di Kecamatan Samarinda Utara. Budaya Pampang ini juga termasuk kedalam bagian Kawasan Strategis Kota (KSK) yang mana didalamnya kawasan ini termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Ditinjau dalam teori McIntosh 1977, Murphy 1985 dan Sharpley 1994 dalam Yudha Prascastino Heston (2010) dalam konteks motivasi, salah satu aspek penting dalam pariwisata budaya, yaitu motivasi budaya yang bertujuan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi dan kesenian daerah lain termasuk ketertarikan akan berbagai peninggalan objek tinggalan budaya.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kalimantan Timur dijelaskan, Kota Samarinda salah satu rencana pembangunan adalah dengan mengembangan kawasan cagar budaya sebagai daya tarik pariwisata, dan salah satunya wisata Desa Budaya Pampang yang dapat disaksikan di Lamin atau rumah adat suku dayak serta tarian dan upacara adat Dayak Kenyah. Keunikan dari Desa Pampang sendiri adalah warganya tetap mempertahankan budaya nenek moyang sebagai tradisi yang terus mereka lestarikan, meskipun pengaruh modern selalu masuk kesana menyadari jumlah pengunjung wisata lokal maupun mancanegara yang terus mengalir tiap harinya baik turis-turis domestik maupun mancanegara yang penasaran dengan keaslian budaya Dayak Kenyah.

Tercatat dalam data Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda pada tahun 2009 jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Desa Budaya Pampang sebanyak 4.949 dan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 182. Di tahun 2010, terdapat 3.792 wisatawan domestik dan 206 wisatawan mancanegara. Sepanjang tahun 2011 tercatat 3.729 wisatawan domestik dan 70 wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Desa Budaya Pampang ini. Data baru pada tahun 2012 menyebutkan wisatawan yang berkunjung mengalami peningkatan menjadi 5.524 dari domestik dan 212 wisatawan mancanegara. Dari data pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan dilihat dari penelitian sebelumnya Said Keliwar (2015) salah satu terjadinya penurunan karena masih adanya permasalahan terkait pada lokasi wisata yaitu masih kurannya perhatian dari pemerintah terkait ketersediaan infrastruktur, jalan masih banyak yang rusak, dan belum lengkapnya fasilitas-fasilitas yang mendukung adanya wisata tersebut.

Potensi wisata, peran wisatawan dan jumlah kunjungan yang tinggi melatarbelakangi perlu dilakukan kajian yang bertujuan mengidentifikasi kinerja pelayanan Desa WIsata Budaya Pampang sebagai sebuah obyek wisata budaya berdasarkan persepsi pengunjung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan analisis *Importance Performance Analysis* (IPA). Metode IPA merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur atribut-atribut atau dimensi-dimensi dari tingkat kepentingkan yang didasarkan atas persepsi pengunjung dan persepsi nilai terhadap kinerja pada suatu objek Supranto J (2011) dalam Edi Suswardji (2012).

Data yang diperoleh dari hasil skala likert kemudian akan dianalisis dengan IPA untuk menunjukkan variable-variabel yang dianggap penting oleh pengunjung. Pada metode IPA tingkat kinerja yang dapat memberikan nilai kepuasan pengunjung dinyatakan dengan huruf X, sedangkan huruf Y menunjukan tingkat kepentingan pengunjung. Untuk menilai tingkat kepuasan pengunjung digunakan dengan skor skala likert Sugiono (2008) dalam Edi Suswardji (2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil kuisioner kemudian diananlisis untuk mendapatkan hasil tingkat kesesuaian dari tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan harapan dari pengunjung wisata. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil perhitungan tingkat kesesuaian dari tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Tingkat Kesesuaian Antara Tingkat Kepuasan dan Kepentingan

No Atribut	Nama Atribut	Xi	Yi	Tki %
A1	Sistem kepercayaan	2.98	3.85	77.40
A2	Sistem kesenian	2.98	3.85	77.40
A3	Lembaga keamanan	1.81	4.55	39.78
A4	Pengelola destinasi	1.82	4.55	40
A5	Jaringan jalan	2.94	3.85	76.36
A6	Akomodasi	1.7	3.85	44.16
A7	Keamanan	2.79	4.54	61.45
A8	Rumah makan	2.05	4.54	45.15
A9	Toko cinderamata	3.7	4.5	82.22
A10	Pusat informasi wisata	2.78	4.5	61.78
A11	Rambu wisata	2.94	4.51	65.19
A12	Transportasi	2.94	3.8	77.37
A13	Waktu	2.94	3.8	77.37
A14	Pementasan budaya	3	4.7	63.83
A15	Pameran	3	4.7	63.83
A16	Tari-tarian	3.71	4.72	78.60
A17	Musik	3.71	4.72	78.60
A18	Warisan budaya	3.7	4.72	78.39
A19	Peninggalan sejarah	3.72	4.73	78.65
A20	Kesenian	3.73	4.74	78.69
A21	Adat istiadat	3.73	4.74	78.69
A22	Peninggalan sejarah	3.73	4.67	79.87
A23	Seni pertujukan	3.73	4.67	79.87
A24	Kerajinan	3.73	4.67	79.87
A25	Komunitas	2.84	4.59	79.87
A26	SDM	2.68	4.59	58.39
A27	Faktor eksternal	2.98	3.99	74.69
A28	Keunikan	3.76	4.72	79.66
A29	Ciri khas	3.76	4.72	79.66
A30	Daya tarik wisata	4.52	4.74	95.36
A31	Budaya	4.52	4.77	94.76
A32	Fasilitas rekreasi	1.9	4.75	40
A33	Akomodasi	1.83	4.74	38.61
A34	Cinderamata	4.51	4.87	92.61
A35	Makanan khas daerah	1	4.9	20.41
	Rata-rata	108.16	157.82	232.218%

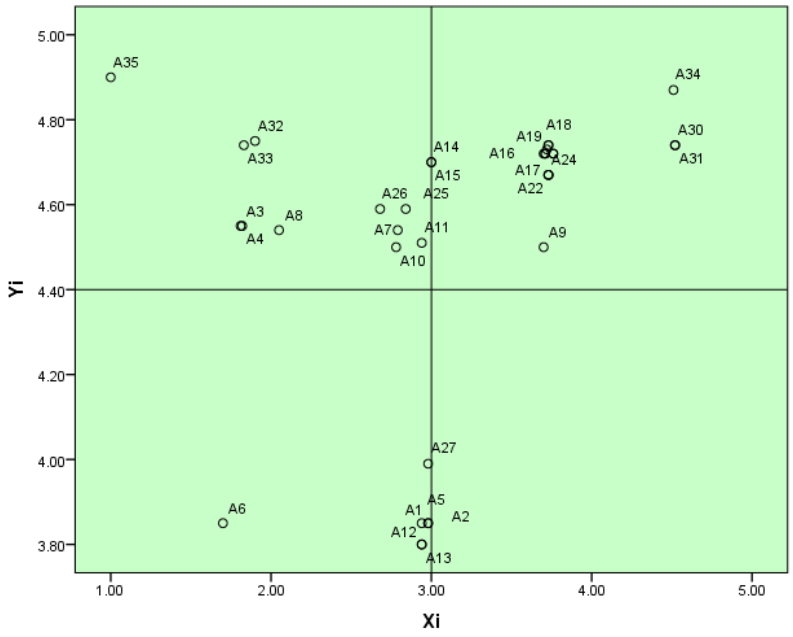
Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat kesesuaian merupakan hasil perbandingan antara menghitung skor dari tingkat kepuasan dan skor tingkat kepentingan, sehingga

tingkat kesesuaian yang digunakan dalam menentukan skala prioritas untuk mencapai skala kepuasan bagi pengunjung wisata. Berdasarkan perhitungan tingkat kesesuaian (Tki) pada tabel 5.1 diperoleh nilai tingkat kesesuaian rata-rata sebesar 232.218% dengan memiliki rentan nilai yang berada pada kisaran antara 20,41% sampai dengan 95,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pada atribut penyediaan makanan khas yang ada pada objek wisata dirasa belum sesuai dengan harapan pengungjung wisata dilihat dari hasil survey lapangan bahwa masih belum adanya penyediaan makanan khas pada desa wisata tersebut, sehingga perlu adanya penyediaan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. Atribut yang memiliki nilai 95,36% adalah daya tarik wisata, pada atribut ini menandakan nilai dari daya tarik wisata sudah sangat sesuai dengan harapan pengunjung, akan tetapi hal ini masih perlu diperhatikan dan dipertahankan lagi kualitas dari daya tarik wisata.

Rata-rata dari tingkat kepuasan sebesar 108.16 dan rata-rata tingkat kepentingan sebesar 157.82. Hasil dari nilai rata-rata kemudian akan digunakan dalam menentukan diagram kartisius (Importance performance analysis) yang dibagi menjadi empat kuadran yang meliputi kuadran I prioritas utama, kuadran II pertahankan prestasi, kuadran III prioritas rendah serta kuadran IV dalam kategori berlebihan.

Gambar 5.1 Diagram Kartisius



A1	: Sistem kepercayan	A19	: Peninggalan sejarah
A2	: Sistem kesenian	A20	: Kesenian
A3	: Lembaga keamanan	A21	: Adat istiadat
A4	: Pengelola destinasi	A22	: Peninggalan sejarah
A5	: Jaringan jalan	A23	: Seni pertunjukan
A6	: Akomodasi	A24	: Kerajinan
A7	: Keamanan	A25	: Komunitas
A8	: Rumah makan	A26	: SDM
A9	: Toko cinderamata	A27	: Faktor eksternal
A10	: Pusat informasi wisata	A28	: Keunikan
A11	: Rambu wisata	A29	: Ciri khas
A12	: Transportasi	A30	: Daya tarik wisata
A13	: Waktu	A31	: Budaya
A14	: Pementasan budaya	A32	: Fasilitas rekreasi
A15	: Pameran	A33	: Akomodasi
A16	: Tari-tarian	A34	: Cinderamata
A17	: Musik	A35	: Makanan khas daerah
A18	: Warisan budaya		

Adapun letak kuadran tersebut menggambarkan keadaan yang berbeda. Pemetaan yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan ini memungkinkan bagi pihak pengelola untuk segera melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas-fasilitas yang kurang terhadap objek wisata. Setiap kuadran akan dijelaskan dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Kuadran I (Prioritas Utama)
   Pada kuadran ini menggambarkan faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan oleh pengunjung akan tetapi sesuatu yang di anggap penting oleh pengunjung wisata belum memberikan kepuasan terhadap apa yang diharapkan pengunjung secara optimal, sehingga dalam hal ini membuat pengunjung wisata merasa kecewa. Atribut inilah yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Atribut yang termasuk dalam kuadran I antara lain makanan khas daerah, fasilitas rekreasi, akomodasi, lembaga keamanan, pengelola destinasi, rumah makan, SDM, kemanan, pusat informasi wisata.
2. Kuadran II (Pertahankan Prestasi)
   Kuadran II merupakan kuadran yang paling diharapkan oleh pengunjung wisata, atribut-atribut tersebut telah sesuai dengan apa yang dirasakan dan dianggap penting serta diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan pengunjung wisata. Atribut yang termasuk dalam kuadran II antara lain pementasan budaya, pameran, komunitas, rambu wisata, tari-tarian, peninggalan sejarah, musik, toko cinderamata, warisan budaya, kerajinan, cinderamata, daya tarik wisata, dan budaya.
3. Kuadran III (Prioritas Rendah)
   Dalam kuadran ini terdapat atribut yang dianggap diharapkan oleh pengunjung wisata. Atribut yang termasuk dalam kuadran III antara lain akomodasi, sistem kepercayaan, transportasi.
4. Kuadran IV (Berlebihan)
   Pada kuadran ini terdapat 3 kuadran yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh pengunjung wisata sehingga lebih baik memperhatikan atribut lainnya yang lebih memiliki prioritas tinggi. Atribut tersebut antara lain faktor eksternal, jaringan jalan, sistem kesenian, waktu.

IV. KESIMPULAN

Pengunjung merupakan saalah satu dari *stakeholder* yang memiliki kontribusi dalam menentukan keberlanjutan dan pengembangan sebuah obyek wisata. Hasil analisis kinerja pelayanan obyek wisata Desa Budaya Pampang menunjukan bahwa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan obyek wisata antara lain makanan khas daerah, fasilitas rekreasi, akomodasi, lembaga keamanan, pengelola destinasi, rumah makan, SDM, kemanan, pusat informasi wisata, dengan faktor penunjang antara lain pementasan budaya, pameran, komunitas, rambu wisata, tari-tarian, peninggalan sejarah, musik, toko cinderamata, warisan budaya, kerajinan, cinderamata, daya tarik wisata, dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Jurnal :

Said Keliwar, Anton Nurcahyo. (2015). Motivasi dan Persepsi Pengunjung Terhadap Obyek Wisata Desa Budaya Pampang Di Samarinda. Jurnal Manajemen Resort dan Leisure, Volume 12, Nomor 2.

Edi Suswardji, S. M. (2012). Analisis Kepuasan Pelanggan Pada Taman Kota Galuh Mas Karawang. Jurnal Manajemen, Volume 09, Nomor 3.

Yudha Prascatino Heston. "Preferensi Wisatawan terhadap Pariwisata Budaya: Studi Kasus Kraton Yogyakarta". Jurnal Penelitian Arsitektur dan Pariwisata, Vol. 1, No.1, 2010

Website:

International Council On Monuments and Sites (ICOMOS). 2012. Dari alamat *http://www.icomos- ictc.org.*

Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan:

Pemerintah Kota Samarinda. 2014. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2008. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kalimantan Timur

ISBN: 978-602-50730-0-7



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

IAP Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia

ASPI Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia

ISBN: 978-602-50730-0-7

